



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.169, 2019

KEUANGAN. APBN. Tahun 2019.
Pertanggungjawaban. (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6388)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang telah dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

Pasal 2

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2018;
 - c. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2018;
 - d. Laporan Operasional Tahun Anggaran 2018;
 - e. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2018;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2018; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.943.674.876.878.796,00 (satu kuadriliun sembilan ratus empat puluh tiga triliun enam ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh

- enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) yang berarti 102,58% (seratus dua koma lima delapan persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.894.720.327.977.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus sembilan puluh empat triliun tujuh ratus dua puluh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- b. realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.213.117.817.284.996,00 (dua kuadriliun dua ratus tiga belas triliun seratus tujuh belas miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang berarti 99,66% (sembilan puluh sembilan koma enam enam persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.220.656.966.577.000,00 (dua kuadriliun dua ratus dua puluh triliun enam ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- c. berdasarkan realisasi Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan realisasi Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp269.442.940.406.200,00 (dua ratus enam puluh sembilan triliun empat ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus enam ribu dua ratus rupiah) yang berarti 82,67% (delapan puluh dua koma enam tujuh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp325.936.638.600.000,00 (tiga ratus dua puluh lima triliun sembilan ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- d. Pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf c

- sebesar Rp305.692.597.869.020,00 (tiga ratus lima triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) yang berarti 93,79% (sembilan puluh tiga koma tujuh sembilan persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp325.936.638.600.000,00 (tiga ratus dua puluh lima triliun sembilan ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- e. berdasarkan Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp36.249.657.462.820,00 (tiga puluh enam triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - f. realisasi Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam serta pendapatan Badan Layanan Umum dari Kerja Sama Operasi yang dilaporkan berdasarkan asas neto.

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp138.353.015.853.598,00 (seratus tiga puluh delapan triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar lima belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- b. tidak terdapat Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan;
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e

- sebesar Rp36.249.657.462.820,00 (tiga puluh enam triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- d. berdasarkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdapat Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian sebesar Rp174.602.673.316.418,00 (seratus tujuh puluh empat triliun enam ratus dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus delapan belas rupiah);
 - e. penyesuaian Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp639.042.368.228,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
 - f. berdasarkan Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Penyesuaian Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp175.241.715.684.646,00 (seratus tujuh puluh lima triliun dua ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 5

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah Aset sebesar Rp6.325.285.785.861.570,00 (enam kuadriliun tiga ratus dua puluh lima triliun dua

ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

- b. jumlah Kewajiban sebesar Rp4.917.477.561.215.829,00 (empat kuadriliun sembilan ratus tujuh belas triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- c. jumlah Ekuitas sebesar Rp1.407.808.224.645.741,00 (satu kuadriliun empat ratus tujuh triliun delapan ratus delapan miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 6

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Operasional Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.169.151.212.988.779,00 (dua kuadriliun seratus enam puluh sembilan triliun seratus lima puluh satu miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- b. Beban Operasional Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.249.590.079.933.188,00 (dua kuadriliun dua ratus empat puluh sembilan triliun lima ratus sembilan puluh miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
- c. berdasarkan Pendapatan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp80.438.866.944.409,00 (delapan puluh triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus

- enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan rupiah);
- d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp145.291.236.291.926,00 (seratus empat puluh lima triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
 - e. tidak terdapat Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa;
 - f. berdasarkan Defisit dari Kegiatan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp225.730.103.236.335,00 (dua ratus dua puluh lima triliun tujuh ratus tiga puluh miliar seratus tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 7

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp85.606.836.614.663,00 (delapan puluh lima triliun enam ratus enam miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- b. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp245.132.313.372.320,00 (dua ratus empat puluh lima triliun seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- c. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp366.988.807.449.803,00 (tiga ratus enam puluh enam triliun sembilan ratus delapan puluh

- delapan miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah);
- d. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp5.378.953.624.562,00 (lima triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.540.783.656.928.940,00 (satu kuadriliun lima ratus empat puluh triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- b. Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sebesar Rp225.730.103.236.335,00 (dua ratus dua puluh lima triliun tujuh ratus tiga puluh miliar seratus tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- c. Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp92.241.498.200.652,00 (sembilan puluh dua triliun dua ratus empat puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- d. Transaksi Antar Entitas sebesar Rp513.172.752.484,00 (lima ratus tiga belas miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
- e. berdasarkan Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2018 sebagaimana

dimaksud pada huruf b, Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan Transaksi Antar Entitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.407.808.224.645.741,00 (satu kuadriliun empat ratus tujuh triliun delapan ratus delapan miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pasal 10

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9, meliputi juga Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

Pasal 11

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 12

Saldo Anggaran Lebih dapat digunakan dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, dan/atau terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu.

Pasal 13

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Pasal 14

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2018
(Audited)

RINGKASAN

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.943,67 triliun atau 102,58 persen dari APBN. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.213,11 triliun atau 99,66 persen dari APBN. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.455,32 triliun atau 100,06 persen dari APBN, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp757,79 triliun atau 98,91 persen dari APBN.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp269,44 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp305,69 triliun atau 93,79 persen dari APBN. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp36,25 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	(Rp Triliun)			Realisasi TA 2017
	Realisasi Anggaran TA 2018 (Audited)		%	
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Negara dan Hibah	1.894,72	1.943,67	102,58	1.666,37
Belanja Negara:	2.220,65	2.213,11	99,66	2.007,35
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.454,49	1.455,32	100,06	1.265,35
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766,16	757,79	98,91	741,99
Surplus (Defisit) Anggaran	(325,93)	(269,44)	82,67	(340,97)
Pembiayaan Neto	325,93	305,69	93,79	366,62
SiLPA (SiKPA)		36,25		25,64

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode I Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal I Januari 2018 adalah sebesar Rp138,35 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp36,25 triliun dan Penyesuaian SAL adalah sebesar Rp639,04 miliar, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2018 adalah sebesar Rp175,24 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	(Rp Triliun)	
		Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
A	SAL awal	138,35	113,19
B	Penggunaan SAL	-	-
C	SiLPA/SiKPA	36,25	25,64
D	Penyesuaian SAL	0,64	(0,48)
E	SAL akhir (A + B + C + D)	175,24	138,35

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Aset per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.325,28 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp437,87 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp2.877,28 triliun, Aset Tetap sebesar Rp1.931,05 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp57,18 triliun, dan Aset Lainnya sebesar Rp1.021,88 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.917,47 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp750,50 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp4.166,97 triliun. Dengan Demikian, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.407,80 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	(Rp Triliun)	
	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Aset		
Aset Lancar	437,87	336,81
Investasi Jangka Panjang	2.877,28	2.604,04
Aset Tetap	1.931,05	2.034,80
Piutang Jangka Panjang	57,18	47,81
Aset Lainnya	1.021,88	924,36
Total Aset	6.325,28	5.947,83
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	750,50	593,44
Kewajiban Jangka Panjang	4.166,97	3.813,60
Total Kewajiban	4.917,47	4.407,05
Ekuitas	1.407,80	1.540,78
Total Kewajiban dan Ekuitas	6.325,28	5.947,83

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Dari Kegiatan Operasional Pemerintah, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp2.169,15 triliun, Beban sebesar Rp2.249,59 triliun, sedangkan defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp145,29 triliun, sehingga Defisit-LO sebesar Rp 225,73 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

		(Rp Triliun)	
No	Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1	Pendapatan-LO	2.169,15	1.806,52
2	Beban	(2.249,59)	(1.991,67)
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(80,43)	(185,15)
4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(145,29)	72,16
5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
6	Surplus/(Defisit) LO	(225,73)	(112,98)

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018.

Saldo Awal Kas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp208,50 triliun. Selama TA 2018 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp85,60 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp245,13 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp366,98 triliun, penurunan kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp5,37 triliun dan kenaikan kas karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp0,77 triliun. Dengan demikian, saldo akhir kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 menjadi Rp240,15 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp285,15 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp92,28 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp2,91 triliun, Kas pada BLU yang telah Didepositokan sebesar minus Rp6,21 triliun, Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp58,60 triliun, dan Kas Transito sebesar Rp465 sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp178,62 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	(Rp triliun)	
	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Saldo Awal Kas	208,50	174,07
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(85,60)	(132,51)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(245,13)	(268,12)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	366,98	426,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(5,37)	9,37
Penggunaan SAL	-	-
Penyesuaian Pembukuan	0,77	(0,58)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas	31,64	34,42
Saldo Akhir Kas	240,15	208,50
Saldo Kas Pemerintah Lainnya:		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,28	0,21
Kas di Bendahara Penerimaan	0,09	0,10
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan	2,91	2,84
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(6,21)	(12,20)
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	-	(0,007)
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	(58,60)	(65,21)
Kas Transito (Kiriman Uang)	-	0,33
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	178,62	134,57

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam bentuk ekuitas yang masuk ke dalam Neraca per 31 Desember 2018.

Ekuitas awal adalah sebesar Rp1.540,78 triliun, dikurangi defisit LO sebesar Rp225,73 triliun, ditambah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp91,24 triliun, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,51 triliun, sehingga Ekuitas Akhir adalah Rp1.407,80 triliun.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

(Rp triliun)

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1	Ekuitas Awal	1.540,78	1.566,93
2	Surplus/Defisit LO	(225,73)	(112,98)
3	Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	91,24	84,97
4	Transaksi Antar Entitas	0,51	0,18
5	Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas	-	1,67
6	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(132,97)	(26,14)
7	Ekuitas Akhir	1.407,80	1.540,78

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

OPINI BPK

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 71b/LHP/XV/05/2019 dan Nomor 71c/LHP/XV/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	i
HALAMAN OPINI.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
I. LAPORAN REALISASI APBN	1
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	7
III. NERACA	9
IV. LAPORAN OPERASIONAL.....	13
V. LAPORAN ARUS KAS	19
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	23
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	25
A. PENJELASAN UMUM	26
A.1. DASAR HUKUM	26
A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO.....	48
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	65
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI	71
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN.....	94
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN.....	94
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN.....	95
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA	128
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	134
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	142
D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM.....	142
D.2. PENJELASAN PER POS NERACA.....	143
D.3. CATATAN PENTING LAINNYA.....	233
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	280
E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL	280
E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL.....	281
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	315
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	315
F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS	219
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	342
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	357
INDEKS SINGKATAN	363

DFTAR TABEL

1	Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran Tahun 2016-2018.....	30
2	Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018.....	31
3	Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2016 – 2018.....	35
4	Perkembangan NPL dan CAR Tahun Januari – Desember 2018.....	40
5	Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018 dan 2017.....	46
6	Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2018 dan 2017.....	47
7	Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018 dan 2017.....	47
8	Postur APBN Tahun 2018 dan APBNP Tahun 2017.....	50
9	Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2018 dan 2017.....	50
10	Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018 dan 2017.....	51
11	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2018 dan 2017.....	58
12	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2018 dan 2017.....	58
13	Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran Terhadap PDB dan Keseimbangan Primer Tahun 2018 dan 2017....	62
14	Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2018 dan 2017.....	64
15	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2018 dan TA 2017.....	105
16	Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2018 dan 2017.....	138
17	Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2018 dan 2017.....	236

DAFTAR GRAFIK

1 Sumber Pertumbuhan Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2018.....	28
2 Sumber Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018.....	29
3 Tren Laju Inflasi Bulanan (mtm), Tahun Kalender (ytd), dan Tahunan (yoy) Januari 2017 - Desember 2018.....	33
4 Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Januari 2017 – Desember 2018.....	34
5 Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Tahun 2016-2018.....	36
6 Perkembangan Cadangan Devisa per Akhir Desember 2016 – 2018.....	36
7 Tren Laju IHS (End of Period) Bulanan Januari 2017 – Desember 2018.....	39
8 Realisasi Rata-rata <i>Lifting</i> Migas Bulanan Januari 2017 – Desember 2018.....	41
9 Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Januari 2017 – Desember 2018.....	42
10 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia Tahun 2012 – 2018.....	43
11 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1999 – September 2018.....	44
12 Hubungan Anggaran Perlindungan Sosial dengan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015 – 2018.....	44
13 Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Indonesia Tahun 2010 – September 2018.....	45
14 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2010 – 2018.....	45
15 Hubungan antara Anggaran Pendidikan dengan IPM Indonesia 2014-2018.....	46
16 Pendapatan Perpajakan Tahun 2018 dan 2017.....	53
17 Tren Defisit APBN Terhadap PDB Tahun 2013 – 2018.....	63
18 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNPB TA 2013 – 2018.....	94
19 Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2013- 2018.....	95
20 Komposisi Realisasi Pendapatan Negara TA 2018.....	96
21 Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2018.....	104
22 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2018.....	106
23 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2018.....	106
24 Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018.....	114
25 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2014 – 2018.....	142
26 Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2015 s.d Tahun 2018.....	280
27 Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan Tahun 2017.....	281
28 Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2018.....	282
29 Komposisi Beban Operasional Tahun 2018.....	293
30 Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018.....	302
31 Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas.....	316

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Uraian	Catatan	TA 2018 (Audited)		% Realisasi terhadap Anggaran	TA 2017 (Audited)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
A. Pendapatan Negara					
I. Penerimaan Perpajakan					
1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	1.618.095.493.162.000	1.518.789.777.151.030	93,86%	1.343.529.843.798.510
2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	1.579.395.493.162.000	1.472.907.964.370.352	93,26%	1.304.316.269.228.039
		38.700.000.000.000	45.881.812.780.678	118,56%	39.213.574.570.471
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	275.427.969.415.000	409.320.239.488.446	148,61%	311.216.253.857.085
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	103.674.868.751.000	180.592.649.823.641	174,19%	111.132.042.413.912
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Disisihkan	B.2.1.2.2	44.695.387.920.000	45.060.521.375.969	100,82%	43.904.217.111.673
3. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya	B.2.1.2.3	83.753.115.091.000	128.574.010.038.218	153,52%	108.834.561.775.552
4. Pendapatan Badan Layanan Umum	B.2.1.2.4	43.304.597.653.000	55.093.058.250.618	127,22%	47.345.432.555.948
III. Penerimaan Hibah	B.2.1.3	1.196.865.400.000	15.564.860.239.320	1.300,47%	11.629.815.002.490
Jumlah Pendapatan Negara (A.I + A.II + A.III+A.IV)		1.894.720.327.977.000	1.943.674.876.878.796	102,58%	1.666.375.912.658.085

(Dalam Rupiah)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Uraian	Catatan	TA 2018 (Audited)			Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Realisasi			
B. Belanja Negara	B.2.2						
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	1.454.494.390.020.000	1.455.324.879.227.617	100,06%	1.265.359.428.745.519		
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	365.691.526.092.000	346.890.764.906.966	94,86%	312.728.756.432.452		
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	340.130.197.863.000	347.468.335.110.569	102,16%	291.459.133.344.592		
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	203.879.406.594.000	184.127.627.500.274	90,31%	208.656.670.235.846		
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	238.607.121.370.000	257.952.028.141.279	108,11%	216.568.022.521.345		
5. Subsidi	B.2.2.1.5	156.228.125.107.000	216.883.304.115.301	138,82%	166.401.103.129.178		
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	1.460.845.703.000	1.520.560.988.285	104,09%	5.445.667.259.156		
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	81.259.761.570.000	84.318.412.919.513	103,76%	55.297.216.841.355		
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	67.237.405.721.000	16.163.845.545.430	24,04%	8.802.858.981.595		
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	B.2.2.2	766.162.576.557.000	757.792.938.057.379	98,91%	741.992.381.461.367		
Transfer ke Daerah	B.2.2.2.1	706.162.576.557.000	697.933.529.448.104	98,83%	682.225.803.933.964		
1. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1.1	676.602.993.371.000	668.643.196.262.104	98,82%	654.482.511.343.964		

(Dalam Rupiah)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Uraian	Catatan	TA 2018 (Audited)			Realisasi	TA 2017 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran		
Dana Transfer Umum	B.2.2.2.1.1.1	490.714.921.663.000	495.193.618.043.420	100,91%	486.814.511.890.637	
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1.1.1	89.225.342.014.000	93.704.038.394.420	105,02%	88.232.197.142.63	
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.1.1.2	401.489.579.649.000	401.489.579.649.000	100,00%	398.582.314.748.000	
Dana Transfer Khusus	B.2.2.2.1.1.2	185.888.071.708.000	173.449.578.218.684	93,31%	167.667.999.453.327	
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.1.1.2.1	62.436.262.908.000	58.149.298.269.245	93,13%	62.104.230.254.35	
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.1.1.2.2	123.451.808.800.000	115.300.279.949.439	93,40%	105.563.769.198.975	
2. Dana Insentif Daerah	B.2.2.2.1.2	8.500.000.000.000	8.230.750.000.000	96,83%	7.500.000.000.000	
3. Dana Keistimewaan DIY	B.2.2.2.1.3	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00%	800.000.000.000	
4. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.1.4	20.059.583.186.000	20.059.583.186.000	100,00%	19.443.292.590.000	
Dana Desa	B.2.2.2.2	60.000.000.000.000	59.859.408.609.275	99,77%	59.766.577.527.403	
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		2.220.656.966.577.000	2.213.117.817.284.996	99,66%	2.007.351.810.206.886	
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	(325.936.638.600.000)	(269.442.940.406.200)	82,67%	(340.975.897.548.801)	

(Dalam Rupiah)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2018 (Audited)			TA 2017 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
8. Dana Perimbangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(15.000.000.000.000)	(15.000.000.000.000)	100,00%	(10.500.000.000.000)
9. Pembiayaan Lain-lain	B.2.4.1.9		5.000.000.000		
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	B.2.4.2	(29.014.341.538.000)	3.176.809.376.629	(10,95%)	(20.266.979.216.895)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	51.345.917.282.000	88.609.746.474.180	172,57%	51.726.855.339.15
a. Pinjaman Tunai	B.2.4.2.1.1	13.400.000.000.000	50.625.053.600.000	377,80%	20.947.967.337.50
b. Pinjaman Kegiatan	B.2.4.2.1.2	37.945.917.282.000	37.984.692.874.180	100,10%	30.778.888.001.65
2. Penerusan Pinjaman	B.2.4.2.2	(10.575.086.820.000)	(9.099.739.735.235)	86,05%	(6.868.916.465.167)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	B.2.4.2.3	(69.785.172.000.000)	(76.333.197.362.316)	109,38%	(65.124.918.090.885)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		325.936.638.600.000	305.692.597.869.020	93,79%	366.623.822.146.843
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SilPA (SIKPA) (D - C)	B.2.5		36.249.657.462.820		25.647.924.598.042

**LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN LEBIH**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	138.353.015.853.598	113.193.835.264.285
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	C.2	-	-
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	C.3	36.249.657.462.820	25.647.924.598.042
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A + B + C)		174.602.673.316.418	138.841.759.862.327
D. Penyesuaian SAL			
1. Penyesuaian Pembukuan	C.4	819.451.289.822	(526.298.971.307)
2. Penyesuaian Lain-lain	C.5	(180.408.921.594)	37.554.962.578
Total Penyesuaian SAL		639.042.368.228	(488.744.008.729)
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A + B + C + D)	C.6	175.241.715.684.646	138.353.015.853.598

NERACA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

Klasifikasi	Subklasifikasi	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
ASET	D.2.1		
Aset Lancar	D.2.1.1		
Kas dan Setara Kas:	D.2.1.1.1		
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia	D.2.1.1.1.1	114.834.181.946.110	91.287.531.283.185
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.1.1.1.2	5.851.939.714.224	3.905.763.616.747
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.1.1.1.3	5.127.777.217.073	2.282.077.569.283
Kas dalam Transit	D.2.1.1.1.4	465	330.588.755.619
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.1.1.1.5	285.150.273.469	210.828.164.140
Kas di Bendahara Penerimaan	D.2.1.1.1.6	92.280.796.378	105.738.412.756
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.1.1.1.7	3.638.728.687.898	7.680.332.290.094
Kas pada BLU	D.2.1.1.1.8	48.795.152.993.771	28.772.719.623.601
Jumlah Kas dan Setara Kas		178.625.211.629.388	134.575.579.715.425
Uang Muka Kerekening Bendahara Umum Negara (BUN)	D.2.1.1.2	106.939.618.970	38.165.547.963
Investasi Jangka Pendek	D.2.1.1.3	6.215.489.058.582	12.204.408.488.386
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	D.2.1.1.4	31.026.237.178.411	17.261.771.032.885
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	D.2.1.1.5	637.147.289.481	576.867.095.851
Piutang:	D.2.1.1.6		
Piutang Perpajakan	D.2.1.1.6.1	81.477.055.227.031	58.621.958.896.480
Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.6.2	176.243.261.284.193	158.620.573.008.549
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.1.6.3	10.541.206.650	9.689.533.832
Bagian Lancar Piutang (termasuk Piutang Perantara dan Piutang Ganti Rugi (TPITGR))	D.2.1.1.6.4	134.743.730.704	134.439.614.178
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	D.2.1.1.6.5	23.609.406.852.881	22.591.650.468.443
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.1.6.6	6.295.339.227.189	1.086.601.779.631
Piutang dari Kegiatan BLU	D.2.1.1.6.7	7.520.013.178.234	6.429.911.707.728
Piutang PFK	D.2.1.1.6.8	230.659.224	4.001.304
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	D.2.1.1.6.9	775.312.000.000	776.236.492.092
Jumlah Piutang (Bruto)		296.064.083.586.362	248.271.065.502.237
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	D.2.1.1.6.10	(187.387.119.210.777)	(160.417.250.319.840)
Jumlah Piutang (Bersih)		108.676.964.375.585	87.853.815.182.397
Persediaan	D.2.1.1.7	112.590.656.928.185	84.301.758.170.225
Jumlah Aset Lancar		437.878.646.078.602	336.812.365.233.132
Investasi Jangka Panjang	D.2.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	D.2.1.2.1		
Dana Bergulir	D.2.1.2.1.1	38.751.152.041.474	34.757.069.042.734
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.1.2.1.2	(1.015.195.857.543)	(823.745.637.784)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		37.735.956.183.931	33.933.323.404.950
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.1.3	46.347.382.486.948	4.132.872.181
Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.1.4	(303.374.618.948)	(4.132.872.181)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)		46.044.007.868.000	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		83.779.964.051.931	33.933.323.404.950
Investasi Jangka Panjang Permanen	D.2.1.2.2		
Investasi Permanen PMN	D.2.1.2.2.1	2.286.384.989.214.962	2.133.750.339.987.427
Investasi Permanen BLU	D.2.1.2.2.2	8.743.190.882	8.325.008.679
Investasi Permanen Lainnya	D.2.1.2.2.3	507.109.135.609.757	436.354.324.393.637
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		2.793.502.868.015.601	2.570.112.989.389.743
Jumlah Investasi Jangka Panjang		2.877.282.832.067.532	2.604.046.312.794.693
Aset Tetap	D.2.1.3		
Tanah	D.2.1.3.1	1.018.648.023.083.736	1.037.757.720.329.050
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	590.286.694.016.479	519.896.090.337.204
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	287.028.466.749.583	275.152.781.045.431
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.2.1.3.4	593.241.196.851.828	681.081.175.258.573
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	55.538.219.173.610	51.165.291.629.744
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	130.585.126.268.737	121.959.328.341.308
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		2.675.327.726.143.973	2.687.012.386.941.310
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.7	(744.276.685.956.335)	(652.208.833.012.249)
Jumlah Aset Tetap		1.931.051.040.187.638	2.034.803.553.929.061
Piutang Jangka Panjang	D.2.1.4		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.4.1	95.661.712.269	104.817.554.622
Piutang Tagihan Runtutan Perencanaan/Runtutan Uang Rugi (TP/TGR)	D.2.1.4.2	103.207.374.337	261.894.714.759
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	D.2.1.4.3	57.777.575.276.481	47.184.454.676.040
Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	D.2.1.4.4	-	775.312.000.000
Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.4.5	2.566.599.689.666	2.580.014.152.770
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		60.603.046.072.955	50.906.493.098.191
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	D.2.1.4.6	(3.414.291.568.549)	(3.096.044.947.048)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		57.188.754.504.406	47.810.448.151.143
Aset Lainnya	D.2.1.5		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D.2.1.5.1	142.696.848.159.921	140.933.161.376.717
Aset Tidak Berwujud	D.2.1.5.2	35.776.524.869.463	31.293.091.131.831
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	D.2.1.5.3	212.155.787.167.225	259.379.354.966.485
Dana Penjaminan	D.2.1.5.4	4.449.043.145.097	3.327.794.435.749
Dana Kelolaan BLU	D.2.1.5.5	57.173.480.419.942	45.821.116.060.256
Aset Lain-lain	D.2.1.5.6	843.100.479.849.556	659.515.052.235.595
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	D.2.1.5.7	10.482.359.272.377	15.591.513.780.723
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		1.305.834.522.883.581	1.155.861.083.987.356
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	D.2.1.5.8	(12.211.622.116.245)	(10.072.629.035.983)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	D.2.1.5.9	(271.738.387.743.944)	(221.423.780.525.753)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		1.021.884.513.023.392	924.364.674.425.620
JUMLAH ASET		6.325.285.785.861.570	5.947.837.354.533.649

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)			
Uraian	Catatan	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
KEWAJIBAN	D.2.2		
Kewajiban Jangka Pendek	D.2.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	D.2.2.1.1	3.991.926.175.494	4.505.640.401.487
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.2.1.2	99.881.440.679.615	44.438.234.758.803
Utang Bunga	D.2.2.1.3	63.568.707.486.877	57.638.432.861.401
Utang Subsidi	D.2.2.1.4	30.130.298.770.683	32.192.914.590.833
Utang Transfer	D.2.2.1.5	42.508.894.037.204	26.096.171.127.047
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.2.1.6	368.352.663.805.325	272.701.715.607.467
<i>Unamortized Discount</i>		(101.251.794.000)	(52.370.697.000)
<i>Unamortized Premium</i>		78.266.476.000	34.999.374.000
Utang SBN Jangka Pendek	D.2.2.1.7	102.900.000.000.000	124.497.290.000.000
<i>Unamortized Discount</i>		(1.664.040.194.000)	(1.654.961.103.000)
<i>Unamortized Premium</i>		-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.2.1.8	24.856.986.958.911	17.452.254.907.564
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.2.1.9	15.685.573.384.005	15.549.048.517.692
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.2.1.10	280.090.169.168	33.564.572.441
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.2.1.11	32.878.446.202	16.494.539.212
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		750.502.434.401.484	593.449.429.457.947
Kewajiban Jangka Panjang	D.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	D.2.2.2.1		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	D.2.2.2.1.1	5.724.587.516.213	4.414.348.818.183
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	D.2.2.2.1.2	3.231.655.441.684.556	2.871.222.232.762.317
<i>Unamortized Discount</i>		(34.929.436.432.000)	(20.297.983.982.000)
<i>Unamortized Premium</i>		35.276.299.121.000	37.427.442.288.000
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.2.2.1.3	43.314.553.530.000	53.890.489.260.000
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.2.2.1.4	5.326.890.009.308	9.657.081.539.263
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.2.2.1.5	154.619.584.439.818	160.704.149.324.311
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.2.2.1.6	11.627.039.378.875	28.415.009.897.486
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		3.452.614.959.247.770	3.145.432.769.907.560
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	D.2.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	D.2.2.2.2.1	714.334.793.186.942	668.147.269.113.375
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	D.2.2.2.2.2	25.374.379.633	24.229.125.827
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		714.360.167.566.575	668.171.498.239.202
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		4.166.975.126.814.345	3.813.604.268.146.762
JUMLAH KEWAJIBAN		4.917.477.561.215.829	4.407.053.697.604.709
EKUITAS	D.2.3	1.407.808.224.645.741	1.540.783.656.928.940
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.325.285.785.861.570	5.947.837.354.533.649

LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

KEGIATAN OPERASIONAL	URAIAN	Catatan	JUMLAH		KURANG (PENURUNAN)		%
			2018 (Audited)	2017 (Audited)			
KEGIATAN OPERASIONAL		E.2.1					
PENDAPATAN OPERASIONAL		E.2.1.1					
PENDAPATAN PERPAJAKAN		E.2.1.1.1					
	Pendapatan Pajak Penghasilan	E.2.1.1.1.1	731.838.117.941.363	662.417.200.380.162	69.420.917.561.201	10,48%	
	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Perjualan Barang Mewah	E.2.1.1.1.2	526.856.640.020.385	479.591.110.489.748	47.265.529.530.637	9,86%	
	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	E.2.1.1.1.3	20.136.546.791.758	17.129.686.745.834	3.006.860.045.924	17,55%	
	Pendapatan Cukai	E.2.1.1.1.4	168.411.747.414.517	153.286.335.416.261	15.125.411.998.256	9,87%	
	Pendapatan Pajak Lainnya	E.2.1.1.1.5	6.796.688.674.946	11.065.264.993.893	(4.268.576.318.947)	(38,58%)	
	Pendapatan Bea Masuk	E.2.1.1.1.6	39.464.702.540.677	35.054.329.773.200	4.410.372.767.477	12,58%	
	Pendapatan Bea Keluar	E.2.1.1.1.7	6.665.716.676.905	4.544.847.292.042	2.120.869.384.863	46,67%	
	Pendapatan Pajak Lain-lain	E.2.1.1.1.8	(27.142.816.314)	33.846.372.448	(60.989.188.762)	(180,19%)	
	Jumlah Pendapatan Perpajakan		1.500.143.017.244.237	1.363.122.621.463.588	137.020.395.780.649	10,05%	

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2018 (Audited)	2017 (Audited)	JUMLAH	%
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	E.2.1.1.2				
Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1.2.1	211.849.605.126.532	135.324.531.870.897	76.525.073.255.635	56,55%
Pendapatan dari Kelayaan Negara Digisahkan (KND)	E.2.1.1.2.2	239.499.611.090.293	137.711.638.621.387	101.787.972.468.906	73,91%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.1.2.3	136.947.279.857.210	100.052.858.157.571	36.894.421.699.640	36,87%
Pendapatan Badan Layanan Umum	E.2.1.1.2.4	56.528.281.085.047	48.206.459.097.560	8.321.821.987.487	17,26%
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		644.824.777.159.082	421.295.487.747.415	223.529.289.411.668	53,06%
PENDAPATAN HIBAH	E.2.1.1.3				
Pendapatan Hibah		24.183.418.585.460	22.102.029.338.827	2.081.389.246.633	9,42%
Jumlah Pendapatan Hibah		24.183.418.585.460	22.102.029.338.827	2.081.389.246.633	9,42%
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		2.169.151.212.988.779	1.806.520.138.549.830	362.631.074.438.950	20,07%

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2018 (Audited)	2017 (Audited)	JUMLAH	%
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	E.2.1.2	351.169.184.831.245	313.570.939.079.330	37.598.245.751.915	11,99%
Beban Persediaan	E.2.1.2.1	29.932.790.690.126	26.506.371.268.281	3.426.419.421.845	12,93%
Beban Barang dan Jasa	E.2.1.2.2	175.351.118.265.689	143.272.384.828.489	32.078.733.437.200	22,39%
Beban Pemeliharaan	E.2.1.2.3	37.434.658.112.329	41.623.251.981.571	(4.188.593.869.242)	(10,06%)
Beban Perjalanan Dinas	E.2.1.2.4	43.791.723.031.484	34.884.409.891.254	8.907.313.140.230	25,53%
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	E.2.1.2.5	40.361.271.228.799	43.450.653.025.621	(3.089.381.796.822)	(7,11%)
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	E.2.1.2.6	244.805.005.384.622	217.040.353.670.203	27.764.651.714.419	12,79%
Beban Subsidi	E.2.1.2.7	196.719.559.440.096	167.834.411.964.126	28.885.147.475.970	17,21%
Beban Hibah	E.2.1.2.8	1.520.560.988.285	5.445.667.259.156	(3.925.106.270.871)	(72,08%)
Beban Bantuan Sosial	E.2.1.2.9	82.465.242.445.242	55.858.510.175.202	26.606.732.270.040	47,63%
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	E.2.1.2.10	769.694.450.184.060	735.149.293.850.265	34.545.156.333.795	4,70%
Beban Lain-lain	E.2.1.2.11	79.829.317.279.532	37.776.589.355.266	42.052.727.924.266	111,32%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.1.2.12	172.046.636.562.132	144.842.686.552.886	27.203.950.009.246	18,78%
Beban Penyisihan Piutang Tak Teragih	E.2.1.2.13	24.468.561.489.547	24.415.200.700.641	53.360.788.907	0,22%
	E.2.1.2.14				

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KURANG (PENURUNAN)		%
		2018 (Audited)	2017 (Audited)	2018 (Audited)	2017 (Audited)	
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		2.249.590.079.933.188	1.991.670.723.602.291	257.919.356.330.898		12,95%
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(80.438.866.944.409)	(185.150.585.052.461)	104.711.718.108.052		(56,55%)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	E.2.2					
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	E.2.2.1					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.1	392.274.523.533	234.320.099.124	157.954.424.409		67,41%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.2	4.972.299.920.406	51.823.998.544.606	(46.901.698.624.200)		(90,50%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(4.530.025.396.873)	(51.589.678.445.482)	47.059.653.048.609		(91,22%)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	E.2.2.2					
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.1	-	5.631.521.326	(5.631.521.326)		(100,00%)
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.2	2.787.500.000	126.428.843.569	(123.641.343.569)		(97,79%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		(2.787.500.000)	(120.797.322.243)	118.009.822.243		(97,69%)
		(1.185.033.)				

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2018 (Audited)	2017 (Audited)	JUMLAH	%
SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3 E.2.2.3.1 E.2.2.3.2	59.843.747.196.323	192.808.566.996.268	(132.964.819.799.945)	(68,96%)
		200.602.170.591.376	68.930.322.334.684	131.671.848.256.692	191,02%
		(140.758.423.395.053)	123.878.244.661.584	(264.636.668.056.637)	(213,63%)
Jumlah Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(145.291.236.291.926)	72.167.768.893.859	(217.459.005.185.785)	(301,32%)
POS LUAR BIASA	E.2.3				
Pendapatan Luar Biasa	E.2.3.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	E.2.3.2	-	-	-	-
SURPLUS DEFISIT DARI POS LUAR BIASA					
SURPLUS DEFISIT LO		(225.730.103.236.335)	(112.982.816.158.602)	(112.747.287.077.733)	99,79%

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.2.1		
I. Arus Kas Masuk	F.2.1.1		
1. Penerimaan Perpajakan	F.2.1.1.1		
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	F.2.1.1.1.1	749.977.029.683.808	646.793.472.957.381
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	F.2.1.1.1.2	537.267.909.259.264	480.724.607.483.756
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.1.1.3	19.444.913.884.758	16.770.346.937.156
d. Pendapatan BPHTB	F.2.1.1.1.4	32.748.454	1.216.911.547
e. Pendapatan Cukai	F.2.1.1.1.5	159.588.552.586.225	153.288.149.392.121
f. Pendapatan Pajak Lainnya	F.2.1.1.1.6	6.629.526.207.843	6.738.475.546.078
g. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.1.1.7	45.881.812.780.678	39.213.574.570.471
Total Penerimaan Perpajakan		1.518.789.777.151.030	1.343.529.843.798.510
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	F.2.1.1.2		
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	F.2.1.1.2.1	180.592.649.823.641	111.132.042.413.912
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	F.2.1.1.2.2	45.060.521.375.969	43.904.217.111.673
c. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	F.2.1.1.2.3	128.282.486.329.481	108.635.073.191.043
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	F.2.1.1.2.4	55.093.058.250.618	47.345.432.555.948
Total PNBP		409.028.715.779.709	311.016.765.272.576
3. Penerimaan Hibah	F.2.1.1.3	15.564.860.239.320	11.629.815.002.490
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		1.943.383.353.170.059	1.666.176.424.073.576
II. Arus Kas Keluar	F.2.1.2		
1. Belanja Pegawai	F.2.1.2.1	346.890.764.906.966	312.728.756.432.452
2. Belanja Barang Dan Jasa	F.2.1.2.2	347.468.335.110.569	291.459.133.344.592
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.1.2.3	257.952.028.141.279	216.568.022.521.345
4. Belanja Subsidi	F.2.1.2.4	216.883.304.115.301	166.401.103.129.178
5. Belanja Hibah	F.2.1.2.5	1.520.560.988.285	5.445.667.259.156
6. Belanja Bantuan Sosial	F.2.1.2.6	84.318.412.919.513	55.297.216.841.355
7. Belanja Lain-Lain	F.2.1.2.7	16.163.845.545.430	8.802.858.981.595
8. Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.1.2.8	45.695.178.904.793	53.668.650.342.060
9. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.1.2.9	45.086.668.324.382	31.641.673.021.137
10. Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.1.2.10	2.922.191.165.245	2.921.873.779.440
11. Dana Alokasi Umum	F.2.1.2.11	401.489.579.649.000	398.582.314.748.000
12. Dana Alokasi Khusus Fisik	F.2.1.2.12	58.149.298.269.245	62.104.230.254.352
13. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	F.2.1.2.13	29.290.333.186.000	27.743.292.590.000
14. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	F.2.1.2.14	115.300.279.949.439	105.563.769.198.975
15. Dana Desa	F.2.1.2.15	59.859.408.609.275	59.766.577.527.403
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		2.028.990.189.784.722	1.798.695.139.971.040
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		(85.606.836.614.663)	(132.518.715.897.464)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2.2		
I. Arus Kas Masuk	F.2.2.1		
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.2.1.1	291.523.708.737	199.488.584.509
2. Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.2.1.2	163.619.880.616	359.085.434.905
3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.1.3	-	-
4. Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	F.2.2.1.4	775.312.000.001	735.156.000.000
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		1.230.455.589.354	1.293.730.019.414
II. Arus Kas Keluar	F.2.2.2		
1. Belanja Modal	F.2.2.2.1	184.127.627.500.274	208.656.670.235.846
2. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.2.2.2	15.000.000.000.000	10.500.000.000.000
3. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.2.3	5.530.000.000.000	5.600.000.000.000
4. Penyertaan Modal Negara	F.2.2.2.4	9.431.096.461.400	11.603.494.561.382
5. Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.2.2.5	32.274.045.000.000	33.055.934.000.000
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		246.362.768.961.674	269.416.098.797.228
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)		(245.132.313.372.320)	(268.122.368.777.814)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.2.3		
I. Arus Kas Masuk	F.2.3.1		
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.1.1	784.742.629.776.147	727.576.037.546.945
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.1.2	88.609.746.474.180	51.726.855.339.157
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	F.2.3.1.3	4.034.087.137.110	4.081.374.007.277
4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.3.1.4	5.000.000.000	-
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		877.412.063.987.503	783.384.266.893.379
II. Arus Kas Keluar	F.2.3.2		
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.2.1	424.990.319.440.149	285.101.423.064.007
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.2.2	76.333.197.362.316	65.124.918.090.885
3. Pengembalian Pinjaman	F.2.3.2.3	9.099.739.735.235	6.868.916.465.167
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		510.423.256.537.700	357.095.257.620.059
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)		366.988.807.449.803	426.289.009.273.320
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.2.4		
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	F.2.4.1	(513.959.408.911)	(763.254.906.069)
2. Transito (Neto)	F.2.4.2	3.498.307.513.555	1.069.556.153.365
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	F.2.4.3	(8.693.890.485.382)	9.363.511.838.634
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	F.2.4.4	330.588.756.176	(298.353.410.242)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(5.378.953.624.562)	9.371.459.675.688

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN		30.870.703.838.258	35.019.384.273.730
Koreksi Pembukuan		775.775.692.984	(589.976.797.589)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN		31.646.479.531.242	34.429.407.476.141
	F.1.2		
SALDO AWAL KAS	F.1.1	208.506.122.640.283	174.076.715.164.142
SALDO AKHIR KAS		240.152.602.171.525	208.506.122.640.283
Kas di Bendahara Pengeluaran		285.150.273.469	210.828.164.140
Kas di Bendahara Penerimaan		92.280.796.378	105.738.412.756
Kas Lainnya Dan Setara Kas Selsin Hibah yg Sudah Disahkan		2.911.840.057.154	2.845.838.264.767
Kas BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)		(6.215.489.058.582)	(12.204.408.488.386)
Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan		-	(7.391.778.396)
Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)		(58.601.172.611.021)	(65.211.736.255.835)
Kas Transito (Kiriman Uang)		465	330.588.756.091
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.1.3	178.625.211.629.388	134.575.579.715.420

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2018 (Audited)	31 DESEMBER 2017 (Audited)
EKUITAS AWAL	G.1	1.540.783.656.928.940	1.566.931.752.006.649
SURPLUS/DEFISIT-LO	G.2	(225.730.103.236.335)	(112.982.816.158.602)
MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	G.3		
Penyesuaian Nilai Aset	G.3.1	273.314.147.911	11.292.013.385
Penggunaan SAL	G.3.2	-	-
Penyesuaian SiLPA	G.3.3	1.501.069.710.656	473.817.522.854
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.4	6.005.920.659.013	5.823.271.175.506
Revaluasi Aset Tetap	G.3.5	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	G.3.6	(6.758.324.262.623)	76.515.960.269.354
Revaluasi Aset BUMN	G.3.7	-	(2.171.167.258.138)
Koreksi Lainnya	G.3.8	91.219.517.945.695	4.317.975.497.496
MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		92.241.498.200.652	84.971.149.220.457
KENAIKAN NILAI EKUITAS	G.4	513.172.752.484	184.315.553.360
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	G.5	-	1.079.250.307.070
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (G.2+G.3+G.4+G.5)	G.6	(132.975.432.283.199)	(26.148.095.077.709)
EKUITAS AKHIR (G.1 +G.6)	G.7	1.407.808.224.645.741	1.540.783.656.928.940

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

A.2. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN

A.2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GLOBAL DAN INDONESIA

Perekonomian Global Tahun 2018 diperkirakan tumbuh 3,7 persen

Krisis keuangan global (*Global Financial Crisis/GFC*) di tahun 2008-2009 memberikan dampak yang cukup mendalam pada perekonomian dunia. Sejak saat itu, secara umum tingkat pertumbuhan berada dalam tren pelemahan, yang diikuti oleh perlambatan perdagangan internasional serta investasi yang menjadi faktor rendahnya produktivitas. Dalam rangka mengatasi dampak GFC, dalam kurun waktu 2008-2016, perekonomian besar seperti Amerika Serikat (AS), Jepang dan Zona Euro mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi longgar seperti stimulus fiskal, penurunan suku bunga acuan, hingga penerapan program pembelian aset oleh bank sentral. Meskipun berbagai langkah kebijakan ekspansif telah ditempuh, namun proses pemulihan relatif berjalan lambat karena dampak GFC yang dalam pada investasi dan perdagangan, serta hadirnya berbagai tantangan lain seperti krisis utang di kawasan Eropa, perubahan struktur ekonomi Tiongkok (*economic rebalancing*), berakhirnya era *boom* komoditas, dan ketegangan geopolitik.

Tahun 2017 merupakan momentum positif pemulihan ekonomi global yang ditandai oleh peningkatan pertumbuhan di lebih dari separuh ekonomi dunia, peningkatan aktivitas

perdagangan, dan kenaikan harga komoditas. Meski demikian, akselerasi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan berlanjut pada tahun 2018 tertahan oleh berbagai tantangan seperti pengetatan likuiditas akibat normalisasi kebijakan moneter AS serta tekanan perang dagang. Hal tersebut membuat IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dalam *World Economic Outlook (WEO)* yang dirilis pada Januari 2019. Berdasarkan *WEO update* bulan Januari 2019, pertumbuhan ekonomi global tahun 2018 diperkirakan sebesar 3,7 persen lebih rendah 0,2 persen dibandingkan dengan proyeksi *WEO update* Juli 2018 dan tetap pada level yang sama pada *WEO update* Oktober 2018. Penurunan proyeksi pertumbuhan global tersebut karena meningkatnya risiko ketidakpastian perekonomian global sebagai konsekuensi perang dagang setelah langkah pemerintah AS mengumumkan tarif impor sebesar 200 miliar dolar AS dari Tiongkok. Risiko perang dagang yang semakin meningkat juga berkontribusi pada penurunan proyeksi pertumbuhan volume perdagangan dunia tahun 2018 dari 4,2 persen pada *WEO Update* Oktober 2018 menjadi 4,0 persen pada *WEO update* bulan Januari 2019. Dengan demikian, pertumbuhan volume perdagangan dunia melambat dibanding tahun 2017 yang mencapai 5,3 persen.

Pertumbuhan ekonomi global tahun ini didukung oleh akselerasi pertumbuhan baik pada kelompok negara maju maupun berkembang, dengan AS yang akan menjadi motor penggerak pertumbuhan negara maju. Pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 2,9 persen (*WEO update* bulan Januari 2018), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,2 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi AS yang cukup signifikan tahun ini antara lain didukung oleh kebijakan penurunan tarif pajak secara signifikan (dari 35 persen menjadi 21 persen). Kinerja ekonomi AS yang baik juga ditunjukkan oleh tingkat pengangguran yang berada pada level terendah dalam 50 tahun terakhir. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi AS, pertumbuhan ekonomi kelompok Zona Euro diperkirakan melambat dari 2,4 persen di tahun 2017 menjadi 1,8 persen di tahun 2018. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan aktivitas perekonomian di Jerman dan Perancis, serta ketegangan politik di Italia sehingga membebani permintaan domestik. Di wilayah Asia, pertumbuhan ekonomi Jepang melambat dari 1,9 persen di tahun 2017 menjadi 0,9 persen di tahun 2018 akibat melemahnya investasi dan konsumsi swasta serta bencana alam di tahun 2018. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat dari 6,9 persen di tahun 2017 menjadi 6,6 persen di tahun 2018 karena pengetatan sektor keuangan dan efek negatif dari perang dagang dengan AS. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi India diperkirakan meningkat dari 6,7 persen pada tahun 2017 menjadi 7,3 persen pada tahun 2018.

Selanjutnya, sejumlah risiko terhadap perekonomian global tetap perlu diwaspadai karena meningkatkannya risiko ketidakpastian global. Beberapa risiko yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi global antara lain: (i) kebijakan proteksionisme dan perpajakan AS; (ii) perang dagang AS dengan Tiongkok; (iii) keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju yang berpotensi menimbulkan dinamika likuiditas pada sektor keuangan global; dan (iv) situasi geopolitik yang makin memanas di berbagai belahan dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Perkembangan perekonomian global ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi nasional.

Pertumbuhan
 Ekonomi Tahun
 2018 sebesar 5,17
 persen (yoy):
 Momentum
 Pertumbuhan
 Ekonomi Domestik
 Berlanjut di Tengah
 Dinamika
 Perekonomian Global

PEREKONOMIAN INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 sebesar 5,17 persen lebih baik dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Hal tersebut mengindikasikan perekonomian domestik masih relatif meningkat stabil di tengah kondisi ketidakpastian global yang bersumber dari isu perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat (AS), serta kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS. Berdasarkan *Asian Development Outlook (ADO) 2018 Supplement* bulan Desember 2018, di antara negara ASEAN-5, Indonesia bersama Thailand mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2017. Sedangkan, Singapura, Malaysia, dan Filipina mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut telah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan serta ketimpangan. Kinerja pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang stabil, serta investasi dan pengeluaran pemerintah yang meningkat. Dari sisi produksi, capaian pertumbuhan positif sektor-sektor utama seperti Industri Pengolahan, Pertanian, dan Perdagangan juga mencerminkan perekonomian domestik yang kokoh.

Sepanjang tahun 2018, perekonomian Indonesia juga mendapat pengakuan yang positif dari dunia internasional. Pengakuan tersebut berasal dari setidaknya lima Lembaga rating dunia yang memberikan rating *investment grade* bagi Indonesia. Indeks Daya Saing Global (*Global Competitiveness Indeks*) Indonesia juga mengalami perbaikan dari posisi 47 pada tahun 2017 menjadi 45 pada tahun 2018 dari 140 negara di dunia.

Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 menurut Pengeluaran berasal dari Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,74 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,17 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari komponen lainnya sebesar 0,26 persen. Sumber pertumbuhan menurut pengeluaran sebagaimana pada grafik 1 berikut.



Grafik 1. Sumber Pertumbuhan Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2018 (persen)
 Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Sementara itu, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 menurut Lapangan Usaha berasal dari Industri Pengolahan sebesar 0,91 persen; diikuti Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,66 persen; Konstruksi sebesar 0,61 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,49 persen. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lapangan usaha lainnya sebesar 2,50 persen. Grafik sumber pertumbuhan menurut lapangan usaha adalah sebagai berikut.



Grafik 2. Sumber Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018 (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Sebagai komponen terbesar pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,05 persen ditopang oleh pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman yang mampu tumbuh 5,13 persen, sejalan dengan tingkat harga yang stabil, terutama harga kebutuhan pokok. Peningkatan konsumsi rumah tangga ini ditandai oleh peningkatan beberapa indikator konsumsi seperti penjualan eceran, mobil penumpang dan motor, serta konsumsi listrik. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kinerja konsumsi juga didukung oleh pencairan anggaran bantuan sosial yang tepat waktu serta konsumsi komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) yang tumbuh tinggi sebesar 9,08 persen. Hal ini didorong dengan telah dimulainya rangkaian pemilihan umum legislatif dan Presiden 2019 serta tingginya aktivitas sosial terutama terkait bencana alam yang menjadi pendorong pertumbuhan komponen LNPR.

Konsumsi Pemerintah juga tumbuh cukup tinggi sebesar 4,80 persen, sejalan dengan realisasi belanja Pemerintah Pusat tahun 2018 yang meningkat dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2017. Peningkatan terbesar terjadi pada belanja lain-lain terkait dengan komponen dana kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam serta kenaikan dana cadangan subsidi. Belanja pegawai juga mengalami kenaikan hingga 10,92 persen terutama didorong oleh adanya perluasan pemberian gaji ke-13. Belanja barang juga tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 19,22 persen antara lain didorong oleh adanya beberapa event internasional yang diselenggarakan pada tahun 2018 misalnya pelaksanaan *Asian Games* di Jakarta dan Palembang, *Asian Para Games* di Jakarta, serta *Annual Meetings World Bank – IMF* di Bali.

Dari sisi investasi, PMTB tumbuh 6,67 persen, lebih tinggi dari tahun 2017. Seluruh komponen investasi tumbuh positif, dimana komponen mesin perlengkapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 19,54 persen, sejalan dengan peningkatan impor barang modal seperti impor mesin dan alat angkut. Kinerja investasi bangunan juga memberikan dorongan bagi pertumbuhan investasi seiring dengan peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur. Hal ini terkonfirmasi oleh adanya kenaikan konsumsi semen dalam negeri serta pertumbuhan sektor konstruksi yang turut meningkat.

Dari sisi perdagangan internasional, defisit neraca perdagangan relatif dapat dikendalikan, dengan pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing sebesar 6,48 persen dan 12,04 persen. Ekspor tumbuh terbatas, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya, dikarenakan masih lemahnya permintaan dari negara mitra dagang seperti Tiongkok dan Jepang. Hal ini karena produk ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas yang mempunyai tingkat elastisitas permintaan yang rendah terhadap harga.

Di sisi lain, komponen impor relatif tumbuh sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik. Peningkatan terjadi pada seluruh komponen impor barang, baik barang konsumsi, barang modal, maupun bahan baku. Impor jasa juga mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan permintaan jasa angkutan untuk kegiatan ekspor dan impor, serta peningkatan minat wisatawan Indonesia yang pergi ke luar negeri.

Tabel 1. Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran Tahun 2016-2018 (persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018
Konsumsi Rumah Tangga	5,01	4,94	5,05
Konsumsi LNRT	6,64	6,93	9,08
Konsumsi Pemerintah	(0,14)	2,13	4,80
PMTB	4,47	6,15	6,67
Ekspor	(1,66)	8,91	6,48
Impor	(2,41)	8,06	12,04
PDB	5,03	5,07	5,17

-perubahan inventori dan discrepani statistik tidak disajikan

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari sisi produksi, secara umum kinerja sektor-sektor utama seperti Industri Pengolahan, Pertanian, dan Perdagangan tumbuh relatif stabil. Sektor Industri Pengolahan masih bergerak di bawah ekpektasi dengan hanya tumbuh 4,27 persen. Kinerja tersebut sedikit melambat dibandingkan kinerja tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan beberapa kelompok industri seperti industri pengilangan migas, kimia, dan farmasi, serta barang logam dan elektronik. Sementara itu beberapa kelompok industri nonmigas seperti tekstil dan pakaian jadi, logam dasar, serta mesin dan perlengkapan mampu tumbuh meningkat didukung tingginya permintaan baik di dalam maupun luar negeri (ekspor).

Kinerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih relatif stabil dengan tumbuh 3,91 persen. Hal ini didukung oleh peningkatan produksi sayuran dan buah-buahan (hortikultura) terutama pada jenis buah musiman yang mengalami puncak panen. Selain itu, kelompok peternakan juga berkontribusi positif sejalan dengan peningkatan permintaan hewan kurban pada masa Hari Raya Idul Adha. Di sisi lain, kelompok perkebunan kembali tumbuh melambat, terutama diakibatkan oleh kinerja ekspor minyak kelapa sawit yang melambat. Perlambatan pertumbuhan juga terjadi pada kelompok perikanan tangkap akibat aktivitas produksi nelayan yang terhambat oleh cuaca yang buruk dan gelombang laut yang tinggi.

Sektor Perdagangan mencatat peningkatan pertumbuhan, yakni sebesar 4,97 persen. Kinerja pertumbuhan sektor ini didukung oleh peningkatan pada perdagangan eceran dan perdagangan kendaraan bermotor, serta sejalan dengan tingginya aktivitas ekspor – impor.

Sektor lainnya yang mencatat kinerja positif adalah Sektor Pertambangan, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kinerja Sektor Pertambangan mampu tumbuh positif ditopang oleh peningkatan aktivitas produksi dan ekspor batubara dan mineral logam (khususnya komoditas mineral tembaga dan emas). Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh 7,02 persen relatif tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,06 persen seiring dengan peningkatan kinerja layanan pemerintah.

Tabel 2. Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018(persen)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,37	3,87	3,91
Pertambangan dan Penggalian	0,95	0,66	2,16
Industri Pengolahan	4,26	4,29	4,27
Pengadaan Listrik dan Gas	5,39	1,54	5,47
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,60	4,60	5,46
Konstruksi	5,22	6,80	6,09
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,03	4,46	4,97
Transportasi dan Pergudangan	7,45	8,49	7,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,17	5,39	5,66
Informasi dan Komunikasi	8,88	9,63	7,04
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,93	5,47	4,17
Real Estate	4,69	3,66	3,58
Jasa Perusahaan	7,36	8,44	8,64
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,20	2,06	7,02
Jasa Pendidikan	3,84	3,70	5,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,16	6,84	7,13
Jasa lainnya	8,01	8,73	8,99
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	19,06	13,33	10,58
PDB	5,03	5,07	5,17

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari sisi kewilayahan, seluruh wilayah mencatat pertumbuhan positif. Aktivitas manufaktur dan perdagangan menjadi pendorong kinerja pertumbuhan di wilayah Jawa dan Sumatera. Pertumbuhan wilayah Maluku Papua masih relatif tinggi sebesar 6,99 persen terkait dengan ekspor mineral logam yang masih tumbuh cukup tinggi. Sementara itu, wilayah Bali Nusa Tenggara berangsur membaik pasca gempa sehingga pada tahun 2018 tumbuh sebesar 2,68 persen. Secara struktur ekonomi, komposisi dan kontribusi masing-masing wilayah tidak banyak mengalami perubahan, dimana wilayah Jawa dan Sumatera masih memberikan kontribusi pertumbuhan PDB terbesar yakni masing-masing sebesar 58,48 persen dan 21,58 persen.

Tingkat Laju Inflasi Desember tahun 2018 tercatat sebesar 3,13 persen (yoy) lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Sepanjang tahun 2018, laju inflasi mencapai 3,13 persen. Nilai tersebut relatif masih berada pada level yang terkendali di bawah target asumsi inflasi APBN tahun 2018 sebesar 3,5 persen dan di bawah tingkat inflasi tahun 2017 sebesar 3,61 persen. Inflasi sepanjang tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh inflasi komponen harga bergejolak (*volatile food*) sedangkan inflasi komponen inti (*core inflation*) dan harga diatur Pemerintah (*administered prices*) relatif terjaga selama tahun 2018.

Secara kumulatif, inflasi komponen harga bergejolak hingga Desember mencapai 3,39 persen. Tekanan pada komponen harga bergolak terutama terjadi pada awal tahun 2018 akibat tingginya harga beras yang disebabkan tingginya permintaan. Namun demikian, seiring dengan perbaikan faktor cuaca pada bulan-bulan berikutnya, masuknya musim panen, serta kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan pasokan bahan pangan, laju inflasi pada komponen harga bergejolak berangsur-angsur berkurang, bahkan mengalami deflasi secara bulanan pada bulan April tahun 2018 sebesar 0,29 persen. Memasuki bulan Mei, komponen harga bergejolak kembali mengalami tekanan terutama akibat peningkatan harga telur dan daging ayam ras. Tekanan inflasi komponen ini terus berlanjut hingga bulan Juni sejalan dengan peningkatan permintaan dan konsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Tekanan inflasi pangan juga sedikit meningkat di bulan Juli akibat kenaikan harga daging dan telur ayam ras, kemudian mereda (*normalisasi harga*) hingga terjadi deflasi pada bulan Agustus – September. Deflasi yang terjadi secara bulanan tersebut juga disebabkan oleh meningkatnya panen komoditas hortikultura, terutama aneka cabai dan bawang.

Sementara itu, laju inflasi komponen harga diatur pemerintah masih dapat dijaga pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai dengan bulan Desember 2018, komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 3,36 persen lebih rendah dibandingkan Desember 2017 tahun sebelumnya yang mengalami inflasi mencapai 8,70 persen. Rendahnya laju inflasi komponen harga diatur pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam menjaga harga energi domestik, terutama harga bahan bakar dan tarif listrik. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Sepanjang tahun 2018, komponen inti relatif stabil pada kisaran 3 persen meskipun di tengah terjadinya pelemahan Rupiah. Hingga Desember tahun 2018, inflasi yang berasal dari komponen inti mencapai 3,07 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 2,95 persen. Tren inflasi bulanan dan tahunan selama Januari tahun 2017 sampai dengan Desember tahun 2018 sebagaimana pada grafik 3 berikut.



Grafik 3. Tren Laju Inflasi Bulanan (mtm), Tahun Kalender (ytd), dan Tahunan (yoy) Januari 2017 - Desember 2018 (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Rata-rata Nilai Tukar Rupiah selama tahun 2018 sebesar Rp14.247 per dolar AS

Selama tahun 2018, rata-rata nilai tukar rupiah adalah Rp14.247 per dolar AS, mengalami depresiasi jika dibandingkan dengan asumsi pada APBN yang sebesar Rp13.400 per dolar AS. Rata-rata nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif dengan kecenderungan mengalami depresiasi yang dipengaruhi terutama oleh faktor eksternal akibat ketidakpastian pasar keuangan global. Perekonomian dunia saat ini bergerak ke arah keseimbangan baru (*a new normal*) yang dipengaruhi oleh dampak arah kebijakan di AS yang disebabkan oleh kecenderungan peningkatan laju inflasi serta penurunan tingkat pengangguran di AS. Dengan membaiknya data-data fundamental perekonomian AS tersebut, Bank Sentral AS (Federal Reserve) melanjutkan normalisasi kebijakan moneter, yaitu rencana meningkatkan tingkat suku bunga acuan atau *Fed Fund Rate* (FFR) sebanyak 3 sampai 4 kali pada tahun 2018 dan telah dimulai pada bulan Maret 2018 yang naik menjadi 1,5-1,7 persen. Membaiknya data-data fundamental perekonomian AS tersebut juga menyebabkan meningkatnya *yield US Treasury Bonds* yang telah melewati 3 persen pada bulan April 2018 atau merupakan *yield* tertinggi sejak tahun 2013, sehingga mempengaruhi persepsi para investor untuk menarik dananya di luar untuk kembali ke pasar AS. Selain itu, kekhawatiran pasar juga terjadi akibat kebijakan perdagangan Presiden Trump terkait penerapan tarif impor atas beberapa barang yang masuk AS yang berdampak pada terjadinya perang dagang dengan Tiongkok.

Nilai tukar rupiah sempat mengalami pelemahan pada level terendahnya di bulan Oktober 2018 mencapai Rp15.253 per dolar AS. Rupiah terkoreksi 6,89 persen secara *point to point* dari Rp13.548 per dolar AS pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp14.481 per dolar AS pada tanggal 31 Desember 2018. Penguatan nilai dolar AS tidak hanya terjadi terhadap nilai tukar rupiah, tetapi juga terjadi secara meluas (*broad based*) terhadap hampir semua nilai

tukar mata uang negara lain di dunia. Pelemahan rupiah yang terjadi di tahun 2018 relatif moderat dibandingkan dengan nilai depresiasi yang terjadi pada hampir seluruh mata uang dunia sebagai dampak meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed dan perang dagang AS dengan Tiongkok. Nilai tukar rupiah masih jauh lebih baik dari negara seperti India, Brasil, dan Afrika Selatan.



Grafik 4. Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Januari 2017 – Desember 2018

Sumber: Bank Indonesia (dolar), Kementerian Keuangan

Neraca Pembayaran Indonesia sampai dengan akhir tahun 2018 menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap terkendali

Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia pada tahun 2018 secara keseluruhan menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap terkendali. Defisit neraca transaksi berjalan mampu dijaga nilainya dalam batas yang aman. Defisit transaksi berjalan sebesar 31,1 miliar dolar AS atau 2,98 persen dari Produk Domestik Bruto. Terjaganya neraca transaksi berjalan tidak terlepas dari upaya pemerintah menjalankan sejumlah bauran kebijakan antara lain (1) melakukan tinjauan terhadap proyek-proyek infrastruktur Pemerintah khususnya proyek strategis nasional; (2) implementasi penggunaan Biodiesel (B-20) untuk mengurangi impor bahan bakar solar; serta (3) melakukan tinjauan kebijakan Pajak Penghasilan terhadap barang konsumsi impor untuk mendorong penggunaan produk domestik. Sementara itu, Neraca Transaksi Modal dan Finansial cukup menggembirakan dengan mencatat surplus secara kumulatif sebesar 26,04 miliar dolar AS meskipun pada saat yang sama menghadapi ketidakpastian global yang tinggi. Hal tersebut karena masih terjaganya persepsi positif investor terhadap iklim investasi di Indonesia sehingga mampu mendorong aliran dana masuk ke Indonesia, di tengah terbatasnya likuiditas di pasar keuangan *emerging market*. Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2018 dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial menghasilkan nilai akumulasi sebesar defisit 7,1 miliar dolar AS.

Tabel 3. Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2016 – 2018 (miliar dolar AS)

Uraian	2016	2017	2018
Transaksi Berjalan	(16,95)	(16,20)	(31,06)
Transaksi Modal	0,41	0,46	0,93
Transaksi Finansial	29,31	28,69	25,11
Selisih Perhitungan Bersih	(0,31)	(0,95)	(1,27)
Neraca Keseluruhan	12,09	11,59	(7,13)
Transaksi Berjalan (% thd PDB)	(1,82)	(1,60)	(2,98)

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Akumulasi nilai ekspor sebesar 180,22 miliar dolar AS dan impor sebesar 188,71 miliar dolar AS sepanjang Januari-Desember 2018

Nilai total ekspor Indonesia secara kumulatif pada periode Januari – Desember 2018 tercatat sebesar 180,22 miliar dolar AS atau meningkat 6,74 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu senilai 168,83 miliar dolar AS. Peningkatan nilai total ekspor ini dipengaruhi oleh kenaikan ekspor migas menjadi 17,40 miliar dolar AS atau meningkat 10,55 persen dari senilai 15,74 miliar dolar AS di periode yang sama tahun sebelumnya dan ekspor nonmigas menjadi sejumlah 162,81 miliar dolar AS atau meningkat 6,36 persen dari senilai 153,08 miliar dolar AS di periode yang sama tahun sebelumnya.

Seljalan dengan peningkatan nilai ekspor Indonesia, volume ekspor Indonesia secara kumulatif pada rentang Januari – Desember tahun 2018 mengalami peningkatan. Total volume ekspor Indonesia selama Januari – Desember 2018 tercatat sebesar 609,73 juta ton atau meningkat sebesar 11,70 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar 545,85 juta ton. Dari sisi ekspor nonmigas, volume ekspor tercatat sebesar 571,86 juta ton atau meningkat sebesar 13,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar 503,34 juta ton. Sedangkan dari sisi migas, volume ekspor mengalami penurunan sebesar 10,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Selanjutnya, nilai impor Indonesia pada Januari – Desember 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 20,21 persen dari 156,99 miliar dolar AS pada periode Januari – Desember tahun 2017 menjadi 188,71 miliar dolar AS. Peningkatan terjadi pada impor migas dan nonmigas masing-masing 22,83 persen dan 19,73 persen.

Lebih lanjut, kenaikan nilai impor secara kumulatif juga selaras dengan peningkatan volume impor Indonesia selama rentang waktu Januari – Desember 2018. Volume impor Indonesia sampai dengan akhir Desember tahun 2018 tercatat sebesar 171,72 juta ton atau lebih tinggi 6,82 persen dibanding periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar 160,75 juta ton. Peningkatan volume impor sebagian besar disumbang oleh sektor nonmigas sebesar 10,98 persen. Sedangkan, sektor migas mengalami penurunan sebesar 2,29 persen.

Defisit neraca perdagangan Indonesia terjadi antara lain karena dipicu oleh peningkatan impor karena adanya peningkatan permintaan domestik terhadap barang modal dan bahan baku, khususnya untuk menopang kinerja pertumbuhan sektor sekunder. Lebih lanjut, kinerja pertumbuhan impor tersebut ditopang oleh kenaikan impor barang modal yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas investasi dan perdagangan di Indonesia.

Peningkatan impor barang modal pada periode ini akan menjadi kunci peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi di masa yang akan datang.

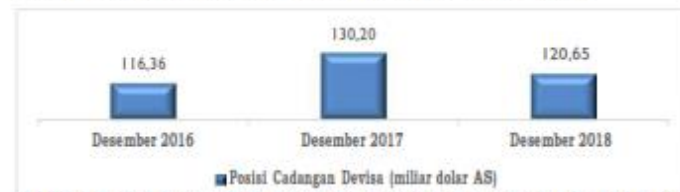
Grafik 5. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Tahun 2016-2018 (miliar dolar AS)



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Cadangan Devisa diatas standar kecukupan internasional menjadi 120,65 miliar dolar AS pada Desember 2018

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2018 sebesar 120,65 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan.



Grafik 6. Perkembangan Cadangan Devisa per Akhir Desember 2016 – 2018 (miliar dolar AS)

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Cadangan devisa pada tahun 2018 antara lain digunakan sebagai alat intervensi pemerintah dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah kondisi fluktuasi pasar keuangan global. Pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai dengan didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang tetap tumbuh, serta kinerja ekspor yang tetap positif.

BI 7-day RR Rate Desember tahun 2018 naik menjadi 6,00 persen

Selama kurun waktu Januari – Desember 2018, Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) dari 4,25 persen menjadi 6,00 persen. Langkah tersebut ditempuh Bank Indonesia untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi dan konsisten dengan upaya pemerintah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman sehingga dapat memperkuat ketahanan eksternal Indonesia.

Perkembangan Peringkat Utang (Sovereign Rating) Indonesia

Konsistensi peningkatan peringkat sovereign rating Indonesia

Pada tahun 2017, Indonesia berhasil mendapatkan kategori layak investasi (*investment Grade*) dari 5 lembaga pemeringkat internasional (Moody's, Fitch, Standard & Poor's, Japan Credit Rating Agency, dan Rating and Investment). Pencapaian ini merupakan pencapaian yang besar karena merupakan gambaran pengakuan perbaikan perekonomian. Selain itu, peringkat *Investment Grade* Indonesia diberikan oleh Standard & Poor's (S&P) terakhir pada tahun 1997, atau sekitar 21 tahun yang lalu.

Tren positif perbaikan peringkat utang Indonesia ini pun berlanjut ke tahun 2018. Beberapa lembaga pemeringkat internasional melanjutkan optimisme mereka terhadap Indonesia melalui peningkatan peringkat utang Indonesia menjadi satu tingkat di atas batas bawah *Investment Grade*. Diawali dengan Fitch pada 20 Desember 2017, lalu Japan Credit Rating Agency (JCR) pada 12 Februari 2018, Rating and Investment (R&I) pada 7 Maret 2018, dan Moody's pada 13 April 2018. Dalam kondisi ketidakpastian arah pemulihan perekonomian global, peningkatan peringkat utang ini memberikan dorongan positif atas perekonomian Indonesia. Sementara itu, pada 31 Mei 2018 S&P telah mengafirmasi posisi rating Indonesia pada BBB- dengan *outlook stable*.

Perbaikan dalam struktur ekonomi maupun sisi penyusunan kebijakan Indonesia menjadi salah satu dasar perbaikan penilaian lembaga pemeringkat terhadap Indonesia. Fitch mengapresiasi ekonomi Indonesia yang menunjukkan stabilitas meskipun dihadapkan dengan tekanan eksternal. R&I menyatakan bahwa perbaikan daya tahan perekonomian Indonesia terlihat dari terus meningkatnya cadangan devisa dan perbaikan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia. Menurut Moody's, pencapaian perkembangan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari komitmen dan koordinasi yang produktif antar institusi domestik dalam menjaga sinergi, kredibilitas, dan efektifitas kebijakan. Lebih jauh, JCR mengapresiasi upaya pemerintah dalam menstimulus investasi dengan meningkatkan kemudahan berusaha serta mendorong pembangunan infrastruktur.

Dari sisi penyusunan kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan terus menjaga kredibilitas dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara faktual, apabila dibandingkan dengan negara berperingkat utang sebanding (*peer countries*), kondisi fiskal Indonesia relatif lebih baik dengan defisit dan tingkat utang terus dijaga pada tingkat moderat. Persentase utang Pemerintah Indonesia terhadap PDB (2017: 28,98 persen) merupakan salah satu yang terendah diantara *peer countries** (2017: India 45,46 persen; Filipina: 42,09 persen; Italia: 131,86 persen). Pemerintah telah berhasil mengelola pengaruh gejolak kondisi global untuk tidak menyebabkan pelebaran defisit yang berlebihan. Pencapaian sisi fiskal Indonesia, khususnya mengenai komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal, telah diapresiasi oleh lembaga pemeringkat internasional. Fitch secara khusus menyebutkan bahwa disiplin pemerintah dalam menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen telah teruji.

Dampak Peningkatan Peringkat Utang terhadap Perekonomian Indonesia

Peningkatan peringkat utang memiliki peran yang cukup besar dalam mempengaruhi keputusan investor. Semakin baik peringkat dari penerbit (*issuer*) suatu instrumen, maka semakin tinggi juga tingkat keyakinan dari investor untuk berinvestasi di instrumen tersebut. Penilaian dari lembaga pemeringkat yang terstandarisasi menjadi indikator yang *comparable*

dari issuer instrumen keuangan, termasuk dari sektor publik (*sovereign issuer*). Hal ini terlebih berlaku kepada investor yang memiliki keterbatasan data, informasi, dan sumber daya yang cukup untuk menganalisa suatu instrumen pasar keuangan (*less-informed investors*). Bagi *less-informed investors*, peringkat penerbit instrumen menjadi indikator dini atas risiko gagal bayar dari instrumen yang diterbitkan. Keberhasilan Indonesia, sebagai *sovereign issuer*, masuk dalam kategori *Investment Grade*, memberikan potensi peningkatan kepercayaan *less-informed investor* untuk berinvestasi pada instrumen investasi Indonesia. Hal ini juga meningkatkan potensi masuknya investor-investor baru kepada pasar keuangan Indonesia.

Perbaikan peringkat utang Indonesia memberikan dampak positif pada peningkatan produktivitas dan kesehatan APBN. Peningkatan ini diharapkan dapat membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap Indonesia, sebagaimana diindikasikan oleh kenaikan peringkat utang, maka imbal hasil (*yield*) yang ditawarkan oleh pemerintah pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), baik untuk pembiayaan APBN maupun *refinancing*, dapat ditekan seefisien mungkin. Dengan beban bunga pemerintah yang semakin ringan, maka ruang fiskal yang semakin lebar dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan produktif (pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta upaya pengentasan kemiskinan). Upaya peningkatan produktivitas APBN juga tercermin dari menurunnya tingkat keseimbangan primer pada empat tahun terakhir (**Keseimbangan primer: 2015: -1,24; 2016: -1,01; 2017: -0,92 persen; 2018: -0,08 persen**).

Tantangan Perekonomian Indonesia

Indonesia saat ini masih memiliki potensi yang besar dalam hal peningkatan peringkat utang. Dalam pandangan beberapa lembaga pemeringkat, penerimaan pajak Indonesia masih belum optimal. Rasio pajak Indonesia yang masih relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara sebanding (*peer countries*) merupakan salah satu faktor yang harus terus diperbaiki. Struktur perekonomian Indonesia yang mempunyai keterkaitan besar kepada komoditas juga memiliki ruang untuk perbaikan mengingat adanya kekhawatiran adanya kerentanan apabila terjadi goncangan pada harga atau permintaan komoditas dunia. Walaupun lembaga pemeringkat telah memberikan apresiasi positif terhadap upaya reformasi perpajakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, konsistensi pelaksanaan reformasi ini juga menjadi faktor yang menjadi perhatian para lembaga pemeringkat.

* India, Filipina, dan Italia merupakan *peer countries* Indonesia menurut Moody's dan Fitch.
 Sumber: Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pusat Statistik (diolah)

Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan Januari-Desember tahun 2018 berhasil dijaga pada level di bawah target APBN menjadi sebesar 5,0 persen

Perubahan asumsi tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak negatif terhadap postur APBN karena dapat menyebabkan peningkatan defisit. Selain itu, tingkat suku bunga SPN ini juga dijadikan suku bunga acuan untuk pembayaran bunga SUN dengan kupon bunga mengambang. Perbedaan antara asumsi dan realisasi tingkat suku bunga SPN 3 bulan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, termasuk faktor yang berada di luar kendali Pemerintah. Tingkat likuiditas domestik dan global ditentukan oleh selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri, terutama oleh suku bunga acuan negara maju seperti AS.

Selama Januari – Desember tahun 2018, realisasi rata-rata tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan lebih rendah dari target APBN 2018. Hingga akhir Desember 2018, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,00 persen, atau lebih baik di bawah target APBN 2018 yang sebesar 5,20 persen.

Lelang SPN 3 bulan sepanjang Januari – Desember tahun 2018 masih mendapatkan minat yang besar dari investor meski diikuti oleh maraknya aksi jual investor asing. Maraknya aksi jual investor asing tersebut terutama disebabkan oleh pernyataan Gubernur baru The Fed, Jerome Powell, yang mengindikasikan kenaikan suku bunga acuan The Fed dengan lebih agresif pada tahun 2018 seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi AS yang didorong solidnya pasar tenaga kerja dan kenaikan inflasi AS yang lebih cepat sehingga memicu peningkatan aksi penarikan dana oleh investor asing di Indonesia. Sejak triwulan II tahun 2018, tingkat suku bunga SPN 3 bulan kembali menunjukkan tren peningkatan yang disebabkan kenaikan imbal hasil surat utang AS (*US Treasury*) terutama tenor 10 tahun yang mencapai angka tertinggi dalam 4 tahun terakhir dan lonjakan harga minyak mentah dunia. Selaras dengan kondisi pasar saham, kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2018. Pada rentang Januari – Desember tahun 2018, *yield* SBN 10 tahun tercatat naik sebesar 168 bps dari 6,32 persen pada akhir tahun 2017 menjadi 8,00 persen pada akhir bulan Desember 2018. Fluktuasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga The Fed yang mendorong kenaikan *yield United State Treasury* (UST) serta tren kenaikan *yield* secara global.

Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun mengalami kenaikan 168 bps

Sampai dengan akhir Desember 2018 IHSG mengalami koreksi 161 poin (2,54 persen) menjadi 6.194,50

Sampai dengan akhir tahun 2018, aksi jual investor asing masih membayangi pasar bursa saham Indonesia. Aksi jual tersebut disebabkan oleh kenaikan imbal hasil surat utang AS (*US Treasury*) dan ketidakpastian perekonomian global. Akibatnya IHSG mengalami koreksi sebesar 161 poin dari posisi akhir Desember 2017 sebesar 6.355,65 dan ditutup di atas level 6000 pada akhir perdagangan Desember 2018 menjadi sebesar 6.194,50. Perkembangan laju IHSG (*end of period*) dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018 sebagaimana pada grafik berikut ini.



Grafik 7. Tren Laju IHSG (*End of Period*) Bulanan Januari 2017 – Desember 2018

Sumber: Bursa Efek Indonesia dan Kementerian Keuangan (diolah)

Fungsi Intermediasi Perbankan yang baik dan risiko kredit yang terkendali

Sampai dengan bulan Desember 2018, stabilitas sistem keuangan masih tetap terjaga disertai intermediasi perbankan yang membaik dan pembiayaan nonbank yang positif. Hal tersebut ditunjukkan oleh rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*(CAR) perbankan yang tinggi mencapai 22,9 persen. Rasio tersebut berada jauh di atas ketentuan minimum sebesar 8,0 persen.

Sementara itu, rasio likuiditas (AL/DPK) tercatat pada level yang masih aman sebesar 19,3 persen pada bulan Desember 2018. Selain itu, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan /NPL*) tetap rendah sebesar 2,4 persen (*gross*). Dari sisi fungsi intermediasi, Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga tumbuh stabil sebesar 6,5 persen . Sedangkan, pertumbuhan kredit pada Desember 2018 sebesar 11,75 persen . Dari pembiayaan nonbank, pembiayaan ekonomi melalui pasar modal, seperti IPO, obligasi korporasi, *Medium Term Notes* (MTN), dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) selama tahun 2018 sebesar Rp207,8 triliun. Peningkatan intermediasi perbankan didukung pula oleh relaksasi kebijakan makroprudensial yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pelonggaran *Loan to Value* (LTV) serta implementasi kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Giro Wajib Minimum (GWM) Rata-rata.

Tabel 4. Perkembangan NPL dan CAR Tahun Januari – Desember 2018

Ket	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ag	Sep	Okt	Nov	Des.
NPL Gross (%)	2,90	2,90	2,75	2,79	2,79	2,70	2,70	2,70	2,70	2,60	2,70	2,40
CAR (%)	23,2	23,1	22,5	22,4	22,1	22,0	22,5	22,8	22,9	22,9	23,3	22,9

Sumber : Bank Indonesia, Kementerian Keuangan-BKf

Rata-rata Lifting minyak dan lifting gas bumi Januari – Desember 2018 masing-masing sebesar 778 ribu barel per hari dan 1.145 ribu barel setara minyak per hari.

Lifting minyak dan gas bumi merupakan volume produksi minyak dan gas bumi dari lapangan migas nasional yang siap untuk dijual. Sejalan dengan asumsi ICP, *lifting* migas menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas.

Rata-rata realisasi *lifting* minyak bumi selama periode Januari – Desember tahun 2018 mencapai 778 ribu barel per hari. Nilai realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 797 rbph. Faktor yang menjadi penyebab turunnya capaian tersebut antara lain kondisi penurunan alamiah sumur-sumur migas yang ada. Selain itu, berbagai kendala teknis di fasilitas tangki penampungan Blok Cepu dan Jabung, serta peningkatan kandungan air di Blok *Offshore North West Java* (ONWJ) juga berdampak pada kurang optimalnya tingkat produksi dan *lifting* minyak di Januari – Desember 2018.

Sementara itu, rata-rata realisasi *lifting* gas bumi Januari – Desember tahun 2018 mencapai 1.145 ribu barel setara minyak per hari. Nilai realisasi tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 1.142 ribu barel setara minyak per hari.



Grafik 8. Realisasi Rata-rata Lifting Migas Bulanan Januari 2017 – Desember 2018 (ribu barel per hari)

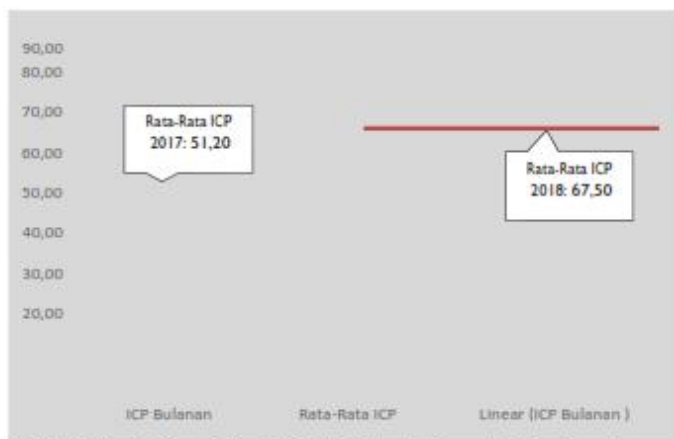
Sumber: SKK Migas (diolah), Kementerian Keuangan c.q. DJA

Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Januari-Desember tahun 2018 tercatat sebesar 67,50 dolar AS per barel lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price (ICP)*) merupakan salah satu variabel asumsi ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun postur APBN. Keterkaitan ICP dengan sisi penerimaan APBN tampak pada komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak, khususnya terkait penerimaan dari minyak bumi, serta penerimaan pajak antara lain melalui Pajak Penghasilan Minyak dan Gas (PPH Migas). Sementara dari sisi belanja negara, ICP berpengaruh pada belanja subsidi energi dan dana bagi hasil (DBH) ke daerah, karena adanya peningkatan harga energi domestik seperti BBM dan tarif listrik.

Rata-rata ICP Januari – Desember tahun 2018 mencapai 67,50 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan rata-rata ICP tahun 2017 yang sebesar 51,20 dolar AS per barel maupun asumsi APBN sebesar 48,00 dolar AS per barel. Tren peningkatan minyak mentah dunia maupun ICP sudah tampak sejak awal tahun dan terus mencatatkan peningkatan mulai di pertengahan tahun 2017 setelah adanya kesepakatan untuk melanjutkan pemangkasan produksi minyak mentah hingga akhir tahun 2018 oleh OPEC dan 11 negara Non-OPEC termasuk Rusia.

Sepanjang tahun 2018 harga minyak dunia menunjukkan peningkatan yang signifikan bahkan secara harian sempat menyentuh level 80,00 dolar AS per barel. Hal ini dipengaruhi oleh adanya gangguan produksi di beberapa negara OPEC seperti Venezuela, Libya, Nigeria, dan Angola serta memanasnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat dengan Timur Tengah, Iran dan Suriah. Peningkatan harga sedikit mereda di kuartal III 2018 dengan adanya peningkatan produksi di negara-negara Non-OPEC dan meredanya gangguan produksi di Libya dan Nigeria. Harga kembali meningkat di bulan September karena adanya ketidakpastian kesanggupan Arab Saudi dan Rusia mengisi kekurangan suplai dengan kembali berlakunya sanksi terhadap Iran.



Grafik 9. Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Januari 2017 – Desember 2018 (dolar AS per barel)

Sumber: Kementerian Keuangan cq DJA, Kementerian ESDM (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil diturunkan menjadi sebesar 5,34 persen (Agustus 2018)

Dalam APBN 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diharapkan turun pada kisaran 5,0-5,3 persen. Dalam jangka pendek, penurunan TPT diantaranya didorong oleh kinerja pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Dalam jangka menengah dan panjang, sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja yang merupakan salah satu kunci keberhasilan kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2018 sebesar 5,34 persen lebih rendah dari pada Agustus 2017 sebesar 5,50 persen. TPT Indonesia menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tren penurunan tersebut sebagaimana pada grafik 10.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 131,01 juta orang, naik 2,95 juta orang dibanding Agustus 2017. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat. TPAK pada Agustus 2018 tercatat sebesar 67,26 persen, meningkat 0,59 persen dibanding setahun yang lalu. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.



Grafik 10. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia Tahun 2012 – 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Persentase Penduduk Miskin turun menjadi 9,66 persen dan Rasio Gini sebesar 0,384 (September 2018)

Pada RKP tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan tema, “**Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**”. Sasaran angka kemiskinan yang ingin dicapai pada tahun 2018 berada pada kisaran 9,5-10,0 persen. Penurunan tingkat kemiskinan juga diarahkan melalui berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan di antaranya sebagai berikut. *Pertama*, pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial secara tepat sasaran antara lain melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui satu kartu. Hal ini diharapkan juga memperluas inklusi keuangan dan kepesertaan jaminan sosial. *Kedua*, pemenuhan kebutuhan dasar melalui: (i) perluasan penyediaan sarana dan prasarana dasar; (ii) peningkatan inklusivitas pelayanan dasar; dan (iii) peningkatan pemanfaatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) untuk mensasar kebutuhan dasar 40 persen penduduk berpendapatan terendah, seperti dokumen kependudukan dan perumahan. *Ketiga*, perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi antara lain melalui: (i) peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil; (ii) peningkatan akses terhadap permodalan usaha; dan (iii) peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2018 mencapai 25,67 juta orang (9,66 persen). Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 908,4 ribu orang dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2017–September 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 141,27 ribu orang dengan persentase penurunan dari 7,26 persen menjadi 6,89 persen. Sedangkan, penurunan jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan sebesar 767 ribu orang, dengan persentase penurunan dari 13,47 persen menjadi 13,10 persen.

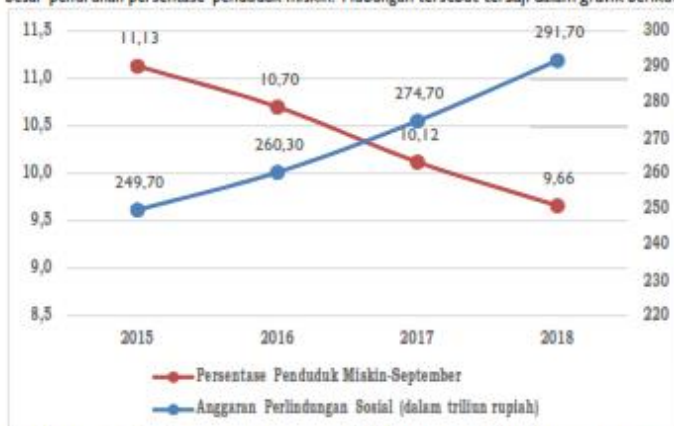
Tren perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia adalah sebagaimana pada grafik berikut ini.



Grafik 11. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1999 - 2018

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Penurunan Persentase Penduduk Miskin sejalan dengan peningkatan anggaran untuk perlindungan sosial. Semakin besar penambahan untuk anggaran perlindungan sosial semakin besar penurunan persentase penduduk miskin. Hubungan tersebut tersaji dalam grafik berikut.

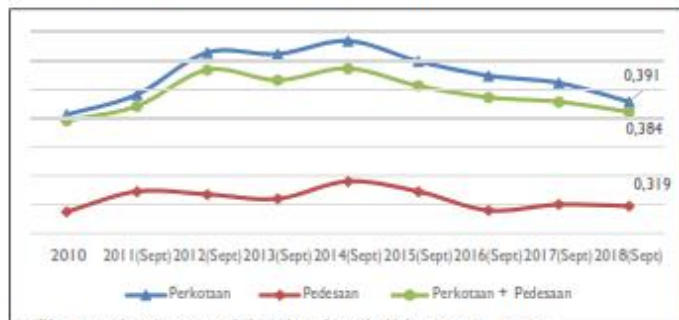


Grafik 12. Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial dengan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015 - 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara nasional, nilai Rasio Gini Indonesia selama periode 2010 – September 2014 terus mengalami fluktuasi dan mulai September 2015 hingga September 2018 nilainya mulai menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode September 2015 – September 2018 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia.

Pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Rasio Gini adalah sebesar 0,384 (ketimpangan rendah). Angka ini menurun sebesar 0,007 poin jika dibandingkan dengan Rasio Gini September 2017 yang sebesar 0,391.

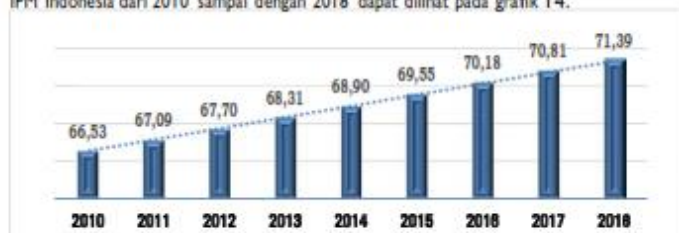


Grafik 13. Perkembangan Rasio Gini Indonesia Tahun 2010 - 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik

IPM Indonesia saat ini berstatus "tinggi", meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,39 pada tahun 2018

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (*Human Development Index (HDI)*) merupakan indikator yang digunakan sebagai parameter untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2018. IPM Indonesia meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,39 pada tahun 2018. Selama periode 2010 hingga 2018, IPM Indonesia menunjukkan kemajuan yang besar. Status pembangunan Indonesia mengalami peningkatan dari "sedang" menjadi "tinggi". Selama periode 2010 hingga 2015, IPM Indonesia berstatus "sedang". Sementara itu, sejak 2016 IPM Indonesia berubah status menjadi "tinggi". Perkembangan IPM Indonesia dari 2010 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik 14.



Grafik 14. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2010 - 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Tren Peningkatan IPM Indonesia tahun 2010 - 2018 disebabkan oleh terus meningkatnya komponen pembentuk IPM yaitu komponen kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meningkatnya IPM sejalan dengan meningkatnya anggaran Pendidikan dan kesehatan. Komponen pendidikan yang diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan anggaran pendidikan. Selama tahun 2014 hingga 2018, Anggaran pendidikan meningkat dari Rp353,4 triliun

menjadi Rp434,6 triliun. Sementara itu, komponen kesehatan yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup saat lahir juga meningkat sejalan dengan anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan pada tahun 2014 sebesar Rp61 triliun meningkat menjadi Rp111 triliun pada tahun 2018. Perkembangan antara anggaran pendidikan dengan IPM Indonesia tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada grafik 15.



Grafik 15. Perkembangan Anggaran Pendidikan dengan IPM Indonesia 2014-2018

Sumber : Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran ringkas mengenai realisasi asumsi dasar ekonomi makro serta realisasi indikator kesejahteraan masyarakat, di bawah ini disajikan tabel ikhtisar realisasi asumsi dasar ekonomi makro serta ikhtisar realisasi indikator kesejahteraan masyarakat. Ikhtisar tersebut menyajikan realisasi pada tahun 2018, serta realisasi tahun 2017 sebagai pembandingan.

Tabel 5. Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018 dan 2017

Indikator	2018		2017
	APBN	Realisasi Audited	Realisasi Audited
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,17	5,07
PDB Nominal (Rp triliun)	14.850,50	14.837,40	13.587,20
Inflasi (%)	3,50	3,13	3,61
Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)	5,200	5,00	5,00
Nilai tukar (Rp/US\$)	13.400	14.247	13.384
Harga Minyak Mentah Indonesia(US\$/barel)	48,00	67,50	51,20
Lifting Minyak (ribu barel per hari)	800	778	804
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.200	1.145	1.142

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, SKK Migas

Tabel 6. Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2018 dan 2017

Indikator	Realisasi Tahun 2018 <i>Audited</i>	Realisasi Tahun 2017 <i>Audited</i>
Ekspor (miliar dolar AS)	180,22	168,83
Impor (miliar dolar AS)	188,71	156,99
Cadangan Devisa (miliar dolar AS)	120,70	130,20
Neraca Pembayaran Indonesia (miliar dolar AS) surplus/defisit)	(7,13)	11,59
BI 7-day RR Rate (BI Rate) (%)	6,00	4,25
Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN)- 10 Tahun (%)	8,00	6,32
IHSG (<i>end of period</i>)	6.194,50	6.355,65

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan

Tabel 7. Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018 dan 2017

Indikator	Realisasi Tahun 2018 <i>Audited</i>	Realisasi Tahun 2017 <i>Audited</i>
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) -Agustus	5,34	5,50
Persentase Penduduk Miskin (%) -September	9,66	10,12
Rasio Gini- September	0,384	0,391
Indeks Pembangunan Manusia	71,39	70,81

Sumber : Badan Pusat Statistik

A.2.2. POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2018

Tema RKP tahun 2018 adalah "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan"

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 disusun dalam rangka menguraikan sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan periode ke-4 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019. RKP tersebut digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kerangka kerja penyelenggaraan pemerintahan secara tahunan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah telah menetapkan tema RKP tahun 2018 yaitu "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan". Sejalan dengan tema tersebut, RKP tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi yang sehat serta percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian nasional sehingga dapat tetap bertumbuh di tengah-tengah perlambatan ekonomi dunia serta pemerataan ekonomi yang akan memperkuat fundamental perekonomian nasional sekaligus mengurangi ketimpangan antarindividu maupun antarwilayah.

Untuk dapat mewujudkan sasarannya, RKP tahun 2018 disusun melalui pendekatan prinsip *money follows program* dengan penerjemahan ke dalam 4 (empat) hal yaitu (1) penguatan perencanaan dan penganggaran, (2) pengendalian perencanaan melalui penyusunan proyek pembangunan prioritas untuk memastikan perencanaan dapat dijalankan dengan baik, (3) penguatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan, serta (4) penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Belanja K/L dan Pemerintah Daerah, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tema Kebijakan Fiskal Tahun 2018 adalah "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan"

Untuk menyelaraskan dengan RKP tahun 2018, pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2018 yaitu "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan". Tema kebijakan fiskal tahun 2018 tersebut diarahkan untuk dapat menangani beberapa tantangan pembangunan antara lain (1) mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, (2) menekan angka pengangguran dan meningkatkan produktivitas, (3) meningkatkan kapasitas fiskal, serta (4) menjaga stabilitas makro ekonomi. Pemerintah secara konsisten menjaga pengelolaan kebijakan fiskal diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, yang ditempuh melalui beberapa strategi utama antara lain memperkuat kualitas belanja, memperlebar ruang fiskal, serta menjaga daya tahan dan pengendalian risiko fiskal. Strategi memperkuat kualitas belanja diwujudkan melalui pemberian penekanan (*big push policy*) terhadap dukungan pembangunan infrastruktur, efektifitas perlindungan sosial, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Strategi dalam memperlebar ruang fiskal diwujudkan melalui optimalisasi pendapatan dan peningkatan efisiensi belanja. Sedangkan, strategi menjaga daya tahan dan pengendalian risiko fiskal diwujudkan melalui pengendalian defisit anggaran dan rasio utang yang mendorong keseimbangan primer secara positif, serta memperkuat bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian.

Implementasi kebijakan fiskal tahun 2018 diwujudkan melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

Dalam rangka pengejawantahan kebijakan fiskal tahun 2018, pemerintah telah menetapkan APBN tahun 2018 melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal diarahkan menjadi lebih produktif, efisien, dan berdaya tahan. Untuk menjalankan kebijakan fiskal tersebut, pemerintah menerapkan beberapa strategi yaitu (1) melakukan optimalisasi pendapatan negara dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, (2) melakukan penguatan kualitas belanja melalui peningkatan kualitas belanja modal, efisiensi belanja barang, serta sinergi program perlindungan sosial, serta (3) menjaga kesinambungan dan efisiensi pembiayaan, yang diwujudkan antara lain melalui pengendalian defisit anggaran dan rasio utang dalam batas yang aman. Pada tahun 2018, besaran pendapatan negara mencapai Rp1.894,72 triliun, yang berarti naik 9,14 persen dari APBNP tahun 2017. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.618,09 triliun atau naik 9,87 persen dari APBNP tahun 2017. Sementara itu, PNBPN ditetapkan sebesar Rp275,42 triliun, atau naik 5,84 persen dari APBNP tahun 2017. Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam APBN tahun 2018 dengan jumlah penerimaan yang mencapai 85,39 persen dari total pendapatan negara. Sedangkan, untuk penerimaan hibah direncanakan sebesar Rp1,19 triliun rupiah.

Di sisi lain, dengan mengacu pada pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2018, besaran anggaran belanja negara untuk tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp2.220,65 triliun, naik 4,10 persen dari APBNP tahun 2017. Belanja negara di tahun 2018 tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,49 triliun, dan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,16 triliun.

Dengan besaran pendapatan dan belanja negara tersebut, APBN tahun 2018 mengalami defisit anggaran sebesar Rp325,93 triliun atau 2,19 persen terhadap PDB, yang berarti turun dari defisit APBNP tahun 2017 sebesar 2,92 persen. Defisit APBN tahun 2018 tersebut ditetapkan akan dibiayai dari kombinasi pembiayaan utang dan pembiayaan non utang.

Tabel 8. Postur APBN Tahun 2018 dan APBNP Tahun 2017 (triliun rupiah)

URAIAN	APBN 2018	APBNP 2017	% Kenaikan/ (Penurunan)
A. Pendapatan Negara	1.894,72	1.736,06	9,14
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.893,51	1.732,95	9,27
I. Penerimaan Perpajakan	1.618,09	1.472,71	9,87
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	275,42	260,24	5,84
II. Penerimaan Hibah	1,19	3,12	(61,49)
B. Belanja Negara	2.220,65	2.133,30	4,10
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.454,49	1.366,96	6,40
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766,16	766,34	(0,02)
C. Keseimbangan Primer	(87,33)	(178,04)	(50,95)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(325,93)	(397,24)	(17,95)
% Surplus/Defisit Terhadap PDB	(2,19)	(2,92)	(0,73) **
E. Pembiayaan Anggaran	325,93	397,24	(17,95)
I. Pembiayaan Utang	399,22	461,34	(13,47)
II. Pembiayaan Investasi	(65,65)	(59,73)	9,91
III. Pemberian Pinjaman	(6,69)	(3,67)	82,35
IV. Kewajiban Penjaminan	(1,12)	(1,00)	11,53
V. Pembiayaan Lainnya	0,18	0,30	(39,00)

*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan

**) Perhitungan berdasarkan selisih rasio

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam struktur APBN yang berlaku saat ini, belanja pemerintah pusat menurut klasifikasi fungsi dikelompokkan menjadi 11 fungsi. Dalam APBN tahun 2018, fungsi yang memiliki porsi terbesar adalah fungsi pelayanan umum dan fungsi ekonomi, yang masing-masing sebesar 30,00 persen dan 23,10 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, dan sisanya sebesar 46,90 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya.

Tabel 9. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 (triliun rupiah)

No.	Fungsi	APBN 2018	APBNP 2017
1	Pelayanan Umum	435,87	362,64
2	Pertahanan	107,82	115,03
3	Keterlibatan dan Keamanan	135,99	145,46
4	Ekonomi	335,48	327,07
5	Perlindungan Lingkungan Hidup	15,68	12,56
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	31,50	30,07
7	Kesehatan	65,06	58,72
8	Pariwisata	7,45	6,45
9	Agama	9,47	9,78
10	Pendidikan	147,57	143,99
11	Perlindungan Sosial	162,55	155,12
	Total	1.454,49	1.366,95

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi
Pendapatan
Negara Tahun
2018 sebesar
Rp1.943,67
triliun atau
mencapai 102,58
persen dari
target tahun
2018

PENDAPATAN NEGARA

Realisasi pendapatan negara pada tahun 2018 sebesar Rp1.943,67 triliun, atau 102,58 persen dari target dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp1.894,72 triliun. Realisasi tersebut berada di atas realisasi periode yang sama tahun 2017 yaitu Rp1.666,37 triliun atau sebesar 95,99 persen dari target APBN tahun 2017. Realisasi pendapatan negara dan hibah berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak (PNBP), serta penerimaan hibah. Pada tahun 2018, penerimaan perpajakan memiliki kontribusi sebesar 78,14 persen dari total realisasi pendapatan negara dan hibah. Untuk PNBP, kontribusi terhadap pendapatan negara dan hibah tahun 2018 adalah sebesar 21,06 persen. Sedangkan, kontribusi yang berasal dari hibah adalah sebesar 0,80 persen.

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018 dan 2017 (triliun rupiah)

Uraian	Realisasi 2018 Audited	Realisasi 2017 Audited	kenaikan/ (Penurunan) (%)
I. Penerimaan Perpajakan	1.518,78	1.343,52	13,04
1. Pajak Dalam Negeri	1.472,90	1.304,31	12,93
2. Pajak Perdagangan Internasional	45,88	39,21	17,00
II. PNBP	409,32	311,21	31,52
1. Penerimaan SDA	180,59	111,13	62,50
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	45,06	43,90	2,63
3. PNBP lainnya	128,57	108,83	18,14
4. Pendapatan BLU	55,09	47,34	16,36
III. Penerimaan Hibah	15,56	11,62	33,84
Jumlah Pendapatan Negara	1.943,67	1.666,37	16,64

Realisasi
Penerimaan
Perpajakan Tahun
2018 mencapai
Rp1.518,78
triliun

Pemerintah terus mendorong peningkatan kinerja penerimaan perpajakan secara konsisten setiap tahunnya demi mewujudkan stabilitas Keuangan Negara. Hasil positif yang diraih pemerintah tidak lepas dari pelaksanaan reformasi kebijakan dan transformasi organisasi perpajakan dalam rangka membangun *awareness* masyarakat terhadap pelaksanaan perpajakan secara berkesinambungan yang diwujudkan antara lain melalui penyempurnaan sistem informasi dan teknologi informasi perpajakan. Pemerintah juga serius untuk melakukan terobosan dalam kebijakan perpajakan, antara lain melalui pemberian insentif perpajakan secara selektif dalam rangka mendorong daya saing industri nasional serta tetap mendorong hilirisasi industri. Selain itu, untuk mendorong peningkatan penerimaan perpajakan yang lebih baik, pada tahun 2018 juga dilakukan sinergi perpajakan serta kepabeanan dan cukai yang diwujudkan antara lain melalui penggabungan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi *single identity* berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pengembangan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) melalui PLB generasi kedua (PLB G2). Sinergi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kemudahan prosedural dan efisiensi pelayanan kepabeanan untuk mengakomodasi perkembangan industri dan perdagangan internasional, serta meningkatkan kepatuhan dan meminimalisir penyalahgunaan fasilitas yang diberikan.

Pada tahun 2018, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2018 mencapai Rp1.518,78 triliun atau sebesar 93,86 persen dari target APBN tahun 2018 sebesar Rp1.618,09 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp1.343,52 triliun. Kinerja positif perpajakan tahun 2018 tersebut mampu mendorong pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 13,04 persen

dari tahun 2017. Pertumbuhan penerimaan perpajakan yang berhasil dicapai Pemerintah sebesar 13,04 persen tersebut merupakan angka pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2012. Pertumbuhan penerimaan perpajakan tersebut didorong antara lain melalui keberhasilan dalam menjaga pertumbuhan perekonomian nasional secara positif sehingga mendorong peningkatan konsumsi domestik yang baik dan peningkatan aktivitas perdagangan internasional. Selain itu, keberhasilan dalam pertumbuhan penerimaan perpajakan juga merupakan dampak dari peningkatan kemampuan dalam memungut pajak sebagai hasil dari peningkatan basis pajak setelah pemerintah menerapkan kebijakan *tax amnesty*. Kemudian, pertumbuhan penerimaan perpajakan juga turut dikontribusikan dari peningkatan kepatuhan wajib pajak dan intensifikasi pajak yang berjalan secara efektif, yang didorong dengan telah dimulainya reformasi administrasi perpajakan seperti kemudahan melaporkan kewajiban perpajakan melalui *e-filing*.

Dari sisi kepabeanan dan cukai, penyempurnaan kebijakan seperti penertiban impor, cukai dan ekspor berisiko tinggi serta kebijakan tarif secara efektif telah mendorong perbaikan aktivitas perdagangan internasional sehingga mampu meningkatkan kinerja penerimaan perpajakan secara positif di tahun 2018. Selain itu, keberhasilan dalam melakukan penertiban cukai berisiko tinggi serta reformasi di bidang kepabeanan dan cukai yang terus digulirkan juga turut mendukung pertumbuhan penerimaan perpajakan tahun 2018.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) memberikan kontribusi terbesar terhadap keseluruhan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2018. Realisasi penerimaan PPh adalah sebesar Rp749,97 triliun atau 87,70 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut berhasil menyumbang sebesar 49,38 persen dari total penerimaan perpajakan tahun 2018. Pertumbuhan realisasi penerimaan PPh tersebut di tahun 2018 adalah sebesar 15,95 persen. Faktor-faktor yang mendorong capaian tersebut antara lain adanya peningkatan harga ICP, perbaikan basis pajak, dan peningkatan jumlah wajib pajak yang merupakan dampak program pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahun 2016-2017, serta membaiknya aktivitas perdagangan internasional. Selanjutnya, realisasi penerimaan PPN (termasuk PPnBM) tahun 2018 adalah sebesar Rp537,26 triliun atau 99,16 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi penerimaan PPN tersebut berhasil menyumbang 35,37 persen dari total penerimaan perpajakan tahun 2018. Realisasi penerimaan PPN pada tahun 2018 berhasil tumbuh sebesar 11,76 persen. Pertumbuhan yang positif tersebut mengindikasikan terjaganya daya beli dan konsumsi masyarakat serta perekonomian nasional yang tetap positif ditengah ketidakpastian kondisi ekonomi global.

Selanjutnya, penerimaan dari kepabeanan dan cukai pada tahun 2018 adalah sebesar Rp205,47 triliun atau mencapai 105,86 persen dari target APBN tahun 2018 serta tumbuh sebesar 6,74 persen dari realisasi tahun 2017. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut merupakan akumulasi dari realisasi penerimaan cukai serta realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional yang berasal dari bea masuk dan bea keluar. Realisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai tahun 2018 tersebut berhasil menyumbang 13,53 persen dari total penerimaan perpajakan tahun 2018. Pertumbuhan penerimaan dari kepabeanan dan cukai tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir yang hanya tumbuh sebesar 5,90 persen. Penerimaan dari kepabeanan dan cukai ditopang oleh pendapatan bea masuk dan bea keluar, serta pendapatan cukai yang seluruhnya dapat direalisasikan di atas target APBN tahun 2018. Penerapan kebijakan impor

pemerintah mampu mengendalikan pasokan kebutuhan dalam negeri dan mengendalikan harga komoditas tertentu yang mendorong pertumbuhan devisa impor sejak awal tahun. Selain itu, pemerintah juga mampu menerapkan kebijakan program penertiban impor beresiko tinggi (PIBT), sehingga dapat meminimalisir masuknya barang-barang ilegal untuk menjaga optimalisasi penerimaan negara dan mendorong perbaikan perekonomian dalam negeri. Penerapan kebijakan-kebijakan tersebut mampu mendorong pendapatan bea masuk di atas target APBN tahun 2018. Kemudian, pendapatan bea keluar juga mampu direalisasikan jauh di atas target. Hal tersebut didorong oleh perbaikan dan stabilitas harga komoditas internasional, serta peningkatan permintaan komoditas dari beberapa negara yang menjadi mitra dagang Indonesia, khususnya permintaan atas komoditas mineral tambang. Selanjutnya, pendapatan cukai memberikan kontribusi terbesar atas penerimaan dari kepabeanan dan cukai dengan realisasi sebesar Rp159,58 triliun, dan mencapai 102,70 persen dari target tahun 2018. Pencapaian target tersebut didorong melalui implementasi kebijakan pengendalian cukai berupa kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang mendominasi penerimaan cukai hingga 95 persen. Selain itu, program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) juga mampu mendorong peningkatan kinerja pendapatan cukai, dengan semakin turunnya volume peredaran rokok ilegal untuk menciptakan persaingan industri hasil tembakau yang semakin sehat.

Grafik 16. Penerimaan Perpajakan Tahun 2018 dan 2017 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

*Realisasi PNB
Tahun 2018
sebesar
Rp409,32 triliun*

Realisasi pendapatan PNB tahun 2018 adalah sebesar Rp409,32 triliun atau mencapai 148,61 persen dari target APBN sebesar Rp275,42 triliun atau tumbuh sebesar 31,52 persen dari realisasi tahun 2017. Pertumbuhan PNB tahun 2018 tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2009. Kenaikan pendapatan PNB terutama dipengaruhi tingginya penerimaan dari sumber daya alam (SDA) yang tumbuh 62,50 persen dibanding tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan SDA tahun 2018 adalah sebesar Rp180,59 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp111,13 triliun. Tingginya penerimaan SDA tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena adanya peningkatan harga komoditas dunia terutama minyak bumi dan batu bara, serta peningkatan kinerja BUMN dan layanan pemerintah kepada masyarakat. Secara khusus, tren kenaikan harga minyak Indonesia (ICP) sebagaimana kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh faktor fundamental seperti tingginya permintaan minyak mentah global, pembatasan produksi oleh negara-negara OPEC dan negara non-OPEC menjadi faktor pendorong tingginya capaian realisasi PNB SDA migas sepanjang tahun 2018. Selain itu, tren kenaikan harga komoditas berupa batubara juga turut mendorong peningkatan realisasi PNB SDA Nonmigas.

Realisasi pendapatan bagian laba BUMN/kekayaan negara dipisahkan (KND) mencapai Rp45,06 triliun atau 100,82 persen dari target APBN 2018. Realisasi tersebut mengalami peningkatan 2,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang meraih pendapatan sebesar Rp43,90 triliun. Realisasi pendapatan laba BUMN tersebut merupakan akumulasi dari realisasi pendapatan bagian laba BUMN perbankan yang mencapai Rp16,26 triliun atau berkontribusi sebesar 36,10 persen, serta pendapatan bagian laba BUMN non perbankan yang mencapai Rp28,79 triliun atau berkontribusi sebesar 63,90 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh penambahan penyetoran dividen tahun buku 2017 bagian pemerintah serta piutang dividen tahun buku sebelum 2017 oleh beberapa BUMN berdasarkan hasil pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS) sepanjang tahun 2018.

Realisasi pendapatan PNBPL Lainnya tahun 2018 sebesar Rp128,57 triliun atau 153,52 persen dari target APBN 2018. Realisasi tersebut naik sebesar 18,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai sebesar Rp108,83 triliun. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan realisasi penjualan hasil tambang, adanya pembayaran biaya hak penggunaan izin stasiun radio pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, adanya peningkatan volume layanan atas pada Kementerian Negara/Lembaga antara lain jasa kepolisian (penerbitan BPKB dan STNK), jasa kepelabuhan serta jasa pertanahan (*access reform*).

Pendapatan BLU pada tahun 2018 sebesar Rp55,09 triliun atau 127,22 persen dari target dalam APBN 2018. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 16,36 persen dengan nilai sebesar Rp47,34 triliun. Capaian positif tersebut dipengaruhi antara lain oleh peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU dan peningkatan pengelolaan aset BLU, serta adanya peralihan status 25 satuan kerja menjadi satker BLU pada Kepolisian RI, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian perhubungan sepanjang tahun 2018.

*Realisasi
Penerimaan Hibah
Tahun 2018
Rp15,51 triliun*

Selama tahun 2018 realisasi penerimaan hibah mencapai Rp15,56 triliun atau 1.300,47 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp1,19 triliun. Realisasi penerimaan hibah tersebut naik dari tahun 2017 sebesar 33,84 persen dengan nilai sebesar Rp11,62 triliun. Tingginya realisasi penerimaan hibah tersebut dipengaruhi antara lain karena adanya penerimaan hibah langsung oleh beberapa K/L yang tidak direncanakan dalam APBN 2018, serta penyaluran hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan pemilukada secara serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Kontribusi hibah dari pemerintah daerah tersebut mencapai 78,40 persen dari total realisasi penerimaan hibah tahun 2018.

Selain itu, penerimaan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pencairan beberapa program hibah yang berasal dari luar negeri di awal tahun. Beberapa pencairan program hibah di awal tahun antara lain program hibah yang disalurkan melalui Kementerian Negara/Lembaga seperti Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi, termasuk air minum serta hibah dalam rangka pelestarian ekosistem di beberapa wilayah di Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Realisasi Belanja Negara Tahun 2018 Rp2.213,11 triliun yang merupakan realisasi tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir

BELANJA NEGARA

Sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan sepenuhnya untuk mencapai tujuan bernegara, yakni mewujudkan pembangunan, dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Pemerintah dalam mengelola APBN mengedepankan tata kelola yang baik (*good governance*) agar bauran kebijakan dari sisi pendapatan maupun alokasi belanja dapat berdampak positif dan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui bauran/output yang dihasilkannya dari program-program yang dituangkan dalam belanja negara pada APBN. Dari tahun ke tahun, volume APBN semakin meningkat. Pertumbuhan alokasi belanja negara semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga Rp2.220,65 triliun pada APBN tahun anggaran 2018. Peningkatan alokasi belanja tersebut tentunya perlu disertai dengan rangkaian perbaikan kebijakan pada setiap tahapan siklus APBN, agar kinerja pelaksanaan APBN meningkat secara kesinambungan.

Secara umum kebijakan belanja negara 2018 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan belanja produktif dan prioritas yang disertai dengan efisiensi belanja negara non prioritas, dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta memperluas kesempatan kerja. Di tahun 2018 yang penuh tantangan bagi perekonomian nasional, pelaksanaan APBN telah ditutup dengan capaian yang sangat gemilang, termasuk realisasi belanja negara telah menunjukkan kinerja yang terkendali bahkan melampaui batas ekspektasi yang ditargetkan. APBN 2018 telah mampu membuktikan bahwa realisasinya memiliki daya tahan dan daya dorong terhadap pertumbuhan di tengah berbagai macam tantangan perekonomian global sepanjang tahun 2018.

Realisasi belanja negara tahun 2018 sebesar Rp2.213,11 triliun atau 99,66 persen dari pagu APBN tahun 2018. Realisasi tersebut naik 10,25 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.007,35 triliun. Realisasi belanja negara tersebut merupakan yang tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2018 adalah Rp1.455,32 triliun atau mencapai 100,06 persen dari pagu APBN 2018 sebesar Rp1.454,49 triliun. Sedangkan, transfer ke daerah dan dana desa telah terealisasi sebesar Rp757,79 triliun atau sebesar 98,91 persen dari pagu APBN 2018 sebesar Rp766,16 triliun. Meningkatnya belanja negara pada tahun 2018 mencerminkan akselerasi kinerja pemerintah dalam mengeksekusi anggaran untuk ketercapaian keluaran yang optimal. Selain itu, melalui kebijakan pemerintah yang tidak menetapkan APBN perubahan pada tahun 2018, yang merupakan pertama kalinya dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah yang secara fokus mampu menjalankan perencanaan dengan konsisten sehingga berhasil mengoptimalkan penyerapan anggaran. Konsistensi pelaksanaan APBN hingga akhir tahun 2018 tanpa melalui adanya UU APBN perubahan, juga telah menunjukkan adanya peningkatan kualitas dari sisi perencanaan penganggaran.

Selanjutnya, keberhasilan dalam implementasi realisasi belanja tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif di tengah kondisi perlambatan perekonomian global yang antara lain ditandai dengan fluktuasi nilai tukar mata uang, termasuk mata uang Rupiah, serta penanganan bencana alam di beberapa daerah untuk mengatasi kondisi kahar yang dialami oleh negara Indonesia sepanjang tahun 2018. Secara umum, ketercapaian keluaran tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui program-program pemerintah yang berbasis infrastruktur, penyaluran berbagai

program bantuan sosial, subsidi kebutuhan dasar, dan penyaluran dana transfer serta Dana Desa. Selain itu, pada tahun 2018, terdapat beberapa pos pengeluaran untuk program prioritas nasional khusus yang berskala internasional, yakni penyelenggaraan *Annual Meeting International Monetary Fund (IMF) – World Bank (WB)* tahun 2018 di Bali, penyelenggaraan *Asian Games XVIII* di Jakarta dan Palembang, serta penyelenggaraan *Asian Para Games ke-3* di Jakarta.

Capaian kinerja pelaksanaan APBN yang positif di tahun 2018 berdampak optimal bagi tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan. Dari sisi makro ekonomi, terlihat bahwa APBN tahun 2018 telah berkontribusi dalam menjaga level pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Suatu capaian yang membanggakan dimana hal tersebut dicapai di tengah kondisi ketidakpastian global. Selain itu, pencapaian kinerja APBN 2018 yang semakin baik tersebut tentunya merupakan suatu momentum yang sangat berarti sebagai wujud dan hasil dari kerja keras pemerintah dan masyarakat, kemantapan sinergi yang dibangun, dengan semakin baiknya tata kelola dalam melaksanakan anggaran, yang dimulai sejak perencanaan yang semakin baik, pelaksanaan anggaran yang taat asas, sampai dengan pelaporan keuangan yang akuntabel. Maka dari itu, momentum kinerja APBN yang semakin baik di tahun 2018 tersebut, tentunya harus dijaga dan ditingkatkan untuk pelaksanaan anggaran di masa-masa mendatang agar lebih baik dan lebih berkualitas.

Belanja Pemerintah Pusat yang direalisasikan pada tahun 2018 sebesar Rp1.455,32 triliun atau 100,06 persen dari pagu APBN 2018 sebesar Rp1.454,49 triliun. Realisasi tersebut naik 15,01 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.265,35 triliun. Perbaikan kinerja realisasi belanja tersebut dipengaruhi oleh kemajuan implementasi program-program yang dilaksanakan oleh K/L serta percepatan pelaksanaannya. Perbaikan kinerja tersebut juga didorong melalui penyempurnaan kebijakan-kebijakan tata kelola keuangan negara yang dituangkan pada sejumlah regulasi dalam kerangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Realisasi BPP tahun 2018 juga dipengaruhi oleh beberapa agenda strategis seperti Pemilihan Kepala Daerah secara serentak, penyelenggaraan *Asian Games* dan *Asian Para Games*, penanganan bencana alam, serta kegiatan strategis lainnya seperti *IMF-WB Annual Meeting*.

Upaya peningkatan kualitas penganggaran dan pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat terus dilanjutkan pada tahun 2018. Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional dengan tetap memerhatikan penciptaan stabilitas nasional dan agenda strategis tahun 2018. Beberapa upaya dilakukan baik dari aspek substantif maupun aspek administratif. Upaya yang bersifat substantif seperti: (1) penajaman prioritas belanja termasuk *refocusing* anggaran prioritas bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, (2) perbaikan ketepatan sasaran program perlindungan sosial seperti pengalihan subsidi rastra menjadi bantuan pangan nontunai secara penuh dan perbaikan basis data, serta (3) melanjutkan kebijakan efisiensi terutama pada belanja barang nonprioritas. Sementara itu, upaya yang bersifat administratif antara lain mencakup: (1) harmonisasi dan langkah koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, (2) melanjutkan kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebelum tahun anggaran dimulai, percepatan pelaksanaan kegiatan, lelang dini, dan persiapan dokumen yang lebih baik, serta pemanfaatan *e-procurement*, (3) monitoring secara komprehensif dan terkoordinasi, (4) simplifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan (5) pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan monitoring, serta penyusunan laporan keuangan.

Realisasi
Belanja
Pemerintah
Pusat Tahun
2018
Rp1.455,32
triliun

Berdasarkan realisasi belanja menurut organisasi, realisasi belanja K/L tahun 2018 sebesar Rp846,56 triliun, sedangkan realisasi belanja non K/L (belanja BA 999 Bendahara Umum Negara) adalah sebesar Rp608,76 triliun. Pada belanja K/L, realisasi tahun 2018 mencapai Rp846,56 triliun atau 98,68 persen terhadap pagu APBN sebesar Rp847,43 triliun. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp765,13 triliun (95,81 persen). Diterbitkannya kebijakan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran serta Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2018 memberikan pengaruh positif pada kinerja pelaksanaan anggaran K/L tahun 2018. Disamping itu, tidak adanya perubahan atas APBN 2018 juga berdampak positif terhadap kinerja belanja pemerintah pusat yang optimal karena Kementerian/Lembaga dapat lebih fokus dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan. Selain dilihat dari aspek makro fiskal pelaksanaan APBN, pemerintah juga senantiasa mengawal pelaksanaan APBN melalui serangkaian monitoring dan evaluasi kinerja anggaran melalui indikator-indikator yang terukur mulai dari aspek perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Pada belanja non K/L, realisasi tahun 2018 adalah Rp608,76 triliun atau mencapai 100,19 persen dari alokasi pagu APBN tahun 2018 sebesar Rp607,06 triliun. Realisasi belanja non-K/L tersebut antara lain untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp257,95 triliun atau 108,11 persen dari target tahun 2018, serta belanja subsidi sebesar Rp216,88 triliun atau 138,82 persen dari target tahun 2018. Realisasi pembayaran bunga utang tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan *outstanding* utang sebagai dampak terjadinya depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar sepanjang tahun 2018. Sedangkan, meningkatnya realisasi belanja subsidi antara lain dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar dan harga minyak mentah Indonesia (ICP), penyelesaian kurang bayar tahun sebelumnya, serta kebijakan penyesuaian subsidi tetap solar dari Rp500/liter menjadi Rp2.000/liter sebagai upaya untuk menyerap risiko kenaikan harga yang dapat menurunkan daya beli masyarakat dan pengendalian tingkat inflasi. Namun demikian, terjadinya depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS tersebut telah memberikan *net impact* yang positif terhadap APBN. Hal tersebut antara lain ditunjukkan melalui adanya tambahan penerimaan negara dari migas akibat kenaikan harga minyak. Secara umum, kinerja penyerapan anggaran belanja non K/L pada tahun 2018 telah menunjukkan capaian realisasi anggaran yang baik dalam kisaran target APBN 2018. Lebih lanjut, memperhatikan tren penyerapan anggaran sepanjang tahun 2018 terlihat bahwa tren penyerapan anggaran belanja non K/L dalam beberapa tahun terakhir memiliki pola yang dapat diproyeksikan karena tidak mengalami fluktuasi yang signifikan karena kebutuhan belanja yang cukup proposional. Kecenderungan pola penyerapan anggaran belanja non K/L tersebut hampir merata sepanjang tahun dikarenakan bentuk komitmen pada alokasi anggaranbelanja non K/L berdasarkan penjadwalan pembayaran yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, dalam hal kondisi yang dapat menyebabkan fluktuasi penyerapan anggaran pada belanja non K/L, maka hal tersebut bisa terjadi dan dapat disesuaikan apabila terdapat kebijakan pemerintah yang cukup signifikan yang mempengaruhi penyaluran belanja non K/L, seperti adanya kenaikan belanja untuk kebutuhan pembayaran subsidi dan bunga utang. Dengan mengetahui karakteristik pola penyerapan anggaran yang ideal untuk belanja non K/L tersebut, maka hal ini dapat membantu pemerintah dalam menyediakan likuiditas yang memadai guna melakukan pembayaran dan penyaluran belanja non K/L yang bersifat rutin sepanjang tahun anggaran.

Tabel 11. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2018 dan 2017 (triliun rupiah)

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Pemerintah Pusat	1.455,32	1.265,35	15,01
Belanja K/L	846,56	765,13	10,64
Belanja Non K/L	608,76	500,22	21,70

Sumber : Kementerian Keuangan

Selanjutnya, berdasarkan realisasi belanja menurut fungsi, nilai realisasi terbesar tahun 2018 berada pada belanja fungsi ekonomi sebesar Rp382,42 triliun yang naik dari tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp307,14 triliun atau naik sebesar 24,25 persen. Realisasi tersebut diikuti oleh realisasi belanja fungsi pelayanan umum sebesar Rp435,87 triliun yang naik dari tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp 307,78 triliun atau naik sebesar 22,16 persen. Realisasi belanja fungsi ekonomi tersebut berkontribusi sebesar 26,28 persen dari total realisasi anggaran tahun 2018. Sedangkan, realisasi belanja fungsi pelayanan umum berkontribusi sebesar 25,78 persen dari total realisasi anggaran tahun 2018. Rincian realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2018 menurut fungsi adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 12. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 (triliun rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
01	Pelayanan Umum	375,19	307,14	22,16
02	Pertahanan	106,83	117,50	(9,08)
03	Ketertiban dan Keamanan	143,30	135,74	5,57
04	Ekonomi	382,42	307,78	24,25
05	Lingkungan Hidup	13,70	10,61	29,12
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	32,19	27,27	18,04
07	Kesehatan	61,86	57,22	8,11
08	Pariwisata dan Budaya	10,69	5,77	85,27
09	Agama	9,37	8,87	5,64
10	Pendidikan	145,94	138,50	5,37
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	173,77	148,90	16,70
	Total	1.455,32	1.265,35	15,01

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan realisasi belanja menurut jenis belanja (ekonomi), nilai realisasi terbesar terjadi pada belanja pegawai yang mencapai Rp346,89 triliun atau 94,86 persen dari pagu dalam APBN 2018, diikuti Belanja Barang yang mencapai Rp347,46 triliun atau 102,16 persen dari pagu APBN 2018. Kinerja realisasi belanja pegawai selama tahun 2018 antara lain dipengaruhi adanya kenaikan tunjangan kinerja pada beberapa K/L dalam rangka mendukung pemantapan reformasi birokrasi serta adanya pemberian gaji ke-13 dan THR (termasuk bagi para pensiunan) untuk mempertahankan kesejahteraan aparatur negara.

Untuk belanja barang dan modal, realisasi anggaran didorong oleh akselerasi kegiatan dan pengadaan barang dan jasa, termasuk penyaluran berbagai program bantuan pemerintah, seperti Bantuan

Operasional Sekolah (BOS), bantuan pemerintah berbasis infrastruktur kepada masyarakat, keperluan operasional Pemilihan Umum (Pilkada serentak tahun 2018 dan persiapan Pemilu tahun 2019), serta operasional penyelenggaraan *Asian Games XVIII*, *Asian Para Games*, dan sidang tahunan IMF – World Bank. Khusus pada belanja modal, realisasi anggaran didorong oleh pembayaran atas prestasi *progress* pada berbagai proyek infrastruktur konektivitas pada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pengadaan Alat Material Khusus (Almatsus) untuk program keamanan dan ketertiban pada Kepolisian RI.

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Berskala Internasional Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan sejumlah kegiatan berskala internasional. Perhelatan internasional pertama yang diselenggarakan pada tahun 2018 adalah penyelenggaraan pesta olahraga tingkat Asia yang ke-18 yaitu *Asian Games 2018* yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2018, atau tepat 1 (satu) hari setelah perayaan hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-73, hingga tanggal 2 September 2018 yang berlokasi di 2 (dua) tempat yaitu Jakarta dan Palembang. Perhelatan kedua adalah penyelenggaraan pesta olahraga difabel tingkat Asia yang ke-3, yaitu *Asian Para Games 2018* yang diselenggarakan pada tanggal 6 - 13 Oktober 2018 di Jakarta. Sedangkan, perhelatan ketiga adalah penyelenggaraan pertemuan tahunan Dewan Gubernur IMF dan World Bank yaitu *IMF-WB Annual Meetings* pada tanggal 8 - 14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali.

Indonesia Menorehkan Prestasi Membanggakan di Asian Games 2018

Penyelenggaraan *Asian Games 2018* dikelola oleh Indonesia *Asian Games 2018 Organizing Committee* (INASGOC) bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora). Penyelenggaraan *Asian Games 2018* di Jakarta dan Palembang tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga menorehkan kesuksesan atas prestasi seluruh kontingen Indonesia di ajang tingkat Asia ke-18. Berdasarkan hasil akhir penyelenggaraan *Asian Games 2018*, Indonesia menduduki posisi tertinggi ke-4 dalam raihan medali dari total 45 (empat puluh lima) negara yang berpartisipasi. Raihan tersebut menjadi sebuah sejarah baru pencapaian tertinggi prestasi olahraga Indonesia selama keikutsertaannya di *Asian Games*. Indonesia berhasil meraih total 98 medali yang terdiri dari 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu. Catatan prestasi terbaik Indonesia sebelumnya diraih saat penyelenggaraan *Asian Games 1962* di Jakarta dengan raihan 51 medali yang terdiri dari 11 medali emas, 12 medali perak, dan 28 medali perunggu. Raihan tersebut juga melebihi target awal yaitu berada di peringkat 10 besar dengan target minimal 16 medali emas.

Dalam penyelenggaraan *Asian Games 2018*, kontingen Indonesia berhasil mencatatkan beberapa pencapaian penting. Catatan penting tersebut antara lain berhasil menciptakan *All Indonesian Final* pada nomor pertandingan panjat tebing nomor *speed relay* Putri dan *speed relay* Putra, serta bulutangkis nomor ganda putra. Selain itu, Indonesia juga berhasil memperoleh medali emas untuk pertama kalinya pada sejumlah cabang *olympic sports* seperti pada cabang tenis, karate, dan angkat besi. Untuk cabang olahraga *non-olympic sports*, Indonesia juga berhasil meraih medali emas melalui cabang olahraga sepak takraw.

Melalui raihan medali emas sebanyak 31 medali, Indonesia berhasil mengukirkan diri sebagai yang terbaik di wilayah Asia Tenggara sepanjang sejarah *Asian Games*. Sebelumnya, tidak pernah ada negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu meraih medali emas sejumlah 31 medali di ajang *Asian Games*.

Indonesia Menjadi Tuan Rumah Pertama Kali di Ajang Asian Para Games 2018

Penyelenggaraan *Asian Para Games 2018* di Jakarta pada tanggal 6 - 13 Oktober 2018 menjadi kali pertama Indonesia sebagai tuan rumah, setelah penyelenggaraan *Asian Para Games* pertama pada tahun 2010 di Guangzhou, Tiongkok, serta penyelenggaraan kedua di Incheon, Korea Selatan

pada tahun 2014. Dalam perhelatan kegiatan tersebut di Indonesia, pengelolaan seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan oleh Indonesia *Asian Para Games 2018 Organizing Committee* (INAPGOC) bersama Kemenpora.

Pada ajang yang ketiga kali ini, Indonesia berhasil meraih prestasi di posisi kelima dari 43 (empat puluh tiga) negara peserta, dengan raihan 135 medali yang terdiri dari 37 medali emas, 47 medali perak, dan 51 medali perunggu. Raihan medali tersebut juga berhasil mencatatkan Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di wilayah Asia Tenggara sejak penyelenggaraan pertama kali di Tiongkok. Pada perhelatan pertama tahun 2010, Indonesia berada pada peringkat 14 dari 30 negara peserta dengan raihan 11 medali yang terdiri dari 1 medali emas, 5 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sedangkan, pada perhelatan kedua di tahun 2014, Indonesia berada pada peringkat 9 dari 32 negara peserta dengan raihan sebanyak 38 medali yang terdiri dari 9 medali emas, 11 medali perak, dan 18 medali perunggu. Prestasi Indonesia di Ajang *Asian Para Games 2018* tersebut berada di atas target penyelenggaraan yaitu berada pada delapan besar dengan capaian medali emas minimal 16 medali.

IMF-WB Annual Meeting 2018 Menjadi Showcase Indonesia

IMF-WB *Annual Meetings* (IMF-WB AMs) merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur IMF dan World Bank. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global serta isu-isu aktual antara lain penurunan kemiskinan, pembangunan ekonomi internasional, serta isu-isu global lainnya.

Indonesia terpilih sebagai tuan rumah IMF-WB AMs 2018 setelah melalui proses seleksi dan evaluasi yang cukup panjang, sebelum akhirnya diputuskan oleh para Gubernur IMF dan WB. Indonesia merupakan negara ASEAN ke-4 yang terpilih sebagai tuan rumah IMF-WB AMs. Tiga negara ASEAN yang telah terpilihnya sebelumnya adalah Philipina pada tahun 1976, Thailand pada tahun 1991 dan Singapura pada tahun 2006. Kesempatan menjadi tuan rumah IMF-WB AMs 2018 merupakan momentum yang sangat baik bagi Indonesia untuk menunjukkan *leadership* Indonesia di kawasan ASEAN sekaligus sebagai satu-satunya negara ASEAN di Forum G20.

Pelaksanaan IMF-WB AMs pada tahun 2018 diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 8 – 14 Oktober 2018. Kegiatan tersebut dinilai berhasil dan memberikan sejumlah dampak positif bagi Indonesia. Delegasi Resmi yang datang pada Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 merupakan jumlah delegasi terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di luar Washington DC. Kesuksesan juga ditunjukkan oleh penilaian peserta yang menyatakan puas atau sangat puas pada semua aspek. Dampak jangka panjang yang dirasakan oleh Indonesia sebagai tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 berupa Dampak *Tangible* (berwujud) serta Dampak *Intangible* (tidak berwujud). Selama Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018, Indonesia berhasil membuat kesepakatan investasi dengan berbagai investor dari luar negeri. Sebanyak 14 BUMN berhasil menandatangani perjanjian kerjasama investasi. PINA Center Bappenas juga berhasil memfasilitasi kerjasama investasi pada saat Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 berlangsung. Dampak yang juga sangat penting adalah kemampuan Indonesia untuk berperan di dalam Forum Internasional. Di sisi lain, perekonomian regional maupun nasional mendapatkan *benefit* dari kegiatan tersebut, baik dari sektor pariwisata, infrastruktur maupun investasi.

IMF-WB AMs 2018 juga menjadi agenda yang sangat penting bagi negara-negara di dunia untuk mewujudkan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, terutama dalam membebaskan dunia dari kelaparan dan kemiskinan. Dalam mewujudkan tujuan SDGs, diperlukan pembiayaan yang sangat besar, sekitar USD 6 triliun per tahun. Untuk itu, kemitraan dan kerja sama yang erat melibatkan semua pihak, termasuk pelaku swasta dan *philantropies*, sangat diperlukan untuk memobilisasi sumber daya dan sumber dana. Adapun kesepakatan yang dihasilkan dalam IMF-WB AMs 2018, yang dikenal dengan *Bali Initiative* dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Penanganan ketidakstabilan ekonomi global dengan merilis WEO Oktober 2018.
2. Penanganan urbanisasi yang perlu menjadi perhatian dan komitmen bersama seluruh bangsa agar dapat berjalan efektif.
3. Investasi pada *Human Capital* yang ditandai dengan *launching Human Capital Indeks* (HCI) yang diinisiasi oleh World Bank.
4. Prakarsa *Bali Fintech agenda* dengan inisiasi 12 prinsip Fintech oleh IMF, WB, BI dan Kemenkeu untuk mereduksi hambatan yang timbul dari ketimpangan akses keuangan.
5. Peluncuran Strategi Pembiayaan dan Asuransi Bencana (*Disaster Risk Financing and Insurance – DRFI*) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana dan terjaminnya keberlangsungan pembangunan berkelanjutan.
6. Penanganan perubahan iklim dengan penciptaan peluang bisnis dan pertumbuhan yang memprioritaskan pendanaan program *climate-smart development*.
7. Prakarsa pembiayaan infrastruktur dengan prakarsa *SDG Indonesia One* (SIO) yang telah menghasilkan komitmen sebesar USD 2,34 miliar untuk penyiapan proyek, mitigasi risiko, pembiayaan dan investasi.
8. Kesepakatan *capital package*, dalam rangka pemberantasan kemiskinan dan kesenjangan, dengan menyepakati kenaikan modal negara anggota IBRD dan IFC.

Sumber: Kemenkeu, Kemensos, Bappenas, Kemenkaminfo, Bank Indonesia

Realisasi Transfer
ke Daerah dan
Dana Desa Tahun
2018
Rp757,8 triliun

Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang penting untuk memperkuat implementasi desentralisasi fiskal serta mendorong percepatan program-program pembangunan dan pencapaian sasaran prioritas nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Peran strategis TKDD dalam mendukung pembangunan nasional antara lain terkait perbaikan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar publik (*public service delivery*), penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), serta meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Alokasi TKDD terdiri dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan bagi daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sedangkan, Dana Desa dialokasikan bagi desa. Pada APBN tahun 2018, pemerintah telah menetapkan alokasi TKDD sebesar Rp766,16 triliun. Alokasi TKDD tahun 2018 tersebut merupakan komitmen Pemerintah untuk melanjutkan *progress* pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI, sebagaimana pelaksanaan Nawa Cita ke-3 Pemerintah. Alokasi TKDD tahun 2018 tersebut diikuti dengan adanya perbaikan mekanisme penyaluran TKDD antara lain melalui perbaikan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa yang berbasis *output* yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017, penerapan sistem terintegrasi dalam rangka sinkronisasi pengalokasian DAK dan belanja K/L, serta percepatan penyelesaian pembayaran kurang bayar DBH.

Pada tahun 2018, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp757,79 triliun atau 98,91 persen terhadap pagu dalam APBN 2018. Realisasi tersebut meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,13 persen. Peningkatan realisasi TKDD tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan memacu pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, peningkatan realisasi TKDD tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kinerja penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa karena alokasi anggaran TKDD dilakukan dengan memperhatikan kinerja penyerapan dan capaian *output*. Penyaluran TKDD selain penyaluran transfer dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), disempurnakan dengan kebijakan alokasi dana berbasis kebutuhan sektoral/bidang, khususnya untuk dukungan program pendidikan,

kesehatan, dan infrastruktur dasar. Hal ini dimaksudkan guna mendukung tingkat kesejahteraan dasar, seperti layanan pendidikan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan profesi guru PNSD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana, layanan administrasi kependudukan, Dana Alokasi Khusus (DAK) reguler, afirmasi, dan penugasan. Selain itu, penyaluran Dana Desa untuk pemerataan pembangunan dan mengatasi persoalan kesenjangan pada level pemerintahan terendah, yakni desa. Kinerja penyaluran Dana Desa tahun 2018 semakin baik dimana seluruh Pemda mampu menyalurkan untuk pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan setiap desa, meliputi 5 bidang prioritas dimana alokasi terbesar untuk pembangunan desa yaitu sebesar Rp29,6 triliun atau 49,50 persen terhadap total realisasi penyaluran Dana Desa. Kinerja penyaluran Dana Desa tahun 2018 semakin baik, dimana seluruh Pemda mampu menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RLDDes untuk pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan setiap desa, meliputi 5 bidang. Penggunaan Dana Desa terbesar terdapat pada Bidang Pembangunan Desa, yaitu sebesar Rp29,60 triliun atau 49,50 persen terhadap total realisasi penyaluran Dana Desa tahun 2018.

DEFISIT DAN PEMBIAYAAN

Defisit anggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp269,44 triliun atau 1,81 persen terhadap realisasi PDB tahun 2018 yang mencapai Rp14.837,4 triliun. Realisasi tersebut berada di bawah target defisit yang telah ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar Rp325,93 triliun dengan besaran persentase defisit terhadap PDB sebesar 2,19 persen. Persentase defisit tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,51 persen terhadap PDB. Sementara itu, realisasi defisit keseimbangan primer sebesar Rp11,49 triliun, yang menurun tajam jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer di tahun 2018 merupakan yang terkecil sejak tahun 2012.

Realisasi Defisit Anggaran tahun 2018 sebesar Rp269,44 triliun merupakan yang terendah sejak 5 tahun terakhir

Tabel 13. Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran Terhadap PDB dan Keseimbangan Primer Tahun 2018 dan 2017 (triliun rupiah)

Indikator	APBN 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
Surplus/(Defisit) Anggaran	(325,93)	(269,44)	(340,97)
PDB Nominal	14.850,50	14.837,40	13.587,20
Surplus/(Defisit) Anggaran thd PDB	(2,19%)	(1,81%)	(2,51%)
Keseimbangan Primer	(87,33)	(11,49)	(124,40)

Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (diolah)

Realisasi defisit anggaran tahun 2018 sebesar 1,81 persen terhadap PDB tersebut, menjadi yang paling rendah sejak tahun 2012. Terjaganya defisit anggaran tersebut mencerminkan besarnya komitmen Pemerintah untuk terus menjaga keberlanjutan fiskal yang sehat antara lain dengan terus melakukan optimalisasi pendapatan negara terutama dari penerimaan perpajakan dan PNBPN serta senantiasa mendorong penguatan kualitas belanja produktif yang didukung dengan efisiensi belanja non prioritas serta perbaikan kinerja penyerapan belanja.



Grafik 17. Tren Defisit APBN Terhadap PDB Tahun 2013 - 2018

Sumber : Kementerian Keuangan

*Realisasi
Pembiayaan
Anggaran Tahun
2018 mencapai
Rp305,69 triliun*

Pada tahun 2018, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp305,69 triliun atau 93,79 persen dari target APBN tahun 2018 sebesar Rp325,93 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan tahun 2017 yang memiliki nilai sebesar Rp366,62 triliun. Kebijakan pembiayaan tersebut ditempuh oleh pemerintah dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal serta efisiensi APBN di tengah kondisi perekonomian global yang ditandai dengan suku bunga The Fed yang mengalami tren peningkatan, serta depresiasi mata uang nasional terhadap Dolar AS, sebagaimana tren penurunan mayoritas mata uang negara-negara di dunia. Realisasi tersebut berasal dari realisasi pembiayaan utang sebesar Rp367,46 triliun atau 92,05 persen dari targetnya, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp61,11 triliun setara dengan 93,08 persen dari targetnya, pemberian pinjaman sebesar negatif Rp4,03 triliun atau 60,27 persen dari target, realisasi kewajiban penjaminan sebesar negatif Rp1,12 triliun atau 100 persen dari target, serta realisasi pembiayaan lainnya sebesar Rp0,17 triliun atau 92,14 persen dari targetnya dalam APBN 2018. Secara khusus, realisasi pembiayaan yang menurun tersebut diikuti dengan realisasi pembiayaan utang neto yang menurun yaitu Rp367,46 triliun dari tahun 2017 sebesar Rp429,07 triliun.

Realisasi pembiayaan utang juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah untuk pengembangan pasar SBN (*financial deepening*), pengembangan jumlah investor ritel domestik, serta peningkatan peringkat kredit Indonesia menjadi *investment grade*. Peningkatan peran SBN sebagai instrumen utama pembiayaan defisit APBN ditempuh oleh pemerintah sebagai salah satu strategi pembiayaan APBN dengan mempertimbangkan perlunya pemerintah untuk meningkatkan edukasi masyarakat terhadap investasi, sehingga dapat meningkatkan kontribusi masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional melalui partisipasi masyarakat sebagai investor SBN. Hal tersebut telah menjadi salah satu komitmen Pemerintah untuk senantiasa menjaga APBN yang sehat dan kredibel antara lain dengan melakukan pengelolaan APBN dengan mendorong peningkatan kemandirian fiskal.

Tabel 14. Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2018 dan 2017(triliun rupiah)

Uraian	APBN 2018	Realisasi Audited 2018	Realisasi Audited 2017	% thd APBN
Pembiayaan Utang	399,21	372,02	429,07	93,18
Pembiayaan Investasi	(65,65)	(61,11)	(59,75)	93,08
Pemberian Pinjaman	(6,69)	(4,03)	(2,05)	60,27
Kewajiban Penjaminan	(1,12)	(1,12)	(1,00)	100,00
Pembiayaan Lainnya	0,18	0,16	0,35	92,14
Total Pembiayaan Anggaran	325,93	305,69	366,62	93,79

Sumber: Kementerian Keuangan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 sebesar Rp36,24 triliun

Berdasarkan realisasi pembiayaan tahun 2018, maka terdapat Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp36,24 triliun. Nilai SiLPA tahun 2018 lebih besar daripada tahun 2017 yang bernilai sebesar Rp25,64 triliun, atau terdapat pertumbuhan positif sebesar 41,34 persen. SiLPA tersebut menjadi bagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dapat difungsikan menjadi penyangga fiskal (*fiscal buffer*). Penyangga fiskal tersebut menjadi salah satu alternatif mitigasi terhadap dampak kondisi ketidakpastian ekonomi global terhadap perekonomian nasional di masa yang akan datang.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). LKPP mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi Eselon I, Kantor Wilayah, dan Satuan Kerja (satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

LKPP Tahun 2018 merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN dan entitas pelaporan K/L. LKKL merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas akuntansi satuan kerja di bawahnya.

Berikut ini adalah Daftar Entitas Pelaporan Tingkat K/L dan BUN selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa BUN dan jumlah Entitas Akuntansi untuk setiap K/L dan BUN, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam LKKL.

Daftar entitas
pelaporan tingkat
Kementerian
Negara/Lembaga

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2018	2017
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	3	2
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	3	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	42	74
4	BA 005	Mahkamah Agung	1.657	1.656
5	BA 006	Kejaksaan Agung	533	524
6	BA 007	Sekretariat Negara	14	14
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	1.253	1.114
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	146	144
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	500	496
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.181	1.388
11	BA 015	Kementerian Keuangan	1.104	1.101
12	BA 018	Kementerian Pertanian	823	1.177
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	106	99
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	46	51
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	610	667
16	BA 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	420	365
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	1.681	1.586
18	BA 025	Kementerian Agama	6.208	6.682
19	BA 026	Kementerian Ketenagakerjaan	475	354
20	BA 027	Kementerian Sosial	276	291
21	BA 029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	333	400
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	510	639
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.177	1.177
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2	2
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	3	2

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas	
			Akuntansi 2018	2017
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4	3
27	BA 040	Kementerian Pariwisata	57	101
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2	1
29	BA 042	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	241	236
30	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	281	298
31	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42	41
32	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2	2
33	BA 050	Badan Intelijen Negara	2	1
34	BA 051	Lembaga Sandi Negara	2	1
35	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1	1
36	BA 054	Badan Pusat Statistik	515	513
37	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	38	36
38	BA 056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	502	520
39	BA 057	Perpustakaan Nasional	38	36
40	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	65	61
41	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.291	1.282
42	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	44	42
43	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	2	1
44	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	41	40
45	BA 066	Badan Narkotika Nasional	224	223
46	BA 067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	393	479
47	BA 068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	43	42
48	BA 074	Komis Nasional Hak Asasi Manusia	2	1
49	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	192	194
50	BA 076	Komis Pemilihan Umum	550	549
51	BA 077	Mahkamah Konstitusi	2	1
52	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	3	1
53	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	47	46
54	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	21	20
55	BA 081	Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi	19	19
56	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	22	21
57	BA 083	Badan Informasi Geospasial	2	1
58	BA 084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
59	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	4	3
60	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	9	8
61	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	38	38
62	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	17	16
63	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	41	40
64	BA 090	Kementerian Perdagangan	502	544
65	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	43	42
66	BA 093	Komis Pemberantasan Korupsi	2	1
67	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	3	2
68	BA 100	Komis Yudisial	2	1
69	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2	1
70	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	29	29
71	BA 105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	0	1
72	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2	1
73	BA 107	Badan SAR Nasional	41	36

No.	Kode	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2018	2017
74	BA 108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	1
75	BA 109	Badan Pengembangan Wilayah Sumatera	2	1
76	BA 110	Ombudsman RI	2	1
77	BA 111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	32	58
78	BA 112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	2	1
79	BA 113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2	1
80	BA 114	Sekretariat Kabinet	1	1
81	BA 115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	35	35
82	BA 116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	71	71
83	BA 117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	31	30
84	BA 118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	2	1
85	BA 119	Badan Keamanaan Laut	2	1
86	BA 120	Kementerian Koordinator Bidang Kemanitman	1	1
87	BA 121	Badan Ekonomi Kreatif	1	1
88	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:		
	BA 999.00	Kuasa Bendahara Umum Negara	182	183
	BA 999.01	Pengelolaan Utang	1	1
	BA 999.02	Hibah	3	3
	BA 999.03	Investasi Pemerintah	12	14
	BA 999.04	Pengelolaan Penerimaan Pinjaman	1	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah	177	183
	BA 999.07	Belanja Subsidi	16	18
	BA 999.08	Belanja Lain-lain	11	56
	BA 999.99	Transaksi Khusus	72	23
	BA 999.09	Pengelolaan Badan Lainnya	19	1
		Jumlah Entitas Akuntansi	25.211	26.271

LKPP mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut.

- 1) Transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana urusan bersama;
- 2) Ekuitas bersih dari Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker.

LKPP tidak mencakup entitas:

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH);
- Pemerintah Daerah; dan
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

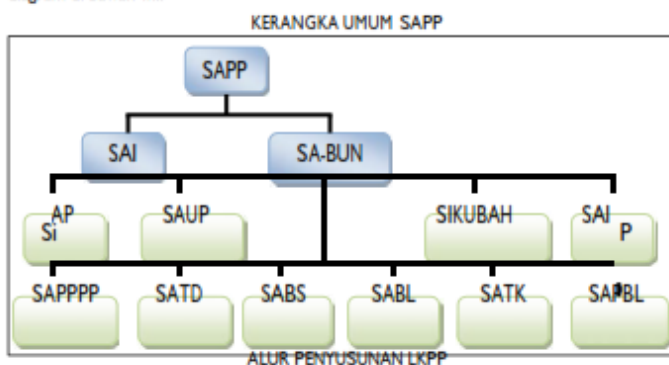
Namun demikian, penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN/Non BUMN) dan PTN Badan Hukum, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara. LKPP juga dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker sampai tingkat K/L

termasuk satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan/Dana Urusan Bersama, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam pelaksanaannya, K/L membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman (SAPPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lainnya (SABL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL). SiAP menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat dan Neraca Kuasa BUN sebagai data yang akan direkonsiliasi dengan data SAI.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.



LKPP terdiri dari LRA,
LPSAL, LO, LPE,
Neraca, LAK, dan CaLK.



SAPP dilaksanakan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA) disusun berdasarkan kompilasi LRA seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. LRA terdiri dari Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

Angka realisasi Pendapatan Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang riil yang masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) atas data BUN.

Angka realisasi Belanja Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh pengeluaran uang riil keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi belanja. Dalam hal terdapat selisih data realisasi antara SiAP dengan K/L diungkapkan di dalam CaLK.

Angka realisasi Pembiayaan pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang riil yang masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun berdasarkan beberapa komponen seperti nilai SAL awal yang berasal dari nilai SAL Pemerintah Pusat Awal Tahun Anggaran Berjalan, Penggunaan SAL di Tahun Anggaran Berjalan, SILPA/SiKPA yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, dan penyesuaian lainnya yang mempengaruhi SAL. Seluruh penyesuaian/koreksi yang mempengaruhi perhitungan catatan SAL disajikan sebagai Penyesuaian SAL pada tahun berjalan (tidak dilakukan penyesuaian terhadap SAL awal).

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa, yang dikonsolidasikan dari seluruh LKKL dan LKBUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/Defisit-LO yang berasal dari hasil akhir Laporan Operasional Tahun Anggaran Berjalan, dan Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang akan disajikan di Neraca.

5. Neraca

Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kuasa BUN dan Neraca Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas dari Hibah, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan ini mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN, termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langsung, pengesahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan belanja yang bersumber dari PHLN yang penarikannya melalui mekanisme *direct payment*, serta pengesahan pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan disusun dengan menggunakan SiAP. Dalam rangka menyajikan saldo kas dan setara kas yang selaras antara saldo di laporan arus kas dan saldo di neraca, pada laporan arus kas juga disajikan informasi tambahan terkait saldo kas yang berada dalam rekening yang dikuasai oleh kementerian negara/lembaga di luar saldo kas hibah dan kas BLU yang sudah disahkan. Informasi tambahan tersebut antara lain meliputi saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas BLU/hibah yang belum disahkan dan lain-lain.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat pada tahun anggaran 2015. Atas ketentuan tersebut, mulai pelaporan keuangan tahun 2015, Pemerintah telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis Akrual. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP diharapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

Pendapatan

Kebijakan akuntansi pendapatan pada SAP Berbasis Akrual, terdiri atas:

a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Menurut jenis pendapatannya, pendapatan LO dibagi menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO serta Pendapatan Hibah-LO. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengecualian terhadap asas bruto pada Pendapatan-LO berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama

Pendapatan-LO diakui apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih suatu pendapatan atau telah terdapat realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 82 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, mulai tahun 2018 dilakukan restrukturisasi kode akun PNBPN, khususnya untuk kelompok Pendapatan PNBPN Lainnya. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menampung jenis PNBPN yang realisasinya besar dan signifikan untuk memiliki kode akun tersendiri, penggabungan dalam akun baru untuk PNBPN yang realisasinya kecil dan berkarakteristik sama, serta menghapus akun lama yang telah tidak relevan. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui penggunaan kode kelompok akun 425xxx yang menggantikan kode kelompok akun 423xxx. Dengan demikian, mulai tahun 2018 kode kelompok akun 423xxx tidak digunakan lagi.

b) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran entitas pelaporan/akuntansi.

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening Panas Bumi. Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai. Hal ini dikarenakan penerimaan migas pada rekening migas dan penerimaan panas bumi pada rekening panas bumi masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *underlifting* Kontraktor, *fee* kegiatan usaha hulu migas, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan". Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, dan apabila terdapat

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN atau terjadinya pengesahan oleh KPPN

saldo, kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan hulu migas sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Migas diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan panas bumi sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Panas Bumi diatur melalui surat nomor S-10601/PB.6/2016 tanggal 22 Desember 2016 hal Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PNBP Panas Bumi.

Selain pada penerimaan migas, pengecualian terhadap asas bruto atas Pendapatan-LRA juga berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 26 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, mulai tahun 2018 dilakukan restrukturisasi kode akun PNBP, khususnya untuk kelompok Pendapatan PNBP Lainnya. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menampung jenis PNBP yang realisasinya besar dan signifikan untuk memiliki kode akun tersendiri, penggabungan dalam akun baru untuk PNBP yang realisasinya kecil dan berkarakteristik sama, serta menghapus akun lama yang telah tidak relevan. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui penggunaan kode kelompok akun 425xxx yang menggantikan kode kelompok akun 423xxx. Dengan demikian, mulai tahun 2018 kode kelompok akun 423xxx tidak digunakan lagi.

Beban, Belanja, dan Transfer

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, dan saat timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) dan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi konsumsi aset, dan/atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi, atau potensi jasa, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

pembayarannya kembali oleh pemerintah. Secara umum belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja disajikan pada lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja diungkapkan menurut klasifikasi organisasi dan jenis belanja.

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D)

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, antara lain dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian, dana bagi hasil milik Pemerintah Daerah, serta dana desa. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat. Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D).

Pembiayaan

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh BUN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas adalah berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran BUN 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan jangka pendek, dan persediaan

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan uang (rupiah). Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

- Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.

Kas dicatat di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh BUN atau Kuasa BUN terdiri atas:

Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Negara dan Sub Rekening Kas Umum Negara di Bank Sentral;

Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum;

Kas pada Rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola Kuasa BUN;

Rekening Khusus (*special account*) Pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L terdiri atas:

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan K/L setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas pada BLU merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di K/L.

Kas lainnya yang dikelola K/L dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah saldo kas pada K/L selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas pada BLU. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah tidak digulirkan kembali, maka kas dari Dana Bergulir yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya dalam kelompok Aset Lainnya.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAL.

Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah ke rekening Pemerintah yang lain, namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.

Termasuk dalam klasifikasi Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Investasi jangka pendek meliputi, antara lain:

- a. Investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
- b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca.
- d. Reksadana.

Piutang Jangka Pendek dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Perpajakan, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang BLU, Piutang Lain-lain, Piutang Transfer ke Daerah, dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. LKPP Tahun Anggaran Berjalan menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable*

Value) atas piutang jangka pendek dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, serta piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan transfer ke daerah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir karena Pemerintah belum dapat mengimplementasikan Metode *First In First Out* (FIFO) dalam penilaian Persediaan.

- **Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek (telah dijelaskan sebelumnya pada bagian Aset Lancar) dan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

a. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen meliputi, antara lain:

Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo;

Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

Dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir);

Investasi non permanen lainnya, yang bersifat tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus/berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi antara lain seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya. Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah adalah sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga seperti saham pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas). Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan aset yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan BUMN berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh K/L. Aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang pada BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset BPYBDS pada neraca BUMN didasarkan atas penggunaan prinsip *substance over form* dan *matching cost against revenue*, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh BUMN dalam kegiatan operasi dalam rangka memperoleh pendapatan. PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen, investasi pada PTN BH serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya.

Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan

internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi yang dicatat dengan metode ekuitas, diakui sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (*emiten*). Dalam hal nilai bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi dimaksud melebihi nilai Investasi Pemerintah (Investasi negatif), penyajian nilai Investasi Pemerintah di Neraca dilakukan sampai dengan nilai Investasi menjadi nihil. Dalam hal nilai Investasi bernilai negatif dan Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima Investasi (*emiten*), maka bagian pemerintah atas akumulasi rugi Investasi disajikan sebagai Investasi yang bernilai negatif di Neraca dan diberikan penjelasan yang memadai di CaLK.

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

- **Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L tahun anggaran berjalan dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 pada Neraca Tahun Anggaran Berjalan.

Pengukuran suatu aset tetap memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi BMN meliputi perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai dan/atau peningkatan kapasitas/ efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat, kecuali pengeluaran untuk aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, mulai tahun anggaran 2018 nilai

satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

- a. sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk:
 1. peralatan dan mesin; atau
 2. aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
- b. sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
 1. gedung dan bangunan; atau
 2. aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak diperlukan untuk aset tetap berupa tanah; jalan, irigasi dan jaringan; konstruksi dalam pengerjaan; dan aset tetap lainnya seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum aset tetap disajikan dalam neraca, sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomptabel dan tidak disajikan dalam neraca.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi mulai pelaporan keuangan tahun 2013 sebagaimana PMK No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah melakukan proses Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset Tetap Pemerintah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam periode tahun 2017 dan 2018. Pada pelaporan tahun 2018, aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan (*historical cost*). Dampak perubahan nilai aset berdasarkan Penilaian Kembali kembali yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018, Catatan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018, dan Catatan atas

Piutang Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Penyajian aset tetap berdasarkan nilai wajar hasil penilaian kembali pada Laporan Keuangan dilakukan setelah hasil penilaian kembali aset tetap Pemerintah Pusat diterima dan disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan secara keseluruhan.

- Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset Pemerintah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas/kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada Pemda, BUMN, BUMD atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada Pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang jangka panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana dijelaskan di atas. TPA, Tagihan TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- **Aset Lainnya**

Aset lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik, dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi *software* komputer, *lisensi* dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Dana Penjaminan merupakan dana yang digunakan sebagai jaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terjamin.

Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga.

Aset KKKS yang disajikan pada LKPP adalah:

- a. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) disajikan pada Neraca sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang belum di-IP diungkapkan pada CaLK.

- b. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan telah dilakukan inventarisasi disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan. Dalam hal Aset KKKS tersebut tidak diketahui nilai perolehannya, namun sudah dilakukan penilaian, maka disajikan di Neraca sebesar nilai hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang belum diinventarisasi diungkapkan pada CaLK.
- c. Aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan.
- d. Atas Aset KKKS yang telah diserahkan ke Pemerintah, dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap. Dikecualikan dari reklasifikasi tersebut adalah dalam hal Aset KKKS tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pemindahtanganan atau Aset KKKS tersebut kondisinya rusak berat, usang atau secara ekonomis nilainya tidak material dan tidak sebanding dengan biaya pemeliharaannya.
- e. Aset KKKS yang dicatat dalam LKPP bukan merupakan hasil konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melainkan berasal dari hasil konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (dalam hal ini KPA BUN Transaksi Khusus pada DJKN).

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung Veteran, SKK Migas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA, aset eks Pertamina, aset bekas milik asing/cina, aset BMN idle, dan aset PKP2B. Aset eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2016, mulai tahun anggaran 2016, dilakukan penerapan amortisasi atas BMN berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi atas aset tak berwujud dilakukan menggunakan metode garis lurus tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak

Berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tak Berwujud diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebagai pengurang nilai Aset Lainnya di Neraca.

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks Pemerintahan, kewajiban bersumber antara lain dari penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi Pemerintah dan masa pembayaran/pelunasannya diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi antara lain Utang Transfer, Utang Bunga, Utang Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Surat Perbendaharaan Negara, dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari: (1) Pendapatan Diterima di Muka; (2) Utang Biaya; dan (3) Kewajiban pada Pihak Lain.

Utang Transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan Pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *underlifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama SKK MIGAS.

Kewajiban akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah *Inkracht*

Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang dimaksud dalam laporan keuangan ini merupakan gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maupun gugatan arbitrase yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi penerimaan negara.

Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Kementerian Negara/ Lembaga bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan.

Dalam hal putusan atas tuntutan hukum kepada pemerintah telah *inkracht* dan upaya hukum luar biasa telah dilaksanakan, maka Kementerian Negara/Lembaga terkait harus segera menindaklanjuti putusan *inkracht* tersebut untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi keuangan negara. Pendanaan atas pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* dianggarkan pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

Kebijakan akuntansi atas putusan yang telah *inkracht* dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut.

Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;

Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum

yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum);

Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CaLK dalam LKKL.

- **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah antara lain terdiri dari Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Utang Obligasi/Surat Utang Negara (SUN), Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Utang Pembelian Cicilan, dan Utang Jangka Panjang Lainnya. Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rate bonds*, *variable rate bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2018 disajikan sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

Fixed Rate (FR) Bonds adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Obligasi Negara Ritel (ORI) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Saving Bond Ritel (SBR) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SBR memiliki tingkat kupon yang mengambang dan dibayarkan secara periodik. Kupon SBR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). SBR tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Sukuk Tabungan (ST) adalah adalah produk investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah, yang ditujukan bagi investor individu Warga Negara Indonesia. Sukuk Tabungan merupakan varian dari Sukuk Ritel yang merupakan instrumen investasi yang khusus ditujukan bagi individu Warga Negara Indonesia. Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu. Sukuk Tabungan dapat lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah (Rp 2 juta). Sukuk Tabungan juga memberikan imbalan tetap setiap bulan (*fixed coupon*), dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat (2 tahun). Meskipun Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*).

Variable Rate (VR) Bonds adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka tiga bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Zero Coupon (ZC) Bond adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI) merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01.

SU-002 dan SU-004 adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).

SU-007 adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).

SRBI-01 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2043 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.

International Bonds adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs Rupiah terhadap USD yang ditetapkan secara khusus.

Pemerintah tidak mengakui adanya utang kepada pegawai (*Past Service Liabilities*) atas pensiun PNS. Hal ini dikarenakan bahwa saat ini Pemerintah menanggung seluruh pembayaran pensiun kepada para penerima pensiun, di samping bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah belum memiliki Program Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka program pensiun yang akan datang perlu dibuat sedemikian rupa agar tidak diperlukan pengeluaran Pemerintah untuk membayar *Past Service Liabilities* dengan jumlah besar yang dapat berdampak negatif bagi APBN.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

*Kewajiban kontinjensi
diungkapkan dalam
catatan penting lainnya*

Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau nilainya tidak dapat diukur dengan andal.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah antara lain pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, serta Program Percepatan Penyediaan Air Minum, sebagaimana diungkapkan secara memadai dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca. Kewajiban Kontinjensi pada tahun anggaran berjalan juga meliputi kewajiban yang timbul akibat penyaluran subsidi non energi yaitu Subsidi Bunga Kredit Program yang belum dibayar oleh Pemerintah. Terhadap kewajiban ini, diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca.

Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrua, Pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kurs Mata Uang Asing

Kurs Mata Uang Asing

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan

transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Pertakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	14.481,00	13.548,00
Dolar Australia [AUD]	1	10.211,29	10.557,29
Dolar Canada [CAD]	1	10.624,37	10.778,92
Franc Swiss [CHF]	1	14.709,75	13.842,15
Yuan China [CNY]	1	2.109,95	2.073,40
Kroner Denmark [DKK]	1	2.217,87	2.172,34
Euro [EUR]	1	16.559,75	16.173,62
Poundsterling Inggris [GBP]	1	18.372,78	18.218,01
Yen Jepang [JPY]	100	13.111,51	12.021,84
Korean Won [KRW]	1	13,03	12,70

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. LKPP tahun anggaran berjalan menyajikan selisih kurs atas dalam mata uang asing sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional tahun anggaran berjalan.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas)

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:

- 1) Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;
- 2) Hasil pembagian angka 1) dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.
- 3) Selisih kurs diakui sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional, dan sebagai belanja/pendapatan lain-lain pada Laporan Realisasi Anggaran.

Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

- 1) Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:
Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi.
- 2) Penghitungan penyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada saat konversi:
 - a) Membandingkan antara besaran mata uang asing yang dipindahbukukan dengan saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih kurs belum terealisasi saat pemindahbukuan;
 - b) Kemudian diakui sebagai untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat pada Laporan Operasional yang akan mempengaruhi posisi ekuitas di Neraca.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing (valas) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing:

$$(Total\ Utang\ Valas\ Penarikan\ dalam\ Mata\ Uang\ Outstanding\ x\ Kurs\ Tengah\ BI\ Tanggal\ Pelaporan) - Total\ Nilai\ Buku\ Penjabaran\ Utang\ dalam\ Mata\ Uang\ Rupiah$$

Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai positif maka dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi (*unrealized loss*). Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai negatif maka dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized gain*).

Pencatatan selisih kurs atas investasi dalam valas

Selisih kurs atas investasi dalam mata uang asing dicatat sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional. Sedangkan pengaruh selisih kurs atas investasi yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang Rupiah yang dikonversi dalam mata uang asing, dicatat sebagai komponen LPE.

Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR NAD-Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

*Aset/Kewajiban Eks
BRR NAD-Nias*

Eliminasi Akun Timbal Balik dan reklasifikasi dalam konsolidasi Laporan Keuangan

Sampai dengan penyusunan LKPP tahun anggaran berjalan, Neraca Likuidasi BRR NAD Nias belum selesai disusun, sehingga aset/kewajiban eks BRR NAD-Nias tidak dikonsolidasikan pada LKPP tahun anggaran berjalan dan diungkapkan secara memadai di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP tahun anggaran berjalan yang diungkapkan adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK.

Eliminasi akun timbal balik dan reklasifikasi dalam konsolidasi Laporan Keuangan

Dalam penyusunan LKPP, Pemerintah menerapkan eliminasi akun timbal balik terhadap transaksi/akun buku besar yang bersifat timbal balik. Eliminasi dilakukan sepanjang transaksi/akun dimaksud dapat diidentifikasi sifat dan nilainya dapat diukur secara handal. Di antara transaksi/akun timbal balik yang dieliminasi tersebut antara lain: Transaksi antar entitas, yaitu eliminasi akun Transfer Masuk dan Transfer Keluar, eliminasi akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Setoran Surplus BLU, serta eliminasi akun Pengesahan Hibah Langsung.

Pada proses konsolidasi neraca, jurnal eliminasi juga dilakukan terhadap pos yang sama atau yang secara substansi sama yang disajikan oleh dua atau lebih entitas pelaporan, antara lain

- a. Kas di KL dari Hibah, dan Kas pada BLU disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L/BABUN, sedangkan atas data yang berasal dari Kuasa BUN dilakukan eliminasi.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh Kuasa BUN, sedangkan atas data yang berasal dari K/L/BABUN dilakukan eliminasi.
- c. Investasi Permanen BLU dicatat oleh Kementerian Agama dan BA BUN Investasi Pemerintah. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh BA BUN Investasi Pemerintah, sedangkan atas data yang berasal dari Kementerian Agama dilakukan eliminasi.

Eliminasi atas Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Berasal Dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang secara Organisatoris Membawahinya (Antar K/L) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hanya dilakukan atas transaksi resiprokal yang telah dapat diidentifikasi secara memadai.

Di samping itu, Pemerintah juga melakukan jurnal penyesuaian/reklasifikasi pada saat proses konsolidasi, antara lain:

- Uang Muka dari KPPN TAYL yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun ekuitas pada neraca;
- Uang Muka dari KPPN dari tahun anggaran berjalan yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun DDEL/DKEL;
- Utang atas Pajak yang Belum Disetor ke Kas Negara pada LKKL menjadi Pendapatan Pajak lain-lain -LO;

- Hibah yang Belum Disahkan sampai akhir periode pelaporan pada LKKL dan Pendapatan yang ditangguhkan (hibah yang NoDnya belum diterima sehingga belum disahkan) pada BA BUN 999.02 menjadi Pendapatan Hibah-LO.
- Jurnal penyesuaian/reklasifikasi lainnya yang diperlukan dalam rangka penyusunan Neraca Konsolidasian LKPP dapat dilakukan sepanjang mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dalam penyusunan LKPP.

Kebijakan akuntansi dalam konsolidasi LKPP diatur Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 32/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

Kesesuaian SAP dengan IPSAS

Pada tahun 2010 International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dengan SAP dengan melakukan perbandingan antara SAP berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana diatur dalam Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan 26 (dua puluh enam) IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2008. Setiap standar dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi Indonesia pada saat itu. Kajian IPSASB tersebut menyimpulkan bahwa:

- a. PSAP berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berada di atas IPSAS berbasis kas dalam semua aspek yang signifikan; dan
- b. Langkah-langkah strategis telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan progress dalam sistem akuntansi.

Sehubungan dengan penerapan SAP berbasis akrual yang telah dimulai sejak tahun 2015, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dan SAP berbasis akrual. Kajian dilakukan dengan membandingkan antara SAP berbasis Akrual dengan 1 (satu) Kerangka Konseptual dan 38 (tiga puluh delapan) IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2016. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa:

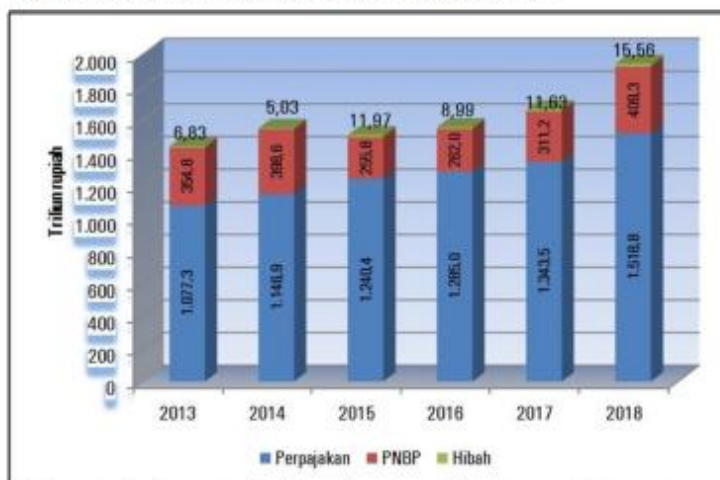
1. SAP berbasis akrual, yang meliputi PSAP berbasis Akrual pada Lampiran I PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditambah PMK penetapan PSAP, Kerangka Konseptual, Buletin Teknis dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, setara dengan IPSAS berbasis akrual dalam semua aspek yang signifikan;
2. Terdapat 22 SAP yang setara dengan Kerangka Konseptual dan IPSAS tanpa perbedaan yang material, serta terdapat 5 *draft* PSAP yang setara dengan IPSAS, namun sedang dalam pembahasan;
3. Perbedaan yang ada terjadi karena mempertimbangkan kondisi dan situasi Pemerintah Indonesia, misalnya adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebutuhan akuntansi dan pelaporan pemerintah Indonesia.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran (TA) 2018 adalah sebesar Rp1.943.674.876.878.796 atau mencapai 102,58 persen dari target APBN TA 2018 sebesar Rp1.894.720.327.977.000. Realisasi Pendapatan Negara berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.518.789.777.151.030, PNBP sebesar Rp409.320.239.488.446, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp15.564.860.239.320. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp10.111.755.590.449 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp370.614.635.480.

Pendapatan Negara TA 2018 mengalami kenaikan Rp277.298.964.220.711 atau lebih besar 16,64 persen jika dibandingkan dengan TA 2017. Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP dan Hibah sejak TA 2013 dapat dilihat pada Grafik 18.



Grafik 18. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2013 - 2018

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp2.213.117.817.284.996 atau 99,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp2.220.656.966.577.000. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp2.007.351.810.206.886. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.455.324.879.227.617, Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp757.792.938.057.379. Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2013 dapat dilihat pada Grafik 19.



Grafik 19. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2013- 2018

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp1.943.674.876.878.796 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp2.213.117.817.284.996, maka Defisit Anggaran pada TA 2018 sebesar Rp269.442.940.406.200.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2018 adalah sebesar Rp305.692.597.869.020, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp302.515.788.492.391 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar Rp3.176.809.376.629.

Pembiayaan Neto sebesar Rp305.692.597.869.020 untuk menutupi Defisit Anggaran sebesar Rp269.442.940.406.200 tersebut mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2018 sebesar Rp36.249.657.462.820.

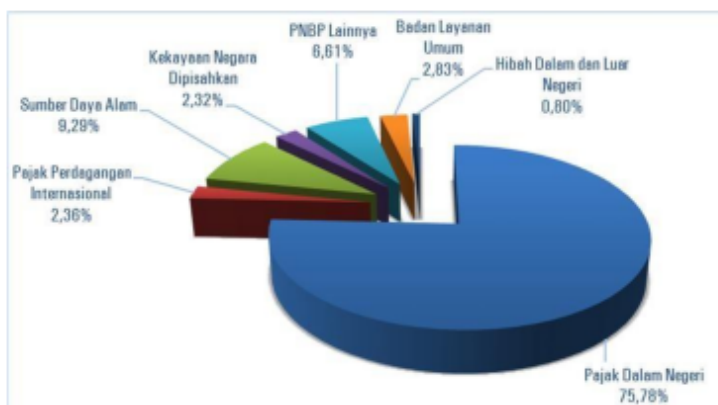
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1 Pendapatan Negara

*Pendapatan Negara
Rp1.943,67 triliun*

Realisasi Pendapatan Negara TA 2018 adalah sebesar Rp1.943.674.876.878.796 atau 102,58 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1.894.720.327.977.000. Pendapatan Negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBPN, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara TA 2018 dapat dilihat pada Grafik 20.



Grafik 20. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara TA 2018

Rincian pendapatan negara per akun dapat dilihat pada Lampiran I.A.

B.2.1.1 Penerimaan Perpajakan

*Penerimaan
Perpajakan
Rp1.518,78 triliun*

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2018 adalah sebesar Rp1.518.789.777.151.030 atau 93,86 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1.618.095.493.162.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2018 lebih besar Rp175.259.933.352.520 atau naik 13,04 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.343.529.843.798.510. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pendapatan Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah sebesar Rp10.111.755.590.449 dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebesar Rp370.614.635.480.

Perbedaan pencatatan Total Realisasi Penerimaan Perpajakan antara BUN dengan K/L secara neto adalah sebesar Rp2.171.714.481.

B.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Dalam Negeri

*Pendapatan Pajak
Dalam Negeri
Rp1.472,90 triliun*

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2018 adalah sebesar Rp1.472.907.964.370.352 atau 93,26 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1.579.395.493.162.000. Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2018 lebih besar Rp168.591.695.142.313 atau naik 12,93 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas)	64.699.145.451.922	50.315.750.744.783
Pendapatan Pajak Penghasilan Nonmigas	675.165.778.735.455	587.543.573.276.305
Pendapatan Pajak Penghasilan Fiskal	349.905.982	349.728.807
Pendapatan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah	10.111.755.590.449	8.933.799.207.486
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM)	537.267.909.259.264	480.724.607.483.756

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.444.913.884.758	16.770.346.937.156
Pendapatan BPHTB	32.748.454	1.216.911.547
Pendapatan Cukai	159.588.552.586.225	153.288.149.392.121
Pendapatan Pajak Lainnya	6.629.526.207.843	6.738.475.546.078
Jumlah	1.472.907.964.370.352	1.304.316.269.228.039

Pendapatan Pajak Dalam Negeri mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 terutama pada PPh Migas sebesar Rp14.383.394.707.139, PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp45.580.610.630.856, PPN dan PPnBM sebesar Rp56.543.301.775.508, dan Cukai sebesar Rp6.300.403.194.104. Kenaikan PPh Migas yang cukup signifikan disebabkan harga ICP yang meningkat, dan meningkatnya pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) karena meningkatnya aktivitas ekonomi domestik dan kepatuhan pembayaran PPN oleh WP.

Pertumbuhan Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar 12,93 persen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain membaiknya perekonomian (terutama meningkatnya konsumsi dan impor), serta positifnya kondisi sektoral utama yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan jasa keuangan. Pertumbuhan Pendapatan Pajak Dalam Negeri juga didorong oleh meningkatnya kemampuan memungut pajak sebagai hasil dari meningkatnya basis pajak (dampak kebijakan *Tax Amnesty*) dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta intensifikasi pajak yang berjalan efektif, serta keberhasilan penertiban cukai berisiko tinggi.

Pendapatan Pajak
Perdagangan
Internasional
Rp45,88 triliun

B.2.1.1.2 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi Pendapatan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2018 adalah sebesar Rp45.881.812.780.678 atau 118,56 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp38.700.000.000.000. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2018 lebih besar Rp6.668.238.210.207 atau naik 17 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Bea Masuk	39.116.746.986.751	35.066.181.439.852
Pendapatan Bea Keluar	6.765.065.793.927	4.147.393.130.61
Jumlah	45.881.812.780.678	39.213.574.570.471

Kenaikan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional pada Tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh komoditi utama yang terkena Bea Keluar (ekspor minerba), dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai seperti penyempurnaan penggunaan IT, intensifikasi kebijakan tarif, kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi, dan organisasi pemungutan, serta pemberantasan penyelundupan. Pertumbuhan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional juga didukung oleh meningkatnya volume aktivitas perdagangan internasional (ekspor-impor), peningkatan devisa impor dan peningkatan utilisasi *Free Trade Agreement* (FTA).

PNBP Rp409,32 triliun

B.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP TA 2018 adalah sebesar Rp409.320.239.488.446 atau 148,61 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp275.427.969.415.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2018 lebih besar Rp98.103.985.631.361 atau naik 31,52 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp311.216.253.857.085. Realisasi PNBP berasal dari (i). Pendapatan Sumber Daya Alam; (ii) Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan; (iii) Pendapatan PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

B.2.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Penerimaan SDA Rp180,59 triliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2018 adalah sebesar Rp180.592.649.823.641 atau 174,19 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp103.674.868.751.000. Penerimaan SDA TA 2018 lebih besar Rp69.460.607.409.729 atau naik 62,50 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017(Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	101.486.695.315.900	58.203.042.976.236
Pendapatan Gas Bumi	41.302.551.779.459	23.639.900.993.613
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	30.313.666.621.680	23.763.165.037.383
Pendapatan Kehutanan	4.760.407.698.602	4.101.918.540.911
Pendapatan Perikanan	448.751.885.603	491.033.529.369
Pendapatan Panas Bumi	2.280.576.522.397	932.981.336.400
Jumlah	180.592.649.823.641	111.132.042.413.912

Kenaikan realisasi penerimaan SDA terjadi pada seluruh jenis pendapatan, kecuali Pendapatan Perikanan. Kenaikan signifikan terutama pada pendapatan minyak bumi dan gas bumi yang dipengaruhi oleh rata-rata ICP tahun 2018 yang mencapai 67,5 dolar AS per barel. ICP tahun 2018 ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata ICP tahun 2017, sebesar 51,2 dolar AS per barel maupun asumsi APBN sebesar 48,0 dolar AS per barel. Sedangkan, kenaikan Pendapatan Pertambangan Umum dipengaruhi antara lain oleh membaiknya harga dan kinerja produksi komoditas pertambangan umum.

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Rp45,06 triliun

B.2.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) pada tahun 2018 berupa Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2018 sebesar Rp45.060.521.375.969 atau 100,82 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp44.695.387.920.000. Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2018 ini lebih besar Rp1.156.304.264.296 atau naik 2,63 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017.

Rincian Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan	16.267.751.186.649	12.460.928.189.608
Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan	28.792.770.189.320	31.443.288.922.065
Jumlah	45.060.521.375.969	43.904.217.111.673

Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan sebesar Rp16.267.751.186.649 seluruhnya merupakan Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN. Sedangkan, Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan sebesar Rp28.792.770.189.320 terdiri dari Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN sebesar Rp28.335.119.189.320 dan Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp457.651.000.000.

Naikannya Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terutama disebabkan karena capaian realisasi bagian Laba BUMN perbankan yang mengalami peningkatan sebesar 30,55 persen terhadap realisasi anggaran di tahun 2017. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kinerja BUMN yang secara umum semakin baik khususnya BUMN Perbankan maupun kondisi perekonomian yang mendukung kinerja BUMN.

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2018 tersebut, sebesar 85,98 persen berasal dari 10 BUMN terbesar, yaitu:

	Nama BUMN	Jumlah
1	PT Telkom	8.651.640.277.399
2	PT Pertamina	8.569.790.000.000
3	PT Bank Rakyat Indonesia	7.472.280.892.834
4	PT Bank Mandiri	5.572.714.448.000
5	PT Bank Negara Indonesia	2.859.459.907.905
6	PT Indonesia Asahan Aluminium (Paseo)	1.919.750.000.000
7	PT Jasa Raharja	1.269.902.963.670
8	PT Pegadaian	1.005.367.000.000
9	PT Pupuk Indonesia	768.850.000.000
10	PT Pelabuhan Indonesia II	653.968.051.800
	Total 10 BUMN	38.743.723.541.608

Rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan berupa Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2018 dapat dilihat pada Lampiran I.B.

Pendapatan PNPB
Lainnya Rp128,57
triliun

B.2.1.2.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya TA 2018 adalah sebesar Rp128.574.010.038.218 atau 153,52 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 yaitu sebesar Rp83.753.115.091.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan PNPB Lainnya TA 2018 lebih besar Rp19.739.448.262.666 atau naik 18,14 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017.

Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	22.768.752.720.908	17.395.210.236.393
Pendapatan dari Pemindahantangan BMN	250.827.244.737	196.631.066.809
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	1.575.471.215.636	503.190.153.764
Pendapatan Atas Pengelolaan BMN Dan Kekayaan Negara Dan Pengelola Barang	573.611.868.078	615.775.120.447
Pendapatan Dari Penggunaan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	62.256.481.499	
Pendapatan Penjualan Dari Kegiatan Hulu Migas	20.655.579.279.504	6.979.420.198.806
Pendapatan dan Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.351.576.937.661	1.157.518.727.502
Sub Total	47.238.075.748.023	26.847.745.503.721
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	3.508.128.693.239	1.891.930.718.910
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	801.858.988.566	743.766.318.732
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Grafikasi	710.472.768.619	829.074.665.967
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang	1.253.573.712.907	458.346.658.250
Pendapatan Perizinan	1.566.453.310.352	2.603.827.263.108
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	8.491.555.385.000	9.080.142.986.000
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	876.003.488.818	1.521.505.527.406
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, Dan Standardisasi	560.109.228.431	
Sub Total	17.768.155.575.932	17.128.594.138.373
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	3.849.996.353.287	3.692.049.439.026
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat Dan Makanan	179.606.380.001	-
Pendapatan Jasa Karantina	344.312.823.136	-
Pendapatan Jasa Agraria	2.177.144.211.554	2.318.870.035.242
Pendapatan Jasa Keagamaan	869.992.567.168	796.259.570.822
Sub Total	7.421.052.335.146	6.807.179.045.090
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	4.091.137.740.960	4.484.816.582.419
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	283.378.471.210	
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, Dan Pengembangan Iptek	383.125.471.424	102.755.561.086
Pendapatan Sejarah Dan Kebudayaan	6.252.526.140	15.889.100.893
Sub Total	4.763.894.209.734	4.603.461.244.398
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.319.589.621.391	
Pendapatan Jasa Komunikasi Dan Informatika	17.446.455.866.510	17.578.763.121.175
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	184.441.567.495	60.897.960.246
Sub Total	23.950.487.055.396	17.639.681.081.421

Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kesehatan	204.088.090.073	158.901.986.453
Pendapatan Jasa Kelautan Dan Perikanan	21.799.455.591	4.173.205.256.034
Pendapatan Jasa Lainnya	684.168.810.068	2.521.751.745.094
Sub Total	910.056.355.732	6.853.858.987.581
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	1.656.180.667.138	1.535.360.256.560
Pendapatan Gain On Bond Redemption		6.497.500.000
Pendapatan Premium Atas Obligasi Negara	2.282.759.533.200	6.110.092.446.400
Pendapatan Imbat Jasa Perjanjian Pemerintah, Selisih Harga SBN, Dan Fee Lainnya Atas Transaksi SBN	94.901.097.815	69.108.954.346
Pendapatan dari Selisih Kurs	242.930.299.187	23.239.529.318
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	287.720.782.980	264.409.379.457
Pendapatan Atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau Atas Penempatan Uang Negara	6.054.091.902.483	5.041.464.684.573
Pendapatan Biaya Pengalihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	481.447.093.712	412.785.656.940
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	53.238.480.276	40.120.604.821
Sub Total	11.153.269.856.791	13.503.079.012.415
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	540.373.238.968	565.766.276.076
Pendapatan Denda II	65.693.449.290	169.770.738.744
Pendapatan Denda III	5.657.999.395	1.730.891.600
Sub Total	611.724.687.653	737.267.906.420
Pendapatan Lain-lain		
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	6.467.615.893.218	12.363.242.225.359
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	261.161.535.102	221.236.016.033
Pendapatan Setoran Sisa Uang Dari Penitipan	33.306.961.074	14.368.455.221
Pendapatan Lain-lain I	7.704.637.733.401	
Pendapatan Lain-lain II	234.908.790.827	414.745.107.318
Pendapatan dari surplus Otoritas Jasa Keuangan	55.663.300.189	
Pendapatan dari surplus Bank Indonesia	-	1.700.103.052.202
Sub Total	14.757.294.213.811	14.713.694.856.193
Jumlah PNBSP Lainnya	128.574.010.038.218	108.834.561.775.552

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2018 meningkat dibandingkan TA 2017 terutama karena peningkatan dari Pendapatan Penjualan Dari Kegiatan Hulu Migas. Peningkatan PNBSP Lainnya juga terutama disebabkan adanya kenaikan realisasi Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang khususnya penjualan hasil tambang batu bara, adanya peningkatan Pendapatan dari Pemanfaatan BMN, dan Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum.

B.2.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan BLU
Rp55,09 triliun

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2018 adalah sebesar Rp55.093.058.250.618 atau 127,22 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 yaitu sebesar Rp43.304.597.653.000. Realisasi Pendapatan BLU TA 2018 lebih besar Rp7.747.625.694.670 atau naik 16,36 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017. Realisasi Pendapatan BLU adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	28.739.609.164.736	25.499.135.736.497
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	1.507.220.557.604	1.173.415.343.107
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	17.622.794.124.394	17.327.970.928.406
Pendapatan dan Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	944.213.288.248	250.097.458.163
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	48.813.837.134.982	44.250.619.466.173
Pendapatan Hibah BLU	90.948.165.044	174.211.852.608
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	1.556.582.772.589	578.904.594.476
Pendapatan dari Alokasi APBN	235.873.713.666	-
Pendapatan BLU Lainnya	4.395.816.464.337	2.341.696.642.691
Jumlah	55.093.058.250.618	47.345.432.555.948

Pendapatan BLU melebihi target APBN TA 2018 dan meningkat dibanding tahun 2017 terutama karena kinerja pendapatan BLU yang semakin baik berupa peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU, penambahan jenis layanan BLU karena permintaan masyarakat, optimalisasi aset BLU, pencatatan pendapatan BLU yang semakin baik, dan terdapat BLU yang baru ditetapkan pada tahun 2018.

*Penerimaan Hibah
Rp15,56 triliun*

B.2.1.3 Penerimaan Hibah

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp15.564.860.239.320 atau 1.300,47 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1.196.865.400.000. Penerimaan Hibah TA 2018 lebih besar Rp 3.935.045.236.830 atau naik 33,84 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang	13.178.185.591.822	7.410.435.627.384
Total Pendapatan Hibah Dalam Negeri	13.178.185.591.822	7.410.435.627.384
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	418.374.595.589	530.076.024.609
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	1.968.300.051.909	3.689.303.350.497
Total Pendapatan Hibah Luar Negeri	2.386.674.647.498	4.219.379.375.106
Jumlah Penerimaan Hibah	15.564.860.239.320	11.629.815.002.490

Realisasi Penerimaan Hibah mencapai 1.300,47 persen dikarenakan terdapat hibah langsung yang diterima oleh K/L tidak direncanakan dalam APBN TA 2018. Hibah Langsung Dalam Negeri terutama dipengaruhi oleh adanya hibah langsung dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2018. Selain itu, kesadaran K/L untuk melaporkan Hibah langsung yang diterima juga semakin membaik.

Untuk realisasi Hibah Luar Negeri Terencana sebesar Rp418.374.595.589 yang berarti tidak mencapai target APBN sebesar Rp1.196.865.400.000 antara lain karena terdapat beberapa Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah belum merealisasikan kegiatan yang dibiayai dari hibah di tahun 2018.

*Belanja Negara
Rp2.213,11 triliun*

B.2.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara TA 2018 adalah sebesar Rp2.213.117.817.284.996 atau 99,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp2.220.656.966.577.000. Belanja Negara TA 2018 lebih besar Rp205.766.007.078.110 atau naik 10,25 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp2.007.351.810.206.886. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

*Belanja Pemerintah
Pusat Rp1.455,32
triliun*

B.2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2018 adalah sebesar Rp1.455.324.879.227.617 atau 100,06 persen dari APBN TA 2018 sebesar Rp1.454.494.390.020.000. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2018 lebih besar Rp189.965.450.482.098 atau naik 15,01 persen dari Realisasi TA 2017 sebesar Rp1.265.359.428.745.519.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat melampaui dari Pagu APBN TA 2018 dikarenakan terdapat perubahan/revisi Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sepanjang tahun 2018 berupa penambahan pagu anggaran pada DIPA K/L dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU APBN 2018 yaitu dalam Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 35. Ketentuan lebih mengenai Revisi DIPA di atur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan Revisi DIPA sepanjang tahun 2018, total pagu DIPA untuk Belanja Pemerintah Pusat bertambah dari Pagu APBN yang semula Rp1.454.494.390.020.000 menjadi sebesar Rp1.575.193.377.332.000. Penambahan/Revisi Pagu DIPA pada K/L dan BA BUN sepanjang Tahun Anggaran 2018 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan pagu untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum dan/atau penggunaan Saldo BLU dari tahun sebelumnya;
2. Penggunaan Anggaran Belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di atas Pagu APBN;
3. Revisi Anggaran berupa lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri dan/atau Pinjaman Dalam Negeri/Hibah Dalam Negeri;
4. Penambahan Hibah Luar Negeri Langsung maupun Hibah Dalam Negeri Langsung yang diterima setelah UU APBN TA 2018 ditetapkan;
5. Penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan /proyek pada K/L
6. Pergeseran dari Bagian Anggaran BUN 999,08 yang menambah Pagu DIPA K/L dan BA BUN (pergeseran dari BA BUN 999,08 juga menambah Pagu per Jenis Belanja di K/L dan BA BUN sesuai karakteristik Belanja);

- 7. Penambahan pagu untuk menyesuaikan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dibandingkan dengan asumsi dalam UU APBN 2018 dalam rangka pembayaran bunga utang, serta untuk pembayaran discount SUN lebih tinggi dikarenakan kondisi perekonomian global yang mempengaruhi yield SUN di pasar keuangan; dan
- 8. Penambahan Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi yang disesuaikan dengan kebutuhan realisasi berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar Rupiah.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

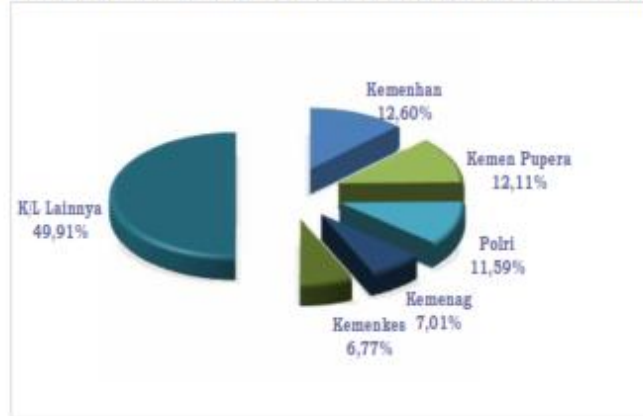
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/BA

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2018 terdiri atas Belanja pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp846.561.639.143.821 dan Belanja pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp608.763.240.084.018.

Perbedaan pencatatan Total Realisasi Belanja Pemerintah Pusat antara BUN dengan K/L secara neto adalah sebesar minus Rp222.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2018 dapat dilihat pada Grafik 21.



Grafik 21. Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2018

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam Lampiran 2.A.

*Belanja Pemerintah
Pusat menurut
Fungsi*

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

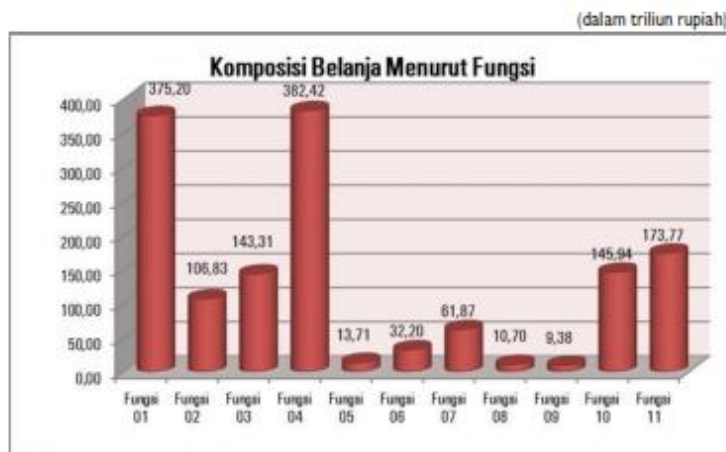
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi kependudukan dan perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada TA 2018 dan 2017 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

**Tabel 15. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
TA 2018 dan TA 2017**

Kode	Uraian Fungsi	Anggaran	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
01	Pelayanan Umum	435.870.738.404.000	375.196.058.527.405	307.147.187.148.911
02	Pertahanan	107.829.073.062.000	106.832.343.039.117	117.506.617.827.291
03	Keterlibatan dan Keamanan	135.992.740.817.000	143.305.834.551.443	135.748.091.293.871
04	Ekonomi	335.488.556.325.000	382.420.938.264.524	307.787.488.810.661
05	Lingkungan Hidup	15.680.368.482.000	13.709.647.546.748	10.613.749.846.511
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	31.508.367.660.000	32.198.021.305.359	27.277.374.331.721
07	Kesehatan	65.066.241.944.000	61.869.740.305.698	57.225.069.767.631
08	Pariwisata dan Budaya	7.456.033.221.000	10.699.961.811.579	5.770.640.693.431
09	Agama	9.473.281.586.000	9.379.001.902.213	8.870.392.959.211
10	Pendidikan*	147.571.689.561.000	145.941.716.362.457	138.507.296.388.951
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	162.557.298.958.000	173.771.615.611.074	148.905.519.677.581
00	Tidak ada fungsi**			(294)
	Total	1.454.494.390.020.000	1.455.324.879.227.617	1.265.359.428.745.511

* Anggaran pada fungsi Pendidikan tersebut di atas adalah anggaran yang dialokasikan pada Belanja Pemerintah Pusat, tidak termasuk belanja pendidikan yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah. Total Anggaran Pendidikan adalah sebesar Rp441.131.393.403.000.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2018 terlihat pada Grafik 22.



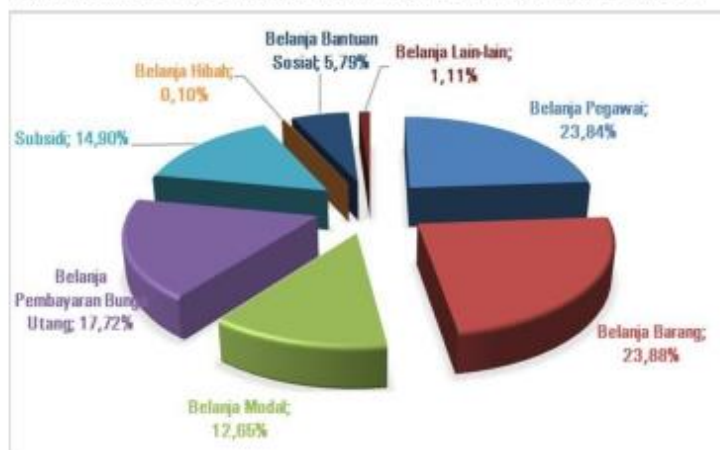
Grafik 22. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2018

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja dapat dilihat dalam Lampiran 2.B.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 23.



Grafik 23. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2018

*Belanja Pegawai
Rp346,89 triliun*

B.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 adalah sebesar Rp346.890.764.906.966 atau 94,86 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp365.691.526.092.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2018 lebih besar Rp34.162.008.474.514 atau naik 10,92 persen dari realisasi TA 2017. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	88.761.414.586.45	86.930.689.954.783
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	59.259.965.936.71	55.598.387.820.021
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	687.701.259.485	632.908.371.807
Belanja Gaji Dokter PTT	143.441.868.160	349.074.423.545
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	7.815.199.731.645	9.921.891.320.235
Belanja Honorarium	1.715.499.887.178	1.424.831.461.810
Belanja Lembur	736.752.950.627	726.231.100.431
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	71.843.429.192.342	54.327.231.140.342
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	110.214.811.345.869	97.518.558.624.900
Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai	5.712.498.850.571	5.299.056.321.310
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	49.297.918	(104.106.732)
Jumlah	346.890.764.906.966	312.728.756.432.482

Realisasi Belanja Pegawai yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terutama disebabkan karena adanya penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai/ASN/TNI/POLRI di Kementerian Negara/Lembaga serta kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) sejalan dengan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan upaya menjaga tingkat kesejahteraan aparatur Negara. Pada tahun 2018, THR juga diberikan kepada pensiunan.

B.2.2.1.2 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp347,46 triliun*

Realisasi Belanja Barang TA 2018 adalah sebesar Rp347.468.335.110.569 atau 102,16 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp340.130.197.863.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2018 lebih besar Rp6.009.201.765.977 atau naik 19,22 persen dari Realisasi TA 2017. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Barang Operasional	43.230.122.239.02	35.348.784.715.218
Belanja Barang Non Operasional	76.260.723.012.60	54.833.055.287.147
Belanja Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah MCC	11.639.419.655	7.170.705.049
Belanja Kontribusi	317.058.748.451	191.859.442.958
Belanja Barang Persediaan	18.280.492.782.315	14.956.683.394.699
Belanja Jasa	35.723.270.208.473	29.604.088.264.675
Belanja Pemeliharaan	38.181.109.225.774	43.501.069.034.235
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.487.592.947.242	31.288.719.510.943
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.196.165.038.161	2.839.153.746.638
Belanja Barang BLU	36.718.290.173.03	36.570.860.054.466
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	30.103.540.060.344	23.035.723.226.413
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	1.260.615.823.049	28.864.014.676

Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	24.697.784.830.577	19.251.191.596.011
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/latau mantan Wakil Presiden	-	1.693.210.000
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	(69.398.142)	217.141.464
Jumlah	347.468.335.110.569	291.459.133.344.592

Belanja Barang BLU sebesar Rp36.718.290.173.038 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan	10.130.261.968.504	8.834.131.141.188
Belanja Barang	4.525.771.817.413	7.012.276.581.189
Belanja Jasa	4.925.312.401.378	3.242.509.237.465
Belanja Pemeliharaan	1.047.849.457.396	1.001.316.285.880
Belanja Perjalanan	1.101.344.741.454	779.580.000.133
Belanja atas Pengelolaan <i>Endowment Fund</i>	2.154.624.925.372	2.525.371.133.860
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	6.276.885.963.449	10.620.361.661.301
Belanja Ketersediaan Layanan BLU	251.835.550.050	-
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	3.046.747.996.648	2.517.932.755.999
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	2.137.863.721.756	14.193.974.995
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	10.452.851.992	2.481.628.744
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU	277.911.800	5.400.000
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	35.549.375.037	
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	14.238.476.161	
Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU	1.137.606.250	
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	1.055.288.080.965	20.700.253.712
Belanja Barang dan Jasa BLU Kepada BLU Lain	2.847.327.413	
Jumlah	36.718.290.173.038	36.570.860.054.466

Belanja gaji dan tunjangan yang didanai dari pendapatan BLU, sesuai ketentuan belanja tersebut dimasukkan sebagai Belanja Barang.

Kinerja penyerapan Belanja Barang tahun 2018 yang lebih baik dan meningkat dibandingkan tahun 2017 terutama disebabkan oleh kinerja pelaksanaan anggaran yang semakin baik di Satuan Kerja Pemerintah, kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Belanja, dan meningkatnya Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Kenaikan realisasi Belanja Barang terbesar ada pada belanja barang non operasional terutama digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2018.

Realisasi Belanja Barang TA 2018 yang mencapai 102,16 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018, terutama disebabkan adanya penambahan pagu Belanja BLU/Revisi DIPA karena adanya hibah langsung berupa uang yang diterima K/L, dan terkait penambahan pagu DIPA Satuan Kerja BLU untuk Belanja Barang BLU, serta penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di atas Pagu APBN.

*Belanja Modal
Rp184,12 triliun*

B.2.2.1.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2018 adalah sebesar Rp184.127.627.500.274 atau 90,31 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp203.879.406.594.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2018 lebih kecil Rp24.529.042.735.572 atau turun 11,76 persen dari Realisasi TA 2017. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Modal Tanah	3.504.541.754.056	3.420.693.140.383
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.379.078.527.781	89.603.303.025.072
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.165.890.294.249	27.821.932.251.082
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	84.370.254.579.143	80.442.482.866.724
Belanja Modal Lainnya	3.074.437.667.301	3.420.971.446.117
Belanja Modal BLU	4.633.404.577.742	3.947.412.016.494
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	20.100.002	(124.510.026)
Jumlah	184.127.627.500.274	208.656.670.235.846

Belanja Modal BLU Rp4.633.404.577.742 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Modal Tanah - BLU	162.541.496.729	79.980.955.957
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	2.057.924.330.154	1.810.482.376.417
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	2.123.179.713.015	1.817.990.201.300
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	164.805.262.970	108.698.438.139
Belanja Modal Lainnya - BLU	124.953.774.874	130.260.044.681
Jumlah	4.633.404.577.742	3.947.412.016.494

Kinerja penyerapan belanja modal tahun 2018 yang mencapai 90,31 persen dari pagu APBN TA 2018 terutama dipengaruhi oleh realisasi Belanja Modal pada tiga Kementerian/Lembaga dengan alokasi Belanja Modal terbesar yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (realisasi sebesar Rp70.232.936.293.010 dari Pagu APBN 2018 sebesar Rp75.825.196.666.000), Kementerian Pertahanan (realisasi sebesar Rp19.141.896.795.971 dari Pagu APBN 2018 sebesar Rp30.063.812.410.000), dan Kepolisian RI (realisasi sebesar Rp27.959.844.574.652 dari Pagu APBN 2018 sebesar Rp28.913.241.668.000). Realisasi belanja modal pada tiga kementerian tersebut antara lain dipengaruhi oleh belum terbitnya SP3 belanja modal yang bersumber dari Pinjaman luar negeri, dan terdapat kegiatan pengadaan alutsista pada Kementerian Pertahanan yang tidak direalisasikan pada tahun 2018.

B.2.2.1.4 Belanja Pembayaran Bunga Utang

*Pembayaran Bunga
Utang Rp257,95
triliun*

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2018 adalah sebesar Rp257.952.028.141.279 atau 108,11 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp238.607.121.370.000. Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2018 lebih besar Rp41.384.005.619.934 atau naik 19,11 persen dari Realisasi TA 2017 sebesar Rp216.568.022.521.345.

Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri – Jangka Panjang	19.519.914.054.797	16.590.693.239.260
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang	390.855.637.193	425.469.471.321
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Dalam Negeri	178.387.166.750.674	160.182.860.414.728
Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara	35.901.375.910.034	30.225.713.200.512
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Utang Negara	18.986.695.721.500	7.212.316.604.950
Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara	2.787.500.000	83.757.200.000
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara	4.763.232.567.081	1.847.212.390.574
Jumlah	257.952.028.141.279	216.568.022.521.345

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2018 yang mencapai 108,11 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 antara lain disebabkan penambahan pagu untuk menyesuaikan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dibandingkan dengan asumsi dalam UU APBN 2018. Selain faktor nilai tukar rupiah, pembayaran bunga utang khususnya *discount* SUN lebih tinggi dikarenakan kondisi perekonomian global yang mempengaruhi *yield* SUN di pasar keuangan. Pelampauan realisasi belanja untuk pembayaran bunga ini sesuai dengan Pasal 35 UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, karena pemerintah dapat melakukan pembayaran Bunga Utang melebihi pagu UU APBN TA 2018.

Belanja untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017 terutama pada Belanja Pembayaran Bunga Utang DN–Jangka Panjang berupa Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah, Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas, Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Dalam Negeri, dan Belanja Pembayaran *Discount* SUN Dalam Negeri.

B.2.2.1.5 Belanja Subsidi

Subsidi Rp216,88 triliun

Realisasi Belanja Subsidi TA 2018 adalah sebesar Rp216.883.304.115.301 atau 138,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp156.228.125.107.000.

Realisasi Belanja Subsidi TA 2018 lebih besar Rp50.482.200.986.123 atau 30,34 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp166.401.103.129.178. Rincian realisasi subsidi adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Subsidi Minyak Solar	35.500.058.608.682	6.578.231.530.501
Belanja Subsidi Minyak Tanah	3.370.760.456.883	1.718.878.334.674
Belanja Subsidi Elpiji	58.144.013.468.021	38.749.622.596.141
Belanja Subsidi Pangan	-	19.500.250.069.873
Belanja Subsidi Listrik	56.507.587.695.000	50.595.347.740.000
Belanja Subsidi Benih	-	764.685.996.611
Belanja Subsidi Pupuk	33.612.732.444.040	28.840.416.670.054
Belanja Subsidi PPh – DTP	10.111.762.370.778	8.933.666.779.147
Belanja Subsidi BM – DTP	370.614.635.480	280.946.213.728
Belanja Subsidi PT KAI	2.145.056.042.843	2.066.701.261.556
Belanja Subsidi PT PELNI	1.932.549.353.375	2.106.212.269.638
Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya	155.927.797.800	136.812.799.346
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	952.643.000.000	826.304.000.000
Belanja Subsidi Bunga KPR	2.285.851.639.491	1.472.174.173.954
Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	30.840.009.278	77.345.682.020
Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	52.374.490.735	126.295.726.866
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	11.588.571.574.697	3.172.581.081.357
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat	116.443.541.536	414.349.387.000
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	5.206.072.509	6.324.279.981
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	185.015.802	145.227.180
Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	125.898.351	33.811.309.551
Jumlah	216.883.304.115.301	166.401.103.129.178

Kenaikan Realisasi Belanja Subsidi pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 terutama kenaikan pada Subsidi Minyak Solar, Subsidi Elpiji, Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk dan Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya. Peningkatan Belanja Subsidi Elpiji dikarenakan kenaikan harga LPG dan kenaikan volume penyalurannya. Peningkatan Belanja Subsidi Minyak Solar dikarenakan Pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian subsidi tetap solar sebagai upaya untuk menyerap risiko kenaikan harga yang dapat menurunkan daya beli masyarakat dan pengendalian tingkat inflasi, serta adanya pembayaran utang subsidi tahun 2016.

Realisasi Belanja Subsidi TA 2018 mencapai 138,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 terutama dikarenakan adanya penambahan Pagu DIPA TA 2018 untuk Subsidi Energi, Pupuk, dan PSO PT Pelni yang merupakan pergeseran pagu dari BA 999.08 ke BA 999.07 untuk penyelesaian kurang bayar Subsidi/PSO Tahun Anggaran sebelumnya. Terdapat penyesuaian pagu subsidi energi (penambahan pada bulan Oktober sebesar Rp45.330.165.941.000, dan pengurangan sebesar Rp3.278.141.677.000) untuk menyesuaikan adanya perubahan parameter, nilai tukar rupiah, perubahan subsidi tetap minyak solar dari Rp500 menjadi Rp2.000, dan perubahan harga minyak mentah Indonesia.

Hal ini sesuai dengan UU APBN 2018 yaitu Pasal 16 ayat 3 yang berbunyi bahwa belanja subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak Indonesia (ICP), dan atau nilai tukar rupiah.

Belanja Hibah
Rp1,52 triliun

B.2.2.1.6 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2018 adalah sebesar Rp1.520.560.988.285 atau berarti 104,09 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1.460.845.703.000.

Realisasi Belanja Hibah TA 2018 lebih kecil Rp3.925.106.270.871 atau turun 72,08 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp5.445.667.259.156. Belanja hibah tersebut terdiri atas belanja hibah kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp1.465.989.051.764 dan belanja hibah kepada luar negeri sebesar Rp54.481.623.000 serta belanja hibah lainnya sebesar Rp90.313.521. Rincian realisasi belanja Hibah untuk Pemerintah Luar Negeri antara lain digunakan untuk Pembangunan Indonesia Islamic Center di Afganistan sebesar Rp16.176.873.000, restorasi pasca bencana alam gempa bumi di Papua Nugini sebesar Rp7.163.000.000, dan Hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Fiji (pembelian alat pertanian) sebesar Rp5.800.000.000, dan kepada Pemerintah Guinea Bissau sebesar Rp25.341.750.000 untuk memberangkatkan 500 jamaah haji miskin di Guinea Bissau, serta Bank Commission sebesar Rp90.313.521.

Rincian realisasi belanja Hibah untuk Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Proyek/Kegiatan	Jumlah (Rp)
Pembangunan MRT	41.283.071.898
Proyek Air Minum	18.974.000.000
Water Resources and Irrigation Sector Management Project-APL2 (WISMP-2)	26.378.604.831
Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi	5.949.000.000
Hibah Flood Management in Selected River Basins (FSMRB)	1.263.700.590
Hibah Biodiversity Conservation and Climate Protection in Gunung Leuser Ecosystem	1.386.323.600
Hibah City Sewerage Project/Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) Pelambang	6.933.888.740
Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)	35.196.147.102
Hibah Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project	29.526.539.891
Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	602.333.076.000
Nationwide Water Hibah Program	643.675.520.612
Hibah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	53.089.178.500
Jumlah	1.465.989.051.764

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2018 yang mencapai 104,09 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 disebabkan adanya penambahan pagu yang merupakan pergeseran anggaran dari BA 999.08 dalam rangka pemberian Hibah Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bencana kepada Pemerintah Daerah, dan Hibah keluar negeri untuk negara Afganistan, Fiji, Guinea Bissau, dan Papua Nugini.

Belanja Bantuan
Sosial Rp84,31
triliun

B.2.2.1.7 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 adalah sebesar Rp84.318.412.919.513 atau 103,76 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp81.259.761.570.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 lebih besar Rp29.021.196.078.158 atau naik 52,48 persen dari realisasi TA 2017. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	262.639.545.303	330.347.968.057
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	36.130.093.800.799	35.809.212.856.984
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	2.888.119.938.473	2.665.538.268.830
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	19.077.821.483.801	12.716.131.609.642
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	19.131.121.934.000	1.998.168.889.240
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	6.828.616.217.137	1.777.805.773.602
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	-	11.475.000
Jumlah	84.318.412.919.513	55.297.216.841.355

Kenaikan realisasi Belanja Bantuan Sosial di tahun 2018 terutama disebabkan karena kebijakan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Belanja Bantuan Sosial digunakan antara lain untuk peningkatan Bantuan Pangan Non Tunai (semula disalurkan dalam bentuk Beras Sejahtera) untuk 15,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018, dan peningkatan target Program Keluarga Harapan (PKH) semula dari 6 juta KPM meningkat menjadi 10 juta KPM pada tahun 2018. Peningkatan Belanja Bantuan Sosial juga signifikan untuk penanggulangan bencana alam khususnya Bencana di NTB dan Sulawesi Tengah. Pemerintah juga konsisten dalam upaya simplifikasi pertanggungjawaban terutama pada penyaluran bantuan sosial sehingga dapat meningkatkan kinerja Belanja Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp84.318.412.919.513 atau 103,76 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp81.259.761.570.000 disebabkan adanya pergeseran belanja dari BA 999.08 Belanja Lain-Lain menjadi Belanja Bantuan Sosial di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

B.2.2.1.B Belanja Lain-Lain

*Belanja Lain-lain
Rp16,16 triliun*

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2018 adalah sebesar Rp16.163.845.545.430 atau 24,04 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp67.237.405.721.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2018 lebih besar Rp7.360.986.563.835 atau naik 83,62 persen dari realisasi TA 2017.

Rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	2.405.131.757.000	2.499.999.996.933
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	528.513.624.711	28.578.926.000
Belanja Lain-lain BUN	10.852.819.577.533	3.975.569.242.950
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	22.826.732.841	-
Belanja Lain-lain Lainnya	2.354.553.853.345	2.298.710.815.712
Jumlah	16.163.845.545.430	8.802.858.981.595

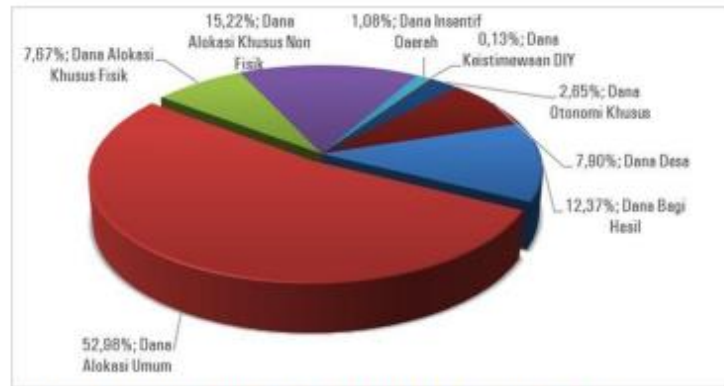
Realisasi Belanja Lain-lain tidak mencapai target APBN TA 2018 terutama karena terdapat Pagu Anggaran Belanja Lain-lain yang direalokasi ke K/L (melalui mekanisme Surat Alokasi Bagian Anggaran (SABA)), dan relokasi ke BA BUN (melalui mekanisme Surat Penetapan Pergeseran (SPP)) sesuai dengan karakteristik belanjanya, dan pagu pada APBN 2018 tidak seluruhnya dialokasikan dalam DIPA yang terbit pada tahun 2018.

B.2.2.2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp757,79triliun

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp757.792.938.057.379 atau 98,91 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp766.162.576.557.000. Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari Transfer ke Daerah yang meliputi (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus, serta Dana Desa. Dana Desa merupakan amanat UU tentang Desa dan pertama kalinya disalurkan oleh Pemerintah Pusat Pada Tahun 2015.

Komposisi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018 disajikan pada Grafik 24.



Grafik 24. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018

Rincian penyaluran neto DBH, DAU, dan Dana Penyesuaian dapat dilihat pada Lampiran 3A.

B.2.2.2.1 Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah Rp697,93 triliun

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2018 adalah sebesar Rp697.933.529.448.104 atau 98,83 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp706.162.576.557.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2018 ini lebih besar Rp15.707.725.514.140 atau naik 2,30 persen dari Realisasi TA 2017. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus.

B.2.2.2.1.1 Dana Perimbangan

*Dana Perimbangan
Rp668,64 triliun*

Realisasi Dana Perimbangan TA 2018 adalah sebesar Rp668.643.196.262.104 atau 98,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp676.602.993.371.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2018 ini lebih besar Rp14.160.684.918.140 atau naik 2,16 persen dari realisasi TA 2017. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3E.

*Dana Transfer Umum
Rp495,19 triliun*

B.2.2.2.1.1.1 Dana Transfer Umum

Realisasi Dana Transfer Umum TA 2018 adalah sebesar Rp495.193.618.043.420 atau 100,91 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp490.714.921.663.000. Hal ini berarti realisasi Dana Transfer Umum TA 2018 lebih besar Rp8.379.106.152.783 atau naik sebesar 1,72 persen dibandingkan TA 2017.

B.2.2.2.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil

DBH Rp93,70 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2018 adalah sebesar Rp93.704.038.394.420 atau 105,02 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp89.225.342.014.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2018 ini lebih besar Rp5.471.841.251.783 atau naik 6,2 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp88.232.197.142.637.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Dana Bagi Hasil Pajak		
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	29.991.687.612.756	34.312.377.870.061
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	15.703.491.292.037	19.356.272.471.999
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	45.695.178.904.793	53.668.650.342.060
Dana Bagi Hasil Cukai	2.922.191.165.245	2.921.873.779.440
Dana Bagi Hasil SDA		
Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	13.265.216.482.401	8.191.122.864.049
Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi	9.210.412.221.749	8.442.353.752.961
Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum	19.807.904.298.240	11.835.084.190.433
Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Panas Bumi	832.936.590.394	970.633.323.538
Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan	1.612.576.032.153	1.820.962.826.750
Dana Bagi Hasil Perikanan	357.622.699.445	381.516.063.406
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	45.086.668.324.382	31.641.673.021.137
Total Dana Bagi Hasil	93.704.038.394.420	88.232.197.142.637

Realisasi Dana Bagi Hasil yang lebih besar dari anggarannya terutama disebabkan oleh pembayaran atas kurang bayar DBH tahun anggaran sebelumnya, yang belum dianggarkan dalam APBN TA 2018. Penambahan pagu anggaran DBH berasal dari pergeseran BA 999.08 ke BA 999.05. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu kenaikan DBH sebesar Rp5.471.841.251.783 terutama disebabkan karena kenaikan pada DBH Minyak Bumi sebesar Rp5.074.093.618.352 dan DBH SDA Pertambangan Umum sebesar Rp7.972.820.107.807. Rincian realisasi Dana Bagi Hasil disajikan pada Lampiran 3B, 3C, dan 3D.

DAU Rp401,48 triliun

B.2.2.2.1.1.1.2 Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2018 adalah sebesar Rp401.489.579.649.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp401.489.579.649.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2018 ini lebih besar Rp2.907.264.901.000 atau naik 0,73 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp398.582.314.748.000.

Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan pada data dasar perhitungan DAU. Penggunaan formula tersebut menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Alokasi DAU tahun 2018 meningkat sebesar Rp2.907.264.901.000 karena berdasarkan perhitungan 28,7 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto pada APBN TA 2018.

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3E.

Dana Transfer Khusus Rp173,44 triliun

B.2.2.2.1.1.2 Dana Transfer Khusus

Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2018 adalah sebesar Rp173.449.578.218.684 atau 93,31 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp185.888.071.708.000. Hal ini berarti realisasi Dana Transfer Khusus TA 2018 ini lebih besar Rp5.781.578.765.357 atau naik 3,45 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp167.667.999.453.327.

DAK Fisik Rp58,14 triliun

B.2.2.2.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 adalah sebesar Rp58.149.298.269.245 atau 93,13 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp62.436.262.908.000. Hal ini berarti realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2018 ini lebih kecil Rp3.954.931.985.107 atau menurun 6,37 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp62.104.230.254.352.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan usulan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Realisasi DAK Fisik Tahun 2018 meliputi DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah, dan DAK Afirmasi dan Tambahan DAK Fisik dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
DAK Reguler	29.411.961.830.062	17.631.735.799.034
DAK Infrastruktur Publik Daerah	22.482.775.199.874	30.593.209.199.748
DAK Afirmasi	6.254.561.239.309	2.859.365.226.598
Tambahan DAK Fisik	-	11.019.920.028.970
Jumlah DAK Fisik	58.149.298.269.245	62.104.230.254.352

Penyaluran DAK Fisik sebesar Rp58.149.298.269.245 atau 93,13% dari APBN 2018 dikarenakan adanya penyesuaian penyaluran DAK Fisik Tahap III dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan berdasarkan daftar kontrak yg telah disampaikan pada penyaluran Tahap I dan terdapat beberapa Pemda yang tidak 100% memenuhi persyaratan penyaluran DAK Fisik. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 pada tahun 2018 tidak dialokasikan Tambahan DAK Fisik.

DAK Non Fisik
Rp115,3 triliun

B.2.2.2.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2018 adalah sebesar Rp115.300.279.949.439 atau 93,4 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp123.451.808.800.000. Hal ini berarti realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2018 ini lebih besar Rp9.736.510.750.464 atau naik 9,22 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp105.563.769.198.975. Rincian realisasi DAK Non Fisik adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	55.016.720.212.33	49.929.771.976.07
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.727.102.404.861	1.403.689.814.100
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	588.007.130.574	942.916.401.139
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	44.367.351.931.00	43.545.891.060.22
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	7.454.358.890.915	5.407.224.385.828
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.753.419.417.979	245.107.978.781
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	92.221.616.897	90.237.480.533
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	745.193.742.984	750.000.000.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	3.555.904.601.891	3.248.930.102.292
Jumlah	115.300.279.949.439	105.563.769.198.975

Penyaluran DAK Non Fisik sebesar Rp115.300.279.949.439 atau 93,40% dari APBN 2018 disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: terdapat beberapa Pemda yang tidak 100% memenuhi persyaratan penyaluran DAK Non Fisik, pemanfaatan sisa dana di kas daerah, perubahan status guru penerima TPG (pensiun, beralih ke jabatan struktural/fungsional lain) dan tambahan penghasilan (Tamsil) guru yang belum memperoleh sertifikasi menjadi penerima TPG, dan menurunnya jumlah sasaran penerima BOS, khususnya pada jenjang SD.

Realisasi DAK Non Fisik pada TA 2018 mengalami peningkatan Rp9.736.510.750.464 atau 9,22%, terutama disebabkan karena kenaikan realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp5.086.948.236.255, dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp2.047.134.505.087, dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp1.508.311.439.198.

B.2.2.2.1.2 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah
Rp8,23triliun

Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2018 adalah sebesar Rp8.230.750.000.000 atau 96,83 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp8.500.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2017, realisasi Dana Insentif Daerah TA 2018 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp730.750.000.000 dari sebelumnya sebesar Rp7.500.000.000.000 atau naik 9,74 persen dikarenakan terdapat penambahan daerah yang memenuhi kriteria mendapat Dana Insentif Daerah.

Peningkatan realisasi Dana Insentif Daerah terutama untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Rincian realisasi Dana Insentif Daerah disajikan pada Lampiran 3F.

B.2.2.2.1.3 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

*Dana Keistimewaan
DIY Rp1triliun*

Realisasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) TA 2018 adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1.000.000.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2018 lebih besar Rp200.000.000.000 dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp800.000.000.000 atau naik 25 persen. Meningkatnya realisasi ini sesuai dengan kenaikan alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan naiknya kebutuhan pendanaan penyelenggaraan keistimewaan DIY.

B.2.2.2.1.4 Dana Otonomi Khusus

*Dana Otonomi
Khusus Rp20,05
triliun*

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2018 adalah sebesar Rp20.059.583.186.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp20.059.583.186.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2018 ini lebih besar Rp616.290.596.000 atau naik 3,17 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp19.443.292.590.000.

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Rincian realisasi Dana Otonomi Khusus adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	8.029.791.593.000	7.971.646.295.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.620.854.115.000	5.580.152.407.000
Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.400.000.000.000	2.625.000.000.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.408.937.478.000	2.391.493.888.000
Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.600.000.000.000	875.000.000.000
Jumlah	20.059.583.186.000	19.443.292.590.000

Peningkatan realisasi Dana Otonomi Khusus dikarenakan adanya kenaikan pagu Dana Otonomi Khusus sebagai dampak dari kenaikan pagu DAU TA 2018 dibanding tahun sebelumnya, dan terdapat kenaikan dana tambahan infrastruktur untuk Papua Barat.

B.2.2.2.2 Dana Desa

*Dana Desa
Rp59,85 triliun*

Realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 59.859.408.609.275 atau 99,77 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp60.000.000.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Desa TA 2018 ini lebih besar Rp92.831.081.872 atau naik 0,16 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp59.766.577.527.403. Pengalokasian Dana Desa merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa pertama kalinya dialokasikan pada APBN TA 2015.

Peningkatan realisasi Dana Desa pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 terutama karena sesuai dengan arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyerapan Dana Desa. Dana Desa TA 2018 tersebut dialokasikan kepada 74.958 desa. Jumlah desa dimaksud bertambah sebanyak 4 desa dibandingkan tahun 2017 sebanyak 74.954 desa.

Persentase realisasi Dana Desa tahun 2018 tersebut lebih baik apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Pada Tahun 2018 Pemerintah melakukan upaya percepatan penyaluran Dana Desa dan penambahan tahapan penyaluran Dana Desa. Selain hal tersebut, capaian realisasi tersebut terutama didorong peningkatan kesadaran pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran secara lengkap dan tepat waktu.

B.2.3 Defisit Anggaran

*Defisit Anggaran
minus Rp269,44
triliun*

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan realisasi Belanja Negara TA 2018, maka Defisit Anggaran TA 2018 adalah sebesar Rp269.442.940.406.200 atau 82,67 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp325.936.638.600.000. Perhitungan Defisit Anggaran sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Negara	1.943.674.876.878.796	1.666.375.912.658.085
Belanja Negara	2.213.117.817.284.996	2.007.351.810.206.886
Defisit Anggaran	(269.442.940.406.200)	(340.975.897.548.801)

B.2.4 Pembiayaan

*Pembiayaan (Neto)
Rp305,69 triliun*

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2018 adalah sebesar Rp305.692.597.869.020 atau 93,79 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp325.936.638.600.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri.

Untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah, pemerintah tetap menjaga defisit kumulatif APBN tahun 2018 dibawah ambang batas 3,0 persen terhadap PDB. Defisit Anggaran di tahun 2018 sebesar Rp269.442.940.406.200 dan Produk Domestik Bruto tahun 2018 sebesar Rp14.837,40 triliun, sehingga rasio defisit terhadap PDB sebesar 1,79 persen.

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan berdasarkan Struktur APBN 2018

Pada APBN 2018 Anggaran Pembiayaan Neto sebesar Rp325.936.638.600.000, sedangkan realisasi sebesar Rp305.692.597.869.020 yang terdiri atas Pembiayaan Pembiayaan Utang, Pembiayaan Investasi, Pemberian Pinjaman, Kewajiban Penjaminan dan Pembiayaan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	APBN 2018	Realisasi
Pembiayaan Utang		
Surat Berharga Negara (Neto)	414.520.685.000.000	358.398.491.544.783
Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	3.137.930.000.000	1.353.818.791.215
Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(18.439.254.718.000)	12.276.549.111.864
Total	399.219.360.282.000	372.028.859.447.862
Pembiayaan Investasi		
Investasi Kepada BUMN	(3.600.000.000.000)	(3.600.000.000.000)
Investasi Kepada Lembaga/ Badan Lainnya (BP Tapera)	(2.500.000.000.000)	(2.500.000.000.000)

Investasi Kepada BLU (Dana Bergulir, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, Lembaga Manajemen Aset Negara)	(57.433.160.000.000)	(52.682.730.000.000)
Investasi kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	(2.121.153.274.000)	(2.331.096.461.400)
Total	(65.654.313.274.000)	(61.113.826.461.400)
Pemberian Pinjaman		
Pinjaman Kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	(10.575.086.820.000)	(9.099.733.075.175)
Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda	3.884.993.412.000	4.829.999.737.177
Total	(6.690.093.408.000)	(4.269.733.337.998)
Kewajiban Penjaminan		
Total	(1.121.315.000.000)	(1.121.315.000.000)
Pembiayaan Lainnya		
Hasil Pengelolaan Aset/Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	183.000.000.000	163.613.220.556
Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo		5.000.000.000
Total	183.000.000.000	168.613.220.556
Total Pembiayaan	325.936.638.600.000	305.692.597.869.020

B.2.4.1 Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)

Pembiayaan Dalam Negeri Rp302,51 triliun

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2018 adalah sebesar Rp302.515.788.492.391 atau 85,23 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp354.950.980.138.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, (iii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iv) Surat Berharga Negara (Neto), (v) Pinjaman Dalam Negeri (Neto), (vi) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (vii) Kewajiban Penjaminan, (viii) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan (ix) Pembiayaan Lain-lain.

Rekening Pemerintah/ Penggunaan SAL

B.2.4.1.1 Rekening Pemerintah/Penggunaan SAL

Pembiayaan dari Rekening Pemerintah adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan rekening SAL. Pada tahun 2018, Penggunaan SAL tidak dianggarkan dalam APBN TA 2018.

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Rp4,82 triliun

B.2.4.1.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2018 adalah sebesar Rp4.829.999.737.177 atau 124,32 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp3.884.993.412.000. Rincian Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Daerah	8.124.198.926	9.105.652.119
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	150.000.004	-
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	326.830.783.945	332.670.226.562
Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	11.296.966.836	11.923.640.707
Penerusan Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan (TAB) kepada Daerah	62.227.742.264	41.250.464.518
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMD	1.300.199.480	27.690.698.149
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	3.598.669.439.670	3.591.468.563.170
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Non Pemerintah	46.088.406.051	67.264.762.052
Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	775.312.000.001	735.156.000.000
Total	4.829.999.737.177	4.816.530.007.277

B.2.4.1.3 Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Rp163,61 miliar

Realisasi Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2018 adalah sebesar Rp163.619.880.616 atau 89,41 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp183.000.000.000. Realisasi tersebut terdiri dari: (1) Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN sebesar Rp124.649.183.550 dan (2) Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi sebesar Rp38.970.697.066.

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN terdiri dari realisasi pengelolaan aset eks BPPN, realisasi pengelolaan aset eks Kelolaan PT PPA, dan realisasi pengelolaan aset eks BPPN aset yang diserahkan kepada PT PPA.

Penerimaan hasil pengelolaan aset eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) serta hasil pengelolaan aset yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) berasal dari pembayaran dan/atau pelunasan dalam rangka penyelesaian/pengurusan piutang negara, penjualan melalui lelang aset properti dan/atau aset inventaris, deviden saham, dan penjualan melalui lelang barang jaminan obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke kas negara.

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) diperoleh dari hasil pembayaran/pelunasan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN, penjualan barang jaminan diambil alih, pendapatan bunga dari obligasi, dan deviden dari saham yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke kas negara. Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	124.649.183.550	233.478.439.644
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	38.970.697.066	125.606.995.261
Jumlah	163.619.880.616	359.085.434.905

Surat Berharga
Negara (Neto)
Rp358,39 triliun

B.2.4.1.4 Surat Berharga Negara (Neto)

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2018 adalah sebesar Rp358.398.491.544.783 atau 86,46 persen dari yang dianggarkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 sebesar Rp414.520.685.000.000.

Pemerintah menerbitkan SBN untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah dan untuk kepentingan stabilisasi pasar serta pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Perhitungan Surat Berharga Neto adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan:		
Penerbitan/Penjualan SPN	143.050.000.000.000	192.207.290.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara	320.274.306.000.000	233.576.660.000.000
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara	5.446.859.375.000	4.307.352.996.000
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	96.869.377.647.000	90.917.094.052.727
Imbalan Dibayar di Muka SBSN – Jangka Panjang	1.734.060.896.401	1.663.933.848.698
Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	51.680.000.000.000	44.690.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	97.877.550.000.000	102.021.478.500.000
Penerimaan Penerbitan SBSN – Valas	42.854.500.000.000	39.969.000.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dim Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN PBS	22.526.588.353.000	16.918.172.947.273
Total Penerimaan	782.313.242.271.401	726.270.982.344.698
Pengeluaran:		
Pelunasan SPN	(170.257.290.000.000)	(128.390.000.000.000)
Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Negara	(83.438.091.186.177)	(66.282.433.592.954)
Pembelian Kembali Obligasi	(515.000.000.000)	(1.255.000.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara	(5.546.137.909.040)	(4.324.143.651.960)
Pelunasan SBSN Jangka Panjang	(73.588.948.000.000)	(22.555.554.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN Jk Panjang	(1.640.239.131.401)	(1.640.928.188.698)
Pelunasan SPN Syariah	(46.070.000.000.000)	(32.750.000.000.000)
Pelunasan Obligasi Negara Valas	(28.241.044.500.000)	(27.246.600.000.000)
Pelunasan SBSN Valas Jangka Panjang	(14.618.000.000.000)	
Total Pengeluaran	(423.914.750.726.618)	(284.444.659.433.612)
Jumlah SBN (Neto)	358.398.491.544.783	441.826.322.911.086

Pada tahun 2018, pembiayaan dari SBN Neto dipengaruhi adanya perubahan strategi pembiayaan yang semula menggunakan instrumen Surat Berharga Negara diubah menjadi Pinjaman Tunai (sepaimana dijelaskan pada B.2.4.2.1.1).

Di dalam realisasi penerimaan pembiayaan SBN tidak termasuk nilai *prefunding* 2019 sebesar Rp43.314.553.530.000. Atas realisasi pembiayaan dari SBN Tahun 2018 sebesar Rp358.398.491.544.783 termasuk di dalamnya penerimaan Penerbitan Penjualan Obligasi Negara sebesar Rp515.000.000.000 dan penerimaan bunga Obligasi Negara sebesar Rp18.344.995.000 dalam rangka *debt switch*.

Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang merupakan penerimaan yang terjadi karena tanggal penerbitan SBN berbeda dengan tanggal pembayaran kupon (bunga atau imbalan), untuk Tahun 2018 realisasinya adalah sebesar Rp7.180.920.271.401. Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang sebesar Rp184.478.615.000, akan dibayarkan pada Tahun 2019 sesuai dengan jadwal pembayaran kupon (bunga atau imbalan).

Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara dan Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang terdapat pembayaran atas utang bunga 2017 senilai Rp189.935.384.040.

B.2.4.1.5 Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

*Pinjaman Dalam Negeri (Neto)
Rp1,35 triliun*

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2018 adalah sebesar Rp1.353.818.791.215 atau 43,14 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN TA 2018 sebesar Rp3.137.930.000.000. Pinjaman ini merupakan pinjaman dari BUMN dan Perusahaan Daerah. Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	2.397.198.022.147	1.251.027.557.472
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	32.189.482.599	54.027.644.775
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(1.075.568.713.531)	(656.763.630.395)
Jumlah	1.353.818.791.215	648.291.571.852

Realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri TA 2018 naik sebesar Rp705.527.219.363 atau 108,83% dari realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri TA 2017 sebesar Rp648.291.571.852.

Realisasi penarikan Pinjaman Dalam Negeri tahun 2018 terdapat penarikan tahun anggaran 2017 yang terbit SP3 di tahun anggaran 2018 sebesar Rp943.529.183.

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan di Kementerian Pertahanan/TNI dan Alat Material Khusus di POLRI yang berasal dari industri pertahanan dalam negeri.

B.2.4.1.6 Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

PMN/ Investasi Pemerintah minus Rp46,11 triliun

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2018 adalah sebesar minus Rp46.113.826.461.400 atau 91,04 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN TA 2018 sebesar minus Rp50.654.313.274.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2018 adalah:

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Kembali Investasi Lainnya		-
Penyertaan Modal Negara untuk BUMN	(3.600.000.000.000)	(6.379.318.092.000)
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	(2.331.096.461.400)	(2.024.176.469.382)
Pengeluaran Pembiayaan Untuk Modal Awal BLU Lembaga Manajemen Aset Negara		(32.050.560.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	(5.530.000.000.000)	(5.600.000.000.000)
Penyertaan Modal Negara Lainnya	(2.500.000.000.000)	(3.200.000.000.000)
Penerimaan Kembali Investasi		
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	(31.152.730.000.000)	
Pengeluaran Pembiayaan untuk pendirian BLU Lembaga Pengelolaan Dana Bantuan Internasional	(1.000.000.000.000)	
Jumlah	(46.113.826.461.400)	(49.254.054.561.382)

PMN untuk BUMN sebesar Rp3.600.000.000.000 merupakan PMN kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

PMN untuk Badan Internasional dan Penyertaan Modal Lainnya digunakan untuk *The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)* sebesar Rp42.984.459.135, *International Development Bank (IDB)* sebesar Rp77.923.202.265, *International Fund for Agricultural Development (IFAD)* sebesar Rp57.924.000.000, *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* sebesar Rp1.994.792.800.000, dan *International Development Association* sebesar Rp157.472.000.000.

Penyaluran Pembiayaan Dana Bergulir untuk BLU sebesar Rp5.530.000.000.000 adalah untuk BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sebesar Rp2.180.000.000.000, BLU Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp2.500.000.000.000, dan BLU Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebesar Rp850.000.000.000.

Penyertaan Modal Negara Lainnya sebesar Rp2.500.000.000.000 merupakan PMN kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah oleh BLU LMAN sebesar Rp31.152.730.000.000) untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah Program Strategis Nasional.

Pengeluaran Pembiayaan untuk Investasi kepada BLU Lembaga Pengelola Dana Bantuan Internasional (LPDBI) sebesar Rp1.000.000.000.000 dialokasikan untuk pendirian BLU LPDBI yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pemberian bantuan internasional.

B.2.4.1.7 Kewajiban Penjaminan

Kewajiban Penjaminan minus Rp1,12 triliun

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Dana Kewajiban Penjaminan sebesar minus Rp1.121.315.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan pada APBN TA 2018 sebesar minus Rp1.121.315.000.000.

Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar minus Rp1.121.315.000.000 yang dianggarkan pada APBN TA 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara	(297.400.000.000)	(427.965.000.000)
Proyek percepatan penyediaan air minum	(1.102.000.000)	(1.157.000.000)
Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(389.500.000.000)	(296.023.000.000)
Proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera	(284.700.000.000)	(35.300.000.000)
Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Internasional Kepada BUMN	(148.613.000.000)	(41.929.000.000)
Penugasan Kepada BUMN dalam rangka Pembiayaan Infrastruktur Daerah	-	(203.000.000.000)
Jumlah	(1.121.315.000.000)	(1.005.374.000.000)

B.2.4.1.8 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional minus Rp15 triliun

Realisasi Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2018 adalah minus Rp15.000.000.000.000 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN TA 2018 sebesar minus Rp15.000.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2017, realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2018 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp4.500.000.000.000 dari sebelumnya sebesar Rp10.500.000.000.000.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

B.2.4.1.9 Pembiayaan lain-lain

*Pembiayaan lain-lain
Rp5 miliar*

Terdapat realisasi Pembiayaan Lain-lain berupa penerimaan sebesar Rp5.000.000.000. Penerimaan pembiayaan lain-lain ini merupakan penerimaan Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

B.2.4.2 Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

*Pembiayaan LN
(Neto) Rp3,17 triliun*

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar Rp3.176.809.376.629 karena nilai penarikan pinjaman lebih besar dari pengeluaran pembiayaan selama tahun 2018. APBN tahun 2018 menargetkan penarikan pinjaman lebih kecil dari pengeluaran pembiayaan sebesar minus Rp29.014.341.538.000.

Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari (i) Penarikan Pinjaman Luar Negeri, (ii) Penerusan Pinjaman, dan (iii) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri.

B.2.4.2.1 Penarikan Pinjaman Luar Negeri

*Penarikan Pinjaman
Luar Negeri Rp88,60
triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2018 adalah sebesar Rp88.609.746.474.180 atau 172,57 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp51.345.917.282.000. Penarikan Pinjaman Luar Negeri terdiri dari (i) Penarikan Pinjaman Tunai dan (ii) Penarikan Pinjaman Proyek.

B.2.4.2.1.1 Penarikan Pinjaman Tunai

*Penarikan Pinjaman
Tunai Rp50,62 triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Pinjaman Tunai/Pinjaman Program TA 2018 adalah sebesar Rp50.625.053.600.000 atau 377,8 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp13.400.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2017, realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp29.677.086.262.497 dari sebelumnya sebesar Rp20.947.967.337.503. Realisasi yang mencapai 377,8 disebabkan adanya perubahan strategi pembiayaan yang semula menggunakan instrumen Surat Berharga Negara diubah menjadi Pinjaman Tunai/Program. Kebijakan pemerintah ini sesuai UU APBN TA 2018 yaitu dalam hal terdapat instrument pembiayaan dari utang yang lebih menguntungkan, pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal.

Pinjaman Tunai adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk *cash financing* yang memerlukan *policy matrix* untuk pencairannya. *Policy matrix* adalah suatu *set of policy* yang menjadi *collateral* pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tunai APBN. Besarnya pinjaman program dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran.

*Penarikan Pinjaman
Proyek Rp37,98
triliun*

B.2.4.2.1.2 Penarikan Pinjaman Proyek

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2018 adalah sebesar Rp37.984.692.874.180 atau 100,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp37.945.917.282.000. Jika dibandingkan TA 2017, realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.205.804.872.526 dari sebelumnya sebesar Rp30.778.888.001.654. Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek yang mencapai 100,10 persen dari Pagu APBN 2018 sudah cukup tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu, namun demikian, masih terdapat Kementerian/Lembaga terutama Kementerian Pertahanan yang belum melakukan pengesahan belanja yang dibiayai dari Pinjaman Proyek.

Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

*Penerusan Pinjaman
minus Rp9,09 triliun*

B.2.4.2.2 Penerusan Pinjaman

Realisasi pengeluaran pembiayaan Penerusan Pinjaman TA 2018 adalah sebesar minus Rp9.099.739.735.235 atau 86,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar minus Rp10.575.086.820.000. Rincian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Daerah	(3.618.555.506.556)	(1.003.985.193.194)
Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMD	(5.481.184.228.679)	(5.864.931.271.973)
Total	(9.099.739.735.235)	(6.868.916.465.167)

*Pembayaran Cicilan
Pokok Utang LN
Rp76,33triliun*

B.2.4.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2018. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2018 adalah sebesar minus Rp76.333.197.362.316 atau 109,38 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar minus Rp69.785.172.000.000.

Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan	(22.356.849.857.109)	(16.320.383.114.913)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Lain-lain	(53.968.748.159.161)	(48.799.093.676.802)
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible	(7.599.346.046)	(5.441.299.170)
Jumlah	(76.333.197.362.316)	(65.124.918.090.885)

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri yang mencapai 109,38 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 terutama disebabkan penambahan pagu untuk menyesuaikan perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibandingkan dengan asumsi dalam UU APBN 2018.

*SiLPA Rp36,24
triliun*

B.2.5 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp269.442.940.406.200 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp305.692.597.869.020 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp36.249.657.462.820 dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Negara	1.943.674.876.878.796	1.666.375.912.658.085
Belanja Negara	2.213.117.817.284.996	2.007.351.810.206.886
Surplus (Defisit)	(269.442.940.406.200)	(340.975.897.548.801)
Pembiayaan Neto	305.692.597.869.020	366.623.822.146.843
SiLPA (SiKPA)	36.249.657.462.820	25.647.924.598.042

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan/urusan bersama TA 2018, dengan rincian sebagai berikut.

Kode	Keterangan	Realisasi TA 2018 (dalam Rp)		
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan	Urusan Bersama
010	Kementerian Dalam Negeri	23.156.584.727	18.391.457.191	
018	Kementerian Pertanian	1.230.351.130.156	8.283.739.065.556	
019	Kementerian Perindustrian	71.435.554.595		
023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	332.255.408.981		
024	Kementerian Kesehatan	972.872.928.116		
026	Kementerian Ketenagakerjaan	133.191.099.591	115.690.929.044	
027	Kementerian Sosial	606.876.574.168	98.143.769.223	
029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	59.881.406.241	228.188.186.203	
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	105.379.369.020	75.788.241.072	
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	33.273.676.933	1.575.210.110.497	
040	Kementerian Pariwisata	79.541.167.747		
044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	101.282.960.729	65.744.835.534	
047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61.183.643.146		
055	Kementerian Negara PPN/Bappenas	27.070.426.596		
057	Perpustakaan Nasional	33.244.107.399		
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	16.746.194.414		
067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2.304.548.633.169	514.797.690.875	28.600.777.904
068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	23.652.645.744		
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	6.813.882.034		
090	Kementerian Perdagangan	58.548.911.714	1.280.360.653.619	
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	138.045.311.792		
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	245.660.000		
	Total	6.419.597.277.012	12.256.054.938.814	28.600.777.904

2. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamankan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan pasal 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep "enterprising the government" dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyeter surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan

non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapat lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang akan digabungkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU. Pada tahun 2018, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Pelaporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2018, terdapat 217 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah ditetapkan menjadi BLU, yang berasal dari 21 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Kementerian Kesehatan	53
2	Kementerian Keuangan	5
3	Kementerian Pertanian	2
4	Kementerian Perindustrian	5
5	Kementerian Agama	17
6	Kementerian Koperasi dan UKM	2
7	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
8	Kepolisian Republik Indonesia	39
9	Kementerian Perhubungan	33
10	Kementerian ESDM	8
11	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2
12	Sekretariat Negara	2
13	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1
14	Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1
15	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1
16	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1
17	Kementerian Ristek Dikti	34
18	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1
19	Kementerian Pertahanan	8
20	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1
	Jumlah BLU	217

Ditinjau dari jenis layanan, dari 217 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

203 BLU bidang Penyediaan Barang dan/atau Jasa;

4 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;

10 BLU bidang Pengelolaan Dana Khusus;

Pada tahun 2018, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Kontrak Tahun Jamak

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000 dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000. Rincian sesuai Lampiran 4.

4. Notice of Disbursement (NoD) yang belum terbit SP3 sampai dengan 2018

Terdapat *Notice of Disbursement* (NoD) yang sudah dicatat sebagai penambahan Utang, tetapi belum terbit SP3, yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman, dan Belanja Kementerian/Lembaga. Hal tersebut berdampak pada Penerimaan Pinjaman Proyek, Pengeluaran Pembiayaan Penerusan Pinjaman dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga terkait NoD tersebut belum dapat dicatat sebagai transaksi tahun 2018 sesuai dengan periode penerbitan NoD.

Terdapat 4 (empat) kementerian lembaga dengan total nilai sebesar Rp691.439.453.411 yang bersumber dari pinjaman luar negeri belum dapat dilakukan pengesahan yaitu Kementerian Pertahanan sebesar Rp230.197.773.003, Kepolisian RI sebesar Rp444.997.297.498, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebesar Rp11.357.980.669, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp4.886.402.242.

5. Pinjaman Dalam Negeri

Pada realisasi penarikan Pinjaman Dalam Negeri tahun 2018 terdapat penarikan tahun anggaran 2017 yang terbit SP3 di tahun anggaran 2018 sebesar Rp943.529.183.

Realisasi penyerapan yang belum mencapai target pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI terjadi karena permasalahan umum yang dihadapi oleh Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI adalah penerbitan Daftar Kegiatan Prioritas Dalam negeri (DKPPDN) oleh Kementerian PPN/Bappenas pada kuartal III tahun 2018 yang berimplikasi pada keterlambatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI serta proses seleksi calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, juga dipengaruhi oleh kapasitas Industri pertahanan dalam negeri dalam menyelesaikan kontrak yang disepakati dengan Kementerian Pertahanan.

6. Pengembalian Pinjaman Kegiatan

Terdapat *refund* senilai Rp278.483.793.854 yang dilakukan pemerintah selama TA 2018. *Refund* tersebut ada karena transaksi *Ineligible Expenditure* sebesar Rp154.238.882.527 dan dilakukan karena *refund procedure administrative* sebesar Rp124.244.911.327.

7. Pembiayaan Luar Negeri melalui Mekanisme Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) dan Kreditur Swasta Asing (KSA)

Sebagai implementasi dari Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Kementerian Keuangan menyusun Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dalam hal Daftar Kegiatan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri Keuangan memuat indikasi pembiayaan yang bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) atau Kreditur Swasta Asing (KSA). Penggunaan sumber pembiayaan melalui LPKE dan KSA ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Polri dengan pertimbangan terdapat kebutuhan untuk mengakomodasi pengadaan alutsista dan almatrus TNI/Polri yang bersifat khusus.

Untuk daftar kegiatan Tahun 2011-2014, Menteri Keuangan telah menetapkan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) untuk 121 kegiatan (65 kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan 56 kegiatan pada POLRI) dengan pagu USD7,104,014.000, yang terdiri dari 67 kegiatan senilai USD5,118,120,000 dengan pembiayaan KSA dan 12

kegiatan senilai USD 1,985,894,000 dengan pembiayaan LPKE. Sementara untuk daftar kegiatan tahun 2016-2019, Kementerian Keuangan telah menetapkan PSP atas 56 kegiatan (39 kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan 17 kegiatan pada POLRI) dengan pagu sebesar USD7,613,300,000 yang terdiri dari 26 kegiatan senilai USD1,734,000,000 dengan pembiayaan KSA dan 30 kegiatan senilai USD5,879,300,000 dengan pembiayaan LPKE.

8. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertahanan

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertahanan diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor: 67/PMK.05/2013 dan Permenhan Nomor 15 tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Berdasarkan peraturan diatas, terdapat 5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk pada Kemhan yaitu:

1. DIPA Unit Organisasi (UO) Kemhan
2. DIPA Unit Organisasi (UO) Mabes TNI
3. DIPA Unit Organisasi (UO) TNI AD
4. DIPA Unit Organisasi (UO) TNI AL, dan
5. DIPA Unit Organisasi (UO) TNI AU

Masing-masing UO diperlakukan sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI), sehingga pada Kemhan terdapat 5 UAPPA-EI, yaitu UAPPA-EI Kemhan, UAPPA-EI Mabes TNI, UAPPA-EI TNI AD, UAPPA-EI TNI AL dan UAPPA-EI TNI AU.

Kemudian dari masing-masing DIPA Induk terbagi menjadi:

1. DIPA Petikan untuk Satker Pusat yang terdiri dari:
 - a. DIPA Satker Kemhan
 - b. DIPA Satker Mabes TNI
 - c. DIPA Satker TNI AD
 - d. DIPA Satker TNI AL, dan
 - e. DIPA Satker TNI AU
2. DIPA Petikan untuk Satker Daerah

Untuk Satker Daerah mekanisme pelaksanaan anggarannya sama dengan satker pada Kementerian Negara lainnya.

Khusus untuk Satker Pusat, pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan diseluruh unit pada masing-masing UO. Mekanisme pelaksanaannya adalah Bendahara Pengeluaran Satker DIPA Pusat menarik Dana Uang Persediaan yang kemudian ditransfer ke Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Pada peraturan ini, khusus Satker DIPA Pusat, dari Uang Persediaan dapat digunakan untuk pembayaran kepada penyedia barang/jasa melampaui Rp50.000.000, dan saldo UP pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP dapat melebihi Rp50.000.000.

Untuk Kebijakan pencatatan aset dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kemhan sehubungan dengan Satker DIPA Pusat adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan barang pada unit-unit dicatat terlebih dahulu sebagai Aset pada Satker DIPA Pusat;
2. Untuk memudahkan pencatatan, maka unit-unit pengadaan barang menjadi Subsatker dari Satker DIPA Pusat.
3. Setelah pengadaan barang dicatat pada Subsatker DIPA Pusat, kemudian atas aset tersebut dilakukan Transfer Keluar ke Satker DIPA Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen Pemerintah untuk menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Kementerian Pertahanan, pada tahun 2018 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia sebagai pengganti Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor: 67/PMK.05/2013 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 tahun 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 telah diundangkan pada tanggal 2 November 2018, dan pemerintah telah melakukan persiapan dan langkah-langkah implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut sehingga masa peralihan penerapan peraturan dimaksud berjalan dengan baik.

9. Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Berdasarkan surat Ketua BPK nomor 152/S/11/2018 tanggal 22 November 2018 hal Penyelarasan dan Pengungkapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LK PHLN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sehingga perlu dilakukan penyelarasan penyusunan LK PHLN dengan LKKL dan LKPP.

Di samping itu dalam rangka pengungkapan yang lebih memadai, maka Kementerian Negara/lembaga yang memiliki transaksi PHLN menyusun ikhtisar LK PHLN yang meliputi informasi nama PHLN, realisasi pendapatan, Belanja, aset dan kewajiban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari LKKL tahun 2018.

Berikut adalah rekapitulasi belanja KL yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.

No	Kode	Kementerian/Lembaga	Anggaran	Realisasi Neto
1	010	Kementerian Dalam Negeri	53.489.795.000	49.188.842.894
2	012	Kementerian Pertahanan	11.736.928.000.000	9.243.741.054.923
3	018	Kementerian Pertanian	348.416.297.000	293.492.821.054
4	022	Kementerian Perhubungan	5.723.499.613.000	3.595.242.706.049
5	024	Kementerian Kesehatan	500.000.000	0
6	025	Kementerian Agama	500.000.000.000	87.615.614.861
7	026	Kementerian Ketenagakerjaan	14.669.000.000	9.226.273.000
8	033	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	13.409.613.040.000	9.940.264.996.672
9	042	Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	3.456.033.017.000	2.934.509.538.311
10	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	163.388.985.000	146.849.145.803
11	056	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bpn	852.670.000	0
12	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.278.982.517.000	1.856.167.288.949
13	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	1.065.767.478.000	965.171.182.386
14	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	94.835.000.000	81.179.275.868
15	083	Badan Informasi Geospasial	100.000.000	0
16	089	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	143.638.472.000	120.540.393.076
17	112	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Pelabuhan Bebas Sabang	334.551.432.000	102.459.355.109
		Grand Total	40.325.265.316.000	29.425.648.488.955

Dan berikut merupakan realisasi Belanja KL yang bersumber dari Hibah Luar Negeri.

No	Kode	Kementerian/Lembaga	Anggaran	Realisasi Neto
1	015	Kementerian Keuangan	30.619.653.000	24.048.750.455
2	018	Kementerian Pertanian	3.000.000.000	2.983.919.382
3	022	Kementerian Perhubungan	12.000.000.000	10.552.212.268
4	029	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	251.548.893.000	218.324.686.815
5	032	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	3.686.342.000	3.445.298.718
6	033	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	60.648.709.000	41.829.794.720
7	042	Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	27.107.417.000	21.578.353.151
8	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	5.450.000.000	4.073.605.289
9	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	66.761.673.000	64.083.253.118
Grand Total			460.822.687.000	390.919.873.916

Data realisasi pada tabel di atas mengacu kepada nilai yang tercantum di dalam realisasi belanja KL dengan sumber dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri pada Aplikasi E-Rekon LK.

Rincian ikhtisar LK PHLN berdasarkan LKKL untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana Lampiran 2.C dan 2.D.

10. Penganggaran Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional pada Pembiayaan

Terdapat Pengeluaran Pembiayaan dan Dana Kelolaan BLU pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah Program Strategis Nasional (PSN).

Berdasarkan UU APBN TA 2018, dianggarkan dan direalisasikan pengeluaran pembiayaan kepada LMAN sebesar Rp31.152.730.000.000 dan diakumulasikan dalam Aset Lainnya Dana Kelolaan BLU. Selanjutnya, LMAN melaksanakan pembayaran pengadaan tanah untuk PSN sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tanah untuk PSN tersebut telah disajikan sebagai aset tetap Tanah pada Neraca.

Terkait Pendanaan Pengadaan Tanah PSN pada LMAN tersebut, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah akan melakukan koreksi dengan menetapkan tata kelola dan perlakuan pembukuan sesuai standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pemerintah akan memperlakukan Dana Kelolaan LMAN yang merupakan investasi dalam UU APBN TA 2019 sebagai *land bank*, dimana pembelian tanah PSN yang akan dikerjasamakan dilaksanakan melalui mekanisme DIPA Belanja Modal. Hal ini akan diatur melalui perubahan PP, PMK, dan peraturan terkait.

Kedua langkah di atas, akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan negara dan APBN yang berlaku.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Awal SAL
per 1 Januari 2018
sebesar Rp 138,35
triliun

Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi saldo SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan SILPA/SIKPA tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian SAL yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp138.353.015.853.598 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2017 (*Audited*). Saldo Anggaran Lebih Awal meliputi saldo awal Kas BUN, Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU yang Sudah Disahkan, dan Kas Hibah di Kementerian Negara/Lembaga yang Sudah Disahkan, beserta penyesuaian dalam perhitungan fisik SAL yang dilakukan di Tahun 2017. Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal adalah sebagai berikut.

Uraian	1 Januari 2018	1 Januari 2017
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Saldo Awal Kas BUN	91.287.531.283.185	81.150.105.652.341
Saldo Awal Kas di KPPN	2.282.077.569.283	1.818.956.055.570
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	210.828.164.140	262.946.369.485
Saldo Awal Kas pada BLU yg Sudah Disahkan	40.984.519.890.383	32.440.062.300.360
Saldo Awal Kas Hibah di K/L yg Sudah Disahkan	4.834.494.025.327	3.350.959.289.659
	139.599.450.932.318	119.023.029.667.415
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL		
Saldo di Rek. Escrow yang Memiliki Unsur SAL	3.276.851.117.024	-
Utang PFK	(4.505.640.401.487)	(5.301.758.765.389)
Utang PFK dalam Bentuk Invoice	4.001.304	-
Utang kpd Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	(39.676.912.721)	(614.356.802.242)
Selish Kurman Uang	298.353.410.242	-
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	(276.326.293.082)	87.051.367.150
Transaksi Persekot Gaji	-	(122.392.649)
Pengembalian Escrow PNBK	-	(7.810.000)
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	(1.246.435.078.720)	(5.829.194.403.130)
Saldo Anggaran Lebih Awal	138.353.015.853.598	113.193.835.264.285

C.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL
sebagai
Penerimaan
Pembiayaan sampai
dengan 31
Desember 2018
sebesar Rp0,00

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian pada Pasal 39 UU Nomor 15 Tahun 2017 tersebut, Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya. Pada Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan.

SILPA/SiKPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp36,25 triliun

C.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. SiLPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp36.249.657.462.820 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Pendapatan Negara	1.943.674.876.878.796	1.666.375.912.658.085
Belanja Negara	2.213.117.817.284.996	2.007.351.810.206.886
Surplus (Defisit)	(269.442.940.406.200)	(340.975.897.548.801)
Pembiayaan Neto	305.692.597.869.020	366.623.822.146.843
SiLPA (SiKPA)	36.249.657.462.820	25.647.924.598.042

Penyesuaian Pembukuan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,81 triliun

C.4. Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian Pembukuan merupakan koreksi yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) terkait dengan koreksi SiLPA, perhitungan selisih kurs (*unrealized*), koreksi kas, dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL yang dilakukan pada tahun berjalan. Penyesuaian Pembukuan SAL sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp819.451.289.822 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Koreksi SiLPA	1.079.553.470.113	149.497.232.083
Selisih Kurs Belum Terealisasi (<i>Unrealized</i>)	(312.233.301.456)	115.136.054.861
Koreksi Kas BUN	(270.884.828.683)	(3.765.194.909)
Koreksi Kas KPPN	4	198.081.593
Koreksi Kas Hibah	(5.418.309.131)	(115.519.321.645)
Koreksi Kas BLU	284.758.662.132	(779.378.992.976)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	46.468.719.871	3.504.402.474
Koreksi Utang PFK	(18.524.998)	32.865.609.137
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(2.774.598.030)	71.163.158.075
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	819.451.289.822	(526.298.971.307)

- Koreksi SiLPA sebesar Rp1.079.553.470.113 terdiri dari pengembalian atas pendapatan Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL) sebesar minus Rp725.035.951.720 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA sebesar Rp1.804.589.421.833. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Pendapatan senilai Rp303.519.711.177 dan transaksi pengembalian Hibah senilai Rp421.516.240.543.
- Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi (*Unrealized*) sebesar minus Rp312.233.301.456 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
- Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp270.884.828.683 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi kas.
- Koreksi Kas di KPPN sebesar Rp4 merupakan koreksi pembulatan.

5. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp5.418.309.131 merupakan penyesuaian akuntansi /pembukuan atas saldo kas hibah yang sudah disahkan di KPPN, antara lain reklasifikasi saldo Kas Hibah menjadi Kas BLU maupun koreksi pembukuan lainnya.
6. Koreksi Kas BLU sebesar Rp284.758.662.132 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal Kas BLU baru pada tahun 2018, penyesuaian saldo Kas BLU tahun berjalan, dan koreksi saldo Kas BLU untuk perbaikan akuntansi/pembukuan lainnya.
7. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp46.468.719.871 merupakan penyesuaian terhadap saldo-saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN), sebagai akibat dari reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Negara/Lembaga, penyesuaian selisih kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Valas, maupun koreksi akuntansi/pembukuan lainnya.
8. Koreksi Utang PFK sebesar minus Rp18.524.998 merupakan koreksi terhadap saldo Utang PFK karena adanya reklasifikasi dari Pendapatan Diterima Di Muka pada BUN.
9. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar minus Rp2.774.598.030 merupakan koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas.

C.5. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar minus Rp0,18 triliun

Penyesuaian Lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian perhitungan catatan SAL dilakukan dengan membandingkan antara mutasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP dan kas yang bukan merupakan SAL (Rekening Pemerintah Lainnya, Rekening Escrow, dan Kas Transitoris) dengan mutasi transaksinya selama periode berjalan.

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL yang dilakukan pada 31 Desember 2018 adalah sebesar minus Rp180.408.921.594 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP	-	8.559.545.546
Penyesuaian Transaksi RPL	(575.403.332.739)	(66.177.733.509)
Penyesuaian Transaksi Rek. Escrow	417.021.528.777	(176.060.645.176)
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	(472)	1.992
Penyesuaian Terkait Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL	-	358.154.958.334
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yg Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	(22.027.117.160)	(86.921.164.501)
Pembulatan	-	(108)
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	(180.408.921.594)	37.554.962.578

1. Tidak terdapat Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran pada LPSAL tahun 2018 karena tidak terdapat perbedaan pencatatan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran antara pencatatan menurut konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga dengan pencatatan menurut BUN dengan rincian sebagai berikut.

	Saldo Kas di BP menurut pencatatan BUN (I)	Saldo Kas di BP menurut pencatatan K/L (II)	Selisih Saldo Kas di BP (II – I)
Saldo Awal	210.828.164.140	210.828.164.140	-
Saldo Akhir	285.150.273.469	285.150.273.469	-
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP yang dilakukan di LPSAL (selisih Saldo Akhir – selisih Saldo Awal)			-

2. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL terkait dengan transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL), Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan dalam rangka menyajikan nilai catatan SAL yang sesuai dengan fisik SAL. RPL, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris bukan merupakan bagian fisik SAL, namun pada nilai catatan SAL (yang merupakan akumulasi SILPA tahun lalu ditambah dengan SILPA tahun berjalan) masih terpengaruh oleh transaksi-transaksi dari aktivitas rekening tersebut. Penyesuaian Transaksi RPL sebesar minus Rp575.403.332.739, Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* sebesar Rp417.021.528.777, dan Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris sebesar minus Rp472 merupakan nilai total transaksi yang memengaruhi Catatan SAL tahun berjalan yang berasal dari aktivitas transaksi rekening non-SAL tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai ini harus disesuaikan terhadap catatan SAL sehingga tersaji nilai SAL yang sesungguhnya.
3. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar minus Rp22.027.117.160 merupakan perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yg perlu dibalik pada tahun berjalan. Penyesuaian ini harus dilakukan pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada Catatan SAL, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Total
Selisih Kiriman Uang (TAYL)	(298.353.410.242)
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan (TAYL)	276.326.293.082
Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	(22.027.117.160)

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Perhitungan Catatan SAL		
Saldo Awal SAL	138.353.015.853.598	113.193.835.264.285
Penerunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	-	-
SAL Awal setelah Penggunaan SAL	138.353.015.853.598	113.193.835.264.285
SILPA (SiKPA) Tahun Berjalan	36.249.657.462.820	25.647.924.598.042
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL	174.602.673.316.418	138.841.759.862.327
Penyesuaian Pembukuan		
Koreksi SiLPA	1.079.553.470.113	149.497.232.083
Selisih Kurs (annualized)	(312.233.301.456)	115.136.054.861
Koreksi Kas BUN	(270.884.828.683)	(3.765.194.909)
Koreksi Kas KPPN	4	198.081.593
Koreksi Kas Hibah	(5.418.309.131)	(115.519.321.645)
Koreksi Kas BLU	284.758.662.132	(779.378.992.976)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN) ¹⁾	46.468.719.871	3.504.402.474
Koreksi Utang PPK ²⁾	(18.524.998)	32.865.609.137
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) ³⁾	(2.774.598.030)	71.163.158.075
Pembulatan	-	-
Total Penyesuaian Pembukuan	819.451.289.822	(526.298.971.307)
Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)		
Penyesuaian Perhitungan Kas di BP LKPP ¹⁾	-	8.559.545.546
Penyesuaian Transaksi RPL ²⁾	(575.403.332.739)	(66.177.733.509)
Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow ³⁾	417.021.528.777	(176.060.645.176)
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris ⁴⁾	(472)	1.992
Penyesuaian Terkait Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL	-	358.154.958.334
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	(22.027.117.160)	(86.921.164.501)
Pembulatan	-	(108)
Total Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL	(180.408.921.594)	37.554.962.578
SALDO AKHIR CATATAN SAL	175.241.715.684.646	138.353.015.853.598

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran (I)	210.828.164.140	262.946.369.485
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (II)	285.150.273.469	210.828.164.140
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (I - II)	(74.322.109.329)	52.118.205.345
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran (III)	(27.853.389.458)	64.182.153.365
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II)	46.468.719.871	12.063.948.020
<i>Keterangan:</i>		
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran BUN	46.468.719.871	3.504.402.474
Selisih Mutasi dikurangi Koreksi Kas BP BUN = Penyesuaian Perhitungan Kas di BP LKPP	-	8.559.545.546

2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Saldo Awal Utang PFK (I)	4.505.640.401.487	5.301.758.765.389
Saldo Akhir Utang PFK (II)	3.991.926.175.494	4.505.640.401.487
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(513.714.225.993)	(796.118.363.902)
Mutasi Transaksi PFK (III)	(513.959.408.911)	(763.256.756.069)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I)	(245.182.918)	32.861.607.833
Mutasi Utang PFK dalam Bentuk Invoice (IV)	226.657.920	4.001.304
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) setelah memperhitungkan Utang PFK dalam bentuk Invoice = Koreksi Utang PFK pada BUN	(18.524.998)	32.865.609.137
Keterangan: Koreksi terhadap Saldo Utang PFK karena adanya reklasifikasi dari Pendapatan Diterima Di Muka pada BUN.	(18.524.998)	-

3) Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Saldo Awal Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (I)	239.936.781.997	614.356.802.242
Saldo Akhir Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (II)	197.868.217.285	239.936.781.997
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(42.068.564.712)	(374.420.020.245)
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (III)	(44.843.162.742)	(303.256.862.170)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(2.774.598.030)	71.163.158.075
Keterangan: Koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas.	(2.774.598.030)	-

4) Rekening Pemerintah Lainnya

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Saldo Awal RPL	3.905.763.616.742	1.538.381.222.069
Dikurangi: Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL Awal Tahun	(200.259.869.276)	(358.154.958.334)
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL	3.705.503.747.466	1.180.226.263.735
Koreksi Saldo RPL	5	-
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (I)	3.705.503.747.471	1.180.226.263.735
Saldo Akhir RPL	5.851.939.714.224	3.905.763.616.742
Dikurangi: Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL Akhir Tahun	(197.383.044.970)	(200.259.869.276)
Saldo Akhir RPL untuk perhitungan SAL (II)	5.654.556.669.254	3.705.503.747.466
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II - I)	1.949.052.921.783	2.525.277.483.731
Mutasi Transaksi RPL (III)	1.373.649.589.044	2.459.099.750.222
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) dan Koreksi Saldo RPL = Penyesuaian Transaksi RPL	(575.403.332.739)	(66.177.733.509)
Keterangan: Merupakan Penyesuaian terhadap nilai Selisih Kurs di Rekening Migas dan Panas Bumi dan penyesuaian RPL lainnya yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL	(575.403.332.739)	(66.177.733.509)

5) Rekening Escrow

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Saldo Awal Rek. Escrow	65.211.736.255.835	53.822.105.986.135
Dikurangi: Saldo pada Rekening Dana PFK Awal Tahun	(3.276.851.117.024)	-
Saldo Awal Rek. Escrow untuk perhitungan SAL	61.934.885.138.811	53.822.105.986.135
Koreksi Saldo Rek. Escrow	-	-
Saldo Awal Rek. Escrow untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (I)	61.934.885.138.811	53.822.105.986.135
Saldo Akhir Rek. Escrow	58.601.172.611.021	65.211.736.255.835
Dikurangi: Saldo pada Rekening Dana PFK Akhir Tahun (yang mengandung Unsur Kas SAL pada tanggal pelaporan 2017)	(3.714.379.337.474)	(3.276.851.117.024)
Saldo Akhir Rek. Escrow untuk perhitungan SAL (II)	54.886.793.273.547	61.934.885.138.811
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II - I)	(7.048.091.865.264)	8.112.779.152.676
Mutasi Transaksi Rek. Escrow (III)	(6.631.070.336.487)	7.936.718.507.500
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow	417.021.528.777	(176.060.645.176)
Keterangan: Merupakan Penyesuaian terhadap nilai Selisih Kurs di Rekening Surat Berharga Negara dan penyesuaian Rekening Escrow lainnya yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL	417.021.528.777	(176.060.645.176)

6) Kas Transitoris

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Saldo Awal Kas Transitoris	(472)	(43.855.341.992)
Koreksi Saldo Kas Transitoris	-	43.855.343.512
Saldo Awal Kas Transitoris setelah Koreksi (I)	(472)	1.520
Saldo Akhir Kas Transitoris (II)	-	(472)
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II - I)	472	(1.992)
Mutasi Transaksi Kas Transitoris (III)	-	-
Selish Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	(472)	1.992
<i>Keterangan:</i> Merupakan pembulatan Kas Transitoris pada transaksi cross currency yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL.	(472)	-

C.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp175,24 triliun

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp175.241.715.684.646. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara perhitungan Catatan SAL dengan perhitungan Fisik SAL. Rincian saldo akhir SAL dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Saldo Anggaran Lebih Akhir		
Saldo Akhir Kas BUN	114.834.181.946.110	91.287.531.283.185
Saldo Akhir Kas di KPPN	5.127.777.217.073	2.282.077.569.283
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	285.150.273.469	210.828.164.140
Saldo Akhir Kas pada BLU yg Sudah Disahkan	55.010.642.052.353	40.984.519.890.383
Saldo Akhir Kas Hibah di K/L yg Sudah Disahkan	726.888.630.744	4.834.494.025.327
	175.984.640.119.749	139.599.450.932.318
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Saldo di Rek. Escrow yang Memiliki Unsur SAL	3.714.379.337.474	3.276.851.117.024
Utang PPK	(3.991.926.175.494)	(4.305.640.401.487)
Utang PPK dalam Bentuk Invoice	230.659.224	4.001.304
Utang Kpd Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	(485.172.315)	(39.676.912.721)
Selish Kiriman Uang	(330.588.756.176)	298.353.410.242
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	(134.534.327.816)	(276.326.293.082)
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	(742.924.435.103)	(1.246.435.078.720)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	175.241.715.684.646	138.353.015.853.598

Dengan demikian, terdapat peningkatan Saldo SAL pada Tahun 2018 sebesar Rp36.888.699.831.048 dari Saldo SAL Tahun 2017.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

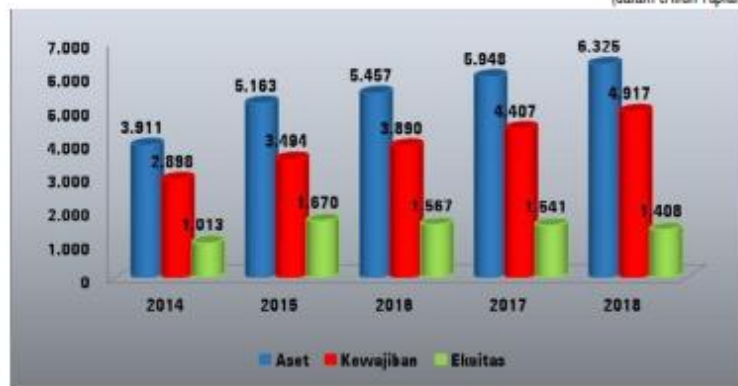
Posisi Neraca secara umum

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut.

Posisi Neraca	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Aset Lancar	437.878.646.078.602	336.812.365.233.132
Investasi Jangka Panjang	2.877.282.832.067.532	2.604.046.312.794.693
Aset Tetap	1.931.051.040.187.638	2.034.803.553.929.061
Piutang Jangka Panjang	57.188.754.504.406	47.810.448.151.143
Aset Lainnya	1.021.884.513.023.392	924.364.674.425.620
Jumlah Aset	6.325.285.785.861.570	5.947.837.354.533.649
Kewajiban Jangka Pendek	750.502.434.401.484	593.449.429.457.947
Kewajiban Jangka Panjang	4.166.975.126.814.345	3.813.604.268.146.762
Jumlah Kewajiban	4.917.477.561.215.829	4.407.053.697.604.709
Ekuitas	1.407.808.224.645.741	1.540.783.656.928.940
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	6.325.285.785.861.570	5.947.837.354.533.649

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 25**.
(dalam triliun rupiah)



Grafik 25 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2014 – 2018

D.2. PENJELASAN PER POS NERACA**D.2.1 ASET****D.2.1.1 Aset Lancar****D.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas****D.2.1.1.1.1 Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia**

*Kas di Rekening
Pemerintah di BI
Rp114,83 triliun*

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp114.834.181.946.110 dan Rp91.287.531.283.185. Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI, dengan rincian sebagai berikut.

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Rekening BUN Nomor 502.000000980	2.457.631.451.020	2.251.960.416.588
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	63.948.250.367	41.095.824.987
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	798.232.662	98.275.892.483
Rekening KUN dalam Valuta EUR	117.908.359.024	250.343.675.250
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor 518.000122980	15.859.223.125.982	10.242.036.867.562
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD Nomor 608.001411980	4.460.730.353.125	2.965.512.966.366
Rekening SAL Nomor 500.000002980	78.075.064.058.877	66.383.586.349.132
Rekening Khusus dalam Valas dan Rupiah	10.392.731.099.473	9.054.719.290.821
Rekening SUBRKUN Kuasa BUN Pusat	-	(4)
Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH (519000143980)	3.406.147.015.577	-
Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Rupiah	3	-
Jumlah	114.834.181.946.110	91.287.531.283.185

D.2.1.1.1.2 Kas di Rekening Pemerintah Lainnya

*Kas di Rekening
Pemerintah
Lainnya Rp5,85
triliun*

Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.851.939.714.224 dan Rp3.905.763.616.747. Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum dengan rincian sebagai berikut.

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji (4 rekening di BNI, Mandiri, BTN dan BRI)	194.057.444.660	195.453.950.729
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	49.530.800	1.984.038.711
Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980)	1.374.911.063.212	1.709.479.552.436
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Nomor 600.000411980)	4.279.644.422.002	1.995.770.488.537

Kas di Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)	(4)	253.706.468
Kas lainnya	3.276.069.510	2.821.879.836
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi (6 rekening dalam rupiah dan valas)	4	10
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah (Nomor 519000102980)	20	15
RPL BUN Unit Pelaksana Proyek Perkebunan SPH	1.179.020	-
Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLK-KUD)	5.000	-
Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali)	1	1
RPL BUN Perusahaan Inti Rakyat Non SPH	(1)	(1)
Jumlah*)	5.851.939.714.224	3.905.763.616.742

*) selisih antara data neraca dengan rincian per 31 Desember 2017 (Audited) sebesar Rp5 karena pembulatan Rekening Panas Bumi sebesar Rp1.374.911.063.212 merupakan kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan panas bumi di Indonesia termasuk kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp4.279.644.422.002 merupakan Kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada pemerintah. Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Panas Bumi disajikan pada **Catatan Penting Lainnya**.

D.2.1.1.1.3 Kas di Rekening Kas di KPPN

Kas di Rekening
Kas di KPPN
Rp5,12 triliun

Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.127.777.217.073 dan Rp2.282.077.569.283. Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia yang ditunjuk selaku Bank/Pos Persepsi serta Bank Operasional dan Rekening SUBBRKUN KPPN pada Bank Indonesia.

Rincian Kas di KPPN dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

D.2.1.1.1.4 Kas dalam Transito

Kas dalam
Transito Rp465

Kas dalam Transito per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp465 dan Rp330.588.755.619. Kas dalam Transito terdiri dari kas dalam transito BUN serta selisih antara catatan penerimaan kiriman uang dengan kode akun 818111 dan pengeluaran kiriman uang dengan kode akun 828111 pada seluruh rekening yang dikelola oleh BUN Pusat dan Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Kas Dalam Transito	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Kas Dalam Transito – BUN	330.588.756.176	(472)
2. Selisih Kiriman Uang antar Rekening Bank	(330.588.756.169)	330.588.756.176
3. Pembulatan	458	(85)
Jumlah	465	330.588.755.619

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp285,15 miliar

D.2.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp285.150.273.469 dan Rp210.828.164.140. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp92,28 miliar

D.2.1.1.1.6 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp92.280.796.378 dan Rp105.738.412.756. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp3,63 triliun

D.2.1.1.1.7 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.638.728.687.898 dan Rp7.680.332.290.094. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan sisa kas yang berada di bendahara pengeluaran selain Uang Persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN sebagai berikut.

Kas Lainnya dan Setara Kas	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
K/L	3.631.533.687.032	7.680.309.646.436
BUN	7.195.000.867	22.643.658
Jumlah*	3.638.728.687.899	7.680.332.290.094

**] selisih data neraca tahun 2018 sebesar Rp1 karena pembulatan*

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari K/L terdiri dari:

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Setara kas lainnya	2.368.973.287	3.421.865.343
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.503.277.817.929	1.292.872.842.163
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	726.888.630.744	4.834.494.025.327
Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI	-	4.022.885.752
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	16.827.906.795	782.400.419
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	407.179.162.727	571.809.033.280
Kas Lainnya di BLU	671.962.767.202	664.498.295.217
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	303.028.428.348	308.408.298.935
Jumlah	3.631.533.687.032	7.680.309.646.436

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

1. Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp1.281.396.850.338 merupakan pendapatan yang belum disahkan, uang muka kerja, dana pihak ketiga, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayar, hibah, dan pajak/jasa giro yang belum disetor ke kas negara.
2. Kementerian Sosial sebesar Rp391.775.845.227 merupakan hibah dan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum disalurkan.
3. Kementerian Keuangan sebesar Rp363.024.058.349 merupakan pendapatan yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayarkan kepada yang bersangkutan, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di BLU, serta pajak yang belum disetor ke kas negara.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp265.088.934.982 sebagian besar merupakan hibah.
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp222.407.919.463 sebagian besar merupakan hibah, titipan/hak pihak ketiga, jasa giro, dan pajak yang belum disetor ke kas negara.
6. Kementerian Kesehatan sebesar Rp173.145.297.853 sebagian besar merupakan hibah, kas lainnya pada BLU, pengembalian belanja dan pendapatan jasa giro yang belum disetor ke kas negara.
7. POLRI sebesar Rp126.473.628.235 sebagian besar merupakan hibah, hak pegawai/pihak ketiga, uang muka pasien Rumah Sakit BLU, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, Kas Lainnya di BLU, dan pajak/jasa giro/pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.
8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp105.945.287.155 merupakan titipan pihak ketiga yang belum disahkan sampai dengan 31 Desember 2018.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN sebesar Rp7.195.000.867 merupakan Kas Lainnya dan Setara Kas pada:

1. BA 999.07 sebesar Rp11.446.470 merupakan jasa giro yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan.
2. BA 999.08 sebesar Rp7.183.554.397 merupakan saldo yang terdapat pada:
 - a. Istana Kepresidenan berupa bantuan kemasyarakatan yang belum disetor sampai dengan tanggal pelaporan sebesar Rp5.329.951.870 dan utang pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp1.633.166.347.
 - b. SKK utang pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan sebesar Rp166.158.880 dan saldo lain-lain yang berasal dari retur pembayaran yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp54.277.300.

D.2.1.1.1.8 Kas pada BLU

*Kas pada BLU
Rp48,79 triliun*

Kas pada BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp48.795.152.993.771 dan Rp28.772.719.623.601. Kas pada BLU merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU pada beberapa K/L dengan rincian sebagai berikut.

Kas pada BLU	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	904.957.640.969	950.428.607.625
2. BLU di Kementerian Pertahanan	58.096.202.573	16.868.661.797
3. BLU di Kementerian Keuangan	22.717.545.215.069	5.098.913.847.342
4. BLU di Kementerian Pertanian	90.650.947.758	98.303.035.727
5. BLU di Kementerian Perindustrian	71.478.397.756	73.566.795.784
6. BLU di Kementerian ESDM	120.726.309.982	52.287.038.958
7. BLU di Kementerian Perhubungan	868.613.894.298	737.030.441.915
8. BLU di Kementerian Kesehatan	1.849.005.553.191	2.243.446.441.759
9. BLU di Kementerian Agama	884.621.264.398	858.430.167.529
10. BLU di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	922.303.158.596	839.952.533.771
11. BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	27.095.500.565	-
12. BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.269.856.342.589	1.723.562.568.513
13. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	3.176.916.338.139	2.591.818.310.642
14. BLU di Kementerian Negara KUKM	883.834.264.321	765.165.735.606
15. BLU di Kementerian Kominfo	12.858.068.421.709	11.931.874.968.079
16. BLU di Kepolisian RI	256.232.999.313	305.177.129.823
17. BLU di BPPT	38.455.953.365	38.097.086.146
18. Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga	203.999.501.633	1.636.519.866
19. BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBB Batam)	586.726.344.967	442.619.085.919
20. BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBB Sabang)	5.968.742.580	3.540.646.800
Jumlah	48.795.152.993.771	28.772.719.623.601

Kas pada BLU sebesar Rp48.795.152.993.771 merupakan Kas pada BLU yang sudah disahkan. Di samping itu, terdapat Investasi Jangka Pendek berupa Deposito sebesar Rp6.215.489.058.582, yang berasal dari reklasifikasi Kas di BLU. Dengan demikian, jumlah Kas di BLU yang berasal dari Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B) menurut K/L sebesar Rp55.010.642.052.353 (Rp48.795.152.993.771 ditambah Rp6.215.489.058.582) dan telah sesuai dengan nilai Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN.

Uang Muka
Rekening BUN
Rp106,93 miliar

D.2.1.1.2 Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Uang Muka Rekening BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp106.939.618.970 dan Rp38.165.547.963. Uang Muka Rekening BUN adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009. Uang Muka Rekening BUN merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum dibebankan ke Reksus karena saldo Reksus tidak mencukupi. Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Rincian Uang Muka Rekening BUN menurut *lender* sebagai berikut.

Lender	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. IBRD	4.770.340.651	3.391.853.007
2. ADB	1.337.462.511	122.123.356
3. OECF/JBIC	-	19.459.000
4. IFAD	871.774.698	457.092.600
5. IDB	340.547.160	-
6. Australia	-	34.167.000.000
7. SBSN	98.985.926.350	8.020.000
8. KFW	633.567.600	-
Jumlah	106.939.618.970	38.165.547.963

D.2.1.1.3 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka
Pendek Rp6,21
triliun

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.215.489.058.582 dan Rp12.204.408.488.386. Investasi Jangka Pendek merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2018 merupakan deposito yang berada di BLU dengan rincian sebagai berikut.

Investasi Jangka Pendek	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. BLU pada Kementerian Keuangan	2.592.473.339.265	8.730.956.109.060
2. BLU pada Kementerian Negara Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	3.100.019.151.495	2.953.985.171.122
3. BLU pada Kementerian Kesehatan	450.246.567.822	371.467.208.204
4. BLU pada Kementerian Perhubungan	9.000.000.000	79.000.000.000
5. BLU pada Kementerian Agama	58.250.000.000	59.000.000.000
6. BLU pada Kementerian ESDM	5.500.000.000	10.000.000.000
Jumlah	6.215.489.058.582	12.204.408.488.386

D.2.1.1.4 Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja

Belanja Dibayar
di Muka dan
Uang Muka
Belanja Rp31,02
triliun

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp31.026.237.178.411 dan Rp17.261.771.032.885. Uang Muka Belanja mencakup pembayaran melalui termin kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang akan dilaksanakan, sedangkan Belanja Dibayar Di Muka mencakup pembayaran penuh atas barang atau jasa yang akan diterima. Rincian Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja sebagai berikut.

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Belanja Dibayar di Muka	23.669.417.801.342	6.048.710.078.004
Uang Muka Belanja	7.356.819.377.069	11.213.060.954.881
Jumlah	31.026.237.178.411	17.261.771.032.885

Belanja Dibayar di Muka yang memiliki nilai yang paling signifikan terdapat pada pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp10.281.967.652.641 dan Kementerian Pertanian sebesar Rp7.199.940.494.192.

Uang Muka Belanja yang memiliki nilai paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.825.359.174.425 dan POLRI sebesar Rp1.494.519.431.842. Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja. Rincian Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

D.2.1.1.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp637,14 miliar

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp637.147.289.481 dan Rp576.867.095.851. Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp547.460.256.932. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

D.2.1.1.6 Piutang

Piutang Perpajakan Rp81,47 triliun

D.2.1.1.6.1 Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp81.477.055.227.031 dan Rp58.621.958.896.480. Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) sebesar Rp36.989.612.359.677 berasal dari nilai bruto sebesar Rp81.477.055.227.031 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp44.487.442.867.354.

Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2018. Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Perpajakan menurut organisasi sebagai berikut.

(dalam ribuan)

Piutang Perpajakan	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Direktorat Jenderal Pajak:		
Nilai Bruto	68.090.740.726	54.160.090.238
Penyisihan	(41.098.667.934)	(27.725.482.667)
Nilai Neto	26.992.072.792	26.434.607.571
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:		
Nilai Bruto	13.386.314.501	4.461.868.658
Penyisihan	(3.388.774.933)	(3.324.042.373)
Nilai Neto	9.997.539.568	1.137.826.285
Jumlah Bruto	81.477.055.227	58.621.958.896
Penyisihan Piutang Perpajakan	(44.487.442.867)	(31.049.525.040)
Jumlah Neto	36.989.612.360	27.572.433.856

Saldo piutang pajak bruto mengalami kenaikan sebesar Rp22.855.096.330.551 atau sebesar 38,98% antara lain karena adanya kenaikan Piutang Cukai dan Bea Meterai sebesar Rp8.823.309.015.104, Piutang Pajak Lainnya sebesar Rp8.611.289.193.763, dan Piutang Pajak PPh Non Migas sebesar Rp4.041.520.001.772.

Rincian Piutang Perpajakan (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak sebagai berikut.

(dalam ribuan)

Piutang Perpajakan	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)	Kenaikan/ (penurunan)	%
1. Piutang Pajak PPH Non Migas	24.226.282.819	20.184.762.817	4.041.520.002	20,02
2. Piutang Pajak PPN	24.061.126.456	24.241.668.611	(180.542.155)	(0,74)
3. Piutang Pajak PPhBM	506.938.435	355.413.375	151.525.060	42,63
4. Piutang Pajak PBB dan BPHTB	7.968.671.988	6.819.833.386	1.148.838.602	16,85
5. Piutang Cukai dan Bea Meterai	8.913.391.928	90.082.913	8.823.309.015	9.794,65
6. Piutang Pajak Lainnya	11.704.776.608	3.093.487.414	8.611.289.194	278,37
7. Piutang Pajak Perdagangan Internasional	4.030.766.089	3.812.291.758	218.474.331	5,73
8. Piutang Bea Masuk Tindakan	65.100.905	24.418.623	40.682.282	166,60
Jumlah	81.477.055.228	58.621.958.897	22.855.096.331	38,987

Rincian Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih per jenis Piutang Perpajakan sebagai berikut.

(dalam ribuan)

Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	Kenaikan/ (penurunan)	%
1. Piutang Pajak PPH Non Migas	(15.608.454.940)	(12.327.832.755)	(3.280.622.185)	26,61
2. Piutang Pajak PPN	(12.910.651.974)	(11.863.974.673)	(1.046.677.301)	8,82
3. Piutang Pajak PPhBM	(452.316.382)	(299.430.166)	(152.886.216)	51,06
4. Piutang Pajak PBB dan BPHTB	(2.692.417.812)	(2.126.318.365)	(566.099.447)	26,62
5. Piutang Cukai dan Bea Meterai	(157.090.888)	(81.011.399)	(76.079.489)	93,91
6. Piutang Pajak Lainnya	(9.561.022.376)	(1.235.170.751)	(8.325.851.625)	674,06
7. Piutang Pajak Perdagangan Internasional	(3.105.488.495)	(3.115.786.931)	10.298.436	(0,33)
Jumlah	(44.487.442.867)	(31.049.525.040)	(13.437.917.827)	43,279

*J. Selsih Rp1 Tahun 2018 merupakan pembulatan

Pada tahun 2018 saldo piutang yang dihapusbukukan sebesar Rp23.545.731.800.089 mengalami penurunan sebesar Rp9.208.465.044.843 dari saldo 2017 sebesar Rp32.754.196.844.932. Penurunan tersebut disebabkan antara lain oleh adanya penghapustagihan Piutang Pajak, pembayaran/pelunasan oleh Wajib Pajak, dan penghitungan kembali daluwarsa Piutang Pajak.

Dalam hal terdapat Piutang Perpajakan daluwarsa yang berdasarkan hasil penelitian terdapat kesalahan dalam penentuan kriteria daluwarsanya, atas Piutang tersebut dicatat kembali di dalam Neraca. Demikian pula dalam hal terdapat Piutang Perpajakan daluwarsa yang dikeluarkan dari neraca tersebut di kemudian hari ternyata diterima pembayarannya, maka Piutang Pajak tersebut akan dicatat kembali sebesar nilai yang diterima. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, pemerintah memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali.

Piutang Perpajakan yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Sampai dengan 31 Desember 2018, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 248.503 dengan total nilai ketetapan sebesar Rp83.514.611.978.805 dan USD953,466,142.00.

Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan sebagai berikut.

Pajak	Kurs	Jumlah Data	Nilai Ketetapan Pajak	Nilai Setuju	Nilai Tidak setuju
PPh Final	IDR	70.290	6.059.092.433.684	1.237.839.170.756	4.821.253.262.928
	USD	13	25.574.777	10.733.841	14.840.936
PPh Pasal 21	IDR	16.531	2.119.367.528.952	1.089.014.659.370	1.030.352.869.582
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 22	IDR	2.600	1.967.832.136.875	494.271.760.096	1.473.560.376.779
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 23	IDR	34.591	6.395.152.601.047	1.677.038.792.802	4.718.113.808.245
	USD	2	181.998	4.625	177.373
PPh Pasal 25 Badan	IDR	7.007	26.192.419.076.089	5.277.029.225.364	20.915.389.850.725
	USD	329	927.709.368	125.624.843	802.084.525
PPh Pasal 25 OP	IDR	2.957	623.050.170.156	329.538.654.607	293.511.515.549
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 26	IDR	3.773	4.536.487.011.007	1.100.179.416.165	3.436.307.594.842
	USD	-	-	-	-
PPN	IDR	110.286	35.514.020.301.861	8.113.984.733.539	27.400.035.568.322
	USD	-	-	-	-
PPnBM	IDR	44	81.336.050.783	48.570.482.071	32.765.568.712
	USD	-	-	-	-
Bea Materai	IDR	80	25.854.668.351	6.503.024.351	19.351.644.000
	USD	-	-	-	-
Jumlah	IDR	248.159	83.514.611.978.805	19.373.969.919.121	64.140.642.059.684
	USD	344	953,466,143	136,363,309	817,102,834

*) Selsih Rp1 Tahun 2018 merupakan pembulatan

Rincian Piutang Perpajakan dapat dilihat pada Lampiran 8.

D.2.1.1.6.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp176,24 triliun

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp176.243.261.284.193 dan Rp158.620.573.008.549. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp50.037.611.353.960, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp176.243.261.284.193 dikurangi Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp126.205.649.930.233.

Rincian Piutang Bukan Pajak sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Piutang pada K/L:		
Nilai Bruto	42.436.309.628.220	37.946.995.596.919
Penyisihan	(32.208.264.178.309)	(27.798.207.844.367)
Nilai Neto	10.228.045.449.911	10.148.787.752.552
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	133.806.951.655.973	120.673.577.411.630
Penyisihan	(93.997.385.751.924)	(99.456.395.011.878)
Nilai Neto	39.809.565.904.049	21.217.182.399.752
Jumlah Bruto	176.243.261.284.193	158.620.573.008.549
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(126.205.649.930.233)	(127.254.602.856.245)
Jumlah Neto	50.037.611.353.960	31.365.970.152.304

Piutang Bukan Pajak di K/L Rp42,43 triliun

Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2018 sebesar Rp42.436.309.628.220 mengalami kenaikan sebesar Rp4.489.314.031.301 atau 11,83% dibandingkan tahun 2017. Beberapa Piutang Bukan Pajak pada K/L yang mempunyai nilai cukup signifikan, antara lain pada:

- Kejaksanaan Agung sebesar Rp17.658.347.583.931 merupakan piutang dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, denda tilang, dan sewa rumah dinas.
- Kementerian ESDM sebesar Rp14.659.967.368.426 sebagian besar merupakan piutang yang berasal dari luran Royalti dan luran Tetap Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta kewajiban KKKs kepada negara berupa *Firm Commitment*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp3.999.519.410.852 berasal dari tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH DR) dan tunggakan ganti rugi tegakan.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.323.688.942.817 berasal dari Biaya Hak Penyelenggaran (BHP) Telekomunikasi dan Pengenaan Denda.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2018 dapat dilihat di **Lampiran 9**.

Piutang Bukan Pajak di BUN Rp133,80 triliun

Piutang Bukan Pajak pada BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp133.806.951.655.973 dan Rp120.673.577.411.630, terdiri dari:

Piutang Bukan Pajak pada BUN	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)
Piutang Dividen pada BA 999.03	125.924.962.205	130.507.641.516
Piutang PNB pada BA 999.05	14.361.357.610.243	12.587.181.424.549
Piutang Subsidi pada BA 999.07	1.142.839.475.600	2.418.199.044.056
Piutang Belanja Lain-lain pada BA 999.08	1.168.517.287.943	298.954.011.484
Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99	117.008.312.319.982	105.238.735.290.025
Jumlah	133.806.951.655.973	120.673.577.411.630

- a. Piutang Dividen (Bagian Laba BUMN) pada BA 999.03 per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp125.924.962.205 dan Rp130.507.641.516. dengan rincian sebagai berikut.

Piutang Dividen pada BA 999.03	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)
Pokok Dividen	90.426.389.353	90.350.726.664
Denda	35.498.572.852	40.156.914.852
Jumlah	125.924.962.205	130.507.641.516

Rincian Piutang Dividen (Bagian laba BUMN) pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut.

BUMN	Tahun Buku Terjadinya Piutang	Nilai Piutang
PT Balai Pustaka	2004	231.749.799
Perum Perumnas	1991-1997	63.225.637.648
PT Perkebunan Nusantara II	1999	14.167.527.690
PT Inhutani I	2000	812.468.076
PT Inhutani V	1999	2.421.919.265
PT Bina Karya	2001	178.308.462
PT Istaka Karya	2003	8.391.154.934
PT Industri Sandang Nusantara	1978-2001	33.586.982.444
PT Kertas Gowa (telah dilikuidasi)	1972-1980	715.651.799
PT Indah Karya	2017	2.193.562.087
Jumlah		125.924.962.205

*selisih sebesar Rp1 karena pembulatan

- b. Piutang PNBPN pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp14.361.357.610.243 dan Rp12.587.181.424.549. Piutang pada BA 999.05 merupakan piutang transfer ke daerah akibat lebih salur yang terjadi pada periode tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya. Atas lebih salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan lebih salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan jenis akunnya, piutang pada BA 999.05 sebesar Rp14.361.357.610.243 dijelaskan sebagai berikut.

Piutang pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Piutang TKD	13.029.228.490.793	10.799.485.615.144
Piutang TKD Diestimasi	1.332.129.119.450	1.787.695.809.405
Jumlah	14.361.357.610.243	12.587.181.424.549

1) Piutang TKD

Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018, meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas Lebih Salur transfer yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun sebelumnya. Atas Lebih Salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan Lebih Salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Piutang TKD TA 2018 sebesar Rp13.029.228.490.793, terdiri dari:

Piutang TKD	31 Desember 2018 (Audited)
Satker Dana Bagi Hasil	12.494.317.546.569
Satker DAU dan DAK Non Fisik	497.683.632.667
Satker Dana Keistimewaan DIY	37.227.311.557
Jumlah	13.029.228.490.793

Piutang TKD Satker DBH TA 2018 sebesar Rp12.494.317.546.569 per tanggal 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

Uraian	Sumber	31 Desember 2018 (Audited)
Lebih Bayar Tahun 2013, 2014, 2015	PMK 259/2015	3.909.250.837.716
	PMK 162/2015	-
	PMK 103/2018	-
Lebih Bayar Tahun 2016	PMK 187/2017	6.784.940.728.900
	PMK 103/2018	-
Lebih Bayar Tahun 2017	PMK 103/2018	1.800.125.979.953
TOTAL		12.494.317.546.569

Piutang PNPB pada Satker DAU-DAK merupakan Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker DAU dan DAK per 31 Desember 2018 meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas Lebih Salur transfer yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun anggaran sebelumnya. Nilai Piutang TKD yang tercatat per 31 Desember 2018 sebesar Rp497.683.632.667.

Rincian Piutang TKD sebagai berikut.

Piutang PNPB pada Satker DAU-DAK	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)
Lebih Salur Dana DAK Fisik TA 2016	-	48.931.543.176
Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV TA 2017	-	175.641.395.881
Lebih Salur Dana BOS TA 2018	497.683.632.667	-
Jumlah	497.683.632.667	224.572.939.057

2) Piutang TKD Diestimasi

Piutang TKD Diestimasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.332.129.119.450. Saldo ini merupakan nilai hasil estimasi lebih bayar DBH. Dibandingkan dengan 31 Desember 2017, Piutang TKD Diestimasi mengalami penurunan sebesar Rp455.566.689.955 di mana saldo piutang TKD Diestimasi per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp1.787.695.809.405 (telah direklasifikasi menjadi Piutang TKD dengan ditetapkannya PMK No. 103/PMK.07/2018).

Rincian Piutang TKD Diestimasi TA 2018 sebagai berikut.

Piutang TKD Diestimasi	Nilai Piutang
Estimasi LB PPh pasal 21 2018	472.528.697.334
Estimasi LB PPh pasal 25 2018	652.019.744.442
Estimasi LB Kehutanan IUUPH 2018	84.591.325.503
Estimasi LB Pertambangan Umum-Iuran Tetap	122.989.352.171
Jumlah	1.332.129.119.450

- c. Piutang Subsidi pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.142.839.475.600 dan Rp2.418.199.044.056. Piutang sebesar Rp1.142.839.475.600 terdiri dari:

Piutang pada BA 999.07	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)
Kementerian Sosial	-	834.824.264.978
Kementerian Perhubungan	143.196.727.531	385.229.458.233
Kementerian Keuangan	816.849.136.778	-
Kementerian PUPR	203.000.000	-
Kementerian Pertanian	182.590.611.291	1.198.145.320.845
Jumlah	1.142.839.475.600	2.418.199.044.056

- 1) Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebesar Rp143.196.727.531 yang merupakan kelebihan pembayaran atas Subsidi/PSO oleh PT KAI berdasarkan hasil audit BPK RI.
 - 2) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp816.849.136.778,00. Nilai piutang tersebut timbul dari pembayaran kepada golongan tarif 900 VA RTM (R-I/TR) yang bukan golongan tarif bersubsidi dalam APBN 2018 sebesar Rp5.365.707.937.752,00 yang telah diperhitungkan untuk menyelesaikan utang subsidi listrik sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp4.548.858.800.974,00.
 - 3) Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR sebesar Rp203.000.000 yang merupakan koreksi atas pencatatan piutang lebih bayar penyaluran SBUM tahun 2018 karena duplikasi pembayaran pada BTN senilai Rp27.000.000 dan kelebihan pembayaran pada BTN senilai Rp176.000.000.
 - 4) Piutang Bukan Pajak Kementerian Pertanian sebesar Rp182.590.611.291 yang terdiri atas piutang bukan pajak pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp12.453.015.134 yang merupakan sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih oleh PT Sang Hyang Seri berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2014 dan Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp170.137.596.157 yang merupakan kelebihan pembayaran atas Subsidi Pupuk oleh PT Pupuk Iskandar Muda berdasarkan hasil audit BPK RI.
- d. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.168.517.287.943 dan Rp298.954.011.484. Rincian Piutang pada BA 999.08 sebagai berikut.

Piutang pada BA 999.08	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Kementerian Keuangan	888.686.999.287	19.694.995.500
Kementerian Pertanian	277.566.811.272	279.109.577.585
Otoritas Jasa Keuangan	2.263.477.384	149.438.400
Jumlah*	1.168.517.287.943	298.954.011.485

*J) Selisih data neraca tahun 2017 sebesar Rp1 karena pembulatan

- a. Piutang sebesar Rp888.686.999.287 pada Kementerian Keuangan merupakan penjualan Operasi Pasar Murni (OPM) Satuan Kerja BA BUN Direktorat Jenderal Perbendaharaan (BA999.08.999979) CBP Tahun 2018 yang belum diterima pelunasannya.
- b. Piutang sebesar Rp277.566.811.272 pada Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian terdiri dari:

Piutang	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Dana penyegaran Benih CBN	4.811.607.957	4.811.607.957
Jasa Giro Dana CBN	71.870.618	98.702.334
Benih CBN di penangkar	7.551.590.160	47.614.294.265
Benih CBN tidak terdapat di gudang dan penangkar	249.920.932.558	196.957.839.678
Biaya Distribusi Benih CBN	14.388.461.647	14.810.489.747
Calon Benih	633.246.080	2.128.255.052
Benih Rusak/Kadaluwarsa	189.102.252	12.688.388.552
Jumlah	277.566.811.272	279.109.577.585

- c. Piutang sebesar Rp2.263.477.384 pada Otoritas Jasa Keuangan merupakan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.
- e. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp117.008.312.319.982 dan Rp105.238.735.290.025 . Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99 dijelaskan sebagai berikut.

Piutang PNPB pada BUN Transaksi Khusus	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Piutang pada UAPBUN TK DJPBN	162.094.275.907	132.742.498.288
Piutang pada UAPBUN TK DJA	22.880.302.482.313	16.131.433.244.963
Piutang pada UAPBUN TK DJKN	93.965.915.561.762	88.974.559.546.774
Jumlah	117.008.312.319.982	105.238.735.290.025

- l) Piutang pada UAPBUN TK DJPBN sebesar Rp162.094.275.907, terdiri dari:

Piutang pada satker pengelola Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Akumulasi Iuran Pensiun sebesar Rp133.395.393.371 dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	Jumlah
Saldo Utang Pensiun (SUP) dan Retur bulan Desember 2018 (PT Asabri)	14.461.399.900
SUP > 3 bulan (tunai) dan >= 6 bulan (rekening) (PT Asabri)	18.977.722.700
Jasa Giro bulan Desember 2018 (PT Asabri)	183.777.190
Kelebihan pencairan dana bulan Desember 2018 (PT Asabri)	8.881.694.668
Potongan utang non TGR (Non Dapem Desember 2018) (PT Asabri)	103.648.276
Keterlaksanaan bayar hasil uji petik (PT Asabri)	1.024.701.600
Piutang Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi s.d. 30 November 2018	1.075.000
Kelebihan pembayaran dana kontribusi pensiun eks Kemenhub Triwulan IV Tahun 2018 (PT Taspen)	14.447.669.640
Kelebihan pembayaran dana kontribusi pensiun eks Kemenhub Gaji 13 Triwulan IV Tahun 2018 (PT Taspen)	6.691.932
Kelebihan Pencairan Belanja Pensiun bulan Desember 2018 (PT Taspen)	32.281.565.294
SUP 2018 (PT Taspen)	26.949.798.166
SUP Retur Desember 2018 (PT Taspen)	6.938.155.997
Keterlaksanaan pembayaran pensiun (PT Taspen)	3.634.644.040
Piutang Jasa Giro Taspen Desember 2018 (PT Taspen)	3.350.199.158
Piutang Kelebihan pencairan dana iuran jaminan kesehatan Tahun 2018 Rampung	2.152.649.810
Jumlah	133.395.393.371

Piutang pada satker transaksi khusus pengelola kas negara sebesar Rp28.698.882.536 berasal dari piutang atas kekurangan setor pendapatan pelaksanaan *Treasury National Pooling* bulan November dan Desember 2018 yang akan diterima pada bulan Januari 2019.

- 2) Piutang PNBP UAPBUN TK DJA merupakan merupakan piutang PNBP Migas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp22.880.302.482.313 dan Rp16.131.433.244.963, yang seluruhnya merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas. Piutang migas terdiri dari piutang hasil penjualan minyak bumi bagian pemerintah, hasil penjualan gas bumi bagian pemerintah, *overlifting* KKKS dan piutang PNBP migas lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Hasil Penjualan Minyak	10.163.287.329.467	9.918.983.786.794
Hasil Penjualan Gas	7.395.990.110.500	4.210.019.459.533
<i>Overlifting</i> KKKS	4.859.318.092.586	1.548.862.123.895
PNBP Migas Lainnya	461.706.949.760	453.567.874.741
Jumlah	22.880.302.482.313	16.131.433.244.963

Saldo piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.880.302.482.313 lebih tinggi Rp6.748.869.237.350 dari posisi per 31 Desember 2017. Dari total saldo piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.880.302.482.313 tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut.

- a. Di dalam nilai saldo piutang tersebut masih terdapat piutang yang statusnya *dispute* disebabkan adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dengan KKKS, yaitu:
- 1) Piutang yang berasal dari transaksi *overlifting* minyak KKKS CNOOC SES Ltd. Tahun 2015 sebesar USD887,672 dan *overlifting* KKKS Tahun 2016 sebesar USD12,197,508. Perbedaan pendapat tersebut menyangkut pemahaman kontraktual PSC yang terkait dengan klausul yang berkenaan dengan besaran kewajiban KKKS atas *Domestic Market Obligation (DMO)*. Dimana, hal tersebut berdampak terhadap perbedaan perhitungan bagi hasil atas *over/under lifting* tahun 2015 dan 2016 antara SKK Migas dan KKKS CNOOC SES Ltd. Untuk tahun 2015, menurut perhitungan SKK Migas, KKKS CNOOC SES Ltd. memiliki *overlifting* minyak sebesar USD887,672, namun menurut perhitungan KKKS CNOOC SES Ltd. Pemerintah malah dianggap memiliki kewajiban atas *underlifting* KKKS tahun 2015 sebesar USD27,571,054. Sementara itu untuk tahun 2016, menurut perhitungan SKK Migas KKKS CNOOC SES Ltd. memiliki *overlifting* sebesar USD12,197,508, namun menurut KKKS CNOOC SES Ltd. *overlifting*-nya hanya sebesar USD1,518,247.
 - 2) Piutang yang berasal dari transaksi *overlifting* KKKS Conoco Phillips (Grissik) tahun 2017 sebesar USD18,238,353. Terjadi *dispute* atas *cost recovery* dalam perhitungan bagi hasil tahun 2017, dimana atas *overlifting* minyak dan gas bumi KKKS Conoco Phillips (Grissik) Tahun 2017 yang ditagihkan oleh SKK Migas sebesar USD45,022,132 hanya diakui oleh KKKS yang bersangkutan sebesar USD26,783,779.

- b. Selain itu, dalam nilai saldo piutang tersebut sebesar USD289,892,976.22 atau setara dengan Rp4.197.940.188.610,58 juga masih merupakan nilai piutang yang bersifat estimasi, yaitu atas piutang *overlifting* KKKS tahun 2018 yang disampaikan oleh SKK Migas. Nilai estimasi piutang *overlifting* yang disampaikan oleh SKK Migas tersebut adalah berdasarkan *cut off* pengumpulan data oleh SKK Migas dari KKKS per 1 Februari 2018 dan belum melalui proses evaluasi dan pembahasan bersama antara SKK Migas dan KKKS. Keseluruhan nilai *final over/underlifting* tahun 2018 baru dapat diperoleh sekitar akhir bulan Mei atau awal bulan Juni 2019.
- c. Dalam nilai saldo piutang tersebut di atas, juga telah berkurang oleh pencatatan atas kelebihan penerimaan hasil penjualan gas KKKS **JOB PPEJ** kepada PT Gassuma Corporindo sebagai akibat dari penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut dari November 2014 s.d. Juli 2017 sebesar USD833,499.78 yang dilaporkan oleh SKK Migas dalam Laporan Hasil Pengiriman Gas Bumi (Laporan A04 Natural Gas). Kelebihan penerimaan hasil penjualan gas tersebut belum diproses lebih lanjut karena Direktorat Jenderal Anggaran menunggu kepastian legalitas dari Biro Hukum Kementerian Keuangan atas transaksi penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut.
- 3) Piutang bukan pajak pada UAPBUNTK DJKN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp93.965.915.561.762 dan Rp88.974.559.546.774 yang merupakan piutang yang berasal dari:

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	1.176.715.352.919	1.176.715.352.919
Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Lain-lain	25.000	18.759.829
Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	92.768.450.185.730	87.778.562.323.202
Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset KKKS	20.749.998.113	19.263.110.823
Jumlah*	93.965.915.561.762	88.974.559.546.773

*Jumlah data neraca tahun 2017 sebesar Rp1 karena pembulatan

- a) Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP sebesar Rp1.176.715.352.919.
- Perhitungan Piutang PNBP didasarkan pada Surat Kepala SKK MIGAS Nomor: SRT-1294/SKK.00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa *equipment*, bangunan dan aset lainnya yang digunakan oleh PT Pertamina untuk menunjang kegiatan operasional senilai Rp6.630.929.353.338. Untuk aset yang berupa lahan dan sumur sepanjang merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan dapat dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS). Jumlah BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 tersebut diperhitungkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai tarif sewa dengan perhitungan secara prorata untuk jangka waktu 32 (tiga puluh dua) tahun sejak PT Pertamina (Persero) berdiri pada 17 September

2003. Oleh karena itu, tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 dibagi 384 bulan sama dengan Rp17.268.045.191 per bulan. Perhitungan Piutang PNBP untuk sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP hingga Tahun 2018 sebesar Rp1.176.715.352.919, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Mutasi Piutang PNBP	Nilai (Rp)
Saldo 1 Januari 2018	1.176.715.352.919
Mutasi Tambah:	
Sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun Buku 2018	207.216.542.292
Mutasi Kurang:	
Pembayaran Sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP	(207.216.542.292)
Saldo 31 Desember 2018	1.176.715.352.919

- b) Piutang Bukan Pajak Aset Lain-Lain. Terdapat piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari hasil lelang yang belum disetor di triwulan II 2018 sebesar Rp25.000.
- c) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp92.768.450.185.730 dan 87.778.562.323.202. Rincian Piutang Aset BLBI sebagai berikut.

Piutang Aset BLBI dan KKKS	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Aset Kredit Eks BPPN	73.449.774.111.948	68.570.198.091.260
Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA	9.224.824.677.306	8.188.857.769.778
Aset Kredit Yang Diserahkelolakan Kepada PT PPA	-	873.811.488.440
Piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL)	10.093.368.778.47	10.132.339.475.545
Piutang Pada PT PPA	-	12.721.729.178
Piutang Bukan Pajak yang timbul dari Pemberian BLBI	-	633.769.000
Piutang Kegiatan Sewa ke Indosat	482.618.000	-
Jumlah*	92.768.450.185.733	87.778.562.323.202

*Jeslsh sebesar Rp3 karena pembulatan

- 1) Aset Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp73.449.744.111.948 dan Rp68.570.198.091.260. Perubahan nilai Aset Kredit Eks BPPN disebabkan adanya penyerahan pengurusan piutang negara, pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur/obligor, koreksi besaran piutang negara, pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, serta pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
- 2) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp9.224.824.677.306 dan Rp8.188.857.769.778. Perubahan nilai Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA disebabkan adanya pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, dan pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Rincian Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Aset Kredit yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negeranya Kepada PUPN	4.021.040.786.202	3.919.833.561.326
Aset Kredit yang masih dikelola Kementerian Keuangan (DJKN)	5.203.783.891.104	4.269.024.208.453
Jumlah*	9.224.824.677.306	8.188.857.769.779

* selisih antara data neraca Tahun 2017 dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan

Dari Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang masih dikelola oleh DJKN sebesar Rp5.203.783.891.104, terdapat aset kredit sebesar Rp3.610.641.294.586 yang masih dalam tahap restrukturisasi utang.

- 3) Piutang Lain-Lain aset kredit yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) per 31 Desember 2018 sebesar Rp0, sedangkan Per 31 Desember 2017 sebesar Rp873.811.488.440. Penurunan saldo Piutang Lain-Lain aset kredit yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) ini disebabkan aset kredit yang selama ini diserahkan kepada PT PPA (persero) tidak lagi dilakukan perjanjian serah kelola antara Kementerian Keuangan dengan PT PPA (persero).
- 4) Saldo Piutang eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp10.093.368.778.479 dan Rp10.132.339.475.545. Piutang eks BDL terdiri dari 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan dan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan.
 - 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan terdiri dari:
 - 13 (tiga belas) Bank Dalam Likuidasi telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;
 - 1 (satu) BDL yaitu PT Bank Umum Majapahit Jaya telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham pembubaran Tim Likuidasi;
 - 1 (satu) BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta, namun PT Bank Jakarta pada tahun 2012 telah melunasi kewajibannya.
 Sedangkan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan sebagai berikut.
 - 4 (empat) BDL yaitu Bank Prasadha Utama, PT Bank Asiatic, PT Bank Global Internasional, dan PT Bank Dagang Bali telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;
 - 1 (satu) BDL, yaitu PT Bank Ratu, tidak melakukan penandatanganan BAST Aset, namun pada semester II tahun 2017 telah melunasi kewajibannya.
 Saldo Piutang eks BDL per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.093.368.778.479, sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp10.132.339.475.545. Penurunan nilai Piutang eks BDL dikarenakan pembayaran/penyelesaian atas aset kredit eks BDL yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
 - 5) Saldo Piutang Pada PT PPA per 31 Desember 2018 sebesar Rp0 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.721.729.178. Piutang pada PT PPA (Persero) adalah tagihan Kementerian Keuangan kepada PT PPA (Persero) terkait pelaksanaan perjanjian pengelolaan aset eks BPPN berupa hasil pengelolaan aset yang telah

diperoleh dalam tahun anggaran namun belum disetorkan ke kas umum negara.

Pada tanggal 12 Mei 2018 telah dilakukan pembayaran oleh PT PPA atas piutang tersebut, sehingga saldo pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0.

- 6) PNBPN yang timbul dari pemberian BLBI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dan Rp633.769.000.
- 7) Piutang kegiatan sewa kepada Indosat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp482.618.000 dan Rp0.
- d) Piutang Bukan Pajak Aset Eks KKKS
Piutang KKKS sebesar Rp20.749.998.113 terdiri dari (1) Piutang Job Pertamina Petrochina East Java PT Pertamina (Persero) sebesar USD1,422,858.65 atau sebesar Rp20.604.416.111, dan (2) Piutang Conoco Philips Indonesia Inc, Ltd Perusda Anambas Sejahtera sebesar Rp145.582.002.

D.2.1.1.6.3 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA
Rp10,54 miliar

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp10.541.206.650 dan Rp9.689.533.832. Bagian Lancar TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp8.755.511.370 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp10.541.206.650 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.785.695.280. Saldo Bagian Lancar TPA tersebut berada di Kementerian PUPR sebesar Rp8.791.243.398, Kementerian KUKM sebesar Rp1.220.552.288, dan LPP RRI sebesar Rp529.410.964.

D.2.1.1.6.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp132,92 miliar

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp132.923.950.960 dan Rp134.439.614.178. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan saldo Tagihan TP/TGR pada K/L yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp45.413.990.611 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp132.923.950.960 dikurangi penyisihan sebesar Rp87.509.960.349. Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

D.2.1.1.6.5 Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman

Bagian Lancar
Piutang
Pemberian
Pinjaman
Rp23,60 triliun

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp23.609.406.852.881 dan Rp22.591.650.468.443.

Rincian Bagian Lancar Penerusan Pinjaman sebagai berikut.

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	13.076.833.905.203	12.712.303.683.642
Piutang Bunga Pemberian Pinjaman Penyesuaian	4.002.513.667.578	4.387.248.377.574
Piutang Denda Pemberian Pinjaman	1.216.332.449.136	796.105.289.184
Piutang Jasa Bank Pemberian Pinjaman	894.292.896.365	957.372.476.610
Piutang Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	3.900.355.300.304	3.365.746.890.439
Piutang Bunga Akrual Pemberian Pinjaman	519.078.634.295	372.873.750.994
Jumlah	23.609.406.852.881	22.591.650.468.443

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp9.275.810.791.356 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp23.609.406.852.881 dikurangi penyisihan sebesar Rp14.333.596.061.525.

D.2.1.1.6.6 Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya

*Bagian Lancar
Piutang Jangka
Panjang Lainnya
Rp6,29 triliun*

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.295.339.227.189 dan Rp1.086.601.779.631. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus.

Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut.

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang PT Minarak Lapindo Jaya tahun 2015 - 2018	773.382.049.559	573.849.480.773
Penerimaan pembiayaan tahun 2018 untuk Piutang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ^{a)}	(5.000.000.000)	-
Bunga tahun 2015 - 2018	126.834.656.128	37.122.338.378
Denda Keterlambatan Pengembalian Pinjaman	699.137.372.801	282.284.448.089
Piutang yang Jatuh Tempo	-	193.345.512.391
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar	4.700.985.148.701	
Jumlah	6.295.339.227.189	1.086.601.779.631

^{a)} Penerimaan pembiayaan tahun 2018 mengurangi total piutang PT Minarak Lapindo namun kebijakan penerimaan pembiayaan tersebut sebagai komponen pengurang saldo pokok atau bunga akan ditentukan kemudian.

D.2.1.1.6.7 Piutang dari Kegiatan BLU

*Piutang dari
Kegiatan BLU
Rp7,52 triliun*

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.520.013.178.234 dan Rp6.429.911.707.728. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp5.248.877.959.199 berasal dari nilai bruto sebesar Rp7.520.013.178.234 dikurangi Penyisihan Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp2.271.135.219.035. Piutang dari Kegiatan BLU terdiri dari Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp6.750.572.387.799 dan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp769.440.790.435.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebagai berikut.

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	686.550.385.603	686.877.856.732
2. BLU di Kementerian Pertahanan	312.826.229.609	110.768.287.162
3. BLU di Kementerian Keuangan	93.149.342.874	49.824.275.493
4. BLU di Kementerian Pertanian	508.804.231	2.355.596.525
5. BLU di Kementerian Perindustrian	2.661.270.884	2.761.119.950
6. BLU di Kementerian ESDM	34.578.089.926	23.787.415.450
7. BLU di Kementerian Perhubungan	41.093.863.711	48.815.532.767
8. BLU di Kementerian Kesehatan	2.871.565.020.544	2.366.739.177.023
9. BLU di Kementerian Agama	28.718.269.464	35.446.573.467
10. BLU di Kementerian PUPR	1.571.906.365.165	1.160.652.888.495
11. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	205.372.142.586	290.849.520.158
12. BLU di Kementerian KUKM	8.114.895.954	4.312.144.444
13. BLU di Kementerian Kominfo	133.923.623.053	228.029.375.073
14. BLU di Kepolisian RI	276.844.130.422	204.687.487.913
15. BLU di BPPT	11.393.839.638	10.074.801.800
16. BLU di BPKP/BPBB Batam	471.366.114.135	368.498.898.367
Jumlah Bruto	6.750.572.387.799	5.594.480.950.819
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(2.246.986.060.087)	(1.998.515.231.060)
Jumlah Neto	4.503.586.327.712	3.595.965.719.759

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebagai berikut.

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	563.190.095	612.892.012
2. BLU di Kementerian Keuangan	547.339.240	467.335.113
3. BLU di Kementerian ESDM	-	22.916.667
4. BLU di Kementerian Perhubungan	2.218.441.992	1.348.210.637
5. BLU di Kementerian Kesehatan	12.766.764.474	13.165.815.819
6. BLU di Kementerian Agama	4.226.996.513	4.809.756.024
7. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	39.390.382.929	39.433.675.371
8. BLU di Kementerian Kominfo	588.244.764.265	768.068.505.266
9. BLU di Kepolisian RI	20.250.000	1.650.000
10. BLU di Kementerian Pemuda dan Olahraga	121.462.660.927	7.500.000.000
Jumlah Bruto	769.440.790.435	835.430.756.909
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(24.149.158.948)	(24.120.501.419)
Jumlah Neto	745.291.631.487	811.310.255.490

D.2.1.1.6.8 Piutang PFK

Piutang PFK
Rp230,65 juta

Piutang PFK per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp230.659.224 dan Rp4.001.304 yang berasal dari kelebihan penyaluran Dana PFK Pegawai. Kelebihan penyaluran dana PFK Pegawai menunjukkan bahwa penerimaan dana PFK Pegawai kurang dari penyaluran (pembayaran) dana PFK Pegawai kepada Badan Penyelenggara, yang disebabkan adanya:

- Koreksi transaksi penerimaan dana PFK Pegawai berdasarkan permintaan dari pemotong dan penyeter gaji/penghasilan tetap bulanan untuk dana PFK; dan
- Permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK Pegawai yang terjadi setelah Dana PFK Pegawai disalurkan ke Badan Penyelenggara.

Piutang Lancar
Kredit
Pemerintah dan
Piutang Jangka
Pendek Lainnya
Rp775,31 miliar

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang
Rp187,38 triliun

D.2.1.1.6.9 Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya

Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp775.312.000.000 dan Rp776.236.492.092. Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 merupakan Piutang Lancar Kredit Pemerintah (KUMK).

D.2.1.1.6.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp187.387.119.210.777 dan Rp160.417.250.319.840. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek dijelaskan sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Piutang Pajak	44.487.442.867.354	31.049.525.040.498
2. Piutang Bukan Pajak	126.205.649.930.233	112.447.317.486.670
3. Bagian Lancar TPA	1.785.695.280	1.874.157.626
4. Bagian Lancar TP/TGR	87.509.960.349	88.612.532.992
5. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	14.333.596.061.526	14.807.285.369.575
6. Piutang dari Kegiatan BLU	2.271.134.696.035	2.022.635.732.479
Jumlah	187.387.119.210.777	160.417.250.319.840

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp44.487.442.867.354 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada KL. Rincian Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 8**.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp126.205.649.930.233, merupakan Penyisihan Piutang Tidak Bukan Pajak pada KL sebesar Rp32.208.264.178.309 dan Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada BUN sebesar Rp93.997.385.751.924. Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 9**.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.785.695.280 merupakan penyisihan TPA pada Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi dan UKM dan Lembaga Penyiaran Publik RRI.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2018 sebesar Rp87.509.960.349 dapat dilihat pada **Lampiran 12**.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Pemberian Pinjaman pada BA 999.04 per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.333.596.061.526. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Pemberian Pinjaman pada BA 999.04 dirincikan sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Pemberian Pinjaman BA 999.04	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	8.368.810.959.312	8.890.349.008.465
2. Penyisihan Piutang Bunga Pemberian Pinjaman	5.958.703.439.968	5.912.955.834.664
3. Penyisihan Piutang Denda Pemberian Pinjaman	6.081.662.246	3.980.526.446
Jumlah	14.333.596.061.526	14.807.285.369.575

6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp2.271.134.696.035. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU dirincikan sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	64.012.286.114	67.153.462.624
2. BLU di Kementerian Pertahanan	16.567.283.293	11.909.016.278
3. BLU di Kementerian Keuangan	1.765.643.200	1.403.937.845
4. BLU Kementerian Pertanian	2.544.021	11.777.983
5. BLU di Kementerian Perindustrian	199.115.966	254.660.746
6. BLU di Kementerian ESDM	14.646.654.148	13.374.883.794
7. BLU di Kementerian Perhubungan	3.591.972.257	2.644.268.267
8. BLU di Kementerian Kesehatan	440.324.448.386	406.228.132.538
9. BLU di Kementerian Agama	11.595.695.779	8.504.979.603
10. BLU di Kementerian PUPR	1.319.436.302.466	1.023.971.470.822
11. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	137.143.224.175	166.097.728.693
12. BLU di Kementerian KUKM	4.182.635.273	3.635.415.465
13. BLU di Kementerian Kominfo	142.512.030.691	234.658.847.884
14. BLU di Kepolisian RI	1.734.783.412	1.641.141.509
15. BLU di BPPT	98.531.698	91.936.509
16. BLU di Kementerian Pemuda dan Olah Raga	607.313.305	37.500.000
17. BLU di BPKPBPB Batam	112.714.231.851	81.016.571.919
Jumlah	2.271.134.696.035	2.022.635.732.479

D.2.1.1.7 Persediaan

Persediaan
Rp112,59 triliun

Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp112.590.656.928.185 dan Rp84.301.758.170.225 dengan rincian sebagai berikut.

Persediaan	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Persediaan di K/L	112.585.262.923.923	82.262.262.310.961
2. Persediaan di BUN	5.394.004.262	2.039.495.859.264
Jumlah	112.590.656.928.185	84.301.758.170.225

1. Persediaan di Kementerian Negara/Lembaga

Persediaan di K/L per 31 Desember 2018 sebesar Rp112.585.262.923.923. Persediaan dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp57.801.718.824.526, Kementerian PUPR sebesar Rp10.117.302.555.177, Kementerian Kesehatan sebesar Rp8.848.474.789.132, Kementerian Perhubungan sebesar Rp8.189.041.789.589, POLRI sebesar Rp5.823.228.307.786, Kementerian Perdagangan sebesar Rp3.881.570.620.917, Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp2.809.327.268.968, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp2.027.676.296.737, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.232.210.766.192, Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp1.098.833.089.639, Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp1.050.272.584.033, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/BAPPENAS sebesar Rp1.003.556.532.748. Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada Lampiran 13.

2. Persediaan di Bendahara Umum Negara

Persediaan di BUN per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.394.004.262 berasal dari Persediaan pada BA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

Persediaan di BUN	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a. Kementerian Keuangan	-	2.030.473.182.609
b. Kementerian Pertanian	1.319.754.895	4.578.322.340
c. Otoritas Jasa Keuangan	1.484.615.490	1.534.803.820
d. SKK Migas	2.589.633.877	2.909.550.495
Jumlah	5.394.004.262	2.039.495.859.264

- a. Persediaan pada Kementerian Keuangan sebesar Rp0 merupakan persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Laporan mutasi CBP sebagai berikut.

(dalam kilogram)

Persediaan pada Kementerian Keuangan	Mutasi Persediaan		Saldo
	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
Saldo Awal	-	-	232.825.729
Penambahan Stok 2015	250.979.000	-	483.804.729
Penggunaan Operasi Pasar	-	476.886.212	6.918.517
Penggunaan Bencana Alam	-	6.918.517	-

Stok Cadangan Beras Pemerintah telah habis sejak pertengahan bulan Desember 2018. Berdasarkan Laporan Penyaluran CBP tahun 2018 dari Perum Bulog, penggunaan Operasi Pasar sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar 544.722.893 Kg, selanjutnya penyaluran CBP menggunakan stok bulog dan diakui sebagai utang penyaluran.

- b. Persediaan pada Kementerian Pertanian merupakan persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga berupa Cadangan Benih Nasional (CBN) pada Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp1.319.754.895 merupakan Cadangan Benih Nasional (CBN) di Gudang BUMN yang dicadangkan sebagai pemulihan pertanaman yang rusak/fuso akibat bencana alam atau serangan OPT Komoditas benih yang dicadangkan berupa Padi Hibrida, Padi Non Hibrida, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit. Hasil *stock opname* persediaan di gudang (pencatatan persediaan manual) sebagai berikut.

Tahun	31 Desember 2018 (Audited)		31 Desember 2017 (Audited)	
	Kg	Nilai (Rp)	Kg	Nilai (Rp)
1. Padi Non Hibrida	193.935	1.319.754.895	672.788	4.578.322.340
2. Padi Hibrida	-	-	-	-
3. Jagung Komposit	-	-	-	-
4. Jagung Hibrida	-	-	-	-
5. Kedelai	-	-	-	-
Jumlah	193.939	1.319.754.895	672.788	4.578.322.340

c. Persediaan pada OJK sebesar Rp1.484.615.490 dengan rincian sebagai berikut.

Persediaan pada OJK	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Barang Konsumsi	1.482.053.865	1.532.242.195
Barang untuk Pemeliharaan	2.561.625	2.561.625
Jumlah	1.484.615.490	1.534.803.820

d. Persediaan pada SKK Migas sebesar Rp2.589.633.877 dengan rincian sebagai berikut.

Persediaan pada SKK Migas	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Barang Konsumsi	2.571.084.787	2.883.214.405
Barang untuk Pemeliharaan	18.549.090	26.336.090
Jumlah	2.589.633.877	2.909.550.495

D.2.1.2 Investasi Jangka Panjang

D.2.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

D.2.1.2.1.1 Dana Bergulir

Dana Bergulir
Rp38,75 triliun

Dana Bergulir per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp38.751.152.041.474 dan Rp34.757.069.042.734. Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat, pengusaha kecil, anggota koperasi, dan lain-lain yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

Dana Bergulir	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	758.264.173.716	473.887.356.891
2. Kementerian Lingkungan Hidup	18.146.079.030	19.300.021.582
3. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUKM	2.629.660.562.998	3.445.531.671.700
4. BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPOPP)	29.463.190.892.831	25.625.590.772.984
5. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	4.315.637.580.927	4.616.134.219.577
6. BLU Pusat Investasi Pemerintah	1.352.498.396.761	565.500.000.000
7. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	213.754.355.211	11.125.000.000
Jumlah	38.751.152.041.474	34.757.069.042.734

1. Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp758.264.173.716 dan Rp473.887.356.891. Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan merupakan dana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan hutan tanaman melalui fasilitasi pembiayaan pembangunan hutan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat. Perubahan nilai investasi jangka panjang non permanen/ Dana Bergulir disebabkan oleh penyaluran Dana Bergulir kepada masyarakat selama tahun 2018.

2. Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp18.146.079.030 dan Rp19.300.021.582. Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup merupakan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi *Separate Arrangement Agreement* (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS).

3. Dana Bergulir pada BLU LPDB KUKM per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.629.660.562.998 dan Rp3.445.531.671.700. Dana Bergulir yang dikelola oleh LPDB KUKM ditujukan untuk membiayai program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan pengembangan industri keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan Dana Bergulir. Perubahan Dana Bergulir yang dikelola oleh BLU LPDB KUKM disebabkan oleh:
 - a. Adanya pengembalian pokok dan penyaluran Dana Bergulir yang dilakukan oleh BLU LPDB KUKM; dan
 - b. Pengalihan Dana Bergulir yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Dana Bergulir BUN Investasi Pemerintah.
4. Dana Bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp29.463.190.892.831 dan Rp25.625.590.772.984 merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN atau sumber dana jangka panjang lainnya yang dicampurkan dengan dana bank penerbit kredit untuk pembiayaan perumahan dengan metode *blended financing*.
5. Dana Bergulir pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.315.637.580.927 dan Rp4.616.134.219.577 merupakan piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan Dana Bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang perjanjiannya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BLU BP Sekretariat BPJT setelah pengadaan tanah selesai.
6. Dana Bergulir pada BLU Pusat Investasi Pemerintah per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.352.498.396.761 dan Rp565.500.000.000.
7. Dana Bergulir pada BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp213.754.355.211 dan Rp11.125.000.000.

D.2.1.2.1.2 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.015.195.857.543 dan Rp823.745.637.784. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih Dana Bergulir yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

Dana Bergulir
Diragukan
Tertagih Rp1,01
triliun

Dana Bergulir Diragukan Tertagih	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUKM	952.848.817.952	793.779.058.004
2. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	22.622.772.656	10.666.558.198
3. Kementerian Lingkungan Hidup	18.146.079.030	19.300.021.582
4. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol	21.578.187.905	-
Jumlah	1.015.195.857.543	823.745.637.784

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Rp46,34 triliun

D.2.1.2.1.3 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp46.347.382.486.948 dan Rp4.132.872.181. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya merupakan Investasi Non Permanen pada BLU Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Kementerian Perindustrian	4.089.232.181	4.132.872.181
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	46.343.293.254.767	-
Jumlah	46.347.382.486.948	4.132.872.181

- Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada Kementerian Perindustrian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.089.232.181 dan Rp4.132.872.181. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya merupakan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BA BUN 999.03 yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil.
- Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU Lembaga Dana Pendidikan (LPDP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp46.343.293.254.767 dan Rp0. Penyajian portofolio LPDP sebagai Investasi Jangka Panjang mengacu pada ketentuan dalam PMK 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU dan PMK 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang mengklasifikasikan investasi berdasarkan asal sumber dana. Dengan demikian, penyajian portofolio LPDP yang merupakan BLU pengelola dana berdasarkan amanat PMK Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP (terakhir diubah dengan PMK Nomor 143/PMK.01/2016) sebagai Investasi Jangka Panjang berdasarkan sumber dana investasinya telah sesuai dengan ketentuan dalam PMK 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan PMK 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU Lembaga Dana Pendidikan (LPDP) sebagai berikut.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada LPDP	Nilai Investasi
Deposito	26.385.921.170.836
Obligasi Korporasi	2.687.000.000.000
Surat Perbendaharaan Negara	-
Surat Utang Negara	17.270.372.083.931
Jumlah	46.343.293.254.767

Pada LKPP Tahun 2017 Investasi pada Lembaga Dana Pendidikan (LPDP) dicatat sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah).

Cadangan
Penurunan Nilai
Investasi Non
Permanen Lainnya
Rp303,37 miliar

D.2.1.2.1.4 Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya

Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp303.374.618.948 dan Rp4.132.872.181. Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya merupakan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah, yang berasal dari pencadangan penurunan nilai Investasi Non Permanen Lainnya pada Investasi Non Permanen Skim 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian sebesar Rp4.089.232.181 dan Aset Keuangan KPA Direktorat SMI-BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp299.285.386.767.

D.2.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

D.2.1.2.2.1 Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

Investasi
Permanen PMN
Rp2.286,38
triliun

Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.286.384.989.214.962 dan Rp2.133.750.339.987.427. Investasi Permanen PMN meliputi Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero, Perum, Lembaga Keuangan Internasional, dan Badan Usaha Lainnya.

Rincian Investasi Permanen PMN sebagai berikut.

Investasi PMN	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Persero	2.189.877.537.413.492	2.053.384.644.525.322
2. Perum	47.038.715.000.000	36.931.206.575.871
3. Lembaga Keuangan Internasional	21.293.200.765.776	17.951.256.260.707
4. Badan Usaha Lainnya	28.175.536.035.694	25.483.232.625.529
Jumlah*	2.286.384.989.214.962	2.133.750.339.987.429

**) Selisih data neraca sebesar Rp2 karena pembulatan*

1. PMN pada Persero per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.189.877.537.413.492 dan Rp2.053.384.644.525.322. PMN pada Persero merupakan kepemilikan Negara pada BUMN yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih besar dari 51% sehingga Nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas. PMN pada Persero dikelola oleh 2 pihak yaitu:

a. PMN Pada Persero di bawah Pembinaan Kementerian BUMN

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.133.010.292.264.217 dan Rp1.998.472.944.288.818. Penyertaan Modal Negara pada Persero yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah 51% sehingga Nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas. Rincian PMN pada BUMN dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

b. PMN pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan

PMN pada BUMN Persero Kementerian Keuangan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp56.867.245.149.275 dan Rp54.911.700.236.504.

Investasi ini merupakan investasi permanen penyertaan modal negara ke dalam modal Badan Usaha Milik Negara atau Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

PMN pada BUMN Persero yang masih terdapat di bawah Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multigriya Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial, PT Geo Dipa Energi, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Rincian PMN pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

2. PMN pada Perum per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp47.038.715.000.000 dan Rp36.931.206.575.871. PMN Perum merupakan kepemilikan Pemerintah pada perusahaan BUMN yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan. Nilai PMN pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas. Nilai investasi tersebut sudah memperhitungkan penihilan ekuitas negatif terhadap Perum PPD. BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh Kementerian BUMN. Per 31 Desember 2018, BUMN dengan bentuk Perum berjumlah 14 BUMN. Rincian PMN pada Perum dapat dilihat pada **Lampiran 14**.
3. Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Negara Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp21.293.200.765.776 dan Rp17.951.256.260.707. Kenaikan PMN ini disebabkan oleh perubahan kurs dan bertambahnya nilai PMN pada Organisasi Internasional-LKI. Rincian PMN pada Lembaga Keuangan Internasional dapat dilihat pada **Lampiran 16**.
4. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp28.175.536.035.694 dan Rp25.483.232.625.529.
Rincian penyertaan pada Badan Usaha Lainnya sebagai berikut.

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	21.189.412.000.000	21.268.011.000.000
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara	544.249.193	525.265.031
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri (Lampiran 17)	2.689.935.786.501	2.534.744.360.498
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Luar Negeri (Lampiran 16)	1.795.644.000.000	1.679.952.000.000
Modal Awal BP Tapera (Ditjen Pembiayaan)	2.500.000.000.000	-
Jumlah	28.175.536.035.694	25.483.232.625.529

Investasi
Permanen BLU
Rp8,74 miliar

D.2.1.2.2.2 Investasi Permanen BLU

Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp8.743.190.882 dan Rp8.325.008.679. Investasi Permanen BLU sebesar Rp8.743.190.882 merupakan penyertaan modal oleh BLU yang terdiri dari:

1. Penyertaan modal BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) sebesar Rp6.637.194.500 dengan porsi 10%; dan
2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara dengan nilai investasi permanen sebesar Rp2.105.996.382 yang merupakan penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani.

D.2.1.2.2.3 Investasi Permanen Lainnya

Investasi
Permanen
Lainnya
Rp507,10 triliun

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp507.109.135.609.757 dan Rp436.354.324.393.637. Investasi Permanen Lainnya merupakan nilai penyertaan modal negara pada PMN Lain-lain, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Rincian Investasi Permanen Lainnya sebagai berikut.

Investasi Permanen Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. PMN Lain-lain	45.167.707.654.757	44.806.336.620.637
2. Bank Indonesia	359.822.197.000.000	304.083.468.000.000
3. Lembaga Penjamin Simpanan	102.119.230.955.000	87.464.519.773.000
Jumlah	507.109.135.609.757	436.354.324.393.637

1. Investasi Permanen Lainnya pada PMN Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp45.167.707.654.757 dan Rp44.806.336.620.637.

Rincian PMN Lain-lain sebagai berikut.

PMN Lain-lain	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a. PMN Lain-lain pada PT Eks BHMN:		
Institut Pertanian Bogor	1.603.071.923.643	1.510.825.849.228
Universitas Airlangga	2.277.484.798.858	2.057.508.228.351
Institut Teknologi Bandung	2.064.284.255.718	2.173.453.041.763
Universitas Indonesia	4.226.657.790.566	4.173.262.381.142
Universitas Gajah Mada	3.889.767.136.555	3.656.484.520.737
Universitas Pendidikan Indonesia	835.687.198.323	779.700.402.216
Universitas Sumatera Utara	1.926.351.353.085	1.981.325.939.928
Universitas Padjajaran	1.192.757.043.174	1.213.663.368.482
Universitas Diponegoro	2.110.921.913.156	1.901.765.280.198
Universitas Hasanuddin	2.067.472.666.539	1.954.643.450.248
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	998.767.982.046	968.809.319.343
b. PMN Lain-lain pada BP Migas:		
BP Migas	-	352.405.757.084
c. PMN Lain-lain pada BPJS:		
BPJS Kesehatan	10.124.002.619.904	10.161.365.113.684
BPJS Ketenagakerjaan	12.230.971.917.800	11.921.123.968.233
Jumlah	45.548.198.599.368	44.806.336.620.637
Eliminasi LKPP	(380.490.944.611)	-
Jumlah	45.167.707.654.757	44.806.336.620.637

- a. PMN Lain-lain pada Perguruan Tinggi Eks BHMN
 Perguruan Tinggi Eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini 11 (sebelas) Perguruan Tinggi eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai PTN BH dan kekayaannya ditetapkan sebagai kekayaan negara dipisahkan yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah. Mutasi kenaikan nilai PTN BH disebabkan Pendapatan PTN BH (Operasional, Bantuan Dana APBN, Dana BPPTN, Hibah/Sumbangan dan Lain-lain) lebih besar dibandingkan Beban Aktivitas PTN BH.
 Pada Investasi Permanen PMN Universitas Indonesia, telah dilakukan eliminasi pada LKPP atas 11 (sebelas) aset hibah pada Universitas Indonesia yang berasal dari Kemenristek Dikti dan Kementerian PUPR yang belum ada BAST dan masih dicatat di Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian PUPR sebagai aset persediaan sejumlah Rp380.490.944.611. Rincian aset hibah tersebut disajikan pada **Catatan Penting Lainnya**.
- b. PMN Lain-lain pada Badan Pengelola Migas
 Pada Tahun 2018, Aset eks BP Migas disajikan oleh SKK Migas sebagai Badan Lainnya (BA 999.09).
- c. PMN Lain-lain pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Mutasi kenaikan investasi pada BPJS Kesehatan tidak sejalan dengan nilai pengeluaran pembiayaan – PMN/Dana Investasi kepada BPJS Kesehatan karena pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan suntikan dana pemerintah kepada aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif dan langsung disalurkan oleh BPJS Kesehatan kepada Aset DJS Kesehatan melalui mekanisme hibah dari BPJS Kesehatan ke DJS Kesehatan.
2. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp359.822.197.000.000 dan Rp304.083.468.000.000. Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan.
3. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp102.119.230.955.000 dan Rp87.464.519.773.000. Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

D.2.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap
Rp2.675,32 triliun

Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.675.327.726.143.973 dan Rp2.687.012.386.941.310. Nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.931.051.040.187.638, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.675.327.726.143.973 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp744.276.685.956.335.

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagai berikut.

Aset Tetap	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Tanah	1.018.648.023.083.736	1.037.757.720.329.050
2. Peralatan dan Mesin	590.286.694.016.479	519.896.090.337.204
3. Gedung dan Bangunan	287.028.466.749.583	275.152.781.045.431
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	593.241.196.851.828	681.081.175.258.573
5. Aset Tetap Lainnya	55.538.219.173.610	51.165.291.629.744
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	130.585.126.268.737	121.959.328.341.308
Jumlah Bruto	2.675.327.726.143.973	2.687.012.386.941.310
7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(744.276.685.956.335)	(652.208.833.012.249)
Jumlah Neto	1.931.051.040.187.638	2.034.803.553.929.061

Nilai Aset Tetap sebelum penyusutan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp11.684.660.797.337 atau 0,43 persen dari nilai per 31 Desember 2017. Sedangkan nilai buku Aset Tetap, mengalami penurunan sebesar Rp103.752.513.741.423 atau 5,09 persen. Penurunan nilai aset tetap ini sebagian besar karena adanya reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Lainnya (Kemitraan Dengan Pihak Ketiga) dan reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lainnya (Aset lain-lain).

D.2.1.3.1 Tanah

Tanah
Rp1.018,64 triliun

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.018.648.023.083.736 dan Rp1.037.757.720.329.050. Terjadi penurunan nilai Aset Tetap Tanah dibandingkan tahun lalu sebesar Rp19.109.697.245.314 terutama disebabkan adanya reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-Lain) pada Kementerian PUPR akibat penghentian penggunaan. Nilai Aset Tetap Tanah yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp294.345.486.868.825, Kementerian PUPR sebesar Rp269.138.602.834.438, Sekretariat Negara sebesar Rp87.070.470.339.603, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp76.039.000.565.104, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp74.178.424.408.286. Pada tahun 2018 terjadi pencatatan ganda atas Aset Tetap Tanah pada Kementerian Sekretariat Negara dan LPP TVRI sebesar Rp857.211.200.000 sehingga dilakukan eliminasi pencatatan pada LKPP. Selain itu terdapat reklasifikasi dari Aset Lain-Lain BA 999.03 menjadi aset Tanah sebesar Rp40.749.988.341.567 yaitu pada Kementerian PUPR sebesar Rp40.159.894.062.134 dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp590.094.279.433.

<i>Peralatan dan Mesin Rp590,28 triliun</i>	<p>D.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin</p>
	<p>Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp590.286.694.016.479 dan Rp519.896.090.337.204. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dibandingkan tahun lalu sebesar Rp70.390.603.679.275. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp227.303.639.687.598, POLRI sebesar Rp110.053.992.531.197, Kementerian Perhubungan sebesar Rp49.051.998.331.321, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp23.585.360.888.712, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp19.931.915.819.977.</p>
<i>Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp287,02 triliun</i>	<p>D.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan</p>
	<p>Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp287.028.466.749.583 dan Rp275.152.781.045.431. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp11.875.685.704.152. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp44.899.893.893.872.846, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp29.801.781.695.588, Kementerian Agama sebesar Rp26.802.836.201.742, Kementerian Perhubungan sebesar Rp25.586.841.177.815, dan POLRI sebesar Rp21.137.675.588.196.</p>
<i>Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp593,24 triliun</i>	<p>D.2.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan</p>
	<p>Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp593.241.196.851.828 dan Rp681.081.175.258.573. Terjadi penurunan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp87.839.978.406.745, antara lain disebabkan adanya reklasifikasi ke Aset Lain-lain pada Kementerian PUPR. Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp448.629.109.542.751, Kementerian Perhubungan sebesar Rp109.896.131.855.771, Kementerian Pertahanan sebesar Rp11.739.190.777.222, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp7.427.274.269.254, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.867.557.664.078.</p>
<i>Aset Tetap Lainnya Rp55,53 triliun</i>	<p>D.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya</p>
	<p>Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp55.538.219.173.610 dan Rp51.165.291.629.744. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya dibandingkan tahun lalu sebesar Rp4.372.927.543.866. Nilai aset tetap lainnya yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp35.911.136.545.120, Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.624.453.663.962, Kementerian Perhubungan sebesar Rp3.303.454.098.620, Sekretariat Negara sebesar Rp3.214.731.558.617, dan Kementerian ATR/BPN sebesar Rp1.478.019.156.338.</p>

D.2.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap KDP
Rp130,58 triliun

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp130.585.126.268.737 dan Rp121.959.328.341.308. Terjadi peningkatan nilai KDP lainnya dibandingkan tahun lalu sebesar Rp8.625.797.927.429. Nilai Aset Tetap KDP yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp59.955.196.610.516, Kementerian Perhubungan sebesar Rp42.859.398.535.213, Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.991.717.524.943, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp6.242.058.075.615, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp3.148.494.656.000.

Rincian Aset Tetap per K/L dan BUN disajikan pada **Lampiran 19**.

D.2.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp744,27
triliun

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp744.276.685.956.335 dan Rp652.208.833.012.249. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan nilai penyusutan Aset Tetap berdasarkan Neraca K/L dan Neraca BUN.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya disajikan sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	330.022.790.879.612	287.580.018.262.056
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	61.566.244.373.632	56.276.139.037.825
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	345.009.781.777.629	303.091.656.042.603
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.677.868.925.462	5.261.019.669.765
Jumlah	744.276.685.956.335	652.208.833.012.249

Piutang Jangka
Panjang
Rp60,60 triliun

D.2.1.4 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp60.603.046.072.955 dan Rp50.906.493.098.191. Nilai neto Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp57.188.754.504.406 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp60.603.046.072.955 dikurangi penyisihan sebesar Rp3.414.291.568.549.

Rincian Piutang Jangka Panjang sebagai berikut.

Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	95.661.712.269	104.817.554.622
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	163.209.394.539	261.894.714.759
3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	57.777.575.276.481	47.184.454.676.040
4. Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	-	775.312.000.000
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.566.599.689.666	2.580.014.152.770
Jumlah Bruto	60.603.046.072.955	50.906.493.098.191
Penyisihan Piutang Jangka Panjang	(3.414.291.568.549)	(3.096.044.947.048)
Jumlah Neto	57.188.754.504.406	47.810.448.151.143

<p><i>Tagihan Penjualan Angsuran</i> Rp95,66 miliar</p>	<p>D.2.1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)</p> <p>Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp95.661.712.269 dan Rp104.817.554.622. Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp95.183.403.707 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp95.661.712.269 dikurangi penyisihan sebesar Rp478.308.562 merupakan Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian PUPR sebesar Rp478.274.122 dan Lembaga Penyiaran Publik RRI sebesar Rp34.440 yang berasal dari transaksi penjualan kavling tanah kepada pegawai LPP RRI.</p>
<p><i>Tagihan TGR</i> Rp163,20 miliar</p>	<p>D.2.1.4.2 Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)</p> <p>Saldo Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp163.209.394.539 dan Rp261.894.714.759. Saldo Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp57.745.504.482 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp163.209.394.539 dikurangi penyisihan sebesar Rp105.463.890.057. Rincian Tagihan TP/TGR pada K/L dapat dilihat pada Lampiran 20.</p>
<p><i>Piutang Jangka Penerusan Pinjaman</i> Rp57,77 triliun</p>	<p>D.2.1.4.3 Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman</p> <p>Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp57.777.575.276.481 dan Rp47.184.454.676.040. Nilai Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman merupakan total pokok pinjaman Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Nilai Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp56.851.418.797.559 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp57.777.575.276.481 dikurangi penyisihan sebesar Rp926.156.478.922.</p>
<p><i>Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah Rp0</i></p>	<p>D.2.1.4.4 Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah</p> <p>Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dan Rp775.312.000.000. Nilai Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah merupakan total pokok pinjaman Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Nilai Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah per 31 Desember 2017 sebesar Rp775.312.000.000 direklasifikasi menjadi Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam 12 bulan.</p>
<p><i>Piutang Jangka Panjang Lainnya</i> Rp2,56 triliun</p>	<p>D.2.1.4.5 Piutang Jangka Panjang Lainnya</p> <p>Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.566.599.689.666 dan Rp2.580.014.152.770. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp184.406.798.659 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.566.599.689.666 dikurangi penyisihan sebesar Rp2.382.192.891.007. Piutang Jangka Panjang Lainnya dijelaskan sebagai berikut.</p>

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Dewan Perwakilan Rakyat	63.000.000	-
2. Kementerian Hukum dan HAM	9.449.000.000	11.151.900.000
3. Kementerian ESDM	37.463.820.845	252.729.574.320
4. Kementerian Perhubungan	-	28.766.646.208
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	89.765.100	-
6. Kementerian Kesehatan	276.560.972	101.560.972
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	29.951.195.000	37.499.960.000
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan	111.069.351.155	114.162.631.206
9. Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
10. Kementerian Komunikasi dan Informatika	304.132.717.193	-
11. BKKBN	8.238.183.016	8.240.685.016
12. BATAN	11.542.061	8.314.680
13. LAPAN	-	2.633.830.161
14. BNP2TKI	2.562.141.500	-
15. BA BUN 999.99	2.047.499.709.524	2.108.926.346.907
Nilai Bruto	2.566.599.689.666	2.580.014.152.770
Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya	(2.382.192.891.007)	(1.989.369.163.630)
Nilai Neto	184.406.798.659	590.644.989.140

- Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp63.000.000 merupakan piutang pengembalian biaya pendidikan S2 dan S3 atas pegawai yang tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai ketentuan.
- Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp9.449.000.000 merupakan piutang atas sewa tanah yang belum dibayar oleh pihak ketiga, untuk masa sewa tahun 2017 sampai dengan tahun 2024.
- Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian ESDM sebesar Rp37.463.820.845 merupakan reklasifikasi dari uang muka pada satker unit induk pembangunan atas koreksi BPK
- Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp89.765.100 merupakan piutang atas jaminan garansi atas pengadaan sarana prasarana perkantoran yang wanprestasi.
- Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp276.560.972 merupakan piutang pada Ditjen Pelayanan Kesehatan.
- Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp29.951.195.000 merupakan bunga/denda Piutang HTI *Rescheduling*, pembayaran Piutang HTI *Rescheduling*, dan reklasifikasi piutang jangka pendek menjadi piutang jangka panjang.
- Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp111.069.351.155 merupakan Piutang Pendapatan dari Kontribusi Tetap KSP Pulau Nipa pada satker Setditjen PRL.
- Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian KUKM sebesar Rp15.792.703.300 merupakan ketidaktertagihan atas kegiatan pengadaan *lift*.
- Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp304.132.717.193 merupakan piutang yang termasuk dalam putusan Homologasi PT.Bakrie Telecom.

10. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN merupakan piutang atas dana bantuan modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mulai tahun 2008. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar Rp8.238.183.016 yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang.
11. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebesar Rp11.542.061 merupakan pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.
12. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebesar Rp2.562.141.500 merupakan kekurangan pembayaran biaya sewa, pajak, dan konsesi yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga atas sewa Pemanfaatan Gedung Pendataan Kepulangan TKI di area Bandara Soekarno Hatta pada Periode Tahun 2011 s.d. 2012.
13. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.99 sebesar Rp2.047.499.709.524 merupakan piutang migas yang berasal dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) yang tergolong dalam kategori piutang macet.

D.2.1.4.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.414.291.568.549 dan Rp3.096.044.947.048.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang dijelaskan sebagai berikut.

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang Jangka
Panjang
Rp3,41 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	478.308.562	524.087.773
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	105.463.890.057	221.870.658.811
3. Piutang Penerusan Pinjaman	926.156.478.922	884.281.036.834
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.382.192.891.007	1.989.369.163.630
Jumlah*	3.414.291.568.548	3.096.044.947.048

*J Selsih rincian dengan data neraca sebesar Rp1 karena pembulatan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp478.308.562 merupakan Penyisihan pada Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp478.274.122 dan Lembaga Penyiaran Publik RRI sebesar Rp34.440.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp105.463.890.057 dapat dilihat pada **Lampiran 20**.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Penerusan Pinjaman sebesar Rp926.156.478.922 merupakan Penyisihan pada Piutang Penerusan Pinjaman dan Piutang Kredit Program.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp2.382.192.891.007 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Lainnya pada K/L dan Pengelola Bagian Anggaran.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut.

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Dewan Perwakilan Rakyat	315.000	-
2. Kementerian Hukum dan HAM	47.245.000	55.759.500
3. Kementerian ESDM	187.319.104	10.100.786.394
4. Kementerian Perhubungan	-	28.766.646.208
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	89.765.100	-
6. Kementerian Kesehatan	93.132.805	507.805
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.994.255.000	3.749.996.000
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan	555.346.755	570.813.156
9. Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
10. Kementerian Komunikasi dan Informatika	304.132.717.193	-
11. BKKBN	8.238.183.016	8.240.685.016
12. BATAN	57.710	41.573
13. LAPAN	-	2.633.830.161
14. BNP2TKI	2.562.141.500	-
15. BA BUN 999.99	2.047.499.709.524	1.919.457.394.517
Jumlah	2.382.192.891.007	1.989.369.163.630

D.2.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp1.305,83
triliun

Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.305.834.522.883.581 dan Rp1.155.861.083.987.356. Aset Lainnya adalah aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.021.884.513.023.392 berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.305.834.522.883.581 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp271.738.387.743.944 dan sebesar Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp12.211.622.116.245. Aset Lainnya terdiri dari:

Aset Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	142.696.848.159.921	140.933.161.376.717
2. Aset Tidak Berwujud	35.776.524.869.463	31.293.091.131.831
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya	212.155.787.167.225	259.379.354.966.485
4. Dana Penjaminan	4.449.043.145.097	3.327.794.435.749
5. Dana Kelolaan BLU	57.173.480.419.942	45.821.116.060.256
6. Aset Lain-lain	843.100.479.849.556	659.515.052.235.595
7. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	10.482.359.272.377	15.591.513.780.723
Jumlah Bruto	1.305.834.522.883.581	1.155.861.083.987.356
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(12.211.622.116.245)	(10.072.629.035.983)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(271.738.387.743.944)	(221.423.780.525.753)
Jumlah Neto	1.021.884.513.023.392	924.364.674.425.620

D.2.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan
Pihak Ketiga
Rp142,69 triliun

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp142.696.848.159.921 dan Rp140.933.161.376.717. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara Pemerintah dengan pihak lainnya (pihak ketiga) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan nilai aset dan/atau hak usaha yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama tersebut.

Nilai neto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp141.903.018.734.346 berasal dari nilai bruto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp142.696.848.159.921 dikurangi Akumulasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp793.829.425.575. Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga dijelaskan sebagai berikut.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Kementerian Luar Negeri	54.013.969.907	-
2. Kementerian Perhubungan	360.209.541.000	347.594.837.654
3. Kementerian Kesehatan	305.364.000	-
4. Kementerian KLH	72.431.682.000	-
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan	214.231.398.172	-
6. Kementerian PUPR	141.561.963.335.546	140.151.873.669.767
7. Kementerian Pariwisata	182.980.000.000	182.980.000.000
8. Kementerian Negara PPN/BAPPENAS	83.647.500.000	83.647.500.000
9. BP Batam	167.065.369.296	167.065.369.296
Jumlah	142.696.848.159.921	140.933.161.376.717

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp54.013.969.907 dan Rp0. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 merupakan hasil koreksi dari BPK berupa reklasifikasi atas tanah dan bangunan yang dimanfaatkan sementara oleh Yayasan Pendidikan Daya Dutika.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp360.209.541.000 dan Rp347.594.837.654 merupakan aset Ditjen Perhubungan Laut berupa tanah dan bangunan yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga melalui kerja sama pemanfaatan aset oleh Satker KSOP Probolinggo.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp305.364.000 dan Rp0. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 berasal dari nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp2.121.420.000 dan Satker Konsolidasi Kementerian Kesehatan sebesar minus Rp1.816.056.000
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp72.431.682.000 dan Rp0. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 berupa tanah yang di-KSP-kan yang berlokasi di Kanci Kab. Cirebon, Jawa Barat seluas 1.950.000 m².
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp214.231.398.172 dan Rp0. Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp214.231.398.172 merupakan aset kerja sama pemanfaatan untuk jangka waktu 30 tahun berupa tanah seluas 24 hektar.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp141.561.963.335.546 dan Rp140.151.873.669.767. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 berasal dari nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp465.687.736.000, Ditjen Bina Marga sebesar Rp290.659.679.656.676, dan Satker Konsolidasi Kementerian PUPR sebesar minus Rp149.563.404.057.130.

7. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pariwisata per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp182.980.000.000 dan Rp182.980.000.000 berupa tanah seluas 9.419 m² yang terletak di Jalan Merdeka Barat No. 16-19 Jakarta. Atas persetujuan Menteri Keuangan nomor 242/MK.03/1993 tanggal 23 Februari 1993 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan (*Build, Operate, and Transfer*) Tanah dan Gedung Sapta Pesona B antara Kementerian Pariwisata dengan PT Sisindosat Lintas Buana.
8. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian PPN/BAPPENAS per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp83.647.500.000 dan Rp83.647.500.000 berupa tanah untuk mendirikan gedung perkantoran (Wisma Bakrie) yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said Kav. B2 berdasarkan perjanjian Bangun Guna Serah/*Built, Operating, dan Transfer (BOT)* bersama PT. Bakrie Swasakti Utama dengan No.4300/SES/09/2004 tanggal 24 September 2004. Jangka waktu hak pengelolaan bagi PT. Bakrie Swasakti Utama selama 25 (dua puluh lima) tahun dihitung sejak 01 Januari 2005 sampai 31 Desember 2029 dan setelah selesai, aset ini akan direklasifikasi menjadi Aset Tetap.
9. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp167.065.369.296 dan Rp167.065.369.296. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 merupakan aset pada Kantor Pelabuhan Laut sebesar Rp40.121.852.086 yang dikelola melalui kerja sama dengan PT Synergy Tharada dan PT Tuah Selimangkarang dan aset pada Kantor Air dan Limbah sebesar Rp126.943.517.210 yang dikelola melalui kerja sama dengan PT Adhya Tirta Batam.

D.2.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud
Rp35,77 triliun

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp35.776.524.869.463 dan Rp31.293.091.131.831. Aset Tidak Berwujud merupakan aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang berada di K/L dan BUN berupa goodwill, hak cipta, paten, *software*, lisensi, hasil kajian/penelitian, dan aset tidak berwujud lainnya.

Nilai neto Aset Tidak Berwujud sebesar Rp23.564.902.753.218 berasal dari nilai bruto Aset Tak Berwujud sebesar Rp35.776.524.869.463 dikurangi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp12.211.622.116.245. Rincian Aset Tidak Berwujud berdasarkan jenisnya disajikan sebagai berikut.

Jenis Aset Tidak Berwujud	Nilai
1. Goodwill	-
2. Hak Cipta	154.206.399.087
3. Paten	200.935.790.651
4. Software	15.902.423.231.301
5. Lisensi	3.891.264.529.385
6. Hasil Kajian/penelitian	6.833.324.409.079
7. Aset Tidak Berwujud Lainnya	8.516.061.249.377
8. Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	278.309.260.583
Jumlah Bruto	35.776.524.869.463
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(12.211.622.116.245)
Jumlah Neto	23.564.902.753.218

Aset Tidak Berwujud pada K/L dan BUN dijelaskan sebagai berikut.

Aset Tidak Berwujud pada K/L dan BUN	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. K/L	35.627.617.637.982	31.146.316.888.464
2. BUN	148.907.231.481	146.774.243.367
Jumlah Bruto	35.776.524.869.463	31.293.091.131.831
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud:		
3. K/L	(12.141.426.494.645)	(10.015.012.414.379)
4. BUN	(70.195.621.600)	(57.616.621.604)
Jumlah Neto	23.564.902.753.218	21.220.462.095.848

1. Aset Tidak Berwujud pada K/L per 31 Desember 2018 sebesar Rp35.627.617.637.982 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:
 - a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.484.744.654.096 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp5.186.915.327.574;
 - b. Badan Intelijen Negara sebesar Rp3.625.879.247.072 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa *Software* senilai Rp2.238.006.430.312;
 - c. Kementerian Pertahanan sebesar Rp3.298.265.237.160 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa *Software* senilai Rp2.139.365.212.051.
2. Aset Tidak Berwujud pada BUN per 31 Desember 2018 sebesar Rp148.907.231.481 berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain, yaitu:
 - a. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp3.301.927.750 berupa Hasil Kajian/Penelitian;
 - b. Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp81.527.065.112 berupa *Software* dan Lisensi;
 - c. Satuan Kerja Khusus Migas sebesar Rp64.078.238.619 berupa *Software* dan Lisensi.

Rincian Aset Tidak Berwujud disajikan pada **Lampiran 21**.

D.2.1.5.3 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp212,15 triliun

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp212.155.787.167.225 dan Rp259.379.354.966.485. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya berdasarkan jenisnya disajikan sebagai berikut.

Jenis Dana yang Dibatasi Penggunaannya	Nilai
1. Cadangan Dana Reboisasi	57.747.109.112
2. Cadangan Dana Subsidi/PSO	379.937.975.000
3. Dana untuk Penyertaan Modal Negara	-
4. Dana Lainnya	207.402.492.132.157
5. Dana Perhitungan Pihak Ketiga	3.714.379.337.474
6. Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	601.230.613.482
Jumlah	212.155.787.167.225

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L dan BUN dijelaskan sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L	7.613.043.103.590	16.003.558.774.228
a. Kementerian Luar Negeri	622.038.911.501	586.016.904.919
b. Kementerian Pertahanan	4.019.707.414.506	9.410.583.279.561
c. Kementerian Hukum dan HAM	14.478.828.000	-
d. Kementerian Dikbud	1.952.635.775.000	4.739.962.225.000
e. Kementerian Kesehatan	6.609.639.586	6.680.396.861
f. Kementerian Agama	548.118.300.000	745.810.975.324
g. Kementerian Sosial	2.655.138.145	118.977.765.758
h. Polri	446.799.096.852	391.631.329.360
i. LPP RRI	-	3.895.897.445
2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN	205.947.589.966.648	243.375.796.192.257
a. Kuasa BUN	54.152.706.611.021	61.884.585.255.835
b. BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah	57.747.109.112	31.174.122.123.664
c. BUN Pengelolaan Belanja Subsidi	379.937.975.000	237.204.000.000
d. BUN Pengelolaan Transaksi Khusus	151.357.198.271.515	150.079.884.812.758
3. Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya	(1.404.845.903.013)	-
Jumlah	212.155.787.167.225	259.379.354.966.485

1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.613.043.103.590 dan Rp16.003.558.774.228. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp622.038.911.501 dan Rp586.016.904.919 merupakan dana kas besi yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan RI di Luar Negeri untuk dapat digunakan dalam hal kondisi darurat di negara setempat, kunjungan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menerima jaminan tertulis dari Sekretariat Negara, terjadi keterlambatan penerimaan Uang Persediaan (UP), dan/atau pembayaran belanja barang operasional di luar perjalanan dinas sesuai ketentuan perundang-undangan. Dana ini juga digunakan untuk menutupi BPJ Minus dan BPPR Minus. Dana yang dibatasi penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2018 sebesar Rp622.038.911.501 adalah: (1) sebesar Rp601.230.613.482 merupakan dana Kas Besi Perwakilan RI yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan RI di Luar Negeri untuk dapat digunakan dalam kondisi darurat di negara setempat; dan (2) sebesar Rp20.808.298.019 merupakan dana atas biaya renovasi atas pembelian gedung KJRI Chicago yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.
 - b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.019.707.414.506 dan Rp9.410.583.279.561 berupa dana *outstanding devisa*, dana pada rekening *non-LC*, dan cadangan alutsista.
 - c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Hukum dan HAM per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp14.478.828.000 dan Rp0 merupakan dana yang ditempatkan di *Department Of Justice* Hongkong terkait kasus Century senilai HKD7.800.000 dengan kurs Rp1.856,26 sesuai KMK No. 53 Tahun 2018.

- d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.952.635.775.000 dan Rp4.739.962.225.000 merupakan saldo retur rekening bank penyalur bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum tersalurkan sampai dengan tahun 2018 pada Ditjen Dikdasmen.
- e. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.609.639.586 dan Rp6.680.396.861 merupakan Dana Bantuan Sosial berupa jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2018.
- f. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Agama per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp548.118.300.000 dan 745.810.975.324 merupakan aset neto (*net asset*) Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji (LK PIH).
- g. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Sosial per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.655.138.145 dan Rp118.977.765.758 merupakan Dana Bantuan Sosial PKH yang belum tersalurkan pada rekening BNI dan akan disalurkan pada tahun 2018.
- h. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp446.799.096.852 dan 391.631.329.360 merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional POLRI yang tidak dibiayai dari DIPA, seperti untuk keperluan pada samsat, Jasa Raharja, DPK, kapitasi BPJS, rumkit non-BLU, parkir, FPU, dan lain-lain.
- i. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Lembaga Penyiaran Publik RRI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dan Rp3.895.897.445.
2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp205.947.589.966.648 dan Rp243.375.796.192.257. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.
- a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp54.152.706.611.021 dan Rp61.884.585.255.835. Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN disajikan sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1) Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AD dalam IDR (519000144980)	129.468.876.553	-
2) Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AU dalam IDR (519000145980)	1.216.643.079.980	-
3) Rekening Dana Cadangan Alutsista - Kemhan dalam IDR (519000146980)	13.255.000.000	-
4) Rekening Dana Cadangan Alutsista - Mabes TNI dalam IDR (519000147980)	45.478.946.480	-
5) Rekening Cadangan Dana Reboisasi (032901036283408)	167.860.809.595	167.860.809.595
6) Rekening Pembangunan Hutan (0001401400298850)	1.770.000.000.000	
7) Rekening Pembangunan Hutan (1030205505635)	925.626.036.865	3.579.017.301.000
8) Rekening Pembangunan Hutan (2018151117)	925.626.036.865	

9) Rekening Pembangunan Hutan (032901036282402)	757.765.227.270	800.000.000.000
10) Rekening Dana Bantuan Internasional (519000148980)	1.000.000.000.000	-
11) Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara (609024411980)	43.314.553.530.000	53.890.489.260.000
12) Rekening Khusus Dana FFK (510000281980)	3.714.379.337.474	3.276.851.117.024
13) Bun Untuk Obligasi Dim Rangka Penjaminan (502000002980)	82.107.368.550	82.107.368.550
14) Menteri Keuangan C.Q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Aset BPR (500000004980)	89.942.361.389	88.259.399.674
15) Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980)	4.245.466.000.000	3.124.151.000.000
16) Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980)	203.000.000.000	203.000.000.000
17) Reksus Menkeu karena Penjualan Saham PT Telkom di Pasar Domestik (510000239980)	-	(8)
18) Penyesuaian Dana Penjaminan	(4.448.466.000.000)	(3.327.151.000.000)
Jumlah	54.152.706.611.021	61.884.585.255.835

- b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp57.747.109.112 dan Rp31.174.122.123.664. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2018 berasal dari Dana pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan Dana Bergulir atas DNS (UAIP) sebesar Rp57.747.109.112.
- c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp379.937.975.000 dan Rp237.204.000.000. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi per 31 Desember 2018 berupa Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Perumahan.
- d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp151.357.198.271.515 dan Rp150.079.884.812.758. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2018 terdiri dari Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dikelola PT Taspen sebesar Rp126.167.048.361.579 dan PT Asabri sebesar Rp25.190.149.909.936.
3. Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp1.404.845.903.013 berupa eliminasi atas Dana Lainnya dari pembentukan Rekening Escrow pada Kementerian Pertahanan karena nilainya sudah disajikan pada LK Kuasa BUN (BA 999.00).

D.2.1.5.4 Dana Penjaminan

*Dana Penjaminan
Rp4,44 triliun*

Dana Penjaminan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.449.043.145.097 dan Rp3.327.794.435.749. Dana Penjaminan merupakan dana yang disediakan sebagai jaminan atas kredit dan/atau pembiayaan dari program ataupun proyek pemerintah dengan tujuan tertentu.

Rincian Dana Penjaminan disajikan sebagai berikut.

Dana Penjaminan	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Dana Penjaminan pada K/L	577.145.097	643.435.749
2. Dana Penjaminan pada BUN	4.448.466.000.000	3.327.151.000.000
Jumlah	4.449.043.145.097	3.327.794.435.749

1. Dana Penjaminan pada K/L per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp577.145.097 terdapat pada Kementerian Koperasi dan UKM yang digunakan sebagai jaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Cadangan Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan UKM. Dana Penjaminan tersebut tersimpan dalam rekening dana penampungan, dana penjaminan, dana pembinaan, dan dana penampungan subrogasi dikurangi jasa pengelolaan hak Perum Jamkrindo.

2. Dana Penjaminan pada BUN per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.448.466.000.000 terdapat pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah. Dana Penjaminan merupakan dana yang dicadangkan untuk menjamin berlangsungnya proyek pembangunan pemerintah.

Dana Penjaminan pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

Dana Penjaminan pada BUN	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a. Dit. Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen	4.054.924.000.000	3.082.222.000.000
b. Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	393.542.000.000	244.929.000.000
Jumlah	4.448.466.000.000	3.327.151.000.000

a. Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Evaluasi Akuntansi dan Setelmen sebesar Rp4.054.924.000.000 digunakan untuk tujuan berikut.

- 1) Pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara.
- 2) Pemberian jaminan pemerintah dalam rangka percepatan penyediaan air minum.
- 3) Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
- 4) Proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.

b. Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sebesar Rp393.542.000.000 terdiri dari penjaminan atas pembiayaan infrastruktur atas pinjaman langsung (*direct lending*) dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN Rp190.542.000.000 dan penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp203.000.000.000.

Dana Kelolaan
BLU Rp57,17
triliun

D.2.1.5.5 Dana Kelolaan BLU

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp57.173.480.419.942 dan Rp45.821.116.060.256. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah atau pengalihan dari Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan penganggarnya, atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok perguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali.

Rincian Dana Kelolaan BLU sebagai berikut.

Dana Kelolaan pada BLU	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	1.332.452.419.073	1.031.955.780.423
2. BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	391.923.107.169	2.049.523.227.017
3. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	1.256.318.525.284	1.540.695.342.109
4. BLU LPDB KUKM	2.773.100.141.070	2.028.750.985.012
5. BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	47.635.938.979.318	37.746.815.725.695
6. BLU Pusat Investasi Pemerintah	2.647.501.603.239	934.500.000.000
7. BLU LPMUKP	1.136.245.644.789	488.875.000.000
Jumlah	57.173.480.419.942	45.821.116.060.256

1. Dana Kelolaan BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.332.452.419.073 dan Rp1.031.955.780.423.

Rekening	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a. Bank Mandiri Acc No 126-00-0 481 9396	-	18.742.013.776
b. Bank BRI Acc No. 0193-01-000751-30-3	-	9.953.816.178
c. Bank BNI Acc No. 5522522235	165.414.019.073	67.259.950.469
d. Deposito Berjangka	1.167.038.400.000	936.000.000.000
Jumlah	1.332.452.419.073	1.031.955.780.423

2. Dana Kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp391.923.107.169 dan Rp2.049.523.227.017.

Rincian Penempatan Dana Kelolaan BLU PPP disajikan dalam **Lampiran 28**.

3. Dana kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.256.318.525.284 dan Rp1.540.695.342.109. Dana Kelolaan BLU P3H terdiri dari:

- Rekening Dana Kelolaan BRI Rp6.983.721.547,94;
- Deposito BRI sebesar Rp1.050.000.000.000;
- Deposito BNI sebesar Rp200.000.000.000.

Terdapat perbedaan antara jumlah dana kelolaan yang belum digulirkan yang terdapat di rekening dana kelolaan dengan yang seharusnya. Dana yang terdapat pada rekening sebesar Rp1.256.983.721.547,94, sedangkan yang seharusnya sebesar Rp1.256.318.525.284 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp665.196.263,94. Hal ini antara lain disebabkan hal sebagai berikut.

- a. Bunga jasa giro bulan September sebesar Rp35.920.515 yang sampai pada tanggal 31 Desember 2018 yang belum dipindahbukukan ke rekening pendapatan dan telah dipindahbukukan pada tanggal 02 Januari 2019.
 - b. Bunga pinjaman/layanan bulan Desember sebesar Rp626.314.641 yang belum dipindahbukukan ke rekening pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan telah dipindahbukukan pada tanggal 04 Januari 2019.
 - c. Kelebihan pelunasan yang akan dikembalikan ke debitur sebesar Rp2.961.106.
 - d. Selisih Rp1,94 karena pembulatan.
4. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.773.100.141.070 dan Rp2.028.750.985.012. Dana Kelolaan BLU LPDB KUMKM, terdiri dari:
 - a. Sudah akad belum dicairkan mitra sebesar Rp261.500.000.000.
 - b. Disetujui komite sebesar Rp1.009.300.000.000.
 - c. Sisa sebesar Rp1.502.300.141.070 merupakan Dana Bergulir yang siap untuk disalurkan pada tahun 2019.
 5. Dana Kelolaan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp47.635.938.979.318 dan Rp37.746.815.725.695. Tujuan penempatan Dana Kelolaan BLU LMAN, yaitu:

Dana Investasi	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a. Aktivitas pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN)	46.229.359.535.205	36.328.328.003.821
b. Dana kelolaan untuk aktivitas manajemen aset	1.406.579.444.113	1.418.487.721.874
Jumlah	47.635.938.979.318	37.746.815.725.695

Mutasi Dana Kelolaan BLU LMAN dijelaskan sebagai berikut.

Dana Kelolaan BLU LMAN	Nilai
Saldo per 31 Desember 2017	37.746.815.725.695
Penggunaan dana kelolaan untuk pengeluaran setelah tanggal perolehan (subsequent expenditure) aset kelolaan	(11.908.277.761)
Penggunaan dana kelolaan untuk pendanaan tanah PSN	(21.251.698.468.616)
Penambahan dana kelolaan dari APBN TA 2017 untuk aktivitas pendanaan tanah infrastruktur PSN	31.152.730.000.000
Saldo per 31 Desember 2018	47.635.938.979.318

6. Dana Kelolaan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.647.501.603.239 dan Rp934.500.000.000.

Rekening	Nomor Rekening	Nominal
PT BNI (Persero) Tbk	0754228723	637.500.000.000
PT BNI (Persero) Tbk	0790913598	650.000.000.000
PT BRI (Persero) Tbk	0329 01 035788 40 5	446.250.000.000
PT BRI (Persero) Tbk	0329. 01 036892 40 1	455.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	0019500024145840	195.000.000.000
PT BRI (Persero) Tbk	0329 01 003827 30 6	72.663.103.253
PT BNI (Persero) Tbk	2018220615	191.088.500.000
Jumlah*		2.647.501.603.253

*] Selisih rincian dengan data neraca sebesar Rp14 karena pembulatan

7. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.136.245.644.789 dan Rp488.875.000.000. Dana Kelolaan BLU LPMUKP per 31 Desember 2018 sudah termasuk pengembalian pokok dari debitor (LKM-KP, UMKM-KP, dan KUKP) sebesar Rp13.103.424.789.

D.2.1.5.6 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp843,1 triliun

Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp843.100.479.849.556 dan 659.515.052.235.595. Aset Lain-lain merupakan jenis aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas.

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp572.155.921.531.187 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp843.100.479.849.556 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp270.944.558.318.369.

Rincian Aset Lain-lain pada K/L dan BUN dijelaskan sebagai berikut.

Aset Lain-lain	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. K/L	264.349.885.641.992	61.455.378.467.18
2. BUN	578.750.594.207.564	598.059.673.768.407
Jumlah Bruto	843.100.479.849.556	659.515.052.235.595
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain:		
1. K/L	(49.958.850.254.012)	(19.829.198.690.520)
2. BUN	(220.985.708.064.357)	(201.034.632.686.026)
Jumlah Neto	572.155.921.531.187	438.651.220.859.049

I. Aset Lain-lain pada K/L

Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp264.349.885.641.992 dan Rp61.455.378.467.188. Nilai neto yang dapat direalisasikan atas Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2018 sebesar Rp214.391.035.387.980 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp264.349.885.641.992 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada K/L Rp49.958.850.254.012.

Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2018 sebesar Rp264.349.885.641.992 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp233.130.907.196.903 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp232.501.430.332.362;
- Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.305.613.513.814 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp6.302.709.503.230;
- Kementerian Kesehatan sebesar Rp5.896.652.429.657 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp5.882.901.795.573.

Rincian Aset Lain-lain di masing-masing K/L disajikan pada **Lampiran 23**.

2. Aset Lain-lain pada BUN

Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp578.750.594.207.564 dan Rp598.059.673.768.407. Nilai neto yang dapat direalisasikan atas Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2018 sebesar Rp357.764.886.143.207 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp578.750.594.207.564 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rp220.985.708.064.357. Aset Lain-Lain pada BUN terdiri dari :

a. Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03)

Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp29.186.005.790.698 dan Rp54.182.632.231.984.

Rincian Aset Lain-Lain BA 999.03 disajikan sebagai berikut.

Aset Lain-lain BA 999.03	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1) UAIP		
Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	13.234.602.981	13.234.602.981
2) BLU LMAN		
a) Aset Eks Kelolaan PT PPA	113.776.576.669	96.259.270.000
b) Aset Eks Pertamina	28.510.627.218.923	28.361.658.924.923
c) Aset Lain-lain BUN	548.367.392.125	25.711.479.434.081
Jumlah	29.186.005.790.698	54.182.632.231.985*

*J selisih jumlah per 31 Desember 2017 sebesar Rp1 karena pembulatan

1) Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP)

Aset Lain-lain pada UAIP berupa Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang nilainya per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.234.602.981. Aset tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004. Program PUPTSK terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI);
- Optimasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI);
- Optimasi Pengolahan dan Distribusi Ikan (OPTIHANDIS);
- Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

Sasaran dari program PUPTSK adalah nelayan dan pengolah ikan skala kecil. Mengingat pendidikan/keterampilan dan kondisi sosial ekonomi mereka pada umumnya relatif rendah, diperlukan peran optimal Pemerintah dalam memberdayakan mereka.

2) BLU Lembaga Manajemen Aset Negara

Aset Lain-lain pada BLU LMAN berupa Aset Eks Kelolaan PT PPA, Aset Eks Pertamina, dan Aset Lain-Lain BUN.

a) Aset Eks Kelolaan PT PPA

Aset Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2018 sebesar Rp113.776.576.669. Aset Eks Kelolaan PT PPA pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN Eks kelolaan PT PPA yang diserahkan kepada entitas.

Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Kelolaan PT PPA disajikan sebesar nilai wajar aset pada keputusan Dirjen Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaannya. Pada tahun 2018, entitas belum melakukan penyusutan atas Aset Eks Kelolaan PT PPA karena belum diperolehnya data-data yang diperlukan guna menghitung sisa umur ekonomis aset. Mutasi nilai Aset Lain-lain Eks Kelolaan PT PPA dijelaskan sebagai berikut.

- Saldo awal per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp96.259.270.000 berupa 106 unit apartemen di Puri Casablanca;
- Pekerjaan *upgrading/furnishing* tahap I (11 unit) dan 1 unit apartemen untuk kantor lapangan sebesar Rp4.671.091.269;
- Pekerjaan jasa konsultasi perencanaan *upgrade/furnishing* tahap II (20 unit) sebesar Rp93.999.400;
- Penyerahkelolaan Aset Eks Kelolaan PT PPA berupa 10 unit apartemen dan 2 unit ruko sebesar Rp12.752.216.000.

b) Aset Eks Pertamina

Aset Eks Pertamina per 31 Desember 2018 sebesar Rp28.510.627.218.923. Aset Eks Pertamina pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN eks Pertamina yang diserahkan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Pertamina disajikan sebesar nilai wajar pada laporan keuangan transaksi khusus (*audited*) pada tahun sebelum penyerahkelolaan atau menggunakan nilai wajar apabila termuat pada keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaan atau pada BAST penyerahkelolaan.

c) Aset Lain-lain BUN

Aset Lain-lain BUN per 31 Desember 2018 sebesar Rp548.367.392.125. Mutasi nilai Aset Lain-lain BUN dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018
Saldo awal per tanggal 31 Desember 2017	25.711.479.434.080
Serah terima pekerjaan upgrade aset eks HTBI periode tahun 2018	7.331.901.000
Unrealized Capital Gain atas aset eks HTBI Jalan Slamet Riyadi I Nomor 7	348.847.715.000
Penarikan aset eks HTBI di Jalan Matraman dan Jalan Slamet Riyadi I Nomor 1	(7.785.000.000)
Pengakuan aset tanah PSN atas hasil verifikasi BPKP di tahun 2018	13.785.553.430.920
Perolehan aset tanah PSN melalui pembayaran langsung di tahun 2018	1.461.797.730.377
Koreksi kurang nilai aset tanah PSN tahun 2017 (proyek jalan tol Depok-Antasari dan Ngawi-Kertosono)	(8.869.477.680)
Transfer keluar aset lainnya terkait Aset Tanah PSN yang diperoleh namun tidak dikerjasamakan (Bendungan dan Perkeretaapian)	(1.878.171.780.785)
Transfer masuk (kapitalisasi) atas Biaya Operasional dan Pendukung Pengadaan (BOPP) Tanah dari K/L teknis	585.106.523.594
Transfer Keluar ke Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan	(39.456.923.084.381)
Posisi per 31 Desember 2018	548.367.392.125

Adapun rincian Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN sebagai berikut.

Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional	0
Aset eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)	548.367.392.125
Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN	548.367.392.125

1. Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)

Aset tanah infrastruktur PSN yang diperoleh melalui pembayaran langsung dari entitas kepada pihak yang berhak diakui sebagai aset sesuai ketentuan pasal 69 ayat (1) PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Aset tanah infrastruktur PSN yang diperoleh melalui skema dana talangan dan telah lolos verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diakui sebagai aset berdasarkan kebijakan pada surat Menteri Keuangan nomor S-282/MK.06/2018 tanggal 16 April 2018 hal Kebijakan Penyajian Aset dan Kewajiban terkait Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Lembaga Manajemen Aset Negara. Kebijakan penyajian aset dan kewajiban tersebut didasarkan pada PMK Nomor 5/PMK.06/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Aset Lain-lain BUN berupa tanah infrastruktur PSN per 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Nominal
Posisi per 31 Desember 2017	25.511.506.657.955
(+) Pengakuan aset tanah PSN atas hasil verifikasi BPKP di tahun 2018	13.785.553.430.920
(+) Perolehan aset tanah PSN melalui pembayaran langsung di tahun 2018	1.461.797.730.377
(-) Koreksi kurang nilai aset tanah PSN tahun 2017 (proyek jalan tol Depok-Antasari dan Ngawi-Kertosono)	(8.869.477.680)
(-) Transfer keluar aset lainnya terkait aset tanah PSN yang diperoleh namun tidak dikerjasamakan (Bendungan dan Perkeretaapian)	(1.878.171.780.785)
(+) Transfer masuk (Kapitalisasi) atas Biaya operasional dan Pendukung Pengadaan tanah (BOPP) dari K/L teknis terkait	585.106.523.594
(-) Transfer Keluar ke Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan	(39.456.923.084.381)
Posisi per 31 Desember 2018	0

2) Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)

Aset Eks HTBI per 31 Desember 2018 sebesar Rp548.367.392.125. Aset Eks HTBI berupa Tanah senilai Rp461.633.373.000 dan Bangunan senilai Rp86.734.019.126. Rincian mutasi Aset Eks HTBI pada tahun 2018 sebagai berikut.

Uraian	Nominal
Posisi per 31 Desember 2017	199.972.776.125
(+) Serah terima pekerjaan upgrade aset eks HTBI periode 2018	7.331.901.000
(+) <i>Unrealized capital gain</i> atas aset eks HTBI Jalan Slamet Riyadi I Nomor 7 dan Jalan Rasuna Said	348.847.715.000
(-) Penarikan aset eks HTBI di Jalan Matraman dan Jalan Slamet Riyadi I Nomor 1, Jakarta Timur	(7.785.000.000)
Posisi per 31 Desember 2018	548.367.392.125

b. Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99)

Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp549.564.588.416.866 dan Rp543.877.041.536.423. Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus dijelaskan sebagai berikut.

Aset Lain-lain BA 999.99	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1) Aset KKKS	491.602.418.832.866	489.508.659.091.683
2) Aset Eks BPPN	7.644.734.809.907	2.574.749.283.103
3) Aset Lain-lain BLBI	-	4.467.365.349.620
4) Aset Eks Pertamina	12.570.408.826.220	12.944.737.727.945
5) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T)	40.518.095.500	72.019.011.500
6) Aset BMN Idle	79.383.729.148	54.663.708.402
7) Aset PKP2B	37.612.241.040.994	34.238.755.875.568
8) Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN	14.883.082.231	16.091.488.602
Jumlah	549.564.588.416.866	543.877.041.536.423

1) Aset KKKS per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp491.602.418.832.866 dan Rp489.508.659.091.684. Nilai neto Aset KKKS per 31 Desember 2018 sebesar Rp313.973.013.141.158 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp491.602.418.832.866 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp177.629.405.691.706 dengan rincian sebagai berikut.

Aset KKKS	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a) Aset Tanah	22.365.774.965.994	22.028.148.948.127
b) Aset NonTanah	469.236.643.866.872	467.480.510.143.557
1. HBM	443.187.162.878.817	442.731.782.028.218
2. HBI	97.017.511.748	70.785.280.181
3. Material Persediaan	25.952.463.476.307	24.677.942.835.158
Jumlah Bruto	491.602.418.832.866	489.508.659.091.684
Akumulasi Penyusutan	(177.629.405.691.706)	(162.493.375.705.530)
Jumlah Neto	313.973.013.141.158	327.015.283.386.154

a) Aset KKKS berupa Tanah

Aset KKKS berupa tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp22.365.774.965.994 dan Rp22.028.148.948.127.

Mutasi Aset KKKS berupa tanah dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS Tanah	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Saldo Awal	22.028.148.948.127	20.819.996.739.758
Penambahan	468.583.011.487	1.980.111.487.259
Pengurangan	(130.956.993.619)	(771.959.278.890)
Saldo Akhir*	22.365.774.965.995	22.028.148.948.127

* Selisih data neraca tahun 2018 sebesar Rp1 karena pembulatan

Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, Aset KKKS berupa tanah diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat diperoleh/dibeli serta digunakan oleh KKKS. Terkait pengukuran, berdasarkan Pasal 11, 12, dan 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016, nilai Aset Tanah dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset, yaitu:

- menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset tanah yang diperoleh tahun 2010 ke bawah;
- menggunakan nilai perolehan untuk aset tanah yang diperoleh setelah tahun 2011.

b) Aset KKKS Non Tanah berupa:

1. Harta Benda Modal (HBM)

Aset KKKS berupa HBM per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp443.187.162.878.817 dan Rp442.731.782.028.218. Mutasi Aset KKKS berupa HBM dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS HBM	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Saldo Awal	442.731.782.028.218	370.928.185.846.133
Penambahan	108.786.421.213.186	88.831.565.216.596
Pengurangan	(108.331.040.362.587)	(17.027.969.034.511)
Saldo Akhir	443.187.162.878.817	442.731.782.028.218

Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, Aset KKKS berupa HBM diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat *Placed Into Service* (PIS). Terkait pengukuran, nilai aset KKKS berupa HBM dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset, yaitu:

- menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset HBM yang diperoleh sampai dengan tahun 2010.
- dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada saat PIS untuk aset HBM yang diperoleh setelah tahun 2011.

2. Harta Benda Inventaris (HBI)

Aset KKKS berupa HBI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp97.017.511.748 dan Rp70.785.280.181.

Mutasi Aset KKKS berupa dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS HBI	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Saldo Awal	70.785.280.181	58.622.414.607
Penambahan	33.131.455.226	13.224.628.049
Pengurangan	(6.899.223.661)	(1.061.762.475)
Saldo Akhir*	97.017.511.746	70.785.280.181

*j) Selisih Rp2 Tahun 2018 merupakan pembulatan

Terkait pengakuan, Aset KKKS berupa HBI diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat PIS. Terkait pengukuran, nilai HBI dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang US dollar yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal perolehan/PIS. HBI yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 dan belum dilakukan inventarisasi belum disajikan ke dalam Neraca.

3. Material Persediaan (MP)

Aset KKKs berupa material persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp25.952.463.476.307 dan Rp24.677.942.835.158. Mutasi Aset KKKs berupa material persediaan dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKs Material Persediaan	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Saldo Awal (USD)	1,821,519,253.00	1,874,726,450
Penambahan (USD)	961,236,541.08	2,849,125,996
Pengurangan	(990,582,361.11)	(2,902,333,193)
Saldo Akhir		
USD	1,792,173,432.97	1,821,519,253
Rp*	25.952.463.476.307	24.677.942.835.158

*] Selsih konversi kurs Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp6.532 dan Rp4.486

Saldo awal aset material persediaan merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2017 (audited) sebesar USD1,821,519,253.00 atau setara Rp24.677.942.835.158 (kurs per 31 Desember 2017 adalah Rp13.548/USD).

Mutasi tambah sebesar USD961,236,541.08 berasal dari:

- Pembelian material persediaan sebesar USD531,488,513.27.
- Koreksi saldo awal *capital* sebesar USD2,698,612.31 dan koreksi saldo awal *non-capital* sebesar USD36,705,428.41.
- Pengembalian material persediaan perolehan 2018 sebesar USD31,421,616.13.
- Transfer In* sebesar USD13,979,173.30.
- Alih kelola terima antar KKKs sebesar USD344,943,197.66.

Mutasi kurang sebesar USD990,582,361.11 berasal dari:

- Koreksi saldo awal *capital* sebesar USD42,682,794.57 dan *non-capital* sebesar USD4,437,535.74 akibat pembenahan pencatatan aset.
- Koreksi perubahan material persediaan menjadi harta benda modal sebesar USD239,718,448.04.
- Transfer Out* sebesar USD15,764,852.95.
- Penghapusan sebesar USD22,166,295.39.
- Alih Kelola Serah pada Eks KKKs Total E&P Indonesia sebesar USD344,943,198.00.
- Penggunaan Material Persediaan *non-capital* sebesar USD320,869,236.75.

Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKs berdasarkan laporan SKK Migas per tanggal 31 Desember 2018 senilai USD1,792,173,432.97 atau ekuivalen Rp25.952.463.476.307 (kurs per 31 Desember 2018 adalah Rp14.481/USD).

- Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.644.734.809.908 dan Rp7.042.114.632.723. Aset Eks BPPN merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah sehingga belum dapat diserahkan kepada PT. PPA (Persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, properti, nostro, surat berharga, dan saham.

Aset Eks BPPN dijelaskan sebagai berikut.

Aset Eks BPPN	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a) Aset Properti Eks BPPN	2.338.126.115.203	1.709.554.940.253
b) Aset Inventaris	8.504.708.157	11.009.466.267
c) Aset Nostro	9.584.244.334	14.092.050.712
d) Surat Berharga Eks BPPN	485.257.220.136	454.405.774.008
e) Saham Eks BPPN	400.118.594.856	385.687.051.863
f) Aset Lain-lain Eks BPPN	4.403.143.927.222	4.467.365.349.620
Jumlah	7.644.734.809.908	7.042.114.632.723

a) Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2018 sejumlah 1.487 aset dengan nilai sebesar Rp2.338.126.115.203. Sedangkan per 31 Desember 2017 sejumlah 1.488 aset dengan nilai sebesar Rp1.709.554.940.253. Aset Properti Eks BPPN yang disajikan di neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*). Perubahan jumlah dan nilai Aset Properti Eks BPPN disebabkan beberapa hal sebagai berikut.

- Tanah dan bangunan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp1.418.550.000 terletak di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat ditetapkan status penggunaannya ke Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.291/KM.6/2018 tanggal 17 Desember 2018.
- Terjadi perubahan nilai aset dikarenakan penilaian aset pada tahun 2018 yaitu sebanyak 60 aset nilainya bertambah sebesar Rp629.989.724.950.

Aset Properti Eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) yaitu:

Dokumen Kepemilikan	Jumlah Unit
Dokumen <i>copy</i>	264
Dokumen selain dokumen kepemilikan	416
Tidak ada keterangan	26
Jumlah	706

b) Aset Inventaris

Aset Inventaris Eks BPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp8.504.708.157 untuk 18.653 unit dan Rp11.009.466.267 untuk 32.408 unit. Aset Inventaris Eks BPPN adalah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi (BBO)), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti. Perubahan nilai Aset Inventaris Eks BPPN disebabkan beberapa hal sebagai berikut.

- Inventaris yang terletak di Gudang Semanan Blok A-10 sebanyak 2.488 unit dengan nilai sebesar Rp294.766.520 telah laku lelang sebesar Rp81.000.000 dan Gudang Semanan Blok B-9 sebanyak 1.000 unit dengan nilai sebesar Rp295.806.590 telah laku lelang sebesar Rp61.750.000, lelang tanggal 26 Oktober 2018 di KPKNL Jakarta V.

- Inventaris yang terletak di Gudang Aspac Batu Ceper sejumlah 10.267 unit dengan nilai sebesar Rp1.914.185.000 telah laku lelang sebesar Rp105.000.000 pada tanggal 5 November 2018 di KPKNL Tangerang II.
- c) Aset Nostro
Aset Nostro per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.584.244.334 dan Rp14.092.050.712. Penurunan nilai Aset Nostro disebabkan adanya Rekening Eks Bank Bahari di Coutts Bank Hongkong Branch sebesar USD350,526.24 dan penurunan kurs mata uang. Aset Nostro yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan per 31 Desember 2018 sebesar Rp454.445.361.291. Dokumen kepemilikan tersebut masih dalam penelusuran oleh Ditjen Kekayaan Negara.
- d) Surat Berharga Eks BPPN
Surat Berharga Eks BPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp485.257.220.136 dan Rp454.405.774.008. Surat Berharga Eks BPPN merupakan surat berharga yang belum *free and clear* pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan *Custodial Agreement* tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Setelah tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan, belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi. Pencatatan nilai Surat Berharga Eks BPPN berdasarkan nilai pasar surat berharga yang disajikan pada *Monthly Report* Citibank tanggal 30 November 2018.
- e) Saham Eks BPPN
Saham Eks BPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp400.118.594.856 dan Rp385.687.051.863. Saham Eks BPPN adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari aset *settlement* BTO dan BBU. Penurunan nilai aset saham eks BPPN dikarenakan adanya penurunan nilai pasar saham selama Tahun 2018.
Aset Saham Eks BPPN yang berada pada Kustodi Citibank per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp101.776.804.670. Untuk Aset Saham Eks BPPN yang berada dalam pengelolaan DJKN per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp298.341.790.186.
Nilai Saham Eks BPPN yang di Kustodi Citibank berdasarkan *Monthly Report Citibank* per tanggal 30 November 2018 kecuali untuk KIK Reksadana Perdana berdasarkan nilai pasar per tanggal 28 Desember 2018. Sedangkan untuk saham yang berada dalam pengelolaan DJKN menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI karena melalui surat nomor S-19/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2019, Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per 31 Desember 2018 kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK tahun 2018 belum ada emiten yang memberikan tanggapan sehingga penyajian nilai saham per 31 Desember 2018 menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI.

f) Aset Lain-lain Eks BPPN

Aset Lain-lain Eks BPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.403.143.927.222 dan Rp4.467.365.349.620. Aset Lain-lain Eks BPPN merupakan aset yang timbul dari pemberian BLBI yang terdiri dari:

- Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebesar Rp4.340.193.715.666;
- Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebesar Rp16.657.242.209. Nilai aset tersebut masih menggunakan nilai saat penyerahan tahun 2009 dikarenakan keterbatasan dokumen kepemilikan sebagai dasar konfirmasi. Kebijakan atas aset Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA yang tidak memiliki dokumen kepemilikan yang memadai akan ditetapkan kemudian.
- Aset Saham (Non Bank) Eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebesar Rp46.292.969.347.

Rincian Aset Eks BPPN disajikan pada **Lampiran 22**.

- 3) Aset Lain-lain BLBI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dan Rp4.467.365.349.620. Aset Lain-lain BLBI merupakan aset non lancar lainnya yang terdiri dari Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA, Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA, Aset Saham (nonBank) Eks Kelolaan PT PPA, dan Saham yang Diserahkan kepada PT PPA. Nilai Aset Lain-lain BLBI telah digabung dengan Aset Lain-lain Eks BPPN.
- 4) Aset Eks Pertamina berupa BMN eks Pertamina per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp12.570.408.826.220 dan Rp12.944.737.727.945. Aset Eks Pertamina dirincikan sebagai berikut.
 - 3 (tiga) aset berupa tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Jakarta dan Depok senilai Rp47.580.000.000;
 - BMN eks kontrak kerja sama Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP senilai Rp12.522.828.826.220.
 Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina Rp4.465.038.871.836.
- 5) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp40.518.095.500 dan Rp72.019.011.500. ABMA/T sebesar Rp40.518.095.500 merupakan aset lainnya pada Neraca ABMA/T dalam Pengelolaan DJKN. Nilai tersebut merupakan saldo awal sebesar Rp72.019.011.500 ditambah mutasi ABMA/T sebesar Rp38.626.071.000 dikurangi dengan penyelesaian ABMA/T yang terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp70.126.987.000.
- 6) Aset BMN *Idle* per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp79.383.729.148 dan Rp54.663.708.402. Aset BMN *Idle* merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN eks BMN *Idle* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *Idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN *Idle* dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) atau disebut dengan BMN eks BMN *Idle* dan disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain. Pada tahun 2018, terdapat mutasi tambah atas Aset BMN *Idle* sebesar Rp28.603.709.586 terdiri dari:

- mutasi tambah tanah sebesar Rp25.103.886.550;
- mutasi tambah bangunan sebesar Rp3.499.823.036.

Mutasi kurang Aset BMN *Idle* pada tahun 2018 sebesar Rp3.883.688.840 yang terdiri dari:

- hibah satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp145.755.000 dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp60.425.000 kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Rawa dengan nilai perolehan sebesar Rp1.567.177.840 kepada Badan Pusat Statistik RI;
- penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp60.500.000 dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp82.300.000 kepada Kementerian Keuangan RI;
- penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp1.611.131.000 kepada Komisi Yudisial;
- penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan nilai perolehan sebesar Rp356.400.000 kepada Kementerian Keuangan RI.

Rincian Aset BMN *Idle* disajikan pada **Lampiran 24**.

7) Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp37.612.241.040.994 dan Rp34.238.755.875.568. Penambahan Aset PKP2B terdiri dari:

- Penambahan aset baru berupa Tanah sebesar Rp2.841.740.379.224;
- Tanah PT Kendilo Coal Indonesia yang baru dicatat sebesar Rp780.000.000;
- Penambahan aset baru berupa non tanah sebesar Rp411.763.344.950;
- Kapitalisasi atas aset induk sebesar Rp189.800.402.912;
- Koreksi nilai perolehan sebesar Rp2.584.451.865; dan
- Penghapusan aset melalui lelang penjualan Rp73.183.413.526.

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp26.155.417.554.234.

Aset PKP2B yang tersebar pada 7 PKP2B, yaitu PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, dan PT Tanito Harum.

8) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp14.883.082.231 dan Rp16.091.488.602. Aset Lain-lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara dirincikan sebagai berikut.

Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)
a) Barang Gratifikasi KPK	14.201.806.017	14.435.139.309
b) Aset Eks USAID	56.276.214	95.189.293
c) Aset Eks GIZ-APCC	-	180.260.000
d) Aset Eks GIZ-SREGIP	-	755.900.000
e) Saham PT Aldevelco	625.000.000	625.000.000
Jumlah	14.883.082.231	16.091.488.602

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya Rp10,48 triliun

D.2.1.5.7 Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp10.482.359.272.377 dan Rp15.591.513.780.723. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan ekuitas pada Unit Badan Lainnya (UBL) dengan rincian sebagai berikut.

Unit Badan Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Yayasan TMII	90.793.868.244	89.955.509.968
2. Otorita Asahan	7.892.847.825	13.616.233.168
3. Yayasan Gedung Veteran	6.891.253.320	8.101.230.962
4. BAZNAS	103.225.219.734	140.005.041.457
5. Badan Wakaf Indonesia	1.293.221.652	1.303.893.178
6. BP Dana Abadi Umat	-	3.327.847.280.828
7. SKK Migas	(15.136.819.621)	(368.357.330.572)
8. Bapertarum PNS	484.186.960.628	8.019.539.592.771
9. OJK	5.652.154.041.966	4.359.502.328.963
10. Badan Pengelola Keuangan Haji	4.151.058.678.629	-
Jumlah	10.482.359.272.377	15.591.513.780.723

1. Aset Lainnya dari Yayasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Aset Lainnya dari Yayasan TMII per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp90.793.868.244 dan Rp89.955.509.968. Nilai Aset Lainnya dari Yayasan TMII per 31 Desember 2018 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited*.

Nilai ekuitas bersih per 31 Desember 2017 sebesar Rp89.955.509.968 merupakan nilai ekuitas akhir TMII berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan TMII Tahun 2017 *Audited*, hal tersebut dikarenakan sampai dengan batas waktu penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2017 *Audited* proses audit di Yayasan TMII belum selesai. Nilai Ekuitas Bersih Yayasan TMII berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan TMII tahun 2017 *Audited* sebesar Rp88.231.021.649. Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Yayasan TMII berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

2. Aset Lainnya dari Otorita Asahan

Aset Lainnya dari Otorita Asahan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.892.847.825 dan Rp13.616.233.168. Aset Lainnya sebesar per 31 Desember 2018 merupakan ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan laporan keuangan Otorita Asahan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.239.478.731.134 dikurangi penyesuaian atas pos Setoran PNBP ke Negara pada aset lancar di neraca sebesar Rp1.231.585.883.309. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan merujuk kepada surat Menteri Keuangan Nomor S-619/MK.02/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pengelolaan Dana Otorita Asahan, yang meminta kepada Otorita Asahan menyetor dana *environmental fund* serta pendapatan lainnya yang sah yang menjadi hak negara ke kas negara sebagai PNBP Lainnya.

3. Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran

Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.891.253.320 dan Rp8.101.230.962. Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2018 merupakan ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2018.

- Nilai Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2017 sebesar Rp8.101.230.962 berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran Tahun 2017 *Audited*. Hal tersebut disebabkan sampai dengan batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2017 *Audited*, Yayasan Gedung Veteran belum menyampaikan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran Tahun 2017 *Audited*. Nilai ekuitas bersih menurut Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran 2017 *Audited* sebesar Rp8.037.340.463.
4. Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp103.225.219.734 dan Rp140.005.041.457. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2018 merupakan nilai ekuitas bersih BAZNAS berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited*.
Nilai sebesar Rp140.005.041.457 merupakan nilai ekuitas bersih laporan keuangan BAZNAS Tahun 2017 *Audited*, Hal tersebut disebabkan karena sampai dengan batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2017 *Audited*, BAZNAS belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2017 *Audited*. Nilai Ekuitas Bersih menurut Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2017 *Audited* sebesar Rp109.498.450.853.
5. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.293.221.652 dan Rp1.303.893.178. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2018 merupakan ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun 2018 *Audited*.
6. Aset Lainnya dari Badan Pengelolaan Dana Abadi Umat (BP DAU)
Aset Lainnya dari BP DAU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dan Rp3.327.847.280.828. Aset Lainnya dari BP DAU per 31 Desember 2018 merupakan ekuitas bersih setelah pelimpahan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Dana Abadi Umat dari Kementerian Agama RI kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Nomor: B-11001/Dj.II/KU.00/01/2019 yang merupakan nilai ekuitas bersih yang dilimpahkan kepada BPKH sesuai neraca penutup per tanggal 31 Desember 2017.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 20, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH merupakan badan hukum publik berdasarkan undang-undang yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dan harus sudah terbentuk paling lama satu tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Berdasarkan PMA Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat Pasal 3, dinyatakan bahwa pengelolaan DAU dilakukan oleh BPKH dan dalam hal BPKH belum terbentuk Menteri menetapkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Pengelola DAU. Pada saat laporan keuangan ini disusun, BPKH telah terbentuk. Dalam rangka likuidasi telah disusun Laporan Keuangan Penutup BPDAU per 30 Juni 2017 dan telah diaudit oleh BPK RI dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 37.A/LHP/XVIII/12/2017 tanggal 21 Desember 2017. Sehubungan hal tersebut, BPDAU telah dilikuidasi dan seluruh asetnya akan diserahkan kepada
BPKH.

7. Aset Lainnya dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Aset Lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar minus Rp15.136.819.621 dan minus Rp368.357.330.572. Aset Lainnya sebesar minus Rp15.136.819.621 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan SKK Migas Tahun 2018 *Audited* sebesar minus Rp896.205.647.175 ditambah penyesuaian atas pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2018 sebesar Rp990.287.587.479 dan dikurangi ekuitas bersih pada Laporan Keuangan satuan kerja SKK Migas (BA 999.08) sebesar Rp109.218.759.925. Rincian perhitungan ekuitas bersih SKK Migas sebagai berikut.

Aset Lainnya SKK Migas	Nilai
Ekuitas Bersih SKK Migas Tahun 2018 <i>Audited</i>	(896.205.647.175)
Penyesuaian Kewajiban Pasca Imbalan Kerja	990.287.587.479
Ekuitas Bersih SKK Migas sebagai Satker dalam BA 999.08	(109.218.759.925)
Ekuitas bersih BP Migas per tanggal 13 November 2012	-
Aset Lainnya dari SKK Migas 31 Des 2018	(15.136.819.621)

Penyesuaian atas ekuitas bersih BP Migas per 13 November 2012 tidak dilakukan lagi pada tahun 2018. Nilai ekuitas bersih eks BP Migas disajikan pada Laporan Keuangan Badan Lainnya dan tidak lagi dicatat dan disajikan sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara.

8. Aset Lainnya dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum PNS)

Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp484.186.960.628 dan Rp8.019.539.592.771. Aset Lainnya sebesar Rp484.186.960.628 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Bapertarum PNS per tanggal 31 Desember 2018. Penurunan Aset lainnya yang berasal dari ekuitas bersih dari laporan keuangan Bapertarum disebabkan pada Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited* Bapertarum mencatat kewajiban utang kepada PNS aktif dan PNS yang sudah berhenti sebesar Rp9.442.958.696.105 yang merupakan bagian dari proses likuidasi Bapertarum PNS, berdasarkan Laporan keuangan Bapertarum PNS total aset sebesar Rp10.199.919.866.895, total kewajiban sebesar Rp9.715.732.906.267, dan ekuitas bersih sebesar Rp484.186.960.628. Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Bapertarum PNS berpedoman kepada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Pada tanggal 23 Maret 2018 Bapertarum PNS dilikuidasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Seluruh aset Bapertarum PNS dilikuidasi dan dikembalikan kepada PNS aktif dan PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia.

Bapertarum PNS melaksanakan pengalihan aset dan hak peserta PNS secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Bapertarum PNS telah mengubah basis akuntansi penyusunan dan pengukuran laporan keuangan Bapertarum PNS dan basis akuntansi kelangsungan usaha menjadi basis akuntansi

likuidasi efektif tanggal 31 Desember 2018. Berita Acara Rapat Anggota Bapertarum PNS tanggal 20 Februari 2018 memberikan keputusan bahwa pengalihan aset dan hak peserta mulai bulan Maret 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Bapertarum PNS per 31 Desember 2018. Pembayaran atau pembagian hak peserta dari rekening Bapertarum PNS. Hak peserta yang tidak diklaim dalam jangka waktu 1 (satu) tahun diserahkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan PNS.

9. Aset Lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Aset Lainnya dari OJK (selaku satker BA 999.08) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.652.154.041.966 dan Rp4.359.502.328.963. Aset Lainnya dari OJK per 31 Desember 2018 merupakan nilai ekuitas bersih OJK selaku lembaga dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena selaku satker BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain (BA 999.08), laporan keuangan telah dikonsolidasi pada LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain.

10. Aset Lainnya dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Aset Lainnya dari BPKH per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.151.058.678.629. Aset Lainnya dari BPKH per tanggal 31 Desember 2018 merupakan nilai ekuitas bersih tidak terikat sebesar Rp1.944.416.114.769, nilai ekuitas bersih terikat temporer sebesar Rp1.944.416.114.769, dan nilai ekuitas bersih terikat permanen sebesar Rp2.088.741.386.755 berdasarkan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2018 *Audited*.

D.2.1.5.8 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp12.211.622.116.245 dan Rp10.072.629.035.983. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dijelaskan sebagai berikut.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp12,21 triliun

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)
1. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada K/L	12.141.426.494.645	10.015.012.414.379
2. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada BUN	70.195.621.600	57.616.621.604
Jumlah	12.211.622.116.245	10.072.629.035.983

1. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada K/L

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada K/L per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp12.141.426.494.645 dan Rp10.015.012.414.379.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada K/L terdiri dari:

- a. Akumulasi Amortisasi Hak Cipta sebesar Rp17.756.152.803;
- b. Akumulasi Amortisasi Paten sebesar Rp75.862.174.145;
- c. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp9.454.936.200.910;
- d. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp806.605.150.567;
- e. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp1.404.896.771.775;
- f. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp381.370.044.445.

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada BUN

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp70.195.621.600 dan Rp57.616.621.604. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud tersebut berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lainnya terdiri dari:

- a. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp47.237.987.378;
- b. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp22.957.634.222.

D.2.1.5.9 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp271.738.387.743.944 dan Rp221.423.780.525.753. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	Desember 2017 (Audited)
1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L	50.752.679.679.587	20.389.147.839.727
2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN	220.985.708.064.357	201.034.632.686.026
Jumlah	271.738.387.743.944	221.423.780.525.753

Akumulasi
Penyusutan Aset
Lainnya Rp271,73
triliun

1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp50.752.679.679.587 dan Rp20.389.147.839.727. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L sebesar Rp50.752.679.679.587 terdiri dari:

- a. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp793.829.425.575.
- b. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp15.029.961.892.
- c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp49.943.820.292.120.

2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp220.985.708.064.357 dan Rp201.034.632.686.026. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN terdiri dari:

- a. Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari KKKS sebesar Rp177.629.405.691.706;
- b. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA sebesar Rp20.551.087.855.
- c. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina sebesar Rp17.172.741.763.346.
- d. Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B sebesar Rp26.155.417.554.234.
- e. Akumulasi Penyusutan Aset *Idle* yang sudah diserahkan ke DJKN sebesar Rp4.005.586.867.
- f. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN sebesar Rp3.586.380.347.

D.2.2 KEWAJIBAN**D.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek****D.2.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK
Rp3,99 triliun

Utang PFK per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.991.926.175.494 dan Rp4.505.640.401.487. Utang PFK merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga.

Utang PFK dapat dijelaskan sebagai berikut.

Utang PFK	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Utang PFK DJPK	3.604.283.936.351	4.364.577.414.806
2. Utang PFK DJPB	387.453.556.900	141.062.986.681
3. Utang PFK DJKN	188.682.243	-
Jumlah	3.991.926.175.494	4.505.640.401.487

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK)

Utang PFK DJPK per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.604.283.936.351 dan Rp4.364.577.414.806. Utang PFK DJPK sebesar Rp3.604.283.936.351 berasal dari:

- a. Hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok Triwulan IV 2018 sebesar Rp46.560.384.465, yaitu untuk Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp15.888.138.522 dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp30.672.245.943;
- b. Hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok bulan Desember 2018 sebesar Rp3.557.723.551.886.

2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Ditjen Perbendaharaan (DJPB)

Utang PFK DJPB per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp387.453.556.900 dan Rp141.062.986.681.

Rincian Utang PFK DJPB menurut badan penyelenggara disajikan sebagai berikut.

Badan Penyelenggara	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a. BPJS Kesehatan	97.974.338.980	113.516.533.532
b. Perum Bulog	-	157.972.645
c. PT. Taspen (Persero)	12.892.263.340	26.770.522.176
d. PT. Asabri (Persero)	583.281.959	412.725.731
e. Bapertarum PNS	276.003.672.621	205.232.597
Jumlah	387.453.556.900	141.062.986.681

3. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Ditjen Kekayaan Negara (DJKN)

Utang PFK DJKN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp188.682.243 dan Rp0. Utang Perhitungan Pihak Ketiga DJKN merupakan utang perwalian/PFK hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks BDL.

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp99,88
triliun

D.2.2.1.2 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp99.881.440.679.615 dan Rp44.438.234.758.803. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dijelaskan sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. K/L	17.548.296.494.980	14.934.504.654.454
2. BUN	82.333.144.184.635	29.503.730.104.349
Jumlah	99.881.440.679.615	44.438.234.758.803

1. Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L

Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L per 31 Desember 2018 sebesar Rp17.548.296.494.980 berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas penyelesaian pekerjaan Gedung, pembelian peralatan dan mesin, honor/hak pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan tertundanya pembayaran tagihan dari pihak ketiga.

Utang kepada Pihak Ketiga pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

- Kementerian Pertahanan sebesar Rp8.488.408.342.644 sebagian besar merupakan kewajiban kepada pihak ketiga atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan belanja Listrik Telepon Gas Air (LTGA) yang masih harus dibayar.
- Kementerian Kesehatan sebesar Rp2.247.499.237.957 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.
- Kementerian Ristek Dikti sebesar Rp1.466.618.127.260 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.

Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

2. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp82.333.144.184.635 dan Rp29.503.730.104.349.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN sebagai berikut.

BA BUN	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a. BA 999.03 (BUN PIP)	7.776.103.924.407	13.789.274.661.776
b. BA 999.08 (BUN Belanja Lain-lain)	58.711.068.590.701	4.514.126.912
c. BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus)	15.813.940.969.921	15.470.004.948.054
d. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	197.868.217.285	239.936.781.997
Eliminasi di LKBUN	(165.837.517.678)	(414.390)
Jumlah*	82.333.144.184.636	29.503.730.104.349

*J Seisih Rp1 Tahun 2018 merupakan pembulatan

- Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03 (BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.776.103.924.407 dan Rp13.789.274.661.776.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03 sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah	Nilai
Posisi per 31 Desember 2017	13.789.274.661.776
Koreksi atas kelebihan saldo kewajiban per 31 Desember 2017	13.785.655.916.257
Hasil verifikasi BPKP <i>eligible</i> di tahun 2018	(19.778.765.251.779)
Penggantian dana talangan yang lolos verifikasi di tahun 2018	3.047.056.332
Pengakuan kewajiban atas BAST <i>upgrade/renovasi</i> aset kelolaan pada periode dilaporkan	(3.001.008.702)
Pembayaran atas kewajiban terkait BAST <i>upgrade/renovasi</i> aset kelolaan pada periode dilaporkan	(20.107.449.477)
Jumlah	7.776.103.924.407

Posisi Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03 per jenisnya dijelaskan sebagai berikut.

1. Kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional sebesar Rp7.776.057.876.777.
 2. Kewajiban kepada penyedia jasa terkait *upgrade* aset kelolaan sebesar Rp46.047.630.
- b. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (BUN Belanja Lain-lain) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp58.711.068.590.701 dan Rp4.514.126.912. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN Belanja Lain-lain	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1) Kementerian Keuangan	58.699.506.425.657	3.221.008.220
2) SKK Migas	11.562.165.044	1.293.118.692
Jumlah	58.711.068.590.701	4.514.126.912

1) Utang kepada Pihak Ketiga pada BUN Belanja Lain-lain Kementerian Keuangan sebesar Rp58.699.506.425.657 terdiri dari:

- a) Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.186.544.050 yang merupakan utang biaya pengacara termin ketiga untuk penanganan perkara ICSID sebesar USD200.000. Konversi rupiah dengan angka konversi kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2018. Rincian biaya atas Utang kepada Pihak Ketiga tersebut disajikan sebagai berikut.

Utang kepada Pihak Ketiga pada Kemenkeu		31 Desember 2018 (Audited)
Pembayaran Tahap III atas Penyedia Jasa Hukum oleh Rajah dan Tann LPP	USD200,000 x Rp 14.481 (Nilai Kurs Tengah BI per 31 Desember 2018)	2.896.200.000
PPN	10% x USD200,000	289.620.000
Biaya Transfer valuta asing	USD50 x Rp 14.481	724.050
Jumlah		3.186.544.050

- b) Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebesar Rp649.429.761.603 yang merupakan Utang Satker Cadangan Beras Pemerintah kepada pihak ketiga (Perum Bulog) atas selisih lebih antara jumlah penyaluran beras yang dilaksanakan operator

- dibandingkan dengan jumlah persediaan cadangan beras pemerintah, yaitu sebesar 67.768.941 kg dikalikan dengan HPB. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-325/MK.02/2018 tanggal 9 Mei 2018 hal Penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2018 ditetapkan bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) tahun 2018 sebesar Rp9.583/Kg.
- c) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat sebesar Rp3.752.236.170. Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018 tersebut dapat dirinci sebagai berikut.
- 1) Tagihan biaya Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.578.068.170 yang tertuang dalam Laporan Hasil Verifikasi BPKP 2017 Nomor : LLWAS-356/PW27/2/2018 tanggal 12 November 2018;
 - 2) Tagihan biaya Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.174.168.000 yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 10 September 2015, sesuai rekomendasi BPK atas Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-999.08/75/DJA/PB.6/2019.
- d) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua sebesar Rp10.267.581.435. Pencatatan Utang Kepada Pihak Ketiga didasarkan pada tagihan dari pihak ketiga (PD. Irian Bhakti) yang belum dibayar atas pekerjaan penyaluran beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Bulan Januari s.d. Agustus 2017 (sebelum kontrak ditandatangani). Atas nilai tagihan tersebut telah direviu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua sesuai dengan Laporan Hasil Reviu Tagihan Pembayaran Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Periode Januari Sampai Dengan Juli Tahun 2017 nomor LR-632/PW26/2/2018 tanggal 14 Desember 2018.
- e) Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp58.032.870.302.399 merupakan utang pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) akibat penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran JBT Solar tahun 2017 sebesar Rp20.788.916.888.950 dan 2018 sebesar Rp29.528.464.106.266, utang pemerintah kepada PT PLN (Persero) akibat penetapan tarif dibawah biaya pokok penyediaan listrik non subsidi sebesar Rp7.456.451.880.403 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal tindak lanjut temuan BPK atas subsidi listrik PT PLN (Persero) 2018, dan kekurangan pendapatan PT AKR Corporindo Tbk dari hasil penjualan JBT Minyak Solar tahun 2017 sebesar Rp259.037.426.780 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Utang Selisih Harga kepada Pertamina	47.605.783.140.136
Nilai PPN	1.807.731.903.387
Nilai PBBKB	903.865.951.693
Total PT Pertamina	50.317.380.995.216
Total PT PLN	7.456.451.880.403
Total PT AKR Corporation	259.037.426.780
Jumlah	58.032.870.302.399

- 2) Utang kepada Pihak Ketiga pada BUN SKK Migas sebesar Rp11.562.165.044. Utang kepada pihak ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 tersebut terdiri dari Belanja Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp9.392.191.481 berupa saldo tunggakan Tahun 2018 yang dibelum dibayarkan kepada pihak ketiga, Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp54.277.300 berupa BP-LS Bendahara dan BP Lain-Lain, dan koreksi tambah sebesar Rp2.115.696.263 sesuai hasil rekomendasi BPK pada Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-999.08/112/DJA/PB.6/2019.
- c. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp15.813.940.969.921 dan Rp15.470.004.533.664. Utang kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1) Utang Kepada Pihak Ketiga DJPb	5.133.133.592.527	6.062.601.535.454
2) Utang Kepada Pihak Ketiga DJA	10.679.007.714.996	9.405.611.924.212
3) Utang Kepada Pihak Ketiga BKF	1.799.662.398	1.791.073.998
Jumlah	15.813.940.969.921	15.470.004.533.664
Eliminasi	(165.837.517.678)	-
Jumlah	15.648.103.452.243	15.470.004.533.664

- 1) Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp5.133.133.592.527 sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Perbendaharaan	31 Desember 2018 (Audited)
1. Utang Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi s.d. 31 Desember 2018	67.833.555.000
2. Utang PPN RTGS/Swift Bank Indonesia	695.884.838
3. Utang PPN RTGS BO	36.747.100
4. Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Bagian Lancar UPSL 2012-2013	1.500.000.000.000
5. Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Bagian Lancar UPSL 2014-2015	3.500.000.000.000
6. Kekurangan luran Jamkes Triwulan IV Tahun 2018	60.411.384.023
7. Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Kekurangan pencairan dana luran JKK s.d. Triwulan IV TA 2018	380.810.360
8. Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Kekurangan pencairan dana luran JKM s.d. Triwulan IV TA 2018	1.142.158.092
9. Utang kepada PT Asabri (Persero) berupa kekurangan pencairan dana luran s.d. JKK Triwulan IV TA 2017	215.819.398
10. Utang kepada PT Asabri (Persero) berupa kekurangan pencairan dana luran JKM s.d. Triwulan IV TA 2017	352.680.485
11. Utang Pembayaran Bunga negatif	3.677.970
12. Kekurangan pembayaran dana belanja pensiun bulan Desember 2018	2.060.875.261
Jumlah	5.133.133.592.527

- 2) Utang kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Anggaran merupakan kewajiban kontraktual pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas. Kewajiban jangka pendek per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp10.679.007.714.996 yang terdiri dari utang kepada pihak ketiga terkait pelaksanaan pengelolaan PNBP Migas dan Panas Bumi, Utang Jangka Pendek Lainnya, Pendapatan Diterima di Muka, dan Pendapatan yang

Ditangguhkan.

Utang Kepada Pihak Ketiga Migas

Utang Kepada Pihak Ketiga Migas merupakan kewajiban kontraktual pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas. Jumlahnya yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.769.169.664.657. Sumber dana pembayaran kewajiban kontraktual tersebut berasal dari penerimaan migas pada Rekening Migas Nomor 600.000411980. Adapun rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut.

Utang kepada pihak ketiga Migas	31 Desember 2018 (Audited)
1. PBB Migas	-
2. Reimbursement PPN	1.648.403.042.888
3. Pajak Penerangan Jalan Non PLN	1.384.817.537
4. DMO Fee KKKS	1.751.906.489.898
5. Underlying KKKS	5.367.475.314.334
6. Fee penjualan	-
Jumlah	8.769.169.664.657

a) PBB Migas

Pada Laporan Keuangan tahun 2018 ini tidak terdapat saldo utang yang berasal dari PBB Migas. Total tagihan awal PBB Migas tahun 2018 adalah nihil, sedangkan total tagihan yang dapat diproses pembayarannya setelah melalui tahap verifikasi dan proses pengembalian tagihan oleh Ditjen Anggaran serta penagihan kembali oleh Ditjen Pajak sebesar Rp12.283.733.396.337. Dari total tagihan yang dapat dibayarkan tersebut, penyelesaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama melalui proses reklasifikasi akun pendapatan, yaitu dari Pendapatan Minyak Bumi menjadi Pendapatan PBB Migas sebesar Rp6.119.980.217.581 dan tahap kedua melalui proses pemindahbukuan dari Rekening Migas sebesar Rp6.163.753.178.756.

b) Reimbursement PPN

Mekanisme pembayaran *reimbursement* PPN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (*Reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 158/PMK.02/2016. KKKS menagihkan *reimbursement* PPN kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas meneruskan tagihan kepada Kementerian Keuangan (dih. Direktur Jenderal Anggaran). Rincian Utang *Reimbursement* PPN per 31 Desember 2018 sebagai berikut.

No	KKKS	Saldo per 31 Desember 2018	Saldo per 31 Desember 2017
1.	BP BERAU	236.991.590.885	144.854.431.985
2.	JOB.PERT-TALISMAN JAMBI MERANG	2.813.371.666	-
3.	PERTAMINA EP	492.960.640.265	-
4.	BUT PETROGAS (BASIN) LTD	7.045.424.233	-
5.	PETROCHINA INT'S JABUNG LTD	14.572.985.142	-
6.	PT MEDCO E&P INDONESIA/SOUTH SUMATERA	8.823.106.689	-
7.	PT MEDCO E&P RIMAU	8.513.218.518	-
8.	PT MEDCO E&P TARAKAN	694.894.329	-
	PT SPR LANGGAK (LANGGAK RIAU)	1.474.830.950	-
9.	SANTOS (MADURA OFFSHORE) PTY LTD	9.288.380.583	19.796.791.785
10.	SANTOS (SAMPANG) PTY LTD	9.681.875.917	34.712.215.408
11.	ENI MUJARA BAKAU B.V	278.008.997.516	-
12.	PT Chevron Pacific Indonesia	-	79.010.088.148
13.	Medco E&P Natuna Ltd	-	48.861.527.055
14.	PT Pertamina Hulu Energy N&O	-	33.230.211.515
15.	Totalinaef E&P Indonesia	-	4.093.809.416
16.	Job Pertamina-Jadestone Energy (JK) Ltd	-	1.074.799.484
17.	PT Tropik Energi Pandan	-	1.315.948.533
18.	CNOOC Southeast Sumatera B.V	299.066.160.233	-
19.	Conocophips Grissik	278.467.565.962	-
	Jumlah	1.648.403.042.888	366.949.823.329

c) Pajak Air Tanah dan Air Permukaan

Pajak Air Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu pajak daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai implementasi *assumed and discharged* yang diatur dalam PSC.

Mekanisme penyampaian tagihan permintaan pembayaran Pajak Air Tanah dan Air Permukaan dan kelengkapan dokumen penagihan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas Yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2017.

Pembayaran Pajak Air Tanah dan Air Permukaan untuk kegiatan usaha hulu migas melalui Rekening Migas Nomor 600.000411.980 pada Bank Indonesia, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.02/2015. Tidak terdapat saldo utang Pajak Air Tanah dan Air Permukaan per 31 Desember 2018.

d) Pajak Penerangan Jalan

Seperti halnya Pajak Air Tanah dan Air Permukaan, Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas juga merupakan pajak daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai implementasi *assumed and discharged* yang diatur dalam PSC. Rincian saldo utang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, sebagai berikut.

Pemda	Saldo per 31 Desember 2018	Saldo per 31 Desember 2017
1. Kab. Indragiri Hulu	144.821.930	119.316.429
2. Kab. Tanjung Jabung Barat	856.184.282	-
3. Kab. Tanjung Jabung Timur	298.996.884	-
4. Kab. Batang Hari	66.126.132	-
5. Kab. Musi Rawas	18.688.309	-
6. Kab. Teluk Bintuni	-	6.983.736.850
7. Kab. Rokan Hilir	-	2.757.315.475
8. Kab. Kutai Kertanegara	-	(131.252.484)
Jumlah*	1.384.817.537	9.729.116.270

*selisih TA 2017 Rp1 antara tabel dengan angka audited karena pembulatan.

e) DMO Fee KKKS

Mekanisme pembayaran DMO Fee kepada KKKS mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran DMO Fee dan *Over/Under Lifting* di Sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.02/2015. KKKS menagihkan DMO Fee kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas melakukan penagihan kepada Kementerian Keuangan (d.h.i Direktur Jenderal Anggaran). Berikut ini adalah rincian dari Utang DMO Fee per 31 Desember 2018 sebesar USD120,979,646.60 atau setara dengan Rp1.751.906.489.898 dan per 31 Desember 2017 sebesar USD158,399,724 atau setara dengan Rp2.145.999.443.684.

f) Utang *Underlifting* KKKS

Underlifting KKKS adalah kekurangan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh kontraktor apabila dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu. Saldo utang per 31 Desember 2018 adalah sebesar USD370,656,399 atau setara dengan Rp5.367.475.314.334, sedangkan saldo utang per 31 Desember 2017 adalah sebesar USD380,735,937 atau setara dengan Rp5.158.210.477.794.

Total saldo utang *underlifting* sebesar USD370,656,399 tersebut terdiri dari:

- Estimasi dan riil tagihan *underlifting* Tahun 2018 masing-masing sebesar USD340,581,975 atau setara dengan Rp4.931.967.574.093 dan USD18,595,030 atau setara dengan Rp269.274.629.864.
- Estimasi dan riil tagihan *underlifting* Tahun 2017 masing-masing sebesar USD9,430,557 atau setara dengan Rp136.563.895.917 dan USD2,048,837 atau setara dengan Rp29.669.214.390. Utang sebesar USD2,048,837 tersebut merupakan utang *underlifting* KKKS PHE Tuban tahun 2017 yang ditagihkan oleh SKK Migas pada Tahun 2018. Utang tersebut masih di-pending penyelesaiannya terkait dengan permasalahan penyesuaian harga gas suar kepada PT Gassuma Corporindo.

Nilai estimasi utang *underlifting* tersebut merupakan nilai estimasi tagihan *underlifting* yang disampaikan oleh SKK Migas berdasarkan cut off hasil pengumpulan data oleh SKK Migas dari KKKs per 1 Februari 2019 yang hingga saat cut off penyusunan laporan keuangan audited ini belum disampaikan tagihan aktualnya oleh SKK Migas. Keseluruhan nilai final *over/underlifting* tahun 2018 baru dapat diperoleh sekitar akhir bulan Mei atau awal bulan Juni 2019.

g) Utang Fee Penjualan Migas

Utang *fee* penjualan Migas merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas yang berasal dari tagihan *fee* atas penjualan migas bagian negara yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan belum diselesaikan hingga 31 Desember 2018. Tidak terdapat saldo utang *fee* penjualan migas untuk tahun ini. Pada tahun 2017 terdapat beberapa tagihan atas *fee* penjualan migas yang dikembalikan kepada SKK Migas, yaitu atas penjualan gas pipa tahun 2016 sebesar USD1,376,957.06, atas penjualan LNG tahun 2016 sebesar USD29,645,479.02, penjualan LNG periode *lifting* bulan Januari – September 2017 sebesar USD20,872,577.79. Pengembalian tagihan *fee* penjualan gas pipa tahun 2016 karena belum ditandatangani amandemen Perjanjian Penunjukkan Penjual Gas Bumi *Existing* yang menjadi landasan dalam melakukan pembayaran *fee* penjualan gas pipa. Pengembalian tagihan *fee* penjualan LNG karena belum lengkapnya dokumen serta masih memerlukan pembahasan lebih lanjut terkait mekanisme perhitungan volume LNG bagian negara.

Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi

Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi adalah dana yang tersedia di rekening panas bumi yang dialokasikan sebagai pencadangan untuk pengembalian (*reimbursement*) PPN panas bumi, pencadangan pembayaran PBB panas bumi, dan pencadangan penggantian bonus produksi panas bumi. Pada Neraca tahun 2018, diakui adanya utang pihak ketiga diestimasi, yaitu pada saat pencadangan utang kepada Pengusaha (*reimbursement* PPN dan penggantian bonus produksi) dan pencadangan pembayaran PBB panas bumi dalam rekonsiliasi triwulanan. Adapun utang pihak ketiga *reimbursement* PPN dan utang pihak ketiga PBB panas bumi diakui pada saat pengajuan tagihan dari pihak ketiga, sedangkan utang pihak ketiga penggantian bonus produksi diakui pada saat diterbitkannya Kepmen ESDM tentang besaran bonus produksi panas bumi.

Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi per 31 Desember 2018 tersaji sebesar Rp1.893.544.333.250. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi per 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Uraian	Nilai
1 Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi-reimbursement PPN *	756.580.888.144
2 Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi-PBB Panas bumi	-
3 Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi-penggantian bonus produksi	137.235.181.441
4 Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi Diestimasi-reimbursement PPN *	606.858.800.737

5 Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi Diestimasi -PBB	227.031.945.250
6 Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi Diestimasi - penggantian bonus produksi **	-
7 Bagian Pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan	165.837.517.678
Jumlah	1.893.544.333.250

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek lainnya merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dari Rekening Migas Nomor 600.000411980 yang disebabkan salah setor PT Madura Mandiri Barat yang peruntukannya sebagai PPh Migas sebesar USD1,125,179 atau setara dengan Rp16.293.717,099 apabila dikonversi menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.481/USD. Terkait dana salah setor tersebut telah dilakukan pembahasan dengan instansi terkait sehubungan dengan permintaan pengembalian oleh PT Madura Mandiri Barat kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Berdasarkan hasil pembahasan terakhir dan korespondensi antara KKKK, Ditjen Anggaran dan Ditjen Pajak, atas dana salah setor tersebut telah diproses pengembaliannya pada bulan Maret 2019 melalui melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Anggaran Nomor 149/AG/2019 tanggal 12 Maret 2019 Hal Proses Pengembalian Dana Salah setor KKKK PT Mandiri Madura Barat Ke Rekening Migas atas kurang bayar PPh Migas tahun 2013.

3) Utang Kepada Pihak Ketiga pada Badan Kebijakan Fiskal sebesar Rp1.799.662.398.

Utang Kepada Pihak Ketiga BKF per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.799.662.398. Penambahan saldo utang kepada pihak ketiga dikarenakan adanya pembayaran kekurangan bayar iuran kepada Lembaga internasional tahun 2017 pada tahun 2018.

d. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp197.868.217.285 dan Rp239.936.781.997 atau mengalami penurunan sebesar Rp42.068.564.712 (17,53%). Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 merupakan Utang kepada Pihak Ketiga dari BUN kepada penerima dana SP2D yang timbul akibat terdapat dana SP2D yang gagal disalurkan akibat kesalahan pencantuman nama dan/atau nomor rekening penerima dana SP2D pada SPM yang belum dikoreksi dan disampaikan kembali kepada KPPN oleh satuan kerja terkait sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan penerimaan/pengeluaran non anggaran pihak ketiga karena kesalahan sistem perbankan. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari:

Utang	Nilai	Penjelasan
Utang Retur KPPN	197.842.160.917	Utang retur di KPPN
Utang Lebih Limpah KPPN Khusus Penerimaan	26.056.365	Merupakan kewajiban KPPN Khusus Penerimaan yang berasal dari kelebihan pelimpahan Bank/Pos Persepsi yang belum selesai dikompensasi
Pembulatan	3	
Jumlah	197.868.217.285	

D.2.2.1.3 Utang Bunga

Utang Bunga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp63.568.707.486.877 dan Rp57.638.432.861.401. Utang Bunga merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca. Utang Bunga dirincikan sebagai berikut.

Utang Bunga
Rp63,56 triliun

Utang Bunga	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Pada BUN:		
Utang Bunga SBN	58.360.927.183.31	53.851.009.055.387
Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	102.827.439.148	54.839.859.751
Utang Bunga Luar Negeri	5.104.952.864.420	3.732.502.361.236
Subtotal	63.568.707.486.878	57.638.351.276.374
Pada KL:		
Utang Bunga pada Kemenlu	-	81.585.027
Jumlah	63.568.707.486.878	57.638.432.861.401

*Selsih tahun 2018 Rp1 karena pembulatan

Utang Bunga Surat Berharga Negara/Utang Bunga Dalam Negeri sebesar Rp58.360.927.183.310 didalamnya termasuk penerimaan utang bunga obligasi negara rupiah dan penerimaan imbalan diterima dimuka SBSN Jangka Panjang yang belum dibayarkan sebesar Rp184.478.615.000.

D.2.2.1.4 Utang Subsidi

Utang Subsidi
Rp30,13 triliun

Utang Subsidi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp30.130.298.770.683 dan Rp32.192.914.590.833. Jumlah Utang Subsidi tersebut Rp2.062.615.820.150 lebih rendah dari jumlah subsidi per 31 Desember 2017 sebesar Rp32.192.914.590.833. Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2018 dilakukan reklasifikasi Utang Subsidi, yang semula Utang Subsidi Jangka Panjang menjadi Utang Subsidi Jangka Pendek. Reklasifikasi Utang Subsidi dimaksud dikarenakan Pemerintah telah mengalokasikan/menganggarkan sebagian penyelesaian Kurang Bayar Subsidi/PSO pada APBN TA 2019.

Selain reklasifikasi tersebut di atas, kenaikan Utang Subsidi juga dipengaruhi oleh adanya Utang Subsidi Estimasi terhadap tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh BUMN Operator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA, namun KPA belum melakukan verifikasi atas tagihan dimaksud.

Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Kementerian Keuangan	16.301.692.140.385	17.615.905.799.630
2. Kementerian Pertanian	9.773.249.000.000	7.950.489.339.000
3. Kementerian Perhubungan	108.285.000.000	189.217.346.222
4. Kementerian Sosial	-	140.372.114.951
5. Kementerian PUPR	617.792.089.221	418.645.594.869
6. Kementerian Koperasi dan UKM	3.329.280.541.077	5.878.284.396.161
Jumlah	30.130.298.770.683	32.192.914.590.833

I. Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan

Utang Subsidi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp16.301.692.140.385 dan Rp17.615.905.799.630. Jumlah Utang Subsidi tersebut, Rp1.314.213.659.245 lebih rendah dari Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2017. Rincian utang jangka pendek disajikan sebagai berikut.

Eselon I	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a. Ditjen Anggaran (Subsidi Energi)	15.907.204.095.50	17.600.000.000.000
b. Ditjen Pajak (Pajak DTP)	386.123.000.000	-
c. Ditjen Perbendaharaan (Subsidi Bunga)	8.365.044.882	15.905.799.630
Jumlah	16.301.692.140.385	17.615.905.799.630

a. Utang Subsidi pada DJA

Utang sebesar Rp15.907.204.095.503 merupakan kekurangan subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk. dengan rincian:

- o Utang sebesar Rp10.028.907.351.448 merupakan utang kekurangan subsidi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2016 kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2016
- o Utang sebesar Rp5.868.200.382.336 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Tanah, Minyak Solar, dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2017 kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2017, yang terdiri atas:
 - Kekurangan Subsidi Minyak Tanah sebesar Rp185.963.787.579;
 - Kekurangan Subsidi Minyak Solar sebesar Rp668.099.506.550;
 - Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp5.014.137.088.207.
- o Utang sebesar Rp10.096.361.719 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Solar Tahun 2017 kepada PT AKR Corporindo Tbk berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2017.

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2018 dilakukan reklasifikasi Utang Subsidi, semula Utang Subsidi Jangka Panjang menjadi Utang Subsidi Jangka Pendek. Reklasifikasi Utang Subsidi dimaksud dikarenakan Pemerintah telah mengalokasikan/menganggarkan penyelesaian Kurang Bayar Subsidi/PSO pada APBN TA 2019. Jumlah reklasifikasi yang semula Utang Subsidi Jangka Panjang menjadi Utang Subsidi Jangka Pendek adalah subsidi BBM dan LPG sebesar Rp15.907.204.095.503.

b. Utang Subsidi pada Ditjen Pajak.

Beban subsidi Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp386.123.000.000.

c. Utang Subsidi pada Ditjen Perbendaharaan

Utang Subsidi Kredit Program per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.365.044.882. Utang Subsidi Kredit Program per 31 Desember 2018 terdiri dari:

- 1) Kredit Ketahanan Pangan Energi (KKPE) sebesar Rp1.600.244.996.
- 2) Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPENRP) sebesar Rp580.453.812.
- 3) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) sebesar Rp6.068.257.667.
- 4) Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) sebesar Rp116.088.407.

Rincian Utang Subsidi Kredit Program sebagai berikut.

Skema	Nilai BAV 2018	Tagihan 2015	Tagihan 2016	Tagihan 2017	Tagihan 2018
KKPE	1.600.244.996	0	0	0	1.600.244.996
KPEN RP	580.453.812	0	0	0	580.453.812
KUPS	6.068.257.667	665.566.882	3.006.357.142	784.841.054	1.611.492.589
SSRG	116.088.407	0	0	0	116.088.407
	8.365.044.882	665.566.882	3.006.357.142	784.841.054	3.908.279.804

2. Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian

Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp9.773.249.000.000 dan Rp7.950.489.339.000. Jumlah Utang Subsidi tersebut meningkat sebesar Rp1.822.759.661.000 dari jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2017. Kenaikan Utang Subsidi Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 karena adanya reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang Subsidi ke Utang Subsidi pada Kewajiban Jangka Pendek terkait kurang bayar Subsidi Pupuk berdasarkan LHP BPK yang telah dianggarkan di APBN TA 2019 sebesar Rp9.773.249.000.000.

3. Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan

Utang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp108.285.000.000 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp189.217.346.222. Jumlah Utang Subsidi tersebut menurun sebesar Rp80.932.346.222 dari jumlah utang subsidi per 31 Desember 2017. Jumlah Utang Subsidi sebesar Rp108.285.000.000 merupakan jumlah Utang Subsidi TA 2015 sebesar Rp108.276.981.441 dan Utang Subsidi TA 2016 sebesar Rp8.018.559 yang merupakan reklasifikasi dari utang jangka panjang ke utang jangka pendek sesuai dengan jumlah yang telah dianggarkan di APBN TA 2019.

4. Utang Subsidi pada Kementerian Sosial

Utang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp140.372.114.951. Tidak terdapat lagi Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 dikarenakan terdapat setoran yang merupakan pengembalian kelebihan bayar atas Subsidi Rastra yang berasal dari perhitungan selisih lebih atas Kurang Bayar Subsidi Pangan TA 2016 sebesar Rp140.372.114.951.

5. Utang Subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Utang Subsidi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp617.792.089.221 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp418.645.594.869. Utang Subsidi tersebut meningkat sebesar Rp199.146.494.352 dari jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2017. Utang Subsidi sebesar Rp617.792.089.221 terdiri dari:

- Dana dibatasi penggunaannya sebesar Rp379.937.975.000
- Utang subsidi estimasi BUM sebesar Rp111.748.000.000
- Utang subsidi estimasi Bunga KPR sebesar Rp124.002.613.877
- Utang subsidi estimasi bunga air bersih sebesar Rp2.103.500.344

6. Utang Subsidi pada Kementerian Koperasi dan UKM

Utang Subsidi pada Kementerian Koperasi dan UKM per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.329.280.541.077 dan Rp5.878.284.396.161. Utang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.329.280.541.077 dapat dirinci sebagai berikut.

Tagihan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR yang belum lolos verifikasi yang dapat ditagihkan kembali sebesar Rp47.420.400.629

Tagihan Subsidi Bunga KUR yang belum lolos verifikasi yang dapat ditagihkan kembali sebesar Rp1.365.216.211.938

Tagihan Subsidi IJP KUR yang belum di verifikasi sebesar Rp1.134.226.908.855

Tagihan Subsidi Bunga KUR yang belum di verifikasi sebesar Rp782.417.019.655.

D.2.2.1.5 Utang Transfer

*Utang Transfer
Rp42,50 triliun*

Utang Transfer per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp42.508.894.037.204 dan Rp26.096.171.127.047. Utang Transfer tersebut terdiri dari Kewajiban TKD sebesar Rp24.143.153.891.576 dan Kewajiban TKD Diestimasi sebesar Rp18.365.740.145.628.

1. Kewajiban TKD (Dana Bagi Hasil)

Kewajiban Transfer ke Daerah untuk satker (Dana Bagi Hasil) per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp24.143.153.891.576. Kewajiban Transfer ke Daerah merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya Kurang Bayar DBH. Kewajiban TKD dirincikan sebagai berikut.

Kewajiban TKD	31 Desember 2018 (Audited)
Kurang Bayar DBH TA 2017	23.679.501.426.987
Kurang Bayar DBH TA 2016	132.314.461.127
Kurang Bayar DBH TA 2015	265.404.954.516
Kurang Bayar DBH TA 2014	62.714.209.703
Kurang Bayar DBH TA 2013	4.593.392
Kurang Bayar DBH TA 2012	3.214.245.851
Jumlah	24.143.153.891.576

Pada tahun 2018, telah ditetapkan PMK No.103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan PMK No. 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2018.

2. Kewajiban TKD Estimasi (Dana Bagi Hasil)

Kewajiban TKD Diestimasi per tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp18.365.740.145.628. Kewajiban TKD Estimasi Satker DBH merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul dari timbulnya akibat adanya potensi selisih kurang antara realisasi penerimaan pajak dan PNPB Sumber Daya Alam (yang telah diperiksa BPK) dengan besaran DBH Pajak dan SDA yang sudah disalurkan. Nilai yang tercantum merupakan perkiraan (estimasi) dan akan menjadi definitif (direklasifikasi menjadi Kewajiban TKD) setelah mendapat penetapan dari Menteri Keuangan.

D.2.2.1.6 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

*Bagian Lancar
Utang Jangka
Panjang
Rp368,35 triliun*

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (UJP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp368.352.663.805.325 dan Rp272.701.715.607.467. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan utang Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai neto Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp368.329.678.487.325 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp368.352.663.805.325 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp101.251.794.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp78.266.476.000.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
BUN:		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri	88.732.967.798.966	72.242.010.438.961
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	1.410.104.071.397	1.367.467.507.395
Bagian Lancar SBN	278.132.014.827.761	199.021.153.186.177
Subtotal Bagian Lancar BUN	368.275.086.698.124	272.630.631.132.533
KL:		
Bagian Lancar UJP pada Kemenlu	77.577.107.201	71.084.474.934
Jumlah Bruto	368.352.663.805.325	272.701.715.607.467
<i>Unamortized Discount</i>	(101.251.794.000)	(52.370.697.000)
<i>Unamortized Premium</i>	78.266.476.000	34.999.374.000
Jumlah Neto	368.329.678.487.325	272.684.344.284.467

Utang SBN
Jangka Pendek
Rp102,90 triliun

D.2.2.1.7 Utang SBN Jangka Pendek

Utang SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp102.900.000.000.000 dan Rp124.497.290.000.000. SBN Jangka Pendek merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek sebesar Rp101.235.959.806.000 merupakan nilai neto dari nilai bruto sebesar Rp102.900.000.000.000 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp1.664.040.194.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp0.

Rincian Utang SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Utang SBN Jangka Pendek	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Utang SBN Jangka Pendek	102.900.000.000.000	124.497.290.000.000
Jumlah Bruto	102.900.000.000.000	124.497.290.000.000
<i>Unamortized Discount</i>	(1.664.040.194.000)	(1.654.961.103.000)
<i>Unamortized Premium</i>	0	0
Jumlah Neto	101.235.959.806.000	122.842.328.897.000

D.2.2.1.8 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp24.856.986.958.911 dan Rp17.452.254.907.564. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang diterima dari penysetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dirincikan sebagai berikut.

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp24,85 triliun

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
SPM-KP yang belum diterbitkan SP2D-nya dan pengembalian pungutan ekspor yang belum direalisasikan oleh eksportir pada Kementerian Keuangan.	24.681.785.707.564	17.295.682.218.033

Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian ESDM	174.546.010.077	156.409.158.398
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada LIPI	-	17.100.000
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Badan Pemeriksa Keuangan	51.000.000	50.000.000
Utang Kelebihan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya DJPB (BA 999.99)	604.241.270	96.431.133
Jumlah	24.856.986.958.911	17.452.254.907.564

D.2.2.1.9 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp14,68 triliun

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp15.685.573.384.005 dan Rp15.549.048.517.692. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
K/L	15.584.991.431.064	15.422.121.457.96
BUN	100.581.952.941	126.927.059.727
Jumlah	15.685.573.384.005	15.549.048.517.692

1. Pendapatan Diterima di Muka yang berada di K/L sebesar Rp15.584.991.431.064, terutama berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp10.466.888.019.588 yang merupakan pendapatan terkait izin spektrum/frekuensi dan BP Batam sebesar Rp1.671.119.438.755. Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagaimana pada **Lampiran 25**.

2. Pendapatan Diterima di Muka yang berada di BUN (BA 999.99) sebesar Rp100.581.952.941 merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

D.2.2.1.10 Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp280,09 miliar

Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp280.090.169.168 dan Rp33.564.572.441 merupakan pendapatan dan piutang terkait penerimaan migas yang belum dapat diakui sebagai PNBK karena *earning process*-nya belum selesai. Pendapatan yang Ditangguhkan pada BA 999.99 sebesar Rp280.090.169.168 merupakan saldo penerimaan yang masih tersedia di Rekening Migas per 31 Desember 2018 yang masih belum jelas peruntukannya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi dalam penyusunan LKPP, Pendapatan yang Ditangguhkan yang berasal dari BA 999.02 direklasifikasi menjadi Pendapatan Hibah di LO LKPP. Pada tahun 2018, terdapat Pendapatan yang Ditangguhkan sebesar Rp865.152.763.986 pada BA 999.02. Pendapatan ini merupakan kontra akun dari Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus dan digunakan untuk mencatat penerimaan hibah yang telah masuk ke Rekening Khusus namun NoD-nya belum diterima. Setelah NoD diterima, Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus akan direklas sehingga akan menjurnal balik akun Pendapatan yang Ditangguhkan dan memunculkan pengakuan akun Pendapatan Hibah.

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp32,87 miliar

D.2.2.1.11 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp32.878.446.202 dan Rp16.494.539.212. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut.

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
K/L	58.508.784.553	71.046.171.406
BUN	1.799.325.227	20.847.698
Penyesuaian/reklasifikasi menjadi pendapatan-LO	(27.429.663.578)	(54.572.479.892)
Jumlah	32.878.446.202	16.494.539.212

1. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di K/L sebesar Rp58.508.784.553 antara lain berupa pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas negara, utang pajak yang bersumber dari non APBN, utang satker BLU, utang Perguruan Tinggi yang masih harus dibayar, dan lain-lain.
2. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di BUN sebesar Rp1.799.325.227 merupakan pajak tahun 2018 yang belum disetor ke rekening kas negara.
3. Dari Utang Jangka Pendek lainnya yang berasal dari pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan ke kas negara dilakukan reklasifikasi dari Utang ke pendapatan pajak pada Laporan Operasional sebesar Rp27.429.663.578.

D.2.2.2 Utang Jangka Panjang

D.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

D.2.2.2.1.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.724.587.516.213 dan Rp4.414.348.818.183. Utang tersebut merupakan utang dalam negeri perbankan yang terdiri dari BUMN dan pinjaman dari perusahaan daerah yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan adalah sebagai berikut.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
BJB	332.145.446.203	664.290.892.406
Bank Mandiri	2.062.398.778.243	712.234.857.729
PT BNI (Persero)	2.732.334.773.459	2.202.502.235.666
PT BRI (Persero)	124.195.303.801	165.593.738.400
Bank Jateng	92.967.743.533	130.154.840.943
Bank DKI	380.545.470.973	539.572.253.039
Jumlah*	5.724.587.516.212	4.414.348.818.183

*Seisih tahun 2018 Rp1 karena pembulatan

Terkait klasifikasi akun utang jangka panjang pada Neraca, pada tahun 2019 akan dilakukan kajian terkait penyajian dan klasifikasi utang jangka panjang perbankan dan non perbankan sesuai dengan substansi transaksi.

Utang Jangka
Panjang DN
Perbankan
Rp5,72 triliun

D.2.2.2.1.2 Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri Rp3.231,65 triliun

Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.231.655.441.684.556 dan Rp2.871.222.232.762.317. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai neto Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.232.002.304.373.556 berasal dari nilai bruto sebesar Rp3.231.655.441.684.556 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp34.929.436.432.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp35.276.299.121.000.

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	3.231.655.441.684.556	2.871.222.232.762.317
<i>Unamortized Discount</i>	(34.929.436.432.000)	(20.297.983.982.000)
<i>Unamortized Premium</i>	35.276.299.121.000	37.427.442.288.000
Jumlah	3.232.002.304.373.556	2.888.351.691.068.317

D.2.2.2.1.3 Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan

Pembiayaan SBN Ditangguhkan Rp43,31 triliun

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp43.314.553.530.000 dan Rp53.890.489.260.000. Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2017 merupakan total dari nilai *cash proceeds* penerbitan SBN Valas seri RI0224, RI0229 dan RI0249 diterbitkan dalam rangka *Prefunding* pembiayaan Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan pasal 28 Undang undang nomor 12 tahun 2018 tentang APBN TA 2019.

D.2.2.2.1.4 Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT Rp5,32 triliun

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.326.890.009.308 dan Rp9.657.081.539.263. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT sebesar Rp5.326.890.009.308 terdiri dari UPSL tahun 2012-2013 sebesar Rp1.557.126.930.000, UPSL tahun 2014-2015 sebesar Rp 3.099.954.609.263, dan UPSL tahun 2015-2016 sebesar Rp669.808.470.045.

Utang Kepada Dana Pensiun terdiri dari *Unfunded Past Service Liability* (UPSLS), yakni kewajiban masa lalu yang belum terpenuhi dan diakui sebagai kewajiban oleh pemerintah kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Dasar pengakuan UPSL oleh pemerintah adalah penetapan jumlah UPSL oleh Menteri Keuangan. Perubahan UPSL tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Terdapat penambahan UPSL tahun 2015-2016 sebesar Rp669.808.470.045 melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1021/MK.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 hal Penetapan dan Pengakuan *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil. Pembayaran atas UPSL Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil tersebut akan dilakukan secara sekaligus pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-132/MK.02/2019 tanggal 14 Februari 2019 hal Persetujuan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.
2. Reklasifikasi dari utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek karena sejumlah nilai tersebut akan dibayarkan pada tahun 2019, yaitu untuk UPSL 2012-2013 sebesar Rp1.500.000.000.000,00 dan UPSL 2014-2015 sebesar Rp3.500.000.000.000.

Pengaturan mengenai *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program THT diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 144/PMK.02/2018, dan
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri Yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 144/PMK.02/2018, UPSL yang diakui adalah UPSL yang terjadi akibat adanya perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PMK tersebut juga diatur bahwa PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero) menyampaikan hasil perhitungan UPSL kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dan menjadi dasar pengakuan UPSL sebagai kewajiban oleh Pemerintah.

Skema dan pembayaran yang telah dilakukan untuk tiap UPSL tersebut adalah sebagai berikut:

1. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2012 – 2013

Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-100/MK.02/2015 tanggal 13 Februari 2015. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah	Tanggal/Keterangan	Jumlah
2016	1.500.000.000.000	15 Februari 2016	1.500.000.000.000
2017	1.500.000.000.000	24 Januari 2017	1.500.000.000.000
2018	1.500.000.000.000	10 Januari 2018	1.500.000.000.000
2019	1.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	1.500.000.000.000
2020	1.557.126.930.000	-	-
Jumlah	7.557.126.930.000	-	6.000.000.000.000

Atas pembayaran tersebut, jumlah UPSL Tahun 2012-2013 yang masih menjadi utang jangka panjang adalah sebesar Rp1.557.126.930.000.

2. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2014 – 2015

Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-21/MK.2/2017 tanggal 28 Februari 2017 sebagai ralat/perbaikan atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-1101/MK.02/2016 tanggal 13 Desember 2016. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah	Tanggal/Keterangan	Jumlah
2018	300.000.000.000	10 Januari 2018	300.000.000.000
2019	3.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	3.500.000.000.000
2020	3.099.954.609.263		
Jumlah	6.899.954.609.263		3.800.000.000.000

3. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2015 – 2016

Pada tanggal 21 Desember 2018, Menteri Keuangan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1021/MK.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 hal Penetapan dan Pengakuan *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil sehingga utang pemerintah diakui sebesar Rp669.808.470.045. Pembayaran atas UPSL Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil tersebut akan dilakukan secara sekaligus pada tahun

2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-132/MK.02/2019 tanggal 14 Februari 2019 hal Persetujuan Pembayaran *Unfunded Past service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

D.2.2.2.1.5 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp154.619.584.439.818 dan Rp160.704.149.324.311, yang terdiri dari:

Jenis Utang	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Kewajiban atas <i>Risk Sharing</i> Kredit Program Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen	126.167.048.361.579	126.013.566.421.159
Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri	25.190.149.909.936	24.066.318.391.599
Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada Bapertarum PNS	484.186.960.628	8.019.539.592.771
Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L	866.271.480.516	692.797.191.623
Jumlah	154.619.584.439.818	160.704.149.324.311

Utang Jangka
Panjang DN
Lainnya
Rp154,61 triliun

Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar 1.911.927.727.159 merupakan Kewajiban Kontinjensi atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLB) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen *channeling*) ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *Risk Sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5% ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.360, terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.700 sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *Risk Sharing* adalah sebesar Rp3.659.191.822.315. *Risk Sharing* yang ditanggung Pemerintah

adalah sebesar 52,25%, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159 (52,25% \times Rp3.659.191.822.315).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program. Dalam rangka penyelesaian kewajiban *Risk Sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *Risk Sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen

Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen (Persero) sebesar Rp126.167.048.391.579 merupakan kewajiban kepada peserta program pensiun PNS sampai dengan 31 Desember 2018 atas dana yang dikelola PT Taspen (Persero). Untuk Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) pada PT Taspen (Persero), terdapat perubahan sumber pencatatan dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2017. Pada tahun 2018 digunakan nilai AIP sesuai Laporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun *Audited*, sedangkan pada tahun 2017 digunakan nilai AIP sesuai Laporan keuangan Konsolidasian *Audited*. Jika menggunakan dasar Laporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun *Audited*, nilai AIP per 31 Desember 2017 adalah Rp126.633.857.473.128,00. Penggunaan nilai AIP sesuai angka pada Laporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun *Audited* adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan pada PMK Nomor 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri

Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri sebesar Rp25.190.149.909.936 merupakan kewajiban kepada peserta program pensiun TNI, Anggota POLRI dan PNS Kemhan/Polri sampai dengan 31 Desember 2018 atas dana yang dikelola PT Asabri. Nilai tersebut merupakan nilai dana bersih AIP berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Asabri Tahun 2018 (*Unaudited*) dan Laporan Semester II Program Akumulasi Iuran Pensiun per 31 Desember 2018 (*Unaudited*). AIP PT Asabri (Persero) Tahun 2018 masih menggunakan nilai dana bersih AIP pada Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun/Laporan Keuangan Konsolidasian *Unaudited*.

Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada Bapertarum PNS

Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada Bapertarum PNS sebesar Rp484.186.960.628 merupakan kewajiban kepada peserta program tabungan perumahan PNS sampai dengan 31 Desember 2018 atas ekuitas bersih Bapertarum PNS.

Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L

Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L sebesar Rp866.271.480.516, adalah utang pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp803.656.913.796 dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebesar Rp62.614.566.720.

Utang Jangka Panjang Subsidi
Rp11,62 triliun

D.2.2.2.1.6 Utang Jangka Panjang Subsidi

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp11.627.039.378.875 dan Rp28.415.009.897.486. Utang tersebut terdiri dari:

No	KL	Jumlah		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2018	31 Desember 2017		
1	Keuangan	5.698.022.525.534	18.587.563.958.211	(12.889.541.432.677)	(69,34)
2	Pertanian	5.757.944.602.218	9.818.329.939.276	(4.060.385.337.058)	(41,36)
3	Perhubungan	25.552.071.501	0	25.552.071.501	
4	Sosial	0	0	0	
5	PUPR	145.520.179.622	9.116.000.000	136.404.179.622	1.496,37
	Jumlah*	11.627.039.378.875	28.415.009.897.487	(16.787.970.518.612)	(59,08)

1. Kementerian Keuangan

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp5.698.022.525.534 dan Rp18.587.563.958.211.

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.698.022.525.534 terdiri dari:

a. Direktorat Jenderal Anggaran

Utang Subsidi merupakan kewajiban pemerintah yang masih harus dibayar atas pelaksanaan PSO yang berupa penyediaan BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik.

Sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi, Utang Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi. Dapat diinformasikan bahwa utang jangka panjang subsidi energi per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

- 1) Utang sebesar Rp4.453.601.479.909 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Tanah, Minyak Solar, dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018 kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2018, yang terdiri atas:
 - Kekurangan Subsidi Minyak Solar sebesar Rp1.788.737.445.352;
 - Kekurangan Subsidi Minyak Tanah sebesar Rp190.670.411.505;
 - Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp2.474.193.623.051,50.
- 2) Utang sebesar Rp21.661.045.834 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Solar Tahun 2018 kepada PT AKR Corporindo TBK berdasarkan hasil audit BPK RI.

b. Direktorat Jenderal Pajak

Utang Subsidi per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.222.759.999.792 dan Rp386.136.772.923. Utang Subsidi per 31 Desember 2018 merupakan Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2018 sebesar Rp13.772.923 ditambah dengan Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2018 sebesar Rp1.222.746.226.869. Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2017 sebesar Rp13.772.923 merupakan sisa utang jangka panjang tahun 2017 sebesar Rp386.136.772.923 yang telah direklasifikasikan ke utang jangka pendek sebesar Rp386.123.000.000. Utang Subsidi tahun 2018 merupakan tagihan Subsidi PPh DTP tahun 2018 yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran tahun 2018 tidak mencukupi.

2. Kementerian Pertanian

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.757.944.602.218 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.818.329.939.276. Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.757.944.602.218 terdapat pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang merupakan Kurang Bayar TA 2015 dan 2016 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, serta Kurang Bayar TA 2017 (*Audited*). Dapat diinformasikan Utang Subsidi per 31 Desember 2018 sebagai berikut.

- a. Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2017 sebesar Rp45.080.939.276 merupakan sisa utang jangka panjang tahun 2017 sebesar Rp9.818.329.939.276 yang telah direklasifikasi ke utang jangka pendek sebesar Rp9.773.249.000.000.
- b. Utang Subsidi Jangka Panjang sebesar Rp5.712.863.662.942,00 merupakan kekurangan pembayaran subsidi pupuk tahun 2018 berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2018 pada PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk Kujang.

3. Kementerian Perhubungan

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.552.071.501 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.552.071.501 sebagai berikut.

- a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku KPA PSO PT KAI sebesar Rp2.216.878.520 yang merupakan hasil verifikasi KPA atas tagihan PSO PT KAI, yaitu Utang Subsidi di TA 2016 sebesar Rp2.216.878.520.

No	Uraian Utang	Nilai (Rp)	Reklas ke Jangka Pendek	Utang Jangka Panjang
1	Utang Subsidi TA 2015	108.276.981.441	108.276.981.441	-
2	Utang Subsidi TA 2016	2.224.897.079	8.018.559	2.216.878.520
	Total	110.501.878.520	108.285.000.000	2.216.878.520

- b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan selaku KPA PSO PT Pelni sebesar Rp23.335.192.981 yang merupakan hasil audit BPK RI Tahun 2018.

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp145.520.179.622 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.116.000.000.

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp145.520.179.622 terdapat pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan selaku KPA Subsidi Selisih Bunga KPR dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM). Utang Jangka Panjang Subsidi tersebut merupakan sisa tagihan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dari Bank Pelaksana yang belum terbayar pada Tahun 2017 dan 2018.

Utang Jangka Panjang LN Perbankan Rp714,33 triliun

D.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri

D.2.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp.714.334.793.186.942 dan Rp668.147.269.113.375 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Outstanding Utang Program	367.807.804.985.617	325.464.854.248.659
Outstanding Utang Proyek	346.526.988.201.325	342.682.414.864.716
Total	714.334.793.186.942	668.147.269.113.375

Berikut Daftar Policy Matrix untuk Utang Program yang ditarik pada TA 2018 sebagai berikut.

No	Lender	Program	Policy Matrix/Output/Pilar
1	ADB, KfW	FPMP-2	1 Medium Term Expenditure Aligned with RPJMN and SDG Targets
			2 National public expenditure system enhanced
			3 Fiscal transfers and subnational governments' spending for service delivery improved
2	ADB, KfW	SIEP	1 Fiscal sustainability and sector governance improved
			2 Private participation in power and gas markets enabled
3	ADB, KfW	SIGAP-3	1 More predictable and open business environment
			2 Creating an Efficient Market for Infrastructure through PPPs
			3 Faster and More transparent public procurement
4	World Bank, KfW, AFD	FISCAL DPL-2	1 Improving Quality of Spending
			2 Strengthening Revenue Administration
			3 Enhancing Tax Policy
5	World Bank, AFD	LOGISTICS DPL-2	1 Improving Port Efficiency and Governance
			2 Enabling a Competitive Business Environment for Logistics Service Providers
			3 Making Trade Processing More Efficient and Transparent
6	World Bank	SOCIAL ASSISTANCE REFORM / PKH	1 Disbursement Linked Indicators-Outcome Program PKH

Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan dapat dilihat pada Lampiran 26.

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Rp25,37 miliar

D.2.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp25.374.379.633 dan Rp24.229.125.827. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya sebesar Rp25.374.379.633 merupakan utang Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA, dan CFC berupa *promissory notes* yang belum akan dibayar dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Tidak terdapat tagihan pencairan utang pada per 31 Desember 2018.

Perubahan nilai *promissory notes* pada Lembaga Keuangan Internasional disebabkan oleh perubahan kurs pada tanggal pelaporan. *Promissory notes* diterbitkan dalam mata uang asing sehingga nilainya menyesuaikan kurs pada tanggal pelaporan, misalnya *promissory notes* pada *Multilateral Investment Guarantee Agency* dan *Common Fund for Commodities*. Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya sebagai berikut.

Lembaga Keuangan Internasional	Mata Uang Asal	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
<i>International Development Association (IDA)</i>	IDR	5.237.901.545	5.237.901.545
<i>Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)</i>	USD	1.135.018	16.436.195.658
<i>Common Fund for Commodities (CFC)</i>	EUR	223.450	3.614.000.418
Jumlah*		25.374.379.633	24.229.125.827

(kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp14.481/USD, Rp16.559,75/EUR)

* Selisih Rp6.293 Tahun 2018 karena pembulatan kurs mata uang asing

Rincian *promissory note* pemerintah Indonesia pada IDA sebagai berikut.

No	Rincian	Tanggal	Nilai
1	2 (two) <i>promissory note</i>	19 Januari 1973	129.523.754,28
2	1 (one) <i>promissory note</i>	21 Juni 1973	355.340.803,50
3	1 (one) <i>promissory note</i>	26 Desember 1973	71.956.501,40
4	1 (one) <i>promissory note</i>	25 Mei 1974	514.542.828,77
5	1 (one) <i>promissory note</i>	30 Juni 2000	2.163.936.250
6	1 (one) <i>promissory note</i>	14 Mei 2003	2.002.601.407
Jumlah			5.237.901.544,95

Pembiayaan Utang

Sepanjang tahun 2018, Pemerintah berhasil memenuhi target pembiayaan utang terutama untuk membiayai defisit dan pembiayaan investasi di tengah berbagai tantangan dan gejolak pasar keuangan baik domestik maupun global. Realisasi pembiayaan utang mencapai Rp372,02 triliun atau 95 persen target APBN. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi pembiayaan utang khususnya SBN neto menurun signifikan dimana tren pertumbuhan realisasi SBN neto menurun dari 36,9 persen tahun 2015 menjadi negatif 18,9 persen tahun 2018. Hal ini menunjukkan kemandirian pembiayaan yang semakin baik dan APBN yang semakin sehat.

Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Pemerintah dalam mengelola utang. Hal ini tidak lepas dari ketidakpastian dan gejolak pasar global yang didominasi oleh

beberapa isu utama diantaranya kenaikan suku bunga acuan *Federal Reserve*, perang dagang US dan China, serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah. Di pasar keuangan domestik, kenaikan *7-Day Repo Rate* sampai 175 bps selama tahun 2018 juga turut berdampak mengerek *yield* SBN domestik.

Dampak dari dinamika tersebut akhirnya mulai dirasakan pada lelang SBN domestik di kuartal II dimana pasar SBN mengalami tekanan yang ditandai dengan besarnya *outflow* investor asing, naiknya *yield* SBN 10 tahun hingga menyentuh level 8,78%, serta turunnya *incoming bids* pada saat lelang. Pada lelang bulan April dan Mei 2018, Pemerintah tidak memenangkan beberapa seri SBN yang dilelang karena *yield* yang diminta investor terlampaui tinggi, bahkan pada lelang tanggal 8 Mei 2018, dari keseluruhan seri SBN yang dilelang tidak ada seri yang dimenangkan sama sekali.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari pasar keuangan tersebut, Pemerintah berhasil melakukan upaya antisipatif dengan mengalihkan sebagian penerbitan SBN menjadi pinjaman tunai (pinjaman program) dari lembaga multilateral dan bilateral. Fleksibilitas penggunaan instrumen utang seperti ini memungkinkan Pemerintah untuk membiayai APBN dengan biaya yang terkendali. Selain itu, Pemerintah juga mengoptimalkan tawaran *private placement* dari beberapa institusi keuangan untuk mengantisipasi tekanan pada lelang SBN domestik. Pada akhirnya, dengan perencanaan, koordinasi, dan eksekusi yang baik serta ditunjang oleh kondisi fundamental perekonomian yang relatif kuat, Pemerintah mampu melewati kondisi tersebut dengan baik.

Pemerintah dapat memenuhi pembiayaan APBN sekaligus memberikan keyakinan kepada pelaku pasar keuangan domestik sehingga tingkat *yield* SUN seri *benchmark* 10 tahun kembali membaik dan menyentuh level 7,93% di akhir Desember 2018. Selain itu, seiring berkurangnya tekanan di pasar global, investor asing yang kembali masuk ke pasar domestik berimplikasi pada pulihnya *incoming bids*. Sepanjang tahun 2018, investor asing masih mencatat *net buy* sebesar Rp57,1 triliun, menurun dibanding *net buy* tahun 2017 yang sebesar Rp170,3 triliun. Di sisi fiskal keseluruhan, perbaikan pada sisi penerimaan negara sebagai akibat kenaikan harga komoditas dan perbaikan nilai tukar Rupiah juga berdampak pada realisasi defisit yang lebih rendah dari target semula. Sebagai akibatnya, pengadaan utang Pemerintah ikut berkurang dan Pemerintah membatalkan 4 kali lelang terakhir di tahun 2018. Hal ini menghantarkan Pemerintah mampu memenuhi target pembiayaan utang dengan optimal serta mampu menjaga *cost of borrowing* dalam level yang *manageable*.

Selanjutnya, Pemerintah akan terus meningkatkan efektivitas kebijakan, mempertajam alternatif pilihan pembiayaan dan terus menyempurnakan tata kelola serta proses perencanaan pengelolaan utang, sehingga setiap instrumen kebijakan dapat menghasilkan dampak positif yang nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program pembiayaan yang diluncurkan Pemerintah pada tahun 2018 adalah penerbitan *Green Global Sukuk* di bulan Februari 2018. *Green Global Sukuk* merupakan program pembiayaan untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup. *Green Global Sukuk* dimanfaatkan untuk proyek-proyek yang berwawasan lingkungan di 4 (empat) Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya sejak bulan April 2018, Pemerintah mulai

memperkenalkan mekanisme *US SEC Shelf Registration* yang memungkinkan Pemerintah menerbitkan SBN dalam valuta asing setiap saat untuk memanfaatkan momentum positif di pasar.

Sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan domestik, Pemerintah juga melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi dalam memasarkan produk SBN ritel. Pemanfaatan kemajuan teknologi finansial (*fintech*) dilakukan pemerintah melalui penerbitan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR-003 dan SBR-004 serta Sukuk Tabungan (ST) seri ST-002 yang dipasarkan secara *online*. Hasil yang diperoleh sangat menggembirakan dimana masing-masing SBR dan ST mengalami *oversubscribe*. Selain itu, sebagian besar investor ST-002 adalah kaum milenial yang sudah mulai paham mengenai produk keuangan dan investasi, serta memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Pengelolaan utang di tahun 2018 senantiasa terjaga, hati-hati (*prudent*) dan akuntabel, terlihat pada rasio utang Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,81 persen (*excl. prefunding*). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan tertinggi untuk pembiayaan baik SBSN bermata uang Rupiah yang kenaikannya sebesar 13,45 persen dibandingkan tahun 2017 maupun SBSN bermata uang asing yang kenaikannya sebesar 24,84 persen dibandingkan tahun 2017.

Kenaikan porsi SBSN terutama dari SBSN untuk pembiayaan proyek disebabkan fokus Pemerintah pada pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Selain itu, SBSN merupakan salah satu instrumen inovasi pembiayaan (*creative financing*) yang menjadi "hot issue" pembangunan infrastruktur tahun 2018.

Secara keseluruhan alokasi atau nilai pagu anggaran untuk pembiayaan infrastruktur melalui SBSN tahun 2018 naik menjadi Rp 22,53 triliun dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 16,76 triliun. Pembiayaan sebesar Rp22,53 triliun digunakan untuk membiayai 587 proyek di 34 provinsi yang dilaksanakan oleh 7 Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Standardisasi Nasional.

Pada 2018, Pinjaman Luar Negeri (PLN) kegiatan/proyek masih didominasi oleh pinjaman bilateral seperti JICA, sementara pinjaman dari lembaga multilateral diantaranya World Bank, ADB dan IDB merupakan urutan kedua dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Nilai Pinjaman Proyek Tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017, Pemerintah tetap melanjutkan PLN kegiatan/proyek mengingat peranannya dalam hal transfer of knowledge dari negara pemberi pinjaman serta dukungan teknis dari masing-masing lembaga pemberi pinjaman, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

D.2.3 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.407.808.224.645.741 dan Rp1.540.783.656.928.940. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas
Rp1.407,80
triliun

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Dalam LKPP Tahun 2018, Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari tiga jenis rekening pada Bank Indonesia (Rekening Migas, Rekening Penerimaan Panas Bumi, dan Rekening Pertambangan dan Perikanan) dan rekening pada Bank Umum (Rekening Kredit Program dan Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN). Adapun tujuan dan pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

a. **Rekening SDA Migas, Nomor 600.000411.980 Rekening Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing (KPS)**

Sesuai PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 138/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 Tentang Rekening Minyak Dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Bagian pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85%, yang terdiri dari 71,15% hak pihak lain dan 13,85% merupakan Pendapatan Pajak.

Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

b. **Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi**

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi dijelaskan bahwa Rekening Penerimaan Panas Bumi pada BI digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagi Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi. Pada rekening panas bumi terdapat pengeluaran berupa *reimbursement* PPN, PBB dan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000084980 ke RKUN/Pengusaha Panas Bumi/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

c. **Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000071.980 Rekening Pertambangan dan Perikanan**

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI No. 166/KMK.011/1979 tanggal 16 April 1979 tentang Penetapan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Sebagai Pejabat Yang Diberi tugas Untuk Atas Nama Menteri Keuangan Mengelola Rekening Dep. Keuangan di Bank Indonesia, yaitu Nomor 508.071 Rekening Khusus Penerimaan Bidang Pertambangan Umum dan Perikanan (sekarang nomor 508.000071.980 sesuai perubahan struktur nomor rekening Bank Indonesia, dan dikelola oleh Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat). Rekening Pertambangan dan Perikanan digunakan untuk menampung setoran penerimaan yang berasal dari bidang pertambangan dan perikanan, yaitu penerimaan yang berasal dari PT Inalum dan penerimaan yang berasal dari perusahaan pertambangan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000071.980 ke Pemda/Bank Persepsi/RKUN didasarkan pada surat permintaan DJA. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

d. **Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)**

Rekening Kredit Program adalah rekening tempat menampung penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kredit program pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dari debitur di Bank Umum, yang terdiri atas:

1. Sepuluh rekening yang diatur sesuai Perdirjen nomor Per-39/PB/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Transaksi Rekening Kredit Program (mulai bulan Februari 2015 rekening tersebut berkurang satu sehubungan dengan ditutupnya satu rekening, yaitu rekening bank Muamalat pada tanggal 26 Februari 2015 sesuai surat konfirmasi penutupan dari Bank Muamalat nomor 046/BMI/CORFD/III/2015). Rekening-rekening tersebut akan dihilangkan setiap bulan untuk dipindahbukukan ke Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 dan jasa giro dari rekening tersebut masuk dalam program *Treasury Notional Pooling (TNP)*.
2. Tujuh rekening penampungan PIR/UPP yang setelah dilakukan reklasifikasi oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (saat ini oleh KPPN Khusus Investasi) dan permintaan pemindahbukukan oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi (saat ini oleh Kepala KPPN Khusus Investasi) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara melalui Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 secara berkala setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

e. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-SPAN adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR – SPAN yaitu

- Rekening RR SPAN Mandiri 1190006666620
- Rekening RR SPAN BNI 0296474245
- Rekening RR SPAN BTN 0001401390005113
- Rekening RR SPAN BRI 032901003296301

f. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-Gaji adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR-Gaji yaitu :

- Rekening RR-Gaji BRI 032901003298303
- Rekening RR-Gaji Mandiri 1190006666646
- Rekening RR-Gaji BNI 0296474369
- Rekening RR-Gaji BTN 0001401390005139

Rincian Saldo Rekening Pemerintah Lainnya sebagai berikut.

Kode Bank	nama dan nomor rekening	Kode AKUN	Uraian Akun	Saldo
E1040	Retur SPAN BRI (032901003296301)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	65.636.224.322
E1041	Retur GAJI BRI (032901003298303)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	8.024.000
E1042	Retur SPAN-MDRJ (1190006666620)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	39.340.155.736
E1043	Retur GAJI-MDRJ (1190006666646)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	14.273.800
E1044	Retur SPAN-BNI (0296474245)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	49.215.047.437
E1045	Retur gaji-BNI (0296474369)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	12.595.200
E1046	Retur SPAN-BTN (0001401390005113)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	19.866.017.165

E1047	Retur GAJI-BTN (0001401390005139)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji	-
S0001	DEPKU K/Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing (600000411980)	111313	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL	4.279.644.422.002
S0002	Rekening Penerimaan Bidang Pertambangan Dan Perikanan (508000071980)	111317	Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada KBUN Pusat	-
S0003	Rekening Penerimaan Panas Bumi (508000084980)	111318	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada KBUN Pusat	1.374.911.063.212
S0004	Ministeri Keuangan untuk Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dan Rupiah (519000124980)	111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah	-
T0001	Ministeri Keuangan Releq.Pembangunan Daerah (519000102980)	111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah	20
U0001	Dana Investasi (513000000980)	111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi	4
W0001	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (020601000023305)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	(4)
W0002	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (1160094009835)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0004	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP (5%) (020601000022309)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	1.179.020
W0007	Pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3%) (020601000032304)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0008	Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali (020601000015302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	1
W0012	Rekening Penampungan Pencairan Dana Surat Utang Pemerintah (032901000510308)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0016	Penampungan pengembalian kredit judang, lantai jemar dan kios KUD (GLK-KUD)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	5.000
W0017	Rekening kredit listrik pedesaan (KLP) (020601000010302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0020	RPL BUN PR non SPH (KLP) (1170006607899)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	(1)
E9001	RR RPKBUNP GAJI BRI SYARIAH (1032474183)	11134	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	6.931.500
E9006	RR RPKBUNP GAJI BSM (7745145196)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	3.526.000
E9012	RR RPKBUNP GAJI BPD DIY (001111001493)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	4.180.300
E9014	RR RPKBUNP GAJI BJB SYARIAH (0080102004544)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	-
EB001	Rekening Retur SBSN BRI Syariah (3010201701)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
EB002	RR Rekasus SBSN BNI Syariah (1011201721)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	810.638.511
EB003	RR Rekasus SBSN Bank Swah Mandiri (7788884518)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	4.700.700.777
Jumlah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya				5.851.939.714.224

2. Rekening Migas (Rekening Nomor 600.000.411980)

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (rekening migas) per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.279.644.422.002. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama Tahun 2018.

Tabel 17. Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2018 dan 2017

URAIAN	31 Desember 2018 (Audited)		31 Desember 2017 (Audited)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	147,811,078.86	1.995,770,49	1,187,266.53	15,952.11
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PPh Migas, PNPB SDA Migas dan PNPB lainnya ²⁾	3,851,928,508.73	55.176.556,27	3,155,440,189.20	42.283.813,96
2. Koreksi Pembukuan Kredit oleh BI	288,238.17	4.020,92	-	-
3. Penerimaan lain-lain ³⁾	19,252,126.97	280.813,85	2,420,359.24	32.623,96
4. Retur/Pengembalian karena salah rekening ⁴⁾	4,523,238.05	65.435,72	3,184,791.72	42.270,15
5. Selisih Kurs Pembukuan Kredit ⁵⁾	-	3.700.077,44	-	1.014.491,36
Total Penerimaan	3,875,992,111.92	59.226.904,20	3,181,045,340.16	43,373,199.43
III. Pengeluaran:				
I. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda	834,667,784.93	12.283.733,40	118,633,924.26	1.604,167.92
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	5,953,901.49	84.399,21	8,648,243.23	115,432.20
c. Pemindahbukuan ke Kek. Valas KUN Nomor 600.50241/1980 ⁶⁾				
Pendapatan dari PNPB SDA Migas	346,634,340.24	5.040.756,57	625,955,470.35	8,479,672.87
Pendapatan dari PNPB Migas lainnya	426,934.57	6.024,33	6,752,396.82	91,756.82
Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD	1,187,682,961.23	17.414,913,51	759,990,034.66	10,291,029.81
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
a. Reimbursement PPN ke Kontraktor	640,388,765.78	9.156.490,04	1,120,089,435.54	14,959,651.41
b. Pembayaran DMO Fee KKKS	964,633,949.37	13.855.279,36	663,389,208.76	8,879,949.24
c. Pembayaran Underlifting KKKS	930,226,604.81	13.322.469,03	439,793,314.71	5,890,206.21
d. Pembayaran Fee penjualan PT Pertamina (Persero)	-	-	28,519,031.41	381,974.64
Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD	2,535,249,319.96	36,334,238.43	2,251,770,990.42	30,111,781.51
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI	288,238.17	4.020,92	-	-
4. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit ⁷⁾	-	-	3.122.777,07	-
946,299.58				
5. Retur/Pengembalian karena salah rekening	4,547,526.72	67.080,24	3,160,503.05	42.270.15
Total Pengeluaran	3,727,768,046.08	56.943.030,17	3,014,921,828.13	41,393,381.04
IV. Naik/turun Penurunan (II - III)	148,224,065.84	2.283.874,03	146,123,512.03	1,979,818.38
V. Saldo Akhir (I + IV) ⁸⁾	296,035,144.40	4.279.644.52	147,811,078.86	1.995,770.49

Penjelasan:**Penerimaan**

- a) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi PNPB SDA Migas dan PNPB Migas lainnya, diuraikan sebagai berikut.
- PNPB SDA Migas
Merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan *lifting* minyak dan gas bumi bagian Negara serta setoran atas *Overlifting* KKKS sebesar USD3,851,830,031.47 atau setara Rp55.175.187.704.494
 - PNPB Migas Lainnya dari kegiatan usaha hulu migas
Meliputi setoran atas Bunga, Denda, dan Penalti dan Kelebihan Pembayaran DMO Fee sebesar USD98,477.26 atau setara Rp1.368.563.817
- b) Penerimaan Lain-Lain
Pada penerimaan lain-lain merupakan Penerimaan Belum Jelas Peruntukannya (BJP) sebesar USD19,252,126.97 atau setara Rp279.531.018.653 adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyeter maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.
- c) Retur/Pengembalian Karena Salah Rekening
Merupakan dana yang dikembalikan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi atas transaksi pembayaran kewajiban Pemerintah yang di-retur/dikembalikan karena kesalahan administrasi atau kesalahan data pada rekening penerima. Nilai retur tersebut terdiri dari dana yang dikembalikan atas retur penyelesaian *Underlifting* KKKS sebesar USD4,120,698.99, penyelesaian DMO Fee sebesar USD177,564.06, dan *Reimbursement* PPN sebesar

Rp3.272.646.116.

d) Selisih Kurs Pembukuan Kredit

Selisih kurs pembukuan kredit sebesar Rp3.700.077.448.336 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

e) Pemindahbukuan ke Rekening KUN

Terdiri atas pemindahbukuan sebagai berikut.

- Pemindahbukuan PNBPD SDA Migas, merupakan proses pemindahbukuan penerimaan SDA migas dari rekening migas Nomor 600.000411980 ke Rekening Kas Umum Negara Nomor 600.502411980 setelah memperhitungkan/mencadangkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama migas. Proses pemindahbukuan ini merupakan tahapan agar penerimaan SDA migas dapat diakui sebagai realisasi pendapatan negara sebesar USD346,634,340.24 atau setara Rp5.040.756.575.770.
- Pemindahbukuan Migas Lainnya, merupakan pemindahbukuan atas Bunga, Denda, dan Penalti dan Kelebihan Pembayaran DMO Fee yang disetorkan ke rekening migas Nomor 600.000411980 sebesar USD426,934.57 atau setara Rp6.024.331.562.

f) Selisih Kurs Pembukuan Debit

Selisih kurs pembukuan debit sebesar Rp3.122.777.066.187 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

g) Retur/Pengembalian Karena Salah Rekening

Merupakan dana retur di Rekening Migas yang diproses kembali pemindahbukuan, yang terdiri dari proses pemindahbukuan dana retur atas penyelesaian kewajiban Pemerintah sebesar USD4,523,238.05 dari pemindahbukuan atas keuntungan transaksi retur tahun 2017 sebesar USD24,288.67 yang diakibatkan perbedaan nilai kurs pada saat dana retur masuk ke Rekening Migas dengan kurs pada saat pemindahbukuan kembali atas pembayaran kewajiban PPN *Reimbursement*.

h) Saldo Akhir

Dari total saldo akhir sebesar USD295,535,144.40 atau setara dengan Rp4.279.644.426.056 ekuivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp14.481/USD.

3. Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084980)

Pada Catatan D.2.2 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.374.911.063.212 dan Rp1.709.479.552.436. Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

URAIAN		31 Desember 2018	31 Desember 2017
I.	Saldo Awal	1.709.479.852.436	1.104.000.404.427
II.	Penerimaan:		
1.	Setoran Badan Pemerintah dan Kegiatan Usaha Panas Bumi	2.558.331.571.462	1.919.581.767.637
2.	Koreksi Pembukuan Kredit		4
	Total Penerimaan	2.558.331.571.463	1.919.581.767.641
III.	Pengeluaran:		
1.	Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi ⁴⁾	308.404.779.734	250.060.927.241
2.	Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi ⁵⁾	213.668.402.122	214.884.703.962
3.	Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha Pabum ⁶⁾	118.179.994.471	-
4.	Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN ⁴⁾	2.252.646.884.360	909.162.988.429
	Total Pengeluaran	2.892.900.060.687	1.374.108.619.632
IV.	kenaikan Penurunan (II - III)	(334.568.469.224)	545.473.148.009
V.	Saldo Akhir (I + IV)⁴⁾	1.374.911.063.212	1.709.479.852.436

Penjelasan:

- a. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi Tahun 2018 sebesar Rp308.404.779.734 dibayarkan dalam dua kali pembayaran yaitu:
 - 1) tahap pertama dibayarkan sebesar Rp300.097.524.500
 - 2) tahap kedua dibayarkan sebesar Rp8.307.255.234,00.
- b. Pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp213.668.402.122 adalah *reimbursement* PPN yang pengajuannya pada Tahun 2017 dan 2018 dengan perincian sebagai berikut.
 - 1) *Reimbursement* PPN yang pengajuannya Tahun 2017 sebesar Rp114.023.035.560
 - 2) *Reimbursement* PPN yang pengajuannya Tahun 2018 sebesar Rp99.645.366.562
- c. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha panas bumi sebesar 118.179.994.471 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) penggantian bonus produksi tahun 2015, 2016, dan 2017 sebesar Rp106.583.568.103
 - 2) penggantian bonus produksi tahun 2018 sebesar Rp11.596.426.368
- d. Pemindahbukuan PNBP Panas Bumi Tahun 2018 ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp2.252.646.884.360 terdiri dari:
 - 1) PNBP Panas Bumi Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp195.696.723.757
 - 2) PNBP Panas Bumi Triwulan II Tahun 2018 sebesar Rp439.578.240.710
 - 3) PNBP Panas Bumi Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp481.924.393.346
 - 4) PNBP Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp503.565.793.649
 - 5) PNBP panas bumi yang berasal dari saldo cadangan *reimbursement* PPN dan setoran kekurangan SBP hasil audit BPKP pada PT PGE sebesar Rp631.881.732.898
- e. Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2018 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban *reimbursement* PPN, penggantian bonus produksi yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi dengan rincian sebagai berikut.

No	Pengusaha	Reimbursement PPN	Bonus Produksi	Total
1.	PT Pertamina Geothermal Energi (Persero)	245.449.137.943	22.479.094.408	267.928.232.351
2.	Star Energy Geothermal Salak, Ltd	408.280.899.600	47.618.787.786	455.899.687.386
3.	Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	302.810.699.363	27.863.491.627	330.674.190.990
4.	Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	299.804.244.246	20.604.708.232	320.408.952.478
	Total	1.256.344.981.152	118.566.082.053	1.374.911.063.205

4. Kebijakan Penilaian Kembali BMN

Dalam rangka penyajian nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sesuai nilai wajarnya dan guna membangun *database* aset yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dipandang perlu melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas BMN. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, sebagai dasar hukum Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN). Selanjutnya, sebagai pedoman atas pelaksanaan Perpres tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN), serta beberapa pedoman teknis terkait pelaksanaan penilaian kembali BMN.

Tujuan penilaian kembali BMN adalah:

- a. Meningkatkan kualitas tata kelola BMN;
- b. Menyajikan aset tetap dengan nilai wajar yang mutakhir dalam laporan keuangan;
- c. Membangun *database* BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN;
- d. Mengidentifikasi BMN *idle*;
- e. Meningkatkan *leverage* BMN sebagai *underlying asset* untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2017, penilaian kembali BMN dilakukan terhadap kelompok aset tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan (berupa jalan dan jembatan, dan bangunan air) yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Proses pelaksanaan penilaian kembali BMN meliputi:

- a. Penyediaan data awal oleh satuan kerja sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB);
- b. Inventarisasi, merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN, yang dilakukan oleh KPB;
- c. Penilaian dilakukan oleh penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan dengan menggunakan pendekatan data pasar, biaya, atau pendapatan;
- d. Penyusunan laporan hasil inventarisasi dan penilaian oleh Tim Pelaksana yang berasal dari unsur Pengelola Barang dan KPB;
- e. Koreksi data BMN pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK BMN) berdasarkan hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN oleh KPB;
- f. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dan penilaian BMN antara KPB dan KPKNL;
- g. Tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian;
- h. Monitoring dan evaluasi;
- i. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-765/MK.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018 telah menyampaikan Laporan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan Laporan tersebut jumlah BMN yang menjadi target penilaian kembali dalam kurun waktu 2017-2018 adalah 884.064 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang tersebar pada 13.782 satuan kerja di bawah 82 Kementerian/Lembaga. Hasil Penilaian Kembali BMN 2017-2018 sesuai data dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) per 12 Oktober 2018 menunjukkan sebanyak 945.460 NUP BMN (106,94% dari target telah selesai dinilai kembali dengan wajar sebesar Rp5.728.492.217.907.936. Nilai BMN ini mengalami kenaikan sebesar Rp4.190.306.958.698.349 atau 272,42% dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp1.538.185.259.209.587. Dari 945.460 NUP yang diinventarisasi, sebanyak 748.568 NUP dapat dipastikan keberadaannya (ditemukan), sebanyak 157.531 NUP tidak dapat ditemukan, dan sebanyak 39.361 NUP ditemukan belum tercatat dalam SIMAK BMN (berlebih).

BPK telah melakukan pemeriksaan atas penilaian kembali BMN tahun 2017-2018. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 119/LHP/XV/12/2018 tanggal 31 Desember 2018, BPK menyimpulkan bahwa BPK

tidak menerima hasil penilaian kembali BMN 2017-2018. Kesimpulan BPK tersebut didasarkan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengendalian atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tidak memadai.
2. Metodologi penilaian tanah dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN 2017-2018 tidak diatur secara memadai.
3. Nilai wajar hasil penilaian kembali aset non tanah tidak didukung dengan daftar biaya yang akurat.
4. Penilaian kembali atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang Disajikan sebagai Aset Lainnya tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Terdapat Aset Tetap yang tidak diketahui hasil penilaiannya pada 52 KL sebanyak 49.756 NUP.
6. Penetapan masa manfaat baru belum menyeluruh terhadap BMN non Tanah.
7. Pengklasifikasian Gedung dan Bangunan sebagai dasar penilaian kembali tidak tertib.
8. Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian yang tidak sesuai ketentuan sehingga nilai hasil penilaian kembali sebesar Rp1.365.267.483.759.910 tidak akurat, dan aset dalam sengketa senilai Rp72.394.979.938.524 berisiko dikuasai pihak lain.

Berdasarkan LHP BPK tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan hasil penilaian kembali BMN tidak disajikan pada laporan keuangan tahun 2018. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan kepada Ketua BPK RI Nomor S-1/MK.06/2019 tanggal 2 Januari 2019 hal Tanggapan dan Rencana Aksi terhadap Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, Pemerintah akan melakukan reviu dan perbaikan atas hasil penilaian kembali pada tahun 2019.

Selanjutnya, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada seluruh K/L Nomor S-35/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019, disampaikan kebijakan penyajian hasil penilaian kembali BMN antara lain sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan perhitungan koreksi pencatatan hasil penilaian kembali BMN (*take out* Revaluasi).
2. Hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 tidak disajikan dalam LKKL dan LKPP Tahun 2018. Hasil penilaian kembali BMN akan disajikan dalam LKKL dan LKPP setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK.
3. Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja/Wilayah/Eselon I Tahun 2018 masih menyajikan angka hasil penilaian kembali BMN.
4. Penjelasan atas perbedaan data BMN pada LKKL dan Laporan Barang Pengguna (LBP) perlu diungkapkan secara memadai pada CaLK.
5. Koreksi pencatatan hasil penilaian kembali BMN dilakukan oleh KL pada satuan kerja konsolidasi (Satkon).

Koreksi pencatatan hasil penilaian kembali BMN (*take out* Revaluasi) dilakukan terhadap akun-akun yang terdampak atas transaksi Koreksi Revaluasi Aset dan transaksi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Barang Berlebih), serta transaksi lanjutan setelah dilakukan penilaian kembali antara lain seperti transaksi penghapusan, hibah keluar, penghentian penggunaan, dan transfer keluar.

Berikut adalah rekapitulasi koreksi revaluasi dan koreksi aset tetap non revaluasi berdasarkan aplikasi E-Rekon dan database SIMAK BMN per 26 April 2019 :

BA	NAMA KL	REVALUASI	KOREKSI NONREVALUASI (BARANG BERLEBIH) BERDASARKAN E REKON	TOTAL (PENUNDAAN SIMAK BMN)
001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	624.977.904.902		624.977.904.902
002	Dewan Perwakilan Rakyat	988.884.712.188		988.884.712.188
004	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	3.992.187.484.073	39.536.459.000	4.031.723.943.073
005	Mahkamah Agung	15.339.940.205.407	115.671.031.000	15.455.611.236.407
006	Kejaksaan	11.344.524.477.832	311.050.984.000	11.655.575.461.832
007	Sekretariat Negara	475.403.656.269.211	18.974.000	475.403.675.243.211
010	Kementerian Dalam Negeri	9.592.818.121.035	8.956.824.000	9.601.774.945.035
011	Kementerian Luar Negeri	32.103.275.718.100	395.288.841.000	32.498.564.559.100

012	Kementerian Pertahanan	1.207.383.029.737.830	10.061.171.620.333	1.217.444.201.358.16
013	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	35.142.780.978.034	1.180.221.799.000	36.323.002.777.034
015	Kementerian Keuangan RI	76.031.323.700.396	135.085.714.000	76.166.409.414.396
018	Kementerian Pertanian	71.316.993.820.167	156.516.527.000	71.473.510.347.167
019	Kementerian Perindustrian	6.348.149.716.075	12.029.655.000	6.360.179.371.075
020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	14.776.948.813.060	14.303.523.000	14.791.252.336.060
022	Kementerian Perhubungan	283.798.849.373.431	6.187.746.072.920	289.986.595.446.351
023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	15.926.393.311.599	399.816.920.000	16.326.210.231.599
024	Kementerian Kesehatan	51.837.890.480.972	154.506.756.552	51.992.397.237.524
025	Kementerian Agama	50.252.951.637.700	1.412.137.779.251	51.665.089.416.951
026	Kementerian Ketenagakerjaan	6.595.264.252.837	62.546.381.550	6.657.810.634.387
027	Kementerian Sosial RI	15.260.552.679.442	30.781.091.000	15.291.333.770.442
029	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	9.373.484.768.463	388.432.444.050	9.761.917.212.513
032	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	12.827.827.266.707	597.572.285.243	13.425.399.551.950
033	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	1.101.452.029.683.090	12.039.363.185.684	1.113.491.392.868.77
034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan	3.925.194.930		3.925.194.930
035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	10.113.676.653		10.113.676.653
036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	4.015.748.497		4.015.748.497
040	Kementerian Pariwisata	5.667.347.469.776		5.667.347.469.776
041	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	1.160.300.520.883		1.160.300.520.883
042	Kementerian Negara Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	286.162.345.658.291	1.813.813.486.476	287.976.159.144.767
044	Kementerian Negara Koperasi Dan UKM	2.148.147.757.953	324.554.077.000	2.472.701.834.953
047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	17.768.486.506		17.768.486.506
048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi	29.163.448.394		29.163.448.394
050	Badan Intelijen Negara	3.118.189.211.029	38.271.454.000	3.156.460.665.029
051	Lembaga Sandi Negara	427.967.461.006	721.492.000	428.688.953.006
054	Badan Pusat Statistik	2.311.634.973.853	21.402.649.000	2.333.037.622.853
055	Kementerian Negara Ppn/Bappenas	1.219.620.544.166	490.209.375.000	1.709.829.919.166
056	Badan Pertanahan Nasional	7.339.110.725.495	36.140.672.000	7.375.251.397.495
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1.617.639.077.017	88.757.000	1.617.727.834.017
059	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	4.228.286.153.414	34.582.270.000	4.262.868.423.414
060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	144.170.369.890.587	29.751.261.186.529	173.921.631.077.116
063	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	941.731.014.673	5.263.838.000	946.994.852.673
064	Lembaga Ketahanan Nasional	1.413.481.362.919		1.413.481.362.919
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1.740.850.077.799		1.740.850.077.799
066	Badan Narkotika Nasional	(18.024.099.815)	18.067.973.000	43.873.185
067	Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal. Dan Transmigrasi	750.566.985.350	2.351.877.000	752.918.862.350
068	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional	1.932.920.309.775	18.815.888.000	1.951.736.197.775
074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	3.372.746.739		3.372.746.739
075	Badan Meteorologi. Klimatologi. Dan Geofisika	2.765.048.060.564	11.636.953.000	2.776.685.013.564
076	Komis Pemilihan Umum	536.840.289.938	48.663.554.000	585.503.843.938
077	Mahkamah Konstitusi RI	330.026.072.893	484.187.000	330.510.259.893
078	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	324.855.497.524		324.855.497.524

079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	22.883.990.921.784	669.411.511.000	23.553.402.432.784
080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	12.275.673.877.482	225.488.966.000	12.501.162.843.482
081	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi	3.950.829.934.184	973.017.000	3.951.802.951.184
082	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	1.633.560.908.259	1.075.204.000	1.634.636.112.259
083	Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional	164.334.306.637		164.334.306.637
085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	104.358.579.244		104.358.579.244
086	Lembaga Administrasi Negara	3.601.088.568.028	2.332.428.000	3.603.420.996.028
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	716.819.995.387	1.462.439.000	718.282.434.387
088	Badan Kepegawaian Negara	2.331.606.200.557	9.188.397.000	2.340.794.597.557
089	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	3.317.786.902.270	7.515.060.000	3.325.301.962.270
090	Kementerian Perdagangan	1.710.226.791.125	1.198.651.000	1.711.425.442.125
092	Kementerian Negara Pemuda Dan Olah Raga	556.968.958.083	187.693.000	557.156.651.083
093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1.282.403.975.291		1.282.403.975.291
095	Dewan Perwakilan Daerah	85.889.933.660	1.764.353.000	87.654.286.660
100	Komisi Yudisial	211.749.326.321		211.749.326.321
103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	56.400.219.741		56.400.219.741
104	BNP2TKI	211.022.642.495	584.468.000	211.607.110.495
105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bpls)	216.465.276.929		216.465.276.929
106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	225.955.997.823		225.955.997.823
107	Badan SAR	703.191.696.257	33.542.372.951	736.734.069.208
109	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura	146.848.939.999	591.387.000	147.440.326.999
110	Ombudsman Republik Indonesia	18.532.116.000		18.532.116.000
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	39.570.802.091	890.545.000	40.461.347.091
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam	27.053.532.234.208	24.231.162.000	27.077.763.396.208
113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	(47.599.972.648)		(47.599.972.648)
115	Badan Pengawas Pemilu RI	2.346.592.238		2.346.592.238
116	Lembaga Penyiaran Publik RRI	10.069.126.721.436	13.413.898.000	10.082.540.619.436
117	Lembaga Penyiaran Publik TVRI	9.106.320.643.054	176.395.836.000	9.282.716.479.054
118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	949.345.669.243	516.417.149.000	1.465.762.818.243
119	Badan Keamanan Laut	164.843.029	299.475.000	464.318.029
999	Bendahara Umum Negara	48.980.689.496		48.980.689.496
	Total	4.081.699.843.719.060	68.006.048.568.539	4.149.705.892.287.600

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi yang berasal dari BMN Berlebih atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 tersebut terdiri terdiri dari 30.598 NUP dengan nilai wajar sebesar Rp68.006.048.568.539 yang terbagi atas koreksi BMN berlebih tahun 2017 sebanyak 13.559 NUP dengan nilai wajar sebesar Rp45.915.121.664.961 dan atas koreksi BMN berlebih tahun 2018 sebanyak 17.039 NUP dengan nilai wajar sebesar Rp22.090.926.903.578.

Rincian Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN akibat pelaksanaan revaluasi BMN Tahun 2018 pada 82 K/L dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

5. **Pembelian Saham PT Freeport Indonesia Oleh PT Indonesia Asahan Aluminium Indonesia (Persero)**

Berdasarkan Kesepakatan Final Perundingan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) tanggal 27 Agustus 2017, antara lain disepakati bahwa divestasi saham PTFI sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh Tim dari Pemerintah dan PTFI. Menindaklanjuti kesepakatan dimaksud serta memperhatikan perkembangan pembahasan bersama antara Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM, maka Menteri BUMN memberikan penugasan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (PT Inalum (Persero)) untuk melakukan pengambilalihan saham divestasi PTFI sampai saham yang dimiliki peserta Indonesia di PTFI mencapai 51%. Berdasarkan penugasan tersebut, PT Inalum (Persero) diberikan wewenang untuk melakukan pembahasan, perundingan dengan pihak-pihak terkait, mempersiapkan dan membuat surat, perjanjian, dokumen, menandatangani perjanjian-perjanjian, termasuk menandatangani Perjanjian Induk tentang Pengambilalihan Saham Divestasi PTFI dengan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, serta dokumen lain yang diperlukan dalam rangka pengambilalihan saham divestasi PTFI dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penugasan tersebut, PT Inalum (Persero) menunjuk konsultan untuk melakukan *due diligence* antara lain dari sisi hukum, *financial model*, teknis, serta melakukan perundingan dengan Freeport McMoran Inc dan PT Rio Tinto Indonesia. Pada saat dilakukan *due diligence*, didapatkan informasi bahwa PTFI tidak memiliki 100% *Economic Interest* dari Tambang Grasberg tetapi sebesar 60% sampai dengan tahun 2022 (yang tertuang lebih rinci pada perjanjian *Participation Agreement*) dengan sisa *Economic Interest* dimiliki oleh PT Rio Tinto Indonesia. Untuk menjalankan kesepakatan terkait divestasi saham PTFI, PT Inalum (Persero) menerbitkan *global bond* yang seluruhnya bernilai USD4 juta. Pada tanggal 21 Desember 2018, transaksi tersebut menghasilkan struktur kepemilikan yang baru sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholder Agreement*) antara PTFI, PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (PT IPMM), Freeport McMoran Inc, dan PT Inalum (Persero), yang disebutkan bahwa persentase kepemilikan awal (setelah divestasi) dari masing-masing pemegang saham sebagai berikut, Freeport McMoran Inc sebesar 48,764%; PT Inalum (Persero) sebesar 26,236%, dan PT IPMM sebesar 25%. Struktur kepemilikan baru ini menjadikan kepemilikan nasional Indonesia menjadi sebesar 51,236% yang dimiliki melalui kepemilikan langsung PT Inalum (Persero) sebesar 26,236% dan kepemilikan tidak langsung PT Inalum (Persero) melalui PT IPMM sebesar 25%.

PT IPMM merupakan perusahaan yang sebelumnya bernama PT Indocopper Investama, pemilik 9,36% saham PTFI, yang pada pelaksanaan divestasi ini dibeli 100% kepemilikannya oleh PT Inalum (Persero) sebagai *special purpose vehicle* (SPV) untuk mengakomodasi rencana kepemilikan Pemerintah Daerah secara tidak langsung atas 10% saham PTFI. Skema yang direncanakan terkait kepemilikan tidak langsung Pemerintah Daerah atas PTFI ini dijalankan sesuai dengan Perjanjian Induk antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan akan dieksekusi oleh BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, sehingga kepemilikan nasional Indonesia akan diwakili oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN sebesar 41% dan oleh Pemerintah Daerah sebesar 10%. Namun, sampai dengan 31 Desember 2018 Pemerintah Daerah belum masuk pada struktur kepemilikan PT IPMM sehingga PT Inalum (Persero) masih memiliki PT IPMM secara penuh. Kondisi tersebut mengakibatkan kepemilikan PT Inalum (Persero) terhadap PTFI per 31 Desember 2018, baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 51,236%.

Atas pembelian tersebut, dalam Laporan Keuangan PT Inalum (Persero) Tahun 2018 (*audited*), PT Inalum (Persero) mencatat Investasi pada PTFI sebesar Rp65.596.356 juta rupiah. Terkait dengan pengendalian yang meliputi kekuasaan investor atas *investee*, eksposur, atau hak-haknya, terhadap imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuannya untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut, Grup mempertimbangkan pengaturan yang ada di dalam *Shareholder Agreement* antara PT Inalum.

Berdasarkan *Shareholder Agreement*, PT Inalum (Persero) dan PT IPMM ("Grup Inalum") mempunyai hak suara yang penting dalam tata kelola perusahaan PTFI melalui keterwakilan Grup Inalum di Dewan Komisaris, Direksi, Komite Nominasi, Komite Operasional dan Komite Keuangan. Grup Inalum memiliki jumlah perwakilan yang sama

dengan Freeport McMoran Inc di Dewan Komisaris, Direksi, Komite Nominasi dan Komite Keuangan. Direksi pada periode pertama ditunjuk dan disetujui bersama-sama oleh Pemegang Saham PTFI. Sementara Freeport McMoran Inc memiliki perwakilan yang lebih banyak pada Komite Operasi, suatu komite yang mengatur aktivitas yang berhubungan dengan operasi pertambangan PTFI. Sistem pengawasan dan keseimbangan diberlakukan untuk memastikan bahwa Komite Operasi tersebut bertanggung jawab terhadap Direksi dan pemegang saham.

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 65 menyebutkan bahwa investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal sebagai berikut.

1. kekuasaan atas *investee*;
 2. eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
 3. kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.
- Berdasarkan *Shareholder Agreement* dan perjanjian-perjanjian lain antara Inalum (selaku investor) dengan Freeport McMoran/FCX (selaku *investee*) dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Inalum tidak dapat mengambil keputusan sepihak atas rencana aktivitas PTFI walaupun kepemilikan saham Inalum secara langsung maupun tidak langsung sebesar 51,236% saham.
2. Inalum sampai dengan tahun 2022 mendapatkan imbal hasil berupa dividen berdasarkan porsi kepemilikan saham yang sebelumnya menjadi milik Pemerintah Indonesia dan PT Indocopper Investama sebesar 18,72% ditambah dengan *economic interest* yang sebelumnya dimiliki oleh PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI) yaitu sebesar 40% dari produksi yang melampaui *metal strip*.
3. Inalum tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil investor dari keterlibatannya dengan *investee*.

Pengaturan dalam ERA ini dilakukan akibat adanya *Participation Agreement* (PA) yang dibuat pada tahun 1996 antara PTFI dan PTRTI. Sebagian kewajiban PA ini direplikasi guna mendapatkan hasil optimal pasca Periode Awal yaitu sebesar 51% atas *economic interest* sesuai dengan 51% kepemilikan *equity interest* PTFI. Tanpa dilakukannya replikasi selama periode awal, kepemilikan PT Inalum akan hanya mendapatkan 30,6% *economic interest* PTFI, bukan 51% sesuai dengan *equity interest*, karena keberadaan PA antara PTFI dan PTRTI akan terus berlaku.

PT Inalum tidak dapat mengambil keputusan sepihak atas rencana aktivitas PTFI dikarenakan PT Inalum masih dalam proses untuk memahami *business process* PTFI, sementara operasional PTFI tetap harus berjalan dan selama proses *transfer of knowledge* dari Freeport McMoran, pengambilan keputusan tetap melibatkan Freeport McMoran. Pemerintah menugaskan PT Inalum (Persero) untuk melakukan pengambilalihan saham PTFI dengan pertimbangan antara lain:

1. Tujuan dibentuknya holding BUMN pertambangan salah satunya dalam rangka menguasai cadangan dan sumber daya mineral di Indonesia, oleh sebab itu, pengambilalihan saham PTFI yang menguasai cadangan dan sumber daya mineral lebih tepat apabila dilakukan oleh PT Inalum selaku induk holding BUMN sektor pertambangan.
2. BUMN Holding pertambangan memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mengakuisisi saham PTFI, khususnya PT Inalum selaku induk holding BUMN pertambangan yang sebelum pengambilalihan saham PTFI tidak memiliki hutang sehingga masih memiliki ruang untuk *leverage* yang cukup besar.
3. Dengan penugasan PT Inalum selaku induk holding BUMN pertambangan untuk mengambil alih saham PTFI maka:
 - a. Pemerintah tidak menggunakan dana APBN dalam rangka proses pengambilalihan saham divestasi PTFI, sehingga dana APBN dapat dialokasikan kepada program yang lebih prioritas seperti pembangun infrastruktur;
 - b. Pengambilalihan saham divestasi PTFI dilakukan menggunakan aksi korporasi.

6. Aset KKKS

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKBUN 31 Desember Tahun 2018 terselenggara, KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKBUN 31 Desember Tahun 2018, karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca, dengan penjelasan sebagai berikut.

a) Aset Tanah

Saldo Awal 2018	Luas	Nilai (Rp)
	3.918.516.749	1.015.852.969.355
Mutasi Tambah :		
Aset belum IP reklasifikasi dari neraca	361.502	9.665.173.937
Aset belum di IP yang baru dilaporkan SKK Migas	11.475.015	15.217.538.603
Mutasi Kurang :		
Koreksi Kurang Pencatatan	45.913.598	70.663.313.793
Reklas ke neraca atas tanah yang sudah di IP	4.502.506	82.424.838.885
Saldo Akhir 31 Desember 2018	3.879.937.162	887.647.529.217

- Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP tahun 2017 (*Audited*).
- Koreksi tambah reklasifikasi dari neraca ke CaLK akibat kesalahan pencatatan aset tanah pada 2 KKKS (PT Medco E&P Indonesia Kampar dan Bunga Mas International Company) dengan perolehan dibawah Tahun 2010 seluas 361.502 m² dengan nilai sebesar Rp9.665.173.937 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.
- Mutasi tambah sebesar Rp15.217.538.603,00 Pertamina Tomori Sulawesi, Selayara Belida, ConocoPhillips South Jambi Ltd., Kangean Energ dengan perolehan tahun sampai dengan 2010 seluas 415.852 m² yang baru dilaporkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.
- Koreksi kurang seluas 45.913.598 m² dengan nilai sebesar Rp70.663.313.793 terdiri dari :
 - aset pinjam pakai dengan PTPN pada KKKS tanah seluas 21.000m² senilai Rp1.140.529.749,00
 - koreksi pembenahan pencatatan aset tana a KKKS ConocoPhillips South Jambi seluas 5.000m² senilai Rp29.061.999,50.
 - Kawasan hutan pada KKKS Pertamina Hulu Mahakam seluas 45.887.598m² senilai Rp69.493.722.044.
- Reklasifikasi ke neraca aset tanah pada 8 KKKS (PHE NSO, Petro Malaka, Petronas Carigali Ltd, PT Pandawa Prima Lestari, PT Rizki Bukit Barisan E&P Stockbridge Budong-Budong B.V, JOB Pertamina Golden Spike IL) dengan luas 4.502.506 m² senilai Rp82.424.838.885 yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian pada tahun 2017 dan 2018.
- Terdapat BMN yang berasal dari 7 (tujuh) KKKS yang telah berakhir masa kontrak namun belum diserahkan kepada operator baru dikarenakan masih dalam proses penyusunan Berita Acara Serah Terima pada Eks KKKS sebagai berikut.
 - JOB Pertamina Jadestone Energy LTD
 - PHE NSO
 - PT Medco E&P Kampar
 - Virginia Indonesia Company Sanga-Sanga, LL
 - South Madura Exploration Company, PTE. LTD
 - Petrosetat, LTD
 - Japex Buton LTD

b) Aset Harta Benda Modal

1) Aset sumur yang tidak digunakan

Terdapat 2 kategori aset sumur, yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi (*plug and abandoned*).

Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2018 dengan total nilai USD152,279,075.85. Nilai aset sumur yang tidak digunakan rinciannya adalah sebagai berikut.

Jumlah KKKS	Saldo Awal Nilai Perolehan (USD)	Penambahan	Pengurangan	Nilai Sumur 2018 (USD)
18 KKKS	146,535,167.24	5,971,202.61	227,294.00	152,279,075.85

Mutasi Tambah aset sebesar USD5,971,202.61 dan mutasi kurang USD227,294.04 berasal dari koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.

2) Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan pada 31 Desember 2018

Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada semester II tahun 2018 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
6,108,202,753.49	464,523,017.95	789,448,488.04	5,783,277,283.40

a) Mutasi Tambah aset sebesar USD464,523,017.95 berasal dari koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.

b) Mutasi Kurang aset sebesar USD789,448,488.04 berasal dari:

- i. Penjualan lelang, transfer out, selisih pembulatan, dan/atau pembenahan aset sebesar USD672,329,454.83.
- ii. Reklasifikasi BMN ke daftar BMN KKKS Terminasi akibat berakhirnya kontrak sebesar USD117,119,033.21.

3) Aset *Subsequent Expenditure*

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
2,612,476,992.16	203,144,324.61	1,191,570,321.10	1,624,050,995.67

a) Mutasi Tambah aset sebesar USD203,144,324.61 berasal dari penambahan SE, selisih pembulatan, transfer in, dan koreksi pembenahan, KKKS oleh SKK Migas.

b) Mutasi Kurang aset sebesar USD1,191,570,321.10 berasal dari:

- i. Penjualan lelang, transfer out, selisih pembulatan, dan/atau pembenahan aset sebesar USD1,175,584,022.70.
- ii. Reklasifikasi BMN ke daftar BMN KKKS Terminasi akibat berakhirnya kontrak sebesar USD15,986,298.40.

c) *Subsequence expenditure* akan dikapitalisasi setelah melalui verifikasi dan rekonsiliasi dengan SKK Migas dan KKKS yang bertujuan untuk mengidentifikasi aset-aset yang memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi.

4) Aset Kondisi Rusak-Berat

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
95,238,539.77	1.340.090,32	4.139.397,66	92.439.232,43

Mutasi kurang pada aset kondisi rusak berat yang disebabkan oleh adanya:

- 1) Mutasi tambah sebesar USD1,340,090.32 berasal dari pembenahan aset sebesar USD1,340,090.32.
- 2) Mutasi kurang pada aset kondisi rusak berat yang disebabkan oleh adanya penjualan lelang, transfer out, selisih pembulatan, dan/atau pembenahan aset sebesar USD4,139,397.66.

5) Aset dalam proses penghapusan

Terdapat aset yang sudah laku terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas dan belum dilaporkan mutasi penghapusannya oleh KKKS sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
222,789,033.69	31,668,925.61	135,404,886.51	119,053,072.79

- a) Mutasi Tambah aset sebesar USD31,668,925.61 merupakan aset yang sudah laku lelang namun belum terbit SK Penghapusan dan/atau Surat Hapus Buku yang diterbitkan oleh SKK Migas kepada KKKS yang bersangkutan.
- b) Mutasi Kurang aset sebesar USD135,404,886.51 merupakan penghapusan BMN yang telah terbit Surat Hapus Buku dari SKK Migas.

6) Aset KKKS Terminasi yang semula tercatat pada neraca

Selama periode tahun 2018, terdapat penambahan sebanyak 16 KKKS yang semula tercatat pada neraca kemudian direklasifikasi ke daftar aset BMN KKKS terminasi dikarenakan masa kontrak telah berakhir sebagaimana berikut.

	Jumlah KKKS	Nilai Perolehan Audited 2017 (USD)	Mutasi Tambah/Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Des 2018 (USD)
31 Des 2017 (Audited)	123 KKKS	2,721,164.31	(9,183.66)	2,711,980.65
Penambahan	16 KKKS	0	0	0
31 Des 2018	139 KKKS	2,721,164.31	(9,183.66)	2,711,980.65

7) Aset Harta Benda Inventaris

	Nilai Perolehan Audited 2017 (USD)	Mutasi Tambah/Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Des 2018 (USD)
KKKS Aktif	4,808,522.72	(9,666.84)	4,798,855.88
KKKS Tidak Aktif (Terminasi)	27,633.50	(8,947.98)	18,685.52
Jumlah	4,836,156.22	(18,614.81)	4,817,541.4

- a) Terdapat aset perolehan dibawah tahun 2011 yang tidak dilaporkan di neraca karena belum dilakukan inventarisasi dan penilaian pada KKKS aktif senilai USD54,884.06.
- b) Terdapat Koreksi Tambah pada KKS aktif dikarenakan pembenahan pencatatan SKK Migas senilai USD92.23.
- c) Terdapat penghapusan aset pada KKKS Aktif senilai USD62,274.87.

- d) Terdapat Koreksi Kurang pada KKS aktif dikarenakan pembenahan pencatatan SKK Migas senilai USD2,368.26.
- e) Terdapat reklasifikasi asset yang semula tercatat pada neraca KKKS Tidak Aktif Husky Oil North Sumbawa Ltd. senilai USD 921,96 yang telah laku dijual lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor RL-886/31/2017 16 Agustus 2017.
- f) Terdapat penghapusan aset pada KKKS tidak aktif Husky Oil North Sumbawa Ltd. senilai USD9,869.94 berdasarkan SK Penghapusan No. 1685 K/95/SJN/2018 tgl 20 Maret 2018
- 8) Perbedaan Line Item HBM antara LKBUN dengan SKK Migas yang harus ditindaklanjuti pada LKBUN tahun berikutnya.

DJKN mengeluarkan penyajian aset KKKS yang memiliki selisih unit sebanyak 1.929 unit dari 9 KKKS senilai Rp21.701.070.403.384 dari Neraca TA 2018 untuk ditindaklanjuti melalui rekonsiliasi unit dan nilai aset KKKS serta melakukan penelusuran lebih lanjut melalui inventarisasi aset KKKS

Perbedaan jumlah unit aset HBM antara LKBUN dengan SKK Migas yang harus ditindaklanjuti pada LKBUN Tahun berikutnya:

- a. Pembenahan pencatatan aset Contract of Work Aset CoW tercatat pada SKK Migas sebanyak 22.516 unit. Atas aset CoW dimaksud, sebanyak 10.345 telah tercatat pada neraca Aset lain-lain KKKS sedangkan sisanya sebanyak 12.171 unit selanjutnya diverifikasi lebih lanjut untuk dilakukan pencatatan pada Neraca Aset lain-lain KKKS.
- b. Selisih Aset KKKS sebanyak 1.929 Unit

Terdapat selisih unit sebanyak 1.929 unit dari 9 KKKS senilai Rp21.701.070.403.384,00 antara catatan UAKPA BUN TK BMN KKKS dan SKK Migas/KKKS. Selanjutnya telah dilakukan penelusuran terhadap perbedaan pencatatan unit aset dimaksud. Dari hasil penelusuran tersebut, diketahui bahwa sebagian besar perbedaan unit aset dikarenakan adanya pembenahan pencatatan oleh KKKS/SKK Migas terhadap item-item aset yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh DJKN.

Selanjutnya, DJKN mengeluarkan penyajian aset KKKS yang memiliki selisih unit sebanyak 1.929 unit dari 9 KKKS senilai Rp21.701.070.403.384 dari Neraca TA 2018 untuk ditindaklanjuti melalui rekonsiliasi unit dan nilai aset KKKS serta melakukan penelusuran di lapangan lebih lanjut melalui inventarisasi aset KKKS. Adapun rincian atas aset KKKS yang dikeluarkan dari Neraca sebagai berikut.

No	NAMA KKKS	KODE KKKS	PPBMD/DJEN			SKK Migas		Selisih Aset	
			Jumlah Unit	Nilai Aset (Rp)	Nilai Aset (USD)	Jumlah Aset	Nilai Aset (USD)	Unit	Rupiah
1	ConocoPhillips (Gross) Ltd	A12	2.256	1.903.362.339	17.347.493.179.831	2.241	1.903.362.339	14	399.287.229.999
2	Medco S&P	A13	5.919	4.586.881.309	38.399.400.460.309	5.798	4.586.881.309	139	1.846.223.420.421
3	HDRB, CEPU LTD.	A15							
4	ENI MUJARA BAKAU B.V.	A21	27	2.966.965.734	39.528.823.588.457	27	2.966.965.734	-	
5	PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA	A31	138.576	6.881.531.508	42.613.180.604.764	138.553	6.881.531.508	23	752.039.033
6	PT PHE-WIND	A81	1.485	1.364.007.885	14.675.129.737.394	1.472	1.364.007.885	13	1.302.441.232.314
7	BP TANGGUH LNG	A82	2.257	2.908.869.101	26.636.154.589.644	2.261	2.908.869.101	16	4.841.650.674.580
8	PERTAMINA	A84	9.511	3.689.833.247	22.085.076.584.647	9.510	3.689.833.247	1	2.216.731.050
9	Pertamina Hulu Mahakam	A85	12.223	9.136.038.527	58.324.696.849.093	10.733	9.136.038.527	1.488	13.014.416.365.457

	(RHS)								
10	Pertamina Hulu Sungai-Sungai (PHSS)	AdB	10.831	1.713.740.022	11.661.317.800.179	10.378	1.713.740.022	253	29.024.639.709
Total			188.443	38.488.949.285	312.978.531.935.773	186.514	38.488.949.285	1.929	21.701.070.403.384

7. Penyajian Nilai Net Equity pada LK Tahun 2018 Audited PT PLN dan PT Pertamina

Penyajian nilai investasi permanen dan Pendapatan-LO dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan didasarkan atas bagian pemerintah pada nilai *net equity* dan Laba Bagian Pemerintah yang disajikan oleh laporan keuangan masing-masing perusahaan/lembaga. LKPP Tahun 2018 *Audited* menyajikan Investasi Permanen PMN pada PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN (Persero)) dan PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp903,69 triliun dan Rp380,73 triliun. Nilai tersebut berbeda dengan nilai *Net Equity* pada LK Tahun 2018 *Audited* PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp926,87 triliun dan Rp399,65 triliun. Lebih lanjut, kenaikan Investasi Permanen PMN LKPP Tahun 2018 *Audited* tersebut diantaranya merupakan dampak laba bagian Pemerintah Tahun 2018 yang disajikan sebagai Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp(6,62) triliun dan Rp27,19 triliun. Nilai pendapatan tersebut berbeda dengan laba bagian Pemerintah pada LK Tahun 2018 *Audited* PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp11,56 triliun dan Rp35,99 triliun. Perbedaan-perbedaan tersebut karena PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) mengakui Piutang dan Pendapatan kompensasi yang belum ditetapkan Pemerintah atas selisih Tarif Tenaga Listrik pada PT PLN (Persero) dan selisih HJE BBM Non Subsidi pada PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp23,17 triliun dan Rp9,46 triliun yang merupakan nilai wajar piutang Pemerintah sebesar Rp15,53 triliun. Pemerintah belum mengakui utang atas selisih Tarif Tenaga Listrik dan HJE tersebut. LK Tahun 2018 PT PLN (Persero) telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sesuai Laporan Auditor Independen Nomor 00620/2.1030/AU.1/02/0499-3/11/2019 tanggal 18 Mei 2019. Sedangkan LK Tahun 2018 PT Pertamina (Persero) diperiksa oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja dengan opini Wajar Dengan Pengecualian terkait pengakuan piutang/pendapatan selisih HJE sesuai Laporan Auditor Independen Nomor 01241/2/1032/AU.1/02/0684-4/11/2019 tanggal 20 Mei 2019.

8. Pelaksanaan Program Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Tahun 2018

Sesuai amanat Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa BMN/D berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Guna melaksanakan pensertipikatan BMN berupa tanah, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pada tanggal 18 November 2009. Peraturan Bersama tersebut diantaranya mengatur bahwa sertifikasi BMN berupa tanah disertipikatkan dengan hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bersama tersebut dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Pengelola Barang bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga melaksanakan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah mulai tahun 2012.

Pokok kegiatan percepatan sertifikasi dilaksanakan dengan mengkoordinasikan K/L untuk melakukan:

- Penyusunan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2018 berdasarkan alokasi anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN tahun 2018.

- b. Mengkoordinasikan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2018 dengan satuan kerja dan Kantor Pertanahan setempat.

Capaian kinerja Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa tanah per 31 Desember 2018 sebagai berikut.

- 1. Hasil identifikasi dan pendataan bidang tanah pada aplikasi Sistem Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP) per 31 Desember 2018 sebanyak 92.206 bidang yang terdiri dari 44.055 bidang tanah belum bersertipikat dan 48.151 bidang tanah sudah bersertipikat. Dengan demikian, persentase bidang tanah yang belum bersertipikat per 31 Desember 2018 sebesar 47,78% dari jumlah bidang tanah yang telah diinput ke dalam aplikasi SIMANTAP.
- 2. Jumlah bidang tanah BMN yang berhasil disertipikatkan selama tahun 2018 sebanyak 4.915 bidang.

Dalam rangka kegiatan pensertipikatan BMN tahun 2019, Kementerian Keuangan telah menyusun usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2019 berdasarkan data tanah sebanyak 6.787 bidang dan menyampaikannya kepada Kementerian ATR/BPN agar dialokasikan anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN Tahun 2019.

9. Aset Bersejarah (Heritage Assets)

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat, berupa Gedung Merdeka berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 65, Kelurahan Braga, Bandung, Jawa Barat.
- b. Badan Pemeriksa Keuangan, aset tersebut berlokasi di Gedung Museum BPK, Magelang. Barang bersejarah tersebut saat ini masih tercatat di kantor BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta.
- c. Kementerian Perhubungan berupa 2 Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.
- d. Kementerian Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah.
- e. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
 - Arsip Tekstual/Kertas sebanyak 30.065 meter linier.
 - Poster sebanyak 336 lembar
 - Arsip Kartografi/Peta sebanyak 128.594 lembar.
 - Arsip foto sebanyak 3.460.868 lembar
 - Arsip Film sebanyak 59.002 reel.
 - Arsip Mikrofilm sebanyak 14.463 roll, Arsip *Microfische* sebanyak 14.262 *fische*.
 - Arsip Video sebanyak 25.347 kaset.
 - Arsip Rekaman Suara sebanyak 45.445 kaset dan arsip *reel to reelsound* sebanyak 946 reel.
 - Arsip *Optical Disc* sebanyak 16.152 keping.
 - Arsip Piringan Hitam sebanyak 101 keping.
 - Arsip *Flashdisk* sebanyak 1 keping.
 - Arsip elektronik sebanyak 350 *terabyte*.
- f. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit aset bersejarah yang terdiri dari Tugu Peringatan, Tugu Raffles, Makam Belanda (Santiong), dan Patung Kepala Sapi.
- g. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Survei Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.
- h. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 764.988 unit aset bersejarah yang dikelompokkan menjadi:
 - Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb); dan
 - Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya,

seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.

- i. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 9.942 eksemplar naskah kuno. Terdapat penambahan naskah kuno sejumlah 169 eksemplar pada tahun 2014.
- j. Kementerian Hukum dan HAM menguasai aset bersejarah sebanyak 13 unit.
- k. Kementerian Sosial RI menguasai aset bersejarah berupa Tugu Peringatan Lainnya sebanyak 3 unit, 2 unit Tugu Pembangunan, serta 1 Unit Makam Bersejarah.
- l. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.
- m. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
 - tugu peringatan sebanyak 14 unit;
 - bangunan bersejarah (Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Rumah Adat, Makam Bersejarah) sebanyak 4 unit;
 - monografi sebanyak 2 buah; dan
 - Laporan sebanyak 7 buah.

10. Badan Lainnya

Untuk dapat dikategorikan sebagai UBL, terdapat beberapa kriteria yaitu:

- a. Didirikan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Bukan merupakan Pengguna Anggaran;
- c. Bukan merupakan Perusahaan Negara;
- d. Menggunakan fasilitas dari Negara berupa Barang Milik Negara, dan/atau Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik;
- e. Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah; dan
- f. Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan UBL, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagai pedoman teknis pelaporan keuangan bagi UBL. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka mekanisme pelaporan UBL adalah sebagai berikut.

a. UBL Satker/ Bagian Satker

UBL Satker/Bagian Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. UBL Satker/Bagian Satker merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) atau bagian dari UAKPA pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi UBL dimaksud. Dalam hal UBL Satker/Bagian Satker mendapatkan dana di luar APBN, dana dimaksud diperlakukan sebagai pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pendapatan hibah, sepanjang memenuhi kriteria PNBP dan pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pengelolaan PNBP dan hibah. Dalam hal dana yang didapatkan dari non APBN oleh UBL Satker/Bagian Satker tidak dapat diperlakukan sebagai pendapatan PNBP atau hibah, dana tersebut dikelola dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan UBL berkenaan.

b. UBL Bukan Satker

UBL Bukan Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, termasuk dana pihak ketiga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing UBL. Dalam menyusun laporan keuangan, UBL Bukan Satker diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). UBL Bukan Satker dilaporkan di LKPP sebesar *net equity* (selisih aset dikurangi dengan kewajiban) sebagai aset lainnya.

Selanjutnya terhadap daftar UBL sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-637/PB/2018 tahun 2018 terdapat 77 Unit Badan Lainnya, dimana selain 72 Unit Badan Lainnya pada Laporan Keuangan Tahun 2017 *Audited*, terdapat penambahan 5 UBL yaitu:

1. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
2. Otoritas Nasional Senjata Kimia
3. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
4. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
5. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Perubahan Nomenklatur UBL yaitu:

1. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Selain 77 UBL sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-637/PB/2018 tahun 2018, terdapat SKK MIGAS dan OJK yang merupakan UBL Satker sekaligus UBL Bukan Satker.

Sehingga untuk Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited* ini terdapat 79 UBL, yang secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut.

1. UBL Satker/ Bagian Satker sebanyak 67 UBL.
2. UBL Bukan Satker sebanyak 10 UBL.
3. UBL Satker sekaligus sebagai UBL Bukan Satker sebanyak 2 UBL.

Terdapat Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN yaitu:

1. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)

Sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01/I/041/2013 tanggal 7 Januari 2013 hal Hasil Inventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan terdapat tiga UBL dan untuk Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) dinyatakan belum aktif.

2. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda

Sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor KU.05.08-SK/128 tanggal 28 Februari 2014, sampai saat ini Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda tersebut telah dibentuk namun belum aktif dan tidak mendapatkan alokasi dana APBN.

3. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

Sesuai dengan surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan nomor S-03/D.I.M.EKON/01/2017 tanggal 30 Januari 2019 bahwa pada tahun 2018 tidak ada usulan PTP maupun tambahan PTP sehingga belum ada kegiatan Rapat koordinasi Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (persero) ataupun alokasi Dana.

4. Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)

Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dalam pasal 20 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Berdasarkan PMA Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat pada Pasal 3 dinyatakan bahwa pengelolaan DAU dilakukan oleh BPKH.

Dalam rangka likuidasi telah disusun Laporan Keuangan Penutup BPDAU per 30 Juni 2017 dan telah diaudit oleh BPK RI dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 37.A/LHP/XVIII/12/2017 tanggal 21 Desember 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, maka BPDAU telah dilikuidasi dan seluruh asetnya telah diserahkan kepada BPKH.

5. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)

6. Sesuai dengan PERPRES 124 tahun 2016 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dihentikan masa tugasnya dan kebijakan, rencana strategis nasional, dan langkah-langkah strategis, penyebarluasan informasi, kerja sama regional nasional, serta pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

7. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)

Pada tahun 2018 Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) tidak mendapatkan alokasi Dana.

8. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur

Pada tahun 2018 Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur tidak mendapatkan alokasi Dana.

9. Otorita Asahan

Sesuai dengan PERPRES 73 TAHUN 2018 Otorita Asahan telah dibubarkan dan proses Likuidasinya dilakukan sampai dengan bulan Juni tahun 2019

10. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan

Pada tahun 2018 Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan belum mendapatkan alokasi Dana

11. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Pada tahun 2018 Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia belum mendapatkan alokasi Dana.

Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker diatas disajikan dalam **Lampiran 27**.

11. Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok

Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) merupakan Aset yang dikuasai Negara adalah aset bekas yang bersumber dari:

- a. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
- b. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
- c. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan perkumpulan-perkumpulan tersebut dalam pemberontakan G.30.S/PKI, yang

ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66; dan

- d. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang memiliki status kewarganegaraan bukan negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Penyelesaian ABMA/T diatur dalam PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Sesuai dengan PMK Nomor 188/PMK.06/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK-154/PMK.06/2011, penyelesaian ABMA/T dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut.

- a. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;
- b. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;
- c. Dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
- d. Dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
- e. Dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Tionghok.

Capaian Kinerja Penyelesaian ABMA/T Sampai Dengan Tahun 2018

1. Atas peran Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi Daerah ABMA/T, pada Tahun 2018 sebanyak 62 aset telah diselesaikan status hukum secara tuntas dan 7 aset diselesaikan sebagian status hukumnya.
2. Sampai dengan akhir Tahun 2018, dari total ABMA/T sebanyak 1.010 dalam Lampiran PMK Nomor 31/PMK.06/2015 dan 5 aset Temuan Baru, sebanyak 470 aset telah diselesaikan status hukumnya dengan tuntas, sehingga masih terdapat 545 aset yang belum diselesaikan dengan tuntas yang terdiri dari 55 aset belum diselesaikan sebagian status hukumnya dan 490 aset belum diselesaikan status hukum seluruhnya.
3. Sejak awal pengelolaan ABMA/T sampai dengan akhir Tahun 2018, terdapat 21 Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian ABMA/T dengan cara dilepaskan kepada Pihak Ketiga dengan pembayaran kompensasi.
4. ABMA/T yang telah diketahui nilainya dan ditetapkan besaran kompensasinya berdasarkan Surat Menteri Keuangan selanjutnya diproses tindak lanjut dengan prosedur pelepasan ABMA/T dengan tahapan meliputi pemberitahuan/pengalihan kompensasi, konfirmasi/klarifikasi penerimaan Negara (bila ada), dan proses penerbitan penetapan keputusan pelepasan ABMA/T (bila memenuhi syarat). Adapun ABMA/T dengan penetapan besaran kompensasi yang masih berlaku (aktif) dan dalam proses tindak lanjut penyelesaian/pelepasan yang dilakukan oleh Direktorat PKNSI sampai dengan akhir Tahun 2018.

12. Aset Properti Eks BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, aset properti adalah aset tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan utang atas kredit di bank. Oleh karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran utang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan utang berupa *fixed asset* dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran utang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap

berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direkto
Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain Pemerintah belum menyajikan aset properti eks BPPN sejumlah 843 (delapan ratus empat puluh tiga) aset dengan nilai sebesar Rp1.070.152.309.824. Terhadap permasalahan ini, Ditjen Kekayaan Negara telah melakukan penelusuran terhadap selisih data tersebut dan menyampaikan hasil penelusuran kepada Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 9 September 2013. Setelah dilakukan verifikasi oleh BPK, maka sisa aset properti eks BPPN yang masih harus ditelusuri per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut.

Daftar Hasil Penelusuran Aset Properti Eks BPPN

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Aset Properti Eks BPPN yang perlu ditelusuri	843	1.070.152.309.824
Hasil Penelusuran TA 2013:		
Terjual di BPPN dan PPA	7	36.496.849.932
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	16	13.376.203.837
Sita Kejaksaaan dan Indikasi Sita	145	482.990.603.127
Aset jaminan BDL dan PKPS	26	35.552.445.176
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	23	101.446.523.368
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)*	626	400.289.684.384

** Terdapat selisih pembulatan sebesar Rp1*

Untuk menindaklanjuti sisa selisih penelusuran data aset properti eks BPPN dalam L-P BPK per 31 Desember 2013, pada tahun 2014, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI telah melakukan upaya sebagai berikut.

1. Menyampaikan surat kepada PT PPA (Persero) dengan nomor S-1509/KN.5/2014 tanggal 30 Juni 2014 terkait aset properti yang terjual selama periode pengelolaan oleh PT PPA (Persero).
2. Menyampaikan surat kepada Notaris/PPAT dengan nomor S-1501 s.d. S-1504/KN.5/2014 tanggal 30 Juni 2014 terkait penjualan aset properti yang dilakukan oleh BPPN.
3. Menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahan Setempat dengan surat nomor S-1799 s.d. S-1927/KN.5/2014 tanggal 25 Juli 2014 terkait permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada pemegang hak atas tanah.
4. Menyampaikan surat kepada KPKNL dengan nomor S-2063/KN.5/2014 tanggal 28 Agustus 2014 guna meminta bantuan untuk melakukan peninjauan fisik atas aset-aset properti.

menjadi tersisa 358 unit senilai Rp122.069.231.522 pada akhir tahun 2014. Sampai dengan tahun 2018 belum sehingga saldo Aset B.310.

Uraian	Hasil Penelusuran DJKN	
	Unit	Nilai (Rp)
	358	122.069.231.521
Terjual di BPPN dan PPA	23	7.179.057.006
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	1	-
Sita Kejaksaaan dan Indikasi Sita		133.203.182
Aset jaminan BDL dan PKPS	1	-

Penetapan Status Penggunaan		
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2018)	253	75.706.848.310

Terdapat aset HTBI sejumlah 67 unit yang belum dapat dicatat dalam neraca karena belum memiliki kelengkapan dokumen.

13. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabel pengelolaan kewajiban penjaminan pada DJPPR dapat diinformasikan sebagai berikut :

Kewajiban Penjaminan

Menurut Undang-Undang nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 9/PMK.02/2017 tentang Perubahan PMK nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Bendahara Umum Negara, diatur bahwa Anggaran kewajiban penjaminan merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BA BUN 999.03.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 836/KMK.08/2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah Tahun Anggaran 2018, Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang meliputi penjaminan : percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara (Program 10.000 MW tahap I (FTP-1)), percepatan Penyediaan Air Minum, proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera dan pengelolaan dana cadangan kewajiban penjaminan dalam rangka pelaksanaan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah. Sedangkan terkait anggaran kewajiban penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko nomor KEP-59/PR/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, selain itu Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara juga ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha

Milik Negara berdasarkan PMK nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Amanat pengaturan pemberian jaminan

Sesuai Perpres Nomor 91/2007, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara.

Kemudian melalui Perpres Nomor 29/2009, Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% atas pembayarar kembali pokok kredit investasi PDAM kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70% jaminan Pemerintah tersebut selanjutnya akan dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40% yang akan diperhitungkan sebagai pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada PDAM sedangkan 30% sebagai beban Pemerintah Daerah yang akan diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah, pinjaman Pemerintah Daerah dan/atau hibah Pemerintah Daerah kepada PDAM.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 78/2010 dan Nomor 38/2015 pasal 17 juga memberikan jaminan terhadap proyek kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), dan sebagaimana Perpres Nomor 78/2010 pasal 4: penjaminan infrastruktur diberikan atas risiko infrastruktur yang (a) lebih mampu dikendalikan, dikelola atau dicegah terjadinya, atau diserap oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) daripada Badan Usaha, (b) bersumber (*risk factor*) dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, dan/atau (c) bersumber (*risk factor*) dari Pemerintah selain Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.

Kemudian melalui Perpres Nomor 100/2014 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 117/2015, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 82/2015 memberikan jaminan penuh terhadap kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) yang menyediakan pendanaan kredit jangka panjang setara pinjaman Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.

Karakteristik Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada kreditor atau badan usaha baru akan timbul jika pihak yang dijamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK/Badan Usaha, PT Hutama Karya (Persero)) tidak mampu memenuhi kewajibannya (mengalami default). Akibatnya, kewajiban ini memiliki unsur ketidakpastian mengenai timbul/tidak timbulnya di masa depan, termasuk mengenai jumlahnya yang tidak dapat diukur secara pasti.

Estimasi dari Dampak Finansial yang Diukur

Estimasi besaran alokasi anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN TA 2018 diperhitungkan atas jumlah eksposur penjaminan pihak terjamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK/Badan Usaha, PT Hutama Karya (Persero)) yang dijamin kepada kreditor/badan usaha, serta probabilitas gagal bayar (*probability of default*) dari eksposur penjaminan tersebut.

Sampai dengan semester II tahun 2018 jumlah akumulasi pemberian penjaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur adalah sebagai berikut.

- a. Penerbitan 36 Surat Jaminan Pemerintah untuk Proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara (Program 10.000 MW tahap I (FTP-I) termasuk pembangkit dan transmisi), dengan nilai

penjaminan sebesar IDR40,89 triliun dan USD3,96 miliar. PT. PLN (Persero) telah melunasi beberapa pinjaman pada PLTU Indramayu (porsi IDR), PLTU Rembang (porsi IDR), PLTU Labuan (porsi IDR dan ekuivalen USD), PLTU Suralaya (porsi IDR), PLTU Paiton (porsi IDR), PLTU Pelabuhan Ratu (porsi IDR), PLTU Lampung dan Sumut (porsi IDR) dan pinjaman untuk 7 PLTU luar Jawa (Porsi IDR);

- b. Penerbitan 11 Surat Jaminan Pemerintah untuk Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum terkait 11 PDAM (Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Lombok Timur, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Kota Denpasar, Giri Menang, Tirta Satria Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kota Palopo, dan Kabupater Buleleng), dengan nilai penjaminan sebesar IDR328,16 miliar. PDAM Kabupaten Buleleng telah mengundurkan diri dari program penjaminan proyek percepatan penyediaan air minum, dan PDAM Kabupaten Lombok Timur telah melunasi keseluruhan pinjaman kredit yang telah ditarik;
- c. Penerbitan 7 Perjanjian Penjaminan untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) terkait proyek Central Java Power Plant dengan nilai penjaminan sebesar USD3,20 miliar, Proyek Jalan Tol Ruas Jakarta-Cikampek II Elevated dengan nilai penjaminan sebesar IDR14,77 triliun, Proyek Jalan Tol Krian-Legundi Bunder dengan nilai penjaminan sebesar IDR9,02 triliun, Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan dengan nilai penjaminan sebesar IDR5,76 triliun, Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang dengan nilai penjaminan sebesar IDR5,33 triliun, Proyek Jalan To Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan dengan nilai penjaminan sebesar IDR12,56 triliun, dan Proyek Jalan To Probolinggo-Banyuwangi dengan nilai penjaminan sebesar IDR21,1 triliun;
- d. Penerbitan 9 Surat Jaminan untuk Proyek Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera, terdiri dari 6 Surat Jaminan untuk pinjaman PT Hutama Karya (Persero) untuk pembangunan jalan tol ruas Medan-Binjai senilai IDR481 miliar, ruas Palembang-Indralaya senilai IDR1,24 triliun, ruas Bakauheni-Terbangi Besar senilai IDR15,59 triliun, ruas Pekanbaru-Dumai IDR12,26 triliun dan IDR4,5 triliun serta ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang-Kayu Agung senilai IDR14,37 triliun sedangkan 3 Surat Jaminan untuk obligasi PT Hutama Karya (Persero) untuk pembangunan jalan tol di Sumatera yaitu Obligasi I senilai IDR1 triliun, Obligasi II senilai IDR1,97 triliun dan Obligasi IV senilai IDR3,53 triliun.
- e. Penerbitan 5 Perjanjian Penjaminan untuk proyek-proyek infrastruktur yang didanai melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada PT PLN (Persero) senilai USD2,28 miliar dengan rincian sebagai berikut.
 - i. Pinjaman Langsung dari Asian Development Bank kepada PT PLN (Persero) dalam mendana Pengembangan/Penguatan Jaringan Kelistrikan di Sumatera (Rekonduktoring dan Penguatan Jaringan Distribusi) senilai USD600 juta atau setara dengan Rp8,04 triliun dengan skema *result based loan*.
 - ii. Pinjaman Langsung dari World Bank kepada PT PLN (Persero) dalam mendanai Pengembangan Jaringan Distribusi di Sumatera senilai USD500 juta atau setara dengan Rp6,7 triliun dengan skema *Program for Result (PforR)*.
 - iii. Pinjaman Langsung dari Islamic Development Bank kepada PT PLN (Persero) dalam mendanai *Power Grid Enhancement Project* (Penguatan Jaringan Kelistrikan Berupa Pengadaan dan Pemasangan Trafo Tegangan Tinggi dan Menengah di Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan Barat dan Sulawesi) senilai USD330 juta atau setara dengan Rp4,42 triliun dengan skema *Intallment Sale Agreement*.
 - iv. Pinjaman Langsung dari Asian Development Bank keada PT PLN (Persero) dalam mendanai Pengembang Jaringan Distribusi di Indonesia Timur (Sulawesi dan Nusa Tenggara) senilai USD600 juta atau setara dengan Rp8,04 triliun dengan skema *result based loan*.

- v. Pinjaman Langsung dari Asian Investment Infrastructure Bank kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC dalam mendanai proyek pembangunan Fasilitas Infrastruktur Kawasan Ekonomi Eksklusif di Mandalika, Lombok senilai USD248.6 juta tau setara dengan Rp3.3 triliun
- f. Penerbitan 1 Surat Jaminan untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas pinjaman kredit sebesar Rp19,25 triliun dalam rangka Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta Bogor Depok dan Bekasi.
- g. Penerbitan 1 Surat Jaminan untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam Rangka Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah dengan nilai jaminan sebesar Rp4,35 triliun. Dalam rangka memberikan stimulus terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, Pemerintah telah memberikan penugasan kepada PT SMI (Persero) melalui penyediaan fasilitas pembiayaan untuk tujuan penyediaan prasarana dan/atau sarana untuk pelayanan publik. Dengan adanya penugasan dimaksud, diharapkan adanya kemudahan akses pembiayaan daerah sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk mendukung penugasan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan jaminan bahwa penugasan tersebut tidak akan memberikan pengaruh negatif kepada kualitas aset PT SMI (Persero) dengan adanya kepastian pemenuhan kewajiban Pemda kepada PT SMI (Persero). Jaminan dari Menteri Keuangan kepada PT SMI (Persero) diberikan untuk memastikan kepada PT SMI (Persero) bahwa Pemda dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati di dalam perjanjian pinjaman melalui *security mechanism* yaitu mekanisme penggunaan dana talangan dan pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH (*intercept*). Jaminan yang bersifat garansi tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas aset PT SMI (Persero) sehingga PT SMI (Persero) dapat melaksanakan fungsi *leveraging* aset. Mekanisme *intercept* akan dilakukan sebagai bentuk penggantian atas penggunaan dan jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah.
- h. Penerbitan 12 Surat Jaminan Kelayakan Usaha atas skema jual beli tenaga listrik 12 pembangkit listrik swasta (*Independent Power Producer/IPP*) kepada PT PLN (Persero) dalam proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas (Proyek 10.000 MW tahap II) sebesar USD11,9 miliar. 1 surat jaminan pada PLTU Kaltim senilai USD314,5 juta telah berakhir. Jaminan kelayakan usaha tersebut dilaksanakan dalam bentuk garansi, dan Pemerintah menjamin kelayakan usaha PT PLN (Persero) dalam membayar kewajibannya sesuai Perjanjian Jual Beli Listrik dengan IPP antara lain menggunakan skema subsidi listrik.

Alokasi Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dalam APBNTA 2018 diperhitungkan sebagai berikut:

Program Penjaminan	Exposure	x Probability	x (100% - Recovery)	= Expected Default Rate	Loss
Proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara	Rp37,65 triliun	x 0,79%	x (100% - 0%)		= Rp297,42 miliar
Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum	Rp127,53 miliar	x 0,84%	x (100% - 0%)		= Rp1,07 miliar
Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPi)	Rp22,18 triliun	x 1,21%	x (100% - 0%)		= Rp389,46 miliar
Proyek Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera	Rp18,49 triliun	x 1,54%	x (100% - 0%)		= Rp284,75 miliar
Proyek infrastruktur yang didanai melalui Pinjaman Langsung dari LKJ kepada BUMN	Rp7,43 triliun	x 2%	x (100% - 0%)		= Rp148,61 miliar
Total					Rp1.121,31 miliar

Sebagai tambahan informasi bahwa pemberian surat jaminan baru yang diterbitkan pada tahun 2018 tidak menjadi bagian dari alokasi anggaran penjaminan dalam APBN TA 2018, karena proyek yang mendapat jaminan baru tersebut belum menimbulkan beban exposure risiko bagi Pemerintah.

Indikasi Tentang Ketidakpastian Yang Terkait Dengan Jumlah Atau Waktu Arus Keluar Sumber Daya

Kewajiban Pemerintah kepada kreditur dan/atau Badan Usaha baru akan timbul jika pihak terjamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK, dan PT Utama Karya (Persero)) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/Badan Usaha (gagal bayar). Terjadinya gagal bayar dimaksud sangat tergantung dengan kondisi keuangan pihak terjamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK, dan PT Utama Karya (Persero)). Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat ketidakpastian mengenai kapan dan berapa kewajiban Pemerintah yang harus dibayarkan. Untuk memperkirakan terjadinya gagal bayar, Pemerintah telah melakukan pemantauan secara berkala pada proyek

infrastruktur yang telah diberikan penjaminan yaitu melalui pemantauan atas kondisi kesehatan keuangan dan pihak terjamin dan pemantauan atas penyelesaian konstruksi proyek-proyek sesuai jadwal serta mempercepat operasionalisasi proyek yang berdampak meningkatkan pendapatan bagi pihak terjamin.

Kemungkinan Penezerantian Oleh Pihak Ketiga

Anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada kreditur/badan usaha akan diperhitungkan sebagai berikut.

- a. Sesuai dengan PMK Nomor 44/PMK.01/2008 Tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, apabila PT. PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur PT. PLN (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).
- b. Berdasarkan PMK Nomor 229/PMK.01/2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 91/PMK.011/2011 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 229/PMK.01/2009, Pemerintah Pusat menanggung sebesar 70% dari pokok kredit investasi PDAM yang jatuh tempo dalam hal PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya (*payment default*). Dari 70% jaminan tersebut selanjutnya dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40% yang akan dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30% akan dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Apabila Pemerintah Daerah tidak membayar pinjaman kepada Pemerintah Pusat, maka akan dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).
- c. Berdasarkan PMK Nomor 8/PMK.08/2016 Tentang Perubahan PMK Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban finansial PJPK. Kewajiban finansial PJPK adalah kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PJPK kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPK (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 25). Penjaminan untuk proyek ini dilakukan bersama antara Pemerintah dengan PT PII secara *risk sharing* (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 3, atau *amount sharing* (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 37 ayat (4)).
- d. Berdasarkan PMK Nomor 253/PMK.08/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dan PMK Nomor 168/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, apabila PT Hutama Karya (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/pemegang obligasi, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur/pemegang obligasi PT Hutama Karya (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero).
- e. Berdasarkan PMK Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada pihak terjamin akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Kewajiban Penjaminan

Sampai dengan akhir semester II tahun 2018, tidak terdapat gagal bayar (*default*) pihak terjamin (PT PLN, PDAM PT Hutama Karya maupun PJPK) yang mendapat jaminan Pemerintah, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha.

- a. Penjaminan Proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara sebesar

Rp297.423.000.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh tiga juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batubara adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban PT. PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang membiayai program percepatan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara, dalam hal PT. PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya (*payment default*). Pengeluaran tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah kepada PT. PLN (Persero). Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batubara sampai dengan akhir semester II tahun 2018 adalah NIHIL, mengingat PT. PLN (Persero) dapat memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur sehingga tidak ada kewajiban Pemerintah kepada kreditur.

- b. Penjaminan Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum sebesar Rp1.071.000.000 (satu miliar tujuh puluh satu juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan Percepatan Penyediaan Air Minum adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar 70% pokok kredit investasi PDAM yang jatuh tempo kepada kreditur perbankan yang membiayai program percepatan penyediaan air minum, dalam hal PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya (*payment default*). Atas pengeluaran dimaksud, sebesar 40% dari kewajiban PDAM yang gagal bayar dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30% dari kewajiban PDAM yang gagal bayar dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal pemotongan DAU/DBH tidak dapat dilaksanakan. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan Percepatan Penyediaan Air Minum sampai dengan akhir semester II tahun 2018 adalah NIHIL, mengingat PDAM dapat memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur sehingga tidak ada kewajiban Pemerintah kepada kreditur.
- c. Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) sebesar Rp389.460.000.000 (tiga ratus delapan puluh Sembilan miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban PJKP kepada badan usaha. Pengeluaran tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah kepada PJKP. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sampai dengan akhir semester II tahun 2018 adalah NIHIL, mengingat Badan Usaha sampai dengan akhir semester II tahun 2018 masih dalam tahap konstruksi dan belum ada risiko penjaminan yang timbul, maka sampai dengan akhir semester II tahun 2018 belum ada kewajiban Pemerintah kepada badan usaha.
- d. Penjaminan Proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera sebesar Rp284.748.000.000 (dua ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban PT Utama Karya (Persero) kepada kreditur/pemegang obligasi yang membiayai program percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, dalam hal PT Utama Karya (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya (*payment default*). Pengeluaran tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah kepada PT Utama Karya (Persero). Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera sampai dengan akhir semester II tahun 2018 adalah NIHIL, mengingat PT Utama Karya (Persero) dapat memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur/pemegang obligasi sehingga tidak ada kewajiban Pemerintah kepada kreditur/pemegang obligasi.
- e. Penjaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp148.613.000.000 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban PT. PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang membiayai program penyediaan infrastruktur kelistrikan, dalam hal PT. PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya (*payment default*). Pengeluaran tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah kepada

PT. PLN (Persero). Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara sampai dengan akhir semester II tahun 2018 adalah NIHIL, mengingat PT. PLN (Persero) dapat memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur sehingga tidak ada kewajiban Pemerintah kepada kreditur.

Selanjutnya, berdasarkan amanat Pasal 34 ayat (3) UU nomor 15 tahun 2017 tentang APBN TA 2018 dan Pasal 9 PMK nomor 257/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, bahwa dalam hal terdapat anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang telah dialokasikan tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah dan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang. Oleh karena itu, alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan tahun 2018 telah dipindahbukukan ke rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah sebesar Rp1.121,31 miliar yang berasal dari program penjaminan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek KPBU yang dilakukan melalui BUPL, proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, dan Program Penjaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara. Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah hingga terjadinya pemindahbukuan alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada akhir 2018 adalah sebesar 4.245,49 miliar.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Dalam upaya mewujudkan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan perlindungan sosial dan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup (kesehatan) yang layak bagi setiap peserta (masyarakat), Pemerintah RI memiliki kewajiban untuk menjaga kesinambungan/keberlangsungan program DJS Kesehatan. Laporan Keuangan DJS Kesehatan Tahun 2018 (*Audited*) menyajikan nilai defisit aset (aset netto negatif) sebesar Rp34.712.814.128.213 diantaranya menyajikan Utang Jaminan Kesehatan sebesar Rp10.625.232.952.215 dan Cadangan Teknis-Liabilitas Jaminan Kesehatan dalam proses sebesar Rp4.418.919.083.946. Utang Jaminan Kesehatan timbul dari klaim pelayanan kesehatan yang diajukan oleh fasilitas kesehatan dan telah ditetapkan nilai gantinya namun belum dilakukan pembayaran. Cadangan Teknis-Liabilitas Jaminan Kesehatan dalam proses berupa klaim dari fasilitas kesehatan yang telah dilaporkan kepada BPJS Kesehatan namun masih dalam proses verifikasi oleh BPJS Kesehatan.

14. Pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau Abandonment & Site Restoration (ASR) KKKS

ASR adalah kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas.

Dana ASR adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh KKKS ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS. Pencadangan dana ASR setiap tahunnya ditentukan berdasarkan estimasi biaya ASR yang terakhir dibagi dengan jangka waktu pengumpulan dana ASR.

Penyetoran dana ASR dilaksanakan oleh KKKS setiap semester dalam mata uang dolar Amerika Serikat ke Rekening Bersama selama jangka waktu pengumpulan.

Sejak Desember 2008 telah ditandatangani dokumen Perjanjian Rekening Bersama antara SKK Migas dan KKKS dengan Bank Pengelola Dana (Bank Mandiri, BNI dan BRI) untuk 60 (enam puluh) Wilayah Kerja dengan 69 (enam puluh sembilan) Perjanjian Rekening Bersama. Total rekening ASR pada bank-bank tersebut sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) rekening dimana Wilayah Kerja Berau, Muturi, Wiriagar dan Cepu memiliki rekening ASR di Bank Mandiri dan BNI, dan Wilayah Kerja Rokan memiliki 2 (dua) rekening masing-masing di Bank Mandiri dan BRI.

Disajikan dalam dolar Amerika Serikat

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo Bank & Deposito <i>Abandonment & Site Restoration</i>	1,256,703,350.41	1,110,716,611.47
Jasa Giro & Bunga Deposito <i>Abandonment & Site Restoration</i>	(36,403,800.17)	(26,189,996.51)
Saldo Bank & Deposito <i>Abandonment & Site Restoration</i> – Neto	1,220,299,550.24	1,084,526,614.96
Tagihan <i>Abandonment & Site Restoration</i> Yang Belum Dibayarkan	25,314,096.77	14,995,680.95
Kewajiban <i>Abandonment & Site Restoration</i>	1,245,613,647.01	1,099,522,295.91

Penerimaan pencadangan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2018 sebesar USD136,277,819.28. Saldo dana ASR pada rekening bersama SKK Migas-KKKS per 31 Desember 2018 sebesar USD1,256,703,350.41. Nilai tersebut terdiri dari saldo penerimaan pembayaran dari KKKS sebesar USD1,220,299,550.24 dan akumulasi penghasilan jasa giro dan bunga deposito (setelah pajak) sebesar USD36,403,800.17. Per 31 Desember 2018 terdapat nilai tagihan ASR yang belum dibayarkan sebesar USD25,314,096.77. Dengan demikian, nilai ASR yang merupakan kewajiban atas kegiatan ASR per 31 Desember 2018 sebesar USD1,245,613,647.01.

15. Pemanfaatan BMN eks Pertamina

a) Pemanfaatan BMN oleh Pertamina C.Q PT Pertamina EP

Melalui surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No: 1105/C00000/2008-SO tanggal 15 Agustus 2008 hal Usulan Penyelesaian Isu-Isu Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero) Tindak Lanjut Rapat Bali 28 dan 29 Juli 2008, dalam rangka koreksi Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) untuk membebaskan biaya atas penggunaan BMN eks KKS Pertamina senilai Rp16,2 triliun oleh PT Pertamina EP, telah disampaikan usulan sewa dengan pola *“fixed payment and fixed term”*, dengan klausul antara lain bahwa beban sewa dan pemeliharaan (*operating and maintenance*) menjadi unsur *cost recovery*.

Selanjutnya dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, disampaikan persetujuan atas usulan sewa pemanfaatan aset eks KKS Pertamina Rp16,2 triliun.

Mengacu kesepakatan antara DJKN dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 23 Januari 2009 bahwa objek sewa adalah atas aset berupa Bangunan, Fasilitas Produksi, Harta Benda Modal Bergerak, dan Aset Lainnya dengan nilai total Rp9,472 triliun, PT Pertamina (Persero) melakukan pembebanan sewa aset yang dibukukan sebagai Hutang Kepada Pemerintah di dalam Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2003.

Dari total tagihan Piutang Sewa BMN per tanggal 30 September 2014 sebesar Rp3.182.271.417.855, PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyetoran Piutang Sewa ke Rekening Kas Umum Negara pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.227.577.829.637.

Selanjutnya, Kepala SKKMIGAS telah mengirimkan surat Nomor: SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa *equipment*, bangunan dan aset lainnya senilai Rp6.630.929.353.338, dengan biaya sewa sampai dengan Juni 2014 adalah sebesar Rp2.227.577.829.636,98.

b) Tindakan lanjut Temuan BPK Terkait Aset Eks Pertamina

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu “Penyajian Saldo Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina Tidak Berdasarkan Perjanjian Sewa dan Nilai Pemanfaatan Aset yang Digunakan oleh PT Pertamina EP Belum Selesai Diverifikasi” dengan rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut.

1) Menyelesaikan proses identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset sebesar Rp2.841.878.588.184 dan menetapkan persetujuan pemanfaatan atas aset yang dimanfaatkan baik oleh PT Pertamina EP maupun pihak lainnya sebagai dasar untuk melakukan pengalihan atas pemanfaatan aset dan pencatatan jumlah piutang; dan

2) membuat perjanjian sewa pemanfaatan aset eks Pertamina dengan PT Pertamina EP berdasarkan hasil verifikasi atas penggunaan aset.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, DJKN telah menyusun rencana tindak lanjut sebagai berikut.

- 1) Sedang dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP
- 2) Telah ditetapkan perjanjian sewa BMN antara Kementerian Keuangan dengan PT. Pertamina EP nomor : PRJ-3/MK.6/2016 1307/EP0000/2016-SO.

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2017, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Terdapat pemanfaatan Aset Eks Pertamina oleh pihak ketiga yang belum dikenakan biaya sewa" dengan rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut.

- 1) Menyelesaikan proses identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset eks Pertamina sesuai LHP SPI LKBUN Tahun 2015 Nomor 54B/LHP/XV/05/2016 tanggal 25 Mei 2016;

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan Tahun 2018 adalah:

- a) Telah dilakukan pemetaan aset di Bunyu, Tarakan, Indramayu, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Rantau, Pangkalan Susu, Jambi, Lirik, Pendopo, Limau, Adera, Prabumulih.
- b) Secara prosentase telah selesai dilakukan pemetaan atas 40,15% (5.307 dari 13.218 item), atau mencapai 66,57% jika dihitung dari nilai aset.
- c) Telah dilakukan harmonisasi pemetaan aset eks Pertamina bersama dengan Dit. PNKNL pada lokasi aset field Jambi, dan Sangasanga.
- d) Telah dilakukan harmonisasi pemetaan aset eks Pertamina bersama dengan LMAN pada lokasi aset field Rantau, dan Sangasanga.

- 2) Menetapkan persetujuan pemanfaatan atas aset yang dimanfaatkan oleh PT Pertamina EP dan pihak lainnya sebagai dasar untuk melakukan penagihan atas pemanfaatan aset dan jumlah piutang.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan Tahun 2018 adalah:

- a) Telah ditandatangani perjanjian sewa nomor PRJ-2/MK.6/2018 tanggal 28 des 2018 antara DJKN dengan Pertamina EP.
- b) Telah diajukan permohonan sewa dari pihak ketiga selain PT Pertamina EP sesuai surat Direktu Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) No. 157/100000/2018-SO tanggal 16 Agustus 2018 ha. Permohonan Pemanfaatan BMN di Wilayah Kerja PT Pertamina EP.
- c) Piutang sewa BMN eks Pertamina yang dipergunakan oleh PT Pertamina cq PT Pertamina EF sebesar Rp1.176.715.352.919 masih berbeda dengan pencatatan dari PT Pertamina. Pemerintah akan melakukan koreksi atas nilai piutang tersebut setelah proses pemetaan aset selesai dan dilakukan addendum perjanjian sewa.

Sesuai hasil pemeriksaan BPK atas LKTK tahun 2018 terkait BMN eks Pertamina, yaitu Atas Aset yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan Nilainya, akan dilakukan upaya penyelesaian atas BMN tersebut dengan penelusuran dan menetapkan status sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 324/KMK.06/2017 j.o 471/KMK.06/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak dan Gas Bumi. Adapun hasil IF atas seluruh aset Rp16.242.092.564.001,00 telah selesai dilakukan oleh 13 Kanwil DJKN, dgn hasil sebaga berikut.

- Hasil IP (BA-01) : Rp13.692.173.347.220

c) Kebijakan Akuntansi Atas Pengelolaan Aset Eks Pertamina Oleh LMAN

Pada periode pelaporan 2016, Aset eks Pertamina yang diserahkan kepada LMAN masih dicatat oleh UAKPA BUN BA 999.99 pada Direktorat KND. Dengan adanya kebijakan Direktur APK sesuai surat Nomor S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN, maka pencatatan atas aset BUN kelolaan LMAN berikut segala hak dan kewajiban yang melekat pada aset tersebut tidak lagi dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BUN BA 999.99 Transaksi Khusus periode pelaporan 2017. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan 2017 atas pos-pos yang terkait pengelolaan Aset eks Pertamina kelolaan LMAN yang telah diserahkan sebelum periode pelaporan sebagai berikut.

Pos	Nilai (Rp)
Aset	
Piutang PNB	4.282.164.770
Liabilitas	
Pendapatan Diterima Di Muka	(164.088.839.505)

Adapun Transfer keluar pada Laporan Keuangan 2017 yang diakibatkan adanya transaksi penyerahan berdasarkan kebijakan Direktur APK tersebut adalah sebagai berikut.

Pos	Nilai (Rp)
Serah kelola ke LMAN - 2016	
Aset Lainnya	28.356.189.388.923
Akumulasi Penyusutan – Aset Lainnya	(8.130.193.127.487)
Serah kelola ke LMAN - 2017	
Aset Lainnya	5.469.536.000
Akumulasi Penyusutan – Aset Lainnya	(110.929.500)

16. PTNB

Laporan keuangan Universitas Indonesia merupakan laporan keuangan PTNBH yang dikonsolidasi netonya sebagai investasi permanen lainnya pada Laporan Keuangan Investasi Pemerintah BA BUN 999.03 (LKIP).

Sesuai dengan Surat Rektor UI Nomor 683/UN2.R/KEU.3.1/2018 tanggal 19 April 2018 hal pencatatan aset tetap UI yang berasal dari pemerintah pada laporan keuangan UI disampaikan bahwa dalam Laporan Keuangan PTNBH UI tahun 2017 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dicatat aset-aset hibah pemerintah yang belum ada Berita Acara Serah Terima (BAST). Hal ini dilakukan sesuai dengan PSAK 16 Aset Tetap yang pada intinya Aset Tetap sudah dapat diakui dan dicatat sebagai aset tetap karena aset aset tersebut telah selesai pembangunannya dan secara substansi telah digunakan dalam proses operasional.

Nilai saldo awal dan saldo per 31 Desember 2018 Unaudited termasuk nilai Aset Hibah dari Pemerintah RI (Kementerian Ristek Dikti) kepada Universitas Indonesia, untuk menghindari terjadinya pencatatan ganda pada LKPP, perlu dilakukan eliminasi di level LKPP karena terdapat sejumlah aset hibah yang belum ada BAST dan masih dicatat di Kementerian Ristek Dikti sebagai Aset Persediaan. Nilai yang perlu dieliminasi sebesar nilai aset yang belum ada BAST. BAST merupakan dasar penghapusbukuan nilai aset pada Kementerian/Lembaga.

Terdapat 11 item pekerjaan berupa Gedung dan Peralatan yang belum ada berita acara serah terima (BAST) barang milik negara dari Pemerintah RI kepada Universitas Indonesia dan masih dicatat di SIMAK BMN.

No	Nama Aset Hibah	Institusi Pemberi Hibah	Nilai Perolehan Nilai Wajar	Nilai tercatat sebagai Aset Tetap Universitas Indonesia (2017) DIPA UI	Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap Universitas Indonesia (2017)	Akum. Penyusutan dari nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap Universitas Indonesia (2018)	Dokumen Pendukung
1	Alat dan Furniture Gedung Fasilitas Rumpun Ilmu Kesehatan	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	104.836.048.971	99.522.644.381	5.313.404.590	3.531.571.732	Acceptance Certificate No. 10696.1/UN2.PPK/LOG.01 /2014 tanggal 8 Desember 2014 dengan nilai kontrak 104.836.048.971
2	Peralatan IT MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	21.598.007.200	-	21.598.007.200	8.999.169.667	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI
3	Peralatan Laboratorium MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	49.830.000.000	-	49.830.000.000	10.381.250.000	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI
4	Peralatan Medical dan Non Medical MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	3.837.744.000	-	3.837.744.000	1.279.248.000	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI
5	Furniture dan Fixture MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	24.368.312.958	-	24.368.312.958	8.122.770.986	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI
6	Peralatan Medical Research Laboratory Equipment MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	38.228.343.871	-	38.228.343.871	7.964.238.306	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI
7	Peralatan Skill Laboratory and Supporting Equipment MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	16.830.777.445	-	16.830.777.445	3.506.411.968	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI

		KDIKTI					KEMENRISTEKDIKTI
8	Gedung MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	252.704.165.799	33.262.800.000	219.441.365.799	7.314.712.193	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI
9	Gedung Asrama Blok H1	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	16.545.400.000	-	16.545.400.000	661.816.000	Laporan Penilaian Bangunan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No.0311/2/1/WKN.08/KNL.03/99.00/2016
10	Gedung Asrama Blok H2	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	37.480.500.000	-	37.480.500.000	1.499.220.000	Laporan Penilaian Bangunan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No. 0312/2/1/WKN.08/KNL.03/99.00/2016
11	Bangunan Genset dan Tangki Air Asrama Gedung H2	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	289.060.000	-	289.060.000	11.562.400	Laporan Penilaian Bangunan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No. 0321/2/1/WKN.08/KNL.03/99.00/2016
Total			566.548.360.244	132.785.444.381	433.762.915.863	53.271.971.252	

Untuk poin 2 sampai 8, Kementerian Ristek Dikti telah menyampaikan Surat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara perihal Permohonan Persetujuan Hibah BMN Proyek MERC UI ke Universitas Indonesia Nomor: 317/B1/PL/2018 tanggal 20 Februari 2018. Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat PKNSI masih dalam proses meneliti dokumen permohonan persetujuan Hibah dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk poin 1 sudah dilakukan rekonsiliasi nilai aset BMN RSUI antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek Dikti dengan Universitas Indonesia pada tanggal 7-9 Februari 2019 termasuk nilai retensi peralatan dan furniture Rumpun Ilmu Kesehatan untuk selanjutnya akan dibuatkan Berita Acara Penetapan Nilai Aset.

17. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai PMN pada Perusahaan Negara yang disajikan pada neraca, sudah termasuk nilai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Nilai BPYBDS per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar 22.922.087.565.782 dan 23.537.921.422.554. Nilai BPYBDS per 31 Desember 2018 terdiri dari BPYBDS pada:

BUMN	BPYBDS per 31 Desember 2017 (Rp)	Pengurangan selama Tahun 2018 (Rp)	Penambahan selama Tahun 2018 (Rp)	BPYBDS per 31 Desember 2018 (Rp)	Selisih (Rp)
Perum DAMRI	310.794.912.055,00	0	0	0	0
PT Perusahaan Listrik Negara	20.037.970.643.771,00	5.354.474.962.197,00	0	19.905.003.303.204,00	0
PT Angkasa Pura II	881.022.753.453,34	0	0	881.022.753.453,34	0
PT Pelindo I	525.884.662.252,50	0	0	527.133.217.252,50	1.248.555.000,00
PT ASDP	794.289.473.182,00	173.320.159.150,00	0	620.969.314.032,00	0
PT Pertamina	12.452.878.178,00	0	0	12.452.878.178,53	0
Perum LPPNPI	975.506.099.661,70	375.512.760.000,00	0	975.506.099.661,70	0
Jumlah	23.507.921.422.554,00	5.903.307.881.347,00	0	22.922.087.563.782,07	1.248.555.000,00

Secara keseluruhan, nilai BPYBDS per 31 Desember 2018 dibandingkan dengan nilai BPYBDS 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 5.903.307.881.347. Pada tahun 2017, telah dilakukan rekonsiliasi terhadap nilai BPYBDS yang mengakibatkan penyesuaian/selisih nilai dengan keterangan sebagai berikut.

- 1) Perum Damri
BPYBDS sebesar 310.794.912.055 telah ditetapkan menjadi PMN sesuai PP Nomor 45 Tahun 2018
- 2) PT Perusahaan Listrik Negara
BPYBDS senilai 132.967.340.567 telah ditetapkan menjadi PMN sesuai PP nomor 15 tahun 2018; BPYBDS sebesar 5.221.507.621.630,00 sesuai PP Nomor 58 Tahun 2018 (namun PT PLN belum melakukan reklasifikasi akun BPYBDS menjadi modal disetor dikarenakan masih menunggu Surat Menteri BUMN terkait penambahan modal disetor PT PLN)
- 3) PT Angkasa Pura II
Dalam proses penetapan PP
- 4) PT Pelindo I
Pada BAR kesepakatan Semester I Tahun 2018 baik Pelindo I dan K/L menyetujui nilai BPYBDS Rekon Semester I Tahun 2018 sebesar 527.133.217.252,50. Pada LK Triwulan I, Pelindo I mengakui nilai BPYBDS sebesar 525.884.662.252,50 sehingga terdapat selisih sebesar 1.248.555.000. Selisih tersebut disebabkan dengan adanya hasil revaluasi kembali oleh BPKP berupa pembangunan Dermaga Gunung Sitoli senilai 1.248.555.000 sehingga nilai *outstanding* nilai per semester I tahun 2018 menjadi 527.133.217.252,50
- 5) PT ASDP
BPYBDS sebesar 173.320.159.150 telah ditetapkan menjadi PMN sesuai PP Nomor 55 Tahun 2018
- 6) PT Pertamina
Belum dapat diproses
- 7) Perum LPPNPI
Dalam proses pembahasan panitia antar kementerian.

18. **Inkracht**

Berdasarkan PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum, maka perlakuan atas putusan pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah adalah sebagai berikut.

- a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah dan telah dianggarkan dalam DIPA, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKGL.
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA, maka tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum); dan

- c. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CALK LKLL.

Tuntutan hukum kepada Pemerintah sampai 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) tuntutan hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yaitu gugatan terkait Gedung Keuangan Negara Manado yang berdiri di atas tanah seluas 6.831 M2 yang status kepemilikannya didasarkan atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 143 Tahun 1983 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Manado, dengan penggugat Frans J. Tamuju, dkk dan tergugat Menteri Keuangan dan KPPN Manado. Status perkara tersebut telah memiliki putusan pengadilan *inkracht* dan telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah sebesar 512.325.000. Atas perkara tersebut, belum dianggarkan dalam DIPA.
2. Putusan *inkracht* BANI pada BPPPTI Kementerian Komunikasi dan Informatika atas gugatan hukum yang diajukan oleh para penyedia jasa pekerjaan USO melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional), sebesar 1.330.797.947.627,00 dan USD1,129,208. Untuk pembayaran tuntutan tersebut dan administrasi proses BANI, telah dianggarkan dalam DIPA TA 2018 sebesar 101.627.750.000 namun dalam posisi tidak dapat dicairkan karena (blokir). Pada 31 Desember 2018, sisa anggaran penyelesaian sengketa BANI yang masih dalam posisi blokir adalah sebesar 89.054.889.000, Sebagian besar nilai putusan BANI belum dianggarkan dalam DIPA TA 2018 dan seluruh putusan tersebut belum dibayarkan.
3. Tuntutan hukum pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, berupa :
 - Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara di Jl. KL.Yos Sudarso Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan seluas 2.102m2 senilai 5.420.007.000,00 merupakan bagian dari 16.481m2 bekas HGB No.26/Pulo Brayan Kota an. Herman Iskandar yang telah berakhir 23 September 1980. Tanah tersebut menjadi obyek perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan sesuai register perkara Nomor: 614PK/Pdt/2009 jo Nomor: 62/PDT/2002/PT.Mdn jo Nomor: 359/Pdt.G/2001/PN.Mdn. Putusan Pengadilan Negeri Medan menyatakan antara lain bahwa Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara segera mengosongkan tanahnya dan menyerahkan kepada penggugat (Herman Iskandar).
 - Terdapat aset tanah dan bangunan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang terletak di Jalan Tunjungan No. 80 dan terdaftar dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Genteng dengan luasan 6.968 M2. Terdapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat bernama Tjipto Chandra selaku Likuidatur dan Perkumpulan Loka Pamitran, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2100K/Pdt/2008, jo Nomor: 517/Pdt/2006/PT.Sby, jo Nomor: 636/Pdt.G/2005/PN.Sby yang mana Penggugat memenangkan perkara dengan luasan obyek perkara seluas 2.003 M2. Terdapat gugatan lainnya yang telah keluar putusan Mahkamah Agung Nomor: 2501 K/Pdt/2014, jo Nomor: 55/Pdt/2013/PT.Sby, jo Nomor: 268/Pdt.G/2011/PN.Sby yang mana Penggugat memenangkan perkara dengan luasan obyek perkara 4.429 M2.
 - Tanah seluas 7000 m2 Status Sertipikat Hak Pakai Nomor: 148/Panaikang atas nama Pemerintah RI cq. Badan Pertanahan Nasional berkedudukan di Jakarta, Jalan Urip Sumiharjo, Kelurahan Karangpuan (dahulu Panaikang), Kecamatan Panakukkang, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan sedang menjadi obyek perkara dan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar sampai pada tingkat Mahkamah Agung RI, BPN dinyatakan kalah, sesuai dengan putusan MA Nomor: 713/K/Pdt/2005 dikuasai oleh H.M Rais SUMANG sebagai pihak yang menang di Mahkamah Agung. Atas kewajiban pemerintah terkait putusan *inkracht* tersebut belum dianggarkan dalam DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN TA 2018.
4. Tuntutan hukum pada Kementerian Luar Negeri berupa :

Terdapat 2 (dua) tuntutan hukum pada 2 (dua) Sackter Perwakilan di luar negeri yang telah mendapatkan putusan hukum (*inkracht*), dimana Kementerian Luar Negeri berkewajiban untuk membayar sejumlah nominal Sackter perwakilan yang memiliki tuntutan hukum yang telah mendapatkan putusan hukum yang telah *inkracht* adalah sebagai berikut.

1. KBRI Amman

Masalah sewa menyewa gedung kantor lama KBRI Amman yang belum dibayar sebesar JOD 30.444,00 (Inkracht keputusan MA Yordania 14607/2016 tanggal 20 Oktober 2016).

2. KBRI Mexico

Gugatan 7 (tujuh) mantan pegawai setempat KBRI Ankara atas nama Ingris Gutierrez Pabst dan rau Arturo, tyang telah berstatus *inkracht* dimana pihak KBRI sebagai tergugat diwajibkan membayar upah sebesar USD70,812.50 dan hak lainnya sebesar USD80,765.39.

Atas kewajiban pemerintah terkait putusan *inkracht* tersebut belum dianggarkan dalam DIPA Kementerian Luar Negeri TA 2018.

5. Tuntutan Hukum pada Kementerian Pariwisata berupa:

Kasus sengketa sebidang tanah di desa Medan Estate, Kec. Percat Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang antara Kementerian Pariwisata dengan Yayasan Yayasan Anugerah Putera (YAPI), yang telah mempunyai Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/Pdt.G/2002/PN.LP tanggal 27 Februari 2003, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 365/PDT/2003/PTMDN Tanggal 2 Maret 2004, Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor 122K/pdt/2006 Tanggal 24 Juli 2006, dan Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) Nomor 67PK/Pdt/2009 Tanggal 27 Juli 2010.

Perihal penghapusan aset Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena pelaksanaan putusan peradilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut akan diproses setelah adanya kejelasan proses ganti rugi.

6. Tuntutan Hukum pada Kementerian Dalam Negeri :

Terdapat gugatan atas perkara sengketa lahan yang telah *inkracht* sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 82 PK/Pdt/2014 tanggal 10 Juli 2014 (Sengketa Perumahan DDN Karang Tengah Cileduk). Mengingat masih perlu dilakukan konfirmasi lebih lanjut terkait kondisi fisik dan kepemilikan sertifikat bidang tanah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, maka untuk sementara putusan Mahkamah Agung RI belum dapat disajikan sebagai kewajiban Kemendagri pada Neraca.

7. Tuntutan Hukum pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan :

Terdapat gugatan atas perkara Aset Tetap berupa Tanah di Jl. Sriwijaya IV No. 1, RT 003 RW 03, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seluas 4.357 M2, yang di atasnya berdiri gedung yang dikenal dengan Mess Departemen Pendidikan Nasional yang terdiri dari 3 (tiga) lantai, dengan penggugat Ny Hadi Susanti Idris, dkk dan tergugat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan telah berkeputusan hukum tetap (*inkracht*) dimana Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 456PK/Pdt/2Q12 tanggal 23 April 2013 menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Sebagai upaya pengamanan aset Mess Sriwijaya, selanjutnya Kemendikbud melakukan langkah-langkah untuk meminta pertimbangan hukum dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*) atas penanganan perkara Tanah Jl. Sriwijaya IV No. 1 dimaksud kepada Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa ini masih dalam proses hukum.

19. Aset Barang Milik Negara Idle

Terdapat 2 (dua) unit bangunan Rumah Negara dengan nilai nol yaitu:

1) Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen yang terletak di Jl. Raden Intan, Enggal, Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kondisi bangunan sudah hancur, rata dengan tanah.

2) Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Lainnya yang terletak di Jl. Tongkol No.28 Metro. Bangunan tersebut diterima oleh KPKNL metro sesuai BAST Nomor BA-30/SJ.7/2016 tanggal 24 Agustus

2016 dari KPP Pratama Metro dan tidak tercatat dalam SIMAK BMN KPP Pratama Metro.

Atas BMN yang telah hancur/rusak berat akan ditindaklanjuti dengan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas BMN yang belum diketahui nilai perolehannya telah dilakukan penilaian oleh KPKNL Metro sesuai laporan penilaian Nomor LAP-0014/1/1/WKN.05/KNL.04/01.00/2018 tanggal 09 Februari 2018 dan nilai atas BMN tersebut telah disajikan dalam Neraca Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola BMN *Idle* yang Sudah Diserahkan ke Pengelola Barang Periode Tahunan Tahun 2018.

Terdapat aset yang telah ditetapkan sebagai BMN *idle* namun belum dilakukan serah terima kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang terletak di Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya ditetapkan sebagai BMN *idle* melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-15/KM6/WKN10/KNL01/2014 tentang Penetapan Barang Milik Negara Berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I NUP I Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Sebagai Barang Milik Negara *Idle*, namun masih terdapat permasalahan hukum dan belum diserahkan kepada Pengelola Barang.
- 2) Satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terletak di Jl. Pahlawan, Desa Ngawen, Kec. Sidayu, Kab. Gresik ditetapkan sebagai BMN *idle* melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KM.6/WKN.10/KNL.01/2017, atas BMN tersebut sedang dalam proses serah terima dengan Pengelola Barang.

Terdapat BMN eks BMN *Idle* yang telah ditetapkan statusnya pada Pengguna Barang namun belum dilakukan serah terima, yaitu BMN eks BMN *Idle* berupa 2 (dua) unit Bangunan gedung Kantor Permanen, satu unit Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Gedung Garasi/Pool Permanen dan Tugu/Tanda Batas Administras Kepemilikan yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda, Sedati, Sidoarjo telah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Pertahanan Nomor 274/KM.6/2017, atas BMN eks *idle* tersebut sedang dalam proses serah terima kepada Kementerian Pertahanan.

Terdapat aset yang seluruh nilainya telah disusutkan, sehingga nilai buku per 31 Desember 2018 adalah nol, yaitu sebagai berikut.

- 1) Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen yang terletak di Jl. Raya RE Martadinata Kab. Merauke, perolehan tahun 1967 dengan nilai perolehan 338.711.692 yang dicatat oleh KPKNL Jayapura.
- 2) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Kuala Selakau, Kec. Selakau Kab. Sambas, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 25.132.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
- 3) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Siaga Parit Baru Sebangkau, Kec. Pemangkat Kab. Sambas, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 9.656.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
- 4) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Desa Sekura, Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, perolehan tahun 1958 dengan nilai perolehan 14.219.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
- 5) Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen yang terletak di Kampung Sei Raya, Kec. Sei Raya Kab. Bengkayang, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 15.317.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.

20. Yayasan Supersemar

Putang Negara pada Yayasan Supersemar didasarkan pada amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 140/PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, dalam perkara antara Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia lawan Yayasan Supersemar dan H.M. Soeharto, yang dimenangkan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga Yayasan Supersemar wajib mengganti kerugian negara sebesar USD315,002,183 (tiga ratus lima belas juta dua ribu seratus delapan puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan 139.438.536.678,56 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh

delapan rupiah lima puluh enam sen), atau setara dengan 4.700.985.148.701,56 (sesuai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2018). Bahwa atas amar putusan ini telah terdapat eksekusi pencairan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar 242.404.759.586, (dua ratus empat puluh dua miliar, empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dan terdapat beberapa objek yang belum dieksekusi terutama tanah/bangunan Gedung Granadi, dan sebidang tanah di Jalan Raya Megamendung No. 6 masih dalam proses di Pengadilan Negeri Cibinong. Nilai aset-aset tersebut belum dapat ditentukan sehingga belum dimasukkan sebagai pengurang dari nilai piutang untuk disisihkan. Koreksi atas besaran penyisihan piutang tak tertagih akan dilakukan kemudian dengan memperhitungkan kembali nilai barang sitaan yang telah dilakukan penilaian dan/atau eksekusi.

Nilai piutang kepada Yayasan Supersemar per 31 Desember 2018 dalam rupiah dihitung sebagai berikut.

1.	Nilai Piutang kepada Yayasan Supersemar	4.700.985.148.701,56
2.	Nilai Agunan atau Barang Sitaan	242.404.759.586,00
3.	Nilai Piutang untuk Disisihkan (1-2)	4.458.580.389.115,56
4.	Penyisihan Piutang Tak tertagih (100% X 3)	4.458.580.389.115,58

Penyusunan laporan keuangan UKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar baru dilakukan pada tahun 2018 sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut Direktorat PKNSI sebagai Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN TK) Pengelola Piutang Kepada Yayasan Supersemar. Pada tahun 2017 piutang kepada Yayasan Supersemar tidak dilaporkan dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat melainkan hanya diungkapkan dalam Catatan Atas laporan Keuangan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 140/PK/Pdt/2015 tidak mencantumkan adanya jatuh tempo pelunasan piutang oleh tergugat. Oleh karena itu, dalam penyajian laporan keuangan ini kami mengasumsikan bahwa jatuh tempo pelunasan tersebut ialah sesuai dengan tanggal putusan yaitu tanggal 8 Juni 2015.

21. Laporan Keuangan Transaksi Khusus Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361)

1) Satker TK Pengelola Utang PFK Pegawai

Pada prinsipnya Satuan Kerja (440780) Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) menyusun Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai hanya meliputi Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional bersaldo nihil (tidak ada transaksi).

2) Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, Dan Pelaporan Akumulasi Iuran Pensiun

a. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, terdapat UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan yang dilaksanakan oleh unit eselon II di DJPb yang menangani pengelola pengeluaran keperluan layanan perbankan. Dalam hal transaksi layanan perbankan belum memiliki DIPA tersendiri, akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi tersebut dilaksanakan oleh UAKPA BUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361) yang mengelola belanja/beban Jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun.

- b. Dalam tahun 2018, terdapat serah terima utang dan piutang imbalan jasa pelayanan bank/pos persepsi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-043/WPB/KP.09/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan penjelasan sebagai berikut.
1. Serah terima utang/piutang dilakukan antara Kepala KPPN Khusus Penerimaan dengan Direktur Sistem Perbendaharaan selaku KPA BUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361). Serah terima utang dan piutang dilakukan untuk transaksi imbalan jasa bank/pos persepsi s.d. November 2017.
 2. Untuk transaksi s.d. November 2017, KPPN Khusus Penerimaan telah melakukan pencatatan atas utang pembayaran imbalan jasa bank/pos persepsi. Dalam hal ini, Direktorat Sistem Perbendaharaan telah membayarkan beban imbalan jasa bank/pos persepsi s.d. November 2017 sebesar 31.831.700.000. Oleh karena itu, sesuai dengan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporar Keuangan Nomor ND-9498/PB.6/2018 tanggal 17 Desember 2018 hal Petunjuk Perlakuan Akuntansi Terhadap Utang dan Piutang Terkait Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi (IJP Tahun 2018, Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengkoreksi beban pembayaran imbalan jasa bank/pos persepsi senilai tersebut dari Laporan Operasional.
 3. Dalam serah terima utang/piutang tersebut, Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerima utang imbalan jasa pelayanan bank/pos Persepsi s.d. November 2017 sebesar 387.035.000 dan piutang imbalan jasa pelayanan bank/pos Persepsi s.d. November 2017 sebesar 3.255.000.
 4. Termasuk dalam piutang yang diserahkan adalah piutang kepada Bank Antar Daerah senilai 1.075.000 untuk transaksi tahun 2015. Saat ini, Bank Antar Daerah sudah diambil alih oleh China Construction Bank pada tahun 2016.
- c. Terdapat IDP yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan sebelum dikelola oleh PT Asabri (Persero) dengan rincian sebagai berikut:
1. Periode 1974/1975 s.d 1983/1984 hasil pengumpulan IDP yang dilaksanakan oleh Dephankam cq Asku Hankam sebesar 132.869.358.206. Hasil tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada YKPP/BPKPR.
 2. Periode 1984 s.d 1998 YKPP/BPKPR menerima dana pensiun sebesar 688.027.050.998,62. Nilai IDP/AIP sebagaimana tersebut di atas tidak dimasukkan ke dalam nilai IDP/AIP pada akun Aset Lainnya dan Utang Jangka Panjang di Neraca LK BUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- d. Berkaitan dengan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) atau Iuran Dana Pensiun (IDP) pada PT Kereta Api Indonesia / PT KAI (Persero), dapat disampaikan sebagai berikut.
1. Nilai IDP PNS (PT KAI) adalah senilai 1.204.364.786.171 sesuai lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Belanja Pensiun, Perhitungan Realisasi, Utang, Piutang dan Pengembalian Belanja Periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018 antara KPA BUN dan PT Taspen (Persero) Nomor: I/BA/LK/DJPb TSP/2019.
 2. Pada saat ini, IDP PNS (PT KAI) dikelola teisah dari Akumulasi Iuran Pensiun PNS. IDP PNS (PT KAI) akan disetorkan ke dalam Akumulasi Iuran PNS pada saat program penyesuaian pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI (Persero) berakhir, yakni pada saat tidak ada lagi penerima pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI (Persero). Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 170/PMK.02/2016 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pasal 9 ayat (4), yang berbunyi "Pada saat program penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) berakhir, Akumulasi Dana Pensiun Pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) disetorkan ke dalam akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil."

3. Sehubungan dengan poin b, maka nilai IDP PNS (PT KAI) tidak masuk ke dalam Neraca Laporan Keuangan UAKPA BUN 987361.
- e. Pada tahun 2018, terdapat penerimaan PNBP dari penyetoran Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sebesar total 7.704.637.733.401 yang masuk ke dalam LRA dan LO tahun 2018. Penyetoran ini berasal dari dana AIP yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Penjelasan terhadap penyetoran adalah sebagai berikut.
1. Penyetoran terhadap AIP dilakukan karena Pemerintah hendak menggunakan dana AIP untuk membayar manfaat pensiun. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 6B, AIP dapat digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
 2. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2018, AIP dapat digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun. Penggunaan AIP dapat dilakukan sesuai kebijakan Pemerintah. Mekanismenya adalah dengan penyetoran AIP oleh Badan Penyelenggara (PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero) ke kas negara sebagai PNBP.
- f. Pembayaran Utang Jangka Pendek berupa Bagian Lancar UPSL Tahun 2012-2013 sebesar 1.500.000.000.000 dan Bagian Lancar UPSL 2014-2015 sebesar 3.500.000.000.000 telah dilakukan pada Januari 2019 dengan rincian sebagai berikut.
1. Pembayaran belanja pensiun angsuran tahap keempat tahun 2019 sesuai dengan skema pembayarar *Unfunded Past Service Liability* tahun 2012 s.d 2013 dengan SPM Nomor 00019T/987361/2015 tanggal 11 Januari 2019 dan SP2D Nomor 190191301000242 tanggal 18 Januari 2019 sebesar 1.500.000.000.000.
 2. Pembayaran belanja pensiun angsuran tahap kedua tahun 2019 sesuai dengan skema pembayarar *Unfunded Past Service Liability* tahun 2014 s.d 2015 dengan SPM Nomor 00020T/987361/2015 tanggal 11 Januari 2019 dan SP2D Nomor 190191301000243 tanggal 18 Januari 2019 sebesar 3.500.000.000.000.

22. Pengungkapan Kewajiban Pemerintah Terkait Pensiun

Saat ini Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Pemerintah menganut sistem pembayaran secara *pay as you go*, yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh Pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Selama ini terkait penyelenggaraan program pensiun dan program THT, pegawai membayar masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok.

Sebagai bagian dari reformasi program pensiun di Indonesia, Pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS (JP JHT PNS). RPP JP JHT ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pokok-pokok pengaturan dalam RPP tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS dalam kerangka reformasi program pensiun yang disusun oleh Kementerian Keuangan antara lain adalah:

- 1) Untuk PNS lama (PNS yang masuk sebelum tanggal *cut off* 1 Januari 2020) tetap menggunakan skema Manfaat Pasti (*defined benefit*), dimana perhitungan manfaatnya merupakan gabungan antara manfaat yang dihitung menggunakan dasar pensiun lama dan menggunakan dasar pensiun yang baru. Sedangkan untuk PNS baru (PNS yang masuk mulai tanggal *cut off* 1 Januari 2020) menggunakan skema iuran pasti (*defined contribution*).
- 2) Sumber pembiayaan untuk skema manfaat pasti (*defined benefit*) bagi PNS lama menggunakan mekanisme *Pay As You Go* yang bersumber dari APBN. Sedangkan iuran yang berasal dari peserta (PNS lama) akan

diakumulasikan untuk diinvestasikan. Akumulasi iuran tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pensiun PNS apabila pemerintah mengalami kesulitan pendanaan program pensiun PNS. Sedangkan sumber pembiayaan untuk skema iuran pasti (*defined contribution*) bagi PNS baru berasal dari iuran peserta (PNS baru) dan iuran dari pemerintah selaku pemberi kerja, ditambah akumulasi hasil atas pengembangan iuran tersebut.

- 3) Dalam jangka waktu titik tertentu, beban *Pay As You Go* yang berasal dari APBN untuk pembayaran manfaat pensiun PNS lama akan habis seiring dengan tidak ada lagi penerima manfaat pensiun yang berasal dari PNS lama dan digantikan seluruhnya oleh PNS baru yang menggunakan skema iuran pasti (*defined contribution*).

23. Subsidi Energi

- a. Subsidi energi (BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik) dianggarkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan BBM (Minyak Tanah dan Minyak Solar), LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dengan harga yang terjangkau.
- b. Subsidi BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg terdiri dari subsidi harga dan PPN atas penyerahan BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg oleh badan usaha kepada Pemerintah. Sedangkan, BBM Jenis Minyak Solar diberikan subsidi tetap.
- c. Penyaluran BBM dalam Tahun 2018 melalui PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Coorindo Tbk (AKR). Sementara itu, penyaluran LPG Tabung 3 Kg melalui PT. Pertamina (Persero).
- d. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang dalam 1 (satu) tahun anggaran terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN.
- e. Kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM tidak terkait dengan pelaksanaan penyelesaian pembayaran subsidi JBT.
- f. Berdasarkan hasil koordinasi Menteri Keuangan dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN terkait kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2017 disepakati kebijakan penyelesaian sebagai berikut.
 - Pemerintah akan mengganti kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) dari hasil penjualan JBT Minyak Solar yang pelaksanaan pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara. sementara itu, untuk kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBKP Premium sebagai kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero).
 - Pemerintah akan mengganti kekurangan pendapatan PT AKR Coorindo, Tbk dari hasil penjualan JBT Minyak Solar yang pelaksanaan pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara.

Kebijakan tersebut di atas telah disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui surat nomor: S-642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPP dan LKBUN Tahun 2017.

- g. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 36/AUDITAMA VII/PDPT/07/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Perhitungan dan Pendistribusian Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg serta Kegiatan Pendistribusian JBKP dan Pemberlakuan BBM Satu Harga Tahun 2017 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Coorindo, Tbk, Kementerian ESDM, BPH-Migas, dan Instansi Terkait Lainnya, diketahui bahwa terdapat kekurangan penerimaan Badan Usaha sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM, yaitu kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) dari hasil penjualan JBT Minyak Solar sebesar 20.788.916.888.950, sesuai dengan pasal 14 Peraturan Presiden Nomor

43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- h. Subsidi listrik diberikan kepada masyarakat/pelanggan dengan golongan tarif yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut, kecuali golongan tarif yang telah menerapkan tarif keekonomian.
- i. Pelaksanaan atas pemberian subsidi listrik melalui BUMN operator yaitu PT PLN (Persero).
Pembayaran subsidi Listrik tahun 2018 kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp51.207.587.695.000, termasuk pembayaran untuk golongan tarif 900 VA Rumah Tangga Mampu pada Tegangan Rendah (900 VA-RTM (R-I/TR)) sebesar Rp5.365.707.937.752,00 yang bukan golongan tarif bersubsidi dalam APBN 2018. Nilai realisasi pembayaran belanja subsidi untuk golongan tarif 900 VA-RTM (R-I/TR) tersebut dialokasikan untuk pembayaran subsidi listrik Tahun 2018 sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Subsidi Listrik sebesar Rp2.259.874.407.897,00 (Rp48.101.754.165.145,00 - Rp45.841.879.757.248,00) dan pembayaran sisa utang subsidi listrik tahun lalu sebesar Rp2.288.984.393.077,00, sedangkan sisanya sebesar Rp816.849.136.778,00 merupakan Piutang Subsidi PT PLN kepada Pemerintah sebagaimana CALK tentang Piutang Bukan Pajak
Pada Tahun 2018, Kementerian ESDM menetapkan peraturan berupa Kepmen ESDM Nomor 1395/K/30/MEM/2018 tanggal 9 Maret 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Kepmen ESDM Nomor 1410/K/30/MEM/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Nomor 1395/K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batu bara untuk penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. Hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut diantaranya penetapan Harga Jual Batu bara untuk penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton Free On Board (FOB) Vessel atau dibawah Harga Batu Bara Acuan (HBA).
Manfaat ekonomi yang diterima pemerintah dari kebijakan penetapan harga jual batu bara yang dibawah Harga Batu Bara Acuan berupa penghematan subsidi listrik sebesar Rp6.819.143.342.516,00 dan penurunan PNBFS DA Batu Bara yang dicatat pada Kementerian ESDM sebesar Rp1.833.793.727.503,00.
- j. Berdasarkan hasil koordinasi Menteri Keuangan dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN pada tanggal 30 Mei 2018, atas beban BPP sebesar 7.456.451.880.403 tersebut disepakati bahwa Pemerintah dapat menyetujui penggantian beban dimaksud yang pembayarannya akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara melalui Surat Menteri Keuangan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas Subsidi Listrik pada PT PLN (Persero) Tahun Anggaran 2017.
- k. Kewajiban diestimasi merupakan tagihan dari Bank Penyalur yang sudah diajukan kepada KPPN Khusus Investasi tetapi belum diverifikasi/masih dalam proses verifikasi (belum diterbitkan BAV). Nilai tagihan yang belum diverifikasi/masih dalam proses verifikasi (belum diterbitkan BAV) sampai dengan penyusunan laporan keuangan ini adalah sebesar 5.363.344.078,00. Nilai tersebut telah dikurangi dengan tagihan yang selesai diverifikasi pada subsequent event sebesar 1.394.016.700,00.
- l. Berdasarkan administrasi dokumen sumber, subsidi PPh DTP yang tidak dapat dibayarkan per 31 Desember 2018 karena pagu anggaran tahun 2018 tidak mencukupi adalah sebesar 1.608.882.999.792, yang terdiri dari Kurang Bayar 2017 sebesar 386.136.772.923 dan Kurang Bayar 2018 sebesar 1.222.746.226.869.

24. Klasifikasi Utang Pemerintah

Utang pemerintah Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan utang luar negeri dan utang dalam negeri sebagaimana definisi dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). Seluruh SBN yang diterbitkan di pasar domestik dan pasar internasional diklasifikasikan sebagai Utang Dalam Negeri sesuai dengan Bultek SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrua.

Utang luar negeri pemerintah adalah termasuk nilai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk, sedangkan Utang Dalam Negeri adalah utang pemerintah yang dimiliki oleh penduduk. Rincian dengan klasifikasi tersebut sebagai berikut.

No	Jenis Utang	Denominasi Mata Uang		Jumlah (miliar)
		Valas (miliar)	Rupiah (miliar)	
1	Utang Luar Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh bukan penduduk	958.964	893.251	1.852.215
	b. Pinjaman luar negeri	803.067	-	803.067
	Jumlah Utang Luar Negeri	1.762.031	893.251	2.655.282
2.	Utang Dalam Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh penduduk	95.404	1.708.383	1.803.787
	b. Pinjaman dalam negeri	-	7.135	7.135
	Jumlah Utang Dalam Negeri	95.404	1.715.518	1.810.922
	Jumlah Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri Pemerintah	1.857.435	2.608.769	4.466.204

Data tabel di atas adalah nilai pokok atas utang (tidak memperhitungkan *unamortized discount* dan *unamortized premium*).

Sebagaimana tabel di atas, yang dimaksud dengan penduduk adalah suatu unit ekonomi baik Orang atau Badan yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu Negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang pusat kegiatan ekonomi utamanya berada pada Negara domisili tersebut. Yang tidak termasuk kriteria tersebut dikategorikan bukan penduduk (*Part IV Balance of Payment Manual (BOPM) IMF, Edisi 4, Public Sector Debt Statistics: Guide for Compilers and Users Tahun 2013* dan *External Debt Statistics: Guide for Compiler and User Tahun 2014*)

Penyajian *discount* dan *premium* pada Neraca pada tahun 2018 disajikan secara rinci sebagaimana dimuat pada **Lampiran 26**.

Adapun penggunaan koefisien dalam perhitungan *Discount* dan *Premium* yang belum diamortisasi (*Unamortized Discount* dan *Unamortized Premium*) atas seri-seri SBN yang diterbitkan sebelum tahun 2007, perhitungan nilainya yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2007 (*audited*) menjadi saldo awal *Discount* dan *Premium* yang belum diamortisasi untuk tahun-tahun selanjutnya. Seri SBN yang diterbitkan mulai 2007, nilai *unamortized* diskon/premium disajikan pada neraca dengan memperhitungkan amortisasinya menggunakan metode garis lurus dan koefisiennya sebesar nilai *unamortized* diskon/premium saat penerbitan yang diperhitungkan selama umur utang tersebut sampai dengan tanggal pelunasannya.

25. Likuidasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007, sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak bencana akibat semburan lumpur Sidoarjo dengan mengadakan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur dengan

memperhitungkan resiko lingkungan yang terkecil.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan misinya yaitu:

- a. Melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- b. Menjaga keandalan ruang tampungan lumpur dan infrastruktur penanganan luapan lumpur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo berkomitmen sesuai dengan visinya yaitu "Terselesaikannya masalah sosial kemasyarakatan dan terwujudnya sistem pengendali dampak dinamika gunung lumpur yang andal"; akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut.

Melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan sosial; dan

Menjaga keandalan ruang tapungan lumpur dan infrastruktur penanganan luapan lumpur.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Sidoarjo, BPLS dibubarkan pada tanggal 2 Maret 2017 dimana untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi BPLS dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu pada Satker Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS). Dengan adanya pembubaran BPLS, maka dilakukan proses likuidasi berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 705/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanggung Jawab Proses Likuidasi Dalam Rangka Pengalihan Penatausahaan Barang Milik Negara Eks. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ke Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tanggal 27 November 2018 telah dilakukan serah terima aset dan kewajibannya dari BPLS ke Kementerian PUPR, yaitu Satker PPLS berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) No. 27.2/BA/SJ/2018. Atas likuidasi tersebut, BPLS sudah membuat Laporan Keuangan Likuidasi per tanggal 31 Desember 2018, yang terdiri atas laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Likuidasi (CaLK).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO.

Defisit LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp225.730.103.236.335. Dibandingkan Tahun 2017 yang mengalami defisit sebesar Rp112.982.816.158.602 nilai defisit LO mengalami kenaikan sebesar Rp112.747.287.077.733 atau 99,79 persen. Surplus/(Defisit) LO Tahun 2018 terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp80.438.866.944.409 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp145.291.236.291.926, sedangkan Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa sebesar Rp0.

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2018 sebesar Rp80.438.866.944.409, diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar Rp2.169.151.212.988.779 dan Beban Operasional sebesar Rp2.249.590.079.933.188.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp145.291.236.291.926, diperoleh dari defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp4.530.025.396.873, defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp2.787.500.000 dan defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp140.758.423.395.053.

Laporan Operasional Tahun 2018 menyajikan angka Tahun 2017 sebagai pembanding. Perkembangan Laporan Operasional sejak Tahun 2015 (dalam triliun) dapat dilihat pada grafik 26.



Grafik 26. Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2015 s.d Tahun 2018

E.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

E.2.1 KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Pusat tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Pusat adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Perpajakan terdiri dari Pendapatan Pajak Penghasilan, Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Cukai, Pendapatan Pajak Lainnya, Pendapatan Bea Masuk, Pendapatan Bea Keluar, dan Pendapatan Pajak Lain-lain. Pendapatan Negara Bukan Pajak meliputi Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-lain, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Defisit Tahun 2018 dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp80.438.866.944.409. Dibandingkan dengan Tahun 2017 yang mengalami defisit sebesar Rp185.150.585.052.461 nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp104.711.718.108.052 atau minus 56,55 persen. Hal ini menunjukkan kegiatan operasional tahun 2018 lebih baik dibandingkan tahun 2017. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada Grafik 27.



Grafik 27. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan Tahun 2017

Pendapatan Operasional Rp2.169,15 triliun

E.2.1.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan Operasional Tahun 2018 sebesar Rp2.169.151.212.988.779 terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp1.500.143.017.244.237, Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp644.824.777.159.082, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp24.183.418.585.460. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2018 lebih tinggi sebesar Rp362.631.074.438.949 atau 20,07 persen dibanding Tahun 2017 yang nilainya adalah sebesar Rp1.806.520.138.549.830. Besaran perbandingan komponen Pendapatan Operasional dapat dilihat pada Grafik 28.



Grafik 28. Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2018

Pendapatan Perpajakan Rp1.500,14 triliun

E.2.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pada Tahun 2018, Pendapatan Perpajakan adalah sebesar Rp1.500.143.017.244.237. Nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp137.020.395.780.649 atau 10,05 persen dibanding tahun 2017 sebesar Rp1.363.122.621.463.588. Pendapatan Perpajakan Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan Pajak Penghasilan	731.838.117.941.363	662.417.200.380.162
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	526.856.640.020.385	479.591.110.489.748
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	20.136.546.791.758	17.129.686.745.834
Pendapatan Cukai	168.411.747.414.517	153.286.335.416.261
Pendapatan Pajak Lainnya	6.796.688.674.946	11.065.264.993.893
Pendapatan Bea Masuk	39.464.702.540.677	35.054.329.773.200
Pendapatan Bea Keluar	6.665.716.676.905	4.544.847.292.042
Pendapatan Pajak Lain-lain	(27.142.816.314)	33.846.372.448
Total	1.500.143.017.244.237	1.363.122.621.463.888

E.2.1.1.1.1 Pajak Penghasilan

Pajak
Penghasilan
Rp731,83
triliun

Pajak Penghasilan Tahun 2018 adalah sebesar Rp731.838.117.941.363. Pendapatan Pajak Penghasilan mengalami kenaikan sebesar Rp69.420.917.561.201 atau 10,48 persen dibanding Tahun 2017 sebesar Rp662.417.200.380.162. Pajak Penghasilan Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan PPh Minyak Bumi	26.557.094.272.26	16.607.135.959.156
Pendapatan PPh Gas Bumi	38.118.280.365.52	33.711.719.503.816
Pendapatan PPh Migas Lainnya	33.800.919.649	4.604.623.804
Pendapatan PPh Pasal 21	134.918.491.786.219	118.232.109.781.647
Pendapatan PPh Pasal 22	18.036.931.666.75	16.193.970.914.029
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	54.702.019.166.46	43.189.095.956.050
Pendapatan PPh Pasal 23	36.885.174.569.42	35.528.626.703.126
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	9.511.668.574.521	7.321.389.939.374
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	240.638.465.110.601	218.520.440.033.635
Pendapatan PPh Pasal 26	49.134.847.249.97	46.195.666.837.559
Pendapatan PPh Final	113.047.874.567.462	105.893.884.322.644
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	141.479.051.817	12.084.406.869.029
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	235.050.235	349.728.807
Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	12.987.522	132.161.316
Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	167.200	219.978
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah	(2.462.000)	
Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	503.900.818	614.833.045
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	1.892.891.197.764	1.702.566.558.147
Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	8.218.348.183.000	7.230.485.435.000
Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	1.616.145	
Jumlah	731.838.117.941.363	662.417.200.380.162

Besarnya Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2018 paling signifikan berasal dari Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan. Pendapatan tersebut menunjukkan adanya kinerja positif sektoral secara umum terutama pada sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor jasa keuangan, dan sektor industri pengolahan. Pertumbuhan positif pada Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan ini juga disebabkan karena penurunan nilai restitusi di tahun anggaran 2018. Nilai Pendapatan PPh Pasal 21 juga mengalami peningkatan antara lain disebabkan adanya peningkatan pemberian gaji dan tunjangan yang cukup signifikan di beberapa sektor usaha. Pendapatan PPh Migas juga meningkat cukup signifikan yang dipengaruhi oleh kenaikan ICP. Adapun penurunan nilai terdapat pada PPh Non Migas lainnya.

*Pajak
Pertambahan
Nilai dan
Penjualan
Barang Mewah
Rp526,85
triliun*

E.2.1.1.1.2 Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Tahun 2018 adalah sebesar Rp526.856.640.020.385. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp47.265.529.530.637 atau 9,86 persen dibandingkan periode Tahun 2017 sebesar Rp479.591.110.489.748. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	323.715.962.911.317	312.942.569.311.304
Pendapatan PPN Impor	186.273.239.836.218	149.224.820.121.550
Pendapatan PPN Lainnya	68.355.639.470	150.814.235.849
Pendapatan PPhBM Dalam Negeri	12.718.712.605.741	13.367.715.729.437
Pendapatan PPhBM Impor	4.105.334.910.489	3.797.914.102.090
Pendapatan PPhBM Lainnya	(24.965.882.850)	107.276.989.518
Jumlah	526.856.640.020.385	479.591.110.489.748

Peningkatan pada Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2018 dipengaruhi oleh pertumbuhan positif pada Sektor Jasa Konstruksi dan Sektor Perdagangan Besar. Adapun peningkatan pada PPN Impor disumbang oleh pertumbuhan pada Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan. Penurunan pada PPhBM disebabkan karena masih tingginya konsumsi kendaraan bermotor roda empat/lebih yang termasuk dalam kategori *Low Cost Green Car/LCGC* (fasilitas PPhBM) serta menurunnya penjualan hunian mewah di tahun 2018.

E.2.1.1.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 adalah sebesar Rp 20.136.546.791.758. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.006.860.045.924 atau 17,55 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp17.129.686.745.834. Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

*Pajak Bumi dan
Bangunan
Rp20,13 triliun*

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan PBB Perkebunan	2.390.974.894.103	2.258.996.189.377
Pendapatan PBB Kehutanan	694.128.495.659	693.240.372.820
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	2.125.365.813.228	1.798.108.620.064
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	14.540.480.330.129	12.071.509.430.753
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	313.275.381.204	253.462.867.931
Pendapatan PBB Lainnya	72.321.877.435	54.369.264.889
Jumlah	20.136.546.791.758	17.129.686.745.834

Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 sebesar Rp17.129.686.745.834 termasuk di dalamnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp1.216.911.547.

Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan nilai cukup signifikan terdapat pada PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi seiring dengan peningkatan produksi dan kenaikan harga minyak bumi dan gas bumi.

E.2.1.1.1.4 Pendapatan Cukai

*Pendapatan
Cukai
Rp168,41
triliun*

Pendapatan Cukai Tahun 2018 adalah sebesar Rp168.411.747.414.517. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.125.411.998.256 atau 9,87 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp153.286.335.416.261. Pendapatan Cukai Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	161.771.554.305.988	147.718.195.604.756
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	139.247.517.580	147.025.706.280
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	6.418.775.169.760	5.567.468.557.500
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	70.790.248.740	(159.167.177.380)
Pendapatan Cukai Lainnya	11.380.172.449	12.812.725.105
Jumlah	168.411.747.414.517	153.286.335.416.261

Peningkatan Pendapatan Cukai Tahun 2018 dengan nilai cukup signifikan terdapat pada Pendapatan Cukai Hasil Tembakau. Hal ini seiring dengan Program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dimulai pada tahun 2017 yang masih digalakkan hingga saat ini. PCBT bertujuan untuk memberantas praktik perdagangan barang kena cukai ilegal dan tidak sehat, dan dalam rangka pengamanan hak keuangan negara khususnya terkait dengan produksi, peredaran, dan perdagangan barang kena cukai.

E.2.1.1.1.5 Pajak Lainnya

*Pajak Lainnya
Rp6,79 triliun*

Pajak Lainnya Tahun 2018 adalah sebesar Rp6.796.688.674.946. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.268.576.318.947 atau minus 38,58 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp11.065.264.993.893. Pajak Lainnya Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan Bea Materai	1.470.393.848.442	1.367.164.381.348
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	3.985.405.294.453	3.785.684.479.195
Pendapatan PPh Batubara	656.409.788.263	982.575.599.538
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	28.230.225.569	33.820.989.027
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	166.418.719.567	2.391.952.222.219
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	460.284.397.839	2.457.001.906.848
Pendapatan Bunga Penagihan PPhBM	26.406.406.436	46.863.187.478
Pendapatan Bunga Penagihan PTL	3.139.994.377	202.228.240
Jumlah	6.796.688.674.946	11.065.264.993.893

Penurunan Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2018 antara lain disebabkan oleh pendapatan yang tidak berulang berupa pembayaran atas bunga penagihan di tahun 2017 dengan nilai yang cukup signifikan.

E.2.1.1.1.6 Bea Masuk

Bea Masuk
Rp39,46 triliun

Bea Masuk Tahun 2018 adalah sebesar Rp39.464.702.540.677. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.410.372.767.477 atau 12,58 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp35.054.329.773.200. Bea Masuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan Bea Masuk	37.565.836.910.406	33.492.227.346.535
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	437.983.381.694	589.834.024.710
Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	590.382.001.633	440.871.610.209
Denda atas Sanksi Administrasi dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	19.682.000	-
Pendapatan BM-DTP	370.614.637.000	280.946.213.728
Pendapatan Pabean Lainnya	32.636.375.103	4.671.058.018
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	285.949.034.841	182.032.920.000
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	44.227.000	2.105.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	181.236.291.000	63.744.495.000
Jumlah	39.464.702.540.677	35.054.329.773.200

Peningkatan Bea Masuk Tahun 2018 berasal dari peningkatan devisa impor dan peningkatan utilitas *Free Trade Agreement* (FTA), kenaikan kurs, dan program penertiban importasi berisiko tinggi yang menghasilkan kenaikan *taxbase* atas importasi berisiko tinggi.

E.2.1.1.1.7 Bea Keluar

Bea Keluar
Rp6,66 triliun

Bea Keluar Tahun 2018 adalah sebesar Rp6.665.716.676.905. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.120.869.384.863 atau 46,67 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp4.544.847.292.042. Bea Keluar tersebut terdiri dari Pendapatan Bea Keluar, Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar, dan Pendapatan Bunga. Bea Keluar Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan Bea Keluar	6.664.583.965.922	4.535.319.521.260
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	1.108.158.983	9.287.233.578
Pendapatan Bunga Bea Keluar	24.552.000	240.537.204
Jumlah	6.665.716.676.905	4.544.847.292.042

Kenaikan pendapatan Bea Keluar Tahun 2018 terutama disebabkan naiknya penerimaan ekspor mineral dan batubara.

E.2.1.1.1.8 Pajak Lain-Lain

Pajak Lain-lain
minus Rp27,14
miliar

Pajak Lain-lain Tahun 2018 adalah sebesar minus Rp27.142.816.314. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp60.989.188.762 atau minus 180,19 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp33.846.372.448.

Pendapatan Pajak Lain-lain tersebut adalah pendapatan yang berasal dari pajak yang telah dipungut oleh Bendahara, namun sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetorkan ke kas negara (berada pada rekening Bendahara) sehingga sudah merupakan pendapatan bagi Pemerintah Pusat.

Pajak Lain-lain Tahun 2018 bernilai minus menunjukkan peningkatan kepatuhan Bendahara dalam penyetoran pajak yang telah dipungut. Pungutan pajak oleh Bendahara yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2018 lebih rendah dibandingkan dengan pungutan pajak oleh Bendahara yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2017.

E.2.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp644,82
triliun*

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2018 sebesar Rp644.824.777.159.082 yang merupakan pendapatan dari Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp211.849.605.126.532, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp239.499.611.090.293, PNPB Lainnya sebesar Rp136.947.279.857.210, dan Pendapatan BLU sebesar Rp56.528.281.085.047. Secara keseluruhan, nilai PNPB mengalami kenaikan sebesar Rp223.529.289.411.667 atau 53,06 persen dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp421.295.487.747.415.

E.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

*Pendapatan
Sumber Daya
Alam Rp211,84
triliun*

Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2018 adalah sebesar Rp211.849.605.126.532. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp76.525.073.255.635 atau 56,55 persen dibandingkan Tahun 2017 yaitu Pendapatan SDA sebesar Rp135.324.531.870.897. Rincian realisasi Pendapatan SDA Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi	173.169.188.168.326	106.391.959.607.594
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	897.013.139.014	585.724.704.360
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	29.793.097.476.683	22.164.409.725.679
Pendapatan Dana Reboisasi	1.949.707.502.589	1.586.709.274.019
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.131.630.995.767	862.625.212.833
Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUJPH)	57.999.849.716	36.192.609.370
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.603.935.082.478	1.508.940.299.429
Pendapatan Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air	25.630.000	635.002.996
Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di Bidang Perbenihan		94.892.000
Pendapatan dari Sertifikasi Benih		78.805.810
Pendapatan Penanaman	448.751.885.603	491.074.184.369
Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi/Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi	2.768.651.348.961	1.669.520.840.396
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi	28.111.645.960	25.081.291.549
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	1.492.401.435	1.485.420.493
Jumlah	211.849.605.126.532	135.324.531.870.897

Kenaikan Pendapatan SDA Tahun 2018 terjadi pada seluruh jenis pendapatan. Secara signifikan, kenaikan terjadi pada Pendapatan Minyak Bumi yang dipengaruhi terutama oleh rata-rata ICP Januari – Desember tahun 2018 yang mencapai 67,5 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan rata-rata ICP tahun 2017 sebesar 51,2 dolar AS per barel. Kenaikan pada Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara dipengaruhi antara lain oleh membaiknya harga dan kinerja produksi batubara serta komoditas pertambangan mineral.

Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi dan gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dalam laporan pengiriman minyak bumi dan gas bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang PNBPN SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi. Hal ini dilakukan karena PBB Migas di satu sisi merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas, namun di sisi lain merupakan pendapatan perpajakan. Di dalam Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi juga termasuk nilai estimasi tagihan *overlifting* KKKKS Tahun 2018.

E.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

*Pendapatan
dari Kekayaan
Negara
Dipisahkan
Rp239,49
triliun*

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2018 adalah sebesar Rp239.499.611.090.293. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp101.787.972.468.906 atau 73,91 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp137.711.638.621.387. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2018 terdiri dari Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi.

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN diakui sebesar jumlah yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham BUMN dan Perusahaan Minoritas/Lainnya untuk ditetapkan sebagai dividen yang harus dibayarkan kepada Pemerintah RI yang terdiri dari Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, PNBPN Laba Perusahaan Penerbit SBSN, dan PNBPN Pendapatan Dividen perusahaan minoritas dengan *cost method*. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN tahun 2018 sebesar Rp45.056.688.696.658.

Dalam komponen Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2018 terdapat Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp194.442.922.393.635. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi tersebut berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan operasional entitas badan usaha (*investee*) yang menambah nilai investasi pemerintah. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi terdiri dari Penyesuaian pada BUMN di bawah Kementerian BUMN sebesar Rp127.473.069.877.401, BUMN di bawah pembinaan Kementerian Keuangan sebesar Rp2.769.383.427.578, pendapatan yang dibukukan Badan Usaha sebesar Rp18.984.162 (pendapatan lain-lain yang berasal dari laba ditahan/bagi hasil deposito mudharabah atas modal selama Tahun 2018 dari Perusahaan Penerbit SBSN II dan Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV dan Perusahaan Penerbit SBSN V yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin), dan pendapatan penyesuaian pada Unit Akuntansi Investasi Pemerintah sebesar Rp64.200.450.104.494 (terdiri dari kenaikan nilai Investasi Permanen Lainnya yang bersumber dari Surplus/Defisit Operasional pada Lembaga Otorita (LPS), Bank Indonesia, dan Investasi Lain-lain pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan BPJS Ketenagakerjaan). Pada Tahun 2017, Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi dari LPS, Bank Indonesia, PTN-BH, dan BPJS Ketenagakerjaan disajikan sebagai bagian dari Pendapatan Kegiatan Non

operasional Lainnya.

E.2.1.1.2.3 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan
Bukan Pajak
Lainnya
Rp136,94
triliun

PNBP Lainnya Tahun 2018 adalah sebesar Rp136.947.279.857.210. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp36.894.421.699.639 atau 36,87 persen dari tahun 2017 sebesar Rp100.052.858.157.571. PNBP Lainnya Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	23.907.157.330.607	16.882.736.366.225
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	458.734.854.512	434.871.371.242
Pendapatan atas Pengetatan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	478.380.886.895	521.031.874.232
Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tasti	62.339.195.189	-
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	34.028.803.590.788	15.151.790.443.323
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Peneriksaan Klaim Asuransi BMN	1.415.665.588.389	1.217.867.656.416
Subtotal Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	60.351.081.446.380	34.208.297.711.438
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	3.503.202.732.697	1.909.936.003.910
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	738.668.412.347	689.618.070.787
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	839.274.977.108	787.827.990.507
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	2.142.477.014.496	1.448.184.499.780
Pendapatan Perizinan	1.508.010.868.552	2.449.295.921.927
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	8.517.324.476.741	9.073.759.827.085
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	874.983.688.834	466.801.592.989
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	555.352.078.123	-
Subtotal Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	18.679.296.248.898	16.825.423.906.985
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	3.837.243.080.383	4.111.592.253.260
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	178.064.580.001	-
Pendapatan Jasa Karantina	344.100.255.227	673.987.928.888
Pendapatan Jasa Agraris	2.197.166.078.286	2.477.763.542.086
Pendapatan Jasa Keagamaan	870.085.779.188	791.932.903.454
Subtotal Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	7.426.689.773.085	7.755.276.627.687

Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	4.050.987.762.767	4.462.234.079.337
Pendapatan Rengsementan Jumlah Ulaya Manusia	286.728.370.651	-
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan IPTEK	401.549.823.964	-
Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	6.485.752.865	15.727.683.018
Subtotal Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	4.745.751.710.247	4.477.961.762.355
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.398.009.015.712	4.340.588.381.947
Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	18.798.087.224.921	16.623.777.141.187
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	192.895.695.221	60.543.889.545
Subtotal Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	25.388.991.935.854	21.024.909.412.679
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	197.658.840.104	160.083.518.171
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	35.824.212.787	-
Pendapatan Jasa Lainnya	671.885.799.338	3.027.843.009.797
Subtotal Pendapatan Jasa Lainnya	905.368.852.229	3.187.926.527.968
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	1.899.839.262.224	572.709.196.587
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	52.088.810.552	69.108.954.346
Pendapatan dari Selisih Kurs	506.350.147.007	23.214.731.478
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	294.971.681.310	2.393.165.189.470
Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	6.053.304.476.813	5.012.412.454.044
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	481.813.432.813	413.689.915.950
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	-	890.371.662
Subtotal Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	9.288.367.810.719	8.485.190.813.537
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	638.613.682.993	526.159.906.696
Pendapatan Denda II	352.672.917.998	225.520.432.820
Pendapatan Denda III	308.741.808.895	284.591.942.893
Subtotal Pendapatan Denda	1.300.028.409.886	1.036.272.282.409
Pendapatan Lain-lain		
Penerimaan Kembali Belanja Tahun	-	119.678.881.905

Anggaran yang Lalu I		
Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	-	2.948.681.700
Pendapatan Lain-Lain I	7.704.637.733.401	-
Pendapatan Lain-Lain II	246.396.187.644	491.222.803.065
Total Pendapatan Lain-lain	7.951.033.921.045	613.850.366.670
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)		
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	55.663.300.189	-
Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia	-	1.700.103.052.202
Subtotal Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	55.663.300.189	1.700.103.052.202
Pendapatan Penyesuaian Akruwal		
Pendapatan Sitaan/Rampasan	855.036.448.678	737.645.693.641
Subtotal Pendapatan Penyesuaian Akruwal	855.036.448.678	737.645.693.641
Jumlah PNBP Lainnya	136.947.279.857.210	100.052.858.157.571

Besarnya Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2018 paling signifikan terdapat pada Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang, Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas, Penerimaan Akumulasi Iuran Pensiun, dan Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika. Kementerian/Lembaga yang menyumbang PNBP Lainnya terbesar antara lain adalah Bendahara Umum Negara terutama pada BA 999.99, Kementerian ESDM, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penyajian uraian PNBP Lainnya pada tahun 2018 telah disesuaikan dengan perubahan kodefikasi PNBP Lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Bagan Akun Standar.

E.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Pendapatan
BLU Rp56,52
triliun

Pendapatan BLU Tahun 2018 adalah sebesar Rp56.528.281.085.047. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.321.821.987.487 atau 17,26 persen dari tahun 2017 sebesar Rp48.206.459.097.560. Pendapatan BLU Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum: kepada Masyarakat		
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	1.104.430.435.632	1.136.550.154.351
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	18.549.624.166.808	17.634.171.781.976
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	-	-
Subtotal Pendapatan Jasa Layanan Umum	49.922.497.024.509	44.912.385.598.353
Pendapatan Hibah BLU	371.494.767.316	317.681.155.334
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.670.308.372.743	594.401.221.874
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	179.978.760.931	9.673.878.071
Pendapatan BLU Lainnya	4.223.579.871.856	2.360.973.399.149
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa	209.776.381.890	11.338.544.779
Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU	646.405.800	5.300.000
Jumlah	56.528.281.085.047	48.206.459.097.560

Kementerian/Lembaga penyumbang nilai Pendapatan Badan Layanan Umum Tahun 2018 paling besar adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kenaikan Pendapatan BLU terutama karena kinerja pendapatan BLU yang semakin baik berupa peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU, penambahan jenis layanan BLU karena permintaan masyarakat, optimalisasi aset BLU, pencatatan pendapatan BLU yang semakin baik, dan terdapat 14 BLU yang baru ditetapkan pada tahun 2018.

E.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Rp24,18 triliun

Pendapatan Hibah selama Tahun 2018 adalah sebesar Rp24.183.418.585.460. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.081.389.246.633 atau 9,42 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp22.102.029.338.827. Pendapatan Hibah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah. Pendapatan Hibah Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana	-	-
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang	6.845.900.809.329	2.960.516.973.884
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Jasa	2.069.086.533	148.800.000
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	13.178.185.591.822	7.410.435.627.384
Subtotal Pendapatan Hibah Dalam Negeri	20.026.155.487.684	10.371.101.401.268
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	418.374.595.589	530.076.024.609
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang	750.246.244.476	1.016.604.071.107
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa	3.062.037.983.142	4.557.855.044.216
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	1.968.300.051.909	3.689.303.350.497
Subtotal Pendapatan Hibah Luar Negeri	6.198.958.875.116	6.793.838.490.429
Pendapatan Hibah Langsung Lainnya	(2.041.695.777.340)	1.937.089.447.130
Jumlah Pendapatan Hibah	24.183.418.585.460	22.102.029.338.827

Penurunan Pendapatan Hibah berasal dari Pendapatan Hibah Luar Negeri, sedangkan Pendapatan Hibah Dalam Negeri mengalami peningkatan. Pendapatan Hibah Langsung Lainnya sebesar minus Rp2.041.695.777.340 menunjukkan pendapatan hibah langsung yang diterima K/L namun belum disahkan sebagai pendapatan hibah oleh Bendahara Umum Negara di tahun 2018 nilainya lebih kecil dibandingkan jumlah pendapatan hibah yang belum disahkan pada tahun 2017.

E.2.1.2 BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional Rp2.242,59 triliun

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2018 adalah sebesar Rp2.249.590.079.933.188. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp257.919.356.330.897 atau 12,95 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp1.991.670.723.602.291. Beban Operasional meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Permda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-lain, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Perbandingan besaran Beban Operasional dapat dilihat pada grafik 29.



Grafik 29. Komposisi Beban Operasional Tahun 2018

Rincian Beban Operasional Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Pegawai	351.169.184.831.245	313.570.939.079.330
Beban Persediaan	29.932.790.690.126	26.506.371.268.281
Beban Barang dan Jasa	175.351.118.265.689	143.272.384.828.489
Beban Pemeliharaan	37.434.658.112.329	41.623.251.981.571
Beban Perjalanan Dinas	43.791.723.031.484	34.884.409.891.254
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Permda	40.361.271.228.799	43.450.653.025.621
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	244.805.005.384.622	217.040.353.670.203
Beban Subsidi	196.719.559.440.096	167.834.411.964.126
Beban Hibah	1.520.560.988.285	5.445.667.259.156
Beban Bantuan Sosial	82.465.242.445.242	55.858.510.175.202
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	769.694.450.184.060	735.149.293.850.265
Beban Lain-lain	79.829.317.279.532	37.776.589.355.266
Beban Penyusutan dan Amortisasi	172.046.636.562.132	144.842.686.552.886
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	24.468.561.489.547	24.415.200.700.641
Jumlah	2.249.590.079.933.188	1.991.670.723.602.291

Beban Pegawai
Rp351,16
triliun

E.2.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk Tahun 2018 adalah sebesar Rp351.169.184.831.245. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp37.598.245.751.915 atau 11,99 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp313.570.939.079.330. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud. Beban Pegawai Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	88.563.658.473.682	85.533.468.836.009
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	59.259.416.151.054	55.598.861.012.954
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	687.001.379.214	633.585.187.202
Beban Gaji Dokter PTT	143.441.868.160	349.048.423.545
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	7.937.957.259.194	8.847.289.629.256
Beban Honorarium	1.715.801.833.161	1.436.541.593.948
Beban Lembur	736.296.210.306	726.465.940.735
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	72.174.671.173.005	54.432.772.543.919
Beban Pensiun dan Uang Tunggu	104.131.084.968.049	91.879.440.770.106
Beban Program Jaminan Sosial Pegawai	5.672.979.906.636	5.398.801.176.104
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Gaji dan Tunjangan	10.146.875.608.784	8.734.663.965.552
Jumlah	351.169.184.831.245	313.570.939.079.330

Persentase kenaikan pada komponen Beban Pegawai Tahun 2018 terbesar terdapat pada Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito, Beban Honorarium, Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Gaji dan Tunjangan, dan Beban Pensiun dan Uang Tunggu. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan karena adanya penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai/ASN/TNI/POLRI di Kementerian Negara/Lembaga serta kebijakan pemberian THR sejalan dengan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan upaya menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara. Adapun persentase penurunan beban pegawai terdapat pada Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS dan Beban Gaji Dokter PTT.

E.2.1.2.2 Beban Persediaan

Beban
Persediaan
Rp29,93 triliun

Beban Persediaan pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp29.932.790.690.126. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.426.419.421.845 atau 12,93 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp26.506.371.268.281. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Persediaan Konsumsi	10.081.393.034.41	8.960.009.757.490
Beban Persediaan Amunisi	1.830.768.691.065	2.642.815.847.024
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	4.422.606.537	6.353.373.570
Beban Persediaan Bahan Baku	6.325.326.611.464	7.693.477.915.628
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	5.117.260.083.422	683.903.388.079
Beban Persediaan Lainnya	6.573.619.663.221	6.519.810.986.490
Jumlah	29.932.790.690.126	26.506.371.268.281

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban Persediaan Tahun 2018 meningkat secara signifikan pada Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga (BA 999) berupa beban untuk mencatat cadangan beras pemerintah yang telah disalurkan sampai dengan 31 Desember 2018 serta penyaluran benih CBN berupa padi dan jagung hibrida Tahun 2018. Adapun Beban Persediaan Tahun 2018 yang mengalami penurunan terdapat pada Beban Persediaan Amunisi dan Beban Persediaan Bahan Baku.

E.2.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang
dan Jasa
Rp175,35
triliun

Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 adalah sebesar Rp175.351.118.265.689. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp32.078.733.437.200 atau 22,39 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp143.272.384.828.489. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Barang Operasional	42.440.563.325.087	34.198.511.297.295
Beban Barang Non Operasional	74.546.230.599.301	53.196.825.930.617
Beban Barang Pengganti Pajak dalam Rangka Hibah MCC	5.632.424.060	11.935.532.901
Beban Kontribusi	317.088.416.644	191.543.039.201
Beban Langganan Daya dan Jasa	6.647.564.485.554	5.884.563.934.738
Beban Jasa Pos dan Giro	11.890.770.411	23.441.961.207
Beban Jasa Konsultan	7.060.533.356.141	9.048.231.664.457
Beban Sewa	6.024.492.993.884	3.820.164.353.004
Beban Jasa Profesi	4.429.562.928.448	4.135.452.364.447
Beban Jasa kepada BLU	63.616.000	-
Beban Jasa Lainnya	14.150.598.174.034	10.193.624.065.86
Beban Barang dan Jasa BLU	19.434.715.588.583	22.430.503.575.452
Beban Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain	1.418.081.613	-
Beban Aset Ekstrakomptabel	280.763.505.929	137.587.109.306
Jumlah	175.351.118.265.689	143.272.384.828.489

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 yang paling signifikan terdapat pada Beban Barang Non Operasional terutama pada Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Adapun kenaikan signifikan pada Beban Kontribusi berasal dari BA BUN berupa Kontribusi kepada Organisasi Internasional dan *Trust Fund*, Kontribusi Dana Dukungan

Kelayakan (*Viability Gap Fund*), dan Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek (*Project Development Facility*). Kenaikan signifikan juga terdapat pada Beban Sewa terutama pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, penurunan Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 terdapat pada Beban Barang Pengganti Pajak dalam Rangka Hibah MCC, Beban Jasa Pos dan Giro, dan pada Beban Jasa Konsultan.

E.2.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp37,43 triliun

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 adalah sebesar Rp37.434.658.112.329. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.188.593.869.242 atau minus 10,06 persen dibandingkan periode Tahun 2017 sebesar Rp41.623.251.981.571. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.779.343.603.707	6.257.018.273.116
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	274.352.833.278	272.388.818.828
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.105.765.465.842	12.819.980.166.644
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	7.422.846.065.125	5.758.299.250.582
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	71.529.599	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209.825.011.642	237.184.279.134
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.802.530.266.621	5.055.736.692.978
Beban Pemeliharaan Irigasi	902.274.127.125	848.411.865.919
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.575.935.041.281	1.469.618.768.322
Beban Pemeliharaan Lainnya	418.839.033.028	351.993.090.934
Beban Barang dan Jasa BLU-Beban Pemeliharaan	1.192.251.332.322	1.005.732.416.743
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	371.224.143.632	312.766.216.914
Beban Persediaan Suku Cadang	4.370.708.860.159	7.234.122.141.457
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	8.690.798.968	-
Jumlah	37.434.658.112.329	41.623.251.981.571

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 mengalami penurunan signifikan pada Beban Persediaan Suku Cadang dan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Beban Pemeliharaan Tahun 2018 terbesar terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan.

E.2.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas Rp43,79
triliun

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 adalah sebesar Rp43.791.723.031.484. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.907.313.140.230 atau 25,53 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp34.884.409.891.254. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	20.833.110.878.840	16.747.144.795.003
Beban Perjalanan Dinas Tetap	80.592.786.539	73.054.664.231
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.671.908.131.049	1.645.789.146.429
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	6.394.737.205.622	4.855.706.875.572
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	9.525.162.333.752	7.945.015.527.711
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1.749.509.630.662	1.393.783.671.513
Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	8.932.751.868	4.361.213.393
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1.428.394.538.224	1.436.308.590.633
Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan	1.099.374.774.928	783.245.406.769
Jumlah	43.791.723.031.484	34.884.409.891.254

Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Tetap, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.

Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri, Beban Perjalanan Dinas Tetap Luar Negeri, dan Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Lainnya.

Beban Perjalanan Tahun 2018 mengalami kenaikan signifikan pada Beban Perjalanan Biasa dan Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting*. Beban Perjalanan Tahun 2018 terbesar terdapat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

E.2.1.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Rp40,36 triliun

Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2018 adalah sebesar Rp40.361.271.228.799. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.089.381.796.822 atau minus 7,11 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp43.450.653.025.621. Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berupa barang yang dibeli oleh pemerintah namun diserahkan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	20.285.122.978.607	18.764.527.056.029
Beban Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	18.206.747.221	49.027.000
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	20.027.851.008.336	24.493.640.754.204
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	-	1.693.210.000
Beban Persediaan untuk Dijual/diserahkan kepada Masyarakat	30.090.494.635	190.742.978.388
Jumlah	40.361.271.228.799	43.450.653.025.621

Pada tahun 2018, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda mengalami penurunan terutama pada Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2018 dengan jumlah yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

E.2.1.2.7 Beban Pembayaran Kewajiban Utang

Beban
Pembayaran
Kewajiban
Utang
Rp244,80
triliun

Beban Pembayaran Kewajiban Utang selama periode Tahun 2018 sebesar Rp244.805.005.384.622 merupakan Beban Bunga dari yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berlalunya waktu. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp27.764.651.714.419 atau 12,79 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp217.040.353.670.203. Beban Pembayaran Kewajiban Utang tersebut berasal dari Beban Pembayaran Kewajiban Utang pada Bagian Anggaran 999.01. Beban Pembayaran Kewajiban Utang Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Bunga Instrumen Pinjaman	21.331.207.774.570	17.409.612.471.278
Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	438.843.216.594	424.038.347.391
Beban Bunga Pinjaman Program	10.521.675.025.835	7.421.003.656.483
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Program	100.919.929.226	47.783.462.225
Beban Bunga Pinjaman Proyek	9.533.690.543.730	8.576.771.751.776
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	735.515.050.817	939.498.647.770
Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	564.008.368	516.605.633
Beban Bunga SBN	218.803.917.557.671	199.630.741.198.925
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	144.427.987.921.696	133.949.026.514.603
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	82.862.689.592	33.845.310.000
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	37.254.812.556.426	32.720.775.638.334
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	89.529.197.775	70.545.022.923
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	27.597.567.223.452	25.825.121.654.965
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang	31.602.995.000	50.555.585.000
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	9.295.028.481.230	6.947.447.169.801
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	24.526.492.500	33.424.303.300
Beban Diskon dan Pendapatan Premium yang Menambah dan Mengurangi Beban Bunga	4.669.880.052.381	
Jumlah	244.805.005.384.622	217.040.353.670.203

Beban Pembayaran Kewajiban Utang pada Tahun 2018 mengalami kenaikan signifikan pada Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah, Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas, dan Beban Bunga Pinjaman Program.

Nilai beban bunga atas SBN yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun 2018 termasuk nilai beban diskonto sebagai penambah nilai beban bunga dan nilai pendapatan premium sebagai pengurang nilai beban bunga. Nilai beban bunga atas beban diskonto dan pendapatan premium termasuk beban diskonto atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS).

Beban diskonto dan pendapatan premium pada Tahun 2017 masih menggunakan akun beban pembayaran bunga sebagai berikut.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
541211	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	9.096.788.011.050	6.105.574.800.371
541251	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Valas	278.335.300.500	-
541311	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	1.291.855.261.574	371.541.298.100
Jumlah		10.666.978.573.124	6.477.116.098.471

Pada Tahun 2018, beban diskonto dan pendapatan premium telah menggunakan akun yang telah disediakan dan disajikan sebagai berikut.

Akun	Uraian	Tahun 2018 (Audited)
542111	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Perbendaharaan Negara	4.549.720.436.000
541121	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara	(1.212.217.927.400)
542141	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara Valas	330.538.952.200
545111	Beban Pembayaran <i>Discount</i> SBSN - Jangka Panjang	(200.408.799.919)
545131	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Perbendaharaan Negara Syariah	1.202.247.391.500
Jumlah		4.669.880.052.381

E.2.1.2.8 Beban Subsidi

Beban Subsidi
Rp196,71
triliun

Beban Subsidi Tahun 2018 sebesar Rp196.719.559.440.096 merupakan Beban Subsidi dari BA 999.07. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp28.885.147.475.970 atau 17,21 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp167.834.411.964.126. Beban Subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Subsidi Minyak Solar	31.170.578.161.186	7.256.427.398.770
Beban Subsidi Minyak Tanah	3.151.544.787.072	1.904.842.122.253
Beban Subsidi Elpiji	54.867.972.112.102	43.763.759.684.348
Beban Subsidi Pangan	-	18.665.425.804.895
Beban Subsidi Listrik	48.101.754.165.145	45.738.215.039.563
Beban Subsidi Benih	-	764.685.996.611
Beban Subsidi Pupuk	31.204.983.758.555	27.488.258.355.598
Beban Subsidi PPh-DTP	10.714.023.989.644	8.861.035.862.196
Beban Subsidi BM-DTP	370.614.635.480	280.946.213.728
Beban Subsidi PT KAI	2.001.859.315.312	1.682.982.370.548
Beban Subsidi PT PELNI	1.877.169.078.654	1.906.905.507.413
Beban Subsidi dalam Rangka PSO Lainnya (KBN)	155.927.797.800	136.812.799.346
Beban Subsidi Bantuan Uang Mula Perumahan	837.448.000.000	834.480.000.000
Beban Subsidi Bunga KPR	2.413.742.864.095	1.190.908.323.782
Beban Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	9.198.526.756	39.434.492.233
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	29.348.058.401	30.136.759.180
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	7.710.610.390.234	2.750.753.157.508
Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR	13.422.500	-
Beban Subsidi Risiko Sharing KKP dan Energi	74.782.015	295.873.402
Beban Subsidi Kredit Sektor Peternakan	3.320.662.330	6.176.062.252
Beban Subsidi Kredit Resi Gudang	227.503.961	94.078.416
Beban Subsidi Estimasi	1.984.155.428.854	4.539.836.062.084
Jumlah	196.719.559.440.096	167.834.411.964.126

Nilai Beban Subsidi tahun 2018 yang signifikan terdapat pada Subsidi Elpiji, Subsidi Listrik, dan Subsidi Minyak Solar. Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya juga mengalami persentase kenaikan yang cukup besar. Adapun penurunan yang signifikan atas Beban Subsidi tahun 2018 terdapat pada Subsidi Pangan dan Subsidi Benih.

Beban Subsidi Estimasi merupakan jumlah tagihan belanja subsidi tahun 2018 yang belum dilakukan verifikasi oleh KPA sampai dengan 31 Desember 2018 dan seharusnya menjadi beban subsidi Tahun 2018. Kebijakan Beban Subsidi Estimasi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi. Beban Subsidi Estimasi sebesar Rp1.984.155.428.854 terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

E.2.1.2.9 Beban Hibah

Beban Hibah
Rp1.520,56
triliun

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut pada saat terjadinya transaksi. Beban Hibah selama Tahun 2018 sebesar Rp1.520.560.988.285. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.925.106.270.871 atau minus 72,08 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp5.445.667.259.156. Beban Hibah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah, Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri, dan Hibah Lainnya. Beban Hibah Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	54.481.623.000	-
Beban Hibah kepada Organisasi Internasional	-	22.547.908.280
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	1.465.989.051.764	5.423.119.350.876
Beban Hibah Lainnya	90.313.521	-
Jumlah	1.520.560.988.285	5.445.667.259.156

Beban Hibah tahun 2018 kepada Pemerintah Luar Negeri antara lain berupa Beban Hibah untuk memberangkatkan 500 jamaah haji miskin di Guinea Bissau, restorasi bencana gempa bumi di Papua Nugini, pemberian bantuan traktor tangan ke Pemerintah Fiji, dan pembangunan Indonesia Islamic Center kepada Pemerintah Afghanistan.

Beban Hibah juga mendukung kegiatan pemerintah daerah antara lain Hibah MRT pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Hibah Air Minum kepada 15 Pemda, Hibah *Water Resources and Irrigation Sector Management Project-APL2 (WISMP-2)* kepada 52 Pemda, Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (SAILG) kepada 6 Pemda, Hibah *Flood Management in Selected River Basins (FSMRB)* kepada Pemda Kab. Serang, Kab. Lebak, dan Kab. Pandeglang, Hibah *Biodiversity Conservation and Climate Protection in Gunung Leuser Ecosystem* kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Hibah *City Sewerage Project* kepada Pemerintah Kota Palembang, Hibah *Provincial Road Improvement and Maintenance* kepada Pemerintah Provinsi NTB dan Kab. Lombok Barat, Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* kepada 46 Pemda, Hibah Sanitasi kepada 55 Pemda, Hibah Air Minum kepada 198 Pemda, dan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana kepada 13 Pemda.

Beban Bantuan Sosial Rp82,46 triliun

E.2.1.2.10 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp82.465.242.445.242. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp26.606.732.270.040 atau 47,63 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp55.858.510.175.202. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang	240.242.618.650	312.083.934.625
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang	37.585.756.187.799	36.253.246.488.171
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang	3.164.141.449.000	2.397.123.317.502
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang	12.475.279.931.942	242.622.399.898
Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	18.616.939.314.479	12.952.704.236.842
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang	7.031.833.349.000	1.988.992.887.695
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang	848.128.786.039	759.913.568.528
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Jasa	2.502.920.808.333	951.823.341.941
Jumlah	82.465.242.445.242	55.858.510.175.202

Peningkatan signifikan pada Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 terdapat pada Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang dan Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang, sedangkan penurunan nilai terdapat pada Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang.

Beban Bantuan Sosial terdapat pada Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kementerian Agama.

Pemerintah terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Beban Bantuan Sosial digunakan antara lain untuk peningkatan Bantuan Pangan Non Tunai (semula disalurkan dalam bentuk Beras Sejahtera) untuk 15,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018, dan peningkatan target Program Keluarga Harapan (PKH) semula dari 6 juta KPM meningkat menjadi 10 juta KPM pada tahun 2018. Peningkatan Beban Bantuan Sosial juga signifikan untuk penanggulangan bencana alam khususnya Bencana di NTB dan Sulawesi Tengah serta bencana yang disebabkan oleh manusia seperti konflik yang terjadi di masyarakat.

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp769,69 triliun

E.2.1.2.11 Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 sebesar Rp769.694.450.184.060 merupakan Beban Transfer kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp34.545.156.333.795 atau 4,70 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp735.149.293.850.265. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Dana Bagi Hasil	106.140.461.465.325	81.648.610.327.750
Beban Dana Alokasi Umum	401.489.579.649.000	398.582.314.748.000
Beban Dana Alokasi Khusus Fisik	58.149.298.269.245	62.055.298.711.176
Beban Dana Otonomi Khusus	20.059.583.186.000	19.443.292.590.000
Beban Dana Keistimewaan DIY	962.772.688.443	773.435.532.429
Beban Dana Insentif Daerah (DID)	8.230.750.000.000	7.500.000.000.000
Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik	114.802.596.316.772	105.383.354.003.094
Beban Dana Desa	59.859.408.609.275	59.762.987.937.816
Jumlah	769.694.450.184.060	735.149.293.850.265

Besarnya bagian masing-masing dana transfer dapat dilihat dalam Grafik 30 berikut.



Grafik 30. Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018

Beban Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Tahun 2018 adalah sebesar Rp106.140.461.465.325. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24.491.851.137.575 atau 30,00 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp81.648.610.327.750. Dana Bagi Hasil Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	26.982.923.728.366	23.569.954.663.020
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	1.881.345.263.440	1.571.540.526.139
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Provinsi	3.181.650.100.692	2.798.264.913.061
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	12.616.952.097.642	10.998.013.719.294
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Provinsi	94.539.271.512	52.744.051.400
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	428.607.668.790	429.523.455.012
Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota	1.920.863.967.650	1.703.244.275.599
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	15.065.174.948.231	9.026.906.109.066
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0,5%	495.733.751.842	299.269.621.906
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus	763.755.981.148	182.330.166.900
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi	10.079.889.654.768	6.251.178.559.669
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0,5%	142.508.695.650	103.468.628.284
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	1.205.967.383.357	98.124.808.600
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	436.500.001.253	375.281.426.095
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	23.814.433.296.091	18.635.249.847.283
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerinah	1.802.117.507.488	727.330.390.743
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	21.149.789.282	18.072.611.932
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi – Iuran Produksi (Royalti)	1.193.921.148	1.200.044.733
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	81.385.756.405	33.009.962.856
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	913.131.399.094	734.619.089.478
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	792.807.965.746	691.941.729.488
Beban Dana Bagi Hasil Perikanan	359.001.100.482	392.940.307.926
Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.058.828.215.248	2.954.401.419.266
Jumlah	106.140.461.465.325	81.648.610.327.750

Beban Dana Alokasi Umum

Beban Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2018 adalah sebesar Rp401.489.579.649.000 yaitu Beban DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU merupakan transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nilai DAU Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp2.907.264.901.000 atau 0,73 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp398.582.314.748.000.

Beban Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 adalah sebesar Rp58.149.298.269.245. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Nilai DAK Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.906.000.441.931 atau minus 6,29 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp62.055.298.711.176.

Beban DAK Fisik Tahun 2018 terdiri dari DAK Reguler sebesar Rp29.411.961.830.062, DAK Infrastruktur Publik Daerah sebesar Rp22.482.775.199.874, dan DAK Afirmasi sebesar Rp6.254.561.239.309.

Beban Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Tahun 2018 adalah sebesar Rp20.059.583.186.000. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp616.290.596.000 atau naik 3,17 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp19.443.292.590.000. Dana Otonomi khusus Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	8.029.791.593.000	7.971.646.295.000
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.620.854.115.000	5.580.152.407.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.400.000.000.000	2.625.000.000.000
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.408.937.478.000	2.391.493.888.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.600.000.000.000	875.000.000.000
Jumlah	20.059.583.186.000	19.443.292.590.000

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2018 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang telah terbayar setelah dikurangi dengan lebih salur pada periode tersebut. Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2018 adalah sebesar Rp962.772.688.443 merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DIY. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp189.337.156.014 atau 24,48 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp773.435.532.429. Beban Dana Keistimewaan DIY tahun 2018 tersebut telah memperhitungkan pengakuan lebih salur atas transfer Dana Keistimewaan DIY selama periode TA 2018.

Beban Dana Insentif Daerah

Beban Dana Insentif Daerah Tahun 2018 sebesar Rp8.230.750.000.000 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode TA 2018. Beban Dana Insentif Daerah tersebut naik sebesar Rp730.750.000.000 atau 9,74 persen dibandingkan dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp7.500.000.000.000. Tidak terdapat lebih/kurang transfer Dana Insentif Daerah pada Tahun 2018. Dana Insentif Daerah bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan fiskal daerah, pelayanan dasar, dan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2018 adalah sebesar Rp114.802.596.316.772. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.419.242.313.678 atau 8,94 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp105.383.354.003.094. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	55.016.720.212.332	49.929.771.976.077
Beban Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.727.102.404.861	1.403.689.814.100
Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	588.007.130.574	942.916.401.139
Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	43.869.668.298.339	43.370.249.664.344
Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan	7.454.358.890.915	5.407.224.385.828
Beban Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.753.419.417.979	245.107.978.781
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	92.221.616.897	90.237.480.533
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan	-	(4.773.800.000)
Beban Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	745.193.742.984	750.000.000.000
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD)	3.555.904.601.891	3.248.930.102.292
Jumlah	114.802.596.316.772	105.383.354.003.094

Beban DAK Non Fisik memperhitungkan lebih salur Dana BOS TA 2018 yang diakui sebagai pengurang beban Dana BOS. Persentase peningkatan DAK Non Fisik terbesar terdapat pada Beban Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

Dana Desa

Beban Dana Desa Tahun 2018 adalah sebesar Rp59.859.408.609.275. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp96.420.671.459 atau 0,16 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp59.762.987.937.816. Beban ini meliputi penyaluran anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta kemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peningkatan Beban Dana Desa pada tahun 2018 disebabkan karena Dana Desa TA 2018 dialokasikan kepada 74.958 desa atau bertambah sebanyak 4 desa dibandingkan tahun 2017 sebanyak 74.954 desa.

E.2.1.2.12 Beban Lain-Lain

*Beban Lain-lain
Rp79,82 triliun*

Beban Lain-lain selama periode Tahun 2018 sebesar Rp79.829.317.279.532. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp42.052.727.924.266 atau 111,32 persen dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp37.776.589.355.266. Beban Lain-lain Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	-	29.061.724.858
Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	476.925.386.855	-
Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	60.642.204.092	38.700.170.872
Beban Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	1.032.465.610	2.808.777.900
Beban Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	537.049.670.791	337.108.842.898
Beban Lain-lain BUN Lainnya	10.256.466.000.000	3.600.000.000.000
Beban Lain-lain	2.085.292.769.784	2.189.006.307.261
Beban Pihak Ketiga Migas	39.433.405.824.736	30.817.021.745.678
Beban Pembayaran Reimbursement PPN	424.290.825.638	228.205.097.449
Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi	255.415.175.912	-
Beban Diestimasi Reimbursement PPN dan Penggantian Bonus Produksi	439.095.791.317	534.676.688.350
Beban Diestimasi - PBB Panas Bumi	227.031.945.250	-
Beban Penyesuaian Nilai Investasi	25.632.669.219.547	-
Jumlah	79.829.317.279.532	37.776.589.355.266

Nilai yang paling signifikan pada Beban Lain-lain terdapat pada Beban Pihak Ketiga Migas, Beban Penyesuaian Nilai Investasi, dan Beban Lain-lain BUN Lainnya. Beban Pihak Ketiga Migas sebesar Rp39.433.405.824.736 terdiri dari *Underlifting* KKKs, *DMO fee* KKKs, *Reimbursement* PPN KKKs, dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN ke Pemda.

Beban Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp25.632.669.219.547 merupakan penurunan nilai

investasi permanen lainnya yang bersumber dari defisit PTNBH Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Padjajaran, dan BPJS Kesehatan; bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan BUMN Persero dan BUMN Perum, serta penurunan nilai aset keuangan berdasarkan hasil penilaian nilai wajar di pasar aktif pada tanggal 31 Desember 2018 pada aset keuangan yang memenuhi karakteristik untuk siap setiap saat dijual (*available for sale*).

Adapun Beban Lain-lain BUN Lainnya sebesar Rp10.256.466.000.000 merupakan beban untuk mencatat penyaluran Dana Program JKN yang telah disalurkan kepada BPJS pada Tahun 2018.

E.2.1.2.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp172,04
triliun

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 adalah sebesar Rp172.046.636.562.132. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp27.203.950.009.246 atau 18,78 persen dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp144.842.686.552.886. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	56.063.855.416.809	47.253.139.476.514
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.775.829.859.799	7.123.990.674.523
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU	-	67.304.325
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	41.079.673.570.825	40.202.160.771.151
Beban Penyusutan Irigasi	8.769.015.107.863	7.787.180.703.026
Beban Penyusutan Jaringan	1.811.637.508.046	1.769.276.236.124
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.240.398.161.993	2.368.972.409.329
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU	-	14.823.248
Beban Amortisasi Hak Cipta	1.970.621.901	2.279.069.483
Beban Amortisasi Paten	11.365.450.298	10.801.350.135
Beban Amortisasi Software	1.586.121.075.234	1.518.495.770.976
Beban Amortisasi Lisensi	274.026.136.330	187.149.358.179
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	297.121.407.251	251.925.571.662
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	6.683.119.444	18.511.597.488
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	124.289.345.137	110.698.638.439
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	(88.383.368)	
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	23.348.452.533.888	4.498.446.630.908
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama	24.831.323.877.527	25.655.750.596.426
Beban Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA	3.170.941.883	2.673.868.611
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	2.134.114.441.323	2.141.552.385.925

Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	2.684.647.299.307	3.938.570.033.052
Beban Penyusutan Aset <i>Idle</i> yang Sudah Diserahkan ke DJKN	437.351.106	365.048.513
Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN	2.591.719.536	664.234.849
Jumlah	172.046.636.562.132	144.842.686.552.886

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 mengalami peningkatan signifikan terutama pada Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah, Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN, Beban Amortisasi Lisensi, dan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebar pada K/L dengan nilai terbesar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bendahara Umum Negara (BA 999.99), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E.2.1.2.14 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih minus
Rp24,46 triliun

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2018 adalah sebesar Rp24.468.561.489.547. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp53.360.788.906 atau 0,22 persen dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp24.415.200.700.641. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2018. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Non Migas	4.523.829.453.402	14.720.933.154.760
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPN	3.158.796.390.646	(321.455.391.552)
Beban Penyisihan Piutang Piutang Tidak Tertagih - PPhBM	179.269.781.943	63.523.241.361
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PBB dan BPHTB	961.719.364.713	(330.770.978.196)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai	76.050.814.202	(2.956.425.989)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	573.898.365.022	6.493.746.394.384
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	7.009.810.653	631.330.037.665
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	5.408.785.349.422	1.544.128.801.208
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	9.403.592.670.154	(251.982.115.300)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	(321.624.478.370)	1.088.382.766.626
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Subsidi	(1.395.591.788)	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(41.075.382)	(59.635.416)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	22.518.884.888	7.011.291.155

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	(143.407)	99.423.323
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	133.543.204.403	195.748.450.269
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	295.061.131.922	392.105.543.132
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa BLU	557.381.177	971.528.862
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non Operasional Lainnya BLU	129.375.581	4.235.069.394
Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih	192.604.162.311	163.368.263.955
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran	(95.984.813)	(392.355.518)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	(82.110.074.750)	5.857.888.807
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR BLU	(56.209.583)	1.472.745.486
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(63.481.092.799)	9.903.002.225
Jumlah	24.468.561.489.547	24.415.200.700.641

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang signifikan pada Tahun 2018 terdapat pada Bendahara Umum Negara (BA 999.99), Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM.

E.2.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional Defisit Rp145,29 triliun

Defisit Kegiatan Non Operasional selama periode Tahun 2018 sebesar Rp145.291.236.291.926 berasal dari defisit pelepasan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit kegiatan non operasional lainnya. Dibandingkan dengan surplus Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 yaitu sebesar Rp72.167.768.893.859, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp217.459.005.185.785 atau minus 301,32 persen. Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E.2.2.1 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Rp4,53 triliun

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2018 sebesar Rp4.530.025.396.873. Defisit ini turun sebesar Rp47.059.653.048.609 atau minus 91,22 persen dari Tahun 2017 yaitu sebesar Rp51.589.678.445.482. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp392.274.523.533 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp4.922.299.920.406.

E.2.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp392,27 miliar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2018 adalah sebesar Rp392.274.523.533. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp157.954.424.409 atau 67,41 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp234.320.099.124.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari K/L yaitu ketika pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	5.711.186.853	817.437.691
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	76.064.406.719	22.374.742.651
Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	9.327.477.116	3.660.651.656
Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa	-	1.416.464.500
Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	135.365.000	114.500
Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	7.130.000	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	226.000.424.634	158.481.872.062
Pendapatan Pelepasan Aset	75.028.533.211	47.568.816.064
Jumlah	392.274.523.533	234.320.099.124

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2018 terbesar terdapat pada Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, dan Pendapatan Pelepasan Aset. Pendapatan tersebut terutama berasal dari Bendahara Umum Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

E.2.2.1.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp4,92 triliun

Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2018 adalah sebesar Rp4.922.299.920.406. Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp46.901.698.624.200 atau minus 90,50 persen dibanding Tahun 2017 sebesar Rp51.823.998.544.606.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya) karena Satuan Kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset tersebut dapat berupa penghapusan, penjualan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan penggunaan/konsumsi aset/material persediaan di KKKS untuk operasional hulu migas.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	4.922.299.920.406	51.334.328.106.767
Beban Penyesuaian Nilai Investasi	-	489.670.437.839
Jumlah	4.922.299.920.406	51.823.998.544.606

Beban Pelepasan Aset Non lancar terdapat pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp4.697.211.517.662 dan pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp225.088.402.744. Beban Pelepasan Aset Non lancar paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.213.821.494.641, Kementerian Desa dan PDT sebesar Rp708.860.995.690, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp555.029.268.160.

Pada Tahun 2018 untuk Beban Pelepasan Aset Non Lancar berupa beban material persediaan yang digunakan oleh KKKS dalam operasional hulu migas sesuai karakteristiknya disajikan pada beban kegiatan non operasional lainnya.

*Surplus/(Defisit)
) Penyelesaian
Kewajiban Jk.
Panjang minus
Rp2,78 miliar*

E.2.2.2 Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2018 adalah sebesar Rp2.787.500.000. Defisit ini turun sebesar Rp118.009.822.243 atau minus 97,69 persen dibandingkan defisit Tahun 2017 sebesar Rp120.797.322.243. Defisit tersebut berasal dari BA BUN 999.01. Surplus/(Defisit) tersebut terkait Pembayaran *Loss on Bond Redemption/Debt Switching* SBN atau Pembelian Kembali Obligasi Negara.

*Pendapatan
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang
Rp0.*

E.2.2.2.1 Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang selama periode Tahun 2018 adalah sebesar Rp0. Pendapatan ini turun sebesar Rp5.631.521.326 atau minus 100 persen dibanding Tahun 2017 sebesar Rp5.631.521.326. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan sebagai akibat pembelian kembali obligasi negara jangka panjang.

*Beban
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang
Rp2,78 miliar*

E.2.2.2.2 Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2018 adalah sebesar Rp2.787.500.000. Beban ini turun sebesar Rp123.641.343.569 atau minus 97,8 persen dibanding Tahun 2017 sebesar Rp126.428.843.569. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang berasal dari BA BUN 999.01 yang terkait dengan beban pembelian kembali obligasi negara/Pembayaran *Loss on Bond Redemption/debt switching* SBN.

*Surplus/
(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya minus
Rp140,75
triliun*

E.2.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2018 adalah sebesar Rp140.758.423.395.053. Nilai tersebut turun sebesar Rp264.636.668.056.637 atau minus 213,63 persen dibanding Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2017 yaitu sebesar Rp123.878.244.661.584. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp59.843.747.196.323 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp200.602.170.591.376.

*Pendapatan
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp59,84 triliun*

E.2.2.3.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp59.843.747.196.323. Nilai tersebut turun sebesar Rp132.964.819.799.945 atau minus 68,96 persen dibanding Tahun 2017 sebesar Rp192.808.566.996.268. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari K/L dan BA BUN. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan BLU Lainnya	41.441.438.303	-
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I	2.333.080.777.546	46.457.400
Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman	-	59.898.701.956
Pendapatan dari Selisih Kurs	-	62.796.449
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu II	134.428.329.188	2.096.996.797.693
Pendapatan dari Hibah yang belum disahkan	-	86.711.899
Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	206.060.348	-
Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	33.331.717.804	11.298.199.899
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	10.221.964.532.595	1.829.592.945.242
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi – BLU	6.098.982.711	938.347.918
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	78.326.034.166	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran yang Lalu	-	545.258.313
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	672.266	78.770.454.797.959
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	17.673.419.787.369	87.159.715.730.708
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	28.664.240.214.347	22.831.321.364.280
Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	656.894.080.880	1.651.871.552
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	314.568.800	-
Pendapatan Pelepasan Aset	-	45.957.015.000
Jumlah	59.843.747.196.323	192.808.566.996.268

Besarnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang signifikan terdapat pada Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan, Pendapatan Perolehan Aset Lainnya, Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi, dan Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu (terutama Bantuan Sosial). Selisih kurs belum terealisasi merupakan perbedaan nilai mata uang antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan.

E.2.2.3.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp200.602.170.591.376. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp131.671.848.256.692 atau 191,02 persen dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp68.930.322.334.684. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

*Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp200,60
triliun*

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan	2.813.451.079	371.925.930
Beban Selisih Harga SBN	-	1.628
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	25.981.938.354.598	25.711.249.619.654
Kerugian Persediaan Rusak/Usang dan Pembulatan	168.777.433.477	383.619.668.517
Beban Penghapusan Piutang TPITGR Kementerian Lembaga	1.897.445.254	195.564.500
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	111.584.564.231.171	42.802.551.367.682
Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	3.677.279.036	4.013.455.630
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	63.754.326.447	2.443.197.655
Beban Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi	-	25.537.272.827
Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	108.940.331.089	340.260.661
Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	6.430.019.496	-
Pembulatan	(3)	-
Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan	4.646.507.417.333	-
Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya	58.032.870.302.399	-
Jumlah	200.602.170.591.376	68.930.322.334.684

Besarnya beban dari kegiatan non operasional lainnya yang signifikan terdapat pada Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi, Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya, Beban Penyesuaian Nilai Persediaan, dan Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terutama berasal dari Bendahara Umum Negara (999), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pertahanan.

Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp58.032.870.302.399 adalah beban atas adanya kewajiban Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp50.317.380.995.216 (termasuk PPN sebesar Rp1.807.731.903.387 dan PBBKP sebesar Rp903.865.951.693), PT PLN (Persero) sebesar Rp7.456.451.880.403, dan kepada PT AKR Corporation sebesar Rp259.037.426.780. Kewajiban terhadap PT Pertamina (Persero) akibat kekurangan pendapatan karena penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran JBT Solar Tahun 2017 dan 2018. Kewajiban Pemerintah kepada PT PLN (Persero) akibat penetapan tarif di bawah Biaya Pokok Penyediaan Listrik Non Subsidi.

Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan adalah beban material persediaan yang digunakan oleh KKKS dalam operasional hulu migas.

*Pos Luar Biasa
minus Rp0*

E.2.3 POS LUAR BIASA

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Tidak terdapat Pos Luar Biasa pada Tahun 2018.

*Pendapatan
Luar Biasa Rp0*

E.2.3.1 Pendapatan Luar Biasa

Tidak terdapat transaksi pendapatan luar biasa pada Tahun 2018.

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa Pemerintah Pusat, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

*Beban Luar
Biasa Rp0*

E.2.3.2 Beban Luar Biasa

Tidak terdapat transaksi Beban Luar Biasa pada Tahun 2018.

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1 SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2018 sebesar Rp208,50 triliun

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp208.506.122.640.283, yang merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2017. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas TA 2017 sebesar Rp174.076.715.164.142, Saldo Awal Kas TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp34.429.407.476.141.

Rincian Saldo Awal Kas adalah sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Saldo Awal Kas:		
Kas BUN di BI	91.287.531.283.185	81.150.105.652.341
Kas di KPPN	2.282.077.569.283	1.818.956.055.570
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	3.905.763.616.742	1.538.381.222.069
Kas Transitoris	(472)	(43.855.342.084)
Kas Escrow	65.211.736.255.835	53.822.105.986.135
Kas pada BLU yang telah disahkan	40.984.519.890.383	32.440.062.300.360
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	4.834.494.025.327	3.350.959.289.659
Saldo Awal Kas	208.506.122.640.283	174.076.715.164.050

Ket: Saldo Awal Kas pada Tahun 2017 menurut SPAN adalah sebesar Rp174.076.715.164.142, terdapat selisih Rp92 karena pembulatan pada saat migrasi data ke sistem aplikasi terintegrasi LKPP.

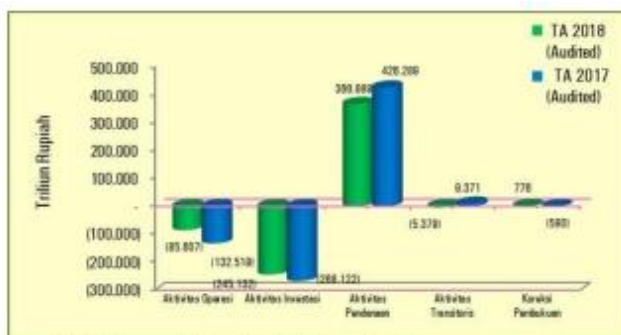
F.1.2 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan Kas sebesar Rp31,64 triliun

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(85.606.836.614.663)	(132.518.715.897.464)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(245.132.313.372.320)	(268.122.368.777.814)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	366.988.807.449.803	426.289.009.273.320
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	(5.378.953.624.562)	9.371.459.675.688
Koreksi Pembukuan ^{*)}	775.775.692.984	(589.976.797.589)
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Koreksi	31.646.479.531.242	34.429.407.476.141

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas disajikan dalam Grafik 31.



Grafik 31. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

*) Koreksi Pembukuan sebesar Rp775.775.692.984, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Koreksi SILPA	1.079.553.470.113
2.	Selisih Kurs Belum Terealisasi (<i>Unrealized</i>)	(312.233.301.456)
3.	Akumulasi Koreksi Pembukuan	8.455.524.327
Total Koreksi Pembukuan		775.775.692.984

Koreksi Pembukuan terdiri dari:

1. Koreksi SILPA sebesar Rp1.079.553.470.113 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar minus Rp725.035.951.720 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SILPA sebesar Rp1.804.589.421.833. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Pendapatan senilai Rp303.519.711.177 dan transaksi pengembalian Hibah senilai Rp421.516.240.543.
2. Selisih Kurs Belum Terealisasi (*Unrealized*) sebesar minus Rp312.233.301.456 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
3. Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar Rp8.455.524.327, terdiri dari:
 - a. Koreksi Kas BLU terdapat pada KPPN sebagai berikut.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Medan I (004)	35.769.409.000
2	KPPN Pekanbaru (008)	(11.817.783)
3	KPPN Padang (010)	2.720.256.087
4	KPPN Jambi (012)	64.763.677.813
5	KPPN Jakarta II (019)	774.905.031
6	KPPN Bandung I (022)	4.702.983.427
7	KPPN Yogyakarta (030)	1.803.659.244
8	KPPN Malang(032)	11.139.666.297
9	KPPN Denpasar (037)	(2.126.212.692)
10	KPPN Mataram (038)	(9.264.248.000)
11	KPPN Kupang (039)	230.821.103
12	KPPN Pontianak (042)	145.401.272.779

13	KPPN Samarinda (046)	(15.648.410.693)
14	KPPN Makassar I (054)	59.649.287
15	KPPN Ambon (061)	38.130.289.218
16	KPPN Jakarta III (088)	2.673.895.358
17	KPPN Jakarta VI (175)	3.613.621.950
18	KPPN Medan II (123)	25.244.706
		284.758.662.132

b. Koreksi Kas Hibah terdapat pada KPPN sebagai berikut.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Tanjung Pinang (009)	(214.302.698)
2	KPPN Kupang (039)	(3.485.645.844)
3	KPPN Tarakan (048)	(227.827.000)
4	KPPN Palu (051)	(1.003.383.795)
5	KPPN Bojonegoro (073)	(622.903.197)
6	KPPN Tanjung Selor (185)	227.827.000
7	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140)	(92.073.597)
		(5.418.309.131)

c. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp270.884.828.691 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi kas.

d. Koreksi kas SUBRKUN Kuasa BUN Pusat dan Koreksi Kas Escrow sebesar minus Rp12 disebabkan oleh penyesuaian saldo akun kas karena penutupan rekening di Tahun Anggaran 2018

e. Koreksi pembulatan Kas RPL sebesar minus Rp5 disebabkan oleh penyesuaian saldo kas RPL dan utang kepada pihak ketiga oleh UAPBUN AP Tahun Anggaran 2018.

f. Koreksi pembulatan sebesar Rp34.

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp178,62 triliun

F.1.3 SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp178.625.211.629.388 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Saldo Akhir Kas¹⁾	240.152.602.171.525	208.506.122.640.283
Kas di Bendahara Pengeluaran	285.150.273.469	210.828.164.140
Kas di Bendahara Penerimaan	92.280.796.378	105.738.412.756
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang Telah Disahkan ²⁾	2.911.840.057.154	2.845.838.264.767
Kas pada BLU yang Belum Disahkan ³⁾	-	(7.391.778.396)
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)	(6.215.489.058.582)	(12.204.408.488.386)
Kas/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) ⁴⁾	(58.601.172.611.021)	(65.211.736.255.835)
Kas Transito (Kiriman Uang) ⁵⁾	465	330.588.756.091
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	178.625.211.629.388	134.575.579.715.420

) Saldo Akhir Kas sebesar Rp240.152.602.171.525 merupakan saldo awal kas ditambah dengan kenaikan (penurunan) kas setelah koreksi pada periode tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Rekening Kas BUN di BI	114.834.181.946.110	91.287.531.283.185
Rekening Kas di KPPN	5.127.777.217.073	2.282.077.569.283
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	55.010.642.052.353	40.984.519.890.383
Hibah Langsung K/L yang Sudah Disahkan	726.888.630.744	4.834.494.025.327
Saldo Akhir Kas Rekening Pemerintah Lainnya	5.851.939.714.224	3.905.763.616.742
Saldo Akhir Kas Transitoris	-	(472)
Saldo Akhir Aset Lainnya (Kas Rekening Escrow)	58.601.172.611.021	65.211.736.255.835
Jumlah	240.152.602.171.525	208.506.122.640.283

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2018 sebesar Rp55.010.642.052.353 termasuk Kas yang didepositokan (investasi jangka pendek BLU) sebesar Rp6.215.489.058.582 oleh Satker BLU.

) Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang Sudah Disahkan sebesar Rp2.911.840.057.154 berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp3.638.728.687.898 dikurangi dengan Kas dari Hibah Langsung Kementerian/Lembaga yang sudah disahkan sebesar Rp726.888.630.744.

) Kas pada BLU Yang Belum Disahkan sebesar Rp0, dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Total Kas pada BLU menurut K/L	48.795.152.993.771	28.772.719.623.601
Ditambah:		
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	6.215.489.058.582	12.204.408.488.386
	55.010.642.052.353	40.977.128.111.987
Dikurangi:		
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	55.010.642.052.353	40.984.519.890.383
Kas pada BLU yang belum disahkan	-	(7.391.778.396)

) Saldo Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp58.601.172.611.021 merupakan Saldo Kas Rekening Escrow yang pada Neraca LKPP disajikan dalam komponen Aset Lainnya (bukan sebagai komponen Kas dan Setara Kas).

) Kas Transito (Kiriman Uang) merupakan total selisih kiriman uang TA 2018, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)
Kas Dalam Transito (Neraca)	465
Kas Transitoris (LAK)	-
Kas Transito (Kiriman Uang)	465

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Operasi
sebesar minus
Rp85,60 triliun

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut.

F.2.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2018. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar minus Rp85.606.836.614.663 dan minus Rp132.518.715.897.464, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Arus Kas Masuk	1.943.383.353.170.059	1.666.176.424.073.576
Dikurangi Arus Kas Keluar	2.028.990.189.784.722	1.798.695.139.971.040
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	(85.606.836.614.663)	(132.518.715.897.464)

Dengan demikian, terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp46.911.879.282.801 atau 35,40 persen dari TA 2017.

Dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2018 sebesar minus Rp85.606.836.614.663 menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah masih belum mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Terdapat kenaikan arus kas masuk pada Tahun 2018 jika dibandingkan dengan Tahun 2017 yang mengindikasikan terjadinya peningkatan realisasi penerimaan negara baik dari perpajakan, PNPB maupun hibah. Namun demikian, arus kas keluar masih lebih tinggi dibandingkan arus kas masuk yang disebabkan oleh tingginya belanja Pemerintah.

F.2.1.1 Arus Kas Masuk

F.2.1.1.1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan
Perpajakan sebesar
Rp1.518,78 triliun

Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2018 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Penerimaan Perpajakan TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp1.518.789.777.151.030 dan Rp1.343.529.843.798.510, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Pajak Dalam Negeri		
Pendapatan Pajak Penghasilan	749.977.029.683.808	646.793.472.957.381
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	537.267.909.259.284	480.724.607.483.756
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	19.444.913.884.758	16.770.346.937.156
Pendapatan BPHTB	32.748.454	1.216.911.547
Pendapatan Cukai	159.388.552.586.225	153.288.149.392.121
Pendapatan Pajak Lainnya	6.629.526.207.843	6.738.475.546.078
Jumlah Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.472.907.964.370.352	1.304.316.269.228.039
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	39.116.746.986.751	35.066.181.439.852
Bea Keluar	6.765.065.793.927	4.147.393.130.619
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	45.881.812.780.678	39.213.574.570.471
Penerimaan Perpajakan	1.518.789.777.151.030	1.343.529.843.798.510

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp175.259.933.352.520 atau 13,04 persen dari TA 2017.

F.2.I.I.I.1 Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp749,97 triliun

Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Pajak Penghasilan Non Migas. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp749.977.029.683.808 dan Rp646.793.472.957.381, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan PPh Migas		
Pendapatan PPh Minyak Bumi	26.549.508.906.106	16.599.430.743.163
Pendapatan PPh Gas Bumi	38.115.852.120.909	33.711.719.453.816
Pendapatan PPh Migas Lainnya	33.784.424.907	4.600.547.804
Jumlah Pendapatan PPh Migas	64.699.145.451.922	50.315.750.744.783
Pendapatan PPh Non Migas		
Pendapatan PPh Pasal 21	134.914.657.190.069	117.764.553.599.746
Pendapatan PPh Pasal 22	18.008.015.831.134	16.172.671.971.729
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	54.723.505.867.454	43.156.722.093.470
Pendapatan PPh Pasal 23	39.739.217.510.968	34.005.879.655.650
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	9.406.726.317.202	7.806.580.852.307
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	252.131.439.879.614	206.550.829.248.758
Pendapatan PPh Pasal 26	50.638.032.804.063	43.691.062.125.980
Pendapatan PPh Final dan Fiskal LN	115.462.608.241.234	106.311.286.059.450
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	10.111.755.590.449	8.933.799.207.486
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	141.924.999.699	12.084.337.398.022
Jumlah Pendapatan PPh Non Migas	685.277.884.231.886	596.477.722.212.598
Jumlah Pendapatan Pajak Penghasilan	749.977.029.683.808	646.793.472.957.381

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp103.183.556.726.427 atau 15,95 persen dari TA 2017.

F.2.I.I.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan PPN sebesar Rp537,26 triliun

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp537.267.909.259.264 dan Rp480.724.607.483.756, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	333.921.320.457.564	314.342.826.531.220
Pendapatan PPN Impor	186.400.182.247.898	149.034.796.849.454
Pendapatan PPN Lainnya	68.708.364.877	150.814.235.849
Pendapatan PPhBM Dalam Negeri	12.794.658.786.886	13.292.538.563.625
Pendapatan PPhBM Impor	4.108.005.284.889	3.796.354.314.090
Pendapatan PPhBM Lainnya	(24.965.882.850)	107.276.989.518
Jumlah PPN dan PPhBM	537.267.909.259.264	480.724.607.483.756

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp56.543.301.775.508 atau 11,76 persen dari TA 2017.

Pendapatan PBB
sebesar Rp19,44
triliun

F.2.1.1.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp19.444.913.884.758 dan Rp16.770.346.937.156, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan PBB Pedesaan	396.446.920	-
Pendapatan PBB Perkebunan	2.188.577.469.904	2.175.377.454.058
Pendapatan PBB Kehutanan	756.237.733.965	595.957.370.926
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	1.718.416.162.627	1.480.177.403.749
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	14.381.978.062.129	12.230.011.698.753
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	313.275.381.204	253.462.867.931
Pendapatan PBB Lainnya	86.032.628.009	35.360.141.739
Jumlah Pendapatan PBB	19.444.913.884.758	16.770.346.937.156

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp2.674.566.947.602 atau 15,95 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.1.4 Pendapatan BPHTB

Pendapatan BPHTB
sebesar Rp32,74
juta

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp32.748.454 dan Rp1.216.911.547. Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan BPHTB sebesar Rp1.184.163.093 atau 97,31 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.1.5 Pendapatan Cukai

Pendapatan Cukai
sebesar Rp159,58
triliun

Pendapatan Cukai pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp159.588.552.586.225 dan Rp153.288.149.392.121, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	152.941.410.762.377	147.719.216.343.096
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	139.235.597.580	147.122.735.280
Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	6.418.775.169.760	5.567.468.557.500
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	76.696.556.557	(158.239.602.120)
Pendapatan Cukai Lainnya	12.434.499.951	12.581.358.365
Jumlah Penerimaan Cukai	159.588.552.586.225	153.288.149.392.121

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Cukai sebesar Rp6.300.403.194.104 atau 4,11 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.1.6 Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Pajak
Lainnya sebesar
Rp6,62 triliun

Pendapatan Pajak Lainnya pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp6.629.526.207.843 dan Rp6.738.475.546.078, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan dari Penjualan Benda Materi	5.455.839.042.895	5.082.167.687.070
Pendapatan PPh Batubara	656.409.788.263	982.575.599.538
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	27.615.845.263	33.451.910.552
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak:		
- Pendapatan Bunga Penagihan PPh	(14.087.087.862)	406.970.758.069
- Pendapatan Bunga Penagihan PPN	499.442.551.458	232.614.159.194
- Pendapatan Bunga Penagihan PPhBM	1.166.073.449	493.203.415
- Pendapatan Bunga Penagihan PTL	3.139.994.377	202.228.240
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	6.629.926.207.843	6.738.475.546.078

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp108.949.338.235 atau 1,62 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.1.7 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan Pajak
Perdagangan
Internasional sebesar
Rp45,88 triliun

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp45.881.812.780.678 dan Rp39.213.574.570.471, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Bea Masuk		
Pendapatan Bea Masuk	37.407.985.838.439	33.495.272.858.547
Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	743.750	-
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	274.134.580.810	582.649.947.955
Pendapatan Bea Masuk dalam rangka KITE	625.126.712.146	457.334.656.735
Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu Yang Pengangkutannya di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	19.682.000	-
Pendapatan BM - DTP	370.614.635.480	280.946.213.728
Pendapatan Pabean Lainnya	11.675.815.285	5.181.494.887
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	247.390.857.841	182.509.916.000
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	44.227.000	2.105.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	179.753.894.000	62.284.247.000
Jumlah Pendapatan Bea Masuk	39.116.746.986.751	35.066.181.439.852
Pendapatan Bea Keluar		
Pendapatan Bea Keluar	6.763.961.349.944	4.137.811.636.557
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	1.079.891.983	9.287.233.578
Pendapatan Bunga Bea Keluar	24.552.000	294.260.484
Jumlah Pendapatan Bea Keluar	6.765.065.793.927	4.147.393.130.619
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	45.881.812.780.678	39.213.574.570.471

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp6.668.238.210.207 atau 17,00 persen dari TA 2017.

PNBP sebesar
Rp409,02 triliun

F.2.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk Penerimaan dari Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU dikurangi dengan pengembalian PNBP. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp409.028.715.779.709 dan Rp311.016.765.272.576, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Sumber Daya Alam	180.592.649.823.641	111.132.042.413.912
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	45.060.521.375.969	43.904.217.111.673
Pendapatan PNBP Lainnya	128.282.486.329.481	108.635.073.191.043
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	55.093.058.250.618	47.345.432.555.948
Jumlah PNBP	409.028.715.779.709	311.016.765.272.576

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp98.011.950.507.133 atau 31,51 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan SDA sebesar Rp180,59 triliun

Pendapatan Sumber Daya Alam merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam. Pendapatan Sumber Daya Alam TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp180.592.649.823.641 dan Rp111.132.042.413.912, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	101.486.695.315.900	58.203.042.976.236
Pendapatan Gas Bumi	41.302.551.779.459	23.639.900.993.613
Pendapatan Pertambangan Umum	30.313.666.621.680	23.763.165.037.383
Pendapatan Kehutanan	4.760.407.698.602	4.101.918.540.911
Pendapatan Perikanan	448.751.885.603	491.033.529.369
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	2.280.576.522.397	932.981.336.400
Jumlah Pendapatan Sumber Daya Alam	180.592.649.823.641	111.132.042.413.912

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp69.460.607.409.729 atau 62,50 persen dari TA 2017.

Pendapatan KND sebesar Rp45,06 triliun

F.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Kekayaan Negara Dipisahkan.

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp45.060.521.375.969 dan Rp43.904.217.111.673, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Laba BUMN Perbankan	-	12.460.928.189.608
Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	-	31.443.288.922.065
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	44.602.870.375.969	-
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	457.651.000.000	-
Jumlah Pendapatan KND	45.060.521.375.969	43.904.217.111.673

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp1.156.304.264.296 atau 2,63 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.2.3 Pendapatan PNBP Lainnya

Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp128,28 triliun

Pendapatan PNBP Lainnya pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp128.282.486.329.481 dan Rp108.635.073.191.043, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	55.663.300.189	-
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	46.946.552.039.286	26.902.392.301.814
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	17.768.170.773.554	15.894.440.259.215
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	7.421.052.335.146	7.483.690.118.211
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	4.763.894.209.734	4.484.816.582.419
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	23.950.487.055.396	21.812.886.337.455
Pendapatan Jasa Lainnya	910.056.355.732	3.543.315.006.384
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	11.153.269.856.791	12.841.264.758.952
Pendapatan Denda	611.724.687.653	918.450.161.639
Pendapatan Lain-lain	14.701.615.716.000	14.753.817.664.954
Jumlah PNPB Lainnya	128.282.486.329.481	108.635.073.191.043

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp19.647.413.138.438 atau 18,09 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan BLU sebesar Rp55,09 triliun

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp55.093.058.250.618 dan Rp47.345.432.555.948, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	48.813.837.134.982	44.250.619.466.173
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	90.948.165.044	174.211.852.608
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.556.582.772.589	578.904.594.476
Pendapatan Dari Alokasi APBN	235.873.713.666	-
Pendapatan BLU Lainnya	4.395.816.464.337	2.341.696.642.691
Jumlah Pendapatan BLU	55.093.058.250.618	47.345.432.555.948

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan BLU sebesar Rp7.747.625.694.670 atau 16,36 persen dari TA 2017.

Pendapatan Hibah sebesar Rp15,56 triliun

F.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu, pendapatan hibah juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Pendapatan Hibah pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp15.564.860.239.320 dan Rp11.629.815.002.490, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung		
Bentuk Uang - Perorangan	9.076.264.000	228.975.340.000
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung		
Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	339.156.572.926	137.817.215.944
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung		
Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	12.814.628.074.896	7.043.656.235.321
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung		
Bentuk Uang - Lainnya	15.324.680.000	(13.163.881)
Jumlah Pendapatan Hibah Dalam Negeri	13.178.185.591.822	7.410.435.627.384
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Bilateral	202.932.271.644	234.472.316.950
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Multilateral	215.422.323.945	295.603.707.659
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung		
Bentuk Uang		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung		
Bentuk Uang - Perorangan		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung		
Bentuk Uang Bilateral	1.527.744.362.454	2.994.461.088.630
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung		
Bentuk Uang Multilateral	347.385.546.650	652.784.794.782
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung		
Bentuk Uang Lainnya	93.170.142.805	42.057.467.085
Jumlah Pendapatan Hibah Luar Negeri	2.386.674.647.498	4.219.379.375.106
Jumlah Pendapatan Hibah	15.564.860.239.320	11.629.815.002.490

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Hibah sebesar Rp3.935.045.236.830 atau 33,84 persen dari TA 2017.

F.2.1.2 Arus Kas Keluar

F.2.1.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebesar Rp346,89 triliun

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp346.890.764.906.966 dan Rp312.728.756.432.452, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	88.759.526.678.607	86.928.589.744.958
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	59.261.582.322.441	55.599.900.348.167
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	687.701.259.485	632.908.371.807
Belanja Gaji Dokter PTT	143.441.868.160	349.074.423.545
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	7.816.083.083.145	9.922.083.655.765
Belanja Honorarium	1.715.507.347.718	1.424.790.271.010
Belanja Lembur	736.748.654.327	726.253.425.631
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	71.842.863.496.643	54.327.541.245.359
Belanja Pensiun dan Uang Tunggal	110.214.811.345.869	97.518.538.624.900
Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai	5.712.498.850.571	5.299.056.321.310
Total Belanja Pegawai	346.890.764.906.966	312.728.756.432.452

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp34.162.008.474.514 atau 10,92 persen dari TA 2017.

Belanja Barang Dan
Jasa sebesar
Rp347,46 triliun

F.2.1.2.2 Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang Dan Jasa merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Belanja Barang Dan Jasa pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp347.468.335.110.569 dan Rp291.459.133.344.592, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Barang	138.091.081.423.936	105.340.094.252.818
Belanja Jasa	35.722.999.519.182	29.605.458.267.170
Belanja Pemeliharaan	38.180.996.840.773	43.501.200.802.930
Belanja Perjalanan	42.692.124.890.093	34.126.165.284.538
Belanja Badan Layanan Umum	36.718.290.173.038	36.570.860.054.466
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kpd Masyarakat/Pemda	56.062.842.263.545	42.313.661.472.670
Belanja Barang untuk diserahkan kepada mantan presiden dan/atau wakil presiden	-	1.693.210.000
Jumlah Belanja Barang	347.468.335.110.569	291.459.133.344.592

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp56.009.201.765.977 atau 19,22 persen dari TA 2017.

Belanja Pembayaran
Bunga Utang sebesar
Rp257,95 triliun

F.2.1.2.3 Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp257.952.028.141.279 dan Rp216.568.022.521.345. Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp41.384.005.619.934 atau 19,11 persen dari TA 2017.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) adalah sebesar Rp238.432.114.086.482 dan Rp19.519.914.054.797 dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp238.432.114.086.482 dan Rp199.977.329.282.085, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	178.778.022.387.867	160.608.329.886.049
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Dalam Negeri	35.901.375.910.034	30.225.713.200.512
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri	18.986.695.721.500	7.212.316.604.950
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption	2.787.500.000	83.757.200.000
Belanja Pembayaran Discount SBSN Dalam Negeri	4.763.232.567.081	1.847.212.390.574
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN	238.432.114.086.482	199.977.329.282.085

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp38.454.784.804.397 atau 19,23 persen dari TA 2017.

b. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp19.519.914.054.797 dan Rp16.590.693.239.260, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Bunga Pinjaman Program	9.593.734.945.579	7.077.108.709.167
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	9.925.615.100.850	9.513.067.924.460
Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman LN	564.008.368	516.605.633
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	19.519.914.054.797	16.590.693.239.260

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp2.929.220.815.537 atau 17,66 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.4 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp216.883.304.115.301 dan Rp166.401.103.129.178, dengan rincian sebagai berikut.

Belanja Subsidi
sebesar Rp216,88
triliun

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Subsidi Perusahaan Negara		
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM	97.014.832.533.586	47.046.732.461.316
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM		
Belanja Subsidi Non-BBM - Biaya	90.120.320.139.040	99.700.700.476.530
Belanja Subsidi Non-BBM - Pajak	10.482.377.006.258	9.214.612.992.875
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - PSO	4.233.533.194.018	4.309.726.330.540
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	201.851.062.872.902	160.271.772.261.269
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	952.643.000.000	826.304.000.000
Belanja Subsidi - Bunga Kredit	13.957.637.714.201	4.848.396.664.197
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan - KUR dan Risk Sharing	116.569.439.887	448.160.696.551
Belanja Subsidi Kredit Program II	5.391.088.311	6.469.507.161
Jumlah Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	15.032.241.242.399	6.129.330.867.909
Jumlah Belanja Subsidi	216.883.304.115.301	166.401.103.129.178

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Subsidi sebesar Rp50.482.200.986.123 atau 30,34 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah sebesar Rp1,52 triliun

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan Pemerintah Daerah yang sifatnya tidak wajib. Belanja Hibah TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp1.520.560.988.285 dan Rp5.445.667.259.156, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	54.481.623.000	-
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	-	22.547.908.280
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	1.465.989.051.764	5.423.119.350.876
Belanja Hibah Lainnya	90.313.521	-
Jumlah Belanja Hibah	1.520.560.988.285	5.445.667.259.156

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Hibah sebesar Rp3.925.106.270.871 atau 72,08 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp84,31 triliun

Belanja Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp84.318.412.919.513 dan Rp55.297.216.841.355, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	262.639.545.303	330.347.968.057
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	36.130.093.800.799	35.809.227.856.984
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	2.888.119.938.473	2.665.538.268.830
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	19.077.821.483.801	12.716.128.084.642
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	19.131.121.934.000	1.998.168.889.240
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	6.828.616.217.137	1.777.805.773.602
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	84.318.412.919.513	55.297.216.841.355

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp29.021.196.078.158 atau 52,48 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.7 Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain sebesar Rp16,16 triliun

Belanja Lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah. Belanja Lain-lain pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp16.163.845.545.430 dan Rp8.802.858.981.595, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Cadangan Beras Pemerintah	2.405.131.757.000	2.499.999.996.933
Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi	502.666.350.000	-
Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan	1.292.847.925	-
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	24.554.426.786	28.578.926.000
Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	59.303.906.742	38.460.400.052
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	537.049.670.791	337.108.842.898
Belanja Lain-lain BUN Lainnya	10.256.466.000.000	3.600.000.000.000
Belanja Lain-Lain selisih kurs terealisasi	22.826.732.841	-
Belanja Lain-lain Lainnya	2.354.553.853.345	2.298.710.815.712
Jumlah Belanja Lain-lain	16.163.845.545.430	8.802.858.981.595

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Lain-lain sebesar Rp7.360.986.563.835 atau 83,62 persen dari TA 2017.

Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp45,69 triliun

F.2.1.2.8 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp45.695.178.904.793 dan Rp53.668.650.342.060, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	29.991.687.612.756	34.312.377.870.061
Dana Bagi Hasil PBB	15.703.491.292.037	19.356.272.471.999
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	45.695.178.904.793	53.668.650.342.060

Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp7.973.471.437.267 atau 14,86 persen dari TA 2017.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp45,08 triliun

F.2.1.2.9 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil SDA dalam TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp45.086.668.324.382 dan Rp31.641.673.021.137, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Dana Bagi Hasil - SDA Minyak Bumi	13.265.216.482.401	8.191.122.864.049
Dana Bagi Hasil - SDA Gas Bumi	9.210.412.221.749	8.442.353.752.961
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Umum	19.807.904.298.240	11.835.084.190.433
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Panas Bumi	832.936.590.394	970.633.323.538
Dana Bagi Hasil - SDA Kehutanan	1.612.576.032.153	1.820.962.826.750
Dana Bagi Hasil Perikanan	357.622.699.445	381.516.063.406
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	45.086.668.324.382	31.641.673.021.137

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp13.444.995.303.245 atau 42,49 persen dari TA 2017.

Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp2,92 triliun

F.2.1.2.10 Dana Bagi Hasil Cukai

Dana Bagi Hasil Cukai merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Cukai pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp2.922.191.165.245 dan Rp2.921.873.779.440. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp317.385.805 atau 0,01 persen dari TA 2017.

Dana Alokasi Umum sebesar Rp401,48 triliun

F.2.1.2.11 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp401.489.579.649.000 dan Rp398.582.314.748.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar Rp2.907.264.901.000 atau 0,73 persen dari TA 2017.

Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp58,14 triliun

F.2.1.2.12 Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp58.149.298.269.245 dan Rp62.104.230.254.352. Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp3.954.931.985.107 atau 6,37 persen dari TA 2017.

Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah sebesar Rp29,29 triliun

F.2.1.2.13 Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY. Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp29.290.333.186.000 dan Rp27.743.292.590.000. Rincian Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Dana Otonomi Khusus	20.059.583.186.000	19.443.292.590.000
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.000.000.000.000	800.000.000.000
Dana Insentif Daerah	8.230.750.000.000	7.500.000.000.000
Jumlah	29.290.333.186.000	27.743.292.590.000

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp1.547.040.596.000 atau 5,58 persen dari TA 2017.

Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp115,30 triliun

F.2.1.2.14 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp115.300.279.949.439 dan Rp105.563.769.198.975, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	56.743.822.617.193	51.333.461.790.177
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	588.007.130.574	942.916.401.139
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	44.367.351.931.006	43.545.891.060.225
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi/P2D2	-	-
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	9.207.778.308.894	5.652.332.364.609
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Ketenagakerjaan	837.415.359.881	840.237.480.533
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	3.555.904.601.891	3.248.930.102.292
Jumlah	115.300.279.949.439	105.563.769.198.975

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp9.736.510.750.464 atau 9,22 persen dari TA 2017.

Dana Desa sebesar Rp59,85 triliun

F.2.1.2.15 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan untuk membantu Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp59.859.408.609.275 dan Rp59.766.577.527.403. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Desa sebesar Rp92.831.081.872 atau 0,16 persen dari TA 2017.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp245,13 triliun

F.2.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Aktivitas Investasi pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar minus Rp245.132.313.372.320 dan minus Rp268.122.368.777.814, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Arus Kas Masuk	1.230.455.589.354	1.293.730.019.414
Dikurangi: Arus Kas Keluar	246.362.768.961.674	269.416.098.797.228
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(245.132.313.372.320)	(268.122.368.777.814)

Dengan demikian, terdapat kenaikan Aktivitas Investasi sebesar Rp22.990.055.405.494 atau 8,57 persen dari TA 2017.

F.2.2.1 Arus Kas Masuk**F.2.2.1.1 Pengelolaan dan Penjualan BMN**

Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp291,52 miliar

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Penerimaan dari Penjualan Aset merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset yang rusak atau berlebihan. Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp291.523.708.737 dan Rp199.488.584.509, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN dan Kekayaan Negara Lain-lain	-	199.488.584.509
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	250.827.244.737	-
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	40.696.464.000	-
Jumlah Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN	291.523.708.737	199.488.584.509

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp92.035.124.228 atau 46,14 persen dari TA 2017.

F.2.2.1.2 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp163,61 miliar

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2018 dan TA 2017 sebesar Rp163.619.880.616 dan Rp359.085.434.905, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	124.649.183.550	233.411.243.099
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	38.970.697.066	125.674.191.806
Jumlah Penjualan Aset Program Restrukturisasi	163.619.880.616	359.085.434.905

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp195.465.554.289 atau 54,43 persen dari TA 2017.

F.2.2.1.3 Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir

Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp0

Tidak terdapat transaksi Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2018 dan TA 2017.

F.2.2.1.4 Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah

Penerimaan Investasi Pemerintah sebesar Rp775,31 miliar

Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah. Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp775.312.000.001 dan Rp735.156.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah sebesar Rp40.156.000.001 atau 5,46 persen dari TA 2017.

F.2.2.2 Arus Kas Keluar**F.2.2.2.1 Belanja Modal**

Belanja Modal sebesar Rp184,12 triliun

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp184.127.627.500.274 dan Rp208.656.670.235.846, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Modal Tanah	3.504.554.254.056	3.421.319.416.306
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.379.656.852.202	89.605.672.819.037
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.166.053.878.250	27.819.212.471.582
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	84.370.358.869.043	80.441.877.902.717
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.073.599.068.981	3.421.175.609.710
Belanja Modal BLU	4.633.404.577.742	3.947.412.016.494
Jumlah Belanja Modal	184.127.627.500.274	208.656.670.235.846

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Modal sebesar Rp24.529.042.735.572 atau 11,76 persen dari TA 2017.

F.2.2.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional

Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp15,00 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp15.000.000.000.000 dan Rp10.500.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp4.500.000.000.000 atau 42,86 persen dari TA 2017.

F.2.2.2.3 Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp5,53 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp5.530.000.000.000 dan Rp5.600.000.000.000. Dengan demikian, terdapat penurunan Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp70.000.000.000 atau 1,25 persen dari TA 2017.

F.2.2.2.4 Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara sebesar Rp9,43 triliun

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta PMN/Dana Investasi Pemerintah. Penyertaan Modal Negara TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp9.431.096.461.400 dan Rp11.603.494.561.382, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	3.600.000.000.000	6.379.318.092.000
Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional	2.331.096.461.400	2.024.176.469.382
Penyertaan Modal Negara Lainnya	3.500.000.000.000	3.200.000.000.000
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	9.431.096.461.400	11.603.494.561.382

Dengan demikian, terdapat penurunan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp2.172.398.099.982 atau 18,72 persen dari TA 2017.

Pengeluaran
Investasi Pemerintah
sebesar Rp32,27
triliun

F.2.2.2.5 Pengeluaran Investasi Pemerintah

Pengeluaran Investasi Pemerintah merupakan Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional dan Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Pengeluaran Investasi Pemerintah TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp32.274.045.000.000 dan Rp33.055.934.000.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	31.152.730.000.000	32.050.560.000.000
Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	1.121.315.000.000	1.005.374.000.000
Jumlah PMN Investasi Pemerintah	32.274.045.000.000	33.055.934.000.000

Dengan demikian, terdapat penurunan Pengeluaran Investasi Pemerintah sebesar Rp781.889.000.000 atau 2,37 persen dari TA 2017.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp85.606.836.614.663 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp245.132.313.372.320 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp330.739.149.986.983. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pendanaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Pendanaan
sebesar Rp366,98
triliun

F.2.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp366.988.807.449.803 dan Rp426.289.009.273.320, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Arus Kas Masuk	877.412.063.987.503	783.384.266.893.379
Dikurangi Arus Kas Keluar	510.423.256.537.700	357.095.257.620.059
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	366.988.807.449.803	426.289.009.273.320

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp59.300.201.823.517 atau 13,91 persen dari TA 2017.

F.2.3.1 Arus Kas Masuk

F.2.3.1.1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan
Pembiayaan Dalam
Negeri sebesar
Rp784,74 triliun

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp784.742.629.776.147 dan Rp727.576.037.546.945, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan	-	-
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	2.429.387.504.746	1.305.055.202.247
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara	641.581.192.271.401	584.280.503.844.698
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	140.732.050.000.000	141.990.478.500.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	784.742.629.776.147	727.576.037.546.945

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp57.166.592.229.202 atau 7,86 persen dari TA 2017.

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri – Perbankan pada TA 2018 dan TA 2017.

b. Penerimaan pembiayaan Dalam Negeri – Non Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri – Non Perbankan berasal dari penerimaan pinjaman dalam negeri dari BUMN dan Perusahaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri – Non Perbankan TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp2.429.387.504.746 dan Rp1.305.055.202.247, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	2.397.198.022.147	1.251.027.557.472
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	32.189.482.599	54.027.644.775
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	2.429.387.504.746	1.305.055.202.247

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri – Non Perbankan sebesar Rp1.124.332.302.499 atau 86,15 persen dari TA 2017.

c. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp641.581.192.271.401 dan Rp584.280.503.844.698, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	143.050.000.000.000	192.207.290.000.000
Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara	325.721.165.375.000	237.884.012.996.000
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang	98.603.438.543.401	92.581.027.901.425
Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang	51.680.000.000.000	44.690.000.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN PBS	22.526.588.353.000	16.918.172.947.273
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara	641.581.192.271.401	584.280.503.844.698

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara sebesar Rp57.300.688.426.703 atau 9,81 persen dari TA 2017.

d. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp140.732.050.000.000 dan Rp141.990.478.500.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Obligasi Negara - Valuta Asing	97.877.550.000.000	102.021.478.500.000
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Pendek	42.854.500.000.000	39.969.000.000.000
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	140.732.050.000.000	141.990.478.500.000

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara — Valuta Asing sebesar Rp1.258.428.500.000 atau 0,89 persen dari TA 2017.

F.2.3.1.2 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan
Pembiayaan Luar
Negeri sebesar
Rp88,60 triliun

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman kegiatan. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp88.609.746.474.180 dan Rp51.726.855.339.157, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Pinjaman Program	50.625.053.600.000	20.947.967.337.503
Penarikan Pinjaman Kegiatan	37.984.692.874.180	30.778.888.001.654
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	88.609.746.474.180	51.726.855.339.157

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp36.882.891.135.023 atau 71,30 persen dari TA 2017.

F.2.3.1.3 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Penerimaan Cicilan
Pengembalian
Pemberian Pinjaman
sebesar Rp4,05
triliun

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD, dan BUMN. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp4.054.687.737.176 dan Rp4.081.374.007.277, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri	346.401.949.711	353.699.519.388
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri	3.708.285.787.465	3.727.674.487.889
Jumlah Penerimaan Pengembalian Pemberian Pinjaman	4.054.687.737.176	4.081.374.007.277

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman sebesar Rp26.686.270.101 atau 0,65 persen dari TA 2017.

F.2.3.1.4 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Penerimaan
Pembiayaan Lain
sebesar Rp5 miliar

Penerimaan Pembiayaan Lain-lain pada TA 2018 sebesar Rp5.000.000.000 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, sedangkan pada TA 2017 tidak terdapat transaksi tersebut.

F.2.3.2 Arus Kas Keluar**F.2.3.2.1 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri**

Pengeluaran
Pembiayaan DN
sebesar Rp424,99
triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam negeri dan valuta asing, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp424.990.319.440.149 dan Rp285.101.423.064.007, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	1.075.568.713.531	656.763.630.395
Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara	381.055.706.226.618	257.198.059.433.612
Pengeluaran Untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	42.859.044.500.000	27.246.600.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	424.990.319.440.149	285.101.423.064.007

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp139.888.896.376.142 atau 49,07 persen dari TA 2017.

F.2.3.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran
Pembiayaan LN
sebesar Rp76,33
triliun

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp76.333.197.362.316 dan Rp65.124.918.090.885, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Kegiatan	76.325.598.016.270	65.119.476.791.715
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible	7.599.346.046	5.441.299.170
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	76.333.197.362.316	65.124.918.090.885

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp11.208.279.271.431 atau 17,21 persen dari TA 2017.

F.2.3.2.3 Pengembalian Pinjaman

Pengembalian
Pinjaman sebesar
Rp9,09 triliun

Pengembalian Pinjaman merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Pengembalian Pinjaman pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp9.099.739.735.235 dan Rp6.868.916.465.167. Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengembalian Pinjaman sebesar Rp2.230.823.270.068 atau 32,48 persen dari TA 2017.

Sisa Lebih
Pembiayaan
Anggaran (SiLPA)
Rp36,24 triliun

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp366.988.807.449.803 dan defisit anggaran sebesar Rp330.739.149.986.983, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2018 sebesar Rp36.249.657.462.820.

F.2.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Transitoris
sebesar minus
Rp5,37 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar minus Rp5.378.953.624.562 dan Rp9.371.459.675.688, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	(513.959.408.911)	(763.254.906.069)
Transito (Neto)	3.498.307.513.555	1.069.556.153.365
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	(8.693.890.485.382)	9.363.511.838.634
Kiriman Uang antar Rekening Bank (Neto)	330.588.756.176	(298.353.410.242)
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	(5.378.953.624.562)	9.371.459.675.688

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp14.750.413.300.250 atau 157,40 persen dari TA 2017.

F.2.4.1 Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)

PFK (Neto) sebesar
minus Rp513,95
miliar

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berasal dari penerimaan pemerintah dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar minus Rp513.959.408.911 dan minus Rp763.254.906.069, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Non Anggaran PFK		
Penerimaan PFK 10 % Gaji	24.075.116.293.031	24.069.529.360.516
Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan	1.610.035.356	4.215.180.920
Penerimaan PFK Beras BULOG	282.471.917.850	285.699.694.065
Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah	4.695.381.176.214	4.557.674.919.056
Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT	48.314.897	(07.799.839)
Penerimaan Setoran / Potongan PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain	5.200.295	-
Penerimaan PFK Lain-lain	410.831.723.812	372.703.882.449
Jumlah Penerimaan PFK	29.465.464.661.455	29.289.924.836.645
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	15.238.490.910.891	14.799.182.410.730
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	27.083.035.000	9.500.000.000
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi	170.157.244	1.850.000
Penerimaan PFK Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	1.581.206.158.711	-
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	16.846.950.261.846	14.808.684.260.730
Pengeluaran Non Anggaran PFK		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 10% Gaji	(22.088.882.658.771)	(22.319.792.812.634)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan	(1.597.145.688.955)	(1.565.564.682.564)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Beras Bulog	(282.639.079.083)	(285.541.721.420)
Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Pemda	(5.117.174.430.880)	(4.894.531.869.489)
Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT	(48.632.484)	(98.493.287)
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(133.410.258.982)	(374.497.159.381)
Jumlah Pengeluaran PFK	(29.219.300.749.155)	(29.440.026.738.755)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga		

Setoran/Potong Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga		
Setoran Pajak Rokok	(15.998.784.389.346)	(15.412.337.264.689)
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga		
Pengalihan Piutang	(27.083.035.000)	(9.500.000.000)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	(1.581.206.158.711)	-
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	(17.607.073.583.057)	(15.421.837.264.689)
Setoran/Potong Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	(17.607.073.583.057)	(15.421.837.264.689)
Jumlah Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	(513.959.408.911)	(763.254.906.069)

Dengan demikian, terdapat kenaikan Perhitungan Pihak Ketiga (Neto) sebesar Rp249.295.497.158 atau 32,66 persen dari TA 2017.

F.2.4.2 Transito (Neto)

Transito (Neto) merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu dan transaksi Escrow dana subsidi dan reboisasi. Transito (Neto) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp3.498.307.513.555 dan Rp1.069.556.153.365, dengan rincian sebagai berikut.

Transito (Neto)
sebesar Rp3,49
triliun

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Transito		
Penerimaan Transito	14.227.327.907.489	9.566.708.865.307
Penerimaan Dana Dari BLU pada Rekening BUN	-	2.503.323.901.989
Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	5.097.490.669	13.211.533.263
Penerimaan Perskot/Uang Muka	-	-
Penerimaan Transito Uang Persediaan	18.075.703.312.008	14.961.779.659.349
Penerimaan Escrow	8.073.039.013.608	5.552.252.110.595
Penerimaan Pengembalian Escrow	-	-
Jumlah Penerimaan Transito	40.381.167.723.774	32.597.276.070.503
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran Transito	(14.205.270.777.282)	(9.531.270.619.075)
Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	-	(2.503.323.901.989)
Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	(5.097.490.669)	(13.211.533.263)
Pengeluaran Perskot Gaji	-	-
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	(18.125.613.831.873)	(14.933.035.752.216)
Pengeluaran Escrow	(4.546.878.110.595)	(4.546.878.110.595)
Jumlah Pengeluaran Transito	(36.882.860.210.219)	(31.527.719.917.138)
Jumlah Transito (Neto)	3.498.307.513.555	1.069.556.153.365

Dengan demikian, terdapat kenaikan Transito (Neto) sebesar Rp2.428.751.360.190 atau 227,08 persen dari TA 2017.

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto) sebesar minus Rp8,69 triliun

F.2.4.3 Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)

Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul karena Kesalahan Rekening, Utang kepada Pihak Ketiga karena retur SP2D, RR, RKUN yang ditangguhkan, Kesalahan Sistem Perbankan dan Koreksi Pemindahbukuan. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar minus Rp8.693.890.485.382 dan Rp9.363.511.838.634, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	53.295.000.063.027	26.448.911.183.027
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga		
Rekening Pemerintah Lainnya	835.624.944.478.326	783.516.087.380.724
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	53.744.151.269.687	40.402.811.314.026
Migas		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	544.069.346.552.982	
Non Migas		414.190.403.283.438
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	6.123.553.023.046	6.481.687.890.981
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	69.118.894.560.000	50.000.000.000.000
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	1.561.975.889.947.068	1.321.039.901.032.196
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga		
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	(53.305.566.836.926)	(26.789.564.814.910)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga		
Rekening Pemerintah Lainnya	(844.068.965.823.547)	(774.127.099.972.136)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	(53.749.151.946.195)	(40.402.811.314.892)
Migas		
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non-Migas	(544.403.906.181.709)	(414.188.948.263.438)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	(5.989.018.695.230)	(6.205.361.597.899)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	(69.118.894.560.000)	(50.000.000.000.000)
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	(1.570.635.504.043.607)	(1.311.713.785.963.275)
Neto	(8.659.614.096.539)	9.326.115.068.921
PFK terkait Kesalahan Sistem		
Perbankan		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem-Perbankan	30.108.166.079.323	22.198.068.982.679
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem-Perbankan	(30.108.454.125.910)	(22.193.398.493.197)
	(288.056.587)	4.670.489.482
Koreksi Pemindahbukuan		
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	122.635.141.076	613.692.610.196
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(156.623.473.332)	(580.966.329.965)
	(33.988.332.256)	32.726.280.231
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	(8.693.890.485.382)	9.363.511.838.634

Dengan demikian, terdapat penurunan Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto) sebesar Rp18.057.402.324.016 atau 192,85 persen dari TA 2017.

F.2.4.4 Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) sebesar Rp330,58 miliar

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) merupakan penerimaan dan pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank. Dalam transaksi Kiriman Uang Antar Rekening Bank masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat pengeluaran kiriman uang serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp330.588.756.176 dan minus Rp298.353.410.242, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	14.571.295.116.506.261	12.585.894.182.296.760
Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	(14.570.964.527.750.085)	(12.586.192.535.707.002)
Jumlah Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	330.588.756.176	(298.353.410.242)

Dengan demikian, terdapat kenaikan Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) sebesar Rp628.942.166.418 atau 210,80 persen dari TA 2017.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. EKUITAS AWAL

*Ekuitas Awal
Rp1.540,78 triliun*

Ekuitas Awal per 1 Januari 2018 dan 1 Januari 2017 sebesar Rp1.540.783.656.928.940 dan Rp1.566.931.752.006.649. Nilai Ekuitas Awal tahun 2018 merupakan nilai Ekuitas Akhir Neraca per 31 Desember 2017 pada LKPP Tahun 2017 *Audited*.

G.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

*Defisit LO
Rp225,73 triliun*

Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp225.730.103.236.335 dan Rp112.982.816.158.602. Defisit LO merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit kegiatan operasional, Surplus/Defisit kegiatan non operasional, dan Surplus/Defisit pos luar biasa. Rincian Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 disajikan dalam Laporan Operasional.

G.3. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

G.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp273,31
miliar*

Penyesuaian Nilai Aset TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp273.314.147.911 dan Rp11.292.013.385. Penyesuaian Nilai Aset TA 2018 terdiri dari penyesuaian atas SAL BLU pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp109.649.287, Kementerian Energi dan SDM sebesar Rp774.905.031, Kementerian Negara Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp269.122.086.797, dan Kepolisian RI sebesar Rp3.307.506.796.

G.3.2. Penggunaan SAL

Penggunaan SAL Rp0

Tidak terdapat Penggunaan SAL pada TA 2018 dan TA 2017.

G.3.3. Penyesuaian SiLPA

*Penyesuaian SiLPA
Rp1,50 triliun*

Penyesuaian SiLPA TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp1.501.069.710.656 dan Rp473.817.522.854. Penyesuaian SiLPA TA 2018 sebesar Rp1.501.069.710.656 terdiri dari:
Mutasi transaksi atas akun SiLPA 311211 sebesar Rp1.804.589.421.833 karena pembayaran dan kiriman uang atau pemindahbukukan ke rekening dengan valuta yang sama atau mata uang rekening tujuan tidak diketahui (null) sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs rekening Milik BUN.
Penyesuaian karena pengembalian atas pendapatan TAYL yang menggunakan akun 311212 sebesar minus Rp303.519.711.177.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp6,00
triliun*

G.3.4. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp6.005.920.659.013 dan Rp5.823.271.175.506. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan pada K/L yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Rincian koreksi nilai persediaan TA 2018 yang signifikan, antara lain terdapat pada K/L:

1. Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.315.979.622.961 yang merupakan koreksi atas nilai persediaan akibat kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
2. Kementerian Perdagangan sebesar Rp311.917.232.782 merupakan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
3. Koreksi Nilai Persediaan pada K/L lainnya sebesar Rp378.023.803.270.

*Revaluasi Aset
Tetap Rp0*

G.3.5. Revaluasi Aset Tetap

Tidak terdapat nilai Revaluasi Aset Tetap pada TA 2018 dan TA 2017.

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi minus
Rp6,75 triliun*

G.3.6. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp6.758.324.262.623 dan Rp76.515.960.269.354. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi tahun 2018 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset yang tidak terkait dengan revaluasi aset pada tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2018 dan koreksi atas nilai Aset Tetap yang baru ditemukan (barang berlebih) selama proses Penilaian Kembali BMN pada tahun 2018. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L	(10.819.023.195.467)	49.905.188.759.638
2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L	(3.426.376.338)	2.722.315.377.302
3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN	4.583.167.648.166	24.068.677.065.565
4. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada BUN	338.168.861.016	(14.706.277.361)
5. Penyesuaian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(857.211.200.000)	(165.514.655.790)
Jumlah	(6.758.324.262.623)	76.515.960.269.354

1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L sebesar minus Rp10.819.023.195.467.
Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada K/L:

Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah
1) Kementerian PUPR	(11.812.370.199.101)
2) Kementerian Ristek dan Dikti	17.169.608.198.023
3) Kementerian Perhubungan	(4.526.865.415.541)
4) Kementerian Pertahanan	5.467.166.038.211
5) Kementerian ESDM	(4.976.383.107.428)
6) Kepolisian RI	(4.692.874.989.508)
7) Kementerian Perdagangan	(2.256.105.780.353)
8) Kementerian Sekretariat Negara	1.930.539.415.651
9) Kementerian Agama	(1.382.884.266.978)
10) Badan Intelijen Negara	(1.263.147.332.416)
11) Kementerian Hukum dan HAM	(1.021.258.742.015)
12) Kementerian Negara/Lembaga lainnya	(3.454.447.014.012)
Jumlah	(10.819.023.195.467)

2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L sebesar minus Rp3.426.376.338.
Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada K/L:

Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah
1. Kementerian Kesehatan	(1.398.127.874.925)
2. Badan Intelijen Negara	1.219.504.651.676
3. Kepolisian RI	561.880.213.885
4. Kementerian PUPR	(520.646.562.882)
5. Kementerian Negara/Lembaga lainnya	133.963.195.908
Jumlah	(3.426.376.338)

3. Koreksi Aset Non Revaluasi pada BUN sebesar Rp4.921.336.509.182, terdiri dari Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp4.583.167.648.166 dan Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp338.168.861.016. Koreksi tersebut berasal dari:
- Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi pada BA 999.03 sebesar Rp349.224.376.656. koreksi tersebut merupakan koreksi nilai pada BLU LMAN dengan rincian sebagai berikut.
 - Pengakuan perolehan aset tanpa pengeluaran dana dari denda keterlambatan penyelesaian *upgrade* Puri Casablanca sebesar Rp376.200.000.
 - Pengakuan *capital gain* (selisih antara hasil penilaian wajar Aset Eks HTBI batch II dengan nilai penebusan) sebesar Rp348.847.715.000.
 - Koreksi akumulasi penyusutan Aset Eks HTBI periode tahun sebelumnya sebesar Rp461.656.
 - BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar minus Rp14.839.762.070 dengan rincian sebagai berikut.

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Tambah:	
1. Konstruksi Dalam Pengerjaan BP Batam	3.282.037.332
2. Aset Tetap Renovasi SKK Migas	640.853.913
3. Peralatan dan Mesin SKK Migas	140.449.828
4. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin SKK Migas	1.846.740.350
Koreksi Kurang:	
1. Konstruksi Dalam Pengerjaan BP Karimun	(12.352.343.619)
2. Peralatan dan Mesin	(8.345.252.314)
3. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(30.885.763)
4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(21.361.797)
Jumlah	(14.839.762.070)

Koreksi tersebut terdapat pada BP Batam sebesar minus Rp9.070.306.287 dan SKK Migas sebesar minus Rp5.769.455.783 dengan rincian sebagai berikut.

BP Batam sebesar minus Rp9.070.306.287 terdiri dari:

- 1) Koreksi tambah sebesar Rp3.282.037.332 merupakan koreksi tambah atas kurang catat Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Pengerjaan di Subsatker Karimun.
- 2) Koreksi kurang sebesar minus Rp12.352.343.619 merupakan koreksi kurang atas KDP yang lebih disajikan pada subsatker BP Karimun.

SKK Migas sebesar minus Rp5.769.455.783 terdiri dari:

- 1) Koreksi tambah sebesar Rp2.628.044.091
 - a) ATR sebesar Rp640.853.913 merupakan koreksi tambah saldo awal atas pekerjaan konstruksi renovasi rumah negara yang dilaksanakan pada tahun 2017.
 - b) Peralatan dan Mesin sebesar Rp140.449.828 merupakan:
 - Koreksi tambah saldo awal sebesar Rp20.824.000 atas alat kantor dan rumah tangga di Kantor Perwakilan Sumbagsel;
 - Koreksi tambah pencatatan nilai sebesar Rp119.625.828 atas aset peralatan dan mesin berupa pesawat tak berawak, CCTV, dan rak server di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Sumbagsel;
 - c) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.846.740.350
- 2) Koreksi kurang sebesar minus Rp8.397.499.874
 - a) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar minus Rp21.361.797
 - b) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp30.885.763
 - c) Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp8.345.252.314 merupakan koreksi pencatatan dan reklasifikasi BMN/aset peralatan dan mesin pada Kantor Pusat dan lima Kantor Perwakilan.
- c. BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp4.586.951.894.596 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah Rp4.604.901.898.730. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai yang terdiri dari:

Koreksi Tambah Nilai Wajar pada tahun 2018, yaitu:

Koreksi Tambah	Jumlah
1. Tanah	63.220.129.245
2. Harta benda Modal (HBM)	105.057.703.562.416
3. Harta Benda Inventaris (HBI)	7.241.753.079
4. Material Persediaan (MP)	7.297.816.306.623
Jumlah	112.425.981.751.363

Koreksi Kurang Nilai Wajar pada tahun 2018, yaitu:

Koreksi Kurang	Jumlah
1. Tanah	(130.956.993.619)
2. Harta Benda Modal (HBM)	(108.242.228.385.608)
3. Harta Benda Inventaris (HBI)	(6.878.165.809)
4. Material Persediaan (MP)	(9.073.273.408.865)
Jumlah	(117.453.336.953.901)

Koreksi Akumulasi penyusutan HBM dan HBI, yaitu:

Koreksi	Jumlah
1. Koreksi tambah akumulasi penyusutan HBM	(48.466.495.875.983)
2. Koreksi tambah akumulasi penyusutan HBI	(8.084.953.608)
3. Koreksi kurang akumulasi penyusutan HBM	58.104.505.660.183
4. Koreksi kurang akumulasi penyusutan HBI	2.332.270.677
Jumlah	9.632.257.101.268

- 2) Koreksi ekuitas atas nilai Aset Lainnya Non Revaluasi aset BMN Idle merupakan Koreksi nilai Aset Lainnya Non Revaluasi terjadi karena terdapat BMN idle berupa Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Lainnya pada KPKNL Metro yang tidak diketahui nilai perolehannya dan dilakukan penilaian pada Tahun 2018. Adapun nilai wajar hasil penilaian sebesar Rp3.813.000;
- 3) Koreksi ekuitas atas nilai Aset Lainnya Non Revaluasi Aset PKP2B yang merupakan koreksi nilai Aset PKP2B yang telah disesuaikan sebesar minus Rp17.953.817.134.
4. Penyesuaian koreksi nilai Aset Non Revaluasi pada konsolidasian LKPP sebesar minus Rp857.211.200.000 yang merupakan koreksi pencatatan ganda Tanah antara Sekretariat Negara dengan TVRI sebesar Rp857.211.200.000.

Revaluasi Aset
BUMN Rp0

Koreksi Lainnya
Rp91,21 triliun

G.3.7. Revaluasi Aset BUMN

Revaluasi Aset BUMN TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan minus Rp2.171.167.258.138.

G.3.8. Koreksi Lainnya

Koreksi Lainnya pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp91.219.517.945.695 dan Rp4.317.975.497.496. Koreksi Lainnya merupakan koreksi yang tidak termasuk dalam Penyesuaian Nilai Aset dan SiLPA, Koreksi Nilai Piutang, Nilai Persediaan, dan Aset, Penggunaan SAL, Selisih Revaluasi Aset Tetap, dan Revaluasi Aset BUMN yang mempengaruhi ekuitas. Koreksi Lainnya pada TA 2018 mencakup Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker, Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran, Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah, dan Mutasi Kas BLU. Koreksi Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Koreksi Lainnya pada K/L	28.927.660.594.840	9.224.749.807.565
2. Koreksi Lainnya pada BUN	72.605.784.273.115	6.802.942.018.571
3. Penyesuaian konsolidasi LKPP	(10.313.926.922.260)	(11.709.716.328.641)
Jumlah*	91.219.517.945.695	4.317.975.497.495

*selisih TA 2017 disebabkan pembulatan sebesar Rp1

1. Koreksi Lainnya pada K/L

Koreksi Lainnya pada K/L pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp28.927.660.594.840 dan Rp9.224.749.807.565. Koreksi Lainnya pada K/L pada TA 2018 yang paling signifikan, antara lain terdapat pada K/L:

- a. Kementerian Keuangan sebesar Rp29.907.120.106.114, dimana Koreksi Lainnya paling signifikan berasal dari Ditjen Pajak sebesar Rp29.994.138.191.495, terutama dari koreksi tambah piutang perpajakan atas ketetapan pajak yang terbit periode sebelumnya yang baru dicatat pada periode berjalan.
- b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar minus Rp561.253.997.976, dimana Koreksi Lainnya paling signifikan berasal dari Ditjen Minerba yang disebabkan koreksi piutang PNBPN atas transaksi yang terjadi pada periode sebelumnya.
- c. Kementerian Pertahanan sebesar minus Rp405.022.861.328, dimana Koreksi Lainnya paling signifikan berasal dari Mabes TNI sebesar minus Rp692.782.088.026 terutama dari penyajian nilai pendapatan.

2. Koreksi Lainnya pada BUN

Koreksi Lainnya pada BUN pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp72.605.784.273.115 dan Rp6.802.942.018.571. Koreksi Lainnya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

Bagian Anggaran	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a. 999.00 Kuasa BUN	11.059.805.369.942	11.056.774.037.490
b. 999.01 Pengelolaan Utang	(581.996.523.912)	(1.128.291.748.037)
c. 999.02 Pengelolaan Hibah	3.259.483.730.332	-
d. 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah	44.292.061.973.245	7.677.326.743.059
e. 999.04 Pengelolaan Penerusan Pinjaman	(37.540.106.239)	(19.692.179.601)
f. 999.05 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	(2.482.307.601.567)	(499.016.564.819)
g. 999.06 Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-lain	(449.954.500)	(277.255.821)
h. 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi	(288.200.235.546)	(816.393.850.063)
i. 999.08 Pengelolaan Belanja Lainnya	(12.441.749.435)	0
j. 999.09 Pengelolaan Badan Lainnya	2.426.198.123.797	680.779.393.840
k. 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus	14.971.171.246.998	(9.143.224.596.255)
Jumlah	72.605.784.273.115	6.802.942.019.571

a. Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN

Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp11.059.805.369.942 dan Rp11.056.774.037.490. Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN	31 Desember 2018 (Audited)
Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran	74.501.106.222
Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah	(4.107.605.394.583)
Mutasi Kas BLU	14.026.122.161.970
Koreksi saldo Uang Muka Reksus	69.186.143.007
Koreksi mutasi kas pada Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	1.121.315.000.000
Koreksi mutasi kas pada Rekening Dana Bantuan Internasional	1.000.000.000.000
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga dari Retur pada KPPN KPH	(1.986.575.236)
Koreksi dari pembulatan penutupan rekening	12
Koreksi Lainnya	550
Koreksi saldo Uang Muka dari rekening Khusus yang berasal dari backlog SP2D	(412.072.000)
Jumlah*	12.181.120.369.942
Penyesuaian Saldo Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah yang telah disajikan BA 999.03	(1.121.315.000.000)
Saldo Akhir Setelah Penyesuaian	11.059.805.369.942

*sekitar disebabkan pembulatan sebesar Rp2

Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp74.501.106.222 terdiri dari Rp74.322.109.329 dikurang minus Rp178.996.893 yang merupakan mutasi transaksi akun kas pada Bendahara Pengeluaran yang sudah disajikan di BA 999.06 dan 999.08. Eliminasi dilakukan tingkat konsolidasi LKBUN.

b. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp581.996.523.912 dan minus Rp1.128.291.748.037. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Koreksi nilai pembayaran bunga pinjaman	-	22.575.157.665
Koreksi nilai posisi pinjaman per 31 Desember	-	(1.569.714.345.692)
Koreksi nilai Pinjaman Dalam Negeri	943.529.183	(943.529.181)
Koreksi nilai Utang Program	(39.766.798.366)	26.940.244.479
Koreksi nilai Utang Proyek	(530.777.632.700)	392.850.724.692
Koreksi Lainnya	(12.395.622.029)	-
Jumlah	(581.996.523.912)	(1.128.291.748.037)

c. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp3.259.483.730.332 dan Rp0. Koreksi Lainnya LPE pada BUN Pengelolaan Hibah merupakan koreksi atas pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga tahun anggaran yang lalu (TAYL) sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-6799/PB/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Penyelesaian Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).

d. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp44.292.061.973.251 dan Rp7.677.326.743.059. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
KPA Dit PNBPDJA	(750.000.000)	42.303.675.087.650
BLU LPDB KUMKM	(71.521.952.645)	8.167.243.255
KPA Kemen BUMN	38.937.359.256.755	(39.604.449.323.202)
KPA DJKN	(892.437.514.807)	(261.338.851.460)
UAIP	7.285.019.959.916	6.886.135.618.475
BLU LMAN	609.278	(1.657.552.815.679)
KPA BKF	(1.000.000.000.000)	2.689.784.020
KPA PPKIM	34.391.614.748	-
Jumlah	44.292.061.973.245	7.677.326.743.059

*selisih TA 2018 sebesar 6 rupiah karena pembulatan

- e. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman
Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp37.540.106.239 dan minus Rp19.692.179.601. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman pada TA 2018 merupakan pencatatan NoD yang telah diakui sebagai piutang pada tahun 2015-2016, namun baru diterbitkan SP3 pada TA 2018. Pada tahun 2015-2016, NoD tersebut dicatat dengan menggunakan akun ekuitas sebagai kontra akun pencatatan akibat penerbitan SP3 pada TA 2018.
- f. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TKDD pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp2.482.307.601.567 dan minus Rp499.016.564.819. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TKDD sebesar minus Rp2.482.307.601.567 terdiri dari:
- 1) Koreksi Piutang atas Reklasifikasi Piutang TKDD Lainnya menjadi Piutang Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar minus Rp525.000.898.171;
 - 2) Koreksi Utang atas Reklasifikasi Utang TKDD Lainnya menjadi Utang TKD sebesar minus Rp1.132.751.524.393;
 - 3) Koreksi pencatatan berupa penyesuaian nilai kurang bayar tahun-tahun sebelum 2018 sebesar minus Rp1.511.419.195.409;
 - 4) Koreksi pencatatan berupa penyesuaian nilai kurang bayar tahun-tahun sebelum 2018 sebesar Rp686.864.016.406.
- g. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-lain (BSBL)
Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan BSBL pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp449.954.500 dan minus Rp277.255.821. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi sebesar Rp449.954.500 berasal dari koreksi atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BUN Pengelolaan BSBL yang telah dilikuidasi, yaitu Panwaslu Lampung tengah dan Panwaslu Tapanuli Utara.
- h. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi
Koreksi Lainnya pada BUN Belanja Subsidi pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp288.200.235.546 dan minus Rp816.393.850.063. Koreksi Lainnya pada BUN Belanja Subsidi berasal dari koreksi atas utang dan beban pada KL dengan rincian sebagai berikut.

KL	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Kementerian PUPR	(192.951)	(281.226.722.331)
Kementerian Perhubungan	-	45.048.930.697
Kementerian Pertanian	(107.775.632.886)	(25.004.513.540)
Kementerian Keuangan	(654.267.108.728)	(544.666.328.206)
Kementerian Koperasi dan UKM	473.842.699.020	(10.545.216.684)
Kementerian Sosial	(1)	-
Jumlah Koreksi Lainnya*	(288.200.235.546)	(816.393.850.064)

*selisih Rp1 TA 2017 karena pembulatan

i. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp12.441.749.435 dan Rp0. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya merupakan koreksi atas utang pada Kementerian Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat sebesar minus Rp2.174.168.000 merupakan koreksi pencatatan utang terhadap tagihan biaya Ongkos Angkut Beras Tahun Anggaran 2012 sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 10 September 2015, sesuai rekomendasi BPK atas Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-999.08/75/DJA/PB.6/2019.
- 2) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua sebesar minus Rp10.267.581.435 merupakan koreksi pencatatan utang atas tagihan pembayaran PD Irian Bhakti yang mendahului kontrak Tahun 2017 setelah mendapat reuiu dari BPKP senilai Rp10.267.581.435.

j. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp2.426.198.123.797 dan Rp680.779.393.840. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya merupakan mutasi Ekuitas Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker dengan rincian sebagai berikut.

UBL	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1) Otorita Asahan	(5.723.385.343)	(295.805.669)
2) Yayasan TMII	838.358.276	1.999.190.591
3) Yayasan Gedung Veteran	(1.209.977.642)	(2.476.808.735)
4) Baznas	(36.779.821.723)	46.468.140.771
5) Badan Wakaf Indonesia	(10.671.526)	(99.923.519)
6) BP Dana Abadi Umat	(3.327.847.280.828)	333.529.292.730
7) SKK Migas	353.220.510.951	(19.893.300.598)
8) OJK	1.292.651.713.003	321.548.608.269
9) Badan Pengelola Keuangan Haji	4.151.058.678.629	-
Jumlah	2.426.198.123.797	680.779.393.840

k. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (TK)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp14.971.171.246.998 dan minus Rp9.143.224.596.255. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK sebesar Rp14.971.171.661.388 dikurangi penyesuaian saldo ekuitas awal LKBUN Tahun 2018 sebesar Rp414.390, yang merupakan eliminasi LK BUN Tahun 2017 *Audited* atas transaksi utang dan beban bagian pemerintah yang belum dipindahbukukan pada BA 999.99 Transaksi Khusus Panas Bumi. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK dijelaskan sebagai berikut.

UAPBUN TK	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1) UAPBUN TK Ditjen Perbendaharaan	(760.210.994.707)	(34.175.033.855)
2) UAPBUN TK Ditjen Kekayaan Negara	10.512.511.652.063	(8.761.423.371.207)
3) UAPBUN TK Ditjen Anggaran	5.218.871.004.032	(347.626.191.192)
4) Penyesuaian	-	-
Jumlah	14.971.171.661.388	(9.143.224.596.254)*

*selisih Rp1 karena pembulatan

Penyesuaian Koreksi Lainnya pada BUN pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp1.121.136.417.497 dan minus Rp1.005.041.960.222. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada BUN pada TA 2018 berasal dari penyesuaian Saldo Awal Ekuitas LKBUN Tahun 2018 dan penyesuaian mutasi Dana Cadangan Penjaminan yang sudah disajikan pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah.

3. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada Konsolidasi LKPP

Penyesuaian Koreksi Lainnya Konsolidasi LKPP pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar sebesar minus Rp10.313.926.922.260 dan minus Rp11.709.716.328.641. Rincian penyesuaian Koreksi Lainnya pada Konsolidasi LKPP TA 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai	Keterangan
Mutasi Kas Lainnya di KL dari Hibah pada BUN	4.107.605.394.583	Eliminasi karena pencatatan ganda
Mutasi Kas dan Bank BLU pada LKBUN	(14.026.122.161.970)	Eliminasi karena pencatatan ganda
Mutasi Kas BP KL	(74.322.109.329)	Eliminasi karena pencatatan ganda
Mutasi Kas BP LKBUN	74.322.109.329	Pencatatan mutasi Kas BP KL pada BUN
Investasi ekuitas bersih PTNBH pada BUN 999 U3	(380.490.944.611)	Eliminasi karena masih tercatat sebagai BMN di Kemristek Dikti
Reklasifikasi antara Pengesahan Hibah langsung dengan akun koreksi lainnya	(14.919.210.262)	Reklasifikasi akun
Jumlah	(10.313.926.922.260)	

Transaksi Antar
Entitas Rp513,17
miliar

G.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp513.172.752.484 dan Rp184.315.553.360. Transaksi Antar Entitas TA 2018 dijelaskan sebagai berikut.

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Ditaghikan Ke Entitas Lain	9.024.058.360.711.860	7.667.629.414.023.180
Diterima Dari Entitas Lain	(9.053.140.743.836.210)	(7.689.683.255.327.710)
Pengesahan Hibah Langsung	27.997.866.283.268	19.920.061.337.943
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(2.192.390.439.978)	(325.761.880.913)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	3.246.918.430.584	-
Setoran Surplus BLU	-	2.496.676.098.011
Transfer Keluar	(297.074.388.438.771)	(204.411.874.523.524)
Transfer Masuk	297.617.550.041.741	204.559.055.826.370
Jumlah*	513.172.752.494	184.315.553.367

*selisih TA 2018 dan TA 2017 sebesar Rp10 dan Rp 3 karena pembulatan

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Transaksi Antar Entitas di LKPP terdiri dari Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh K/L dan Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh BA BUN. Transaksi Antar Entitas terdiri dari lima jenis transaksi, yaitu:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) /Ditaghikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja pada K/L yang melibatkan Kas Negara (BUN), dan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada BA BUN dengan Kas Negara (BUN).
2. Transaksi Antar Entitas pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu pada K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga. Sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA BUN 999.02.
3. Setoran Surplus BLU merupakan setoran surplus kas BLU ke kas negara dari BLU atau pengembalian setoran Surplus BLU dari kas negara ke kas BLU.
4. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN.
5. Transaksi Antar Entitas akibat pembentukan dana lainnya pada Rekening Escrow dalam rangka pengadaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan. Atas pembentukan dana tersebut, BUN mencatat akun DKEL, sedangkan Kementerian Pertahanan mengakui aset berupa Dana lainnya. Dana lainnya pada Rekening Escrow juga dicatat pada BUN. Pada konsolidasi LKPP, Dana lainnya yang dicatat pada LK Kementerian Pertahanan dieliminasi dengan akun DDEL.

Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan disajikan pada akun Diterima Dari Entitas Lain, dan Transaksi Antar Entitas atas Belanja, Transfer ke Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan pada akun Ditagihkan Ke Entitas Lain. Sedangkan Pengesahan atas pendapatan Hibah Langsung dan pengembalian Hibah Langsung yang diterima oleh K/L disajikan pada akun Pengesahan Hibah Langsung. Penjelasan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

- I. Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, terdiri dari DKEL sebesar Rp9.024.058.360.711.860, DDEL sebesar minus Rp9.053.140.743.836.210, pengesahan hibah langsung sebesar Rp27.997.866.283.268, pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar Rp2.192.390.439.978, dan Pengesahan Hibah Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp3.246.918.430.584.

Nilai DDEL sebesar minus Rp9.053.140.743.836.210 sudah termasuk jurnal penyesuaian eliminasi Dana lainnya dari pembentukan Rekening *Escrow* pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.404.845.903.013. Nilai neto/selisih atas Transaksi Antar Entitas ini sebesar minus Rp29.988.850.484 sudah dapat dijelaskan seluruhnya.

Rincian penyebab saldo Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut.

Uraian Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a) Perbedaan pencatatan DDEL antara catatan KL dengan SiAP (UAPBUN AP)	(2.285.186.350)	132.492.464
b) Mutasi Akun Transitoris (815 dan 825)	(27.582.431.851)	77.540.752.671
c) Perbedaan pencatatan belanja antara catatan KL dengan SiAP	222	(294)
d) Perbedaan pencatatan DDEL 999.02 dari Hibah Langsung dengan Pengesahan Hibah Langsung di K/L	(121.233.000)	(40.564.410.058)
e) Transaksi antar Entitas lainnya	495	25.415.727
Jumlah	(29.988.850.484)	37.134.250.510

Penjelasan atas saldo Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp29.988.850.484 di antaranya sebagai berikut.

- Perbedaan pencatatan pendapatan antara Kas Negara dengan K/L sebesar minus Rp2.285.186.350. Perbedaan tersebut berasal dari perbedaan antara pencatatan DDEL sebagai kontra akun pendapatan yang dilaporkan pada KL dan BA BUN lebih besar dibanding kas masuk pada kas negara/ SiAP (DKEL).
- Perbedaan *posting rule* atas pencatatan transaksi pengeluaran dan penerimaan transitio UP/TUP antara SiAP dengan SAI. Pengeluaran dan penerimaan transitio UP/TUP pada SiAP dicatat sebagai DDEL/ DKEL sedangkan pada K/L dicatat sebagai Uang Muka dari KPPN. Perbedaan *posting rule* ini menyebabkan saldo transaksi antar entitas sebesar minus Rp27.582.431.851.
- Perbedaan pencatatan belanja pada K/L dengan SiAP sebesar Rp222.

- d) Terdapat selisih DDEL 999.02 dari Hibah Langsung (HL) dengan Pengesahan HL di K/L sebesar minus Rp121.233.000. Pengesahan Hibah Langsung, Pengesahan Hibah Langsung TAYL dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung yang dicatat K/L merupakan kontra pos dari DDEL yang terbentuk dari pendapatan hibah langsung pada BA 999.02.
- e) Transaksi antar entitas lain-lain karena pembulatan adalah sebesar Rp495.
2. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar konsolidasian LKPP, terdiri dari Transfer Keluar sebesar minus Rp297.074.388.438.771 dan Transfer Masuk sebesar Rp297.617.550.041.741. Selisih Transfer Masuk lebih besar daripada Transfer Keluar sebesar Rp543.161.602.970. Selisih Transfer masuk antara lain disebabkan adanya jurnal *take out* revaluasi atas penilaian kembali BMN baik tahun 2017 maupun tahun 2018 pada satker konsolidasi KL, pencatatan aset TK dari BUN yang secara sistem belum bisa dicatat pada menu Transfer Masuk karena tidak ada ADK sehingga dicatat pada menu saldo awal, transfer keluar Aset Tetap Renovasi dimana pada satker penerima secara aplikasi SIMAK BMN tercatat sebagai aset definitif, dan transfer keluar Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah dimana pada satker penerima secara aplikasi tercatat sebagai aset tetap. Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada KL dan BUN sebagai berikut.

Uraian	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Jumlah TK-TM
KL	(255.921.624.935.324)	297.420.632.160.350	41.499.007.225.026
BA BUN	(41.152.763.503.447)	196.917.881.391	(40.955.845.622.056)
Penyesuaian	-	-	-
Total LKPP	(297.074.388.438.771)	297.617.550.041.741	543.161.602.970

Rincian Transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada KL dan BA BUN terdapat pada Lampiran 30.

G.5. REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS

Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.679.256.307.076. Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas merupakan reklasifikasi akun kewajiban Uang Muka dari KPPN dan Hibah Langsung yang Belum Disahkan. Sesuai dengan kebijakan penyusunan LKPP, pada tahun 2018 reklasifikasi kewajiban ke Ekuitas disajikan di pos Koreksi lainnya.

G.6. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

Penurunan Ekuitas pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp132.975.432.283.199 dan Rp26.148.095.077.709. Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Koreksi-koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas.

Reklasifikasi
Kewajiban Ke
Ekuitas Rp0

Penurunan Ekuitas
Rp132,97 triliun

Ekuitas Akhir
Rp1.407,80 triliun

G.7. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp1.407.808.224.645.741 dan Rp1.540.783.656.928.940. Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari penjumlahan saldo Ekuitas Awal sebesar Rp1.540.783.656.928.940 dikurangi penurunan Ekuitas sebesar Rp132.975.432.283.199.

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah

			Halaman
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara	95
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Perpajakan	96
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	96
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	97
Catatan	B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	98
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	98
Catatan	B.2.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	99
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	100
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	101
Catatan	B.2.1.3	Penerimaan Hibah	102
Catatan	B.2.2	Belanja Negara	103
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat	103
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	107
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	107
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	109
Catatan	B.2.2.1.4	Belanja Pembayaran Bunga Utang	109
Catatan	B.2.2.1.5	Belanja Subsidi	110
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah	112
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial	112
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain	113
Catatan	B.2.2.2	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	114
Catatan	B.2.2.2.1	Transfer ke Daerah	114
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Perimbangan	115
Catatan	B.2.2.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	115
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	115
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	116
Catatan	B.2.2.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	116
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	116
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	117
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Insentif Daerah	117
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Keistimewaan DIY	118
Catatan	B.2.2.2.1.4	Dana Otonomi Khusus	118
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Desa	118
Catatan	B.2.3	Defisit Anggaran	119
Catatan	B.2.4	Pembiayaan	119
Catatan	B.2.4.1	Pembiayaan Dalam Negeri	120
Catatan	B.2.4.1.1	Rekening Pemerintah/Penggunaan SAL	120
Catatan	B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	120
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	121
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara (Neto)	122
Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	123
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	123
Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Penjaminan	124

Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	124
Catatan	B.2.4.1.9	Pembiayaan Lain-Lain	125
Catatan	B.2.4.2	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	125
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	125
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Tunai	125
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek	126
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	126
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	126
Catatan	B.2.5	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)	127
Catatan	B.3	CATATAN PENTING LAINNYA	128

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Catatan	C.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	134
Catatan	C.2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	134
Catatan	C.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	135
Catatan	C.4	Penyesuaian Pembukuan	135
Catatan	C.5	Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)	136
Catatan	C.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir	141

NERACA

Catatan	D.2.1	ASET	143
Catatan	D.2.1.1	Aset Lancar	143
Catatan	D.2.1.1.1	Kas dan Setara Kas	143
Catatan	D.2.1.1.1.1	Rekening Kas BUN di BI	143
Catatan	D.2.1.1.1.2	Rekening Pemerintah Lainnya	143
Catatan	D.2.1.1.1.3	Rekening Kas di KPPN	144
Catatan	D.2.1.1.1.4	Kas Dalam Transito	144
Catatan	D.2.1.1.1.5	Kas di Bendahara Pengeluaran	145
Catatan	D.2.1.1.1.6	Kas di Bendahara Penerimaan	145
Catatan	D.2.1.1.1.7	Kas Lainnya dan Setara Kas	145
Catatan	D.2.1.1.1.8	Kas Pada BLU	147
Catatan	D.2.1.1.2	Uang Muka dari Rekening BUN	148
Catatan	D.2.1.1.3	Investasi Jangka Pendek	148
Catatan	D.2.1.1.4	Belanja Dibayar Di Muka dan Uang Muka Belanja	148
Catatan	D.2.1.1.5	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	149
Catatan	D.2.1.1.6	Piutang	149
Catatan	D.2.1.1.6.1	Piutang Perpajakan	149
Catatan	D.2.1.1.6.2	Piutang Bukan Pajak	152
Catatan	D.2.1.1.6.3	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	161
Catatan	D.2.1.1.6.4	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	161
Catatan	D.2.1.1.6.5	Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	161
Catatan	D.2.1.1.6.6	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	161
Catatan	D.2.1.1.6.7	Piutang dari Kegiatan BLU	162
Catatan	D.2.1.1.6.8	Piutang PFK	163
Catatan	D.2.1.1.6.9	Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	163
Catatan	D.2.1.1.6.10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	163
Catatan	D.2.1.1.7	Persediaan	165
Catatan	D.2.1.2	Investasi Jangka Panjang	166

Catatan	D.2.1.2.1	Investasi Non Permanen	166
Catatan	D.2.1.2.1.1	Dana Bergulir	166
Catatan	D.2.1.2.1.2	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	168
Catatan	D.2.1.2.1.3	Investasi Non Permanen Lainnya	168
Catatan	D.2.1.2.1.4	Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	169
Catatan	D.2.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	169
Catatan	D.2.1.2.2.1	Investasi Permanen PMN	169
Catatan	D.2.1.2.2.2	Investasi Permanen BLU	171
Catatan	D.2.1.2.2.3	Investasi Permanen Lainnya	171
Catatan	D.2.1.3	Aset Tetap	173
Catatan	D.2.1.3.1	Aset Tetap Tanah	173
Catatan	D.2.1.3.2	Peralatan dan Mesin	174
Catatan	D.2.1.3.3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	174
Catatan	D.2.1.3.4	Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	174
Catatan	D.2.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	174
Catatan	D.2.1.3.6	Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	175
Catatan	D.2.1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	175
Catatan	D.2.1.4	Piutang Jangka Panjang	175
Catatan	D.2.1.4.1	Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	176
Catatan	D.2.1.4.2	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	176
Catatan	D.2.1.4.3	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	176
Catatan	D.2.1.4.4	Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	176
Catatan	D.2.1.4.5	Piutang Jangka Panjang Lainnya	176
Catatan	D.2.1.4.6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	178
Catatan	D.2.1.5	Aset Lainnya	179
Catatan	D.2.1.5.1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	179
Catatan	D.2.1.5.2	Aset Tidak Berwujud	181
Catatan	D.2.1.5.3	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	182
Catatan	D.2.1.5.4	Dana Penjaminan	186
Catatan	D.2.1.5.5	Dana Kelolaan BLU	187
Catatan	D.2.1.5.6	Aset Lain-lain	189
Catatan	D.2.1.5.7	Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	200
Catatan	D.2.1.5.8	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	203
Catatan	D.2.1.5.9	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	204
Catatan	D.2.2	KEWAJIBAN	205
Catatan	D.2.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	205
Catatan	D.2.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	205
Catatan	D.2.2.1.2	Utang Kepada Pihak Ketiga	206
Catatan	D.2.2.1.3	Utang Biaya Pinjaman	215
Catatan	D.2.2.1.4	Utang Subsidi	215
Catatan	D.2.2.1.5	Utang Transfer	218
Catatan	D.2.2.1.6	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	219
Catatan	D.2.2.1.7	Utang SBN Jangka Pendek	219
Catatan	D.2.2.1.8	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	220
Catatan	D.2.2.1.9	Pendapatan Diterima di Muka	220
Catatan	D.2.2.1.10	Pendapatan yang Ditangguhkan	221
Catatan	D.2.2.1.11	Utang Jangka Pendek Lainnya	221
Catatan	D.2.2.2	Utang Jangka Panjang	222
Catatan	D.2.2.2.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	222

Catatan	D.2.2.2.1.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	222
Catatan	D.2.2.2.1.2	Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri	222
Catatan	D.2.2.2.1.3	Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	222
Catatan	D.2.2.2.1.4	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	223
Catatan	D.2.2.2.1.5	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	224
Catatan	D.2.2.2.1.6	Utang Jangka Panjang Subsidi	226
Catatan	D.2.2.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	228
Catatan	D.2.2.2.2.1	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	228
Catatan	D.2.2.2.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	229
Catatan	D.2.3	EKUITAS	232
Catatan	D.3	CATATAN PENTING LAINNYA	233

LAPORAN OPERASIONAL

Catatan	E.2.1	Kegiatan Operasional	281
Catatan	E.2.1.1	Pendapatan Operasional	282
Catatan	E.2.1.1.1	Pendapatan Perpajakan	282
Catatan	E.2.1.1.1.1	Pajak Penghasilan	283
Catatan	E.2.1.1.1.2	Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	284
Catatan	E.2.1.1.1.3	Pajak Bumi dan Bangunan	284
Catatan	E.2.1.1.1.4	Pendapatan Cukai	285
Catatan	E.2.1.1.1.5	Pajak Lainnya	285
Catatan	E.2.1.1.1.6	Bea Masuk	286
Catatan	E.2.1.1.1.7	Bea Keluar	286
Catatan	E.2.1.1.1.8	Pajak Lain-lain	286
Catatan	E.2.1.1.2	Pendapatan Negara Bukan Pajak	287
Catatan	E.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	287
Catatan	E.2.1.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	288
Catatan	E.2.1.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	289
Catatan	E.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	291
Catatan	E.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	292
Catatan	E.2.1.2	Beban Operasional	292
Catatan	E.2.1.2.1	Beban Pegawai	294
Catatan	E.2.1.2.2	Beban Persediaan	294
Catatan	E.2.1.2.3	Beban Barang dan Jasa	295
Catatan	E.2.1.2.4	Beban Pemeliharaan	296
Catatan	E.2.1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	296
Catatan	E.2.1.2.6	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	297
Catatan	E.2.1.2.7	Beban Pembayaran Kewajiban Utang	298
Catatan	E.2.1.2.8	Beban Subsidi	299
Catatan	E.2.1.2.9	Beban Hibah	300
Catatan	E.2.1.2.10	Beban Bantuan Sosial	301
Catatan	E.2.1.2.11	Beban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	302
Catatan	E.2.1.2.12	Beban Lain-lain	306
Catatan	E.2.1.2.13	Beban Penyusutan dan Amortisasi	307
Catatan	E.2.1.2.14	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	308
Catatan	E.2.2	Kegiatan Non Operasional	309
Catatan	E.2.2.1	Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	309
Catatan	E.2.2.1.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	309

Catatan	E.2.2.1.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	310
Catatan	E.2.2.2	Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	311
Catatan	E.2.2.2.1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	311
Catatan	E.2.2.2.2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	311
Catatan	E.2.2.3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	311
Catatan	E.2.2.3.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	311
Catatan	E.2.2.3.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	312
Catatan	E.2.3	Pos Luar Biasa	313
Catatan	E.2.3.1	Pendapatan Luar Biasa	314
Catatan	E.2.3.2	Beban Luar Biasa	314

LAPORAN ARUS KAS

Catatan	F.1.1	Saldo Awal Kas	315
Catatan	F.1.2	Kenaikan Penurunan Kas	315
Catatan	F.1.3	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	317
Catatan	F.2.1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	319
Catatan	F.2.1.1	Arus Kas Masuk	319
Catatan	F.2.1.1.1	Penerimaan Perpajakan	319
Catatan	F.2.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	320
Catatan	F.2.1.1.1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	320
Catatan	F.2.1.1.1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	321
Catatan	F.2.1.1.1.4	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	321
Catatan	F.2.1.1.1.5	Pendapatan Cukai	321
Catatan	F.2.1.1.1.6	Pendapatan Pajak Lainnya	321
Catatan	F.2.1.1.1.7	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	322
Catatan	F.2.1.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	322
Catatan	F.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	323
Catatan	F.2.1.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	323
Catatan	F.2.1.1.2.3	Pendapatan PNBP Lainnya	323
Catatan	F.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	324
Catatan	F.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	324
Catatan	F.2.1.2	Arus Kas Keluar	325
Catatan	F.2.1.2.1	Belanja Pegawai	325
Catatan	F.2.1.2.2	Belanja Barang	326
Catatan	F.2.1.2.3	Belanja Pembayaran Bunga Utang	326
Catatan	F.2.1.2.4	Belanja Subsidi	327
Catatan	F.2.1.2.5	Belanja Hibah	328
Catatan	F.2.1.2.6	Bantuan Sosial	328
Catatan	F.2.1.2.7	Belanja Lain-Lain	328
Catatan	F.2.1.2.8	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	329
Catatan	F.2.1.2.9	Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	329
Catatan	F.2.1.2.10	Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	330
Catatan	F.2.1.2.11	Dana Alokasi Umum	330
Catatan	F.2.1.2.12	Transfer Dana Alokasi Khusus	330
Catatan	F.2.1.2.13	Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	330
Catatan	F.2.1.2.14	Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	331

Catatan	F.2.1.2.15	Dana Desa	331
Catatan	F.2.2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	294
Catatan	F.2.2.1	Arus Kas Masuk	331
Catatan	F.2.2.1.1	Pengelolaan dan Penjualan BMN	332
Catatan	F.2.2.1.2	Penjualan Aset Program Restrukturisasi	332
Catatan	F.2.2.1.3	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	332
Catatan	F.2.2.1.4	Penerimaan Investasi Pemerintah	332
Catatan	F.2.2.2	Arus Kas Keluar	333
Catatan	F.2.2.2.1	Belanja Modal	333
Catatan	F.2.2.2.2	Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	333
Catatan	F.2.2.2.3	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	333
Catatan	F.2.2.2.4	Penyertaan Modal Negara	333
Catatan	F.2.2.2.5	Pengeluaran Investasi Pemerintah	334
Catatan	F.2.3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	334
Catatan	F.2.3.1	Arus Kas Masuk	334
Catatan	F.2.3.1.1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	334
Catatan	F.2.3.1.2	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	336
Catatan	F.2.3.1.3	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	336
Catatan	F.2.3.1.4	Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	336
Catatan	F.2.3.2	Arus Kas Keluar	337
Catatan	F.2.3.2.1	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	337
Catatan	F.2.3.2.2	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	337
Catatan	F.2.3.2.3	Pengembalian Pinjaman	337
Catatan	F.2.4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	337
Catatan	F.2.4.1	Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	338
Catatan	F.2.4.2	Transito (Neto)	339
Catatan	F.2.4.3	Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	340
Catatan	F.2.4.4	Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	341

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Catatan	G.1	Ekuitas Awal	342
Catatan	G.2	Surplus/Defisit LO	342
Catatan	G.3	Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/mengurangi Ekuitas	342
Catatan	G.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	342
Catatan	G.3.2	Penggunaan SAL	342
Catatan	G.3.3	Penyesuaian SilPA	342
Catatan	G.3.4	Koreksi Nilai Persediaan	343
Catatan	G.3.5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	343
Catatan	G.3.6	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	343
Catatan	G.3.7	Revaluasi Aset BUMN	347
Catatan	G.3.8	Koreksi Lain-lain	347
Catatan	G.4	Transaksi Antar Entitas	353
Catatan	G.5	Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas	355
Catatan	G.6	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	355
Catatan	G.7	Ekuitas Akhir	356

INDEKS SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
BEJ	:	Bursa Efek Jakarta
BHMN	:	Badan Hukum Milik Negara
BI	:	Bank Indonesia
BKKBN	:	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	:	Badan Layanan Umum
BMN	:	Barang Milik Negara
BNP2TKI	:	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPMIGAS	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	:	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJT	:	Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan BPPN
	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPT
	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	:	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	:	Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BUJT	:	Badan Usaha Jalan Tol
BULOG	:	Badan Urusan Logistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
CBN	:	Cadangan Benih Nasional
CAR	:	<i>Capital Adequate Ratio</i>
CBP	:	Cadangan Beras Pemerintah
CFO	:	<i>Chief Financial Officer</i>
CGI	:	<i>Consultative Group on Indonesia</i>
CICR	:	<i>Consolidated Interest Coverage Ratio</i>
COO	:	<i>Chief Operating Officer</i>
CPI	:	<i>Consumer Price Index</i>
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAU	:	Dana Abadi Umat

DBH	:	Dana Bagi Hasil
DEP	:	Dana Ekonomi Produktif
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran DJBC
	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJKN
	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJP
	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DMO	:	<i>Domestic Market Obligation</i>
DNS	:	<i>Debt for Nature Swap</i>
DPM	:	Dana Penguatan Modal
DPPN	:	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DSCR	:	<i>Debt Service Coverage Ratio</i>
DTP	:	Ditanggung Pemerintah
EDI	:	<i>Electronic Data Interchange</i>
GBHN	:	Garis-Garis Besar Haluan Negara
GIZ-ProFI	:	<i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit -Promotion of Small Financial Institutions</i>
GIZ-GGPAS	:	<i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit -Good Governance in Population Administration Systems</i>
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
INDRA	:	<i>Indonesian Debt Restructuring Agency</i>
ITPT	:	Industri Tekstil dan Produksi Tekstil
JPY	:	<i>Japanese Yen</i>
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	:	Kementerian Negara/Lembaga
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPRSH	:	Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat
KPS	:	Kontraktor <i>Production Sharing</i>
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	:	Kiriman Uang
KUHR	:	Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	:	Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	:	Kas Umum Negara
KUT	:	Kredit Usaha Tani
LAK	:	Laporan Arus Kas
LBMN	:	Laporan Barang Milik Negara
LDKP	:	Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	:	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
LKBUN	:	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	:	Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	:	Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
MP3	:	Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	:	<i>Non-Performing Loan</i>
ORI	:	Obligasi Ritel Indonesia
PBS	:	<i>Project Based Sukuk</i>
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
PFK	:	Perhitungan Pihak Ketiga
PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
PIR	:	Perusahaan Inti Rakyat
PJPK	:	Penanggung Jawab Proyek Kerja sama
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPAP	:	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	:	<i>Past Service Liability</i>
PSO	:	<i>Public Service Obligation</i>
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	:	<i>Recovery of Aceh Nias Trust Fund</i>
RDI	:	Rekening Dana Investasi
RPD	:	Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	:	Rekening Pemerintah Lainnya
RTGS	:	<i>Real Time Gross Settlement</i>
SAA	:	<i>Separate Arrangement Agreement</i>
SA-BUN	:	Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	:	Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	:	Sistem Akuntansi Umum
SBN	:	Surat Berharga Negara
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara

SDA	: Sumber Daya Alam
SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
SiAP	: Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	: <i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SiKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	: Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
SP3	: Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SPU	: Sarana Pengembangan Usaha
SUN	: Surat Utang Negara
SWIFT	: <i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i>
TA	: Tahun Anggaran
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
THT	: Tabungan HariTua
TP	: Tim Pemberesan Aset
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	: <i>Treasury Single Account</i>
TSP	: Tempat Simpan Pinjam
USAID	: <i>United State Agency for International Development</i>
USD	: <i>United State Dollar</i>
UPP	: Unit Pelaksana Proyek
UP3	: Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah
USP	: Usaha Simpan Pinjam
UP/TUP	: Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2018	370
2	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2018	392
3	Laporan Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2018	419
4	Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (<i>Multi Years Contract</i>) Per 31 Desember 2018.....	499
5	Saldo Kas Di Rekening KPPN Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	501
6	Kas Pada K/L dan BUN Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	509
7	Belanja Dibayar Di Muka, Uang Muka Belanja dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	514
8	Piutang Pajak dan Penyisihan Pajak Per 31 Desember 2018	520
9	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	527
10	Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi Per 31 Desember 2018.....	534
11	Rincian Aset Kredit Eks BPPN dan Eks PT PPA Per 31 Desember 2018	537
12	Bagian Lancar TP/TGR Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	549
13	Persediaan Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	552
14	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) Tahun 2018.....	556
15	Ikhtisar Laporan Perusahaan Negara/Lembaga Di Bawah Pembinaan Kementerian Keuangan Tahun 2018	567
16	Laporan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Keuangan Internasional Per 31 Desember 2018	570
17	Ikhtisar Laporan Keuangan Non BUMN (Minoritas) Tahun 2018	572
18	Laporan Penghasilan Komprehensif LPS Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	577
19	Aset Tetap Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	579
20	TP/TGR Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	606

DAFTAR ISI

21	Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	612
22	Rincian Aset Eks BPPN Per 31 Desember 2018	618
23	Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2018	638
24	Daftar BMN Eks BMN <i>idle</i> yang Diserahkan Kepada Pengguna Barang atau Pemda Tahun 2018.....	645
25	Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	649
26	Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Per 31 Desember 2018.....	656
27	Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya Per 31 Desember 2018	664
28	Dana Kelolaan BLU pada Pusat Pembiayaan Perumahan Per 31 Desember 2018.....	674
29	Laporan Penilaian Kembali BMN untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018.....	677
30	Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk Per 31 Desember 2018.....	699
31	Laporan Pertanggungjawaban SBN Tahun 2018.....	702

**LRA PENDAPATAN
PEMERINTAH PUSAT
TA 2018**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)

Kode	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Realisasi/Persentase	% Realisasi/ Persentase
4	PENDAPATAN NEGARA	1.894.720.397.917.000	1.543.014.310.818.800	102,49%	1.090.314.913.084.000	277.298.664.200.712	104,6%
41	PENDAPATAN PERALIHAN	1.018.058.493.102.000	1.018.789.317.151.030	81,86%	1.384.303.843.758.110	179.259.633.392.592	13,04%
411	PENDAPATAN PAAJ DULAN NEGARI	1.379.358.493.102.000	1.479.567.964.310.330	89,28%	1.304.318.293.228.040	108.991.699.142.212	12,97%
4111	Pendapatan Pajak Penghasilan	834.131.462.182.000	1.49.977.029.681.808	87,79%	0.941.791.473.957.181	100.183.898.794.427	12,97%
41111	Pendapatan PPh Warga	38.134.000.000.000	04.093.144.441.922	108,44%	30.318.796.744.183	14.300.394.787.238	28,94%
411111	Pendapatan PPh Orang Borneo	15.402.410.000.000	26.549.508.906.102	172,37%	16.599.430.243.165	9.502.038.182.343	29,54%
411112	Pendapatan PPh Orang Borneo	22.727.640.000.000	28.113.852.120.999	167,69%	33.711.979.453.816	4.404.132.667.691	13,66%
411113	Pendapatan PPh Orang Lainnya	-	33.796.424.900	-	4.000.547.854	29.183.877.002	634,36%
41112	Pendapatan PPh Non Warga	816.598.413.162.000	076.105.716.752.444	80,46%	807.543.373.270.304	87.402.208.489.246	10,81%
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	164.912.990.000.000	134.974.637.190.000	81,80%	117.964.333.399.240	87.150.100.990.222	14,58%
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	12.281.980.237.000	18.008.015.803.134	146,83%	16.172.671.971.726	1.803.343.899.402	11,33%
411123	Pendapatan PPh Pasal 23	58.323.576.437.000	54.221.502.867.424	93,03%	43.136.722.092.407	11.566.383.772.984	24,80%
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	40.392.710.997.000	39.299.217.310.994	96,98%	34.005.679.655.600	3.793.337.605.318	16,86%
411125	Pendapatan PPh Pasal 25	22.209.410.000.000	9.406.726.317.200	42,35%	7.896.380.832.307	1.600.145.464.892	20,50%
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	349.336.383.712.000	232.131.439.879.617	66,51%	206.530.819.248.730	43.980.810.630.842	21,07%
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	61.181.086.370.000	50.638.032.804.000	82,77%	43.691.062.125.900	6.946.970.679.081	13,96%
411128	Pendapatan PPh Pasal	173.343.283.788.000	115.463.258.335.235	66,60%	106.310.936.330.644	9.131.222.004.609	84,17%
411129	Pendapatan PPh Non Warga Lainnya	14.937.271.011.000	141.924.999.699	0,95%	12.084.317.298.000	-11.942.403.298.222	-98,87%
41113	Pendapatan PPh Final	-	349.926.982	-	349.728.807	177.175	0,05%
411131	Pendapatan PPh Final	-	349.926.982	-	349.728.807	177.175	0,05%
41114	Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	-	10.111.764.996.449	-	8.933.959.207.488	1.177.296.382.944	12,19%
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	-	12.987.232	-	132.161.318	-119.172.794	-96,17%
411142	Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	-	167.200	-	218.978	-42.776	-21,95%
411143	Pendapatan PPh Pasal 23 Inper Ditanggung Pemerintah	-	-2.482.000	-	0	-2.482.000	-100,00%
411144	Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	-	503.900.816	-	614.803.046	-110.902.230	-18,04%
411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	-	1.892.891.197.246	-	1.702.566.638.147	190.234.639.617	11,18%
411147	Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	-	8.210.348.183.000	-	7.230.485.125.000	987.863.748.000	12,66%
411148	Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	-	1.616.143	-	0	1.616.143	100,00%

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
 (dalam rupiah)

LAMPIRAN I.A

Akron	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Realisasi/Perencanaan	% Realisasi/Perencanaan
4113	Pendapatan Hibah Pertumbuhan Nilai	541.801.130.000.000	537.291.509.249.242	99,14%	423.724.001.433.745	94.941.301.779.502	11,7%
41131	Pendapatan PPN	524.840.980.000.000	520.290.211.070.335	99,13%	403.528.491.810.923	96.861.779.489.816	13,7%
411311	Pendapatan PPN Dalam Negeri	361.296.910.000.000	333.921.220.457.36	92,43%	314.243.870.531.220	19.579.450.520.344	6,2%
411312	Pendapatan PPN Luar	163.543.970.000.000	186.400.183.247.892	114,03%	149.201.4.790.486.454	37.203.380.298.444	23,07%
411319	Pendapatan PPN Lainnya	131.060.000.000	46.670.094.872	43,48%	130.014.313.845	42.103.870.972	32,44%
41132	Pendapatan PRK	10.907.150.000.000	10.877.698.188.525	99,63%	17.190.106.807.333	-314.471.479.308	-1,8%
411321	Pendapatan PRK Dalam Negeri	12.212.000.000.000	12.794.638.786.486	104,77%	13.292.338.363.632	-497.679.278.729	-1,7%
411322	Pendapatan PRK Luar	4.700.100.000.000	4.108.000.394.085	87,40%	3.798.314.314.095	311.620.070.799	8,1%
411329	Pendapatan PRK Lainnya	43.090.000.000	-	-42,42%	107.278.090.318	-322.242.973.348	-123,2%
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	17.209.101.000.000	19.444.913.884.748	112,99%	16.770.246.937.130	2.674.566.947.618	15,9%
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	17.209.101.000.000	19.444.913.884.748	112,99%	16.770.246.937.130	2.674.566.947.618	15,9%
411311	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	295.448.921	0	0	295.448.921	0,0%
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	1.615.434.903.000	2.108.377.469.92	130,48%	2.175.377.434.026	13.000.031.046	0,6%
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	315.860.721.000	726.217.723.965	230,13%	593.937.270.928	160.280.263.039	26,8%
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	1.917.414.364.000	1.718.416.162.632	89,63%	1.460.177.403.746	238.238.758.878	18,1%
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	13.500.251.000.000	14.381.978.002.123	106,51%	13.335.011.458.26	3.115.966.203.270	17,6%
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Energi Lain	0	313.279.381.200	0	333.462.867.933	39.872.313.273	23,6%
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	86.032.028.000	0	33.360.141.728	50.637.486.270	143,0%
4114	Pendapatan APBN	0	32.748.454	0	1.216.911.247	-1.184.163.893	-97,2%
41141	Pendapatan APBN	0	32.748.454	0	1.216.911.247	-1.184.163.893	-97,2%
4119	Pendapatan Cukai	135.400.000.000.000	129.888.597.584.228	103,70%	133.288.149.392.121	6.200.400.194.104	4,1%
41191	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	140.120.000.000.000	135.540.410.242.37	103,8%	133.288.149.392.121	3.202.400.194.201	3,4%
411911	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	140.120.000.000.000	135.540.410.242.37	103,8%	133.288.149.392.121	3.202.400.194.201	3,4%
411912	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	0	1.99.533.597.286	0	1.497.123.925.280	-2.887.137.280	-3,2%
411913	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	0	6.418.779.159.796	0	3.567.480.537.290	80.326.617.290	13,2%
411914	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	0	76.596.534.33	0	-138.319.602.120	234.928.158.877	17,3%
411919	Pendapatan Cukai Lainnya	0	12.544.489.93	0	13.280.258.365	-148.028.414	-1,1%

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)**

LAMPIRAN I.A

Akta	Uraian Akta	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Realisasi/Perubahan	% Realisasi/Perubahan
4110	Pendapatan Pajak Lainnya	9.691.000.000.000	6.028.205.207.843	62,40%	6.736.473.246.078	-708.268.038.235	-10,37%
41101	Pendapatan Pajak Lainnya	9.691.000.000.000	6.139.694.676.421	63,25%	6.096.129.137.180	43.565.539.241	0,72%
411011	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	0	1.470.292.846.444		1.287.764.817.246	182.528.029.198	14,23%
411012	Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan	9.691.000.000.000	3.993.443.194.435	41,12%	3.713.003.308.722	279.441.886.713	7,28%
411013	Pendapatan PPh Bandera	0	6.564.499.298.235		989.275.599.315	-5.575.223.936.920	-59,17%
411019	Pendapatan Pajak Tidak Lapangan Lainnya	0	27.613.643.235		33.431.910.532	-5.818.267.297	-17,43%
41102	Pendapatan Bunga Pemungutan Pajak	0	489.001.531.422		646.280.248.918	-157.278.717.496	-24,33%
411021	Pendapatan Bunga Pemungutan PPh	0	-		406.970.258.056	-406.970.258.056	-100,00%
411022	Pendapatan Bunga Pemungutan PPh	0	489.442.531.422		239.310.159.159	-250.132.372.264	-51,11%
411023	Pendapatan Bunga Pemungutan PPh	0	1.166.072.446		492.303.415	-673.769.031	-58,27%
411024	Pendapatan Bunga Pemungutan PPh	0	3.129.994.377		207.238.246	-2.922.756.131	-93,43%
412	PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL	38.700.000.000.000	45.881.812.780.878	118,56%	39.213.974.870.471	6.667.837.910.407	17,00%
4121	Pendapatan Bea Masuk	38.700.000.000.000	39.116.745.938.731	100,81%	33.906.181.438.830	5.210.564.500.901	13,44%
41211	Pendapatan Bea Masuk	38.700.000.000.000	38.689.456.007.915	100,31%	34.821.588.171.832	3.867.867.836.083	10,00%
412111	Pendapatan Bea Masuk	33.700.000.000.000	37.407.985.338.433	108,31%	33.493.272.858.246	3.914.712.480.187	11,60%
412112	Pendapatan Bea Masuk Dengan Fasilitas Pembebasan atau Bebas (DPPH Nilai)	0	743.730		0	743.730	100,00%
412113	Pendapatan Dengan Asesmentasi Pabean	0	2.943.244.969.812		582.649.947.925	-2.360.605.021.887	-80,20%
412114	Pendapatan Bea Masuk Dengan Fasilitas Kemudahan impor Pajak Ekspor (MIE)	0	625.126.712.148		437.234.036.723	-187.892.675.425	-30,05%
412115	Denda dan Sanksi Administrasi dan Pelanggaran Fasilitas Pembebasan Terhadap Barang Tertentu yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (daerah Pabean)	0	19.682.005		0	19.682.005	100,00%
412116	Pendapatan Pajak Lainnya	0	3.706.614.633.488		280.946.213.722	-3.425.668.420.766	-92,43%
412119	Pendapatan Pajak Lainnya	0	11.673.813.285		5.181.494.807	-6.492.318.478	-55,61%
41212	Pendapatan Bea Masuk Terhadap	0	429.138.978.841		344.796.668.000	-84.342.310.841	-19,64%
412121	Pendapatan Bea Masuk Terhadap	0	247.290.857.894		182.209.971.000	-64.980.946.894	-26,27%
412122	Pendapatan Bea Masuk Terhadap	0	44.227.005		3.103.000	-41.124.005	-92,75%
412123	Pendapatan Bea Masuk Terhadap	0	1.791.233.994.005		63.294.247.005	-1.728.039.747.000	-96,46%
4122	Pendapatan Bea Reklamasi	3.000.000.000.000	6.704.000.793.927	223,47%	4.147.293.130.619	2.556.707.663.308	81,17%
41221	Pendapatan Bea Reklamasi	3.000.000.000.000	6.704.000.793.927	223,47%	4.147.293.130.619	2.556.707.663.308	81,17%
412211	Pendapatan Bea Reklamasi	3.000.000.000.000	6.703.991.249.924	223,43%	4.137.811.626.315	2.566.180.623.609	82,47%

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)**
(dalam rupiah)

LAMPIRAN I.A

Kode	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018		% Realisasi	TA 2017		Realisasi/Perkiraan	% Realisasi/Perkiraan
			Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		
412112	Pendapatan Cukai Administrasi Bea Kukai	0	1.079.091.948	-	9.207.233.576	-4.207.241.292	-48,37%		
412113	Pendapatan Bunga Bea Kukai	0	2.432.200	-	294.300.484	-294.300.484	-11,66%		
42	PENDAPATAN PEREMBAHAN NEGARA BERAS PALAK	275.471.909.418.000	409.320.209.488.446	144,61%	311.218.293.837.083	98.102.906.601.362	31,92%		
421	PENDAPATAN SUBSIDER DAYA KULAK	103.074.898.791.000	180.292.699.821.041	174,19%	111.132.042.817.912	68.460.407.489.224	61,59%		
4211	PENDAPATAN SUBSIDER BUNDA	58.582.710.000.000	101.488.059.318.900	172,32%	48.200.042.970.330	43.263.483.339.484	90,17%		
42111	Pendapatan Mirip Bumi	58.582.710.000.000	101.488.059.318.900	172,32%	48.200.042.970.330	43.263.483.339.484	90,17%		
421111	Pendapatan Pajak Bumi	59.582.710.000.000	101.488.059.318.900	171,03%	58.200.042.970.330	42.263.483.339.484	72,72%		
4212	PENDAPATAN GAS BUMI	20.706.330.000.000	41.302.491.775.449	199,49%	23.439.500.993.613	17.462.480.708.846	74,72%		
42121	Pendapatan Gas Bumi	20.706.330.000.000	41.302.491.775.449	199,49%	23.439.500.993.613	17.462.480.708.846	74,72%		
421211	Pendapatan Gas Bumi	20.706.330.000.000	41.302.491.775.449	199,49%	23.439.500.993.613	17.462.480.708.846	74,72%		
4213	PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	17.458.522.076.000	30.313.004.021.480	174,14%	23.763.108.037.383	6.550.901.984.295	27,62%		
42131	Pendapatan Bumi Tambak Pertambangan Mineral dan Batubara - Eksplorasi	393.793.083.000	1.003.326.976.462	254,32%	513.823.977.329	412.479.904.932	80,38%		
421312	Pendapatan Bumi Tambak Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi	376.028.290.000	442.247.153.182	117,61%	513.823.977.329	442.247.153.182	86,29%		
421313	Pendapatan Bumi Tambak Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi	0	2.066.925	-	0	20.869.921	-		
42133	Pendapatan Bumi Tambak Pertambangan Mineral dan Batubara	17.064.728.993.000	29.309.677.048.114	171,75%	23.249.285.064.989	6.529.929.994.122	28,09%		
421331	Pendapatan Bumi Tambak Pertambangan Mineral dan Batubara	13.763.795.086.000	21.824.950.537.719	158,75%	23.249.285.064.989	6.529.929.994.122	28,09%		
421332	Pendapatan Bumi Tambak Pertambangan Mineral dan Batubara	1.433.245.299.000	2.474.645.328.298	172,32%	0	0	-		
421333	Pendapatan Bumi Tambak Pertambangan Mineral dan Batubara	1.828.688.608.000	3.014.299.188.177	164,87%	0	0	-		
421334	Pendapatan Bumi Tambak Pertambangan Mineral dan Batubara	36.521.247.000	89.309.723.877	244,27%	0	0	-		
421335	Pendapatan Bumi Tambak Pertambangan Mineral dan Batubara	490.572.384.000	1.421.381.483.239	290,02%	0	0	-		
421336	Pendapatan Bumi Tambak Pertambangan Mineral dan Batubara	305.520.000.000	687.472.008.732	225,02%	0	0	-		
421339	Pendapatan Bumi Tambak Pertambangan Mineral dan Batubara	17.468.000.000	215.783.268.179	123,42%	0	0	-		
4214	PENDAPATAN KEHUTANAN	4.100.711.436.000	4.780.407.626.602	116,59%	4.101.318.540.911	408.448.187.692	9,96%		
42141	Pendapatan Denda Sengketa	1.538.699.022.000	1.982.019.914.344	128,85%	1.728.925.948.987	209.083.926.405	14,64%		
421411	Pendapatan Denda Sengketa	1.828.699.022.000	1.982.019.914.344	108,43%	1.728.925.948.987	221.283.925.407	14,64%		
42142	Pendapatan Perolehan Hak Guna Bumi	921.028.787.000	1.141.414.248.646	123,93%	918.254.417.007	222.026.801.801	24,29%		
421421	Pendapatan Perolehan Hak Guna Bumi	921.028.787.000	1.141.414.248.646	123,93%	918.254.417.007	222.026.801.801	24,29%		
42143	Pendapatan Bumi Tambak Pertambangan Batu Bara	308.912.809.000	101.782.194.598	48,81%	490.977.518.390	61.294.877.134	12,47%		

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
 (dalam rupiah)

LAMPIRAN I.A

Akru	Uraian Akru	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kemlhan/Perumna	% Kemlhan/Perumna
42143	Pendapatan dari Unit Usaha Perumahan Hasil Pasar (UPUP)	255.912.209.000	1.017.722.192.505	49,41%	40.477.518.325	61.254.477.126	151,12%
42144	Pendapatan dari Penyediaan Rumah Sederhana Hasil Penghapusan Fasilitas Subsidi	1.181.072.241.000	1.258.241.339.894	106,49%	1.414.058.24.507	121.188.612.307	8,47%
42145	Pendapatan Kegiatan Sosial dan Kesehatan (Penghapusan Fasilitas Subsidi)	1.181.072.241.000	1.258.241.339.894	106,49%	1.414.058.24.507	121.188.612.307	8,47%
42146	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42147	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42148	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42149	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42150	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42151	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42152	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42153	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42154	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42155	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42156	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42157	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42158	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42159	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42160	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42161	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42162	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42163	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42164	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42165	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42166	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42167	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42168	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42169	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42170	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42171	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42172	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42173	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42174	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						
42175	Pendapatan dari Sumbangan dan Bantuan						

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
 (dalam rupiah)

LAMPIRAN I.A

Aksh	Uraian Aksh	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Realisasi/Pelebihan	% Realisasi/Pelebihan
424	PENDAPATAN BENDAHAYATAN NEGARA	43.304.597.631.000	34.054.034.336.413	127,23%	41.734.433.334.549	1.747.432.334.817	134,86%
4241	Pendapatan Jasa Lainnya Umum	41.333.924.544.000	46.813.637.134.983	113,23%	44.326.619.466.173	4.503.217.668.818	104,13%
42411	Pendapatan Pengelolaan Barang dan Jasa Berupa Masyarakat	20.291.568.040.000	28.179.009.104.109	113,80%	26.499.128.190.497	3.340.478.428.218	124,71%
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Umum Sate	13.214.007.167.000	13.468.133.348.316	101,91%	12.514.890.768.411	603.241.777.911	74,53%
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendaftaran	8.644.424.803.000	11.003.330.293.548	127,24%	9.342.338.840.346	1.370.271.468.202	134,13%
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga Keagamaan, Intelektual, Keahlian dan Teknologi	290.977.229.000	440.282.463.602	151,34%	374.468.813.074	43.892.897.508	17,46%
424114	Pendapatan Jasa Persewaan	237.343.000	70.032.706	29,50%	997.339.903	-677.237.207	-41,98%
424115	Pendapatan Jasa Bandar Laut, Kepulauan dan Kemungkinan	333.621.364.000	301.504.866.333	118,88%	300.531.198.217	61.503.868.141	48,66%
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	2.329.409.024.000	2.369.508.853.792	110,33%	2.469.169.897.606	100.036.954.184	4,03%
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Perikanan	39.860.340.000	336.894.233	0,84%	521.538.426	-34.664.196	-30,74%
424118	Pendapatan Pengelolaan Barang	444.994.734.000	13.961.044.000	3,14%	578.022.735	13.381.021.269	3313,31%
424119	Pendapatan Jasa Pengelolaan Barang dan Jasa Lainnya	0	890.790.194.132	77,43%	590.378.472.832	300.378.683.267	51,33%
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah Perairan Terbatas	1.546.022.041.000	1.307.320.597.604	84,63%	1.174.153.943.107	303.808.314.497	28,43%
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Cukai	1.322.343.342.000	1.257.203.387.695	80,28%	976.117.914.316	281.085.473.176	28,80%
424123	Pendapatan Pengelolaan Perikanan dan Jasa Lainnya	0	464.465.312		670.621.206	-404.167.894	-48,63%
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	434.278.709.000	2.49.552.704.575	56,87%	196.428.797.286	31.725.909.287	27,02%
42413	Pendapatan Dana Monev dan Monev	18.713.394.708.000	17.021.994.124.394	90,96%	17.231.310.928.408	294.824.184.918	1,76%
424133	Pendapatan Program Monev	3.399.232.000	4.231.943.877	114,23%	7.192.213.924	-2.860.272.047	-38,27%
424134	Pendapatan Program Dana Bantuan Sektoral	225.117.690.000	463.567.004.532	144,28%	424.883.174.216	8.683.831.316	1,91%
424135	Pendapatan Program Dana Bantuan Sektoral	38.647.690.000	23.023.867.116	59,58%	26.889.223.395	-3.659.258.280	-13,71%
424136	Pendapatan Program Dana Bantuan Sektoral	30.000.000.000	887.202.481.312	2951,43%	734.207.224.726	113.598.254.726	13,00%
424138	Pendapatan Dana Perencanaan Keperawatan	11.307.000.000.000	14.413.921.297.114	127,50%	14.277.243.700.911	136.677.587.604	0,94%
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Kemanusiaan Lainnya	1.807.730.000.000	1.807.642.534.216	100,27%	1.807.739.386.465	42.003.377.251	2,37%
42414	Pendapatan dari pengelolaan BUMN pada Pengelolaan Barang	334.101.754.000	344.213.268.248	103,00%	320.029.428.163	64.118.838.885	207,44%
424141	Pendapatan dari pengelolaan pengelolaan Pengelolaan Barang	334.101.754.000	344.213.268.248	103,00%	320.029.428.163	64.118.838.885	207,44%
4242	Pendapatan Hibah Badan Usaha Umum	11.498.694.000	90.948.104.000	791,67%	174.211.836.000	-43.263.687.804	-47,78%
42421	Pendapatan Hibah Transfer - Uang	3.398.000.000	30.917.013.549	912,87%	130.380.961.919	-99.910.884.130	-48,44%
424211	Pendapatan Hibah Transfer Dana Negara/Perantara - Uang	1.964.000.000	2.349.722.206	119,43%	308.500.000	1.761.222.206	248,26%

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)**
(dalam rupiah)

LAMPIRAN I.A

Akru	Uraian Akru	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Revisi/Perubahan	% Realisasi/Perubahan
424212	Pendapatan Hibah Tidak Dalam Negeri-Lampung-Batas Ulang - Ulang	1.050.000.000	12.213.004.512	1163,15%	10.803.243.532	1.409.760.979	132,05%
424213	Pendapatan Hibah Tidak Dalam Negeri-Pusat - Lain	6.293.000.000	28.728.333.028	456,51%	137.775.875.033	-108.447.541.017	-79,66%
424215	Pendapatan Hibah Tidak Luar Negeri-Lampung-Batas Ulang - Ulang	0	5.443.024.982	-	0	5.443.024.982	-
424216	Pendapatan Hibah Tidak Luar Negeri-Silang - Ulang	0	1.804.923.000	-	1.892.246.375	-88.323.375	-4,67%
424221	Pendapatan Hibah Tidak Dalam Negeri-Silang - Ulang	1.939.499.000	31.198.130.000	1608,40%	23.029.124.632	8.168.995.368	35,47%
424222	Pendapatan Hibah Tidak Dalam Negeri-Lampung-Batas Ulang - Ulang	240.000.000	9.277.265.692	3865,51%	801.750.000	8.475.515.692	1057,12%
424229	Pendapatan Hibah Tidak Dalam Negeri - Lain	0	11.673.500	-	0	11.673.500	-
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	543.880.134.000	1.556.880.270.888	286,12%	318.504.584.410	877.878.178.112	268,87%
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	245.880.124.000	1.500.082.712.889	289,18%	516.904.594.410	877.878.178.112	268,87%
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	24.970.290.000	69.088.749.700	276,68%	63.207.955.815	5.880.793.885	9,31%
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Batas Ulang	414.603.018.000	1.302.243.531.482	314,23%	441.692.593.532	861.020.811.920	194,80%
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga Daerah	158.308.818.000	184.520.473.422	117,80%	73.808.699.122	110.741.974.300	150,04%
4243	Pendapatan dan Alokasi APBN	0	238.873.713.000	-	0	238.873.713.000	-
424421	Pendapatan dan Pengeluaran BLU yang Berasal dari Hasil Pemrosesan Pusat di luar Kementerian/Departemen/ Lembaga	0	191.521.424.832	-	0	191.521.424.832	-
424422	Pendapatan dan Pengeluaran BLU yang Berasal dari Hasil Pemrosesan Pusat dalam Lingkup Kementerian/Departemen/ Lembaga	0	44.352.278.832	-	0	44.352.278.832	-
4249	Pendapatan BLU Lainnya	1.491.630.290.000	4.398.810.494.237	294,10%	2.341.096.642.691	2.057.713.851.546	87,27%
42491	Pendapatan BLU Lainnya	1.491.630.290.000	4.183.333.918.297	280,29%	2.335.547.970.248	1.847.886.948.049	79,23%
424911	Pendapatan jasa layanan Perbankan BLU	1.491.630.290.000	4.024.154.940.914	269,78%	2.311.074.744.722	1.713.080.206.192	74,12%
424912	Kontribusi, Fee, dan Biaya Bank Lain Sebagai Akibat dari Penggunaan Burung-burung dan BLU	0	343.344.744	-	0	343.344.744	-
424913	Pendapatan Subsidi dari Transaksi - BLU	0	2.844.811.212	-	0	2.844.811.212	-
424914	Pendapatan Kontrol Biaya Burang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	26.951.018.112	-	0	26.951.018.112	-
424916	Pendapatan Kontrol Biaya Hasil BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	788.647.902	-	0	788.647.902	-
424917	Pendapatan Penghasilan Taxation Penerimaan/ Tol - BLU	0	1.754.411.242	-	0	1.754.411.242	-
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	1.26.884.743.288	-	0	1.26.884.743.288	-
42492	Pendapatan BLU Lainnya dan Sewa	0	213.840.138.240	-	0	213.840.138.240	-
424921	Pendapatan BLU Lainnya dan Sewa Tanah	0	4.349.166.632	-	0	4.349.166.632	-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
 (dalam rupiah)

LAMPIRAN I.A

Akta	Uraian Akta	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Realisasi/Perencanaan	% Realisasi/Perencanaan
424923	Pendapatan BLU Lamps dari Sisa Gedung	0	18.520.007.000		828.244.272	17.711.763.112	2112,96%
424924	Pendapatan BLU Lamps dari Sisa Keuangan	0	1.702.824.720.000		6.789.074.817	164.643.883.287	248,12%
424924	Pendapatan BLU Lamps dari Sisa Fasilitas dan Pemas	0	9.240.417.746		187.079.006	9.001.341.780	4839,32%
424924	Pendapatan BLU Lamps dari Sisa Aset Tetap Lainnya	0	4.420.943.152		48.651.000	4.001.350.157	4029,63%
424929	Pendapatan BLU Lamps dari Sisa Lainnya	0	2.740.872.488		268.000	3.762.372.488	19125,241%
424934	Pendapatan BLU Lamps dan Fasilitas BLU	0	644.484.800		4.300.000	441.188.800	12098,34%
424934	Pendapatan BLU Lamps dari Fasilitas Aset Tetap Lainnya BLU	0	513.346.000		0	513.346.000	
424939	Pendapatan BLU Lamps dari Fasilitas Bepilannya BLU	0	111.037.800		3.300.000	100.772.800	1995,02%
425	PENDAPATAN LAINNYA	81.743.114.091.000	128.814.010.018.218	154,12%	108.834.261.718.942	18.788.448.380.848	18,14%
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengalihan BUK, Item Baku Tekuk, dan Perumahan Badan Amnont BUK	23.313.311.604.000	47.238.074.744.032	202,42%	26.444.748.503.731	30.580.230.244.432	74,87%
42511	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi BUK Lintas	18.009.018.694.000	22.108.192.728.948	181,17%	17.898.210.204.939	8.373.540.494.615	26,89%
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Bunkar	14.216.751.437.000	19.217.688.078.032	135,45%	18.056.247.278.61	2.437.428.799.419	14,28%
425113	Pendapatan Penjualan Hasil Perikanan, Perikanan, Perikanan, Perikanan dan Budidaya	33.073.390.000	83.928.026.672	250,81%	81.220.259.944	-13.801.203.270	-18,31%
425113	Pendapatan Penjualan Dolere-somere Perikanan	18.824.000	1.380.489.92	739,43%	1.433.891.000	-338.401.084	-18,31%
425114	Pendapatan Penjualan Cideriga Baku Perikanan Dan Baku Operat Four Pharti	702.987.210.000	3.333.303.918.14	477,39%	404.358.084.919	2.928.925.833.151	739,33%
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produk NonLamp Lainnya	7.801.841.000	22.529.180.12	417,07%	51.018.843.844	-18.479.663.719	-28,21%
42512	Pendapatan dari Penjualan/Perdagangan BUK	188.592.181.000	250.837.244.131	144,71%	198.631.000.809	94.194.177.829	27,94%
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah Gedung dan Bangunan	131.773.000	22.124.812.448	16790,10%	1.011.857.500	21.112.954.949	2098,53%
425123	Pendapatan dari Penjualan Fasilitas dan Pemas	8.183.437.000	76.098.520.92	929,81%	22.309.247.625	53.779.273.288	340,19%
425123	Pendapatan Keterserut Sisa BUK Keras Negeri Gedung B	7.824.348.000	17.542.583.52	224,59%	17.481.104.627	61.448.821	0,21%
425124	Pendapatan dari Takar Pemasar Tanah, Gedung dan Bangunan	0	133.365.000		114.500	120.150.500	118122,71%
425125	Pendapatan dari Pemeliharaan BUK Lainnya	133.448.601.000	1.24.918.882.82	87,93%	135.768.642.488	-20.849.778.661	-13,32%
425129	Pendapatan dari Penjualan BUK	941.188.091.000	1.878.471.218.630	187,29%	983.190.138.104	1.072.281.061.472	213,10%
425131	Pendapatan Sisa Tanah, Gedung dan Bangunan	291.910.659.000	1.321.599.998.94	511,23%	423.279.201.012	1.098.220.791.212	235,44%
425133	Pendapatan Sisa Perumahan dan Pemas	1.780.818.000	8.952.903.92	508,51%	14.257.024.288	-4.404.128.464	-27,44%
425133	Pendapatan Sisa Jalan, Vihari dan Jaringan	73.000.000	788.092.24	1074,12%	3.265.920.000	-1.297.828.126	-47,34%
425134	Pendapatan dari KTR Tanah, Gedung dan Bangunan	0	18.022.487.08		7.949.200.445	10.073.286.640	128,71%

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)**
(dalam rupiah)

LAMPIRAN 1.A

Akru	Uraian Akru	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Realisasi/Pencapaian	% Realisasi/ Pencapaian
423133	Pendapatan dari KCP Revisi dan Hutan	0	98.230.000		1.000	98.230.000	9827900,00%
423137	Pendapatan dari Bunga, Gaji, dan Sisa (BGI)	0	340.047.372		0	340.047.372	
423138	Pendapatan dari Bunga, Sisa, dan Gaji (BSG)	0	3.123.508		0	3.123.508	
423139	Pendapatan dari Pembayaran SPPL/Lampiran	647.438.814.000	23.667.298.248	3,68%	53.238.502.319	-29.571.214.071	-55,13%
42314	Pendapatan dari Penghasilan BUMN dan Kegiatan Negeri dan Kegiatan Lain-lain	90.000.000	578.811.888.078		0	0	
423141	Pendapatan dari Penghasilan BUMN yang Bersifat dari KIKKS	0	497.482.094.878		401.644.630.034	-95.847.864.844	-23,88%
423142	Pendapatan dari Penghasilan BUMN yang Bersifat dari KIKKS	0	26.519.2983.208		2.202.433.000	24.316.860.208	91,31%
423143	Pendapatan dari Pembayaran Asuransi	0	789.691.283		1.121.249.463	-331.558.180	-29,55%
423144	Pendapatan dari Asuransi dan Sisa Lainnya	0	46.696.464.000		2.687.217.200	43.909.246.800	94,05%
423145	Pendapatan dari Penghasilan BUMN dan Kegiatan Negeri Lain-lain	90.000.000	6.686.754.332	7,32%	207.281.593.235	-190.594.838.903	-28,82%
42315	Pendapatan dan Pengeluaran Sisa dan Pengeluaran Sisa Lainnya	10.887.281.000	62.264.481.298		0	62.264.481.298	
423151	Pendapatan Pengeluaran Sisa dan Pengeluaran Sisa Lainnya	10.887.281.000	62.264.481.298	58,07%	0	62.264.481.298	58,07%
42316	Pendapatan dan Pengeluaran Sisa dan Pengeluaran Sisa Lainnya	0	20.658.579.278.204		0	0	
423163	Pendapatan Sisa dan Pengeluaran Sisa Lainnya	6.113.900.000.000	7.499.912.603.785	122,87%	6.229.688.148.016	1.269.224.455.769	20,30%
423164	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Negeri	67.967.594.000	13.155.666.675.72	19,37%	7.297.270.050.795	12.418.394.624.927	18,41%
42317	Pendapatan dan Biaya Sisa dan Pengeluaran Sisa Lainnya	90.000.000.000	1.391.370.937.601		1.197.218.797.200	194.152.140.401	
423171	Pendapatan dari Sisa dan Pengeluaran Sisa Lainnya	678.242.124.000	1.072.659.813.485	158,13%	862.796.192.334	209.463.621.151	34,27%
423172	Pendapatan dari Sisa dan Pengeluaran Sisa Lainnya	221.797.876.000	278.607.583.295	125,59%	294.722.533.148	-16.114.949.853	-6,07%
423173	Pendapatan dari Pembayaran Sisa dan Pengeluaran Sisa Lainnya	0	314.568.805		0	314.568.805	
42318	PENDAPATAN KEMENTERIAN DAN PANGKALAN MILITER	14.638.081.241.000	17.708.138.578.338		11.138.594.188.310	6.569.544.390.028	
423201	Pendapatan dan Pengeluaran Sisa dan Pengeluaran Sisa Lainnya	3.298.559.609.000	3.508.128.693.298		1.891.920.783.910	1.616.197.909.388	
423211	Pendapatan Pajak	1.000.154.900.000	1.097.623.900.000	109,73%	1.067.806.918.975	129.816.981.025	12,70%
423212	Pendapatan Sisa dan Pengeluaran Sisa Lainnya	137.920.084.100	222.529.046.100	161,42%	174.029	222.354.961.100	100,00%
423213	Pendapatan dan Pengeluaran Sisa dan Pengeluaran Sisa Lainnya	798.412.230.000	931.121.100.000	116,63%	0	931.121.100.000	100,00%
423214	Pendapatan dan Pengeluaran Sisa dan Pengeluaran Sisa Lainnya	90.145.800.000	284.912.443.000	316,06%	0	284.912.443.000	100,00%
423215	Pendapatan dan Pengeluaran Sisa dan Pengeluaran Sisa Lainnya	497.288.830.000	740.178.830.000	148,71%	0	740.178.830.000	100,00%
423216	Pendapatan dan Pengeluaran Sisa dan Pengeluaran Sisa Lainnya	193.511.250.000	1.16.543.148.945	60,23%	0	116.543.148.945	100,00%

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
 (dalam rupiah)
 LAMPIRAN I.A

Akron	Uraian Akron	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Realisasi/Perkiraan	% Realisasi/ Perkiraan
423217	Pendapatan Pajak Bumi dan Pajak Lain-lain	179.340.513.000	20.650.153.432	11,52%	0	20.650.153.432	115,22%
423218	Pendapatan Pajak Bumi dan Pajak Lain-lain	461.654.000.000	498.394.313.000	107,94%	0	498.394.313.000	107,94%
423219	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	0	1.187.313.725	100,00%	4.121.800.000	-4.034.486.275	-97,12%
423220	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	488.008.000.000	801.888.988.248	164,32%	143.100.318.132	658.788.670.116	163,33%
423221	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	1.567.974.800.000	3.461.182.283.000	220,82%	432.259.509.318	1.028.922.773.682	230,82%
423222	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	229.524.800.000	1.227.711.667.409	534,67%	0	1.227.711.667.409	100,00%
423223	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	109.164.023.000	1.611.101.991.132	1472,88%	127.200.611.985	1.483.890.379.147	1357,88%
423224	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	0	59.464.713.168	100,00%	61.126.779.310	-1.662.066.142	-2,72%
423225	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	0	22.748.091.174	100,00%	102.999.309.842	-80.251.218.668	-77,92%
423226	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	0	89.538.542.485	100,00%	0	89.538.542.485	100,00%
423227	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	178.814.402.000	170.472.708.619	95,33%	829.074.608.907	-1.104.371.900.288	-61,81%
423228	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	0	317.217.000	100,00%	363.779.000	-46.562.000	-12,80%
423229	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	1.601.179.500	949.954.500	59,33%	1.084.950.882	-514.996.382	-32,14%
423230	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	22.413.284.000	28.348.178.945	126,44%	23.854.637.185	4.493.541.760	19,24%
423231	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	0	7.021.801.742	100,00%	4.301.238.488	2.720.563.254	38,86%
423232	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	0	669.443.345	100,00%	568.487.997	100.955.348	15,08%
423233	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	43.000.000.000	97.828.002.543	227,50%	148.993.318.088	-51.165.315.545	-20,47%
423234	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	63.000.000.000	438.438.080.132	695,78%	0	438.438.080.132	100,00%
423235	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	22.000.000.000	89.431.578.202	406,51%	561.333.321.860	-471.901.743.558	-213,37%
423236	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	22.261.722.000	33.428.593.945	150,15%	88.331.720.484	-54.903.126.539	-246,81%
423237	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	0	1.234.518.123.501	100,00%	418.346.608.280	816.171.515.221	65,79%
423238	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	31.000.000.000	262.565.000.484	847,00%	94.500.081.512	268.064.918.972	864,73%
423239	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	1.100.000.000	247.731.733.928	225,19%	1.723.459.983	523.459.983	47,44%
423240	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	92.018.901.000	372.324.301.627	404,62%	348.626.574.432	417.675.673.432	102,39%
423241	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	1.300.000.000	48.393.707.962	3720,27%	47.979.288.992	414.418.673.970	3170,27%
423242	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	99.000.000.000	14.644.901.005	14,79%	47.234.463.713	-51.789.562.708	-52,30%
423243	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	63.000.000.000	83.248.303.132	131,35%	0	83.248.303.132	100,00%
423244	Pendapatan Pajak dan Administrasi Pajak Lain-lain	7.000.000.000	794.300.000	11,33%	0	794.300.000	100,00%

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
 (dalam rupiah)

LAMPIRAN I.A

Akru	Uraian Akru	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Realisasi/Perubahan	% Realisasi/Perubahan
423248	Pendapatan Hasil Pengendalian Uang Melayan	66.000.000	73.990.840.299	113,144,1%	22.147.830.646	33.841.011.716	243,10%
423249	Pendapatan Uang Sisaan Tidak Pindah Lainnya yang Telah Dipisahkan/Disiapkan Pengabdian	660.000.000	30.213.700.246	7908,14%	0	30.213.700.246	-
423250	Pendapatan Perbankan	926.491.475,000	1.506.453.110,535	164,89%	2.093.837,293,198	-1.087.374.982,794	-49,44%
423251	Pendapatan Perbankan Tengah Kerya Aduh	830.000.000.000	1.423.420.821.920	167,45%	2.378.924.484,994	-1.135.513.662,994	-44,75%
423252	Pendapatan Perbankan Perbankan	12.149.900.000	17.046.100.000	140,33%	0	17.046.100.000	-
423253	Pendapatan Perbankan & Bidang Perdagangan	10.345.000.000	44.497.992.020	421,98%	0	44.497.992.020	-
423254	Pendapatan Perbankan & Bidang Kesehatan	24.081.000.000	43.459.250.000	180,79%	0	43.459.250.000	-
423255	Pendapatan Perbankan & Bidang Lingkungan, Hidro dan Kehutanan	4.331.333.000	4.025.963.330	93,20%	28.862.778,314	-22.806.814,984	-44,92%
423259	Pendapatan Perbankan Lainnya	25.376.000.000	31.923.285,320	126,21%	0	31.923.285,320	-
423260	Pendapatan Pelayanan Kesehatan I	8.627.000.815,000	8.491.998.385,000	98,43%	9.080.142,986,000	-588.847.601,000	-4,48%
423261	Pendapatan Perbankan Surat dan Pengendali (SPH)	854.775.253,000	625.080.330,000	73,25%	660.298.000,000	-13.177.870,000	-3,31%
423262	Pendapatan Perbankan Surat dan Pengendali (SPH)	508.263.623,000	604.131.413,000	118,88%	572.268.710,000	32.081.792,000	3,41%
423263	Pendapatan Perbankan Surat dan Pengendali (SPH)	2.849.200.000,000	2.462.683.223,000	86,43%	2.902.970,860,000	-1.099.897.311,000	-37,46%
423264	Pendapatan Penghasilan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	73.238.773,000	2.821.528.200,000	373,31%	80.598.700,000	201.829.600,000	230,54%
423265	Pendapatan Balai Pembiayaan Kemajuan (BPKM)	3.276.250.000,000	2.463.384.973,000	109,15%	2.317.652.905,000	167.445.070,000	7,24%
423266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	1.357.532.700,000	1.244.024.000,000	91,61%	1.217.287.432,000	122.764.565,000	13,92%
423267	Pendapatan Ujian Keterampilan Hengmutal	313.026.450,000	29.747.800,000	86,14%	29.029.150,000	-491.300,000	-1,46%
423268	Pendapatan Perbankan Surat Mula Kendaraan Kalah Cuanah	131.287.200,000	170.302.000,000	112,48%	172.810.270,000	-2.508.270,000	-1,43%
423269	Pendapatan Nomor Kupon Kendaraan Bermotor Perban	512.980.000,000	3.474.973.140,000	106,79%	3.323.652.500,000	15.022.640,000	2,87%
423270	Pendapatan Pelayanan Kesehatan II	418.827,101,000	870,003,348,813	210,45%	1.201,293,327,497	-448,802,018,818	-42,43%
423271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lusa Sama Negara	8.000.000,000	997.200,000	11,31%	0	997.200,000	-
423272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lusa Sama Negara	8.000.000,000	999.200,000	11,37%	0	999.200,000	-
423273	Pendapatan Perbankan Surat (in-Serjan) Adm dan Bahan Pasok dan Perbankan Surat Keterangan Cuanah Kapedban	3.699.200,000	2.998.610.713,000	81,01,31%	3.324.000,000	296.286.713,000	89,13,6%
423274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kemandiran (STCK)	267.972.800,000	202.490.803,000	75,71%	264.844.460,000	-41.821.573,000	-23,38%
423275	Pendapatan Kupon Sisaan Pengawasan	20.979.253,000	28.909.426,411	140,84%	33.538.130,000	3.442,286,409	21,64%
423276	Pendapatan Pengawasan Objek VMD	99.208.866,000	234.724.262,408	217,07%	169.933.842,378	164.790.371,847	98,97%
423279	Pendapatan Monevun Kapedban Lainnya	8.500.000,000	8.252.900,000	97,09%	1.009.840,094,878	-1.021.952.194,878	-99,13%
423280	Pendapatan Administrasi, Pengawasan, Kesehatan, Keahlian dan Sertifikasi	420.190.071,000	500.109.221,411	124,29%	0	500.109.221,411	-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
 (dalam rupiah)

LAMPIRAN I.A

Akter	Uraian Akter	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Realisasi/Perkiraan	% Realisasi/Perkiraan
423281	Pendapatan Abstrak	15.743.600.000	19.279.600.000	122,45%	0	19.279.600.000	0
423282	Pendapatan Pajak, Sertifikat dan Surat-surat di Bidang Lapangan Hasil dan Kesehatan	1.528.924.000	928.417.105	59,53%	0	928.417.105	0
423283	Pendapatan Pajak, Sertifikat, Kolibrasi dan Surat-surat di Bidang Perindustrian	89.280.910.000	87.180.831.922	97,65%	0	87.180.831.922	0
423284	Pendapatan Pajak, Sertifikat, Kolibrasi dan Surat-surat di Bidang Perdagangan	13.978.405.000	27.202.089.229	193,34%	0	27.202.089.229	0
423285	Pendapatan Pajak, Sertifikat, Kolibrasi dan Surat-surat di Bidang Kesehatan	23.828.281.000	42.328.281.237	174,48%	0	42.328.281.237	0
423286	Pendapatan Pajak, Sertifikat, Kolibrasi dan Surat-surat di Bidang Pekerjaan Umum	2.892.810.000	7.629.218.982	196,02%	0	7.629.218.982	0
423287	Pendapatan Pajak, Sertifikat dan Kolibrasi di Bidang Perhubungan	1.311.263.604.000	1.011.480.009.428	77,13%	0	1.011.480.009.428	0
423288	Pendapatan Pajak, Sertifikat dan Kolibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika	74.240.000.000	1.981.000.292.908	266,70%	0	1.981.000.292.908	0
423289	Pendapatan Pajak, Sertifikat, Kolibrasi dan Surat-surat di Bidang Energi	88.928.122.000	78.028.924.200	87,74%	0	78.028.924.200	0
4290	PENDAPAT KEBERPAK PENLINDUNG BOKAL DAN BEKALAN	6.212.181.324.000	7.421.023.232.146	119,44%	0	6.897.179.049.096	8,22%
4291	PENDAPAT JASA KESEHATAN	3.208.433.001.000	3.849.248.333.337	119,98%	0	3.849.248.333.337	4,37%
423111	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (PKTP)	135.690.120.000	130.987.961.825	111,27%	0	134.526.210.545	31,24%
423112	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (PKTL)	2.244.926.960.000	2.801.230.925.448	124,78%	0	3.258.989.625.466	-21,24%
423113	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	628.810.791.000	574.772.060.548	91,53%	0	574.772.060.548	0
423114	Pendapatan Jasa Kesehatan Kesehatan	23.990.880.000	48.328.810.238	146,14%	0	48.328.810.238	0
423115	Pendapatan Jasa Kesehatan Yakin Kesehatan	140.210.483.000	228.929.217.068	166,17%	0	228.929.217.068	0
423116	Pendapatan Kegiatan Tenaga Kesehatan	23.220.423.000	28.606.652.000	123,19%	0	28.081.578.000	24,88%
42882	Realisasi Jasa Keuangan Obat dan Bahan	64.800.000.000	178.608.388.000	275,63%	0	178.608.388.000	0
423121	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Bahan	64.800.000.000	178.608.388.000	275,63%	0	178.608.388.000	0
42883	Realisasi Jasa Kesehatan	176.144.828.000	344.312.828.128	194,47%	0	344.312.828.128	0
423121	Pendapatan Jasa Kesehatan Pertama dan Perumahan	139.281.088.000	287.492.227.965	191,44%	0	287.492.227.965	0
423122	Pendapatan Jasa Kesehatan Perumahan	36.863.730.000	78.819.602.172	210,82%	0	78.819.602.172	0
4294	Realisasi Jasa Agraria	2.207.119.324.000	2.117.242.311.924	94,87%	0	2.318.710.023.242	4,11%
423242	Pendapatan Pelayanan Pertambangan	2.206.423.513.000	2.177.144.211.228	98,65%	0	2.318.710.023.242	-4,11%
423243	Pendapatan Perikanan dan Akuakultur	40.890.811.000	889.999.297.148	217,42%	0	790.298.210.822	8,28%
423244	Pendapatan Jasa Sektor Jasa Agraria	729.823.800.000	859.992.289.128	117,82%	0	798.229.270.822	3,25%
4294	PENDAPAT KEBERPAK BOKAL, BEKAL, DAN TEKNOLOGI	4.121.423.604.000	4.103.894.209.229	99,56%	0	4.003.441.244.328	-2,49%

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
 (dalam rupiah)

LAMPIRAN I.A

Aksh	Detail Aksh	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Realisasi/Perkiraan	% Realisasi/ Perkiraan
425411	Pendapatan Pendidikan	4.108.317.740.000	4.091.137.740.900	99,21%	4.444.312.582.413	-353.074.841,48	-4,31%
4254111	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	79.263.544.000	78.033.811.448	97,21%	134.834.378.923	-56.570.567,42	-41,21%
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	3.829.107.988.000	3.799.330.399.908	99,23%	3.926.797.254.032	-127.467.164,12	-3,26%
425413	Pendapatan Pendidikan Lainnya	539.000.000	23.946.183,24	4,44%	23.946.183,24	0	0%
425419	Pendapatan Pendidikan Sumber Daya Manusia	235.910.556.000	187.837.855,33	80,01%	332.184.649,45	-144.346.794,12	-43,21%
42542	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	311.891.818.000	283.378.471,219	90,86%	0	283.378.471,219	0%
425421	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	9.528.892.000	28.143.345,925	2,95%	0	28.143.345,925	0%
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	301.962.926.000	255.235.125,295	84,51%	0	255.235.125,295	0%
42543	Pendapatan Pendidikan/Kelembagaan, Penelitian, dan Pengembangan Iptek	254.401.818.000	383.126.471,421	150,59%	103.156.061,069	280.289.910,352	272,85%
425431	Pendapatan Lainnya Pendidikan/Kelembagaan, Penelitian, dan Pengembangan Iptek	36.808.112.000	71.168.283,108	1,92%	0	71.168.283,108	0%
425432	Pendapatan Lainnya Penelitian/Kelembagaan dan Pengembangan Iptek	72.327.365.000	1.07.261.809,466	1,47%	1.07.261.809,466	4.536.248,390	4,27%
425433	Pendapatan Lainnya Penelitian/Kelembagaan dan Pengembangan Iptek	185.872.339.000	1.111.620.131,097	1,08%	0	1.111.620.131,097	0%
425434	Pendapatan Lain Penelitian/Kelembagaan dan Pengembangan Iptek	21.248.126.000	20.518.823,942	96,12%	0	20.518.823,942	0%
425435	Pendapatan Hasil Survei dan Penelitian	7.314.190.000	26.153.313,259	3,58%	0	26.153.313,259	0%
425436	Pendapatan Kegiatan atau Kegiatan Insentif	860.000.000	5.254.461,028	0,60%	0	5.254.461,028	0%
425439	Pendapatan Pendidikan/Kelembagaan, Penelitian, dan Pengembangan Iptek Lainnya	1.457.123.000	38.878.843,24	2,66%	0	38.878.843,24	0%
425441	Pendapatan Hibah	3.543.100.000	3.348.070.000	94,49%	13.889.100,852	-12.541.029,852	-78,91%
425449	Pendapatan Hibah dan Kadaster/Lainnya	2.243.697.000	2.304.406,14	1,02%	0	2.304.406,14	0%
42545	PENDAPATAN JABAT TUNGGAL DAN KEMERDEKAAN	22.371.042.174.000	23.990.287.025,398	107,24%	17.435.081.081,421	6.555.206.043,977	32,77%
425451	Pendapatan Jabat Tunggal	6.153.343.234.000	6.319.598.621,391	102,87%	0	6.319.598.621,391	0%
4254511	Pendapatan Pegawai Pegawai Kantor/Banjar	440.24.500.000	928.624.625,008	209,91%	0	928.624.625,008	0%
4254512	Pendapatan Pegawai Pegawai Kantor/Banjar Account Charge	1.210.223.250.000	902.206.817,842	74,54%	0	902.206.817,842	0%
4254513	Pendapatan Jabat Kependidikan	3.540.801.841.000	3.234.327.178,826	91,34%	0	3.234.327.178,826	0%
4254514	Pendapatan Jabat Non Pegawai	650.91.073.000	5.486.945.578,842	84,28%	0	5.486.945.578,842	0%
4254515	Pendapatan Jabat Pegawai dan Kadaster	283.750.793.000	2.281.111.202,924	80,78%	0	2.281.111.202,924	0%
4254516	Pendapatan Jabat Kependidikan	297.231.728.000	3.001.841.928,111	111,42%	0	3.001.841.928,111	0%
4254517	Pendapatan Jabat Non Pegawai	616.280.395.000	521.181.218,991	84,51%	0	521.181.218,991	0%

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
 (dalam rupiah)

LAMPIRAN I.A

Akru	Uraian Akru	ANGGARAN	Tk 2018	% Realisasi	Tk 2017	Rehabilitasi/Perubahan	% Rehabilitasi/Perubahan
423518	Pendapatan dari Koneksi Bidang Transportasi	547.969.693.000	508.438.602.992	92,78%	0	508.438.602.992	0
423519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	939.737.449.000	88.006.914.474	9,37%	0	88.006.914.474	0
423520	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	18.991.419.398.000	17.466.493.888.810	92,45%	17.370.768.121.170	-333.897.244.869	-4,79%
423521	Pendapatan Perizinan, Sertifikasi, Pelayanan Publik	14.638.136.377.000	16.304.733.338.392	111,87%	16.306.372.878.302	-90.319.240.087	-1,18%
423522	Pendapatan dari Penyelenggaraan Telekomunikasi	911.763.833.000	1.007.001.357.844	110,52%	1.018.310.242.813	8.646.125.023	0,83%
423523	Pendapatan dari Penyelenggaraan Perizinan	39.345.503.000	47.799.808.344	121,48%	0	47.799.808.344	0
423524	Pendapatan dan Penyelenggaraan Pos	174.000.000	823.002.300	474,14%	0	823.002.300	0
423525	Pendapatan Kegiatan Non Komersial Indonesia	0	1.886.706.492	0	0	1.886.706.492	0
423526	Pendapatan Kegiatan Non Komersial Indonesia	0	978.814.632	0	0	978.814.632	0
423529	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya	2.000.000.000	2.112.340.000	105,60%	0	2.112.340.000	0
423530	Pendapatan Jasa Layanan Pemerintah Publik	30.383.794.000	184.441.207.498	607,84%	60.897.960.346	123.543.807.346	202,87%
423531	Pendapatan Jasa Sertifikasi	30.323.543.000	24.921.968.322	82,18%	53.214.413.122	-28.292.444.802	-53,14%
423532	Pendapatan Jasa Sertifikasi Lainnya	58.450.000	269.239.176	460,85%	7.163.548.122	-7.194.807.122	-99,60%
423533	Pendapatan Jasa Sertifikasi Lainnya	0	112.877.812.331	0	0	112.877.812.331	0
423534	Pendapatan Jasa Sertifikasi Lainnya	0	48.613.114.922	0	0	48.613.114.922	0
423536	PENDAPATAN JASA LAINNYA	198.038.113.000	910.038.283.732	459,58%	6.833.838.397.381	-5.923.802.801.849	-86,72%
423601	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	104.394.497.000	204.088.094.073	195,46%	158.901.986.493	45.186.108.438	28,44%
423602	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	92.807.111.000	1.67.966.219.612	179,93%	1.58.109.33.082	9.776.884.328	5,18%
423603	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10.497.795.000	21.094.153.874	201,05%	0	21.094.153.874	0
423604	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	13.350.000	13.027.717.238	98,41,37%	712.631.366	14.315.988.018	2008,76%
423605	Pendapatan Jasa Keluhan dan Perbaikan	18.011.993.000	21.759.458.591	120,80%	417,3.025.236.034	-4.151.467.800.443	-98,48%
423606	Pendapatan Jasa Keluhan dan Perbaikan Lainnya	15.218.493.000	21.759.458.591	142,93%	4.177.209.236.034	-4.151.467.800.443	-99,48%
423607	Pendapatan Jasa Keluhan dan Perbaikan Lainnya	2.793.500.000	7.823.000	0,28%	0	7.823.000	0
423608	Pendapatan Jasa Lainnya	16.201.683.000	684.108.810.088	422,30%	3.301.761.745.094	-1.807.963.935.034	-23,87%
423609	Pendapatan Jasa Perencanaan/Perencanaan	6.879.373.000	5.645.982.396	82,10%	678.511.073.12	-430.947.490.722	-99,18%
423610	Pendapatan Jasa Tenaga, Peralatan dan Informatika	46.024.003.000	407.131.263.232	884,83%	1.279.039.879.031	-1.231.908.616.810	-76,43%
423611	Pendapatan dari Jasa Layanan Jasa IT	0	1.103.025.543.488	0	118.300.792.544	-1.324.348.408	-3,37%
423612	Pendapatan Jasa Lainnya	23.328.303.000	161.297.421.948	691,43%	0	161.297.421.948	0

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)**
(dalam rupiah)

LAMPIRAN I.A

Akru	Uraian Akru	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Rentan/Pertemuan	% Rentan/ Pertemuan
42570	264.023.214.000 BUNDA PENGADAAN KEKAWANAN PERANAKA DAN PENGADAAN PERANAKA	1.496.638.718.000	11.183.295.856.792	148,79%	13.308.079.072.478	-2.348.806.185.684	-17,64%
42571	Pendapatan Bunga	938.591.200.000	1.058.180.697.138	112,72%	1.233.390.216.500	128.438.418.678	7,42%
425713	Pendapatan Bunga dari Pinjam dan Pembiayaan Pembiayaan	938.591.200.000	1.309.111.487.138	139,52%	1.171.268.921.748	139.243.565.414	11,91%
425714	Pendapatan Bunga dari Fasilitas Kredit Pemerintah	0	60.552.481.835	0	118.074.208.403	-57.461.826.567	-48,64%
425717	Pendapatan Bunga dari Kekang Pembangunan Pribadi	0	286.316.249.005	0	299.073.698.586	-12.857.449.581	-4,30%
425719	Pendapatan Bunga Lainnya	0	300.379.145	0	501.347.623	-201.968.478	-40,09%
42572	Pendapatan dan sa hasil kegiatan	0	0	0	6.497.400.000	-6.497.400.000	-100,00%
425721	Pendapatan dan sa hasil kegiatan dari Fasilitas Kredit Pemerintah	0	0	0	6.497.400.000	-6.497.400.000	-100,00%
42573	Pendapatan Premi dan hasil kegiatan	2.110.041.880.000	2.382.785.833.300	112,92%	6.110.092.416.400	-3.897.306.583	-63,78%
425731	Pendapatan Premi dan hasil kegiatan dari Fasilitas Kredit Pemerintah	2.110.041.880.000	1.141.132.656.750	54,08%	4.092.987.718.100	-2.981.855.061.350	-72,13%
425733	Pendapatan Premi dan hasil kegiatan dari Fasilitas Kredit Pemerintah	0	1.141.628.887.530	0	2.017.104.728.100	-875.475.840.570	-43,40%
42574	Pendapatan hasil jasa keuangan pemerintah, seperti: bunga, dan pelayanan jasa keuangan	84.864.361.000	94.901.097.813	111,83%	68.108.984.340	26.792.113.473	37,22%
425741	Pendapatan hasil jasa keuangan pemerintah, seperti: bunga, dan pelayanan jasa keuangan	84.864.361.000	94.497.613.223	111,33%	69.108.984.340	25.388.628.883	38,26%
425742	Pendapatan hasil jasa keuangan pemerintah, seperti: bunga, dan pelayanan jasa keuangan	0	139.484.590	0	0	139.484.590	0
425743	Pendapatan Lain-lain dan Kekang Tugan	0	239.840.000	0	501.347.623	-261.507.623	-52,16%
425746	Pendapatan Lain-lain dan Kekang Tugan	0	239.840.000	0	0	239.840.000	0
42575	Pendapatan dan hasil kegiatan	110.000.128.000	292.900.299.187	266,24%	283.238.526.318	219.669.769.869	94,83%
425751	Pendapatan dan hasil kegiatan dari Fasilitas Kredit Pemerintah	110.000.000.000	242.713.600.138	220,63%	232.114.721.476	219.498.858.636	94,53%
425752	Pendapatan dan hasil kegiatan dari Fasilitas Kredit Pemerintah	0	207.685.138	0	34.797.840	182.887.297	722,31%
425753	Pendapatan dan hasil kegiatan dari Fasilitas Kredit Pemerintah	0	4.811.912	0	0	4.811.912	0
42576	Pendapatan Lain-lain dan Kekang Tugan	281.732.329.000	281.730.782.980	100,00%	294.409.378.487	-20.678.595.507	-7,01%
425761	Pendapatan Lain-lain dan Kekang Tugan	0	891.308	0	72.441.207	-71.549.899	-98,77%
425762	Pendapatan Lain-lain dan Kekang Tugan	0	140.041.035	0	6.473.966.528	-6.333.925.493	-98,53%
425763	Pendapatan Lain-lain dan Kekang Tugan	0	74.536.303.238	0	47.502.727.215	27.033.576.023	36,29%
425764	Pendapatan Lain-lain dan Kekang Tugan	281.732.329.000	207.832.643.528	73,79%	208.907.991.702	-1.075.348.174	-0,51%
425765	Pendapatan Lain-lain dan Kekang Tugan	0	5.180.214.844	0	1.482.238.030	3.708.022.344	284,71%
42577	Pendapatan dan hasil kegiatan	3.430.000.000.000	6.034.091.902.483	175,90%	3.041.494.084.573	1.012.607.817.910	29,20%
425772	Pendapatan dan hasil kegiatan dari Fasilitas Kredit Pemerintah	60.000.000.000	236.947.481.278	418,13%	1.482.697.096.222	1.082.353.353.504	71,80%

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
 (dalam rupiah)

LAMPIRAN I.A

Akron	Uraian Akron	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Realisasi/Perkiraan	% Realisasi/Perkiraan
423772	Fondasi dari Pelaksanaan Treasury National Pooling	210.000.000.000	332.449.155.945	158,31%	280.028.502.724	47.025.652.205	16,44%
423774	Fondasi dari Pemungutan Uang Negara pada Bank Indonesia	1.140.000.000.000	5.464.693.593.158	172,33%	4.407.729.085.652	856.954.507.506	18,60%
423781	Fondasi dari Pemungutan Pajak Larangan Jalan Keluar dan Pemungutan Pajak Negara	380.922.201.000	481.447.093.172	126,42%	412.784.006.940	68.661.436.232	16,43%
423781	Fondasi dari Pemungutan Pajak Negara dengan Surat Pajak	982.722.000	2.371.011.392	241,27%	2.522.550.922	-151.539.530	-6,01%
423782	Fondasi dari Labang Pajak Labang Keluar	0	308.020.455.672	0	238.448.003.872	69.582.451.800	29,18%
423783	Fondasi dari Labang Pajak Labang Keluar II	0	68.037.631.162	0	50.712.448.932	17.325.182.230	34,16%
423784	Fondasi dari Labang Pajak Labang Keluar III	18.359.499.000	91.208.841.028	552,21%	101.978.082.340	-10.265.240.652	-10,17%
423785	Fondasi dari Administrasi Pemungutan Pajak Negara	342.980.000.000	11.298.153.792	3,14%	19.124.578.972	-7.722.425.180	-40,40%
423791	Fondasi dari Peredaran Uang Berharga Negara	163.940.311.000	53.208.480.276	32,49%	40.120.004.821	13.117.879.455	32,02%
423791	Fondasi dari Peredaran Uang Berharga Negara Terlepas Pajak Uang Berharga dan Berharga Asli Pajak Lain	143.851.231.000	16.518.424.772	10,33%	25.421.722.548	-8.591.597.777	-33,45%
423792	Fondasi dari Peredaran Uang Berharga Negara Terlepas Pajak Lain	89.190.000	2.627.704.573	4291,42%	14.698.282.227	-10.871.177.202	-72,96%
423793	Fondasi dari Peredaran Uang Berharga Negara Terlepas Pajak Lain/Perkiraan	0	32.492.350.932	0	0	32.492.350.932	0
42381	Fondasi dari Dana I	10.344.111.000	611.724.087.249	592,21%	737.201.300.420	-125.476.212.765	-17,02%
42381	Fondasi dari Dana Pemungutan Pajak Pemerintah	16.201.111.000	540.373.208.948	333,20%	565.706.276.076	-25.382.067.128	-4,49%
42381	Fondasi dari Dana Pemungutan Pajak Pemerintah	5.641.211.000	508.183.230.442	8944,31%	447.218.990.099	60.964.239.343	13,47%
42381	Fondasi dari Dana Pemungutan Pajak Pemerintah	10.000.000.000	23.421.045.092	234,21%	112.024.080.817	-86.602.935.724	-77,21%
42381	Fondasi dari Dana Pemungutan Pajak Pemerintah	519.200.000	216.600.000	41,72%	0	216.600.000	0
42381	Fondasi dari Dana Pemungutan Pajak Pemerintah	0	98.782	0	11.929.829	-11.841.047	-99,18%
42381	Fondasi dari Dana Pemungutan Pajak Pemerintah	1.600.000	8.392.034	89,20%	9.019.803	-627.769	-6,74%
42381	Fondasi dari Dana Pemungutan Pajak Pemerintah	0	347.429.212	0	1.821.234.023	-1.473.774.860	-80,52%
42381	Fondasi dari Dana Pemungutan Pajak Pemerintah	0	6.198.113.292	0	4.580.202.449	1.617.909.843	33,28%
42381	Fondasi dari Dana II	144.000.000	61.692.445.292	42,82%	185.710.738.744	-124.017.293.452	-41,28%
42381	Fondasi dari Dana Pemungutan Pajak Pemerintah	0	5.378.943.242	0	21.254.797	5.257.688.445	34,62%
42381	Fondasi dari Dana Pemungutan Pajak Pemerintah	0	1.601.497.442	0	4.011.229.235	-2.409.731.793	-60,17%
42381	Fondasi dari Dana Pemungutan Pajak Pemerintah	143.000.000	1.801.092.422	124,20%	483.288.239	-2.011.924.860	-43,74%
42381	Fondasi dari Dana Pemungutan Pajak Pemerintah	0	929.616.903	0	0	929.616.903	0
42381	Fondasi dari Dana Pemungutan Pajak Pemerintah	0	37.997.297.142	0	163.234.293.292	-125.236.996.150	-45,08%
42381	Fondasi dari Dana III	0	4.837.395.382	0	1.738.897.000	3.097.197.382	32,84%

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)**
(dalam rupiah)

LAMPIRAN I.A

Akron	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kemlhan/Perencanaan	% Kemlhan/Perencanaan
425899	Budaya Cendekiawan		3.537.999,25		1.730.891,60	3.917.677,95	226,88%
4299	PENDAPATAN LAIN-LAIN	4.444.480.014,000	14.797.294.213,811	332,64%	14.713.094.896,133	43.589.287,478	6,31%
42991	Penerimaan Kembali Biaya Tahun Anggaran Yang Lampaui	4.394.587.331,000	6.457.614.833,318	148,33%	13.383.292.324,359	-4.894.678.513,141	-47,84%
429911	Penerimaan Kembali Biaya Pegawai, Tenaga Anggaran Yang Lampaui	20.516.285,000	1.804.172.872,105	902,13%	437.149.793,644	-211.878.072,513	-58,45%
429912	Penerimaan Kembali Biaya Barang Tahun Anggaran Yang Lampaui	2.745.580,000	1.101.775.087,102	401,29,03%	840.192,711,011	228.582.269,977	30,87%
429913	Penerimaan Kembali Biaya Modal Tahun Anggaran Yang Lampaui	3.210.000,000	1.434.337.934,143	448,07,13%	1.001.033.506,472	431.314.447,671	43,00%
429914	Penerimaan Kembali Biaya Sisa Anggaran Yang Lampaui				1.631,000	-1.631,000	-100,00%
429915	Penerimaan Kembali Biaya Sisa Anggaran Yang Lampaui		2.174.930.308,89		238.983.070,509	1.935.947.238,385	79,37%
429916	Penerimaan Kembali Biaya Tahun Anggaran Yang Lampaui		34.721.048,31		28.819.974,49	3.911.073,820	20,31%
429917	Penerimaan Kembali Biaya Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lampaui		1.263.881.743,54		302.315.583,314	963.565.160,230	31,87%
429918	Penerimaan Kembali Biaya Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lampaui		13.464.387,25		3.464.727,29	9.999.659,96	182,99%
429919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lampaui	4.408.465.466,000	235.312.488,63	5,3%	9.464.280.214,43	-9.228.967.725,799	-47,30%
42992	Penerimaan Kembali Biaya Tahun Anggaran Yang Lampaui		381.101.634,183		321.336.016,033	59.765.618,150	18,07%
429921	Penerimaan Kembali Biaya Koperasi Sosial TAKSI		261.161.553,10		221.236.016,033	39.925.536,869	18,00%
42993	Pendapatan Sisa Uang dan Perantara		33.308.501,074		14.308.498,207	18.998.802,866	131,87%
429931	Pendapatan Sisa Uang dan Perantara PMS		29.201.213,372		12.094.264,72	17.206.948,534	142,37%
429932	Pendapatan Sisa Uang dan Perantara Perantara Perantara		2.914.287,692		1.463.584,108	2.508.854,332	179,48%
429933	Pendapatan Sisa Uang dan Perantara Perantara Perantara		1.118,118		838.204,405	-434.992,184	-79,45%
429934	Pendapatan Sisa Uang dan Perantara Perantara Perantara		90.028,605		10.200,000	79.828,605	78,63%
42998	Redistribusi Laba-Laba I		11.094.637.733,491		0	1.294.837.233,442	
429982	Penerimaan Pengembalian Dana Akumulasi Istimewa Perumahan		7.704.637.733,49		0	7.704.637.733,491	
429983	Redistribusi Laba-Laba II	5.512.883.200	2.901.071.091,018	526,43%	3.114.848.135,520	-1.804.378.048,504	-48,31%
429984	Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia		53.663.300,18		1.200.100.032,202	35.663.300,18	-100,00%
429985	Pendapatan dari Surplus Operasi Jasa Keuangan		53.663.300,18		0	53.663.300,18	
429986	Pendapatan dari Surplus Operasi Jasa Keuangan		6.179.866,93	136,73%	18.823.574,232	-10.643.707,303	-43,37%
429987	Pendapatan dari Surplus Operasi Jasa Keuangan		0		89.074,018	-89.074,018	-100,00%
429988	Pendapatan dari Surplus Operasi Jasa Keuangan		277.288		0	277.288	
429989	Pendapatan dari Surplus Operasi Jasa Keuangan		5.412,818		1.277.288,232	-1.271.875,414	-79,58%

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited) **LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT**
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
 (dalam rupiah) **LAMPIRAN I.A**

Akron	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Realisasi/Perencanaan	% Realisasi/Perencanaan
42997	Pendapatan dari Hibah yang Didanai Donor/Donor	0	1.602.244,47		86.711,099	72.612,79	84,05%
42998	Pendapatan dari Hibah yang Didanai Pemerintah	0	22.831.019,981		222.344.902,094	-199.484.882,113	-87,37%
42999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	5.970.294,000	205.711.899,898	3449,07%	174.113.898,640	31.597.999,258	18,19%
43	PENDAPATAN NEKAD	1.190.800.400,000	13.564.000.239,232	1200,47%	11.629.015.000,492	1.934.985.238,740	21,84%
431	PENDAPATAN NEKAD DARI KELOMPOK USAHA/KELOMPOK USAHA	1.190.800.400,000	13.564.000.239,232	1200,47%	11.629.015.000,492	1.934.985.238,740	21,84%
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	0	13.178.183.991,822		7.410.435.027,384	5.767.748.864,438	77,89%
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langgung Bantuk Uang - Perencanaan	0	13.178.183.991,822		7.410.435.027,384	5.767.748.864,438	77,89%
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langgung Bantuk Uang - Perencanaan	0	9.076.204,000		228.915.346,000	-219.689.076,000	-48,44%
4311333	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langgung Bantuk Uang - Perencanaan	0	339.156.974,999		137.817.218,544	201.339.756,455	59,49%
43113333	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langgung Bantuk Uang - Perencanaan	0	12.814.628,074,899		7.043.656,235,312	5.770.971.839,573	81,93%
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri/Langgung Bantuk Uang - Lainnya	0	13.324.660,000		-1.311.62,800	13.337.842,801	100,00%
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri	1.190.800.400,000	2.306.674.647,49	194,41%	4.219.379,375,104	-1.802.704.727,608	-42,44%
43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Perencanaan	1.190.800.400,000	418.374.993,545	34,95%	530.078,024,659	-111.703.031,114	-27,07%
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Perencanaan	1.190.800.400,000	202.903.271,644	18,89%	234.472.316,940	-31.569.044,296	-14,44%
4312333	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Perencanaan	0	215.420.203,543		235.000.707,059	-19.580.503,516	-8,32%
43123333	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Perencanaan	0	1.664.300.000,000		2.699.300.350,492	-1.035.000.350,492	-48,53%
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Lainnya	0	247.351.671,851		632.154.794,182	-384.803.122,331	-48,78%
43129	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langgung Bantuk Uang Lainnya	0	93.170,442,800		42.027.467,044	51.142.975,756	121,53%
431293	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langgung Bantuk Uang Lainnya	1.894.750.337,977,000	1.940.674.875,878,800	102,58%	1.666.375,912,658,000	274.298.962,916,800	16,54%

**REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 (Audited)**

(dalam rupiah)

No	Nama BUMN	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.472.280.892.834
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.572.714.448.000
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.859.459.907.905
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	363.295.937.910
	Perbankan	16.267.751.186.649
1	PT Pertamina (Persero)	8.569.790.000.000
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	8.651.640.277.399
3	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	308.715.000.000
4	PT Pupuk Indonesia (Persero)	768.850.000.000
5	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	436.503.715.078
6	PT Jasa Raharja (Persero)	1.269.902.963.670
7	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	410.940.896.980
8	PT Pegadaian (Persero)	1.005.367.000.000
9	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	308.035.889.138
10	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	653.968.051.800
11	Perum Jaminan Kredit Indonesia	80.184.500.000
12	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	171.821.761.507
13	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	441.147.067.551
14	PT Angkasa Pura II (Persero)	301.947.000.000
15	PT Angkasa Pura I (Persero)	283.716.000.000
16	PT Biofarma (Persero)	236.410.000.000
17	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	241.086.272.753
18	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	156.491.377.209
19	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	522.923.131.688
20	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	27.704.250.000
21	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	148.222.628.708
22	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	1.031.387.739
23	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	88.300.000.000
24	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	52.572.750.063
25	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	29.824.758.920
26	Perum Jasa Tirta II	17.455.197.202
27	PT Hutama Karya (Persero)	214.207.547.813
28	Perum Jasa Tirta I	12.333.045.000
29	PT Sucofindo (Persero)	26.949.137.622
30	PT Brantas Abipraya (Persero)	27.015.066.292
31	PT Surveyor Indonesia (Persero)	11.163.696.741
32	PT Dahana (Persero)	8.815.000.000
33	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	6.319.177.264

**REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 (Audited)**

(dalam rupiah)

No	Nama BUMN	Jumlah
(1)	(2)	(3)
34	PT Perikanan Nusantara	723.042.778
35	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	7.067.022.678
36	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	4.954.745.552
37	PT Kawasan Industri Makassar	1.020.465.340
38	Perum Perhutani	81.189.600.000
39	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	8.973.967.036
40	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	20.000.000.000
41	Perum Damri	357.000.000
42	PT Pos Indonesia (Persero)	18.102.960.000
43	PT TWC Borobudur	13.929.212.000
44	Perum Peruri	121.177.000.000
45	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	8.779.645.000
46	PT Nindya Karya	175.000.000
47	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	116.939.940
48	PT LEN Industri (Persero)	1.850.000.000
49	PT Pindad (Persero)	6.400.000.000
50	PT Virama Karya (Persero)	2.926.971.174
51	PT Bina Karya	1.172.872.603
52	PT Indra Karya (Persero)	431.201.140
53	PT Sarinah (Persero)	558.000.000
54	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	4.265.392.101
55	Perum Pembangunan Perumahan Nasional	15.089.791.336
56	PT Garam (Persero)	66.453.339.566
57	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	1.946.721.639
58	PT Perum Perikanan Indonesia	394.245.000
59	PT Yodya Karya (Persero)	2.622.861.792
60	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	54.010.679.700
61	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	1.919.750.000.000
62	PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	7.926.703.560
Non Perbankan		27.863.719.928.072
No	Nama Non BUMN (Minoritas)	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	12.884.249.518
2	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	24.447.061.524
3	PT Socfin Indonesia	57.269.043.900
4	PT Indosat	56.693.625.000
5	PT Perkebunan Nusantara X	287.270.722
6	PT Perkebunan Nusantara VI	693.890.240

**REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 (Audited)**

(dalam rupiah)

No	Nama BUMN	Jumlah
(1)	(2)	(3)
7	PT Perkebunan Nusantara IV	38.133.318.928
8	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	1.593
9	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	2
10	PT Timah (Persero) Tbk	23
Non Perbankan		190.408.461.450
Pembayaran Piutang		
No	BUMN	Jumlah
1	PT Perkebunan Nusantara II	1.200.000.000
2	PT Inhutani I	900.000.000
3	PT Inhutani V	300.000.000
4	PT Balai Pustaka	35.000.000
5	PT Bina Karya	70.000.000
6	PT TWC Borobudur	175.217.658
7	PT ASDP Indonesia Ferry	2.707.981.893
Jumlah Pembayaran Piutang		5.388.199.551
BUMN di Bawah Kementerian Keuangan		
1	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PT. Bank Ekspor Indonesia)	275.602.600.247
2	PT Sarana Multi Infrastruktur	271.000.000.000
3	PT Sarana Multigriya Finansial	85.500.000.000
4	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	101.151.000.000
Jumlah Pembayaran Dividen BUMN di Bawah Kementerian Keuangan		733.253.600.247
JUMLAH TOTAL		45.060.521.375.969

**LRA BELANJA
PEMERINTAH PUSAT
TA 2018**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
 MENURUT BA DAN ESELON I
 TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

KODE BA	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APRIL	MAY	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS DDI
001	MAJELIS PERANGKARAKATAN BANYAK	982.803.014,00	1.040.191.480,00	919.832.189,67	20.827.891,33	899.004.298,32	141.187.181,67
01	KEKETAHAPAN ENDEBAL	157.180.219,00	161.321.772,00	151.801.016,75	124.743,603	151.676.293,15	7.645.478,84
02	SAJELIS	795.622.795,00	878.869.708,00	768.031.172,92	20.703.147,74	745.328.025,17	133.541.702,82
002	DEWAN PERWAKILAN BANYAK	5.728.286.667,00	5.728.286.667,00	4.698.138.285,70	94.460.735,22	4.603.677.550,48	1.124.614.146,82
01	KEKETAHAPAN ENDEBAL	1.700.427.543,00	1.700.427.543,00	1.091.888.583,98	3.669.218,79	1.088.219.365,19	612.207.277,80
02	SEWAN	4.027.859.124,00	4.027.859.124,00	3.606.246.711,71	90.791.516,43	3.515.452.195,28	512.406.868,71
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.840.531.119,00	3.627.420.844,00	3.569.636.664,27	26.039.896,26	3.543.596.769,01	83.824.074,98
01	KEKETAHAPAN ENDEBAL	2.840.531.119,00	3.627.420.844,00	3.569.636.664,27	26.039.896,26	3.543.596.769,01	83.824.074,98
005	MAKAMAR AGUNG	8.262.100.000,00	8.478.226.882,00	8.427.964.001,23	4.545.286,60	8.423.418.714,63	54.808.167,27
01	BAKANDURONG ADPENSISTRASI	7.716.684.339,00	7.891.296.405,00	7.862.996.113,93	2.729.946,65	7.860.156.267,27	31.140.137,72
02	KEPANTERAN	157.270.100,00	168.615.995,00	168.470.696,97	9.276,303	168.461.420,67	154.574,326
03	ORGANISASI ENDEBAL BAKANDURONG LUMU	152.581.761,00	152.581.761,00	141.987.086,63	308.405,99	141.673.680,63	10.908.080,36
04	DIREKTORAT ENDEBAL BAKANDURONG ADPENSISTRASI	71.641.906,00	71.950.031,00	70.537.724,69	228.494,49	70.309.240,19	1.640.790,80
05	DIREKTORAT ENDEBAL BAKANDURONG HUKUM DAN PERALIHAN	23.708.288,00	23.708.288,00	22.620.228,95	1.936,142	22.600.892,80	1.107.395,19
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN	107.622.532,00	126.129.486,00	127.559.429,67	1.222.581,89	126.336.847,77	9.792.638,22
07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKAWAN AGUNG	23.589.054,00	31.944.916,00	31.897.610,37	172.45,112	31.880.165,25	54.550,741
006	KEARIFAN RI	6.386.605.678,00	6.727.265.343,00	6.124.467.688,08	5.679.099,67	6.118.788.588,38	608.476.756,61
01	KEKETAHAPAN ENDEBAL	6.386.605.678,00	6.727.265.343,00	6.124.467.688,08	5.679.099,67	6.118.788.588,38	608.476.756,61
007	SEKRETARIAT NEGARA	1.923.622.827,00	2.490.749.390,00	2.332.079.208,24	1.747.981,24	2.330.331.226,99	160.412.073,00
01	KEKETAHAPAN ENDEBAL	1.101.322.827,00	1.361.182.590,00	1.237.027.201,03	301.887,91	1.236.725.313,12	124.457.276,87
03	KEKETAHAPAN KEPENDIDIKAN	399.800.000,00	511.445.398,00	504.007.605,28	376.473,88	503.631.131,37	7.814.666,82
04	KEKETAHAPAN MAJELIS PRESIDEN	131.800.000,00	229.371.904,00	213.537.943,07	109.591,48	213.428.351,58	15.943.552,41
05	KEKETAHAPAN HUKUM PRESIDEN	35.000.000,00	33.005.000,00	31.762.583,31	279.533,55	31.483.049,76	521.955,240
06	PEKERJAAN PENGEMBALAN PRESIDEN	40.000.000,00	122.220.133,00	119.214.938,34	0	119.214.938,34	3.035.194,65
07	SEWAN PERKAWANAN PRESIDEN	40.000.000,00	38.978.810,00	38.391.576,73	353.686	38.391.223,05	587.586,648
09	PERALIHAN PERKAWANAN SAKSI DAN KORBAN LPSKI	80.000.000,00	81.411.655,00	81.139.228,22	446.447,04	80.692.881,18	718.772,800

(dalam rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited) LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

RODE	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS DDI
10	KANTOR STAF PRESIDEN	134.700.000,00	114.097.860,00	106.997.857,23	233.623,66	106.764.233,57	7.333.626,42
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.110.344.184,00	3.291.205.592,00	3.086.791.037,85	11.510.068,91	3.075.274.978,03	175.530.618,39
01	DEKRETALIA JENDERAL	1.006.476.081,00	974.949.875,00	938.629.491,97	1.141.127,50	935.486.364,47	39.463.510,52
02	DIREKTORAT JENDERAL	74.293.717,00	76.400.170,00	67.246.270,58	1.661.032,27	65.585.238,31	10.815.131,68
03	DJEN POLIK DAN PERHIMPUNAN UMUM	131.333.816,00	242.024.688,00	239.707.394,32	1.201.172,66	239.507.221,65	2.437.476,34
04	DJEN BINA ADMINISTRASI KEMULIAHAN	136.878.262,00	160.005.670,00	150.690.709,62	578.614,15	150.112.095,47	9.893,574,52
05	DJEN BINA PERHIMPUNAN DESA	219.687.596,00	226.793.189,00	207.314.596,17	1.361.752,94	205.950.754,13	20.842,534,86
06	DJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	184.442.601,00	210.679.233,00	196.489.916,49	1.310.848,47	195.179.068,02	15.500.184,97
07	DJEN OTONOM DAERAH	110.230.201,00	114.590.931,00	105.163.914,52	923.863,64	104.240.050,88	10.350.886,11
08	DJEN KEMUNDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	884.783.485,00	884.783.485,00	853.399.190,70	1.200.644,20	852.198.546,49	32.584.938,50
09	DJEN BINA KEJANGKARAN DASAR	74.633.284,00	74.633.284,00	70.925.621,78	213.088,56	70.712.533,22	3.920.750,77
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	48.2831.201,00	51.876.461,00	49.026.725,01	189.987,06	48.836.737,95	3.039.723,04
12	BADAN PENELITIAN SUDBER DAYA MANUSIA	225.312.021,00	234.468.276,00	208.197.896,34	811.533,34	207.386.363,00	27.081.912,99
011	KEKEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.290.769.089,00	7.845.798.894,00	7.548.789.081,43	4.020.805,90	7.548.788.375,92	301.990.618,07
01	DEKRETALIA JENDERAL	6.123.195.060,00	6.513.126.087,00	6.231.251.287,51	1.052.013,00	6.228.699.774,51	284.426.312,48
02	DJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	69.186.051,00	76.637.482,00	75.388.539,34	168.409,14	75.220.130,19	1.437.351,80
03	DJEN AMERIKA DAN EROPA	46.020.058,00	52.673.535,00	52.456.792,61	54.356,438	52.402.436,17	27.098,875
04	DJEN KEMERASRASAN ASEAN	59.098.302,00	59.830.021,00	59.532.863,60	114.446,54	59.418.417,05	411.603,942
05	DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL	618.471.405,00	787.806.556,00	784.395.237,97	54.582,666	784.740.655,30	3.065.900,69
06	DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN PEROWAS PUBLIK	93.881.322,00	104.481.322,00	99.800.196,16	103.046,07	99.697.150,08	4.784.171,91
07	DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERIJINAN INTERNASIONAL	40.681.495,00	43.232.550,00	42.065.615,98	1.234.938,4	41.992.136,14	1.290.413,86
08	DIREKTORAT JENDERAL PROTEKSI DAN KONSUL	137.791.386,00	136.791.386,00	133.902.628,60	1.246.747,06	131.655.881,53	5.045.484,46
09	DIREKTORAT JENDERAL	31.339.139,00	33.109.334,00	32.479.726,42	60.854,151	32.418.872,26	690.461,736
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	311.34.891,00	381.40.641,00	37.615.692,22	42.870.508	37.572.822,65	5.041.818,344
012	KEKEMENTERIAN PERTAHANAN	107.682.385.002,00	113.155.865.071,00	108.230.116.806,07	1.549.689.503,13	106.680.427.249,94	6.473.438.427,45
01	KEKEMENTERIAN PERTAHANAN	26.142.506.902,00	22.227.150.211,00	16.613.309.649,93	39.615.795,88	16.573.693.854,04	5.653.456.356,95

(dalam rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

RODE BA	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGERMILIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS IDI
21	PAKAS BESAR TNL	7.532.830.911,00	8.304.019.023,00	8.303.250.630,00	6.461.651,35	8.296.788.978,67	7.230.044,32
22	PAKAS BESAR TMLAD	45.310.497.196,00	50.679.682.575,00	50.402.748.139,49	255.728.053,82	50.147.019.285,67	53.063.289,12
23	PAKAS BESAR TNL	16.103.833.758,00	17.959.873.042,00	17.840.003.201,54	12.012.006,33	17.827.991.195,21	131.881.846,79
24	PAKAS BESAR TMLAU	12.592.716.295,00	13.983.740.830,00	13.070.804.985,67	1.233.871.035,93	13.837.933.929,73	148.806.890,26
013	REMENTERIAN HORUM DAN BAR ABASI MANUSIA	10.591.416.248,00	13.101.216.922,00	12.076.792.949,59	29.103.446,07	12.047.689.503,52	459.527.418,47
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.761.179.680,00	3.978.065.288,00	3.895.223.531,27	2.099.882,22	3.893.273.649,05	84.791.638,95
02	INSPEKTORAT JENDERAL	32.223.447,00	32.866.907,00	32.168.332,42	336.376,68	31.831.955,74	1.034.951,25
03	DJEN ADMINISTRASI HUKUM/HUKUM	680.307.515,00	683.271.257,00	566.014.354,54	13.981.034,89	552.033.321,64	131.238.935,35
05	DJEN PEMASTYAKAAN	4.263.913.635,00	5.193.564.329,00	5.133.225.664,21	1.898.231,04	5.131.427.433,16	62.136.895,83
06	DJEN HIGGRASI	2.257.230.972,00	2.366.728.137,00	2.248.333.077,92	7.959.190,98	2.240.373.881,94	126.354.255,06
07	DJEN PAKAS KEKAWAN INTEKTUAL	193.223.991,00	261.845.006,00	236.207.817,43	1.138.867,91	235.068.949,52	26.776.056,48
08	DJEN PELAYANAN BERHONGSUNG-LINDANGAN	41.419.507,00	43.591.071,00	41.323.888,00	60.610,33	41.263.277,66	2.237.933,37
09	DJEN PAKAS MANUSIA	34.283.681,00	37.663.696,00	36.460.026,07	79.540,500	36.380.485,57	1.281.212,42
10	SDAN BERHONAN HUKUM NASIONAL	108.570.670,00	108.570.670,00	103.162.178,09	114.943,86	103.047.234,23	5.523.435,77
11	SDAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	29.900.158,00	29.900.158,00	29.354.349,15	37.695,442	29.316.653,70	583.504,291
12	SDAN BERHONAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HUKUM	188.566.985,00	363.240.401,00	347.119.233,45	1.446.072,16	345.673.161,28	17.566.239,71
015	REMENTERIAN KEKAWAN	45.682.169.488,00	46.987.862.720,00	39.928.778.948,19	26.307.154,53	39.900.468.088,66	7.087.394.693,33
01	SEKRETARIAT JENDERAL	19.887.754.241,00	20.763.842.227,00	19.668.089.116,56	13.427.627,37	19.652.661.489,19	1.111.180.737,81
02	INSPEKTORAT JENDERAL	118.341.754,00	118.341.754,00	104.830.414,69	203.373,88	104.627.040,80	13.714.713,19
03	DJEN ANGGARAN	154.537.430,00	154.537.430,00	133.798.783,47	488.985,37	133.309.798,10	21.207.631,89
04	DJEN PAJAK	7.441.332.425,00	7.441.587.985,00	6.736.225.924,25	1.955.835,89	6.734.269.888,35	707.218.296,64
05	DJEN BEA DAN CUKAI	3.393.222.225,00	3.354.687.608,00	3.499.909.060,25	1.792.311,06	3.498.116.748,69	25.560.851,30
06	DJEN BERHONAN KEKAWAN	144.022.253,00	145.915.618,00	126.667.253,93	768.941,90	125.898.311,03	20.077.306,96
07	DJEN PENGOLAHAN ULANG	119.511.382,00	119.511.382,00	111.641.133,99	76.103,62	111.565.037,37	7.946.349,63
08	DJEN BERHONAN HUKUM	12.660.896.230,00	12.660.896.230,00	12.660.896.230,00	256.867,94	12.660.639.362,06	4.698.499.239,28
09	DJEN KEKAWAN NEGARA	872.909.999,00	872.909.999,00	744.841.856,34	1.789.903,03	743.071.953,30	129.838.045,69

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

RODRE BA	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS DDI
11	BAJAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJANGKUN	731.706.890,00	774.327.499,00	665.875.790,25	2.557.579,56	663.318.210,69	91.009.288,30
12	BAJAN KEBUDIAHSARFAN	157.414.654,00	159.296.684,00	129.184.128,31	29.624,816	129.154.503,50	30.142.180,49
01B	KEHUTANAN PERHAYUAN	23.820.702.903,00	24.028.510.833,00	21.926.170.220,68	89.467.412,99	21.836.702.807,69	2.201.907.994,30
01	KEHUTANAN JENDERAL	1.492.092.430,00	1.730.087.919,00	1.664.815.022,53	7.694.961,09	1.657.120.061,43	72.957.737,56
02	SUPERVISI JENDERAL	92.134.000,00	97.134.000,00	92.247.744,00	325.341,49	91.921.402,51	5.261.597,42
03	DITEN YANUARY PANGKALAN	6.486.964.351,00	6.675.409.495,00	6.168.356.984,72	67.832.674,92	6.100.524.309,79	574.685.185,20
04	DITEN HOKY KULTORA	1.355.900.980,00	1.242.629.794,00	1.126.405.896,20	309.442,23	1.126.096.453,97	116.533.340,03
05	DITEN PERKORONGAN	1.631.801.109,00	1.636.354.054,00	1.415.645.206,64	562.118,50	1.415.083.088,13	221.270.965,86
06	DITEN KETERANGAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.087.021.491,00	2.028.956.742,00	1.851.987.720,28	4.527.598,81	1.847.460.121,47	179.496.620,52
08	DITEN PERSARANA DAN SARANA PERYAKAN	6.030.828.749,00	5.834.744.749,00	5.122.013.889,68	2.634.271,43	5.119.389.618,16	715.345.650,83
09	DITEN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERYAKAN	2.084.560.880,00	2.092.710.111,00	1.886.916.691,93	2.335.320,93	1.884.401.372,99	208.308.218,00
10	BAJAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDA PERYAKAN	1.253.599.223,00	1.264.588.172,00	1.177.201.395,20	1.541.674,87	1.175.659.720,32	88.928.451,67
11	BAJAN KAPALANINA PERYAKAN	527.612.000,00	600.286.783,00	587.591.785,84	1.315.194,01	586.276.591,83	14.010.191,02
12	BAJAN KAPALANINA PERYAKAN	773.184.990,00	835.619.124,00	830.957.931,64	248.314,66	830.709.616,97	4.609.517,02
019	KEHUTANAN PERINDUSTRIAN	2.827.854.207,00	2.874.922.896,00	2.629.621.897,84	1.511.494,65	2.628.110.403,19	219.812.738,10
01	KEHUTANAN JENDERAL	1.078.722.835,00	1.139.651.155,00	1.087.911.681,44	677.234,15	1.087.234.447,28	52.416.707,71
02	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	124.964.731,00	121.336.458,00	101.837.823,85	44.560,940	101.793.262,91	19.742.995,09
03	DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI DAN FAKTOR	126.141.000,00	124.314.748,00	107.854.803,00	90.827,741	107.763.975,26	16.570.272,73
04	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI DAN USAHA BERBASIS TEKNOLOGI	124.904.050,00	120.493.000,00	98.893.368,95	14.497,796	98.878.871,16	21.013.986,83
05	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	369.897.840,00	369.897.840,00	353.760.336,80	91.914,104	353.668.422,69	16.229.417,30
06	SUPERVISI JENDERAL	43.616.390,00	43.616.390,00	42.001.083,41	67.911,178	41.933.172,23	1.683.217,76
07	BAJAN PENGALIAN KEBAKARAN, KECIL DAN INDUSTRI	708.613.398,00	714.114.223,00	688.421.116,79	288.690,84	688.132.425,95	45.981.297,04
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERILAKU DAN INDUSTRI	195.297.671,00	140.465.953,00	101.162.549,56	220.035,93	100.942.513,62	39.514.439,37
09	DIREKTORAT JENDERAL KESEKUTUPAN INDUSTRI INTERNASIONAL	54.638.270,00	53.821.695,00	47.778.833,72	16.169,961	47.762.663,76	6.059.405,23
020	KEHUTANAN BERBASIS SDA MINERAL	6.497.099.834,00	6.471.484.341,00	6.920.499.789,11	9.682.947,49	6.910.817.241,62	660.687.699,37
01	KEHUTANAN JENDERAL	351.974.082,00	360.723.780,00	341.316.639,72	1.555.427,24	339.761.212,48	20.962.567,52

(dalam rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)**

LAMPIRAN 2.A

RODE BA	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAAS DDI
02	SUKSEKORAT JENDERAL	80.431.910,00	80.431.910,00	71.996.468,17	49.892,844	71.946.575,32	8.485.334,67
04	DJEN MINYAK DAN GAS BUMI	1.729.967.194,00	1.726.467.194,00	1.572.195.099,33	17.536,705	1.572.177.542,84	164.289.651,15
05	DJEN LISTRIK DAN PENYALAMAN ENERGI	141.273.370,00	141.273.370,00	129.612.445,06	364.530,95	129.347.914,10	11.905.455,90
06	DJEN MINERAL BATUBARA DAN PANGAS BUMI	364.571.634,00	364.572.072,00	328.615.320,09	654.716,64	327.960.543,45	36.561.529,54
07	KEWAN ENERGI NASIONAL	57.116.345,00	57.116.345,00	53.034.444,72	32.478,868	53.001.965,85	4.114.379,14
11	SDAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER	566.950.824,00	597.770.889,00	522.661.972,26	1.581.360,01	521.080.612,24	76.090.276,75
12	SDAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DATA MINERAL	439.422.918,00	468.387.223,00	401.866.072,84	2.000.687,95	401.665.389,88	66.721.883,11
13	SDAN GEOTERMAL	659.817.575,00	659.817.575,00	768.439.812,34	1.750.130,68	766.689.681,65	93.127.891,14
14	BPM MIGAS	183.355.740,00	183.355.740,00	168.665.119,44	2.815.068,30	165.850.051,13	17.505.688,86
15	DJEN ENERGI BAWA TERBUKA DAN KONSERVASI ENERGI	1.722.218.242,00	1.722.218.242,00	1.562.096.439,69	730.637,26	1.561.365.802,42	160.851.439,57
022	KEKEMENTERIAN PERHUBUNGAN	48.203.109.426,00	48.421.413.068,00	45.089.338.310,69	18.596.958,94	45.070.741.364,76	8.345.676.718,24
01	SEKRETARIAT JENDERAL	580.135.964,00	580.135.964,00	528.615.964,37	237.739,48	528.378.225,09	51.757.738,90
02	SUKSEKORAT JENDERAL	106.110.822,00	106.110.822,00	102.739.362,79	407	102.739.362,38	337.439,61
03	DJEN PERHUBUNGAN DARAT	4.582.007.686,00	4.955.270.677,00	4.480.981.331,38	1.117.314,81	4.479.664.016,57	475.666.250,42
04	DJEN PERHUBUNGAN LAUT	11.800.488.955,00	14.417.626.963,00	11.502.150.936,12	5.776.995,26	11.496.373.940,86	2.921.253.022,14
05	DJEN PERHUBUNGAN UDARA	9.162.040.051,00	9.177.698.362,00	8.237.595.009,58	5.069.425,33	8.232.525.584,25	945.172.257,24
08	DIREKTORAT JENDERAL PERKEMERJAAN	17.296.256.780,00	19.188.457.243,00	15.950.142.348,70	697.117,61	15.949.445.231,08	3.239.012.011,91
11	SDAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	143.830.906,00	143.830.906,00	131.373.259,33	1.142.33,69	131.259.025,63	12.571.880,16
12	SDAN HENDIKAN DAN LAMPAHAN PERHUBUNGAN	4.527.498.007,00	4.647.077.286,00	3.956.170.428,24	5.793.77,87	3.957.390.455,36	689.486.830,63
13	SDAN PENGELOLA TRANSPORTASI JALAN DAN AIR	204.744.255,00	204.744.255,00	197.269.148,76	1.656,451	197.267.492,31	7.178.761,68
023	KEKEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	40.092.000.000,00	40.498.436.672,00	39.628.185.099,06	1.957.949.408,18	39.432.495.690,89	1.001.001.074,10
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.668.695.000,00	1.668.695.000,00	1.736.837.028,21	7.704.697,67	1.729.132.330,56	39.363.672,43
02	SUKSEKORAT JENDERAL	192.188.790,00	192.188.790,00	180.649.160,89	8.757.084,46	171.892.076,42	20.296.713,57
03	DJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	22.574.237.939,00	22.574.206.076,00	22.274.067.895,31	67.545.926,57	22.173.421.895,23	400.886.180,26
05	DJEN PAUD DAN DIKMAS	1.803.463.073,00	2.204.186.491,00	2.116.994.193,92	24.202.081,06	2.092.792.112,85	111.344.378,14
11	SDAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIRJOD	1.154.945.174,00	1.154.945.174,00	1.057.329.633,38	27.231.018,23	1.029.398.635,13	125.346.538,87

(dalam rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2A

RODRE BA	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBANGAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAAS DDI
13	BUDAN PENGEMBANGAN DAN PERBUAAN BAHASA	396.946.190,00	396.946.190,00	373.105.704,92	2.656.071,80	370.449.633,12	26.496.556,87
15	DJEN KEBUDAYAAN	1.839.626.560,00	1.831.833.697,00	1.668.966.494,58	8.952.783,83	1.660.013.710,75	171.819.986,24
16	DJEN GADUD DAN TENAGA PENDIDIKAN	10.370.535.251,00	10.370.535.251,00	10.251.334.967,84	48.199.271,52	10.203.135.236,31	165.400.014,68
024	KEHUTERAAN KESEHATAN	89.097.729.214,00	61.894.479.406,00	57.294.407.906,76	245.870.500,08	57.048.607.406,67	4.515.821.999,32
01	KEKETERANGAN JENDERAL	28.165.890.422,00	28.138.096.577,00	27.445.707.938,17	10.095.804,54	27.435.612.133,63	702.484.443,37
02	KEKETERANGAN JENDERAL	119.983.200,00	119.983.200,00	115.696.760,21	2.101.782,61	113.594.977,60	6.388.222,39
03	DJEN BINA GAD DAN KESAYANTAN BUDAN AWAK	2.102.710.381,00	2.114.745.619,00	1.960.859.208,48	6.721.212,98	1.954.138.115,50	160.607.503,49
04	DJEN BINA UPAYA KESEHATAN	15.388.088.084,00	17.204.700.290,00	15.596.718.255,94	184.103.021,17	15.412.615.682,76	1.772.084.607,23
05	DJEN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEMBUHAN LINGKUNGAN	2.723.525.128,00	3.378.571.989,00	3.088.314.861,28	15.755.254,83	3.072.497.106,44	306.092.882,55
07	DJEN BINA KEMERAKSIAN DAN ALAT KESEHATAN	4.939.179.926,00	5.086.339.848,00	4.194.184.011,90	7.036.646,32	4.187.147.365,58	899.212.482,41
11	BUDAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	909.016.668,00	930.898.816,00	839.842.706,38	1.134.457,68	838.488.248,70	102.410.567,29
12	BUDAN PENGEMBANGAN DAN PERBUAAN SOK KESEHATAN	47.493.335.415,00	4.891.123.067,00	4.332.283.544,36	28.707.767,93	4.334.581.746,42	566.541.290,57
025	KEHUTERAAN AGAMA	62.194.741.091,00	63.848.099.224,00	59.448.963.833,45	67.983.619,19	59.380.999.210,26	4.407.100.013,73
01	KEKETERANGAN JENDERAL	2.220.689.530,00	2.239.867.534,00	2.154.683.181,80	3.600.817,61	2.151.082.364,26	88.785.168,73
02	KEKETERANGAN JENDERAL	153.471.471,00	153.786.179,00	153.699.842,97	646.873,66	153.052.969,31	733.209.682
03	DJEN BERINGKAS MASYARAKAT ISLAM	5.130.689.599,00	5.184.871.735,00	5.095.007.842,48	6.589.634,83	5.088.418.207,65	96.463.527,24
04	DJEN BERINGKAS MASYARAKAT ISLAM	49.089.647.287,00	50.506.367.452,00	46.844.310.704,58	31.811.682,22	46.812.519.022,33	3.693.850.429,66
05	DJEN BERINGKAS MASYARAKAT KRISTEN	1.895.576.212,00	1.896.307.498,00	1.647.217.497,25	5.069.803,70	1.642.147.693,55	253.659.804,44
06	DJEN BERINGKAS MASYARAKAT KHALOUK	911.534.193,00	924.066.292,00	853.681.410,66	3.046.214,36	850.637.196,11	73.429.095,88
07	DJEN BERINGKAS MASYARAKAT HINDU	767.569.592,00	773.353.877,00	702.167.366,70	2.662.740,05	699.504.626,64	73.849.250,35
08	DJEN BERINGKAS MASYARAKAT BUDDHA	280.422.135,00	280.722.135,00	255.906.254,48	756.25,58	255.149.528,90	25.572.606,09
09	DJEN PENGENDALIAN HAL DAN UBAH	1.085.834.226,00	1.213.308.943,00	1.120.812.833,25	7.552.310,19	1.113.260.487,09	99.046.453,90
11	BUDAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN MELAYHAN	600.933.726,00	600.933.726,00	537.810.928,86	5.423.200,93	532.387.722,93	48.406.051,06
026	BUDAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	18.523.068,00	75.951.803,00	63.632.962,25	793.550.818	62.839.411,44	13.112.391,55
01	KEKETERANGAN JENDERAL	3.991.179.304,00	3.994.939.982,00	3.762.366.469,76	8.887.760,91	3.754.418.649,84	240.521.339,16
01	KEKETERANGAN JENDERAL	402.575.082,00	402.575.082,00	367.678.612,91	586.986,95	367.091.625,96	35.883.456,04

(dalam rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
 MENURUT BA DAN ESELON I
 TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

KODE BA	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBILAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI	
							ATAS BUDJ	DI BAWAH BUDJ
02	INSTRUKSI JENDERAL	60.000.000,00	60.000.000,00	57.703.193,93	363.047,28	57.340.146,64	2.659.853,33	
04	DJEN PERHIMPAN PERSEPAHAN TENAGA KERJA DAN TENAGA	766.681.820,00	766.681.820,00	742.765.840,40	3.316.091,82	739.449.748,58	37.222.092,41	
05	DJEN PERHIMPAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL TENAGA	184.947.280,00	184.947.280,00	178.774.211,12	1.650.093,02	177.124.628,10	7.823.051,89	
08	DJEN PERHIMPAN PENGAWASAN KEMERDEKAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	269.899.804,00	270.620.944,00	257.221.578,94	176.024,54	257.045.554,40	13.575.389,59	
11	BUDJ PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMERDEKAAN	84.478.298,00	84.478.298,00	81.103.745,04	70.327,40	81.033.417,64	3.444.880,35	
13	DJEN PERHIMPAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	2.222.996.620,00	2.225.616.158,00	2.078.058.711,38	2.725.213,87	2.075.333.497,50	150.302.660,49	
027	KEHENTERIAN SOSIAL	41.285.792.086,00	48.398.196.929,00	41.812.673.205,26	578.590.894,28	41.234.142.871,04	2.198.994.087,98	
01	KEKETAHAPAN JENDERAL	332.315.654,00	338.089.886,00	328.157.427,20	1.150.979,24	327.006.448,05	11.083.437,94	
02	INSTRUKSI JENDERAL	44.088.417,00	45.999.752,00	44.765.759,15	194.918,42	44.570.840,73	1.428.911,26	
03	DJEN PERHIMPAN SOSIAL	433.823.251,00	498.505.882,00	483.754.840,01	2.954.151,79	480.800.688,22	17.705.193,77	
04	DJEN PERHIMPAN SOSIAL	1.005.519.857,00	1.035.616.559,00	1.000.638.593,45	81.65.459,23	992.473.134,21	33.143.424,78	
05	DJEN PERENCANAAN DAN JAMINAN SOSIAL	17.671.377.420,00	19.668.377.420,00	19.601.013.911,05	48.839.629,89	19.552.174.281,15	116.203.138,84	
06	DJEN PENYANGGAPAN MAKRO EKONOMI	21.455.112.987,00	21.455.112.987,00	19.999.845.572,91	516.125.955,63	19.483.719.617,27	1.971.393.369,72	
11	BUDJ PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMERDEKAAN SOSIAL	352.594.520,00	361.434.463,00	354.497.101,39	1.099.240,00	353.397.861,38	8.036.601,61	
029	KEHENTERIAN KEHUTANAN	8.025.646.692,00	8.060.961.667,00	7.299.022.019,52	28.087.294,00	7.180.934.725,52	880.026.941,48	
01	KEKETAHAPAN JENDERAL	573.953.156,00	603.956.342,00	563.103.171,75	1.323.607,24	563.779.564,00	40.176.277,97	
02	INSTRUKSI JENDERAL	66.990.200,00	64.970.525,00	63.914.073,38	639.152,60	63.274.924,98	1.695.600,01	
03	DJEN PERENCANAAN KAJIAN PRODUKSI LESTARI	407.681.364,00	407.681.364,00	396.351.984,47	580.910,19	395.771.074,28	11.920.289,71	
04	DJEN PERENCANAAN DAS DAN HUKUM LINDUNG	1.082.474.152,00	1.084.817.437,00	1.033.772.813,26	476.651,10	1.033.296.162,15	49.521.274,84	
05	DJEN KONSERVASI SOA DAN	2.033.139.356,00	2.042.022.631,00	1.949.616.446,18	1.731.059,85	1.947.883.386,31	94.139.234,68	
06	DJEN PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAN LINDUNG	1.133.562.466,00	1.100.434.984,00	996.826.976,38	12.675.068,09	984.151.908,48	516.283.893,51	
07	BUDJ PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI	384.837.618,00	305.445.430,00	300.298.984,44	407.406,25	299.891.577,89	5.553.852,10	
08	BUDJ PENYANGGAPAN DAN PENGEMBANGAN SUPPLIER	325.914.980,00	315.433.088,00	308.543.336,14	163.702,70	308.379.635,43	7.053.622,56	
09	DJEN PERHIMPAN SOSIAL DAN KEHARUTANAN	416.014.925,00	410.420.946,00	375.405.091,03	1.970.815,28	373.434.275,25	36.986.670,74	

(dalam rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)**

LAMPIRAN 2.A

KODE BA	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DEPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS IDI	(dalam rupiah)
10	DITEN BEKECIKAN LUKU LINGKUNGAN HIDUP DAN	372.606.381,00	372.606.381,00	359.143.077,86	1.749.403,14	357.393.674,71	15.212.706,28	
11	DITEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	220.439.911,00	216.780.485,00	228.945.875,13	981.923,54	227.963.951,59	8.816.513,40	
12	DITEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN	228.530.287,00	288.649.982,00	280.703.161,94	3.151,31	280.388.030,61	8.261.951,39	
13	DITEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUBAHAN	229.389.846,00	227.212.082,00	648.397.022,919	5.089.425,19	643.327.547,72	84.094.534,27	
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.287.582.009,00	7.632.526.314,00	8.109.233.866,171	7.883.011,874	6.097.870.854,29	1.535.155.459,70	
01	SEKRETARIAT JENDERAL	423.513.361,00	476.784.477,00	416.335.642,229	1.315.503,50	415.020.139,22	61.764.507,77	
02	SUPREKTORAT JENDERAL	72.117.438,00	79.016.175,00	77.475.885,703	27.446,605	77.448.439,09	1.567.735,90	
03	DITEN PERIKAYAN TANGKAP	1.264.959.688,00	1.279.761.056,00	828.358.350,135	622.365.609	827.735.884,52	432.025.171,47	
04	DITEN PERIKAYAN BUDIDAYA	944.857.746,00	989.593.786,00	692.900.840,662	895.487.170	692.005.353,49	277.588.432,50	
05	DITEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN	813.454.764,00	813.199.676,00	642.687.200,841	818.135.692	642.169.085,14	171.030.610,85	
06	DITEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN	785.003.713,00	789.399.800,00	670.199.361,947	1.063.245,69	669.136.116,25	120.263.690,74	
07	DITEN KEADUAN, PESISIR DAN PELALAUAN NEGARA (KEPNK)	666.921.318,00	679.122.886,00	429.856.693,160	454.450,037	429.402.243,12	249.740.042,87	
12	SAJAN KEADUAN DAN SUMBER DAYA PERUSAHAAN KELAUTAN DAN	1.785.978.817,00	1.966.080.364,00	1.805.320.726,110	2.390.353,58	1.802.930.372,52	163.149.991,47	
13	SAJAN KAWANINGA KEAN. PENGENDALIAN MUDA DAN KEMPUNGAN	529.725.744,00	579.568.477,00	541.819.264,884	296.023,984	541.523.240,90	38.045.176,10	
033	KEMENTERIAN PERBURUAN DAN PERIKANAN	107.886.317.301,00	115.482.201.310,00	102.376.081.476,774	92.493.024.495	102.488.648.482,27	12.998.559.897,72	
01	SEKRETARIAT JENDERAL	600.000.003,00	600.000.003,00	557.090.208,865	828.105,416	556.262.103,44	43.737.899,55	
02	SUPREKTORAT JENDERAL	104.974.960,00	104.974.960,00	95.039.545,658	1.151.807,79	93.887.737,86	11.087.222,13	
04	DITEN BINA MARGA	41.621.066.930,00	46.351.989.681,00	40.577.821.827,838	12.776.212,873	40.565.045.664,96	5.786.924.016,03	
05	DITEN CUPA KARYA	16.109.202.581,00	18.634.190.049,00	17.189.191.579,236	15.667.223,951	17.173.524.355,28	1.460.665.693,71	
06	DITEN SUMBER DAYA AIR	27.209.551.551,00	37.825.259.130,00	32.798.190.041,595	53.954.930,576	32.744.235.111,01	5.081.024.018,98	
07	DITEN PENGELOMPOKAN PERUBAHAN	9.633.756.042,00	9.989.756.042,00	9.502.039.901,578	3.667.234,83	9.498.377.666,74	491.383.375,25	
08	DITEN PERUBAHAN PERUBAHAN	261.638.463,00	254.238.463,00	239.256.156,362	320.261,948	238.935.894,41	15.202.568,58	
11	SAJAN PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN	611.986.939,00	614.909.139,00	565.040.510,967	1.059.834,10	563.980.676,85	50.518.462,14	
13	SAJAN PEMBINAAN KONSTRUKSI	338.716.396,00	338.716.396,00	335.520.708,440	1.092.134,52	334.428.573,91	4.287.822,08	
14	SAJAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	248.339.063,00	273.523.074,00	253.891.315,916	1.028.413,66	252.862.902,25	20.860.171,75	
15	SAJAN PENGEMBANGAN SDGM	495.064.373,000	495.064.373,000	463.099.630,319	886.864,810	462.212.765,50	32.851.607,49	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2A

(dalam rupiah)

KODE BA	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APRIL	MAY	REALISASI BRUTO	PENGEMBANGAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS DUE
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	283.651.000.000	289.330.376.000	231.821.130.429	143.549.101	231.077.581,32	57.560.794,67
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	0	0	231.821.130.429	143.549.101	231.077.581,32	57.552.792,67
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	414.427.810.00	483.303.136.00	439.290.633.699	381.010.026	438.909.045,67	14.616.110,32
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	414.427.810.00	483.303.136.00	439.290.633.699	381.010.026	438.909.045,67	14.616.110,32
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN	382.103.310.00	382.103.310.00	269.130.210.078	102.034.034	269.028.176,04	113.075.133,95
01	MANUSIA DAN BERKUALITAS KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	269.130.210.078	102.034.034	269.028.176,04	113.075.133,95
040	KEMENTERIAN PARTISIPASI BERKELAKSANAAN KESEHATAN	3.733.498.080.00	3.737.018.611.00	3.430.489.181.397	3.485.941.313	3.032.973.240,08	204.649.370,91
01	KEMENTERIAN PARTISIPASI BERKELAKSANAAN KESEHATAN	3.733.498.080.00	3.737.018.611.00	3.430.489.181.397	3.485.941.313	3.032.973.240,08	204.649.370,91
041	KEMENTERIAN BUDAYA, URBANISASI DAN KEMERDEKAAN	247.041.755.00	247.041.755.00	227.626.666.854	178.248.817	227.448.387,03	19.999.397,96
01	KEMENTERIAN BUDAYA, URBANISASI DAN KEMERDEKAAN	247.041.755.00	247.041.755.00	227.626.666.854	178.248.817	227.448.387,03	19.999.397,96
042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	41.284.024.119.00	47.325.863.949.00	43.434.297.230.386	196.309.034.386	43.237.988.215,90	4.087.875.633,10
01	KEKOLABORASIAN	29.825.289.642.00	31.854.058.561.00	30.909.197.168.391	151.095.061.478	30.758.102.106,91	3.097.956.458,08
02	INSTRUMEN PENELITIAN	54.833.402.00	54.833.402.00	51.833.744.961	26.180.357	51.807.594,60	3.025.807,39
03	DILEN KEMERDEKAAN PIKET DAN LOKAL	1.152.501.579.00	1.176.651.416.00	1.031.809.744.945	4.701.705,85	1.027.108.069,09	149.543.346,90
04	DILEN BERKELAKSANAAN DAN KEMERDEKAAN	6.344.705.887.00	8.242.915.477.00	7.760.653.443.789	23.931.855.034	7.736.731.587,75	506.183.899,24
05	DILEN SUMBER DAYA PIKET DAN LOKAL	1.759.261.009.00	1.845.485.105.00	1.578.726.883.166	7.008.620,99	1.571.718.262,19	273.766.842,80
06	DILEN RISET DAN BERKELAKSANAAN	1.848.367.500.00	1.852.854.786.00	1.814.314.550.272	5.147.172,47	1.809.167.377,75	41.687.408,20
07	DILEN HONGKONGAN INOVASI	299.065.100.00	299.065.100.00	287.751.654.742	2.398.437,19	285.353.217,34	13.771.882,45
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	944.338.384.00	944.338.384.00	838.002.646.931	168.697.991	838.493.948,94	80.044.433,06
01	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	944.338.384.00	944.338.384.00	838.002.646.931	168.697.991	838.493.948,94	80.044.433,06
047	KEMENTERIAN PEREKONOMIAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	0	520.068.068.348	3.185.518.167	520.068.068,34	39.287.063,75

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
 MENURUT BA DAN ESELON I
 TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

RODE BA	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS DDI	(dalam rupiah)
01	KEMENTERIAN PENGENDAIAN PERUBAHAN DAN PELINDUNGAN HUK	553.849.035.00	556.170.204.00	520.068.068.348	3.185.518.10	516.882.550.24	39.287.651.75	
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN MANUSIA DAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS	387.366.400.00	387.366.400.00	310.788.654.382	6.825.961.862	303.962.692.92	83.403.707.48	
01	DEPARTEMEN PERKANTORAN NEGARA DAN BUREKRASI	0	0	310.788.654.382	6.825.961.86	303.962.692.52	83.403.707.48	
050	BADAN INTELEJEN NEGARA	6.646.318.000.00	6.682.698.210.00	6.629.110.278.111	635.998.998	6.028.874.279.11	94.123.930.88	
01	SIKAPINTELEJEN NEGARA	5.646.215.000.00	5.682.698.210.00	5.629.110.278.111	535.998.998	5.028.574.279.11	54.123.930.88	
031	LEMBAGA SANDI NEGARA	969.255.000.00	969.255.000.00	945.295.710.890	2.898.315.474	942.387.195.41	26.857.804.58	
01	LEMBAGA SANDI NEGARA	969.255.000.00	969.255.000.00	945.295.710.890	2.898.315.474	942.387.195.41	26.857.804.58	
052	DEWAN KEPAHAMAN NASIONAL	42.390.000.00	44.629.547.00	40.679.644.586	12.800.000	40.666.844.58	3.902.702.41	
01	KEKETAJALAN JENDERAL DEWAN KEPAHAMAN NASIONAL	42.390.000.00	44.629.547.00	40.679.644.586	12.800.000	40.666.844.58	3.902.702.41	
054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.760.339.968.00	4.777.877.034.00	4.381.146.801.380	6.204.963.894	4.354.881.837.48	432.994.197.01	
01	BADAN PUSAT STATISTIK	4.760.339.968.00	4.777.877.034.00	4.381.146.801.380	6.204.963.894	4.354.881.837.48	432.994.197.01	
055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.994.104.303.00	3.095.723.901.00	2.525.827.844.636	4.499.178.646	2.521.328.065.99	578.895.835.01	
01	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN	1.994.104.303.00	3.095.723.901.00	2.525.827.844.636	4.499.178.646	2.521.328.065.99	578.895.835.01	
056	KEKETAJALAN JENDERAL	9.064.881.486.00	9.218.317.478.00	7.901.768.207.907	15.331.144.507	7.886.583.068.24	1.331.784.414.60	
01	KEKETAJALAN JENDERAL	9.064.881.486.00	9.218.317.478.00	7.901.768.207.907	15.331.144.507	7.886.583.068.24	1.331.784.414.60	
02	KORPORASI JENDERAL	13.314.061.00	13.314.061.00	12.883.668.112	328.209.611	12.555.459.50	758.601.499	
03	DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG	220.906.151.00	220.906.151.00	201.979.065.715	285.641.126	203.691.424.59	17.212.726.40	
04	DIREKTORAT JENDERAL PERASTITIKTOR KEKANTORAN	309.874.469.00	311.680.970.00	240.594.179.684	1.255.933.37	239.248.246.30	72.432.723.67	
05	DIREKTORAT JENDERAL HUBUNGAN HUKUM NEGARA/DAN	22.278.360.00	22.278.360.00	23.266.122.468	543.075.232	22.723.047.23	9.555.312.76	
06	DIREKTORAT JENDERAL PENYAJIAN AGAMA	21.149.080.00	21.149.080.00	20.502.371.903	92.814.232	20.409.537.67	738.543.328	
07	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDAIAN TANAH	13.169.583.00	13.169.583.00	12.295.489.775	81.640.930	12.213.848.84	955.742.155	
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDAIAN PENYAJIAN KULING DAN	177.447.968.00	177.447.968.00	167.803.175.353	1.923.236.08	165.879.939.27	11.568.028.72	
09	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDAIAN PASUKAN AGAMA	13.417.278.00	13.417.278.00	12.775.066.366	16.378.822	12.758.707.56	658.670.436	
097	PERUBAHAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	584.938.638.00	584.938.638.00	550.069.387.683	127.249.541	550.069.387.683	34.371.499.85	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELAJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)**

LAMPIRAN 2.A

RODRE BA	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS DDI
01	KEPUSTAKAAN NASIONAL	594.933.638,00	594.933.638,00	550.689.387,683	127.249.541	550.562.138,14	34.371.499,85
009	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.922.660.278,00	9.104.006.055,00	4.904.604.477,091	8.181.466,040	4.896.423,011,01	207.043,049,98
01	SEKRETARAT JENDERAL	264.870.364,00	272.451.139,00	266.897.770,974	212.075.344	266.685.695,63	5.765.443,37
02	INSTITUSI JENDERAL	22.605.960,00	21.605.960,00	20.792.374,859	64.432.962	20.707.921,89	898.038,103
03	DJENKOS DAN TELEKOMUNIKASI	855.320.081,00	850.520.081,00	815.596.753,696	1.099.721,288	814.498.540,40	36.000.540,59
04	DJENJANGKAS TELEMATIKA	144.971.236,00	143.971.236,00	138.719.563,909	111.269.492	138.608.294,41	5.362.941,58
05	DJENJANGKAS KOMUNIKASI DAN DESAIN INFORMATIKA	1.219.800.394,00	1.219.800.394,00	1.027.631.186,097	5.882.697,21	1.021.748.488,87	198.051.905,12
06	SIKAP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	220.358.878,00	223.414.117,00	213.370.001,791	661.528.209	212.708.473,58	10.705.643,41
07	SIKAP INOVASI PUBLIK	194.843.360,00	432.303.128,00	421.596.825,725	132.229.526	421.464.596,19	10.808.531,80
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	94.031.469.792,00	100.611.422.604,00	98.497.727.761,517	376.722.284,194	98.124.005.476,32	2.487.417.128,67
01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	95.031.469.792,00	100.611.422.605,00	98.497.727.761,517	373.722.285,194	98.124.005.476,32	2.487.417.128,67
063	BADAN PENYAWAN OBAT DAN MAKANAN	2.178.728.393,00	2.174.979.482,00	1.925.222.862,000	9.961.163,293	1.915.261.699,74	259.717.782,63
01	SIKAP PENYAWAN OBAT DAN MAKANAN	2.172.728.393,00	2.174.979.482,00	1.925.222.862,000	9.961.163,25	1.915.261.699,74	259.717.782,65
064	TERBUKA KEYABAKAN NASIONAL	277.698.000,00	288.239.118,00	285.507.748,580	600.821.229	284.906.927,25	3.332.190,64
01	LEMBAGA KEJABARAN NASIONAL RI	277.698.000,00	288.239.118,00	285.507.748,580	600.821.229	284.906.927,25	3.332.190,64
065	BADAN KOORDINASI PERAKAMAN MODAL	548.229.840,00	548.229.840,00	481.267.825,237	581.200.398	480.086.024,85	67.543.215,14
01	SIKAP KOORDINASI PERAKAMAN MODAL	548.229.840,00	548.229.840,00	481.267.825,237	581.200.398	480.086.024,85	67.543.215,14
066	BADAN KAROTIKA NASIONAL	1.732.032.274,00	1.822.956.981,00	1.698.120.784,730	7.421.045,007	1.687.699.739,72	138.267.241,27
01	SIKAP KAROTIKA NASIONAL	1.732.032.274,00	1.822.956.981,00	1.695.120.784,730	7.421.045,00	1.687.699.739,72	135.257.241,27
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	5.145.253.061,00	6.888.602.212,00	4.480.756.370,961	20.080.012.123	4.460.676.358,43	427.924.833,56
02	INSTITUSI JENDERAL KEPROT	57.060.376,00	61.294.966,00	59.267.452,744	385.201.026	58.902.151,72	4.397.814,27
03	DJENK BERKAWAN DAN PEREKONOMIAN PESTASAKAT DESA	2.822.030.394,00	3.463.072.267,00	3.204.180.925,104	16.641.485.805	3.187.739.449,23	281.371,817,76
04	DJENK BERKAWAN KAWAN PEREKONOMIAN	332.081.502,00	333.581.502,00	324.581.764,921	7.182.541	324.574.582,38	8.006.919,62
05	DJENK BERKAWAN DAERAH TENBUNU	262.792.792,00	262.792.792,00	249.436.802,288	231.874.385	249.224.927,91	1.561.864,08
06	DJENK BERKAWAN DAERAH TERINGGAL	320.060.761,00	320.060.761,00	300.218.911,113	442.293.837	299.776.817,27	20.284.143,72
07	DJENK BERKAWAN KAWAN DAN BERKAWAN PERKULIPAN	391.254.320,00	391.254.320,00	372.717.195,410	113.419.689	372.603.775,72	18.650.574,27

(dalam rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited) **LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELAJA PEMERINTAH PUSAT**
 MENURUT BA DAN ESELON I **TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)** LAMPIRAN 2.A

RODE BA	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PERGEMBALAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS IDI
08	DITEN KEMERDEGAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	400.000.000,00	400.000.000,00	367.335.904,928	1.276.118,66	366.059.786,26	33.940.213,73
09	BALITANG DILAT SERTA INFO	280.357.341,00	305.861.891,00	286.261.665,405	343.403.831	285.918.261,57	19.943.632,42
10	REJEN KEBERKES POT DAN TRANSPIRASI	278.775.543,00	343.678.683,00	316.515.738,638	638.932.293	315.676.806,34	27.801.876,65
008	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	5.544.784.337,00	5.574.162.165,00	4.316.272.614,677	17.540.687.499	4.298.731.927,17	1.275.430.237,83
01	SUJAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	5.544.784.337,00	5.574.162.165,00	4.316.272.614,677	17.540.687.499	4.298.731.927,17	1.275.430.237,83
074	KOMISI NASIONAL HAK ASABI MANUSIA	86.682.000,00	97.945.574,00	83.370.688,528	814.175.484	84.286.813,04	13.889.060,95
01	KOMISI NASIONAL HAK ASABI MANUSIA	86.682.000,00	97.945.574,00	83.370.688,528	814.175.484	84.286.813,04	13.889.060,95
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.702.912.962,00	1.809.763.872,00	1.737.614.377,840	6.414.065,507	1.732.200.292,37	77.568.079,73
01	SUJAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.702.912.962,00	1.809.763.872,00	1.737.614.377,840	6.414.065,507	1.732.200.292,37	77.568.079,73
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	12.508.650.264,00	24.420.025.341,00	20.870.681.914,609	7.173.092,599	20.863.508.822,04	3.256.616.518,95
01	KOMISI PEMILIHAN UMUM	12.508.650.264,00	24.420.025.341,00	20.870.681.914,609	7.173.092,599	20.863.508.822,05	3.256.616.518,95
077	KABUPATEN KONSTITUSI RI	331.149.542,00	360.652.908,00	347.497.483,207	839.895,700	346.673.587,50	13.979.320,49
01	KABUPATEN KONSTITUSI RI	331.149.542,00	360.652.908,00	347.497.483,207	839.895,700	346.673.587,50	13.979.320,49
078	FRSAY PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	131.004.000,00	143.869.148,00	138.184.611,54	295.954,97	137.888.656,56	5.980.491,43
01	KOSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	131.004.000,00	143.869.148,00	138.184.611,54	295.954,97	137.888.656,56	5.980.491,43
079	LEMBAGA LAIN PENGERTAHAN INDONESIA	1.416.704.219,00	1.387.313.742,00	1.321.858.447,61	2.138.708,50	1.319.724.679,10	67.589.062,89
01	LEMBAGA LAIN PENGERTAHAN INDONESIA	1.416.704.219,00	1.387.313.742,00	1.321.858.447,61	2.138.708,50	1.319.724.679,10	67.589.062,89
080	BADAN TENAGA KERJA NASIONAL	899.582.331,00	899.463.709,00	819.632.218,26	610.108,78	818.428.109,47	81.028.599,53
01	SUJAN TENAGA KERJA NASIONAL	899.582.331,00	899.463.709,00	819.632.218,26	610.108,78	818.428.109,47	81.028.599,53
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN TEKNOLOGI	1.189.258.353,00	1.209.930.690,00	1.185.641.899,98	1.202.696,33	1.184.439.203,65	85.400.491,34
01	SUJAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN TEKNOLOGI	1.189.258.353,00	1.209.930.690,00	1.185.641.899,98	1.202.696,33	1.184.439.203,65	85.400.491,34
082	LEMBAGA PENELITIAN DAN APLIKASI NASIONAL	827.075.267,00	853.637.368,00	805.545.005,67	424.550,051	805.120.455,62	47.516.912,38
01	LAPAN	827.075.267,00	853.637.368,00	805.545.005,67	424.550,051	805.120.455,62	47.516.912,38
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	790.877.075,00	796.117.205,00	701.530.123,66	5.008.008,26	696.522.115,40	99.635.130,60
01	SUJAN INFORMASI GEOSPASIAL	790.877.075,00	796.117.205,00	701.530.123,66	5.008.008,26	696.522.115,40	99.635.130,60
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	182.464.697,00	183.041.416,00	177.587.242,23	126.497,15	177.460.745,08	5.790.600,92

(dalam rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

KODE BA	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN		REALISASI BRUTO	PENGEMBALAN	REALISASI NETTO		REALISASI DI ATAS DDI
		DAERA	DIPA			REALISASI BRUTO	REALISASI NETTO	
01	BADAN STANDARISASI NASIONAL	182.465.697,00	183.641.416,00	177.987.242,23	126.427,159	177.860.815,08	5.780.600,92	
085	BADAN PENGAWAS TENAGA KERJA	177.868.325,00	177.868.325,00	167.511.272,51	1.390.385,18	166.120.887,32	11.747.437,67	
01	SIKAP PENGAWAS TENAGA KERJA	177.868.325,00	177.868.325,00	167.511.272,51	1.390.385,18	166.120.887,32	11.747.437,67	
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	291.891.512,00	333.486.408,00	321.005.310,66	181.914,865	320.823.395,79	12.663.012,20	
01	STRUKTUR ADMINISTRASI NEGARA	291.891.512,00	333.486.408,00	321.005.310,66	181.914,865	320.823.395,79	12.663.012,20	
087	ASAS NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	195.514.015,00	195.514.015,00	190.711.584,77	833.883,75	189.877.701,02	5.636.313,97	
01	ASAS NASIONAL	195.514.015,00	195.514.015,00	190.711.584,77	833.883,75	189.877.701,02	5.636.313,97	
088	BADAN KEPERAWATAN NEGARA	654.926.411,00	1.072.369.802,00	979.109.694,36	1.821.965,08	977.287.729,27	90.082.072,72	
01	BADAN KEPERAWATAN NEGARA	654.926.411,00	1.072.369.802,00	979.109.694,36	1.821.965,08	977.287.729,27	90.082.072,72	
089	BADAN PENGAWAS KEUNGGULAN DAN PEMERINTAHAN	1.491.983.609,00	1.608.483.127,00	1.567.662.870,48	1.891.876,29	1.565.660.994,18	52.792.132,81	
01	BADAN PENGAWAS KEUNGGULAN DAN PEMERINTAHAN	1.491.983.609,00	1.608.483.127,00	1.567.662.870,48	1.891.876,29	1.565.660.994,18	52.792.132,81	
090	KEMENTERIAN PERKOTAAN	3.584.508.009,00	4.208.118.299,00	3.707.809.987,56	5.480.794,29	3.702.329.193,27	807.289.095,72	
01	KEKOTAAN JENDERAL	720.530.121,00	728.189.077,00	673.414.380,35	810.875,559	672.603.504,79	55.565.572,20	
02	KEKOTAAN JENDERAL	1.987.444.315,00	2.633.599.949,00	2.248.027.681,36	2.314.110,49	2.245.713.570,86	387.796.378,13	
03	DIREKTORAT JENDERAL PERKOTAAN DAN NEGARA	150.000.000,00	155.071.952,00	143.401.208,66	390.481,578	143.010.727,09	12.061.224,90	
04	DIREKTORAT JENDERAL KEMASAKAN PERKOTAAN NASIONAL	148.887.001,00	148.887.001,00	134.075.343,99	528.970,52	133.546.373,48	15.340.627,75	
05	DIREKTORAT JENDERAL	44.500.000,00	44.500.000,00	42.411.000,19	137.768,042	42.273.232,15	2.236.767,84	
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN NEGARA NASIONAL	155.463.929,00	155.463.929,00	134.465.419,56	31.335,320	134.434.084,24	19.029.844,75	
07	BADAN PENGAWAS HONGKONGAN BEKAS KEMENTERIAN	70.426.317,00	70.426.317,00	61.602.478,25	334.089,197	61.268.409,05	9.157.907,94	
08	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBAHAKAN PERKOTAAN	37.235.334,00	36.456.324,00	35.755.656,34	28.885,096	35.726.770,64	729.555,350	
09	DIREKTORAT JENDERAL STANDARISASI DAN PENYUNDAAN	225.000.000,00	228.633.250,00	224.156.818,82	904.227,557	223.252.591,16	5.381.158,83	
092	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN OLAH RAGA	5.605.490.001,00	9.439.891.439,00	8.780.146.426,26	81.380.031,74	8.698.766.394,52	790.061.039,97	
01	KEKOTAAN JENDERAL DAN KOTA BANGSA	5.037.540.001,00	9.434.847.444,00	8.780.146.426,26	81.380.031,74	8.698.766.394,52	790.061.039,97	
093	KOMISI PEMBEBAYARAN KORBAN	790.170.548,00	854.230.814,00	815.517.828,29	2.348.286,27	813.169.542,02	41.061.272,97	
01	KORUS PEMERINTAHAN KORUS	790.170.548,00	854.230.814,00	815.517.828,29	2.348.286,27	813.169.542,02	41.061.272,97	
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1.082.392.940,00	1.082.392.940,00	1.044.129.083,91	15.382.109,50	1.028.746.974,41	53.645.965,58	

(dalam rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)**

LAMPIRAN 2.A

RODRE BA	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS DDI
01	SEKRETARIAT JENESRAL DPR RI	230.297.694,00	230.297.694,00	208.378.443,32	460.470,701	207.917.972,61	22.379.721,38
02	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	852.095.246,00	852.095.246,00	835.750.640,39	14.921.638,80	820.829.001,79	31.266.244,30
100	KOMISI YUDISIAL RI	114.800.003,00	122.421.071,00	121.656.698,84	43.314,45	121.613.384,38	809.688,61
01	KOMISI YUDISIAL RI	114.800.002,00	122.421.071,00	121.656.698,84	43.314,45	121.613.384,38	809.688,61
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	749.380.299,00	719.218.016,00	7.113.492.996,33	8.782.882,61	7.104.710.113,72	87.476.049,27
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	749.380.299,00	719.218.016,00	7.113.492.996,33	8.782.882,61	7.104.710.113,72	87.476.049,27
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERILINDUNGAN TRI	396.160.715,00	396.160.715,00	373.809.752,89	971.113,60	372.838.639,28	23.323.074,71
01	DEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI	396.160.715,00	396.160.715,00	373.809.752,89	971.113,60	372.838.639,28	23.323.074,71
106	LEMBAGA KEBELAKANG PENGALAMAN BARANG/JASA PEMERINTAH	224.809.272,00	224.809.272,00	208.544.893,19	3.709.997,57	204.834.895,61	19.974.376,38
01	LEMBAGA KEBELAKANG PENGALAMAN BARANG/JASA PEMERINTAH	224.809.272,00	224.809.272,00	208.544.893,19	3.709.997,57	204.834.895,61	19.974.376,38
107	BADAN SAR NASIONAL	2.235.099.560,00	2.235.099.560,00	2.182.072.292,44	554.670,63	2.181.517.621,80	53.581.938,19
01	BADAN SAR NASIONAL	2.235.099.560,00	2.235.099.560,00	2.182.072.292,44	554.670,63	2.181.517.621,80	53.581.938,19
108	KOMISI PENGAWAS PERUBAHAN URAHA	134.794.052,00	134.794.052,00	129.420.999,92	917.313,33	128.503.686,58	6.291.365,41
01	KOMISI PENGAWAS PERUBAHAN URAHA	134.794.052,00	134.794.052,00	129.420.999,92	917.313,33	128.503.686,58	6.291.365,41
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH BUKANPADU	242.479.384,00	242.479.384,00	227.100.041,64	23.669,00	227.076.372,64	18.403.011,95
01	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH BUKANPADU	242.479.384,00	242.479.384,00	227.100.041,64	23.669,00	227.076.372,64	18.403.011,95
110	KOMISI PEMILIHAN PERUBAH INDONESIA	148.128.000,00	151.839.456,00	149.081.347,78	1.498.039,08	147.583.308,70	4.251.247,29
01	KOMISI PEMILIHAN PERUBAH INDONESIA	148.128.000,00	151.839.456,00	149.081.347,78	1.498.039,08	147.583.308,70	4.251.247,29
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERUBAHAN	203.542.280,00	203.542.280,00	176.192.633,97	900.427,80	174.292.206,17	29.250.072,83
01	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERUBAHAN	203.542.280,00	203.542.280,00	176.192.633,97	900.427,80	174.292.206,17	29.250.072,83
112	BADAN PENELITIAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS	2.046.159.533,00	2.046.159.533,00	1.368.887.676,07	-	1.368.887.676,07	677.271.856,92
01	BADAN PENELITIAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS	2.046.159.533,00	2.046.159.533,00	1.368.887.676,07	-	1.368.887.676,07	677.271.856,92
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	506.586.324,00	543.733.483,00	538.263.765,14	1.802.709,25	536.461.055,88	7.333.427,11
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	506.586.324,00	543.733.483,00	538.263.765,14	1.802.709,25	536.461.055,88	7.333.427,11
114	SEKRETARIAT KABINET	230.479.029,00	230.479.029,00	229.237.700,30	1.456.318,17	227.781.382,13	53.697.646,86

(dalam rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENCURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

RODE BA	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAH DI
01	SEKRETARIAT KABINET	230.475.029.00	353.401.987.00	299.257.700.30	1.456.315.17	297.801.385.13	55.600.601.88
115	BADAN PENGAWASAN PERHITUNGAN	8.508.195.464.00	9.677.381.776.00	7.759.947.900.29	11.064.341.20	7.748.883.559.09	1.928.468.216.90
01	SEKRETARIAT BADAN PENGAWASAN PERHITUNGAN	5.508.195.464.00	9.677.381.776.00	7.759.947.900.29	11.064.341.20	7.748.883.559.09	1.928.468.216.90
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	958.048.760.00	1.039.091.672.00	981.814.649.37	812.776.78	981.801.872.61	87.789.799.38
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	958.048.760.00	1.039.091.672.00	981.814.649.37	812.776.78	981.801.872.61	87.789.799.38
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	838.896.336.00	909.987.584.00	905.705.614.30	297.222.89	905.408.391.90	83.989.192.09
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	838.896.336.00	909.987.584.00	905.705.614.30	297.222.89	905.408.391.90	83.989.192.09
118	BADAN PENGUSAHAAN KEWASIHAN PERDAGANGAN BERBASIS	224.864.020.00	224.864.020.00	182.987.668.38	23.373.00	182.984.293.38	71.929.726.61
01	DAN PERALIHAN BEBAS SABANG	0	0	9	0	9	1
01	SIJUAN PENGESAHAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS	224.864.020.00	224.864.020.00	182.987.668.38	23.373.00	182.984.293.38	71.929.726.61
01	DAN RELIQUAN BEBAS SABANG	0	0	9	0	9	1
119	BADAN KEAMANKAN LAUT	558.997.000.00	558.997.000.00	542.879.018.28	193.697.75	542.884.320.53	16.311.679.46
01	SIJUAN KEAMANKAN LAUT	558.997.000.00	558.997.000.00	542.879.018.28	193.697.75	542.884.320.53	16.311.679.46
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMAMARTAHAN	300.306.844.00	300.306.844.00	278.233.537.67	4.386.492.38	273.877.084.41	26.429.758.58
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMAMARTAHAN	300.306.844.00	300.306.844.00	278.233.537.67	4.386.492.38	273.877.084.41	26.429.758.58
121	BADAN EKONOMI KREATIF	746.158.140.00	746.158.140.00	662.082.772.52	8.989.145.62	666.123.628.89	90.034.513.10
01	SEKRETARIAT BADAN EKONOMI KREATIF	746.158.140.00	746.158.140.00	662.082.772.52	8.989.145.62	666.123.628.89	90.034.513.10
999	BENDAHARA UNDANG NEGARA	607.029.203.97.00	623.808.784.286.00	608.763.240.084.01	008.763.240.084.01	608.763.240.084.01	13.043.944.171.98
01	SENGEDOLA UTANG PEMERINTAH	238.607.721.370.00	264.850.500.000.00	257.952.028.141.27	257.952.028.141.27	257.952.028.141.27	6.898.471.858.72
02	SENGEDOLA HIBAH	1.460.845.703.00	1.988.620.314.00	1.520.560.988.28	1.520.560.988.28	1.520.560.988.28	488.059.335.71
07	SENGEDOLA BELANJA SUBSIDI	156.228.125.107.00	223.590.040.996.00	216.883.304.115.30	216.883.304.115.30	216.883.304.115.30	6.705.736.880.89
08	SENGEDOLA BELANJA LAINNYA	100.422.942.713.00	15.472.570.425.00	15.075.455.517.08	15.075.455.517.08	15.075.455.517.08	397.14.907.91
99	TRANSAKSI KHUSUS	110.341.068.684.00	117.907.052.521.00	117.331.891.322.06	117.331.891.322.06	117.331.891.322.06	575.61.198.93
XXX		0	0	6		6	
XX	Jumlah	1.454.494.390.020.00	1.547.176.987.290.00	1.459.294.959.016.08	3.970.079.789.00	1.455.294.879.227.02	91.850.078.022.38

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)**

LAMPIRAN 2.B

(dalam rupiah)

RODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bea Cukai	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lain-lain	Total Belanja
		31	32	33	34	35	36	37	38	
001	MAJELIS PERHUKUMATAN MASYARAKAT	86.170.973,94	778.434.310,38	34.378.811,80						899.004.298,32
002	DEWAN PERHUKUMAN MASYARAKAT	1.016.368.548,49	3.409.933.811,38	177.368.163,61						4.803.670.523,48
004	BIDANG PENELITIAN KEUANGAN	1.933.394.391,92	1.477.421.078,75	136.781.298,13						3.547.296.768,80
005	MARSAWAHA AGUNG	6.494.938.933,63	1.350.193.992,53	578.283.786,45						8.423.416.712,61
006	REJAKSARAN RI	3.214.721.010,68	1.333.817.487,62	1.368.340.118,07						5.916.878.616,37
007	KEPENTIMAN DEWETAWAN NEGARA	403.982.827,24	1.614.243.792,77	232.884.638,87						2.251.111.258,88
010	KEPENTIMAN DALAM NEGARA	747.298.281,18	2.180.207.294,83	147.709.097,61						3.075.214.673,62
011	KEPENTIMAN LUAR NEGARA	3.373.674.823,39	3.191.883.183,19	978.211.256,32						7.543.769.262,90
012	KEPENTIMAN PERTAHANAN	49.482.293.204,24	42.128.173.248,23	19.141.896.393,97						100.680.427.246,44
013	KEPENTIMAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	6.306.574.297,29	4.489.260.531,76	1.843.794.884,47						12.641.669.513,52
015	KEPENTIMAN KELUANGAN	20.151.278.169,46	17.744.369.417,28	1.794.822.201,91						39.590.469.788,65
018	KEPENTIMAN PERYAHAN	2.430.897.201,23	18.336.529.810,43	869.173.225,98						21.636.600.237,64
019	KEPENTIMAN PENYADARAN	683.286.216,71	1.498.533.793,72	443.937.376,43						2.625.757.386,86
020	KEPENTIMAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	883.922.266,99	3.219.806.723,61	1.303.118.201,01						5.406.847.191,61
022	KEPENTIMAN PERHUBUNGAN	3.333.208.620,29	14.438.884.323,97	27.082.448.218,48						44.854.541.162,74
023	KEPENTIMAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8.343.622.013,73	20.020.060.946,04	1.013.169.212,94				10.031.282.433,17		39.432.495.665,88
024	KEPENTIMAN KESEHATAN	3.015.492.283,91	23.988.408.032,64	2.820.715.424,11				23.492.243.148,05		51.316.918.788,71
025	KEPENTIMAN AGRIKULTUR	33.772.161.121,42	18.844.379.535,54	4.030.707.886,26				1.516.733.167,94		57.380.999.215,16
026	KEPENTIMAN KETUMBUHANEKONOMIAN	402.989.197,49	2.383.580.220,18	753.849.223,16						3.540.418.640,83
027	KEPENTIMAN SOSIAL	471.787.290,21	3.472.322.616,87	134.171.280,95				27.133.821.182,99		41.234.142.871,02
029	KEPENTIMAN KEMERTAHAN	1.917.981.828,41	4.289.002.842,83	623.920.044,20						7.180.904.715,44
032	KEPENTIMAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.843.913.277,28	3.477.293.598,80	777.041.977,90						6.098.248.854,98
033	KEPENTIMAN PERUMAHAN LINGKUNGAN	2.831.721.467,83	29.618.991.431,43	70.232.926.591,01						102.683.649.490,27

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)**

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Biaya Utang	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan	Belanja Lainnya	Total Belanja
		51	52	53	54	55	56	57	58	
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	57.070.605,46	1.686.793.423,93	5.822.539,92						231.677.381,32
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN	90.734.621,34	339.225.029,90	8.928.464,42						438.909.045,67
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PERK. PERTANIAN	54.992.570,00	209.598.729,70	4.448.846,33						249.038.146,04
040	KEMENTERIAN PARIWISATA, BUDAYA DAN KEMENTERIAN NEGARA SUDAH UTAMA PERLIK NEGARA	261.305.722,62	2.806.478.913,34	423.190.594,11						3.532.973.240,08
042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENCIPTAAN	48.701.098,82	125.024.565,46	31.692.692,74						227.448.357,03
044	KEMENTERIAN NEGARA KEPERAWAAN DAN UKH	112.280.875.215,71	20.125.797.296,41	6.120.933.623,97				3.700.281.979,79		49.237.988.215,90
047	KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN PERENCANAAN	101.839.324,64	679.107.896,50	76.548.747,78						858.493.348,94
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN	29.627.029,26	474.929.429,11	22.968.091,79						316.882.580,24
050	AKADAMIK, NEGARA	71.832.712,17	209.700.242,47	22.409.627,87						303.962.682,52
051	DIKASABANTERANG NEGARA	277.729.577,79	2.230.809.028,41	3.129.968.671,90						5.438.574.278,11
052	LEMBAGA SANDI NEGARA	120.526.940,89	272.968.696,12	348.901.528,40						742.397.165,41
052	DIVISI KEAMANAN NASIONAL	20.697.266,92	19.269.277,86							40.066.544,78
054	DIKASABANTERANG NEGARA	1.992.429.018,04	2.009.271.192,78	249.821.622,64						4.251.521.833,47
055	KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN DAN PERENCANAAN	133.691.045,92	2.306.200.180,82	59.258.829,48						2.397.248.065,99
056	DIKASABANTERANG NEGARA	2.042.764.441,24	3.199.210.912,44	644.427.706,64						7.889.393.060,34
057	PERENCANAAN NASIONAL	84.674.548,18	325.212.296,97	120.372.292,98						390.262.138,14
059	KEMENTERIAN KEMERITRAN	400.706.908,21	4.225.288.629,08	230.227.427,71						4.856.222.011,01
060	KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN	48.663.847.923,29	23.501.212.948,37	27.929.844.574,65						99.134.005.476,32

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)**

LAMPIRAN 2.15

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Biaya Utang	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan	Belanja Lain-lain	Total Belanja
		51	52	53	54	55	56	57	58	
063	BADAN PENGAWAJ OBAT DAN MAKANAN	473.778.944,42	948.941.273,02	490.539.459,89						1.913.261.697,34
064	LEMBAGA KETABAHUAN NASIONAL	72.231.053,84	112.992.029,42	98.683.834,08						284.906.917,35
065	BADAN KOORDINASI PENYAKITAN HOGA	124.417.949,24	336.423.267,24	19.845.408,37						480.686.624,85
066	BADAN KARDIOLOGI NASIONAL	478.917.743,13	846.879.258,02	363.942.440,34						1.687.899.441,52
067	KEMENDI PEMBANGUNAN DAERAH TEKNIS/CGAL	214.433.233,26	4.972.694.878,93	272.548.246,14						5.460.676.358,33
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.094.883.187,41	2.112.777.623,31	91.071.116,24						4.298.771.927,17
074	KORUS NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	28.014.240,72	35.085.526,11	1.458.726,18						64.558.492,91
075	BADAN TEKNOLOGI DAN GEOMATIKA	523.483.077,28	627.493.284,29	529.202.820,29						1.780.208.292,27
076	KORUS PENYAKITAN LUPUS	1.216.398.024,28	19.164.482.194,59	482.628.692,26						20.863.508.912,05
077	PAKSIKAWAN KONSTITUSI PI	34.993.264,71	259.262.292,28	22.217.820,40						346.073.377,39
078	PLADAT PELANCONG DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	69.628.280,06	34.644.022,74	13.616.202,72						127.888.505,52
079	LEMBAGA LPHU PENGANTARAN INDOENSIA	565.048.292,04	297.698.885,24	258.977.481,72						1.121.724.659,10
080	BADAN TEKNOLOGI NASIONAL	233.040.859,88	212.129.023,91	231.235.205,68						676.405.089,47
081	BADAN PENELITIAN DAN PENGAPARAN TEKNOLOGI	422.264.246,46	428.608.070,69	292.618.288,49						1.144.090.605,65
082	LEMBAGA PENELITIAN DAN ANTIKORUPSI NASIONAL	148.180.497,22	196.066.274,24	460.872.684,03						805.120.455,49
083	BADAN INDOENSIA GEOGRAFISAL	72.374.228,22	193.204.262,22	427.802.248,41						693.380.738,85
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	44.422.223,12	82.224.462,27	31.172.794,27						157.819.480,66
085	BADAN PENGAWAJ TEKNOLOGI NUKLIR	33.626.279,29	94.970.128,66	12.424.148,86						141.020.556,81
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	143.220.122,81	128.028.423,82	12.278.822,12						283.527.372,75
087	KORUS NASIONAL TERBUKA INDOENSIA	84.018.222,69	82.924.200,92	21.904.876,49						188.847.300,10
088	BADAN PENELITIAN NEGARA	229.074.820,11	256.841.768,29	91.299.122,27						577.215.710,67

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)**

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Beaya Utang	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan	Belanja Lainnya	Total Belanja
		51	52	53	54	55	56	57	58	
099	BADAN PENGANTARAN KEUANGAN DAN PEMANGGILAN	931.831.224,38	316.713.623,14	87.114.126,65						1.335.659.974,18
090	KEMENTERIAN PENGANGKUTAN	460.861.789,26	3.137.120.720,10	103.816.723,90						3.701.829.233,27
092	KEPENTINGAN NEGARA PERUDA DAN OLAH RAGA	87.726.417,41	8.448.312.692,10	162.347.282,00						8.698.786.391,52
093	KORPRI PERSEKUTUAN KORUPSI	490.672.091,00	245.226.446,22	77.271.094,79						813.169.592,02
095	DEWAN PENYAKSIAN DANAH (DPD)	312.227.851,12	704.286.974,97	11.822.148,20						1.028.746.974,41
100	KORPRI TUDUKAL RI	33.827.813,70	83.284.131,21	2.703.417,16						121.815.362,08
103	BADAN NASIONAL PENGANGKUTAN BERCAKUP	54.297.022,63	610.918.724,83	37.296.374,63				6.401.797.991,60		7.104.710.113,72
104	BADAN NASIONAL PENGANTARAN DAN PENLINDUNGAN TEL	109.432.463,77	246.607.285,19	16.797.890,31						372.838.639,28
106	LEMBAGA KERUBAN PENGADAAN BAKANGJAYA PEMERINTAH	30.227.197,90	133.087.574,14	21.520.123,96						204.834.896,01
107	BADAN SAM NASIONAL	247.214.628,10	722.923.771,25	1.101.077.222,15						2.181.217.621,50
108	KORPRI PENGAWAS PENANGKULAN USAHA	33.293.667,97	89.763.326,01	5.444.677,60						128.502.671,58
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUKAMKOU (BPWS)	10.209.471,00	36.223.102,81	180.631.798,22						227.076.372,04
110	DEKRETERAN REPUBLIK INDONESIA	59.982.227,29	84.224.512,64	2.271.428,66						147.588.308,70
111	BADAN NASIONAL PENGOLOLA PEMBATASAN	24.043.127,22	144.097.207,09	6.131.571,83						174.272.906,15
112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PENGANGKUTAN BERBASIS DAN PELABUHAN		929.162.671,61	429.723.004,46						1.398.887.676,07
113	BADAN NASIONAL PENANGKULAN TERMINISITRE	22.882.264,47	424.376.223,27	89.142.146,03						536.401.033,78
114	DEKRETERAN KEMERIT	179.679.161,69	113.211.823,73	4.916.185,79						297.801.161,21
115	BADAN PENGAWASAN PERILAHAN LUMAH	72.208.923,19	7.477.667.982,02	199.006.622,85						7.749.883.528,07

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.15

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)**

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Beasiswa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lain-lain	Total Belanja	
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	51	52	53	54	55	56	57	58	Total Belanja
		577.433.477,27	287.004.379,11	116.863.816,23					981.301.872,61	
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	309.492.066,57	464.242.653,47	131.672.671,85					905.408.391,90	
118	BADAN PENYIARAN KAWASAN PENGANGKUTAN BERAS DAN PELALUAN		38.447.230,28	112.406.943,18					150.854.173,46	
119	BADAN PENYIARAN LAUT	44.718.284,73	138.747.822,21	239.219.433,55					422.685.540,49	
120	KEHANTUNGAN KORDINATOR BEKAS	34.838.040,31	222.231.603,28	16.787.442,21					273.857.085,81	
121	BADAN REKOMENDASI	19.634.596,30	636.449.877,14	10.039.192,45					666.123.665,89	
999	RENDAMAN UPRU NEGARA	113.927.210.196,44	316.191.097,28	237.932.028.141,27		216.883.204.112,30	1.320.560.998,28	16.163.845.343,43	608.782.240.084,01	
	JUMLAH	340.830.718.099.043,0	347.408.451.508.711,0	184.127.607.490.212,6	287.582.028.141.275,0	216.883.204.112.301,8	1.320.560.998.283,0	84.218.412.919.413,0	16.163.845.343.43	1.438.334.819.227.436,0
	PERSENTASE PER JENIS BELANJA	23,84%	23,88%	12,65%	17,72%	14,90%	0,10%	0,9%	1,11%	100,00%

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN 2.C

No	Jenis	Kategori	Profil	Salah	No Angkat	Dit. Iqta	Dit. efektif	Cukup	Salah	Dibayar	Dibayar	2018		2017		Kategori	Rencana	
												Salah	Dibayar	Salah	Dibayar			
25	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman
26	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman
27	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman
28	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman
29	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman
30	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman
31	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman
32	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman
33	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman
34	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman
35	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman
36	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman	Pinjaman

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PENGJAMPAH LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN 2.C

No	FELI	REKREASI	PROBLEK	Lama ID	No Revisi	Date open	Date effective	Closing date	Lama Akun		Debit		Kredit		Saldo Awal		Saldo Akhir		Keterangan
									Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit			
10	20180101	General Expenses for the	General Expenses for the	2018.01	10000000	31 Dec 2018	31 Dec 2018	31 Dec 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	General Expenses for the
11	20180101	General Expenses for the	General Expenses for the	2018.01	10000000	31 Dec 2018	31 Dec 2018	31 Dec 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	General Expenses for the
12	20180101	General Expenses for the	General Expenses for the	2018.01	10000000	31 Dec 2018	31 Dec 2018	31 Dec 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	General Expenses for the
13	20180101	General Expenses for the	General Expenses for the	2018.01	10000000	31 Dec 2018	31 Dec 2018	31 Dec 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	General Expenses for the
14	20180101	General Expenses for the	General Expenses for the	2018.01	10000000	31 Dec 2018	31 Dec 2018	31 Dec 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	General Expenses for the
15	20180101	General Expenses for the	General Expenses for the	2018.01	10000000	31 Dec 2018	31 Dec 2018	31 Dec 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	General Expenses for the
16	20180101	General Expenses for the	General Expenses for the	2018.01	10000000	31 Dec 2018	31 Dec 2018	31 Dec 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	General Expenses for the
17	20180101	General Expenses for the	General Expenses for the	2018.01	10000000	31 Dec 2018	31 Dec 2018	31 Dec 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	General Expenses for the
18	20180101	General Expenses for the	General Expenses for the	2018.01	10000000	31 Dec 2018	31 Dec 2018	31 Dec 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	General Expenses for the
19	20180101	General Expenses for the	General Expenses for the	2018.01	10000000	31 Dec 2018	31 Dec 2018	31 Dec 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	General Expenses for the
20	20180101	General Expenses for the	General Expenses for the	2018.01	10000000	31 Dec 2018	31 Dec 2018	31 Dec 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	General Expenses for the
21	20180101	General Expenses for the	General Expenses for the	2018.01	10000000	31 Dec 2018	31 Dec 2018	31 Dec 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	General Expenses for the

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

KUTUSKA LAPORAN KEUANGAN PENERIMAAN HABIS LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN 2D

No	REVISI	PRABELOT	PROBITE	Instansi	Revisi Anggaran	Revisi Revisi	Revisi Revisi	Revisi Revisi	Revisi Revisi	Revisi Revisi	Revisi Revisi	Revisi Revisi	Revisi Revisi	Revisi Revisi	Revisi Revisi	Revisi Revisi	Revisi Revisi	Revisi Revisi	Revisi Revisi	Revisi Revisi	Revisi Revisi
1	U.S. 2017	Projector and Management Projector (KLP)	Projector and Management Projector (KLP)	71597107																	
2	U.S. 2017	Projector and Management Projector (KLP)	Projector and Management Projector (KLP)	71597107																	
3	U.S. 2017	Projector and Management Projector (KLP)	Projector and Management Projector (KLP)	71597107																	
4	U.S. 2017	Projector and Management Projector (KLP)	Projector and Management Projector (KLP)	71597107																	
5	U.S. 2017	Projector and Management Projector (KLP)	Projector and Management Projector (KLP)	71597107																	
6	U.S. 2017	Projector and Management Projector (KLP)	Projector and Management Projector (KLP)	71597107																	
7	U.S. 2017	Projector and Management Projector (KLP)	Projector and Management Projector (KLP)	71597107																	
8	U.S. 2017	Projector and Management Projector (KLP)	Projector and Management Projector (KLP)	71597107																	
9	U.S. 2017	Projector and Management Projector (KLP)	Projector and Management Projector (KLP)	71597107																	
10	U.S. 2017	Projector and Management Projector (KLP)	Projector and Management Projector (KLP)	71597107																	

**LAPORAN REALISASI
TKDD TA 2018**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		Total
			FPb Pemazags	FPB	
1	2	3	4	5	4+5
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	153.815.821.172	92.007.929.933	61.747.891.237	153.815.821.172
2	Kab. Aceh Besar	13.877.807.354	6.231.612.022	7.646.195.332	13.877.807.354
3	Kab. Aceh Besar	13.793.001.718	7.296.924.755	6.296.076.933	13.793.001.718
4	Kab. Aceh Selatan	11.261.304.493	3.526.019.491	3.735.285.003	11.261.304.493
5	Kab. Aceh Singkil	13.482.013.051	3.449.085.994	10.032.927.057	13.482.013.051
6	Kab. Aceh Tengah	10.418.230.537	4.892.068.171	3.526.182.366	10.418.230.537
7	Kab. Aceh Tenggara	8.606.740.512	3.413.979.923	3.192.760.584	8.606.740.512
8	Kab. Aceh Tami	32.007.950.838	4.425.049.234	27.582.901.294	32.007.950.838
9	Kab. Aceh Utara	96.473.023.759	6.314.624.969	90.158.398.790	96.473.023.759
10	Kab. Bireuen	13.614.101.639	6.126.391.284	7.487.510.355	13.614.101.639
11	Kab. Pidie	11.616.418.206	6.181.466.302	3.434.951.904	11.616.418.206
12	Kab. Simeulue	8.347.313.987	2.910.126.303	3.437.187.684	8.347.313.987
13	Kota Banda Aceh	36.334.696.132	31.809.628.597	4.525.067.535	36.334.696.132
14	Kota Sabang	7.817.978.001	3.136.153.628	4.659.821.373	7.817.978.001
15	Kota Langsa	13.858.904.834	8.348.990.909	3.509.912.925	13.858.904.834
16	Kota Lhokseumawe	28.938.468.941	9.637.080.161	19.301.408.780	28.938.468.941
17	Kab. Nagan Raya	14.401.370.751	4.532.767.753	3.848.802.996	14.401.370.751
18	Kab. Aceh Jaya	9.141.099.442	2.823.292.191	6.317.807.251	9.141.099.442
19	Kab. Pidie Jaya	7.693.302.498	2.968.980.952	4.724.321.546	7.693.302.498
20	Kab. Aceh Barat Daya	8.681.343.321	3.226.056.070	3.455.286.651	8.681.343.321
21	Kab. Gayo Lues	8.338.551.222	2.620.637.168	3.717.914.054	8.338.551.222
22	Kab. Aceh Tami	79.776.702.346	3.647.812.000	74.128.889.746	79.776.702.346
23	Kab. Bener Merah	8.272.979.491	3.423.397.614	4.849.381.877	8.272.979.491
24	Kota Subussalam	8.977.828.103	3.194.313.085	3.753.615.018	8.977.828.103
25	Provinsi Sumatera Utara	449.086.001.729	329.303.454.923	119.782.546.806	449.086.001.729
26	Kab. Asahan	61.767.184.941	14.024.918.810	47.742.266.130	61.767.184.941
27	Kab. Deli	12.496.303.541	6.179.749.521	6.316.554.020	12.496.303.541
28	Kab. Deli Serdang	62.265.354.132	30.374.319.761	31.891.034.371	62.265.354.132
29	Kab. Karo	13.658.236.123	7.884.318.034	3.773.317.489	13.658.236.123
30	Kab. Labuhan Batu	45.414.292.241	13.711.357.105	31.702.935.136	45.414.292.241
31	Kab. Langkat	143.898.133.603	12.008.910.872	131.889.222.731	143.898.133.603
32	Kab. Mandailing Natal	24.374.119.932	8.404.945.723	15.969.174.209	24.374.119.932
33	Kab. Nias	9.029.889.003	4.840.814.968	4.189.072.035	9.029.889.003
34	Kab. Simalingun	48.449.751.190	11.973.004.890	36.476.746.300	48.449.751.190
35	Kab. Tapanuli Selatan	39.962.868.961	10.237.468.815	29.725.400.146	39.962.868.961
36	Kab. Tapanuli Tengah	14.533.718.353	6.146.833.765	8.386.884.588	14.533.718.353
37	Kab. Tapanuli Utara	31.466.317.865	8.341.927.203	23.124.390.662	31.466.317.865
38	Kab. Toba Samosir	14.534.229.244	9.449.218.057	3.085.011.187	14.534.229.244
39	Kota Binjai	16.231.271.134	8.907.286.509	7.323.984.625	16.231.271.134
40	Kota Medan	212.631.219.115	202.854.655.415	9.776.563.700	212.631.219.115
41	Kota Penangseh Siantar	19.423.364.321	15.134.794.327	4.288.569.994	19.423.364.321
42	Kota Sibolga	12.455.401.556	8.049.175.011	4.406.226.547	12.455.401.556
43	Kota Tanjung Balai	11.352.617.318	6.906.275.631	4.446.341.687	11.352.617.318
44	Kab. Batu Bara	27.100.703.654	13.668.532.408	13.432.171.246	27.100.703.654
45	Kab. Labuhan Batu Utara	35.147.828.245	6.762.537.826	28.385.090.419	35.147.828.245
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	37.043.301.599	8.546.909.307	48.496.392.292	37.043.301.599
47	Kab. Padang Lawas Utara	21.006.522.429	6.010.163.476	14.996.358.953	21.006.522.429
48	Kab. Padang Lawas	22.631.226.502	6.392.147.529	16.239.078.973	22.631.226.502
49	Kab. Nias Utara	9.602.903.718	3.132.040.749	4.470.862.969	9.602.903.718
50	Kab. Nias Barat	9.105.043.509	4.943.710.381	4.161.333.128	9.105.043.509
51	Kota Tanjung Tinggi	12.870.403.267	8.336.433.390	4.534.969.877	12.870.403.267
52	Kota Padang Sidempuan	14.242.055.101	9.180.418.828	3.061.636.273	14.242.055.101
53	Kab. Pangkajene	10.318.081.466	3.121.762.363	3.196.319.043	10.318.081.466
54	Kab. Nias Selatan	11.581.508.325	3.408.323.540	8.173.184.785	11.581.508.325
55	Kab. Humbang Hasundutan	11.538.878.604	3.614.773.043	3.924.105.561	11.538.878.604
56	Kab. Serdang Bedagai	39.989.314.861	10.380.391.296	29.608.923.565	39.989.314.861
57	Kab. Samosir	10.652.795.549	3.366.605.005	3.287.190.544	10.652.795.549
58	Kota Gunungrejo	11.476.306.000	7.430.854.221	4.045.451.779	11.476.306.000
59	Provinsi Sumatera Barat	112.139.095.402	93.181.301.499	18.957.793.903	112.139.095.402
60	Kab. Lima Puluh Kota	10.223.879.420	4.321.613.516	3.902.266.104	10.223.879.420
61	Kab. Agam	14.000.068.393	3.945.504.866	3.054.503.527	14.000.068.393
62	Kab. Kepulauan Mentawai	10.870.117.367	3.110.647.034	7.759.470.333	10.870.117.367
63	Kab. Padang Pariaman	8.812.618.584	3.854.188.308	4.958.432.278	8.812.618.584
64	Kab. Pasaman	9.241.287.041	4.080.471.132	3.160.815.909	9.241.287.041

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		Total
			FPb Pemazags	FPB	
1	2	3	4	5	4+5
65	Kab. Pasuruan Selatan	15.452.877.217	4.248.095.779	11.204.781.438	15.452.877.217
66	Kab. Situbondho	10.218.731.808	4.006.855.239	6.211.876.569	10.218.731.808
67	Kab. Soek	10.218.439.488	4.731.125.463	5.487.314.026	10.218.439.488
68	Kab. Tanah Datar	9.815.933.386	3.035.171.073	4.780.762.313	9.815.933.386
69	Kota Bukit Tinggi	10.905.190.472	7.012.027.057	3.893.163.415	10.905.190.472
70	Kota Padang Panjang	7.682.058.808	3.505.099.458	4.176.959.350	7.682.058.808
71	Kota Padang	62.854.411.577	23.294.125.041	7.500.285.929	62.854.411.577
72	Kota Payakumbuh	9.968.359.414	3.975.568.418	3.990.292.996	9.968.359.414
73	Kota Sawahlunto	8.632.934.807	4.024.411.109	4.608.517.498	8.632.934.807
74	Kota Soek	9.719.458.573	3.544.707.371	4.174.691.201	9.719.458.573
75	Kota Pariaman	9.901.058.761	3.409.271.378	4.491.787.383	9.901.058.761
76	Kab. Pasaman Barat	24.031.899.148	4.928.421.448	19.103.477.700	24.031.899.148
77	Kab. Dharmasraya	17.420.078.094	3.082.307.216	12.338.310.878	17.420.078.094
78	Kab. Soek Selatan	16.374.748.483	4.313.994.029	12.061.154.454	16.374.748.483
79	Provinsi Riau	856.660.641.569	209.908.107.184	646.752.534.405	856.660.641.569
80	Kab. Bengkalis	1.436.254.232.765	48.121.904.260	1.390.132.317.505	1.436.254.232.765
81	Kab. Indragiri Hilir	51.845.980.126	15.290.783.044	36.555.197.082	51.845.980.126
82	Kab. Indragiri Hulu	86.882.825.819	13.607.307.080	73.275.518.739	86.882.825.819
83	Kab. Kampar	222.848.856.511	15.498.333.512	207.350.522.999	222.848.856.511
84	Kab. Kepulauan Singingi	34.507.430.336	12.267.939.857	22.239.490.479	34.507.430.336
85	Kab. Pelalawan	130.445.877.047	24.882.805.459	105.563.071.588	130.445.877.047
86	Kab. Rokan Hilir	237.776.893.504	14.338.970.354	223.437.923.150	237.776.893.504
87	Kab. Rokan Hulu	67.047.044.590	13.927.483.484	53.120.161.106	67.047.044.590
88	Kab. Stak	451.431.044.871	26.779.202.874	424.651.841.997	451.431.044.871
89	Kota Dumai	58.145.052.156	22.588.849.375	35.556.202.781	58.145.052.156
90	Kota Pekanbaru	109.210.048.782	92.404.623.962	16.806.024.820	109.210.048.782
91	Kab. Kepulauan Meranti	37.904.427.427	11.174.930.469	48.729.506.958	37.904.427.427
92	Provinsi Kepulauan Riau	155.976.997.739	122.602.996.761	33.374.000.978	155.976.997.739
93	Kab. Bintan	23.918.046.951	14.325.357.566	9.592.689.385	23.918.046.951
94	Kab. Natuna	74.842.416.285	10.350.482.078	64.491.934.207	74.842.416.285
95	Kab. Karimun	42.148.249.401	18.821.889.059	23.326.359.342	42.148.249.401
96	Kota Batam	104.094.249.034	94.694.584.954	9.999.664.100	104.094.249.034
97	Kab. Kepulauan Anambas	50.508.491.223	18.231.232.983	32.277.258.240	50.508.491.223
98	Kota Tanjung Pinang	26.230.652.195	19.076.025.994	7.154.626.201	26.230.652.195
99	Kab. Lingga	17.572.916.160	9.874.721.908	7.698.194.252	17.572.916.160
100	Provinsi Jambi	168.507.755.503	60.586.732.418	107.921.023.085	168.507.755.503
101	Kab. Sarolangun	80.430.599.417	4.816.007.139	75.614.592.278	80.430.599.417
102	Kab. Bungo	23.135.813.832	7.904.421.075	15.231.392.757	23.135.813.832
103	Kab. Kerinci	9.238.623.294	3.999.250.528	5.239.372.766	9.238.623.294
104	Kab. Merangin	16.483.944.721	3.716.835.765	12.767.108.956	16.483.944.721
105	Kab. Muaro Jambi	83.483.597.789	6.023.834.302	77.459.763.487	83.483.597.789
106	Kab. Sarolangun	49.402.602.195	4.414.402.615	44.988.199.580	49.402.602.195
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	105.796.317.217	6.922.401.941	98.873.915.276	105.796.317.217
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	63.308.094.672	6.262.837.471	57.045.257.201	63.308.094.672
109	Kab. Tebo	37.921.345.610	4.730.559.914	33.190.785.696	37.921.345.610
110	Kota Jambi	71.532.045.324	35.461.093.153	36.070.952.171	71.532.045.324
111	Kota Sungai Penuh	9.777.285.629	3.667.734.124	4.109.551.505	9.777.285.629
112	Provinsi Sumatera Selatan	705.105.611.881	199.501.946.352	505.603.665.529	705.105.611.881
113	Kab. Lahat	92.448.266.494	11.374.802.121	81.073.464.373	92.448.266.494
114	Kab. Muarabanyuasin	629.683.242.091	19.491.479.808	610.191.762.283	629.683.242.091
115	Kab. Muarawaja	177.684.232.848	7.549.299.614	170.134.933.234	177.684.232.848
116	Kab. Muarawaja Utara	32.706.142.410	6.822.692.448	25.883.449.962	32.706.142.410
117	Kab. Muara Enim	470.035.153.625	35.931.347.151	434.103.806.474	470.035.153.625
118	Kab. Ogan Komering Ilir	50.254.143.385	11.862.868.642	48.391.274.743	50.254.143.385
119	Kab. Ogan Komering Ulu	77.757.601.756	9.938.271.045	67.819.330.711	77.757.601.756
120	Kota Palembang	122.318.774.030	115.113.319.389	7.205.454.641	122.318.774.030
121	Kota Pagar Alam	12.295.058.249	6.599.396.900	5.705.661.349	12.295.058.249
122	Kota Lubuk Linggau	15.518.389.184	10.448.759.180	5.069.630.004	15.518.389.184
123	Kota Prabumulih	100.947.039.607	15.551.941.863	85.395.097.744	100.947.039.607
124	Kab. Empat Lawang	13.297.451.290	6.525.907.154	6.771.544.136	13.297.451.290
125	Kab. Banyuwangi	71.489.631.880	11.615.371.022	59.874.260.858	71.489.631.880
126	Kab. Ogan Ilir	67.693.628.871	7.778.793.171	59.914.835.700	67.693.628.871
127	Kab. OKU Timur	16.790.165.153	7.608.702.443	9.181.462.710	16.790.165.153
128	Kab. OKU Selatan	14.540.706.101	6.640.542.418	7.900.163.683	14.540.706.101

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		Total
			FPH Pemotongan	PBB	
1	2		4	5	4+5
129	Kab. Penakul Abadi Lematang Ir	433.507.012.430	8.439.225.402	425.127.787.048	433.507.012.430
130	Provinsi Bangka Belitung	33.319.392.074	33.600.997.191	19.858.594.883	33.319.392.074
131	Kab. Bangka	25.204.920.209	7.604.302.068	17.600.618.141	25.204.920.209
132	Kab. Belitung	34.496.592.130	5.945.334.558	15.531.235.792	34.496.592.130
133	Kota Pangkal Pinang	22.358.726.468	10.436.929.911	5.921.796.551	22.358.726.468
134	Kab. Bangka Selatan	17.217.071.853	3.802.822.750	13.414.849.058	17.217.071.853
135	Kab. Bangka Tengah	18.586.505.648	5.528.040.674	13.058.484.974	18.586.505.648
136	Kab. Bangka Barat	28.941.815.932	6.750.275.088	22.191.344.846	28.941.815.932
137	Kab. Belitung Timur	20.757.361.803	4.363.788.088	16.393.573.115	20.757.361.803
138	Provinsi Bengkulu	40.983.175.706	29.108.329.171	11.854.930.335	40.983.175.706
139	Kab. Bengkulu Selatan	7.512.322.919	2.758.105.417	4.704.217.502	7.512.322.919
140	Kab. Bengkulu Utara	23.959.869.175	3.988.032.921	19.971.836.254	23.959.869.175
141	Kab. Bengkulu Tengah	9.127.305.182	4.101.794.801	5.025.509.359	9.127.305.182
142	Kota Bengkulu	21.928.042.675	17.197.110.561	4.700.932.092	21.928.042.675
143	Kab. Kaur	7.757.649.884	2.033.653.213	3.703.996.071	7.757.649.884
144	Kab. Seluma	9.438.784.832	2.458.951.098	8.979.833.334	9.438.784.832
145	Kab. Mukomuko	15.287.862.083	3.150.064.130	12.137.797.933	15.287.862.083
146	Kab. Lebong	9.194.706.183	2.448.451.188	6.746.254.995	9.194.706.183
147	Kab. Bengkulu Tengah	11.725.621.151	2.844.450.137	8.881.171.014	11.725.621.151
148	Kab. Kepahang	7.631.968.018	2.661.729.268	4.970.238.752	7.631.968.018
149	Provinsi Lampung	122.496.301.793	92.534.998.872	29.961.702.921	122.496.301.793
150	Kab. Lampung Barat	9.592.225.881	4.620.998.472	4.931.227.389	9.592.225.881
151	Kab. Lampung Selatan	26.368.741.277	10.333.453.021	16.035.288.546	26.368.741.277
152	Kab. Lampung Tengah	37.875.008.130	13.028.387.133	24.846.620.997	37.875.008.130
153	Kab. Lampung Utara	16.829.252.921	7.329.907.911	9.599.345.010	16.829.252.921
154	Kab. Lampung Timur	24.368.533.375	7.335.441.257	17.033.092.122	24.368.533.375
155	Kab. Tanggamus	30.166.651.408	7.066.539.862	23.100.111.546	30.166.651.408
156	Kab. Tulang Bawang	20.675.231.142	6.813.076.265	13.862.134.877	20.675.231.142
157	Kab. Way Kanan	16.221.717.943	3.043.744.561	11.177.973.382	16.221.717.943
158	Kab. Pesawaran	12.127.938.083	4.919.075.070	7.208.862.993	12.127.938.083
159	Kab. Pesisir Barat	9.043.182.482	3.788.419.397	5.254.763.085	9.043.182.482
160	Kab. Pringsewu	9.953.425.654	3.323.666.651	4.629.759.003	9.953.425.654
161	Kab. Mesuji	16.787.309.613	4.144.901.949	12.642.307.664	16.787.309.613
162	Kab. Tulang Bawang Barat	11.609.606.793	4.234.833.341	7.374.773.452	11.609.606.793
163	Kota Bandar Lampung	52.082.460.745	46.079.120.795	6.003.339.950	52.082.460.745
164	Kota Metro	13.644.448.725	8.840.332.614	4.804.116.111	13.644.448.725
165	Pryntasi DKI Jakarta	15.026.197.290.222	14.961.540.040.248	64.657.549.974	15.026.197.290.222
166	Provinsi Jawa Barat	1.390.469.989.830	1.252.723.209.767	137.746.777.066	1.390.469.989.830
167	Kab. Bandung	144.933.549.485	37.691.068.008	87.242.480.877	144.933.549.485
168	Kab. Bekasi	381.014.848.306	332.249.305.205	48.765.543.101	381.014.848.306
169	Kab. Bogor	182.236.486.514	124.400.369.811	57.836.117.102	182.236.486.514
170	Kab. Cirebon	35.895.351.200	27.523.639.903	8.371.711.297	35.895.351.200
171	Kab. Ciamis	50.871.661.980	34.108.076.195	16.763.605.785	50.871.661.980
172	Kab. Cirebon	58.225.698.832	40.287.956.659	17.937.742.173	58.225.698.832
173	Kab. Garut	81.986.650.287	31.394.183.279	50.592.467.008	81.986.650.287
174	Kab. Indramayu	150.821.818.345	47.630.214.764	103.191.603.581	150.821.818.345
175	Kab. Karawang	210.865.030.191	171.864.790.541	39.000.239.650	210.865.030.191
176	Kab. Kuningan	35.175.286.130	27.392.091.034	7.783.195.116	35.175.286.130
177	Kab. Majalengka	45.531.009.025	28.204.192.778	17.326.816.237	45.531.009.025
178	Kab. Pangandaran	30.529.916.504	23.694.805.550	6.835.110.954	30.529.916.504
179	Kab. Purwakarta	75.146.049.017	64.198.134.407	8.947.914.610	75.146.049.017
180	Kab. Subang	98.049.171.694	38.976.351.757	59.072.819.937	98.049.171.694
181	Kab. Sukabumi	82.692.108.437	38.400.257.000	44.291.851.437	82.692.108.437
182	Kab. Sumedang	40.559.138.415	33.079.389.155	7.479.749.260	40.559.138.415
183	Kab. Tasikmalaya	38.041.432.761	26.863.906.366	11.177.526.395	38.041.432.761
184	Kab. Bandung Barat	52.430.756.272	42.021.256.792	10.409.499.480	52.430.756.272
185	Kota Bandung	294.975.081.924	286.152.830.910	8.426.251.014	294.975.081.924
186	Kota Bekasi	119.526.364.294	110.205.147.359	9.321.216.935	119.526.364.294
187	Kota Bogor	66.718.674.250	61.059.017.264	5.659.657.086	66.718.674.250
188	Kota Cirebon	44.701.110.749	39.003.662.840	5.697.447.909	44.701.110.749
189	Kota Depok	78.494.670.284	71.286.982.409	7.207.687.875	78.494.670.284
190	Kota Sukabumi	34.178.252.188	29.886.975.738	4.291.276.450	34.178.252.188
191	Kota Cimahi	39.047.090.718	34.977.821.288	4.069.269.430	39.047.090.718
192	Kota Tasikmalaya	37.974.632.883	32.860.205.168	5.114.427.715	37.974.632.883

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		Total
			FPH Pemnagang	PHB	
1	2	3	4	5	4+5
193	Kota Banjar	32.630.697.421	23.965.228.308	8.645.469.113	32.630.697.421
194	Premian Banten	647.226.228.299	637.477.081.805	9.749.146.494	647.226.228.299
195	Kab. Lubuk	62.448.874.317	47.063.817.083	15.385.057.234	62.448.874.317
196	Kab. Pandeglang	27.338.339.527	47.833.084.603	9.485.254.954	27.338.339.527
197	Kab. Serang	76.371.340.526	69.832.884.398	6.538.456.128	76.371.340.526
198	Kab. Tangerang	199.354.194.945	189.945.462.743	9.408.732.199	199.354.194.945
199	Kota Cilegon	118.352.788.466	113.763.776.020	4.589.012.446	118.352.788.466
200	Kota Tangerang	260.382.418.953	253.202.330.769	7.180.088.184	260.382.418.953
201	Kota Serang	70.738.966.382	65.928.166.793	4.810.799.589	70.738.966.382
202	Kota Tangerang Selatan	174.513.807.482	166.637.000.285	7.876.807.197	174.513.807.482
203	Premian Jawa Tengah	555.893.157.918	493.828.217.226	61.864.940.692	555.893.157.918
204	Kab. Banjarnegara	22.256.029.329	11.562.284.510	10.693.744.819	22.256.029.329
205	Kab. Banyumas	35.407.240.494	24.389.774.439	11.117.466.055	35.407.240.494
206	Kab. Batang	28.476.078.388	17.457.137.875	11.020.940.489	28.476.078.388
207	Kab. Blora	86.617.980.026	14.861.009.228	71.756.970.808	86.617.980.026
208	Kab. Boyali	33.835.761.961	16.374.943.292	17.460.818.669	33.835.761.961
209	Kab. Brebes	24.589.836.236	11.916.619.119	12.673.217.119	24.589.836.236
210	Kab. Cileup	60.421.115.064	43.499.864.411	16.921.250.653	60.421.115.064
211	Kab. Demak	21.641.358.012	13.379.869.726	8.261.488.286	21.641.358.012
212	Kab. Grobogan	29.550.114.637	13.228.602.443	17.321.452.194	29.550.114.637
213	Kab. Japor	32.112.528.419	21.501.083.059	10.611.445.360	32.112.528.419
214	Kab. Karanganyar	23.260.774.389	15.877.252.408	7.383.521.983	23.260.774.389
215	Kab. Kebumaha	30.803.060.743	12.761.712.456	18.041.348.287	30.803.060.743
216	Kab. Kendal	27.929.803.964	14.806.913.674	13.122.890.290	27.929.803.964
217	Kab. Klaten	24.846.841.755	18.343.763.774	6.503.077.981	24.846.841.755
218	Kab. Kudus	86.425.599.596	79.367.947.963	7.057.651.633	86.425.599.596
219	Kab. Magelang	15.795.869.884	13.219.712.908	2.576.156.976	15.795.869.884
220	Kab. Pati	25.409.066.041	15.186.649.134	10.222.416.907	25.409.066.041
221	Kab. Pekalongan	18.774.993.989	9.794.318.143	8.980.675.846	18.774.993.989
222	Kab. Penang	21.400.365.523	11.131.945.121	10.268.420.402	21.400.365.523
223	Kab. Purwalingga	17.522.139.880	11.451.968.098	6.070.171.784	17.522.139.880
224	Kab. Purbalingga	17.301.712.596	11.032.409.161	6.269.303.433	17.301.712.596
225	Kab. Rembang	20.192.268.635	11.494.263.196	8.698.005.439	20.192.268.635
226	Kab. Semarang	30.211.932.991	20.924.293.605	9.287.639.386	30.211.932.991
227	Kab. Sragen	19.056.875.440	12.412.641.308	6.644.234.134	19.056.875.440
228	Kab. Sukoharjo	25.167.028.223	19.496.676.033	5.670.352.190	25.167.028.223
229	Kab. Tegal	21.232.470.187	12.320.425.594	8.912.044.593	21.232.470.187
230	Kab. Temanggung	17.951.069.172	11.313.312.921	6.637.756.251	17.951.069.172
231	Kab. Wonorejo	19.299.570.422	12.017.301.471	7.282.268.951	19.299.570.422
232	Kab. Wonosobo	20.295.505.728	10.174.539.495	10.120.966.233	20.295.505.728
233	Kota Magelang	17.018.271.075	12.863.814.220	4.154.456.855	17.018.271.075
234	Kota Pekalongan	18.389.981.062	13.489.977.254	4.900.003.808	18.389.981.062
235	Kota Salatiga	17.102.363.894	12.838.670.149	4.263.693.745	17.102.363.894
236	Kota Semarang	159.709.311.870	151.461.246.819	8.248.065.051	159.709.311.870
237	Kota Surakarta	39.592.216.688	34.936.525.972	4.655.690.716	39.592.216.688
238	Kota Tegal	18.258.408.479	14.130.154.417	4.108.254.062	18.258.408.479
239	Premian DI Yogyakarta	88.194.755.176	85.634.891.641	2.559.863.535	88.194.755.176
240	Kab. Bantul	24.848.763.991	19.175.250.119	5.673.513.872	24.848.763.991
241	Kab. Gunung Kidul	20.375.691.123	14.709.665.011	5.666.026.112	20.375.691.123
242	Kab. Kulon Progo	17.790.198.027	13.067.561.640	4.722.636.387	17.790.198.027
243	Kab. Sleman	47.600.928.548	41.564.539.542	6.036.389.006	47.600.928.548
244	Kota Yogyakarta	44.727.444.849	40.330.210.890	4.397.233.959	44.727.444.849
245	Premian Jawa Timur	932.783.028.517	810.811.243.915	121.971.784.602	932.783.028.517
246	Kab. Bangkalan	27.765.125.049	14.233.403.245	13.531.721.804	27.765.125.049
247	Kab. Banyuwangi	46.077.600.987	25.609.048.786	20.468.552.201	46.077.600.987
248	Kab. Blitar	24.042.193.334	15.407.792.309	8.634.400.965	24.042.193.334
249	Kab. Bojonegara	216.818.133.601	20.582.163.156	196.235.970.445	216.818.133.601
250	Kab. Bondowoso	23.002.310.577	13.217.714.021	9.844.596.556	23.002.310.577
251	Kab. Gresik	104.081.963.966	73.860.274.089	30.221.689.877	104.081.963.966
252	Kab. Jember	48.127.727.032	28.310.645.277	19.817.081.755	48.127.727.032
253	Kab. Jombang	27.419.123.153	18.241.723.052	9.177.400.101	27.419.123.153
254	Kab. Kediri	34.512.204.971	18.646.180.722	15.866.024.249	34.512.204.971
255	Kab. Lamongan	29.420.364.959	16.792.939.980	12.627.424.979	29.420.364.959
256	Kab. Lumajang	25.575.762.430	15.102.868.815	10.416.893.615	25.575.762.430

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		Total
			PPH Pemotongan	PBB	
1	2		4	5	4+5
237	Kab. Madun	22.456.675.810	13.419.309.829	9.037.383.981	22.456.675.810
238	Kab. Magetan	19.936.443.725	14.237.300.214	5.698.943.511	19.936.443.725
239	Kab. Malang	33.533.384.247	33.453.177.727	20.080.206.920	33.533.384.247
240	Kab. Mojokerto	34.072.285.924	23.802.479.251	15.209.806.071	34.072.285.924
241	Kab. Ngawi	25.123.313.495	15.137.764.693	9.965.546.802	25.123.313.495
242	Kab. Ngawi	24.842.486.121	14.070.474.409	10.772.007.682	24.842.486.121
243	Kab. Pacitan	18.084.182.730	12.577.226.044	3.508.956.886	18.084.182.730
244	Kab. Pamekasan	23.083.303.943	15.546.393.646	7.536.910.297	23.083.303.943
245	Kab. Pasuruan	50.360.760.004	39.578.939.075	10.761.820.929	50.360.760.004
246	Kab. Ponorogo	24.770.533.001	15.373.311.959	9.395.223.042	24.770.533.001
247	Kab. Probolinggo	27.219.327.257	18.332.163.372	8.887.163.885	27.219.327.257
248	Kab. Sampang	21.914.175.975	12.857.241.122	9.056.934.851	21.914.175.975
249	Kab. Sidoarjo	102.471.641.335	84.400.304.070	15.071.437.265	102.471.641.335
250	Kab. Situbondo	23.099.526.070	13.875.330.084	9.224.135.992	23.099.526.070
251	Kab. Sukoharjo	35.275.942.812	14.236.799.021	21.019.143.791	35.275.942.812
252	Kab. Trenggales	21.172.033.419	13.167.270.808	8.004.162.611	21.172.033.419
253	Kab. Tuban	62.383.736.994	22.714.936.535	39.668.800.459	62.383.736.994
254	Kab. Tulungagung	25.986.820.686	17.491.038.652	8.495.782.034	25.986.820.686
255	Kota Bharu	19.629.923.801	15.634.320.193	3.995.603.608	19.629.923.801
256	Kota Kediri	36.840.130.893	32.621.266.300	4.218.864.593	36.840.130.893
257	Kota Madun	25.390.758.833	21.341.314.333	4.049.484.520	25.390.758.833
258	Kota Malang	59.220.692.598	33.911.092.464	5.308.940.134	59.220.692.598
259	Kota Mojokerto	18.931.773.681	14.793.425.139	4.138.348.542	18.931.773.681
260	Kota Paksi	20.615.996.480	16.339.727.223	4.276.269.255	20.615.996.480
261	Kota Probolinggo	22.780.341.763	15.952.928.852	8.827.412.911	22.780.341.763
262	Kota Sampang	389.788.594.246	280.109.394.123	9.675.200.123	389.788.594.246
263	Kota Batu	15.936.761.679	11.055.077.190	4.881.704.489	15.936.761.679
264	Provinsi Kalimantan Barat	146.425.501.580	95.619.407.366	50.806.034.214	146.425.501.580
265	Kab. Bengkayang	14.570.464.880	5.103.254.101	9.407.110.779	14.570.464.880
266	Kab. Lantak	23.310.540.776	5.586.504.551	17.723.976.225	23.310.540.776
267	Kab. Kapuas Hulu	26.176.062.371	6.822.981.151	19.353.081.218	26.176.062.371
268	Kab. Ketapang	75.032.860.428	13.567.256.562	61.465.603.866	75.032.860.428
269	Kab. Mempawah	13.531.717.365	6.339.472.070	6.192.348.295	13.531.717.365
270	Kab. Sambas	29.303.256.518	7.445.307.767	21.757.748.751	29.303.256.518
271	Kab. Sanggau	27.578.479.204	8.742.080.494	28.836.398.710	27.578.479.204
272	Kab. Sintang	33.991.902.668	8.288.445.563	25.703.457.105	33.991.902.668
273	Kota Pontianak	49.328.591.474	43.818.998.394	5.509.593.080	49.328.591.474
274	Kota Singkawang	13.002.346.987	8.448.849.120	4.556.497.867	13.002.346.987
275	Kab. Kayong Utara	13.277.814.635	4.329.037.818	8.948.776.817	13.277.814.635
276	Kab. Kubu Raya	29.901.570.464	13.934.726.489	15.966.849.975	29.901.570.464
277	Kab. Sekeloa	17.637.699.617	3.692.213.925	11.945.485.692	17.637.699.617
278	Kab. Mahang	19.905.142.868	5.292.719.012	14.612.423.856	19.905.142.868
279	Provinsi Kalimantan Tengah	140.130.497.882	64.043.901.228	76.088.596.656	140.130.497.882
280	Kab. Bantorejo	16.888.941.807	4.468.201.132	12.420.740.675	16.888.941.807
281	Kab. Bantorejo	41.626.690.732	6.104.891.139	35.521.799.593	41.626.690.732
282	Kab. Kapuas	35.904.511.636	3.433.302.760	30.471.208.876	35.904.511.636
283	Kab. Kotawaringin Barat	27.565.969.093	13.378.340.744	44.187.628.349	27.565.969.093
284	Kab. Kotawaringin Timur	76.380.357.846	14.693.808.758	61.686.549.050	76.380.357.846
285	Kota Palangkaraya	21.895.091.517	16.741.455.660	5.153.635.857	21.895.091.517
286	Kab. Bantorejo	22.214.762.098	8.183.829.344	14.030.932.754	22.214.762.098
287	Kab. Murung Raya	27.995.341.812	5.095.000.370	22.900.341.442	27.995.341.812
288	Kab. Palangkaraya	13.641.888.709	4.016.040.979	9.625.847.730	13.641.888.709
289	Kab. Gunung Mas	21.522.201.950	3.664.117.890	17.858.084.060	21.522.201.950
290	Kab. Lamanda	17.433.697.693	3.289.124.824	14.144.572.869	17.433.697.693
291	Kab. Sukamara	12.426.450.426	3.080.973.459	9.345.476.967	12.426.450.426
292	Kab. Katingan	51.107.874.841	3.981.404.220	47.126.468.621	51.107.874.841
293	Kab. Seruyan	29.152.876.396	4.131.914.291	25.020.962.105	29.152.876.396
294	Provinsi Kalimantan Selatan	169.920.751.685	102.432.792.631	67.468.018.454	169.920.751.685
295	Kab. Banjar	28.519.954.396	10.861.987.325	17.657.507.071	28.519.954.396
296	Kab. Bantorejo	17.310.473.638	6.075.704.457	11.234.769.181	17.310.473.638
297	Kab. Hulu Sungai Selatan	32.955.082.272	3.907.346.418	27.047.735.856	32.955.082.272
298	Kab. Hulu Sungai Tengah	12.121.663.857	6.649.252.384	5.472.431.473	12.121.663.857
299	Kab. Hulu Sungai Utara	12.049.768.283	3.810.887.390	8.238.880.893	12.049.768.283
300	Kab. Kombaru	49.189.299.582	13.013.615.181	36.175.684.381	49.189.299.582

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		Total
			PPH Pemotongan	PBB	
1	2	3	4	5	4+5
321	Kab Tabalong	77.183.883,874	13.242.178.828	63.941.705.046	77.183.883,874
322	Kab Tanah Laut	45.696.273,093	9.417.303,353	36.278.969,740	45.696.273,093
323	Kab Tapin	31.312.428,427	7.002.484,198	44.309.942,229	31.312.428,427
324	Kota Banjarmasin	20.151.911,582	15.087.972,061	5.063.939,889	20.151.911,582
325	Kota Banjarmasin	42.418.194,320	27.241.104,561	5.176.428,932	42.418.194,320
326	Kab Balikpapan	27.838.480,903	9.829.095,299	18.029.385,004	27.838.480,903
327	Kab Tanah Bumbu	73.083.962,069	13.562.563,028	59.521.399,041	73.083.962,069
328	Provinsi Kalimantan Timur	599.348.148,844	203.513.905,813	295.834.243,031	599.348.148,844
329	Kab Berau	86.907.777,801	35.363.184,546	51.544.593,255	86.907.777,801
330	Kab Kutai Kartanegara	859.880.761,437	33.395.322,659	808.485.238,778	859.880.761,437
331	Kab Kutai Barat	68.730.739,048	25.385.997,562	43.344.742,086	68.730.739,048
332	Kab Kutai Timur	210.988.623,131	53.699.528,328	157.289.094,823	210.988.623,131
333	Kab Mahakam Ulu	28.043.001,829	18.241.867,710	11.800.134,119	28.043.001,829
334	Kab Paser	77.700.447,420	28.758.902,681	50.941.544,737	77.700.447,420
335	Kota Balikpapan	123.953.578,235	115.198.045,567	8.755.532,668	123.953.578,235
336	Kota Bontang	88.073.151,383	54.718.648,063	33.294.503,300	88.073.151,383
337	Kota Samarinda	93.507.456,251	56.577.175,805	36.930.276,446	93.507.456,251
338	Kab Penajam Paser Utara	72.352.317,085	17.872.381,795	54.479.935,290	72.352.317,085
339	Provinsi Kalimantan Utara	77.752.121,807	20.345.068,115	57.407.053,752	77.752.121,807
340	Kab Bulungan	71.609.084,744	7.442.484,345	64.166.598,399	71.609.084,744
341	Kab Malinau	29.574.493,072	4.482.424,835	25.092.068,238	29.574.493,072
342	Kab Nunukan	55.951.008,328	4.499.383,811	51.451.724,515	55.951.008,328
343	Kab Tana Tidung	18.452.350,509	3.135.394,266	15.316.956,243	18.452.350,509
344	Kota Tarakan	105.054.469,872	10.938.012,913	94.096.456,959	105.054.469,872
345	Provinsi Sulawesi Utara	78.154.251,915	62.414.345,301	15.679.906,614	78.154.251,915
346	Kab Bolaang Mongondow	9.215.546,535	2.704.422,483	6.451.124,052	9.215.546,535
347	Kab Minahasa	19.218.098,573	3.700.412,254	13.455.686,319	19.218.098,573
348	Kab Sangihe	8.949.383,578	4.233.299,243	4.316.084,335	8.949.383,578
349	Kota Bitung	31.904.373,594	7.232.904,129	24.711.469,823	31.904.373,594
350	Kota Manado	40.240.148,585	35.438.340,683	4.801.807,902	40.240.148,585
351	Kab Kepulauan Talaud	7.779.479,132	2.846.214,761	4.933.264,371	7.779.479,132
352	Kab Minahasa Selatan	9.024.979,611	3.979.618,850	5.045.360,761	9.024.979,611
353	Kab Minahasa Tenggara	7.875.667,635	3.004.675,739	4.810.991,896	7.875.667,635
354	Kab Kepulauan Sulu Tagulandang Siasi	7.244.594,111	2.819.968,553	4.424.625,558	7.244.594,111
355	Kota Kotamobagu	9.637.785,220	3.276.478,828	4.361.306,392	9.637.785,220
356	Kab Bolaang Mongondow Timur	7.772.079,294	2.761.825,047	5.010.254,247	7.772.079,294
357	Kab Bolaang Mongondow Selatan	8.612.051,575	2.582.101,085	6.029.950,490	8.612.051,575
358	Kota Tomohon	13.415.852,481	4.256.059,777	9.159.792,684	13.415.852,481
359	Kab Minahasa Utara	36.338.294,535	8.175.504,810	28.164.729,719	36.338.294,535
360	Kab Bolaang Mongondow Utara	7.596.955,714	2.609.113,777	4.987.841,937	7.596.955,714
361	Provinsi Gorontalo	19.881.801,282	18.565.376,939	3.316.424,343	19.881.801,282
362	Kab Boalemo	7.820.521,943	2.310.919,042	5.509.602,901	7.820.521,943
363	Kab Gorontalo	9.007.643,593	4.393.153,958	3.214.489,635	9.007.643,593
364	Kota Gorontalo	14.235.364,241	10.183.003,048	4.052.580,593	14.235.364,241
365	Kab Pohuwato	9.212.021,992	2.733.417,399	6.478.604,393	9.212.021,992
366	Kab Gorontalo Utara	8.425.940,580	2.263.001,806	6.162.938,754	8.425.940,580
367	Kab Bone Bolango	8.068.725,022	2.904.569,355	5.104.155,667	8.068.725,022
368	Provinsi Sulawesi Tengah	63.317.044,581	39.331.701,128	23.985.343,453	63.317.044,581
369	Kab Banggai	68.849.491,022	9.294.902,180	59.554.588,836	68.849.491,022
370	Kab Banggai Laut	6.598.532,102	2.022.162,083	4.576.370,019	6.598.532,102
371	Kab Banggai Kepulauan	7.222.509,411	2.043.098,177	5.179.411,234	7.222.509,411
372	Kab Buai	10.594.395,481	3.623.606,097	7.970.788,784	10.594.395,481
373	Kab Toli-Toli	9.170.365,383	3.689.447,076	5.480.917,707	9.170.365,383
374	Kab Donggala	10.056.794,863	2.706.035,546	7.290.759,317	10.056.794,863
375	Kab Morowali	14.480.398,836	3.436.891,944	9.043.506,892	14.480.398,836
376	Kab Morowali Utara	13.194.529,331	3.117.584,590	10.076.944,741	13.194.529,331
377	Kab Poso	10.943.702,899	3.747.688,302	7.196.014,577	10.943.702,899
378	Kota Palu	20.980.564,777	18.310.852,169	4.669.712,008	20.980.564,777
379	Kab Parigi Moutong	9.627.739,448	3.093.503,424	6.534.236,024	9.627.739,448
380	Kab Sigi	7.077.742,059	2.459.253,059	5.218.489,000	7.077.742,059
381	Kab Tojo Ulu Ulu	8.205.067,499	2.392.523,779	3.812.543,720	8.205.067,499
382	Provinsi Sulawesi Selatan	189.182.309,749	104.256.930,524	24.925.379,225	189.182.309,749
383	Kab Bantareng	9.989.283,777	4.917.363,564	3.051.920,213	9.989.283,777
384	Kab Barru	9.907.534,977	4.944.224,069	4.963.310,908	9.907.534,977

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		Total
			FPH Pemungutan	PBB	
1	2	3	4	5	4+5
383	Kab Bone	17.583.162.612	7.898.863.978	9.684.298.634	17.583.162.612
386	Kab Bulukumba	13.338.072.172	6.620.372.379	6.717.699.793	13.338.072.172
387	Kab Enrekang	10.596.562.860	4.797.141.197	5.799.441.663	10.596.562.860
388	Kab Gowa	14.012.364.933	7.392.384.905	6.619.576.028	14.012.364.933
389	Kab Jeneponto	12.050.070.579	6.468.018.221	5.582.682.352	12.050.070.579
390	Kab Lene	10.367.184.177	5.026.045.514	5.341.139.203	10.367.184.177
391	Kab Luwu Utara	11.397.337.140	4.667.854.814	6.729.482.326	11.397.337.140
392	Kab Maree	20.964.916.412	10.501.259.673	10.463.656.737	20.964.916.412
393	Kab Pangkajene Kepulauan	20.095.060.874	8.888.941.821	11.206.519.053	20.095.060.874
394	Kab Pinrang	11.112.968.665	5.719.456.000	5.393.512.665	11.112.968.665
395	Kab Selayar	9.700.430.582	4.293.893.974	5.406.537.068	9.700.430.582
396	Kab Siderang Rappang	12.214.654.305	6.312.330.094	5.902.324.211	12.214.654.305
397	Kab Sijau	10.075.095.507	5.129.022.592	4.946.072.975	10.075.095.507
398	Kab Soppeng	9.953.630.514	4.861.424.198	5.092.106.316	9.953.630.514
399	Kab Takalar	12.760.548.377	5.237.823.027	7.522.723.250	12.760.548.377
400	Kab Tana Toraja	9.274.052.897	4.498.638.859	4.775.414.038	9.274.052.897
401	Kab Wajo	29.088.604.838	6.404.235.737	22.684.369.101	29.088.604.838
402	Kota Pare-pare	12.767.383.620	6.344.195.562	4.423.088.038	12.767.383.620
403	Kab Toraja Utara	9.373.697.742	4.699.113.863	4.674.583.879	9.373.697.742
404	Kota Makassar	102.913.565.625	95.736.946.448	7.155.019.177	102.913.565.625
405	Kota Palopo	10.900.605.312	6.614.862.665	4.345.742.647	10.900.605.312
406	Kab Luwu Timur	36.751.720.853	16.482.454.687	20.269.266.166	36.751.720.853
407	Provinsi Sulawesi Barat	18.376.410.941	12.063.903.833	6.314.506.103	18.376.410.941
408	Kab Majene	8.121.890.371	2.591.927.083	5.529.963.288	8.121.890.371
409	Kab Mamuju	13.811.229.239	5.775.149.248	8.032.079.991	13.811.229.239
410	Kab Mamuju Tengah	8.755.090.846	1.525.164.403	7.229.926.443	8.755.090.846
411	Kab Polewali Mandar	5.647.557.695	3.947.184.231	3.700.373.464	5.647.557.695
412	Kab Mamasa	7.484.852.802	1.982.559.287	5.502.293.515	7.484.852.802
413	Kab Pasangkayu	15.629.647.749	2.269.869.904	13.359.777.845	15.629.647.749
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	49.254.878.141	36.682.337.718	12.572.540.423	49.254.878.141
415	Kab Buton	6.669.604.008	1.782.860.202	4.886.743.806	6.669.604.008
416	Kab Konawe	9.256.950.538	2.823.429.284	6.433.421.254	9.256.950.538
417	Kab Konawe Kepulauan	5.720.604.948	1.265.084.418	4.455.520.530	5.720.604.948
418	Kab Kolaka	20.854.226.184	8.093.544.379	12.760.681.805	20.854.226.184
419	Kab Kolaka Timur	6.375.565.791	1.435.065.352	4.940.500.439	6.375.565.791
420	Kab Muna	7.434.870.033	2.761.705.763	4.673.164.270	7.434.870.033
421	Kota Kendari	21.785.883.530	17.039.821.333	4.746.062.197	21.785.883.530
422	Kota Bau-Bau	9.273.651.305	4.410.186.351	4.863.464.954	9.273.651.305
423	Kab Konawe Selatan	14.007.061.852	2.409.992.872	11.597.068.980	14.007.061.852
424	Kab Bombana	7.936.349.837	2.140.120.059	5.796.229.778	7.936.349.837
425	Kab Konawe Utara	10.751.036.816	1.356.888.626	9.392.138.190	10.751.036.816
426	Kab Buton Utara	6.167.712.455	1.421.750.074	4.745.962.381	6.167.712.455
427	Kab Wakatobi	6.928.158.661	1.902.618.560	5.025.540.099	6.928.158.661
428	Kab Kolaka Utara	9.218.322.474	1.810.560.024	7.407.762.450	9.218.322.474
429	Kab Muna Barat	5.754.556.339	1.440.637.182	4.313.919.157	5.754.556.339
430	Kab Buton Tengah	6.802.212.175	1.649.494.180	5.152.717.995	6.802.212.175
431	Kab Buton Selatan	6.777.951.811	1.569.077.319	5.208.874.492	6.777.951.811
432	Provinsi Bali	179.005.916.512	175.334.969.151	3.670.947.361	179.005.916.512
433	Kab Badung	75.158.567.575	74.638.402.976	4.520.164.599	75.158.567.575
434	Kab Bangli	16.440.861.583	11.963.083.399	4.477.778.184	16.440.861.583
435	Kab Buleleng	24.498.064.444	18.862.277.756	5.636.386.688	24.498.064.444
436	Kab Gianyar	25.216.664.438	20.619.900.920	4.596.763.518	25.216.664.438
437	Kab Jembrana	17.945.002.086	12.827.358.561	5.117.643.495	17.945.002.086
438	Kab Karangasem	19.656.751.772	14.688.068.265	4.970.683.507	19.656.751.772
439	Kab Klungkung	17.256.463.918	13.035.049.899	4.221.414.019	17.256.463.918
440	Kab Tabanan	21.959.807.412	17.065.204.637	4.894.602.775	21.959.807.412
441	Kota Denpasar	84.848.366.512	79.302.307.312	5.545.759.200	84.848.366.512
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	72.229.982.291	56.098.053.461	16.131.928.830	72.229.982.291
443	Kab Bima	9.339.650.070	3.240.307.620	6.099.142.450	9.339.650.070
444	Kab Dompu	9.797.480.045	4.564.961.065	5.232.518.980	9.797.480.045
445	Kab Lombok Barat	12.451.322.502	6.042.936.800	6.408.385.702	12.451.322.502
446	Kab Lombok Tengah	17.317.950.171	9.892.092.103	7.425.858.068	17.317.950.171
447	Kab Lombok Timur	18.436.096.681	10.538.632.341	7.897.464.340	18.436.096.681
448	Kab Sumbawa	20.500.851.596	6.945.798.988	13.555.052.608	20.500.851.596

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		Total
			PPH Pemotongan	PBB	
1	2		4	5	4+5
449	Kota Pekanbaru	28.078.881.733	22.022.091.439	3.456.190.294	28.078.881.733
450	Kab. Lombok Utara	9.940.227.889	4.409.397.560	3.070.870.109	9.940.227.889
451	Kota Bima	12.114.935.072	7.500.219.519	4.614.715.553	12.114.935.072
452	Kab. Sumbawa Barat	99.588.167.943	12.933.373.912	46.054.794.031	99.588.167.943
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	99.007.321.926	90.120.068.894	8.946.653.032	99.007.321.926
454	Kab. Aor	7.609.272.632	2.526.316.360	3.082.956.272	7.609.272.632
455	Kab. Belu	7.074.247.432	3.369.160.324	4.305.087.208	7.074.247.432
456	Kab. Ende	8.980.002.657	4.050.818.840	4.929.183.817	8.980.002.657
457	Kab. Flores Timur	8.280.628.007	3.019.370.058	3.261.037.349	8.280.628.007
458	Kab. Kupang	8.011.432.328	2.508.375.508	3.502.832.820	8.011.432.328
459	Kab. Lembata	6.778.993.131	2.113.884.614	4.665.108.517	6.778.993.131
460	Kab. Malaka	6.115.560.598	1.770.526.059	4.345.033.819	6.115.560.598
461	Kab. Manggarai	8.056.294.586	3.221.788.459	4.834.496.127	8.056.294.586
462	Kab. Ngada	6.884.324.547	2.369.090.402	4.514.634.145	6.884.324.547
463	Kab. Sikka	9.462.746.943	4.384.697.062	3.073.049.881	9.462.746.943
464	Kab. Sumba Barat	6.719.298.148	2.329.164.644	4.390.133.504	6.719.298.148
465	Kab. Sumba Timur	10.236.592.411	4.024.463.551	6.212.088.860	10.236.592.411
466	Kab. Timor Tengah Selatan	8.060.586.109	3.003.318.752	3.057.267.357	8.060.586.109
467	Kab. Timor Tengah Utara	7.519.333.794	2.417.283.957	3.102.049.807	7.519.333.794
468	Kota Kupang	25.320.729.080	20.840.514.203	4.477.214.877	25.320.729.080
469	Kab. Rote Ndao	6.073.049.901	1.798.049.039	4.274.490.862	6.073.049.901
470	Kab. Nagekeo	6.445.799.997	1.778.425.835	4.667.374.162	6.445.799.997
471	Kab. Sumba Tengah	6.028.027.185	1.400.325.475	4.627.801.706	6.028.027.185
472	Kab. Sumba Barat Daya	7.042.855.700	2.060.633.140	4.982.222.560	7.042.855.700
473	Kab. Manggarai Timur	6.796.429.035	2.001.150.188	4.795.278.847	6.796.429.035
474	Kab. Sabu Raijua	5.478.373.038	1.494.896.376	4.043.476.662	5.478.373.038
475	Kab. Manggarai Barat	7.756.987.381	2.754.245.383	3.002.741.998	7.756.987.381
476	Provinsi Maluku	40.626.368.858	26.219.086.051	14.407.282.807	40.626.368.858
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	9.525.590.878	3.100.818.865	6.304.771.993	9.525.590.878
478	Kab. Maluku Tengah	15.030.193.843	3.056.738.091	11.973.455.152	15.030.193.843
479	Kab. Maluku Tenggara	8.183.926.639	2.684.360.459	5.499.566.180	8.183.926.639
480	Kab. Pulau Buru	8.680.022.322	2.103.622.966	6.576.399.356	8.680.022.322
481	Kota Ambon	23.349.590.150	17.817.993.919	5.531.596.231	23.349.590.150
482	Kab. Seram Bagian Barat	8.195.252.573	1.901.827.898	6.293.424.675	8.195.252.573
483	Kab. Seram Bagian Timur	26.574.945.006	2.163.889.438	26.411.055.572	26.574.945.006
484	Kab. Maluku Barat Daya	7.616.199.264	1.654.956.769	3.961.242.495	7.616.199.264
485	Kab. Buru Selatan	7.186.648.390	1.311.483.004	3.875.165.386	7.186.648.390
486	Kab. Kepulauan Aru	9.539.943.688	2.053.711.082	7.486.232.606	9.539.943.688
487	Kota Tual	6.044.287.481	1.419.224.207	4.625.063.274	6.044.287.481
488	Provinsi Maluku Utara	33.402.200.226	25.266.451.087	8.135.749.139	33.402.200.226
489	Kab. Halmahera Tengah	9.206.084.182	1.911.038.992	7.295.045.190	9.206.084.182
490	Kab. Halmahera Barat	8.031.660.380	1.964.155.218	6.067.505.162	8.031.660.380
491	Kota Ternate	16.884.154.782	11.056.056.085	3.827.498.097	16.884.154.782
492	Kab. Halmahera Timur	8.801.845.097	1.956.091.382	6.845.753.515	8.801.845.097
493	Kota Tidore Kepulauan	8.845.603.352	3.503.026.950	3.341.576.403	8.845.603.352
494	Kab. Kepulauan Sula	8.859.144.651	1.902.375.752	6.956.768.899	8.859.144.651
495	Kab. Pulau Morotai	7.184.075.017	1.899.169.505	5.284.905.512	7.184.075.017
496	Kab. Pulau Taliabu	7.274.170.735	1.505.794.111	3.768.376.618	7.274.170.735
497	Kab. Halmahera Selatan	11.397.194.081	2.539.275.811	8.857.918.268	11.397.194.081
498	Kab. Halmahera Utara	18.541.442.398	9.660.688.015	8.880.754.383	18.541.442.398
499	Provinsi Papua	250.074.351.616	176.216.319.179	77.458.032.437	250.074.351.616
500	Kab. Yalimo	7.943.949.828	2.930.302.083	4.613.647.145	7.943.949.828
501	Kab. Lanny Jaya	8.039.740.733	3.006.096.088	3.033.644.045	8.039.740.733
502	Kab. Bani Waris	11.431.063.484	6.184.846.419	3.246.417.065	11.431.063.484
503	Kab. Jayapura	15.269.567.256	3.688.145.254	9.581.422.002	15.269.567.256
504	Kab. Jayawijaya	12.163.748.190	6.177.388.847	5.986.359.343	12.163.748.190
505	Kab. Merauke	36.988.971.766	9.902.117.371	27.086.854.193	36.988.971.766
506	Kab. Mimika	304.025.685.168	131.073.600.669	172.952.084.499	304.025.685.168
507	Kab. Nabire	13.036.621.406	4.883.948.176	8.143.275.230	13.036.621.406
508	Kab. Paniai	10.174.374.948	3.958.247.979	6.216.126.969	10.174.374.948
509	Kab. Puncak Jaya	9.760.840.294	3.610.568.899	6.150.271.395	9.760.840.294
510	Kab. Kepulauan Yapen	11.251.664.334	4.077.913.934	7.173.750.400	11.251.664.334
511	Kota Jayapura	32.843.963.442	28.226.857.382	4.617.106.060	32.843.963.442
512	Kab. Sarmi	15.122.362.786	3.402.863.376	11.719.499.408	15.122.362.786

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		Total
			FPH Pemotongan	FPB	
1	2	3	4	5	4+5
313	Kab. Keaton	13.815.202.332	3.543.002.757	10.271.539.575	13.815.202.332
314	Kab. Taklimo	11.338.488.081	3.240.027.353	8.097.860.728	11.338.488.081
315	Kab. Paganungan Rintang	11.392.195.135	3.323.900.751	8.068.294.384	11.392.195.135
316	Kab. Taklaka	9.762.873.503	3.100.916.374	6.661.957.129	9.762.873.503
317	Kab. Bowen Digoel	15.900.761.992	3.443.031.000	12.517.128.332	15.900.761.992
318	Kab. Mappi	12.412.804.929	3.336.794.803	9.074.010.136	12.412.804.929
319	Kab. Asmat	12.326.095.419	3.443.448.553	8.763.246.866	12.326.095.419
320	Kab. Waropen	16.435.846.994	3.066.849.764	13.368.997.210	16.435.846.994
321	Kab. Mamberamo Raya	15.165.176.227	2.966.349.854	12.198.826.373	15.165.176.227
322	Kab. Mamberamo Tengah	7.497.548.750	2.995.056.904	4.502.491.786	7.497.548.750
323	Kab. Nduga	8.304.805.488	3.038.242.200	5.266.563.228	8.304.805.488
324	Kab. Dogiyai	8.805.165.497	3.185.780.084	5.619.385.373	8.805.165.497
325	Kab. Intan Jaya	12.091.983.088	5.047.205.000	7.044.778.088	12.091.983.088
326	Kab. Puncak	9.965.820.791	3.444.756.028	6.521.064.165	9.965.820.791
327	Kab. Doyoi	8.395.486.290	3.139.618.595	5.255.867.695	8.395.486.290
328	Kab. Supai	8.330.370.994	3.113.719.839	5.216.651.155	8.330.370.994
329	Provinsi Papua Barat	140.766.513.456	33.250.328.008	107.513.284.848	140.766.513.456
330	Kab. Sorong	154.914.034.506	3.970.076.442	150.943.958.064	154.914.034.506
331	Kab. Manokwari	20.153.143.793	7.410.337.774	12.742.806.019	20.153.143.793
332	Kab. Manokwari Selatan	8.998.457.718	1.400.845.817	7.597.611.901	8.998.457.718
333	Kab. Fak Fak	12.504.317.006	1.711.979.844	10.832.337.162	12.504.317.006
334	Kota Sorong	18.407.664.644	11.433.095.008	6.973.569.636	18.407.664.644
335	Kab. Paganungan Arbak	19.061.904.489	1.421.395.867	17.640.508.622	19.061.904.489
336	Kab. Sorong Selatan	12.707.952.079	1.972.208.221	10.735.744.458	12.707.952.079
337	Kab. Raja Ampat	14.092.467.236	1.736.630.099	12.355.837.137	14.092.467.236
338	Kab. Teluk Wondama	230.303.035.891	12.995.727.767	217.307.308.184	230.303.035.891
339	Kab. Teluk Wondama	10.861.352.054	1.562.712.194	9.298.639.860	10.861.352.054
340	Kab. Tambora	9.117.104.799	1.865.183.820	7.251.920.979	9.117.104.799
341	Kab. Maybrat	8.735.079.126	1.311.186.088	7.423.893.038	8.735.079.126
342	Kab. Kaimana	11.483.499.581	1.517.022.150	9.966.477.391	11.483.499.581
	JUMLAH	45.695.178.994.793	29.991.687.612.750	15.703.491.382.027	45.695.178.994.793

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Bumi Kesubatan	Bumi Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Provinsi Bangka Belitung	312.884.297.025	187.465.071.763	127.727.968.225	7.080.005.724	96.322.756	276.815.128		312.884.297.025
2	Kab. Aceh Besar	15.994.469.124	993.228.460	1.267.108.105	13.009.523.662	8.811.215	14.361.071	701.234.591	15.994.469.124
3	Kab. Aceh Besar	2.773.053.000	993.228.460	1.267.108.105	634.036.571	134.811.326	41.733.958	701.234.591	2.773.053.000
4	Kab. Aceh Selatan	2.980.874.660	993.228.460	1.267.108.105	997.140.703	8.811.215	3.495.400	701.234.591	2.977.118.474
5	Kab. Aceh Singkil	3.707.129.511	993.228.460	1.267.108.105	707.405.106	8.811.215	3.000.300	701.234.591	3.704.129.777
6	Kab. Aceh Tengah	4.236.453.222	993.228.460	1.267.108.105	1.135.502.085	8.811.215	110.467.864	701.234.591	4.236.453.222
7	Kab. Aceh Tenggara	3.553.182.577	993.228.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	14.143.003	701.234.591	3.553.182.577
8	Kab. Aceh Utara	16.834.340.379	2.332.193.836	13.173.969.950	568.555.203	8.811.215	4.384.300	701.234.591	16.791.089.295
9	Kab. Aceh Utara	40.800.022.998	19.512.607.749	19.992.979.042	568.555.203	8.811.215	2.815.200	701.234.591	40.787.003.000
10	Kab. Bireuen	2.552.164.021	993.228.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	1.708.200	701.234.591	2.540.745.776
11	Kab. Pidie	2.954.230.221	993.228.460	1.267.108.105	969.278.191	8.811.215	1.946.100	701.234.591	2.942.006.061
12	Kab. Simeulue	3.557.704.024	993.228.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	14.104.812	701.234.591	3.553.142.586
13	Kota Bengkulu	3.553.164.024	993.228.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	7.708.200	701.234.591	3.545.745.774
14	Kota Bengkulu	3.613.215.000	993.228.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	87.944.220	14.143.003	3.613.215.000
15	Kota Lingsar	3.553.439.391	993.228.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	1.745.700	701.234.591	3.541.713.577
16	Kota Lingsar	3.553.182.577	993.228.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	14.143.003	701.234.591	3.553.182.577
17	Kab. Nagan Raya	2.231.122.051	993.228.460	1.267.108.105	2.231.448.600	8.811.215	4.918.300	701.234.591	2.236.946.471
18	Kab. Aceh Jaya	3.561.406.003	993.228.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	3.777.600	701.234.591	3.565.183.574
19	Kab. Pidie Jaya	3.553.182.577	993.228.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	14.143.003	701.234.591	3.553.182.577
20	Kab. Aceh Barat Daya	3.606.970.899	993.228.460	1.267.108.105	621.770.867	8.811.215	1.708.200	701.234.591	3.593.941.438
21	Kab. Aceh Lingsar	4.232.104.131	993.228.460	1.267.108.105	1.219.634.232	8.811.215	31.867.300	701.234.591	4.232.104.131
22	Kab. Aceh Tenggara	3.700.645.142	3.121.311.848	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	3.552.400	701.234.591	5.669.473.362
23	Kab. Aceh Tenggara	2.612.162.721	993.228.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	6.441.000	701.234.591	2.618.603.721

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM Tahun Anggaran 2018 (Audited) (Dalam Rupiah)

Table with columns: No, Daerah, Page, Milyar Rupiah, Gas Bumi, Pertambangan Umum, Pasang Bumi, Hasil Kelutasaan, Hasil Perikanan, Total. Rows include provinces like Aceh, Sumatera Utara, and various districts.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM Tahun Anggaran 2018 (Audited) (Dalam Rupiah)

Table with columns: No, Daerah, Page, Milyar Rupiah, Gas Bumi, Pertambangan Umum, Pasang Bumi, Hasil Kelutasaan, Hasil Perikanan, Total. Rows include provinces like Sumatera Utara, Sumatera Barat, and various districts.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM Tahun Anggaran 2018 (Audited) (Dalam Rupiah)

Table with columns: No, Daerah, Page, Milyar Rupiah, Gas Bumi, Pertambangan Umum, Pasang Bumi, Hasil Kelutasaan, Hasil Perikanan, Total. Rows include provinces like Sumatera Barat, Sumatera Selatan, and various districts.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DATA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Pasar Bumi	Hasil Kelautan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	Kab. Bintan	116.209.673.565	20.460.816.243	90.641.521.814	4.381.733.449	-	12.264.900	701.234.591	116.197.672.997
94	Kab. Bontol	269.730.039.834	83.036.516.945	182.141.703.310	3.846.943.233	-	12.264.900	701.234.591	269.718.694.979
95	Kab. Karau	123.730.464.141	20.460.816.243	90.641.521.828	13.833.393.739	-	43.384.600	701.234.591	125.081.561.020
96	Kota Batam	113.679.640.431	20.460.816.243	90.641.521.828	3.846.943.233	-	12.264.900	701.234.591	113.603.760.785
97	Kab. Kepulauan Anambas	198.662.699.221	54.132.301.439	139.910.851.681	3.846.943.233	-	44.936.483	701.234.591	198.656.287.409
98	Kota Tanjung Pinang	115.715.443.089	20.460.816.243	90.641.521.828	3.887.967.776	-	19.642.913	701.234.591	115.711.183.351
99	Kab. Lingga	116.334.311.233	20.460.816.243	90.641.521.828	4.507.267.971	-	43.470.600	701.234.591	116.354.111.233
100	Provinsi Jambi	236.361.941.791	82.493.092.403	151.859.314.922	31.032.154.694	-	10.976.780.245	-	236.361.941.791
101	Kab. Karanganyar	39.590.797.389	13.337.142.039	26.371.862.693	15.741.480.275	-	3.439.077.783	701.234.591	39.590.797.389
102	Kab. Karang	63.222.894.037	12.498.738.586	26.371.862.693	34.577.937.539	-	1.074.090.644	701.234.591	63.222.894.037
103	Kab. Karawang	46.462.297.001	12.498.738.586	26.371.862.693	3.828.117.772	-	1.067.443.263	701.234.591	46.462.297.001
104	Kab. Kebayoran	47.046.611.644	12.498.738.586	26.371.862.693	6.386.348.909	-	1.186.428.888	701.234.591	47.046.611.644
105	Kab. Pati	30.207.903.468	14.017.886.179	26.449.728.902	7.697.344.480	-	41.249.100	701.234.591	49.979.443.200
106	Kab. Karangasem	75.232.666.201	13.313.322.328	26.364.943.342	30.708.192.432	-	463.393.200	701.234.591	71.971.092.793
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	240.962.107.968	102.366.369.145	232.081.198.730	7.089.961.233	-	5.723.814.247	701.234.591	240.962.107.968
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	104.794.606.434	31.103.229.405	64.918.629.530	3.833.117.773	-	2.218.596.146	701.234.591	104.794.606.434
109	Kab. Tebo	33.431.716.601	13.330.303.874	26.371.862.693	10.063.694.683	-	5.062.730.762	701.234.591	35.431.716.603
110	Kota Jambi	46.849.999.489	12.805.341.009	26.371.862.693	3.833.117.773	-	1.067.443.263	701.234.591	46.849.999.489
111	Kota Sungai Penuh	46.493.322.117	12.498.738.586	26.371.862.693	3.833.117.773	-	1.070.368.478	701.234.591	46.493.322.118
112	Provinsi Sumatera Selatan	934.907.319.894	95.874.934.953	562.234.890.047	290.987.611.086	-	7.989.856.511	-	934.907.319.894
113	Kab. Lahat	367.592.492.533	13.276.626.816	63.414.776.773	239.034.723.247	-	83.077.936	701.234.591	367.639.148.933
114	Kab. Pagar Alam	1.140.595.500.033	146.921.908.709	913.274.047.568	75.318.985.053	-	19.875.365	701.234.591	1.140.969.500.033
115	Kab. Pagar Alam	228.807.767.086	30.470.952.366	163.324.426.992	43.973.286.950	-	19.875.365	701.234.591	228.877.767.086

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DATA ALAM							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Pasar Bumi	Hasil Kelautan	Hasil Perikanan	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
116	Kab. Pagar Alam	131.380.124.322	11.984.494.572	67.786.861.499	49.964.783.816	-	19.875.365	920.848.564	701.234.591	131.776.100.000
117	Kab. Pagar Alam	423.449.323.197	18.413.015.323	108.501.891.348	296.054.797.174	-	213.369.593	1.569.914.971	701.234.591	425.449.323.197
118	Kab. Ogan Komering Ilir	127.823.654.691	11.984.494.572	67.786.861.499	36.639.616.073	-	19.875.365	10.691.369.393	701.234.591	127.823.654.691
119	Kab. Ogan Komering Lili	133.919.630.139	20.350.902.278	73.979.883.443	38.704.081.963	-	19.875.365	474.305.300	701.234.591	133.919.630.139
120	Kab. Palembang	116.882.039.110	11.984.494.572	67.786.861.499	35.463.073.173	-	19.875.365	926.317.709	701.234.591	116.882.039.110
121	Kota Pagar Alam	118.479.980.899	11.984.494.572	67.786.861.499	35.463.073.173	-	59.048.370	2.360.033.666	701.234.591	118.599.747.072
122	Kota Lahat	116.882.039.110	11.984.494.572	67.786.861.499	35.463.073.173	-	19.875.365	926.317.709	701.234.591	116.882.039.110
123	Kota Palembang	123.031.246.474	14.313.866.474	71.129.753.228	35.938.588.354	-	19.875.365	926.317.709	701.234.591	123.031.246.474
124	Kab. Pangkalajene	118.804.622.228	11.984.494.572	67.786.861.499	37.628.642.393	-	19.875.365	926.317.709	701.234.591	118.804.622.228
125	Kab. Pangkalajene	123.040.668.201	13.221.406.281	67.786.861.499	40.319.892.291	-	19.875.365	991.397.969	701.234.591	123.040.668.201
126	Kab. Pangkalajene	118.846.156.043	13.701.602.182	67.786.861.499	35.718.300.778	-	19.875.365	926.317.709	701.234.591	118.846.156.043
127	Kab. Pangkalajene	118.170.553.301	11.984.494.572	67.786.861.499	36.760.308.034	-	19.875.365	927.379.240	701.234.591	118.170.553.301
128	Kab. Pangkalajene	117.789.853.739	11.984.494.572	67.786.861.499	35.323.553.994	-	23.948.624	969.760.480	701.234.591	117.789.853.739
129	Kab. Pangkalajene	127.932.017.193	18.791.870.613	69.184.383.391	38.329.825.728	-	19.875.365	923.183.497	701.234.591	127.932.017.193
130	Provinsi Bangka Belitung	162.566.556.353	5.063.154.403	-	155.721.973.336	-	949.159.790	-	-	162.566.556.353
131	Kab. Bangka	86.760.214.934	1.616.479.128	-	84.384.902.914	-	10.012.800	-	-	86.712.628.934
132	Kab. Belitung	47.737.442.292	1.616.479.128	-	45.389.832.863	-	35.034.300	-	-	47.737.442.292
133	Kota Pangkalajene	42.367.869.989	1.616.479.128	-	40.004.781.086	-	45.374.378	-	-	42.367.869.989
134	Kab. Bangka Selatan	70.388.824.822	1.616.479.128	-	67.301.857.916	-	56.185.010	-	-	70.388.824.822
135	Kab. Bangka Tengah	32.828.799.989	1.616.479.128	-	30.038.407.896	-	40.189.049	-	-	32.782.608.038
136	Kab. Bangka Barat	32.980.350.495	1.616.479.128	-	31.493.926.280	-	40.821.831	-	-	32.980.350.495
137	Kab. Belitung Timur	61.458.171.265	1.616.479.128	-	59.489.198.811	-	74.939.314	-	-	61.458.171.265
138	Provinsi Bengkulu	25.953.324.812	-	-	24.799.297.280	-	58.084.698	-	-	25.953.324.812

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DATA ALAM							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Pasar Bumi	Hasil Kelautan	Hasil Perikanan	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
139	Kab. Bengkulu Selatan	6.114.407.994	-	-	5.382.580.621	-	12.907.856	2.979.300	701.234.591	6.099.702.368
140	Kab. Bengkulu Utara	27.217.734.663	-	-	23.046.153.733	-	12.907.856	26.812.800	701.234.591	27.187.106.982
141	Kab. Pajajaran	6.159.932.003	-	-	5.382.580.621	-	53.348.338	2.979.300	701.234.591	6.142.142.650
142	Kota Bengkulu	6.144.729.887	-	-	5.382.580.621	-	12.907.856	47.106.390	701.234.591	6.144.729.887
143	Kab. Kaur	6.287.622.659	-	-	5.519.936.416	-	12.907.856	33.543.793	701.234.591	6.287.622.659
144	Kab. Bengkulu	6.615.823.202	-	-	7.082.508.976	-	12.907.856	30.172.879	701.234.591	6.615.823.202
145	Kab. Bengkulu Tengah	6.114.407.994	-	-	5.382.580.621	-	12.907.856	2.979.300	701.234.591	6.099.702.368
146	Kab. Lampung	7.480.040.568	-	-	6.703.630.385	-	12.907.856	2.979.300	701.234.591	7.420.760.133
147	Kab. Bengkulu Tengah	37.451.038.481	-	-	26.720.126.560	-	12.907.856	16.768.453	701.234.591	37.451.038.481
148	Kab. Kepahang	6.176.318.021	-	-	5.382.580.621	-	73.728.913	8.218.304	701.234.591	6.167.700.831
149	Provinsi Lampung	89.921.761.457	68.089.197.406	17.363.207.583	1.908.968.080	4.584.982.945	378.403.383	-	-	89.921.761.457
150	Kab. Lampung Barat	12.922.139.034	8.967.380.194	2.313.933.822	221.390.212	665.737.138	52.421.094	-	-	12.922.139.034
151	Kab. Lampung Selatan	13.199.205.434	8.967.380.194	2.313.933.822	313.265.836	820.821.953	83.847.042	-	-	13.199.205.434
152	Kab. Lampung Tengah	12.900.387.822	8.967.380.194	2.313.933.822	210.261.612	654.997.299	52.338.314	-	-	12.900.387.822
153	Kab. Lampung Utara	12.876.039.612	8.967.380.194	2.313.933.822	186.069.612	654.997.299	39.924.300	-	-	12.866.561.318
154	Kab. Lampung Timur	44.454.946.251	40.521.938.613	2.313.933.822	210.261.612	654.997.299	52.338.314	-	-	44.454.946.251
155	Kab. Tanggamus	22.614.217.359	8.967.380.194	2.313.933.822	3.031.793.214	8.439.068.178	160.785.351	-	-	22.614.217.359
156	Kab. Tulang Bawang	12.984.900.122	8.967.380.194	2.313.933.822	294.778.912	654.997.299	52.338.314	-	-	12.984.900.122
157	Kab. Way Kambas	13.724.223.740	8.967.380.194	2.313.933.822	463.108.297	654.997.299	623.548.548	-	-	13.724.223.740
158	Kab. Pringsewu	13.289.060.645	8.967.380.194	2.313.933.822	280.463.810	1.074.191.840	52.338.314	-	-	13.289.060.645
159	Kab. Pesisir Barat	12.876.532.991	8.967.380.194	2.313.933.822	186.069.612					

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.C

No	Daerah	Page	SUMBER DATA ALAM					Basil Kelautanan	Basil Perikanan	Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
162	Sdn. Taling Bawang Barat	12.876.195.832	8.957.380.194	2.313.953.822	-	186.069.612	654.997.399	32.538.314	701.234.591	12.876.195.832
163	Sdn. Bandar Lampung	13.011.176.884	8.957.380.194	2.313.953.822	-	186.069.612	790.115.373	45.989.713	701.234.591	13.011.176.884
164	Sdn. Plores	12.876.195.832	8.957.380.194	2.313.953.822	-	186.069.612	654.997.399	32.538.314	701.234.591	12.876.195.832
165	Provinsi DKI Jakarta	183.375.491.488	130.238.055.574	52.435.701.394	-	-	-	-	701.234.520	183.375.491.488
166	Provinsi Jawa Barat	307.513.948.008	66.827.817.955	79.076.521.901	5.268.894.180	155.572.404.668	969.909.324	-	701.234.591	307.513.948.008
167	Kab. Bandung	184.280.656.644	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	172.198.170.337	154.724.800	-	701.234.591	184.280.656.644
168	Kab. Bekasi	31.877.244.513	6.488.866.541	12.373.043.063	274.383.161	11.967.106.758	74.608.403	-	701.234.591	31.877.244.513
169	Kab. Bogor	75.624.857.332	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	9.741.037.872	54.219.793.538	116.635.688	701.234.591	75.624.857.332
170	Kab. Cirebon	24.322.314.822	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	11.967.106.758	438.454.632	-	701.234.591	24.322.314.822
171	Kab. Cisarua	23.972.289.793	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	11.967.106.758	354.980.776	-	701.234.591	23.972.289.793
172	Kab. Cileunyi	21.410.721.833	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	11.967.106.758	78.973.238	-	701.234.591	21.410.721.833
173	Kab. Cugenang	21.410.721.833	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	11.967.106.758	94.441.230	-	701.234.591	21.410.721.833
174	Kab. Indramayu	32.432.300.228	8.957.380.194	10.813.479.378	274.383.161	11.967.106.758	167.035.154	-	701.234.591	32.432.300.228
175	Kab. Karawang	36.982.967.582	7.474.504.413	16.393.523.294	274.383.161	11.967.106.758	75.205.263	-	701.234.591	36.982.967.582
176	Kab. Kuningas	34.022.614.014	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	11.967.106.758	128.733.829	-	701.234.591	34.022.614.014
177	Kab. Pangajene	24.216.392.102	5.042.910.841	6.027.066.365	274.383.161	11.967.106.758	6.027.066.365	-	701.234.591	24.216.392.102
178	Kab. Pangandaran	24.227.179.524	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	11.967.106.758	332.319.343	-	701.234.591	24.227.179.524
179	Kab. Purwakarta	24.189.736.124	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	11.967.106.758	336.822.872	-	701.234.591	24.189.736.124
180	Kab. Sukabumi	46.423.739.102	6.172.701.523	27.077.065.733	274.383.161	12.008.217.393	92.129.493	-	701.234.591	46.423.739.102
181	Kab. Sukawati	64.013.895.237	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	11.967.106.758	209.671.017	-	701.234.591	64.013.895.237
182	Kab. Sumedang	24.020.721.866	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	11.972.732.393	120.192.051	-	701.234.591	24.020.721.866
183	Kab. Tasikmalaya	24.020.721.866	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	11.967.106.758	148.164.312	-	701.234.591	24.020.721.866
184	Kab. Bandung Barat	24.020.444.084	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	12.056.112.293	128.578.598	-	701.234.591	24.020.444.084

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.C

No	Daerah	Page	SUMBER DATA ALAM					Basil Kelautanan	Basil Perikanan	Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
185	Kab. Bandung	22.969.468.586	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	11.967.106.758	74.608.403	-	701.234.591	22.969.468.586
186	Kab. Bekasi	22.969.468.586	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	11.967.106.758	74.608.403	-	701.234.591	22.969.468.586
187	Kab. Bogor	22.969.468.586	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	11.967.106.758	74.608.403	-	701.234.591	22.969.468.586
188	Kab. Cirebon	22.969.468.586	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	11.967.106.758	74.608.403	-	701.234.591	22.969.468.586
189	Kab. Cugenang	22.969.468.586	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	11.967.106.758	74.608.403	-	701.234.591	22.969.468.586
190	Kab. Sukabumi	22.969.468.586	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	11.967.106.758	74.608.403	-	701.234.591	22.969.468.586
191	Kab. Cileunyi	22.969.468.586	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	11.967.106.758	74.608.403	-	701.234.591	22.969.468.586
192	Kab. Tasikmalaya	22.969.468.586	4.944.070.438	3.908.085.237	274.383.161	11.967.106.758	74.608.403	-	701.234.591	22.969.468.586
193	Kab. Bandung	24.134.117.102	4.944.070.438	3.908.085.237	277.247.147	11.967.106.758	136.392.931	-	701.234.591	24.134.117.102
194	Provinsi Banten	3.378.886.313	-	-	2.438.542.508	480.883.819	479.461.988	-	701.234.591	3.378.886.313
195	Kab. Labuan	2.186.779.805	-	-	1.199.969.086	121.675.630	151.899.686	-	701.234.591	2.186.779.805
196	Kab. Panglaja	6.980.328.799	-	-	4.808.091.047	330.414.285	941.988.765	-	701.234.591	6.980.328.799
197	Kab. Serang	1.986.482.488	-	-	623.397.845	322.987.858	121.625.721	-	701.234.591	1.986.482.488
198	Kab. Tangerang	1.600.418.761	-	-	630.520.799	121.675.630	126.989.141	-	701.234.591	1.600.418.761
199	Kab. Cilegon	1.593.297.207	-	-	623.397.845	121.675.630	126.989.141	-	701.234.591	1.593.297.207
200	Kab. Tangerang	1.593.297.207	-	-	623.397.845	121.675.630	126.989.141	-	701.234.591	1.593.297.207
201	Kab. Serang	1.593.297.207	-	-	623.397.845	121.675.630	126.989.141	-	701.234.591	1.593.297.207
202	Kab. Tangerang Selatan	1.593.297.207	-	-	623.397.845	121.675.630	126.989.141	-	701.234.591	1.593.297.207
203	Provinsi Jawa Tengah	11.258.078.000	617.899.676	4.951.031.508	96.167.508	481.704.480	5.142.017.464	-	701.234.591	11.258.078.000
204	Kab. Banjarnegara	1.381.781.534	36.346.929	391.237.025	3.642.858	26.370.761	323.749.370	-	701.234.591	1.381.781.534
205	Kab. Banyuwangi	1.613.745.914	36.346.929	391.237.025	3.642.858	26.370.761	323.749.370	-	701.234.591	1.613.745.914
206	Kab. Batang	1.550.296.911	36.346.929	391.237.025	3.642.858	26.370.761	492.264.747	-	701.234.591	1.550.296.911
207	Kab. Blora	17.013.980.402	1.235.799.333	9.902.082.421	3.642.858	26.370.761	5.147.670.417	-	701.234.591	17.013.980.402

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.C

No	Daerah	Page	SUMBER DATA ALAM					Basil Kelautanan	Basil Perikanan	Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
208	Kab. Brebes	1.413.096.043	36.346.929	391.237.025	3.642.858	29.872.970	353.561.676	-	701.234.591	1.413.096.043
209	Kab. Breksi	1.746.636.701	36.346.929	391.237.025	3.642.858	197.144.776	610.803.534	-	701.234.591	1.746.636.701
210	Kab. Cilacap	1.650.381.787	36.346.929	391.237.025	105.085.062	26.370.761	489.907.419	-	701.234.591	1.650.381.787
211	Kab. Ciamis	1.240.823.992	36.346.929	391.237.025	3.642.858	26.370.761	387.977.828	-	701.234.591	1.240.823.992
212	Kab. Grobogan	1.968.820.444	36.346.929	391.237.025	3.642.858	26.370.761	610.788.283	-	701.234.591	1.968.820.444
213	Kab. Japura	1.398.370.142	36.346.929	391.237.025	11.684.712	26.370.761	331.316.124	-	701.234.591	1.398.370.142
214	Kab. Karanganyar	1.690.895.599	36.346.929	391.237.025	3.642.858	26.343.372	294.892.624	-	701.234.591	1.690.895.599
215	Kab. Kebumeh	1.417.931.631	36.346.929	391.237.025	26.447.739	26.370.761	336.094.371	-	701.234.591	1.417.931.631
216	Kab. Kendal	1.627.524.417	36.346.929	391.237.025	3.642.858	26.370.761	561.137.241	-	701.234.591	1.627.524.417
217	Kab. Klaten	1.340.170.349	36.346.929	391.237.025	3.642.858	26.370.761	381.138.203	-	701.234.591	1.340.170.349
218	Kab. Kudus	1.340.380.140	36.346.929	391.237.025	3.642.858	26.370.761	382.347.983	-	701.234.591	1.340.380.140
219	Kab. Pungling	1.284.029.091	36.346.929	391.237.025	3.642.858	61.946.899	290.621.989	-	701.234.591	1.284.029.091
220	Kab. Pati	1.682.829.293	36.346.929	391.237.025	3.642.858	26.370.761	623.797.238	-	701.234.591	1.682.829.293
221	Kab. Pekalongan	1.412.196.736	36.346.929	391.237.025	3.642.858	26.370.761	354.164.593	-	701.234.591	1.412.196.736
222	Kab. Perawang	1.931.441.598	36.346.929	391.237.025	3.642.858	46.706.549	853.273.638	-	701.234.591	1.931.441.598
223	Kab. Purhalangga	1.370.725.108	36.346.929	391.237.025	3.642.858	41.729.989	297.237.716	-	701.234.591	1.370.725.108
224	Kab. Purworejo	1.384.453.121	36.346.929	391.237.025	3.642.858	26.370.761	326.423.958	-	701.234.591	1.384.453.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	SUMBER DATA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Pasau Bumi	Sesil Kelautan	Sesil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231	Kab. Wajo	1.581.592.303	36.346.929	291.237.023	212.631.367	33.474.011	306.668.280	701.234.591	1.581.592.303
232	Kab. Wotansolo	1.391.005.084	36.346.929	291.237.023	2.442.858	26.370.761	332.972.920	701.234.591	1.391.005.084
233	Kota Magelang	1.340.170.369	36.346.929	291.237.023	2.442.858	26.370.761	382.138.205	701.234.591	1.340.170.369
234	Kota Palangkaraya	1.340.170.369	36.346.929	291.237.023	2.442.858	26.370.761	382.138.205	701.234.591	1.340.170.369
235	Kota Salatiga	1.341.711.049	36.346.929	291.237.023	2.442.858	28.111.440	382.138.205	701.234.591	1.341.711.049
236	Kota Semarang	1.394.502.004	36.346.929	291.237.023	2.442.858	26.370.761	336.668.840	701.234.591	1.394.502.004
237	Kota Sukoharjo	1.340.170.369	36.346.929	291.237.023	2.442.858	26.370.761	382.138.205	701.234.591	1.340.170.369
238	Kota Tegal	1.340.170.369	36.346.929	291.237.023	2.442.858	26.370.761	382.138.205	701.234.591	1.340.170.369
239	Provinsi DI Yogyakarta	44.756.323	-	-	22.980.693	-	21.775.632	-	44.756.323
240	Kab. Bantul	713.613.139	-	-	1.489.441	-	10.887.816	713.613.139	713.613.139
241	Kab. Gunung Kidul	746.273.941	-	-	1.489.441	-	10.887.816	746.273.941	746.273.941
242	Kab. Kulon Progo	798.087.404	-	-	85.964.997	-	10.887.816	798.087.404	798.087.404
243	Kab. Sleman	713.611.848	-	-	1.489.441	-	10.887.816	713.611.848	713.611.848
244	Kota Yogyakarta	713.611.848	-	-	1.489.441	-	10.887.816	713.611.848	713.611.848
245	Provinsi Jawa Timur	1.237.819.248.993	1.157.989.967.942	98.768.350.271	15.888.019.409	577.281.112	5.095.025.287	-	1.237.819.248.993
246	Kab. Bangkalis	74.403.428.021	63.556.392.803	7.041.368.124	814.434.968	31.203.994	256.381.332	701.234.591	74.403.428.021
247	Kab. Banyuwangi	100.073.579.993	62.568.101.586	3.099.167.031	30.316.870.593	289.175.367	2.999.030.461	701.234.591	100.073.579.993
248	Kab. Blitar	67.813.967.011	62.568.101.586	3.099.167.031	814.903.487	31.203.994	599.336.124	701.234.591	67.813.967.011
249	Kab. Bojonegara	3.281.171.868.831	3.274.533.553.497	4.336.387.362	814.447.240	31.203.994	712.843.147	701.234.591	3.281.171.868.831
250	Kab. Bondowoso	88.044.170.471	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	309.165.232	652.054.701	701.234.591	88.044.170.471
251	Kab. Gresik	67.656.505.411	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	285.792.479	701.234.591	67.656.505.411
252	Kab. Jember	68.371.280.622	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	1.161.341.644	701.234.591	68.371.280.622
253	Kab. Jombang	67.370.446.261	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	336.291.819	701.234.591	67.370.446.261

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	SUMBER DATA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Pasau Bumi	Sesil Kelautan	Sesil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
254	Kab. Kediri	67.637.239.548	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	443.105.108	701.234.591	67.637.239.548
255	Kab. Lamongan	67.878.634.171	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	664.479.234	701.234.591	67.878.634.171
256	Kab. Lumajang	68.776.133.401	62.568.101.586	3.099.167.031	1.927.030.345	31.203.994	449.393.854	701.234.591	68.776.133.401
257	Kab. Madiun	68.350.537.831	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	124.079.999	953.111.409	701.234.591	68.350.537.831
258	Kab. Magelang	67.503.629.262	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	66.448.438	334.030.380	701.234.591	67.503.629.262
259	Kab. Malang	67.674.547.631	62.568.101.586	3.099.167.031	815.325.940	51.334.491	438.384.013	701.234.591	67.674.547.631
260	Kab. Mojokerto	67.573.074.718	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	97.736.310	292.367.960	701.234.591	67.573.074.718
261	Kab. Ngawi	67.837.388.461	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	623.214.019	701.234.591	67.837.388.461
262	Kab. Ngawi	68.047.978.541	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	121.213.662	743.814.432	701.234.591	68.047.978.541
263	Kab. Ponorogo	67.494.241.557	62.568.101.586	3.099.167.031	862.389.140	31.203.994	332.145.213	701.234.591	67.494.241.557
264	Kab. Puncak	67.474.493.240	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	260.339.808	701.234.591	67.474.493.240
265	Kab. Purbalingga	67.564.288.164	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	80.362.678	300.973.040	701.234.591	67.564.288.164
266	Kab. Puring	68.003.061.903	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	213.998.322	606.113.222	701.234.591	68.003.061.903
267	Kab. Probolinggo	67.630.981.571	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	416.827.129	701.234.591	67.630.981.571
268	Kab. Sampang	67.465.013.364	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	230.858.922	701.234.591	67.465.013.364
269	Kab. Sidoarjo	69.683.432.642	62.568.101.586	3.338.063.323	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	69.683.432.642
270	Kab. Situbone	67.311.714.468	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	34.222.338	294.541.780	701.234.591	67.311.714.468
271	Kab. Sumamp	70.116.679.714	62.568.101.586	3.738.713.321	814.447.240	31.203.994	263.978.008	701.234.591	70.116.679.714
272	Kab. Trenggaling	67.610.023.924	62.568.101.586	3.099.167.031	830.735.542	31.203.994	339.361.214	701.234.591	67.610.023.924
273	Kab. Tulang	72.249.797.732	66.717.633.509	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	896.111.365	701.234.591	72.249.797.732
274	Kab. Tulungagung	67.509.044.321	62.568.101.586	3.099.167.031	816.048.421	31.203.994	292.288.799	701.234.591	67.509.044.321
275	Kota Blitar	67.464.332.499	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	350.178.053	701.234.591	67.464.332.499
276	Kota Kediri	67.464.332.499	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	350.178.053	701.234.591	67.464.332.499

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	SUMBER DATA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Pasau Bumi	Sesil Kelautan	Sesil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
277	Kota Madiun	67.464.332.499	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	67.464.332.499
278	Kota Malang	67.464.332.499	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	67.464.332.499
279	Kota Mojokerto	67.464.332.499	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	67.464.332.499
280	Kota Ponorogo	67.464.332.499	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	67.464.332.499
281	Kota Probolinggo	67.464.332.499	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	67.464.332.499
282	Kota Sukoharjo	67.464.332.499	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	67.464.332.499
283	Kota Batu	67.314.043.099	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	78.053.234	251.039.413	701.234.591	67.314.043.099
284	Provinsi Kalimantan Barat	64.690.332.937	-	-	25.192.406.117	-	38.497.926.820	-	64.690.332.937
285	Kab. Bengkayang	4.538.246.335	-	-	3.035.243.127	-	778.213.808	701.234.591	4.538.246.335
286	Kab. Landak	8.803.016.135	-	-	6.762.628.885	-	1.339.151.679	701.234.591	8.803.016.135
287	Kab. Mempah Khs	7.399.789.121	-	-	3.410.939.064	-	1.387.939.508	701.234.591	7.399.789.121
288	Kab. Mempawah	41.820.407.782	-	-	28.627.335.905	-	12.506.836.612	701.234.591	41.820.407.782
289	Kab. Sambas	4.278.794.212	-	-	3.168.939.720	-	867.599.804	701.234.591	4.278.794.212
290	Kab. Singkawang	4.278.961.965	-	-	2.838.831.071	-	718.998.203	701.234.591	4.278.961.965
291	Kab. Songgah	30.894.092.479	-	-	28.284.219.428	-	1.808.638.439	701.234.591	30.894.092.479
292	Kab. Sintang	7.303.712.099	-	-	3.010.303.487	-	1.175.271.800	701.234.591	7.303.712.099
293	Kota Pontianak	4.372.674.332	-	-	3.843.879.072	-	837.560.669	701.234.591	4.372.674.332
294	Kota Singkawang	4.372.434.327	-	-	3.837.037.975	-	714.181.761	701.234.591	4.372.434.327
295	Kab. Kapuas Utara	4.498.070.984	-	-	3.092.193.713	-	480.002.392	701.234.591	4.498.070.984
296	Kab. Kubu Raya	3.492.891.463	-	-	3.934.633.772	-	1.837.023.100	701.234.591	3.492.891.463
297	Kab. Sekeloa	3.204.342.771	-	-	3.792.584.092	-	710.324.088	701.234.591	3.204.342.771
298	Kab. Pohnpei	4.661.462.389	-	-	2.832.251.775	-	653.811.800	701.234.591	4.661.462.389
299	Provinsi Kalimantan Tengah	440.616.398.456							

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DATA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Pasca Bumi	Hasil Kelautan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300	Jab. Banten Selatan	56.863.612.888	2.238.600	23.925.000	31.065.932.133	-	5.071.262.336	701.234.591	56.863.612.888
301	Jab. Banten Utara	121.298.995.134	28.911.800	298.021.500	107.733.560.598	-	12.315.265.637	701.234.591	121.298.995.134
302	Jab. Banten Tengah	136.187.992.842	3.238.600	23.925.000	121.930.442.573	-	13.311.153.078	701.234.591	136.187.992.842
303	Jab. Kalimantan Barat	33.109.106.801	2.238.600	23.925.000	33.924.331.624	-	8.438.336.888	701.234.591	33.109.106.801
304	Jab. Kalimantan Timur	37.979.232.243	2.238.600	23.925.000	29.338.361.390	-	7.693.472.762	701.234.591	37.979.232.243
305	Jab. Kalimantan Tengah	29.376.838.372	2.238.600	23.925.000	24.058.105.143	-	4.792.335.036	701.234.591	29.376.838.372
306	Jab. Banten Timur	52.966.127.133	2.429.000	23.925.000	45.776.356.753	-	6.463.981.787	701.234.591	52.966.127.133
307	Jab. Pulau Bangka	12.741.545.647	2.238.600	23.925.000	106.139.219.270	-	14.875.926.182	701.234.591	12.741.545.647
308	Jab. Pulau Belitung	20.220.079.088	2.238.600	23.925.000	22.841.802.303	-	8.410.603.528	701.234.591	20.220.079.088
309	Jab. Pulau Riau	40.220.147.102	2.238.600	23.925.000	24.656.008.447	-	14.837.765.464	701.234.591	40.220.147.102
310	Jab. Lampung	41.513.381.213	2.238.600	23.925.000	29.840.806.134	-	10.946.086.888	701.234.591	41.513.381.213
311	Jab. Sumatera Utara	39.356.326.275	2.238.600	23.925.000	23.866.053.368	-	4.763.872.313	701.234.591	39.356.326.275
312	Jab. Sumatera Barat	31.626.622.579	2.238.600	23.925.000	31.647.499.692	-	19.382.724.693	701.234.591	31.626.622.579
313	Jab. Sumatera Selatan	54.217.880.872	2.238.600	23.925.000	35.473.778.899	-	28.017.703.783	701.234.591	54.217.880.872
314	Provinsi Kalimantan Selatan	763.766.179.083	1.453.231.703	-	755.187.980.493	-	6.118.176.887	-	763.766.179.083
315	Jab. Banjar	197.029.896.478	242.037.107	-	185.836.718.073	-	340.448.236	701.234.591	197.029.896.478
316	Jab. Banten Kuala	126.171.287.472	242.037.107	-	123.098.779.063	-	129.238.709	701.234.591	126.171.287.472
317	Jab. Pulau Selayang Selatan	202.212.472.634	242.037.107	-	201.139.682.939	-	129.319.337	701.234.591	202.212.472.634
318	Jab. Pulau Selayang Tengah	126.252.595.802	242.037.107	-	123.180.126.266	-	128.278.021	701.234.591	126.252.595.802
319	Jab. Pulau Selayang Utara	126.187.948.382	242.037.107	-	125.115.489.146	-	30.549.600	701.234.591	126.187.948.382
320	Jab. Lampung	175.075.899.502	242.037.107	-	173.948.700.915	-	30.549.600	701.234.591	175.075.899.502
321	Jab. Palembang	326.826.921.179	2.381.262.373	-	272.676.302.334	-	148.823.106	701.234.591	326.826.921.179
322	Jab. Tanah Liat	363.708.003.309	242.037.107	-	362.503.766.231	-	236.603.380	701.234.591	363.708.003.309

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DATA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Pasca Bumi	Hasil Kelautan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
323	Jab. Tanah	262.320.476.936	242.037.107	-	261.720.817.720	-	128.187.236	701.234.591	262.320.476.936
324	Jab. Bengkulu	126.294.708.315	242.037.107	-	125.221.190.863	-	120.245.752	701.234.591	126.294.708.315
325	Jab. Bengkulu Tengah	126.203.073.402	242.037.107	-	123.098.779.063	-	161.022.630	701.234.591	126.203.073.402
326	Jab. Bengkulu Selatan	493.743.645.997	565.217.848	-	492.236.619.729	-	134.883.939	701.234.591	493.743.645.997
327	Jab. Tanah Bumbu	441.468.747.371	242.037.107	-	439.813.111.613	-	245.333.101	701.234.591	441.468.747.371
328	Provinsi Kalimantan Timur	2.391.882.976.117	258.780.194.198	-	1.376.416.405.134	-	246.404.361.594	-	2.391.882.976.117
329	Jab. Berau	848.320.330.462	54.539.323.245	-	106.094.112.160	-	29.031.091.183	701.234.591	848.320.330.462
330	Jab. Kutai Kartasegara	1.678.266.612.567	263.309.232.742	-	430.763.831.826	-	14.493.623.629	701.234.591	1.678.266.612.567
331	Jab. Kutai Barat	720.952.272.569	54.539.323.245	-	106.094.112.160	-	13.021.209.268	701.234.591	720.952.272.569
332	Jab. Kutai Timur	1.369.165.385.579	55.072.616.332	-	106.094.112.160	-	1.195.877.049.033	701.234.591	1.369.165.385.579
333	Jab. Pukuhujan Utara	478.589.984.862	54.539.323.245	-	106.094.112.160	-	14.548.992.644	701.234.591	478.589.984.862
334	Jab. Paser	781.208.545.238	54.539.323.245	-	106.094.112.160	-	6.276.109.828	701.234.591	781.208.545.238
335	Jab. Balikpapan	485.470.265.661	54.539.323.245	-	106.094.112.160	-	302.309.377.238	701.234.591	485.470.265.661
336	Jab. Berau Tengah	478.458.032.797	59.729.616.626	-	107.862.985.457	-	302.499.211.632	701.234.591	478.458.032.797
337	Jab. Sarawak	533.611.520.866	56.223.088.478	-	106.481.181.948	-	353.777.651.308	701.234.591	533.611.520.866
338	Jab. Pongkor Pasar Utara	496.807.315.628	62.682.519.932	-	117.332.324.428	-	8.920.834.078	701.234.591	496.807.315.628
339	Provinsi Kalimantan Utara	223.771.075.900	3.181.078.099	-	117.306.132.439	-	96.443.296.638	-	223.771.075.900
340	Jab. Bulungan	117.342.320.134	7.972.373.801	-	1.131.241.047	-	17.702.173.957	701.234.591	117.342.320.134
341	Jab. Malinau	129.126.280.431	4.590.539.049	-	430.584.119	-	6.428.637.531	701.234.591	129.126.280.431
342	Jab. Nunukan	141.469.575.100	6.053.966.494	-	877.811.300	-	18.711.277.542	701.234.591	141.469.575.100
343	Jab. Tana Tidong	94.618.094.982	4.932.254.427	-	430.384.119	-	11.370.948.444	701.234.591	94.618.094.982
344	Jab. Tarakan	77.624.523.599	14.569.719.119	-	608.914.094	-	5.726.087.243	701.234.591	77.624.523.599
345	Provinsi Sulawesi Utara	42.094.269.019	-	-	38.609.888.655	-	3.208.117.685	-	42.094.269.019

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DATA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Pasca Bumi	Hasil Kelautan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
346	Jab. Sulawesi Tenggara	7.202.882.729	-	-	6.011.200.515	-	472.588.588	701.234.591	7.202.882.729
347	Jab. Pinrang	9.817.113.012	-	-	3.266.856.630	-	3.237.653.946	701.234.591	9.817.113.012
348	Jab. Sangihe	6.831.275.613	-	-	3.646.084.609	-	472.588.588	701.234.591	6.831.275.613
349	Jab. Selayar	59.656.199.898	-	-	58.471.008.892	-	472.588.588	701.234.591	59.656.199.898
350	Jab. Mamasa	6.588.934.171	-	-	3.369.933.430	-	506.178.303	701.234.591	6.588.934.171
351	Jab. Kepulauan Talaud	6.720.665.721	-	-	5.535.474.731	-	472.588.588	701.234.591	6.720.665.721
352	Jab. Pinrang Selatan	6.999.645.218	-	-	5.788.879.030	-	493.933.879	701.234.591	6.999.645.218
353	Jab. Pinrang Tenggara	6.832.139.704	-	-	6.639.684.736	-	478.731.790	701.234.591	6.832.139.704
354	Jab. Kap. Sula Tugu/Idung Barat	6.552.047.654	-	-	3.266.856.630	-	472.588.588	701.234.591	6.552.047.654
355	Jab. Kotabaru	6.622.916.399	-	-	5.438.725.286	-	472.588.588	701.234.591	6.622.916.399
356	Jab. Sulawesi Tenggara Timur	10.671.180.844	-	-	9.484.631.585	-	4.922.400	701.234.591	10.671.180.844
357	Jab. Sulawesi Tenggara Selatan	18.806.459.713	-	-	13.224.894.029	-	472.588.588	701.234.591	18.806.459.713
358	Jab. Tana Toraja	9.370.128.123	-	-	3.266.856.630	-	3.280.679.027	701.234.591	9.370.128.123
359	Jab. Pinrang Utara	12.550.443.099	-	-	12.168.041.124	-	669.799.541	701.234.591	12.550.443.099
360	Jab. Sulawesi Tenggara Utara	6.947.766.906	-	-	3.723.246.231	-	472.588.588	701.234.591	6.947.766.906
361	Provinsi Gorontalo	1.738.023.363	-	-	592.806.154	-	1.205.811.625	-	1.738.023.363
362	Jab. Boalemo	758.539.471	-	-	162.880	-	37.162.300	701.234.591	758.539.471
363	Jab. Gorontalo	1.013.833.512	-	-	220.620.643	-	90.647.100	701.234.591	1.013.833.512
364	Jab. Gorontalo Utara	725.540.679	-	-	162.379	-	34.143.300	701.234.591	725.540.679
365	Jab. Pohuwato	1.715.590.579	-	-	874.461.188	-	139.894.800	701.234.591	1.715.590.579
366	Jab. Gorontalo Selatan	1.124.820.474	-	-	196.210.984	-	122.731.700	701.234.591	1.124.820.474
367	Jab. Bone Rottano	1.600.954.477	-	-	844.403.182	-	32.316.700	701.234.591	1.600.954.477
368	Provinsi Sulawesi Tengah	130.835.477.495	9.313.101.600	-	95.919.942.177	-	20.220.788.885	-	130.835.477.495

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.C

No.	Daerah	Page	SUMBER DATA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Keluteraan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
366	Kab. Banggai	217.006.961.648	18.626.703.500	19.039.083.287	3.312.232.105		1.227.089.163		217.006.961.648
370	Kab. Banggai Laut	20.990.401.091	1.532.225.500	15.919.923.670	2.699.893.793		117.123.339		20.990.401.091
371	Kab. Banggai Kepulauan	20.989.806.834	1.532.225.500	15.919.923.670	2.695.684.281		35.424.000		20.989.806.834
372	Kab. Bontol	22.432.606.774	1.532.225.500	15.919.923.670	4.117.137.895		71.169.300		22.432.606.774
373	Kab. Toli-toli	22.561.680.033	1.532.225.500	15.919.923.670	4.234.281.334		134.014.700		22.561.680.033
374	Kab. Donggala	21.243.300.612	1.532.225.500	15.919.923.670	2.913.734.202		70.406.400		21.243.300.612
375	Kab. Paser	54.231.914.719	1.532.225.500	15.919.923.670	34.907.247.191		1.121.283.738		54.231.914.719
376	Kab. Paser Utara	26.532.129.798	1.532.225.500	15.919.923.670	7.486.502.607		893.269.412		26.532.129.798
377	Kab. Pulo	22.700.899.722	1.532.225.500	15.919.923.670	2.708.922.880		740.939.078		22.700.899.722
378	Kab. Pulo	21.266.237.118	1.532.225.500	15.919.923.670	2.976.058.958		25.424.000		21.266.237.118
379	Kab. Pungki Posing	22.404.428.963	1.532.225.500	15.919.923.670	4.023.154.203		189.723.872		22.404.428.963
380	Kab. Sigi	21.129.293.771	1.532.225.500	15.919.923.670	2.803.312.486		46.640.400		21.129.293.771
381	Kab. Tana Ulu	23.097.125.947	1.532.225.500	15.919.923.670	4.151.471.204		772.280.982		23.097.125.947
382	Provinsi Sulawesi Selatan	44.586.701.611	858.951	9.922.700.200	32.741.849.137		942.812.877		44.586.701.611
383	Kab. Barrang	4.343.619.422	74.630	862.843.100	2.723.326.010		26.931.071		4.343.619.422
384	Kab. Barru	4.281.507.994	74.630	862.843.100	2.785.600.687		13.610.362		4.281.507.994
385	Kab. Bona	4.899.170.091	74.630	862.843.100	3.287.899.248		47.118.108		4.899.170.091
386	Kab. Bulukamba	4.077.947.924	74.630	862.843.100	2.487.824.691		23.990.896		4.077.947.924
387	Kab. Bontolene	4.428.446.191	74.630	862.843.100	2.823.192.110		31.102.500		4.428.446.191
388	Kab. Gowa	4.532.960.383	74.630	862.843.100	2.723.326.010		236.275.032		4.532.960.383
389	Kab. Jeneponto	4.242.990.792	74.630	862.843.100	2.723.326.010		28.302.414		4.242.990.792
390	Kab. Lene	5.370.717.020	74.630	862.843.100	3.779.627.147		20.923.603		5.370.717.020
391	Kab. Lene Utara	4.913.568.614	74.630	862.843.100	3.223.843.907		27.568.562		4.913.568.614

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.C

No.	Daerah	Page	SUMBER DATA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Keluteraan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
392	Kab. Maros	4.425.812.533	74.630	862.843.100	2.788.751.210		82.910.004		4.425.812.533
393	Kab. Pangajene Kepulauan	4.338.641.333	74.630	862.843.100	2.990.404.818		4.084.200		4.338.641.333
394	Kab. Pangkep	4.246.022.479	74.630	862.843.100	2.723.326.010		29.234.129		4.246.022.479
395	Kab. Kepulauan Selayar	3.388.498.847	74.630	862.843.100	3.798.335.610		25.990.896		3.388.498.847
396	Kab. Selayar	4.664.514.964	74.630	862.843.100	3.074.410.710		3.389.300		4.664.514.964
397	Kab. Soppeng	4.449.076.171	74.630	862.843.100	3.723.326.011		32.387.821		4.449.076.171
398	Kab. Soppeng	4.342.980.186	74.630	862.843.100	2.723.326.010		42.981.874		4.342.980.186
399	Kab. Takalar	4.242.679.247	74.630	862.843.100	3.723.326.010		23.990.896		4.242.679.247
400	Kab. Tana Toraja	4.407.101.539	74.630	862.843.100	3.808.934.214		33.994.904		4.407.101.539
401	Kab. Wajo	23.349.400.979	1.717.272	19.843.299.798	3.775.058.510		25.990.896		23.349.400.979
402	Kab. Pangkajene	2.242.879.247	74.630	862.843.100	2.723.326.010		25.990.896		2.242.879.247
403	Kab. Tana Toraja	4.416.408.242	74.630	862.843.100	2.828.317.763		28.928.212		4.416.408.242
404	Kab. Makassar	4.473.840.723	74.630	862.843.100	2.723.326.010		30.096.729		4.473.840.723
405	Kab. Palopo	4.242.679.247	74.630	862.843.100	2.723.326.010		25.990.896		4.242.679.247
406	Kab. Lene Utara	70.108.015.181	74.630	862.843.100	68.191.871.484		332.991.266		70.108.015.181
407	Provinsi Sulawesi Barat	824.153.888	-	-	140.906.501		450.407.227		824.153.888
408	Kab. Mamasa	716.680.312	-	-	-		6.844.430		716.680.312
409	Kab. Mamuju	867.213.624	-	-	137.632.202		4.842.200		867.213.624
410	Kab. Mamuju Tengah	728.927.588	-	-	-		37.692.993		728.927.588
411	Kab. Polewali Mandar	754.809.242	-	-	46.400.200		2.667.600		754.809.242
412	Kab. Pangkajene	2.440.307.999	-	-	137.632.200		1.300.043.966		2.440.307.999
413	Kab. Pasangkayu	978.121.577	-	-	241.920.000		3.203.800		978.121.577
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	75.288.076.201	-	-	70.403.856.239		4.884.219.962		75.288.076.201

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.C

No.	Daerah	Page	SUMBER DATA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Keluteraan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
415	Kab. Buton	10.304.102.892	-	-	8.291.030.851		8.371.800		10.304.102.892
416	Kab. Buton	12.798.172.622	-	-	10.112.917.275		1.964.020.792		12.798.172.622
417	Kab. Kepulauan Makassar	3.265.725.211	-	-	8.612.427.093		52.033.527		3.265.725.211
418	Kab. Sidrap	85.045.559.829	-	-	82.969.870.392		1.274.654.792		85.045.559.829
419	Kab. Wajo	4.439.205.611	-	-	8.236.421.410		13.122.300		4.439.205.611
420	Kab. Wajo	4.419.452.928	-	-	8.665.017.210		7.934.700		4.419.452.928
421	Kab. Wajo	3.351.456.778	-	-	8.592.433.231		12.994.471		3.351.456.778
422	Kab. Wajo	3.280.142.674	-	-	8.526.421.411		32.486.678		3.280.142.674
423	Kab. Wajo	29.782.272.229	-	-	29.010.056.907		11.925.000		29.782.272.229
424	Kab. Wajo	22.298.949.194	-	-	22.128.993.862		364.792.424		22.298.949.194
425	Kab. Wajo	37.343.634.897	-	-	34.308.879.604		1.971.023.800		37.343.634.897
426	Kab. Wajo	4.479.275.799	-	-	8.564.069.667		8.826.000		4.479.275.799
427	Kab. Wajo	3.279.724.219	-	-	8.526.421.410		32.098.218		3.279.724.219
428	Kab. Wajo	10.792.328.148	-	-	10.040.044.722		10.100.800		10.792.328.148
429	Kab. Wajo	3.279.675.622	-	-	8.526.421.410		7.236.600		3.279.675.622
430	Kab. Wajo	3.291.296.508	-	-	8.526.421.410		7.236.600		3.291.296.508
431	Kab. Wajo	3.372.027.518	-	-	8.602.711.003		7.236.600		3.372.027.518
432	Provinsi Bali	-	-	-	-		-		-
433	Kab. Bangli	701.234.591	-	-	-		-		701.234.591
434	Kab. Bangli	701.234.591	-	-	-		-		701,234,591
435	Kab. Bangli	701.234.591	-	-	-		-		701,234,591
436	Kab. Gianyar	701.234.591	-	-	-		-		701,234,591
437	Kab. Jimbaran	701.234.591	-	-	-		-		701,234,591

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM Tahun Anggaran 2018 (Audited) (Dalam Rupiah)

Table with columns: No, Daerah, Page, Milyar Rupiah, Gas Bumi, Pertambangan Umum, Panas Bumi, Hasil Kebutuhan, Hasil Perikanan, Total. Rows include provinces like Kalimantan, Sulawesi, and Papua.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM Tahun Anggaran 2018 (Audited) (Dalam Rupiah)

Table with columns: No, Daerah, Page, Milyar Rupiah, Gas Bumi, Pertambangan Umum, Panas Bumi, Hasil Kebutuhan, Hasil Perikanan, Total. Rows include provinces like Sumatera, Jawa, Bali, and Nusa Tenggara.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM Tahun Anggaran 2018 (Audited) (Dalam Rupiah)

Table with columns: No, Daerah, Page, Milyar Rupiah, Gas Bumi, Pertambangan Umum, Panas Bumi, Hasil Kebutuhan, Hasil Perikanan, Total. Rows include provinces like Kalimantan, Sulawesi, Papua, and Maluku.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DATA ALAM						Total	
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kelutasaan	Hasil Perikanan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
307	Kab. Nabire	52.900.866.803	-	-	44.628.807.102	-	-	7.370.059.701	701.234.591	52.900.866.803
308	Kab. Paniai	48.300.796.581	-	-	46.656.460.008	-	-	943.101.988	701.234.591	48.300.796.581
309	Kab. Puncak Jaya	54.570.426.062	-	-	53.923.173.808	-	-	946.817.663	701.234.591	54.570.426.062
310	Kab. Kepulauan Tanimbar	44.548.403.301	-	-	42.905.611.303	-	-	888.905.329	701.234.591	44.495.749.023
311	Kab. Jayapura	44.536.201.737	-	-	42.905.611.303	-	-	926.482.871	701.234.591	44.533.308.905
312	Kab. Sarmi	59.354.181.562	-	-	46.653.211.630	-	-	1.146.192.900	701.234.591	48.502.940.021
313	Kab. Koroore	50.790.203.229	-	-	45.720.032.164	-	-	4.369.936.473	701.234.591	50.790.203.229
314	Kab. Teluk Wondol	46.175.770.847	-	-	46.370.268.900	-	-	1.004.267.748	701.234.591	46.175.770.847
315	Kab. Pegunungan Bintang	47.233.827.097	-	-	45.562.493.220	-	-	943.101.988	701.234.591	47.233.827.097
316	Kab. Tolikara	45.486.279.592	-	-	43.841.963.003	-	-	943.101.988	701.234.591	45.486.279.592
317	Kab. Sarmi Diguai	48.065.951.064	-	-	42.905.611.303	-	-	4.439.104.966	701.234.591	48.065.951.064
318	Kab. Halmahera	44.728.820.624	-	-	42.905.611.303	-	-	1.122.004.260	701.234.591	44.728.820.624
319	Kab. Amam	46.848.990.462	-	-	42.905.611.303	-	-	1.305.116.113	701.234.591	44.911.902.209
320	Kab. Waropen	47.109.833.798	-	-	45.463.211.972	-	-	1.422.239.100	701.234.591	46.308.675.603
321	Kab. Homborano Raya	52.359.771.101	-	-	47.902.759.603	-	-	2.059.989.900	701.234.591	51.563.984.994
322	Kab. Homborano Tengah	44.549.948.088	-	-	42.905.611.303	-	-	943.101.988	701.234.591	44.549.948.088
323	Kab. Halmahera	44.549.948.088	-	-	42.905.611.303	-	-	943.101.988	701.234.591	44.549.948.088
324	Kab. Diguai	44.549.948.088	-	-	42.905.611.303	-	-	943.101.988	701.234.591	44.549.948.088
325	Kab. Intan Jaya	47.009.983.008	-	-	45.363.648.431	-	-	943.101.988	701.234.591	47.009.983.008
326	Kab. Puncak	44.549.948.088	-	-	42.905.611.303	-	-	943.101.988	701.234.591	44.549.948.088
327	Kab. Dorek	44.549.948.088	-	-	42.905.611.303	-	-	943.101.988	701.234.591	44.549.948.088
328	Kab. Sorong	44.543.780.248	-	-	42.918.070.105	-	-	944.479.526	701.234.591	44.566.780.248
329	Provinsi Papua Barat	824.997.794.685	322.132.983.141	494.941.380.523	4.824.293.290	-	-	43.295.947.011	-	824.997.794.685

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DATA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Page	SUMBER DATA ALAM						Total	
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kelutasaan	Hasil Perikanan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
330	Kab. Sorong	68.180.167.408	19.309.390.492	43.077.707.079	371.753.160	-	-	858.843.300	701.234.591	68.318.930.623
331	Kab. Manokwari	47.411.397.334	2.942.249.834	39.679.466.673	2.483.362.083	-	-	1.605.084.149	701.234.591	47.411.397.334
332	Kab. Manokwari Selatan	43.792.070.642	2.942.249.834	39.679.466.673	232.393.083	-	-	1.066.083.482	701.234.591	44.821.927.603
333	Kab. Pak Paha	46.789.517.131	2.942.249.834	39.679.466.673	2.268.149.883	-	-	684.661.200	701.234.591	46.275.762.181
334	Kab. Sorong	44.732.836.902	2.942.249.834	39.679.466.673	232.393.083	-	-	1.134.290.961	701.234.591	44.709.035.142
335	Kab. Pegunungan Arfak	44.732.836.912	2.942.249.834	39.679.466.673	232.393.083	-	-	812.649.004	701.234.591	44.368.993.196
336	Kab. Sorong Selatan	49.929.400.777	2.942.249.834	39.679.466.673	234.798.524	-	-	6.231.851.133	701.234.591	49.929.400.777
337	Kab. Raja Ampat	49.729.160.519	2.388.224.914	39.679.466.673	4.864.402.137	-	-	466.512.600	701.234.591	48.979.940.935
338	Kab. Teluk Bintuni	493.220.019.794	19.632.220.741	470.253.268.850	4.746.231.780	-	-	2.472.944.800	701.234.591	499.322.019.794
339	Kab. Teluk Wondol	50.118.460.398	2.942.249.834	39.679.466.673	681.195.447	-	-	6.114.313.842	701.234.591	50.118.460.398
340	Kab. Tanimbar	44.734.640.201	2.942.249.834	39.679.466.673	232.393.083	-	-	626.844.900	701.234.591	44.182.189.081
341	Kab. Halmahera	45.941.419.545	2.942.249.834	39.679.466.673	232.393.084	-	-	850.935.900	701.234.591	44.806.980.083
342	Kab. Mimika	51.780.686.948	2.942.249.834	39.679.466.673	2.059.784.383	-	-	6.397.951.467	701.234.591	51.780.686.948
JUMLAH		45.135.219.307.212	13.385.216.482.401	9.210.412.221.749	19.807.904.298.240	832.936.590.394	-	1.812.576.022.183	357.622.899.445	45.086.648.924.282

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	5.787.725.000	5.787.725.000
2	Kab. Aceh Barat	263.078.000	263.078.000
3	Kab. Aceh Besar	908.754.000	908.754.000
4	Kab. Aceh Selatan	263.078.000	197.308.500
5	Kab. Aceh Singkil	263.078.000	-
6	Kab. Aceh Tengah	517.162.000	517.162.000
7	Kab. Aceh Tenggara	263.078.000	-
8	Kab. Aceh Timur	339.072.000	339.072.000
9	Kab. Aceh Utara	375.814.000	281.860.500
10	Kab. Bireuen	275.732.000	68.933.000
11	Kab. Pidie	555.386.000	555.386.000
12	Kab. Simeulue	263.078.000	-
13	Kota Banda Aceh	263.078.000	197.308.500
14	Kota Sabang	263.078.000	197.308.500
15	Kota Langsa	263.078.000	263.078.000
16	Kota Lhokseumawe	263.078.000	197.308.500
17	Kab. Nagan Raya	263.078.000	131.539.000
18	Kab. Aceh Jaya	263.078.000	263.078.000
19	Kab. Pidie Jaya	529.055.000	529.055.000
20	Kab. Aceh Barat Daya	263.078.000	131.539.000
21	Kab. Gayo Lues	4.483.236.000	4.483.236.000
22	Kab. Aceh Tamiang	263.078.000	263.078.000
23	Kab. Bener Meriah	1.837.389.000	1.837.389.000
24	Kota Subulussalam	263.078.000	263.078.000
25	Provinsi Sumatera Utara	6.445.996.000	6.445.996.000
26	Kab. Asahan	268.583.000	268.583.000
27	Kab. Dairi	1.269.294.000	1.269.294.000
28	Kab. Deli Serdang	2.442.249.000	2.442.249.000
29	Kab. Karo	397.750.000	397.750.000
30	Kab. Labuhan Batu	268.583.000	67.145.750
31	Kab. Langkat	268.583.000	268.583.000
32	Kab. Mandailing Natal	354.590.000	354.590.000
33	Kab. Nias	268.583.000	201.437.250
34	Kab. Simalungun	268.583.000	268.583.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	268.583.000	201.437.250
36	Kab. Tapanuli Tengah	268.583.000	268.583.000
37	Kab. Tapanuli Utara	313.180.000	313.180.000
38	Kab. Toba Samosir	268.583.000	201.437.250
39	Kota Binjai	268.583.000	134.291.500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
40	Kota Medan	441.632.000	331.224.000
41	Kota Pematang Siantar	2.213.968.000	2.213.968.000
42	Kota Sibolga	268.583.000	268.583.000
43	Kota Tanjung Balai	268.583.000	268.583.000
44	Kab. Batu Bara	268.583.000	268.583.000
45	Kab. Labuhan Batu Utara	268.583.000	201.437.250
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	268.583.000	201.437.250
47	Kab. Padang Lawas Utara	268.583.000	201.437.250
48	Kab. Padang Lawas	268.583.000	268.583.000
49	Kab. Nias Utara	268.583.000	201.437.250
50	Kab. Nias Barat	268.583.000	67.145.750
51	Kota Tebing Tinggi	268.583.000	268.583.000
52	Kota Padang Sidempuan	268.583.000	201.437.250
53	Kab. Pakpak Bharat	352.820.000	352.820.000
54	Kab. Nias Selatan	268.583.000	268.583.000
55	Kab. Humbang Hasundutan	809.182.000	606.886.500
56	Kab. Serdang Bedagai	268.583.000	268.583.000
57	Kab. Sumsut	268.583.000	201.437.250
58	Kota Gunungsitoli	268.583.000	201.437.250
59	Provinsi Sumatera Barat	4.091.621.000	4.091.621.000
60	Kab. Lima Puluh Kota	2.683.510.000	2.683.510.000
61	Kab. Agam	859.217.000	859.217.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	227.313.000	227.313.000
63	Kab. Padang Pariaman	227.313.000	227.313.000
64	Kab. Pasaman	557.848.000	557.848.000
65	Kab. Pesisir Selatan	227.313.000	170.484.750
66	Kab. Sijunjung	227.313.000	227.313.000
67	Kab. Solok	556.913.000	556.913.000
68	Kab. Tanah Datar	995.806.000	995.806.000
69	Kota Bukit Tinggi	227.313.000	227.313.000
70	Kota Padang Panjang	227.313.000	113.656.500
71	Kota Padang	227.313.000	227.313.000
72	Kota Payakumbuh	605.521.000	605.521.000
73	Kota Sawahlunto	560.559.000	560.559.000
74	Kota Solok	227.313.000	227.313.000
75	Kota Pariaman	227.313.000	227.313.000
76	Kab. Pasaman Barat	227.313.000	56.828.250
77	Kab. Dharmasraya	227.313.000	227.313.000
78	Kab. Solok Selatan	227.313.000	113.656.500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
79	Provinsi Riau	-	-
80	Kab. Bengkalis	-	-
81	Kab. Indragiri Hilir	-	-
82	Kab. Indragiri Hulu	-	-
83	Kab. Kampar	-	-
84	Kab. Kuantan Singingi	-	-
85	Kab. Pelalawan	-	-
86	Kab. Rokan Hilir	-	-
87	Kab. Rokan Hulu	-	-
88	Kab. Siak	-	-
89	Kota Dumai	-	-
90	Kota Pekanbaru	-	-
91	Kab. Kepulauan Meranti	-	-
92	Provinsi Kepulauan Riau	1.713.037.000	1.713.037.000
93	Kab. Bintan	285.507.000	142.753.500
94	Kab. Natuna	285.507.000	285.507.000
95	Kab. Karimun	285.507.000	285.507.000
96	Kota Batam	2.284.053.000	2.284.053.000
97	Kab. Kepulauan Anambas	285.507.000	285.507.000
98	Kota Tanjung Pinang	285.507.000	285.507.000
99	Kab. Lingga	285.507.000	285.507.000
100	Provinsi Jambi	2.513.649.000	1.885.236.750
101	Kab. Batanghari	251.365.000	251.365.000
102	Kab. Bungo	251.365.000	125.682.500
103	Kab. Kerinci	2.768.339.000	2.768.339.000
104	Kab. Merangin	488.389.000	244.194.500
105	Kab. Muaro Jambi	251.365.000	188.523.750
106	Kab. Sarolangun	251.365.000	188.523.750
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	251.365.000	251.365.000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	251.365.000	62.841.250
109	Kab. Tebo	251.365.000	251.365.000
110	Kota Jambi	251.365.000	251.365.000
111	Kota Sungai Penuh	597.534.000	448.150.500
112	Provinsi Sumatera Selatan	2.593.005.000	1.944.753.750
113	Kab. Lahat	162.063.000	-
114	Kab. Musi Banyuasin	162.063.000	-
115	Kab. Musi Rawas	162.063.000	-
116	Kab. Musi Rawas Utara	162.063.000	-
117	Kab. Muara Enim	162.063.000	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
118	Kab. Ogan Komering Ilir	162.063.000	81.031.500
119	Kab. Ogan Komering Ulu	162.063.000	-
120	Kota Palembang	162.063.000	40.515.750
121	Kota Pagar Alam	162.063.000	-
122	Kota Lubuk Linggau	162.063.000	-
123	Kota Prabumulih	162.063.000	-
124	Kab. Empat Lawang	162.063.000	162.063.000
125	Kab. Banyuasin	162.063.000	81.031.500
126	Kab. Ogan Ilir	162.063.000	121.547.250
127	Kab. OKU Timur	357.822.000	89.455.500
128	Kab. OKU Selatan	3.261.582.000	3.261.582.000
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	162.063.000	-
130	Provinsi Bangka Belitung	-	-
131	Kab. Bangka	-	-
132	Kab. Belitung	-	-
133	Kota Pangkal Pinang	-	-
134	Kab. Bangka Selatan	-	-
135	Kab. Bangka Tengah	-	-
136	Kab. Bangka Barat	-	-
137	Kab. Belitung Timur	-	-
138	Provinsi Bengkulu	-	-
139	Kab. Bengkulu Selatan	-	-
140	Kab. Bengkulu Utara	-	-
141	Kab. Rejang Lebong	-	-
142	Kota Bengkulu	-	-
143	Kab. Kaur	-	-
144	Kab. Seluma	-	-
145	Kab. Mukomuko	-	-
146	Kab. Lebong	-	-
147	Kab. Bengkulu Tengah	-	-
148	Kab. Kepahiang	-	-
149	Provinsi Lampung	3.623.000.000	3.623.000.000
150	Kab. Lampung Barat	3.216.913.000	3.216.913.000
151	Kab. Lampung Selatan	306.685.000	306.685.000
152	Kab. Lampung Tengah	354.045.000	354.045.000
153	Kab. Lampung Utara	332.066.000	332.066.000
154	Kab. Lampung Timur	917.492.000	917.492.000
155	Kab. Tanggamus	541.023.000	541.023.000
156	Kab. Tulang Bawang	241.533.000	241.533.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
157	Kab. Way Kanan	267.751.000	267.751.000
158	Kab. Pesawaran	467.420.000	467.420.000
159	Kab. Pesisir Barat	241.533.000	241.533.000
160	Kab. Pringsewu	574.018.000	574.018.000
161	Kab. Mesuji	241.533.000	241.533.000
162	Kab. Tulang Bawang Barat	249.986.000	187.489.500
163	Kota Bandar Lampung	241.533.000	241.533.000
164	Kota Metro	260.137.000	260.137.000
165	Provinsi DKI Jakarta	-	-
166	Provinsi Jawa Barat	106.557.067.000	106.557.067.000
167	Kab. Bandung	11.229.654.00	11.229.654.00
168	Kab. Bekasi	4.288.251.000	1.072.062.750
169	Kab. Bogor	4.311.913.000	4.311.913.000
170	Kab. Ciamis	4.467.324.000	4.467.324.000
171	Kab. Cianjur	4.621.396.000	4.621.396.000
172	Kab. Cirebon	4.957.147.000	4.957.147.000
173	Kab. Garut	26.420.902.00	26.420.902.00
174	Kab. Indramayu	4.336.185.000	4.336.185.000
175	Kab. Karawang	63.924.503.00	63.924.503.00
176	Kab. Kuningan	5.804.529.000	5.804.529.000
177	Kab. Majalengka	10.095.738.00	7.571.803.500
178	Kab. Pangandaran	4.527.935.000	4.527.935.000
179	Kab. Purwakarta	4.464.934.000	3.348.700.500
180	Kab. Subang	4.413.679.000	4.413.679.000
181	Kab. Sukabumi	4.333.418.000	4.333.418.000
182	Kab. Sumedang	38.582.754.00	38.582.754.00
183	Kab. Tasikmalaya	4.540.377.000	3.405.282.750
184	Kab. Bandung Barat	4.925.857.000	4.925.857.000
185	Kota Bandung	4.233.733.000	3.175.299.750
186	Kota Bekasi	4.233.512.000	3.175.134.000
187	Kota Bogor	4.270.252.000	4.270.252.000
188	Kota Cirebon	4.275.665.000	3.206.748.750
189	Kota Depok	4.235.871.000	-
190	Kota Sukabumi	4.285.081.000	3.213.810.750
191	Kota Cimahi	4.255.489.000	3.191.616.750
192	Kota Tasikmalaya	4.296.762.000	3.222.571.500
193	Kota Banjar	4.300.295.000	4.300.295.000
194	Provinsi Banten	-	-
195	Kab. Lebak	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
196	Kab. Pandeglang	-	-
197	Kab. Serang	-	-
198	Kab. Tangerang	-	-
199	Kota Cilegon	-	-
200	Kota Tangerang	-	-
201	Kota Serang	-	-
202	Kota Tangerang Selatan	-	-
203	Provinsi Jawa Tengah	203.078.428.000	203.078.428.000
204	Kab. Banjarnegara	6.410.840.000	6.410.840.000
205	Kab. Banyumas	5.980.898.000	5.980.898.000
206	Kab. Batang	6.170.847.000	6.170.847.000
207	Kab. Blora	8.830.957.000	8.830.957.000
208	Kab. Boyolali	17.631.437.00	17.631.437.00
209	Kab. Brebes	6.321.642.000	6.321.642.000
210	Kab. Cilacap	6.126.478.000	6.126.478.000
211	Kab. Demak	12.474.350.00	12.474.350.00
212	Kab. Grobogan	9.441.765.000	9.441.765.000
213	Kab. Jepara	6.325.997.000	6.325.997.000
214	Kab. Karanganyar	13.930.058.00	13.930.058.00
215	Kab. Kebumen	7.406.434.000	7.406.434.000
216	Kab. Kendal	17.958.292.00	17.958.292.00
217	Kab. Klaten	14.944.437.00	14.944.437.00
218	Kab. Kudus	147.894.137.000	147.894.137.000
219	Kab. Magelang	15.251.693.00	15.251.693.00
220	Kab. Pati	6.359.218.000	6.359.218.000
221	Kab. Pekalongan	6.035.205.000	6.035.205.000
222	Kab. Pemalang	6.984.403.000	6.984.403.000
223	Kab. Purbalingga	6.541.387.000	6.541.387.000
224	Kab. Purworejo	7.141.300.000	7.141.300.000
225	Kab. Rembang	18.612.460.00	18.612.460.00
226	Kab. Semarang	8.702.409.000	8.702.409.000
227	Kab. Sragen	6.906.202.000	6.906.202.000
228	Kab. Sukoharjo	7.018.220.000	7.018.220.000
229	Kab. Tegal	6.608.140.000	6.608.140.000
230	Kab. Temanggung	30.735.722.00	30.735.722.00
231	Kab. Wonogiri	6.928.844.000	6.928.844.000
232	Kab. Wonosobo	12.940.062.00	12.940.062.00
233	Kota Magelang	6.064.653.000	6.064.653.000
234	Kota Pekalongan	6.962.880.000	6.962.880.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
235	Kota Salatiga	5.973.923.000	5.973.923.000
236	Kota Semarang	7.680.546.000	7.680.546.000
237	Kota Surakarta	6.580.938.000	6.580.938.000
238	Kota Tegal	5.972.895.000	5.972.895.000
239	Provinsi DI Yogyakarta	4.903.054.000	4.903.054.000
240	Kab. Bantul	5.021.795.000	5.021.795.000
241	Kab. Gunung Kidul	1.584.686.000	1.584.686.000
242	Kab. Kulon Progo	1.225.764.000	1.225.764.000
243	Kab. Sleman	2.370.891.000	2.370.891.000
244	Kota Yogyakarta	1.237.323.000	1.237.323.000
245	Provinsi Jawa Timur	453.628.963.000	453.628.963.000
246	Kab. Bangkalan	13.189.491.000	13.189.491.000
247	Kab. Banyuwangi	15.338.964.000	15.338.964.000
248	Kab. Blitar	15.787.197.000	15.787.197.000
249	Kab. Bojonegoro	34.817.896.000	34.817.896.000
250	Kab. Bondowoso	25.557.195.000	25.557.195.000
251	Kab. Gresik	13.258.402.000	13.258.402.000
252	Kab. Jember	55.076.650.000	55.076.650.000
253	Kab. Jombang	31.354.594.000	31.354.594.000
254	Kab. Kediri	34.970.472.000	34.970.472.000
255	Kab. Lamongan	27.454.023.000	27.454.023.000
256	Kab. Lumajang	16.843.019.000	16.843.019.000
257	Kab. Madiun	13.929.340.000	13.929.340.000
258	Kab. Magetan	13.990.430.000	13.990.430.000
259	Kab. Malang	73.641.430.000	73.641.430.000
260	Kab. Mojokerto	13.934.023.000	13.934.023.000
261	Kab. Nganjuk	15.563.577.000	15.563.577.000
262	Kab. Ngawi	19.044.881.000	19.044.881.000
263	Kab. Pacitan	13.428.481.000	13.428.481.000
264	Kab. Pamekasan	45.183.528.000	45.183.528.000
265	Kab. Pasuruan	173.544.009.000	173.544.009.000
266	Kab. Ponorogo	14.641.525.000	14.641.525.000
267	Kab. Probolinggo	50.841.284.000	50.841.284.000
268	Kab. Sampang	17.819.022.000	17.819.022.000
269	Kab. Sidoarjo	13.656.908.000	13.656.908.000
270	Kab. Situbondo	27.456.765.000	27.456.765.000
271	Kab. Sumenep	33.255.724.000	33.255.724.000
272	Kab. Trenggalek	13.077.240.000	13.077.240.000
273	Kab. Tuban	19.657.858.000	19.657.858.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
274	Kab. Tulungagung	17.731.144.00	17.731.144.00
275	Kota Blitar	13.681.855.00	13.681.855.00
276	Kota Kediri	58.059.072.00	58.059.072.00
277	Kota Madiun	13.119.146.00	13.119.146.00
278	Kota Malang	25.675.809.00	25.675.809.00
279	Kota Mojokerto	13.538.254.00	13.538.254.00
280	Kota Pasuruan	13.054.050.00	13.054.050.00
281	Kota Probolinggo	13.115.695.00	13.115.695.00
282	Kota Surabaya	21.105.780.00	21.105.780.00
283	Kota Batu	13.072.850.00	13.072.850.00
284	Provinsi Kalimantan Barat	2.221.555.000	1.110.777.500
285	Kab. Bengkayang	170.889.000	85.444.500
286	Kab. Landak	170.889.000	85.444.500
287	Kab. Kapuas Hulu	170.889.000	85.444.500
288	Kab. Ketapang	2.962.075.000	1.481.037.500
289	Kab. Pontianak	170.889.000	85.444.500
290	Kab. Sambas	170.889.000	85.444.500
291	Kab. Sanggau	170.889.000	85.444.500
292	Kab. Sintang	170.889.000	85.444.500
293	Kota Pontianak	170.889.000	85.444.500
294	Kota Singkawang	170.889.000	85.444.500
295	Kab. Kayong Utara	170.889.000	85.444.500
296	Kab. Kubu Raya	170.889.000	85.444.500
297	Kab. Sekadau	170.889.000	85.444.500
298	Kab. Melawi	170.889.000	85.444.500
299	Provinsi Kalimantan Tengah	2.013.243.000	2.013.243.000
300	Kab. Barito Selatan	183.023.000	183.023.000
301	Kab. Barito Utara	183.023.000	-
302	Kab. Kapuas	183.023.000	91.511.500
303	Kab. Kotawaringin Barat	736.813.000	736.813.000
304	Kab. Kotawaringin Timur	188.926.000	188.926.000
305	Kota Palangkaraya	183.023.000	183.023.000
306	Kab. Barito Timur	183.023.000	-
307	Kab. Murung Raya	183.023.000	183.023.000
308	Kab. Pulang Pisau	1.758.590.000	879.295.000
309	Kab. Gunung Mas	183.023.000	183.023.000
310	Kab. Lamandau	183.023.000	-
311	Kab. Sukamara	183.023.000	183.023.000
312	Kab. Katingan	183.023.000	45.755.750

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
313	Kab. Seruyan	183.023.000	-
314	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-
315	Kab. Banjar	-	-
316	Kab. Barito Kuala	-	-
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	-
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-
319	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-
320	Kab. Kotabaru	-	-
321	Kab. Tabalong	-	-
322	Kab. Tanah Laut	-	-
323	Kab. Tapin	-	-
324	Kota Banjarbaru	-	-
325	Kota Banjarmasin	-	-
326	Kab. Balangan	-	-
327	Kab. Tanah Bumbu	-	-
328	Provinsi Kalimantan Timur	-	-
329	Kab. Berau	-	-
330	Kab. Kutai Kartanegara	-	-
331	Kab. Kutai Barat	-	-
332	Kab. Kutai Timur	-	-
333	Kab. Mahakam Ulu	-	-
334	Kab. Pasir	-	-
335	Kota Balikpapan	-	-
336	Kota Bontang	-	-
337	Kota Samarinda	-	-
338	Kab. Penajam Paser Utara	-	-
339	Provinsi Kalimantan Utara	-	-
340	Kab. Bulungan	-	-
341	Kab. Malinau	-	-
342	Kab. Nunukan	-	-
343	Kab. Tana Tidung	-	-
344	Kota Tarakan	-	-
345	Provinsi Sulawesi Utara	-	-
346	Kab. Bolaang Mongondow	-	-
347	Kab. Minahasa	-	-
348	Kab. Sangihe	-	-
349	Kota Bitung	-	-
350	Kota Manado	-	-
351	Kab. Kepulauan Talaud	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
352	Kab. Minahasa Selatan	-	-
353	Kab. Minahasa Tenggara	-	-
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	-	-
355	Kota Kotamubagu	-	-
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-
358	Kota Tomohon	-	-
359	Kab. Minahasa Utara	-	-
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-
361	Provinsi Gorontalo	-	-
362	Kab. Boalemo	-	-
363	Kab. Gorontalo	-	-
364	Kota Gorontalo	-	-
365	Kab. Pohuwato	-	-
366	Kab. Gorontalo Utara	-	-
367	Kab. Bone Bolango	-	-
368	Provinsi Sulawesi Tengah	2.195.087.000	2.195.087.000
369	Kab. Banggai	803.621.000	602.715.750
370	Kab. Banggai Laut	219.509.000	219.509.000
371	Kab. Banggai Kepulauan	219.509.000	219.509.000
372	Kab. Buol	219.509.000	219.509.000
373	Kab. Toli-Toli	219.509.000	164.631.750
374	Kab. Donggala	219.509.000	219.509.000
375	Kab. Morowali	219.509.000	164.631.750
376	Kab. Morowali Utara	219.509.000	219.509.000
377	Kab. Poso	219.509.000	164.631.750
378	Kota Palu	1.756.070.000	1.756.070.000
379	Kab. Parigi Moutong	367.092.000	367.092.000
380	Kab. Sigi	219.509.000	219.509.000
381	Kab. Tojo Una Una	219.509.000	164.631.750
382	Provinsi Sulawesi Selatan	5.056.141.000	5.056.141.000
383	Kab. Bantaeng	303.897.000	303.897.000
384	Kab. Barru	239.874.000	239.874.000
385	Kab. Bone	819.711.000	819.711.000
386	Kab. Bulukumba	428.601.000	428.601.000
387	Kab. Enrekang	219.833.000	219.833.000
388	Kab. Gowa	219.833.000	219.833.000
389	Kab. Jeneponto	234.864.000	234.864.000
390	Kab. Luwu	241.158.000	241.158.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
391	Kab. Luwu Utara	219.833.000	219.833.000
392	Kab. Maros	219.833.000	219.833.000
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	219.833.000	219.833.000
394	Kab. Pinrang	219.833.000	219.833.000
395	Kab. Selayar	219.833.000	219.833.000
396	Kab. Sidenreng Rappang	219.833.000	219.833.000
397	Kab. Sinjai	1.772.176.000	1.772.176.000
398	Kab. Soppeng	4.220.593.000	4.220.593.000
399	Kab. Takalar	219.833.000	219.833.000
400	Kab. Tana Toraja	219.833.000	219.833.000
401	Kab. Wajo	239.318.000	239.318.000
402	Kota Pare-pare	219.833.000	219.833.000
403	Kab. Toraja Utara	219.833.000	219.833.000
404	Kota Makassar	219.833.000	219.833.000
405	Kota Palopo	219.833.000	219.833.000
406	Kab. Luwu Timur	219.833.000	219.833.000
407	Provinsi Sulawesi Barat	-	-
408	Kab. Majene	-	-
409	Kab. Mamuju	-	-
410	Kab. Mamuju Tengah	-	-
411	Kab. Polewali Mandar	-	-
412	Kab. Mamasa	-	-
413	Kab. Pasangkayu	-	-
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-
415	Kab. Buton	-	-
416	Kab. Konawe	-	-
417	Kab. Konawe Kepulauan	-	-
418	Kab. Kolaka	-	-
419	Kab. Kolaka Timur	-	-
420	Kab. Muna	-	-
421	Kota Kendari	-	-
422	Kota Bau-bau	-	-
423	Kab. Konawe Selatan	-	-
424	Kab. Bombana	-	-
425	Kab. Konawe Utara	-	-
426	Kab. Buton Utara	-	-
427	Kab. Wakatobi	-	-
428	Kab. Kolaka Utara	-	-
429	Kab. Muna Barat	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
430	Kab. Buton Tengah	-	-
431	Kab. Buton Selatan	-	-
432	Provinsi Bali	3.548.633.000	3.548.633.000
433	Kab. Badung	443.579.000	332.684.250
434	Kab. Bangli	503.459.000	503.459.000
435	Kab. Buleleng	3.366.514.000	3.366.514.000
436	Kab. Gianyar	1.536.554.000	1.536.554.000
437	Kab. Jembrana	499.529.000	499.529.000
438	Kab. Karangasem	599.771.000	599.771.000
439	Kab. Klungkung	443.579.000	443.579.000
440	Kab. Tabanan	443.579.000	443.579.000
441	Kota Denpasar	443.579.000	443.579.000
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	74.734.327.148	74.734.327.148
443	Kab. Bima	8.331.598.000	8.331.598.000
444	Kab. Dompu	5.343.594.000	5.343.594.000
445	Kab. Lombok Barat	13.327.700.72	13.327.700.72
446	Kab. Lombok Tengah	41.641.222.88	41.641.222.88
447	Kab. Lombok Timur	53.417.315.59	53.417.315.59
448	Kab. Sumbawa	8.266.351.032	8.266.351.032
449	Kota Mataram	31.229.352.60	31.229.352.60
450	Kab. Lombok Utara	8.453.757.530	8.453.757.530
451	Kota Bima	1.761.805.000	1.761.805.000
452	Kab. Sumbawa Barat	2.593.671.474	2.593.671.474
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	4.741.989.000	3.556.491.750
454	Kab. Alor	545.116.000	-
455	Kab. Belu	286.438.000	-
456	Kab. Ende	225.809.000	-
457	Kab. Flores Timur	1.301.402.000	325.350.500
458	Kab. Kupang	309.662.000	154.831.000
459	Kab. Lembata	466.613.000	-
460	Kab. Malaka	225.809.000	-
461	Kab. Manggarai	1.809.766.000	-
462	Kab. Ngada	236.512.000	59.128.000
463	Kab. Sikka	903.646.000	-
464	Kab. Sumba Barat	236.512.000	236.512.000
465	Kab. Sumba Timur	375.643.000	93.910.750
466	Kab. Timor Tengah Selatan	259.681.000	-
467	Kab. Timor Tengah Utara	225.809.000	-
468	Kota Kupang	225.809.000	-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
469	Kab. Rote Ndao	225.809.000	-
470	Kab. Nagekeo	743.110.000	185.777.500
471	Kab. Sumba Tengah	225.809.000	-
472	Kab. Sumba Barat Daya	1.076.651.000	807.488.250
473	Kab. Manggarai Timur	479.082.000	479.082.000
474	Kab. Sabu Raijua	247.214.000	-
475	Kab. Manggarai Barat	432.740.000	108.185.000
476	Provinsi Maluku	-	-
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-
478	Kab. Maluku Tengah	-	-
479	Kab. Maluku Tenggara	-	-
480	Kab. Pulau Buru	-	-
481	Kota Ambon	-	-
482	Kab. Seram Bagian Barat	-	-
483	Kab. Seram Bagian Timur	-	-
484	Kab. Maluku Barat Daya	-	-
485	Kab. Buru Selatan	-	-
486	Kab. Kepulauan Aru	-	-
487	Kota Tual	-	-
488	Provinsi Maluku Utara	-	-
489	Kab. Halmahera Tengah	-	-
490	Kab. Halmahera Barat	-	-
491	Kota Ternate	-	-
492	Kab. Halmahera Timur	-	-
493	Kota Tidore Kepulauan	-	-
494	Kab. Kepulauan Sula	-	-
495	Kab. Pulau Morotai	-	-
496	Kab. Pulau Taliabu	-	-
497	Kab. Halmahera Selatan	-	-
498	Kab. Halmahera Utara	-	-
499	Provinsi Papua	-	-
500	Kab. Yalimo	-	-
501	Kab. Lanny Jaya	-	-
502	Kab. Biak Numfor	-	-
503	Kab. Jayapura	-	-
504	Kab. Jayawijaya	-	-
505	Kab. Merauke	-	-
506	Kab. Mimika	-	-
507	Kab. Nabire	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
508	Kab. Paniai	-	-
509	Kab. Puncak Jaya	-	-
510	Kab. Kepulauan Yapen	-	-
511	Kota Jayapura	-	-
512	Kab. Sarmi	-	-
513	Kab. Keerom	-	-
514	Kab. Yahukimo	-	-
515	Kab. Pegunungan Bintang	-	-
516	Kab. Tolikara	-	-
517	Kab. Boven Digoel	-	-
518	Kab. Mappi	-	-
519	Kab. Asmat	-	-
520	Kab. Waropen	-	-
521	Kab. Mamberamo Raya	-	-
522	Kab. Mamberamo Tengah	-	-
523	Kab. Nduga	-	-
524	Kab. Dogiyai	-	-
525	Kab. Intan Jaya	-	-
526	Kab. Puncak	-	-
527	Kab. Deiyai	-	-
528	Kab. Supiori	-	-
529	Provinsi Papua Barat	-	-
530	Kab. Sorong	-	-
531	Kab. Manokwari	-	-
532	Kab. Manokwari Selatan	-	-
533	Kab. Fak Fak	-	-
534	Kota Sorong	-	-
535	Kab. Pegunungan Arfak	-	-
536	Kab. Sorong Selatan	-	-
537	Kab. Raja Ampat	-	-
538	Kab. Teluk Bintuni	-	-
539	Kab. Teluk Wondama	-	-
540	Kab. Tambrauw	-	-
541	Kab. Maybrat	-	-
542	Kab. Kaimana	-	-
JUMLAH		2.964.808.087.995	2.922.191.165.245

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	2.060.263.235.000	2.060.263.235.000	1.576.401.640.000	1.471.613.112.593
2	Kab. Aceh Barat	570.763.544.000	570.763.544.000	189.325.546.000	180.969.637.761
3	Kab. Aceh Besar	713.344.629.000	713.344.629.000	241.500.986.000	198.391.154.414
4	Kab. Aceh Selatan	641.605.359.000	641.605.359.000	324.209.737.000	315.285.379.749
5	Kab. Aceh Singkil	441.266.415.000	441.266.415.000	138.467.819.000	119.272.244.615
6	Kab. Aceh Tengah	603.737.495.000	603.737.495.000	221.449.494.000	210.625.435.066
7	Kab. Aceh Tenggara	586.091.423.000	586.091.423.000	199.342.084.000	151.157.752.221
8	Kab. Aceh Timur	786.034.858.000	786.034.858.000	199.139.509.000	192.612.259.187
9	Kab. Aceh Utara	847.191.268.000	847.191.268.000	372.779.369.000	364.373.142.302
10	Kab. Bireuen	802.618.535.000	802.618.535.000	273.347.486.000	265.190.124.110
11	Kab. Pidie	794.948.892.000	794.948.892.000	309.703.441.000	293.595.826.388
12	Kab. Simeulue	444.554.705.000	444.554.705.000	140.952.070.000	132.388.792.225
13	Kota Banda Aceh	591.711.772.000	591.711.772.000	129.961.032.000	116.595.706.007
14	Kota Sabang	350.863.359.000	350.863.359.000	134.168.011.000	127.162.931.061
15	Kota Lingsa	444.012.586.000	444.012.586.000	134.356.202.000	131.946.202.463
16	Kota Lhokseumawe	459.628.037.000	459.628.037.000	102.792.279.000	93.948.851.900
17	Kab. Nagan Raya	507.106.599.000	507.106.599.000	149.202.595.000	146.257.947.462
18	Kab. Aceh Jaya	421.315.269.000	421.315.269.000	153.015.629.000	150.114.010.462
19	Kab. Pidie Jaya	420.639.477.000	420.639.477.000	184.146.496.000	177.599.868.091
20	Kab. Aceh Barat Daya	451.309.794.000	451.309.794.000	201.210.730.000	192.663.131.445
21	Kab. Gayo Lues	462.943.021.000	462.943.021.000	170.306.857.000	166.695.480.399
22	Kab. Aceh Yamang	532.641.693.000	532.641.693.000	172.342.579.000	161.435.948.924
23	Kab. Bener Meriah	448.988.545.000	448.988.545.000	121.935.612.000	117.742.883.739
24	Kota Subulussalam	345.335.126.000	345.335.126.000	79.444.673.000	73.710.148.823
25	Provinsi Sumatera Utara	2.629.224.545.000	2.629.224.545.000	4.082.135.880.000	3.929.216.182.249
26	Kab. Asahan	877.794.641.000	877.794.641.000	247.058.157.000	231.933.908.489
27	Kab. Dairi	612.745.792.000	612.745.792.000	169.332.568.000	154.914.774.714
28	Kab. Deli Serdang	1.468.561.952.000	1.468.561.952.000	466.075.998.000	455.242.047.339
29	Kab. Karo	738.378.312.000	738.378.312.000	211.431.929.000	184.960.051.262
30	Kab. Labuhanbatu	684.408.474.000	684.408.474.000	209.425.055.000	199.352.228.211
31	Kab. Langkat	1.179.392.864.000	1.179.392.864.000	414.927.706.000	392.914.470.349
32	Kab. Mandailing Natal	783.200.132.000	783.200.132.000	253.694.038.000	248.799.513.596
33	Kab. Nias	430.091.477.000	430.091.477.000	186.691.760.000	170.260.660.801
34	Kab. Simalungun	1.209.194.704.000	1.209.194.704.000	396.528.444.000	364.957.717.597
35	Kab. Tapanuli Selatan	644.304.467.000	644.304.467.000	166.840.616.000	163.894.825.061
36	Kab. Tapanuli Tengah	627.027.553.000	627.027.553.000	257.399.477.000	241.018.512.560
37	Kab. Tapanuli Utara	639.394.068.000	639.394.068.000	203.769.695.000	191.102.620.448
38	Kab. Toba Samosir	528.490.802.000	528.490.802.000	168.007.248.000	158.583.010.253
39	Kota Binjai	564.377.582.000	564.377.582.000	137.072.598.000	129.936.136.339
40	Kota Medan	1.583.624.375.000	1.583.624.375.000	388.300.386.000	356.788.804.200
41	Kota Pematang Siantar	583.106.207.000	583.106.207.000	196.049.598.000	188.366.544.385
42	Kota Siboga	405.554.215.000	405.554.215.000	96.453.637.000	90.935.128.378
43	Kota Tanjung Balai	418.666.416.000	418.666.416.000	95.262.968.000	90.844.606.170
44	Kab. Batu Bara	602.464.355.000	602.464.355.000	165.400.037.000	151.358.139.644
45	Kab. Labuhanbatu Utara	588.021.836.000	588.021.836.000	245.247.454.000	235.115.494.290
46	Kab. Labuhanbatu Selatan	504.525.796.000	504.525.796.000	160.723.218.000	147.933.110.879
47	Kab. Padang Lawas Utara	537.469.609.000	537.469.609.000	147.681.324.000	138.216.844.240
48	Kab. Padang Lawas	521.562.942.000	521.562.942.000	160.101.069.000	157.464.009.272
49	Kab. Nias Utara	413.837.391.000	413.837.391.000	146.587.743.000	136.489.812.774

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
50	Kab. Nias Barat	348.251.352.000	348.251.352.000	214.083.960.000	206.066.316.839
51	Kota Tebing Tinggi	409.399.195.000	409.399.195.000	120.547.171.000	114.868.858.164
52	Kota Padang Sidempuan	498.768.033.000	498.768.033.000	135.687.423.000	124.683.309.074
53	Kab. Pakpak Bharat	339.271.690.000	339.271.690.000	76.630.526.000	71.532.318.937
54	Kab. Nias Selatan	556.410.357.000	556.410.357.000	205.201.189.000	199.651.552.996
55	Kab. Humbang Hasundutan	523.818.445.000	523.818.445.000	147.110.998.000	142.133.738.492
56	Kab. Serdang Bedagai	763.943.386.000	763.943.386.000	323.742.306.000	310.954.071.433
57	Kab. Sumsel	453.737.230.000	453.737.230.000	145.102.356.000	139.883.498.974
58	Kota Gunungstali	426.758.929.000	426.758.929.000	113.748.744.000	109.906.226.088
59	Provinsi Sumatera Barat	2.014.646.639.000	2.014.646.639.000	1.825.208.546.000	1.763.791.244.387
60	Kab. Lima Puluh Kota	747.073.168.000	747.073.168.000	254.372.166.000	236.061.072.373
61	Kab. Agam	813.474.914.000	813.474.914.000	284.359.411.000	262.382.906.117
62	Kab. Kepulauan Mentawai	610.939.918.000	610.939.918.000	170.723.124.000	152.970.429.302
63	Kab. Padang Pariaman	769.827.010.000	769.827.010.000	325.744.165.000	306.685.313.801
64	Kab. Pasaman	596.083.486.000	596.083.486.000	162.181.140.000	147.062.049.488
65	Kab. Pesisir Selatan	838.100.134.000	838.100.134.000	278.271.663.000	265.159.690.710
66	Kab. Sijunjung	548.573.107.000	548.573.107.000	151.719.988.000	139.505.882.043
67	Kab. Solok	710.962.915.000	710.962.915.000	230.998.945.000	211.524.645.912
68	Kab. Tanah Datar	695.555.745.000	695.555.745.000	273.243.829.000	237.114.024.294
69	Kota Bukit Tinggi	450.905.882.000	450.905.882.000	66.569.182.000	59.565.781.339
70	Kota Padang Panjang	375.436.356.000	375.436.356.000	67.562.403.000	57.424.847.367
71	Kota Padang	1.100.370.559.000	1.100.370.559.000	284.775.700.000	263.030.961.104
72	Kota Payakumbuh	437.696.934.000	437.696.934.000	105.347.474.000	99.022.990.283
73	Kota Sawahlunto	375.131.128.000	375.131.128.000	82.041.001.000	64.415.138.140
74	Kota Solok	398.106.262.000	398.106.262.000	78.922.163.000	71.968.447.294
75	Kota Pariaman	415.241.327.000	415.241.327.000	91.269.676.000	83.096.934.607
76	Kab. Pasaman Barat	644.333.727.000	644.333.727.000	232.170.727.000	217.224.642.075
77	Kab. Dharmasraya	502.298.085.000	502.298.085.000	193.590.735.000	187.705.190.546
78	Kab. Solok Selatan	480.406.179.000	480.406.179.000	147.086.555.000	137.314.855.550
79	Provinsi Riau	1.465.261.007.000	1.465.261.007.000	1.728.536.844.000	1.635.090.586.303
80	Kab. Bengkalis	345.070.716.000	345.070.716.000	218.058.065.000	183.801.494.841
81	Kab. Indragiri Hilir	918.602.922.000	918.602.922.000	241.540.908.000	221.058.798.121
82	Kab. Indragiri Hulu	646.609.433.000	646.609.433.000	198.259.495.000	162.440.212.758
83	Kab. Kampar	774.370.036.000	774.370.036.000	332.767.162.000	305.292.493.019
84	Kab. Kuantan Singingi	618.561.583.000	618.561.583.000	214.660.548.000	202.328.743.402
85	Kab. Pelalawan	610.599.637.000	610.599.637.000	169.518.518.000	147.794.646.899
86	Kab. Rokan Hilir	432.022.856.000	432.022.856.000	199.517.128.000	168.071.481.411
87	Kab. Rokan Hulu	654.291.480.000	654.291.480.000	247.278.920.000	234.938.355.856
88	Kab. Siak	323.293.793.000	323.293.793.000	202.931.802.000	191.890.258.298
89	Kota Dumai	427.188.089.000	427.188.089.000	182.864.333.000	166.331.273.455
90	Kota Pekanbaru	798.138.148.000	798.138.148.000	235.800.179.000	212.931.929.581
91	Kab. Kepulauan Meranti	403.426.873.000	403.426.873.000	172.997.560.000	158.755.443.046
92	Provinsi Kepulauan Riau	1.150.516.796.000	1.150.516.796.000	598.868.305.000	581.563.538.822
93	Kab. Bintan	484.586.669.000	484.586.669.000	123.177.913.000	115.572.160.116
94	Kab. Natuna	368.413.963.000	368.413.963.000	105.912.412.000	100.102.868.329
95	Kab. Karimun	403.184.262.000	403.184.262.000	223.948.899.000	210.593.110.332
96	Kota Batam	599.074.016.000	599.074.016.000	174.229.056.000	162.160.638.526
97	Kab. Kepulauan Anambas	364.336.885.000	364.336.885.000	109.115.713.000	102.809.320.682
98	Kota Tanjung Pinang	457.366.176.000	457.366.176.000	105.169.584.000	100.173.268.328

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
99	Kab. Lingga	455.758.203.000	455.758.203.000	120.294.283.000	114.405.753.614
100	Provinsi Jambi	1.399.367.134.000	1.399.367.134.000	984.106.096.000	985.300.581.842
101	Kab. Batanghari	605.739.426.000	605.739.426.000	155.943.284.000	141.430.445.078
102	Kab. Bungo	635.999.293.000	635.999.293.000	201.368.830.000	191.980.404.384
103	Kab. Kerinci	589.202.611.000	589.202.611.000	163.055.528.000	155.138.708.215
104	Kab. Merangin	718.849.295.000	718.849.295.000	214.271.029.000	194.318.877.142
105	Kab. Muaro Jambi	670.341.091.000	670.341.091.000	202.418.501.000	175.375.563.818
106	Kab. Sarolangun	583.152.387.000	583.152.387.000	161.113.327.000	143.747.196.458
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	506.589.288.000	506.589.288.000	147.210.829.000	142.753.764.049
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	540.400.531.000	540.400.531.000	210.425.771.000	196.922.022.086
109	Kab. Tebo	582.313.417.000	582.313.417.000	139.842.780.000	129.648.054.971
110	Kota Jambi	714.783.378.000	714.783.378.000	291.823.567.000	277.298.116.284
111	Kota Sungai Penuh	422.532.652.000	422.532.652.000	103.162.020.000	92.350.598.379
112	Provinsi Sumatera Selatan	1.097.897.817.000	1.097.897.817.000	2.239.022.240.000	2.170.012.209.131
113	Kab. Lahat	696.379.856.000	696.379.856.000	228.458.230.000	221.396.196.527
114	Kab. Musi Banyuasin	370.826.979.000	370.826.979.000	264.004.132.000	258.339.719.486
115	Kab. Musi Rawas	639.753.278.000	639.753.278.000	280.633.217.000	274.429.844.260
116	Kab. Musi Rawas Utara	383.935.458.000	383.935.458.000	201.842.840.000	186.721.499.530
117	Kab. Muara Enim	661.337.068.000	661.337.068.000	243.024.261.000	235.688.695.036
118	Kab. Ogan Komering Ilir	1.053.840.757.000	1.053.840.757.000	380.678.836.000	369.716.929.562
119	Kab. Ogan Komering Ulu	636.233.972.000	636.233.972.000	192.582.480.000	183.161.504.401
120	Kota Palembang	1.269.426.417.000	1.269.426.417.000	497.046.815.000	481.900.223.639
121	Kota Pagar Alam	391.943.478.000	391.943.478.000	131.337.080.000	113.818.849.262
122	Kota Lubuk Linggau	449.082.849.000	449.082.849.000	132.148.074.000	124.671.818.972
123	Kota Prabumulih	416.312.645.000	416.312.645.000	100.964.525.000	97.780.605.399
124	Kab. Empat Lawang	424.811.343.000	424.811.343.000	193.137.833.000	187.918.012.283
125	Kab. Banyuasin	933.631.693.000	933.631.693.000	339.674.743.000	319.248.731.658
126	Kab. Ogan Ilir	623.348.780.000	623.348.780.000	249.132.726.000	239.900.136.052
127	Kab. OKU Timur	767.167.031.000	767.167.031.000	281.840.479.000	268.448.705.478
128	Kab. OKU Selatan	598.063.061.000	598.063.061.000	183.972.625.000	176.993.703.944
129	Kab. Penakal Abab Lematang Ilir	317.402.008.000	317.402.008.000	164.622.621.000	152.733.330.695
130	Provinsi Bangka Belitung	1.018.673.218.000	1.018.673.218.000	477.958.706.000	497.248.795.861
131	Kab. Bangka	529.693.057.000	529.693.057.000	158.979.164.000	146.711.843.788
132	Kab. Belitung	480.560.681.000	480.560.681.000	148.235.984.000	136.413.967.928
133	Kota Pangkal Pinang	443.476.956.000	443.476.956.000	164.883.946.000	157.626.702.360
134	Kab. Bangka Selatan	466.182.109.000	466.182.109.000	156.062.373.000	148.733.631.210
135	Kab. Bangka Tengah	439.128.449.000	439.128.449.000	131.553.770.000	127.994.070.259
136	Kab. Bangka Barat	445.168.706.000	445.168.706.000	134.617.979.000	125.830.480.976
137	Kab. Belitung Timur	440.265.288.000	440.265.288.000	113.777.568.000	100.079.772.515
138	Provinsi Bengkulu	1.301.538.847.000	1.301.538.847.000	624.124.381.000	596.924.819.743
139	Kab. Bengkulu Selatan	554.227.555.000	554.227.555.000	157.045.584.000	151.473.245.759
140	Kab. Bengkulu Utara	625.146.185.000	625.146.185.000	188.106.625.000	178.507.519.724
141	Kab. Rejang Lebong	593.702.491.000	593.702.491.000	207.561.174.000	199.934.328.125
142	Kota Bengkulu	671.384.345.000	671.384.345.000	163.657.480.000	157.409.377.766
143	Kab. Kaur	435.518.398.000	435.518.398.000	112.497.595.000	102.413.423.004
144	Kab. Seluma	497.868.275.000	497.868.275.000	177.567.584.000	165.274.694.591
145	Kab. Mukomuko	492.562.518.000	492.562.518.000	122.923.745.000	118.315.585.553
146	Kab. Lebong	405.048.287.000	405.048.287.000	100.669.737.000	94.531.189.096
147	Kab. Bengkulu Tengah	430.023.533.000	430.023.533.000	121.812.643.000	117.192.906.321

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
148	Kab. Kepulauan	414.396.205.000	414.396.205.000	110.689.648.000	106.571.947.541
149	Provinsi Lampung	1.857.043.487.000	1.857.043.487.000	2.195.260.835.000	2.132.385.102.832
150	Kab. Lampung Barat	521.743.958.000	521.743.958.000	312.627.914.000	307.395.275.747
151	Kab. Lampung Selatan	1.019.207.779.000	1.019.207.779.000	353.878.952.000	348.372.103.639
152	Kab. Lampung Tengah	1.319.480.688.000	1.319.480.688.000	457.631.283.000	437.002.533.599
153	Kab. Lampung Utara	949.774.837.000	949.774.837.000	308.458.247.000	226.503.513.121
154	Kab. Lampung Timur	1.069.168.109.000	1.069.168.109.000	363.143.901.000	355.380.212.579
155	Kab. Tanggamus	778.605.786.000	778.605.786.000	247.878.372.000	240.167.619.173
156	Kab. Tulang Bawang	612.112.587.000	612.112.587.000	273.610.957.000	256.723.192.931
157	Kab. Way Kanan	655.518.878.000	655.518.878.000	344.457.373.000	337.441.152.282
158	Kab. Pesisir Selatan	669.276.831.000	669.276.831.000	255.672.043.000	250.821.838.688
159	Kab. Pesisir Barat	417.412.494.000	417.412.494.000	141.842.215.000	133.816.358.062
160	Kab. Pingsawa	621.967.450.000	621.967.450.000	203.636.701.000	196.385.795.591
161	Kab. Mesuji	446.272.067.000	446.272.067.000	144.700.488.000	138.886.646.742
162	Kab. Tulang Bawang Barat	463.478.442.000	463.478.442.000	239.852.919.000	237.255.143.339
163	Kota Bandar Lampung	1.034.730.849.000	1.034.730.849.000	270.866.364.000	264.908.878.825
164	Kota Metro	455.732.157.000	455.732.157.000	145.660.812.000	141.554.086.855
165	Provinsi DKI Jakarta	-	-	3.136.029.255.000	2.645.603.991.214
166	Provinsi Jawa Barat	3.023.552.986.000	3.023.552.986.000	9.745.960.170.000	9.379.847.926.040
167	Kab. Bandung	2.060.202.697.000	2.060.202.697.000	792.150.938.000	737.019.669.306
168	Kab. Bekasi	1.152.893.281.000	1.152.893.281.000	378.522.198.000	336.464.448.595
169	Kab. Bogor	1.919.023.527.000	1.919.023.527.000	670.569.805.000	637.617.713.872
170	Kab. Ciamis	1.183.061.992.000	1.183.061.992.000	416.875.558.000	405.372.512.431
171	Kab. Cianjur	1.548.376.287.000	1.548.376.287.000	642.510.404.000	617.131.832.222
172	Kab. Cirebon	1.500.538.688.000	1.500.538.688.000	507.436.424.000	482.734.102.661
173	Kab. Garut	1.776.936.655.000	1.776.936.655.000	690.598.890.000	658.897.211.119
174	Kab. Indramayu	1.371.769.951.000	1.371.769.951.000	450.837.686.000	429.382.722.396
175	Kab. Karawang	1.245.521.327.000	1.245.521.327.000	537.455.851.000	491.491.861.535
176	Kab. Kuningan	1.197.194.996.000	1.197.194.996.000	415.861.747.000	399.724.583.341
177	Kab. Majalengka	1.204.397.174.000	1.204.397.174.000	440.694.096.000	420.418.332.786
178	Kab. Pangandaran	538.882.193.000	538.882.193.000	199.579.730.000	190.111.565.695
179	Kab. Purwakarta	854.419.670.000	854.419.670.000	282.962.084.000	265.883.032.920
180	Kab. Subang	1.282.683.362.000	1.282.683.362.000	451.750.555.000	436.390.303.341
181	Kab. Sukabumi	1.580.414.660.000	1.580.414.660.000	551.398.996.000	533.275.079.784
182	Kab. Sumedang	1.125.798.410.000	1.125.798.410.000	415.546.749.000	409.715.609.147
183	Kab. Tasikmalaya	1.451.247.063.000	1.451.247.063.000	565.948.278.000	550.280.189.633
184	Kab. Bandung Barat	1.091.118.868.000	1.091.118.868.000	374.063.434.000	352.833.523.306
185	Kota Bandung	1.643.076.905.000	1.643.076.905.000	499.234.857.000	462.437.060.573
186	Kota Bekasi	1.212.033.531.000	1.212.033.531.000	305.718.986.000	295.252.447.074
187	Kota Bogor	791.929.143.000	791.929.143.000	191.716.946.000	179.875.196.265
188	Kota Cirebon	577.778.746.000	577.778.746.000	179.184.996.000	164.489.195.433
189	Kota Depok	860.675.991.000	860.675.991.000	224.968.437.000	195.519.453.727
190	Kota Sukabumi	495.865.420.000	495.865.420.000	144.697.321.000	130.989.790.173
191	Kota Cimahi	576.278.051.000	576.278.051.000	157.470.504.000	144.938.837.788
192	Kota Tasikmalaya	780.073.445.000	780.073.445.000	307.728.472.000	299.932.769.876
193	Kota Banjar	368.153.289.000	368.153.289.000	79.090.159.000	75.925.333.043
194	Provinsi Banten	1.072.903.468.000	1.072.903.468.000	2.395.789.872.000	2.369.670.919.999
195	Kab. Lebak	1.086.661.291.000	1.086.661.291.000	421.108.405.000	387.752.105.644
196	Kab. Pandeglang	1.172.374.842.000	1.172.374.842.000	426.373.358.000	385.626.887.343

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
197	Kab. Serang	1.078.411.345.000	1.078.411.345.000	418.238.755.000	387.690.019.660
198	Kab. Tangerang	1.178.485.856.000	1.178.485.856.000	412.980.894.000	381.460.784.571
199	Kota Cilegon	598.515.134.000	598.515.134.000	128.161.069.000	123.996.175.236
200	Kota Tangerang	866.113.340.000	866.113.340.000	227.879.834.000	213.587.477.495
201	Kota Serang	636.602.678.000	636.602.678.000	152.816.021.000	146.974.402.472
202	Kota Tangerang Selatan	572.637.313.000	572.637.313.000	152.702.482.000	141.157.634.550
203	Provinsi Jawa Tengah	3.652.586.431.000	3.652.586.431.000	6.796.315.118.000	6.507.583.193.672
204	Kab. Banjarnegara	959.486.489.000	959.486.489.000	383.655.403.000	364.545.234.875
205	Kab. Banyumas	1.373.971.809.000	1.373.971.809.000	490.108.673.000	477.533.051.326
206	Kab. Batang	781.383.387.000	781.383.387.000	241.996.944.000	231.124.509.384
207	Kab. Blora	926.754.302.000	926.754.302.000	338.981.256.000	333.004.046.384
208	Kab. Boyolali	1.014.602.019.000	1.014.602.019.000	389.150.665.000	381.026.305.696
209	Kab. Brebes	1.322.465.038.000	1.322.465.038.000	419.479.479.000	398.599.759.143
210	Kab. Cilacap	1.362.443.518.000	1.362.443.518.000	463.571.821.000	443.618.853.481
211	Kab. Demak	894.376.873.000	894.376.873.000	283.657.892.000	275.348.403.392
212	Kab. Grobogan	1.094.460.434.000	1.094.460.434.000	400.743.048.000	385.401.361.674
213	Kab. Jepara	984.937.249.000	984.937.249.000	328.599.224.000	314.882.423.372
214	Kab. Karanganyar	978.664.650.000	978.664.650.000	332.279.859.000	308.185.919.715
215	Kab. Kebumen	1.234.003.169.000	1.234.003.169.000	412.176.759.000	390.504.708.527
216	Kab. Kendal	956.765.777.000	956.765.777.000	306.531.100.000	295.942.730.376
217	Kab. Klaten	1.237.967.327.000	1.237.967.327.000	394.218.628.000	373.028.991.537
218	Kab. Kudus	807.711.173.000	807.711.173.000	258.820.220.000	239.054.267.051
219	Kab. Magelang	1.060.540.612.000	1.060.540.612.000	322.883.487.000	301.160.637.595
220	Kab. Pati	1.189.796.870.000	1.189.796.870.000	435.261.793.000	414.061.984.957
221	Kab. Pekalongan	915.154.037.000	915.154.037.000	366.638.864.000	346.840.785.740
222	Kab. Pemalang	1.180.834.332.000	1.180.834.332.000	356.263.948.000	331.768.131.456
223	Kab. Purbalangga	881.574.483.000	881.574.483.000	372.175.819.000	333.565.496.887
224	Kab. Purworejo	924.251.795.000	924.251.795.000	308.339.590.000	297.357.422.378
225	Kab. Rembang	771.584.367.000	771.584.367.000	282.210.059.000	258.619.192.504
226	Kab. Semarang	952.362.147.000	952.362.147.000	327.925.404.000	314.696.838.280
227	Kab. Sragen	1.049.016.918.000	1.049.016.918.000	334.257.047.000	320.063.100.709
228	Kab. Sukoharjo	906.416.629.000	906.416.629.000	302.965.064.000	286.887.271.862
229	Kab. Tegal	1.144.494.182.000	1.144.494.182.000	352.404.227.000	339.287.872.985
230	Kab. Temanggung	793.801.136.000	793.801.136.000	232.143.431.000	225.548.811.404
231	Kab. Wonorejo	1.125.312.680.000	1.125.312.680.000	395.201.647.000	379.596.211.850
232	Kab. Wonosobo	827.791.657.000	827.791.657.000	284.687.567.000	277.386.975.847
233	Kota Magelang	440.041.244.000	440.041.244.000	113.246.363.000	105.991.302.809
234	Kota Pekalongan	449.055.738.000	449.055.738.000	115.135.973.000	110.631.025.427
235	Kota Salatiga	448.067.710.000	448.067.710.000	95.645.513.000	88.527.219.754
236	Kota Semarang	1.190.422.387.000	1.190.422.387.000	350.631.680.000	330.030.704.917
237	Kota Surakarta	826.753.038.000	826.753.038.000	226.716.078.000	216.821.173.609
238	Kota Tegal	482.150.715.000	482.150.715.000	124.689.784.000	94.845.070.521
239	Provinsi DI Yogyakarta	1.314.372.147.000	1.314.372.147.000	946.184.887.000	912.156.183.851
240	Kab. Bantul	982.250.842.000	982.250.842.000	356.069.177.000	342.620.916.112
241	Kab. Gunungkidul	938.221.136.000	938.221.136.000	322.400.991.000	303.863.880.056
242	Kab. Kulon Progo	705.868.940.000	705.868.940.000	260.428.120.000	247.883.109.094
243	Kab. Sleman	996.492.454.000	996.492.454.000	339.258.544.000	321.540.108.398
244	Kota Yogyakarta	658.504.186.000	658.504.186.000	188.129.240.000	162.523.890.048
245	Provinsi Jawa Timur	3.813.411.928.000	3.813.411.928.000	7.150.849.653.000	6.889.606.818.234

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
246	Kab. Bangkalan	994.460.684.000	994.460.684.000	308.312.968.000	260.696.538.242
247	Kab. Banyuwangi	1.375.784.247.000	1.375.784.247.000	442.593.081.000	423.717.990.705
248	Kab. Bitar	1.109.812.753.000	1.109.812.753.000	410.165.755.000	382.043.194.822
249	Kab. Bojonegoro	932.445.113.000	932.445.113.000	378.811.850.000	349.495.303.481
250	Kab. Bondowoso	910.319.122.000	910.319.122.000	329.658.613.000	309.056.755.613
251	Kab. Gresik	909.888.092.000	909.888.092.000	351.571.255.000	330.283.398.649
252	Kab. Jember	1.697.477.217.000	1.697.477.217.000	529.854.557.000	478.354.824.047
253	Kab. Jombang	1.091.779.457.000	1.091.779.457.000	364.092.359.000	341.135.141.100
254	Kab. Kediri	1.225.331.641.000	1.225.331.641.000	424.783.623.000	406.576.707.166
255	Kab. Lamongan	1.146.161.266.000	1.146.161.266.000	454.501.481.000	429.800.064.440
256	Kab. Lumajang	972.852.929.000	972.852.929.000	330.054.686.000	306.661.771.652
257	Kab. Madiun	877.868.685.000	877.868.685.000	320.302.605.000	303.837.979.055
258	Kab. Magetan	899.960.340.000	899.960.340.000	306.067.226.000	278.740.644.408
259	Kab. Malang	1.665.195.901.000	1.665.195.901.000	588.243.213.000	553.022.487.244
260	Kab. Mojokerto	973.768.511.000	973.768.511.000	369.041.904.000	337.920.214.957
261	Kab. Nganjuk	1.059.746.429.000	1.059.746.429.000	384.950.335.000	361.601.592.261
262	Kab. Ngawi	1.039.619.057.000	1.039.619.057.000	350.461.658.000	334.579.617.361
263	Kab. Pacitan	793.715.346.000	793.715.346.000	282.439.173.000	277.683.212.331
264	Kab. Pamekasan	849.764.469.000	849.764.469.000	289.125.093.000	266.900.962.262
265	Kab. Pasuruan	1.179.777.625.000	1.179.777.625.000	415.803.948.000	387.073.986.651
266	Kab. Ponorogo	1.043.916.636.000	1.043.916.636.000	434.499.623.000	405.686.933.708
267	Kab. Probolinggo	967.345.237.000	967.345.237.000	302.117.135.000	282.727.096.204
268	Kab. Sampang	825.443.163.000	825.443.163.000	294.214.648.000	279.475.126.533
269	Kab. Sidoarjo	1.203.737.401.000	1.203.737.401.000	449.062.283.000	415.805.733.813
270	Kab. Situbondo	806.660.581.000	806.660.581.000	327.642.434.000	303.035.021.045
271	Kab. Sumenep	1.144.489.870.000	1.144.489.870.000	330.553.820.000	318.164.202.097
272	Kab. Trenggalek	885.545.437.000	885.545.437.000	306.254.354.000	290.488.992.985
273	Kab. Tuban	1.028.370.328.000	1.028.370.328.000	323.808.210.000	311.052.055.461
274	Kab. Tulungagung	1.151.959.732.000	1.151.959.732.000	471.895.459.000	438.491.758.679
275	Kota Bitar	421.212.306.000	421.212.306.000	126.977.276.000	104.546.300.626
276	Kota Kediri	606.928.225.000	606.928.225.000	121.069.685.000	111.321.491.483
277	Kota Madiun	502.392.070.000	502.392.070.000	77.420.525.000	70.689.542.010
278	Kota Malang	844.576.426.000	844.576.426.000	202.637.120.000	184.452.461.185
279	Kota Mojokerto	390.118.825.000	390.118.825.000	85.000.428.000	74.274.872.665
280	Kota Pasuruan	424.499.789.000	424.499.789.000	151.989.086.000	124.354.364.356
281	Kota Probolinggo	461.952.836.000	461.952.836.000	119.364.796.000	102.056.324.513
282	Kota Surabaya	1.211.713.876.000	1.211.713.876.000	440.719.915.000	398.797.386.102
283	Kota Batu	474.881.106.000	474.881.106.000	90.110.425.000	77.838.891.013
290	Provinsi Kalimantan Barat	1.724.402.496.000	1.724.402.496.000	1.584.705.923.000	1.487.264.125.078
291	Kab. Bengkayang	581.274.511.000	581.274.511.000	183.342.723.000	173.905.503.371
292	Kab. Landak	670.222.701.000	670.222.701.000	276.056.375.000	268.890.449.941
293	Kab. Kapuas Hulu	975.757.515.000	975.757.515.000	299.935.750.000	292.467.332.303
294	Kab. Ketapang	1.122.269.534.000	1.122.269.534.000	357.881.688.000	335.157.692.404
295	Kab. Mempawah	583.210.092.000	583.210.092.000	207.542.224.000	199.602.980.557
296	Kab. Sambas	873.609.250.000	873.609.250.000	360.100.826.000	345.123.001.262
297	Kab. Sanggau	824.217.941.000	824.217.941.000	320.804.657.000	280.489.089.182
298	Kab. Sintang	909.410.866.000	909.410.866.000	372.440.549.000	351.581.836.133
299	Kota Pontianak	699.448.985.000	699.448.985.000	193.884.869.000	189.323.074.300
300	Kota Singkawang	492.487.388.000	492.487.388.000	172.857.374.000	149.662.300.565

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
301	Kab. Kayong Utara	472.544.021.000	472.544.021.000	154.122.780.000	146.013.672.816
302	Kab. Kubu Raya	782.647.725.000	782.647.725.000	332.788.854.000	322.384.358.285
303	Kab. Sekadau	504.548.895.000	504.548.895.000	204.110.372.000	150.505.334.115
304	Kab. Melawai	604.543.876.000	604.543.876.000	193.812.228.000	182.377.273.756
305	Provinsi Kalimantan Tengah	1.574.382.856.000	1.574.382.856.000	899.006.397.000	871.152.626.504
306	Kab. Barito Selatan	576.041.341.000	576.041.341.000	166.820.611.000	159.775.921.222
307	Kab. Barito Utara	559.665.616.000	559.665.616.000	171.230.664.000	162.376.186.859
308	Kab. Kapuas	866.321.730.000	866.321.730.000	285.162.297.000	271.460.074.291
309	Kab. Kotawaringin Barat	652.906.913.000	652.906.913.000	176.267.742.000	169.591.409.220
310	Kab. Kotawaringin Timur	820.559.562.000	820.559.562.000	214.452.736.000	198.592.942.745
311	Kota Palangkaraya	646.270.544.000	646.270.544.000	155.288.671.000	149.663.978.896
312	Kab. Barito Timur	478.975.191.000	478.975.191.000	122.459.353.000	117.705.864.742
313	Kab. Murung Raya	667.654.598.000	667.654.598.000	192.661.943.000	185.940.755.229
314	Kab. Pulang Pisau	568.390.382.000	568.390.382.000	211.497.077.000	207.858.468.017
315	Kab. Gunung Mas	559.898.689.000	559.898.689.000	189.633.870.000	180.921.429.482
316	Kab. Lamandau	462.248.605.000	462.248.605.000	99.823.112.000	95.832.653.032
317	Kab. Sukamara	420.535.543.000	420.535.543.000	127.591.219.000	122.277.982.314
318	Kab. Katingan	696.300.554.000	696.300.554.000	217.731.471.000	208.340.312.389
319	Kab. Seruyan	616.493.956.000	616.493.956.000	191.940.444.000	186.575.296.212
320	Provinsi Kalimantan Selatan	1.118.213.289.000	1.118.213.289.000	977.026.328.000	932.766.102.579
321	Kab. Banjar	709.407.411.000	709.407.411.000	291.390.017.000	272.331.969.107
322	Kab. Barito Kuala	565.599.843.000	565.599.843.000	208.458.268.000	199.754.994.741
323	Kab. Hulu Sungai Selatan	522.814.008.000	522.814.008.000	197.137.474.000	186.501.672.823
324	Kab. Hulu Sungai Tengah	519.741.516.000	519.741.516.000	182.519.056.000	169.416.141.770
325	Kab. Hulu Sungai Utara	485.062.285.000	485.062.285.000	187.659.373.000	175.927.903.178
326	Kab. Kotabaru	612.929.409.000	612.929.409.000	184.086.491.000	167.498.841.495
327	Kab. Tabalong	494.109.854.000	494.109.854.000	174.327.801.000	152.343.418.702
328	Kab. Tanah Laut	528.690.162.000	528.690.162.000	254.526.431.000	239.891.419.691
329	Kab. Tapin	448.697.311.000	448.697.311.000	138.933.004.000	134.346.921.703
330	Kota Banjarbaru	428.542.067.000	428.542.067.000	160.488.832.000	153.802.001.843
331	Kota Banjarmasin	696.828.787.000	696.828.787.000	173.793.606.000	162.900.494.334
332	Kab. Balangan	382.593.322.000	382.593.322.000	123.973.940.000	107.140.074.624
333	Kab. Tanah Bumbu	457.712.799.000	457.712.799.000	180.156.223.000	170.017.213.906
334	Provinsi Kalimantan Timur	767.682.423.000	767.682.423.000	1.117.790.783.000	1.075.683.891.680
335	Kab. Berau	561.401.129.000	561.401.129.000	220.844.708.000	185.757.595.993
336	Kab. Kutai Kartanegara	249.562.937.000	249.562.937.000	376.951.357.000	349.024.531.165
337	Kab. Kutai Barat	600.687.747.000	600.687.747.000	128.792.838.000	119.348.431.316
338	Kab. Kutai Timur	552.776.510.000	552.776.510.000	170.571.244.000	158.879.642.260
339	Kab. Mahakam Ulu	470.722.849.000	470.722.849.000	89.403.526.000	76.368.544.292
340	Kab. Paser	386.895.907.000	386.895.907.000	156.088.435.000	151.266.217.629
341	Kota Balikpapan	410.543.293.000	410.543.293.000	179.838.266.000	170.566.774.550
342	Kota Bontang	215.830.009.000	215.830.009.000	80.518.946.000	76.089.380.994
343	Kota Samarinda	659.322.535.000	659.322.535.000	242.306.672.000	234.160.199.197
344	Kab. Perajm Paser Utara	259.192.257.000	259.192.257.000	138.899.602.000	118.631.268.563
344	Provinsi Kalimantan Utara	1.185.105.767.000	1.185.105.767.000	394.147.252.000	340.090.138.981
284	Kab. Bulungan	497.449.426.000	497.449.426.000	162.288.240.000	158.479.243.265
286	Kab. Malinau	798.139.775.000	798.139.775.000	129.902.724.000	123.374.212.863
287	Kab. Nunukan	453.241.796.000	453.241.796.000	188.036.112.000	180.609.548.271
288	Kab. Yami Tidung	394.725.005.000	394.725.005.000	47.185.154.000	42.974.348.710

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
289	Kota Yarakkan	380.969.519.000	380.969.519.000	164.159.864.000	157.588.699.499
345	Provinsi Sulawesi Utara	1.427.544.997.000	1.427.544.997.000	1.013.884.068.000	963.695.634.505
346	Kab. Bolang Mongondow	556.612.417.000	556.612.417.000	213.885.530.000	206.410.223.418
347	Kab. Minahasa	656.641.151.000	656.641.151.000	232.625.482.000	221.231.538.080
348	Kab. Sangihe	518.472.055.000	518.472.055.000	170.640.394.000	153.984.975.135
349	Kota Bitang	476.935.367.000	476.935.367.000	211.596.335.000	203.284.399.558
350	Kota Manado	727.970.839.000	727.970.839.000	176.496.324.000	165.407.742.587
351	Kab. Kepulauan Talaud	488.354.687.000	488.354.687.000	158.834.739.000	139.669.923.500
352	Kab. Minahasa Selatan	523.238.733.000	523.238.733.000	264.626.265.000	243.492.758.581
353	Kab. Minahasa Tenggara	407.185.484.000	407.185.484.000	120.661.600.000	113.856.997.510
354	Kab. Kep. Siau Tagulandang Baro	385.429.131.000	385.429.131.000	170.586.105.000	134.767.591.603
355	Kota Kotamobagu	376.388.719.000	376.388.719.000	175.243.709.000	171.048.865.141
356	Kab. Bolang Mongondow Timur	341.807.077.000	341.807.077.000	133.900.982.000	129.408.162.373
357	Kab. Bolang Mongondow Selatan	349.643.086.000	349.643.086.000	110.843.836.000	106.573.164.734
358	Kota Tomohon	401.366.876.000	401.366.876.000	138.730.505.000	133.006.595.896
359	Kab. Minahasa Utara	496.136.006.000	496.136.006.000	145.568.655.000	131.495.165.367
360	Kab. Bolang Mongondow Utara	384.772.383.000	384.772.383.000	151.519.546.000	140.988.642.599
361	Provinsi Gorontalo	1.006.924.707.000	1.006.924.707.000	395.083.811.000	370.824.273.846
362	Kab. Boalemo	452.535.801.000	452.535.801.000	229.642.212.000	209.589.456.124
363	Kab. Gorontalo	653.986.983.000	653.986.983.000	360.446.224.000	337.657.059.816
364	Kota Gorontalo	508.677.825.000	508.677.825.000	170.959.881.000	132.026.723.646
365	Kab. Pohuwato	513.389.155.000	513.389.155.000	184.748.664.000	178.359.374.852
366	Kab. Gorontalo Utara	402.570.414.000	402.570.414.000	153.235.829.000	144.151.240.328
367	Kab. Bone Bolango	487.244.817.000	487.244.817.000	217.595.287.000	202.098.479.193
368	Provinsi Sulawesi Tengah	1.586.163.908.000	1.586.163.908.000	976.962.777.000	950.221.062.164
369	Kab. Banggai	869.604.156.000	869.604.156.000	261.487.704.000	249.050.528.494
370	Kab. Banggai Laut	397.037.063.000	397.037.063.000	102.823.702.000	88.799.346.787
371	Kab. Banggai Kepulauan	465.346.799.000	465.346.799.000	176.537.342.000	164.512.996.173
372	Kab. Buol	528.033.354.000	528.033.354.000	204.062.877.000	192.891.578.885
373	Kab. Tolitoli	618.784.625.000	618.784.625.000	177.757.647.000	164.916.344.191
374	Kab. Donggala	659.731.826.000	659.731.826.000	211.607.349.000	207.662.219.147
375	Kab. Morowali	509.533.134.000	509.533.134.000	205.364.920.000	197.507.484.461
376	Kab. Morowali Utara	558.773.483.000	558.773.483.000	209.441.702.000	206.738.086.961
377	Kab. Poso	723.089.621.000	723.089.621.000	281.178.342.000	275.669.370.626
378	Kota Palu	671.600.535.000	671.600.535.000	203.483.077.000	195.171.092.200
379	Kab. Parigi Moutong	750.918.302.000	750.918.302.000	302.673.259.000	290.626.082.739
380	Kab. Sigi	634.133.821.000	634.133.821.000	256.206.197.000	244.935.609.690
381	Kab. Tojo Una-Una	567.372.983.000	567.372.983.000	170.625.051.000	164.597.862.401
382	Provinsi Sulawesi Selatan	2.509.480.255.000	2.509.480.255.000	2.695.227.590.000	2.553.260.115.413
383	Kab. Bantaeng	494.749.832.000	494.749.832.000	222.720.011.000	215.529.019.670
384	Kab. Barru	510.978.699.000	510.978.699.000	219.627.726.000	208.448.805.220
385	Kab. Bone	1.070.426.493.000	1.070.426.493.000	467.789.754.000	454.581.140.617
386	Kab. Bulukumba	705.099.263.000	705.099.263.000	340.624.256.000	318.538.927.491
387	Kab. Enrekang	534.335.959.000	534.335.959.000	233.963.668.000	228.774.951.421
388	Kab. Gowa	837.326.483.000	837.326.483.000	384.326.476.000	380.202.231.681
389	Kab. Jenepono	627.644.516.000	627.644.516.000	304.866.064.000	296.771.322.098
390	Kab. Luwu	680.212.384.000	680.212.384.000	231.601.785.000	226.035.056.309
391	Kab. Luwu Utara	655.693.773.000	655.693.773.000	262.743.673.000	255.514.760.202
392	Kab. Maros	697.947.111.000	697.947.111.000	271.589.059.000	265.357.127.967

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	752.773.975.000	752.773.975.000	272.041.805.000	254.489.977.990
394	Kab. Pinrang	693.794.315.000	693.794.315.000	260.788.933.000	250.453.739.206
395	Kab. Kepulauan Selayar	580.780.803.000	580.780.803.000	238.701.256.000	232.128.162.002
396	Kab. Sidenreng Rappang	610.506.232.000	610.506.232.000	288.880.838.000	283.058.010.217
397	Kab. Sinjai	585.911.082.000	585.911.082.000	268.441.908.000	262.570.872.744
398	Kab. Soppeng	624.804.701.000	624.804.701.000	250.203.550.000	244.013.518.712
399	Kab. Takalar	595.466.518.000	595.466.518.000	274.879.684.000	256.130.933.270
400	Kab. Tana Toraja	551.496.571.000	551.496.571.000	234.234.567.000	223.679.321.245
401	Kab. Wajo	714.224.148.000	714.224.148.000	292.072.056.000	280.429.998.297
402	Kota Pare-pare	454.752.410.000	454.752.410.000	132.727.738.000	127.529.699.403
403	Kab. Toraja Utara	519.040.535.000	519.040.535.000	274.652.761.000	262.417.829.026
404	Kota Makassar	1.300.764.306.000	1.300.764.306.000	462.625.154.000	401.425.917.297
405	Kota Palopo	516.167.587.000	516.167.587.000	218.799.860.000	215.391.889.365
406	Kab. Luwu Timur	545.609.968.000	545.609.968.000	225.794.297.000	220.736.443.611
407	Provinsi Sulawesi Barat	1.025.033.063.000	1.025.033.063.000	408.342.173.000	480.334.925.040
408	Kab. Majene	512.162.492.000	512.162.492.000	149.560.436.000	147.835.927.732
409	Kab. Mamuju	627.775.288.000	627.775.288.000	223.868.146.000	219.255.558.042
410	Kab. Mamuju Tengah	347.815.396.000	347.815.396.000	141.810.691.000	136.069.833.276
411	Kab. Polewali Mandar	713.339.396.000	713.339.396.000	305.761.113.000	299.025.456.064
412	Kab. Mamasa	515.625.843.000	515.625.843.000	190.551.944.000	184.942.913.656
413	Kab. Pasangkayu	483.136.786.000	483.136.786.000	152.896.742.000	148.341.483.525
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.375.959.517.000	1.375.959.517.000	1.214.078.997.000	1.189.936.688.180
415	Kab. Buton	424.357.645.000	424.357.645.000	196.613.689.000	182.974.007.913
416	Kab. Konawe	678.419.303.000	678.419.303.000	194.309.628.000	190.070.966.295
417	Kab. Konawe Kepulauan	315.499.213.000	315.499.213.000	96.711.049.000	91.377.903.711
418	Kab. Kolaka	582.742.370.000	582.742.370.000	173.798.991.000	167.763.941.686
419	Kab. Kolaka Timur	402.711.812.000	402.711.812.000	101.836.510.000	96.732.158.509
420	Kab. Muna	658.128.350.000	658.128.350.000	246.322.950.000	243.260.160.556
421	Kota Kendari	662.782.152.000	662.782.152.000	252.453.612.000	249.387.870.879
422	Kota Bau-Bau	509.013.667.000	509.013.667.000	150.094.879.000	145.768.712.848
423	Kab. Konawe Selatan	666.731.360.000	666.731.360.000	253.959.666.000	248.877.062.901
424	Kab. Bombana	482.294.441.000	482.294.441.000	140.553.132.000	132.453.388.634
425	Kab. Konawe Utara	454.226.840.000	454.226.840.000	126.533.244.000	124.059.735.478
426	Kab. Buton Utara	410.109.235.000	410.109.235.000	114.765.484.000	111.341.616.173
427	Kab. Wakatobi	463.652.327.000	463.652.327.000	209.793.672.000	204.709.145.524
428	Kab. Kolaka Utara	475.754.194.000	475.754.194.000	124.751.513.000	120.905.705.029
429	Kab. Muna Barat	356.862.831.000	356.862.831.000	121.208.618.000	119.238.946.228
430	Kab. Buton Tengah	358.696.369.000	358.696.369.000	160.176.709.000	156.709.766.310
431	Kab. Buton Selatan	343.792.777.000	343.792.777.000	126.954.121.000	125.031.358.075
432	Provinsi Bali	1.268.585.388.000	1.268.585.388.000	1.102.440.440.000	1.048.792.685.835
433	Kab. Badung	330.336.650.000	330.336.650.000	153.350.911.000	147.499.745.680
434	Kab. Bangli	559.867.699.000	559.867.699.000	123.630.664.000	98.523.654.743
435	Kab. Buleleng	965.435.235.000	965.435.235.000	270.730.677.000	251.132.931.738
436	Kab. Gianyar	693.573.732.000	693.573.732.000	216.328.339.000	207.925.722.534
437	Kab. Jembrana	552.643.376.000	552.643.376.000	132.747.433.000	121.721.250.874
438	Kab. Karangasem	729.378.991.000	729.378.991.000	199.915.436.000	187.547.161.754
439	Kab. Klungkung	530.371.681.000	530.371.681.000	128.490.929.000	120.943.257.704
440	Kab. Tabanan	811.768.631.000	811.768.631.000	237.947.837.000	228.591.669.673
441	Kota Denpasar	650.169.150.000	650.169.150.000	155.434.473.000	143.294.526.569

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.537.777.886.000	1.537.777.886.000	1.454.262.126.000	1.401.066.600.559
443	Kab. Bima	880.920.216.000	880.920.216.000	423.326.232.000	416.530.293.427
444	Kab. Dompu	572.061.726.000	572.061.726.000	228.459.417.000	223.893.542.356
445	Kab. Lombok Barat	771.028.054.000	771.028.054.000	291.474.620.000	283.970.250.081
446	Kab. Lombok Tengah	985.217.157.000	985.217.157.000	387.895.658.000	375.752.025.902
447	Kab. Lombok Timur	1.147.731.584.000	1.147.731.584.000	556.344.948.000	528.019.968.808
448	Kab. Sumbawa	821.927.598.000	821.927.598.000	333.839.050.000	315.746.201.466
449	Kota Mataram	598.318.257.000	598.318.257.000	205.027.649.000	198.061.418.460
450	Kab. Lombok Utara	392.932.943.000	392.932.943.000	175.229.910.000	167.347.499.619
451	Kota Bima	455.972.250.000	455.972.250.000	157.886.864.000	152.038.608.385
452	Kab. Sumbawa Barat	400.284.503.000	400.284.503.000	177.899.376.000	169.726.258.778
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.827.412.640.000	1.827.412.640.000	1.885.339.844.000	1.784.037.619.507
454	Kab. Alor	600.881.201.000	600.881.201.000	276.559.920.000	264.126.614.328
455	Kab. Belu	501.312.256.000	501.312.256.000	214.403.552.000	208.282.595.364
456	Kab. Ende	621.873.578.000	621.873.578.000	202.083.516.000	182.115.289.753
457	Kab. Flores Timur	608.246.576.000	608.246.576.000	239.294.828.000	216.818.990.907
458	Kab. Kupang	681.370.762.000	681.370.762.000	292.327.076.000	270.417.611.896
459	Kab. Lembata	466.007.663.000	466.007.663.000	141.217.781.000	136.212.752.068
460	Kab. Malaka	436.377.451.000	436.377.451.000	147.373.968.000	138.791.619.406
461	Kab. Manggarai	572.870.496.000	572.870.496.000	234.979.250.000	224.296.757.486
462	Kab. Ngada	470.536.836.000	470.536.836.000	178.674.358.000	171.889.898.276
463	Kab. Sikka	622.679.290.000	622.679.290.000	192.918.147.000	182.748.667.364
464	Kab. Sumba Barat	397.976.871.000	397.976.871.000	223.871.607.000	217.843.032.706
465	Kab. Sumba Timur	637.391.140.000	637.391.140.000	189.063.851.000	169.415.544.661
466	Kab. Timor Tengah Selatan	747.723.272.000	747.723.272.000	341.268.889.000	301.043.603.693
467	Kab. Timor Tengah Utara	582.372.204.000	582.372.204.000	157.175.223.000	147.002.815.808
468	Kota Kupang	649.542.427.000	649.542.427.000	235.537.591.000	226.807.530.550
469	Kab. Kota Ndau	445.782.708.000	445.782.708.000	177.168.259.000	169.559.232.423
470	Kab. Nagekeo	432.406.320.000	432.406.320.000	125.879.410.000	119.884.445.535
471	Kab. Sumba Tengah	351.241.387.000	351.241.387.000	101.464.960.000	94.958.670.474
472	Kab. Sumba Barat Daya	467.693.510.000	467.693.510.000	180.223.341.000	166.481.523.168
473	Kab. Manggarai Timur	507.763.475.000	507.763.475.000	258.477.600.000	248.587.452.378
474	Kab. Suku Raijua	346.280.257.000	346.280.257.000	115.129.037.000	91.344.353.490
475	Kab. Manggarai Barat	506.495.526.000	506.495.526.000	265.694.182.000	251.523.066.541
476	Provinsi Maluku	1.670.334.402.000	1.670.334.402.000	872.454.324.000	829.326.348.724
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	561.838.215.000	561.838.215.000	147.175.421.000	140.556.393.564
478	Kab. Maluku Tengah	965.391.210.000	965.391.210.000	338.561.120.000	317.645.449.651
479	Kab. Maluku Tenggara	495.979.781.000	495.979.781.000	183.296.137.000	176.807.140.414
480	Kab. Buru	500.117.604.000	500.117.604.000	228.295.886.000	221.272.221.252
481	Kota Ambon	674.130.364.000	674.130.364.000	182.270.533.000	170.302.430.309
482	Kab. Seram Bagian Barat	597.525.057.000	597.525.057.000	291.125.795.000	281.041.633.010
483	Kab. Seram Bagian Timur	530.650.657.000	530.650.657.000	190.247.018.000	168.884.101.312
484	Kab. Maluku Barat Daya	566.039.812.000	566.039.812.000	121.056.644.000	96.764.184.296
485	Kab. Buru Selatan	421.390.061.000	421.390.061.000	230.849.684.000	222.630.267.264
486	Kab. Kepulauan Aru	580.686.128.000	580.686.128.000	277.967.664.000	245.644.477.961
487	Kota Tual	394.706.960.000	394.706.960.000	123.517.854.000	121.826.166.195
488	Provinsi Maluku Utara	1.331.236.347.000	1.331.236.347.000	604.497.731.000	651.539.307.564
489	Kab. Halmahera Tengah	448.490.415.000	448.490.415.000	122.275.444.000	119.085.631.953
490	Kab. Halmahera Barat	493.248.990.000	493.248.990.000	279.313.566.000	277.956.179.429

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
491	Kota Yemate	610.569.215.000	610.569.215.000	121.623.139.000	120.641.348.267
492	Kab. Halmahera Timur	477.350.304.000	477.350.304.000	103.557.907.000	98.759.437.040
493	Kota Tidore Kepulauan	545.226.947.000	545.226.947.000	162.976.273.000	157.075.843.604
494	Kab. Kepulauan Sula	480.487.794.000	480.487.794.000	192.946.647.000	189.637.591.907
495	Kab. Pulau Morotai	391.524.047.000	391.524.047.000	144.896.753.000	142.851.217.542
496	Kab. Pulau Taliabu	341.053.281.000	341.053.281.000	106.575.813.000	102.976.849.067
497	Kab. Halmahera Selatan	751.125.982.000	751.125.982.000	247.892.965.000	242.796.536.711
498	Kab. Halmahera Utara	486.052.902.000	486.052.902.000	158.347.443.000	155.630.323.808
499	Provinsi Papua	2.571.298.119.000	2.571.298.119.000	1.222.885.646.000	914.093.743.390
500	Kab. Talmo	620.836.641.000	620.836.641.000	164.960.191.000	144.756.859.320
501	Kab. Lanny Jaya	635.655.130.000	635.655.130.000	232.620.876.000	225.547.207.578
502	Kab. Biak Numfor	590.680.088.000	590.680.088.000	183.819.387.000	168.667.986.726
503	Kab. Jayapura	685.569.817.000	685.569.817.000	159.095.366.000	152.581.529.364
504	Kab. Jayawijaya	714.016.533.000	714.016.533.000	280.935.172.000	288.643.813.140
505	Kab. Merauke	1.220.130.325.000	1.220.130.325.000	332.045.406.000	305.830.656.630
506	Kab. Mimika	610.285.895.000	610.285.895.000	277.861.017.000	262.684.868.136
507	Kab. Nabire	709.282.575.000	709.282.575.000	273.860.021.000	263.699.417.579
508	Kab. Paniai	586.036.724.000	586.036.724.000	190.851.642.000	187.487.053.110
509	Kab. Puncak Jaya	749.825.236.000	749.825.236.000	137.860.990.000	131.587.202.300
510	Kab. Kepulauan Yapen	547.266.529.000	547.266.529.000	181.289.417.000	161.068.118.800
511	Kota Soropua	634.300.774.000	634.300.774.000	141.667.687.000	124.614.710.613
512	Kab. Sarmi	711.725.614.000	711.725.614.000	127.110.240.000	106.363.979.400
513	Kab. Keerom	545.712.219.000	545.712.219.000	192.245.500.000	171.776.040.877
514	Kab. Tahukemo	748.276.221.000	748.276.221.000	284.109.864.000	279.292.133.135
515	Kab. Pegunungan Bintang	851.061.519.000	851.061.519.000	269.479.359.000	260.412.057.995
516	Kab. Tolikara	734.503.655.000	734.503.655.000	239.872.588.000	232.433.220.965
517	Kab. Boven Digoel	831.711.325.000	831.711.325.000	157.562.759.000	148.316.810.100
518	Kab. Mappi	781.328.280.000	781.328.280.000	170.293.282.000	162.404.939.921
519	Kab. Asmat	895.264.341.000	895.264.341.000	138.641.461.000	112.241.299.203
520	Kab. Waropen	562.528.293.000	562.528.293.000	115.732.915.000	104.092.907.290
521	Kab. Mamberamo Raya	720.547.800.000	720.547.800.000	92.463.749.000	75.210.895.955
522	Kab. Mamberamo Tengah	635.796.762.000	635.796.762.000	139.860.513.000	136.978.037.570
523	Kab. Nduga	632.951.682.000	632.951.682.000	241.407.194.000	239.319.080.946
524	Kab. Dogiyai	492.099.027.000	492.099.027.000	145.950.602.000	143.001.200.811
525	Kab. Intan Jaya	700.866.324.000	700.866.324.000	164.393.834.000	153.534.741.550
526	Kab. Puncak	805.591.888.000	805.591.888.000	198.900.267.000	178.133.391.688
527	Kab. Deiyai	475.401.856.000	475.401.856.000	153.525.149.000	150.001.046.414
528	Kab. Supiori	451.175.449.000	451.175.449.000	78.311.909.000	74.753.646.760
529	Provinsi Papua Barat	1.431.332.966.000	1.431.332.966.000	482.040.969.000	485.382.845.960
530	Kab. Sorong	512.300.811.000	512.300.811.000	233.538.688.000	229.351.163.641
531	Kab. Manokwari	529.220.329.000	529.220.329.000	156.866.403.000	138.557.527.784
532	Kab. Manokwari Selatan	347.705.874.000	347.705.874.000	116.315.878.000	113.928.830.106
533	Kab. Fak Fak	668.545.841.000	668.545.841.000	159.827.017.000	147.899.355.835
534	Kota Sorong	471.797.886.000	471.797.886.000	105.541.553.000	92.961.897.100
535	Kab. Pegunungan Arfak	380.420.717.000	380.420.717.000	133.597.480.000	128.740.245.564
536	Kab. Sorong Selatan	448.077.175.000	448.077.175.000	108.726.993.000	97.199.401.538
537	Kab. Raja Ampat	666.645.462.000	666.645.462.000	175.428.684.000	164.950.039.083
538	Kab. Teluk Bintuni	549.667.337.000	549.667.337.000	116.253.860.000	114.758.771.274
539	Kab. Teluk Wondama	444.837.467.000	444.837.467.000	136.539.003.000	132.546.484.315

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
540	Kab. Tambora	519.425.053.000	519.425.053.000	170.269.951.000	167.550.411.629
541	Kab. Maybrat	444.866.529.000	444.866.529.000	91.270.486.000	86.981.311.960
542	Kab. Mamasa	609.928.253.000	609.928.253.000	85.660.134.000	36.306.943.195
543	Dana Cadangan	-	-	2.695.766.600.000	353.976.565.607
	JUMLAH	401.489.579.649.000	401.489.579.649.000	185.888.071.708.000	173.449.578.218.684

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DAN KEISTIMEWAAN DIT DAN DANA INSENTIF DAERAH
 Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

No.	Daerah	Rupiah						Rupiah			
		Paga Dana Operasi Khusus	Paga Dana Desa	Paga Transfer Dana Keistimewaan DIT	Paga Dana Insentif Daerah	Jumlah Paga 7-3+4+5+6	Dana Operasi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIT	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi 12-8+9+10+11
1	Provinsi Lampung Aceh Nordatama	8.029.791.293.000	-	-	-	8.029.791.293.000	-	-	-	8.029.791.293.000	
2	Kab. Aceh Barat	220.927.595.000	-	33.230.000.000	-	254.157.595.000	220.927.000.000	-	33.230.000.000	254.157.000.000	
3	Kab. Aceh Barat	394.170.700.000	-	18.000.000.000	-	412.170.700.000	394.170.700.000	-	18.000.000.000	412.170.700.000	
4	Kab. Aceh Selatan	180.986.876.000	-	33.230.000.000	-	214.216.876.000	180.986.876.000	-	33.230.000.000	214.216.876.000	
5	Kab. Aceh Singkil	91.394.344.000	-	-	-	91.394.344.000	91.080.148.825	-	-	91.080.148.825	
6	Kab. Aceh Tenggara	197.926.546.000	-	34.730.000.000	-	232.656.546.000	197.926.546.000	-	34.730.000.000	232.656.546.000	
7	Kab. Aceh Tenggara	235.238.604.000	-	-	-	235.238.604.000	235.238.604.000	-	-	235.238.604.000	
8	Kab. Aceh Tenggara	343.119.423.000	-	19.730.000.000	-	362.849.423.000	343.119.423.000	-	19.730.000.000	362.849.423.000	
9	Kab. Aceh Utara	542.234.583.000	-	-	-	542.234.583.000	542.234.583.000	-	-	542.234.583.000	
10	Kab. Aceh Utara	416.718.824.000	-	8.730.000.000	-	425.448.824.000	416.718.824.000	-	8.730.000.000	425.448.824.000	
11	Kab. Aceh	498.843.013.000	-	-	-	498.843.013.000	498.843.013.000	-	-	498.843.013.000	
12	Kab. Sumbawa	102.024.543.000	-	43.300.000.000	-	145.324.543.000	102.024.543.000	-	43.300.000.000	145.324.543.000	
13	Kab. Sumbawa	64.464.666.000	-	33.500.000.000	-	97.964.666.000	64.464.666.000	-	33.500.000.000	97.964.666.000	
14	Kec. Sabang	19.527.822.000	-	34.230.000.000	-	53.757.822.000	19.527.822.000	-	34.230.000.000	53.757.822.000	
15	Kec. Langsa	33.459.733.000	-	-	-	33.459.733.000	33.459.733.000	-	-	33.459.733.000	
16	Kec. Lhokseumawe	54.102.499.000	-	-	-	54.102.499.000	54.102.499.000	-	-	54.102.499.000	
17	Kab. Nagan Raya	136.912.821.000	-	33.230.000.000	-	170.142.821.000	136.912.821.000	-	33.230.000.000	170.142.821.000	
18	Kab. Aceh Jaya	117.810.988.000	-	33.500.000.000	-	151.310.988.000	117.810.988.000	-	33.500.000.000	151.310.988.000	
19	Kab. Aceh Jaya	131.134.709.000	-	-	-	131.134.709.000	131.134.709.000	-	-	131.134.709.000	
20	Kab. Aceh Barat Daya	102.334.223.000	-	-	-	102.334.223.000	102.032.872.602	-	-	102.032.872.602	
21	Kab. Aceh Utara	101.298.133.000	-	36.500.000.000	-	137.798.133.000	101.298.134.893	-	36.500.000.000	137.798.134.893	
22	Kab. Aceh Tenggara	130.086.313.000	-	33.500.000.000	-	163.586.313.000	130.086.313.985	-	33.500.000.000	163.586.313.985	
23	Kab. Aceh Tengah	137.060.749.000	-	33.730.000.000	-	170.790.749.000	137.060.749.000	-	33.730.000.000	170.790.749.000	
24	Kec. Sadaulrahman	63.666.491.000	-	-	-	63.666.491.000	63.666.491.000	-	-	63.666.491.000	
25	TRANSFER KEISTIMEWAAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Kab. Aceh	136.612.808.000	-	-	-	136.612.808.000	136.612.808.000	-	-	136.612.808.000	
27	Kab. Aceh	111.921.480.000	-	36.730.000.000	-	148.651.480.000	111.921.480.000	-	36.730.000.000	148.651.480.000	
28	Kab. Aceh Singkil	291.727.190.000	-	-	-	291.727.190.000	291.727.190.000	-	-	291.727.190.000	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KESTIMAWAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
 Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

No.	Daerah	Rupa Dana Otonomi Khusus	Rupa			Jumlah Rupa	Dana Otonomi Khusus	Konsolidasi		
			Rupa Dana Desa	Rupa Transfer Dana Kestimawaran DIY	Rupa Dana Insentif Daerah			Dana Desa	Transfer Dana Kestimawaran DIY	Dana Insentif Daerah
29	Kab. Kayu	172.032.360.000	-	-	172.032.360.000	-	172.032.360.000	-	-	172.032.360.000
30	Kab. Lingsar	60.319.134.000	-	-	60.319.134.000	-	60.319.134.000	-	-	60.319.134.000
31	Kab. Pangkep	179.187.235.000	-	-	179.187.235.000	-	179.187.235.000	-	-	179.187.235.000
32	Kab. Pengadegan	201.119.996.000	-	-	201.119.996.000	-	201.119.996.000	-	-	201.119.996.000
33	Kab. Polewali	149.340.347.000	-	-	149.340.347.000	-	149.167.029.009	-	-	149.167.029.009
34	Kab. Sumbawa	229.242.614.000	-	-	229.242.614.000	-	229.088.113.999	-	-	229.088.113.999
35	Kab. Tegalallaha	143.887.324.000	-	-	143.887.324.000	-	144.813.909.800	-	-	144.813.909.800
36	Kab. Tegalallaha	121.729.547.000	-	-	121.729.547.000	-	120.968.789.000	-	-	120.968.789.000
37	Kab. Tegalallaha	164.171.728.000	-	-	164.171.728.000	-	164.171.728.000	-	-	164.171.728.000
38	Kab. Tana Toraja	154.311.189.000	-	-	154.311.189.000	-	153.248.394.400	-	-	153.248.394.400
39	Kab. Bone	-	-	-	-	-	17.500.000.000	-	-	17.500.000.000
40	Kab. Pinrang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kab. Pangajene	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Kab. Selayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Kab. Takengon	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Kab. Bantaeng	104.278.228.948	-	-	104.278.228.948	-	104.278.228.948	-	-	104.278.228.948
45	Kab. Bantaeng	67.242.000.000	-	-	67.242.000.000	-	67.242.000.000	-	-	67.242.000.000
46	Kab. Luwu	46.111.024.000	-	-	46.111.024.000	-	46.111.024.000	-	-	46.111.024.000
47	Kab. Pangkajene	224.182.148.000	-	-	224.182.148.000	-	224.182.148.000	-	-	224.182.148.000
48	Kab. Pangkajene	204.988.532.000	-	-	204.988.532.000	-	204.988.532.000	-	-	204.988.532.000
49	Kab. Pangkajene	111.964.832.000	-	-	111.964.832.000	-	109.293.137.200	-	-	109.293.137.200
50	Kab. Pangkajene	92.981.905.000	-	-	92.981.905.000	-	92.981.905.000	-	-	92.981.905.000
51	Kab. Pangkajene	-	-	-	-	-	33.682.358.000	-	-	33.682.358.000
52	Kab. Pangkajene	49.048.983.000	-	-	49.048.983.000	-	49.048.983.000	-	-	49.048.983.000
53	Kab. Pangkajene	215.110.810.000	-	-	215.110.810.000	-	207.448.027.033	-	-	207.448.027.033
54	Kab. Pangkajene	102.690.048.000	-	-	102.690.048.000	-	102.690.048.000	-	-	102.690.048.000
55	Kab. Pangkajene	162.753.883.000	-	-	162.753.883.000	-	161.297.222.647	-	-	161.297.222.647
56	Kab. Pangkajene	90.933.371.000	-	-	90.933.371.000	-	90.933.371.000	-	-	90.933.371.000
57	Kab. Pangkajene	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KESTIWAWAN DIT DAN DANA INSENTIF DAERAH
 Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

No.	Detail	Page Dana Otonomi Khusus	Page Dana Desa	Page		Jumlah Page	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Realisasi	
				Transfer Dana Kestiwawanan DIT	Dana Insentif Daerah				Transfer Dana Kestiwawanan DIT	Dana Insentif Daerah
58	Donor Pemerintah	77.492.216.000	-	-	-	77.492.216.000	-	-	-	70.000.480.809
59	PERUSAHAAN BUMI HATI	-	64.726.914.000	71.250.000.000	-	71.250.000.000	-	-	-	71.250.000.000
60	Donor Lain	-	-	26.750.000.000	-	26.750.000.000	-	-	-	26.750.000.000
61	Donor Asing	-	63.842.103.000	23.500.000.000	-	87.342.103.000	-	-	-	87.342.103.000
62	Donor Lembaga Internasional	-	43.361.148.000	-	-	43.361.148.000	-	-	-	43.361.148.000
63	Donor Pihak Persewaan	-	81.807.844.000	16.500.000.000	-	98.307.844.000	-	-	-	98.307.844.000
64	Donor Persewaan	-	39.081.007.000	16.750.000.000	-	55.831.007.000	-	-	-	47.590.007.000
65	Donor Persewaan	-	143.958.367.000	8.750.000.000	-	152.708.367.000	-	-	-	152.708.367.000
66	Donor Sengkang	-	49.631.473.000	-	-	49.631.473.000	-	-	-	49.631.473.000
67	Donor Sengkang	-	62.971.507.000	-	-	62.971.507.000	-	-	-	62.971.507.000
68	Donor Badan Tiga	-	36.799.295.000	23.750.000.000	-	60.549.295.000	-	-	-	58.299.295.000
69	Donor Badan Tiga	-	-	28.250.000.000	-	28.250.000.000	-	-	-	28.250.000.000
70	Donor Pihak Persewaan	-	-	4.000.000.000	-	4.000.000.000	-	-	-	4.000.000.000
71	Donor Pihak Persewaan	-	-	28.250.000.000	-	28.250.000.000	-	-	-	28.250.000.000
72	Donor Persewaan	-	-	16.500.000.000	-	16.500.000.000	-	-	-	16.500.000.000
73	Donor Persewaan	-	23.469.694.000	27.500.000.000	-	50.969.694.000	-	-	-	50.969.694.000
74	Donor Sengkang	-	-	9.500.000.000	-	9.500.000.000	-	-	-	9.500.000.000
75	Donor Persewaan	-	41.606.563.000	8.500.000.000	-	50.106.563.000	-	-	-	48.710.563.154
76	Donor Persewaan	-	33.839.479.000	14.750.000.000	-	48.589.479.000	-	-	-	48.589.479.000
77	Donor Persewaan	-	43.249.031.000	17.500.000.000	-	60.749.031.000	-	-	-	60.749.031.000
78	Donor Sengkang	-	33.721.401.000	-	-	33.721.401.000	-	-	-	33.721.401.595
79	PERUSAHAAN BUMI HATI	-	-	9.000.000.000	-	9.000.000.000	-	-	-	9.000.000.000
80	Donor Asing	-	118.033.974.000	26.750.000.000	-	144.783.974.000	-	-	-	144.783.974.596
81	Donor Asing	-	146.426.521.200	-	-	146.426.521.200	-	-	-	146.426.521.200
82	Donor Asing	-	140.433.275.000	-	-	140.433.275.000	-	-	-	140.433.275.000
83	Donor Asing	-	183.182.993.000	-	-	183.182.993.000	-	-	-	183.182.993.000
84	Donor Asing	-	133.076.939.000	-	-	133.076.939.000	-	-	-	133.076.939.000
85	Donor Asing	-	90.134.697.000	-	-	90.134.697.000	-	-	-	89.841.146.300
86	Donor Asing	-	126.860.823.000	-	-	126.860.823.000	-	-	-	126.860.823.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KERUSUK, DANA DESA, TRANSFER DANA KESTERIMAAN DIT DAN DANA INSENTIF DAERAH
 Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

No.	Detail	Rupiah				Kategori				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Kesterimaan DIT	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Kesterimaan DIT	Dana Insentif Daerah
87	Sub-Kelompok	120.206.632.000	97.125.442.000	-	-	120.206.632.000	120.206.631.400	-	-	120.206.631.400
88	Sub-Sektor	97.125.442.000	-	-	-	97.125.442.000	97.125.441.994	-	-	97.125.441.994
89	Sektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Sektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Sektor	84.020.804.000	-	-	-	84.020.804.000	84.020.803.000	-	-	84.020.803.000
92	Sentral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Sektor	30.903.914.000	-	-	-	30.903.914.000	30.903.914.000	-	-	30.903.914.000
94	Sektor	54.514.794.000	-	-	-	54.514.794.000	54.514.794.000	-	-	54.514.794.000
95	Sektor	35.444.527.000	-	-	-	35.444.527.000	35.444.527.000	-	-	35.444.527.000
96	Sektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Sektor	43.487.568.000	-	-	-	43.487.568.000	43.487.568.000	-	-	43.487.568.000
98	Sektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Sektor	57.013.543.000	-	-	-	57.013.543.000	57.013.543.000	-	-	57.013.543.000
100	Sektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Sektor	86.949.104.000	-	-	-	86.949.104.000	86.949.104.000	-	-	86.949.104.000
102	Sektor	99.662.383.000	-	-	-	99.662.383.000	99.662.379.346	-	-	99.662.379.346
103	Sektor	189.575.503.000	-	-	-	189.575.503.000	187.861.320.200	-	-	187.861.320.200
104	Sektor	146.823.812.000	-	-	-	146.823.812.000	146.823.812.977	-	-	146.823.812.977
105	Sektor	107.498.108.000	-	-	-	107.498.108.000	107.498.108.000	-	-	107.498.108.000
106	Sektor	116.644.059.000	-	-	-	116.644.059.000	115.844.592.000	-	-	115.844.592.000
107	Sektor	89.944.914.000	-	-	-	89.944.914.000	89.944.914.000	-	-	89.944.914.000
108	Sektor	61.125.428.000	-	-	-	61.125.428.000	61.125.428.000	-	-	61.125.428.000
109	Sektor	91.640.792.000	-	-	-	91.640.792.000	91.640.792.000	-	-	91.640.792.000
110	Sektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Sektor	47.221.346.000	-	-	-	47.221.346.000	47.204.703.200	-	-	47.204.703.200
112	Sektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Sektor	269.128.286.000	-	-	-	269.128.286.000	269.128.286.000	-	-	269.128.286.000
114	Sektor	194.512.079.000	-	-	-	194.512.079.000	194.512.079.000	-	-	194.512.079.000
115	Sektor	166.798.218.000	-	-	-	166.798.218.000	166.798.218.000	-	-	166.798.218.000
116	Sektor	83.178.183.000	-	-	-	83.178.183.000	83.178.182.999	-	-	83.178.182.999

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIT DAN DANA INSENTIF DAERAH
 Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

No.	Detail	Page					Realisasi				
		Page Dana Otonomi Khusus	Page Dana Desa	Page Transfer Dana Keistimewaan DIT	Page Dana Insentif Daerah	Jumlah Page	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIT	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
117	Rub. Peningkatan	-	208.161.174.000	-	43.500.000.000	251.661.174.000	208.161.174.000	-	43.500.000.000	251.661.174.000	
118	Rub. Cipta Kerja/IT	-	233.191.679.000	-	26.230.000.000	259.421.679.000	233.191.679.000	-	26.230.000.000	259.421.679.000	
119	Rub. Cipta Kerja/IT	-	118.812.420.000	-	23.000.000.000	141.812.420.000	118.180.843.500	-	23.000.000.000	141.180.843.500	
120	Rub. Peningkatan	-	-	-	23.230.000.000	23.230.000.000	-	-	23.230.000.000	23.230.000.000	
121	Rub. Peningkatan	-	-	-	8.000.000.000	8.000.000.000	-	-	8.000.000.000	8.000.000.000	
122	Rub. Peningkatan	-	-	-	17.730.000.000	17.730.000.000	-	-	17.730.000.000	17.730.000.000	
123	Rub. Peningkatan	-	16.294.624.000	-	17.000.000.000	33.294.624.000	16.294.624.000	-	17.000.000.000	33.294.624.000	
124	Rub. Peningkatan	-	112.222.919.000	-	17.000.000.000	129.222.919.000	112.222.919.000	-	17.000.000.000	129.222.919.000	
125	Rub. Peningkatan	-	233.420.207.000	-	33.750.000.000	267.170.207.000	233.420.207.000	-	33.750.000.000	267.170.207.000	
126	Rub. Cipta Kerja/IT	-	176.924.320.000	-	17.200.000.000	194.124.320.000	176.332.916.400	-	17.200.000.000	193.532.916.400	
127	Rub. Cipta Kerja/IT	-	203.524.132.000	-	8.000.000.000	211.524.132.000	203.524.132.000	-	8.000.000.000	211.524.132.000	
128	Rub. Cipta Kerja/IT	-	190.412.124.000	-	18.730.000.000	209.142.124.000	190.412.124.000	-	18.730.000.000	209.142.124.000	
129	Rub. Peningkatan Khusus	-	63.063.632.000	-	-	63.063.632.000	63.063.632.000	-	-	63.063.632.000	
130	Total Anggaran Realisasi	-	31.718.989.000	-	16.230.000.000	47.948.989.000	38.802.104.000	-	8.230.000.000	47.034.104.000	
131	Rub. Peningkatan	-	38.802.104.000	-	-	38.802.104.000	38.802.104.000	-	-	38.802.104.000	
132	Rub. Peningkatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
133	Rub. Peningkatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
134	Rub. Peningkatan	-	42.487.029.000	-	8.000.000.000	50.487.029.000	42.487.029.000	-	8.000.000.000	50.487.029.000	
135	Rub. Peningkatan	-	47.148.882.000	-	23.230.000.000	70.378.882.000	47.629.072.327	-	23.230.000.000	70.859.072.327	
136	Rub. Peningkatan	-	48.519.804.000	-	23.230.000.000	71.749.804.000	48.519.804.000	-	23.230.000.000	71.749.804.000	
137	Rub. Peningkatan	-	33.618.220.000	-	-	33.618.220.000	33.618.220.000	-	-	33.618.220.000	
138	Total Realisasi	-	97.288.052.000	-	-	97.288.052.000	97.288.052.000	-	-	97.288.052.000	
139	Rub. Peningkatan	-	146.242.984.000	-	-	146.242.984.000	146.242.984.000	-	-	146.242.984.000	
140	Rub. Peningkatan	-	97.229.212.000	-	-	97.229.212.000	97.229.212.000	-	-	97.229.212.000	
141	Rub. Peningkatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
142	Rub. Peningkatan	-	129.217.424.000	-	9.230.000.000	138.447.424.000	129.217.424.000	-	9.230.000.000	138.447.424.000	
143	Rub. Peningkatan	-	126.103.578.979	-	-	126.103.578.979	126.103.578.979	-	-	126.103.578.979	
144	Rub. Peningkatan	-	106.244.049.000	-	-	106.244.049.000	106.244.049.000	-	-	106.244.049.000	
145	Rub. Peningkatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KESTERIMAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
 Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

No.	Daerah	Page Dana Operasi Khusus	Page Dana Desa	Page		Jumlah Page	Dana Operasi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Kesterimaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
				Transfer Dana Kesterimaan DIY	Insentif Daerah						
146	Kab. Lombok	-	64.333.722.000	-	-	64.333.722.000	-	-	-	64.333.722.000	
147	Kab. Bengkulu Tengah	-	98.197.528.000	-	-	98.197.528.000	-	-	-	98.197.528.000	
148	Kab. Kerinci	-	74.928.023.000	-	-	74.928.023.000	-	-	-	74.928.023.000	
149	Provinsi Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	Kab. Lampung Barat	-	112.483.531.000	-	-	112.483.531.000	-	-	-	112.483.531.000	
151	Kab. Lampung Selatan	-	223.519.782.000	-	-	223.519.782.000	-	-	-	223.519.782.000	
152	Kab. Lampung Tengah	-	228.648.643.000	-	-	228.648.643.000	-	-	-	228.648.643.000	
153	Kab. Lampung Timur	-	215.481.590.000	-	-	215.481.590.000	-	-	-	215.481.590.000	
154	Kab. Lampung Utara	-	234.301.839.000	-	-	234.301.839.000	-	-	-	234.301.839.000	
155	Kab. Tanggamus	-	248.590.258.000	-	-	248.590.258.000	-	-	-	248.590.258.000	
156	Kab. Tulang Bawang	-	128.010.109.000	-	-	128.010.109.000	-	-	-	128.010.109.000	
157	Kab. Way Kanan	-	164.879.793.000	-	-	164.879.793.000	-	-	-	164.879.793.000	
158	Kab. Pesisir Selatan	-	134.133.688.000	-	-	134.133.688.000	-	-	-	134.133.688.000	
159	Kab. Pesisir Timur	-	98.920.377.000	-	-	98.920.377.000	-	-	-	98.920.377.000	
160	Kab. Pringrejo	-	103.274.260.000	-	-	103.274.260.000	-	-	-	103.274.260.000	
161	Kab. Pematang	-	87.417.060.000	-	-	87.417.060.000	-	-	-	87.417.060.000	
162	Kab. Tulang Bawang Barat	-	74.208.126.000	-	-	74.208.126.000	-	-	-	74.208.126.000	
163	Kab. Bener Lingsar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
164	Kab. Pinar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
165	Provinsi DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
166	Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
167	Kab. Bandung	-	229.488.420.000	-	-	229.488.420.000	-	-	-	229.488.420.000	
168	Kab. Bogor	-	196.713.680.000	-	-	196.713.680.000	-	-	-	196.713.680.000	
169	Kab. Sukar	-	402.048.049.000	-	-	402.048.049.000	-	-	-	402.048.049.000	
170	Kab. Cianjur	-	217.283.508.000	-	-	217.283.508.000	-	-	-	217.283.508.000	
171	Kab. Cibeureum	-	346.894.878.000	-	-	346.894.878.000	-	-	-	346.894.878.000	
172	Kab. Cirebon	-	370.342.211.000	-	-	370.342.211.000	-	-	-	370.342.211.000	
173	Kab. Garut	-	293.328.092.000	-	-	293.328.092.000	-	-	-	293.328.092.000	
174	Kab. Indragiri	-	310.822.174.000	-	-	310.822.174.000	-	-	-	310.822.174.000	
175	Kab. Karawang	-	280.299.029.000	-	-	280.299.029.000	-	-	-	280.299.029.000	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEMENTERIAN DIT DAN DANA INSENTIF DAERAH
 Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

No.	Daerah	Rupiah					Rendahnya				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Kementerian DIT	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Kementerian DIT	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
175	Kab. Kutai	262.201.673.000	-	-	-	262.201.673.000	-	-	-	-	-
177	Kab. Kutai	312.483.897.000	-	-	-	312.483.897.000	-	-	-	-	
178	Kab. Pongkor	76.670.319.000	-	-	-	76.670.319.000	-	-	-	-	
179	Kab. Pongkor	142.032.991.000	-	-	-	142.032.991.000	-	-	-	-	
180	Kab. Sukoharjo	183.677.026.000	-	-	-	183.677.026.000	-	-	-	-	
181	Kab. Sukoharjo	204.406.623.000	-	-	-	204.406.623.000	-	-	-	-	
182	Kab. Sukoharjo	192.482.049.000	-	-	-	192.482.049.000	-	-	-	-	
183	Kab. Tegalrejo	322.596.651.000	-	-	-	322.596.651.000	-	-	-	-	
184	Kab. Tegalrejo	198.291.241.000	-	-	-	198.291.241.000	-	-	-	-	
185	Kab. Bantul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
186	Kab. Bantul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
187	Kab. Bantul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
188	Kab. Cilacap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
189	Kab. Cilacap	17.250.000.000	-	-	-	17.250.000.000	-	-	-	-	
190	Kab. Cilacap	76.230.000.000	-	-	-	76.230.000.000	-	-	-	-	
191	Kab. Cilacap	39.230.000.000	-	-	-	39.230.000.000	-	-	-	-	
192	Kab. Cilacap	9.000.000.000	-	-	-	9.000.000.000	-	-	-	-	
193	Kab. Tasikmalaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
194	Kab. Tasikmalaya	17.291.312.000	-	-	-	17.291.312.000	-	-	-	-	
194	Provinsi Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
195	Kab. Jember	229.383.197.000	-	-	-	229.383.197.000	-	-	-	-	
196	Kab. Ponorogo	221.185.206.000	-	-	-	221.185.206.000	-	-	-	-	
197	Kab. Sragen	227.676.618.000	-	-	-	227.676.618.000	-	-	-	-	
198	Kab. Tanggamus	242.671.212.000	-	-	-	242.671.212.000	-	-	-	-	
199	Kab. Tanggamus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200	Kab. Tanggamus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201	Kab. Tanggamus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202	Kab. Tanggamus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203	Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	Kab. Banjarnegara	222.775.782.000	-	-	-	222.775.782.000	-	-	-	-	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DAN KERSTYERWAAN DIT DAN DANA INSENTIF DAERAH
 Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

No.	Daerah	Rupa					Rakasan				
		Paga Dana Otomatis Khusus	Paga Dana Desa	Paga Transfer Dana Kerstyerwaan DIT	Paga Dana Insentif Daerah	Jumlah Paga	Dana Otomatis Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Kerstyerwaan DIT	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
200	Kab. Bengkulu	294.876.047.000	34.230.000.000	330.126.047.000	330.126.047.000	294.876.047.000	34.230.000.000	330.126.047.000	330.126.047.000	294.876.047.000	
206	Kab. Bangka	168.403.538.000	34.230.000.000	202.633.538.000	202.633.538.000	168.403.538.000	34.230.000.000	202.633.538.000	202.633.538.000	168.403.538.000	
207	Kab. Belitung	229.723.837.000	26.230.000.000	255.953.837.000	255.953.837.000	229.723.837.000	26.230.000.000	255.953.837.000	255.953.837.000	229.723.837.000	
209	Kab. Bengkulu	192.998.474.000	11.500.000.000	204.498.474.000	204.498.474.000	192.998.474.000	11.500.000.000	204.498.474.000	204.498.474.000	192.998.474.000	
210	Kab. Bangka	240.387.239.000	37.230.000.000	277.617.239.000	277.617.239.000	240.387.239.000	37.230.000.000	277.617.239.000	277.617.239.000	240.387.239.000	
211	Kab. Bangka	229.565.688.000	34.000.000.000	263.565.688.000	263.565.688.000	229.565.688.000	34.000.000.000	263.565.688.000	263.565.688.000	229.565.688.000	
212	Kab. Bengkulu	248.193.231.000	8.000.000.000	256.193.231.000	256.193.231.000	248.193.231.000	8.000.000.000	256.193.231.000	256.193.231.000	248.193.231.000	
213	Kab. Lampung	138.839.437.000	68.230.000.000	207.069.437.000	207.069.437.000	138.839.437.000	68.230.000.000	207.069.437.000	207.069.437.000	138.839.437.000	
214	Kab. Kepulauan	200.891.179.000	37.000.000.000	237.891.179.000	237.891.179.000	200.891.179.000	37.000.000.000	237.891.179.000	237.891.179.000	200.891.179.000	
216	Kab. Kepulauan	213.090.043.000	37.000.000.000	250.090.043.000	250.090.043.000	213.090.043.000	37.000.000.000	250.090.043.000	250.090.043.000	213.090.043.000	
217	Kab. Kepulauan	320.540.593.000	320.540.593.000	641.081.186.000	641.081.186.000	320.540.593.000	320.540.593.000	641.081.186.000	641.081.186.000	320.540.593.000	
218	Kab. Kepulauan	117.644.044.000	28.230.000.000	145.874.044.000	145.874.044.000	117.644.044.000	28.230.000.000	145.874.044.000	145.874.044.000	117.644.044.000	
219	Kab. Bengkulu	223.360.832.000	-	223.360.832.000	223.360.832.000	223.360.832.000	-	223.360.832.000	223.360.832.000	223.360.832.000	
220	Kab. Pali	365.454.541.000	43.500.000.000	408.954.541.000	408.954.541.000	365.454.541.000	43.500.000.000	408.954.541.000	408.954.541.000	365.454.541.000	
221	Kab. Palembang	227.842.347.000	8.000.000.000	235.842.347.000	235.842.347.000	227.842.347.000	8.000.000.000	235.842.347.000	235.842.347.000	227.842.347.000	
222	Kab. Palembang	249.222.556.000	9.000.000.000	258.222.556.000	258.222.556.000	249.222.556.000	9.000.000.000	258.222.556.000	258.222.556.000	249.222.556.000	
223	Kab. Palembang	199.934.262.000	9.500.000.000	209.434.262.000	209.434.262.000	199.934.262.000	9.500.000.000	209.434.262.000	209.434.262.000	199.934.262.000	
224	Kab. Palembang	326.083.184.000	9.000.000.000	335.083.184.000	335.083.184.000	326.083.184.000	9.000.000.000	335.083.184.000	335.083.184.000	326.083.184.000	
225	Kab. Bengkulu	229.010.130.000	-	229.010.130.000	229.010.130.000	229.010.130.000	-	229.010.130.000	229.010.130.000	229.010.130.000	
226	Kab. Bengkulu	157.084.768.000	17.500.000.000	174.584.768.000	174.584.768.000	157.084.768.000	17.500.000.000	174.584.768.000	174.584.768.000	157.084.768.000	
227	Kab. Bengkulu	146.148.232.000	9.000.000.000	155.148.232.000	155.148.232.000	146.148.232.000	9.000.000.000	155.148.232.000	155.148.232.000	146.148.232.000	
228	Kab. Sarolangun	126.078.236.000	33.730.000.000	159.808.236.000	159.808.236.000	126.078.236.000	33.730.000.000	159.808.236.000	159.808.236.000	126.078.236.000	
229	Kab. Tegal	282.703.163.000	33.000.000.000	315.703.163.000	315.703.163.000	282.703.163.000	33.000.000.000	315.703.163.000	315.703.163.000	282.703.163.000	
230	Kab. West Kalimantan	213.042.611.000	18.730.000.000	231.772.611.000	231.772.611.000	213.042.611.000	18.730.000.000	231.772.611.000	231.772.611.000	213.042.611.000	
231	Kab. West Kalimantan	198.188.133.000	13.730.000.000	211.918.133.000	211.918.133.000	198.188.133.000	13.730.000.000	211.918.133.000	211.918.133.000	198.188.133.000	
232	Kab. West Kalimantan	184.414.648.000	8.730.000.000	193.144.648.000	193.144.648.000	184.414.648.000	8.730.000.000	193.144.648.000	193.144.648.000	184.414.648.000	
233	Kab. Pangkajene	-	18.230.000.000	18.230.000.000	18,230,000.000	-	18,230,000.000	18,230,000.000	18,230,000.000	18,230,000.000	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KERUSUK, DANA DESA, TRANSFER DANA KESTERIMAAN DIT DAN DANA INSENTIF DAERAH
 Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

No.	Desem	Rup				Jumlah Rup	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Kekayaan	
		Paga Dana Otonomi Khusus	Paga Dana Desa	Paga Transfer Dana Kesterimaan DIT	Paga Dana Insentif Daerah				Transfer Dana Kesterimaan DIT	Dana Insentif Daerah
234	Rda Pasangir	-	-	33.250.000.000	33.250.000.000	-	-	-	33.250.000.000	33.250.000.000
235	Rda Sumpang	-	-	38.500.000.000	38.500.000.000	-	-	-	38.500.000.000	38.500.000.000
236	Rda Sumpang	-	-	60.250.000.000	60.250.000.000	-	-	-	60.250.000.000	60.250.000.000
237	Rda Sumpang	-	-	33.250.000.000	33.250.000.000	-	-	-	33.250.000.000	33.250.000.000
238	Rda Tigap	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	Standar Di Wilayah	-	-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
240	Rda Sumpang	79.076.103.000	-	24.250.000.000	113.326.103.000	-	-	-	113.326.103.000	113.326.103.000
241	Rda Gunung Mulu	117.574.520.000	-	9.000.000.000	126.574.520.000	-	-	-	126.574.520.000	126.574.520.000
242	Rda Klaten Pagi	76.680.810.000	-	63.250.000.000	139.930.810.000	-	-	-	139.930.810.000	139.930.810.000
243	Rda Sumpang	81.187.698.000	-	51.250.000.000	132.437.698.000	-	-	-	132.437.698.000	132.437.698.000
244	Rda Tegayama	-	-	42.500.000.000	42.500.000.000	-	-	-	42.500.000.000	42.500.000.000
245	Transfer Dana Insentif Daerah	-	-	77.200.000.000	77.200.000.000	-	-	-	77.200.000.000	77.200.000.000
246	Rda Sumpang	270.643.937.000	-	270.643.937.000	541.287.874.000	-	-	-	541.287.874.000	541.287.874.000
247	Rda Sumpang	167.707.413.000	-	74.500.000.000	242.207.413.000	-	-	-	242.207.413.000	242.207.413.000
248	Rda Sumpang	163.105.009.000	-	36.250.000.000	199.355.009.000	-	-	-	199.355.009.000	199.355.009.000
249	Rda Sumpang	316.364.487.000	-	17.250.000.000	333.614.487.000	-	-	-	333.614.487.000	333.614.487.000
250	Rda Sumpang	197.148.839.000	-	24.500.000.000	221.648.839.000	-	-	-	221.648.839.000	221.648.839.000
251	Rda Sumpang	246.902.275.000	-	34.250.000.000	281.152.275.000	-	-	-	281.152.275.000	281.152.275.000
252	Rda Sumpang	236.182.333.000	-	236.182.333.000	472.364.666.000	-	-	-	472.364.666.000	472.364.666.000
253	Rda Sumpang	236.440.982.000	-	18.500.000.000	254.940.982.000	-	-	-	254.940.982.000	254.940.982.000
254	Rda Sumpang	270.643.937.000	-	24.250.000.000	294.893.937.000	-	-	-	294.893.937.000	294.893.937.000
255	Rda Sumpang	221.348.755.000	-	43.750.000.000	265.098.755.000	-	-	-	265.098.755.000	265.098.755.000
256	Rda Sumpang	163.728.393.000	-	33.000.000.000	196.728.393.000	-	-	-	196.728.393.000	196.728.393.000
257	Rda Sumpang	142.136.308.000	-	18.000.000.000	160.136.308.000	-	-	-	160.136.308.000	160.136.308.000
258	Rda Sumpang	147.948.231.000	-	33.250.000.000	181.198.231.000	-	-	-	181.198.231.000	181.198.231.000
259	Rda Sumpang	314.213.308.000	-	26.250.000.000	340.463.308.000	-	-	-	340.463.308.000	340.463.308.000
260	Rda Sumpang	208.533.726.000	-	9.000.000.000	217.533.726.000	-	-	-	217.533.726.000	217.533.726.000
261	Rda Sumpang	233.233.700.000	-	233.233.700.000	466.467.400.000	-	-	-	466.467.400.000	466.467.400.000
262	Rda Sumpang	167.813.849.000	-	17.250.000.000	185.063.849.000	-	-	-	185.063.849.000	185.063.849.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KEHUSIS, DANA DESA, TRANSFER DANA KESTIWEWAAN DIT DAN DANA INSENTIF DAERAH
 Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

No.	Detail	Rupiah				Rendang				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Kestiwewaan DIT	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Page	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Kestiwewaan DIT	Dana Insentif Daerah
263	Sib. Pemas	123.632.316.000	-	-	37.000.000.000	162.632.316.000	-	-	37.000.000.000	162.632.316.000
264	Sib. Pemas	163.867.897.000	-	-	23.730.000.000	187.604.897.000	-	-	23.730.000.000	187.604.897.000
265	Sib. Pemas	201.266.507.000	-	-	23.730.000.000	225.000.507.000	-	-	23.730.000.000	225.000.507.000
266	Sib. Pemas	216.613.315.000	-	-	27.230.000.000	243.843.315.000	-	-	27.230.000.000	243.843.315.000
267	Sib. Pemas	322.100.877.987	-	-	16.230.000.000	338.330.877.987	-	-	16.230.000.000	338.330.877.987
268	Sib. Sempag	179.206.635.000	-	-	43.000.000.000	222.206.635.000	-	-	43.000.000.000	222.206.635.000
269	Sib. Sempag	232.235.524.000	-	-	43.000.000.000	275.235.524.000	-	-	43.000.000.000	275.235.524.000
270	Sib. Sempag	115.130.381.000	-	-	26.730.000.000	141.860.381.000	-	-	26.730.000.000	141.860.381.000
271	Sib. Sempag	378.366.376.000	-	-	17.000.000.000	395.366.376.000	-	-	17.000.000.000	395.366.376.000
272	Sib. Sempag	127.606.280.000	-	-	17.000.000.000	144.606.280.000	-	-	17.000.000.000	144.606.280.000
273	Sib. Tawar	226.950.412.000	-	-	26.500.000.000	253.450.412.000	-	-	26.500.000.000	253.450.412.000
274	Sib. Tawar	205.952.328.000	-	-	26.000.000.000	231.952.328.000	-	-	26.000.000.000	231.952.328.000
275	Sib. Baur	-	-	-	16.230.000.000	16.230.000.000	-	-	16.230.000.000	16.230.000.000
276	Sib. Baur	-	-	-	18.230.000.000	18.230.000.000	-	-	18.230.000.000	18.230.000.000
277	Sib. Pemas	-	-	-	23.500.000.000	23.500.000.000	-	-	23.500.000.000	23.500.000.000
278	Sib. Pemas	-	-	-	66.730.000.000	66.730.000.000	-	-	66.730.000.000	66.730.000.000
279	Sib. Pemas	-	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000
280	Sib. Pemas	-	-	-	48.730.000.000	48.730.000.000	-	-	48.730.000.000	48.730.000.000
281	Sib. Pemas	-	-	-	7.230.000.000	7.230.000.000	-	-	7.230.000.000	7.230.000.000
282	Sib. Baur	21.347.494.000	-	-	92.400.237.000	113.747.731.000	-	-	92.400.237.000	113.747.731.000
283	Sib. Baur	-	-	-	17.658.590.000	17.658.590.000	-	-	17.658.590.000	17.658.590.000
284	Sib. Baur	-	-	-	228.933.717.000	228.933.717.000	-	-	228.933.717.000	228.933.717.000
285	Sib. Baur	-	-	-	217.293.280.000	217.293.280.000	-	-	217.293.280.000	217.293.280.000
286	Sib. Baur	-	-	-	18.730.000.000	18.730.000.000	-	-	18.730.000.000	18.730.000.000
287	Sib. Baur	-	-	-	53.232.991.000	53.232.991.000	-	-	53.232.991.000	53.232.991.000
288	Sib. Baur	-	-	-	172.844.238.000	172.844.238.000	-	-	172.844.238.000	172.844.238.000
289	Sib. Baur	-	-	-	126.479.518.000	126.479.518.000	-	-	126.479.518.000	126.479.518.000
290	Sib. Baur	-	-	-	13.879.000.000	13.879.000.000	-	-	13.879.000.000	13.879.000.000
291	Sib. Sempag	-	-	-	149.354.518.000	149.354.518.000	-	-	149.354.518.000	149.354.518.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KEHUSIS, DANA DESA, TRANSFER DANA KESTIEMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
 Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

No.	Deskripsi	Rupiah		Rupiah		Jumlah Page	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Kestiwewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
		Paga Dana Otonomi Khusus	Paga Dana Desa	Paga Transfer Dana Kestiwewaan DIY	Paga Dana Insentif Daerah						
292	Sib. Surobo	-	-	-	-	294.671.841.000	-	-	-	-	294.671.841.000
293	Sib. Faturah	-	-	-	-	16.730.000.000	-	-	-	-	16.730.000.000
294	Sib. Supriatno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	Sib. Karyo Utas	39.856.608.000	-	-	-	39.856.608.000	-	-	-	-	39.856.608.000
296	Sib. Kain Raga	111.498.247.000	-	-	-	137.748.171.000	-	-	-	-	137.748.171.000
297	Sib. Salsab	69.076.030.000	-	-	-	79.276.030.000	-	-	-	-	79.276.030.000
298	Sib. Pahlawi	120.908.934.000	-	-	-	130.908.934.000	-	-	-	-	130.908.934.000
299	Transfer Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Sib. Berta Sabana	70.547.741.000	-	-	-	70.547.741.000	-	-	-	-	70.547.741.000
301	Sib. Berta Ulaya	76.315.979.000	-	-	-	108.628.979.000	-	-	-	-	108.628.979.000
302	Sib. Kemas	160.073.999.000	-	-	-	160.073.999.000	-	-	-	-	160.073.999.000
303	Sib. Kemasrayan Barat	63.846.738.000	-	-	-	83.394.738.000	-	-	-	-	83.394.738.000
304	Sib. Kemasrayan Timur	129.483.060.000	-	-	-	164.433.060.000	-	-	-	-	164.433.060.000
305	Sib. Pabogayya	-	-	-	-	34.730.000.000	-	-	-	-	34.730.000.000
306	Sib. Berta Timur	73.794.573.000	-	-	-	36.560.000.000	-	-	-	-	36.560.000.000
307	Sib. Heral Raga	102.178.180.000	-	-	-	101.594.573.000	-	-	-	-	101.594.573.000
308	Sib. Pung Pasa	79.340.338.000	-	-	-	128.360.338.000	-	-	-	-	128.360.338.000
309	Sib. Gunung Pias	67.208.949.000	-	-	-	104.468.949.000	-	-	-	-	104.468.949.000
310	Sib. Lantulu	63.423.791.000	-	-	-	91.924.791.000	-	-	-	-	91.924.791.000
311	Sib. Salsaban	28.377.201.000	-	-	-	28.377.201.000	-	-	-	-	28.377.201.000
312	Sib. Karang	123.109.934.000	-	-	-	140.356.934.000	-	-	-	-	140.356.934.000
313	Sib. Suraya	84.482.204.000	-	-	-	93.732.204.000	-	-	-	-	93.732.204.000
314	Transfer Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	Sib. Bang	180.881.941.000	-	-	-	23.500.000.000	-	-	-	-	23.500.000.000
316	Sib. Berta Kain	122.904.071.000	-	-	-	167.494.071.000	-	-	-	-	167.494.071.000
317	Sib. Hala Sungai Selatan	103.076.991.000	-	-	-	141.076.991.000	-	-	-	-	141.076.991.000
318	Sib. Hala Sungai Tengah	112.048.449.000	-	-	-	147.798.449.000	-	-	-	-	147.798.449.000
319	Sib. Hala Sungai Utara	133.823.237.000	-	-	-	168.657.237.000	-	-	-	-	168.657.237.000
320	Sib. Kambay	144.947.030.000	-	-	-	144.947.030.000	-	-	-	-	144.947.030.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIT DAN DANA INSENTIF DAERAH
 Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

No.	Daerah	Rupiah					Realisasi				
		Paga Dana Otonomi Khusus	Paga Dana Desa	Paga Transfer Dana Keistimewaan DIT	Paga Dana Insentif Daerah	Jumlah Paga	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIT	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
321	Kab. Tegalung	-	93.339.641.000	30.000.000.000	-	143.339.641.000	-	93.339.641.000	-	143.339.641.000	
322	Kab. Tanah Liat	-	93.622.628.000	9.500.000.000	-	103.122.628.000	-	93.050.228.700	-	103.050.228.700	
323	Kab. Tapan	-	68.545.041.000	8.000.000.000	-	94.545.041.000	-	68.545.041.000	-	94.545.041.000	
324	Kab. Bangorejo	-	-	8.750.000.000	-	8.750.000.000	-	-	-	8.750.000.000	
325	Kab. Bangorejo	-	-	28.500.000.000	-	28.500.000.000	-	-	-	28.500.000.000	
326	Kab. Blangora	-	100.313.544.000	27.750.000.000	-	133.063.544.000	-	104.545.393.000	-	133.395.494.000	
327	Kab. Tanah Bumbu	-	100.467.721.000	28.750.000.000	-	133.187.721.000	-	100.467.728.000	-	133.187.728.000	
328	Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
329	Kab. Berau	-	90.992.724.000	-	-	90.992.724.000	-	90.871.643.500	-	90.871.643.500	
330	Kab. Kutai Kartanegara	-	139.887.078.000	-	-	139.887.078.000	-	137.684.888.900	-	137.684.888.900	
331	Kab. Kutai Berau	-	148.190.189.000	34.750.000.000	-	183.940.189.000	-	148.190.189.000	-	183.940.189.000	
332	Kab. Kutai Timur	-	141.178.638.000	9.000.000.000	-	150.178.638.000	-	140.307.868.337	-	149.307.868.337	
333	Kab. Paser	-	56.354.021.000	-	-	56.354.021.000	-	53.962.438.600	-	53.962.438.600	
334	Kab. Paser	-	104.473.887.000	27.750.000.000	-	134.223.887.000	-	104.928.338.600	-	134.676.338.600	
335	Kab. Paser	-	-	28.000.000.000	-	28.000.000.000	-	-	-	28.000.000.000	
336	Kab. Paser	-	-	24.750.000.000	-	24.750.000.000	-	-	-	24.750.000.000	
337	Kab. Paser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
338	Kab. Paser	-	28.609.379.000	-	-	28.609.379.000	-	28.609.379.000	-	28.609.379.000	
339	Provinsi Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	Kab. Bulungan	-	67.296.564.000	-	-	67.296.564.000	-	67.296.564.000	-	67.296.564.000	
341	Kab. Malinau	-	118.919.224.000	34.250.000.000	-	153.169.224.000	-	118.919.224.000	-	153.169.224.000	
342	Kab. Nunukan	-	166.806.519.000	39.250.000.000	-	200.056.519.000	-	166.806.519.000	-	200.056.519.000	
343	Kab. Tana Tidjung	-	34.235.379.000	-	-	34.235.379.000	-	34.235.379.000	-	34.235.379.000	
344	Kab. Tana Tidjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
345	Provinsi Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
346	Kab. Bolaang Mongondow	-	141.107.482.000	8.750.000.000	-	141.107.482.000	-	141.107.482.000	-	141.107.482.000	
347	Kab. Pesisir Barat	-	151.926.817.000	18.750.000.000	-	170.676.817.000	-	151.926.817.000	-	170.676.817.000	
348	Kab. Sangihe	-	99.713.800.000	17.250.000.000	-	116.963.800.000	-	99.713.800.000	-	116.963.800.000	
349	Kab. Sangihe	-	-	18.750.000.000	-	18.750.000.000	-	-	-	18.750.000.000	
350	Kab. Pesisir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KESTERMINAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
 Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

No.	Detail	Rupiah					Rendang				
		Paga Dana Otonomi Khusus	Paga Dana Desa	Paga Transfer Dana Kesterminan DIY	Paga Dana Insentif Daerah	Jumlah Paga	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Kesterminan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Rendang
331	Sib. Kebutuhan Taid	98.448.136.000	-	-	-	133.698.136.000	98.448.136.000	-	-	133.698.136.000	
332	Sib. Mekanis Sotans	120.399.908.000	-	-	-	147.399.908.000	120.399.908.000	-	-	147.399.908.000	
333	Sib. Pagarin Tinggiran	93.323.083.000	-	-	-	136.823.083.000	93.323.083.000	-	-	136.823.083.000	
334	Sib. Kap. Sib. Tugalandang Bur	59.926.989.000	-	-	-	59.926.989.000	59.926.989.000	-	-	59.926.989.000	
335	Sib. Kestandaris	17.430.831.000	-	-	-	38.180.831.000	17.430.831.000	-	-	38.180.831.000	
336	Sib. Bangun Mergandaw Tawar	59.194.609.000	-	-	-	76.534.409.000	59.194.609.000	-	-	76.534.409.000	
337	Sib. Bangun Mergandaw Sotans	59.580.601.000	-	-	-	67.860.601.000	59.580.601.000	-	-	67.860.601.000	
338	Sib. Tondan	-	-	-	-	23.000.000.000	-	-	23.000.000.000	23.000.000.000	
339	Sib. Mekanis Ulan	95.468.439.000	-	-	-	108.468.439.000	95.468.439.000	-	-	108.468.439.000	
340	Sib. Bangun Mergandaw Ulan	73.468.287.000	-	-	-	110.948.287.000	73.468.287.000	-	-	110.948.287.000	
341	Transfer Otomatis	-	-	-	-	17.000.000.000	-	-	-	17.000.000.000	
342	Sib. Balaia	72.967.279.000	-	-	-	72.967.279.000	72.967.279.000	-	-	72.967.279.000	
343	Sib. Coromah	170.948.169.000	-	-	-	211.548.169.000	170.948.169.000	-	-	211.548.169.000	
344	Sib. Coromah	-	-	-	-	34.000.000.000	-	-	34.000.000.000	34.000.000.000	
345	Sib. Pagarin	79.073.314.000	-	-	-	100.073.314.000	79.073.314.000	-	-	100.073.314.000	
346	Sib. Coromah Ulan	68.869.533.000	-	-	-	88.869.533.000	68.869.533.000	-	-	88.869.533.000	
347	Sib. Sib. Bona Bangor	123.177.661.000	-	-	-	129.427.661.000	123.177.661.000	-	-	129.427.661.000	
348	Transfer Belanja Negara	-	-	-	-	200.724.378.000	-	-	-	200.724.378.000	
349	Sib. Bangor	203.474.378.000	-	-	-	203.474.378.000	203.474.378.000	-	-	203.474.378.000	
370	Sib. Bangor List	47.192.680.000	-	-	-	47.192.680.000	47.192.680.000	-	-	47.192.680.000	
371	Sib. Bangor Kerdaman	99.213.710.000	-	-	-	99.213.710.000	99.213.710.000	-	-	99.213.710.000	
372	Sib. Baur	79.718.705.000	-	-	-	113.468.658.928	79.718.705.000	-	-	113.468.658.928	
373	Sib. Tugul	76.404.400.000	-	-	-	76.404.399.000	76.404.400.000	-	-	76.404.399.000	
374	Sib. Coromah	123.460.807.000	-	-	-	123.460.807.000	123.460.807.000	-	-	123.460.807.000	
375	Sib. Mergandaw	90.212.479.000	-	-	-	123.460.479.000	90.212.479.000	-	-	123.460.479.000	
376	Sib. Mergandaw Ulan	95.403.798.000	-	-	-	95.403.798.000	95.403.798.000	-	-	95.403.798.000	
378	Sib. Paga	110.933.533.000	-	-	-	110.933.533.000	110.933.533.000	-	-	110.933.533.000	
379	Sib. Paga Insentif	207.264.407.000	-	-	-	207.264.407.000	207.264.407.000	-	-	207.264.407.000	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KESTIWEWAAN DIT DAN DANA INSENTIF DASRAH
 Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

No.	Detail	Rupiah				Desa Otonomi Khusus	Desa	Kestiwaaan		Desa Incentif Daerah	Jumlah Realisasi
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Kestiwaaan DIT	Pagu Dana Incentif Daerah			Transfer Dana Kestiwaaan DIT	Desa Incentif Daerah		
2380	Sib. Smp	127.246.327.000	-	-	-	127.246.327.000	127.246.327.000	-	-	127.246.327.000	
2381	Sib. Tmpn. Dns	103.574.985.000	-	-	-	103.574.985.000	103.574.985.000	-	-	103.574.985.000	
2382	Transfer Bantuan Belanda	-	-	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	16.000.000.000	
2383	Sib. Bussung	28.832.248.000	-	9.000.000.000	9.000.000.000	47.832.248.000	47.832.248.000	41.830.853.000	41.830.853.000	47.832.248.000	
2384	Sib. Buntar	41.920.853.000	-	16.500.000.000	16.500.000.000	58.420.853.000	58.420.853.000	51.920.000.000	51.920.000.000	58.420.853.000	
2385	Sib. Smp	289.888.499.000	-	17.500.000.000	17.500.000.000	307.388.499.000	307.388.499.000	286.420.588.200	286.420.588.200	307.388.499.000	
2386	Sib. Balaunka	93.646.408.000	-	34.750.000.000	34.750.000.000	128.396.408.000	128.396.408.000	120.396.408.000	120.396.408.000	128.396.408.000	
2387	Sib. Buntar	97.769.717.000	-	97.769.717.000	97.769.717.000	195.539.434.000	195.539.434.000	187.539.434.000	187.539.434.000	195.539.434.000	
2388	Sib. Caneh	124.907.258.000	-	26.250.000.000	26.250.000.000	151.157.258.000	151.157.258.000	143.157.258.000	143.157.258.000	151.157.258.000	
2389	Sib. Jempeni	83.403.574.000	-	-	-	83.403.574.000	83.403.574.000	83.403.574.000	83.403.574.000	83.403.574.000	
2390	Sib. Lawa	166.790.061.000	-	23.250.000.000	23.250.000.000	189.940.061.000	189.940.061.000	182.940.061.000	182.940.061.000	189.940.061.000	
2391	Sib. Lawa	143.801.298.000	-	8.750.000.000	8.750.000.000	152.551.298.000	152.551.298.000	143.801.298.000	143.801.298.000	152.551.298.000	
2392	Sib. Panyam	74.083.393.000	-	23.250.000.000	23.250.000.000	97.333.393.000	97.333.393.000	97.333.393.000	97.333.393.000	97.333.393.000	
2393	Sib. Panyam	60.274.262.000	-	8.000.000.000	8.000.000.000	68.274.262.000	68.274.262.000	68.274.262.000	68.274.262.000	68.274.262.000	
2394	Sib. Panyam	57.070.423.000	-	23.250.000.000	23.250.000.000	80.320.423.000	80.320.423.000	80.320.423.000	80.320.423.000	80.320.423.000	
2395	Sib. Sangkulirang	70.237.248.000	-	33.250.000.000	33.250.000.000	103.487.248.000	103.487.248.000	103.487.248.000	103.487.248.000	103.487.248.000	
2396	Sib. Sabang	33.539.074.000	-	17.000.000.000	17.000.000.000	50.539.074.000	50.539.074.000	50.539.074.000	50.539.074.000	50.539.074.000	
2397	Sib. Sangkulirang	39.003.588.193	-	41.000.000.000	41.000.000.000	80.003.588.193	80.003.588.193	80.003.588.193	80.003.588.193	80.003.588.193	
2398	Sib. Sangkulirang	43.861.085.000	-	17.000.000.000	17.000.000.000	60.861.085.000	60.861.085.000	60.861.085.000	60.861.085.000	60.861.085.000	
2399	Sib. Sangkulirang	70.302.533.000	-	-	-	70.302.533.000	70.302.533.000	70.302.533.000	70.302.533.000	70.302.533.000	
4000	Sib. Sangkulirang	103.574.985.000	-	-	-	103.574.985.000	103.574.985.000	103.574.985.000	103.574.985.000	103.574.985.000	
4001	Sib. Sangkulirang	104.219.271.000	-	-	-	104.219.271.000	104.219.271.000	104.219.271.000	104.219.271.000	104.219.271.000	
4002	Sib. Sangkulirang	194.911.127.628	-	-	-	194.911.127.628	194.911.127.628	194.911.127.628	194.911.127.628	194.911.127.628	
4003	Sib. Sangkulirang	28.280.000.000	-	-	-	28.280.000.000	28.280.000.000	28.280.000.000	28.280.000.000	28.280.000.000	
4004	Sib. Sangkulirang	109.601.623.000	-	-	-	109.601.623.000	109.601.623.000	109.601.623.000	109.601.623.000	109.601.623.000	
4005	Sib. Sangkulirang	17.875.000.000	-	-	-	17.875.000.000	17.875.000.000	17.875.000.000	17.875.000.000	17.875.000.000	
4006	Sib. Sangkulirang	10.250.000.000	-	-	-	10.250.000.000	10.250.000.000	10.250.000.000	10.250.000.000	10.250.000.000	
4007	Sib. Sangkulirang	99.497.339.000	-	-	-	99.497.339.000	99.497.339.000	99.497.339.000	99.497.339.000	99.497.339.000	
4008	Sib. Sangkulirang	18.250.000.000	-	-	-	18.250.000.000	18.250.000.000	18.250.000.000	18.250.000.000	18.250.000.000	
4009	Sib. Sangkulirang	34.250.000.000	-	-	-	34.250.000.000	34.250.000.000	34.250.000.000	34.250.000.000	34.250.000.000	
4010	Transfer Bantuan Belanda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4011	Sib. Sangkulirang	33.284.442.000	-	-	-	33.284.442.000	33.284.442.000	33.284.442.000	33.284.442.000	33.284.442.000	
4012	Sib. Sangkulirang	87.834.442.000	-	-	-	87.834.442.000	87.834.442.000	87.834.442.000	87.834.442.000	87.834.442.000	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KESTIMAWAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
 Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

No.	Detail	Page Dana Otonomi Khusus	Page Dana Desa	Page Transfer Dana Kestimawanan DIY	Page Dana Insentif Daerah	Jumlah Page	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Kestimawanan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
409	Sib. Penanggulangan		70.314.731.000			70.314.731.000					70.314.731.000
410	Sib. Penanggulangan		43.226.000.000			43.226.000.000					43.226.000.000
411	Sib. Penanggulangan		120.070.147.000			120.070.147.000					120.070.147.000
412	Sib. Penanggulangan		134.448.271.000			134.448.271.000					134.448.271.000
413	Sib. Penanggulangan		46.426.242.000			46.426.242.000					46.426.242.000
414	Transfer Bantuan Keuangan										
415	Sib. Bantuan		63.341.301.000			63.341.301.000					63.341.301.000
416	Sib. Bantuan		201.473.802.000			201.473.802.000					201.473.802.000
417	Sib. Bantuan		64.308.237.000			64.308.237.000					64.308.237.000
418	Sib. Bantuan		75.174.449.000			75.174.449.000					75.174.449.000
419	Sib. Bantuan		84.611.827.000			84.611.827.000					84.611.827.000
420	Sib. Bantuan		102.272.894.000			102.272.894.000					102.272.894.000
421	Sib. Bantuan										
422	Sib. Bantuan		223.016.234.000			223.016.234.000					223.016.234.000
423	Sib. Bantuan		90.629.284.000			90.629.284.000					90.629.284.000
424	Sib. Bantuan		110.281.183.800			110.281.183.800					110.281.183.800
425	Sib. Bantuan		37.444.249.000			37.444.249.000					37.444.249.000
426	Sib. Bantuan		106.445.882.793			106.445.882.793					106.445.882.793
427	Sib. Bantuan		64.818.419.000			64.818.419.000					64.818.419.000
428	Sib. Bantuan		54.296.204.000			54.296.204.000					54.296.204.000
429	Sib. Bantuan										
430	Sib. Bantuan		41.200.000.000			41.200.000.000					41.200.000.000
431	Sib. Bantuan		81.250.000.000			81.250.000.000					81.250.000.000
432	Sib. Bantuan		52.857.659.800			52.857.659.800					52.857.659.800
433	Sib. Bantuan		107.028.277.000			107.028.277.000					107.028.277.000
434	Sib. Bantuan		34.250.000.000			34.250.000.000					34.250.000.000
435	Sib. Bantuan		31.973.243.000			31.973.243.000					31.973.243.000
436	Sib. Bantuan		37.250.000.000			37.250.000.000					37.250.000.000
437	Sib. Bantuan										

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KESTIMEWANAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
 Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

No.	Daerah	Rupiah				Miliar	
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Kestimewanan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa
438	Jab. Karangasem	64.239.619.000	35.250.000.000	99.489.619.000	64.239.619.000	35.250.000.000	99.489.619.000
439	Jab. Karangasem	43.276.499.000	34.750.000.000	78.026.499.000	43.276.499.000	34.750.000.000	78.026.499.000
440	Jab. Karangasem	101.211.992.000	31.000.000.000	132.211.992.000	101.211.992.000	31.000.000.000	132.211.992.000
441	Jab. Karangasem	27.404.979.000	27.250.000.000	54.654.979.000	27.404.979.000	27.250.000.000	54.654.979.000
442	Transfer Dana Kestimewanan DIY	-	27.250.000.000	27.250.000.000	-	27.250.000.000	27.250.000.000
443	Jab. Karangasem	136.276.861.000	136.276.861.000	136.276.861.000	136.276.861.000	136.276.861.000	136.276.861.000
444	Jab. Karangasem	61.498.398.000	35.250.000.000	96.748.398.000	61.498.398.000	35.250.000.000	96.748.398.000
445	Jab. Karangasem	128.821.278.000	16.500.000.000	145.321.278.000	128.821.278.000	16.500.000.000	145.321.278.000
446	Jab. Karangasem	135.444.598.000	35.250.000.000	170.694.598.000	135.444.598.000	35.250.000.000	170.694.598.000
447	Jab. Karangasem	232.211.702.000	27.250.000.000	259.461.702.000	232.211.702.000	27.250.000.000	259.461.702.000
448	Jab. Karangasem	123.898.408.000	27.250.000.000	151.148.408.000	123.898.408.000	27.250.000.000	151.148.408.000
449	Jab. Karangasem	-	38.000.000.000	38.000.000.000	-	38.000.000.000	38.000.000.000
450	Jab. Karangasem	49.433.654.000	36.000.000.000	85.433.654.000	49.433.654.000	36.000.000.000	85.433.654.000
451	Jab. Karangasem	-	27.250.000.000	27.250.000.000	-	27.250.000.000	27.250.000.000
452	Transfer Dana Kestimewanan DIY	32.509.432.000	35.250.000.000	67.759.432.000	32.509.432.000	35.250.000.000	67.759.432.000
453	Transfer Dana Kestimewanan DIY	-	-	-	-	-	-
454	Jab. Karangasem	129.899.534.000	129.899.534.000	129.899.534.000	129.899.534.000	129.899.534.000	129.899.534.000
455	Jab. Karangasem	72.481.173.000	175.297.130.998	247.778.303.998	72.481.173.000	175.297.130.998	247.778.303.998
456	Jab. Karangasem	135.311.387.000	136.528.446.000	271.839.833.000	135.311.387.000	136.528.446.000	271.839.833.000
457	Jab. Karangasem	136.528.446.000	114.408.439.000	250.936.885.000	136.528.446.000	114.408.439.000	250.936.885.000
458	Jab. Karangasem	114.408.439.000	95.197.594.592	209.606.033.592	114.408.439.000	95.197.594.592	209.606.033.592
459	Jab. Karangasem	95.197.594.592	125.785.322.000	220.982.916.592	95.197.594.592	125.785.322.000	220.982.916.592
460	Jab. Karangasem	125.785.322.000	95.242.287.863	221.027.609.863	125.785.322.000	95.242.287.863	221.027.609.863
461	Jab. Karangasem	95.242.287.863	131.813.894.000	227.056.181.863	95.242.287.863	131.813.894.000	227.056.181.863
462	Jab. Karangasem	131.813.894.000	67.192.170.000	198.995.994.000	131.813.894.000	67.192.170.000	198.995.994.000
463	Jab. Karangasem	67.192.170.000	17.500.000.000	84.692.170.000	67.192.170.000	17.500.000.000	84.692.170.000
464	Jab. Karangasem	108.342.480.500	232.686.745.000	341.029.225.500	108.342.480.500	232.686.745.000	341.029.225.500
465	Jab. Karangasem	232.686.745.000	232.686.745.000	465.373.490.000	232.686.745.000	232.686.745.000	465.373.490.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEMENTERIAN DIT DAN DANA INSENTIF DAERAH
 Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

No.	Daerah	Rupiah				Korupsi				
		Paga Dana Otonomi Khusus	Paga Dana Desa	Paga Transfer Dana Kementerian DIT	Paga Dana Insentif Daerah	Jumlah Paga	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Kementerian DIT	Dana Insentif Daerah
467	Sab. Timur Tengah Utara	137.831.055.000	-	-	-	137.831.055.000	137.831.055.000	-	-	137.831.055.000
468	Sab. Kalimantan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469	Sab. Kalimantan	91.824.992.000	-	-	-	91.824.992.000	91.824.992.000	-	-	91.824.992.000
470	Sab. Sulawesi	75.933.714.000	-	-	-	75.933.714.000	75.933.714.000	-	-	75.933.714.000
471	Sab. Sumatra Tengah	59.271.547.000	-	-	-	59.271.547.000	59.271.547.000	-	-	59.271.547.000
472	Sab. Sumatra Barat-Daya	186.636.441.000	-	-	-	186.636.441.000	186.636.441.000	-	-	186.636.441.000
473	Sab. Pengkajenean Timur	160.836.109.000	-	-	-	160.836.109.000	160.836.109.000	-	-	160.836.109.000
474	Sab. Sabu Kuning	63.498.620.000	-	-	-	63.498.620.000	63.498.620.000	-	-	63.498.620.000
475	Sab. Pengkajenean Barat	127.851.447.000	-	-	-	127.851.447.000	127.851.447.000	-	-	127.851.447.000
476	Provinsi Maluku	-	-	-	18.230.000.000	18.230.000.000	-	-	-	18.230.000.000
477	Sab. Provinsi Pengkajenean Barat	71.097.247.538	-	-	-	71.097.247.538	71.097.247.538	-	-	71.097.247.538
478	Sab. Maluku Tengah	130.561.289.000	-	-	26.230.000.000	156.791.289.000	156.791.289.000	-	-	156.791.289.000
479	Sab. Maluku Tenggara	131.874.182.000	-	-	37.750.000.000	169.624.182.000	169.624.182.000	-	-	169.624.182.000
480	Sab. Selayar	65.863.299.000	-	-	26.230.000.000	92.093.299.000	92.093.299.000	-	-	92.093.299.000
481	Sab. Anson	30.779.402.000	-	-	-	30.779.402.000	30.779.402.000	-	-	30.779.402.000
482	Sab. Serang Bagian Barat	86.318.043.000	-	-	-	86.318.043.000	86.318.043.000	-	-	86.318.043.000
483	Sab. Serang Bagian Timur	140.065.596.000	-	-	-	140.065.596.000	140.065.596.000	-	-	140.065.596.000
484	Sab. Serang Barat-Daya	93.674.227.000	-	-	-	93.674.227.000	93.674.227.000	-	-	93.674.227.000
485	Sab. Serang Selatan	74.041.228.000	-	-	-	74.041.228.000	74.041.228.000	-	-	74.041.228.000
486	Sab. Kepulauan Aru	90.552.282.705	-	-	-	90.552.282.705	90.552.282.705	-	-	90.552.282.705
487	Sab. Tanimbar	28.659.645.000	-	-	-	28.659.645.000	28.659.645.000	-	-	28.659.645.000
488	Provinsi Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
489	Sab. Halmahera Tengah	50.443.552.472	-	-	-	50.443.552.472	50.443.552.472	-	-	50.443.552.472
490	Sab. Halmahera Barat	116.624.282.000	-	-	-	116.624.282.000	116.624.282.000	-	-	116.624.282.000
491	Sab. Tanimbar	-	-	16.750.000.000	-	16.750.000.000	-	16.750.000.000	-	16.750.000.000
492	Sab. Halmahera Timur	83.978.431.000	-	23.750.000.000	-	107.728.431.000	107.728.431.000	-	-	107.728.431.000
493	Sab. Tanimbar Selatan	39.920.623.000	-	27.000.000.000	-	66.920.623.000	66.920.623.000	-	-	66.920.623.000
494	Sab. Kepulauan Sula	62.695.292.000	-	-	-	62.695.292.000	62.695.292.000	-	-	62.695.292.000
495	Sab. Pulau Morotai	65.910.753.000	-	-	-	65.910.753.000	65.910.753.000	-	-	65.910.753.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KESTIMWAMAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
 Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)
LAMPIRAN 3.F

No.	Detail	Rupiah						Miliar					
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Kestimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Page	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Kestimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi		
496	Sub. Pulu Tahun	-	54.310.776.000	-	-	54.310.776.000	-	54.310.776.000	-	-	54.310.776.000		
497	Sub. Hibah/Sumbu	-	177.933.114.000	-	28.230.000.000	200.184.114.000	-	177.933.113.200	-	28.230.000.000			
498	Sub. Hibah/Sumbu	-	140.180.499.000	-	37.750.000.000	177.930.499.000	-	139.157.200.200	-	37.750.000.000			
499	Transfer Pajal	8.020.854.113.000	-	-	-	8.020.854.113.000	8.020.854.113.000	-	-	-			
500	Sub. Tahun	-	209.824.398.000	-	-	209.824.398.000	-	-	-	-			
501	Sub. Lain/Just	-	246.393.537.000	-	-	246.393.537.000	-	-	-	-			
502	Sub. Sum. Transfer	-	180.962.759.000	-	-	180.962.759.000	-	-	-	-			
503	Sub. Justifikasi	-	111.970.776.000	-	23.230.000.000	137.200.776.000	-	111.970.776.000	-	23.230.000.000			
504	Sub. Justifikasi	-	240.932.941.000	-	16.200.000.000	257.132.941.000	-	240.932.941.000	-	16.200.000.000			
505	Sub. Transfer	-	182.467.283.000	-	18.500.000.000	200.967.283.000	-	182.467.283.000	-	18.500.000.000			
506	Sub. Hibah/Sum	-	122.772.890.000	-	-	122.772.890.000	-	121.772.890.000	-	-			
507	Sub. Tahun	-	76.884.837.000	-	-	76.884.837.000	-	-	-	-			
508	Sub. Pajal	-	173.404.573.000	-	-	173.404.573.000	-	-	-	-			
509	Sub. Pajal Just	-	246.549.531.000	-	-	246.549.531.000	-	-	-	-			
510	Sub. Kapitalisasi	-	119.682.949.000	-	-	119.682.949.000	-	-	-	-			
511	Sub. Justifikasi	-	18.465.066.000	-	8.200.000.000	26.665.066.000	-	18.465.066.000	-	8.200.000.000			
512	Sub. Sumbu	-	83.866.011.000	-	-	83.866.011.000	-	-	-	-			
513	Sub. Hibah/Sum	-	83.103.081.000	-	-	83.103.081.000	-	-	-	-			
514	Sub. Tahun/Sumbu	-	237.953.032.000	-	-	237.953.032.000	-	-	-	-			
515	Sub. Hibah/Sumbu	-	219.018.657.000	-	-	219.018.657.000	-	-	-	-			
516	Sub. Tahun/Sumbu	-	245.435.608.000	-	-	245.435.608.000	-	-	-	-			
517	Sub. Hibah/Sumbu	-	107.925.694.994	-	-	107.925.694.994	-	-	-	-			
518	Sub. Hibah/Sumbu	-	135.265.102.000	-	-	135.265.102.000	-	-	-	-			
519	Sub. Hibah/Sumbu	-	184.603.028.000	-	-	184.603.028.000	-	-	-	-			
520	Sub. Hibah/Sumbu	-	83.950.063.000	-	-	83.950.063.000	-	-	-	-			
521	Sub. Hibah/Sumbu	-	73.392.018.000	-	-	73.392.018.000	-	-	-	-			
522	Sub. Hibah/Sumbu	-	64.302.828.000	-	-	64.302.828.000	-	-	-	-			
523	Sub. Hibah/Sumbu	-	177.338.214.000	-	-	177.338.214.000	-	-	-	-			
524	Sub. Hibah/Sumbu	-	69.721.372.000	-	-	69.721.372.000	-	-	-	-			

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KESTIMAWAN DIT DAN DANA INSENTIF DAERAH
 Tahun Anggaran 2018 (Audited)
 (Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

No.	Daerah	Rup				Rupiah	
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Kestimawaran DIT	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus
525	Kab. Aceh Jaya	-	92.186.732.000	-	-	92.186.732.000	-
526	Kab. Aceh	-	166.578.832.000	-	-	166.578.832.000	-
527	Kab. Aceh	-	62.044.921.000	-	-	62.044.921.000	-
528	Kab. Aceh	4.008.937.478.000	-	-	-	4.008.937.478.000	-
529	Provinsi Papua Barat	-	169.164.934.000	-	8.000.000.000	177.164.934.000	-
530	Kab. Sorong	-	132.818.328.000	-	-	132.818.328.000	-
531	Kab. Mamberamo	-	30.785.871.000	-	-	30.785.871.000	-
532	Kab. Mamberamo Selatan	-	114.404.325.000	-	-	114.404.325.000	-
533	Kab. Paniai	-	-	-	-	-	-
534	Kab. Sorong	-	134.103.349.000	-	-	134.103.349.000	-
535	Kab. Fakfak	-	90.956.708.000	-	-	90.956.708.000	-
536	Kab. Raja Ampat	-	90.332.849.000	-	4.750.000.000	95.082.849.000	-
537	Kab. Tolikima	-	93.889.409.400	-	43.750.000.000	137.639.409.400	-
538	Kab. Teluk Wondama	-	60.808.824.000	-	-	60.808.824.000	-
539	Kab. Waropen	-	136.933.803.000	-	-	136.933.803.000	-
540	Kab. Pegunungan Arfak	-	178.533.371.000	-	-	178.533.371.000	-
541	Kab. Kaimana	-	77.811.529.000	-	-	77.811.529.000	-
542	Kab. Kaimana	20.058.583.184.000	40.000.000.000.000	1.000.000.000.000	8.500.000.000.000	69.558.583.184.000	1.000.000.000.000
	Jumlah						

**PERSETUJUAN KONTRAK
TAHUN JAMAK
31 DESEMBER 2018**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS
CONTRACT) PER 31 DESEMBER 2018**

LAMPIRAN 4

No	Kode BA	Nama Kementerian/Lembaga	Alokasi Anggaran per Tahun					Total sd 2023
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	011	Kementerian Luar Negeri	78.136.003.000	186.606.735.000	179.531.152.000	172.208.630.000	164.586.281.000	781.379.371.202
2	012	Kementerian Pertahanan	510.814.970.000	105.560.000.000				616.726.153.930
3	015	Kementerian Keuangan	739.867.605.000	1.131.320.091.000	756.863.822.000	521.166.728.000	240.356.810.000	3.389.575.056.000
4	024	Kementerian Kesehatan	133.990.135.000	186.366.527.000				320.451.585.733
5	025	Kementerian Agama	439.009.981.000	171.516.651.000				610.680.901.158
6	022	Kementerian Perhubungan	9.751.172.814.000	3.376.298.507.000				13.127.471.321.000
7	033	Kementerian PU/Pera	37.607.695.790.000	17.238.491.476.000	12.356.566.593.000	6.446.222.232.000		73.648.976.091.000
8	084	Badan Standardisasi Nasional	50.000.000.000					50.000.000.000
9	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	124.635.000.000	63.450.000.000				188.198.890.000
10	112	BP Batam	40.135.758.000					40.135.758.000
11	118	BP Sabang	81.721.000.000					81.721.000.000
		Jumlah	49.557.179.056.000	22.459.609.987.000	13.292.961.567.000	7.139.597.590.000	404.943.091.000	92.855.316.128.024

**SALDO KAS DI REKENING
KPPN**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
	DJPB PUSAT		5.126.994.858.550	2.280.287.123.733
1	KHUSUS PENERIMAAN	901	5.126.994.858.550	2.280.287.123.733
2	RPKBUN - PUSAT	902	0	0
	I. NAD			
3	BANDA ACEH	001	0	0
4	LANGSA	002	0	0
5	MEULABOH	003	0	0
6	TAPAK TUAN	074	0	0
7	LHOKSEUMAWE	089	0	-
8	KUTACANE	105	0	-
9	TAKENGON	122	0	-
	II. SUMATERA UTARA			
10	MEDAN I	004	0	-
11	PEMATANG SIANTAR	005	0	-
12	PADANG SIDEMPUAN	006	0	-
13	GUNUNG SITOLI	007	0	-
14	RANTAU PRAPAT	075	0	-
15	TANJUNG BALAI	076	0	-
16	SIBOLGA	106	0	-
17	SIDIKALANG	119	0	0
18	MEDAN II	123	0	0
19	TEBING TINGGI	124	0	-
20	BALIGE	125	0	-
	III. SUMATERA BARAT			
21	PADANG	010	0	-
22	BUKIT TINGGI	011	0	-
23	SIJUNJUNG	077	0	-
24	SOLOK	090	0	-
25	LUBUK SIKAPING	091	0	0
26	PAINAN	142	0	0
	IV. RIAU			
27	PEKANBARU	008	0	-
28	RENGAT	092	0	0
29	DUMAI	120	0	0

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
	V. JAMBI			
30	JAMBI	012	0	-
31	SUNGAI PENUH	013	0	0
32	MUJARA BUNGO	078	0	0
33	KUALA TUNGKAL	143	0	0
34	BANGKO	159	0	0
	VI. SUMATERA SELATAN			
35	PALEMBANG	014	0	-
36	LUBUK LINGGAU	070	0	0
37	BATURAJA	109	0	-
38	LAHAT	144	0	0
39	SEKAYU	160	0	0
	VII. LAMPUNG			
40	BANDAR LAMPUNG	017	0	-
41	KOTABUMI	116	0	-
42	METRO	126	0	-
43	LIWA	145	0	0
	VIII. BENGKULU			
44	BENGKULU	016	0	0
45	MANNA	121	0	0
46	CURUP	146	0	0
47	MUKO MUKO	181	0	0
	IX. BANGKA BELITUNG			
48	PANGKAL PINANG	015	0	-
49	TANJUNG PANDAN	107	0	-
	X. BANTEN			
50	SERANG	020	0	-
51	TANGERANG	127	0	-
52	RANGKASBITUNG	161	0	-
	XI. DKI JAKARTA		782.358.523	1.790.445.550
53	JAKARTA I	018	0	0

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
54	JAKARTA II	019	0	-
55	JAKARTA III	088	0	1.764.382.865
56	JAKARTA IV	133	0	-
57	JAKARTA V	139	0	-
58	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	140	782.358.523	26.062.685
59	JAKARTA VI	175	0	0
60	JAKARTA VII	182	0	0
XII. JAWA BARAT				
61	PURWAKARTA	021	0	-
62	BANDUNG I	022	0	-
63	BOGOR	023	0	0
64	CIREBON	024	0	-
65	TASIKMALAYA	025	0	0
66	KARAWANG	086	0	0
67	SUMEDANG	087	0	0
68	BANDUNG II	095	0	-
69	GARUT	096	0	-
70	SUKABUMI	128	0	-
71	KUNINGAN	147	0	0
72	BEKASI	171	0	0
XIII. JAWA TENGAH				
73	SEMARANG I	026	0	-
74	PURWOREJO	027	0	-
75	SURAKARTA	028	0	-
76	PURWOKERTO	029	0	-
77	PEKALONGAN	072	0	-
78	PATI	097	0	-
79	MAGELANG	115	0	-
80	TEGAL	118	0	-
81	KUDUS	129	0	-
82	CILACAP	130	0	-
83	SEMARANG II	134	0	0
84	KLATEN	148	0	0
85	SRAGEN	162	0	0
86	PURWODADI	163	0	-
87	BANJARNEGARA	164	0	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
	XIV. DIY			
88	YOGYAKARTA	030	0	-
89	WONOSARI	149	0	-
90	WATES	176	0	-
	XV. JAWA TIMUR			
91	SURABAYA I	031	0	-
92	MALANG	032	0	-
93	MADIUN	033	0	-
94	KEDIRI	034	0	-
95	BONDOWOSO	035	0	0
96	PAMEKASAN	036	0	-
97	BOJONEGORO	073	0	-
98	MOJOKERTO	098	0	0
99	PACITAN	099	0	0
100	BANYUWANGI	100	0	-
101	JEMBER	131	0	-
102	SURABAYA II	135	0	0
103	BLITAR	150	0	-
104	SIDOARJO	165	0	-
105	TUBAN	166	0	-
	XVI. KALIMANTAN BARAT			
106	PONTIANAK	042	0	-
107	SINTANG	079	0	0
108	SINGKAWANG	093	0	-
109	KETAPANG	094	0	0
110	PUTUSSIBAU	117	0	0
111	SANGGAU	167	0	-
	XVII. KALIMANTAN TENGAH			
112	PALANGKARAYA	043	0	0
113	SAMPIT	044	0	0
114	BUNTOK	080	0	0
115	PANGKALAN BUN	102	0	0

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
	XVIII. KALIMANTAN SELATAN			
116	BANJARMASIN	045	0	0
117	KOTABARU	081	0	0
118	BARABAI	110	0	0
119	TANJUNG	151	0	0
120	PELAIHARI	168	0	0
	XIX. KALIMANTAN TIMUR			
121	SAMARINDA	046	0	0
122	BALIKPAPAN	047	0	-
123	TARAKAN	048	0	-
124	NUNUKAN	152	0	0
125	TANJUNG REDEP	153	0	0
	XX. BALI			
126	DENPASAR	037	0	0
127	SINGARAJA	132	0	0
128	AMLAPURA	154	0	0
	XXI. NTB			
129	MATARAM	038	0	0
130	BIMA	071	0	0
131	SUMBAWA BESAR	101	0	0
132	SELONG	169	0	0
	XXII. NTT			
133	KUPANG	039	0	0
134	ENDE	040	0	0
135	WAINGAPU	041	0	0
136	RUTENG	111	0	0
137	ATAMBUA	172	0	0
138	LARANTUKA	174	0	0
	XXIII. SULAWESI			
	SELATAN			
139	MAKASSAR I	054	0	0
140	WATAMPONE	055	0	0

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
141	BANTAENG	056	0	0
142	PARE-PARE	057	0	0
143	PALOPO	058	0	0
144	MAKASAR II	136	0	0
145	BENTENG	155	0	0
146	MAKALE	170	0	0
147	SINJAI	177	0	0
	XXIV. SULAWESI TENGAH			
148	PALU	051	0	-
149	POSO	052	0	0
150	LUWUK	053	0	0
151	TOLI-TOLI	082	0	-
	XXV. SULAWESI TENGARA			
152	KENDARI	060	0	-
153	BAU-BAU	103	0	-
154	KOLAKA	156	0	0
155	RAHA	157	0	0
	XXVI. GORONTALO			
156	GORONTALO	050	0	-
157	MARISA	180	0	0
	XXVII. SULAWESI UTARA			
158	MANADO	049	0	-
159	TAHUNA	083	0	0
160	KOTAMOBAGU	158	0	-
161	BITUNG	179	0	0
	XXVIII. MALUKU UTARA			
162	TERNATE	062	0	-
163	TOBELO	112	0	0
	XXIX. MALUKU			

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
164	AMBON	061	0	-
165	TUAL	084	0	-
166	SAUMLAKI	104	0	0
167	MASOHI	173	0	0
	XXX. PAPUA			
168	JAYAPURA	063	0	-
169	BIAK	064	0	-
170	MERAUKE	068	0	-
171	NABIRE	085	0	0
172	WAMENA	113	0	0
173	SERUI	138	0	0
174	TIPTIKA	141	0	0
	XXXI. KEPRI			
175	TANJUNG PINANG	009	0	-
176	BATAM	137	0	-
	XXXII. SULAWESI BARAT			
177	MAJENE	059	0	-
178	MAMUJU	178	0	0
	XXXIII. PAPUA BARAT			
179	MANOKWARI	065	0	-
180	SORONG	066	0	0
181	FAK-FAK	067	0	0
	JUMLAH KAS DI KPPN		5.127.777.217.073	2.282.077.569.283

KAS PADA KL DAN BUN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 6

**KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PEMERIKSAAN		KAS LAINNYA DAN BERTARA KAS	
			31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED
1	001	PAJALEIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	4.394.113	-	-	7.991.268	267.468.248
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-	-	-	4.198.123.77
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	-	-	-	-	-	247.141.999
4	005	MAHKAMAH AGUNG	273.898.265	41.343.500	172.019.680	61.309.801	83.330.667	76.537.993.226
5	006	DEKAMAN AGUNG	1.437.588.53	830.414.895	49.747.260.089	16.48.312.46	64.023.781.991	47.927.362.187
6	007	BEKETAJALAT NEGARA	5.134.682.24	6.381.732.57	-	-	43.346.258.768	44.553.108.684
7	010	KEHENTERIAN DALAM NEGERI	143.743.791	143.514.400	4.030.950.00	2.318.750.00	1.129.504.31	9.338.053.62
8	011	KEHENTERIAN LUAR NEGERI	166.373.082.924	119.867.022.901	17.634.868.167	20.772.633.798	49.597.819.355	37.031.523.542
9	012	KEHENTERIAN PERTAHANAN	513.621.500	13.502.999	-	-	86.891.991.725	38.241.570.044
10	013	KEHENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIPERUSAHA	2473.362.98	1.294.724.41	-	-	32.906.472.664	36.289.582.072
11	015	KEHENTERIAN KEUANGAN	2.313.040.22	2.533.211.24	3.658.057.94	6.330.715.64	363.024.058.349	471.927.362.187
12	018	KEHENTERIAN PERTANIAN	348.601.261	6.915.057.58	1.400.000	651.711.457	16.728.092.179	31.942.760.265
13	019	KEHENTERIAN BERINDUSTRIAN	487.542.376	70.859.339	-	25.520.000	17.974.527	141.006.450
14	020	KEHENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	37.944.493	-	26.462.561	3.305.418.78	3.337.319.16
15	022	KEHENTERIAN REHABILITASI	1.203.397.12	7.929.652.38	1.381.354.96	1.241.057.66	37.022.720.984	27.484.286.145
16	023	KEHENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8.424.255.92	17.803.152.339	325.000	75.537.000	222.407.919.463	54.112.301.810
17	024	KEHENTERIAN KESEHATAN	1.659.565.73	1.320.666.79	849.108.715	218.677.700	173.145.297.853	574.442.183.969
18	025	KEHENTERIAN AGAMA	2.097.762.41	2.097.462.91	813.089.991	44.176.550	69.233.159.758	60.147.925.567
19	026	KEHENTERIAN KETENAGAKERJAAN	38.350.000	714.208.315	500	5.000.000	433.310.701	89.419.780
20	027	KEHENTERIAN SOSIAL	211.191.900	85.430.900	992.866.000	-	391.775.845.227	335.962.866.982
21	029	KEHENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	433.086.289	1.040.061.02	498.020.500	1.636.578.50	58.433.019.192	43.992.120.401
22	032	KEHENTERIAN KEAGAMAAN DAN BERKORBAN	997.164.079	546.762.090	81.252.337	41.669.448	4.153.747.34	8.905.907.15
23	033	KEHENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	89.433.535	162.261.940	-	-	39.139.679	36.257.424.764
24	034	KEHENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HAKUP, DAN KEHUMANAN	58.450.000	-	-	-	2.245.494.96	2.413.819.87
25	035	KEHENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	4.861.000	-	-	756.122.835	951.029.083
26	036	KEHENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PERHANGUNAN MANUSA DAN KEBUDAYAAN	185.843.797	138.770.095	-	-	204.488.113	231.503.520

(Dalam Ribu)

**KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rp/bil)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELABARAN		KAS DI BENDAHARA PEKERJAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED
27	040	KEPENTERIAN PARIWISATA	30.996.559	10.000	-	249.085.262	-	369.334.760
28	041	KEPENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	-	-	-	-	-	-
29	042	KEPENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	2.120.995.54	3.001.316.34	6.790.646.18	66.556.092.999	1.281.396.850.338	790.575.624.052
30	044	KEPENTERIAN KOPERASI DAN UKM	-	45.651.150	-	-	5.214.488.21	4.219.142.46
31	047	KEPENTERIAN PERBENDAHARAAN PERSEKUTUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	4.412.887.95	-	-	2.123.408.01	1.986.463.59
32	048	KEPENTERIAN PENDAYAGUNAAN MANAULUR NEGARA DAN REFORMASI BIRUKERAS	95.000	1.027.500	-	-	46.512.282	80.853.400
33	050	BADAN INTELEJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	178.812.585	-
35	052	DEWAN KEHAKIMAN NASIONAL	-	63.448	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	262.099.491	4.879.223.80	80.000	10.000.000	8.573.176.16	8.004.257.73
37	055	KEPENTERIAN PRIBALAPENAS	205.713.244	659.923.772	-	-	26.811.835.914	542.920.796.056
38	056	KEPENTERIAN AGAMA DAN TATA RUMAH BADA DAN PERTANAHAN NASIONAL	25.043.881	122.832.777	-	-	20.185.135.659	1.265.975.84
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	13.720.600	420.000	-	-	-	-
40	059	KEPENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	160.430.233	74.714.000	-	2.883.172	212.857.023	11.940.000
41	060	KEPUSKESAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	122.930.725	716.375.997	1.527.976.50	1.376.826.30	126.473.628.235	741.201.340.537
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	-	326.927.000	-	-	-	6.811.810
43	064	LEMBAGA KEHAKIMAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAHAN HOLOS	472.469.831	284.499.790	-	-	1.519.541.00	4.242.465.94
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	909.613	112.621.575	-	-	13.366.623.268	424.887.604
46	067	KEPENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DEKATAN TERTINGGAL DAN TRANSFORMASI	16.831.000	18.938.471	-	-	-	1.182.986
47	068	BADAN KENDUKUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	-	71.065.068	-	-	301.703.933	1.255.196.93
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-	6.449.325.25	1.696.322.62
49	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	-	-	1.375.000	250.000	170.000	230.000
50	076	KOMISI PEMILIHAN UJUM	12.199.147.128	3.385.459.38	-	-	20.645.677.672	2.736.090.651.979
51	077	MAKAMAH KONSTITUSI	-	-	-	-	150.729.965	-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 6

**KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN BERTARA KAS		(Dalam Rupiah)
			31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	
52	078	BIGAT PELAYANAN DAN ANALISIS TRANSKIPSI KEUANGAN	1.394.382	-	-	-	-	-	-
53	079	EMBAKA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	-	7.616.396	361.996.100	455.548.400	1.809.135.27	403.239.846	-
54	080	BADAN TENAGA MANUJUR NASIONAL	668.429.983	603.658.983	-	-	548.841.411	332.409.648	-
55	081	BADAN PENKAJIAN DAN PENELITIAN TEKNOLOGI	3.221.303	124.314.478	894.941.252	894.027.094	2.883.687.14	1.541.139.02	-
56	082	EMBAKA PEMBANGUNAN DAN ANTARAKISA NASIONAL	88.731.703	4.127.708	-	-	32.025.846	22.830.018	-
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	-	-	-	3.535.317	387.465.154	38.386.320	-
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA MANUJUR	-	-	-	-	-	-	-
60	086	EMBAKA ADMINISTRASI NEGARA	-	-	-	-	10.564.192	8.344.850	-
61	087	ASISIP NASIONAL KEPOLISIAN INDONESIA	-	33.049.600	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEBAGAWAAN NEGARA	-	5.038.000	-	-	160.675.524	-	-
63	089	BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-	45.644.000	-
64	090	KEHENTERIAAN PERDAGANGAN	9.242.309.12	8.685.477.84	2.833.954.98	15.655.000	2.465.438.56	3.032.043.22	-
65	092	KEHENTERIAAN PENDIDIKAN DAN OLAH RAGA	354.442.744	646.841.213	-	-	1.575.289.272	8.522.072.97	-
66	093	KOMISI PERBERANTASAN KORUPSI	500.000.000	299.227.500	852.463	-	13.274.181.027	27.947.696.290	-
67	095	DEWAN PERKAWALAN DAERAH	1.244.617.60	2.783.677.45	-	-	7.142.305.42	8.259.964.50	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	6.448.280	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENYANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	-	265.088.924.982	34.683.033.156	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	150.000.000	-	-	-	-	33.455.722	-
71	105	BADAN PENYANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	-	-	-	-
72	106	EMBAKA KEBERHAJIAN BENDAHARA BAHAN BAKU PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	-	42.031	-	-	9.840	-	-
74	108	KOMISI PEMBANGUNAN PERKAWASAN USUKA	-	-	-	-	-	110.291.608	-
75	109	BADAN PEMBANGUNAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-	-
76	110	PENGUDUSAN BERSEKUTU INDONESIA	-	-	-	-	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATAAN	-	3.661.000	-	-	465.454.038	421.963.908	-

**KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGICARAB		KAS DI BENDAHARA PEMERINTAH		KAS LAINNYA DAN BERTAKA KAS	
			31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELAJUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	105.945.287.155	121.049.516.851
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGILANGAN TERORISME	55.078.000	114.322.000	-	-	2.247.800.33	1.746.404.35
80	114	SEKRETARIAT KABINET	6.650.017.008	1.688.396.60	-	-	2.528.755.74	903.253.008
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	54.650.444.304	6.630.389.91	-	-	30.423.399.232	730.131.317.730
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	191.778.834	32.313.100	8.500.000	-	304.983.822	-
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	2.700.000	80.892.500	-	1.076.397.13	223.138.219	4.022.885.75
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELAJUHAN BEBAS PABANG	-	-	-	-	3.052.000	22.343.100
85	119	BADAN KEAMANNAN LAUT	-	-	-	-	-	-
86	120	KEPENTANGAN KOORDINATOR BIDANG KEPANTIKAN	-	-	-	-	2.041.278	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
		PELAYANAN (berkearifan dan keadilan BUN)	-	-	-	-	-	-
		JUNTAH KAS PADA K/L	284.832.122.809	210.331.016.647	92.280.790.378	105.738.412.796	722.531.164.344	3.687.119.77
		JUNTAH KAS PADA SATKER BUN	318.130.600	497.147.493	-	-	2.904.045.006.288	7.680.309.646.438
		JUNTAH KAS PADA K/L DAN BUN	285.190.273.409	210.828.164.140	92.280.790.378	105.738.412.796	3.638.728.087.899	7.680.332.290.094

(dalam Rupiah)

**BELANJA DIBAYAR DI
MUKA, UANG MUKA
BELANJA, DAN
PENDAPATAN YANG
MASIH HARUS DITERIMA**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
**BELANJA DIBAYAR DI MUKA, YANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS
 DITERIMA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

LAMPIRAN 7

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		YANG MUKA BELANJA			PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2016 AUDITED	
1	001	MAJELIS PERHIMPUNAN AWATANI MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-
2	002	DEWAN PERAKSIKAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-
3	004	BIRO PERENCANAAN KEUANGAN	8.081.642.144	357.453.807	-	-	-	-	-
4	005	MAJELIS ASUNG	10.047.125.204	1.093.671.281	-	-	-	-	-
5	006	KEKAWAAN AGUNG	12.244.268.086	-	-	-	-	-	-
6	007	DEKRETASAT NEGARA	18.806.044.829	18.821.994.726	-	-	13.799.083	314.080.000	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	-	-	-	-	-	-	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	48.339.409.828	70.423.387.206	-	-	-	-	-
9	012	KEMENTERIAN PERTANYAHAN	10.281.967.652.641	1.341.545.722.828	5.823.359.174.425	10.828.526.884.561	-	11.280.314.702	-
10	013	KEMENTERIAN NEGARA DAN NEGARA ASIAN PASIFIK	11.288.621.269	14.616.202.667	-	73.516.187.188	6.228.886	24.546.979	-
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	402.999.623.767	426.912.225.114	3.191.963.782	3.231.678.928	347.460.226.922	265.793.209.448	-
12	018	KEMENTERIAN PERTANYAHAN	7.199.940.494.192	1.182.182.121	-	-	39.400.000	798.368.000	-
13	019	KEMENTERIAN PENDUDUSTRIAN	-	-	-	-	1.682.129.314	1.444.469.000	-
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	609.884.111	13.691.024.387	63.712.600	-	-	2.318.629	-
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	13.222.218.720	12.247.000	-	-	636.668.774	199.145.435.439	-
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	746.624.122.027	2.781.927.171.918	3.229.072.280	-	1.276.144.200	1.006.223.020	-
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	37.881.942.877	90.292.929.622	-	9.266.508.000	314.279.722	627.111.298	-
18	025	KEMENTERIAN AGRI	110.961.027.622	224.225.428	2.862.054.200	-	422.222.798	10.283.069.822	-
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	-	-	-	-	621.810.720	427.020.000	-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	308.490.828	5.000.000	-	-	-	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	20.712.982.829	2.097.412.872	-	-	6.007.200	867.218.092	-
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.528.742.092	1.812.676.024	-	-	329.081.621	205.942.207	-
23	033	KEMENTERIAN PERENCANAAN LINGKUNGAN DAN PERUMAHAN MASYARAKAT	4.292.000.000	6.627.228.999	8.022.227.200	-	12.469.280.296	2.208.414.845	-

(dalam Ringgit)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
**BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS
 DITERIMA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

LAMPIRAN 7

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA			PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2016 AUDITED	
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	461.096.313	-	-	-	-	
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PERKONDISIAN	-	-	-	-	-	-	
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PERANGKUNGAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	28.226.633	133.478.544	-	-	-	-	
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	9.633.438.039	11.678.383.948	-	-	-	-	
28	041	KEMENTERIAN SDA DAN UDAHA PEKER NECEKA	481.258.001	2.302.234.817	-	-	-	-	
29	042	KEMENTERIAN KERT. TEKNOLOGI DAN PERINDUSTRIAN TINGGI	4.690.204.581	10.661.747.689	132.800.298	1.958.017.187	26.684.078.461	12.744.429.762	
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	413.762.001	373.437.290	-	-	1.766.108.828	-	
31	047	KEMENTERIAN PERENCANAAN PERSEKUTUAN DAN PELINDUNGAN ANGK	-	-	-	-	-	-	
32	048	KEMENTERIAN PENYAYANGAN KEMAJATAN NECEKA DAN KEPONHARI BERKELAS	-	-	182.011.282	-	-	-	
33	030	SADAN INTELEN NECEKA	225.026.073.712	107.641.492.716	-	-	-	-	
34	031	LEMBAGA SANDI NECEKA	-	-	-	-	-	-	
35	032	DEWAN KEPEMIMPINAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-	
36	034	SADAN PUSAT STATISTIK	1.616.040.032	1.290.966.229	-	-	11.190.198	16.827.080	
37	035	KEMENTERIAN PPN/BAFFENAS	28.533.827.881	28.698.222.227	-	-	234.200	110.173.600	
38	036	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA KULINER/SDAN PERTANAHAN NASIONAL	389.100.023	366.599.131	-	-	17.586.730	-	
39	037	PERUSTAKAAN NASIONAL BERJALAN INONERJA	10.710.114.042	1.904.129.020	-	-	-	-	
40	039	KEMENTERIAN KONSERVASI DAN INONERJATIKA	207.086.265	19.044.986.376	-	-	-	2.000.000	
41	060	KERCASAN NECEKA PERULKE INONERJA	167.222.892.899	18.446.226.104	1.494.519.431.642	222.066.191.328	19.080.548	53.566.712	
42	063	SADAN PENCIANG GABAT DAN HUKUMAN	14.190.671.821	816.966.199	-	-	-	-	
43	064	LEMBAGA KEPEMIMPINAN NASIONAL	-	73.220.000	-	-	-	-	
44	065	SADAN KOORDINASI PENYAYANGAN HONDI	49.300.000	-	-	-	-	-	
45	066	SADAN NAKROTKA NASIONAL	1.234.207.231	869.160.231	-	-	-	-	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
**BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS
 DITERIMA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

LAMPIRAN 7

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA			PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2019 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2019 AUDITED	
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DESA-Desa TERTINGGAL DAN TRANSSKRIPSI	-	-	-	-	-	-	
47	068	BADAN KEPENDIDIKAN DAN KEMUDA BERENCANA NASIONAL	-	-	-	-	-	1.853.514	
48	074	KONS NASIONAL HAR APAR HANUSA	927.000	1.821.500	-	-	-	-	
49	075	BADAN TEKNOLOGI, KEMATOLOGI, DAN GEOTEKNIKA	3.000.000	3.000.000	-	-	13.537.888.534	23.727.143.245	
50	076	KONS PERUMAHAN UMUM	25.449.832.218	2.966.488.111	-	-	-	-	
51	077	PERKAWINAN/KEHANTUS	99.487.503	7.693.059	-	-	-	-	
52	078	PLSAT PELAYARAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	1.783.708.900	1.792.897.141	-	-	-	-	
53	079	LEMBAGA LEMU PENGETAHUAN INDONESIA	153.833.333	115.506.000	-	-	88.403.911	39.821.880	
54	080	BADAN TENAGA NUKLEAR NASIONAL	151.609.000	136.505.666	-	-	-	-	
55	081	BADAN PENELITIAN DAN PENELITIAN TEKNOLOGI	-	-	-	-	-	-	
56	082	LEMBAGA PENELITIAN DAN ANTARAKASA NASIONAL	37.950.000	42.166.664	-	-	-	-	
57	083	BADAN INFORMASI GEOGRAFISAL	-	-	-	-	556.499.787	87.298.983	
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	82.848.543	-	13.793.480.768	-	-	-	
59	085	BADAN PENELITIAN TENAGA NUKLEAR	-	-	-	-	-	-	
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	-	-	-	-	-	
61	087	KAP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-	
62	088	BADAN KERCAMBAHAN NEGARA	6.630.000	19.930.000	-	-	-	-	
63	089	BADAN PENELITIAN KEKUNINGAN DAN PEMBANGUNAN	1.211.250.278	1.296.693.876	-	-	15.440.600	21.762.859	
64	090	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	7.423.010.101	11.565.716.696	-	56.873.000	21.816.188	791.880.736	
65	092	KEPERINTAHAN PERUSAHAAN DAN DAN BERKAWAN	-	177.488.833.533	3.133.314.000	29.771.458.507	-	-	
66	093	KONS PERHIMPATAN KORBUPRI	2.209.379.781	1.299.149.210	-	-	-	-	
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	2.052.169.737	1.704.255.477	-	-	-	-	
68	100	KONS TUDICIAL	340.573.001	442.032.463	-	-	-	-	

(Dalam Ribu)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
**BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS
 DITERIMA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

LAMPIRAN 7

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2016 AUDITED
69	103	SADAN NASIONAL PENGANGGULANAN BENCANA	3.048.213.460.984	406.181.132.504	-	-	-	-
70	104	SADAN NASIONAL PERUBAHAN DAN PERUNDUNGAN TRUKA KEPUA INDONESIA	339.976.313	644.147.062	-	-	-	-
71	109	SADAN PENGANGGULANAN LUPHUR SOGAJIO	-	-	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KESEKIAN PENGADAAN BARANG-JAJA PERHENTAH	239.289.032	314.677.984	-	-	-	-
73	107	SADAN IAK NASIONAL	882.992.999	717.208.000	-	-	-	-
74	108	KORPRI PENGUNCIAN PERAWANAN USAHA	-	-	-	-	-	-
75	109	SADAN PENGUNCIAN WILAYAH SUMABAYA MADURA	497.751.375	951.377.873	-	-	-	-
76	110	OPERASI DAN PERUBAHAN REPUBLIK INDONESIA	3.113.303.376	3.120.991.906	-	-	-	-
77	111	SADAN NASIONAL PENGOLA PERUBAHAN	-	12.380.000	-	-	-	-
78	112	SADAN PENGUNCIAN KAWASAN PENGUNCIAN BEBAS & PELAYANAN BEBAS BATAH	-	-	-	-	27.818.764.946	28.046.814.084
79	113	SADAN NASIONAL PENGANGGULANAN TENONGTONE	-	-	-	-	-	-
80	114	KEHATIHAATAN KASNET	-	3.976.000	-	-	-	-
81	113	SADAN PENGUNCIAN PERBELU	249.816.402.819	64.607.236.433	-	-	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RMI	-	-	294.034.000	-	-	-
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	66.412	97.774.871	-	320.409.000	22.946.230	132.310.000
84	118	SADAN PENGUNCIAN KAWASAN PENGUNCIAN BEBAS DAN PELAYANAN BEBAS SABANG	-	3.466.610	-	22.034.746.964	4.339.317.000	15.010.768.716
85	119	SADAN KEMAMPUAN LAUT	106.203.147.477	87.237.669.877	-	-	-	-
86	120	KEHENTIARAN KORDINATOR SDANG KEHATIHAATAN	-	-	-	-	-	-
87	121	SADAN NEGARA KEANTAR	3.084.017.308	4.183.883.882	-	-	-	-
Jumlah Pada K/L			23.007.607.601.289	6.049.121.028.182	7.284.619.377.009	11.213.000.994.881	607.147.289.481	974.607.094.881
88	999.01	PENGOLAHAN UTANG	-	-	-	-	-	-
89	999.02	PENGOLAHAN HRAH	-	-	-	-	-	-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
**BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS
 DITERIMA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

LAMPIRAN 7

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2016 AUDITED
90	999.03	INVESTASI PERENCANAAN	-	-	-	-	-	-
91	999.04	PENGALIHAN PENGALIHAN	-	-	-	-	-	-
92	999.05	TRANGAN PER DAERAH	-	-	-	-	-	-
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-	-	-
94	999.08	BELANJA LANGSUNG	1.750.000.004	3.453.385.529	-	-	-	-
95	999.99	TRANGAN KHUSUS	-	133.664.283	-	-	-	-
96	999.00	SISTEM AKUNTANSI PUSAT	-	-	-	-	-	-
97	999.09	BADAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pada BA BUKU	1.750.000.004	3.589.049.812	-	-	-	-
		TOTAL	23.009.417.401.342	6.048.710.078.004	7.396.819.277.099	11.313.000.594.881	637.147.289.481	576.867.095.851

(dalam Ribu)

PIUTANG PAJAK DAN
PENYISIHAN PAJAK

**PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA**
**PIUTANG PAJAK DAN PENYISIHAN PAJAK BERDASARKAN JENIS
PAJAK PER 31 DESEMBER 2018 (Audited)**
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Nilai
I 15121	Piutang PPh Pasal 21	1.179.013.937,28
I 15122	Piutang PPh Pasal 22	513.491.595,69
I 15123	PPh Pasal 22 Impor	56.267.402,423
I 15124	Piutang PPh Pasal 23	1.274.118.662,16
I 15125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.583.276.185,06
I 15126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	16.109.153.823,70
I 15127	Piutang PPh Pasal 26	1.692.189.385,19
I 15128	Piutang PPh Final	1.818.771.827,09
I 15131	Piutang PPN Dalam Negeri	23.743.183.930,88
I 15132	PPN Impor	317.942.525,28
I 15141	Piutang PPhBM Dalam Negeri	504.887.065,46
I 15142	PPhBM Impor	2.051.369,198
I 15153	Piutang PBB Perkebunan	1.302.383.004,67
I 15154	Piutang PBB Kehutanan	611.275.366,84
I 15155	Piutang PBB Pertambangan	6.033.394.958,74
I 15159	Piutang PBB Sektor Lainnya	21.618.657,418
I 15161	Cukai Hasil Tembakau	8.869.155.688,60
I 15162	Cukai Etil Alkohol	12.120.000
I 15163	Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	3.098.196.600
I 15164	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	28.458.154,707
I 15169	Pendapatan Cukai Lainnya	12.667.767,967
I 15172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	2.025.634,020
I 15173	Piutang Bunga Penagihan PPh	6.594.205.443,94
I 15174	Bunga Penagihan PPN	794.282,304
I 15174	Piutang Bunga Penagihan PPN	4.914.538.121,19
I 15175	Piutang Bunga Penagihan PPhBM	193.213.126,39
I 15181	Bea masuk	1.076.661.519,00
I 15183	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	2.083.214.902,03
I 15184	Pendapatan Pabean Lainnya	372.162.006,94
I 15185	Pajak/Pungutan Ekspor	482.125.830,72
I 15186	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	16.065.266,082
I 15187	Pendapatan Bunga Bea Keluar	536.564,390
I 15191	Bea Masuk Andidumping	61.483.362,000
I 15193	Bea Masuk Tindakan Pengamanan	3.617.543,000
Jumlah Piutang Pajak		81.477.055.227,03
I 16112	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak PPh Non Migas	(15.608.454.939,722)
I 16113	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak PPN	(12.910.651.974,419)
I 16114	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak PPhBM	(452.316.382,119)
I 16115	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PBB dan BPHTB	(2.692.417.811,730)
I 16116	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Meterai	(157.090.888,152)
I 16117	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	(9.561.022.375,801)
I 16118	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	(3.105.488.495,412)
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak		(44.487.442.867,354)
Jumlah Piutang Pajak Netto		36.989.612.359,67

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**PERATURAN REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PERPAJAKAN BERDASARKAN JENIS DAN UMUR PAJAK
PER 31 DESEMBER 2018 (Audited)**

LAMPIRAN 8.B

A. PIUTANG PAJAK		1 s.d. 1 thn	1 s.d. 2 thn	2 s.d. 3 thn	3 s.d. 4 thn	4 s.d. 5 thn	di atas 5 thn	Jumlah
Bode Akun	Nama Akun							
115173	Piutang Bunga Penghasilan PPh	1.080.540.080.479	2.895.854.841.741	2.010.181.854.415	1.488.842.177.991	96.288.877.858	449.157.611.453	6.594.205.443.927
115174	Piutang Bunga Penghasilan PPh	474.643.029.343	2.875.424.875.691	1.459.610.315.772	62.605.091.978	20.151.946.267	22.102.862.140	4.914.538.121.192
115175	Piutang Bunga Penghasilan PPh-BPH	28.074.826.814	49.016.964.745	59.745.826.216	56.428.325.682	-	447.182.937	197.213.126.399
115154	Piutang PPh Kebutuhan	207.635.950.688	107.579.175.222	94.156.820.685	90.508.276.732	51.536.505.831	59.858.637.684	611.275.366.842
115153	Piutang PBB Perumahan	527.831.074.037	171.886.216.540	183.511.061.028	171.412.171.563	159.947.865.124	87.294.626.578	1.302.383.004.676
115155	Piutang PBB Perumahan	2.221.500.975.010	403.763.316.710	544.337.881.644	1.098.247.149.405	351.158.568.692	1.414.387.097.227	6.033.394.988.748
115159	Piutang PBB Sektor Lainnya	10.420.812.884	2.025.795.171	6.695.913.504	2.476.136.059	-	-	21.618.657.418
115121	Piutang PPh Pel. 21	442.797.162.841	209.550.476.948	124.835.877.894	128.883.024.367	98.709.543.051	174.237.842.184	1.179.013.937.265
115122	Piutang PPh Pel. 22	6.241.920.022	10.485.897.489	2.582.984.710	6.292.581.855	5.199.743.111	421.587.468.508	51.349.595.695
115124	Piutang PPh Pel. 23	427.725.860.874	115.067.041.116	104.569.364.445	111.487.605.700	140.419.276.337	374.849.513.691	1.274.118.662.163
115126	Piutang PPh Pel. 23 Badan	3.632.761.544.934	2.641.233.262.522	2.706.150.308.618	1.718.199.267.662	1.288.704.344.884	4.122.605.095.003	16.109.153.823.723
115125	Piutang PPh Pel. 23 CDP	444.723.439.985	208.093.102.767	163.878.354.444	322.937.817.230	172.576.669.096	271.066.781.541	1.583.276.185.065
115127	Piutang PPh Pel. 26	402.550.218.186	44.190.288.737	99.773.990.653	708.952.475.108	96.037.405.572	340.885.006.936	1.692.189.385.192
115128	Piutang PPh Pel. 4 Ayat (2)	1.002.697.280.331	278.761.678.359	146.662.088.365	151.441.418.068	174.009.156.312	65.200.205.648	1.818.771.827.081
115131	Piutang PPh	9.005.647.665.974	3.678.593.702.313	2.103.445.901.963	2.216.740.633.823	2.127.934.042.025	4.610.821.984.793	23.747.181.930.891
115141	Piutang PPh-BPH	56.079.979.507	1.244.668.167	6.801.303.365	223.866.195.407	2.782.803.469	214.118.415.548	504.887.065.403
115172	Piutang PPh	1.965.556.020	-	600.078.000	-	-	-	2.025.634.020
	Jumlah	20.034.437.297.709	13.692.171.024.138	9.816.500.918.744	7.219.314.338.630	4.658.196.157.029	13.028.920.281.869	68.090.740.725.779

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PERPAJAKAN BERDASARKAN JENIS DAN UMUR PAJAK
PER 31 DESEMBER 2018 (Audited)

B. PIUTANG BEA DAN CUKAI						
Kode Akun	Nama Akun	1 s.d. 1 th	1 s.d. 3 th	3 s.d. 5 th	di luar 5 th	Jumlah
115181	Piutang Bea Masuk	315.030.034.889	23.838.810.476	11.914.412.000	725.878.261.638	1.076.661.519.002
115191	Piutang Bea Masuk Asir Dimpang	38.534.987.000	-	-	22.958.375.000	61.493.362.000
115193	Piutang Bea Masuk Tamban Pengamanan	1.482.431.000	2.135.112.000	-	-	3.617.543.000
115183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	233.103.852.975	28.973.440.000	2.816.933.000	1.818.330.656.059	2.083.214.492.034
115184	Piutang Pendapatan/Pabean Lainnya	21.484.040.975	1.610.850.760	660.214.000	348.406.901.210	372.162.006.945
115185	Piutang Kegiatan ekspor	338.280.567.944	185.078.006	503.640	153.659.661.117	482.125.830.722
115186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	28.267.000	-	-	16.036.999.081	16.065.266.082
115187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	-	3.703.000	-	532.777.390	536.564.392
115187	Piutang Cukai Hasil Tembakau	8.798.112.540.440	1.063.360.000	84.000	69.979.788.166	8.859.155.688.606
115162	Piutang Cukai Hasil Alkohol	121.200.000	-	-	-	121.200.000
115163	Piutang Cukai Miras/Mengandung Ethyl Alcohol	-	-	-	3.098.196.600	3.098.196.600
115164	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	1.023.511.000	20.000.000	-	27.414.643.707	28.458.154.707
115169	Piutang Pendapatan Cukai lainnya	183.891.200	285.127.600	2.160.000	12.196.589.167	12.667.767.967
115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	30.387.995.777	2.444.185.872	879.022.000	22.556.198.773	56.267.402.422
115142	Piutang PPh/BM Impor	198.000	-	-	2.051.171.198	2.051.369.198
115132	Piutang PPh Impor	21.311.410.573	6.460.668.782	5.543.185.000	92.824.570.925	317.942.575.280
115174	Piutang Bunga Penghasilan PPh	311.607.000	10.982.000	-	471.693.304	794.282.304
	Jumlah	9.981.080.148.773	67.031.318.316	21.816.553.640	3.316.386.483.337	13.886.314.501.060
Jumlah Piutang Pajak, Bea dan Cukai (A+B)						81.477.035.237.045
Prosesasi Berdasarkan Laporan Perkembangan Piutang LR BA 015						(14)
Jumlah Piutang Perpaajakan & Bea Cukai						81.477.035.237.031

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN B.C

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK PER KUALITAS
PER 31 DESEMBER 2018 (Audited)**

T. Direktorat Jenderal Pajak							(dalam Rupiah)	
Akum	Jenis Pajak	Lancar	Kurang Lancar	Dipersewa	Macet	Total		
115173	Bunga Penanghan PPh	397.425.607	60.898.381.678	504.413.767.81	4.896.625.621.98	5.462.335.197.08		
115174	Bunga Penanghan PPh	359.316.555	56.092.307.245	385.918.334.82	3.508.941.337.86	3.951.311.196.48		
115175	Bunga Penanghan PPh-BM	26.554.257	2.311.342.125	20.673.038.295	123.442.777.14	146.453.711.82		
115154	PBB Kehutanan	1.038.179.752	20.173.599.598	71.022.391.294	59.858.637.684	151.092.808.32		
115153	PBB Perkebunan	2.637.185.806	35.407.936.958	165.680.018.37	87.794.626.578	291.519.767.71		
115155	PBB Pertambangan	11.107.504.876	94.628.415.223	724.702.859.07	1.416.204.113.52	2.246.642.892.70		
115159	PBB Sektor Lainnya	52.104.063	872.170.875	1.238.068.033		2.162.342.971		
115121	PPh PsL 21	1.003.904.695	26.832.106.065	121.065.345.12	467.197.913.42	616.099.269.31		
115122	PPh PsL 22	165.141.622	2.731.706.422	9.812.438.618	433.520.592.76	446.229.879.42		
115124	PPh PsL 23	1.184.431.678	15.378.726.341	96.325.111.926	690.331.218.18	803.219.488.13		
115125	PPh PsL 25 Badan	6.692.502.158	205.871.462.64	2.199.091.291.78	8.289.200.352.71	10.700.855.609.29		
115126	PPh PsL 25 Or	924.908.874	26.868.094.948	123.654.901.72	882.139.130.73	1.031.587.036.38		
115127	PPh PsL 26	1.254.457.733	14.108.422.635	53.364.306.285	1.193.482.740.36	1.262.209.926.91		
115128	PPh PsL 4 Ayat (2)	1.777.199.249	63.197.985.142	172.868.789.87	484.616.741.95	722.460.716.21		
115131	PPh	17.517.523.796	588.105.754.23	2.301.938.532.91	9.923.213.149.56	12.810.774.960.49		
115141	PPh-BM	237.888.675	319.189.304	4.409.305.426	445.298.826.52	450.265.209.93		
115172	PTTL	46.800	146.674.002	248.334.000	52.866.000	447.920.802		
	Grand Total	46.376.276.19	1.193.944.275.43	6.956.426.835.39	32.901.920.546.91	41.098.667.933.92		

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK PER KUALITAS
PER 31 DESEMBER 2018 (Audited)**

LAMPIRAN 8 C

2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Akun	Uraian	31 Desember 2018				Total
		31 Desember 2017	31 Desember 2018	Perubahan	Saldo Awal 2018	
115181	Piutang Bea Masuk	1.571.733.641	2.374.888.548	803.154.907	728.556.128,69	737.492.709,88
115191	Piutang Bea Masuk Aneka Duplek	192.624.933	-	(192.624.933)	22.958.375,00	23.150.999.935
115193	Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan	7.412.153	213.511.200	206.099.047	-	220.923.355
115183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	1.165.005.595	2.897.344.000	1.732.338.405	1.383.476.508	1.823.556.233,77
115184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	107.362.954	160.905.178	53.542.224	313.559.500	349.027.095,86
115185	Piutang Pungutan ekspor	1.641.402.840	2.160.903	519.501.063	-	155.467.217,49
115186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	141.335	-	(141.335)	16.036.999,081	16.037.140,416
115187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	-	43.300	43.300	536.131,390	536.174.690
115161	Piutang Cukai Hasil Tembakau	43.990.562.702	106.336.000	62.346.438,300	69.979.788,166	114.076.686,86
115162	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	60.600	-	(60.600)	-	60.600
115163	Piutang Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	-	-	-	3.098.196,603	3.098.196,600
115164	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	4.767.555	-	(4.767.555)	27.504.643,707	27.509.411,262
115169	Piutang Pendapatan Cukai lainnya	54.695	27.816.760	27.762.065	12.378.661,367	12.406.532,822
115123	Piutang PPN Pasal 22 Impor	151.745.197	244.418.587	93.673.390	77.327.000	23.319.523,19
115142	Piutang PPhBM Impor	990	-	(990)	-	2.051.172,188
115132	Piutang PPN Impor	1.065.055.934	646.066.878	(418.989.056)	304.379.000	99.877.013,923
115174	Piutang Bunga Penangihan PPN	1.558.034	1.098.200	(459.834)	-	474.349,539
		49.899.489,16	6.674.589,55	(6.175.100,39)	7.069.101,00	3.388.774.933,31

**PIUTANG PAJAK DALUARSA PER
31 DESEMBER 2018 (Audited)
(dalam ribuan rupiah)**

Kode Akun	Nama Akun	DALUARSA
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	1.979.152.867.319
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	1.386.274.519.962
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	6.072.574.178
115154	Piutang PBB Kehutanan	217.840.784.822
115153	Piutang PBB Perkebunan	194.284.410.409
115155	Piutang PBB Pertambangan	4.886.102.453.558
115159	PBB Sektor Lainnya	-
115121	Piutang PPh Pasal 21	477.478.783.157
115122	Piutang PPh Pasal 22	32.819.090.366
115124	Piutang PPh Pasal 23	548.923.318.695
115125	Piutang PPh Pasal 25 Badan	6.192.327.443.680
115126	Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi	685.306.722.705
115127	Piutang PPh Pasal 26	353.277.160.761
115128	Piutang PPh Final	324.113.343.842
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	6.190.664.770.095
115141	Piutang PPnBM Dalam Negeri	71.088.938.090
115172	Piutang PTL	4.618.450
Jumlah		23.545.731.800.089

PIUTANG BUKAN PAJAK

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PIUTANG
PENERIMAN NEGARA BUKAN PAJAK PER 31
DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

LAMPIRAN 9

Mn	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (A UDITED)		31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	
			BRUTO	PENYISIHAN	BRUTO	PENYISIHAN
1	001	MAJELIS PERMUSAWAKATAN RAKYAT	170.026.803	(850.135)	169.176.669	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	600.181.033	(15.375.905)	584.805.128	(24.890.698)
3	004	BADAN PEMERIKSA KEJANGGAN	616.722.457	(79.594.140)	537.128.317	(25.439.867)
4	005	MAKAMAH AGUNG	918.553.121	(4.592.765)	913.960.356	(4.512.704)
5	006	KEMUSAKAN AGUNG	17.658.347.583.931	(11.389.499.015.869)	6.268.848.568.062	(11.232.408.079.064)
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	-	-	9.834.118	(49.170)
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	33.844.804.945	(4.905.287.529)	28.939.517.416	(1.081.373.246)
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	51.407.086.714	(257.614.420)	51.149.472.294	(241.191.323)
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	456.088.556.143	(32.578.121.269)	423.510.434.874	(35.088.135.064)
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	386.127.641.921	(347.983.315.237)	38.144.326.684	(39.843.265.606)
11	015	KEMENTERIAN KEJANGGAN	106.065.442.231	(45.572.869.279)	60.492.572.952	(45.673.329.718)
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	101.880.036.002	(2.408.637.087)	99.471.398.915	(312.781.522)
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	56.789.334.387	(27.054.979.774)	29.734.354.613	(27.567.081.593)
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	14.659.967.368.426	(13.715.443.026.585)	944.524.341.841	(10.099.483.949.336)
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	847.089.111.102	(266.486.929.509)	580.940.181.593	(22.455.062.296)

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PITANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PER 31
DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

LAMPIRAN 9

No	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)		31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENTHESIAN	BRUTO	PENTHESIAN	
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.150.450.806	(10.752.255)	323.373.693	(44.882.550)	278.491.143
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	30.317.031.629	(3.417.159.202)	26.899.872.427	(5.475.319.552)	36.219.132.699
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	16.032.073.364	(2.421.177.379)	13.610.895.985	(2.630.248.439)	7.968.144.263
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	120.649.943	(603.250)	120.046.693	(351.786)	70.005.407
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	343.275.773	(1.716.386)	341.559.387	(157.491.481)	178.276.480
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.999.519.410.852	(3.636.250.700.963)	363.268.709.889	(3.208.649.715.591)	396.175.336.123
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	57.096.652.401	(19.681.633.005)	37.413.019.396	(19.647.685.249)	36.128.803.545
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	393.573.107.028	(34.881.416.800)	358.691.690.228	(33.768.081.146)	140.619.278.621
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	-	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	184.217.101	(921.084)	183.296.017	(3.474.780)	691.481.469
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSAHA DAN KEBUDAYAAN	449.026.084	(2.245.132)	446.780.952	(647.529)	128.858.087
27	040	KEMENTERIAN PALMIBISATA	25.289.572.755	(126.447.863)	25.163.124.892	(157.811.237)	31.404.436.181
28	041	KEMENTERIAN PADAN UBAHA MILIK NEGARA	3.879.053.586	(444.922.415)	3.434.126.171	(440.616.754)	2.576.304.331
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	119.788.093.963	(64.042.573.002)	55.745.520.961	(101.845.812.986)	64.563.620.392
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	97.892.269.367	(97.393.704.417)	498.564.950	(89.845.174.398)	1.919.099.240

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 9

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PIUTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PER 31
DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (A UDITTED)		31 DESEMBER 2017 (AUDITTED)			
			BRUTO	PENYISIRAN	NETTO	BRUTO	PENYISIRAN	NETTO
31	047	KEMENTERIAN PERBENDAHARYAN PERBIJARAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	241.323.805	-	241.323.805	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN BENDAHARYAAN APARATUR NEGARA DAN BERORGANISASI BIRUKRASI	834.372.539	(417.1863)	830.200.676	1.995.4100	(99.771)	1.985.4329
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	1.145.882.259	(5.729.410)	1.140.152.849
35	052	DEWAN KETARAAN NASIONAL	-	-	-	2.018.000	(10.090)	2.007.910
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.621.948.090	(57.584.671)	2.564.363.419	1.946.347.573	(81.560.901)	1.864.786.672
37	055	KEMENTERIAN PRIBALAPPENAS	3.516.480	(17.582)	3.498.898	154.281.400	-	154.281.400
38	056	KEMENTERIAN AGRIKULTUR DAN TATA RILANGBUDAH PERTANJAHAN NASIONAL	3.065.256.942	(2.543.903.882)	521.353.260	4.073.366.909	(2.550.287.482)	1.523.079.427
39	057	PERUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKAS DAN INFORMATIKA	2.323.688.942.817	(2.198.455.907.576)	125.233.035.241	2.405.493.494.580	(2.175.923.549.751)	229.569.944.825
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	6.752.094.238	(9.576.595)	6.692.517.643	44.254.772.350	(247.089.986)	44.007.682.364
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.746.515.029	(13.732.576)	2.732.782.453	377.604.756	(1.888.024)	375.716.732
43	064	LEMBAGA KETARAAN NASIONAL	71.735.340	(358.676)	71.376.664	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINAS BERKAWANAN MODAL	29.563.380	-	29.563.380	38.406.235	(192.031)	38.214.204
45	066	BADAN NUKLIOTIKA NASIONAL	287.628.443	(1.438.145)	286.190.298	14.135.582.951	(175.617.083)	13.959.665.868

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PIUTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PER 31
DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

LAMPIRAN 9

No	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (A DUTTED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIRAN	NETTO	BRUTO	PENYISIRAN	NETTO
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DEWASA TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	14.895.514	(74.477)	14.821.037	964.895.514	(4.824.477)	960.071.037
47	068	BADAN KENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1.221.869.442	61.133.287	1.215.758.155	7.958.019.645	(39.646.723)	7.918.372.922
48	074	KOMISI NASIONAL HUKUM ASASI MANUSIA	425.000	(2.125)	422.875	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOG, KLIMATOLOG, DAN GEOFISIKA	40.350.361.621	(201.751.809)	40.148.609.812	2.808.079.592	(14.040.399)	2.794.039.193
50	076	KOMISI PEMILIHAN URAH	-	-	-	-	-	-
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	236.837.860	(1.184.189)	235.653.671	-	-	-
52	078	RISAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	4.879.096.474	(1.747.572.289)	3.131.524.175	5.864.453.726	(2.818.851.034)	3.045.602.692
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	4.362.560.602	(1.812.098.394)	2.550.462.208	3.385.333.470	(1.807.212.254)	1.578.121.216
55	081	BADAN PENGAJIAN DAN PENELITIAN TEKNOLOGI	35.100.915.315	(29.888.966.967)	5.211.948.348	53.303.623.314	(49.226.404.090)	4.077.219.224
56	082	LEMBAGA REPERANGKAN DAN ANTARKERJA NASIONAL	108.908.698	(544.543)	108.364.155	8.767.688.427	(43.838.485)	8.723.859.932
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1.585.146.089	(153.885.795)	1.431.260.294	2.512.459.030	(42.474.833)	2.469.984.197
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	1.101.085.944	(21.681.407)	1.079.404.537	1.809.585.944	(9.047.930)	1.800.538.014
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	26.040.828	(130.204)	25.910.624	58.468.470	(292.343)	58.176.127
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	485.956.341	(2.429.782)	483.526.559	158.216.952	(791.085)	157.425.867

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 9

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PIUTANG
PENERIMAN NEGARA BUKAN PAJAK PER 31
DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

No.	BA	31 DESEMBER 2018 (A UDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
		BRUTO	PENTSIHAN	NETTO	BRUTO	PENTSIHAN	NETTO
	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA						
61	087	-	-	-	-	-	-
62	088	1.194.544.373	(313.662.276)	880.882.097	706.503.121	(307.953.706)	398.549.415
63	089	-	-	-	-	-	-
64	090	10.034.043.078	(171.690.419)	9.862.352.659	22.535.809.851	(231.443.690)	22.304.366.161
65	092	30.406.745	(152.034)	30.254.711	303.002.210	(1.515.011)	301.487.199
66	093	576.147.537.379	(10.677.075.615)	565.470.461.764	523.774.435.781	(17.036.892.655)	506.737.543.126
67	095	225.846.455	(1.129.232)	224.717.223	105.479.044	(527.395)	104.951.649
68	100	-	-	-	-	-	-
69	103	114.048.605	(570.243)	113.478.362	-	-	-
70	104	-	-	-	2.573.110.780	(2.562.196.346)	10.914.434
71	105	-	-	-	306.213.128	(296.573.750)	9.639.378
72	106	101.308.655	(506.544)	100.802.111	81.797.154	(408.986)	81.388.168
73	107	30.341.969.149	(27.167.783.497)	3.174.185.652	28.928.600.000	(27.322.670.000)	1.605.930.000
74	108	162.347.404.463	(152.173.372.020)	10.174.032.443	159.528.084.343	(145.344.844.188)	14.183.240.155
75	109	646.249.000	(3.231.245)	643.017.755	549.388.956	(2.746.944)	546.642.012

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 9

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PIUTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PER 31
DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (A UDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENTSIHAN	NETTO	BRUTO	PENTSIHAN	NETTO
76	110	OHGUDSIAN REPUBLIK INDONESIA	37.014.633	(185.073)	36.829.560	119.447.063	(597.235)	118.849.828
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PEDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	1.966.135.668	-	1.966.135.668	2.031.729.289	-	2.031.729.289
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGALANGAN TERORISME	-	-	-	6.990.000	(4.950)	6.955.050
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	1.019.999.998	-	1.019.999.998
81	115	BADAN PENGAWAS PERILU	-	-	-	-	-	-
82	116	LEMBAGA PENYARAFAN PUBLIK RRI	2.051.472.500	(1.166.621.888)	884.850.612	3.369.035.985	(1.134.557.081)	2.234.478.904
83	117	LEMBAGA PENYARAFAN PUBLIK TVRI	101.396.470.471	(89.403.169.333)	11.993.301.138	123.983.091.557	(84.078.585.153)	39.904.506.404
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PEDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1.768.746.963	(1.523.968.203)	244.778.760	1.213.035.410	(11.992.724)	1.201.042.686
85	119	BADAN KEAHWAN LAUT	-	-	-	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEHUTANAN	545.277.384	(2.726.387)	542.550.997	1.281.793.530	(4.034.298)	1.277.759.232
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	73.474.787	(367.374)	73.107.413
JUMLAH PADA K/L			42.436.309.638.220	(32.208.204.176.309)	10.228.045.449.911	37.946.996.996.919	(27.798.207.844.987)	10.148.787.792.932
88	999	ENDAHARA UMUM NEGARA	133.806.951.655.973	(93.997.385.751.924)	39.809.565.904.049	120.673.577.411.638	(99.456.395.011.878)	21.217.182.399.762
TOTAL			176.243.261.284.193	(126.205.649.936.233)	50.037.611.353.960	158.620.579.008.549	(127.254.602.856.245)	31.365.970.153.304

(dalam Rupiah)

**RINCIAN PIUTANG EKS
BANK DALAM LIKUIDASI**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA RINCIAN
PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI
PER 31 DESEMBER 2018**

LAMPIRAN 10

No.	ASAL BANK BDL	Tanggal BAST Aset	Setoran Kas Ke Rekening BUKU 3021.00000000990			Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2018	Nilai Hak Aset Yang Diserahkan Berdasarkan Laporan	Saldo Hak Tagih 31 Desember 2018
			Pengembalian Tahun 2017	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2017	Pengembalian Periode Tahun 2018			
1	2		15	5	6	7	8	
BDL Eks Dana Talangan								
1	PT. Bank Arctico	07 Juni 2007	8.150.345,00	62.432.303.026,78	334.604.591,00	72.289.864.937,85	140.797.811.123,91	137.790.863.417,88
2	PT. Bank Guna Internasional	08 Maret 2007	173.803.487,00	53.693.771.137,21	1.012.429.346,00	238.261.158.483,23	106.107.201.031,41	12.793.849.516,79
3	PT. Bank Harapan Sentosa	08 Maret 2007	382.021.799,00	105.445.778.465,52	271.508.051,00	691.445.343.015,52	136.297.409.195,04	3.174.736.969.836,53
4	PT. Bank Citrastra Dharmasuratji	08 Maret 2007	527.736.991,00	8.939.838.669,00	9.090.909,00	34.047.118.415,19	172.736.782.621,00	167.735.048.520,11
5	PT. Bank Kasagraha Semesta Segahtera	08 Maret 2007	523.820.349,00	52.269.852.048,83	18.181.818,00	99.160.235.937,83	157.450.001.984,00	102.652.378.353,65
6	PT. Bank Marusan Dhasura	08 Maret 2007	0,00	9.507.058.537,00	0,00	40.693.058.537,00	6.760.484.884,78	296.070.151.329,98
7	PT. Bank Pacific	08 Maret 2007	291.480.270,00	276.328.490.911,96	10.306.543.092,00	618.658.110.271,76	1.638.279.007.000,00	1.514.708.324.567,87
8	PT. Sejahtera Bank Umum	08 Maret 2007	2.068.322.313,00	366.250.312.955,15	7.724.410.996,00	1.231.261.941.344,85	1.015.640.110.944,05	455.987.574.027,23
9	PT. South East Asia Bank	08 Maret 2007	0,00	97.482.364.439,79	0,00	196.785.083.820,68	181.953.841.474,06	702.613.939.485,31
10	PT. Bank Dwipa Semesta	17 Januari 2008	370.997.961,00	28.035.558.872,00	0,00	34.995.693.472,00	114.546.599.155,04	75.110.203.658,87
11	PT. Astra Raya Bank	31 Maret 2008	2.036.818.273,00	69.792.196.192,42	13.074.954.600,00	214.816.6754.392,42	56.733.811.678,21	364.101.506.306,35
12	PT. Bank Praisahan	05 Maret 2008	498.784.053,00	46.854.867.581,52	283.417.291,00	65.594.664.972,63	92.182.282.117,24	615.489.525.946,95
13	PT. Bank Jelara		0,00	90.034.069.938,00	0,00	210.993.999.999,67	81.323.394.608,00	0,00
14	PT. Bank Indostri	Suabah BAST	39.484.546,00	83.226.130.623,00	731.891.677,00	263.181.822.350,00	238.276.207.422,00	148.288.406.976,68
15	PT. Bank Union Majapahit Jaya	Tl. Babar Sebelum BAST	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	6.054.789.642,67
Total BDL Eks Dana Talangan			6.921.420.387,00	1.380.382.543.448,18	33.786.832.371,00	4.114.783.149.970,56	4.037.801.644.028,03	7.774.153.031.587,29

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA RINCIAN
PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI
PER 31 DESEMBER 2018**

LAMPIRAN 10

No.	ASAL BANK BDL	Tanggal BAST Aset	Pengembalian Tahun 2017	Setoran Kas Ke Rekg. BUK 502.0000000980		Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2018	Nilai Buku Aset Yang Diperkirakan Berdasarkan Laporan	Saldo Hak Tagih 31 Desember 2018	
				Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2017	Pengembalian Periode Tahun 2018				
1	2		15	5	6	7 = Jumlah 4.s.d. 6		8 = 3 - 7	
BUL eks Dana Pemajanaan									
1	PT Bank Asiatik		2.678.511.707,00	83.700.289.552,00	685.569.126,00	89.385.858.678,00		797.193.365.765,83	
2	PT Bank Djarum Bali		73.707.577.815,00	490.159.813.294,00	3.998.645.569,00	494.158.458.863,00		837.358.452.614,24	
3	PT Bank Global Internasional		481.500.000,00	325.276.936.482,00	519.650.000,00	325.806.586.482,00		478.427.683.913,51	
4	PT Bank Ratu		41.817.985.352,00	71.817.985.352,00	0,00	71.817.985.352,00		0,00	
5	PT Bank Prudha Utama		0,00	16.898.914.545,52	0,00	20.898.914.545,52		206.235.644.598,48	
Total BDL Eks Dana Pemajanaan			118.685.574.874,00	987.883.939.225,52	8.213.864.695,00	1.002.097.803.920,52		2.819.218.146.892,04	
TOTAL SALDO PIUTANG BDL				TOTAL PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI					10.099.308.778.479,40

**RINCIAN ASET KREDIT EKS
BPPN DAN EKS PT PPA**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2018 (Audited)

LAMPIRAN 11.A

Uraian	Debitur ATK di PUPN	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	Dikelola Kantor Pusat (debitur ATK)	Grand Total
JUMLAH	18.157.554.088,107,6	26.708.951.618.345,3	28.583.268.405.495,7	73.449.774.111.948,6

1. Aset Kredit Yang Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN *

a. Aset Transfer Kit (ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Dollar Amerika	542.894.417,41	7.861.654.058.514,2	541.235.832,35	7.332.663.056.677,8
Rupiah	7.707.129.407.177,6	7.707.129.407.177,6	7.410.962.766.853,0	7.410.962.766.853,0
Yen Jepang	5.615.941.858,8	736.334.778.417,3	5.615.941.858,8	675.139.544.763,9
Euro	13.093.102,45	216.818.503.296,3	13.093.102,45	211.762.863.647,3
		16.521.936.747.405,50		15.630.528.231.942,20

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2018 (Audited)

b Non Asset Transfer Kit (Non ATK) telah PB/PJPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Dollar Amerika	28.356.584,87	410.631.705.502,4	28.356.584,87	384.175.011.818,7
Rupiah	1.224.986.625.699,6	1.224.986.625.699,6	1.228.619.059.526,8	1.228.619.059.526,8
		1.635.618.331.202,1		1.612.794.071.345,5

**Aset kredit Non ATK telah memperhatikan tahap pengurusan yang telah PB/PJPN*

a+b Total

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Dollar Amerika	571.251.002,28	8.272.285.764.016,6	569.592.417,22	7.716.838.068.496,5
Rupiah	8.932.116.032.877,2	8.932.116.032.877,2	8.639.581.826.379,8	8.639.581.826.379,8
Yen Jepang	5.615.941.858,8	736.334.778.417,3	5.615.941.858,8	675.139.544.763,9
Euro	13.093.102,45	216.818.503.296,3	13.093.102,45	211.762.863.647,3
Jumlah		18.157.555.078.607,6		17.243.322.303.287,8

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2018 (Audited)

LAMPIRAN 11.A

2. Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Nama Obligor	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2018	Mutasi TA 2018	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)
Agus Anwar	Bank Pelita Istismarat	577.812.000.000,0	0,00	577.812.000.000,0
Atang Latief	Bank Indonesia Raya	155.727.000.000,0	0,00	155.727.000.000,0
Baringin Marulam Hasiholan Panggabean & Joseph Januardy	Bank Namura	170.144.000.000,0	0,00	170.144.000.000,00
David Nusa Wijaya/Tarunojoro Nusa	Bank Servita	4.308.730.000.000,0	0,00	4.308.730.000.000,0
Dewanto Kurniawan	Bank Deka	0,00	0,00	0,00
Fadel Muhammad	Bank Intan	136.430.000.000,0	0,00	136.430.000.000,0
Hengky Wijaya	Bank Tata Internasional	596.794.000.000,0	0,00	596.794.000.000,0
I.M. Sudarta/IGD Darmawan	Bank Aken	509.986.363.636,0	0,00	509.986.363.636,0
Kaharudin Ongko	Bank Umum Nasional	7.831.110.763.791,1	0,00	7.831.110.763.791,1
Lidia Muchtar	Bank Tamara	188.483.118.182,0	0,00	188.483.118.182,0
Marimutu Sinivasan	Bank Putra Multikarsa	790.557.000.000,0	0,00	790.557.000.000,0

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2018 (Audited)**

Samadikun Hartono	Bank Modern	2.525.651.574.703,0	0,00	2.525.651.574.703,0
Santoso Sumali	Bank Metropolitan	70.460.000.000,0	0,00	70.460.000.000,0
Santoso Sumali	Bank Bahari	406.415.000.000,0	0,00	406.415.000.000,0
Trijono Gondokusumo	Bank Putera Surya Perkasa	4.893.525.874.669,0	0,00	4.893.525.874.669,0
Utung Bursa	Bank Lautan Berlian	424.656.000.000,0	0,00	424.656.000.000,0
KAHARUDIN ONGKO	Bank Arya Panduarta	359.435.826.603,7		0,00
SUJANTO GONDOKUSUMO	Bank Dharmala (BBKU)	822.254.323.305,3		0,00
HINDARTO TANTULAR/ANTON TANTULAR	Bank Central Dagang	1.470.120.709.878,0		0,00
SJAMSUL NURSALIM	Bank Dewa Rutji (BBKU)	470.658.063.577,0		0,00
Jumlah		26.708.951.618.345,3	0,00	23.586.482.694.981,2

Catatan:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2018 (Audited)

LAMPIRAN 11.A

3. a) Dikelola Kantor Pusat (Debitur ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Rupiah	11.364.155.398.555,0	11.364.155.398.555,0	11.484.758.087.138,0	11.484.758.087.138,0
Dollar Amerika	996.655.658,92	14.432.570.596.820,5	996.655.658,92	13.502.690.867.048,2
Yen Jepang	998.413.744,00	130.907.117.885,9	998.413.744,00	120.027.702.841,6
Deutschmark	0,00	0,00	0,00	0,00
Euro **	436.387,00	7.226.459.623,2	436.387,00	7.057.957.510,9
Dollar Australia	1.332.783,00	13.609.433.720,0	1.332.783,00	14.070.576.638,0
Poundsterling**	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		25.948.469.006.604,8		25.128.605.191.176,9

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2018 (Audited)

b) ATK Lainnya

	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Koreksi ATK yang tercatat non ATK	Rupiah	271.003.330.923,9	271.003.330.923,9	271.003.330.923,9	271.003.330.923,9
Koreksi ATK sesuai LHP BPK TA 2012	Rupiah	1.980.529.395.026,3	1.980.529.395.026,3	1.980.529.395.026,3	1.980.529.395.026,3
Eraska Tristi	Dolar Amerika	26.403.988,65	382.356.159.640,6	26.403.988,65	357.721.238.230,2
PT Teratai Mahkota	Rupiah	893.182.300,00	893.182.300,00	893.182.300,00	893.182.300,00
Penyerahan Aset Kredit 2016 yang belum tercatat pada KPKNL	Rupiah	17.331.000,00	17.331.000,00	17.331.000,00	17.331.000,00
	Rupiah	0,00	0,00	1.623.424.334,0	1.623.424.334,0
Total		2.634.799.398.890,9	2.634.799.398.890,9	2.611.787.901.814,4	2.611.787.901.814,4

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2018 (Audited)

LAMPIRAN 11.A

Catatan

	Kurs Tengah BI	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Dolar Amerika	14.481,00	13.548,00
2	Yen Jepang	131,12	120,22
3	Deutschmark	8.466,87	8.269,44
4	Euro	16.559,75	16.173,62
5	Dolar Australia	10.211,29	10.557,29
6	Poundsterling	18.372,78	18.218,01
7	Dolar Singapura	10.602,97	10.133,53

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2018**

	Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Dikelola Kantor Pusat	Grand Total Per 31 Desember 2018
TOTAL	4.021.040.786.202,2	5.203.783.891.104,0	9.224.824.677.306,3

1. Debitur Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negeranya kepada PUPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Dollar Amerika	106.812.508,72	1.546.751.938.774,3	106.812.508,56	1.447.095.865.964,4
Dollar Singapore	79.397,45	841.848.780,43	79.397,45	804.576.441,50
Rupiah	2.448.509.128.092,7	2.448.509.128.092,7	2.448.683.794.112,4	2.448.683.794.112,4
Yen Jepang	141.216.722,50	18.515.644.692,2	141.216.722,50	16.976.848.432,1
Deutchmark	758.512,78	6.422.225.862,4	758.512,78	6.272.476.375,1
Jumlah		4.021.040.786.202,2		3.919.833.561.325,7

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 11.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2018

**2. Debitur Dikelola Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat
PKNSI**

Nama Debitur	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2018 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 (audited)
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	1.299.150.000,0	1.299.150.000,0
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	108.990.024,00	108.990.024,00
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	34.584.020.409,7	34.584.020.409,7
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	69.168.040.819,5	69.168.040.819,5
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	62.099.370.000,0	62.099.370.000,0
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	30.938.810.688,8	30.938.810.688,8
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	112.771.449.858,24	112.771.449.858,24
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	425.983.823.548,50	425.983.823.548,50
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	8.693.911.800,0	8.693.911.800,0
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	91.489.249.097,0	91.489.249.097,0
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	1.212.685.353.877,9	1.212.685.353.877,9
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	26.981.928.647,6	26.981.928.647,6
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	615.025.707.374,47	615.025.707.374,47
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	45.000.000.000,0	45.000.000.000,0
PT Tuban Petrochemical Industries*	MCB & MYB	873.811.488.440,40	0,00
Jumlah		3.610.641.294.586,2	2.736.829.806.145,8

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2018

Group Texmaco (dalam perkara)*						
No.	Debitur	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
1	Jaya Perkasa Engineering, PT	Rupiah	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00
		Dollar Amerika	38.822.432,00	562.187.637.792,00	38.822.432,00	525.966.308.736,00
2	Polysindo Eka Perkasa, PT	Rupiah	459.555.536,00	459.555.536,00	459.555.536,00	459.555.536,00
		Dollar Amerika	960.092,00	13.903.092.252,0	960.092,00	13.007.326.416,00
3	Texmaco Jaya, PT	Rupiah	365.572.613,00	365.572.613,00	365.572.613,00	365.572.613,00
		Dollar Amerika	2.435,00	35.261.235,00	2.435,00	32.989.380,00
4	Wastra Indah, PT	Rupiah	10.493.948,00	10.493.948,00	10.493.948,00	10.493.948,00
5	PT Bina Prima Perdana	Rupiah	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00
		Dollar Amerika	25.540.008,00	369.844.855.848,00	25.540.008,00	346.016.028.384,00
Grand Total				1.568.573.257.460,0		1.507.625.063.249,0

* Berdasarkan Perjanjian dengan PT. PPA tahun 2013

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN 11.B

5 Debitur eks kelolaan PT PPA sesuai LHP BPK tahun anggaran 2013

No	Nama debitur	Mata uang	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2017 (audited)
1	PT Citra Makmur Asia	Rupiah	24.561.586,875,0	24.561.586,875,0
2	Abdul Hadi	Rupiah	4.911.933,42	4.911.933,42
3	Faridah	Rupiah	2.528.941,32	2.528.941,32
4	Haryanto	Rupiah	59.266,60	59.266,60
5	Zainal Abidin	Rupiah	252.041,46	252.041,46
Total			24.569.339.057,8	24.569.339.057,8

Catatan

Kurs Tengah BI	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1 Dollar Amerika	14.481,00	13.548,00
2 Yen Jepang	131,12	120,22
3 Deutschmark	8.466,87	8.269,44
4 Euro	16.559,75	16.173,62
5 Dollar Australia	10.211,29	10.557,29
6 Poundsterling	18.372,78	18.218,01
7 Dollar Singapura	10.602,97	10.133,53

BAGIAN LANCAR TP/TGR

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERSEDAHAARAN/TUNTUTAN GANTI Rugi
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

Table with columns: No, DA, KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 31 DESEMBER 2018 (AUDITED) (BUDJO, PERTYAIRAN, NETTO), 31 DESEMBER 2017 (AUDITED) (BUDJO, PERTYAIRAN, NETTO). Rows include various government departments like Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pengelola Keuangan, etc.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERSEDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

No	DA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			DEBIT	PERYISIRAN	NETO	DEBIT	PERYISIRAN	NETO
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	62.068.936	(310.344)	61.758.612	62.068.936	(310.344)	61.758.612
61	087	KORPRI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN PENGAWASAN NEGARA	-	-	-	3.499.500	(17.490)	3.482.002
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	873.971.230	(4.359.856)	869.601.394	114.411.230	(372.036)	113.839.194
64	090	KEHENTERAN PERDAGANGAN	101.466.224	(307.232)	100.958.992	94.823.224	(474.117)	94.349.207
65	092	KEHENTERAN PELUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-
66	093	KOMISI PERBERANTANGAN KORUPSI	162.032.709	(6.282.654)	155.750.045	154.541.424	(772.707)	153.768.747
67	095	DEWAN PERAWALAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	331.468.883	(245.924.342)	285.574.541	4.092.473.100	(404.806.029)	3.687.667.121
70	104	BADAN NASIONAL PENYIARAN DAN PEMBANGUNAN TENAGA KERJA INDONESIA	192.580.000	(12.262.900)	180.217.100	353.423.227	(179.991.200)	173.431.977
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBERAGAMAN PENGADUAN BAKARANGGALKA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	4.060.000	(20.300)	4.039.700	3.220.000	(26.100)	3.193.900
74	108	KOMISI PERANGKAIAN PENGAWASAN USAHA	664.701.149	(456.883.215)	207.817.934	630.728.070	(304.373.823)	126.152.247
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-
76	110	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERSATASIAN	-	-	-	-	-	-
78	112	BADAN PENGLAHDHAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELALUPAN BEBAS BATAH	-	-	-	-	-	-
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PERBELU	-	-	-	-	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	181.431.044	(148.918.027)	32.533.017	207.548.644	(147.181.447)	60.367.197
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	188.620.978	(464.100)	188.156.878	20.000.000	-	20.000.000
84	118	BADAN PENGLAHDHAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELALUPAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
86	120	KEHENTERAN KOORDINATOR SDANG KEMABITIRAN	-	-	-	-	-	-
87	121	BADAN BUDIDHI KREATIF	165.144.000	(823.720)	164.318.280	14.589.000	(72.943)	14.516.055
		TOTAL	132.923.950.960	(87.509.908.248)	45.413.990.611	134.438.614.178	(88.612.532.992)	45.827.081.186

PERSEDIAAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	11.286.396.319	7.483.566.263
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	23.226.536.663	18.560.434.078
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	15.843.612.528	15.887.954.266
4	005	MAHKAMAH AGUNG	23.353.040.743	18.069.171.901
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	468.311.929.929	340.677.490.552
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	596.880.169.078	567.141.947.498
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	170.851.287.822	279.686.794.522
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	63.604.896.877	47.636.453.144
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	57.801.718.824.526	48.618.947.782.931
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	411.488.366.832	547.645.750.308
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	368.543.028.343	376.664.699.351
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	889.356.431.578	553.130.416.941
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	312.622.732.637	410.615.589.704
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.027.676.296.737	843.424.910.555
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	8.189.041.789.589	7.022.058.287.675
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.232.210.766.192	1.428.258.639.787
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	8.848.474.789.132	3.443.123.902.754
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	81.382.238.309	67.960.460.498
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	416.157.184.324	18.111.579.777
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	451.765.319.891	478.497.291.788
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	973.194.410.140	536.427.131.856
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	187.113.345.598	851.505.706.652
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	10.117.302.555.177	4.398.225.644.611
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	13.038.950	26.603.867
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	781.297.894	680.594.496
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	1.828.380.778	1.624.989.732
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	29.104.736.750	37.730.094.642
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.633.934.371	759.008.096
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	2.809.327.268.968	1.802.435.378.484
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	64.301.362.339	2.072.111.304
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.426.066.348	19.220.776.479
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.474.233.641	757.741.009
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	11.181.461.354	2.473.967.943

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	611.821.950	1.290.554.583
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	3.647.425
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	29.209.225.390	28.528.286.333
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.003.556.532.748	482.466.729.156
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	82.903.600.336	75.566.143.863
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	11.868.690.299	26.187.007.204
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.442.895.214	16.728.626.689
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	5.823.228.307.786	4.980.541.918.826
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	155.641.585.196	121.624.164.634
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	249.894.626	329.336.508
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	2.156.865.494	2.338.336.351
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	36.902.363.191	39.811.236.832
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	581.713.720.524	399.770.817.759
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	623.579.528.663	639.967.637.712
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	527.832.004	280.124.178
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	114.812.864.174	97.229.087.022
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.050.272.584.033	355.853.933.684
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	2.052.266.170	1.619.210.613
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	1.772.854.264	980.510.696
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	81.013.520.966	92.518.037.456
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	66.781.667.696	60.036.135.675
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	14.646.643.456	13.534.849.078
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	57.318.366.099	54.955.291.470
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	131.413.937.869	130.224.546.891
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	111.866.751	182.863.000
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	3.252.036.988	2.789.540.385
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	2.640.228.608	2.930.769.434
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.268.275.397	1.385.672.418
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	11.054.864.115	9.655.127.921
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	9.843.219.941	6.963.618.456
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.881.570.620.917	36.526.527.839
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	498.832.224.112	180.369.796.059
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.098.833.089.639	842.295.854.659
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	790.360.885	956.735.193
68	100	KOMISI YUDISIAL	484.539.172	600.075.136

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIaan
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	234.196.545.653	317.831.111.871
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	45.677.965.002	45.558.182.496
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	5.467.142.113
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	1.060.478.766	766.276.037
73	107	BADAN SAR NASIONAL	157.465.334.995	152.152.104.712
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	368.339.492	302.686.686
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	90.363.242.495	227.111.413.322
76	110	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	837.246.364	878.410.028
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	11.331.227.996	12.903.122.585
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	18.626.355.115	16.260.345.536
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	438.355.222	446.582.121
80	114	SEKRETARIAT KABINET	1.763.974.162	1.899.303.426
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	169.498.213	187.822.279
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	4.855.554.074	4.849.642.361
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	2.544.479.692	4.383.256.789
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	206.172.928	231.005.071
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	15.325.391.914	4.672.748.150
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	321.591.664	370.324.846
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	874.545.140	1.425.205.930
JUMLAH PADA K/L			112.585.262.923.923	82.262.262.310.961
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	5.394.004.262	2.039.495.859.264
TOTAL			112.590.656.928.185	84.301.758.170.225

IKHTISAR LK
PERUSAHAAN NEGARA

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN 14.A

KOD	NAMA	STATUS LAPORAN	REKONSILIASI	AKTIF LABA	AKTIF PASIVA	TOTAL AKTIF	LIABILITAS	LIABILITAS	TOTAL LIABILITAS	SOLUSI BUKAN	KEMERUSAKAN	PUNJUK	ESTIMASI	NETO LABA	SUDUT TAJUK		RUBRIK AKTIF	RUBRIK PASIVA	RUBRIK PASIVA	RUBRIK PASIVA	RUBRIK PASIVA	RUBRIK PASIVA	RUBRIK PASIVA		
															1	2								3	4
				1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9	10	11	12=11+10+11	13	14=13+12								
1	Piutang Pemerintah	Auditor 2018		3.314.205	12.277.655	16.031.954	987.072	4.004.081	4.991.154	2.585.202	11.234.148	-	778.180	10.294.432	11.068.572	0.285	11.295.819								
2	Piutang Perusahaan Indonesia	Auditor 2018		328.852	394.208	911.032	225.932	259.294	485.226	241.434	1.005	-	7.822	82.122	413.794		413.794								
3	Piutang Negara/ Lembaga Indonesia/ Pemerintah	Auditor 2018		1.693.412	9.211.798	12.425.185	1.292.897	4.032.407	7.228.204	1.091.345	1.005	-	3.288.242	1.180.032	5.594.242		6.098.899								
4	Piutang Perusahaan Luar Negeri	Auditor 2018		167.682	484.887	652.572	71.247	292.118	364.182	200.217	-	-	2.713	114.139	468.295		468.295								
5	Piutang Perusahaan/ Lembaga/ BUMN/ Pemerintah	Auditor 2018		18.874.542	107.442.887	126.317.432	28.623.084	41.472.118	68.098.202	24.029.877	798	-	22.917.222	110.849.798	51.128.102	3.092.828	58.221.932								
6	Piutang Bank	Auditor 2018		23.228.557	8.216.446	42.444.955	31.688.112	952.023	21.627.127	12.522.282	-	-	251.023	11.272.527	10.897.977	82.211	10.897.977								
7	Piutang Jasa/ Jasa I	Auditor 2018		331.082	333.932	665.014	119.812	18.827	138.639	31.701	-	-	1.284	692.639	727.946	613	728.565								
8	Piutang Jasa/ Jasa II	Auditor 2018		751.234	585.512	1.316.798	182.921	79.403	262.324	164.348	-	-	18.686	949.512	1.064.432	10.000	1.074.432								
9	Piutang Negara/ Lembaga/ BUMN/ Pemerintah	Auditor 2018		57.847.284	81.256.052	139.103.479	24.524.444	48.532.148	72.878.592	23.000.000	-	-	29.225.812	11.498.803	62.821.812	203.071	66.024.888								
10	Piutang Perusahaan/ Lembaga/ BUMN/ Pemerintah	Auditor 2018		2.291.928	5.099.225	7.401.152	748.202	893.019	1.428.222	2.992.000	-	-	1.888.119	2.682.724	3.942.812		3.942.812								
11	Piutang Perusahaan/ Lembaga/ BUMN/ Pemerintah	Auditor 2018		3.269.542	4.090.872	7.360.414	1.274.202	2.229.642	3.503.844	328.400	-	-	67.432	6.102.942	6.431.244		6.431.244								
12	Piutang Bank	Auditor 2018		522.488	1.377.722	1.900.210	520.448	39.318	559.766	73.000	-	-	8.282	22.222	106.222		106.222								
13	Piutang Perusahaan/ Lembaga/ BUMN/ Pemerintah	Auditor 2018		227.112	222.192	449.304	729.292	1.229.172	1.958.464	524.000	1.000	-	-	11.021.172	12.022.172		12.022.172								
14	Piutang Perusahaan/ Lembaga/ BUMN/ Pemerintah	Auditor 2018		824.222	288.222	1.112.444	318.222	289.222	607.444	1.011.222	-	-	21.222	728.222	749.444		749.444								
15	Piutang Perusahaan/ Lembaga/ BUMN/ Pemerintah	Auditor 2018		328.222	327.222	655.444	98.222	89.222	187.444	600.000	-	-	-	141.222	748.666		748.666								
16	Piutang Perusahaan/ Lembaga/ BUMN/ Pemerintah	Auditor 2018		487.492	274.822	762.314	827.222	118.444	945.222	208.222	81.222	-	-	102.222	494.444	494.444		494.444							
17	Piutang Perusahaan/ Lembaga/ BUMN/ Pemerintah	Auditor 2018		218.292	282.982	501.274	118.292	202.292	260.484	113.292	1.808.819	-	8.298.124	140.292	280.702	291.210	495.523	787.232							
18	Piutang Perusahaan/ Lembaga/ BUMN/ Pemerintah	Auditor 2018		285.292	283.212	568.504	72.862	22.220	95.082	220.000	108	-	22.829	224.222	224.222	1	224.222								
19	Piutang Perusahaan/ Lembaga/ BUMN/ Pemerintah	Auditor 2018		21.192	27.202	48.394	44.472	2.229	47.222	12.222	-	-	-	12.472	29.694	29.694		29.694							
20	Piutang Perusahaan/ Lembaga/ BUMN/ Pemerintah	Auditor 2018		178.412	9.227.982	9.406.394	197.812	1.025.422	1.223.234	101.222	82	-	8.494.292	113.222	8.607.514	8.607.514		8.607.514							
21	Piutang Perusahaan/ Lembaga/ BUMN/ Pemerintah	Auditor 2018		283.242	1.483.122	1.766.364	206.122	142.122	348.244	880.000	297.808	-	-	192.422	1.497.614	1.497.614		1.497.614							
22	Piutang Perusahaan/ Lembaga/ BUMN/ Pemerintah	Auditor 2018		228.212	148.522	376.734	92.822	22.220	115.042	44.000	181	-	-	152.422	228.442	47	228.442								
23	Piutang Perusahaan/ Lembaga/ BUMN/ Pemerintah	Auditor 2018		426.172	2.864.882	3.291.054	142.978	1.007.281	1.150.259	196.200	-	-	116.244	2.008.172	2.124.424	3.174	2.127.598								
24	Piutang Perusahaan/ Lembaga/ BUMN/ Pemerintah	Auditor 2018		545.002	483.722	1.028.724	378.472	48.292	426.764	271.000	-	-	11.442	125.448	325.922		325.922								
25	Piutang Perusahaan/ Lembaga/ BUMN/ Pemerintah	Auditor 2018		2.824.922	3.208.422	6.033.344	1.084.292	1.084.292	2.168.584	425.212	-	-	2.018.528	1.215.248	3.383.772	3.383.772		3.383.772							
26	Piutang Perusahaan/ Lembaga/ BUMN/ Pemerintah	Auditor 2018		923.242	1.279.872	2.203.114	137.802	487.172	624.974	199.828	274.222	-	-	19.828.002	20.452.222	546.222	20.998.444								
27	Piutang Perusahaan/ Lembaga/ BUMN/ Pemerintah	Auditor 2018		622.202	1.242.202	1.864.404	322.408	124.202	446.610	202.942	111.908	-	-	9.220	1.028.872	1.028.872		1.028.872							

(dalam jutaan rupiah)

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2018**

NO	URAIAN	STATUS LAPORAN	REPERSENTASI	ASSET/LANCAH		TOTAL ASSET/LANCAH	LIABILITAS/KEWAJIBAN		TOTAL LIABILITAS/KEWAJIBAN	NETO EKUITAS/KEWAJIBAN	TAMBAHAN/KEURAIAN	DEFISIENSI	KETERANGAN	SALDO LAMA	REPERSENTASI SALDO LAMA	REPERSENTASI SALDO LAMA PER 31 DESEMBER 2017	REPERSENTASI SALDO LAMA PER 31 DESEMBER 2018	PERUBAHAN	REPERSENTASI PERUBAHAN	
				1	2		3	4												5
52	PT Garuda Indonesia (Persero)	Auditor 2018		9.476.902	3.534.676	13.011.572	7.494.418	2.051.619	9.546.037	21.167.765	74.251	-	1.877.206	119.671.182	2.448.514	100,00	2.448.514	100,00	3.448.514	
53	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Auditor 2018		23.429.244	4.689.871	28.119.115	18.964.329	4.866.028	23.830.357	224.042	2.268.821	-	326.728	2.967.620	6.274.482	10,20	6.274.482	10,20	3.199.825	
54	PT Aneka Karya (Persero)	Auditor 2018		791.265	298.649	1.090.914	571.041	291.062	862.104	44.282	-	-	226.264	84.729	190.116	100,00	190.116	100,00	190.116	
55	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Auditor 2018		1.192.191	3.202.666	4.394.857	2.469.148	1.239.267	3.708.415	161.532	-	-	348.295	1.033.022	1.384.977	10,23	1.384.977	10,23	1.564.977	
56	PT Bukit Raya (Persero) Tbk	Auditor 2018		11.813.804	70.604.744	82.418.548	31.081.472	31.128.129	62.210.601	3.828.926	3.997.686	-	1604.892	9.487.279	16.928.502	3.290.482	20.198.984	70,00	11.813.804	
57	PT Bukit Tigapuluh (Persero) Tbk	Auditor 2018		66.989.191	57.402.441	124.391.632	26.799.288	26.794.726	98.594.464	1.237.292	3.252.028	-	744.292	10.247.409	18.001.112	10.886.000	28.887.119	64,64	11.887.292	
58	PT Bumi Karya (Persero) Tbk	Auditor 2018		43.553.499	13.674.502	57.228.001	28.251.925	12.762.724	41.014.649	896.992	7.829.029	-	597.606	3.479.923	14.802.614	10.886.000	28.887.119	64,64	11.887.292	
59	PT Bumi Serpong Damai (Persero)	Auditor 2018		14.813.262	49.220.244	64.033.506	18.921.231	26.980.182	45.901.413	6.100.000	-	-	487.494	4.044.182	10.811.678	4,24	10.811.678	100,00	10.811.678	
60	PT Bumi Perkotaan (Persero) Tbk	Auditor 2018		9.206.522	791.669	10.008.191	3.537.212	1.114.809	6.652.019	1.000	1.960.272	-	281.892	1.126.429	3.272.692	12,500	3.272.692	100,00	3.272.692	
61	PT Bumi Puncak (Persero)	Auditor 2018		41.697	53.646	95.343	9.894	447.028	466.921	19.000	-	-	46	37.664	24.908	34,928	54.596	100,00	54.596	
62	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Auditor 2018		2.622.928	11.297.902	14.020.830	2.677.748	4.863.526	7.541.276	1.790.000	-	527.123	1198.050	3.286.018	3.449.024	1.020.251	6.479.277	100,00	3.449.024	
63	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Auditor 2018		24.524.218	26.878.241	51.402.459	3.998.191	29.200.224	34.996.421	1.418.021	0,967.711	-	112.142	14.108.249	18.249.212	1.287.885	16.424.432	100,00	13.471.212	
64	PT Perusahaan Telekomunikasi Indonesia I (Persero)	Auditor 2018		6.482.862	24.042.847	30.525.710	3.254.212	16.526.696	20.126.402	1.018.921	-	-	28.742	8.021.242	9.079.228	1.276.072	10.215.214	100,00	9.079.228	
65	PT Perusahaan Telekomunikasi Indonesia II (Persero)	Auditor 2018		2.474.141	7.899.027	10.373.168	1.171.231	3.219.672	4.390.904	2.172.080	1.468	-	103.846	2.749.791	3.969.182	13,081	3.969.182	100,00	3.969.182	
66	PT Perusahaan Telekomunikasi Indonesia III (Persero)	Auditor 2018		258.328	226.282	500.210	151.029	189.212	340.241	7.000	97.202	-	1.792	60.072	163.976	100,00	163.976	100,00	163.976	
67	PT Pos Indonesia (Persero)	Auditor 2018		92.099	49.201	142.300	72.222	22.214	94.436	13.000	-	-	6.402	60.122	48.728	48,728	48.728	100,00	48.728	
68	PT Pos dan Logistik Internasional (Persero)	Auditor 2018		187.492	926.924	1.114.416	122.722	299.641	422.363	19.700	621.697	-	661.622	120.989	741.042	100,00	741.042	100,00	741.042	
69	PT Pos Telekomunikasi dan Teknologi (Persero)	Auditor 2018		102.124	202.844	304.968	152.726	197.877	350.603	221.795	271.029	-	3.520	140.093	48.222	48.222	100,00	48.222	100,00	48.222
70	PT Pos Telekomunikasi dan Teknologi (Persero) Tbk	Auditor 2018		3.268.966	2.026.166	5.295.132	944.925	20.249	972.202	1.941.292	0,16.798	-	29.778	2.619.290	4.649.822	4,649.822	4,649.822	100,00	4,649.822	
71	PT Pos Telekomunikasi dan Teknologi (Persero) Tbk	Auditor 2018		5.112.402	26.492.202	31.604.604	7.614.896	8.941.702	16.556.601	6.414.412	22.026	-	324.226	8.218.028	12.947.248	4,864	12.947.248	100,00	12.947.248	
72	PT Pos Telekomunikasi dan Teknologi (Persero) Tbk	Auditor 2018		3.207.929	22.021.929	25.229.858	4.798.892	10.106.946	14.905.838	7.000.000	4.424.924	-	120.140	8.218.028	22.916.722	282	22.916.722	100,00	22.916.722	
73	PT Pos Telekomunikasi dan Teknologi (Persero) Tbk	Auditor 2018		227.781	1.181.212	1.408.993	34.112	24.542	58.654	1.031	-	-	6.872	178.222	178.222	100,00	178.222	100,00	178.222	
74	PT Pos Telekomunikasi dan Teknologi (Persero) Tbk	Auditor 2018		409.792	86.202	496.000	227.228	2.202	229.030	25.000	-	-	8.872	121.222	222.222	222,222	222,222	100,00	222,222	
75	PT Pos Telekomunikasi dan Teknologi (Persero) Tbk	Auditor 2018		92.282	88.892	181.174	72.812	22.292	100.412	2.000	-	-	28.792	12.442	72.942	100,00	72.942	100,00	72.942	
76	PT Pos Telekomunikasi dan Teknologi (Persero) Tbk	Auditor 2018		267.822.821	340.221.221	608.044.042	648.417.012	49.781.222	698.198.222	9.024.822	14.528.462	-	-	13.408.722	108.078.822	2.296.902	110.221.792	100,00	64.844.122	

(dalam jutaan rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN 14.A

NO	NAMA	STATUS LAPORAN	RESEPTIF	ASET LANCAR	NETO TOTAL LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS /KEWAJIBAN	LIABILITAS PASIFIVA	TOTAL KEWAJIBAN	KELOMPOK KEWAJIBAN	TANPA KEWAJIBAN	SPESIFIK	ESTIMASI LAIN	SALDO LAIN	BENTUK PASIFIKASI KEWAJIBAN KELOMPOK KEWAJIBAN	KELOMPOK KEWAJIBAN KELOMPOK KEWAJIBAN	PERSENTASE KEWAJIBAN KELOMPOK KEWAJIBAN	BENTUK PASIFIKASI KEWAJIBAN KELOMPOK KEWAJIBAN	PERSENTASE KEWAJIBAN KELOMPOK KEWAJIBAN		
																				1	2
01	Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk	Audit 2018		308.312.813	650.918.179	1.203.232.094	932.728.818	84.538.937	1.017.267.755	11.666.666	17.216.192	-	33.134.972	127.084.686	181.203.137	1.737.785	184.583.238	60,00	108.721.310	100,00	
02	Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Audit 2018		1.244.964.193	2.1.923.031	1.298.028.231	928.428.729	133.994.228	1.111.623.953	6.487.293	223.213	-	13.298.442	682.138.289	182.942.340	2.207.782	183.273.231	27,27	104.783.212	100,00	
03	Pt Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Audit 2018		78.698.133	227.728.641	206.426.791	242.801.199	282.292.748	3.293.002	2.054.434	-	-	2.278.675	13.714.219	23.840.488	8.862	23.840.488	60,00	14.234.236	100,00	
04	Pt Bank Jambora Bakti Indonesia	Audit 2018		13.040.872	1.160.928	18.240.995	1.478.214	1.488.603	4.943.317	7.238.713	-	-	63.782	3.291.140	11.239.665	13	11.239.665	100,00	11.239.665	100,00	
05	Pt Bank Permata (Persero)	Unaudit 2018		28.294.424	13.004.274	48.298.698	4.168.276	42.313.076	48.270.654	200.000	-	-	483.208	1.824.323	1.293.028	8.023	1.293.028	100,00	1.293.028	100,00	
06	Pt Bank Pembangunan Indonesia (Persero)	Audit 2018		6.837.408	6.818.445	12.655.853	2.740.278	7.267.602	10.207.879	423.000	-	-	32.923	2.681.298	2.129.242	3.833	2.129.242	100,00	2.129.242	100,00	
07	Pt Bank Pembangunan Daerah (Persero)	Unaudit 2018		448.214	28.269.433	28.817.647	7.890.402	39.168.212	47.028.818	233.000	3.037	-	123.409	3.288.232	8.843.923	3.833	8.843.923	100,00	8.843.923	100,00	
08	Pt Bank Permata Syariah (Persero)	Audit 2018		17.283.175	784.242	18.067.417	7.982.448	318.024	8.201.202	5.801.000	-	-	103.409	3.288.232	8.843.923	3.833	8.843.923	100,00	8.843.923	100,00	
09	Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Audit 2018		14.090.108	1.127.942	15.218.050	4.202.008	223.271	4.327.850	3.000.000	13.204	-	488.226	6.094.620	10.622.920	27.226	10.622.920	100,00	10.622.920	100,00	
10	Pt Bank Syariah Indonesia (Persero)	Audit 2018		1.691.247	1.604.136	3.295.383	1.802.656	8.527	1.811.283	701.482	85.927	-	492.746	142.827	1.423.926	143	1.423.926	100,00	1.423.926	100,00	
11	Pt Bank Syariah Mandiri (Persero)	Audit 2018		1.837.652	31.023	1.878.675	1.547.824	13.207	1.561.031	102.000	-	-	0.423	215.818	318.185	1.448	317.637	100,00	318.185	100,00	
12	Pt Bank Tabung Negara (Persero) Syariah	Audit 2018		12.537.208	3.811.234	18.248.572	4.310.233	12.044.620	18.234.891	1.200.000	-	-	12.843	571.171	1.883.720	9.842	1.893.591	100,00	1.893.591	100,00	
13	Pt Bank Widyadarmas (Persero)	Audit 2018		404.827	482.122	886.949	279.232	4.161.248	4.441.284	42.927	192.066	-	-	0.254.402	92.24	-	0.254.402	100,00	92.24	100,00	
14	Pt Bank Widyadarmas Syariah (Persero)	Audit 2018		43.525.232	3.205.918	46.731.150	24.028.813	8.261.488	32.290.301	6.255.000	-	-	-	3.813.202	6.500.800	20.114.311	2.178	20.114.311	100,00	20.114.311	100,00
15	Pt Bank Widyadarmas Syariah (Persero)	Audit 2018		1.725.673	1.724.223	3.449.896	398.223	398.223	992.027	200.000	1.482	-	728.146	1.428.223	2.229.223	0.194	2.204.223	92,50	2.204.223	100,00	
16	Pt Bank Widyadarmas Syariah (Persero)	Audit 2018		980.812	607.277	1.588.089	282.923	68.823	431.743	23.000	820	-	202.417	918.258	1.148.408	0.278	1.144.208	85,12	1.144.208	100,00	
17	Pt Bank Widyadarmas Syariah (Persero)	Audit 2018		3.189.235	1.789.235	4.978.470	1.789.235	1.789.235	3.588.470	1.789.235	181.792	-	118.292	1.789.235	3.588.470	181.792	3.588.470	100,00	3.588.470	100,00	
18	Pt Bank Widyadarmas Syariah (Persero)	Audit 2018		411.844	320.918	732.762	178.291	394.428	472.861	1.970.861	1.427	-	348	1.424.428	471.825	9	471.834	73,23	471.834	100,00	
19	Pt Bank Widyadarmas Syariah (Persero)	Audit 2018		7.280.098	4.484.483	11.764.581	3.440.228	1.942.228	6.482.456	2.296.666	308.029	-	-	503.217	1.923.288	3.144.432	117.612	3.260.848	100,00	3.144.432	100,00
20	Pt Bank Widyadarmas Syariah (Persero)	Audit 2018		18.866	123.208	142.074	1.204.148	-	1.204.148	47.007	94.283	-	-	-	11.203.842	0.282.077	-	11.203.842	63,82	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2018**

LAMPIRAN 14.A

NO	URAIAN	STATUS LAPORAN	REPERSENTASI	AKTIF		PASIVA		KETERANGAN	REPERSENTASI										
				LABORAN	LIABILITAS	LABORAN	LIABILITAS												
				1	2	3	4		5										
103	PT Industri Sepuluh Nopember (Persero)	Audit 2018		209.939	413.838	349.443	46.717	298.182	198.875	450	2.278	-	189.491	11.59.280	219.531	219.531	100,00	219.531	
104	PT Pelayaran Garuda	Audit 2018		83.972	108.691	129.185	14.135	149.280	12.005	-	-	-	88.295	9.9.281	42.235	42.235	52,79	22.299	
105	PT Semen (Duta Pura) (Persero)	Audit 2018		71.774	69.624	93.949	163.137	229.196	13.005	-	-	-	-	11.364	118.928	1.248	017,678	100,00	-
110	PT Semen Tiga Warna (Persero)	Audit 2018		32.808	16.882	43.938	34.415	70.373	11.005	-	-	-	3.235	13.368	1.011	1.011	100,00	-	-
111	PT Semen Tiga Warna (Persero)	Undutur 2018		114.802	793.218	1.728.922	141.612	1.898.523	798.992	-	-	-	618.408	11.789.282	990.285	990.285	98,43	984.431	
112	PT Semen Tiga Warna (Persero)	Ym 8 / 2018		6.088	694.238	1.101.259	218.008	1.219.267	413.072	-	-	-	418.408	11.854.198	618.749	618.749	100,00	618.749	
113	PT Pelayaran Garuda	Audit 2017		58.334	728.088	7.411.031	3.128.419	10.349.450	1.984.532	-	-	-	48.182	111.774.883	9.793.142	133	9.793.010	98,99	-
114	PT Pelayaran Garuda	Audit 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL				3.218.929.282	4.846.619.479	8.184.329.840	3.728.312.228	12.912.641.048	3.603.376.128	694.167.287	42.328.924	38.718.233	882.511.286	847.602.897	2.483.313.602	102.889.190	2.380.524.792	100,00	2.180.049.897

(dalam jutaan rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2018**

LAMPIRAN 14B

NO	NOMOR	STATUS LAPORAN	PENDAPAT		LABA USHAK		PERISALAHAN LABA		BIAYA		BIAYA	BIAYA	LABA	LABA	LABA	LABA	LABA	LABA	LABA	LABA	LABA
			1	2	3=1-2	4	5	6=10-5-11	7	8=6-7											
1	Pusat Perhubungan	Audited 2018	3.361.926	4.753.723	598.082	214.535	69.196	812.744	18.234	794.407	148.422	633.976	-	96.596	633.976	720.572					
2	Pusat Perhubungan Indonesia	Audited 2018	1.607.310	970.860	31.492	77.122	39.409	39.409	26.884	12.519	01.477	23.936	18.097	17.895	23.936	17.895					
3	PT Pelabuhan Nusantara Indonesia (Persero)	Audited 2018	3.166.942	3.110.712	76.236	600.922	207.833	459.238	312.809	156.528	01.771	188.300	20.721	209.031	152.764	162.723					
4	PT Pelabuhan Nusantara (Persero)	Audited 2018	3.900.137	3.277.922	3.215	13.398	13.612	13.612	-	15.613	1.528	14.083	11.933	12.136	14.083	12.136					
5	PT Pelabuhan Nusantara III (Persero)	Unaudited 2018	33.228.112	32.086.98	1.233.135	3.208.317	912.412	4.321.529	2.848.657	1.637.885	737.142	914.721	7.823.952	8.748.728	870.197	7.778.477					
6	Pusat Jasa Truk I	Audited 2018	28.428.61	27.342.71	1.085.900	764.608	38.593	946.178	2.198.158	1.231.982	020.198	981.788	126.528	873.500	873.500	797.291					
7	Pusat Jasa Truk II	Audited 2018	823.548	602.066	213.482	31.233	18.205	326.531	-	236.531	69.913	166.594	54.062	320.656	166.594	220.656					
8	PT Garuda Indonesia (Persero)	Audited 2018	69.448.113	66.902.08	9.446.045	83.200	148.659	9.285.67	3.438.829	5.922.812	1.710.435	4.313.777	118.222	4.195.642	4.195.642	4.182.147					
9	PT Garuda Indonesia (Persero)	Audited 2018	2.229.223	2.498.461	726.794	454.802	464.198	727.268	-	727.268	184.142	543.228	6.067	549.292	543.228	549.292					
10	PT Garuda Indonesia (Persero)	Audited 2018	2.454.113	6.880.812	372.202	194.433	2.728	726.018	187.291	377.268	175.934	401.794	373.905	723.703	413.892	786.883					
11	PT Garuda Indonesia (Persero)	Audited 2018	1.283.242	1.283.242	18.313	37.214	17.832	38.072	3.072	33.002	3.800	29.143	-	29.143	29.143	29.143					
12	PT Garuda Indonesia (Persero)	Audited 2018	1.723.947	270.928	928.620	46.861	64.948	116.088	66.429	116.088	-	182.542	-	182.542	182.542	182.542					
13	PT Garuda Indonesia (Persero)	Audited 2018	1.772.928	1.857.766	94.828	13.943	6.317	175.400	41.225	116.920	02.848	182.072	1.694	181.278	181.278	181.278					
14	PT Garuda Indonesia (Persero)	Audited 2018	3.891.113	326.798	132.225	48.407	19.091	179.648	47	179.598	41.448	138.150	17.138	131.014	138.150	131.014					
15	PT Garuda Indonesia (Persero)	Audited 2018	1.392.985	1.387.826	5.154	32.656	31.871	33.942	31.246	03.298	7.428	03.226	3.972	03.226	03.226	03.226					
16	PT Garuda Indonesia (Persero)	Unaudited 2018	798.697.88	723.221.20	65.476.68	4.431.179	4.429.022	65.428.72	11.880.22	32.628.50	29.943.77	13.694.72	1.028.804	14.723.52	12.209.40	13.988.97					
18	PT TPGC dan KSI (Persero)	Audited 2018	424.608	271.748	132.859	22.228	3.127	174.658	666	174.002	48.278	127.728	6.092	133.816	127.728	133.816					
19	PT Energi Management Indonesia (Persero)	Audited 2018	21.498	21.201	197	13.228	3.229	8.131	2.229	3.872	1.684	7.258	1.12	7.668	7.258	7.668					
20	PT Energi Management Indonesia (Persero)	Audited 2018	698.791	649.946	48.843	29.485	24.582	62.222	45.227	18.485	1.018	17.442	18.220	9.222	17.442	9.222					
21	PT Energi Management Indonesia (Persero)	Audited 2018	299.816	801.348	88.023	35.282	47.248	76.089	-	76.089	2.048	72.041	2.483	78.492	72.041	78.492					
22	PT Energi Management Indonesia (Persero)	Audited 2018	823.342	801.348	20.818	13.826	3.229	148.231	-	148.231	34.788	110.442	2.492	112.935	108.282	111.885					
23	PT Energi Management Indonesia (Persero)	Audited 2018	1.426.312	1.490.920	122.818	217.806	78.023	93.892	-	93.892	34.788	61.182	-	61.182	61.182	61.182					
24	PT Energi Management Indonesia (Persero)	Audited 2018	1.211.985	1.048.920	122.818	340.448	27.025	102.128	93.923	114.829	01.814	127.453	603.472	720.923	120.748	720.923					
25	PT Energi Management Indonesia (Persero)	Audited 2018	5.222.028	5.222.028	029.228	340.448	102.128	208.796	93.923	114.829	01.814	127.453	603.472	720.923	120.748	720.923					
26	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Unaudited 2018	328.642.33	308.198.09	20.244.23	14.928.72	9.828.823	23.214.09	21.821.47	3.682.618	2.468.122	21.449	19.824.96	19.824.96	19.824.96	19.824.96					

(dalam jutaan rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2018**

LAMPIRAN 14.B

NO	NAMA	STATUS LAPORAN	PERIODE (dalam jutaan rupiah)													
			1	2	3 = 1+2	4	5	6 = 1+4+5	7	8 = 6+7	9	10 = 8+9	11	12 = 10+11	13	14
27	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Audited 2018	649.205	452.961	1.092.166	41.105	23.977	208.644	10.209	108.215	483.272	149.284	1342	149.215	149.284	149.284
28	PT Kawasan Industri Yogyakarta (Persero)	Audited 2018	117.207	59.472	176.679	2.174	83	60.134	2.331	37.297	2.507	54.096	147	34.043	54.096	54.043
29	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Audited 2018	240.804	176.346	417.150	6.745	392	71.292	648	70.644	6.987	63.655	147	63.655	63.655	63.655
30	PT Kawasan Industri Pekanbaru (Persero)	Audited 2018	104.387	54.287	158.674	7.334	292	37.262	3.319	33.943	48.049	1722	47.327	48.049	47.327	47.327
31	Peran Peredaran Uang Kertas Indonesia	Audited 2018	292.521	262.662	555.183	5.013	6.024	29.802	16.976	12.826	1.976	6.964	-	6.964	6.964	6.964
32	Peran Peredaran Uang Kertas Indonesia	Audited 2018	3.196.517	2.749.792	5.946.309	107.128	17.511	545.529	137.612	407.947	129.412	287.535	16.001	281.532	285.041	276.614
33	Peran Peredaran Uang Kertas Indonesia	Audited 2018	22.345	22.402	44.747	411	6.431	6.401	121	6.401	1.084	5.317	-	5.317	5.317	5.317
34	Peran Peredaran Uang Kertas Indonesia	Audited 2018	319.202	325.866	645.068	12.629	4.048	17.218	-	17.218	3.232	11.986	8.286	30.572	11.978	20.261
35	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018	28.687.423	23.914.238	52.601.661	299.925	2.999.925	5.684.216	929.225	4.104.925	1.619.225	3.085.704	431.662	2.317.272	3.079.112	3.079.289
36	PT Semen Bungkus (Persero) Tbk	Audited 2018	1.992.808	1.748.208	3.741.016	16.503	16.503	204.002	118.648	149.352	69.285	76.072	12.216	73.265	76.072	73.265
37	PT Semen Kandang (Persero)	Audited 2018	12.282	4.413	16.695	7.867	9	7.876	2.283	5.493	-	5.493	-	5.493	5.493	5.493
38	PT Bata Puncak (Persero)	Audited 2018	108.492	108.666	217.158	13.421	9.921	2.222	150	3.492	1.288	3.288	62	3.492	3.288	3.448
39	PT Tolakpauk Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018	121.624	93.229.00	93.350.624	1.697.002	-	29.912.00	2.297.002	26.402.00	9.428.002	26.979.00	4.942.002	31.921.002	18.022.00	22.844.002
40	PT PAL Indonesia (Persero)	Audited 2018	1.581.828	1.515.286	3.097.114	268.216	472.607	1.128.425	83.828	1.212.253	61.604	1.094.133	5.404	1.088.729	1.084.133	1.084.729
41	PT Industri Kertas Indonesia (Persero)	Audited 2018	153.794	134.932	288.726	4.403	3.954	19.297	-	19.297	1.897	13.394	3.072	18.417	13.394	18.417
42	PT Doh dan Perkapalan Kapal Bahari (Persero)	Audited 2018	422.206	611.216	1.033.422	84.096	81.874	1.813.118	-	1.813.118	69.244	1.272.879	639.082	367.116	1.272.879	367.116
43	PT Doh dan Perkapalan Sertaya (Persero)	Audited 2018	129.213	172.972	302.185	77.272	4.714	29.021	26.882	2.139	1440	2.578	2.664	5.242	1.929	4.269
44	PT Industri Aneka Aluminium (Persero)	Audited 2018	63.277.412	33.272.029	96.549.441	7.610.212	1.282.822	13.922.288	2.082.465	12.839.823	3.121.212	10.717.220	2.327.216	12.244.712	8.283.212	10.516.212
45	PT Industri Aneka Aluminium (Persero)	Audited 2018	24.281.411	24.803.029	49.084.440	866.272	401.908	440.288	1.600.216	11.129.624	80.266	11.099.264	349.988	779.283	1.083.425	778.283
46	PT Bumi Bata Indeh (Persero)	Audited 2018	340.976	328.102	669.078	5.444	1.192	17.142	6.797	10.236	11.61	10.466	18.102	2.261	10.441	2.261
47	PT Industri Negeri Indonesia (Persero)	Audited 2018	22.674	24.506	47.180	1.929	173	2.904	2.904	2.904	2.262	642	642	642	642	642
48	PT Industri Tekstil Indonesia (Persero)	Audited 2018	847.242	747.927	1.595.169	13.962	29.581	64.206	68.232	17.948	2.262	17.948	3.294	6.027	1.792	7.292
49	PT Buzan Indonesia (Persero)	Audited 2018	2.178.826	2.021.628	4.200.454	33.962	18.571	1.902.242	42.628	147.922	80.118	67.807	13.642	62.785	67.807	62.785
50	PT Industri Tekstil Indonesia (Persero)	Audited 2018	1.982.662	1.823.292	3.805.954	33.872	18.571	1.902.242	42.628	147.922	80.118	67.807	13.642	62.785	67.807	62.785
51	PT Industri Tekstil Indonesia (Persero)	Audited 2018	5.221.922	4.911.822	10.133.744	49.229	80.529	324.802	122.449	211.253	29.272	171.472	11.882	183.284	131.181	144.902
52	PT Prada (Persero)	Audited 2018	2.200.822	2.816.266	5.017.088	68.248	122.018	320.266	193.061	127.204	36.224	100.276	23.242	75.026	100.276	75.026

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2018**

LAMPIRAN 14.B

NO	BUMN	STATUS LAPORAN ISYU	PERIODIKASIAN													
			1	2	3 = 1+2	4	5	6 = 1+4+5	7	8 = 6+7	9	10 = 8+9	11	12 = 10+11	13	14
53	PT Dirumaya Indonesia (Persero)	Audit 2018	3.344.892	3.543.336	1.000.446	1.900.036	1.232.236	1.232.446	286.310	1.518.936	310.726	1.849.662	17.033	1.866.695	1.949.660	1.936.714
54	PT Asam Kaya (Persero) Tbk	Audit 2018	15.653.49	13.985.66	1.669.833	197.233	175.52	1.691.531	523.744	1.167.777	523.744	645.039	1.211.771	1.211.771	644.159	512.287
55	PT Asam Kaya (Persero)	Audit 2018	704.516	663.282	39.234	13.476	111	54.932	23.923	30.676	13.567	9.103	17.402	26.502	9.103	26.502
56	PT Asam Kaya (Persero)	Audit 2018	4.229.378	4.487.805	321.426	364.402	11.282	574.106	83.850	490.256	132.851	337.339	189.808	547.167	336.338	546.139
57	PT Jani Hargi (Persero) Tbk	Audit 2018	36.974.67	32.381.49	4.593.181	1.281.130	807.444	5.649.565	1.035.660	3.210.207	1.173.816	4.383.481	48.302	2.084.794	2.302.600	3.249.998
58	PT Widyia Karya (Persero) Tbk	Audit 2018	48.786.95	41.594.67	7.194.873	2.405.300	2.104.986	7.995.662	2.458.249	5.336.442	916.872	4.619.568	289.408	4.909.058	3.862.839	4.252.322
59	PT Widyia Karya (Persero) Tbk	Audit 2018	31.158.19	28.339.21	2.818.983	1.631.329	1.116.652	3.357.336	998.921	2.358.419	285.329	2.072.309	1.402.34	2.312.542	1.730.238	1.860.118
60	PT Hama Karya (Persero)	Audit 2018	26.747.66	23.397.23	3.350.432	438.682	1.098.032	2.651.086	292.484	2.358.602	121.18	2.237.424	8.672	2.246.102	2.374.878	2.283.336
61	PT Pongkor Perikanan (Persero) Tbk	Audit 2018	23.119.56	22.727.11	3.292.446	1.288.437	208.846	3.372.343	759.837	2.812.506	852.512	1.928.993	157.818	2.116.609	1.501.977	1.602.237
62	Peran Perikanan	Audit 2018	2.667.118	2.077.744	589.372	66.509	291.262	364.616	-	364.616	58.848	305.772	-	305.772	305.968	305.968
63	PT Industri Keranji Aji (Persero)	Audit 2018	3.235.889	3.128.777	1.171.12	3.328	918	1.171.12	4.121	4.121	400	3.315	13.230	104.684	86.401	101.631
64	PT POCIPAL Buan (Persero)	Audit 2018	63.021	63.536	1.498	3.328	918	4.121	-	4.121	400	3.315	8	3.321	3.315	3.321
65	PT Pabrikasi Indonesia I (Persero)	Audit 2018	3.113.923	1.868.585	1.244.948	239.671	138.372	1.349.262	133.281	1.195.982	291.11	964.871	10.948	873.923	911.814	880.874
66	PT Pabrikasi Indonesia II (Persero)	Audit 2018	12.218.36	8.824.214	3.394.148	1.881.519	1.012.785	4.261.906	1.130.783	3.132.118	701.408	2.430.710	140.589	2.390.121	2.379.232	2.339.484
67	PT Pabrikasi Indonesia III (Persero)	Audit 2018	10.778.77	8.210.531	2.568.243	1.431.194	79.321	2.631.915	808.410	1.823.505	438.102	1.385.403	739.672	2.123.072	2.379.632	1.502.633
68	PT Pabrikasi Indonesia IV (Persero)	Audit 2018	3.205.398	2.752.141	533.656	132.024	154.926	330.746	68.131	482.396	156.392	326.203	3.127	328.386	326.132	328.316
69	PT Bina Karya (Persero)	Audit 2018	193.588	156.027	39.540	13.531	8.672	32.423	723	31.701	8.942	22.729	193	22.931	22.729	22.931
70	PT Bina Karya (Persero)	Audit 2018	90.928	87.208	3.621	13.336	1.312	13.962	-	13.962	4.228	11.646	1.862	13.508	13.508	13.508
71	Peran Bauri	Audit 2018	1.237.678	1.177.664	60.014	19.432	8.165	71.275	20.488	50.792	29.231	21.562	12.528	13.944	21.562	13.944
72	Peran Pengujian Keuangan Eksternal	Audit 2018	328.254	314.892	13.662	9.777	7.831	13.608	-	13.608	2.288	13.322	-	13.322	13.322	13.322
73	Peran Lembaga Penyelenggara Pelayanan Keuangan	Audit 2018	3.277.738	2.869.186	406.572	134.414	12.392	528.524	440	528.154	146.708	381.446	7.011	388.457	381.446	388.457
74	PT Angkasa Pura II (Persero)	Audit 2018	8.321.087	3.762.646	2.738.441	390.402	60.936	1.088.192	263.134	2.833.062	817.144	2.015.918	171.104	1.844.814	2.007.018	1.933.914
75	PT Angkasa Pura II (Persero)	Audit 2018	8.486.833	6.430.246	3.056.105	331.272	164.024	1.640.232	478.942	2.746.206	834.925	1.911.281	120.731	1.890.550	1.911.610	1.880.824
76	PT Garuda Karya (Persero)	Audit 2018	482.239	398.642	63.614	943	1.083	63.472	6.378	53.092	16.671	36.421	119	36.544	36.421	36.544
77	PT Yoda Karya (Persero)	Audit 2018	520.500	382.394	138.111	1.031	4.937	134.208	4.030	130.126	8.052	122.074	11.061	121.013	122.074	121.013

(dalam jutaan rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2018**

LAMPIRAN 14.B

NO	NOMOR	STATUS LAPORAN	PENDAPAT MUSKAM	BPP+ DEKAM DEKAM	LABA USUKA	PENDAPATAN LAIN- LAIN	DEKAM LAIN- LAIN	BIOT	DEKAM BUNCA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAMBAH KEMALANG	PENDAPATAN KOMPENSASI P	LABA RUGI KOMPENSASI P	LABA RUGI TAMBAH KEMALANG KEPADA KEPADA	LABA RUGI KOMPENSASI STATISTIS KEPADA KEPADA
104	PT Dharma Loydi (Persero)	Audited 2018	361.206	486.177	73.536	32.106	28.046	79.572	18.419	61.134	11.521	61.206	1.982	60.724	61.206	60.724
105	PT Percontaan Pengasin Alum (Persero)	Audited 2018	8.824.001	5.292.545	331.433	197.782	211.253	217.666	76.004	441.660	12.860	428.800	61.279	490.579	428.072	467.822
106	PT Iqra (Persero)	Audited 2018	690	6.219	19.669	2.849	57.126	19.657	48.422	106.286	12.665	94.619	-	94.619	94.619	94.619
107	PT Industri Sumbang Nusantara (Persero)	Audited 2018	323.164	331.666	3.504	8.326	10.503	1.537	-	1.537	841	686	1.416	2.104	2.104	2.104
108	PT Prismastra (Persero)	Audited 2018	168.222	152.222	18.000	-	14.726	1.232	-	1.232	212	1.043	33.292	34.442	1.043	34.442
109	PT Sarni Lubri Pura (Persero)	Audited 2018	32.216	32.821	1.441	11.222	323	11.029	8.162	2.916	294	2.162	-	2.162	1.928	1.928
110	PT Varona Tera Pirexona (Persero)	Audited 2018	129.101	162.943	12.842	434	3.679	19.087	-	19.087	12.426	16.831	-	16.831	16.831	16.831
111	PT Karya Kabi Aceh (Persero)	Unaudited 2018	172.692	186.217	11.522	3.463	8.692	18.721	56.265	72.116	-	72.116	-	72.116	72.116	72.116
112	PT Karya Liris (Persero)	TM II / 2018	1.513	16.917	11.402	19.976	-	4.517	-	4.517	-	4.517	-	4.517	4.517	4.517
113	PT Hargid Nusantara Adhara (Persero)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			2.360.159,20	2.072.602,89	287.251,60	38.040,19	20.250,59	315.262,19	66.998,94	2.48.264,23	94.008,97	154.175,28	110.267,20	143.250,69	128.114,83	127.210,49

(Dalam Ribu Rupiah)

**IKHTISAR LK
PERUSAHAAN NEGARA
DI BAWAH KEMENKEU**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DI BAWAH PENBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 (AUDITED)

LAMPIRAN 15.A

No	Perubahan Mula	Berita Laporan	Perubahan Usaha	SPV dan Badan Usaha	Lab. (Rugi) Usaha	Perubahan Lab.-Lab.	Beban Lab.-Lab.	Lab. (Rugi) sebelum Beban dan Pajak	Beban Beban	Lab. (Rugi) sebelum Pajak	Beban (Beban) Pajak	Lab. (Rugi) Tabung Beban	Perubahan (Gross) Kompositif	Lab. (Rugi) Kompositif	Lab. (Rugi) Tabung Beban Kompositif	Lab. (Rugi) Kompositif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 - 5)	(8)	(9)	(10 = 7 + 8 - 9)	(11)	(12 = 10 - 11)	(13)	(14 = 12 - 13)	(15)	(16 = 14 + 15)	(17)	(18)
1	Peraturan Menteri Infrastruktur	Agustus 2018	4.008.043.000.000	21.086.792.000.120	1.879.371.000.193	21.701.098.000	21.216.444.000	1.879.371.000.193	-	1.879.371.000.193	254.184.794.358	1.531.108.925.935	3.375.253.334	1.528.728.902.417	1.531.108.925.935	1.528.728.902.417
2	Peraturan Menteri Infrastruktur	Agustus 2018	824.251.987.000	128.785.948.000	477.452.017.000	-	-	477.452.017.000	-	477.452.017.000	57.291.000.000	426.541.000.000	11.467.023.777.000	398.077.200.000	471.290.176.000	398.077.200.000
3	Peraturan Menteri Keuangan	Agustus 2018	1.245.426.000.000	826.372.000.000	492.824.000.000	-	-	492.824.000.000	-	492.824.000.000	57.291.000.000	426.541.000.000	128.476.000.000	398.077.200.000	426.541.000.000	398.077.200.000
4	Peraturan Menteri Keuangan	Agustus 2018	783.543.983.808	526.323.227.200	233.295.848.528	-	-	233.295.848.528	-	233.295.848.528	72.712.257.804	170.218.900.472	40.186.841	170.218.900.472	170.218.900.472	170.218.900.472
			8.871.270.627.720	3.922.823.498.320	3.042.448.824.421	61.299.778.640	79.981.213.640	3.042.448.824.421	-	3.042.448.824.421	481.873.407.142	2.609.872.003.240	114.421.420.443	3.424.940.592.297	2.697.710.427.878	2.413.180.307.483

LAPORAN PMN PADA
LEMBAGA KEUANGAN
INTERNASIONAL

**LAPORAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
PER 31 DESEMBER 2018 (Audited)**

NO	Institusi	Penyertaan Modal Pemerintah			Surat hutang	
			USD	IDR	Utang dalam MVA	Utang dalam IDR
A. PMN pada Lembaga Keuangan Internasional						
1	Asian Development Bank (ADB)	SDR	289.100.000,00		5.822.482.670.109	
	World Bank Group					
2	International Bank for Reconstruction and Development	USD		167.203.427,47	2.421.272.833.205	
3	International Development Association (IDA)	USD		34.411.001,07	498.205.706.424	5.237.901.345
4	International Finance Corporation (IFC)	USD		31.602.000,00	457.628.362.000	
5	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD		3.797.820,00	54.996.231.420	
6	Bank Pembangunan Islam (IDB)	ID	136.086.967,25		2.740.795.601.663	
7	International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)	USD		2.060.000,00	29.830.860.000	
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and	ID	123.140,32		3.530.329.798	
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	USD		71.939.000,00	1.042.038.279.000	
10	Common Fund for Commodities (CFC) EUR 223.450 (Sept 20	EUR	223.450,00		18.599.791.519	EUR 223.450
		USD		1.028.901,00		3.700.282.430
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private S	USD		16.305.864,78	236.125.227.879	
12	Credit Guarantee and Investment Facility	USD		12.600.000,00	182.460.600.000	
13	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	USD		537.680.000,00	7.786.144.080.000	
	Jumlah*		425.535.557,37	878.648.014,32	31.293.200.773.016	
PMN Lainnya						
15	ASEAN Infrastructure Fund	USD		120.000.000,00	1.737.720.000.000	
16	International Rubber Consortium Limited	USD		4.000.000,00	57.924.000.000	
	Jumlah		-	124.000.000,00	1.795.644.000.000	
	Jumlah		425.535.557,37	1.002.648.014,32	33.088.844.773.016	25.374.379.633

Catatan:

1. Kurs Special Drawing Right (SDR) ; SDR1 = USD 1,39079

2. Kurs Euro to IDR 16.599,79

3. Kurs USD to IDR Rp 14.481

4. Kurs Islamic Dinar (ID) to IDR Rp 20.140

*Selisih jumlah antara Lampiran dengan CsLK sebesar Rp7.240 akibat pembulatan kurs mata uang asing

IKHTISAR LK NON BUMN
(MINORITAS)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUM (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018**

LAMPIRAN 17.A

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	LABA RUGI (dalam jutaan rupiah)													
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4+5)	7	8 = (6+7)	9	10 = (8+9)	11	12 = (10+11)	13	14
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Audited 2018	7.58.903	600.645	158.258	22.007	-	180.265	2.297	177.968	16.304	161.664	15.452	156.519	161.682	156.537
2	PT Jabara Industrial Estate Paliagedung	Audited 2018	320.435	171.848	148.587	13.568	140.320	-	-	140.320	24.092	116.228	44	116.184	116.228	116.184
3	PT Medya Karya	Audited 2018	6.226.913	5.834.721	392.192	173.626	346.225	72.837	273.388	1.207	1.207	272.181	178	272.359	271.522	271.772
4	PT Perkebunan Nusantara I	unaudited 2018	834.095	818.241	15.854	9.157	22.119	119.821	(141.940)	79.634	-	79.634	265.526	345.160	(141.940)	(113.781)
5	PT Perkebunan Nusantara II	unaudited 2018	1.225.668	1.123.108	102.566	269.806	253.334	173.708	173.708	79.634	-	79.634	559.636	880.285	924.142	547.073
6	PT Perkebunan Nusantara IV	unaudited 2018	5.200.019	4.103.381	1.096.638	139.255	1.305.509	305.532	1.192.977	824.977	265.341	559.636	320.649	880.285	924.142	547.073
7	PT Perkebunan Nusantara V	unaudited 2018	4.907.512	4.365.546	541.966	-	541.966	219.815	219.815	322.151	80.897	241.254	304.579	545.833	545.833	203.457
8	PT Perkebunan Nusantara VI	unaudited 2018	1.422.855	1.237.011	185.844	24.955	192.336	90.283	102.053	102.053	30.562	71.091	1.061.256	132.951	137.408	55.935
9	PT Perkebunan Nusantara VII	unaudited 2018	2.897.762	3.019.622	(121.861)	122.184	323	546.026	(545.707)	5.165	5.165	(550.872)	1.061.256	510.384	510.384	(223.591)
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	unaudited 2018	1.445.775	1.662.723	(216.948)	1.736.841	1.424.215	230.990	1.193.225	18.462	18.462	1.174.763	4.959.572	6.134.335	6.134.279	(295.473)
11	PT Perkebunan Nusantara IX	unaudited 2018	986.460	1.282.401	(295.941)	121.788	(174.152)	152.032	(326.184)	51.207	(4.488)	(326.184)	97.922	(228.262)	(228.262)	(193.277)
12	PT Perkebunan Nusantara X	unaudited 2018	2.726.459	2.479.627	246.832	53.713	280.657	124.342	156.315	156.315	51.207	105.108	106.371	211.479	202.999	53.458
13	PT Perkebunan Nusantara XI	unaudited 2018	1.735.330	1.801.900	(66.570)	89.613	10.950	151.685	(140.735)	14.488	(4.488)	(136.247)	106.371	(136.247)	(77.053)	
14	PT Perkebunan Nusantara XII	unaudited 2018	1.148.230	1.018.532	129.698	146.978	174.908	166.757	81.51	81.51	5.878	2.273	87.144	89.417	89.417	(73.434)
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	unaudited 2018	1.392.478	1.663.340	(270.862)	50.915	(318.561)	365.982	(684.547)	1.944	1.944	(686.491)	221.784	(464.707)	(468.670)	(381.397)
16	PT Perkebunan Nusantara	unaudited 2018	608.624	726.903	(118.279)	69.468	(48.811)	141.511	(190.322)	-	-	(190.322)	32.909	(157.413)	(157.413)	(153.962)
17	XIV/PT Relaysa Industri	unaudited 2018	4.914.923	4.571.474	343.449	50.343	375.008	174.223	200.785	42.416	41.005	1.411	361.40	236.925	184.237	220.377
18	PT PAMN Perkebunan Maritim	unaudited 2018	13.659	152.350	(138.691)	199.512	18.784	-	-	42.416	41.005	1.411	-	1.411	1.411	1.411
19	PT Indosat Tbk	Audited 2018	23.139.551	24.888.440	(1.748.889)	1.360.299	149.894	2.125.059	-	(2.663.543)	(578.484)	(2.085.059)	223.925	(1.861.134)	(2.403.843)	(2.181.969)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMI (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN 17A

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	(dalam jutaan rupiah)													
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4+5)	7	8 = (6+7)	9	10 = (8+9)	11	12 = (10+11)	13	14
			PENDAPATAN USAHA	HPP - BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIR - LAIR	BEBAN LAIR - LAIR	ZAIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPENSASI	LABA RUGI KOMPENSASI	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIKSIKALAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPENSASI DIATRIKSIKALAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
20	PT Bank Binaqin Tbk	Audited 2018	7.980.892	8.457.928	(477.036)	855.041	161.670	216.335	-	216.335	26.365	189.970	188.966	378.936	189.595	378.410
21	PT Socfindo	Audited 2017	2.440.713	1.425.743	1.014.970	21.523	-	1.036.493	-	1.036.493	262.946	773.547	(9.154)	764.393	773.547	764.393
22	PT Aneka Bontu Fertilizer	Audited 2017	905.384	839.604	65.720	16.142	-	81.862	-	81.862	12.529	69.333	-	69.333	69.333	69.333
23	PT Pasada Panauh Lembang Industri	Audited 2015	911.761	723.315	188.446	24.552	10.503	202.495	3.169	199.326	69.544	129.782	(5.016)	124.766	129.782	124.766
24	PT Kawasan Industri Lampung	Audited 2015	-	732	(732)	1.614	-	882	-	882	222	630	-	630	631	631
25	PT Bakti Alam Tbk	Audited 2018	21.166.993	15.218.740	5.948.253	1.013.365	-	6.961.618	103.543	6.858.075	1.736.963	5.124.112	740.459	5.864.571	5.023.946	5.764.405
26	PT Tanah Tbk	Audited 2018	11.049.946	10.303.124	746.822	324.301	(43.464)	1.114.587	304.641	809.946	191.669	618.277	104.885	723.162	531.359	636.244
27	PT Aneka Tambang Tbk	Audited 2018	25.241.267	23.388.540	1.852.727	487.333	520.228	1.819.832	554.331	1.265.501	391.075	874.436	422.178	1.296.604	874.425	1.296.603
28	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Audited 2018	56.045.322	47.066.595	8.978.727	2.896.591	1.183.503	10.691.815	2.221.826	8.469.989	3.189.672	5.280.323	(402.615)	4.877.708	4.416.589	4.004.967
29	PT Indika Karys Percol	Audited 2018	418.498	385.190	33.298	3.382	1.311	35.369	7.721	27.648	7.207	20.441	-	20.441	20.441	20.441

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
NERACA PER 31 DESEMBER 2018**

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	ASET		TOTAL ASET	LIABILITAS		TOTAL LIABILITAS	MODA L. SAMA	TAMBAHAN MODAL DISTRIB	SIMPANAN	EKUITAS S. LAIN	SALDO LAIN	DITITIP YANG BENDAH PENGELOLA	KEPERINGGIAN A N NON PERSEKUSAL	JITRANG EKUITAS	% SANKSI NEGARA	REPRESIBILITAS NEGARA	
			LANJUT	TIDAK LANJUT		S. JANGKA PANJANG	S. JANGKA PENDEK												
			1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13	15	16=13+15	
1	PT Sertona Industri Pulpas	standar 2018	354.825	390.805	875.632	70.491	31.484	101.975	200.000	440	-	13.601	578.808	771.648	-	-	-	30,000	386.874.000,00
2	Keagiat PT Jakarta Industri Ciptas	standar 2018	428.720	228.549	697.269	133.594	7.545	141.139	200.000	-	-	617	316.400	316.032	-	-	-	30,000	238.871.200,00
3	Pelagang PT Nindia Karya	standar 2018	4.517.911	1.173.008	5.691.000	3.663.113	31.1874	4.178.959	259.497	-	-	428.934	316.400	1.494.911	17.130	-	-	1,000	59.500.000,00
4	PT Perkebunan Nusantara 1	standar 2018	196.794	2.384.311	2.581.111	698.219	1.841.044	2.339.322	166.987	720.200	-	28.150	677.802	141.348	240	-	-	24,000	28.641.000,00
5	PT Perkebunan Nusantara 8	standar 2018	498.335	6.337.021	6.835.353	3.161.000	1.672.322	5.033.322	327.504	-	-	4.128.537	1.667.630	1.708.33	1.478	-	-	10,000	31.761.000,00
6	PT Perkebunan Nusantara	standar 2018	1.874.477	13.079.69	16.954.166	2.091.96	7.191.16	9.283.12	2.942.11	-	-	2.699.008	1.957.96	7.509.16	152.164	-	-	10,000	394.212.000,00
7	PT Perkebunan Nusantara	standar 2018	1.260.211	7.781.008	9.041.219	1.291.12	4.819.443	6.308.56	1.313.22	-	-	1.108.38	317.03	2.776.73	2.331	-	-	10,000	131.312.000,00
8	Nusantara V PT Perkebunan	standar 2018	428.965	3.778.66	4.197.625	749.238	1.791.481	2.540.66	633.293	334	-	649.285	387.504	1.610.41	4.344	-	-	10,000	63.329.000,00
9	Nusantara VI PT Perkebunan	standar 2018	1.202.802	11.241.705	12.944.507	1.800.36	6.741.48	10.352.42	1.401.22	8.085	-	4.311.802	1.317.180	2.548.75	2.331	-	-	10,000	148.122.000,00
10	Nusantara VII PT Perkebunan	standar 2018	842.322	14.637.20	15.479.52	1.200.36	2.428.16	4.319.72	920.202	-	-	4.954.12	5.273.67	11.108.09	1.754	-	-	12,000	122.528.000,00
11	PT Perkebunan Nusantara VIII	standar 2018	1.421.832	2.313.73	4.635.56	2.464.72	723.093	2.189.82	1.291.81	-	-	1.521.00	11.673.07	1.448.74	-	-	-	10,000	159.991.000,00
12	PT Perkebunan Nusantara	standar 2018	2.238.611	10.667.07	12.905.68	1.746.30	2.192.42	3.944.92	1.844.59	-	-	6.843.66	3.193.827	9.208.99	51.768	-	-	10,000	184.560.000,00
13	PT Perkebunan Nusantara	standar 2018	1.393.811	6.308.02	7.699.84	2.023.802	3.129.22	4.162.84	1.168.48	102	-	2.403.15	126.004	2.537.71	1.90	-	-	10,000	118.848.000,00
14	Nusantara IX PT Perkebunan	standar 2018	1.217.403	10.170.48	11.387.88	2.407.30	2.240.28	4.647.58	1.271.97	-	-	3.223.78	1.271.97	6.770.28	4.659	-	-	10,000	127.298.000,00
15	Perkebunan Nusantara X PT	standar 2018	443.390	4.643.86	5.087.26	2.129.28	3.983.92	6.140.20	1.029.72	-	-	2.063.978	1.132.638	11.390.09	122.929	-	-	10,000	102.974.000,00
16	Perkebunan Nusantara XI	standar 2018	291.202	1.627.45	1.918.65	1.007.64	1.810.35	2.818.19	223.081	-	-	1.218.32	12.007.735	354.216	-	-	-	10,000	21.500.000,00
17	PT Perkebunan Nusantara	standar 2018	531.830	2.188.29	2.720.12	3.808.86	1.867.13	6.547.99	400.000	1.025	-	226.177	59.080	726.252	21.207	-	-	4,978	21.566.000,00
18	PT Perkebunan Nusantara	standar 2018	227.690	288.189	515.879	309.991	1.118.804	209.991	678.412	724.238	-	387.12	996.828	403.892	-	-	-	0,000	1.000,00
19	Nusantara XII PT Perkebunan	standar 2018	7.906.52	46.233.06	54.139.58	21.040.26	19.902.97	41.003.24	340.293	1.346.28	-	287.12	8.497.00	11.174.10	962.143	-	-	14,259	77.662.000,00
20	Perkebunan Nusantara XIV	standar 2018	86.272.07	9.271.84	95.543.92	81.424.09	3.613.24	87.049.33	1.274.43	2.923.92	-	1.227.03	2.944.43	8.572.26	22.021	-	-	11,449	150.793.297,60
21	PT Mekar Industri	Auditor 2016	423.922	1.423.02	1.846.94	403.057	3.531.87	4.374.82	423.00	1.677	-	-	732.662	797.982	-	-	-	10,000	4.220.000,00
22	PT MAN/Pembangunan Harau	Auditor 2017	978.216	2.670.81	3.649.02	210.048	462.501	672.549	1.000.00	-	-	408.714	1.976.16	2.976.66	-	-	-	12,000	136.227.000,00
23	PT Indon. Tbk	Auditor 2015	962.968	241.219	1.204.187	993.938	122.913	2.124.98	500.889	122.637	-	-	732.822	1.190.78	-	-	-	3,000	2.478.911,25
24	PT Bank Kelapa Tbk	Auditor 2015	21.461	304	325,46	78	-	78	8.636	-	-	11.031	21.467	-	-	-	-	20,265	1.782.087,00
25	PT Secheno	standar 2018	11.729.24	12.423.28	24.152,52	4.920.69	2.419.80	7.340,49	1.131.20	12.271,13	-	219.524	16.814,70	16.013,16	354.237	-	-	0,000	300
26		standar 2018	9.204.28	3.913,66	13.117,94	6.178,22	2.419,80	8.598,06	272.208	38	-	123.117	6.724,26	6.521,69	190	-	-	0,000	16.269,69

(dalam jutaan rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
NERACA PER 31 DESEMBER 2018**

LAMPIRAN 17.B

(dalam jutaan rupiah)

NO	PENJELASAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	ASSET LANCAR	ASSET TITIK LANCAR	TOTAL ASSET	LIABILITAS JANGKA PANJANG	LIABILITAS JANGKA PENDEK	TOTAL LIABILITAS	MODAL LAIN	TAMBAHAN MODAL DIBAYAR	SPESIAL	EKUITAS SALAH SATU	SALDO LABA	EKUITAS YANG DITAMBAH KELOMPOK MINORITAS	KEPERINGAN A/R NON PERSEORANG	Jumlah Ekuitas	% Saham Minoritas	Ketersediaan Negara
27	PT Asma Tuntang Tbk	TW II / 2018	8.498,44	24.807,94	33.306,38	3.511,74	8.035,41	11.547,15	2.403,07	1.924,83	-	2.810,12	10.291,17	19.779,31	5984,59	19.779,31	0,00%	100
28	PT Permuda Gah Ngura Tbk	TW II / 2018	33.820,34	79.146,28	114.966,62	23.225,12	43.366,92	66.592,04	4.981,72	6.770,94	-	678,202	29.947,28	27.261,87	5984,59	45.265,56	0,00%	100
29	PT Indo Kaya Perkasa	Badan 2018	411,482	281,823	693,305	202,108	-	202,108	20,000	602,292	-	1403,146	20,441	191,159	-	191,159	7,45%	50.000.000,00
Jumlah Keperiksaan Negeri pada Perusahaan Keperiksaan																		644.841.000,000
Jumlah Keperiksaan Negeri Meliputi:																		2.044.094.296,000
Jumlah Keperiksaan Negeri pada Perusahaan Keperiksaan																		2.044.094.296,000
Jumlah Keperiksaan Negeri Meliputi:																		3.690.025.796,000
Total Keperiksaan Negeri pada Perusahaan Keperiksaan																		3.690.025.796,000

**IKHTISAR LK LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 18

**LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2018 (AUDITED)**

status laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Audited 2018	4.000.000.000,000	14.634.820.441,000	19.890.741,000	87.464.519.773,000	102.119.230.955,000

ASET TETAP

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANAH PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Ruziah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	343.728.232.605	343.728.232.605
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	188.409.157.000	188.409.157.000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.989.704.672.051	1.857.964.547.083
4	005	MAHKAMAH AGUNG	4.864.312.403.867	4.793.673.683.460
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	3.844.291.889.173	3.830.796.872.345
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	87.070.470.339.603	87.074.543.797.603
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.253.066.003.779	2.276.589.447.779
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	11.502.743.450.419	11.066.986.986.557
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	294.345.486.868.825	296.536.866.272.608
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12.625.444.631.053	12.672.489.520.638
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	19.436.535.504.094	19.349.423.511.784
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	11.608.949.370.893	11.628.839.367.360
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.620.380.005.603	2.575.568.019.159
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.276.347.034.160	3.737.148.692.766
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	74.768.518.687.719	75.742.121.286.401
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.040.119.575.914	4.207.264.327.026
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	15.404.565.123.149	15.781.343.836.355
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	17.129.404.796.332	17.432.422.531.102
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	1.622.328.251.528	1.625.315.206.554
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	3.495.475.164.694	3.556.821.561.447
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.365.498.329.641	2.662.177.738.345
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.444.400.900.882	2.703.873.839.795
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	269.138.602.834.438	292.480.373.394.093
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	1.420.230.276.062	1.420.889.583.062
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	273.198.404.650	273.198.404.650
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	76.039.000.565.104	58.651.792.675.836
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKH	876.321.187.609	1.183.259.332.609
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	294.120.000	294.120.000
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.651.451.539.479	1.545.973.041.479
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	446.959.267.105	446.514.387.105
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	772.800.959.901	773.225.293.257
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	180.483.709.805	179.478.885.500
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.040.367.985.540	2.027.972.861.507
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	326.366.052.000	326.366.052.000
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	998.225.868.635	998.033.700.475
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	41.953.588.425.160	45.787.314.955.912
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	622.657.329.807	555.367.081.351
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	100.600.000.000	100.600.000.000
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	333.830.014.000	333.830.014.000
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	324.379.067.106	125.751.844.930
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	122.404.255.697	120.992.735.697

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANAH PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Ruziah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	372.869.158.878	377.635.858.958
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEORISKA	860.125.687.828	846.738.707.121
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	585.704.428.389	606.358.583.625
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	89.075.216.326	89.075.216.326
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	81.705.022.040	80.978.000.000
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	6.201.291.154.537	6.846.181.762.046
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.782.773.318.225	1.782.773.318.225
55	081	BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	781.190.927.385	840.070.594.665
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	325.015.190.655	320.651.455.392
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	27.226.540.000	27.226.540.000
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	11.250.883.554	11.250.883.554
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	515.131.306.413	515.131.306.413
61	087	ARSP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	216.312.132.396	216.312.132.396
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	440.002.155.618	444.447.889.239
63	089	BADAN PENGAWASAN KEJANGGARAN DAN PEMBANGUNAN	1.015.394.877.901	1.040.119.546.830
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	937.546.345.302	888.598.843.330
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	336.575.243.520	336.575.243.520
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	515.234.741.435	453.822.133.060
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	69.139.276.742	57.502.052.742
68	100	KOMISI YUDISIAL	48.799.520.400	47.188.389.400
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	113.143.589.776	113.143.589.776
70	104	BADAN NASIONAL PENDEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	43.853.876.181	44.748.936.081
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	3.520.341.767.980
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	116.490.960.000	116.490.960.000
73	107	BADAN SAR NASIONAL	314.683.285.364	303.615.044.275
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	1.987.200.000	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	471.736.231.125	429.505.041.845
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	7.315.400.000	7.315.400.000
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	21.822.314.130.937	21.830.341.424.135
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	38.261.256.000	1.977.000.000
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	221.628.762	221.628.762
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	2.585.286.126.373	2.639.261.998.650
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	3.307.355.554.899	3.348.951.908.778
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	597.525.625.314	588.009.096.314
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	6.737.260.600	5.544.500.600
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-
JUMLAH PADA R/L			1.019.801.217.907.900	1.037.793.703.598.270
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	4.016.775.775	4.016.775.775
		Penyesuaian (Eliminasi) pada SPAN	(857.211.200.000)	-
TOTAL			1.018.648.023.083.740	1.037.797.720.329.050

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

LAMPIRAN 19.B

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)		31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
			BRUTO	PENYUSUTAN	BRUTO	PENYUSUTAN		
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	157.535.478.383	(127.882.666.318)	29.652.812.067	148.831.544.599	(120.071.320.509)	28.760.224.090
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.320.157.553.41	(929.544.472.379)	390.613.081.035	1.188.424.521.14	(804.093.379.649)	384.331.141.500
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.971.544.524.38	(1.630.757.004.133)	340.787.520.254	1.961.947.628.28	(1.502.512.437.022)	459.435.191.258
4	005	MAKAMAH AGUNG	2.917.147.390.88	(2.301.314.727.130)	615.832.663.757	2.703.706.525.96	(2.098.944.069.586)	604.762.456.373
5	006	KEPAJAKAN AGUNG	3.487.200.803.63	(2.064.770.585.061)	1.422.430.218.57	2.829.780.003.48	(1.792.932.045.372)	1.036.847.958.10
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	3.622.893.042.84	(2.129.636.610.118)	1.493.256.432.73	3.078.891.846.10	(1.851.721.409.806)	1.227.170.436.29
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.963.315.687.79	(2.679.559.533.823)	283.756.153.975	2.916.134.984.44	(2.580.034.879.094)	336.100.105.347
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	2.160.421.214.72	(1.467.545.543.785)	692.875.670.936	1.856.678.982.91	(1.298.774.583.385)	557.904.399.533
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	227.303.639.687.59	(108.488.012.725.453)	118.815.626.962.14	191.232.696.715.95	(91.801.816.953.576)	99.430.879.762.37
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	6.680.447.076.85	(4.407.498.695.412)	2.272.948.381.43	5.714.938.492.90	(3.602.514.871.035)	2.112.423.621.86
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	14.107.977.235.91	(10.861.430.455.942)	3.246.546.779.97	13.627.399.300.89	(10.269.980.408.649)	3.357.418.892.24
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	6.225.890.240.25	(4.700.564.104.242)	1.525.326.136.00	6.007.283.535.14	(4.270.325.461.087)	1.736.958.074.05
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.838.718.583.44	(1.951.087.290.292)	885.631.293.153	2.646.562.621.96	(1.741.695.049.720)	904.867.572.241
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.134.852.582.10	(3.966.609.219.808)	1.168.243.362.29	5.052.666.303.41	(3.663.751.438.234)	1.388.914.865.18
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	49.051.998.331.32	(25.733.040.571.422)	23.318.957.759.89	43.493.459.809.41	(21.599.967.169.435)	21.897.492.639.97
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.417.235.655.31	(2.446.822.749.458)	970.412.905.856	3.192.976.280.87	(2.269.707.578.060)	923.268.702.813
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	19.931.915.819.97	(14.702.932.779.488)	5.228.983.040.48	30.298.593.008.90	(22.794.222.198.080)	7.504.370.810.82
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	8.666.975.027.17	(6.587.245.554.537)	2.079.729.472.64	7.863.111.088.54	(5.783.375.986.927)	2.079.735.101.62

(dalam Rupiah)

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)				31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO		
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	2.493.107.556,23	(1.515.160.349,103)	977.947.207,134	2.333.052.146,84	(1.328.154.058,006)	1.004.898.088,83		
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.788.554.554,51	(1.402.111.593,278)	386.442.961,232	1.751.270.679,84	(1.237.589.909,574)	513.680.770,268		
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.373.676.281,91	(2.444.112.122,135)	929.564.159,777	3.196.243.543,79	(2.330.361.494,748)	865.882.049,046		
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.631.552.945,32	(3.728.287.515,633)	1.903.265.429,69	5.620.044.740,19	(3.480.878.317,492)	2.139.166.422,70		
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	13.109.431.069,66	(7.885.247.316,585)	5.224.183.753,08	10.907.002.968,38	(6.801.456.896,357)	4.105.546.072,02		
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEMAYAMAN	125.456.875,877	(94.025.592,776)	31.431.283,101	122.823.118,743	(82.707.456,693)	40.115.662,050		
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	64.652.995,149	(49.172.886,473)	15.480.108,676	59.437.718,065	(43.394.951,212)	16.032.766,853		
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KERUDAYAN	75.422.307,424	(57.514.810,127)	17.907.497,297	79.588.439,223	(56.808.098,805)	22.780.340,418		
27	040	KEMENTERIAN PARAHISATA	471.713.974,169	(333.857.259,112)	137.856.715,057	409.256.751,706	(293.230.345,226)	116.026.406,480		
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	122.026.524,215	(92.638.266,811)	29.388.257,404	114.169.368,148	(82.094.961,098)	32.074.407,050		
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	23.585.360.888,71	(17.122.789.183,343)	6.462.571.705,36	22.043.852.287,47	(15.382.916.956,126)	6.660.935.331,35		
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	406.599.540,127	(347.934.033,813)	58.665.506,314	400.639.177,271	(324.419.005,264)	76.220.172,007		
31	047	KEMENTERIAN PEMBENDAHYANAN PENEMPULAN DAN PENLINDUNGAN ANAK	95.571.541,415	(69.673.879,556)	25.897.661,865	94.259.793,486	(55.027.890,538)	39.231.902,948		
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI	103.103.352,431	(70.059.645,563)	33.043.706,868	90.317.431,592	(62.471.363,229)	27.846.068,363		
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	10.505.136.338,48	(5.393.001.721,005)	5.112.134.607,47	8.951.547.860,45	(3.777.863.767,557)	5.173.684.092,89		

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

LAMPIRAN 19.B

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)		31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	6.793.202.944,51	(5.422.295.375,07)	1.370.907.569,44	6.532.100.035,64	(4.686.677.387,39)	1.845.422.648,25
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	158.821.733,247	(98.335.210,146)	60.486.523,107	159.188.547,377	(67.804.455,62)	91.384.091,756
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.891.531.310,33	(1.497.332.102,00)	394.199.208,33	1.737.061.101,35	(1.349.822.429,25)	387.238.672,094
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	332.663.047,278	(219.799.543,03)	112.863.504,24	273.023.533,027	(166.253.412,34)	106.770.120,687
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.618.852.315,58	(1.819.887.630,85)	798.964.684,73	2.386.990.201,22	(1.609.216.863,80)	777.773.337,423
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	558.958.560,402	(249.337.171,17)	309.621.389,231	496.477.053,115	(223.558.444,57)	272.918.608,544
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.146.630.406,29	(1.434.297.408,42)	712.332.997,87	2.782.208.505,07	(1.325.048.895,76)	1.457.159.609,30
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	110.053.992.531,19	(54.943.646.544,14)	55.110.345.987,04	86.798.752.155,21	(40.142.958.672,90)	46.655.793.482,30
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.434.616.953,55	(1.447.632.923,29)	986.984.030,25	2.086.540.043,49	(1.246.620.404,82)	839.919.638,669
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	350.702.533,884	(257.273.579,79)	93.428.954,09	298.742.412,095	(217.580.784,72)	81.161.627,370
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	232.085.022,345	(208.364.527,46)	23.720.494,87	232.559.785,523	(203.116.450,15)	29.443.335,364
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2.026.684.912,69	(1.107.894.183,74)	918.790.728,94	1.706.969.603,84	(852.616.803,43)	854.352.800,410
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	344.347.161,374	(229.816.758,57)	114.530.402,79	331.245.725,328	(194.282.897,48)	136.962.827,84
47	068	BADAN KENDUKUNGAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	454.276.912,620	(358.991.953,50)	95.284.959,11	422.748.982,55	(332.435.367,14)	90.313.615,410
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	27.794.544,161	(24.854.145,59)	2.940.398,570	25.016.080,524	(21.490.245,37)	3.525.835,151
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	4.158.147.499,54	(3.135.554.878,69)	1.022.592.614,84	3.633.316.469,31	(2.644.166.297,02)	989.150.172,284
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.304.109.262,23	(727.024.629,17)	577.084.588,06	832.980.215,76	(614.917.078,10)	218.063.137,660

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.B

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	255.815.979,563	(222.332.659,936)	33.483.319,627	243.000.749,346	(209.000.026,524)	34.000.722,822
52	078	PUSAT LAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	118.793.778,109	(87.175.449,795)	31.618.328,314	110.597.292,348	(75.996.128,595)	34.601.163,753
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.723.437.864,53	(1.127.698.823,009)	595.739.041,525	1.436.999.731,66	(1.003.749.463,150)	433.250.268,510
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.013.923.992,49	(595.864.147,556)	418.059.844,947	876.178.559,164	(536.294.889,043)	339.883.670,121
55	081	BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	2.994.893.473,64	(1.876.960.845,823)	1.117.932.627,81	2.754.354.375,37	(1.650.798.131,303)	1.103.556.244,06
56	082	LEMBAGA PENERANGAN DAN ANTARiksa NASIONAL	1.368.808.513,31	(755.640.242,292)	613.168.271,018	1.202.377,314,86	(630.917,040,610)	571.460.274,259
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1.034.767.333,69	(776.592.235,901)	258.175.117,796	923.707.281,421	(691.850.436,854)	231.856.844,567
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	41.509.541,786	(29.926.011,659)	11.583.530,127	42.750.590,319	(26.795.023,959)	15.955.566,360
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	120.042.125,093	(78.138.930,239)	41.913.194,854	115.518.436,047	(71.502.476,146)	44.015.959,901
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	176.039.169,071	(149.789.427,786)	26.249.741,285	171.006.618,574	(143.363.945,116)	27.642.673,458
61	087	ARSP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	196.135.354,724	(170.519.136,473)	25.616.218,251	195.093.264,253	(162.069.997,505)	33.023.266,748
62	088	BADAN KEGAWALAN NEGARA	539.281.544,640	(428.443.721,524)	110.837,823,116	496.480.147,511	(379.113.220,086)	117.366,927,423
63	089	BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	381.726.544,930	(300.753.302,051)	80.973.242,879	328.936.657,011	(273.420.280,814)	55.516,376,197
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	771.053.591,013	(645.245.133,726)	125.808.457,287	738.830.977,606	(619.430.173,926)	119.400.803,680
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	682.617.192,748	(432.200.825,066)	250.416.367,682	501.711.614,402	(387.062.309,743)	114.649.304,659
66	093	KOHISI PEMERINTAS ANTI KORUPSI	605.972.934,481	(363.363.123,793)	242.609.810,688	555.634.140,026	(290.926.263,647)	264.707.877,379
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	137.187.762,130	(117.557.831,415)	19.629.930,715	140.141.212,363	(116.113.429,045)	24.027,783,318
68	100	KOHISI YUDISIAL	49.765.110,623	(43.570.066,789)	6.195.043,834	48.589.855,918	(40.013.473,449)	8.576.382,469

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19 B

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)		31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		NETO
			BRUTO	PENYUSUTAN	BRUTO	PENYUSUTAN	
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.301.094.714,02	(1.006.930.866,457)	1.295.301.771,92	(829.678.734,347)	465.623.037,580
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN TENAGA KERJA	167.841.381,133	(138.085.844,574)	170.630.985,546	(137.463.308,040)	33.167.677,500
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	151.490.237,335	(91.413.879,691)	60.076.357,644
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PERHERINTAH	208.050.847,316	(129.336.280,053)	186.982.734,923	(90.048.170,378)	96.934,564,545
73	107	BADAN SAR NASIONAL	8.601.402.036,17	(4.661.260.231,535)	7.910.772.864,08	(3.772.425.810,436)	4.138.347.053,64
74	108	KOMISI PERSENGAJAN PEGAWAI USAHA	28.161.334,109	(20.260.272,594)	25.745.668,885	(18.816.404,704)	6.929,264,185
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	33.262.317,682	(20.967.135,236)	22.233.577,944	(19.008.186,746)	3.225.391,198
76	110	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	41.357.097,591	(29.564.103,963)	40.151.199,049	(26.838.741,033)	13.312,458,016
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	79.414.853,670	(56.123.409,898)	76.974.049,537	(50.492.271,876)	26.481,337,661
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	1.221.776.217,71	(850.616.980,842)	1.063.527.969,56	(743.101.607,819)	320.426,361,750
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	317.333.696,415	(168.724.029,178)	313.135.625,991	(103.652.918,477)	209.482,707,514
80	114	SEKRETARIAT KABINET	55.019.747,053	(43.100.096,667)	54.506.077,745	(42.324.283,496)	12.181,794,255
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	354.870.590,962	(135.443.539,896)	174.227.792,977	(100.113.085,724)	74.614,707,253
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	1.358.515.800,52	(1.129.616.551,398)	1.285.833.879,17	(1.100.042.928,399)	185.790,950,780
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	2.532.465.596,16	(1.367.020.241,310)	1.764.777.955,41	(1.263.802.256,292)	500,975,699,124
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	57.636.862,010	(40.341.576,809)	55.795.062,816	(35.431.505,857)	20.363,556,953

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.B

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)		31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	
			BRUTO	PENYUSUTAN	BRUTO	PENYUSUTAN
85	119	BADAN KEAMANNAN LAUT	1.347.247.788,06	(656.550.790,187)	1.192.231.455,63	(549.410.961,343)
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	100.422.974,762	(43.780.967,605)	59.069.896,632	(20.990.790,421)
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	28.091.846,029	(12.445.615,436)	24.406.262,576	(6.361.962,883)
		JUMLAH PADA K/L	589.844.387.849,92	(329.678.110.529,237)	519.473.703.556,58	(287.394.218.557,576)
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	442.306.166,552	(344.680.350,375)	422.386.780,615	(288.090.838,707)
		TOTAL	590.286.694.016,47	(330.022.790.879,612)	519.896.090.337,20	(287.682.309.396,283)
						232.213.780.940,92

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

LAMPIRAN 19.C

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)		31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	
			BRUTO	PENYUSUTAN	BRUTO	PENYUSUTAN
1	001	PAJES PERSTASIAANAN BAKTI	220.385.697,914	53.307.270,932	167.078.426,982	207.005.054,808
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKAT	907.534.052,443	1.188.580.554,347	718.951.498,095	885.368.481,135
3	004	BADAN PERENCANA NEGARA	2.332.971.508,643	316.182.839,145	2.016.788.669,498	2.325.635.122,982
4	005	PERHAKSIAN AGUNG	7.992.652.226,378	11.572.348.334,794	6.420.304.391,586	7.555.156.372,492
5	006	PERHAKSIAN AGUNG	6.007.786.627,706	1.251.801.892,108	4.756.184.755,598	5.839.341.744,774
6	007	PERHAKSIAN AGUNG	5.790.344.144,015	1.748.617.456,319	4.041.726.687,695	3.697.178.100,803
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.522.795.952,068	652.840.708,857	1.869.955.243,211	2.799.100.959,818
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	6.451.334.088,928	3.937.710.066,599	2.493.624.022,379	6.702.165.653,533
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	44.899.893.872,846	14.081.695.076,689	30.816.198.796,157	42.887.557.331,350
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	10.457.963.988,623	12.221.816.547,094	8.134.147.251,529	11.135.467.855,674
11	015	KEMENTERIAN KEJANGAN	14.544.545.225,457	3.755.337.542,619	10.789.207.682,838	14.271.267.493,102
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	4.734.924.884,794	11.089.264.819,476	3.645.670.065,318	4.758.157.681,267
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.675.432.517,112	1.980.886.203,044	1.284.546.314,068	1.515.316,610,965
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.166.250.483,575	1.998.483.944,019	1.567.766.539,556	2.163.560.176,324
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	25.586.841.177,815	3.431.685.733,636	22.153.155.444,185	23.274.257.931,008
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5.004.481.460,948	1.932.178.235,827	4.072.303.225,121	4.719.650.447,399
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	13.374.335.256,508	12.903.594.715,702	10.670.740.540,806	14.264.231.925,066
18	025	KEMENTERIAN AGRI	26.802.836.201,742	14.646.037.458,595	22.156.803.743,147	25.604.968.974,564
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	1.442.717.606,755	2.271.117.457,794	1.165.600.148,991	1.435.418,016,658
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.513.338.943,015	1.061.077.631,791	1.193.266.311,224	1.510.007.243,771
21	029	KEMENTERIAN UNDANG-UNDANG DAN KEHUTANAN	2.397.477.874,437	1.453.828.665,741	1.941.649.208,695	2.237.634.338,395
22	032	KEMENTERIAN KELUANGAN DAN PERKANTORAN	4.103.635.605,538	1.603.034.197,244	3.500.601.407,295	3.898.176.044,399
23	033	KEMENTERIAN PERKANTORAN, DAMPAK DAN PERUMAHAN RAKAT	17.505.734.217,644	11.589.561.223,730	15.976.172.449,944	20.178.006.715,792
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	8.134.999.202	1.920.333,975	7.214.665,227	5.598.310,526

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

LAMPIRAN 19.C

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN	22.785.169.780	(4.100.080.318)	18.685.089.462	22.785.169.780	(3.531.951.978)	19.153.217.802
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN MANUSIA DAN PERKOTAAN	162.802.785.121	(17.750.071.892)	145.052.713.229	162.486.121.051	(14.491.499.398)	147.994.621.653
27	040	KEMENTERIAN PERHUKUMATAN	1.167.697.980.895	(222.582.630.238)	945.115.350.657	865.451.580.378	(206.791.790.658)	658.658.789.720
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	245.548.812.957	(41.889.842.418)	203.658.970.539	196.573.019.634	(37.247.676.623)	159.325.343.011
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	29.801.781.695.588	(4.928.782.106.647)	24.872.999.588.941	27.203.772.194.881	(4.450.828.235.815)	22.752.943.959.066
30	044	KEMENTERIAN KORPORASI DAN UKM	797.166.816.674	(170.319.817.269)	626.847.018.905	854.798.416.608	(154.235.218.889)	700.563.197.717
31	047	KEMENTERIAN PEMBIDAYAAN PERBURUHAN DAN PELINDUNGAN ANAK	104.426.273.203	(9.288.216.796)	95.137.556.407	104.426.273.203	(7.195.138.738)	97.231.134.465
32	048	KEMENTERIAN PENGUSAHAAN PERAKTOR NEGARA DAN BERKORPORASI BERKORPORASI	37.572.097.436	(5.868.012.690)	31.704.084.746	33.626.425.495	(44.440.001.957)	29.186.423.538
33	050	BADAN INTELEJEN NEGARA	730.064.092.473	(110.438.044.612)	619.626.047.861	578.418.037.421	(91.993.672.774)	486.424.364.647
34	051	LEMBAGA SAKSI NEGARA	1.016.402.983.406	(72.388.014.872)	944.014.968.534	983.445.174.538	(51.506.945.658)	931.938.228.878
35	052	DEWAN KEJAMANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN KOSAS STATISTIK	1.930.243.613.988	(364.436.539.093)	1.565.787.074.895	1.873.467.611.436	(340.215.816.170)	1.533.251.752.266
37	055	KEMENTERIAN PERUBAHAN PERUSAHAAN	144.131.361.953	(34.504.274.610)	109.627.087.343	137.642.745.908	(29.667.419.254)	108.585.326.654
38	056	KEMENTERIAN PERUBAHAN PERUSAHAAN NASIONAL	2.083.541.389.078	(337.182.419.604)	1.746.358.969.474	1.882.135.331.886	(290.114.803.343)	1.592.020.528.543
39	057	PERUBAHAN NASIONAL BERUBAH INDONESIA	556.219.926.984	(61.482.435.333)	494.737.491.651	553.271.098.393	(47.461.196.201)	506.319.902.192
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	739.117.374.472	(209.055.295.451)	530.062.079.021	750.241.479.014	(193.354.839.431)	556.886.639.583
41	060	KEPOMBAK NEGARA BERUBAH INDONESIA	21.137.675.588.196	(4.558.876.072.562)	16.578.800.515.634	17.720.687.344.074	(4.120.803.236.600)	13.599.884.107.474
42	063	BADAN BENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	669.133.787.588	(138.352.024.302)	530.781.763.286	641.816.305.428	(164.227.431.690)	477.588.873.738
43	064	LEMBAGA KEJAMANAN NASIONAL	274.667.240.892	(24.927.059.575)	249.740.181.317	252.579.816.384	(19.700.164.644)	232.879.651.740
44	065	BADAN KOORDINASI PENYAJIAN MODAL	245.317.298.605	(58.887.402.839)	186.430.195.766	245.317.298.605	(51.939.275.882)	193.378.022.723
45	066	BADAN NAKORINA NASIONAL	1.020.982.337.974	(154.539.286.910)	866.443.051.064	951.563.570.792	(136.819.894.907)	814.743.675.885
46	067	KEMENTERIAN DESA, PENGEMBANGAN DAERAH, PERTANAKAN DAN TRANSKRIBASI	389.194.638.847	(39.039.232.598)	250.155.406.249	330.387.908.289	(35.897.915.518)	294.489.992.771
47	068	BADAN PENELITIAN DAN KULIAHA BERKORPORASI NASIONAL	367.230.483.740	(111.690.663.556)	255.539.820.184	340.567.625.332	(101.876.209.897)	238.691.415.435
48	074	KORPRI NASIONAL HUKUM ASASIS MANUSIA	11.440.763.193	(1.144.076.319)	10.296.686.874	13.058.303.193	(1.043.066.439)	12.015.246.754

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**PERMINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

LAMPIRAN 19.C

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)		31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	BRUTO	PENYUSUTAN	
			NETO	NETO	NETO	NETO	
49	075	BAJAN FISIOLOGI, KUPATOLOGI, DAN GEORSIKA	1.060.044.349.465	(224.726.111.508)	835.318.237.957	(213.478.351.169)	621.839.886.788
50	076	KORISI PENJAJAN UMUM	503.775.867.237	(74.749.011.151)	429.026.856.086	(64.881.021.448)	364.145.834.638
51	077	PAKAR/KAH/KONSULTOR	249.040.949.082	(43.230.167.797)	205.810.781.285	(38.871.017.749)	166.939.763.536
52	078	KUAI BELAJAR DAN/ANALISIS TRANSKIPSI KEUANGAN	147.070.888.731	(19.852.382.588)	127.218.506.143	(16.926.479.381)	110.292.026.762
53	079	LEMBAGA UMUM PENELITIAN INDONESIA	1.215.315.192.230	(197.489.134.192)	1.017.826.058.038	(161.564.479.529)	856.261.578.509
54	080	BAJAN TENGAH NUKLEI NASIONAL	607.102.240.600	(258.474.880.040)	348.627.360.560	(207.554.029.736)	141.073.330.824
55	081	BAJAN PENGAJIAN DAN PENELITIAN TEKNOLOGI	882.480.773.826	(181.349.872.405)	701.130.901.421	(742.838.607.831)	2.050.062.613
56	082	LEMBAGA PENELITIAN DAN ANALISIS NASIONAL	317.054.317.655	(83.008.126.628)	234.046.191.027	(296.511.486.644)	1.050.000.000
57	083	BAJAN INFORMASI GEOSPASIAL	113.637.697.525	(27.715.786.908)	85.921.910.617	(105.679.034.732)	1.050.000.000
58	084	BAJAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-
59	085	BAJAN PENGAWAS TENGAH NUKLEI	19.950.542.915	(4.812.747.250)	15.137.795.665	(4.504.627.508)	10.633.168.157
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	466.235.260.661	(104.888.121.762)	361.347.138.899	(462.280.170.172)	1.050.000.000
61	087	GRUP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	232.559.835.154	(57.350.517.341)	175.209.317.813	(233.874.874.154)	1.050.000.000
62	088	BAJAN NEGARAWAN NEGARA	667.835.852.268	(124.289.208.618)	543.546.643.650	(664.526.079.484)	1.050.000.000
63	089	BAJAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PERANGKUAN	913.574.996.570	(201.982.264.181)	711.592.732.389	(905.663.787.448)	1.050.000.000
64	090	KEMENTERIAN PENDAGANGAN	794.985.145.735	(143.970.715.514)	651.014.430.221	(794.505.857.974)	1.050.000.000
65	092	KEMENTERIAN PERLOM DAN UJAH RAGA	254.853.519.859	(49.255.431.817)	205.598.088.042	(245.333.338.859)	1.050.000.000
66	093	KOMISI PEMBANTUAN KORUPSI	407.107.703.632	(44.946.939.118)	362.160.764.504	(404.563.747.058)	1.050.000.000
67	095	DEWAN PENYALING DAERAH	65.883.779.175	(5.013.341.286)	60.870.437.889	(67.600.455.175)	1.050.000.000
68	100	KOMISI YUDISIAL	72.314.003.716	(13.493.326.308)	58.820.677.408	(71.676.580.588)	1.050.000.000
69	103	BAJAN NASIONAL PENWANGKALAN BERCAKUP	576.047.389.075	(46.697.440.520)	529.350.948.555	(539.690.594.752)	1.050.000.000
70	104	BAJAN NASIONAL PERAWAN DAN PERANGKUAN TENGAH NEGARA INDONESIA	74.814.040.087	(11.966.891.986)	62.847.148.101	(73.374.094.028)	1.050.000.000
71	105	BAJAN PENWANGKALAN LUMPIR BERCAKUP	-	-	-	(9.646.391.985)	1.050.000.000
72	106	LEMBAGA PENELITIAN PENGOJAN BAHAN/OLAH PERMINTAH	160.657.530.329	(11.037.251.535)	149.620.278.794	(160.430.583.711)	1.050.000.000

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

LAMPIRAN 19.C

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
73	107	BADAN NASIONAL	946.399.056.329	(101.131.248.788)	845.267.807.541	871.645.179.878	(87.502.161.506)	784.143.018.370
74	108	KORPRI PENGANGKATAN PEGAWAIAN USAHA	173.700.000	(45.429.231)	128.270.769	-	-	-
75	109	BADAN PENGASBANGAN WILAYAH SIBERAYA PROURA	36.419.569.236	(3.345.626.821)	33.073.942.415	18.470.776.884	(2.542.362.987)	15.928.413.897
76	110	PERBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERUBAHAN	30.273.586.683	(2.884.590.397)	27.388.996.286	31.977.517.063	(2.478.612.211)	29.498.904.852
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & MELALUHAN BEBAS BAYAH	1.233.215.663.807	(188.568.337.618)	1.044.647.326.189	1.062.442.964.853	(171.837.704.041)	890.605.260.812
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	205.269.758.084	(14.835.307.177)	190.434.450.907	163.590.307.114	(11.133.631.431)	152.456.675.683
80	114	SEKRETARAT KABINET	-	-	-	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	1.940.294.000	(77.611.760)	1.862.682.240	1.940.294.000	(38.805.880)	1.901.488.120
82	116	LEMBAGA PENYIARAN REPUBLIK RRI	463.272.406.105	(159.301.576.147)	303.970.829.958	445.111.125.932	(1.481.071.172.858)	297.003.953.094
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	479.810.814.660	(194.357.970.143)	285.452.844.517	592.501.519.758	(181.647.766.883)	410.853.752.875
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELALUHAN BEBAS SABANG	1.522.249.681.813	(120.080.591.206)	1.402.169.090.607	1.550.241.578.543	(89.340.104.053)	1.460.901.474.490
85	119	BADAN KEARIFANAN LALU	47.107.069.885	(6.237.784.772)	40.869.285.113	47.007.069.885	(5.297.212.232)	41.709.757.653
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEPARLITIHAN	-	-	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KESEKUTUPAN	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			287.027.970.732.883	(81.566.239.473.462)	225.461.731.259.421	275.132.781.045.431	(96.270.139.037.825)	218.876.642.007.606
88	999	RENDAH RAKA URUH NEGARA	490.017.000	(4.900.170)	485.116.830	-	-	-
TOTAL			287.028.460.749.883	(81.566.244.373.632)	225.462.322.378.591	275.132.781.045.431	(96.270.139.037.825)	218.876.642.007.606

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

LAMPIRAN 19.D

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)		31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		(dalam Rupiah)	
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO		PENYUSUTAN
23	033	KEMENTERIAN PERKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	448.629.109.542.751	(276.172.334.850.102)	172.456.774.692.649	535.321.612.427.100	(240.614.899.608.726)	294.706.712.818.374
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	2.475.255.400	(542.201.287)	1.932.554.113	2.475.255.400	(478.544.821)	1.996.710.579
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PERHUBUNGAN MANUSIA DAN KERUDAYAN	144.386.000	(33.171.325)	111.214.675	144.386.000	(29.561.675)	114.824.325
27	040	KEMENTERIAN PARIPIMATA	56.927.687.773	(29.161.163.550)	27.766.524.223	60.913.210.545	(28.941.968.759)	31.971.241.786
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.201.056.420	(987.919.883)	2.213.136.537	3.201.056.420	(899.703.235)	2.301.353.185
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	1.275.363.488.177	(628.405.530.355)	646.957.957.822	1.266.045.901.613	(612.037.645.046)	654.008.256.567
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	48.254.855.445	(22.103.633.324)	26.151.222.121	49.425.853.297	(20.841.120.705)	28.584.732.592
31	047	KEMENTERIAN PEMBENDAYAGAAN PERPIPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANA	5.152.456.725	(4633.723.553)	518.733.172	5.152.456.725	(3.605.557.207)	1.546.899.518
32	048	KEMENTERIAN PEMBENDAYAGAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.395.216.550	(603.858.894)	791.357.656	1.395.216.550	(539.128.606)	836.087.944
33	050	BADAN INTELEJEN NEGARA	142.624.465.295	(60.540.546.196)	82.083.919.099	150.949.571.850	(61.163.364.890)	89.786.206.960
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	37.449.601.826	(12.861.647.553)	24.587.954.273	37.449.601.826	(11.686.681.487)	25.762.920.339
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	-	-	-	-	-	-
37	055	KEMENTERIAN PRIBAPENAS	6.507.585.170	(3.153.379.513)	3.354.205.657	6.507.585.170	(2.942.850.366)	3.564.734.804
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	22.816.996.787	(8.898.074.532)	13.918.922.255	22.416.744.583	(8.131.569.681)	14.285.174.902
39	057	PERUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	54.724.368.942	(957.853.858)	53.766.515.084	54.724.368.942	(923.932.208)	53.800.436.734
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	31.262.337.137	(12.101.181.807)	19.161.155.330	30.161.281.609	(11.237.238.668)	18.923.942.941
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	847.085.525.229	(459.488.158.831)	387.597.366.398	824.913.528.281	(423.204.897.291)	401.708.630.990

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

LAMPIRAN 19 D

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)		31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	
			BRUTO	PENYUSUTAN	BRUTO	PENYUSUTAN
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	28.520.550.327	(7.227.367.300)	21.293.183.027	(6.542.559.991)
43	064	LEMBAGA KEFAHAMAN NASIONAL	11.118.997.502	(2.059.426.170)	9.059.571.332	(1.527.179.401)
44	065	BADAN KOORDINASI PENANJAHAN MODAL	4.863.164.183	(1.607.288.915)	3.255.875.268	(1.483.491.423)
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	45.387.927.803	(15.750.916.292)	29.637.011.511	(13.880.200.515)
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	732.005.217.423	(190.165.972.058)	541.839.245.365	(238.312.806.499)
47	068	BADAN KENDUDUKAN DAN KEUANGAN BERENCANA NASIONAL	27.500.273.480	(14.123.553.364)	13.376.720.116	(13.003.248.677)
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEORFIKA	229.990.006.233	(93.183.026.150)	136.806.980.083	(109.838.853.630)
50	076	KOMISI PEMULIHAN LINGKUNGAN	1.284.045.495	(462.645.517)	821.379.978	(489.216.236)
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	45.054.462.043	(23.280.974.631)	21.773.487.412	(22.339.764.668)
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	628.286.198	(357.002.027)	271.284.171	(299.882.741)
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	203.024.166.928	(90.114.751.486)	112.909.415.442	(101.188.942.446)
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	121.863.800.285	(41.252.018.440)	80.611.781.845	(38.393.630.345)
55	081	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI	123.426.801.131	(33.644.640.593)	89.782.160.538	(28.691.696.172)
56	082	LEMBAGA PENELITIAN DAN ANTARIKASA NASIONAL	42.420.442.869	(26.651.419.398)	15.769.023.471	(26.414.878.053)
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	9.420.314.030	(2.880.752.972)	6.539.561.058	(2.654.457.977)
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAJIAN TENAGA NUKLIR	2.272.411.872	(1.030.662.162)	1.241.749.710	(1.439.292.232)
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	9.201.428.880	(3.660.184.058)	5.541.244.822	(2.828.017.204)
61	087	ARIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	11.741.372.797	(6.158.324.313)	5.583.048.484	(5.820.756.893)
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	23.239.393.756	(14.151.529.407)	9.087.864.349	(13.120.248.236)
63	089	BADAN PENGAJIAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	15.185.311.538	(8.812.507.418)	6.372.804.120	(8.392.713.148)

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN IKIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

LAMPIRAN 19.D

No.	BA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)				31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
		BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO		
64	090	25.690.278.749	(22.060.304.221)	3.630.074.528	25.507.442.449	(21.815.136.017)	3.692.306.432		
65	092	11.881.430.936	(8.990.874.337)	2.890.556.599	12.049.455.936	(8.468.621.459)	3.580.834.477		
66	093	126.156.177.603	(34.948.712.402)	91.207.465.201	117.956.045.292	(30.211.403.577)	87.744.641.715		
67	095	-	-	-	27.677.000	(294.436)	27.382.564		
68	100	3.588.869.628	(3.457.085.931)	131.783.697	3.588.869.628	(3.449.181.876)	139.687.752		
69	103	1.190.429.000	(1.190.429.000)	1.071.386.100	1.190.429.000	(71.425.740)	1.119.003.260		
70	104	12.077.735.207	(9.823.672.353)	2.254.062.854	12.120.395.452	(9.338.483.788)	2.781.911.664		
71	105	-	-	-	597.961.790.333	(115.474.586.535)	482.487.203.798		
72	106	-	-	-	-	(14.326.273.749)	(14.326.273.749)		
73	107	57.593.114.435	(15.385.843.125)	42.207.271.310	46.592.688.404	-	46.592.688.404		
74	108	-	-	-	-	-	-		
75	109	105.238.959.033	(20.686.235.155)	84.552.723.878	48.908.454.347	(15.492.578.981)	33.415.875.366		
76	110	-	-	-	-	(20.567.863.530)	(20.567.863.530)		
77	111	36.015.310.318	(24.129.367.370)	11.885.942.948	39.235.842.818	(3.751.983.407.915)	(3.712.747.565.097)		
78	112	7.427.274.269.254	(3.962.176.977.500)	3.465.097.291.754	7.405.404.216.665	(15.167.736.562)	2.290.236.490.103		
79	113	58.854.528.469	(19.411.879.312)	39.442.649.157	52.401.186.939	-	52.401.186.939		
80	114	-	-	-	-	-	-		
81	115	1.115.711.700	(534.413.763)	562.297.937	1.113.759.200	(452.987.967)	660.771.233		
82	116	20.006.091.035	(10.974.725.569)	9.031.365.466	23.581.471.790	(11.500.132.399)	12.081.339.391		
83	117	26.715.212.180	(12.077.175.979)	14.638.036.201	20.917.102.526	(12.922.798.209)	7.994.304.317		

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PENERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

LAMPIRAN 19.D

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)		31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		(dalam Rupiah)	
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO		PENYUSUTAN
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	617.385.904.920	(278.289.223.243)	339.096.681.677	695.650.598.420	(241.033.704.575)	454.616.893.845
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	35.895.980.460	(6.833.181.469)	29.062.798.991	35.895.980.460	(5.993.291.059)	29.902.689.401
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
Jumlah pada K/L			593.013.461.009.196	(344.948.939.522.544)	248.064.521.486.652	680.926.723.185.441	(303.050.766.911.424)	377.875.956.274.017
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	227.735.842.632	(60.842.255.085)	166.893.587.547	154.452.072.132	(40.889.131.179)	113.562.941.953
TOTAL			593.241.196.851.828	(345.009.781.777.629)	248.231.415.074.199	681.081.175.258.573	(303.091.656.042.603)	377.989.519.215.970

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ASET
TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)		31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	
			BRUTO	PENYUSUTAN	BRUTO	PENYUSUTAN
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	73.440.383.488	-	66.451.125.475	0
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	19.832.817.868	-	19.238.192.079	0
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	24.329.110.328	(482.415.781)	23.870.580.607	(402.519.155)
4	005	MAKAMAH AGUNG	73.890.244.537	(525.440.920)	65.999.639.840	(546.287.205)
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	12.425.940.639	(497.222.054)	11.619.447.041	(416.868.300)
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	3.214.731.558.617	(4.503.555.713)	1.224.227.578.028	(4.457.307.775)
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	186.880.348.286	(137.811.871.932)	190.887.797.956	(79.580.030.559)
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	97.258.327.925	(5.861.398.720)	94.709.830.232	(5.748.953.851)
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	5.624.453.663.962	(1.365.586.686.650)	4.147.202.957.721	(987.436.356.496)
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	68.218.739.768	(6.043.713.717)	70.832.527.797	(5.787.294.902)
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	51.089.377.176	(585.686.709)	55.953.215.349	(549.119.806)
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	72.295.320.166	(1.468.982.573)	79.520.885.958	(1.263.655.777)
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	28.003.391.321	(1.022.149.100)	29.911.166.531	(1.021.649.100)
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	430.305.894.454	(1.598.722.991)	438.695.860.786	(1.380.257.420)
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	3.303.454.098.620	(80.887.399.119)	3.207.799.293.553	(125.112.662.944)
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	412.300.389.335	(4.722.701.103)	338.127.542.172	(4.344.229.407)

(dalam Ruzah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19 E

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ASET
TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	180.330.322.376	(3.278.310.046)	177.052.012.330	253.351.060.234	(7.157.937.466)	246.193.122.768
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	1.320.276.033.117	(71.400.253.882)	1.248.875.779.235	1.234.806.086.792	(66.758.185.989)	1.168.047.900.803
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	16.880.404.515	(1.190.018.197)	15.690.386.318	8.817.233.763	(83.195.375)	8.734.038.388
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	14.798.697.676	(3.430.878.695)	11.367.818.981	14.788.440.270	(3.115.510.716)	11.672.929.552
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	105.333.767.646	(5.249.320.685)	100.084.446.961	103.905.414.761	(5.168.946.240)	98.736.468.521
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	116.166.184.657	(6.111.680.008)	110.054.504.649	146.902.957.776	(6.126.218.671)	140.776.739.105
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UHUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	35.911.136.545.120	(5.821.560.452.289)	30.089.576.092.831	35.350.410.359.224	(3.816.556.095.304)	31.533.854.263.920
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	24.595.834.418	(3.000.000)	24.592.834.418	23.244.640.159	(3.000.000)	23.241.640.159
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	63.071.925	-	63.071.925	63.071.925	0	63.071.925
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN	1.439.174.836	(120.264.375)	1.318.910.461	944.775.132	(85.903.125)	858.872.007
27	040	KEMENTERIAN PARAHMISATA	15.226.395.367	(840.089.751)	14.386.305.616	22.423.958.462	(856.756.608)	21.567.201.854
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.046.413.262	-	1.046.413.262	1.260.287.262	0	1.260.287.262
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	1.019.472.809.235	(53.255.002.897)	966.217.806.338	952.144.078.123	(46.515.557.958)	905.628.520.165

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19 E

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ASET
TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)		31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	
			BRUTO	PENYUSUTAN	BRUTO	PENYUSUTAN
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	3.069.152.266	-	2.599.575.930	(4.137.388)
31	047	KEMENTERIAN PERBERDAYAAN PERBURUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	315.310.076	(13.875.000)	310.310.194	(10.125.000)
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	864.607.100	-	3.111.007.523	0
33	050	BADAN INTELEJEN NEGARA	3.133.994.145	(39.750.000)	2.942.398.145	(39.750.000)
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	6.778.000.866	(143.498.901)	7.677.372.866	(281.244.276)
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	811.201.704	-	811.201.704	0
36	054	BADAN RUSAT STATISTIK	51.045.639.716	(38.727.714)	47.815.514.459	(9.460.000)
37	055	KEMENTERIAN PRUBAPENAS	5.379.109.730	-	5.146.207.030	0
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.478.019.156.338	(2.384.273.929)	1.330.272.790.778	(2.312.106.304)
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	194.244.882.925	(15.900.000)	162.468.924.990	(15.900.000)
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	48.196.091.736	(368.160.615)	42.290.193.159	(437.950.434)
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	66.043.685.608	(18.098.799.570)	138.370.540.740	(16.974.085.381)
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	18.972.377.860	(58.607.348)	18.367.157.511	(19.994.563)

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ASET
TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

LAMPIRAN 19.E

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)		31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	
			BRUTO	PENYUSUTAN	BRUTO	PENYUSUTAN
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	12.365.100.402	(36.400.000)	12.328.700.402	(36.400.000)
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	3.307.132.388	-	3.307.132.388	0
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.040.553.507	(3.000.000)	2.037.553.507	(3.000.000)
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	6.109.228.202	(66.608.214)	6.042.619.988	(64.027.200)
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	15.627.955.878	(60.483.100)	15.567.472.778	(60.483.100)
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	9.889.943.122	(129.192.970)	9.760.750.152	(29.800.000)
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	3.810.633.321	(457.712.040)	3.352.921.281	(352.306.255)
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	8.246.574.376	(615.062.339)	7.631.512.037	(582.003.214)
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	86.321.915.762	(33.603.053.855)	52.718.861.907	(10.270.649.714)
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	7.297.619.585	-	7.297.619.585	0
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	44.466.968.323	(391.613.526)	44.075.354.797	0
68	100	KOMISI YUDISIAL	1.901.048.257	-	1.901.048.257	0
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	13.345.213.780	-	13.345.213.780	0
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	10.637.399.936	(276.955.250)	10.360.444.686	(276.955.250)
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	3.305.748.483	0

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ASET
TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

LAMPIRAN 19 E

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)		31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		NETO
			BRUTO	PENYUSUTAN	BRUTO	PENYUSUTAN	
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	20.230.559.652	-	1.755.192.300	0	1.755.192.300
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	77.166.944.364	(64.050.000)	77.102.894.364	0	76.437.138.451
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	13.751.130.817	-	13.751.130.817	0	8.426.720.817
		JUMLAH PADA K/L	55.451.024.499.709	(7.665.412.014.697)	47.785.612.485.012	(5.233.439.279.028)	45.846.855.234.016
88	999	BENDAHARA UPMH NEGARA	87.194.673.901	(12.456.910.765)	74.737.763.136	(5.013.140.737)	79.983.975.963
		TOTAL	55.538.219.173.610	(7.677.868.925.462)	47.860.350.248.148	(5.238.452.419.765)	45.926.839.209.979

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.F

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan pada E/L dan Bun per 31
DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	18.925.965.28	17.328.422.60
4	005	MAHKAMAH AGUNG	195.373.014.19	239.137.575.78
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	15.699.534.95	17.864.222.30
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	5.325.208.050	12.376.892.81
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	182.496.252.65	152.309.976.43
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	415.204.726.27	89.431.455.06
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	6.991.717.524.94	18.532.210.503.62
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	722.754.577.35	288.538.742.79
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	278.968.308.40	206.417.421.60
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	14.198.879.90	22.236.085.17
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	51.976.363.65	63.090.939.72
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	667.023.445.88	532.270.673.79
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	42.859.398.535.21	32.109.534.219.72
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	764.495.228.51	701.356.750.77
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	3.148.494.656.00	3.379.500.085.89
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	1.840.176.765.98	1.235.865.769.63
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	57.859.210.13	22.775.291.34
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	623.272.587	623.272.587
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	35.479.636.01	41.570.765.71
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	339.926.330.71	329.571.709.86
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	59.955.196.610.51	52.596.156.693.72
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	1.861.761.752
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARTIWISATA	240.073.284.12	221.138.438.03
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	47.802.332.78	1.288.255.220
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	6.242.058.075.61	5.442.112.727.15
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	4.407.331.012	2.505.285.000
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIRUKRASI	5.369.662.030	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	247.504.586.41	4.241.599.437
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	23.786.153.66	1.265.812.700
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	16.179.258.36	28.726.057.33
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	742.732.400	7.013.851.417
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2.346.499.832.36	3.488.138.787.83
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	85.011.000.82	5.855.812.906
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	5.553.739.362	5.553.739.362
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KONSTRUKSI
DALAM PENERJAAN PADA K/L DAN BUN PER 31
DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER	31 DESEMBER
			2018	2017
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	11.585.610.00	80.224.344.45
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	11.181.884.17 0	24.495.714.21 9
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	5.761.235.555	3.190.102.000
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	44.085.900	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOPHISIKA	41.661.090.36	12.939.713.57
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	-	1.225.776.283
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	14.122.950.47	8.701.286.854
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	7.778.778.600	684.298.900
55	081	BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.223.689.500	845.053.000
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	583.053.947.69	391.004.559.63
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	-	4.384.589.900
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	45.122.863.97	3.837.380.508
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.596.788.000	2.596.788.000
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	28.583.355.35	12.468.732.20
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	3.712.566.399	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	5.584.600.500	7.265.552.500
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	18.547.973.00	202.790.179.13
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	834.285.000	2.770.819.290
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	1.065.989.528
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	5.304.624.372	5.304.624.372
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	19.009.056.30
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	2.534.331.148	2.352.784.000
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	648.273.500
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	27.005.000	1.401.456.713
73	107	BADAN SAR NASIONAL	200.985.906.54	680.670.000
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	99.438.855.20	51.250.225.23
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	11.482.425.21	11.754.922.70
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	437.978.646.60 2	426.717.114.66 9
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	3.907.353.514	1.439.032.500
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	463.125.675	17.418.636.87
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	157.235.901.67 5	93.881.368.04 5
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	847.029.736.24	704.879.141.91
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	12.131.378.14
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-
JUMLAH PADA K/L			130.374.085.651.85	121.909.229.164.08
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	211.040.616.87	50.099.177.21
		Penyesuaian (Eliminasi pada SPAN)	-	-
TOTAL			130.585.126.268.73	121.959.328.341.30

TAGIHAN TUNTUTAN
TP/TGR

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 20

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI Rugi
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)		31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-	108.400.474	(542.003)	107.858.471
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	216.000.000	(210.030.000)	5.970.000	-	-	-
3	004	BADAN PERIKSA KEUANGAN	3.196.262.033	(2.696.178.366)	500.083.667	2.908.215.990	(2.523.276.509)	384.939.481
4	005	MAHKAMAH AGUNG	13.770.947	(68.854)	13.702.093	49.115.563	(245.576)	48.869.985
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	93.888.627	(469.443)	93.419.184	99.858.627	(499.293)	99.359.334
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	-	-	-	-	-	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	18.750.000	(93.750)	18.656.250	-	-	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	-	-	-	1.022.251.411	(744.651.976)	277.599.435
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	825.035.872	(788.281.647)	36.754.225	992.767.597	(947.375.148)	45.392.449
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.097.460.531	(85.597.165)	1.011.863.366	901.155.492	(16.168.275)	884.987.217
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	12.051.328.428	(11.772.909.904)	278.418.524	11.935.622.280	(11.532.349.151)	403.273.129
12	016	KEMENTERIAN PERTANIAN	9.199.782.866	(132.861.669)	9.066.921.191	927.024.746	(77.866.372)	849.158.374
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	-	-
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	750.000	(3.750)	746.250
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	9.894.416.883	(498.436.997)	9.395.979.886	9.289.750.741	(306.686.998)	8.983.063.743
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	88.902.167	(444.511)	88.457.656	9.300.000	(46.500)	9.253.500
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	8.843.156.898	(1.672.952.782)	7.170.204.116	8.906.350.598	(1.616.556.125)	7.289.794.473
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	800.585.529	(5.075.000)	795.510.529	792.492.741	(119.163)	792.373.578
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	-	-	-	29.000.000	(145.000)	28.855.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI Rugi
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

LAMPIRAN 20

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	-	-	-	-	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.686.969.463	(1.271.842.162)	1.415.127.301	2.730.658.857	(1.272.060.609)	1.458.598.248
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	71.515.619	(215.130)	71.300.489	258.335.449	(1.201.934)	257.133.515
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UHUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	431.664.134	(236.413.983)	195.250.151	395.413.327	(287.925.030)	107.488.297
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PERANGKUAN MANUSA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIPISATYA	168.064.805	(168.064.805)	-	168.064.805	(168.064.805)	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	33.964.410	(169.822)	33.794.588	33.964.410	(169.822)	33.794.588
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	7.659.162.099	(5.389.399.515)	2.269.762.584	5.939.574.151	(5.380.169.465)	559.404.686
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	-	-	-	-	-	-
31	047	KEMENTERIAN PERBERKAYAAAN PERBURHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	784.230.781	(784.230.781)	-	817.073.466	(817.073.466)	-
33	050	BADAN INTELEJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	280.954.219	(23.539.911)	257.414.308	77.732.912	(5.475.316)	72.257.596
37	055	KEMENTERIAN PRIVAIRENAS	-	-	-	-	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRIARA DAN TATA RILANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.818.354.115	(2.008.102.701)	810.251.414	2.893.259.407	(2.008.394.105)	884.865.302

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI Rugi
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

LAMPIRAN 20

No.	BA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
		BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
39	057	101.589.211	(507.945)	101.081.266	91.984.349	(459.921)	91.524.428
40	059	-	-	-	-	-	-
41	060	10.580.559.280	(1.338.850.567)	9.241.708.713	8.101.385.125	(1.335.510.920)	6.775.874.205
42	063	10.113.380	(50.567)	10.062.813	14.953.364	(74.767)	14.878.597
43	064	-	-	-	-	-	-
44	065	-	-	-	-	-	-
45	066	756.943.846	(755.401.590)	1.542.256	747.851.422	(740.827.049)	7.024.373
46	067	19.541.286	-	19.541.286	-	-	-
47	068	58.626.778	(790.655)	57.836.123	118.837.638	(791.005)	118.046.633
48	074	189.863.006	(189.863.000)	-	212.680.410	(1.063.402)	211.617.008
49	075	5.238.000	(26.190)	5.211.810	108.356.464	(541.782)	107.814.682
50	076	5.770.862.410	(117.604.056)	5.653.258.354	3.015.240.306	(147.605.981)	2.867.634.325
51	077	-	-	-	25.476.000	(2547.600)	22.928.400
52	078	-	-	-	-	-	-
53	079	9.782.496.467	(9.782.496.467)	-	62.463.254.102	(62.463.254.102)	-
54	080	22.905.685.655	(19.967.042.473)	2.938.643.182	23.542.910.041	(20.650.812.959)	2.892.097.082
55	081	103.708.888	(29.251.294)	74.457.594	65.957.508.409	(65.957.508.409)	-
56	082	8.360.332.688	(5.777.466.579)	2.582.866.109	2.026.247.201	(2.026.247.201)	-
57	083	10.710.968.626	(10.700.119.146)	10.849.480	10.600.324.210	(10.585.391.250)	14.932.960

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 20

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)		31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	
			BRUTO	PENYISIHAN	BRUTO	PENYISIHAN
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	14.360.000	(71.800)	71.360.000	(356.800)
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	155.172.436	(775.862)	222.413.805	(1.112.069)
61	087	ASBP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-
62	088	BADAN KEGAWAHAN NEGARA	-	-	3.499.500	(17.488)
63	089	BADAN PENGAWAS KEJANGGAN DAN PEMBANGUNAN	28.816.238.986	(28.552.394.836)	30.241.842.834	(29.922.736.384)
64	090	KEMENTERIAN PEDAGANGAN	2.267.093.320	(331.351.320)	2.249.977.644	(331.265.754)
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-
66	093	KOMISI PERBERANTASAN KORUPSI	152.132.669	(760.663)	254.654.453	(1.273.272)
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENGGALANGAN BERCAKRA	-	-	2.750.000	(13.750)
70	104	BADAN NASIONAL RESEPTAS DAN REKONSILIASI TENAGA KERJA INDONESIA	527.808.275	(169.984.725)	357.873.550	(1.465.100)
71	105	BADAN PENGGALANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	-	-	-	-
74	108	KOMISI PENGAWASAN PERUSAHAAN USAHA	70.990.922	(1.340.922)	69.650.000	(2.081.830)
75	109	BADAN PENGAWAS WILAYAH SUBABAYA MADURA	-	-	-	-
76	110	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 20

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI Rugi
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

No.	BA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
		BRUTO	PEYISIHAN	NETO	BRUTO	PEYISIHAN	NETO	
	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA							
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAH	-	-	-	-	-	
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	
81	115	BADAN PENGAWAS PERILU	-	-	-	-	-	
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	101.182.608	(505.913)	100.676.695	(584.238)	116.263.376	
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	363.569.394	(1.304.097)	362.265.297	(123.125.000)	(49.375)	
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEHARITIHAN	-	-	-	-	-	
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	110.096.000	(530.480)	109.545.520	-	-	
		Jumlah pada K/L	163.209.394.539	(105.463.890.057)	57.745.504.482	261.894.714.759	(221.870.658.811)	40.024.055.948
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	163.209.394.539	(105.463.890.057)	57.745.504.482	261.894.714.759	(221.870.658.811)	40.024.055.948

(dalam Rupiah)

ASET TAK BERWUJUD

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)
**PEMERINTAH REPUBLIK
 INDONESIA ASSET TAK BERWUJUD
 PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER
 2017**

LAMPIRAN 21

No.	BA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)				31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
		ASSET TAK BERWUJUD	ASSET TAK BERWUJUD DALAM PENGEMBAIAN	AMORTISASI	NETTO	ASSET TAK BERWUJUD	ASSET TAK BERWUJUD DALAM PENGEMBAIAN	AMORTISASI	NETTO
1	001	PARALIS PERHUSAN/PERAKYAN RAKYAT	1.887.621.026	-	(1.570.558.520)	317.062.506	2.048.944.54	(1.260.756.045)	788.188.495
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	47.315.876.247	-	(22.343.508.839)	25.072.367.408	41.851.828.145	(20.248.695.119)	21.603.133.026
3	004	BIDAN PERSEKUTUAAN KEJURANGAN	176.965.580.064	-	(113.780.416.500)	63.185.163.564	1.86.848.003.424	(92.295.689.043)	93.552.314.381
4	005	PERAKYAN AGUNG	35.119.419.817	-	(20.230.407.433)	4.889.011.384	31.599.658.319	(27.460.451.378)	4.049.493.941
5	006	KEPAJAKAN AGUNG	615.696.541.777	-	(213.679.502.598)	402.017.039.181	279.643.543.244	(86.517.450.021)	193.131.093.223
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	55.941.988.423	-	(29.025.309.652)	26.916.678.771	35.096.656.423	(21.646.238.431)	13.450.417.992
7	010	KEPERUSAHAAN DAERAH NEGARA	803.544.862.448	-	(762.999.235.664)	40.545.626.784	787.967.553.266	(710.627.656.589)	77.339.896.677
8	011	KEPERUSAHAAN DAERAH NEGARA	92.736.286.729	-	(59.712.891.675)	33.023.395.054	65.980.270.994	(49.270.934.421)	16.709.336.573
9	012	KEPERUSAHAAN PERTAHANAN	3.298.265.237.160	-	(1.146.630.409.887)	2.151.634.827.273	3.276.440.800.850	(931.005.279.662)	2.345.395.521.188
10	013	KEPERUSAHAAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	526.019.128.157	-	(354.852.166.897)	171.166.961.260	486.690.695.488	(328.424.502.247)	158.266.193.241
11	015	KEPERUSAHAAN KEJURANGAN	1.370.630.220.833	-	(1.065.012.343.458)	305.617.877.375	1.207.236.914.878	(952.878.516.287)	249.358.398.591
12	018	KEPERUSAHAAN PERTANIAN	92.020.243.837	-	(22.006.213.246)	70.014.030.591	91.781.286.244	(29.988.481.781)	61.792.804.463
13	019	KEPERUSAHAAN PERKOTAAN	27.358.799.081	-	(22.442.235.315)	4.916.563.766	24.225.997.406	(11.922.226.131)	12.303.771.275
14	020	KEPERUSAHAAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	249.839.202.115	-	(172.012.024.968)	77.827.177.147	234.486.989.226	(150.262.467.998)	84.224.521.228
15	022	KEPERUSAHAAN PERHUBUNGAN	2.488.094.406.160	44.504.716.108	(412.839.551.474)	2.119.759.571.794	2.226.511.102.216	(27.384.526.240)	2.199.126.575.556
16	023	KEPERUSAHAAN PERINDUSTRIAN DAN KEROBYAAN	272.541.419.740	-	(135.847.321.339)	136.694.098.401	280.089.270.653	(130.993.724.869)	149.095.545.784
17	024	KEPERUSAHAAN KESEHATAN	271.946.991.563	-	(180.961.896.669)	90.985.094.894	230.678.798.039	(153.600.611.475)	77.078.186.564
18	025	KEPERUSAHAAN AKADIA	161.835.481.198	-	(101.280.914.257)	60.554.566.941	140.303.459.538	(92.128.112.341)	48.175.347.197
19	026	KEPERUSAHAAN KEBUDAKARYAAN	51.411.962.668	-	(32.738.104.837)	18.673.858.831	46.682.881.104	(25.882.243.244)	20.800.637.857
20	029	KEPERUSAHAAN SOSIAL	94.613.896.087	-	(72.837.403.209)	21.776.492.878	64.518.479.682	(62.738.285.243)	1.780.194.439
21	029	KEPERUSAHAAN LINGKUNGAN HUKUM DAN KEHUTAN	113.349.621.351	-	(58.461.720.311)	54.887.901.040	138.681.706.797	(55.131.951.667)	83.549.755.130
22	032	KEPERUSAHAAN KELOMPOK DAN PERKAWAN	216.434.890.995	-	(97.851.052.999)	118.583.837.997	227.867.709.404	(87.311.149.022)	140.556.560.372
23	033	KEPERUSAHAAN PERUSAHAAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN RAKYAT	7.484.744.054.096	31.448.695.075	(102.086.956.816)	7.416.104.392.355	7.109.439.406.318	(18.272.265.508)	7.091.167.130.810

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA ASSET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER
2017**

LAMPIRAN 21

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)				31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
			ASSET TAK BERWUJUD	ASSET TAK BERWUJUD DALAM PENGEMBALAN	AMORTISASI	NETTO	ASSET TAK BERWUJUD BERWUJUD DALAM PENGEMBALAN	AMORTISASI	NETTO	
24	034	KOORDINATOR BIDANG POLICE, MARINE DAN KEVAKUAN	13.430.021.425	-	(11.331.679.989)	2.098.941.436	12.971.832.925	-	(10.509.786.354)	2.464.046.571
25	035	KOORDINATOR BIDANG PERKONOMIAN	14.471.017.969	-	(6.516.854.292)	7.956.163.677	11.050.106.455	-	(3.726.105.444)	7.324.001.011
26	036	KOORDINATOR BIDANG PENGANGKUTAN PERUSAHAAN DAN KERUMAHAN	1.267.026.500	-	(674.038.428)	592.988.072	824.826.500	-	(573.706.813)	251.119.687
27	040	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN	43.741.820.828	-	(14.411.746.192)	29.330.074.636	40.509.220.005	-	(8.107.497.814)	31.401.772.091
28	041	KEMENTERIAN BUDAYASARA MILIK NEGARA	23.013.447.590	-	(6.821.802.786)	16.191.644.804	20.665.430.090	-	(18.187.193.659)	2.478.446.821
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	685.639.922.233	10.000.000	(297.742.550.306)	388.597.381.927	659.214.561.988	-	(272.364.973.760)	386.849.588.208
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	34.332.242.833	-	(35.572.294.821)	(1.240.051.988)	33.602.470.392	-	(32.610.613.123)	991.857.269
31	047	KEMENTERIAN BERKEMUKAMATAN PESERAPAN DAN PERUNDANGAN	17.450.041.700	-	(11.906.626.928)	5.543.414.772	17.450.041.700	-	(81.203.513.137)	9.329.528.563
32	048	KEMENTERIAN PENGANGKUTAN AIRPORTOR NEGARA DAN BEROMBAH BANGKAS	3.212.718.420	-	(2.204.079.688)	908.638.732	2.204.202.42	-	(1.801.383.655)	903.876.764
33	050	BADAN INTELEN NEGARA	1.625.879.247.072	-	(748.798.612.096)	877.080.634.976	2.395.915.619.396	-	(666.254.090.724)	1.729.061.528.672
34	051	LEMBAGA SAKIT NEGARA	524.522.811.827	-	(327.281.890.454)	197.040.921.373	519.579.003.827	-	(290.434.052.705)	229.144.941.122
35	052	DEPARTEMEN NEGARA	118.329.609.412	-	(60.631.532.110)	57.698.077.302	123.921.109.678	-	(34.387.154.066)	91.549.956.612
36	054	BADAN POST STATISTIK	660.902.639.698	-	(444.468.810.285)	216.433.829.413	610.582.099.020	-	(398.420.613.714)	212.131.485.306
37	055	KEMENTERIAN PERKAWASAN	49.585.544.864	-	(35.207.224.354)	13.899.920.510	44.416.060.823	-	(38.225.519.590)	16.440.481.233
38	056	KEMENTERIAN AGRI DAN PERUMAHAN PERUMAHAN	199.607.672.289	-	(143.317.223.660)	56.290.448.629	188.499.708.641	-	(136.544.388.923)	51.755.319.720
39	057	PERUSAHAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	133.091.602.713	-	(35.222.740.249)	97.868.862.464	120.320.467.020	-	(17.789.615.621)	88.530.851.439
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	362.881.672.383	-	(276.965.041.384)	86.085.025.998	348.211.657.608	-	(253.534.169.245)	94.897.688.363

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**PERINTAH REPUBLIK
INDONESIA ASSET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER
2017**

LAMPIRAN 21

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			NETTO	
			ASSET TAK BERWUJUD	ASSET TAK BERWUJUD DALAM PENGERSAAN	AMORTISASI	NETTO	ASSET TAK BERWUJUD	ASSET TAK BERWUJUD DALAM PENGERSAAN		AMORTISASI
41	060	KEPUSATAN NEGARA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	1.260.389.635.058	-	(1.118.262.922.344)	2.142.126.712.714	2.566.058.570.086	-	1616.095.070.229	1.949.968.449.687
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKHMUDAN	97.890.198.613	-	(38.480.862.517)	59.409.336.102	67.612.831.238	8.216.000	(30.274.586.731)	97.366.489.448
43	064	LEMBAGA KEKAWAHLAN NASIONAL	210.664.394.405	-	(1.897.805.885.167)	20.868.489.239	202.982.448.232	-	(1.765.043.862.461)	26.939.086.271
44	065	BADAN KOORDINASI PENYAYAKAN HOPEL	80.164.757.133	-	(58.476.187.211)	21.688.570.924	72.133.448.422	-	(55.444.939.910)	16.888.409.517
45	066	BADAN NAKONIKAS NASIONAL	130.801.107.702	-	(89.207.571.292)	61.593.536.668	134.423.489.480	6.201.181.072	(7.189.815.701)	61.344.845.831
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TINGGAL DAN TRANSGRAG	7.854.215.654	-	(4.167.482.042)	3.686.733.61	7.775.495.65	4	(3.350.454.065)	4.426.041.889
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	37.160.207.101	-	(11.840.084.367)	5.320.222.73	35.664.443.701	-	(26.404.030.957)	9.260.412.744
48	074	KORPRI NASIONAL HAR AKASRI MANUDA	658.885.000	-	(2.722.070.051)	(2.063.185.051)	2.807.924.58	-	(2.517.250.527)	290.174.062
49	075	BADAN METEOROLOG KUPHATOLOGI DAN GEOSFIKA	449.638.379.655	-	(299.190.246.112)	56.468.133.544	435.079.224.618	-	(122.305.865.181)	112.773.469.487
50	076	KORPRI PERHIMPUNAN	11.162.254.056	-	(6.312.261.820)	4.850.492.42	5.281.486.45	-	(3.941.423.632)	1.340.062.804
51	077	PELAKSANA KONTRUBSI	27.256.404.411	-	(12.509.075.514)	14.747.328.897	15.188.586.616	-	(10.314.413.285)	4.874.173.331
52	078	PIKAT PELAJARAN DAN AKUISIS TRANSKRIP KEUANGAN	23.811.857.288	-	(1.879.050.868)	5.022.806.87	23.693.936.834	-	(15.605.032.976)	8.088.903.686
53	079	LEMBAGA UHU PENGETAHUAN INDONESIA	126.791.506.448	-	(26.578.765.283)	100.212.741.165	68.725.714.782	-	(23.582.921.031)	45.142.783.751
54	080	BADAN TENAGA MANUR NASIONAL	38.345.597.682	-	(24.382.405.882)	13.963.191.780	29.201.699.264	-	(21.215.361.924)	8.488.338.340
55	081	BADAN PENYAKILAN DAN PENYERAPAN KEMUDOT	168.928.715.994	-	(85.581.486.295)	13.377.129.099	101.123.070.117	-	(90.335.040.760)	10.838.029.527
56	082	LEMBAGA REKREASIAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	374.445.802.861	-	(67.637.845.809)	291.336.107.052	288.449.451.263	-	(62.158.641.367)	226.390.187.396
57	083	BADAN INFOSTATIS GEOSPASIAL	2.642.271.136.054	-	(1.537.886.501.137)	1.111.256.046.718	2.334.586.515.246	-	(1.235.507.054.414)	1.100.427.130.276
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	9.160.797.152	-	(8.091.256.668)	1.069.070.28	9.964.060.40	-	(6.120.315.114)	3.843.745.286
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA MANUR	10.668.927.529	-	(4.343.873.451)	6.325.062.17	5.914.201.50	-	(2.688.021.015)	3.238.278.486
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	3.891.837.900	-	(2.804.113.588)	1.087.725.33	2.907.022.40	-	(1.801.276.400)	303.244.000
61	087	KORPRI NASIONAL KEMUDOT INDONESIA	11.520.424.655	-	(9.037.490.862)	2.462.933.67	11.644.793.155	-	(8.600.850.258)	2.563.597.897
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	178.604.173.959	-	(168.328.442.781)	10.275.731.223	171.319.688.743	-	(164.208.110.799)	7.111.577.974

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PENERIMAAN REPUBLIK
INDONESIA ASSET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER
2017

LAMPIRAN 21

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)				
			ASSET TAK BERWUJUD	ASSET TAK BERWUJUD DALAM PENGEMALAN	AMORTISASI	NETTO	ASSET TAK BERWUJUD	ASSET TAK BERWUJUD DALAM PENGEMALAN	AMORTISASI	NETTO
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PERANGKATAN	47.405.179.997	701.261.200	14.729.184.137	23.177.058.860	28.890.230.947	91.848.750	11.787.018.118	11.100.001.579
64	090	KEPENTIMAN PERDAGANGAN	103.885.747.514	-	89.625.170.759	14.260.576.755	115.035.800.201	-	91.057.566.629	21.978.157.572
65	092	KEPENTIMAN PERUDA DAN OLAH RAGA	935.513.694.884	-	112.160.481.365	923.353.213.519	18.380.270.511	662.762.984.362	19.311.727.021	671.821.527.891
66	093	KOPERASI PERBESAN/PASUKAN KOPERASI	68.486.817.884	725.055.000	141.814.230.997	28.377.621.467	59.262.265.326	-	84.917.271.045	24.344.494.281
67	095	LEWAT HAWAHLAN DAN/ATAU	4.813.495.152	-	16.618.468.543	11.804.971.391	4.601.574.15	-	16.061.556.085	13.481.981.890
68	100	KOMISI YUDISIAL	3.017.355.940	-	2.086.234.928	931.121.012	2.304.693.47	-	11.792.254.082	512.438.490
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	190.119.648.115	-	85.535.374.621	124.583.273.492	168.552.974.840	-	88.539.342.467	130.013.629.373
70	104	BADAN NASIONAL PENYIMPANAN DAN PERINDUSTRIAN TENGAH	14.409.131.228	-	112.144.886.323	2.324.244.91	13.433.259.88	-	11.081.213.621	4.351.458.904
71	105	BADAN NASIONAL PENYIMPANAN DAN PERINDUSTRIAN TENGAH	-	-	-	-	549.989.749	-	415.697.897	74.291.890
72	106	LEMBAGA KESEKUTUAN PENYALAMAN BAKAN/CIKESIA PERHANTAI	29.107.788.566	1.714.492.815	119.486.375.241	11.355.886.138	26.292.596.173	1.524.809.31	11.813.785.010	9.652.619.838
73	107	BADAN SAR NASIONAL	294.838.520.335	-	197.201.349.826	107.633.170.509	157.063.888.335	-	189.605.396.465	87.486.471.890
74	108	KOPERASI PENANGANAN PERAWATAN USAHA	882.792.863	-	612.519.108	269.773.755	853.777.863	-	161.551.548	238.220.315
75	109	BADAN PENANGGULANGAN WILAYAH SURABAYA RAHUBA	85.905.871.271	2.160.000	12.061.892.478	81.645.138.793	81.622.017.421	157.293.440	120.35.890.285	81.749.420.633
76	110	ORGANISASI REPUBLIK INDONESIA	764.229.234	-	863.562.449	100.666.783	669.729.234	-	153.294.410	152.494.814
77	111	BADAN NASIONAL PENELITIAN PERDATAAN	204.846.316.215	-	9.166.239.619	195.880.076.596	185.113.851.94	-	17.805.174.514	177.308.677.680
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAK	193.842.470.450	3.302.885.193	119.487.045.291	177.658.310.352	66.148.324.196	3.302.885.19	117.457.399.673	51.993.809.716
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERRORISME	222.294.756.728	-	120.885.239.074	211.409.427.654	222.294.756.728	-	17.208.755.226	228.080.401.402
80	114	BERKETAHAPAN KABINET	3.457.298.192	-	18.229.847.146	14.772.548.954	7.838.307.27	-	180.76.312.594	128.024.310

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**PENYERTAAN REPUBLIK
INDONESIA ASSET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER
2017**

LAMPIRAN 21

(dalam Rupiah)

No.	BA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)				31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
		ASSET TAK BERWUJUD	ASSET TAK BERWUJUD DALAM PENGALIAN	AMORTISASI	NETTO	ASSET TAK BERWUJUD	ASSET TAK BERWUJUD DALAM PENGALIAN	AMORTISASI	NETTO
81	115	BIDAN PENGAWAS PERILU	11.294.156.637	-	(12.280.223.010)	1.986.166.378	10.053.076.337	(10.901.105.496)	(848.029.159)
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	5.771.910.518	-	(4.214.226.615)	1.447.683.903	4.826.516.51	(2.978.097.616)	1.848.418.903
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	3.683.270.418	-	(1.200.145.143)	2.383.125.275	2.721.976.91	(887.216.458)	1.495.909.818
84	118	BIDAN PENGUSAHAAN KAWASAN PEDAGANGAN TERBUK DAN RELABAHAN BEBAS SABANG	310.609.000	-	-	310.609.000	260.850.000	0	260.850.000
85	119	BIDAN KEPEMERINTAHAN	68.295.955.208	-	(59.931.646.610)	8.362.308.598	65.021.318.908	(48.928.451.337)	16.092.867.571
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEHARITMAMAN	3.940.368.502	-	(1.213.292.439)	2.727.076.063	1.232.575.00	(422.276.500)	804.798.500
87	121	BIDAN EKONOMI KREATIF	7.993.138.520	-	(200.716.259)	7.792.422.261	6.688.347.50	(66.466.250)	6.501.881.260
88	999	BIDAN PANGKALAN	33.349.308.377.399	278.309.200.983	(123.138.900.906.437)	23.488.690.667.245	30.238.807.203.449	887.449.523.013	21.191.304.474.085
89	999	BIDAN PERUSAHAAN NEGARA	148.907.231.481	-	(70.195.621.600)	78.711.609.881	146.714.241.367	(57.616.621.004)	89.097.620.363
TOTAL			33.498.215.608.890	278.309.200.983	(123.209.146.674.037)	23.567.878.297.426	30.404.641.600.816	887.449.523.013	21.220.462.095.548

ASET EKS BPPN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET PROPERTI EKS BPPN
31 DESEMBER 2018

No.	KOREKSI	Saldo Per 31 Desember 2017		Mutasi Semester I 2018		Saldo Per 30 Juni 2018		Mutasi Semester II 2018		Saldo Per 31 Desember 2018 (Audited)	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BJDA (Verifikasi 2011)	915	363.788.450.347,00			915	363.788.450.347,00			915	794.072.652.297,00
2	Temuan BPK	370	767.275.549.869,15			370	767.275.549.869,15	(1)	15.520.250.000,00	369	782.795.799.869,15
3	BJDA (verifikasi 2009)	63	281.187.736.000,00			63	281.187.736.000,00			63	281.187.736.000,00
4	Settlement	-	-			-	-			-	-
5	Apurtemen Menara 7 Gading	-	-			-	-			-	-
5	Sinar Bonana	42	139.208.400.000,00			42	139.208.400.000,00			42	139.208.400.000,00
6	Griya Potensa	2	295.000.000,00			2	295.000.000,00			2	295.000.000,00
7	Covernote	96	157.799.804.037,00			96	157.799.804.037,00			96	340.566.527.037,00
		1.488	1.709.554.940.253			1.488	1.709.554.940.253,15			1.487	2.338.126.115.203,15

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.B

**PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA ASET INVENTARIS EKS
BPPN PER 31 DESEMBER 2018**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)		Mutasi TA 2018		Saldo 31 Desember 2018 (Audited)		Keterangan
		Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	
1	Aset Inventaris	32.408	11.009.466.267,35	13.755	2.504.758.110	18.653	8.504.708.157,35	
	a. Digunakan Instansi	11.274	6.400.600.338,35			11.274	6.400.600.338,35	
	b. Tidak Digunakan (idle)	21.134	4.608.865.929,00	13.755	2.504.758.110	7.379	2.104.107.819,00	

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASSET REKENING NOSTRO EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2018

No	Ekst. Bank Asal	Bank Penerimaan		Monetasi (Rp)	Nilai per 31 Desember 2018
Materai Nostro Bercaja dalam Neraca					
1	Bank Dana Ruler	Bank Garuda	Bank dalam negeri	Rp 5.841.708.415,00	- Rp
2	BNKA	ClearStream Banking SA sebesar USD258.438,5	Bank luar negeri	Rp 3.501.324.798,0	Rp 3.742.447.919,5
3	Bank Mandiri	Clearstream Banking Branch sebesar USD330.526,5	Bank luar negeri bercaja dalam negeri	Rp 4.748.829.490,0	Rp 4.748.829.490,0
TOTAL				Rp 14.092.036.712,0	Rp 9.594.244.333,5
Materai Nostro Bercaja di Luar Neraca					
1	Bank Central Dagang BSKU	Bank CIC, Jakarta	Bank dalam negeri	Rp 2.044.748,00	Rp
3	BUN	BNI Gud Mula		Rp 83.311.326,3	Rp 83.311.326,3
4	BUN	Citibank		Rp 8.776.918.074,4	Rp 8.776.918.074,4
5	BDNI	Bank Te Sejahtera Makmur, Jkt		Rp 97.886.237,9	Rp 97.886.237,9
6	BDNI	Bank Garuda, Jkt		Rp 708.428.110,4	Rp 708.428.110,4
7	Bank Dana Ruler	Bank Garuda, Jkt		Rp 198.058.719,4	Rp 198.058.719,4
8	Bank Khazanah BSKU	Bank Agip		Rp 287.767,4	Rp 287.767,4
9	Bank Unbank BSKU	Bank Achia (ditem. Kurasa)	tidak diketahui	Rp 8.001.373,8	Rp 8.001.373,8
10	Bank Alam BSKU	Bank Central Dagang		Rp 825.089,8	Rp 825.089,8
11	SANHO	Bank Central Dagang		Rp 2.994.999,1	Rp 2.994.999,1
14	HCKINDO	Bank Modern		Rp 8.207.877,9	Rp 8.207.877,9
15	SURYA	Bank Usum, Magelang		Rp 122.086.337,0	Rp 122.086.337,0
16	SANHO	Bank UOHG Savisa		Rp 4.887.597,0	Rp 4.887.597,0
17	BDNI	BDNI Finance, Hongkong		Rp 1.020.080.447,8	Rp 1.020.080.447,8
18	HCKINDO	Bank Palita		Rp 6.017.122,8	Rp 6.017.122,8
19	ANVA PANDUARTA	Bank Sabad		Rp 11.739.033,9	Rp 11.739.033,9
20	Bank Khazanah BSKU	Indover Bank	Bank Indover	Rp 141.402.436,4	Rp 141.402.436,4
21	Bank Khazanah Internasional	Indover Bank		Rp 301.433.693,8	Rp 301.433.693,8
22	BUS	Indover Bank		Rp 2.884.035,0	Rp 2.884.035,0
23	Bank Sahid Gajah Perkasa BSKU	Indover Bank		Rp 288.237.424,5	Rp 288.237.424,5
24	BUN	Indover Bank		Rp 108.852.042,8	Rp 108.852.042,8
25	BUN	Indover Bank		Rp 925.492.300,9	Rp 925.492.300,9
26	BUN	Indover Bank		Rp 531.317.598,9	Rp 531.317.598,9
27	Bank BIMA BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 24.530.231,6	Rp 24.530.231,6
28	Bank Modern BSO	Indover Bank, Amsterdam		Rp 32.416.251,3	Rp 32.416.251,3
29	Bank Asia Pacific BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 16.993.382,2	Rp 16.993.382,2
30	Bank Unbank BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 40.288.112,2	Rp 40.288.112,2
31	Bank Unbank BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 24.849.497,6	Rp 24.849.497,6
32	Bank Mashil Utama BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 354.542.691,0	Rp 354.542.691,0
33	Bank Central Dagang BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 90.960.251,9	Rp 90.960.251,9
34	Bank Fisinvest BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 77.524.756,2	Rp 77.524.756,2
35	OSAKMALA	Indover Bank, Amsterdam		Rp 1.139.287,4	Rp 1.139.287,4
36	BDNI	Indover Bank, Amsterdam		Rp 11.864.939,4	Rp 11.864.939,4
37	BAHARI	Indover Bank, Amsterdam		Rp 108.150.696,6	Rp 108.150.696,6
38	PERSONA	Indover Bank, Amsterdam		Rp 120.045.719,9	Rp 120.045.719,9
39	Mashil Utama	Indover Bank, Amsterdam		Rp 241.740.942,4	Rp 241.740.942,4
40	Bank Modern BSO	Indover Bank, Hamburg		Rp 195.403.134,6	Rp 195.403.134,6
41	Bank Asia Pacific BSKU	Indover Bank, Hamburg		Rp 958.004.496,4	Rp 958.004.496,4
42	Bank Unbank BSKU	Indover Bank, Hamburg		Rp 2.096.775,6	Rp 2.096.775,6
43	BAHARI	Indover Bank, Hamburg		Rp 254.274.894,5	Rp 254.274.894,5
44	PERSONA	Indover Bank, Hamburg		Rp 27.308.123,3	Rp 27.308.123,3
45	BDNI	Indover, Inc Bank		Rp 122.424.186,8	Rp 122.424.186,8
46	BDNI	Bank Indonesia	Bank Indonesia	Rp 406.733.525.331,3	Rp 406.733.525.331,3
47	BDNI	Melaysia Nostro (Unidentified)	tidak diketahui	Rp 2.359.921.187,7	Rp 2.359.921.187,7
48	BDNI	Kapal Bank, Singapore	Bank luar negeri	Rp 2.257.377.867,8	Rp 2.257.377.867,8
49	BDNI	Indovina Bank (Khusus, Dwidan)		Rp 1.758.722.855,3	Rp 1.758.722.855,3
50	BDNI	American Express Bank, NY		Rp 1.834.239.834,6	Rp 1.834.239.834,6
51	BDNI	ANZ Banking Group Bank		Rp 686.429.511,7	Rp 686.429.511,7
52	PERSONA	Banca Comersiale		Rp 61.815.826,6	Rp 61.815.826,6
53	OSAKMALA	Banco Ambrosiano (BAVE)		Rp 44.241.248,9	Rp 44.241.248,9
54	BDNI	Bank Boston, NA Singapore		Rp 2.270.531,9	Rp 2.270.531,9
55	SURYA	Bank Brussels Lambert		Rp 378.699.546,3	Rp 378.699.546,3
56	SURYA	Bank Credit Issue		Rp 234.342.412,1	Rp 234.342.412,1
57	Bank Yama BSKU	Bank Mashil		Rp 58.834.913,9	Rp 58.834.913,9
58	ANVA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Hongkong		Rp 85.028.723,5	Rp 85.028.723,5
59	ANVA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Kuala Lumpur		Rp 41.786.487,4	Rp 41.786.487,4
60	ANVA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, New York		Rp 6.616.463.903,9	Rp 6.616.463.903,9
61	ANVA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Singapore		Rp 266.632.029,0	Rp 266.632.029,0
62	ANVA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Tokyo		Rp 339.890.834,3	Rp 339.890.834,3
63	ANVA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Toronto		Rp 357.108.918,2	Rp 357.108.918,2
64	HCKINDO	Bank Pacific		Rp 6.463.800,4	Rp 6.463.800,4
65	BDNI	Barque Woma, Singapore		Rp 208.798.448,2	Rp 208.798.448,2
66	BDNI	Barque Woma, Singapore		Rp 327.222.386,8	Rp 327.222.386,8
67	BDNI	BBMB, Kuala Lumpur		Rp 1.678.910,5	Rp 1.678.910,5
68	BDNI	BCCI London		Rp 1.312.775.083,3	Rp 1.312.775.083,3
69	BDNI	BNP Singapore		Rp 490.837.088,1	Rp 490.837.088,1
70	BDNI	Chase Manhattan Bank, Singapore		Rp 4.122.298,5	Rp 4.122.298,5
71	BDNI	Chemical Bank		Rp 909.494.198,2	Rp 909.494.198,2
72	BDNI	National Australia Bank		Rp 980.037.418,4	Rp 980.037.418,4
73	BDNI	National Australia Bank (Dnalk)		Rp 103.808.247,0	Rp 103.808.247,0
74	BDNI	National Westminster		Rp 1.708.457.313,3	Rp 1.708.457.313,3
75	Bank Fisinvest BSKU	National Westminster Bank, London		Rp 1.332.284.084,6	Rp 1.332.284.084,6
76	BDNI	Security Pacific Natl Bank, Singapore		Rp 25.528.725,8	Rp 25.528.725,8
77	Bank Modern BSO	Standard Chartered Bank, New York		Rp 72.226.080,5	Rp 72.226.080,5
78	Bank Modern BSO	Standard Chartered Bank, Sydney		Rp 598.327.488,6	Rp 598.327.488,6
79	Bank Modern BSO	Standard Chartered Bank, Tokyo		Rp 458.068.074,8	Rp 458.068.074,8
80	BDNI	Sumitomo Bank Ltd, Tokyo		Rp 1.550.878.033,2	Rp 1.550.878.033,2

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET REKENING NOSTRO EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2018

Table with columns: No, Eks, Bank Asal, Bank Penyimpan, Status Bank Penyimpan, Nilai per 31 Desember 2017, Mutasi (Rp), Nilai per 31 Desember 2018. Rows include SUN, SDNI, Bank Modern BBO, and various international banks like Swiss Bank Corporation, UBOC, UMIC, etc.

* Pengkonversian nilai rekening BIRA di ClearStream Banking SA dan rekening Bank Bahari di Credit Bank merupakan kurs tengah Bank Indonesia

Table showing conversion rates for BIRA and Bank Bahari accounts as of 31 December 2017 and 31 December 2018.

** Mutasi nilai rekening eks. BIRA di Clearstream merupakan

Table showing account details for BIRA at Clearstream, including account name, currency, and balance as of 31 December 2018.

Perjelasan

Penelusuran dan Konfirmasi Dana Nostro

- 1. Telah dilaksanakan rapat dengan PPATK pada tanggal 18 Juni 2015
2. DUKN melalui surat Nomor S-1378/KN.5/2014 s.d. S-1381/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta informasi kepada Bank Indonesia dan 5 Bank Dalam Negeri dimaksud, terkait keberadaan rekening nosto eks. BBO/BBKU di bank-bank tersebut. PT Bank Mulia mengkonfirmasi rekening tersebut serta telah menyinkronkannya ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada tanggal 18 September 2014 dan PT Bank BCA, Tbk Cabang Solo meminta lambatan data mengenai rekening tersebut. Sedangkan tiga bank lainnya (CIBank, BRI, dan BPR 14 Sejahtera Makmur) tidak membatasi tanggapan.

Progres Pengelolaan Dana Nostro di Bank Indonesia

- 1. Menanggapi surat Direktorat PKNSI, DUKN nomor S-2369/KN.5/2014 tanggal 30 September 2014, Bank Indonesia melalui surat nomor 16/156/DPTP tanggal 20 November 2014, menyatakan bahwa rekening eks Bank Ficorwest di Bank Tala sebesar Rp5.840.515.509 dan Rp1.187.712.121 merupakan kredit fasilitas dikonto dan kredit overdraft (jukan awal nosto eks. BBO/BBKU) namun demikian BI masih melakukan penitipan dan penelusuran. Untuk rekening senilai Rp406.733.523.331,33 BI belum menemukan informasi mengenai data dimaksud. Sedangkan untuk rekening Bank Indover, tidak terdapat nama bank eks. BBO/BBKU yang mengiklaim data ke Bank Indover, namun demikian sebagai informasi terdapat tagihan Pemerintah kepada Trustee Indover Bank senilai EUR 335.526,20 yang terlampaui dispute.
2. Selanjutnya, melalui surat undangan nomor UND-578N.5/2017 tanggal 25 Februari, DUKN mengundang Bank Indonesia untuk melakukan rapat pembahasan data nosto di Bank Indonesia pada tanggal 5 Maret 2014. Dalam rapat s. Dalam sistem penatausahaan rekening Bank Indonesia, saat ini tidak tercatat rekening atas nama eks. Bank SDN. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia meminta informasi yang lebih rinci atas rekening dimaksud berupa nomor
a. Berdasarkan Dokumen Daftar K&M dari Trustee Indover Bank per tanggal 20 Oktober 2009 yang disampaikan Bank Indonesia, diketahui bahwa terdapat tagihan Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan kepada Trustee Indov c. Bank Indonesia saat ini menatausahaan rekening eks. Bank Ficorwest dan Bank Tala dengan nilai sebesar Rp10.025.227.629,96, namun dikarenakan kedua rekening tersebut dibuka oleh Internal Bank Indonesia terkait fasilitas
3. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan Laporan Nomor LAP-01/KN.5/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian/Penelusuran Dokumen Aset Nostro Eks BPPN dan surat tugas Direktur PKNSI nomor ST-1131/KN.5/2016 tanggal 26 April 2016.
4. Melalui surat nomor 15/25/DPTP/5/16 tanggal 21 Maret 2016, Bank Indonesia menyampaikan bahwa rekening eks Bank Ficorwest dan Bank Tala sebesar Rp5.840.515.509 dan Rp1.187.712.121 merupakan hak Kementerian. Selanjutnya melalui surat nomor 18/134/DPTP-GTTP-DPT/5/16 tanggal 29 April 2016, Bank Indonesia menyatakan data eks Bank Ficorwest dan Bank Tala tersebut telah diotokan ke RKUN tanggal 26 April 2016.

Progres Pengelolaan Dana Nostro Eks. BDR di PT Bank Genesha Tbk

- 1. Tersejutan dan terkonfirmasi rekening eks BDR di Bank Genesha sebesar Rp5.841.796.415,00, namun PT Bank Genesha juga menyatakan memiliki tagihan kontijensi kepada eks. BDR sebesar Rp51.447.560.083,00.
2. Melalui surat Nomor S-2586/KN.5/2014 tanggal 10 Oktober 2014, Direktorat PKNSI telah meminta PT Bank Genesha untuk menyediakan data eks BPPN yang tersimpan di PT Bank Genesha ke rekening KUN. Melalui surat Nomor 277/DK/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Bank Genesha menyampaikan bahwa:
a. Tidak terdapat outstanding dana eks BDR pada PT Bank Genesha.
b. Terdapat komitmen PT Bank Genesha kepada eks BDR sebesar Rp5.841.796.415,00, namun PT Bank Genesha juga memiliki tagihan kontijensi kepada eks. BDR sebesar Rp51.447.560.083,00 sehingga secara net off eks BDR
3. Menanggapi surat PT Bank Genesha tersebut, melalui surat Nomor S-35/KN.5/2015 tanggal 8 Januari 2015 dan dan S-1157/KN.5/2015 tanggal 10 April 2015, Direktorat PKNSI telah meminta PT Bank Genesha untuk menyediakan
4. Melalui surat nomor S-2734/KN.5/2015 tanggal 30 Oktober 2015, DI PKNSI telah meminta bantuan saran/pencapaian dari DJK terkait dana eks. BDR yang tersimpan di PT Bank Genesha. Melalui surat nomor SR-08/PB.332/2016
5. Selanjutnya, melalui surat nomor S-200/KN.5/2015 tanggal 16 Februari 2016, DUKN telah mengundang PT Bank Genesha untuk melakukan pembahasan, namun PT Bank Genesha tidak hadir. Atas keterlambatan tersebut, melalui
6. Berdasarkan PMK nomor 17/PMK.05/2005, program penjaminan yang dilaksanakan oleh BPPN dengan memberikan jaminan terhadap pembayaran Bank Umum telah berakhir sejak tanggal 22 September 2005, dengan demikian
7. Menanggapi surat Direktorat PKNSI tersebut, melalui surat nomor 037/DPU/17 tanggal 2 Februari 2017, PT Bank Genesha menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1425 dan 1426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
8. Berkaitan dengan tanggapan PT Bank Genesha tersebut, Direktorat PKNSI akan melakukan koordinasi dengan Internal Kementerian Keuangan terkait guna pengembalian dana eks. BDR ke rekening kas Negara.

Progres Pengelolaan Dana Nostro Eks. Bank BIRA di ClearStream Banking SA

- 1. Tersejutan dan terkonfirmasi rekening eks Bank BIRA di Clearstream Banking SA dengan nilai 256.438,50 USD
2. Melalui surat nomor S-10044/KN.5/2015 tanggal 10 November 2015, DUKN telah meminta rekening dalam valuta asing kepada Ditjen Penerimaan dan telah mendapat tanggapan melalui surat nomor S-9935/PB.3/2015 tanggal
3. Selanjutnya melalui surat nomor S-5-11478N.5/2017 Tanggal 31 Juli 2017, dalam rangka pengalihan dana tersebut ke RKUN, Direktorat PKNSI telah menyampaikan kepada Konsultan Hukum Widjayan & Partners selaku kuasa hukum Clearstream Banking S.A nomor RKUN dalam dolar USD serta surat Direktur PKNSI kepada Clearstream Banking S.A untuk permintaan pengalihan dana eks. Bank BIRA tersebut ke RKUN dan spesifikasi tanda tangan
4. Saat ini, Direktorat PKNSI sedang menunggu tanggapan dari Konsultan Hukum Widjayan & Partners untuk pengembalian dana eks. Bank Bira tersebut ke RKUN.

Progress Pengelolaan Dana Nostro Eks. Bank Bahari di Coutts Bank

1. Berdasarkan surat-surat Konsultan Hukum Ali Bualati Nugroho, Reksadiputro (ABNK) nomor 001/CDB-160/14/X/2017/AAAD-PW tanggal 4 Desember 2017 dan nomor 004/CDB-160/14/X/2017/AAAD-PW tanggal 14 November 2018 hal Penyampaian Informasi: Sehubungan dengan Mencara Pengembalian Aset Bank Bahari, surat Adversely Chief Executive, Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch tanggal 21 Juli 2017 hal Pemberian Konfirmasi dan Permintaan Dokumen serta Prosedur oleh DKN, dan surat Head and Front Office, Coutts and Co Ltd, Singapore Branch tanggal 17 April 2017 hal Permohonan Klarifikasi Proses Pengembalian Aset Bank Bahari ke rekening dana eks. Bank Bahari terapan di Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch sebesar USD 150.379,24.
2. Hongkong Coutts and Co Ltd (ABNK) melalui Contact No. 2 Hongkong dan Singapura, Direktorat PKNB melalui Surat Nomor S-1823/KN.5/2017 tanggal 11 Desember 2017, telah meminta Coutts and Co Ltd Hongkong BNP.
3. melalui email tanggal 2 Januari 2018, Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch menyampaikan bahwa telah mencoba melakukan pemindahtanganan dana dimaksud ke RKUN di Bank Indonesia namun tidak berhasil dikarenakan terlanjur.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat PKNB DKN melalui surat nomor S-22/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2018 telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia mengenai SWIFT details RKUN di Bank Indonesia dan melanda.
5. Selanjutnya, melalui email tanggal 29 Januari 2018 Direktorat PKNB menyampaikan kembali pelaksanaan pemindahtanganan dana tersebut ke RKUN sesuai dengan surat Bank Indonesia nomor 20/27/DOTP-GLP-LR/DIR/18 tanggal 23 Januari 2018.
6. Berdasarkan surat Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB nomor S-2955/PS.3/2018 tanggal 2 April 2018 diketahui bahwa dana tersebut telah efektif diterima RKUN pada tanggal 1 Februari 2018.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA SURAT BERHARGA
EKS BPPN PER 31 DESEMBER
2018**

LAMPIRAN 22.D

No.	Nama Asat	Bentuk Surat Berharga	Nominal	Mata Uang	Jumlah Lembar	Nilai Pasar Per Lembar	Nilai Pasar	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Koreksi Rugak per 31 Desember 2017	Nilai Koreksi Rugak per 31 Desember 2018	Keterangan	Kurudikan
A. Operasi Swasta												
1	BNP International Finance Co.	Skripium	0,01	USD	1.000,000	-	-	-	-	-	Tidak Diapukan oleh Central Reporting	HONGKONG
2	Bank Daeng National Indonesia	Skripium	101,88	USD	4.500,000	1,82	4.504.483,52	30 November 2016	62.112.219.134,00	66.292.825.713,52	BBN (Tipe Lain-lain)	BLUGSETE
3	TRE International Finance Co. Bv	Skripium	1,00	USD	23.000,000	0,81	23.600,000	31 November 2016	1.287.000.000,00	1.620.150.000,00	EmanTGA Diambil	BLUGSETE
4	Coopers & Lybrand	Cupon	18.730.000,00	DKR	-	1,80	33.710.000,00	27 Juni 2006	38.730.000,00	38.730.000,00	Eman Asat	JAKARTA
5	Sarana International Motor	Cupon	860.000.000,00	DKR	-	1,80	860.000.000,00	27 Juni 2006	860.000.000,00	860.000.000,00	EmanTGA Diambil	JAKARTA
6	Valis Citra	Cupon	28.123.000,00	DKR	-	1,80	38.123.000,00	27 Juni 2006	38.123.000,00	38.123.000,00	EmanTGA Diambil	JAKARTA
7	Bank Kerinci	Cupon	28.123.000,00	DKR	-	1,80	38.123.000,00	27 Juni 2006	38.123.000,00	38.123.000,00	EmanTGA Diambil	JAKARTA
8	Polytron Bn Perkasa	Skripium	2,10	USD	3.000,000	0,82	63.000,00	30 November 2016	63.524.000,00	912.103.000,00	Eman Asat	BLUGSETE
9	TRE International Finance Co. Bv	Skripium	1,00	USD	2.000,000	0,81	20.000,00	30 November 2016	276.960.000,00	287.520.000,00	EmanTGA Diambil	BLUGSETE
10	Bank Pajajaran	Checkup dan Cupon	100,00	DKR	3.000.000,000	1,80	300.000.000,00	10 Juni 2014	300.000.000,00	300.000.000,00	BBN (Tipe Lain-lain)	JAKARTA
11	Polytron Bn Perkasa	Skripium	2,10	USD	4.000,000	0,82	84.000,00	30 November 2016	1.128.021.000,00	1.218.404.000,00	Eman Asat	BLUGSETE
12	Polytron Bn Perkasa	Skripium	88,21	USD	182.000	0,88	160.547,48	30 November 2016	2.175.097.239,84	2.324.888.037,88	Eman Asat	BLUGSETE
	Total						11.292.920.413,84		16.189.293.183,38			
B. Medium Term Notes												
1	Polytron Bn Perkasa Medium Term Note	Skripium	93,92	USD	182.000	0,84	170.927,48	30 November 2016	2.315.861.114,22	2.473.340.792,69	Eman Asat	BLUGSETE
2	Polytron Bn Perkasa Medium Term Note	Skripium	90,00	USD	20.000,000	0,90	18.000.000,00	30 November 2016	241.864.000.000,00	269.628.000.000,00	Eman Asat	HONGKONG
3	Polytron Bn Perkasa Medium Term Note	Skripium	90,00	USD	940.540	0,90	846.504,00	30 November 2016	11.771.200.192,00	13.318.862.424,00	Eman Asat	HONGKONG
4	Polytron Bn Perkasa Medium Term Note	Skripium	90,00	USD	943.940	0,90	849.256,00	30 November 2016	11.776.680.288,00	13.327.694.128,00	Eman Asat	HONGKONG
5	Perdana Karya	Perisaf	100,00	USD	1.000,000	1,80	1.000.000,00	31 Oktober 2004	13.548.000.000,00	14.481.000.000,00	TN Tidak digunakan saat dan tidak berlaku	JAKARTA
6	Perdana Karya	Perisaf	100,00	USD	1.000,000	1,80	1.000.000,00	31 Oktober 2004	13.548.000.000,00	14.481.000.000,00	TN Tidak digunakan saat dan tidak berlaku	JAKARTA
7	Perdana Karya	Perisaf	100,00	USD	1.000,000	1,80	1.000.000,00	31 Oktober 2004	13.548.000.000,00	14.481.000.000,00	TN Tidak digunakan saat dan tidak berlaku	JAKARTA
8	Perdana Karya	Perisaf	100,00	USD	3.000,000	1,80	3.000.000,00	31 Oktober 2004	42.740.000.000,00	72.403.000.000,00	TN Tidak digunakan saat dan tidak berlaku	JAKARTA
	Total						218.023.841.594,22		404.807.924.502,89			

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.D

**PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA SURAT BERHARGA
EKS BPPN PER 31 DESEMBER
2018**

No.	Nama Alat	Spesifikasi Berharga	Nilai	Mata Uang	Jumlah Lembar	Nilai Pasar Per Lembar	Nilai Pasar	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Koreksi Rangkap per 31 Desember 2017	Nilai Koreksi Rangkap Desember 2018	Keterangan	Kurudikan
C. Bank Pemerintah Debitur												
1	Polysido Eks Perkasa	Prinsipal	100,00	IDR	3.000.000.000	1,00	3.000.000.000,00	30 November 2018	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Ekstans Alur	JAKARTA
Total (a-b+c)									494.405.714,00/296	488.397.230,138/07		
Total Nilai												
*Nilai berdasarkan Monthly Report Cetakak per tanggal 30 November 2018												

Catatan		
Revisi Tanggal 31	Per 31 Desember 2018	
1	Saldo Awal	14.481,00

- Keterangan :
- * Eritas surat berharga yang telah dengan berdasarkan Surat Acara Pemeriksaan Saluran dan Surat Bersama di Kantor Cetakak antara Dir PNCB dan BPK RI
 - ** Beban surat berharga berstatus aktif/urasa masih tercatat di Bursa
 - *** MTN/ deposito bank dan tidak berlaku karena adanya putusan pengadilan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PERATURAN REPUBLIK INDONESIA
ASPEK SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN 22 E

Sifat Saham Pada Kondisi Cegah												
No	Nama Emiten	Cover Business Emiten	Struktur Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Sektor Emiten	Indikator Nilai Penyelidikan	Kendala/kepada Emiten/Objek ASU	Tanggung Emiten	Diper ASU
1	PT Asic Cita Cemerlang Tbk (PT Asic Pacific Indonesia Tbk)	Pendukung Teknik	Seringkat	22.137.200	144,00 Rp	4.917.004.900,00	4.627.771.200,00	Aud	Securities Hoistby Report Cegah per tanggal 20 November 2018	Sifat Nomor 5- (1231)KN/2014 tanggal 13 Jan 2014 kepada Emiten	-	-
2	PT Asic Cita Cemerlang Tbk	Pendukung Teknik	Seringkat	37.459.700	112,00 Rp	3.791.334.100,00	3.970.728.200,00	Aud		Sifat Nomor 5- (1231)KN/2014 tanggal 13 Jan 2014 kepada Emiten	-	-
3	PT Asim Dirama Tbk	-	Seringkat	40.000	850,00 Rp	34.000.000,00	34.000.000,00	Sektor Emiten Teknik Dan/atau		Sifat Nomor 5- (4218)KN/2013 tanggal 13 Februari 2013 kepada Dirjen ASU	-	Peraturan Menteri Percepatan sebagai Saham, namun akan diberikan pada kelas
4	PT Bank Dugang National Indonesia	-	Seringkat	46.330	73,00 Rp	3.468.730,00	3.468.730,00	BBU		-	-	-
5	PT Bank Dugang National Indonesia	-	Seringkat	343	73,00 Rp	27.213,00	27.213,00	BBU		-	-	-
6	PT Bank Puncung	-	Seringkat	409	50,00 Rp	20.000,00	20.000,00	BBU/		-	-	-
7	PT Bank Puncu	-	Seringkat	330	330,00 Rp	87.500,00	87.500,00	STC		-	-	-
8	PT Bank Suria	-	Seringkat	800	200,00 Rp	240.000,00	240.000,00	BBU		-	-	-
9	PT Citra Tbk	Pengadaan barang, pengadaan, atau dan struktur bahan bangunan	Seringkat	11.204.423	114,00 Rp	1.268.093.600,00	1.240.228.575,00	Aud		Sifat Nomor 5- (1230)KN/2014 tanggal 13 Jan 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan tanggapan tercapai mengenai saham	-
10	PT Citra Tbk	Pengadaan barang, pengadaan, atau dan struktur bahan bangunan	Seringkat	41.421.423	114,00 Rp	4.629.201.160,00	4.629.131.241,00	Aud		Sifat Nomor 5- (1231)KN/2014 tanggal 13 Jan 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan tanggapan tercapai mengenai saham	-

**PERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2018**

11	PT Giga Telekom Tbk	Pendukung Data	Sertifikat	200	640.000 Rp	1.43.000.000 Rp	130.000.000 Rp	Aset
12	PT Telekom Indonesia Tbk	Pendukung Jaringan	Sertifikat	12.990.500	1.900.000 Rp	11.188.292.292.000 Rp	28.198.872.200.000 Rp	Aset
13	PT Langgani Telekom Indonesia Tbk	Pendukung Pasok	Sertifikat	37.901.000	142.000 Rp	5.785.249.318.000 Rp	8.217.744.288.000 Rp	Aset
14	PT Star Telekom Tbk (dah. PT Giga Telekom)	Penjualan dan Jasa Lain	Sertifikat	100	140.000 Rp	1.400.000 Rp	1.400.000 Rp	Aset
15	PT Telekom Tbk	Perantara dan Jasa	Sertifikat	100	48.000.000 Rp	4.000.000.000 Rp	4.000.000.000 Rp	Aset
16	PT Pula Indonesia Tbk	Pendukung Kerangka dan Kaca	Sertifikat	-	0,00 Rp	- Rp	- Rp	-
17	PT Telekomunikasi Agung	-	Sertifikat	94.600	673.200 Rp	63.833.000.000 Rp	63.833.000.000 Rp	Sisa Ekuitas Trans Diambil

Surat Nomor 5-0246/KM.12/2014 tanggal 12 Juni 2014 kepada	-	-	-
Surat Nomor 5-0246/KM.12/2014 tanggal 12 Juni 2014 kepada	Tidak memiliki informasi tentang kepentingan dalam Kementerian Keuangan	-	-
Surat Nomor 5-0247/KM.12/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada	Conflic of interest (bertentangan) dalam Kementerian Keuangan	-	-
Surat Nomor 5-0248/KM.12/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada	-	-	-
Surat Nomor 5-0249/KM.12/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada	Tidak memiliki informasi tentang kepentingan dalam Kementerian Keuangan	-	-
Surat Nomor 5-0250/KM.12/2013 tanggal 13 Februari 2013 kepada	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 30.000.000 lembar saham PT Pula Indonesia Tbk yang diterbitkan di Kantor Central Bank merupakan aset	-	Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar hukum, surat akuitas pemerintah tidak ialah

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN 22.E

18	PT Garuda Ind Investment	-	Sertifikat	49.231.500	50,00	Rp	2.463.373.000,00	Rp	2.463.373.000,00	Saha Dengan Teknik Dibawah	Surat Nomor 5- 42/KMNS/2015 tanggal 13 Maret 2015 kepada Direktur APJ	-	Pertanian masih berjalan sebagai badan hukum, namun belum permanen oleh pihak
19	PT Prima Akyo Joint Universal Tbk	Manufaktur volat Kendaraan (industri Otomobil)	Sertifikat	2.200	75,00	Rp	187.200,00	Rp	187.200,00	Aktif			
20	PT Sinar Prodia Tbk	Perdagangan	Sertifikas	1.918.863	116,00	Rp	1.419.960.000,00	Rp	1.966.834.633,00	Aktif			
21	PT Sinarca Tbk	Manufaktur kapal	Sertifikat	700	\$300,00	Rp	6.330.000,0	Rp	\$6.090.000,00	Aktif	Surat Nomor 5- 077/KMNS/2014 tanggal 16 Jun 2014 kepada Direktur	BPPN tidak tercatat atas pendirian saham dan sancara reformasi berdasarkan surat asal pendirian 700 lembar saham perantara atas nama BPPN	-
22	PT Sinarca Tbk	Manufaktur kapal	Sertifikas	348.000	\$300,00	Rp	3.097.200.000,00	Rp	3.027.400.000,00	Aktif	Surat Nomor 5- 077/KMNS/2014 tanggal 16 Jun 2014 kepada Direktur	Cadren atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	
23	PT Tera Sinarca Tbk	Manufaktur polipropilena dan pelastik film	Sertifikat	100	400,00	Rp	38.800,00	Rp	40.000,00	Aktif	Surat Nomor 5- 077/KMNS/2014 tanggal 16 Jun 2014 kepada Direktur	Tidak sesuai dengan peraturan tentang kependidikan lainnya	

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2018

24	Juni Komori Investor Kapital RIU Kalimantan Pusat dan saham PT BDI/ Kalimantan	Saham	80.000.000	Rp	43.726.013.150,77	Rp	44.798.119.004,33	Aset			Berdasarkan surat PT Dapag Birtan pada 8 Desember 2018 nomor DOK/2018-113 tanggal 9 Januari 2014, dan pada tahun PT Kalimantan Pusat. Tbk di PT BDI/ Kalimantan pada tahun 2014 sesuai dengan Kebijakan Fiskus dengan jumlah konversi dan saham 80.000.000 lembar dengan nilai Konfirmasi Keuangan adalah senilai 28.633.799 unit KIK. Saat ini pengkonversian saham nilai Konfirmasi Keuangan menjadi unit KIK Kebijakan Fiskus belum dilakukan.
Total				Rp	87.565.200.000,77	Rp	101.776.804.476,33				

Selama tahun yang berakhir pada saat ini tidak ada perubahan di BDI. Tidak ada surat Nomor 5-1368/KN.3/2014 s.d. 5-1373/KN.3/2014 dan Nomor 5-1381/KN.3/2014 s.d. 5-1379/KN.3/2014 tanggal 16 Juni 2014. Diakibatkan PPK/1 salah memuat konfirmasi seperti pada tahun pertama tahun berjalan, dan berdasarkan tahun 2018, BPPN berakur. Namun dengan
akhir periode penyusunan laporan keuangan, sejak 9 bulan dari 13 bulan yang diuraikan, yang merupakan surat Diakibatkan PPK/1 berakur. Dari jumlah yang disebutkan di atas, BPPN yang telah memberikan penjelasan tentang kepastian tahun 2018, BPPN dan biaya
pengkonversian, serta BDI/ Kalimantan Birtan masing-masing.
Nilai aset tahun 2018 BPPN yang di format adalah berdasarkan Moody Report Citibank per tanggal 30 November 2018 sesuai dengan KIK Kalimantan. Perkiraan berdasarkan nilai pasar per tanggal 28 Desember 2018 (sumber : <http://www.kartika.com/indonesia/2018/12/28/2018-dns-gpni/>)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PERATURAN REPUBLIK INDONESIA
ASSET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN 22.E

Salah Pengekalan Langsung Objek DUKN										
No.	Nama Emiten	Cara Analisis	Bentuk Saham	Kemudahan Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	Strategi Nilai Investasi	Alamat Emiten
1	PT Karya Digejaya	Pengelolaan dan pengelolaan sarana pemukiman dan perdagangan sarana olahraga golf		100.00%	10.000	Rp 231.240.749.588	Rp 231.240.740.580.00	Audif	Nilai buku berdasarkan surat Direksi PT Karya Digejaya Nomor Digej/10/Dir/2017 tanggal 10 Juli 2017	Duta Tiga, Kecamatan Chenggale, PO BOX 316, Depok 16932
2	PT Agra Cendek Hutanagri	Conserv Cores		0,0024%	312	Rp 312.000	Rp 312.000,00	Audif	Nilai nominal saham berdasarkan Laporan Keuangan perwaseh per 31 Desember 2012 (tidak terdapat)	Cyber 2 building, 12th floor, Jalan H.K. Murnas Sad Box X-3 No. 13, Jakarta 12950
3	PT Kobero Hutan Tbk	Manufaktur KSM		0,24%	69.802.400 Rp	Rp 47.100.737.500	Rp 47.100.737.500,00	Audif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direksi PT Kobero Hutan Tbk Nomor 004/KOH-0/VER/2017 H.K. Murnas Sad Box X-3 tanggal 04 Agustus 2017 No. 13, Jakarta 12950	Cyber Kawasan Industri Nole Gedung JL Kemang No 2 Jakarta 2 building, 12th floor, Jalan H.K. Murnas Sad Box X-3 No. 13, Jakarta 12950
Total						Rp 298.341.790.184,00	Rp 298.341.790.184,00			

Diketahui/Disetujui/Disahkan/Lampiran LKIK tahun 2018 sesuai surat nomor 219/KM/2018 tanggal 04 Januari 2019, Sekretaris Monev dan managemen nilai tahun per tanggal per 31 Desember 2018 kepada para emiten, sebagai salah satu periode perhitungan LKIK tahun 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah dipaparkan pada tahun per 31 Desember 2018 menggunakan nilai transfer tahun yang telah ditetapkan kepada Direktorat PUNDL.

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018**

Nilai aset properti Eks Kelolaan PT PPA yang disajikan dalam Rencana	Saldo Per 31 Desember 2017 (Audited)		Mutasi Semester I 2018		Saldo Per 30 Juni 2018		Mutasi Semester II 2018		Saldo Per 31 Desember 2018	
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
AT	285	1.804.429.239.851	5	31.199.803.000	290	1.835.629.042.851	(4)	(4.098.310.000)	286	1.831.530.732.851
BS	1.076	1.580.829.348.019	(11)	(45.832.640.000)	1.065	1.534.996.708.019	(74)	(16.197.370.000)	991	1.518.799.338.019
BT	323	865.910.243.344			323	865.910.243.344			323	865.910.243.344
BD (Dokumen berupa Coverteq)	37	123.953.401.452			37	123.953.401.452			37	123.953.401.452
perubahan tanah										
JUMLAH	1.721	4.374.122.882.666			1.718	4.380.489.395.666			1.637	4.340.193.718.666
Nilai aset properti Eks Kelolaan PT PPA yang dipegang dalam CALK										
BD (Dokumen berupa AJB/APHT, Capi Dokumen Kepentikan, PPIB, Ruzah Lelang, IMB)	640	2.092.463.091.833			640	2.092.463.091.833	(7)	(8.914.000.000)	633	2.083.549.091.833
JUMLAH	640	2.092.463.091.833			640	2.092.463.091.833			633	2.083.549.091.833
JUMLAH TOTAL	2.361	6.467.585.974.499							2.270	6.423.742.807.499

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.G

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT BERHARGA EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018

No.	Emiten	Jenis Surat Berharga	Nilai Aset Per		Asal Bank	CUR	ATK Value (Nominal Value)	Total Nominal Value	Keterangan
			31 Desember 2017 (Audited) *	31 Desember 2018					
1.	Dharmala Instrama (0016060906)	Obligasi	2.793.450.000,00	2.793.450.000,00	Various	USD	22.000.000,00 Rp	186.230.000.000,00	Default asset
2.	Omnitraco Multi Artha (0016060794)	Obligasi	6.499.457.694,00	6.499.457.694,00	Bill	USD	15.356.072,52 Rp	129.989.153.881,80	Default asset
3.	Ongko Ind Fin (290304)	Obligasi	4.317.150.000,00	4.317.150.000,00	BAU	USD	30.000.000,00 Rp	253.950.000.000,00	Default asset
4.	Ongko Ind Fin CO BV (0016037876)	Obligasi	215.857.500,00	215.857.500,00	ASPAC	USD	1.500.000,00 Rp	12.697.500.000,00	Default asset
5.	Pacific Ind CP (0016062464)	Obligasi	507.900.000,00	507.900.000,00	TAMARA	USD	2.000.000,00 Rp	16.930.000.000,00	Default asset
6.	Pacific Ind CP (0016062504)	Obligasi	507.900.000,00	507.900.000,00	TAMARA	USD	2.000.000,00 Rp	16.930.000.000,00	Default asset
7.	Indonesia Bermuda	Reksadana	1.805.657.589,00	1.805.657.589,00	Danamon	USD	1.000.000,00 Rp	8.465.000.000,00	
8.	Mulia Keramik 197 – Mulia Ind Wrt-SRA-SL (ID4000007408)	Warrants	4.934.713,00	4.934.713,00	Various	IDR	4.934.713,00 Rp	4.934.713,00	
9.	Mulia Keramik 197 – Mulia Ind Wrt-SRA-SL (ID4000007507)	Warrants	4.934.713,00	4.934.713,00	Various	IDR	4.934.713,00 Rp	4.934.713,00	
Total			16.657.242.209,00	16.657.242.209,00				625.201.523.307,80	

*Nilai disajikan sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 dan Lampiran B Pengembangan Aset tanggal 27 Februari 2009
 Kurs 8465

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018**

No.	Nama Emiten	Core Business	Saham Asli	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	Rekening Nilai Penyajian	Absah Emiten	Echirrengga
1	PT Aneka Jaya Bhan Lbh	-	Bhan	-	na	Rp 223.500,00	Rp 223.500,00	Tidak Diketahui	Dasar Lampiran A Perjanjian Perdagangan Asosiasi 24 Februari 2004	-	Permintaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor S-425/KM.3/2013 tanggal 13 Februari 2013 dengan tempat-pesan "Kerjasama usaha serikat sebagai badan hukum."
2	PT Bansa Multibalance	-	BUN	730.000	13,00%	Rp 73.000.000,00	Rp 73.000.000,00	Diketahui untuk tahun 2006, berdasarkan surat Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan Asosiasi-LK Nomor S-443/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Dasar Lampiran A Perjanjian Perdagangan Asosiasi 24 Februari 2004	-	-
3	PT Daulat Prayama	-	KON	280	14,29%	Rp 141.350.000,00	Rp 141.350.000,00	Tidak Diketahui	Dasar Lampiran A Perjanjian Perdagangan Asosiasi 24 Februari 2004	-	Permintaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor S-426/KM.3/2013 tanggal 13 Februari 2013
4	PT Pura Indonesia Ltd	-	KON	1.300	13,00%	Rp 28.310.000,00	Rp 28.310.000,00	Tidak Diketahui	Dasar Lampiran A Perjanjian Perdagangan Asosiasi 24 Februari 2004	-	Permintaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor S-427/KM.3/2013 tanggal 13 Februari 2013 dengan tempat-pesan "Kerjasama usaha serikat sebagai badan hukum, namun dalam perjanjian"
5	PT Pura Yaman Indonesia	-	KON	200	20,00%	Rp 234.871,00	Rp 234.871,00	Tidak Diketahui	Dasar Lampiran A Perjanjian Perdagangan Asosiasi 24 Februari 2004	-	Permintaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor S-447/KM.3/2013 tanggal 13 Februari 2013 dengan tempat-pesan "Kerjasama usaha serikat sebagai badan hukum, namun dalam perjanjian"
6	PT Devina Finance	-	BLU	24.730	99,00%	Rp 1.390.000.000,00	Rp 1.390.000.000,00	Diketahui untuk tahun 2006, berdasarkan surat Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan Asosiasi-LK Nomor S-442/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Dasar Lampiran A Perjanjian Perdagangan Asosiasi 24 Februari 2004	-	-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.H

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018

No.	Nama Emiten	Cara Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	Estimasi Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Estimasi
7	PT Aghosha Linaarta	-	19 Bank	400	0%	123.013.692,00	123.013.692,00	Audif	Salah Lampiran Surat Menteri Keuangan No. 5-99/PMK.0/2008 tanggal 28 April 2008	Jalan PPK, Thurong Kan. 3, Kebon Sari, Pematang Gedang, Kecamatan Thurong, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, 80811	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5448/KM.1/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan perubahan melalui surat edaran sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5448/KM.1/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan perubahan melalui surat edaran sebagai bagian dari pelaksanaan
8	PT Binar Sintra Ventura	via Model Venture	BCNI	439	3,43%	283.134.000,00	283.134.000,00	Tidak Diikuti	Jalur KHK No. 123/KP/06/2007	-	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5448/KM.1/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan perubahan melalui surat edaran sebagai bagian dari pelaksanaan
9	PT Duta Securities Indonesia	-	BCNI	239	13,00%	-	-	Tidak Diikuti Tahun 2012	-	-	-
10	PT Sarana Janti Ventura	via Model Venture	BCNI	200.912	2,20%	222.903.994,00	222.903.994,00	Audif	Halaman 10 dari 10 halaman surat Direktur Utama PT Sarana Janti Ventura Nomor 06/DIRJANT/2016 tanggal 24 Agustus 2016	Jalan Kencana Pratama No. 119 Janti - 36128, Kecamatan Janti, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, 80811	-
11	PT Sarana Kabar Ventura	via Model Venture	BCNI	498.262	2,67%	233.094.924,20	233.094.924,20	Audif	Halaman 10 dari 10 halaman surat Direktur Utama PT Sarana Kabar Ventura Nomor 43/SK/VK/2017 tanggal 28 Juni 2017	Jalan P. Sabor No. 9 A/B, Kecamatan 78121, Phone: 05511726 613, Fax 05611746 883	-

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018**

No.	Nama Emitas	Care Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emitas	Strategi Nilai Penyajian	Amanat Emitas	Keterangan
12	PT Sarana Karya Ventura	200 Model Venture	BONI	193.064	1,0483 %	302.656.812,00	0	Audit	Nilai Buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Karya Ventura Nomor 01529K/07/12018 tanggal 26 Januari 2018	Jalan Pemuda No.4, Bogorjaya, Poskod 03111 227 2208, 227 2209, Fax 021 (0) 212 4232	-
13	PT Sarana Perdana Venture	200 Model Venture	BVNI	63.106	1,4119 %	31.286.000,00	31.286.000,00	Audit	Surat KPR No. 1531K/PM.06/2007	-	-
14	PT Sarana Bersama Pengembang Industri	-	20 Bank	1.115	16,6463 %	34.239.460.920,00	4.038.231.683,55	Audit	Nilai Buku saham berdasarkan laporan Keuangan PT SBR Tahun 2018 (unaudited)	Sedong 2 Gedung Sate 5022A Jalan H.R. Kasnan Sate Kav 42 Karetan, Jakarta Sidoarjo, 13920Phone: 021 531 0715, 531 0732, 531 0799, Fax: 021 (0) 521 0735	- Berantutan Laporan Keuangan PT SBR per 31 Desember 2017 (audited), dalam persentase yang dimiliki Kementerian Keuangan adalah 1,412 lembar saham, yang terdistribusi 1,115 lembar saham oleh kelolaan PT PPA dan 297 lembar saham oleh BODL. Berantutan hal tersebut disebabkan karena perantaraan. - Pada tahun 2018, berdasarkan surat KUPAT pemerintah tahun 2017, dilakukan pengalihan saham sebagai surat divestasi oleh saham PT SBRPT pada A/C: Perizinan Bank-Aus ekspedien 1115 oleh saham PT SBR, Kementerian Keuangan menurutnya Rp24.3852.173.200,00.
15	PT Aurora Jwa Tigo PT	Jasa Auroral	BUN-HALAN	4.500	1,0483 %	4.500.000.000,00	4.341.276.000,00	Audit	Nilai wajar saham per 09 Juni 2017 berdasarkan Laporan Keuangan Saham PT ATTH Nomor LAF-0215101/16/14/076/ML.0302101/2017 tanggal 8 Juli 2017	Transaksi Permis Bontosa Office Lantai 11, Jalan KH Moez Hidayat No. B4-2B, Jakarta 10430	-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018**

LAMPIRAN 22.H

No.	Nama Emiten	Cara Business	Salut Asul	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	Keterangan Nilai Pasyrujan	Alamat Emiten	Keterangan
16	PT Aurrani Pura Mandiri	Jasa Aurrani	RUM HUKUM	1.800.000	23,71%	313.020.000,00 Rp	333.020.000,00 Rp	Diikuti in subkarye tahun 2011.	Perawal Kode KHK No.13/MCHK.06/2007		
17	ICDN Kautana (PT Kaut)	-	ICDN	0	0,00%	- Rp	- Rp	0	0		Salah PT ICDN Kautana dipisahkan dari dan sura berbagai aka saham PT PPA diberikan berdasarkan surat PT Diprofil dan saham Bina Adiantara Bina unian no DE/02014-112 tanggal 9
18	PT Sarana Sakti Ventura	SAK Model Venture	BMN	61.333	1,44%	61.333.000,00 Rp	61.333.000,00 Rp	Audit	Nilai buku utuan berdasarkan surat Direktur PT Sarana Sakti Ventura Nomor 006/520/V/2016 tanggal 23 Agustus 2016	Kempala Pura Sagar Bina KIC-17 Puri Dasjahan Via Sudiro Mhandu	
19	PT Sarana Sakti Ventura	SAK Model Venture	BMN	661.465	3,74%	661.465.000,00 Rp	970.885.000,00 Rp	Audit	Nilai utuo utuan berdasarkan surat Direktur PT Sarana Sakti Ventura nomor 07/520/V- 006/12018 tanggal 29 Januari 2018	Jalan Kuala Solihun No. 9 Kw. 3 rd 7 Padang - Barransia Barat.	
20	PT Sarana Papua Ventura (dan PT Sarana Pura Ventura)	SAK Model Venture	BMN	82.471	1,41%	82.471.000,00 Rp	82.471.000,00 Rp	Audit	Nilai Model Dasar Kementerian Keuangan per tanggal 20 Juli 2016 berdasarkan surat Direktur PT Sarana Papua Ventura Nomor 16/ACH/DP/V/2016 tanggal 23 Agustus 2016	Jalan Santirone Tanggajaya No. 20, 99223, Jayapura, Papua 16/ACH/DP/V/2016 tanggal 23 Agustus 2016	

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018**

No.	Nama Emiten	Cover Emiten	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Situs Emiten	Berkas Nilai Pasyruka	Alamat Emiten	Estimasi
31	PT ZINC Indonesia Finance	-	BONI	3.750.000	13,000%	3.750.000.000,00 Rp	3.750.000.000,00 Rp	Cikuar (sumber: tahun 2010, berdasarkan surat Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Saham-LK Nomor 5-4612/SL.10/2013 tanggal 27 Juli 2012	Daftar Lampiran Surat Menteri Keuangan No. P-171/PMK.02/2007 tanggal 29 Juni 2007	-	
32	PT Aia Nisard Keuangan	Pendukung hasil tambang	-	33.000.500	0,97%	1.300.313.000,00 Rp	1.100.323.000,00 Rp	Aiaf (Daftar dari BDI)	berdasarkan Monthly Report/Catatan per tanggal 20 November 2018	-	Per 31 Desember 2018, saat saham PT Aia Nisard diterbitkan kembali kepada PT PPA dan dicair sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DKN. Saat ini perdagangan saham PT Aia Nisard telah dibuka oleh DKN. Saat ini saham tersebut terdagang di Bursa Efek Indonesia.
33	PT Jember Coko Company	Penelitian hasil	-	634.500	0,43%	3.403.400.000,00 Rp	4.332.423.000,00 Rp	Aiaf	berdasarkan Monthly Report/Catatan per tanggal 20 November 2018	-	Per 31 Desember 2018, saat saham PT Jember Coko Nisard diterbitkan kembali kepada PT PPA dan dicair sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DKN. Saat ini saham tersebut terdagang di Bursa Efek Indonesia.
34	PT Sakti Raja Emas Png	Jasa Sarana Obseksi urutasi Gold	-	37	13,87%	1.423.000.000,00 Rp	1.423.000.000,00 Rp	Aiaf	Nilai buku utama berdasarkan surat Direktur PT Sakti Raja Emas Png Gold Nisard 008/5276/DINK/CSW/2018 tanggal 26 Januari 2018	Jl. Kayu Damar, Pasir Kanti Tangerang 13360	
35	PT Bina Prima Perdana (Ong Terasu)	-	-	-	100,00%	0 Rp	0 Rp	Tidak Aiaf	-	-	Per 31 Desember 2018, saat saham PT ZINC diterbitkan dan dicair sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.H

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018**

No.	Nama Emiten	Cover Emiten	Berkas	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	Keterangan Nilai Frekuensi	Alamat Emiten	Keterangan
26	PT Sejahtera Eks Graha	Fengterbagan dan pengalihan sarana perkebunan dan pemukiman warga oblong-ang	-	272.000	94,33%	Rp -	Rp 22.470.000.000,00	Aktif	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengalihan Aset Tahun 2017	Kawasan Bogor Raya, Bogor	Per 31 Desember 2018, aset saham PT Sejahtera Eks Graha tidak dipersebutkan kembali kepada PT PPA dan aset saham tersebut direvisi dari nilai aset saham yang dipersebutkan ke nilai saham eks kelolaan PT PPA.
27	PT Turan Percontengan Indonesia	Perseksi	-	70.000	70,00%	Rp -	Rp 8.750.000,00	Aktif	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengalihan Aset Tahun 2017		Per 31 Desember 2018, aset saham PT Turan Percontengan Indonesia tidak dipersebutkan kembali kepada PT PPA dan aset saham tersebut direvisi dari nilai aset saham yang dipersebutkan ke nilai saham eks kelolaan PT PPA.
	Total					Rp 93.107.124.749,28	Rp 40.220.989.344,88				

Dalam rangka penyusunan LKTK tahun 2017, melalui surat nomor S-19/004.3/2018 tanggal 8 Januari 2019, Direktorat PKNSG telah menerima nilai saham per tanggal per 31 Desember 2018 kepada jemaat emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK tahun 2018 belum ada emiten yang memberikan tanggapan, sehingga perjanjian nilai saham per 31 Desember 2018 menggunakan nilai terakhir tahun yang telah dipersebutkan kepada Direktorat PKNSG.

ASET LAIN-LAIN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

LAMPIRAN 23

No.	BA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)				31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
		BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH	JUMLAH
1	001 MAJELIS PERHUSYAWARATAN RAKYAT	12.287.110.720	(262.752.167)	12.024.358.553	12.093.595.400	(1.283.710.421)	10.809.884.979	10.809.884.979	
2	002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	18.627.927.252	(8.284.185.458)	10.343.741.794	16.513.703.434	(5.846.076.518)	10.667.626.916	10.667.626.916	
3	004 BADAN PENENKSA KEUANGAN	61.551.373.67	(55.653.217.360)	5.898.156.407	21.421.653.287	(20.447.536.349)	974.116.938	974.116.938	
4	005 MAHKAMAH AGUNG	135.623.038.742	(114.569.274.531)	21.053.764.211	121.947.499.753	(104.123.178.191)	17.824.321.562	17.824.321.562	
5	006 KEMAHKAMAN AGUNG	78.507.611.770	(72.786.529.897)	5.721.081.873	55.088.376.025	(50.099.183.630)	4.989.192.395	4.989.192.395	
6	007 SEKRETARIAT NEGARA	262.071.923.074	(114.947.470.049)	147.124.453.025	276.502.028.994	(107.525.285.055)	168.976.743.939	168.976.743.939	
7	010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI	388.378.557.288	(177.980.572.171)	210.397.985.117	243.017.275.805	(116.957.094.440)	126.060.181.365	126.060.181.365	
8	011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI	113.688.381.260	(81.938.129.579)	31.750.251.681	117.733.922.822	(64.846.101.544)	52.887.821.278	52.887.821.278	
9	012 KEMENTERIAN PERTAHANAN	6.305.613.513.814	(3.471.143.073.409)	2.834.470.440.405	5.099.567.905.903	(3.475.590.062.866)	1.623.977.843.037	1.623.977.843.037	
10	013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	349.586.548.982	(256.677.527.937)	92.909.021.045	271.241.635.576	(234.938.144.439)	36.303.491.137	36.303.491.137	
11	015 KEMENTERIAN KEUANGAN	1.139.813.993.517	(910.595.400.676)	229.218.592.841	865.287.703.248	(700.350.560.167)	164.937.143.081	164.937.143.081	
12	018 KEMENTERIAN PERTANIAN	716.975.689.013	(245.244.101.082)	471.731.587.931	366.970.350.022	(176.107.287.347)	190.863.062.675	190.863.062.675	
13	019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.180.818.896.191	(828.808.401.464)	352.010.494.727	1.203.012.177.177	(560.070.438.889)	642.941.738.288	642.941.738.288	
14	020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.129.200.211.249	(413.742.922.887)	715.457.288.362	1.110.690.803.891	(370.775.357.075)	739.915.446.816	739.915.446.816	
15	022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	5.231.113.506.667	(1.382.199.721.916)	3.848.913.784.751	4.689.311.508.841	(869.299.894.710)	3.820.011.614.131	3.820.011.614.131	
16	023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	607.599.164.234	(539.078.925.000)	68.520.239.234	564.843.100.649	(487.310.308.816)	77.532.791.833	77.532.791.833	
17	024 KEMENTERIAN KESEHATAN	5.896.652.929.657	(4.821.936.883.440)	1.074.715.546.017	1.861.374.860.857	(1.572.540.013.150)	288.834.847.707	288.834.847.707	
18	025 KEMENTERIAN AGAMA	303.467.082.927	(208.612.292.851)	94.854.790.076	182.792.595.700	(140.465.330.209)	42.327.265.491	42.327.265.491	

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 23

PENERintah REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)				31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH		
19	026	KEHENTERIAN KETENAGAKERJAAN	545.056.528.846	(458.228.910.138)	86.827.618.708	617.430.188.157	(460.743.008.640)	156.688.179.517		
20	027	KEHENTERIAN SOSIAL	27.417.688.583	(24.858.951.495)	2.558.737.088	29.632.501.014	(28.327.019.000)	1.305.482.014		
21	029	KEHENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	482.878.816.419	(383.422.746.684)	99.456.069.735	374.479.476.319	(286.310.901.032)	88.168.575.287		
22	032	KEHENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	342.965.519.318	(258.241.124.883)	84.724.394.435	214.641.530.229	(173.983.874.404)	40.657.655.825		
23	033	KEHENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	233.130.907.196.903	(31.778.517.454.240)	201.352.389.742.663	345.142.846.18.434	(7.026.126.413.099)	27.488.158.205.335		
24	034	KEHENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	1.028.775.466	(116.970.835)	911.804.631	1.710.707.023	(1.706.444.523)	4.262.500		
25	035	KEHENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	3.380.215.129	(2.908.769.049)	471.446.080	3.183.506.702	(2.695.909.439)	487.597.263		
26	036	KEHENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	250.365.400	(250.365.400)	-	481.804.150	(432.744.150)	49.060.000		
27	040	KEHENTERIAN PARAWISATA	57.765.832.615	(11.233.662.781)	46.532.169.834	60.435.929.219	(10.674.865.958)	49.761.063.261		
28	041	KEHENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	906.938.624	(882.577.124)	24.361.500	4.429.388.813	(367.056.514)	4.062.332.299		
29	042	KEHENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	535.046.603.518	(308.887.568.529)	226.159.034.989	441.472.902.832	(243.729.312.557)	197.743.590.275		
30	044	KEHENTERIAN KOPERASI DAN UKM	185.922.326.191	(16.947.230.725)	168.975.095.466	299.762.228.161	(24.175.450.199)	275.586.777.962		
31	047	KEHENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN DAN PELINDUNGAN ANAK	-	-	-	261.326.200	(149.329.256)	111.996.944		

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

LAMPIRAN 23

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)				31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH		
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.484.310.584	(1.484.018.084)	292.500	16.008.239	(10.672.159)	5.336.080		
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	4.767.753.563	(1.802.482.743)	2.965.270.820	-	-	-		
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	4.192.983.187	(3.912.978.187)	280.005.000	4.192.983.187	(3.912.978.187)	280.005.000		
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	9.285.528.963	(2.143.836.815)	7.141.692.148	1.782.860.067	(1.782.860.067)	-		
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	99.943.393.399	(87.230.572.407)	12.712.820.992	82.265.888.737	(86.028.892.181)	16.236.996.556		
37	055	KEHENTERIAN PPN/BAPPENAS	62.680.178.299	(2.607.734.195)	60.072.444.104	63.873.985.294	(2.598.368.149)	61.275.617.145		
38	056	KEHENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	125.004.264.599	(114.427.810.259)	10.576.454.340	103.004.149.752	(100.572.588.356)	2.431.561.396		
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	93.930.401.983	(8.786.378.146)	85.144.023.837	79.122.343.101	(9.058.743.306)	70.063.599.795		
40	059	KEHENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.621.187.552	(18.983.762.369)	1.637.425.183	25.020.789.361	(22.005.191.820)	3.015.597.541		
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	856.260.491.543	(777.902.275.324)	78.358.216.319	753.747.925.477	(697.789.953.531)	55.957.971.946		
42	063	BADAN PENGAJAS OBAT DAN MAKANAN	15.276.035.516	(15.838.332.018)	(562.296.502)	14.942.717.477	(12.375.262.569)	2.567.454.908		
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	8.343.400.965	(197.200.000)	8.146.200.965	528.172.499	(80.922.000)	447.250.499		
44	065	BADAN KOORDINASI PENANGANAN MOGAL	49.773.970	(49.773.970)	-	-	(45.648.308.323)	(45.648.308.323)		
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	50.688.053.831	(49.759.618.763)	928.435.068	46.461.721.651	(963.858.970.889)	(917.397.249.238)		
46	067	KEHENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	1.994.248.710.782	(889.622.125.693)	1.104.626.585.089	2.501.523.762.400	0	2.501.523.762.400		

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASSET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

LAMPIRAN 23

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	14.797.720.282	(10.129.262.907)	4.668.457.375	14.862.441.763	(8.835.820.857)	6.026.620.906
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	2.356.007.867	(104.785.675)	2.251.222.192	104.785.675	(104.785.675)	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	36.375.441.590	(27.370.078.199)	9.005.363.391	28.109.240.771	(20.588.880.932)	7.520.359.839
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	62.663.133.603	(58.927.231.688)	3.735.901.915	57.677.783.200	(55.457.487.505)	2.220.295.695
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	7.000.920.398	(6.989.131.973)	11.788.425	6.984.249.898	(6.984.249.898)	-
52	078	PUSAT LAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	3.107.133.503	(94.176.500)	3.012.957.003	3.575.551.002	(1.847.088.579)	1.728.462.423
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	104.689.484.879	(56.807.950.403)	47.881.534.476	22.535.167.957	(19.013.407.476)	3.521.760.481
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	8.528.081.274	(8.645.504.434)	(117.423.160)	10.958.952.504	(10.459.088.421)	499.864.083
55	081	BADAN PENGAJIAN DAN PENELITIAN TEKNOLOGI	237.493.486.013	(109.451.928.198)	128.041.567.815	122.883.418.331	(101.962.014.813)	20.921.403.518
56	082	LEMBAGA FENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	5.983.005.475	(4.812.248.441)	1.170.757.034	4.876.735.931	(4.022.518.154)	854.217.777
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	-	-	#VALUE!	6.416.386.500	(182.054.000)	6.234.332.500
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	4.332.338.489	(1.578.329.735)	2.744.008.754	98.178.705	(34.259.705)	63.919.000
59	085	BADAN PENGAJIAN TENAGA NUKLIR	1.260.701.850	(1.119.293.140)	141.408.710	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	1.375.539.100	(1.328.233.450)	47.305.650	737.034.955	(464.606.455)	272.428.500
61	087	ARIS NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	7.254.929.769	(7.124.928.900)	130.000.869	4.764.944.283	(4.665.040.908)	99.903.375
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	5.040.713.882	(4.945.244.595)	95.469.287	13.056.081.276	(7.888.934.771)	5.167.146.505

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASSET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

LAMPIRAN 23

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2.778.682.115	(2.575.132.384)	203.549.731	3.834.449.277	(2.703.079.525)	1.131.369.752
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	111.442.518.114	(47.878.273.001)	63.564.245.113	2.724.474.604.741	(200.053.878.185)	2.524.420.726.556
65	092	KEMENTERIAN PELOUDA DAN OLAH RAGA	196.677.386.495	(82.460.492.234)	114.216.894.261	246.870.284.728	(82.367.454.597)	164.502.830.131
66	093	KOMISI BERANTASAN KORUPSI	4.435.355.597	(4.203.290.277)	232.065.320	4.266.426.001	(4.134.838.476)	131.587.525
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	9.594.029.740	(6.850.182.100)	2.743.847.640	7.497.924.955	(5.595.290.375)	1.902.634.580
68	100	KOMISI YUDISIAL	100.987.032	-	#VALUE!	522.029.174	(514.385.636)	7.643.538
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	81.529.802.239	(71.720.001.019)	9.809.801.220	171.500.999.962	(140.130.883.580)	31.370.116.382
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	23.375.013.984	(22.902.059.451)	472.954.533	16.759.004.183	(16.316.546.264)	442.457.919
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	#VALUE!	10.567.651.901	(7.623.831.428)	2.943.820.473
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	9.685.537.677	(1.627.893.151)	8.057.644.526	11.708.907.835	(2.816.123.141)	8.892.784.694
73	107	BADAN SAR NASIONAL	213.233.575.302	(65.346.477.613)	147.887.097.689	219.142.248.577	(58.911.411.450)	160.230.837.127
74	108	KOMISI PERSANGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-	-	-	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-
76	110	OHBUDESHAN REPUBLIK INDONESIA	815.822.395	(509.078.084)	306.744.311	1.256.377.439	(821.304.271)	335.073.168
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	37.195.313.400	(21.855.629.535)	15.339.683.865	61.443.336.957	(31.201.482.699)	30.241.854.258

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 23

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)		31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
			BRUTO	PENYUSUTAN +)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
78	112	BADAN PENGOUSAHAAN KAWASAN PENGANGGARAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	245.153.378,589	(149.836.409,876)	95.316,968,713	200.659.098,517	(203.972.156,865)	(3.113.058,346)
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	683.050,000	(662.621,428)	20.428,572	322.362,443	(107.640,766)	214.721,677
80	114	SEKRETARIAT KABINET	6.261.239,836	(941.919,382)	5.319.320,454	1.324.821,904	(556.352,889)	768.469,015
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	13.564.770,668	(7.234.337,428)	6.330.433,240	6.719.477,637	(693.438,332)	6.026.039,305
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	42.526.514,418	(41.255.719,947)	1.270.794,471	40.326.424,921	(39.422.247,992)	904.176,929
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	218.664.209,118	(193.540.378,614)	25.123.830,504	106.391.060,184	(104.934.932,312)	1.456.127,872
84	118	BADAN PENGOUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	3.547.589,396	(2.287.151,679)	1.260.437,717	3.547.589,396	(1.782.976,591)	1.764.612,805
85	119	BADAN KEAMANNAN LAUT	14.445.733,031	(14.439.506,531)	6.226,500	482.232,826	(473.243,826)	8.989,000
86	120	KEPENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEPARITAMAN	-	-	#VALUE!	-	0	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	46.249,000	(34.303,417)	11.945,583	20.089,000	(10.044,509)	10.044,500
JUMLAH PADA K/L			264.349.885.641,992	(49.961.295.798,219)	214.388.589.843,773	61.455.378.467,188	(20.387.914.329,132)	41.067.464.138,056
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	578.750.594.207,564	(3.586.380,347)	578.747.007.827,217	598.059.673.768,407	(201.034.632.686,026)	397.025.041.082,381
TOTAL			843.100.479.849,556	(49.964.882,178,566)	793.135.597.670,990	659.515.052.235,595	(221.422.547,015,158)	438.092.505.220,437

DAFTAR BMN IDLE

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN IDEL YANG DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA PERIODE TAHUN 2018

No	Jenis BMN		KPNL	Kab./Kota	Lokasi Aset		Luas (M ²)	Perolehan Aset		Akte Penyusutan	Nilai Buku	Ket.
	Kode Barang	Uraian Barang			Jalan	Tanggal		Nilai (Rp)	Nilai (Rp)			
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPNL Lampung	Kab. Lampung Barat	II. Kesuma, Pagar Kru, Pagar Tengah	11. Kesuma, Pagar Kru, Pagar Tengah	615	01/01/2010	145.755.000	-	145.755.000	Hibah ke Pemkab Pagar
2	2010201001	Tanah Bawa	KPNL Palembang	Palembang	II. Seraya Kamboja, Kelurahan 20 III, Kec	II. Seraya Kamboja, Kelurahan 20 III, Kec	4.205	01/01/2013	1.567.177.840	-	1.567.177.840	Hibah ke Pemkab Pagar
4	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPNL Tero	Lampung Timur	II. Jenderal Sudirman No.01	II. Jenderal Sudirman No.01	1.330	01/01/1988	60.500.000	-	60.500.000	PSP pada Kementerian
5	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPNL Tangerang 1	Tangerang	II. Komplet Perumahan Gipsy Pinarjanti	II. Komplet Perumahan Gipsy Pinarjanti	730	01/01/2013	1.611.131.000	-	1.611.131.000	PSP pada Komdis
	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara	KPNL Ambon	Kota Ambon	II. Dr. Muliho	II. Dr. Muliho	531	01/04/1968	356.400.000	-	356.400.000	PSP pada Kementerian
	TOTAL TANAH						7.211		3.740.963.840		3.740.963.840	
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPNL Lampung	Kab. Lampung Barat	II. Kesuma, Pagar Kru, Pagar Tengah	II. Kesuma, Pagar Kru, Pagar Tengah	144	01/01/2010	60.425.000	9.668.000	50.757.000	Hibah ke Pemkab Pagar Barat
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPNL Tero	Lampung Timur	II. Jenderal Sudirman No.01	II. Jenderal Sudirman No.01	360	01/01/1988	82.300.000	23.947.818	58.352.182	PSP pada Kementerian Keuangan
	TOTAL BANGUNAN						504		142.725.000	33.609.818	109.115.182	
	TOTAL						7.715		3.883.688.840	33.609.818	3.850.079.022	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 24.B

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMM IDE YANG DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PENDA
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

KODE	AKUN NEBACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	URAIAN	SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2017			MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
				KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	BERKURANG	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
166128		Isat Ide yang sudah diserahkan ke D/KV									
	TANAH			73,48	44.038.153,51	281,37	7,211	3.740.963,84	347,65	68.401.076,22	
2.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	6.631	2.597.922,60	667	140.326,000	7,298	2.738.248,60	7.298	2.738.248,60	
2.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	13.289	11.596.150,416	3.061	181.481,000	531	356.400,000	15.819	11.421.231,416	
2.01.01.01.003	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	M2	200	1.001.000,000					200	1.001.000,000	
2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	15.329	16.470.008,500	4.948	316.208,000	2,475	1.817.386,000	17.802	14.966.830,500	
2.01.01.04.004	Tanah Bangunan Bali Sidang/Peremuan	M2	1.015	1.380.400,000					1.015	1.380.400,000	
2.01.01.04.018	Tanah Bangunan For Jaga	M2	-	-	6.508	71.980,550			6.508	71.980,550	
2.01.01.99.999	Tanah Perai Lainnya	M2	889	7.477.138,000					889	7.477.138,000	
2.01.02.01.001	Tanah Rawan	M2	9.144	3.407.913,000			4,205	1.567.177,840	4.939	1.840.735,160	
2.01.02.02.002	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	M2	26.990	107.621,000					26.990	107.621,000	
2.01.03.08.003	Tanah untuk Bangunan Peningkatan Rawan dan Podar	M2	-	-	266,196	24.393.891,000			266,196	24.393.891,000	
	GEDUNG DAN BANGUNAN		93	10.628.554,884	30	3.499.828,036	2	142.725,000	121	13.082.652,920	
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Perumahan	Unit	16	6.785,871,041	2	1.728.633,171	2	142.725,000	16	8.371.792,112	
4.01.01.01.002	Bangunan Gedung Kantor Seni Perumahan	Unit	1	26.555,288	1	15.117,825			2	41.673,113	
4.01.01.02.001	Bangunan Gedung Terutup Perumahan	Unit	1	6.200,000	2	59.265,000			3	65.465,000	
4.01.01.04.001	Gedung Instalasi Sunde	Unit	-	-	1	7.562,000			1	7.562,000	
4.01.01.04.002	Gedung Instalasi Pemancar	Unit	2	8.694,000					2	8.694,000	
4.01.01.05.001	Bangunan Gedung Laboratorium Perumahan	Unit	-	-	2	295.543,000			2	295.543,000	
4.01.01.13.001	Gedung For Jaga Perumahan	Unit	-	-	1	101.84,248			1	101.84,248	
4.01.01.13.002	Gedung For Jaga Seni Perumahan	Unit	1	15.271,000	7	245.363,347			8	260.634,347	

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMM IDLE YANG DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PENDA
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

KODE	AKUN NEKADA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	URAIAN	SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2017			MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
				KUANTITAS	MULAI		BEKTAHAR	BEKURANG	KUANTITAS	MULAI	KUANTITAS
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.01.14.001		Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	62.500.000					1	62.500.000
4.01.01.24.001		Bangunan Tempat Sidang/Zoning Plat	Unit	1	109.116.485					1	109.116.485
4.01.02.01.007		Rumah Negara Golongan I tipe C Permanen	Unit	2	118.927.000					2	118.927.000
4.01.02.01.010		Rumah Negara Golongan I tipe D Permanen	Unit	2	120.804.437					2	120.804.437
4.01.02.01.013		Rumah Negara Golongan I tipe E Permanen	Unit	-	-			4		4	173.926.000
4.01.02.02.004		Rumah Negara Golongan II tipe B Permanen	Unit	1	338.711.692					1	338.711.692
4.01.02.02.007		Rumah Negara Golongan II tipe C Semi Permanen	Unit	3	289.995.000			3		6	745.200.591
4.01.02.02.008		Rumah Negara Golongan II tipe C Semi Permanen	Unit	-	-		15.317.000			1	15.317.000
4.01.02.02.010		Rumah Negara Golongan II tipe D Permanen	Unit	52	1.769.175.029					52	1.769.175.029
4.01.02.02.013		Rumah Negara Golongan II tipe E Semi Permanen	Unit	1	77.520.134					1	77.520.134
4.01.02.02.014		Rumah Negara Golongan II tipe E Semi Permanen	Unit	2	80.943.778					2	80.943.778
4.01.02.02.015		Rumah Negara Golongan II tipe E Durat	Unit	2	28.100.000					2	28.100.000
4.01.02.04.001		Mesa/Warna/Bungelaw/Tempat Peristirahatan	Unit	-	-		398.222.854			2	398.222.854
4.01.02.09.999		Rumah Negara Dalam Proses Pembangunan Lainnya	Unit	-	-		3.813.000			1	3.813.000
4.01.02.99.999		Bangunan Gedung Tempat Tempil Lainnya	Unit	3	703.311.000					3	703.311.000
4.04.01.01.009		Tugu/Fandi Basas Administrasi Kepemilikan	Unit	1	43.928.000		91.260.000			4	135.588.000
4.04.01.04.001		Pagar Permanen	Unit	1	39.931.000					1	39.931.000
	TOTAL				34.663.708.402		28.603.709.386		3.883.688.840		79.383.729.148

**UTANG KEPADA PIHAK
KETIGA**

**UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	34021348	406.765.290	-	135.416.000	7.991.268	129.414.237
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	99188138	2.359.840.672	5.361.621.728	4.439.877.981	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6233788892	60.986.545.027	952.515.553	1.075.292.762	1.286.850	43.936.941
4	005	MAHKAMAH AGUNG	2350441285	30.084.076.014	971.400.491	844.110.148	2.819.000	10.718.466
5	006	KÉAKSAAÑ AGUNG	1.32887432	88.528.814.594	419.977.265	-	1.031.673.674	863.250
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	1.07904432	67.213.565.692	63.334.688.539	71.843.462.056	5.541.091.473	7.218.551.826
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	12.099.580.668	12.055.539.377	3.388.124.870	1.348.220.166	-	617.569.067
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	66.046.352.492	51.796.815.809	383.250.000	638.750.000	197.781.298	16.179.293
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	8.488.408.342.644	6.454.161.190.355	1.169.368.774.536	6.007.668.352	25.144.591.430	8.660.097.620
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	105.218.621.484	222.697.385.108	297.076.909.128	293.567.777.305	893.850	41.628.677
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	472.206.297.236	1.486.741.001.607	88.730.205.183	267.311.529.885	2.690.975.505	1.634.231.652
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	247.540.754.802	29.986.921.676	4.991.253.179	4.111.131.341	-	2.178.462.036
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	4.736.812.603	2.518.832.120	19.723.767.548	19.104.459.056	-	11.297.816
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	111.949.273.418	75.690.991.106	10.351.484.291	16.362.159.263	288.913.070	194.956.199
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	446.077.282.624	219.484.907.017	31.947.759.585	52.281.877.089	1.781.300	271.351.355
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	508.819.563.523	1.046.462.808.793	1.405.663.161	1.344.508.821	268.624.707	409.552.089
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	2.247.499.237.957	1.492.156.224.516	115.414.379.017	116.097.544.526	109.374.898	174.220.925

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 25

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	489.786.337.885	1.098.066.469.844	28.527.070.912	27.837.498.982	4.072.446.624	2.732.064.166
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.397.831.467	7.246.549.166	551.319.155.846	497.671.397.490	-	-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.205.917.841	155.625.426	146.742.000	316.883.583	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	48.511.655.011	39.464.238.717	1.663.905.634	1.739.210.196	2.727.272	5.827.150
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.224.707.014	175.323.176.542	2.795.261.502	2.599.217.498	-	775.481
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.152.176.385.294	79.442.197.871	18.512.859.775	21.548.857.458	13.349.261	109.819.154
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	2.132.143.718	2.467.902.405	-	-	257.551.671	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	4.232.554.692	4.648.404.629	-	-	93.258.415	65.968.790
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	384.536.115	281.336.587	-	-	106.603.805	231.503.520
27	040	KEMENTERIAN PARAHUMAS	30.808.255.546	35.640.614.494	4.453.731.971	4.556.975.543	-	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	6.626.846.612	37.109.483	1.627.566.300	3.126.930.400	-	-
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	1.466.618.127.260	819.900.650.121	480.381.269.898	581.809.786.686	7.559.368.598	12.459.754.131
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	7.907.900.743	7.399.751.015	27.580.098.626	24.236.796.334	-	-
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PELINDUNGAN ANAK	7.203.141.374	-	10.283.000	20.566.000	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	2.694.682.148	258.443.937	-	-	12.543.385	-

(dalam Rupiah)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
33	050	BADAN INTELEJEN NEGARA	54.791.945.996	10.783.800.003	473.783.631	853.409.262	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	937.297.137	826.821.026	-	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	1.076.426.760	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	132.577.726.879	67.116.062.498	406.655.330	76.987.320	162.548.572	247.823.811
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	21.715.821.483	13.270.000.291	200.409.583	110.938.166	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN	57.486.088.181	59.165.382.652	428.229.924.943	448.354.593.856	28.517.852	23.040.532
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.771.297.238	2.296.377.533	-	-	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	48.449.639.269	9.424.956.990	10.455.045.823.788	11.660.741.708.117	-	-
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	309.249.930.906	703.448.690.296	20.182.640.866	40.741.580.208	1.142.655.681	24.104.024.451
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	12.307.969.987	3.206.263.638	33.391.680.815	31.863.416.571	-	-
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	461.426.721	405.609.250	1.251.405.956	998.761.290	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENYAMAHAAN MODAL	2.018.700.285	4.665.237.219	1.627.616.429	1.630.840.096	-	-
45	066	BADAN NAKOTIKA NASIONAL	2.647.769.945	3.572.577.082	19.387.500	34.897.500	388.900	19.403.181
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN	4.337.312.149	6.611.032.907	-	-	-	1.182.408
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.716.023.450	1.315.735.102	467.789.000	896.127.517	-	-
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	715.839.862	537.844.410	-	-	-	175.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 25

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

NO	BA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA		
		31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	1.260.040.398	4.245.598.516	-	-	-	-
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	19.325.252.305	8.997.844.787	-	-	1.685.207.180	1.258.616.446
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	540.604.451	650.287.175	1.806.470.877	2.306.117.323	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	144.780.102	990.452.993	3.828.330	13.016.327	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	2.333.816.164	3.429.695.646	361.643.820	361.643.820	717.750.664	103.253.321
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	24.119.681.385	2.784.516.563	107.883.967	109.542.858	-	-
55	081	BADAN PENELITIAN DAN PENELITIAN TEKNOLOGI	26.850.031.216	29.906.879.523	-	-	1.373.004.832	1.109.078.849
56	082	LEMBAGA PENELITIAN DAN ANTARANGSA NASIONAL	10.216.744.310	752.183.933	93.913.250	5.541.508	-	22.778.384
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	3.354.183.940	664.082.523	69.030.970	40.367.507	-	-
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	5.225.574.491	31.594.478	609.000.000	745.500.000	-	-
59	085	BADAN PENGAJAWAS TENAGA NUKLIR	14.916.503	252.273.498	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	542.824.852	234.971.695	2.576.406.102	1.802.497.421	10.564.192	-
61	087	AKSIPI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.458.992.441	549.493.059	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1.961.186.258	2.041.990.119	299.415.347	458.488.712	-	-
63	089	BADAN PENGAJAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2.846.298.102	3.214.411.201	714.393.028	642.930.618	-	-
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.077.868.216	4.370.754.385	1.476.673.228	2.539.337.866	16.128.950	22.600.150
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	29.111.364.834	18.460.027.268	628.236.150	58.586.996	4.076.053	8.727.272

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
66	093	KOHISI PEMERIKSAAN KORUPSI	14.794.536.717	12.043.630.323	29.427.488	27.187.680	-	-
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	4.763.656.901	5.589.408.903	-	-	218.367.763	-
68	100	KOHISI YUDISIAL	129.925.795	131.992.624	10.512.667	72.900.667	6.448.280	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	179.616.426.130	12.311.613.581	197.955.000	318.266.250	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN TENAGA	4.471.661.966	3.674.605.147	17.513.526	72.878.901	-	33.455.722
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	5.042.433.878	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	620.028.446	598.750.160	293.488.828	295.935.518	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	5.300.455.703	1.241.445.972	201.646.100	481.495.900	-	-
74	108	KOHISI BERSANGAN PECAWASAN USAHA	23.903.801	47.694.160	6.709.073.996	11.002.342.566	-	92.672.608
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	16.097.200	-	-	-
76	110	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	375.211.248	329.574.269	-	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	540.454.036	674.790.136	-	-	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PEDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	123.023.117.279	127.672.110.075	1.671.126.470.419	1.169.990.012.803	8.079.500	5.384.500
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	206.869.613	95.048.260	-	-	-	28.341.373
80	114	SEKRETARIAT KABINET	8.147.367.714	4.070.837.821	-	-	385.225.904	422.053.397

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 25

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	3.126.405.160	28.295.180.195	-	-	2.303.213.408	2.988.089.793
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	2.359.492.707	8.692.631.294	14.282.668.912	13.023.514.604	-	-
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	138.167.775.441	132.751.962.826	10.862.669.813	9.472.287.295	3.040.959.468	3.094.746.998
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PEDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	3.052.000	22.343.100	380.174.667	-	-	-
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	451.754.231	3.622.700.001	-	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	2.503.407.505	3.219.400.853	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	831.846.622	2.466.357.607	-	-	-	-
Jumlah pada K/L			17.548.296.494.980	14.934.004.654.454	18.584.991.431.064	18.422.121.457.965	58.508.784.553	71.046.171.406
Jumlah Konsolidasi SPAN			5.065.326.093.892	-	-	-	(5.092.755.757.470)	(54.572.479.892)
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	77.267.818.090.744	29.503.730.518.739	100.581.952.941	126.927.089.727	5.067.125.419.119	20.847.698
TOTAL			99.881.440.679.616	44.438.235.173.193	18.685.573.384.005	18.549.048.517.692	32.878.446.202	16.494.539.212

(dalam Rupiah)

**RINCIAN UTANG JANGKA
PANJANG LUAR NEGERI
PERBANKAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 26.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROGRAM PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2018

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR ¹⁾	UTANG JANGKA PANJANG IDR ¹⁾	TOTAL POSISI UTANG IDR ¹⁾
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
ADB	USD	31	7.320.574.083	12.055.474.253.791	93.953.759.041.842	106.009.233.295.633
AFD	EUR	7	859.364.286	88.358.094.548	14.142.499.635.904	14.230.857.730.452
	USD	3	450.000.000	1.158.480.000.000	5.357.970.000.000	6.516.450.000.000
IBRD	USD	34	13.314.849.390	10.184.862.050.208	182.627.471.966.093	192.812.334.016.300
IDA	SDR	1	26.053.500	91.931.195.842	432.787.075.96	524.718.271.806
JICA	JPY	38	376.509.998.00	7.400.676.044.867	41.965.469.993.903	49.366.146.038.770
KfW	EUR	5	1.100.000.000	-	18.215.725.000.000	18.215.725.000.000
	USD	5	832.649.882	945.480.674.54	11.112.122.271.910	12.057.602.946.455
TOTAL		124		31.925.262.313.800	367.807.804.985.616	399.733.067.299.417

¹⁾ Konversi Kurs Neraca: USD 1 = Rp 14.481,-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROJECT PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITUR
PER 31 DESEMBER 2018

NO	CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR ⁽¹⁾	UTANG JANGKA PANJANG IDR ⁽¹⁾	TOTAL POSISI UTANG IDR ⁽¹⁾
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
2	ABN AMRO ROTTERDAM	EUR	2	6.855.351,82	20.640.529.780,30	92.882.382.520,95	113.522.912.301,25
3	ADB	ADB	6	34.841.819,4	147.870.528.215,85	356.673.859.818,84	504.544.388.034,69
4		SDR	45	354.358.326,05	1.345.592.622.068,44	5.791.194.695.328,34	7.136.787.317.396,78
5		USD	84	1.939.654.472,29	3.728.783.204.548,89	24.359.353.208.610,20	28.088.136.413.159,10
6	AFD	EUR	1	34.496.668,4	60.132.232.178,54	511.123.972.523,96	571.256.204.702,50
7		USD	4	93.380.662,9	144.607.872.985,60	1.207.637.507.410,57	1.352.245.380.396,17
8	AIB	USD	3	73.648.422,6	-	1.066.502.808.973,89	1.066.502.808.973,89
9	AKA	USD	1	29.182.631,0	90.146.299.837,68	332.447.380.107,75	422.593.679.945,43
10	ATRADIUS DBB	EUR	1	24.443.395,6	150.380.530.613,85	254.395.989.838,85	404.776.520.452,70
11		USD	1	6.699.685,30	36.043.690.927,68	60.974.451.901,62	97.018.142.829,30
12	AUSTRALIA	AUD	2	468.954.614,01	99.566.239.065,34	4.689.060.631.882,69	4.788.626.870.948,03
13	B A W A G	EUR	2	14.586.788,8	57.358.251.490,50	184.193.324.986,14	241.553.576.476,63
14	BANCO DE SABADELL	USD	1	38.336.105,0	138.786.284.271,06	416.358.852.233,94	555.145.136.505,00
15	BANK MANDIRI SIN	USD	9	150.676.998,67	879.680.007.996,12	1.302.273.609.744,15	2.181.953.617.740,27
16	BANQUE DE FRANCE	EUR	3	73.832.520,2	334.392.503.083,79	888.255.573.463,76	1.222.648.076.547,55
17	BEVA	EUR	2	7.120.715,86	43.923.077.091,26	73.994.197.371,38	117.917.274.462,64
18		USD	2	32.500.000,0	117.658.125.289,62	352.974.374.710,38	470.632.500.000,00
19	BBVAIT	EUR	1	5.009.375,00	23.701.142.187,50	59.252.855.468,75	82.953.997.656,25
20	BELGIUM	EUR	11	18.962.219,7	77.756.071.307,75	236.253.547.362,92	314.009.618.670,66
21	BLG	EUR	1	19.714.000,0	-	326.458.911.500,00	326.458.911.500,00
22	BNP PARIBAS, PARIS	CHF	1	29.984.349,0	-	441.062.277.702,75	441.062.277.702,75
23		EUR	8	118.911.324,03	851.183.320.091,47	1.117.958.478.014,32	1.969.141.798.105,79
24		GBP	1	4.212.241,72	19.347.636.892,76	58.042.911.413,20	77.390.548.305,96
25		USD	3	41.445.797,2	260.425.267.884,45	339.751.321.658,37	600.176.589.542,82
26	BNP PARIBAS, SPAIN	EUR	1	527.863,68	8.741.290.574,88	-	8.741.290.574,88
27	BOC CAYMAN ISLAND	USD	1	6.302.728,74	45.634.907.586,78	45.634.907.297,16	91.269.814.883,94
28	BOTM SINGAPORE	USD	5	120.690.643,17	540.002.380.291,56	1.207.718.823.453,21	1.747.721.203.744,77
29	BRI SINGAPORE	USD	1	2.851.077,18	11.796.128.183,88	29.490.320.459,70	41.286.448.643,58
30	BRI-CAYMAN ISLAND	EUR	1	14.157.186,1	-	234.439.463.016,27	234.439.463.016,27
31		USD	3	160.774.823,29	968.271.196.140,00	1.359.909.019.922,49	2.328.180.216.062,49
32	BRUNEI INVEST. BANK	USD	2	5.264.026,32	60.982.692.459,48	15.245.672.880,44	76.228.365.139,92
33	CA CIB LONDON BRANCH	USD	1	91.675.850,5	287.206.509.654,00	1.040.351.481.581,31	1.327.557.991.235,31
34	CASA OF FRANCE	EUR	1	91.036.314,0	-	1.507.538.600.761,50	1.507.538.600.761,50
35	CASSA DEPOSITI	USD	2	2.204.854,41	14.161.279.503,78	17.767.217.207,43	31.928.496.711,21
36	CDC	GBP	1	1.589.233,04	10.847.721.047,38	18.350.892.072,94	29.198.613.120,32
37	CEBSCE, SPAIN	USD	1	11.444.216,8	61.568.830.744,49	104.154.873.185,22	165.723.703.929,71
38	CEKIN	USD	1	9.979.000,00	57.802.359.600,00	86.703.539.400,00	144.505.899.000,00
39	CIDA	CAD	24	77.424.202,5	104.505.415.588,65	718.077.958.832,52	822.583.374.421,17
40	CITIBANK LONDON	EUR	3	26.269.855,0	79.094.951.603,68	355.927.280.229,37	435.022.231.833,04
41	COFACE	EUR	1	42.893.895,6	263.891.575.568,97	446.420.613.417,91	710.312.188.986,88
42		USD	1	25.756.714,3	138.568.737.743,05	234.414.243.048,92	372.982.980.791,97
43	CREDIT AGRICOLE CIB	EUR	6	139.482.294,93	984.654.995.010,91	1.323.136.938.456,16	2.309.791.933.467,07
44		USD	2	69.952.121,0	288.926.664.925,05	724.050.000.000,00	1.012.976.664.925,05
45	CREDIT SUISSE	CHF	2	4.688.902,63	28.007.805.292,50	40.964.780.169,14	68.972.585.461,64
46	CZECH EXPORT BANK	USD	1	37.590.154,5	-	544.343.027.314,50	544.343.027.314,50
47	DENMARK	DKK	3	13.168.205,0	8.837.359.622,56	20.368.007.200,79	29.205.366.823,35
48	DEUTSCHE BANK AG, HK	USD	1	676.585,14	9.797.629.412,34	-	9.797.629.412,34
49	DEUTSCHE BANK LONDON	USD	2	24.224.450,1	78.773.455.338,48	272.020.807.283,67	350.794.262.622,15
50	DEUTSCHE BANK MADRID	EUR	2	7.856.047,81	28.562.431.008,57	101.531.756.713,08	130.094.187.721,65
51	DEUTSCHE BANK TOKYO	USD	2	1.974.397,54	28.591.250.776,74	-	28.591.250.776,74
52	DFAB	USD	1	1.544.923,16	8.311.548.558,65	14.060.483.721,31	22.372.032.279,96
53	DRESNER SINGAPORE	EUR	3	271.645,13	3.961.587.717,40	536.787.773,80	4.498.375.491,20
54		USD	1	119.842,14	1.156.956.280,21	578.477.749,12	1.735.434.029,34
55	DE Bank AG Singapore	USD	3	11.802.675,7	70.744.778.735,19	100.169.769.379,80	170.914.548.114,99
56	ECGD	GBP	1	63.904.799,0	436.198.737.338,82	737.909.437.319,32	1.174.108.174.658,14

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROJECT PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITØR
PER 31 DESEMBER 2018

NO	CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR ¹⁾	UTANG JANGKA PANJANG IDR ¹⁾	TOTAL POSISI UTANG IDR ¹⁾
1	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
57		USD	1	12.193.443,4	65.599.603.916,78	110.973.650.248,24	176.573.254.165,02
58	EDC	USD	3	114.623.218,70	365.706.415.224,31	1.294.152.414.770,39	1.659.858.829.994,70
59	EFIC	EUR	3	20.196.299,0	137.792.678.795,91	196.652.984.314,53	334.445.663.110,44
60		USD	20	65.022.562,5	412.719.559.994,08	528.872.168.741,38	941.591.728.735,46
61	EIB	USD	1	9.902.491,31	94.410.005.397,75	48.987.971.262,36	143.397.976.660,11
62	EKF	EUR	1	1.609.452,31	9.901.664.035,54	16.750.463.854,98	26.652.127.890,52
63		USD	1	6.307.720,34	33.934.955.123,69	57.407.143.061,93	91.342.098.185,62
64	EKN	USD	1	3.657.173,71	19.681.869.048,52	33.277.663.445,99	52.959.532.494,51
65	EKSPOFINANS ASA	USD	6	15.132.831,4	85.167.094.004,82	133.971.438.222,63	219.138.532.227,45
66	EKSPOKREDITT AS	USD	1	79.376.470,0	-	1.149.450.662.070,00	1.149.450.662.070,00
67	ERSTE BANK, VIENNA	EUR	2	18.944.480,4	20.481.044.484,02	293.234.816.144,66	313.715.860.628,68
68	EXIM BANK KOREA	KRW	18	325.245.648.180,00	152.690.716.037,20	4.085.260.079.748,20	4.237.950.795.785,40
69		USD	22	1.092.567.435,42	2.669.323.718.484,98	13.152.145.313.846,50	15.821.469.032.331,50
70	EXIM BANK OF CHINA	CNY	1	1.007.554.261,87	327.059.863.778,20	1.798.829.251.054,40	2.125.889.114.832,61
71		USD	16	1.435.640.373,71	1.651.960.645.317,14	19.137.547.606.435,30	20.789.508.251.752,40
72	EXIM BANK TAIPEI	USD	1	913.907,26	4.916.736.840,68	8.317.554.191,38	13.234.291.032,06
73	EXIMBANK HUNGARY	USD	1	26.263.491,9	-	380.321.627.362,38	380.321.627.362,38
74	FIMVERA	EUR	4	500.075,02	2.835.204.733,35	5.445.912.529,42	8.281.117.262,77
75		USD	1	602.106,88	3.239.279.565,62	5.479.830.163,66	8.719.109.729,28
76	GIEK	USD	1	3.578.200,74	19.250.394.084,82	32.565.530.541,50	51.815.924.626,32
77	GOSPODRSTVA	USD	4	6.550.431,59	56.475.881.898,75	38.380.917.956,04	94.856.799.854,79
78	HAPOALIM, ZURICH	USD	1	4.080.000,00	39.388.320.000,00	19.694.160.000,00	59.082.480.000,00
79	HBC LONDON	GBP	4	5.850.041,23	77.008.712.906,34	30.472.749.470,42	107.481.462.376,76
80	IBRD	USD	59	3.786.553.631,54	2.153.966.276.420,95	52.677.116.861.851,90	54.833.083.138.272,80
81	ICO	EUR	9	78.318.097,0	7.327.171.717,22	1.289.600.935.575,33	1.296.928.107.292,54
82		USD	19	119.845.958,93	278.994.704.311,85	1.456.494.626.953,48	1.735.489.331.265,33
83	IDA	SDR	31	743.038.080,67	2.182.820.884.716,85	12.781.988.351.119,40	14.964.809.235.836,20
84		USD	48	124.746.462,33	404.804.833.858,48	1.401.648.687.142,25	1.806.453.521.000,73
85	IDB	ACU	42	195.833.399,28	487.613.251.751,51	2.348.250.203.207,69	2.835.863.454.959,20
86		USD	25	792.241.816,23	1.324.989.086.395,09	10.147.464.654.373,60	11.472.453.740.768,70
87	IFAD	EUR	2	8.495.708,24	8.009.851.716,50	132.676.952.810,84	140.686.804.527,34
88		SDR	8	122.914.664,74	138.150.817.745,42	2.337.354.217.558,12	2.475.505.035.303,54
89		USD	1	2.500.000,00	-	36.202.500.000,00	36.202.500.000,00
90	ING BANK AMSTERDAM	EUR	7	327.124.426,68	915.988.841.561,28	4.501.109.883.152,86	5.417.098.724.714,13
91	JAICAF	JPY	2	6.892.880.000,00	139.244.891.775,50	764.515.758.712,50	903.760.650.488,00
92	JBIC	JPY	12	33.239.684.563,00	1.751.857.220.867,53	2.606.367.344.578,67	4.358.224.565.446,20
93		USD	4	45.591.558,8	313.119.807.535,05	347.091.535.882,18	660.211.363.417,23
94	JICA	JPY	239	1.017.276.854.869,00	13.984.280.551.502,90	119.396.076.002.332,00	133.380.356.553.834,00
95	KFAED	KWD	2	886.800,00	21.128.426.796,00	21.128.426.700,70	42.256.853.496,70
96	KfW	EUR	63	671.048.099,42	1.727.543.361.391,92	9.384.845.402.978,43	11.112.388.764.370,30
97		USD	2	37.027.921,2	213.441.843.528,09	322.759.484.093,16	536.201.327.621,25
98	KOMERCI BANKA	USD	1	4.030.356,60	29.181.796.962,30	29.181.796.962,30	58.363.593.924,60
99	MAFF, JAPAN	JPY	2	4.253.103.675,00	156.430.039.631,43	401.216.074.026,57	557.646.113.657,99
100	METI, GOV. OF JAPAN	JPY	1	5.359.332.998,00	261.059.602.736,33	441.629.879.229,74	702.689.481.966,07
101	MIZUHO SINGAPORE	USD	1	15.199.487,0	48.911.949.487,80	171.191.822.772,87	220.103.772.260,67
102	N I O	EUR	10	69.730.500,5	386.853.218.944,43	767.866.437.869,63	1.154.719.656.814,06
103	NATIXIS BANQUE	EUR	74	442.580.472,41	1.320.648.303.128,39	6.008.373.674.863,10	7.329.021.977.991,50
104	NIB	EUR	3	8.921.050,12	10.730.141.720,70	137.000.218.003,97	147.730.359.724,67
105	NORDEA FINLAND	USD	1	6.345.373,45	22.971.838.775,40	68.915.514.125,09	91.887.352.900,49
106	OEBB	EUR	1	47.432.969,5	291.816.862.065,46	493.661.255.936,95	785.478.118.002,41
107	ONDD	EUR	1	13.189.961,1	81.147.210.976,15	137.275.248.839,95	218.422.459.816,10
108	PT BNI TOKYO BRANCH	USD	3	5.440.000,00	19.694.160.000,00	59.082.480.000,00	78.776.640.000,00
109	PT MANDIRI CAYMAN IS	EUR	2	121.162.023,58	958.500.066.659,05	1.047.912.753.319,86	2.006.412.819.978,91
110		USD	2	283.610.394,74	1.246.191.393.540,78	2.860.770.732.689,16	4.106.962.126.229,94
111	PT MANDIRI HONGKONG	USD	1	21.250.000,0	153.860.625.000,00	153.860.625.000,00	307.721.250.000,00

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROJECT PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2018

NO	CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR ^{*)}	UTANG JANGKA PANJANG IDR ^{*)}	TOTAL POSISI UTANG IDR ^{*)}
1	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7) = 5) + 6)
112	PT. BNI-HONG KONG	USD	5	37.559.697,2	91.973.862.133,83	451.928.113.019,37	543.901.975.153,20
113	PT. BNI-SINGAPORE	GBP	1	1.021.607,73	12.513.176.269,80	6.256.587.951,17	18.769.764.220,97
114		USD	24	198.370.548,47	1.053.383.389.560,41	1.819.220.522.833,66	2.872.603.912.394,07
115	RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	3	14.680.608,6	40.517.868.043,98	202.589.341.213,46	243.107.209.257,44
116	RUSIA FED.	USD	7	209.400.453,75	416.151.509.800,50	2.616.176.460.953,25	3.032.327.970.753,75
117	BACE	EUR	1	365.159,45	2.246.535.875,51	3.800.413.326,62	6.046.949.202,14
118		USD	1	1.710.114,25	9.200.257.201,96	15.563.907.541,91	24.764.164.743,87
119	SERV	CHF	5	43.342.578,3	231.262.559.517,04	406.295.932.808,16	637.558.492.325,21
120	SFD	SAR	5	177.778.950,85	85.583.392.772,24	600.534.912.348,75	686.118.305.120,98
121	SOCIETE GENERALE	EUR	2	5.009.555,00	-	82.956.978,41	82.956.978,41
122	SWISS	CHF	1	2.833.333,30	41.677.624.509,68	-	41.677.624.509,68
123	UBS AG, SINGAPORE	USD	2	41.966.549,5	607.717.604.033,55	-	607.717.604.033,55
124	UNICREDIT BANK AUSTR	EUR	35	177.964.952,67	581.139.505.482,23	2.365.915.619.494,81	2.947.055.124.977,03
125	UNICREDIT MUNICH	EUR	1	4.326.316,25	20.469.347.339,01	51.173.368.181,93	71.642.715.520,94
126	US DEP TREASURY	USD	2	5.129.321,01	37.424.575.773,27	36.853.121.772,54	74.277.697.545,81
127	US EXIM	USD	9	126.176.317,25	575.624.583.077,19	1.251.534.667.020,06	1.827.159.250.097,25
128	USAID	USD	110	201.633.712,26	613.318.943.790,33	2.306.538.843.417,77	2.919.857.787.208,10
129	USDA	USD	10	109.712.291,88	390.810.863.976,75	1.197.932.834.737,53	1.588.743.698.714,28
130	VNESHECONOMBANK	USD	2	99.875.000,0	1.446.289.875.000,00	-	1.446.289.875.000,00
131	Grand Total		1293		36.807.705.465.160,50	346.526.988.201.325,00	403.334.693.686.492,00
132	*) Konversi Kurs Neraca; USD 1 = Rp 14.481,-						

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Unamortized
Discount / Premium Obligasi Negara Rupiah PER 31
DESEMBER 2018**

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	FR0031	15-Nov-20	(168.270.917.000,00)	88.385.985.000,00
2	FR0034	15-Jun-21	(941.746.000,00)	51.737.802.000,00
3	FR0035	15-Jun-22	(7.358.964.000,00)	-
4	FR0037	15-Sep-26	(60.748.763.000,00)	-
5	FR0039	15-Aug-23	(16.454.792.000,00)	-
6	FR0040	15-Sep-25	(11.705.210.000,00)	609.333.102.000,00
7	FR0042	15-Jul-27	(108.291.531.000,00)	48.919.032.000,00
8	FR0043	15-Jul-22	(71.244.181.000,00)	36.970.671.000,00
9	FR0044	15-Sep-24	(617.843.580.000,00)	11.881.409.000,00
10	FR0045	15-May-37	(39.287.747.000,00)	655.998.320.000,00
11	FR0046	15-Jul-23	(797.798.701.000,00)	268.709.145.000,00
12	FR0047	15-Feb-28	(853.077.807.000,00)	32.433.952.000,00
13	FR0050	15-Jul-38	(470.080.715.000,00)	142.485.235.000,00
14	FR0052	15-Aug-30	(297.693.698.000,00)	111.928.972.000,00
15	FR0053	15-Jul-21	(197.914.460.000,00)	991.536.857.000,00
16	FR0054	15-Jul-31	(383.552.731.000,00)	394.520.901.000,00
17	FR0056	15-Sep-26	(797.582.111.000,00)	2.120.925.199.000,00
18	FR0057	15-May-41	(28.582.168.000,00)	1.169.714.224.000,00
19	FR0058	15-Jun-32	(43.632.332.000,00)	3.957.668.048.000,00
20	FR0059	15-May-27	(998.745.865.000,00)	1.209.077.539.000,00
21	FR0061	15-May-22	(254.289.063.000,00)	1.336.468.032.000,00
22	FR0062	15-Apr-42	(374.707.396.000,00)	110.170.285.000,00
23	FR0063	15-May-23	(3.484.225.388.000,00)	140.673.566.000,00
24	FR0064	15-May-28	(4.830.751.605.000,00)	139.172.980.000,00
25	FR0065	15-May-33	(4.137.516.218.000,00)	641.639.105.000,00
26	FR0067	15-Feb-44	(392.405.823.000,00)	1.027.689.567.000,00
27	FR0068	15-Mar-34	(2.129.894.069.000,00)	872.315.946.000,00
28	FR0070	15-Mar-24	(457.614.633.000,00)	1.745.793.795.000,00
29	FR0071	15-Mar-29	(193.930.573.000,00)	3.010.165.206.000,00
30	FR0072	15-May-36	(664.594.048.000,00)	2.797.394.782.000,00
31	FR0073	15-May-31	(196.631.835.000,00)	3.694.440.223.000,00
32	FR0074	15-Aug-32	(343.581.741.000,00)	513.011.016.000,00
33	FR0075	15-May-38	(1.966.671.363.000,00)	1.268.614.589.000,00
34	FR0076	15-May-48	(134.626.823.000,00)	11.286.314.000,00
35	FR0077	15-May-24	(228.594.616.000,00)	40.276.821.000,00
36	FR0078	15-May-29	(273.154.182.000,00)	74.709.344.000,00
Grand Total			(26.033.997.395.000,00)	29.326.047.964.000,00

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Unamortized
Discount / Premium Obligasi Negara Valas PER 31
DESEMBER 2018**

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	RI0035	12-Oct-35	-	638.241.056.000,00
2	RI0037	17-Feb-37	(131.245.719.000,00)	-
3	RI0038	17-Jan-38	(268.220.543.000,00)	-
4	RI0122	8-Jan-22	(14.009.586.000,00)	-
5	RI0123	11-Jan-23	(25.333.239.000,00)	-
6	RI0124	15-Jan-24	(68.065.006.000,00)	-
7	RI0125	15-Jan-25	(92.539.564.000,00)	-
8	RI0126	8-Jan-26	(87.306.574.000,00)	-
9	RI0127	8-Jan-27	(54.712.559.000,00)	-
10	RI0128	11-Jan-28	(64.269.898.000,00)	-
11	RI0142	17-Jan-42	(228.085.213.000,00)	165.138.384.000,00
12	RI0144	15-Jan-44	(255.247.974.000,00)	-
13	RI0145	15-Jan-45	(248.174.156.000,00)	-
14	RI0146	8-Jan-46	(109.380.352.000,00)	-
15	RI0147	8-Jan-47	(142.063.579.000,00)	-
16	RI0148	11-Jan-48	(190.720.343.000,00)	-
17	RI0320	13-Mar-20	(20.958.997.000,00)	-
18	RI0422	25-Apr-22	(50.221.085.000,00)	-
19	RI0423	15-Apr-23	(65.391.027.000,00)	-
20	RI0428	24-Apr-28	(31.585.610.000,00)	-
21	RI0443	15-Apr-43	(234.427.085.000,00)	-
22	RI0521	5-May-21	(87.616.603.000,00)	-
23	RI0727	18-Jul-27	(46.764.185.000,00)	-
24	RI0747	18-Jul-47	(100.210.008.000,00)	-
25	RI1023	17-Oct-23	(28.649.854.000,00)	-
26	RIEUR0425	24-Apr-25	(29.995.899.000,00)	-
27	RIEUR0623	14-Jun-23	(132.183.951.000,00)	-
28	RIEUR0628	14-Jun-28	(260.783.425.000,00)	-
29	RIEUR0721	8-Jul-21	(36.065.876.000,00)	-
30	RIEUR0724	18-Jul-24	(21.895.618.000,00)	-
31	RIEUR0725	30-Jul-25	(181.427.248.000,00)	-
Grand Total			(3.307.550.776.000,00)	803.379.440.000,00

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Unamortized
Discount / Premium Obligasi SBSN Rupiah PER 31
DESEMBER 2018**

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	IFR0006	15-Mar-30	(5.411.444.000,00)	14.624.904.000,00
2	IFR0007	15-Jan-25	(8.932.948.000,00)	10.964.453.000,00
3	IFR0008	15-Mar-20	(513.200.000,00)	473.762.000,00
4	IFR0010	15-Feb-36	(15.932.545.000,00)	267.534.760.000,00
5	PBS002	15-Jan-22	(575.544.125.000,00)	-
6	PBS003	15-Jan-27	(426.800.270.000,00)	2.244.233.000,00
7	PBS004	15-Feb-37	(1.329.182.458.000,00)	-
8	PBS005	15-Apr-43	(1.775.928.688.000,00)	-
9	PBS006	15-Sep-20	(53.334.762.000,00)	361.598.179.000,00
10	PBS007	15-Sep-40	(14.387.962.000,00)	351.937.481.000,00
11	PBS011	15-Aug-23	(4.546.572.000,00)	1.056.141.009.000,00
12	PBS012	15-Nov-31	(63.574.887.000,00)	2.842.526.304.000,00
13	PBS014	15-May-21	(334.686.140.000,00)	48.200.014.000,00
14	PBS015	15-Jul-47	(431.518.786.000,00)	47.672.458.000,00
15	PBS016	15-Mar-20	(145.244.502.000,00)	138.467.859.000,00
16	PBS017	15-Oct-25	(252.777.095.000,00)	-
17	PBS018	15-May-28	(66.034.006.000,00)	-
18	PBS019	15-Sep-23	(55.487.558.000,00)	-
19	PBS020	15-Oct-27	(23.697.662.000,00)	4.486.301.000,00
20	PBS021	15-Nov-26	(4.352.651.000,00)	-
Grand Total			(5.587.888.261.000,00)	5.146.871.717.000,00

IKHTISAR LK UBL

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 27.A

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
PER 31 DESEMBER 2018
(Dalam Ribuan Rupiah)**

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI							Jumlah Realisasi	BIBA	Keterangan	BA
			4	5	6	7	8	9	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14			
1	Badan Ilmu Kesehatan Indonesia (BIKI)	9.500.000		9.363.558			9.363.558	136.442	Bagian subter	007			
2	Badan Aritmia Nasional (BANAS)						0	0	Bagian subter	025			
3	Badan Koordinasi Nasional Perubahan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	279.150		265.597			265.597	13.554	Bagian subter	018			
4	Badan Koordinasi Pemberantasan Penyakit Pesu (BOP4SP4U)	1.337.687		1.337.687			1.337.687	0	Bagian subter	050			
5	Badan Nasional Seretika Profesi (BNSP)	99.844.802	6.335.227	85.097.850	2.758.060		94.191.138	5.653.664	Subter	026			
6	Badan Belkassa Pengelola Masjid Istiqbal (BPPMI)	10.000.000		10.000.000			10.000.000	-	Bagian subter	025			
7	Badan Belkassa Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Sehat						0	0	tidak aktif	033			
8	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	54.419.000	4.406.623	45.901.921	1.815.147		52.123.692	2.295.308	Subter	033			
9	Badan Pengukur Hita Negeri (BPH HIGAS)	183.355.740	38.594.902	123.102.115	4.153.033		165.850.051	17.505.687	Subter	020			
10	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU)						0	0	Bagian subter	025			
11	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)						0	0	tidak aktif	025			
12	Badan Pengembangan Komunitas Nasional KI (BPKN)	12.000.000	7.838.714	3.506.738	171.127		11.516.599	483.401	Subter	090			
13	Badan Pengembangan Keagamaan (BAPK)	1.065.140		1.040.758			1.040.758	24.382	Bagian subter	088			
14	Badan Pengembangan Asuransi Perumahan - PNS (BAPPA (PILUP-PNS))						0	0	Bagian subter	091			
15	Badan Promosi Pariwisata Indonesia						0	0	Bagian subter	040			
16	Badan Restorasi Gambut	234.763.553	11.514.673	187.341.961	12.688.545		211.545.179	23.217.374	Subter	029			
17	Badan Wafat Indonesia (BWI)	6.000.000	3.216.279	2.781.686			5.999.966	34	Bagian subter	025			
18	Dewan Energi Nasional (DEN)	57.116.348	17.979.698	31.907.838	2.114.433		53.001.966	4.114.379	Subter	020			
19	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	21.600.000		18.990.854	232.100		19.223.250	2.376.750	Subter	016			

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
PER 31 DESEMBER 2018
(Dalam Ribuan Rupiah)**

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI							Keterangan	BA
			BELANJA	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	JUMLAH REALISASI	SIBA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	Dewan Kawasan Perdagangan Besar dan Perbaikan Besar Binaan dan Kerjasama Kepulauan Riau	276.522.850	-	-	-	255.921.175	255.921.175	22.601.675	Sukber	999	
21	Dewan Kawasan Bangun (DKB) Kepulauan Riau	1.000.000	-	992.898	34.500	-	992.898	62.600	Bugan sukber	018	
22	Dewan Koperasi Indonesia (DKOPI) Kepulauan Riau	14.325.000	-	13.357.180	-	-	13.357.180	967.820	Bugan sukber	044	
23	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	18.252.213	1.574.285	16.556.998	80.300	-	18.211.583	40.638	Sukber	035	
24	Dewan Pengawasan Nasional (DEPNAS)	1.152.380	-	1.152.134	-	-	1.152.134	246	Bugan sukber	026	
25	Dewan Pers	12.854.274	2.894.165	13.270.219	34.901	-	16.649.780	1.204.982	Sukber	059	
26	Dewan Pertambangan Oron/Derah (DPOO)	2.000.000	-	1.845.522	-	-	1.845.522	154.478	Bugan sukber	010	
27	Dewan Pertambangan Hrodan (Wanamproel)	38.978.810	3.380.485	34.885.104	125.634	-	38.391.223	587.582	Sukber	007	
28	Dewan Bulet Nasional (DBN)	5.436.040	-	5.333.890	-	-	5.333.890	1021.150	Bugan sukber	042	
29	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	10.202.200	248.682	9.499.084	199.918	-	9.947.684	260.023	Sukber	033	
30	Dewan Teknologi/Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKOMNAS)	3.200.000	-	3.154.495	-	-	3.154.495	45.505	Bugan sukber	055	
31	Komis Arsurat Sigel Negara (KASN)	38.268.460	7.288.643	24.634.008	1.231.859	-	33.154.508	5.613.958	Bugan sukber	048	
32	Komis Banfing Merek	722.964	-	474.124	-	-	474.124	248.840	Bugan sukber	013	
33	Komis Banding Paten	447.201	-	439.474	-	-	439.474	7.727	Bugan sukber	013	
34	Komis Informasi Bulet (KIB)	16.750.700	3.369.234	12.801.144	251.723	-	16.422.151	328.551	Sukber	059	
35	Komis Keamanan Hayati Produk Kelangka Genetik (KKHPKGL)	749.390	-	747.202	-	-	747.202	1.883	Bugan sukber	043	
36	Komis Keamanan Republik Indonesia	9530.512	-	8.723.428	-	-	8.723.428	297.073	Bugan sukber	034	
37	Komis Kependidikan Nasional (Konpendisi)	14.214.529	2.825.766	11.718.221	-	-	14.543.987	170.542	Bugan sukber	034	
38	Komis Nasional Anti Kelangkaan Terhadap Perungan (KOMNAS-PEPERULAN)	18.782.982	7.430.983	9.592.321	44.086	-	17.067.396	1.715.592	Bugan sukber	074	
39	Komis Nasional Linjat Ura (KOMNAS-LANSAL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Komis Penanggulangan AIDS Nasional (KPAAN)	2.405.285	-	-	-	-	66.900	2.338.385	Bugan sukber DOK SAKEL	027 026	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audiited)

LAMPIRAN 27.A

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
PER 31 DESEMBER 2018
(Dalam Ribuan Rupiah)**

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI						Jumlah Realisasi	BIBI	Keterangan	BA
			4	5	6	7	8	9				
1												
41	Komite Pengawas Haji Indonesia (KPHI)	3.155.168	3.147.974	3.147.974				3.147.974	7.196	Bugun sabbler	025	
42	Komis Penyairan Indonesia (KPI)	51.981.082	40.167.832	40.167.832				40.167.832	892.974	Sabbler	059	
43	Komis Perindangan Anak Indonesia (KPAI)	15.000.000	1.395.000	1.395.000				1.395.000	109.414	Sabbler	084	
44	Komite Altruisme Nasional (KAN)	16.552.224	14.364.011	14.364.011				14.364.011	2.188.213	Bugun sabbler	035	
45	Komite Honorasi dan Insani Nasional (KENI)	58.500.000	57.953.371	57.953.371				57.953.371	546.629	Bugun sabbler	035	
46	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	33.320.000	2.683.287	2.683.287				2.683.287	4.628.486	Bugun sabbler	012	
47	Komite Kebijakan Pendanaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.000.000	994.071	994.071				994.071	3.929	Sabbler	035	
48	Komite Keuangan Nasional Syariah	18.900.000	16.302.308	16.302.308				16.302.308	1.309.208	Sabbler	035	
49	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KKPPH)	40.000.000	39.587.001	39.587.001				39.587.001	266.438	Bugun sabbler	035	
50	Komite Koordinasi Nasional Percepatan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	564.320	405.418	405.418				405.418	158.902	Bugun sabbler	078	
51	Komite Nasional Keselamatan (KNSKT)	42.756.192	8.371.589	24.175.778				39.338.045	3.418.149	Sabbler	022	
52	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	50.252.258	6.925.350	1.417.438				50.052.364	199.892	Bugun sabbler	092	
53	Komite Pengaruh Kesehatan Berasmi Nasional (KPBKN)	2.226.100	1.835.505	1.835.505				1.835.505	890.595	Bugun sabbler	048	
54	Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KPP2E)									Tidak aktif	035	
55	Komite Privatisasi Perusahaan Perantara (KPP2P)									Tidak aktif	041	
56	Komite Standar Asuransi Pemerintahan (KSAP)	3.544.315	3.520.467	3.520.467				3.520.467	23.848	Sabbler	015	
57	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNUSU)									Tidak aktif	004	
58	Komit Kesehatan Indonesia (KKI)	34.565.651	26.476.535	26.476.535				30.487.705	4.077.946	Sabbler	024	
59	Komis Pegawai Republik Indonesia (KOPRI)	1.200.000	1.197.564	1.197.564				1.197.564	2.436	Bugun sabbler	088	
60	Lembaga Kerja Sama Inpres Nasional (LKS IN)	2.089.598	1.867.205	1.867.205				1.867.205	221.885	Bugun sabbler	026	
61	Lembaga Pertahanan Suku dan Korban (LPSC)	81.411.855	8.296.633	64.620.022				80.692.881	718.774	Sabbler	007	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 27.A

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
PER 31 DESEMBER 2018
(Dalam Ribuan Rupiah)**

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI							Keterangan	BA
			BELANJA OPERASIAL	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	JUMLAH REALISASI	BISA			
1		3	4	5	6	7	8	9	13	14	
62	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	834.240		833.288			833.288	952	Bayan saktier	026	
63	Lembaga Senior Film (LSF)	41.130.449	12.384.933	25.226.858	1.269.343	-	38.881.131	2.249.318	Saktier	023	
64	Pagella Daplin Tenaga Kesehatan (PDTK)						0	0	Tidak aktif	024	
65	Orotra Asahan	5.740.008	1.491.449	204.425			1.693.924	4.044.076	Bayan saktier	019	
66	Sekretariat Pengadilan Pajak	99.336.908	70.917.251	21.451.017	4.254.489		96.622.751	2.714.153	Saktier	015	
67	SKK Migas (Saktier)	1.856.364.45				1.611.276.86	1.611.276.86	245.087.588	saktier	999	
68	SKK Migas (Badan Saktier)						0	0	Badan saktier	999	
69	Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden	45.458.965		37.198.920			37.198.920	8.260.045	Bayan saktier	114	
70	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	41.616.381		4.215.586	583.876		4.799.462	3.6816.919	Bayan saktier	114	
71	Orotra Jasa Keuangan (OJK) (Badan saktier)						0	0	Badan saktier	999	
72	Orotra Jasa Keuangan (OJK) (Saktier)						0	0	Saktier	999	
73	Varisan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan THII						0	0	Badan Saktier	007	
74	Varisan Gedung Veteran RI "Gerba Prima Yudha"						0	0	Badan Saktier	007	
75	Badan Orotra Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	71.500.000	2.597.774	37.669.842	1.523.540		43.791.156	29.708.844	Saktier	040	
76	Orotra Nasional Sempit Karma	41.531.716		3.851.752			3.851.752	301.954	Bayan saktier	019	
77	Badan Orotra Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur								Belum aktif	040	
78	Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan								Belum aktif	082	
79	Korps Tenaga Kesehatan Indonesia	3.810.135.88	282.466.63	1.135.549.08	62.402.772	1.917.755.59	3.368.214.08	41.921.80	Belum aktif	024	
	JUMLAH										

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 27.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
UNTUK PERIODE PELAPORAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2018

(Dalam Ribuan)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN N	PENDAPATAN NON	TOTAL PENDAPATAN 5 = 3 + 4	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN 8 = 6 + 7	SURPLUS (DEFISIT) 9 = 5 - 8	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 - 8	10	11
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	239.407.364	-	239.407.364	245.680.595	-	245.680.595	(6.273.231)	025	Bukan satker
2	Badan Nasional Serifikasi Prokeri (BNSP)	-	-	-	92.428.698	-	92.428.698	(92.428.698)	026	Satker
3	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda	-	-	-	-	-	-	-	033	Belum aktif
4	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	-	575.037	575.037	50.751.406	-	50.751.406	(50.176.369)	033	Satker
5	Badan Pengurir Hiri Migas (BPM MIGAS)	1.415.740.143	4.294.701	1.420.034.844	163.545.466	9.509	163.554.975	1.256.479.868	020	Satker
6	Badan Pengelola Dana Abadi Umum (BP DAU)	-	-	-	-	-	-	-	025	tidak aktif
7	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	14.955.533.31	68.302.769	15.023.836.07	14.802.653.93	59.100	14.802.653.93	221.182.146	025	Bukan satker
8	Badan Pertindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	-	8.685	8.685	11.633.361	59.100	11.692.461	(11.683.776)	090	Satker
9	Badan Pertumbuhan Tabungan Perumahan - PINS (BAPERTALUM-PINS)	487.657.312	-	487.657.312	3.470.351	-	3.470.351	484.186.961	091	Bukan satker
10	Badan Restorasi Gambut	74.686	7.991.975	8.066.661	151.122.035	3.138.897	154.260.932	(146.194.271)		
11	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	6.000.000	237.910	6.237.910	5.999.966	9.229	6.009.195	228.716	025	Bukan satker
12	Dewan Energi Nasional (DEN)	-	449.351	449.351	53.018.257	4.470	53.022.727	(52.573.375)	020	Satker
13	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	-	20.570	20.570	19.557.865	48.752	19.606.616	(19.586.047)	026	Satker
14	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	3.022	304.921	307.943	48.269.038	5.318	48.274.355	(47.966.412)	999	Satker

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 27.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
UNTUK PERIODE PELAPORAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2018

(Dalam Ribuan)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN N	PENDAPATAN NON	TOTAL PENDAPATAN 5 = 3 + 4	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN 8 = 6 + 7	SURPLUS (DEFISIT) 9 = 5 - 8	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 - 8	10	11
15	Dewan Nasional Kawasan Biosani Khusus (DN KEK)	-	9.174	9.174	18.226.176	1.154	18.227.329	(18.218.155)	035	Satker
16	Dewan Pers	499	24.720	25.219	17.136.166	20.738	17.156.904	(17.131.685)	059	Satker
17	Dewan Perwakilan Presiden (Wandipresi)	-	23.177	23.177	39.136.221	9.491	39.145.712	(39.122.535)	007	Satker
18	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	-	334	334	9.959.964	621	9.960.585	(9.960.251)	033	Satker
19	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	264	40.058	40.322	33.850.027	667	33.850.694	(33.810.372)	048	Satker
20	Komisi Informasi Pusat (KIP)	-	71.954	71.954	16.703.141	206.041	16.909.182	(16.837.228)	059	Satker
21	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	26.121	19.755	45.876	50.042.032	114.464	50.156.496	(50.110.620)	059	Satker
22	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	-	218.287	218.287	14.872.944	93.364	14.966.308	(14.748.022)	047	Satker
23	Komite Keuangan Nasional Syariah	1.082	-	1.082	16.786.955	-	16.786.955	(16.785.873)	055	Satker
24	Komite Nasional Kelembutan Transportasi (KNKT)	93.516	1.610	95.126	37.166.334	11	37.166.345	(37.071.219)	022	Satker
25	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	-	8.000	8.000	3.531.492	74	3.531.567	(3.523.567)	015	Satker
26	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	10.786.703	138.813	10.925.516	29.503.950	14.657	29.518.607	(18.593.091)	024	Satker
27	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	50	313.162	313.212	80.396.666	33.713	80.430.379	(80.117.167)	007	Satker
28	Lembaga Sensor Film (LSF)	3.384.177	378.896	3.763.073	42.641.873	92.817	42.734.691	(38.971.617)	023	Satker
29	Majelis Diploin Tenaga Kesehatan (MDTK)	-	-	-	-	-	-	-	024	Tidak aktif
30	Oorita Asahan	-	-	-	-	-	-	-	019	Bukan satker

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 27.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
UNTUK PERIODE PELAPORAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2018

(Dalam Ribuan)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN N	PENDAPATAN NON	TOTAL PENDAPATAN 5 = 3 + 4	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN 8 = 6 + 7	SURPLUS (DEFISIT) 9 = 5 - 8	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Sekretariat Pengabdian Pajak	2.953	187.937	190.889	96.814.548	130.535	96.945.072	(96.754.183)	015	Satker
32	SKK MIGAS (Satker)	3.173.979	15.432.918	18.606.894	1.621.096.467	649.435	1.621.745.902	(1.603.139.008)	999	Satker
33	SKK MIGAS (Bukan Satker)	1.611.292.317	-	1.611.292.317	1.715.701.274	-	1.715.701.274	(104.408.960)	999	Bukan satker
34	Oortus Jasa Keuangan (OJK) (bulan satker)	5.569.587.680	-	5.569.587.680	5.034.453.918	-	5.034.453.918	535.133.762	999	Bukan Satker
35	Oortus Jasa Keuangan (OJK) (satker)	-	2.294.753	2.294.753	50.602.486	-	50.602.486	(48.307.733)	999	Satker
36	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan	115.617.020	-	115.617.020	114.537.123	-	114.537.123	1.079.897	007	Bukan satker
37	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha" Tuban	3.843.516	-	3.843.516	1.660.144	3.577.529	5.237.673	(1.394.157)	007	Bukan satker
38	Badan Oortus Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	7.479	7.695	15.173	40.931.268	20.533	40.951.801	(40.936.628)	040	Satker
	J U M L A H	24.422.233,19	101.387,161	24.523.590,35	24.733.882,14	8.241,108	24.742.123,25	(218.532,897)		

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2018
(Dalam Ribuan Rupiah)**

300	MAHA CIPTA BADAN LAINNYA	ASET LANCAR	DIYERJASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDIRI	KEWAJIBAN JK PANGILANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	KEF
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10=8+9	11	12=10+11	14
1	Badan Asat Zait Nusatir (BAZNAZI)	98.713.939	-	9.915.996	-	108.629.935	3.404.702	-	3.404.702	103.225.233	4.798.432	Bahan Aktif
2	Badan Nusatir Sertifikat Produk (BNSTP)	1.803.918	-	2.914.503	-	4.718.421	-	-	-	-	-	Bahan Aktif
3	Badan Perencana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Seder Sunda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bahan Aktif
4	Badan Perencana Pengembangan Sistem Perpipaan Air Pesisir (BPP-APAS)	773	-	2.378.192	22.266	2.401.227	-	-	-	2.401.227	-	Bahan Aktif
5	Badan Pengajar Hutan Raya (BPH-PRH)	117.934.596	-	233.027.909	1.971.842	372.934.347	13.802.012	-	13.802.012	359.132.335	-	Bahan Aktif
6	Badan Pengelola Danau Alam Uluw (BPAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bahan Aktif
7	Badan Pengelola Kawasan Hijau (BPAH)	72.203.669.270	40.720.915.397	1.011.469	342.975	112.923.829.215	261.781.842	108.774.780.538	119.126.542.378	112.923.829.215	-	Bahan Aktif
8	Badan Pengelola Kawasan Nusatir K. (BPAK)	125.208	-	421.154	246.802	813.264	-	-	-	813.264	-	Bahan Aktif
9	Badan Pengelola Kawasan Nusatir K. (BPAK)- PNS	1.203.433.160	8.814.486.707	-	-	10.199.919.867	-	9.713.712.906	9.713.712.906	484.186.961	10.199.919.867	Bahan Aktif
10	Badan Kemanusiaan Gunung	184.895.992	-	13.780.294	601.792	178.278.082	-	-	-	178.278.082	-	Bahan Aktif
11	Badan Yayasan Pendidikan (BYP)	694.872	564.278	184.087	4.650.492	6.102.685	702.442	4.131.694	4.834.132	1.268.553	6.102.685	Bahan Aktif
12	Dewan Buruh Nusatir (DBN)	205.719	-	3.921.680	42.278	4.129.696	-	-	-	4.129.696	-	Bahan Aktif
13	Dewan Jamban Sosial Nusatir	248.048	-	892.239	-	1.140.287	-	-	-	961.402	1.140.287	Bahan Aktif
14	Dewan Kawasan Perdesaan Bekas dan Perdesaan Bekas Beras dan Kawasan Kependidikan Mula	-	-	428.773.260	3.201.928	432.075.188	-	-	-	432.075.188	-	Bahan Aktif
15	Dewan Nusatir Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	70.919	-	22.918	74.414	171.249	100.867	-	100.867	70.382	171.249	Bahan Aktif
16	Dewan Pura	172.182	-	828.642	83.220	1.084.044	2.299	-	2.299	1.079.981	1.084.044	Bahan Aktif
17	Dewan Pengembangan Perdesaan (DPP)	794.734	-	608.488	80.782	1.484.004	2.812	-	2.812	1.479.192	1.484.004	Bahan Aktif
18	Dewan Sumbat Daya Air Nusatir (DSDAN)	22.517	-	378.297	-	398.814	-	-	-	398.814	-	Bahan Aktif
19	Kantor Lapangan Zait Nusatir (KAN)	214.120	-	7.111.202	429.418	7.754.740	145.692	-	145.692	7.609.048	-	Bahan Aktif
20	Kantor Lapangan Pura (KLP)	124.249	-	525.245	28.144	677.638	13.287	-	13.287	664.351	-	Bahan Aktif
21	Kantor Lapangan Nusatir (KAN)	278.204	-	8.991.827	52.708	9.322.739	79.280	-	79.280	9.243.459	-	Bahan Aktif

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2018
(Dalam Ribuan Rupiah)**

LAMPIRAN 27.C

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	ASSET LANCAR	INVESTASI	ASSET TETAP	ASSET LAINNYA	TOTAL ASSET	KEWAJIBAN JIK PENDUK	KEWAJIBAN JERANSANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS NAMA	KEP
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10=8+9	11	12=10+11	13
23	Kantor Perwakilan Asia Selatan (KPA)	333.590	-	1.144.773	183.383	1.561.747	-	-	1.561.747	1.561.747	1.561.747	Salah
24	Kantor Perwakilan Negara-Singapura	21.518	-	1.823.827	-	1.844.189	243.333	-	1.844.189	1.498.832	1.844.189	Salah
24	Kantor Perwakilan Kalimantan Timur (KPKT)	27.187	-	11.827.040	10.603.134	22.457.361	-	-	22.457.361	22.457.361	22.457.361	Salah
25	Kantor Besar Alumni Pemerintah RI (KBA)	33.503	-	18.334	-	50.939	-	-	50.939	50.939	50.939	Salah
26	Kantor Kedutaan Indonesia (KI)	1.995.724	-	158.124.615	543.266	160.663.605	805.704	-	805.704	158.849.923	160.669.628	Salah
27	Lembaga Swasta (LS)	100.936	-	145.349.238	231.613	145.721.849	240.272	-	240.272	145.371.569	145.371.849	Salah
28	Lembaga Swasta (LS)	1.407.431	-	12.972.519	221.202	14.601.152	20	-	20	14.601.132	14.601.132	Salah
29	Unit Disiplin Temp. Kamtibmas (UDTK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Salah
30	Unit Asahan	1.235.399	-	4.504.964	1.235.478.711	1.241.239.094	85.642.943	-	85.642.943	1.159.596.151	1.241.239.094	Salah
31	Sekretariat Pengadilan Pajak	725.979	-	8.167.099	-	8.902.078	-	-	8.902.078	8.902.078	8.902.078	Salah
32	SKK HKAS/Gasdar 1	3.117.920	-	69.664.433	-48.432.378	121.354.984	12.028.224	-	12.028.224	109.318.760	121.354.984	Salah
33	SKK HKAS/Gasdar 2	2.841.534	-	103.748.124	-	106.589.658	121.593.222	602.892.097	1.004.495.319	892.908.649	1.004.495.319	Salah
34	Unit Jasa Keuangan (UJK) (sisa sasar)	4.115.778.314	-	1.728.522.823	331.373.699	7.795.674.836	244.129.818	1.792.260.112	2.013.389.929	3.782.485.137	7.795.679.026	Salah
35	Unit Jasa Keuangan (UJK) (sisa)	5.328.796	-	98.022.193	28.937.104	130.311.093	-	-	130.311.093	130.311.093	130.311.093	Salah
36	Bayan Pasang Kiri Badan Fasilitas dan Pengerangan T-HH	25.913.947	-	87.931.723	-	113.845.672	13.863.847	16.946.418	32.810.265	91.035.407	123.845.672	Salah
37	Bayan Gedung VVIPs (I) "Garis Pirus Yudha"	3.928.801	-	2.932.433	-	6.891.233	-	-	6.891.233	6.891.233	6.891.233	Salah
38	Badan Central Fasilitas Kesehatan "Pemerita Desa Toba"	10.528	-	3.985.180	-	3.995.709	11.023	-	11.023	3.984.686	3.995.709	Salah
	TOTAL	80.154.624.128	48.803.624.587	2.264.079.624	1.430.816.294	124.154.624.634	814.877.828	121.249.547.408	122.074.524.816	121.249.547.408	124.144.424.436	

DANA KELOLAAN BLU
PUSAT PEMBIAYAAN
PERUMAHAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DANA KELOLAAN BLU PADA PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN
per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Bank	Nama Rekening	No. Rekening	Saldo Dana Bergulir (Rp)
1	BTN	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	01-01-30-000881-3	20.286.930.568,33
2	MANDIRI	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	126-00-0703519-8	3.963.832,70
3	BTN SYARIAH	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	7011001717	6.671.891.834,00
4	BUKOPIN	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	1023938011	1.715.113,56
5	BANK RIAU KEPRI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	10-10-00010-6	67.924.654,45
6	BANK SUMUT	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	350.01.06.0000054	391.763.027,06
7	BANK SUMUT Syariah	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	610.01.06.000008-0	17.195.170,30
8	BANK Kaltim	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	11100244	178.528.937,39
9	BANK Sumsel Babel	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1703000001	3.027.627,49
10	BANK NTT	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	016.01.01.000014-6	870.840.980,24
11	BANK DIY	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1111001471	1.307.233,98
12	BRI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	0193-01-002945-30-6	5.125.775,72
13	BNI	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	2226662828	1.739.010.758,00
14	BRI SYARIAH	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	1030811328	551.583.437,41
15	BPD JATIM	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	11268862	339.861.123,28
16	BPD JATIM Syariah	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	6101003780	6.722.601,47
17	BPD JATENG	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1-034-02557-2	1.828.324,00
18	BPD Papua	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1500105000063	7.937.885,55
19	BPD Kalteng	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	100-002-000003591-0	293.767.010,00
20	BPD Kalsel	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	003.00.04.00848.5	2.497.862,44
21	Bank Syariah Mandiri	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	7122212216	244.105.365,83
22	BPD Nagari (Sumbar)	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	2100.0101.01446-1	267.835.906,25
23	BPD Sulawesi Tenggara	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	001.01.05.500231-0	99.770.546,00
24	Bank Artha Graha	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1075015719	8.947.302.621,37
25	Bank NTB	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	001.21.07109.00-6	115.367.349,50
26	Bank Jabar Banten	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	8000000000003	5.451.896,00
27	Bank Mayora	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	6000486815	19.964.413,53
28	Bank Sumsel Babel Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	801-32-00002	182.285.538,00
29	Bank Jambi	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	3000947217	1.552.003,39
30	Bank Jabar Banten Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	70102000901	109.102.625,93
31	Bank Sulselbar Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	510-052-000000004-7	13.416.368,00
32	Bank Sulut Go	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1601420000036	12.767.378,76
33	Bank Sulselbar	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	130-002-000031853-0	3.980.105,00
34	Bank Kalbar	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1000001909	264.687.887,23
35	Bank Sulteng	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	10101000353	197.690.403,44
36	Bank Bali	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	100121000548	23.551.700,92
37	Bank Kalsel Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	901.00.01.00303.8	32.131.521,85
38	Bank Aceh Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	610 01.01.000007-0	8.875.499,49
39	BTPN	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	5373000630	3.839.595,00
40	Bank Jambi Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	7001170273	11.225.875,07

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DANA KELOLAAN BLU PADA PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN
per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Bank	Nama Rekening	No. Rekening	Saldo Dana Bergulir (Rp)
41	Bank Kaltimarta syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	5100052101	3.442.564,00
42	Bank Jateng Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	5031004003	2.443.991,00
43	Bank DKI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	40001208662	0
44	KEB Hana	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	110121800087211	9.695.280,19
45	BRI Agro	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1001000505407	600.772,62
46	BTN	Pengelolaan Kas	101400224547	200.000.000.000,00
47	BTN	Pengelolaan Kas	101400225218	150.000.000.000,00
Total Saldo Menurut Rekening Koran (1)				392.024.510.965,74
Selisih kas rekening Dana Kelolaan (2)				* (101.403.796,82)
Total Saldo Dana Bergulir Sesuai Rekening Koran (3=1-2)				391.923.107.168,92
Total Aset Lainnya (4=3)				391.923.107.168,92

Keterangan :

Selisih kas rekening dana kelolaan senilai Rp.100.736.544,00 terdiri dari akumulasi dari nilai-nilai berikut ini :

- a. Jasa giro yang belum dipindahkan ke rekening operasional sebesar (Rp457.344.115,60);
- b. Pencairan FLPP pada bank Sulteng yang seharusnya dipindahkan ke dana program sebelum 31 Desember 2018, namun baru dilakukan setelah 31 Desember 2018 sebesar (Rp183.825.000,00);
- c. Biaya-biaya yang muncul pada rekening Dana Kelolaan sebesar Rp395.548,15;
- d. Kesalahan Bank Sultra yang melakukan *double* pendebitan pencairan FLPP dari Dana Kelolaan ke Dana Program sebesar Rp194.250.000,00. Namun telah dikembalikan ke rekening Dana Kelolaan pada tanggal 03 Januari 2019;
- e. Kesalahan Bank NTT yang kelebihan dalam melakukan pendebitan pencairan FLPP dari Dana Kelolaan ke Dana Program sebesar Rp10.000.000,00 serta kekurangan pendebitan sebesar (Rp8.326.000,00) (dua kali kekurangan pendebitan masing-masing sebesar Rp.4.163.000,00), sehingga jika dijumlahkan adalah PPDPP lebih bayar sebesar Rp1.674.000,00. Namun telah dikembalikan ke rekening Dana Kelolaan pada tanggal 03 Januari 2019 (rekening terlampir);
- f. Pembatalan FLPP sebesar Rp381.445.763,00 atas beberapa bank yaitu :
 - a. Bank Jatim sebesar Rp92.625.000,00;
 - b. Bank Sumsel Babel sebesar Rp89.250.000,00;
 - c. Bank Sultra sebesar Rp96.900.000,00;
 - d. Bank Sumsel Babel Syariah sebesar Rp102.670.763,00.
 atas pembatalan beberapa bank tersebut telah dana telah dikembalikan ke rekening Dana Kelolaan PPDPP pada bulan Januari 2019.
- g. Kesalahan pemindahbukuan bank dari rekening operasional bank Sulselbar ke rekening dana kelolaan sebesar (Rp38.000.000,00), dan akan dilakukan pemindahbukuan kembali ke rekening operasional pada Januari 2019;
- h. Serta beberapa kesalahan pencatatan oleh beberapa bank sebesar Rp7,63,00.

**LAPORAN PENILAIAN
KEMBALI BMN**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENILAIAN
KEMBALI BMN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenakan (Penurunan)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	131111	Tanah	353.496.962.605	937.764.422.000	584.267.459.395
2	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	133111	Gedung dan Bangunan	160.568.289.493	201.278.735.000	40.710.445.507
3	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	131111	Tanah	188.409.157.000	1.073.370.956.905	884.961.799.905
4	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	133111	Gedung dan Bangunan	722.151.448.273	826.074.360.556	103.922.912.283
5	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	134111	Jalan dan Jembatan	6.870.699.000	6.870.699.000	-
6	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	134112	Irigasi	3.388.031.928	3.388.031.928	-
7	004	BADAN PENENGAH KEUANGAN	131111	Tanah	1.695.021.150.768	5.393.085.509.622	3.698.064.358.854
8	004	BADAN PENENGAH KEUANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	1.874.796.628.372	2.154.254.141.535	279.457.513.163
9	004	BADAN PENENGAH KEUANGAN	134111	Jalan dan Jembatan	5.045.811.543	16.097.672.416	11.051.860.873
10	004	BADAN PENENGAH KEUANGAN	134112	Irigasi	9.476.290.763	13.090.041.946	3.613.751.183
11	005	MAHKAMAH AGUNG	131111	Tanah	4.674.570.201.359	18.590.587.433.846	13.916.017.232.487
12	005	MAHKAMAH AGUNG	132111	Peralatan dan Mesin	-	-	-
13	005	MAHKAMAH AGUNG	133111	Gedung dan Bangunan	5.376.248.766.311	6.799.952.598.875	1.423.703.832.564
14	005	MAHKAMAH AGUNG	134111	Jalan dan Jembatan	12.416.781.360	14.907.717.902	2.490.936.542
15	005	MAHKAMAH AGUNG	134112	Irigasi	13.505.181.291	11.772.777.772	(1.732.403.519)

L678

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENILAIAN
KEMBALI BMN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

LAMPIRAN 29

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
16	005	MAHKAMAH AGUNG	135121	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
17	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	3.561.671.405.231	15.332.134.078.146	11.770.462.672.915
18	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	4.291.149.722.005	3.856.815.866.992	(434.333.855.013)
19	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	134111	Jalan dan Lembaran	6.103.210.905	14.304.798.924	8.201.588.019
20	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	134112	Irigasi	6.370.747.340	6.512.643.251	141.895.911
21	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	131111	Tanah	87.074.216.197.603	559.533.523.926.383	472.459.307.728.780
22	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	4.082.450.411.857	6.764.028.915.607	2.681.578.503.750
23	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	134111	Jalan dan Lembaran	96.349.832.668	308.350.248.390	212.000.415.722
24	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	134112	Irigasi	59.821.647.437	110.699.422.492	50.877.775.055
25	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	131111	Tanah	2.273.442.063.655	11.229.540.817.000	8.956.098.753.345
26	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	133111	Gedung dan Bangunan	1.855.664.967.978	2.490.376.042.273	634.711.074.295
27	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	134111	Jalan dan Lembaran	31.565.116.287	30.698.010.202	(867.106.085)
28	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	134112	Irigasi	8.464.999.229	11.333.495.877	2.868.496.648
29	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	131111	Tanah	10.987.477.162.452	38.193.366.319.037	27.205.889.156.585

PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENILAIAN
KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenalkan (Penurunan)
30	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	133111	Gedung dan Bangunan	1.896.301.944,078	6.778.444.985,396	4.882.143.041,318
31	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	134111	Jalan dan Jembatan	24.644,803	13.010,308,077	12.985,663,274
32	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	134112	Irigasi	3.649,502	3.649,502	-
33	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	131111	Tanah	294.835.406,765,490	1.466.872.624,813,270	1.172.037,218,047,780
34	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	132111	Peralatan dan Mesin	-	-	-
35	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	133111	Gedung dan Bangunan	23.834.922,396,954	53.769,102,464,825	29.934,180,067,871
36	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	134111	Jalan dan Jembatan	1.350,639,967,619	6.630,977,337,771	5.280,337,370,152
37	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	134112	Irigasi	510,651,937,276	725,342,567,655	214,690,630,379
38	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI	131111	Tanah	12,529,831,996,828	45,705,235,412,953	33,175,403,416,125
39	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI	133111	Gedung dan Bangunan	6,831,801,421,177	8,784,787,551,093	1,952,986,129,916
40	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI	134111	Jalan dan Jembatan	9,591,169,054	23,051,610,929	13,460,441,875
41	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI	134112	Irigasi	7,859,359,770	8,436,254,983	576,895,213
42	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	131111	Tanah	19,215,320,495,376	91,266,532,570,966	72,051,212,075,590
43	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	10,325,780,551,852	14,274,045,587,039	3,948,265,035,187
44	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	134111	Jalan dan Jembatan	134,516,561,740	156,498,749,730	21,982,187,990

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENILAIAN
KEMBALI BMN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
45	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	134112	Irigasi	24.481.215.196	34.065.716.472	9.584.501.276
46	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	131111	Tanah	11.491.409.430.690	80.262.934.985.401	68.771.525.554.711
47	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	133111	Gedung dan Bangunan	3.108.401.959.119	5.441.815.505.120	2.333.413.546.001
48	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	134111	Jalan dan Jembatan	64.254.198.545	167.198.212.875	102.944.014.330
49	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	134112	Irigasi	91.776.340.396	200.632.287.353	108.855.946.957
50	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	131111	Tanah	2.529.491.595.203	8.301.434.578.250	5.771.942.983.047
51	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	133111	Gedung dan Bangunan	975.736.040.859	1.508.529.543.877	532.793.503.018
52	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	134111	Jalan dan Jembatan	1.098.186.672	11.741.052.369	10.642.865.697
53	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	134112	Irigasi	3.542.044.426	36.992.940.225	33.450.895.799
54	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA	131111	Tanah	4.136.646.637.155	18.148.561.938.495	14.011.915.301.340
55	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA	133111	Gedung dan Bangunan	1.581.252.968.553	2.263.967.267.051	682.714.298.498
56	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA	134111	Jalan dan Jembatan	17.854.596.703	33.149.966.410	15.295.369.707
57	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA	134112	Irigasi	50.210.435.328	139.524.730.867	89.314.295.539
58	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	131111	Tanah	65.317.591.521.473	299.375.287.114.701	234.057.695.593.228

PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENILAIAN
KEMBALI BMN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

No	Kode	Uraian	Akrun	Uraian Akrun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
59	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1331111	Gedung dan Bangunan	13.985.852.886.495	15.645.064.896.571	1.659.212.010.076
60	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1341111	Jalan dan Jembatan	43.640.649.187.820	90.306.043.882.437	46.665.394.694.617
61	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1341112	Irigasi	3.661.440.388.442	5.049.634.347.262	1.388.193.958.820
62	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	1311111	Tanah	3.779.503.080.672	16.723.323.479.369	12.943.820.398.697
63	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	1331111	Gedung dan Bangunan	3.319.332.969.982	6.110.778.984.810	2.791.446.014.828
64	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	1341111	Jalan dan Jembatan	31.950.459.157	65.772.207.468	33.821.748.311
65	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	1341112	Irigasi	27.750.933.418	184.580.087.037	156.829.153.619
66	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1311111	Tanah	15.562.732.556.862	64.345.859.548.002	48.783.126.991.140
67	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1331111	Gedung dan Bangunan	9.216.965.190.061	12.213.335.321.685	2.996.370.131.624
68	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1341111	Jalan dan Jembatan	28.874.858.801	82.856.315.164	53.981.456.363
69	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1341112	Irigasi	46.597.448.486	51.009.350.331	4.411.901.845
70	025	KEMENTERIAN AGAMA	1311111	Tanah	15.875.691.355.278	59.803.628.403.868	43.927.937.048.590
71	025	KEMENTERIAN AGAMA	1331111	Gedung dan Bangunan	16.943.686.149.528	23.405.616.807.892	6.461.930.658.364
72	025	KEMENTERIAN AGAMA	1341111	Jalan dan Jembatan	81.906.410.656	118.706.536.480	36.800.125.824
73	025	KEMENTERIAN AGAMA	1341112	Irigasi	112.515.576.131	98.441.840.722	(14.073.735.409)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENILAIAN
KEMBALI BMN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

No	Kode	Uraian	Akrua	Uraian Akrua	Nilai Buku	Nilai Wajar	kenaikan (penurunan)
74	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	1311111	Tanah	1.625.314.695.584	7.599.735.077.026	5.974.420.381.442
75	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	1331111	Gedung dan Bangunan	1.051.854.428.944	1.662.601.755.780	610.747.326.836
76	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	1341111	Jalan dan Jembatan	7.941.484.563	15.896.782.005	7.955.297.442
77	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	1341112	Irigasi	3.067.091.918	5.208.339.035	2.141.247.117
78	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1311111	Tanah	3.549.930.651.797	18.296.772.009.000	14.746.841.357.203
79	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1331111	Gedung dan Bangunan	1.053.463.388.254	1.551.066.993.093	497.603.604.839
80	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1341111	Jalan dan Jembatan	28.007.880.242	45.919.255.805	17.911.375.563
81	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1341112	Irigasi	26.221.498.085	24.393.011.512	(1.828.486.573)
82	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN	1311111	Tanah	2.281.792.425.376	10.465.691.373.399	8.183.898.948.023
83	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN	1331111	Gedung dan Bangunan	1.644.157.168.954	2.682.555.327.185	1.038.398.158.231
84	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN	1341111	Jalan dan Jembatan	43.268.529.911	183.272.755.436	140.004.225.525
85	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN	1341112	Irigasi	37.530.223.745	48.713.660.429	11.183.436.684
86	032	KEMENTERIAN KELOMPOK DAN PERIKAMAN	1311111	Tanah	2.198.015.984.967	13.259.733.497.421	11.061.717.512.454
87	032	KEMENTERIAN KELOMPOK DAN PERIKAMAN	1331111	Gedung dan Bangunan	2.438.742.658.841	3.377.767.414.068	939.024.755.227

PEREMINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENJILAIAN
KEMBALI BMN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

No	Kode	Uraian	Akru	Uraian Akru	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
88	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	134111	Jalan dan Jembatan	571.876.843.800	919.646.254.398	347.769.410.598
89	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	134112	Irigasi	448.121.663.919	926.616.379.121	478.494.715.202
90	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN	131111	Tanah	425.917.910.136.766	1.185.324.067.746.120	759.406.157.609.351
91	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN	132111	Peralatan dan Mesin	-	-	-
92	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN	133111	Gedung dan Bangunan	8.004.949.231.685	14.759.077.821.874	6.754.128.590.189
93	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN	134111	Jalan dan Jembatan	118.693.745.523.128	349.460.998.475.376	230.767.252.952.248
94	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN	134112	Irigasi	93.271.668.618.509	197.837.563.266.216	104.565.894.647.707
95	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK	133111	Gedung dan Bangunan	4.685.407.070	8.610.602.000	3.925.194.930
96	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG	133111	Gedung dan Bangunan	18.232.282.347	28.345.959.000	10.113.676.653
97	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG	133111	Gedung dan Bangunan	149.523.812.503	153.539.561.000	4.015.748.497
98	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	131111	Tanah	1.595.430.929.869	7.000.239.458.875	5.404.808.529.006
99	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	133111	Gedung dan Bangunan	514.621.835.787	773.525.758.399	258.903.922.612
100	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	134111	Jalan dan Jembatan	3.303.630.186	6.587.086.000	3.283.455.814

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENILAIAN
KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
101	040	KEMENTERIAN PARAWISATA	134112	Irigasi	3.998.725.617	4.350.287.961	351.562.344
102	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	131111	Tanah	273.198.404.650	1.307.839.814.000	1.034.641.409.350
103	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	155.723.508.467	281.382.620.000	125.659.111.533
104	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN	131111	Tanah	57.349.103.821.453	334.958.442.295.664	277.609.338.474.211
105	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN	132111	Peralatan dan Mesin	-	-	-
106	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN	133111	Gedung dan Bangunan	16.725.878.933.756	24.911.951.550.450	8.186.072.616.694
107	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN	134111	Jalan dan Embatan	145.511.791.781	468.649.325.982	323.137.534.201
108	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN	134112	Irigasi	97.617.550.496	141.414.583.681	43.797.033.185
109	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA	131111	Tanah	876.321.187.609	2.861.633.061.000	1.985.311.873.391
110	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA	133111	Gedung dan Bangunan	689.737.155.351	853.215.603.674	163.478.448.323
111	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA	134111	Jalan dan Embatan	11.837.228.920	8.879.264.321	(2.957.964.599)
112	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA	134112	Irigasi	2.653.858.162	4.969.259.000	2.315.400.838
113	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	131111	Tanah	294.120.000	1.626.120.000	1.332.000.000
114	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	133111	Gedung dan Bangunan	98.220.800.494	114.657.287.000	16.436.486.506

PEREMINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENILAIAN
KEMBALI BMN
 Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
 2018

No	Kode	Uraian	Akrua	Uraian Akrua	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
115	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR	1331111	Gedung dan Bangunan	27.683.537.081	56.846.985.475	29.163.448.394
116	050	BADANINTELJEN NEGARA	1311111	Tanah	1.327.193.478.205	4.089.638.405.000	2.762.444.926.795
117	050	BADANINTELJEN NEGARA	1331111	Gedung dan Bangunan	372.368.550.323	716.323.590.947	343.955.040.624
118	050	BADANINTELJEN NEGARA	1341111	Jalan dan Jembatan	3.726.455.323	15.295.413.000	11.568.957.677
119	050	BADANINTELJEN NEGARA	1341112	Irigasi	12.609.121.395	12.829.407.328	220.285.933
120	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1311111	Tanah	230.330.789.519	741.572.134.394	511.241.344.875
121	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1331111	Gedung dan Bangunan	412.558.331.125	331.490.397.806	(81.067.933.319)
122	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1341112	Irigasi	2.629.460.550	423.510.000	(2.205.950.550)
123	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1311111	Tanah	752.203.225.466	2.933.561.554.606	2.181.358.329.140
124	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1331111	Gedung dan Bangunan	1.474.084.223.804	1.604.128.397.407	130.044.173.603
125	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1341112	Irigasi	-	-	-
126	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1311111	Tanah	179.478.885.500	1.357.777.745.000	1.178.298.859.500
127	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1331111	Gedung dan Bangunan	108.120.792.906	147.622.414.000	39.501.621.094

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

**PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENILAIAN
KEMBALI BMN**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
128	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	134111	Jalan dan jembatan	370.929.648	51.605.000	(319.324.648)
129	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	134112	Irigasi	310.934.780	2.450.323.000	2.139.388.220
130	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA	131111	Tanah	1.965.854.219.814	8.617.521.411.767	6.651.667.191.953
131	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA	133111	Gedung dan Bangunan	1.043.171.306.057	1.727.634.108.153	684.462.802.096
132	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA	134111	Jalan dan Jembatan	527.305.656	2.899.617.924	2.372.312.268
133	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA	134112	Irigasi	368.753.614	916.207.601	547.453.987
134	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK	131111	Tanah	326.366.052.000	1.842.591.607.000	1.516.225.555.000
135	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK	133111	Gedung dan Bangunan	143.517.156.168	244.930.678.185	101.413.522.017
136	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN	131111	Tanah	996.757.053.210	5.030.125.452.685	4.033.368.399.475
137	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN	133111	Gedung dan Bangunan	516.746.856.214	707.276.543.012	190.529.686.798
138	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN	134111	Jalan dan Jembatan	5.380.568.359	8.822.920.000	3.442.351.641
139	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN	134112	Irigasi	2.047.968.022	2.993.683.522	945.715.500
140	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	43.736.485.617.407	177.981.337.304.528	134.244.851.687.121
141	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	10.253.845.613.566	19.864.615.224.052	9.610.769.610.486

L.687

PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENILAIAN
KEMBALI BMN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
142	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1341111	Jalan dan Jembatan	68.183.261.160	326.731.878.204	258.548.617.044
143	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1341112	Irigasi	44.365.365.531	100.398.587.708	56.033.222.177
144	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1311111	Tanah	519.866.034.658	1.296.263.408.100	776.397.373.442
145	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1331111	Gedung dan Bangunan	404.582.643.428	567.624.652.187	163.042.008.759
146	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1341111	Jalan dan Jembatan	704.015.060	1.872.755.520	1.168.740.460
147	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1341112	Irigasi	3.477.766.254	4.598.218.966	1.120.452.712
148	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1311111	Tanah	101.438.100.000	1.418.300.300.000	1.316.862.200.000
149	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1331111	Gedung dan Bangunan	198.975.570.760	294.920.669.475	95.945.098.715
150	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1341111	Jalan dan Jembatan	1.238.440.520	2.743.866.000	1.505.425.480
151	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1341112	Irigasi	380.613.000	(450.748.276)	(831.361.276)
152	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1311111	Tanah	333.830.014.000	1.992.281.774.000	1.658.451.760.000
153	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1331111	Gedung dan Bangunan	196.970.014.589	279.368.332.388	82.398.317.799
154	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1311111	Tanah	67.931.369.276	219.749.425.000	151.818.055.724
155	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1331111	Gedung dan Bangunan	575.748.738.822	401.190.797.686	(174.557.941.136)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENILAIAN
KEMBALI BPN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
156	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	212.256.636	4.812.541.099	4.600.284.463
157	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	134112	Irigasi	2.607.116.767	2.709.185.000	102.068.233
158	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH	131111	Tanah	123.510.085.888	642.616.544.191	519.106.458.303
159	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH	133111	Gedung dan Bangunan	168.022.062.241	398.247.882.995	230.225.820.754
160	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH	134111	Jalan dan Jembatan	106.156.485.726	113.076.958.945	6.920.473.219
161	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH	134112	Irigasi	18.331.500.238	12.641.733.312	(5.689.766.926)
162	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	131111	Tanah	371.913.603.454	2.034.749.364.958	1.662.835.761.504
163	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	133111	Gedung dan Bangunan	205.432.684.900	473.073.560.150	267.640.875.250
164	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	134111	Jalan dan Jembatan	1.201.527.239	3.097.466.882	1.895.939.643
165	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	134112	Irigasi	1.806.173.017	2.342.554.000	536.380.983
166	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	133111	Gedung dan Bangunan	12.145.847.261	15.518.594.000	3.372.746.739
167	075	BADAN METEOROLOGI KUMAROLOGI DAN	131111	Tanah	840.096.145.812	3.369.020.054.288	2.528.923.908.476
168	075	BADAN METEOROLOGI KUMAROLOGI DAN	133111	Gedung dan Bangunan	857.978.605.785	1.070.806.349.448	212.827.743.663
169	075	BADAN METEOROLOGI KUMAROLOGI DAN	134111	Jalan dan Jembatan	12.419.358.627	28.361.979.243	15.942.620.616

PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENILAIAN
KEMBALI BMN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
170	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN	134112	Irigasi	18.168.138.438	25.521.756.425	7.353.617.987
171	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	131111	Tanah	561.364.640.301	933.221.789.200	371.857.148.899
172	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	133111	Gedung dan Bangunan	386.960.183.513	551.520.313.730	164.560.130.217
173	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	134111	Jalan dan Jembatan	106.197.666	145.702.854	39.505.188
174	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	134112	Irigasi	61.201.243	444.706.877	383.505.634
175	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	131111	Tanah	89.075.216.326	382.975.758.000	293.900.541.674
176	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	133111	Gedung dan Bangunan	206.745.640.723	241.890.332.591	35.144.691.868
177	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	134111	Jalan dan Jembatan	963.605.649	1.944.445.000	980.839.351
178	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI	131111	Tanah	80.978.000.000	325.328.697.000	244.350.697.000
179	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI	133111	Gedung dan Bangunan	64.378.179.376	145.048.765.000	80.670.585.624
180	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI	134111	Jalan dan Jembatan	271.323.100	105.538.000	(165.785.100)
181	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	131111	Tanah	6.315.989.762.206	28.953.383.959.160	22.637.394.196.954
182	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	874.654.226.449	1.050.541.652.143	175.887.425.694
183	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	13.105.490.489	43.113.987.504	30.008.497.015

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENILAIAN
KEMBALU BMN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

No	Kode	Uraian	Akum	Uraian Akum	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
184	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	134112	Irigasi	8.430.486.600	48.848.335.139	40.417.848.539
185	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	131111	Tanah	1.788.972.615.313	13.752.630.052.088	11.963.657.436.775
186	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	349.902.451.263	655.189.208.855	305.286.757.592
187	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	430.235.452	1.576.632.000	1.146.396.548
188	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	134112	Irigasi	805.876.717	6.389.163.284	5.583.286.567
189	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN	131111	Tanah	840.070.594.665	4.226.181.592.399	3.386.110.997.734
190	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN	133111	Gedung dan Bangunan	616.415.077.982	1.184.076.464.572	567.661.386.590
191	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN	134111	Jalan dan Jembatan	4.525.332.733	960.588.460	(3.564.744.273)
192	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN	134112	Irigasi	1.395.964.308	2.018.258.441	622.294.133
193	082	LEMBAGA PENELITIAN DAN ANTARIKSA	131111	Tanah	277.041.192.102	1.719.731.549.050	1.442.690.356.948
194	082	LEMBAGA PENELITIAN DAN ANTARIKSA	133111	Gedung dan Bangunan	178.649.349.585	285.993.655.485	107.344.305.900
195	082	LEMBAGA PENELITIAN DAN ANTARIKSA	134111	Jalan dan Jembatan	4.948.465.624	80.776.729.862	75.828.264.238
196	082	LEMBAGA PENELITIAN DAN ANTARIKSA	134112	Irigasi	1.866.296.205	9.031.938.504	7.165.642.299
197	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	131111	Tanah	27.226.540.000	184.060.499.000	156.833.959.000

PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENILAIAN
KEMBALI BMN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

No	Kode	Uraian	Akrun	Uraian Akrun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenakan (Penurunan)
198	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1331111	Gedung dan Bangunan	78.837.489.880	85.746.541.902	6.909.052.022
199	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1341111	Jalan dan Jembatan	-	330.598.000	330.598.000
200	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1341112	Irigasi	891.945.721	1.152.643.336	260.697.615
201	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1311111	Tanah	11.250.883.554	117.417.760.000	106.166.876.446
202	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1331111	Gedung dan Bangunan	15.251.924.936	12.276.559.000	(2.975.365.936)
203	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1341111	Jalan dan Jembatan	64.240.704	1.785.327.375	1.721.086.671
204	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1341112	Irigasi	172.906.562	69.425.000	(103.481.562)
205	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	1311111	Tanah	511.094.866.313	3.843.818.261.578	3.332.723.395.265
206	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	1331111	Gedung dan Bangunan	371.369.675.481	637.952.793.869	266.583.118.388
207	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	1341111	Jalan dan Jembatan	-	1.030.559.855	1.030.559.855
208	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	1341112	Irigasi	678.261.480	1.429.756.000	751.494.520
209	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1311111	Tanah	215.715.732.396	851.899.807.600	636.184.075.204
210	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1331111	Gedung dan Bangunan	151.594.804.778	232.358.159.478	80.763.354.700
211	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1341111	Jalan dan Jembatan	27.363.083	345.580.000	318.216.917
212	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1341112	Irigasi	484.068.434	38.417.000	(445.651.434)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENILAIAN
KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenakan (Penurunan)
213	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1311111	Tanah	410.917.619.119	2.497.383.834.883	2.086.466.215.764
214	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1331111	Gedung dan Bangunan	538.262.661.694	783.849.869.950	245.587.208.256
215	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1341111	Jalan dan Jembatan	4.168.687.575	5.848.581.063	1.679.893.488
216	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1341112	Irigasi	4.024.239.491	1.897.122.540	(2.127.116.951)
217	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN	1311111	Tanah	1.036.506.333.558	4.163.558.623.060	3.127.052.289.502
218	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN	1331111	Gedung dan Bangunan	661.158.588.941	847.210.614.507	186.052.025.566
219	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN	1341111	Jalan dan Jembatan	963.553.051	4.619.316.000	3.655.762.949
220	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN	1341112	Irigasi	466.713.747	1.493.538.000	1.026.824.253
221	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1311111	Tanah	633.535.700.530	2.272.940.570.000	1.639.404.869.470
222	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1331111	Gedung dan Bangunan	689.579.967.617	758.589.045.665	69.009.078.048
223	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1341111	Jalan dan Jembatan	-	1.538.255.000	1.538.255.000
224	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1341112	Irigasi	218.249.393	492.838.000	274.588.607
225	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1311111	Tanah	323.999.844.370	726.213.007.000	402.213.162.680
226	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1331111	Gedung dan Bangunan	288.609.240.683	442.281.186.208	153.671.945.525

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENILAIAN
KEMBALI BMN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
227	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	134111	Jalan dan jembatan	495.832.400	1.925.143.000	1.429.310.600
228	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	134112	Irigasi	462.486.770	117.026.048	(345.460.722)
229	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	131111	Tanah	453.822.133.060	1.675.136.125.000	1.221.313.991.940
230	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	133111	Gedung dan Bangunan	55.621.420.649	116.711.404.000	61.089.983.351
231	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	131111	Tanah	43.062.623.473	159.548.294.240	116.485.670.767
232	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	133111	Gedung dan Bangunan	62.826.697.107	32.230.960.000	(30.595.737.107)
233	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	134111	Jalan dan jembatan	-	-	-
234	100	KOMISI YUDISIAL RI	131111	Tanah	47.188.389.400	226.330.350.000	179.141.960.600
235	100	KOMISI YUDISIAL RI	133111	Gedung dan Bangunan	60.054.484.279	92.661.850.000	32.607.365.721
236	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN	131111	Tanah	113.143.589.776	182.973.800.000	69.830.210.224
237	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	473.459.968.867	460.029.978.384	(13.429.990.483)
238	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN	131111	Tanah	52.430.088.081	246.024.658.000	193.594.569.919
239	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN	133111	Gedung dan Bangunan	63.999.258.500	79.403.633.885	15.404.375.385

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENILAIAN
KEMBALI BMN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
240	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN	134111	Jalan dan jembatan	807.966.517	2.909.568.000	2.101.601.483
241	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN	134112	Irigasi	510.587.130	481.135.500	(29.451.630)
242	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	131111	Tanah	3.520.341.767.980	3.742.852.311.479	222.510.543.499
243	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	133111	Gedung dan Bangunan	1.660.810.665	2.919.793.000	1.258.982.335
244	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	134111	Jalan dan jembatan	764.820.281	548.106.000	(216.714.281)
245	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	134112	Irigasi	301.364.763.624	294.277.229.000	(7.087.534.624)
246	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN	131111	Tanah	116.490.960.000	349.428.991.000	232.938.031.000
247	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN	133111	Gedung dan Bangunan	149.053.959.869	142.071.926.692	(6.982.033.177)
248	107	BADAN SAR NASIONAL	131111	Tanah	286.800.624.150	889.771.723.070	602.971.098.920
249	107	BADAN SAR NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	584.687.968.683	686.733.752.496	102.045.783.813
250	107	BADAN SAR NASIONAL	134111	Jalan dan jembatan	14.527.090.096	16.998.807.326	2.471.717.230
251	107	BADAN SAR NASIONAL	134112	Irigasi	4.485.367.883	55.719.985	(4.429.647.898)
252	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA	131111	Tanah	279.884.701.713	420.463.767.000	140.579.065.287
253	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA	133111	Gedung dan Bangunan	14.073.715.015	11.115.606.700	(2.958.108.315)

PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENJILAIAN
KEMBALI BMN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenalkan (Penurunan)
254	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA	134111	Jalan dan Jembatan	7.817.903.471	11.486.751.560	3.668.848.089
255	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA	134112	Irigasi	4.387.676.062	9.946.811.000	5.559.134.938
256	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	7.315.400.000	25.847.516.000	18.532.116.000
257	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	133111	Gedung dan Bangunan	26.376.688.774	24.796.788.988	(1.579.899.786)
258	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	134111	Jalan dan Jembatan	12.445.391.323	48.058.780.983	35.613.389.660
259	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	134112	Irigasi	5.075.125.783	10.612.438.000	5.537.312.217
260	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN	131111	Tanah	21.633.142.599.667	43.003.077.624.800	21.369.935.025.133
261	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	725.778.421.702	5.557.820.976.949	4.832.042.555.247
262	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN	134111	Jalan dan Jembatan	2.826.686.384.296	2.747.139.740.827	(79.546.643.469)
263	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN	134112	Irigasi	575.270.377.239	1.506.371.674.536	931.101.297.297
264	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	102.077.219.984	68.810.456.000	(33.266.763.984)
265	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN	134111	Jalan dan Jembatan	19.152.757.691	3.443.482.953	(15.709.274.738)
266	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN	134112	Irigasi	5.075.264.576	6.451.330.650	1.376.066.074

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENILAIAN
KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun (Penurunan)	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan
267	115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	131111	Tanah	33.770.762	2.380.363.000	2.346.592.238
269	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK	133111	Gedung dan Bangunan	291.696.947.415	714.726.036.267	423.029.088.852
270	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK	134111	Jalan dan Jembatan	1.602.452.486	6.272.931.800	4.670.479.314
271	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK IN	134112	Irigasi	1.198.116.255	2.922.785.050	1.724.668.795
273	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI	133111	Gedung dan Bangunan	284.339.595.394	1.103.252.155.449	818.912.560.055
274	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI	134111	Jalan dan Jembatan	803.346.542	19.114.653.350	18.311.306.808
275	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK	134112	Irigasi	441.720.286	5.012.994.348	4.571.274.062
277	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN	133111	Gedung dan Bangunan	1.401.642.014.095	1.167.793.341.587	(233.848.672.508)
278	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN	134111	Jalan dan Jembatan	261.503.604.172	269.738.291.210	8.234.687.038
279	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN	134112	Irigasi	6.834.499.603	13.601.084.710	6.766.585.107

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA LAPORAN PENILAIAN
KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenakan (Penurunan)
281	119	BADAN KEAMANAN LAUT	1331111	Gedung dan Bangunan	41.742.413.903	27.095.537.933	(14.646.875.970)
282	119	BADAN KEAMANAN LAUT	1341111	Jalan dan Jembatan	23.955.189.401	26.950.086.000	2.994.896.599
283	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	1311111	Tanah	4.016.775.779	24.738.816.000	20.722.040.221
284	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	1341111	Jalan dan Jembatan	81.002.315.725	109.260.965.000	28.258.649.275
TOTAL					1.587.484.548.294.830	5.669.450.660.565.540	4.081.966.112.270.710

TRANSFER KELUAR
TRANSFER MASUK

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK
PER 31 DESEMBER 2018

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Transfer Masuk	Transfer Keluar	Saldo
1	001	MAJELIS PERMUSYAWAKATAN RAKYAT	-	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	50.135.279.963	(50.092.679.963)	42.600.000
4	005	MAKAMAH AGUNG	193.518.080.170	(117.703.852.634)	75.814.227.536
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	892.889.397.606	(869.573.277.719)	3.316.119.887
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	4.941.651.542.183	(2.396.588.408.863)	2.545.063.133.320
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	108.013.871.047	(108.013.871.047)	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	184.619.586.714	(67.448.064.635)	97.171.522.079
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	82.374.986.663.427	(82.480.188.410.439)	(105.201.747.012)
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.603.177.212.936	(1.640.530.373.151)	(37.353.160.215)
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	6.979.801.983.378	(7.010.187.583.298)	(30.385.599.920)
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	115.263.799.193	(112.611.349.311)	2.652.449.882
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	34.354.284.869	(141.363.900.965)	(107.009.616.096)
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	224.355.766.401	(281.402.826.389)	(57.047.059.988)
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	19.665.458.385.093	(19.225.756.089.663)	439.702.295.430
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	37.419.248.552	(37.380.066.526)	39.182.026
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.006.637.949.688	(1.023.072.029.762)	(16.434.080.074)
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	1.529.374.169.991	(1.157.911.277.676)	371.462.892.315
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	67.883.925.193	(67.883.925.193)	-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.006.075.155.871	(1.006.407.534.481)	(332.378.610)
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	237.682.126.019	(218.540.577.516)	19.141.548.503
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	680.936.906.608	(697.325.661.910)	(16.388.755.302)
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN URM DAN PERUMAHAN RAKYAT	129.293.662.132.855	(87.108.218.846.937)	42.185.443.285.918
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	56.720.230	-	56.720.230
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	48.765.896.898	(48.765.896.898)	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	-	-	-
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	417.404.767.104	(437.581.285.498)	(20.176.518.394)
30	044	KEMENTERIAN KOOPERASI DAN UKM	(1.196.255.687)	3.610.886.000	2.414.630.313
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENYAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	(2.414.630.313)	(2.414.630.313)
33	050	BADAN INTELEJEN NEGARA	19.430.410	(19.430.410)	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	138.384.772.105	(143.171.234.877)	(4.786.462.772)
37	055	KEMENTERIAN PRIBAPPENAS	1.984.540.573	(2.057.723.042)	(73.182.469)
38	056	KEMENTERIAN AGRIKULTUR DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	268.804.159.079	(252.646.364.393)	16.157.794.686
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	(1.755.225.000)	(1.755.225.000)
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	42.130.046.922	(743.774.384.502)	(701.644.337.580)
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	40.519.146.472.019	(40.502.029.092.225)	17.117.379.794
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	63.466.268.776	(46.105.236.362)	17.361.032.414
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	469.269.797.130	(310.561.855.471)	158.707.941.659
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	469.840.806.273	(476.566.205.095)	(6.725.398.822)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 30

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK
PER 31 DESEMBER 2018

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Transfer Masuk	Transfer Keluar	Saldo
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	137.947.715.407	(137.939.671.907)	8.043.500
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	130.779.299.400	(140.953.240.525)	9.826.058.875
50	076	KOMISI PEMIDAHAN UPIH	763.882.661.415	(763.882.661.415)	-
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	(556.344.547)	(556.344.547)
52	078	RUSAK LAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	113.463.048.054	(113.455.523.084)	7.524.970
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	157.251.440.478	(102.707.000.224)	54.544.440.254
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	135.057.237.127	(134.904.313.044)	152.924.083
55	081	BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	25.517.988.319	(25.307.238.319)	210.750.000
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	56.067.077.929	(55.715.342.822)	351.735.107
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	118.993.150	(407.133.720)	(288.140.570)
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	(1.691.809.600)	(1.691.809.600)
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	(682.659.450)	(682.659.450)
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	135.200.000	(135.200.000)	-
61	087	ARSP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	25.589.907.494	(971.833.494)	24.618.074.000
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	28.859.538.069	(28.861.543.513)	(4.005.444)
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	21.631.808.124	(21.631.808.124)	-
64	090	KEPENTERIAN PERDAGANGAN	38.611.025.260	(38.611.025.260)	-
65	092	KEPENTERIAN PERUDA DAN OLAH RAGA	605.847.422	(10.532.347.422)	(9.926.500.000)
66	093	KOMISI PERBERANTASAN KORUPSI	459.278.900	(58.484.502.900)	(58.025.224.000)
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	1.174.124.296	(2.069.184.196)	(895.059.900)
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	(4.058.755.289.527)	(4.058.755.289.527)
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	558.124.699.240	(559.437.083.717)	(1.312.384.477)
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWAIAN USAHA	2.118.143.077	-	2.118.143.077
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	30.195.000	-	30.195.000
76	110	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	(834.097.489)	(834.097.489)
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	39.188.990.112	(13.336.908.514)	25.852.081.598
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	(32.987.680)	(32.987.680)
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	2.629.175.480	(2.629.175.480)	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	32.808.996.762	(65.451.585.512)	(32.642.588.750)
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	1.474.524.462.879	(779.605.137.675)	694.919.325.204
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN	-	-	-
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-
86	120	KEPENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMAKMURAHAN	8.080.417.367	-	8.080.417.367
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-
Jumlah Pada KL			297.420.632.160.350	(255.921.624.935.324)	41.499.007.225.026
88	999	BENDAHARA UPIH NEGARA	196.917.881.391	(41.152.763.503.447)	(41.349.681.384.838)
Penyesuaian Konsolidasi LKPP			-	-	-
TOTAL KONSOLIDASIAN TK YM LKPP			297.617.550.041.741	(297.074.388.438.771)	543.161.662.970

L 701

LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
SBN

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN	706
II. STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUN 2018	710
III. KEBUTUHAN PEMBIAYAAN	711
A. Bunga Utang Surat Berharga Negara	711
B. Surat Berharga Negara Neto	712
IV. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2018.....	714
A. Penerbitan/ Penjualan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Rupiah	714
B. Penerbitan dan Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	715
C. Penerbitan dan Pelunasan SUN dalam Valuta Asing	719
D. Pelaksanaan Debt Switching/ Buyback	719
V. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2018.....	720
VI. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2018	729
I. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah	729
II. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valuta Asing (Valas)	749
III. Mutasi Surat Berharga Negara Selama Tahun 2018	751
VII. PENUTUP	753

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sbn Neto Tahun 2018	713
Tabel 2. Seri SPN Yang Diterbitkan Tahun 2018	716
Tabel 3. Daftar Pelunasan SPN Tahun 2018	718
Tabel 4. Realisasi Penerbitan SUN Valas 1 Januari s.d. 31 Desember 2018	719
Tabel 5. Realisasi Pelaksanaan <i>Debtswitching</i> Tahun 2018	720
Tabel 6. Rincian Realisasi Pelaksanaan <i>Debtswitching</i> Tahun 2018	720
Tabel 7. Daftar Penerbitan SPNS Tahun 2018	723
Tabel 8. Daftar Pelunasan SPNS Tahun 2018	724
Tabel 9. Daftar Penerbitan PBS Tahun 2018	725
Tabel 10. Daftar Penerbitan Sukuk Ritel Dan Sukuk Tabungan Tahun 2018	728
Tabel 11. Daftar Penerbitan SBSN Valas Tahun 2018	728
Tabel 12. Daftar Pelunasan SBSN Jangka Panjang Tahun 2018	728
Tabel 13. Daftar Pelunasan SBSN Valas Tahun 2018	728
Tabel 14. <i>Outstanding</i> SBN Seri Fixed Rate (FR) Per 31 Desember 2018	730
Tabel 15. Data <i>Outstanding</i> ORI Per 31 Desember 2018	733
Tabel 16. Nilai dan Jatuh Tempo SBN Seri Variable Rate (VR) Per 31 Desember 2018	735
Tabel 17. Struktur <i>Outstanding</i> SPN Per 31 Desember 2018	736
Tabel 18. Struktur <i>Outstanding</i> Surat Utang Pemerintah	738
Tabel 19. Struktur <i>Outstanding</i> SBSN Seri IFR Per 31 Desember 2018	739
Tabel 20. Struktur <i>Outstanding</i> SBSN Seri PBS Per 31 Desember 2018	741
Tabel 21. Struktur <i>Outstanding</i> SBSN Seri SR dan ST Per 31 Desember 2018	744
Tabel 22. Struktur <i>Outstanding</i> SBSN Seri SPNS Per 31 Desember 2018	745
Tabel 23. Struktur <i>Outstanding</i> SBSN Seri SDHI Per 31 Desember 2018	747
Tabel 24. <i>Outstanding</i> dan Jatuh Tempo SBN Valas Per 31 Desember 2018	750
Tabel 25. Mutasi Principle <i>Outstanding</i> SBN Tahun 2018	752

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data Outstanding ON Rupiah Seri FR Tgl 31 Desember 2018 731
Grafik 2. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah Seri FR..... 731
Grafik 3. Struktur Outstanding ORI Per 31 Desember 2018 733
Grafik 4. Struktur Jatuh Tempo ORI Per 31 Desember 2018..... 734
Grafik 5. Struktur Outstanding VR Per 31 Desember 2018..... 735
Grafik 6. Struktur Jatuh Tempo VR Per 31 Desember 2018..... 735
Grafik 7. Struktur Outstanding SPN Per 31 Desember 2018 737
Grafik 8. Struktur Jatuh Tempo SPN Per 31 Desember 2018 737
Grafik 9. Struktur Outstanding Surat Utang Pemerintah Per 31 Desember 2018 .. 738
Grafik 10. Struktur Jatuh Tempo Surat Utang Pemerintah Per 31 Desember 2018 739
Grafik 11. Struktur Outstanding SBSN Seri IFR Per 31 Desember 2018..... 740
Grafik 12. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri IFR Per 31 Desember 2018..... 740
Grafik 13. Struktur Outstanding SBSN Seri PBS Per 31 Desember 2018 742
Grafik 14. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri PBS Per 31 Desember 2018 742
Grafik 15. Struktur Outstanding SBSN Seri SR Per 31 Desember 2018..... 744
Grafik 16. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri SR Per 31 Desember 2018 745
Grafik 17. Struktur Outstanding SBSN Seri SPN-S Per 31 Desember 2018 746
Grafik 18. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri SPN-S Per 31 Desember 2018..... 746
Grafik 19. Struktur Outstanding SBSN Seri SDHI Per 31 Desember 2018 748
Grafik 20. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri SDHI Per 31 Desember 2018..... 749

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Di samping itu laporan ini juga disusun agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara tahun 2018. Seluruh angka dan data yang digunakan dalam laporan ini meliputi realisasi selama satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2018 dan berakhir 31 Desember 2018, kecuali secara jelas dinyatakan lain.

Dalam peta kebijakan fiskal, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) termasuk dalam sumber pembiayaan dan pengelolaan portofolio utang negara. Pemerintah pusat berwenang menerbitkan Surat Berharga Negara setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka APBN.

Tujuan penerbitan Surat Berharga Negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara adalah untuk:

- a. Membiayai defisit APBN;
- b. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran (*cash-mismatch*);
- c. Mengelola portofolio utang Negara.

Adapun manfaat penerbitan SBN adalah sebagai berikut:

a. Sebagai Instrumen Fiskal

Penerbitan SBN diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal.

b. Sebagai Instrumen Investasi

SBN menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar dan memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi portofolionya guna memperkecil risiko investasi.

c. Sebagai Instrumen Pasar Keuangan

Surat Berharga Negara dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan dapat dijadikan acuan (*benchmark*) bagi penentuan nilai instrumen pasar keuangan lainnya.

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pengertian Surat Utang Negara (SUN) menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Sedangkan pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Secara umum, SUN dapat dibagi dalam dua jenis yaitu Surat Perbendaharaan Negara (*Treasury Bills*) dan Obligasi Negara (*Treasury Bonds*). Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Sedangkan Obligasi Negara (ON) adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/atau pembayaran bunga secara diskonto.

Menurut denominasi mata uangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan ON berdenominasi valuta asing. Menurut jenis tingkat bunganya, ON dapat dikelompokkan ke dalam ON dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dan ON dengan tingkat bunga mengambang (*floating rate*).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, SUN diterbitkan dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat (*scriptless*). SUN dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum di lembar sertifikat tersebut, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi pemilik sehingga setiap orang yang menguasainya portofolionya guna memperkecil risiko investasi adalah pemilik yang sah. Surat Utang Negara tanpa warkat (*scriptless*) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik (*book entry system*). Dalam hal SUN tanpa warkat maka bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik. Cara pencatatan secara elektronik dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (*registry*) dan penyelesaian transaksi perdagangan SUN di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) menyatakan bahwa SUN dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat diperdagangkan (*tradable*) atau bentuk yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan pertama kali diperdagangkan oleh Pemerintah di pasar primer/ pasar perdana. Perdagangan SUN selanjutnya ada di pasar sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan atau di luar bursa (*over the counter/ OTC*). SUN yang tidak diperdagangkan adalah SUN yang tidak diperjualbelikan di Pasar Sekunder dan biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun

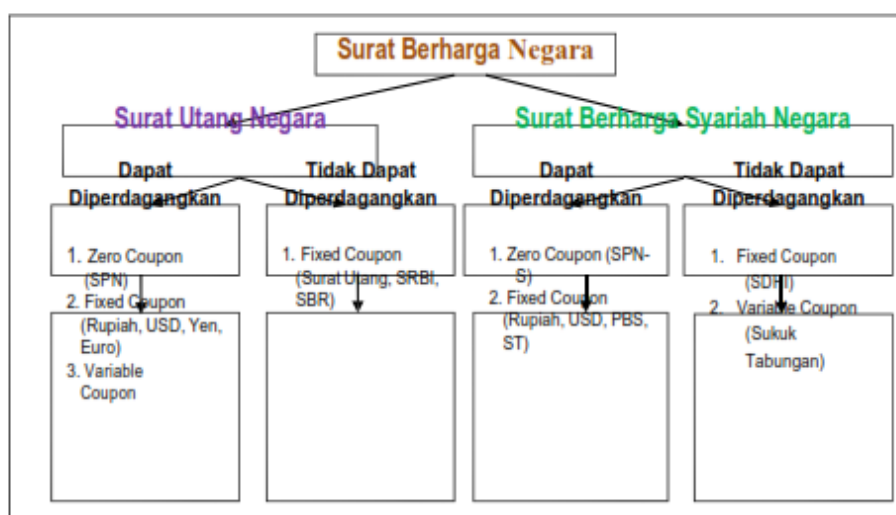
asing, yang berminat untuk memiliki SUN sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya.

SBSN adalah SBN yang berbasis syariah. Pemerintah mulai menerbitkannya pada tahun 2008 dengan denominasi rupiah yakni setelah disahkannya UU No 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Berdasarkan metode penerbitan, SBSN tidak berbeda dengan SBN konvensional yaitu SUN. Yang membedakannya dengan SUN adalah SBSN bukan surat pernyataan utang sehingga dalam penerbitannya dibutuhkan *underlying transaction* dan *underlying asset* sebagai obyek transaksi. Adapun tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah seperti proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.

Penerbitan SBSN dilakukan melalui SPV (*Special Purpose Vehicle*) sebagai penerbit. Yang bertindak sebagai SPV adalah Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN), yang berbadan hukum. PP SBSN didirikan berdasarkan Undang-Undang SBSN untuk penerbitan SBSN. Ketentuan pendirian dan pengelolaan PP SBSN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

Adapun struktur Surat Berharga Negara secara umum pada tahun 2018 dapat digambarkan pada gambar 1.

Gambar 1. Struktur Surat Berharga Negara



II. STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUN 2018

Kebijakan umum yang digunakan dalam penyusunan strategi pembiayaan tahunan sebagai berikut¹:

1. Mengendalikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada level yang aman dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali;
2. Meningkatkan optimalisasi biaya utang untuk mendukung kesinambungan fiskal melalui optimalisasi pinjaman tunai, peningkatan kinerja kegiatan - kegiatan yang dibiayai dengan utang dan *shortening duration* portofolio utang;
3. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap;
4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik;
5. Melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang;
6. Meningkatkan koordinasi pengelolaan likuiditas dengan para pemangku kepentingan dalam kerangka *Asset Liability Management (ALM)*;
7. Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan SBN berbasis proyek yang mendukung program pembangunan nasional;
8. Mengoptimalkan pinjaman tunai untuk meningkatkan fleksibilitas pemenuhan pembiayaan melalui utang dengan mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman dan biaya serta risiko pinjaman;
9. Meningkatkan fungsi hubungan investor dan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas unit hubungan investor dan kelembagaan, peningkatan kualitas strategi komunikasi dengan investor dan kelembagaan, serta penyusunan basis data target investor;

¹ Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 52/PR/2018 Tentang Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2018

10. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berinvestasi di SBN melalui pengembangan jalur distribusi SBN Ritel secara online.

III. KEBUTUHAN PEMBIAYAAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN tahun 2018 sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2017 sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2018, kebutuhan penerbitan/pengadaan utang neto sebesar Rp399.219,4 miliar terdiri atas SBN neto sebesar Rp383.184,8 miliar dan Pinjaman neto sebesar Rp16.034,6 miliar. Dengan memperhatikan utang jatuh tempo sebesar Rp400.467,4 miliar yang terdiri dari Surat Berharga Negara sebesar Rp323.963,0 miliar dan Pinjaman sebesar Rp76.504,3 miliar maka kebutuhan pembiayaan melalui utang sebesar Rp799.686,7 miliar. Kebutuhan tersebut akan dipenuhi melalui (a) penerbitan SBN sebesar Rp707.147,8 miliar, pembiayaan melalui penerbitan SBN dimaksud tidak termasuk penerbitan SPN dan SPNS yang akan jatuh tempo pada tahun 2018 sebesar Rp91.830,0 miliar sehingga penerbitan SBN Bruto sebesar Rp798.977,8 miliar (b) pembiayaan melalui penarikan Pinjaman sebesar Rp92.538,9 miliar. Pembiayaan tunai bersumber dari penerbitan SBN yang mengutamakan penerbitan melalui lelang dan pengadaan pinjaman program/tunai yang bersumber dari mitra pembangunan (*development partners*) multilateral dan bilateral.

Kebutuhan APBN atas pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) ditetapkan dalam dua pos yaitu pos Bunga Utang SBN dan Kewajiban Biaya Lain (SUN dan SBSN) serta Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri yang menjadi fungsi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang (999.01).

A. Bunga Utang Surat Berharga Negara

Berdasarkan APBN TA 2018, total pagu Bunga dan Biaya Utang SBN ditetapkan sebesar Rp245.099.773.630.000,- sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SBN adalah sebesar Rp238.043.106.503.289,-, atau sebesar 97,12%.

B. Surat Berharga Negara Neto

Pengertian Surat Berharga Neto berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2015 adalah selisih antara jumlah penerbitan dan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (sukuk).

Mengingat target pembiayaan SBN dalam APBN ditetapkan dalam bentuk penerbitan SBN Neto, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SBN dan jumlah pembelian kembali. Untuk Tahun 2018, sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, target SBN neto adalah sebesar Rp414.520.685.000.000,-. Realisasi SBN neto Tahun 2018 adalah sebesar Rp358.398.491.544.783,-. Adapun rincian SBN neto disajikan pada Tabel 1.

Realisasi SBN neto Tahun 2018 memperhitungkan penerimaan dan pembayaran bunga utang diterima di muka sebesar minus Rp5.456.769.040,- dengan rincian penerimaan sebesar Rp7.180.920.271.401,- dan pembayaran sebesar Rp7.186.377.040.441,-. Perhitungan ini sebagai konsekuensi dari kode akun penerimaan dan pembayaran bunga utang diterima di muka yang dikelompokkan dalam kelompok akun pembiayaan (kelompok akun 71 dan 72).

Penerbitan SBN Tahun 2018 terdiri atas penerbitan SBN domestik maupun valas, baik SUN maupun SBSN. Penerbitan SBN Tahun 2018 adalah sebesar Rp782.313.242.271.401,- dengan rincian penerbitan SBN domestik sebesar Rp641.581.192.271.401,- dan penerbitan SBN valas adalah sebesar USD2.850.000.000,- dan EUR1.000.000.000,- serta JPY100.000.000.000,- atau setara dengan Rp140.732.050.000.000,-.

Atas penerbitan SBN Tahun 2018, terdapat penerbitan valas yang diperuntukkan untuk pembiayaan di tahun 2019 (*prefunding*) sebesar USD3.000.000.000,-, sehingga atas penerbitan tersebut tidak dicatat sebagai penerimaan pembiayaan di Tahun 2018. Adapun selama Tahun 2018 Transaksi *Debt switching* SBN tercatat sebesar Rp515.000.000.000,-.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 31

Pelunasan SBN Tahun 2018 adalah sebesar Rp423.914.750.726.618,- dengan rincian pelunasan SBN domestik Rp381.055.706.226.618,- dan pelunasan SBN valas Rp42.859.044.500.000,-.

Tabel 1. SBN Neto Tahun 2018

NO	AKUN	URAIAN	TOTAL
Penerimaan Pembiayaan			
1	711411	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	143,050,000,000,000
2	711421	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri	320,274,306,000,000
3	711422	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	5,446,859,375,000
4	711441	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang	96,009,377,647,000
5	711442	Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	1,734,060,896,401
6	711451	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SPN Syariah	51,660,000,000,000
7	711461	Penerimaan SBSN - pembiayaan proyek melalui SBSN PBS	22,526,566,353,000
8	711611	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas	97,677,550,000,000
9	711612	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas	-
10	711641	Penerimaan Penerbitan SBSN-Valas	42,854,500,000,000
11	711642	Penerimaan Imbalan Dibayar di muka SBSN-Valas	-
Total			782,313,242,271,461
Pengeluaran Pembiayaan			
1	721311	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	170,257,290,000,000
2	721321	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri	63,430,091,186,177
3	721322	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri - Pembelian Kembali	515,000,000,000
4	721324	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	5,546,137,909,040
5	721341	Pengeluaran pelunasan SBSN-jk Panjang	73,566,946,000,000
6	721343	Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	1,640,239,131,401
7	721351	Pengeluaran Pelunasan SPN-S	46,070,000,000,000
8	721511	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas	26,241,044,500,000
9	721512	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Valas melalui Pembelian Kembali	-
10	721513	Pembayaran utang bunga Obligasi Valas	-
11	721541	Pengeluaran pelunasan SBSN valas Jangka panjang	14,616,000,000,000
Total			423,914,750,726,618
SBN Neto			358,398,491,544,78

IV. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2018

Target SBN Netto 2018 adalah sebesar Rp383.184,8 miliar disebabkan adanya kebijakan pelebaran defisit. Jumlah nominal tersebut merupakan target neto yaitu jumlah penerbitan SUN setelah dikurangi dengan jumlah SUN yang jatuh tempo maupun dibeli kembali oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo (*buyback*).

A. Penerbitan/Penjualan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Rupiah

Obligasi Negara (ON) dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada Tahun 2018 dilelang sebanyak 23 kali, yang dilakukan sejak bulan Januari sampai Desember 2018.

Penerbitan ON dalam denominasi Rupiah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: (i) struktur jatuh tempo utang yang sudah ada, (ii) pengembangan pasar sekunder SUN, dan (iii) *cost of borrowing*.

Penerbitan ON secara reguler dilakukan dengan cara lelang di pasar perdana. Pada setiap penerbitan di Tahun 2018, jumlah penawaran yang dimenangkan lebih rendah dari jumlah penawaran yang masuk. Total nilai nominal ON dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp319.759.306.000.000,- dengan rincian:

- a. ON dalam negeri sebesar Rp287.130.000.000.000,-; dan
- b. ON ritel yang terdiri dari penerbitan Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI) dan *Saving Bond Retail* (SBR) adalah sebesar Rp32.629.306.000.000,-.

Penjualan ON Ritel yang dilakukan sebanyak 3 kali penerbitan, yaitu seri ORI014, SBR003 dan SBR004, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperluas basis investor SUN dan diterbitkan dengan metode *bookbuilding* melalui Agen Penjual yang diseleksi oleh Panitia Seleksi. *Bookbuilding* adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (*yield*) penawaran pembelian, dan dicatat dalam *book order* oleh *investment bank* yang bertindak sebagai *bookrunner*.

Pelunasan Obligasi Negara Rupiah yang jatuh tempo pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp83.438.091.186.177,- yang terdiri dari:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 31

- a. ON bunga tetap (*Fixed Rate*) sebesar Rp 34.281.933.186.177,-;
- b. ON Ritel yang terdiri dari pelunasan ORI dan SBR sebesar Rp31.237.880.000.000,-;
dan
- c. ON bunga variable (*Variable Rate*) sebesar Rp 17.918.278.000.000,-.

B. Penerbitan dan Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN adalah Surat Utang Negara yang jangka waktu jatuh temponya sampai dengan 12 bulan. Pada Tahun 2018, Pemerintah menerbitkan 33 seri SPN, dengan total penerbitan SPN mencapai Rp 143.050.000.000.000,- dengan rincian sebagaimana dalam tabel

2.

Tabel 2. Seri SPN yang diterbitkan Tahun 2018

NO	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri SPN	Mata Uang	Nominal
1	1/5/2018	4/4/2018	SPN03180404	IDR	5.000.000.000.000.00
2	1/5/2018	1/4/2019	SPN12190104	IDR	5.000.000.000.000.00
3	1/18/2018	4/17/2018	SPN03180417	IDR	5.000.000.000.000.00
4	1/18/2018	1/4/2019	SPN12190104	IDR	5.000.000.000.000.00
5	2/1/2018	4/30/2018	SPN03180430	IDR	5.000.000.000.000.00
6	2/1/2018	1/31/2019	SPN12190131	IDR	5.000.000.000.000.00
7	2/15/2018	5/14/2018	SPN03180514	IDR	5.000.000.000.000.00
8	2/15/2018	2/14/2019	SPN12190214	IDR	5.000.000.000.000.00
9	3/1/2018	5/28/2018	SPN03180528	IDR	5.000.000.000.000.00
10	3/1/2018	2/14/2019	SPN12190214	IDR	5.000.000.000.000.00
11	3/15/2018	6/14/2018	SPN03180614	IDR	5.000.000.000.000.00
12	3/15/2018	3/14/2019	SPN12190314	IDR	5.000.000.000.000.00
13	3/29/2018	6/28/2018	SPN03180628	IDR	5.000.000.000.000.00
14	3/29/2018	3/14/2019	SPN12190314	IDR	4.050.000.000.000.00
15	4/12/2018	7/12/2018	SPN12180712	IDR	4.200.000.000.000.00
16	4/12/2018	4/11/2019	SPN12190411	IDR	4.450.000.000.000.00
17	5/24/2018	8/23/2018	SPN03180823	IDR	2.200.000.000.000.00
18	5/24/2018	2/14/2019	SPN12190214	IDR	3.300.000.000.000.00
19	6/7/2018	9/6/2018	SPN12180906	IDR	3.000.000.000.000.00
20	6/7/2018	6/6/2019	SPN12190606	IDR	700.000.000.000.00
21	7/5/2018	10/4/2018	SPN12181004	IDR	3.000.000.000.000.00
22	7/5/2018	7/4/2019	SPN12190704	IDR	3.500.000.000.000.00
23	7/19/2018	10/18/2018	SPN03181018	IDR	3.000.000.000.000.00
24	7/19/2018	4/11/2019	SPN12190411	IDR	3.000.000.000.000.00
25	8/2/2018	11/1/2018	SPN03181101	IDR	3.000.000.000.000.00
26	8/2/2018	8/1/2019	SPN12190801	IDR	3.000.000.000.000.00
27	8/16/2018	11/15/2018	SPN12181115	IDR	3.000.000.000.000.00
28	8/16/2018	6/6/2019	SPN12190606	IDR	3.000.000.000.000.00
29	8/30/2018	11/29/2018	SPN03181129	IDR	3.000.000.000.000.00
30	8/30/2018	8/29/2019	SPN12190829	IDR	1.100.000.000.000.00
31	9/14/2018	12/13/2018	SPN03181213	IDR	3.000.000.000.000.00
32	9/14/2018	9/13/2019	SPN12190913	IDR	4.500.000.000.000.00
33	9/27/2018	12/26/2018	SPN03181226	IDR	3.000.000.000.000.00
34	9/27/2018	6/6/2019	SPN12190606	IDR	1.500.000.000.000.00
35	10/11/2018	1/10/2019	SPN03190110	IDR	3.000.000.000.000.00
36	10/11/2018	10/10/2019	SPN12191010	IDR	3.000.000.000.000.00
37	10/25/2018	1/24/2019	SPN03190124	IDR	2.600.000.000.000.00
38	10/25/2018	7/4/2019	SPN12190704	IDR	3.000.000.000.000.00
39	11/8/2018	7/7/2019	SPN03190207	IDR	1.000.000.000.000.00
40	11/8/2018	11/7/2019	SPN12191107	IDR	1.000.000.000.000.00
41	11/23/2018	2/22/2019	SPN03190222	IDR	1.000.000.000.000.00
42	11/23/2018	8/1/2019	SPN12190801	IDR	950.000.000.000.00
Total SPN (IDR)					143.050.000.000.000.00

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

SPN yang merupakan utang jangka pendek diterbitkan tanpa kupon. Pada saat penerbitan akan terdapat diskonto, yaitu selisih nilai penjualan dengan nilai nominal, yang akan diamortisasi sampai dengan jatuh tempo seri SPN tersebut.

Pelunasan SPN selama Tahun 2018 adalah sebesar Rp170.257.290.000.000,- dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Daftar Pelunasan SPN Tahun 2018

No.	Seri	Tanggal Valuta	Jumlah (IDR)
1	SPN12180104	03/01/2018	5,300,000,000,000.00
2	SPN12180104	03/01/2018	5,000,000,000,000.00
3	SPN12180104	03/01/2018	500,000,000,000.00
4	SPN12180104	03/01/2018	5,000,000,000,000.00
5	SPN03180118	17/01/2018	3,650,000,000,000.00
6	SPN12180201	31/01/2018	4,900,000,000,000.00
7	SPN12180201	31/01/2018	9,450,000,000,000.00
8	SPN12180201	31/01/2018	5,000,000,000,000.00
9	SPN12180201	31/01/2018	1,600,000,000,000.00
10	SPN03180215	2/14/2018	2,600,000,000,000.00
11	SPN12180301	2/28/2018	1,800,000,000,000.00
12	SPN12180301	2/28/2018	900,000,000,000.00
13	SPN12180301	2/28/2018	3,000,000,000,000.00
14	SPN12180301	2/28/2018	4,050,000,000,000.00
15	SPNNT20180328	3/27/2018	10,107,290,000,000.00
16	SPN03180404	4/3/2018	5,000,000,000,000.00
17	SPN12180412	4/11/2018	3,050,000,000,000.00
18	SPN12180412	4/11/2018	5,000,000,000,000.00
19	SPN03180417	4/16/2018	5,000,000,000,000.00
20	SPN03180430	4/27/2018	5,000,000,000,000.00
21	SPN12180511	5/11/2018	3,000,000,000,000.00
22	SPN12180511	5/11/2018	2,300,000,000,000.00
23	SPN03180514	5/14/2018	5,000,000,000,000.00
24	SPN03180528	5/28/2018	5,000,000,000,000.00
25	SPN12180607	6/7/2018	3,000,000,000,000.00
26	SPN12180607	6/7/2018	2,550,000,000,000.00
27	SPN03180614	6/8/2018	5,000,000,000,000.00
28	SPN03180628	6/28/2018	5,000,000,000,000.00
29	SPN12180712	7/12/2018	4,200,000,000,000.00
30	SPN12180712	7/12/2018	3,100,000,000,000.00
31	SPN12180809	8/9/2018	3,000,000,000,000.00
32	SPN12180809	8/9/2018	5,000,000,000,000.00
33	SPN03180823	8/23/2018	2,200,000,000,000.00
34	SPN12180906	9/6/2018	3,000,000,000,000.00
35	SPN12180906	9/6/2018	3,000,000,000,000.00
36	SPN12181004	10/4/2018	3,000,000,000,000.00
37	SPN12181004	10/4/2018	3,000,000,000,000.00
38	SPN12181004	10/4/2018	3,000,000,000,000.00
39	SPN03181018	10/18/2018	3,000,000,000,000.00
40	SPN03181101	11/1/2018	3,000,000,000,000.00
41	SPN12181115	11/15/2018	3,000,000,000,000.00
42	SPN12181115	11/15/2018	3,000,000,000,000.00
43	SPN03181129	11/29/2018	3,000,000,000,000.00
44	SPN03181213	12/13/2018	3,000,000,000,000.00
45	SPN03181226	12/26/2018	3,000,000,000,000.00
TOTAL (IDR)			170,257,290,000,000.00

C. Penerbitan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Valuta Asing

Total penerbitan Obligasi Negara (ON) Valas adalah sebesar USD5.000.000.000,- dan EUR1.000.000.000,- serta JPY100.000.000.000,- atau setara dengan Rp97.877.550.000.000,- yang terdiri atas *International Bonds* sebesar USD1.000.000.000,- dan EUR1.000.000.000,- serta JPY100.000.000.000,-.

Data penerbitan SUN dalam valuta asing pada Tahun 2018, disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Penerbitan Obligasi Negara Valas 1 Januari s.d. 31 Desember 2018

No	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Nominal
1	12/11/2017	1/11/2023	RI0123	USD	1,000,000,000.00
2	12/11/2017	1/11/2028	RI0128	USD	1,250,000,000.00
3	12/11/2017	1/11/2048	RI0148	USD	1,750,000,000.00
4	4/24/2018	4/24/2028	RI0428	USD	1,000,000,000.00
5	4/24/2018	4/24/2025	RIEUR0425	EUR	1,000,000,000.00
6	5/31/2018	5/31/2021	RIJPY0521	JPY	49,000,000,000.00
7	5/31/2018	5/31/2023	RIJPY0523	JPY	39,000,000,000.00
8	5/31/2018	5/30/2025	RIJPY0525	JPY	3,500,000,000.00
9	5/31/2018	5/31/2028	RIJPY0528	JPY	8,500,000,000.00

Catatan: Seri RI0123, RI0128 dan RI0148 diterbitkan dalam rangka *prefunding* pembiayaan Tahun Anggaran 2018

D. Pelaksanaan *Debt Switching/Buyback*

Dalam rangka mengurangi risiko pelunasan pokok SUN, Pemerintah berupaya untuk menata ulang struktur jatuh tempo SUN melalui *debt switching*, yaitu dengan membeli seri-seri ON jangka pendek dan menengah serta menukarkannya dengan Obligasi Negara yang mempunyai jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Kondisi ini juga memberikan keleluasaan bagi Pemerintah untuk menerbitkan instrumen SUN jangka pendek, baik berupa Obligasi Negara Ritel maupun Surat Perbendaharaan Negara.

Total pelaksanaan *debt switching* pada Tahun 2018 adalah sebanyak 1 kali dengan jumlah nominal SUN yang ditukar sebesar Rp515.000.000.000,- sebagaimana disajikan dalam tabel 5.

Tabel 5. Realisasi pelaksanaan *Debtswitching* Tahun 2018

No.	Tanggal <i>Debtswitch</i>	Penawaran	Dimenangkan
1	18-Okt-18	Rp1.050.000.000.000,-	Rp515.000.000.000,-

Rincian pelaksanaan *debt switching* pada Tahun 2018 disajikan dalam tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Rincian realisasi pelaksanaan *Debtswitching* Tahun 2018 (dalam juta rupiah)

Date		Source					Destination			
Debt Switch	Settlement	Series	Maturity	Coupon	Offer	Alloted	Series	Maturity	Coupon	Alloted
18-Oct-18	23-Oct-18	FR0069	15-04-2019	7.87500%	647,000	515,000	FR0077	15-05-2024	8.12500%	445,000
		FR0036	15-09-2019	11.50000%	110,000	-	FR0078	15-05-2029	8.25000%	70,000
		FR0031	15-11-2020	11.00000%	293,000	-				
Total Debt Switch 2018					1,050,000	515,000				515,000

Di samping *debtswitching*, Pemerintah juga dapat melakukan kegiatan *cash buyback* yang merupakan salah satu strategi pengelolaan portofolio SUN dengan cara melaksanakan pembelian ON yang belum jatuh tempo di pasar sekunder. ON yang telah dibeli tersebut kemudian dinyatakan lunas atau jatuh tempo, sehingga mengurangi total *outstanding* SUN. Namun demikian, pada tahun 2018 tidak terdapat transaksi *buyback*.

V. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2018

Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri. Pemerintah telah menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga

konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya *aqad* atau perjanjian antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut, juga dengan mempertimbangkan adanya kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi landasan legal pengelolaan SBSN. Secara garis besar UU tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Transparansi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan.
- b. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit.
- c. Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (*underlying asset*).
- d. Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara;
- e. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
- f. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan

Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman.

Sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2008, tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek. Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SBSN pada Agustus 2008 melalui metode *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri.

SBSN berbasis proyek selain sebagai instrumen pembiayaan APBN juga sekaligus berfungsi mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri. Manfaat dari penerbitan SBSN berbasis proyek antara lain adalah untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan, mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur, mendukung pengembangan pasar keuangan, khususnya pasar keuangan syariah, mendorong peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri serta meningkatkan transparansi pelaksanaan kegiatan oleh K/L karena perkembangan pelaksanaan proyek akan dipantau oleh investor dan publik. Penerbitan SBSN seri PBS tersebut dilakukan dengan mekanisme sistem lelang yang ada di Bank Indonesia.

Jumlah penerbitan SBSN yang telah diterbitkan sampai dengan akhir Tahun 2018 terdiri atas 6 jenis instrumen yakni Sukuk Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST), *Project Based Sukuk* (PBS), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan Sukuk Negara Indonesia (SNI), dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel 7, 9, 10 dan 11 berikut.

Tabel 7. Daftar Penerbitan SPNS Tahun 2018

NO	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh	Seri SPNS	Mata Uang	Nominal
1	1/11/2018	7/10/2018	SPNS1007201	IDR	2.000.000.000.000,0
2	1/25/2018	7/10/2018	SPNS1007201	IDR	2.000.000.000.000,0
3	2/8/2018	8/7/2018	SPNS0708201	IDR	3.000.000.000.000,0
4	2/22/2018	8/7/2018	SPNS0708201	IDR	3.000.000.000.000,0
5	3/8/2018	9/7/2018	SPNS0709201	IDR	1.230.000.000.000,0
6	3/22/2018	9/7/2018	SPNS0709201	IDR	3.000.000.000.000,0
7	4/5/2018	10/4/2018	SPNS0410201	IDR	2.400.000.000.000,0
8	4/19/2018	10/4/2018	SPNS0410201	IDR	2.100.000.000.000,0
9	5/4/2018	11/3/2018	SPNS0311201	IDR	650.000.000.000,00
10	5/17/2018	11/3/2018	SPNS0311201	IDR	500.000.000.000,00
11	6/4/2018	12/1/2018	SPNS0112201	IDR	2.550.000.000.000,0
12	6/28/2018	12/1/2018	SPNS0112201	IDR	4.000.000.000.000,0
13	7/12/2018	1/11/2019	SPNS1101201	IDR	2.900.000.000.000,0
14	7/12/2018	4/11/2019	SPNS1104201	IDR	1.000.000.000.000,0
15	7/26/2018	1/11/2019	SPNS1101201	IDR	900.000.000.000,00
16	7/26/2018	4/11/2019	SPNS1104201	IDR	1.100.000.000.000,0
17	8/9/2018	2/8/2019	SPNS0802201	IDR	850.000.000.000,00
18	8/9/2018	5/8/2019	SPNS0805201	IDR	1.200.000.000.000,0
19	8/24/2018	2/8/2019	SPNS0802201	IDR	3.000.000.000.000,0
20	8/24/2018	5/8/2019	SPNS0805201	IDR	1.000.000.000.000,0
21	9/6/2018	3/5/2019	SPNS0503201	IDR	1.100.000.000.000,0
22	9/6/2018	6/5/2019	SPNS0506201	IDR	1.200.000.000.000,0
23	9/20/2018	3/5/2019	SPNS0503201	IDR	1.300.000.000.000,0
24	10/4/2018	4/3/2019	SPNS0304201	IDR	1.400.000.000.000,0
25	10/4/2018	7/3/2019	SPNS0307201	IDR	1.000.000.000.000,0
26	10/18/2018	4/3/2019	SPNS0304201	IDR	1.000.000.000.000,0
27	10/18/2018	7/3/2019	SPNS0307201	IDR	1.000.000.000.000,0
28	11/1/2018	5/1/2019	SPNS0105201	IDR	950.000.000.000,00
29	11/1/2018	8/1/2019	SPNS0108201	IDR	1.700.000.000.000,0
30	11/15/2018	5/1/2019	SPNS0105201	IDR	1.050.000.000.000,0
31	11/15/2018	8/1/2019	SPNS0108201	IDR	1.600.000.000.000,0
Total SPNS					51.680.000.000.000,0

Tabel 8. Daftar Pelunasan SPNS Tahun 2018

No.	Seri	Tanggal Valuta	Jumlah (IDR)
1	SPNS05012018	1/4/2018	2.000.000.000.000.00
2	SPNS05012018	1/4/2018	870.000.000.000.00
3	SPNS02022018	2/1/2018	2.000.000.000.000.00
4	SPNS02022018	2/1/2018	2.000.000.000.000.00
5	SPNS02022018	2/1/2018	3.000.000.000.000.00
6	SPNS13032018	3/12/2018	2.000.000.000.000.00
7	SPNS13032018	3/12/2018	1.450.000.000.000.00
8	SPNS11042018	4/10/2018	1.600.000.000.000.00
9	SPNS11042018	4/10/2018	2.000.000.000.000.00
10	SPNS08052018	5/8/2018	1.750.000.000.000.00
11	SPNS08052018	5/8/2018	970.000.000.000.00
12	SPNS10072018	7/10/2018	2.000.000.000.000.00
13	SPNS10072018	7/10/2018	2.000.000.000.000.00
14	SPNS07082018	8/7/2018	3.000.000.000.000.00
15	SPNS07082018	8/7/2018	3.000.000.000.000.00
16	SPNS07092018	9/7/2018	1.230.000.000.000.00
17	SPNS07092018	9/7/2018	3.000.000.000.000.00
18	SPNS04102018	10/4/2018	2.100.000.000.000.00
19	SPNS04102018	10/4/2018	2.400.000.000.000.00
20	SPNS03112018	11/5/2018	650.000.000.000.00
21	SPNS03112018	11/5/2018	500.000.000.000.00
22	SPNS01122018	12/3/2018	2.550.000.000.000.00
23	SPNS01122018	12/3/2018	4.000.000.000.000.00
TOTAL (IDR)			46.070.000.000.000.00

Tabel 9. Daftar Penerbitan PBS Tahun 2018

NO	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri PBS	Mata Uang	Nominal
1	1/11/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	1.350.000.000.000,0
2	1/11/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	1.640.000.000.000,0
3	1/11/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	870.000.000.000,0
4	1/11/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	4.370.000.000.000,0
5	1/11/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	2.370.000.000.000,0
6	1/25/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	1.040.000.000.000,0
7	1/25/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	2.060.000.000.000,0
8	1/25/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	2.970.000.000.000,0
9	1/25/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	560.000.000.000,0
10	2/8/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	390.000.000.000,0
11	2/8/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	970.000.000.000,0
12	2/8/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	4.910.000.000.000,0
13	2/8/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	805.000.000.000,0
14	2/15/2018	8/15/2023	PBS011	IDR	300.000.000.000,0
15	2/15/2018	5/15/2021	PBS014	IDR	250.000.000.000,0
16	2/22/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	680.000.000.000,0
17	2/22/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	200.000.000.000,0
18	2/22/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	4.400.000.000.000,0
19	2/22/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	195.000.000.000,0
20	2/26/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	300.000.000.000,0
21	2/28/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	1.000.000.000.000,0
22	2/28/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1.000.000.000.000,0
23	3/8/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	510.000.000.000,0
24	3/8/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	440.000.000.000,0

NO	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri PBS	Mata Uang	Nominal
25	3/8/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	810,000,000,000.00
26	3/8/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,920,000,000,000.00
27	3/8/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	185,000,000,000.00
28	3/13/2018	5/15/2019	PBS013	IDR	250,000,000,000.00
29	3/22/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	502,857,000,000.00
30	3/22/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	150,000,000,000.00
31	3/22/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	4,630,000,000,000.00
32	3/22/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	620,000,000,000.00
33	4/5/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	600,000,000,000.00
34	4/5/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	316,857,000,000.00
35	4/5/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	690,000,000,000.00
36	4/5/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	1,220,000,000,000.00
37	4/5/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,560,000,000,000.00
38	4/19/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	605,000,000,000.00
39	4/19/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	527,000,000,000.00
40	4/19/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	410,000,000,000.00
41	4/19/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	2,710,000,000,000.00
42	5/4/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	380,000,000,000.00
43	5/4/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	250,000,000,000.00
44	5/4/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	100,000,000,000.00
45	5/15/2018	5/15/2021	PBS014	IDR	1,000,000,000,000.00
46	5/17/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	1,190,000,000,000.00
47	5/17/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	665,000,000,000.00
48	5/17/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	860,000,000,000.00
49	5/17/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	840,000,000,000.00
50	5/30/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	300,000,000,000.00
51	6/4/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	315,000,000,000.00
52	6/4/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	1,080,000,000,000.00
53	6/4/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	415,000,000,000.00
54	6/4/2018	5/15/2028	PBS018	IDR	2,000,000,000,000.00
55	6/28/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	325,000,000,000.00
56	6/28/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	294,000,000,000.00
57	6/28/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	540,000,000,000.00
58	7/3/2018	5/15/2028	PBS018	IDR	1,000,000,000,000.00
59	7/12/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	3,050,000,000,000.00
60	7/12/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	35,000,000,000.00
61	7/12/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	105,000,000,000.00
62	7/12/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	910,000,000,000.00
63	7/26/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	565,000,000,000.00
64	7/26/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	1,000,000,000,000.00
65	7/26/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,150,000,000,000.00
66	7/26/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	95,000,000,000.00
67	7/27/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	350,000,000,000.00
68	7/27/2018	5/15/2028	PBS018	IDR	1,000,000,000,000.00
69	8/9/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	900,000,000,000.00
70	8/9/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	420,000,000,000.00
71	8/9/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	340,000,000,000.00
72	8/9/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,460,000,000,000.00
73	8/10/2018	1/15/2027	PBS003	IDR	500,000,000,000.00
74	8/13/2018	4/15/2043	PBS005	IDR	500,000,000,000.00
75	8/24/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	500,000,000,000.00
76	8/24/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	310,000,000,000.00
77	8/24/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,120,000,000,000.00
78	8/24/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	135,000,000,000.00
79	8/27/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	500,000,000,000.00
80	8/29/2018	8/29/2023	PBSNT001	IDR	1,500,000,000,000.00

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 31

NO	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri PBS	Mata Uang	Nominal
81	8/30/2018	4/15/2043	PBS005	IDR	250,000,000,000.00
82	8/30/2018	5/15/2021	PBS014	IDR	1,000,000,000,000.00
83	9/6/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	330,000,000,000.00
84	9/6/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	900,000,000,000.00
85	9/6/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	175,000,000,000.00
86	9/6/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,100,000,000,000.00
87	9/12/2018	1/15/2027	PBS003	IDR	500,000,000,000.00
88	9/20/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	60,000,000,000.00
89	9/20/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	1,060,000,000,000.00
90	9/20/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	1,153,000,000,000.00
91	9/20/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,260,000,000,000.00
92	9/20/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	70,000,000,000.00
93	9/24/2018	1/15/2027	PBS003	IDR	500,000,000,000.00
94	10/4/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	100,000,000,000.00
95	10/4/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	1,030,000,000,000.00
96	10/4/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,510,000,000,000.00
97	10/4/2018	9/15/2023	PBS019	IDR	65,000,000,000.00
98	10/8/2018	1/15/2027	PBS003	IDR	250,000,000,000.00
99	10/18/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	605,000,000,000.00
100	10/18/2018	5/15/2021	PBS014	IDR	1,350,000,000,000.00
101	10/18/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	505,000,000,000.00
102	10/18/2018	9/15/2023	PBS019	IDR	765,000,000,000.00
103	10/22/2018	10/15/2027	PBS020	IDR	1,000,000,000,000.00
104	11/1/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	270,000,000,000.00
105	11/1/2018	5/15/2021	PBS014	IDR	2,160,000,000,000.00
106	11/1/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	35,000,000,000.00
107	11/1/2018	9/15/2023	PBS019	IDR	510,000,000,000.00
108	11/5/2018	10/15/2027	PBS020	IDR	1,000,000,000,000.00
109	11/6/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	1,000,000,000,000.00
110	11/6/2018	9/15/2023	PBS019	IDR	2,000,000,000,000.00
111	11/15/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	155,000,000,000.00
112	11/15/2018	5/15/2021	PBS014	IDR	230,000,000,000.00
113	11/15/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	470,000,000,000.00
114	11/15/2018	9/15/2023	PBS019	IDR	610,000,000,000.00
115	11/19/2018	10/15/2027	PBS020	IDR	250,000,000,000.00
116	12/5/2018	11/15/2026	PBS021	IDR	1,500,000,000,000.00
Total (IDR)					106,013,714,000,000.00

Tabel 10. Daftar Penerbitan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan Tahun 2018

NO	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri PBS	Mata Uang	Nominal
1	3/21/2018	3/10/2021	SR-010	IDR	8,436,570,000,000.00
2	11/29/2018	11/10/2020	ST002	IDR	4,945,682,000,000.00
Total (IDR)					13,382,252,000,000.00

Tabel 11. Daftar Penerbitan SBSN Valas Tahun 2018

NO	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri PBS	Mata Uang	Nominal
1	3/1/2018	3/1/2023	SNI0323	USD	1,250,000,000.00
2	3/1/2018	3/1/2028	SNI0328	USD	1,750,000,000.00
3	11/15/2018	11/15/2021	USDPBS001	USD	100,000,000.00
Total (USD)					3,100,000,000.00

Tabel 12. Daftar Pelunasan SBSN Jangka Panjang Tahun 2018

No.	Seri	Tanggal Valuta	Jumlah (IDR)
1	PBS009	1/24/2018	37,890,000,000,000.00
2	PBS001	2/14/2018	6,725,000,000,000.00
3	SR-007	3/9/2018	21,965,035,000,000.00
4	SDHI-2018A	5/30/2018	2,500,000,000,000.00
5	IFR0002	8/15/2018	1,985,000,000,000.00
6	ST001	9/7/2018	2,523,913,000,000.00
TOTAL (IDR)			73,588,948,000,000.00

Tabel 13. Daftar Pelunasan SBSN Valas Tahun 2018

No.	Seri	Tanggal Valuta	Jumlah (USD)	Jumlah (IDR)
1	SNI18	11/21/2018	1,000,000,000.00	14,618,000,000,000.00

VI. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2018

I. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah

Surat Berharga Negara berdenominasi Rupiah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Obligasi bunga tetap (*fixed rate bonds - FR*)

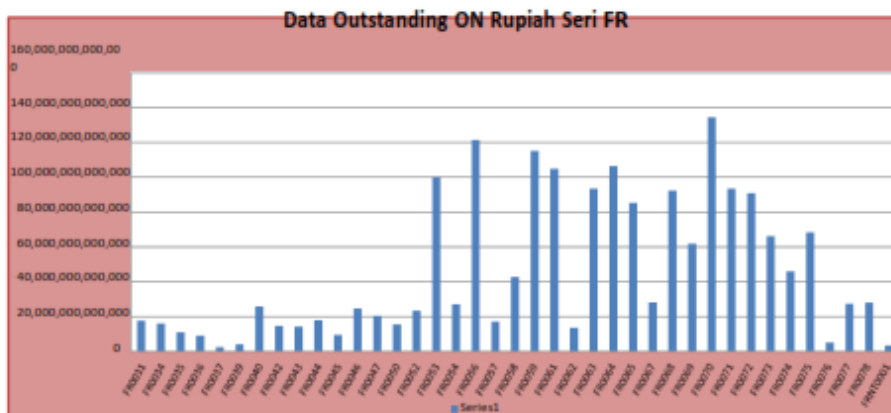
Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon obligasi bunga tetap seri FR (*Fixed Rate*) dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annually*). Obligasi jenis FR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Berdasarkan posisi akhir Tahun 2018, terdapat 39 seri FR dengan tingkat kupon berkisar antara 5,625% sampai dengan 12,9% dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2048. Adapun data *outstanding* ON seri *Fixed Rate* pada 31 Desember 2018 disajikan dalam tabel 14 berikut.

Tabel 14. Outstanding SBN seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2018

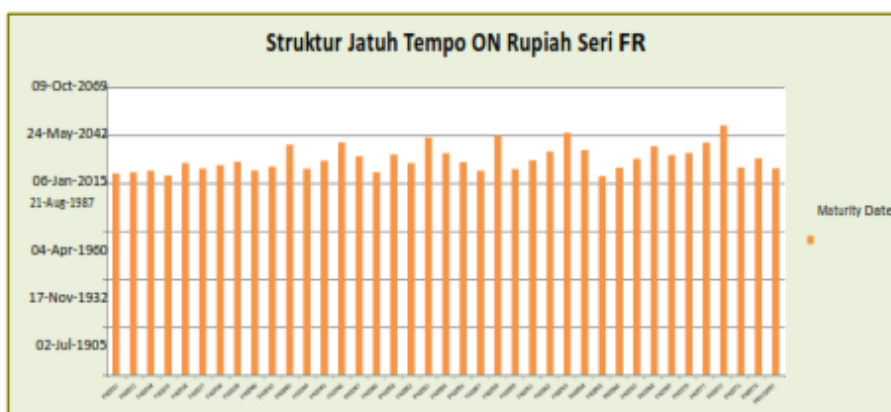
No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	FR0031	16-Jun-2005	15-Nov-2020	11.00000% IDR	17.792.000.000.000	
2	FR0034	26-Jan-2006	15-Jun-2021	12.80000% IDR	16.097.400.000.000	
3	FR0035	16-Feb-2006	15-Jun-2022	12.90000% IDR	11.023.750.000.000	
4	FR0036	20-Apr-2006	15-Sep-2019	11.50000% IDR	9.184.500.000.000	
5	FR0037	18-May-2006	15-Sep-2026	12.00000% IDR	2.450.000.000.000	
6	FR0039	24-Aug-2006	15-Aug-2023	11.75000% IDR	4.175.000.000.000	
7	FR0040	21-Sep-2006	15-Sep-2025	11.00000% IDR	26.002.090.000.000	
8	FR0042	25-Jan-2007	15-Jul-2027	10.25000% IDR	14.774.100.000.000	
9	FR0043	22-Feb-2007	15-Jul-2022	10.25000% IDR	14.417.000.000.000	
10	FR0044	19-Apr-2007	15-Sep-2024	10.00000% IDR	18.014.000.000.000	
11	FR0045	24-May-2007	15-May-2037	9.75000% IDR	9.624.304.000.000	
12	FR0046	19-Jul-2007	15-Jul-2023	9.50000% IDR	24.680.000.000.000	
13	FR0047	30-Aug-2007	15-Feb-2028	10.00000% IDR	20.385.000.000.000	
14	FR0050	24-Jan-2008	15-Jul-2038	10.50000% IDR	15.661.000.000.000	
15	FR0052	20-Aug-2009	15-Aug-2030	10.50000% IDR	23.500.000.000.000	
16	FR0053	08-Jul-2010	15-Jul-2021	8.25000% IDR	100.027.793.000.000	
17	FR0054	22-Jul-2010	15-Jul-2031	9.50000% IDR	27.096.000.000.000	
18	FR0056	23-Sep-2010	15-Sep-2026	8.37500% IDR	121.414.000.000.000	
19	FR0057	21-Apr-2011	15-May-2041	9.50000% IDR	17.236.573.000.000	
20	FR0058	21-Jul-2011	15-Jun-2032	8.25000% IDR	42.798.000.000.000	
21	FR0059	15-Sep-2011	15-May-2027	7.00000% IDR	115.080.000.000.000	
22	FR0061	06-Oct-2011	15-May-2022	7.00000% IDR	104.878.000.000.000	
23	FR0062	09-Feb-2012	15-Apr-2042	6.37500% IDR	13.692.000.000.000	
24	FR0063	13-Aug-2012	15-May-2023	5.62500% IDR	93.466.000.000.000	
25	FR0064	13-Aug-2012	15-May-2028	6.12500% IDR	106.295.000.000.000	
26	FR0065	30-Aug-2012	15-May-2033	6.62500% IDR	85.343.000.000.000	
27	FR0067	18-Jul-2013	15-Feb-2044	8.75000% IDR	28.188.284.000.000	
28	FR0068	01-Aug-2013	15-Mar-2034	8.37500% IDR	92.400.000.000.000	
29	FR0069	29-Aug-2013	15-Apr-2019	7.87500% IDR	61.881.000.000.000	
30	FR0070	29-Aug-2013	15-Mar-2024	8.37500% IDR	134.439.421.000.000	
31	FR0071	12-Sep-2013	15-Mar-2029	9.00000% IDR	93.390.682.000.000	
32	FR0072	09-Jul-2015	15-May-2036	8.25000% IDR	90.910.000.000.000	
33	FR0073	06-Aug-2015	15-May-2031	8.75000% IDR	66.217.000.000.000	
34	FR0074	10-Nov-2016	15-Aug-2032	7.50000% IDR	46.031.140.000.000	
35	FR0075	10-Aug-2017	15-May-2038	7.50000% IDR	68.420.860.000.000	
36	FR0076	22-Sep-2017	15-May-2048	7.37500% IDR	5.210.000.000.000	
37	FR0077	27-Sep-2018	15-May-2024	8.12500% IDR	27.495.000.000.000	
38	FR0078	27-Sep-2018	15-May-2029	8.25000% IDR	28.070.000.000.000	
39	FRNT0001	29-Aug-2018	29-Aug-2023	8.00000% IDR	3.500.000.000.000	
Jumlah					IDR	1.801.259.897.000.000

Grafik 1. Data Outstanding ON Rupiah seri FR tgl 31 Desember 2018



Adapun struktur jatuh tempo ON Rupiah seri FR disajikan dalam grafik 2.

Grafik 2. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah seri FR



b. Obligasi Negara Ritel (ORI)

ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan ORI merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Strategi Pengelolaan Utang Negara tahun 2018 - 2021 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 884/KMK.08/2017. Di dalam dokumen strategi dimaksud ditetapkan bahwa pengembangan pasar sekunder SUN dilakukan antara lain dengan melakukan diversifikasi instrumen SUN melalui SUN Ritel yang mana hal ini sejalan pula dengan upaya memperluas basis investor.

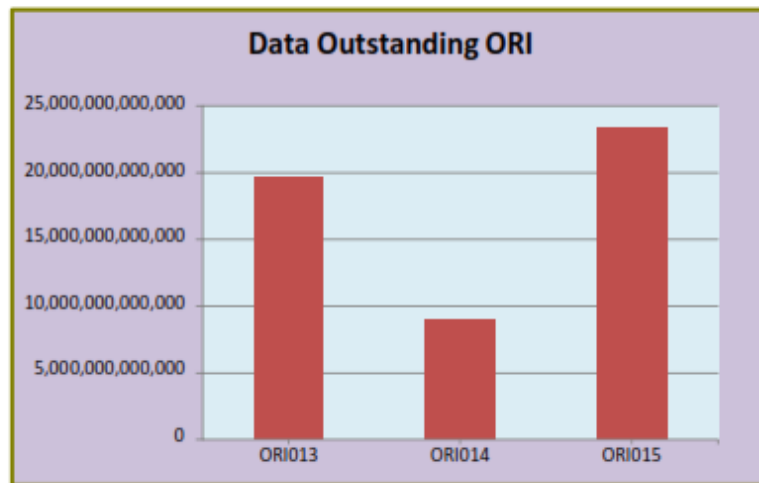
Selain itu, penerbitan ORI juga dimaksudkan dalam rangka memberikan alternatif investasi yang cukup menguntungkan dan aman bagi investor individu, serta memberikan unsur pendidikan bagi investor individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal seperti ORI. Selama ini investor individu umumnya menyimpan dananya pada instrumen investasi berupa tabungan atau deposito yang merupakan instrumen pasar uang. Kehadiran ORI dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

Tahun 2018 pemerintah menerbitkan satu seri ORI baru yaitu ORI015 dengan tingkat kupon 8.25% dan mampu menghimpun dana investor sebesar Rp23.378.269.000.000.- sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2018 menunjukkan ada 3 (tiga) seri ORI dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Rincian *outstanding* ORI disajikan dalam tabel 15 berikut.

Tabel 15. Data Outstanding ORI per 31 Desember 2018

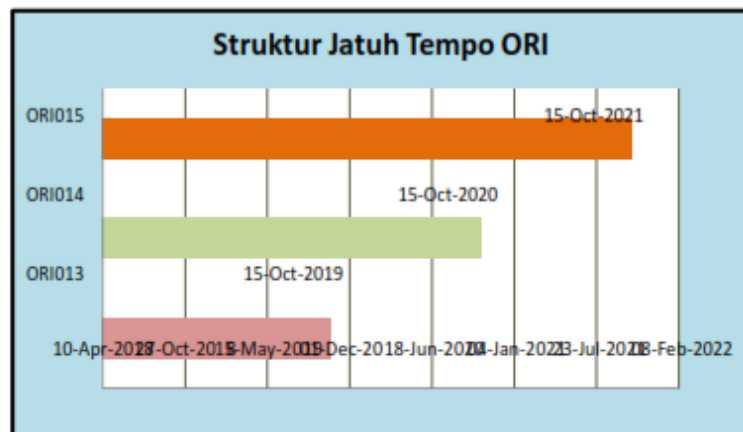
No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Coupon	Outstanding
1	ORI013	26-Oct-2016	15-Oct-2019	6.60000%	IDR 19,691,455,000,000
2	ORI014	25-Oct-2017	15-Oct-2020	5.85000%	IDR 8,948,660,000,000
3	ORI015	31-Oct-2018	15-Oct-2021	8.25000%	IDR 23,378,269,000,000
Jumlah					IDR 52,018,384,000,000

Grafik 3. Struktur Outstanding ORI per 31 Desember 2018



Adapun struktur jatuh tempo ORI disajikan dalam grafik 4 berikut.

Grafik 4. Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2018



c. Obligasi tanpa bunga (*zero coupon - ZC*)

Zero coupon adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Pada tahun 2013 telah dilakukan pelunasan ZC seri ZC0005 sehingga pada akhir tahun 2013, sudah tidak terdapat lagi *outstanding* obligasi ZC.

d. Obligasi berbunga mengambang (*Variable Rate Bonds - VR*)

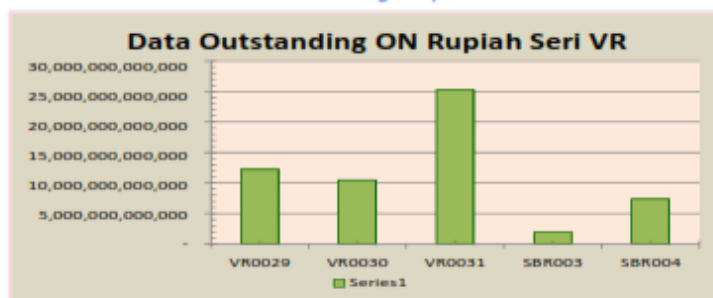
Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Obligasi jenis VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Sampai akhir Tahun 2018, terdapat 3 seri VR dan 2 seri SBR dengan *outstanding* berkisar dari 1,9 triliun sampai dengan 25,3 triliun dengan masa jatuh temponya berkisar antara tahun 2019 sampai dengan 2020

Tabel 16. Nilai dan Jatuh Tempo SBN seri Variable Rate (VR) per 31 Desember 2018

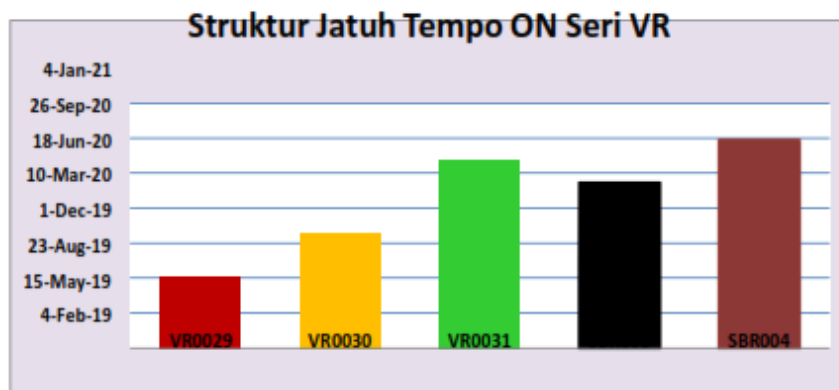
No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Coupon	Outstanding
1	VR0029	20-Nov-2002	25-Aug-2019	5.76000%	IDR 12.212.320.000.000
2	VR0030	20-Nov-2002	25-Dec-2019	5.57533%	IDR 10.503.015.000.000
3	VR0031	20-Nov-2002	25-Jul-2020	5.21833%	IDR 25.322.354.000.000
4	SBR003	31-May-2018	20-May-2020	8.55000%	IDR 1.928.066.000.000
5	SBR004	19-Sep-2018	20-Sep-2020	8.55000%	IDR 7.322.971.000.000
Jumlah					IDR 57.288.726.000.000

Grafik 5. Struktur Outstanding VR per 31 Desember 2018



Adapun struktur jatuh tempo ON seri VR disajikan dalam Grafik 6 berikut.

Grafik 6. Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2018



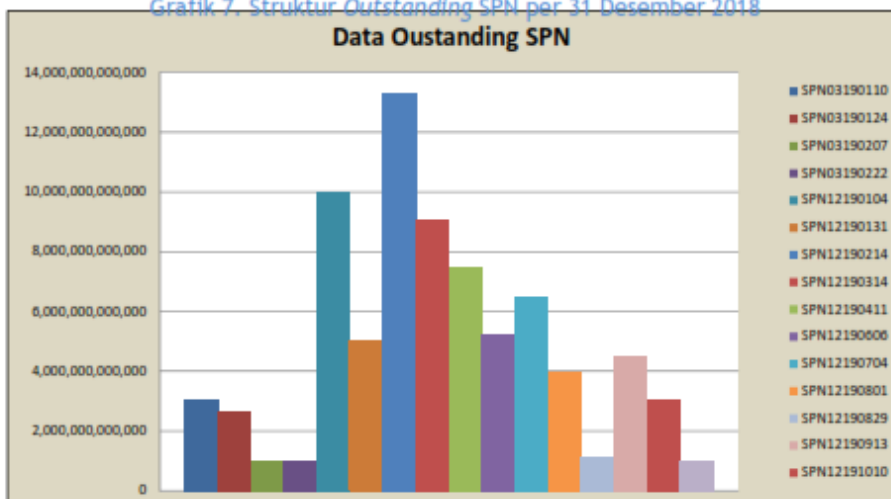
e. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto. SPN dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Sampai akhir Tahun 2018, terdapat 16 seri SPN yang beredar dengan *outstanding* berkisar 1 triliun dan 13,3 triliun yang akan jatuh tempo pada Tahun 2019.

Tabel 17. Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2018

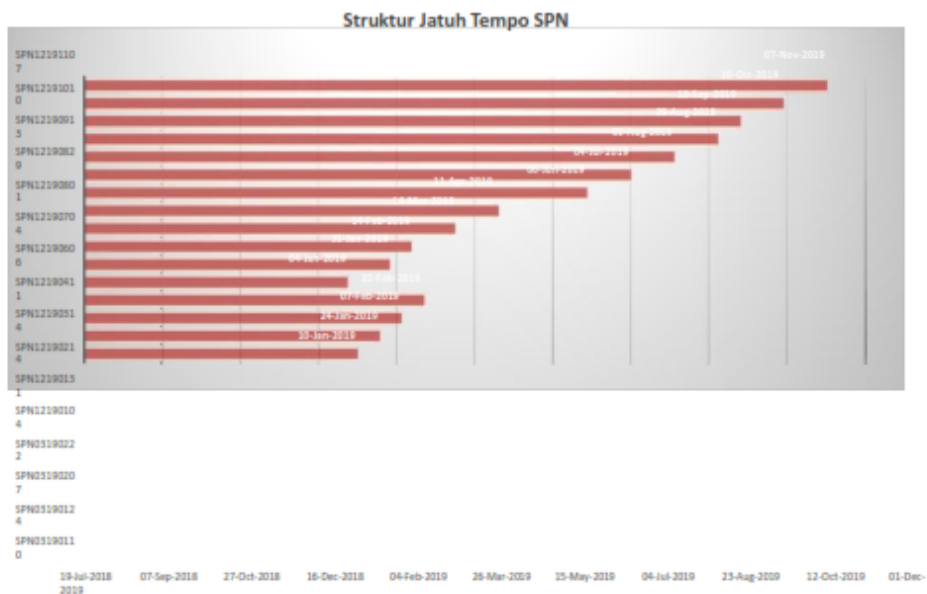
No	Series	Maturity Date		Outstanding
1	SPN03190110	10-Jan-2019	IDR	3.000.000.000.000
2	SPN03190124	24-Jan-2019	IDR	2.600.000.000.000
3	SPN03190207	07-Feb-2019	IDR	1.000.000.000.000
4	SPN03190222	22-Feb-2019	IDR	1.000.000.000.000
5	SPN12190104	04-Jan-2019	IDR	10.000.000.000.000
6	SPN12190131	31-Jan-2019	IDR	5.000.000.000.000
7	SPN12190214	14-Feb-2019	IDR	13.300.000.000.000
8	SPN12190314	14-Mar-2019	IDR	9.050.000.000.000
9	SPN12190411	11-Apr-2019	IDR	7.450.000.000.000
10	SPN12190606	06-Jun-2019	IDR	5.200.000.000.000
11	SPN12190704	04-Jul-2019	IDR	6.500.000.000.000
12	SPN12190801	01-Aug-2019	IDR	3.950.000.000.000
13	SPN12190829	29-Aug-2019	IDR	1.100.000.000.000
14	SPN12190913	13-Sep-2019	IDR	4.500.000.000.000
15	SPN12191010	10-Oct-2019	IDR	3.000.000.000.000
16	SPN12191107	07-Nov-2019	IDR	1.000.000.000.000
Jumlah			IDR	77.650.000.000.000

Grafik 7. Struktur Outstanding SPN per 31 Desember 2018



Adapun struktur jatuh tempo ON seri SPN disajikan dalam Grafik 8 berikut.

Grafik 8. Struktur Jatuh Tempo SPN per 31 Desember 2018



f. Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI

Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia terdiri dari empat seri yaitu SU002, SU004, SU007 dan *Special Rate Bank Indonesia* (SRBI01). Kupon SUP dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Pembayaran cicilan pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga. Data *outstanding* SUP disajikan pada tabel 18 berikut.

Tabel 18. Struktur *Outstanding* Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding
1	SRBI01 (4)	01-Aug-2043	0.10000%	IDR 101,859,120,794,27
2	SU002 (3)	01-Apr-2025	0.10000%	IDR 12,048,595,070,16
3	SU004 (3)	01-Dec-2025	0.10000%	IDR 33,686,948,838,41
4	SU007 (3)	01-Aug-2025	0.10000%	IDR 32,194,936,059,45
Jumlah				IDR

Grafik 9. Struktur *Outstanding* Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2018



Adapun struktur jatuh tempo Surat Utang Pemerintah disajikan dalam Grafik 10 berikut.

Grafik 10. Struktur Jatuh Tempo Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2018



g. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kupon Tetap (IFR)

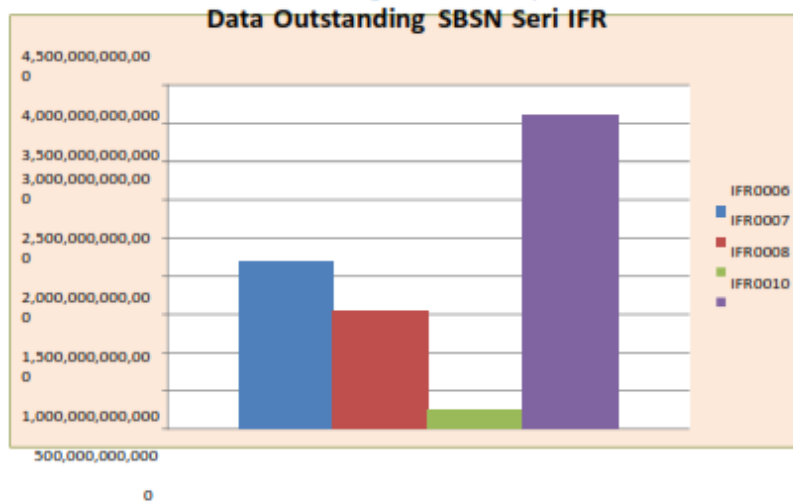
Obligasi jenis ini adalah obligasi berbasis Syariah yang memiliki tingkat imbalan yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Imbalan/rate seri FR (Fixed Rate) dibayarkan setiap enam bulan sekali (semi-annually). SBSN jenis IFR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Pada akhir Tahun 2018 terdapat 4 seri SBSN jenis IFR yang masih beredar dengan masa jatuh tempo antara tahun 2020 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbalan antara 8,80% sampai dengan 10,25% yang disajikan dalam tabel 19 berikut.

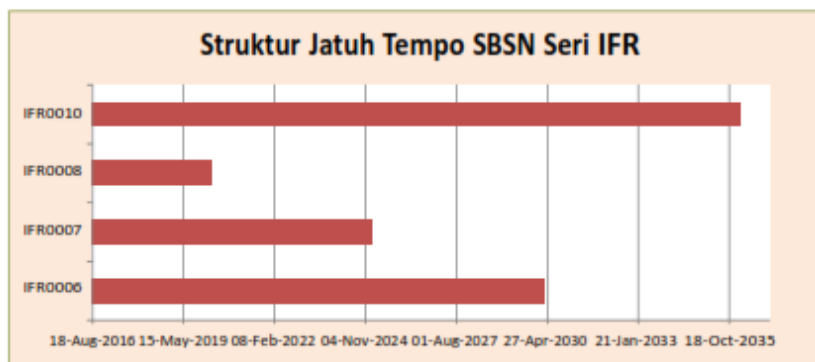
Tabel 19. Struktur Outstanding SBSN seri IFR per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding
1	IFR0006	15-Mar-2030	10.25000%	IDR 2,175,000,000,00
2	IFR0007	15-Jan-2025	10.25000%	IDR 1,547,000,000,00
3	IFR0008	15-Mar-2020	8.80000%	IDR 252,000,000,00
4	IFR0010	15-Feb-2036	10.00000%	IDR 4,110,000,000,00
Jumlah				IDR

Grafik 11. Struktur Outstanding SBSN seri IFR per 31 Desember 2018



Grafik 12. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri IFR per 31 Desember 2018



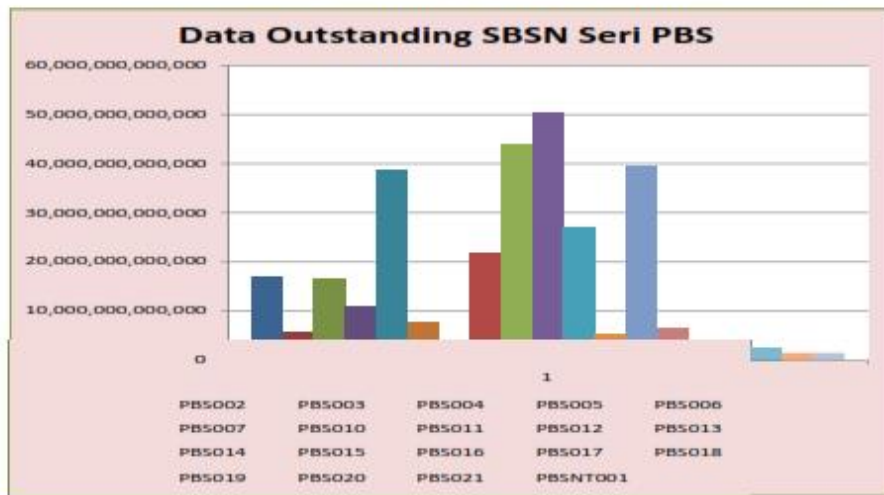
h. Project Based Sukuk (PBS)

Project Based Sukuk merupakan SBSN yang menggunakan proyek-proyek yang dibiayai APBN sebagai *underlying asset*. Pada akhir Tahun 2018 terdapat 19 seri PBS yang ada sebagaimana disajikan dalam tabel 20 berikut.

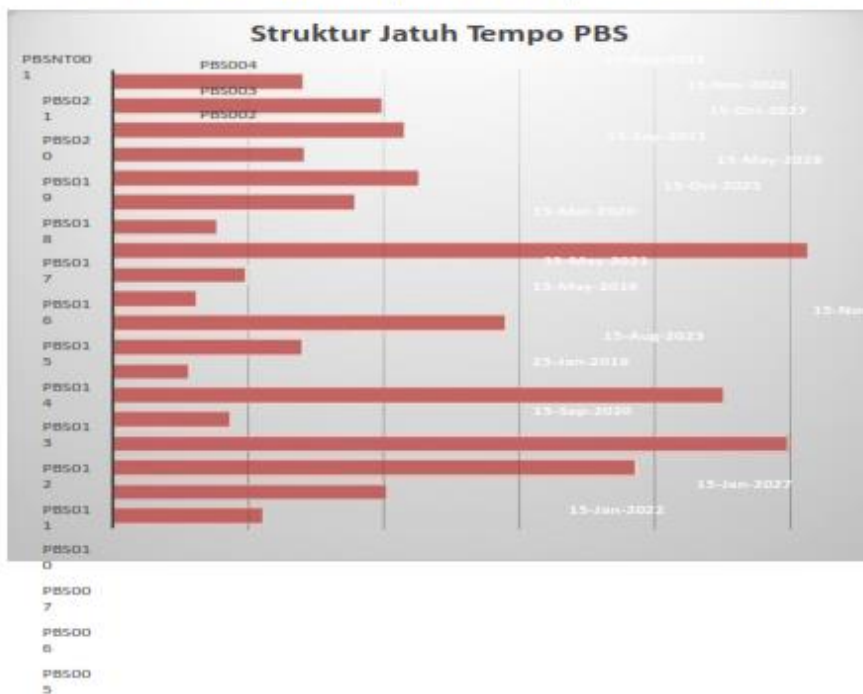
Tabel 20. Struktur Outstanding SBSN seri PBS per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	PBS002	15-Jan-2022	5.45000%	IDR	16,710,857,000,00
2	PBS003	15-Jan-2027	6.00000%	IDR	5,536,000,000,00
3	PBS004	15-Feb-	6.10000%	IDR	16,497,857,000,00
4	PBS005	15-Apr-2043	6.75000%	IDR	10,984,000,000,00
5	PBS006	15-Sep-	8.25000%	IDR	38,508,000,000,00
6	PBS007	15-Sep-	9.00000%	IDR	7,525,000,000,00
7	PBS010	25-Jan-2019	8.62500%	IDR	4,050,000,000,00
8	PBS011	15-Aug-	8.75000%	IDR	21,750,000,000,00
9	PBS012	15-Nov-	8.87500%	IDR	44,039,100,000,00
10	PBS013	15-May-	6.25000%	IDR	50,425,000,000,00
11	PBS014	15-May-	6.50000%	IDR	26,807,857,000,00
12	PBS015	15-Jul-2047	8.00000%	IDR	5,243,000,000,00
13	PBS016	15-Mar-2020	6.25000%	IDR	39,525,000,000,00
14	PBS017	15-Oct-2025	6.12500%	IDR	6,375,000,000,00
15	PBS018	15-May-	7.62500%	IDR	4,000,000,000,00
16	PBS019	15-Sep-	8.25000%	IDR	3,950,000,000,00
17	PBS020	15-Oct-2027	9.00000%	IDR	2,250,000,000,00
18	PBS021	15-Nov-	8.50000%	IDR	1,500,000,000,00
19	PBSNT001	29-Aug-	8.00000%	IDR	1,500,000,000,00
				IDR	

Grafik 13. Struktur Outstanding SBSN seri PBS per 31 Desember 2018



Grafik 14. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri PBS per 31 Desember 2018



1. Sukuk Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST)

Sukuk Ritel (SR) adalah Sukuk Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SR memiliki tingkat imbal hasil yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Imbal hasil SR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). SR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan SR dimaksudkan untuk memperluas pembiayaan sumber APBN, diversifikasi investor dan instrumen, memberikan alternatif instrumen ritel berbasis syariah, dan memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk berinvestasi dalam instrumen pasar modal yang aman dan menguntungkan. Selain itu, Keberadaan SR dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

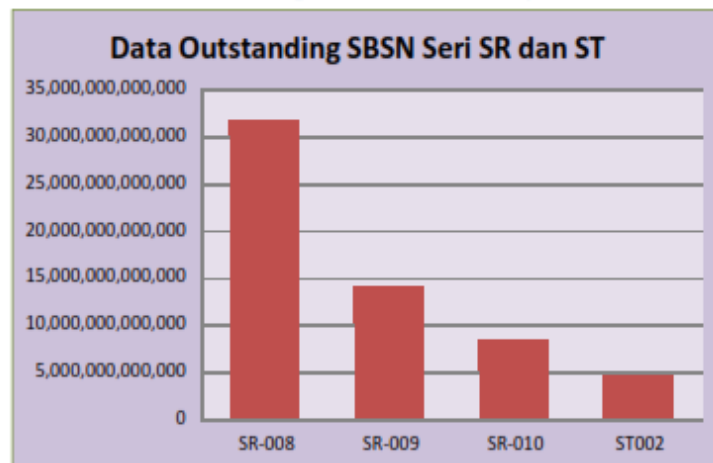
Sukuk Tabungan (ST) adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Penerbitan Sukuk Tabungan menggunakan struktur akad Wakalah. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut.

Tahun 2018, pemerintah menerbitkan SR010 dan ST002 sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2018 menunjukkan ada 3 seri SR dan 1 seri ST dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang disajikan pada tabel 16.

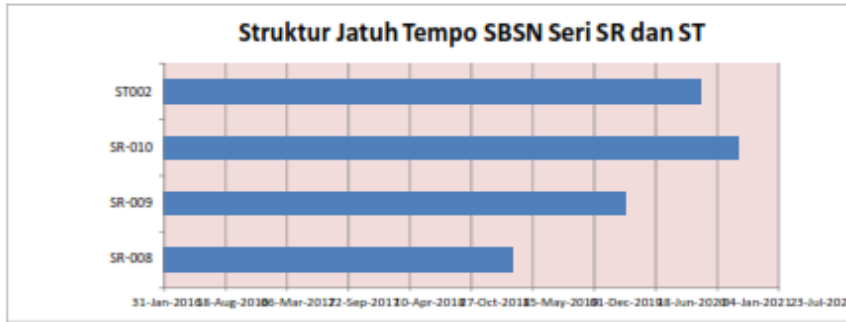
Tabel 21. Struktur Outstanding SBSN seri SR dan ST per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding
1	SR-008	10-Mar-2019	8.30000%	IDR 31,500,000,000,00
2	SR-009	10-Mar-2020	6.90000%	IDR 14,037,310,000,00
3	SR-010	10-Mar-2021	5.90000%	IDR 8,436,570,000,00
4	ST002	10-Nov-2020	8.30000%	IDR 4,945,682,000,00
Jumlah				IDR

Grafik 15. Struktur Outstanding SBSN seri SR dan ST per 31 Desember 2018



Grafik 16. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SR dan ST per 31 Desember 2018



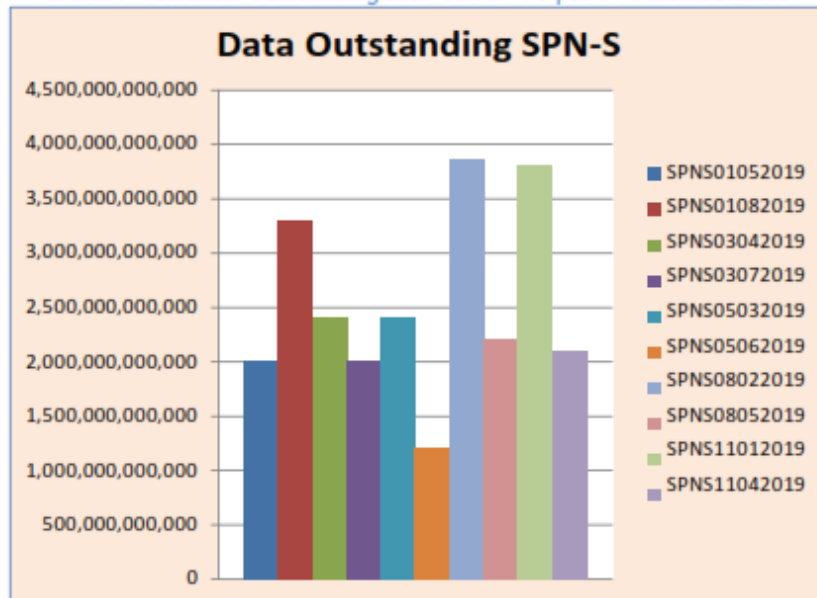
j. Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S)

SPN-S merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto SPN-S dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Sampai akhir Tahun 2018, terdapat 10 seri SPN-S yang beredar dengan total *outstanding* sebesar Rp25.250.000.000.000,- yang akan jatuh tempo pada Tahun 2019.

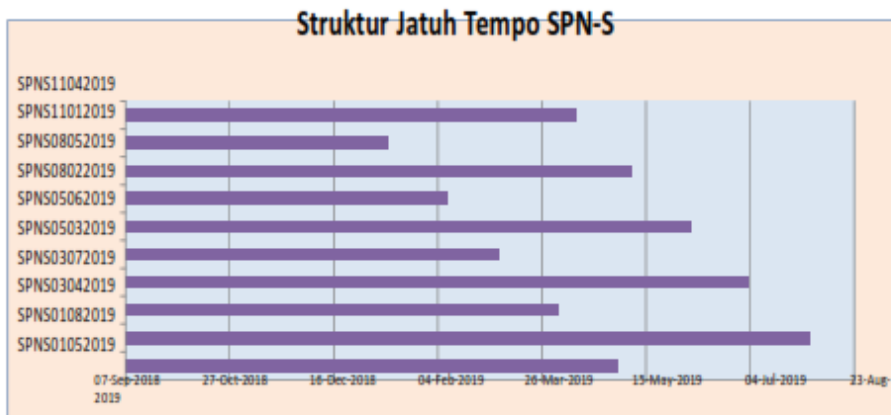
Tabel 22. Struktur *Outstanding* SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding
1	SPNS01052019	01-May-2019	-	IDR 2,000,000,000,00
2	SPNS01082019	01-Aug-2019	-	IDR 3,300,000,000,00
3	SPNS03042019	03-Apr-2019	-	IDR 2,400,000,000,00
4	SPNS03072019	03-Jul-2019	-	IDR 2,000,000,000,00
5	SPNS05032019	05-Mar-2019	-	IDR 2,400,000,000,00
6	SPNS05062019	05-Jun-2019	-	IDR 1,200,000,000,00
7	SPNS08022019	08-Feb-2019	-	IDR 3,850,000,000,00
8	SPNS08052019	08-May-2019	-	IDR 2,200,000,000,00
9	SPNS11012019	11-Jan-2019	-	IDR 3,800,000,000,00
10	SPNS11042019	11-Apr-2019	-	IDR 2,100,000,000,00
Jumlah				IDR

Grafik 17. Struktur Outstanding SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2018



Grafik 18. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2018



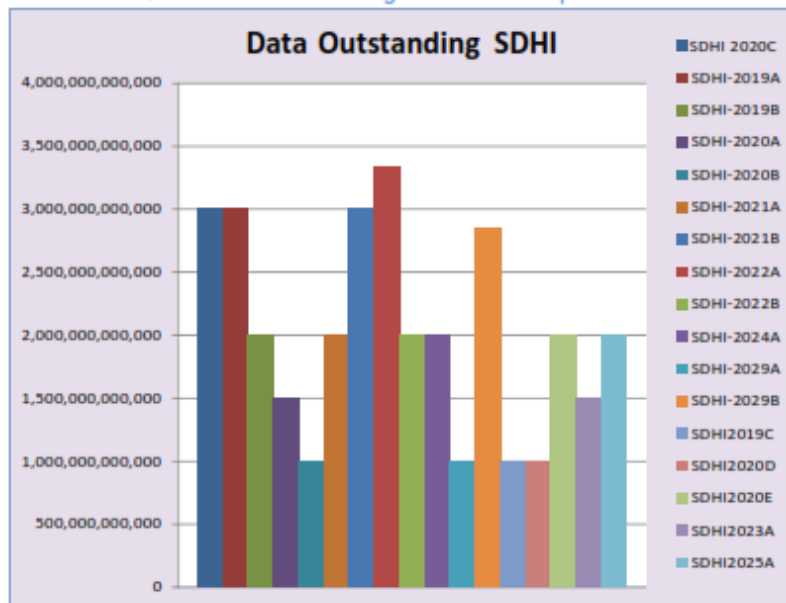
k. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

SDHI merupakan instrumen pembiayaan syariah melalui penempatan dana haji pada SBSN itu dengan metode *private placement*, yang merupakan penerbitan surat berharga tanpa melalui penawaran perdana dan tidak dapat diperjualbelikan. Pada akhir Tahun 2018, terdapat 17 seri SDHI dengan nilai *outstanding* Rp34.197.000.000.000,-.

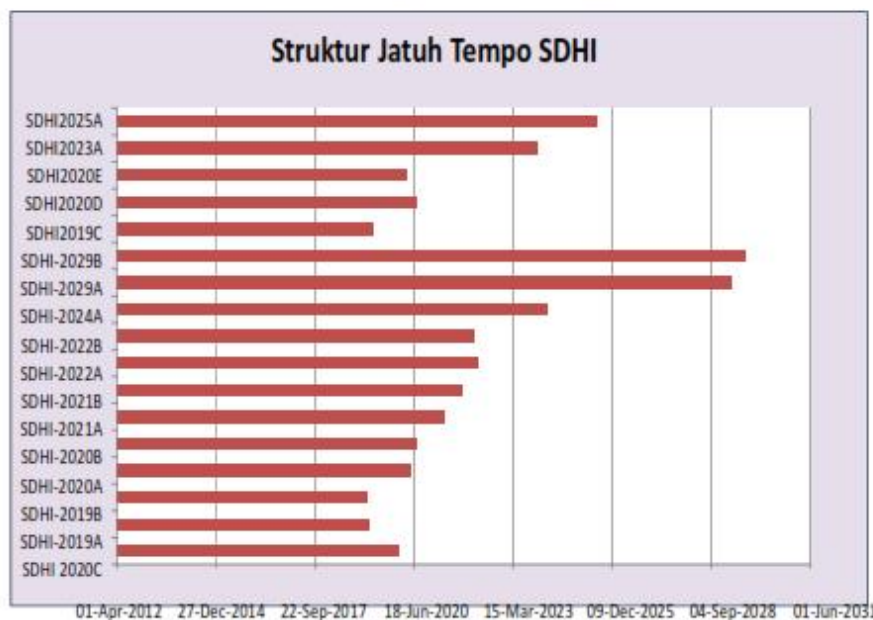
Tabel 23. Struktur *Outstanding* SBSN seri SDHI per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding
1	SDHI 2020C	03-Jan-2020	8.30000%	IDR 3,000,000,000,000
2	SDHI-2019A	21-Mar-2019	5.46000%	IDR 3,000,000,000,000
3	SDHI-2019B	11-Feb-2019	8.05000%	IDR 2,000,000,000,000
4	SDHI-2020A	27-Apr-2020	5.79000%	IDR 1,500,000,000,000
5	SDHI-2020B	28-Jun-2020	6.20000%	IDR 1,000,000,000,000
6	SDHI-2021A	11-Apr-2021	8.00000%	IDR 2,000,000,000,000
7	SDHI-2021B	17-Oct-2021	7.16000%	IDR 3,000,000,000,000
8	SDHI-2022A	21-Mar-2022	5.91000%	IDR 3,342,000,000,000
9	SDHI-2022B	11-Feb-2022	8.75000%	IDR 2,000,000,000,000
10	SDHI-2024A	11-Feb-2024	9.04000%	IDR 2,000,000,000,000
11	SDHI-2029A	25-Mar-2029	8.43000%	IDR 1,000,000,000,000
12	SDHI-2029B	13-Aug-2029	8.62000%	IDR 2,855,000,000,000
13	SDHI2019C	27-Apr-2019	7.20000%	IDR 1,000,000,000,000
14	SDHI2020D	29-Jun-2020	8.20000%	IDR 1,000,000,000,000
15	SDHI2020E	21-Mar-2020	7.14000%	IDR 2,000,000,000,000
16	SDHI2023A	04-Nov-2023	8.82000%	IDR 1,500,000,000,000
17	SDHI2025A	08-Jul-2025	8.30000%	IDR 2,000,000,000,000
Jumlah				IDR 34,197,000,000,000

Grafik 19. Struktur Outstanding SBSN seri SDHI per 31 Desember 2018



Grafik 20. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SDHI per 31 Desember 2018



II. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valuta Asing (Valas)

Surat Berharga Negara (SBN) saat ini telah menjadi sumber utama dalam pemenuhan target pembiayaan dalam APBN karena mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam rangka pemenuhan target tersebut pemerintah semaksimal mungkin berusaha terus menggali potensi sumber pembiayaan dari dalam negeri yaitu dengan menerbitkan SBN berdenominasi Rupiah di pasar domestik. Namun, dengan berbagai pertimbangan seperti daya serap pasar obligasi dalam negeri yang masih terbatas dan kebutuhan untuk pemenuhan *benchmark* atas obligasi Indonesia dalam denominasi USD, maka Pemerintah melakukan penerbitan obligasi negara dalam valuta asing di pasar internasional dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Sampai dengan akhir Tahun 2018, terdapat 59 seri SBN valas dengan 38 seri memiliki denominasi USD (termasuk SBN domestik yang berdenominasi valas), 14 seri dengan denominasi JPY dan 7 Seri berdenominasi EURO. Data outstanding SBN valas disajikan dalam tabel 24 berikut.

Tabel 24. Outstanding dan Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity	Coupon	Outstanding
A. GOVERNMENT DEBT SECURITIES				
US Dollar Denominated				
<i>Fixed Coupon</i>				
1	RI001901004	04-Apr	11.625000	1,000,000.00
2	RI001901005	12-Feb	8.500000	1,000,000.00
3	RI001901006	17-Jan	6.625000	2,000,000.00
4	RI001901007	17-Jan	7.750000	2,000,000.00
5	RI001901008	08-Feb	3.750000	750,000.00
6	RI001901009	11-Jan	2.900000	1,000,000.00
7	RI001901010	15-Jan	5.875000	2,000,000.00
8	RI001901011	15-Jan	4.125000	2,000,000.00
9	RI001901012	08-Jan	4.750000	2,500,000.00
10	RI001901013	08-Feb	4.350000	1,200,000.00
11	RI001901014	11-Jan	3.500000	1,200,000.00
12	RI001901015	17-Jan	5.250000	2,200,000.00
13	RI001901016	15-Jan	6.750000	2,000,000.00
14	RI001901017	15-Jan	5.125000	2,000,000.00
15	RI001901018	08-Feb	5.750000	1,200,000.00
16	RI001901019	08-Jan	5.250000	1,000,000.00
17	RI001901020	15-Jan	4.625000	1,200,000.00
18	RI001901021	13-Apr	5.875000	2,000,000.00
19	RI001901022	25-Apr	3.750000	2,000,000.00
20	RI001901023	16-Apr	3.125000	1,000,000.00
21	RI001901024	24-Apr	4.100000	1,000,000.00
22	RI001901025	24-Apr	4.625000	1,000,000.00
23	RI001901026	06-May	4.875000	2,000,000.00
24	RI001901027	18-Jul	3.850000	1,000,000.00
25	RI001901028	18-Jul	4.750000	1,000,000.00
26	RI001901029	17-Jul	4.350000	1,000,000.00
27	RI001901030	24-Jul	4.050000	1,000,000.00
Total Fixed Coupon				42,450,000.00
Total US Dollar Denominated *)				IDR 608,926,050,000.00
Japan Yen Denominated				
<i>Fixed Coupon</i>				
28	RI001902001	31-May	0.670000	49,000,000.00
29	RI001902002	31-May	0.920000	39,000,000.00
30	RI001902003	30-May	1.070000	3,500,000.00
31	RI001902004	31-May	1.220000	8,000,000.00
32	RI001902005	31-May	0.810000	2,000,000.00
33	RI001902006	08-Jul	0.850000	20,000,000.00
34	RI001902007	21-Jul	1.160000	38,000,000.00
35	RI001902008	08-Jul	0.870000	50,000,000.00
36	RI001902009	07-Jul	1.030000	10,000,000.00
37	RI001902010	29-Jul	2.100000	15,000,000.00
38	RI001902011	13-Aug	1.380000	22,000,000.00
39	RI001902012	13-Aug	0.910000	66,000,000.00
40	RI001902013	12-Aug	1.600000	60,000,000.00
41	RI001902014	22-Aug	1.130000	60,000,000.00
Total Fixed Coupon				332,500,000.00
Total Japan Yen Denominated *)				IDR 62,818,720,750.00
Euro Denominated				
<i>Fixed Coupon</i>				
42	RI001903001	24-Apr	1.750000	1,000,000.00
43	RI001903002	14-Jul	2.625000	1,000,000.00
44	RI001903003	14-Jul	3.750000	1,000,000.00
45	RI001903004	08-Jul	2.875000	1,000,000.00
46	RI001903005	18-Jul	2.150000	1,000,000.00
47	RI001903006	18-Jul	3.475000	1,200,000.00
48	RI001903007	26-Apr	0.900000	500,000.00
Total Fixed Coupon				7,300,000.00
Total Euro Denominated *)				IDR 120,886,175,000.00
TOTAL GOVERNMENT DEBT SECURITIES (A)				IDR 799,631,015,750.00
B. GOVERNMENT INSTAALIC DEBT SECURITIES				
US Dollar Denominated				
<i>Fixed Coupon</i>				
49	RI001904001	27-May	3.400000	1,000,000.00
50	RI001904002	01-May	3.750000	1,200,000.00
51	RI001904003	29-May	4.100000	2,000,000.00
52	RI001904004	01-May	4.400000	1,700,000.00
53	RI001904005	15-May	6.125000	1,500,000.00
54	RI001904006	29-May	3.400000	750,000.00
55	RI001904007	21-May	3.400000	1,000,000.00
56	RI001904008	10-Sep	4.350000	1,500,000.00
57	RI001904009	28-May	4.325000	2,000,000.00
58	RI001904010	27-May	4.550000	1,700,000.00
59	RI001904011	15-May	4.050000	1,000,000.00
Total Fixed Coupon				14,800,000.00
Total US Dollar Denominated *)				IDR 211,422,600,000.00
TOTAL GOVERNMENT INSTAALIC DEBT SECURITIES (B)				IDR 14,800,000.00
GRAND TOTAL (A + B)				IDR 811,053,615,750.00
Notes:				
*) ASSUMED EXCHANGE RATE FOR CONVERSION (IDR/USD) IS 14,481.00				
*) ASSUMED EXCHANGE RATE FOR CONVERSION (IDR/JPY) IS 131.1151				
*) ASSUMED EXCHANGE RATE FOR CONVERSION (IDR/EUR) IS 16,589.76				

III. Mutasi Surat Berharga Negara Selama Tahun 2018

Surat Berharga Negara dapat berubah saldonya akibat adanya penerbitan baru, pelunasan, pembelian kembali atau oleh sebab lainnya. Adapun ringkasan perubahan posisi SBN Tahun 2018 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 25.

Tabel 25. Mutasi Principle Outstanding SBN Tahun 2018

Saldo awal Th 2018 (Original Currency)	Mutasi 2018			Saldo Akhir tahun 2018 (Original Currency)	Saldo Akhir 2018 (Rupiah)
	Penerimaan b	Pembayaran c	d		
a					e
IDR 2,341,102,897,948,500.00	IDR 634,400,272,000,000.00	IDR 373,869,329,186,177.00	IDR 2,601,633,840,762,320.00	2,601,633,840,762,320.00	
USD 51,450,000,000.00	USD 8,100,000,000.00	USD 2,900,000,000.00	USD 56,650,000,000.00	820,348,650,000,000.00	
JPY 455,000,000,000.00	JPY 100,000,000,000.00	JPY 22,500,000,000.00	JPY 532,500,000,000.00	69,818,790,750,000.00	
EUR 6,300,000,000.00	EUR 1,000,000,000.00	0.00	EUR 7,300,000,000.00	120,886,175,000,000.00	
Jumlah					3,612,687,456,512,320.00

Kurs Tengah BI tgl 31 Desember 2017 USD = 13,548,00 JPY = 120,22 EUR = 16,173,62
 Kurs Tengah BI tgl 31 Desember 2018 USD = 14,481,00 JPY = 131,12 EUR = 16,559,75

VII. PENUTUP

Demikianlah laporan pertanggungjawaban pengelolaan SBN ini dibuat dalam rangka pemenuhan amanat sebagaimana dituangkan pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan dilampirkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Besar harapan Pemerintah agar masyarakat juga dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara, sesuai komitmen Pemerintah untuk mengelola sektor keuangan yang transparan, profesional dan bertanggung jawab.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO